



Pengembangan Transformasi Bisnis dan Digitalisasi Berbasis Ekosistem Perumahan

Laporan Tahunan **2022**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

PENGEMBANGAN TRANSFORMASI BISNIS DAN DIGITALISASI BERBASIS EKOSISTEM PERUMAHAN



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan atau Bank BTN) terus melaksanakan transformasi bisnis yang antara lain meliputi transformasi model operasional cabang, mengembangkan struktur *Strategic Business Unit* (SBU) dan menyusun transformasi *human capital* untuk mendukung rencana bisnis dan meningkatkan kapabilitas pegawai dalam rangka mencapai Visi di tahun 2025 serta mengembangkan KPR di segmen milenial dengan pengembangan konsep *Transit Oriented Development* (TOD).

Laporan Tahunan 2022

Seiring dengan transformasi bisnis, Perseroan juga memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi *value chain* bisnis perumahan dengan membangun *one stop shop financial solution* layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME, Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga. Transformasi bisnis dan digitalisasi berbasis ekonomi perumahan yang telah dilakukan mampu meningkatkan kinerja Perseroan sesuai dengan harapan para *stakeholders*.

KESINAMBUNGAN TEMA

2021

Transformasi Menuju Best Mortgage Bank



Mengusung semangat transformasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Perseroan menapaki tahun 2021 dengan percaya diri dalam menjalankan visi dan misinya. Dengan fundamental kokoh yang sudah dibangun sepanjang tahun 2020, langkah Perseroan ke depan akan semakin mantap bertransformasi menjadi “Best Mortgage Bank in South East Asia di tahun 2025”.

Tahun ini Perseroan akan terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki, disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan aplikasi *mobile banking* serta membuat variasi produk

KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap Perseroan.

Selama 71 tahun berdiri, Perseroan juga menjadi mitra pemerintah dalam mendukung perekonomian khususnya sebagai *agent of development* dengan merealisasikan kredit lebih dari Rp640 triliun dan disalurkan kepada lebih dari lima juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen dan terus berupaya menjadi pemimpin dan inovator di dalam kompetisinya dengan perbankan nasional.

2020

Tumbuh Berkelanjutan di Masa Pandemi



Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan dan dilalui penuh perjuangan yang memaksa kita melakukan adaptasi terhadap “The New Normal”. Perseroan bertekad memperkuat inovasi/integritas membangun bisnis yang berkualitas dengan mencanangkan fokus dan inisiatif strategi yang menjadi acuan dalam memulihkan dan memacu bisnis Perseroan ke depan. Bagi Perseroan, pandemi COVID-19 menjadi motivasi untuk memacu kinerjanya dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi. Selain itu, Perseroan juga memperkuat kolaborasi sinergi dengan mitra bisnis. Hal ini memacu penyaluran kredit, meningkatkan dana pihak ketiga dan pendapatan *non bunga* sekaligus meningkatkan pelayanan perbankan kepada nasabah lewat

berbagai inovasi *digital* yaitu *BTN Mobile Banking*, Portal BTN Properti, Portal Rumah Murah BTN, BTN Solusi dan Program Batara Spekta.

Di tengah masa pandemi COVID-19 dan perbaikan *business process*, Perseroan mampu membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Laba Perseroan melampaui target yang ditetapkan dengan pertumbuhan mencapai 655,71% dibandingkan posisi tahun lalu. Sementara dana pihak ketiga juga melambung lebih dari 23,78% dibandingkan tahun lalu. Pencapaian kinerja keuangan tersebut menjadi bukti nyata di tengah pandemi, para pegawai tetap dapat bekerja dan berkarya bagi Perseroan.

2019

Rumah untuk Keluarga Milenial Indonesia



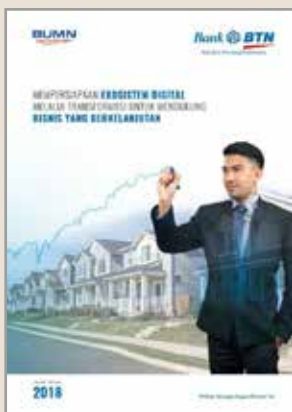
Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa merupakan modal yang besar bagi perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, dengan bonus demografi yang memprediksikan lebih kurang 20% diantaranya berusia 20-44 tahun, Indonesia menjadi negara dengan modal aset yang sangat potensial: penduduk dengan usia produktif yang besar.

Sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, Bank BTN mencoba menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para "Milenial", sebutan bagi generasi produktif Indonesia.

Fokus Bank BTN untuk menjadi bank tabungan di sektor pembiayaan perumahan akan menjadi agenda prioritas ke depan. Dengan potensi pasar para Milenial yang cukup besar, Bank BTN berharap mampu menjadi mitra dalam ekosistem industri perumahan dan properti, sekaligus terus-menerus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

2018

Mempersiapkan Ekosistem *Digital* Melalui Transformasi untuk Mendukung Bisnis yang Berkelanjutan



Di tengah kondisi bisnis perbankan yang penuh tantangan, Perseroan mampu memantapkan kinerjanya dibuktikan dengan keberhasilan dalam meningkatkan posisinya yang cukup kompetitif di industri perbankan dan sektor perumahan nasional, khususnya pada realisasi Program Sejuta Rumah. Keberhasilan kinerja tersebut, tidak terlepas dari proses transformasi *Digital Banking* yang secara konsisten diterapkan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan industri perbankan yang semakin kompleks. Menyadari tantangan ke depan, Perseroan telah mengambil langkah penting untuk memperkuat fundamental keuangan khususnya dalam mempersiapkan implementasi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang semakin dekat. Untuk itu, di tahun 2018 Perseroan telah memperkuat tata kelola proses bisnis yang lebih *prudent* dan meningkatkan penambahan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai upaya untuk meningkatkan rasio *coverage*. Bagi Perseroan, transformasi *Digital Banking* dengan upaya memperkuat fundamental keuangan merupakan keharusan untuk mengelola tantangan bisnis perbankan kedepannya, guna mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan Perseroan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian bangsa.

DAFTAR ISI

1	Tema dan Arti Tema
2	Kesinambungan Tema
4	Daftar Isi
7	Sekilas Tentang Perseroan
8	Jejak Langkah
10	Kontribusi Terbaik Kami

14 KILAS KINERJA

16	Pencapaian Kinerja Penting 2022
18	Ikhtisar Data Keuangan Penting
18	Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan
24	Ikhtisar Operasional
25	Informasi Saham
27	Aksi Korporasi
29	Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (<i>Suspension</i>) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (<i>Delisting</i>)
28	Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi
30	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
32	Peringkat Perusahaan 2022
32	Laporan Analisis Perusahaan
34	Peristiwa Penting

44 LAPORAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

46	Laporan Direksi
62	Laporan Dewan Komisaris
74	Laporan Dewan Pengawas Syariah
80	Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan

82 PROFIL PERUSAHAAN

84	Identitas Perusahaan
86	Nama dan Alamat Kantor Wilayah, Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah
95	Jaringan Mitra Usaha
97	Brand Perusahaan

98	Riwayat Singkat Perusahaan
99	Keterangan Perubahan Nama
100	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
100	Visi
101	Misi
100	Review Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi
102	Budaya Perusahaan
104	Kegiatan Usaha
104	Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
105	Produk dan Jasa
118	Wilayah Operasional
120	Struktur Organisasi
122	Daftar Keanggotaan Asosiasi
123	Profil Direksi
134	Profil Dewan Komisaris
146	Profil Dewan Pengawas Syariah
150	Profil Pejabat Eksekutif
152	Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi
168	Profil Pegawai
168	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
168	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
168	Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia
169	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
169	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Ketenagakerjaan
169	Jumlah Pekerja Berdasarkan Masa Kerja
170	Komposisi Pemegang Saham
171	Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar
172	Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih
173	Komposisi Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%
174	Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris
175	Klasifikasi Pemegang Saham
175	Pemegang Saham Utama dan Pengendali
176	Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama
176	Informasi Kelompok Usaha Bank
176	Struktur Grup Perusahaan
177	Kronologi Penerbitan Saham
180	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi Serta Efek Lainnya

187	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
187	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
192	Penghargaan dan Sertifikasi
203	Informasi yang Tersedia pada <i>Website</i>

204 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERSEROAN

206	Tinjauan Perekonomian
206	Analisis Perekonomian Global
210	Analisis Perekonomian Nasional
211	Analisis Industri Perbankan
211	Analisis Industri Perumahan
214	Analisis Posisi Perseroan dalam Industri Perbankan
216	Tinjauan Operasional
216	Rencana Strategis Bank
222	Aspek Pemasaran
222	Strategi Pemasaran
228	Pangsa Pasar
231	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
231	Segmen Konvensional
247	Segmen Syariah
260	Tinjauan Keuangan
260	Kinerja Keuangan
260	Laporan Posisi Keuangan
266	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
269	Laporan Arus Kas
272	Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
272	Kemampuan Membayar Utang
274	Kolektibilitas Piutang
275	Suku Bunga Dana
277	Suku Bunga Dasar Kredit
278	Analisis Kualitas Aset Produktif
280	Akselerasi Pertumbuhan <i>Fee Based Income</i>
280	Pertumbuhan Volume Transaksi <i>Digital</i>
282	Struktur Permodalan Bank
282	Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Dasar Penentuan Kebijakan
283	Rincian Struktur Modal
283	Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan
320	Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
320	Investasi Barang Modal

321	Komitmen dan Kontinjensi
321	Perjanjian dan Perikatan
322	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
322	Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan
328	Pencapaian Target dan Target Ke Depan
328	Pencapaian Target 2022
331	Target Ke Depan (Proyeksi)
333	Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
334	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
334	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal
335	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
342	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Perseroan
344	Perubahan Kebijakan Akuntansi
345	Tingkat Kesehatan Bank
345	Informasi Kelangsungan Usaha

350 HUMAN CAPITAL

352	Strategi Manajemen <i>Human Capital</i>
353	Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen <i>Human Capital</i>
353	Rekrutmen
353	Pengembangan Kompetensi
357	Pengembangan Karir
359	Penilaian Kinerja
360	Remunerasi
360	Program Pensiun
361	<i>Human Capital Information System</i>
362	Internalisasi Budaya
365	Struktur Pengelola <i>Human Capital</i>
366	Rencana Kerja <i>Human Capital</i> 2023

368 TEKNOLOGI INFORMASI

370	Rencana Strategi Teknologi Informasi
375	Inovasi Teknologi Informasi
376	Infrastruktur Teknologi Informasi
377	Tata Kelola Teknologi Informasi
378	Struktur Pengelola Teknologi Informasi
379	Rencana Kerja Teknologi Informasi 2023

380 TATA KELOLA PERUSAHAAN

382	Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
384	Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
385	Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata Kelola
386	Roadmap Tata Kelola Perusahaan
389	Implementasi Tata Kelola Perseroan 2022
390	Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola Penyusunan Kebijakan
396	Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
396	Struktur Organ Perusahaan
397	Governance Soft Structure
397	Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
397	Pemegang Saham
398	Rapat Umum Pemegang Saham
410	Direksi
427	Dewan Komisaris
460	Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
464	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
466	Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris
469	Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
503	Organ dan Komite di Bawah Direksi
542	Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
549	Akuntan Publik
550	Sistem Pengendalian Internal
554	Manajemen Risiko
570	Fungsi Kepatuhan
579	Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
581	Perkara Hukum
582	Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya
582	Akses Informasi dan Data Perusahaan
587	Kode Etik
591	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen
591	Whistleblowing System
600	Program Anti Korupsi
606	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

607	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dan Upaya Penyelesaian
607	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik
607	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
608	Buyback Saham dan Buyback Obligasi
608	Rencana Strategis Bank
608	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
608	Perselisihan Internal
608	Pencegahan Transaksi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)
608	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
609	Laporan Tata Kelola Unit Usaha Syariah
623	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
632	<i>Governance Principles for Banks</i> yang Diterbitkan oleh <i>Basel Committee in Banking Supervision</i>
634	<i>Good Corporate Governance Assessment</i>

646 PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

664 KRITERIA OJK, ARA DAN SK-16

686 LAPORAN KEUANGAN

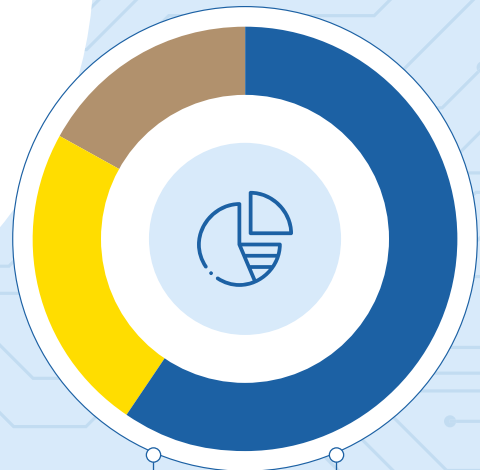
SEKILAS TENTANG PERSEROAN



TOTAL ASET

sebesar
Rp 402,15 triliun

KEPEMILIKAN



JUMLAH KANTOR

628 Jaringan Kantor Konvensional

110 Jaringan Kantor Syariah

65,34%

Pemerintah Republik Indonesia

24,91%

Publik Domestik

9,75%

Publik Asing

PRODUK & JASA

Perbankan Konvensional

Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah

JEJAK LANGKAH

1897

Perseroan berdiri dengan nama "Postspaarbank" pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.

1942

Perseroan diambil alih Pemerintah Jepang dan diganti namanya dengan *Tyokin Kyoku* atau Kantor Tabungan.

1945

Pemerintah RI mengambil alih *Tyokin Kyoku* dan didirikan Kantor Taboengan Pos.

1946

Semua Kantor Taboengan Pos diduduki oleh Belanda dan berhenti bekerja.

1949

Pemerintah RI membuka kembali Kantor Taboengan Pos dengan nama Bank Tabungan Pos RI.

1950

Perubahan nama menjadi "Bank Tabungan Pos" oleh Pemerintah RI.

1953

Dikukuhkan sebagai badan hukum di bawah Kementerian Perhubungan dan diizinkan membuka Kantor Cabang.

1963

Berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara dan berpindah menjadi di bawah Menteri Urusan Bank Sentral.

1965

Pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral. Berdiri Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia yang terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Indonesia, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Umum Negara, BNI 1946 dan Bank Dagang Negara.

1968

Bank tunggal kembali dipecah dan dibuka kembali Bank Tabungan Negara disingkat BTN.

1971

BTN bekerja sama dengan Perum Pos dan Giro untuk melaksanakan program Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska).

1974

Mendapat tugas membiayai perumahan rakyat dari Menteri Keuangan.

1976

Realisasi KPR BTN pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang.

1986

Mendapatkan kredit dari IBRD/Bank Dunia sebesar USD266.550.000 ditandatangani oleh Pemerintah RI.

1989

Pertama kali menerbitkan Obligasi dan awal melaksanakan kegiatan bank umum.

1992

Efektif menjadi PT Persero.



1994

Memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa.

2001

Direkapitalisasi oleh Pemerintah RI dengan nilai Rp13,6 triliun.

2002

Dengan sistem *online real* sistem berbasis IBM-AS400, teknologi informasi diimplementasikan ke seluruh Kantor Cabang.

2005

Pembentukan Usaha Unit Syariah dan dibuka Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta Harmoni.

2008

Memperoleh Sertifikasi ISO 9001-2000 untuk layanan kredit jangka menengah atas dengan pola layanan 1-5-1.

2009

Sekuritisasi KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) pertama di Indonesia. Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan *listing* di Bursa Efek Indonesia (*Go Public*).

2012

Melakukan *Rights Issue*.

2013

Perseroan melakukan transformasi menuju *leading housing* bank dan *world class banking*.

2014

Perseroan bersama SMF menandatangani Sekuritisasi terbesar.

2015

Perseroan turut serta mensukseskan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat.

2016

Perseroan melanjutkan agenda transformasi yaitu "*Digital Banking Periods*".

2017

Pengembangan berbagai produk dan layanan yang berbasis *digital*, salah satunya adalah pembukaan *Smart Branch* Jakarta Harmoni.

2018

Pengembangan ekosistem *digital* untuk mendukung bisnis sebagai bank pembiayaan perumahan terdepan di Indonesia.

2019

Menjadi *Housing Market Maker* dan Memperkuat Posisi Sebagai Bank Terbesar ke-5.

2020

Memperbarui visi menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025.

2021

Transformasi untuk mencapai pertumbuhan yang Berkelanjutan.

2022

Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue*.



KONTRIBUSI TERBAIK KAMI

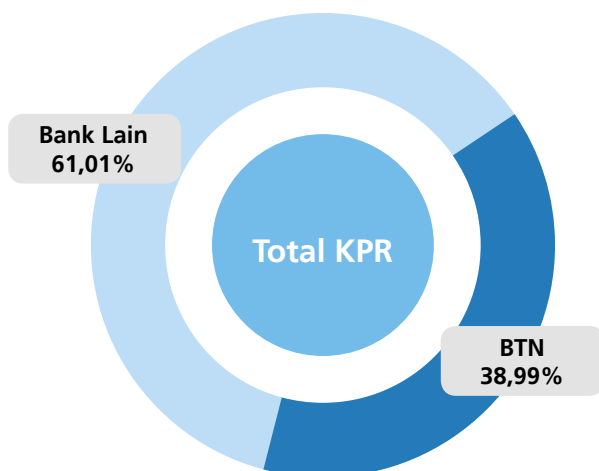


BANK BTN DALAM EKOSISTEM PERUMAHAN NASIONAL

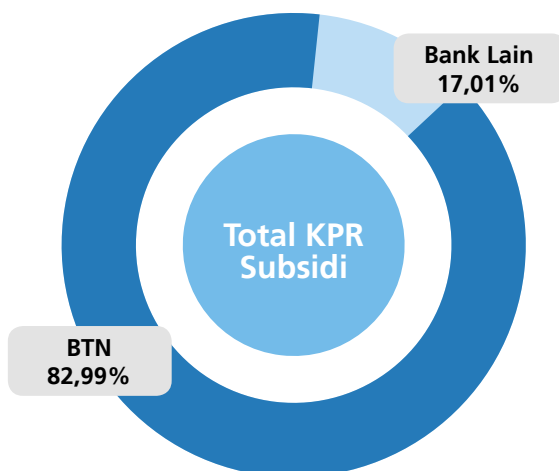
Sebagai Bank yang fokus pada Perumahan, Bank BTN memiliki posisi strategis pada ekosistem perumahan nasional terutama pada segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyaluran KPR BTN sangat membantu masyarakat Indonesia dalam memiliki hunian layak dan terjangkau. Selain itu, KPR BTN juga mampu mendukung terwujudnya ekosistem perumahan Indonesia yang baik dan stabil sehingga mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional serta mendukung program perumahan.

Bank BTN merupakan mitra kerja pemerintah yang handal dalam program perumahan. Hal itu tidak hanya dalam program rumah bersubsidi tapi juga berperan dalam penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga mampu menjangkau lebih banyak masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Market Share KPR
Bank BTN per Desember 2022



Market Share KPR
Subsidi per Desember 2022



PERSEROAN DUKUNG PERUMAHAN RAMAH LINGKUNGAN

Perseroan mendukung pembiayaan perumahan yang ramah lingkungan atau *green housing*. Salah satu konsep yang dikembangkan dalam *green housing* adalah dengan mengembangkan hutan kota dalam kompleks perumahan. Selain mendukung pembiayaan perumahan, Perseroan juga membantu para *developer* yang ingin mengembangkan konsep perumahan ramah lingkungan. Untuk itu, Bank BTN siap menyalurkan bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pembangunan Hutan Kota ini merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal dan sebagai pengatur tata air untuk mencegah banjir maupun untuk melindungi lingkungan serta mencegah timbulnya pencemaran. Perseroan selama ini telah menyarankan kepada para pengembang yang membangun rumah dan mendapatkan kredit dari Bank BTN untuk menerapkan konsep satu rumah satu pohon. Diharapkan dengan konsep tersebut perumahan akan terlihat hijau.



>5 Juta Unit

Rumah telah direalisasikan Bank BTN sejak KPR sejak tahun 1976



> 2.000

Pengembang Baru yang berhasil dicetak melalui *learning & advisory* Bank BTN



90% Portofolio Kredit

adalah terkait perumahan di mana 80% nya adalah KPR



200.000 unit/tahun

Kapasitas rata-rata Penyaluran KPR Bank BTN per tahun



Kontributor Utama

program Perumahan Nasional dengan penyerapan kuota Subsidi yang terbesar

Partnership

Partnership dengan seluruh *stakeholder* perumahan



> 3.000 Notaris

telah bekerja sama dengan Bank BTN dalam merealisasikan KPR dan Kredit Konstruksi



> 7.000 Mitra Pengembang

sebagian besar adalah pengembang hunian Subsidi dan MBR

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Perseroan sebagai Badan Publik melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;



Berdasarkan hasil *Monitoring* dan *Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik* pada tahun 2022, pada momen Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022, Perseroan mendapat kualifikasi sebagai Badan Publik "Menuju Informatif" pada Kategori Badan Usaha Milik Negara. Hal tersebut merupakan pencapaian yang baik mengingat terdapat peningkatan kualifikasi dari tahun buku sebelumnya.

Perseroan sebagai Badan Publik memiliki visi “Menjadi Bank Terbaik Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik” dengan misi “Menyediakan Informasi Publik dan Layanan Melalui Inovasi Digital”.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.182/DIR/2016 tanggal 10 Mei 2016, bahwa Kepala Divisi *Corporate Secretary Division* sebagai Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID). PPID memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:



Penyediaan, penyimpanan,
pendokumentasian dan pengamanan
informasi



Pelayanan informasi sesuai dengan aturan
yang berlaku



Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat
dan sederhana



Penetapan prosedur operasional
penyebarluasan Informasi Publik



Pengujian Konsekuensi



Pengklasifikasian informasi dan/atau
pengubahannya



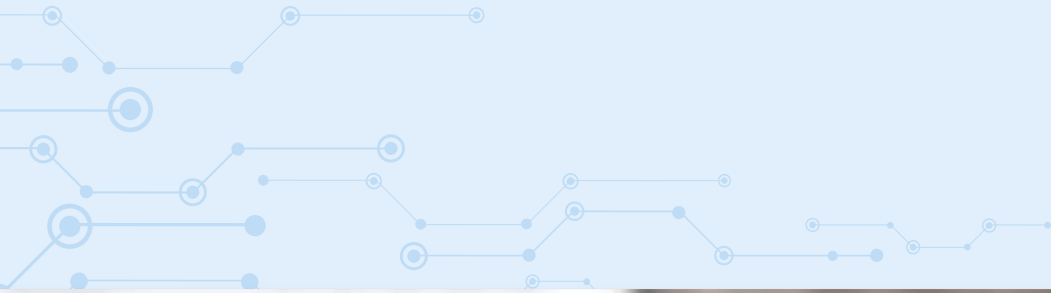
Penetapan informasi yang dikecualikan yang
telah habis jangka waktu pengecualiannya
sebagai informasi publik yang dapat diakses



Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak
setiap orang atas informasi publik

Kilas Kinerja





PENCAPAIAN KINERJA PENTING 2022



**KINERJA KREDIT SEGMENT
PERBANKAN KONSUMER**

↑ 26,85%



**KINERJA SIMPANAN
SEGMENT SYARIAH**

↑ 18,35%



**KINERJA SIMPANAN SEGMENT
PERBANKAN KOMERSIAL**

↑ 13,11%



**KINERJA PEMBIAYAAN
SEGMENT SYARIAH**

↑ 14,79%



TOTAL ASET

↑ 8,14%



LABA TAHUN BERJALAN

↑ 28,15%

Di tengah kondisi perekonomian yang masih mengalami perbaikan, Perseroan mampu melanjutkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari kinerja bisnis yang *sustain*, peningkatan profitabilitas dan efisiensi bisnis serta kualitas kredit yang semakin membaik. Per 31 Desember 2022 (*audited*), Perseroan berhasil memperkuat posisinya sebagai Bank Terbesar ke-5 dengan mencatatkan aset sebesar Rp402,15 triliun atau tumbuh 8,14% (yoy).

Pada periode yang sama, kredit tercatat sebesar Rp298,28 triliun atau tumbuh 8,53% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit perumahan, terutama KPR Subsidi. Per Desember 2022, KPR Subsidi BTN tercatat sebesar Rp145,86 triliun atau tumbuh 11,61% (yoy). Sebagai Bank Fokus Perumahan, *market share* KPR BTN juga tetap kuat. Per Desember 2022, Perseroan memiliki total *market share* KPR sebesar 38,99% dan *market share* KPR Subsidi sebesar 82,99%.





Dengan kinerja tersebut, pada tahun 2022 Perseroan berhasil memperkuat kontribusinya pada program perumahan nasional. Sejak KPR pertama kali diluncurkan pada tahun 1976 hingga tahun 2022, Perseroan telah menyalurkan lebih dari 5 juta KPR yang terdiri dari 3,7 juta KPR Subsidi dan 1,5 juta KPR Non Subsidi.

Selain kredit perumahan, dana pihak ketiga (DPK) per Desember 2022 tercatat sebesar Rp322 triliun, tumbuh 8,77% (yoy). Kinerja DPK tersebut tetap di atas posisi kredit, sehingga rasio LDR per Desember 2022 dapat dijaga di bawah 100%, yaitu sebesar 92,65%. Di tengah kenaikan suku bunga acuan BI 7 days repo, Perseroan juga tetap mampu mengendalikan *Cost of Fund* (CoF) yang pada Desember 2022, CoF DPK BTN terealisasi sebesar 2,60%, lebih rendah dibanding Desember 2021 yang sebesar 3,13%.

Per Desember 2022, laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp3,05 triliun, tumbuh 28,15% (yoy). Sejalan dengan peningkatan laba, indikator *Return on Equity* (ROE) dan *Net Interest Margin* (NIM) Perseroan juga menunjukkan tren peningkatan. Per Desember 2022, ROE tercatat sebesar 16,42%, meningkat 2,78% (yoy) dan NIM tercatat sebesar 4,40%, meningkat 0,41% (yoy).

Implementasi atas perbaikan proses bisnis dan sentralisasi aktivitas operasional yang terdapat pada Kantor Cabang juga sudah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari indikator *Cost to Income Ratio* (CIR) yang semakin membaik. Per Desember 2022, CIR tercatat sebesar 46,66% lebih rendah dibanding CIR Desember 2021 yang sebesar 48,18%.

Kualitas kredit Bank BTN juga semakin membaik. Per Desember 2022, NPL Gross tercatat sebesar 3,38%, lebih baik dibanding Desember tahun 2021 yang sebesar 3,70%. Selain itu, rasio pencadangan juga semakin kuat, dimana per Desember 2022 rasio *Coverage CKPN* terhadap NPL tercatat sebesar 155,65%, lebih tinggi dibanding Desember 2021 yang sebesar 141,82%.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
ASET					
KAS	1.661.533	1.539.577	1.429.426	1.369.167	1.243.615
GIRO PADA BANK INDONESIA	25.416.941	10.692.484	11.107.672	15.512.329	15.417.862
GIRO PADA BANK LAIN					
Pihak ketiga	963.935	1.000.338	2.995.233	391.877	718.377
Pihak berelasi	508.322	96.460	221.896	357.624	870.392
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.747)	(1.698)	(1.808)	(1.632)	(1.718)
	1.470.510	1.095.100	3.215.321	747.869	1.587.051
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN					
Pihak ketiga	12.975.894	27.900.711	19.830.096	10.996.115	26.461.116
Pihak berelasi	61	337	337	101.078	3.644
EFEK-EFEK					
Pihak ketiga	873.109	891.173	1.123.406	5.985.588	4.991.546
Pihak berelasi	850.059	1.341.732	2.082.560	2.126.461	877.112
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.399)	(2.000)	(2.000)	(27.378)	(20.173)
	1.720.769	2.230.905	3.203.966	8.084.671	5.848.485
OBLIGASI PEMERINTAH					
Pihak berelasi	51.964.973	46.080.298	56.287.751	11.053.601	9.393.138
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJII DIJUAL KEMBALI					
Pihak ketiga	1.434.190	1.598.325	954.955	1.675.221	-
Pihak berelasi	-	-	-	200.000	-
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH					
Kredit yang diberikan					
Pihak ketiga	247.217.823	229.174.514	217.711.277	214.807.263	204.651.014
Pihak berelasi	19.439.742	18.110.919	17.340.839	17.405.276	11.605.291
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.104.914)	(13.165.897)	(12.151.936)	(5.425.908)	(2.777.845)
	252.552.651	234.119.536	222.900.180	226.786.631	213.478.460
Pembiayaan/piutang syariah					
Pihak ketiga	31.367.082	27.102.484	25.059.007	23.609.204	22.037.831
Pihak berelasi	257.057	447.374	3.040	3.416	3.596
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.570.009)	(1.269.863)	(909.007)	(690.258)	(520.287)
	30.054.130	26.279.995	24.153.040	22.922.362	21.521.140
TAGIHAN DERIVATIF					
Pihak ketiga	103.939	31.017	70.386	-	167
TAGIHAN AKSEPTASI					
Pihak ketiga	289.206	-			
Pihak berelasi	131.356	454.140	196.071	487.052	528.148
Cadangan kerugian penurunan nilai	(136)	(623)	(1.393)	-	-

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
	420.426	453.517	194.678	487.052	528.148
PENYERTAAN SAHAM					
Pihak ketiga	-	-	-	270	270
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(270)	(270)
ASET TETAP					
Biaya perolehan/Nilai revaluasi	10.599.848	9.468.655	9.053.182	8.108.086	7.411.526
Akumulasi penyusutan	(4.246.045)	(3.731.864)	(3.234.737)	(2.707.428)	(2.393.832)
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	10.750.302	9.173.536	6.285.574	3.210.772	2.959.502
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	2.915.428	2.430.660	1.972.393	629.105	260.251
ASET LAIN-LAIN	2.352.762	2.505.522	3.784.186	2.600.197	2.715.921
TOTAL ASET	402.148.312	371.868.311	361.208.406	311.776.828	306.436.194
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS SEGERA	3.205.358	3.654.236	4.765.276	1.999.183	2.301.930
SIMPANAN DARI NASABAH					
Giro					
Pihak ketiga	17.636.481	12.806.732	16.546.465	9.583.560	17.774.334
Pihak berelasi	87.264.437	60.556.142	52.054.300	38.524.556	35.898.854
Giro Wadiah					
Pihak ketiga	1.783.134	1.176.350	946.930	917.455	1.314.451
Pihak berelasi	6.841.675	4.179.603	2.138.165	1.675.555	1.467.403
	113.525.727	78.718.827	71.685.860	50.701.126	56.455.042
Tabungan					
Pihak ketiga	35.656.990	46.363.367	38.279.792	41.212.905	37.991.758
Pihak berelasi	525.339	436.034	420.345	272.004	359.081
Tabungan Wadiah					
Pihak ketiga	1.192.775	1.149.143	903.998	789.042	765.695
Pihak berelasi	943	1.096	1.211	847	629
	37.376.047	47.949.640	39.605.346	42.274.798	39.117.163
Deposito berjangka					
Pihak ketiga	66.808.185	53.067.211	60.918.288	61.281.176	69.989.506
Pihak berelasi	79.389.842	93.453.378	86.940.320	52.648.592	45.472.777
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	-	-	-	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	-	-
	146.198.027	146.520.589	147.858.608	113.929.768	115.462.283
Total simpanan dari nasabah	297.099.801	273.189.056	259.149.814	206.905.692	211.034.488
SIMPANAN DARI BANK LAIN					
Pihak ketiga	136.408	66.007	29.880	4.509.238	2.992.579
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI					
Pihak ketiga	-	-	-	935.000	935.000
LIABILITAS AKSEPTASI					
Pihak ketiga	302.037	292.220	196.071	-	-

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Pihak berelasi	118.525	161.920	-	487.052	528.148
LIABILITAS DERIVATIF					
Pihak ketiga	-	17.741	22.787	-	152
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN					
Pihak ketiga	4.297.252	8.094.441	10.835.733	14.405.980	13.719.734
Pihak berelasi	4.355.008	4.277.267	4.974.733	5.377.572	6.925.026
PINJAMAN YANG DITERIMA					
Pihak ketiga	7.365.320	6.499.997	6.798.082	8.681.368	7.430.342
Pihak berelasi	17.455.685	15.562.294	17.009.056	13.784.289	8.069.151
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	629.366	496.725	726.914	630.002	630.134
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	4.719	3.644	6.489	-	-
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	7.248.985	6.618.300	6.666.875	5.736.637	6.217.814
PINJAMAN SUBORDINASI DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI					
Pihak ketiga	4.658.242	4.259.776	4.194.554	-	-
Pihak berelasi	4.499.977	4.499.968	5.999.878	5.999.669	2.999.519
TOTAL LIABILITAS	351.376.683	327.693.592	321.376.142	269.451.682	263.784.017
DANA SYIRKAH TEMPORER					
SIMPANAN NASABAH					
<i>Giro Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	468.889	467.333	341.653	826.682	1.059.570
Pihak berelasi	11.897	12.281	17.033	588.030	534.702
<i>Tabungan Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	4.730.686	3.466.529	2.683.283	3.226.349	2.675.780
Pihak berelasi	88.427	505.563	430.860	136.577	84.289
<i>Deposito berjangka Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	11.886.366	8.887.336	11.022.780	11.661.400	8.814.203
Pihak berelasi	7.637.191	9.424.102	5.345.495	2.038.501	5.625.953
Total simpanan nasabah	24.823.456	22.763.144	19.841.104	18.477.539	18.794.497
SIMPANAN DARI BANK LAIN					
<i>Giro Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	56	46	176	243	315
<i>Tabungan Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	19.674	1.882	2.139	3.299	8.857
<i>Deposito berjangka Mudharabah</i>					
Pihak ketiga	19.089	3.000	1.000	7.870	8.060
Total simpanan dari bank lain	38.819	4.928	3.315	11.412	17.232
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	24.862.275	22.768.072	19.844.419	18.488.951	18.811.729
EKUITAS					
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021					
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021					
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.054.454	2.054.454	2.054.454
Dana setoran modal	2.756.575	-	-	-	-

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi Pemerintah pemerintah setelah pajak tangguhan Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.193.252)	87.817	1.100.019	11.460	(107.430)
Pengukuran kembali					
Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan	(409.657)	(458.153)	(531.674)	(194.707)	(82.886)
Bagian efektif Lindung Nilai - Arus Kas	(49.301)	(19.983)	(1.239)	-	-
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.508.565	3.307.991	3.307.991	3.307.991	2.966.991
Saldo laba*					
Telah ditentukan penggunaannya	10.745.157	8.606.555	7.004.198	12.995.995	10.749.657
Belum ditentukan penggunaannya	3.201.813	2.532.966	1.759.096	366.002	2.964.662
TOTAL EKUITAS	25.909.354	21.406.647	19.987.845	23.836.195	23.840.448
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	402.148.312	371.868.311	361.208.406	311.776.828	306.436.194
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil					
Bagi Hasil Bunga	23.233.200	23.413.857	22.947.252	23.271.432	20.781.512
Bagi hasil dan marjin unit syariah	2.674.168	2.381.101	2.169.236	2.448.442	2.070.246
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	25.907.368	25.794.958	25.116.488	25.719.874	22.851.758
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus					
Bunga	(9.866.919)	(11.670.728)	(14.687.492)	(15.167.294)	(11.627.554)
Beban pendanaan lainnya	(169.804)	(177.585)	(147.146)	(157.708)	(128.826)
Bonus Simpanan <i>Wadiah</i>	(57.558)	(32.175)	(21.782)	(15.641)	(12.436)
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil <i>Mudharabah</i>	(815.803)	(923.167)	(1.335.517)	(1.417.430)	(993.765)
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(10.910.084)	(12.803.655)	(16.191.937)	(16.758.073)	(12.762.581)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	14.997.284	12.991.303	8.924.551	8.961.801	10.089.177
Pendapatan Operasional Lainnya					
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	965.441	852.953	760.751	832.556	819.837
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	431.591	304.810	275.538	113.399	130.900
(kerugian) Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	(234.089)	76.734	356.168	478.339	437.553
(kerugian) Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	(266.235)	818.679	308.351	144.553	8.586
(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	(64.931)	(135.338)	18.493	20.894	30.316
(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	55.045	(18.778)	87.011	1.745	11.999
Lain-lain	822.775	463.507	708.295	518.366	632.403
Total Pendapatan Operasional Lainnya	1.709.597	2.362.567	2.514.607	2.109.852	2.071.594
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(4.017.378)	(3.627.477)	(2.258.479)	(3.486.665)	(1.714.427)
Pembalikan (Penyisihan) Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	(1.075)	2.845	(3.784)	-	-
Beban Operasional Lainnya					
Umum dan administrasi	(3.754.028)	(3.358.846)	(3.114.260)	(3.425.022)	(3.225.353)
Gaji dan tunjangan karyawan	(4.190.298)	(3.782.925)	(2.977.208)	(2.863.955)	(2.876.562)
Premi program penjaminan Pemerintah	(599.991)	(619.667)	(469.360)	(467.791)	(401.532)
Lain-lain	(329.308)	(930.968)	(285.782)	(306.447)	(349.097)
Total Beban Operasional Lainnya	(8.873.625)	(8.692.406)	(6.846.610)	(7.063.215)	(6.852.544)
LABA OPERASIONAL	3.814.803	3.036.832	2.330.285	521.773	3.593.800
BEBAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	60.887	(43.512)	(59.428)	(110.711)	16.475
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.875.690	2.993.320	2.270.857	411.062	3.610.275

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
BEBAN PAJAK	(830.617)	(617.093)	(668.499)	(201.799)	(802.352)
LABA TAHUN BERJALAN	3.045.073	2.376.227	1.602.358	209.263	2.807.923
Pendapatan Komprehensif Lain:					
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	200.574	-	-	341.000	-
Pengukuran kembali program imbalan pasti	59.872	75.005	(397.512)	(132.869)	80.363
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(11.376)	(1.484)	60.545	21.048	(20.091)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Bagian Efektif Lindung Nilai – Arus Kas	(40.883)	(18.744)	(1.239)	-	-
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.576.967)	(1.259.616)	1.342.481	148.613	(114.250)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	307.463	247.414	(253.922)	(9.723)	28.562
Total laba komprehensif tahun berjalan	1.983.756	1.418.802	2.352.711	557.332	2.782.507
Laba Per Saham Dasar (nilai penuh)	288	224	151	20	265
LAPORAN ARUS KAS					
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan marjin	24.331.326	22.427.061	22.025.695	25.453.902	22.179.899
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	503.307	362.436	331.915	153.997	151.188
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(10.775.222)	(13.027.787)	(16.095.612)	(16.646.046)	(12.624.698)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.001.324)	(820.461)	(341.466)	(590.027)	(976.956)
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	402.428	-	-	6.710	3.941
Beban operasional lainnya - neto	(6.896.183)	(5.927.136)	(3.986.344)	(4.845.107)	(5.163.188)
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - neto	13.828	(27.932)	(59.428)	(110.711)	16.475
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	6.578.160	2.986.181	1.874.760	3.422.718	3.586.661
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:					
Penempatan pada bank lain	-	947.105	(595.305)	(351.800)	-
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(104.885)	849.641	172.622	2.452.777	740.954
Obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(4.955.939)	4.842.769	(18.122.548)	1.547.115	(2.350.369)
Tagihan akseptasi	33.578	-258.069	-	-	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	(26.318.471)	(16.988.247)	(7.255.860)	(18.229.537)	(39.554.295)
Aset lain-lain	(196.503)	1.241.584	(1.285.447)	300.335	10.680
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:					
Liabilitas segera	(466.852)	(1.120.009)	2.446.942	(301.002)	-414.568
Simpanan dari nasabah					
Giro	31.538.044	4.762.109	20.492.649	(5.565.072)	3.653.362
Giro Wadiah	3.268.857	2.270.858	492.085	(188.844)	32.528
Tabungan	(10.617.072)	8.099.264	(2.784.772)	3.134.070	132.903
Tabungan Wadiah	43.479	245.030	115.320	23.565	143.923
Deposito berjangka	(322.562)	(1.338.019)	33.928.841	(1.532.515)	29.980.351
Simpanan dari bank lain	70.400	36.127	(4.479.357)	1.516.659	(2.070.854)
Liabilitas akseptasi	(33.578)	258.069	-	-	-
Liabilitas lain-lain	654.214	(206.114)	303.204	(734.052)	650.935
Dana <i>syirkah</i> temporer	2.094.203	2.923.653	1.355.469	(322.778)	3.047.359
Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Operasi	1.265.073	9.551.932	26.658.603	(14.828.361)	(2.410.430)

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek biaya perolehan diamortisasi	199.964	-	1.061.584	-	-
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	36.889
Perolehan Aset tetap	(1.042.464)	(415.473)	(798.086)	(366.561)	(526.743)
Penurunan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	381.580	330.249	1.082.203	-	-
Penurunan (Kenaikan) obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.714.402	10.722.233	(25.844.225)	(2.085.930)	464.873
Pembelian obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi	(7.816.426)	(5.922.417)	(148.619)	-	944.573
Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	(236.767)	-	-	-
Penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	163.410	-	920.267	-	-
Penempatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	(643.370)	-	(1.875.221)	-
(Kenaikan) Penurunan efek-efek tersedia untuk dijual	-	-	-	(718.350)	1.089.818
Pembelian obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	(947.963)	(319.917)
Pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	(1.083.081)	-
Kas Neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(2.399.534)	3.834.455	(23.726.876)	(7.077.106)	1.689.493
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	1.541.330	10.186	1.493.811	4.144.000	3.660.000
Pembayaran atas surat-surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo	(5.263.000)	(3.455.000)	(5.322.500)	(5.122.930)	(3.520.000)
Penerimaan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	592.326	1.716.191	-	-	-
Pembayaran atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali jatuh tempo	(592.326)	(1.716.191)	(935.000)	-	(450.000)
Eksekusi opsi saham karyawan	-	-	-	-	-
Pembayaran dividen	(237.624)	-	(20.927)	(561.585)	(605.493)
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	11.814.826	6.455.429	9.141.448	11.001.654	7.550.287
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(9.095.884)	(8.204.691)	(7.823.008)	(4.020.720)	(36.490)
Penerimaan dari efek-efek subordinasi	-	1.500.000	4.047.884	2.999.950	-
Pembayaran Liabilitas Sewa	(84.983)	(99.959)	(125.788)	-	-
Pembayaran atas pinjaman dan efek-efek subordinasi jatuh tempo	-	(3.000.000)	-	-	-
Dana setoran modal	2.756.575	-	-	-	-
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.431.240	(6.794.035)	455.920	8.440.369	6.598.304
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	296.779	6.592.352	3.387.647	(13.465.098)	5.877.367
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	41.229.907	34.637.555	31.249.908	44.715.006	38.837.639
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	41.526.686	41.229.907	34.637.555	31.249.908	44.715.006
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:					
Kas	1.661.533	1.539.577	1.429.426	1.369.167	1.243.615
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	10.692.484	11.107.672	15.512.329	15.417.862
Giro pada bank lain	1.472.257	1.096.798	3.217.129	749.501	1.588.769
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	12.975.955	27.901.048	18.883.328	10.745.393	26.364.760
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	-	-	2.873.518	100.000
Total	41.526.686	41.229.907	34.637.555	31.249.908	44.715.006

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
RASIO KEUANGAN (%)					
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	87,37	88,12	88,97	86,42	86,08
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas	1.356,18	1.530,80	1.607,86	1.130,43	1.106,46
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,38	3,70	4,37	4,78	2,81
Non Performing Loan (NPL) Netto	1,32	1,20	2,06	2,96	1,83
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	20,17	19,14	19,34	17,32	18,21
Return On Asset (ROA)	1,02	0,81	0,69	0,13	1,34
Return On Equity (ROE)	16,42	13,64	10,02	1,00	14,89
Net Interest Margin (NIM)	4,40	3,99	3,06	3,32	4,32
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	86,00	89,28	91,61	98,12	85,58
Cost to Income Ratio (CIR)	46,66	48,18	53,85	58,08	-
Loan to Deposit Ratio (LDR)	92,65	92,86	93,19	113,50	103,49
Persentase Pelanggaran BMPK					
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Pelampauan BMPK					
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giro Wajib Minimum (GWM)					
GWM Utama Rupiah					
Konvensional	8,28	3,55	3,16	6,19	6,61
Syariah	7,76	3,70	3,15	4,64	5,30
GWM Valuta Asing	4,13	6,24	4,63	8,28	8,69
Posisi Devisa Netto	4,17	2,63	3,17	4,14	1,55

*Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

Ikhtisar Operasional

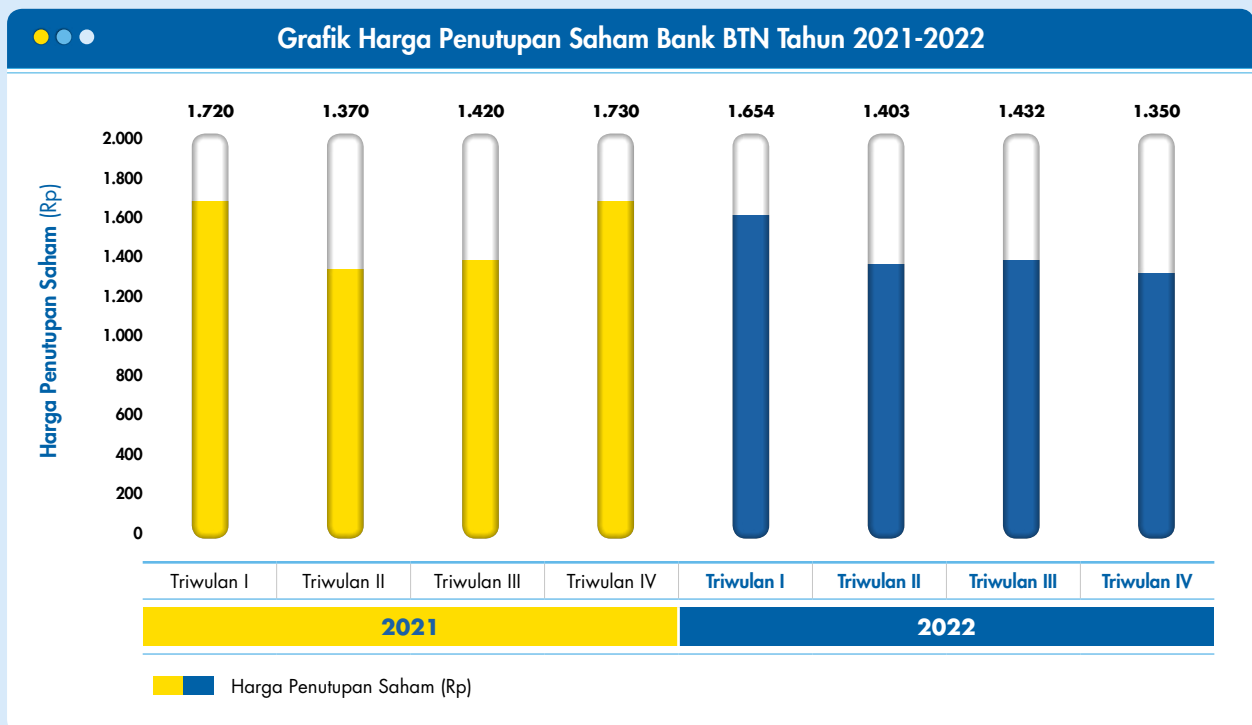
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
PERBANKAN KONSUMER					
Penyaluran Kredit Konsumer	41.795.596	32.948.775	24.812.869	33.439.158	49.371.120
Simpanan Konsumer	63.400.171	68.770.476	65.777.811	65.600.784	61.792.136
PERBANKAN KOMERSIAL					
Penyaluran Kredit Komersial	37.654.864	20.423.399	15.416.031	25.962.288	29.135.261
Simpanan Komersial	223.893.013	197.936.014	189.525.768	137.939.293	146.263.780
UNIT USAHA SYARIAH					
Penyaluran Pembiayaan Syariah	8.213.567	6.232.013	4.658.912	5.302.395	8.326.533
Simpanan Syariah	34.640.775	29.269.336	23.831.409	21.861.284	22.342.676

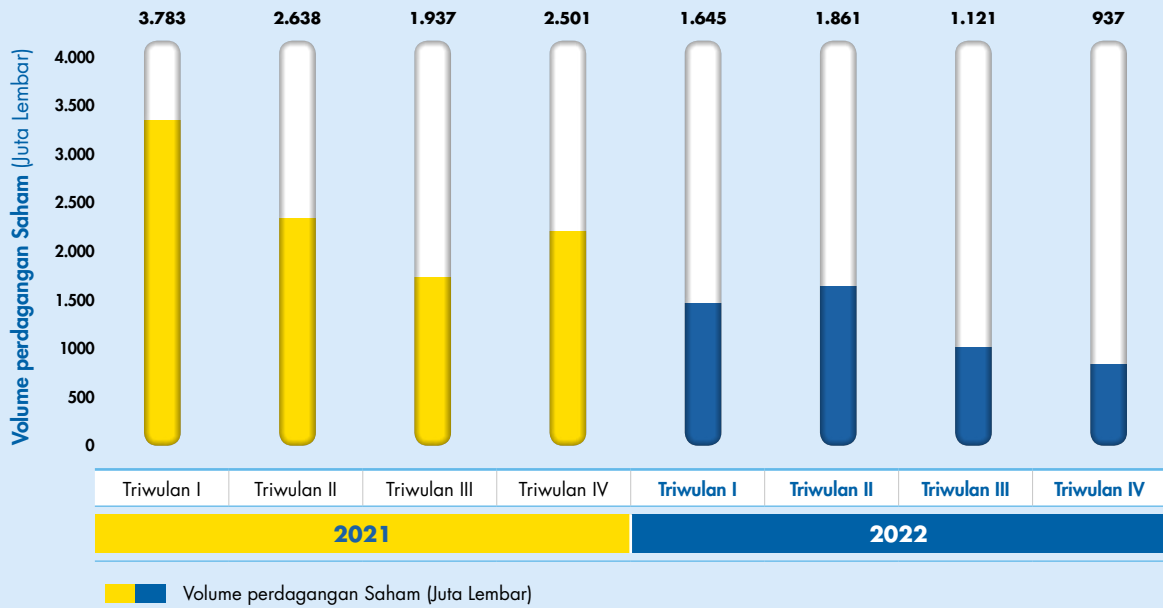
INFORMASI SAHAM

Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham Bank BTN 2021-2022

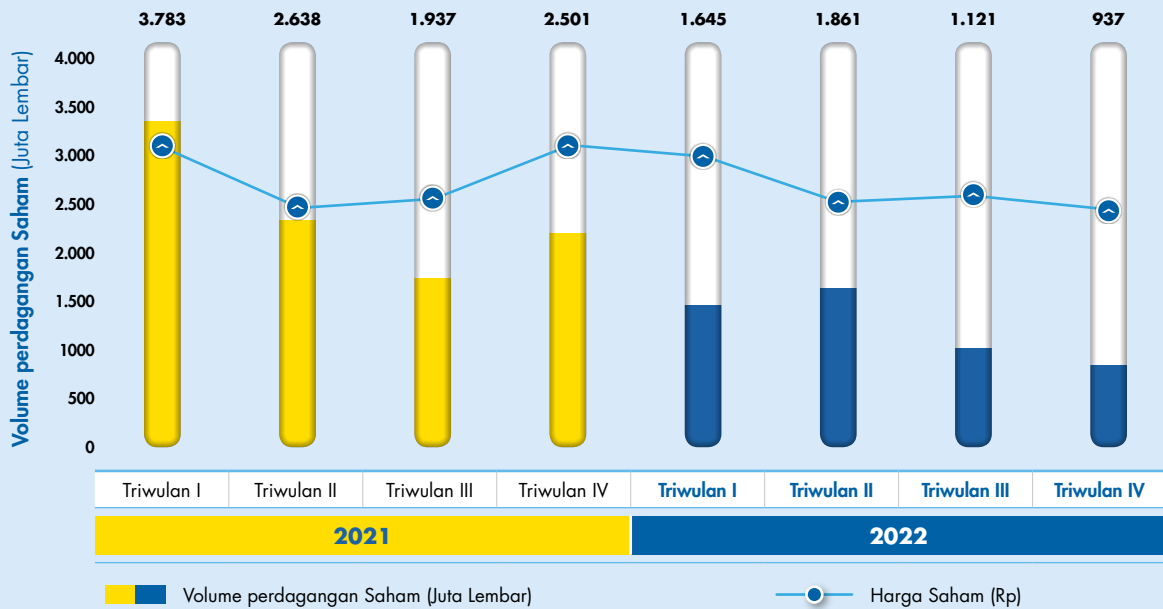
Tahun	Harga per saham (Rp)				Jumlah Saham Beredar (Juta Lembar)	Volume Perdagangan (Juta Lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan			
2022							
Triwulan I	1.668	1.750	1.499	1.654	10,59	1.645	18,16
Triwulan II	1.654	1.798	1.403	1.403	10,59	1.861	15,41
Triwulan III	1.403	1.567	1.340	1.432	10,59	1.121	15,73
Triwulan IV	1.432	1.494	1.311	1.350	12,87	937	17,46
2021							
Triwulan I	1.735	2.150	1.570	1.720	10,59	3.783	18,21
Triwulan II	1.725	1.735	1.330	1.370	10,59	2.638	14,51
Triwulan III	1.360	1.460	1.230	1.420	10,59	1.937	15,04
Triwulan IV	1.485	1.860	1.485	1.730	10,59	2.501	18,32



Grafik Volume Perdagangan Saham Bank BTN Tahun 2021-2022



Grafik Pergerakan Harga dan Volume Saham Bank BTN Tahun 2021 – 2022



Tabel Ringkasan Informasi Saham BBTN 2018-2022

Indikator	BBTN 2022	BBTN 2021	BBTN 2020	BBTN 2019	BBTN 2018
Harga Pembukaan (Rp per Lembar Saham)	1.668	1.735	2.150	2.560	3.780
Harga Tertinggi (Rp per Lembar Saham)	1.798	2.150	2.160	2.790	3.840
Harga Terendah (Rp per Lembar Saham)	1.311	1.230	745	1.795	2.050
Harga Penutupan (Rp per Lembar Saham)	1.350	1.730	1.725	2.120	2.540
Volume Perdagangan (Juta Lembar)	5.563	10.502	16.981	6.076	7.079
Nilai Buku Per Saham (Rp)	2.131	1.988	1.887	2.251	2.251
Price to Book Value (kali)	0,63	0,89	0,91	0,94	1,13
Price to Earning Ratio (kali)	4,73	9,28	11,40	107,29	9,58
Jumlah Saham Beredar (Juta Lembar)	12,87	10,59	10,59	10,59	10,59
Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)	17,46	18,32	18,27	22,45	26,90

Sepanjang tahun 2022, Perseroan berhasil masuk dalam daftar konstituen beberapa Indeks saham terkemuka sebagai berikut:

Indeks	Periode
PEFINDO i-Grade	Januari 2022 – Juni 2022
LQ45	November 2022 – Januari 2023
IDX BUMN20	November 2022 – Februari 2023
IDX30	Februari 2022 – Juli 2022
IDX80	November 2022 – Januari 2023
IDX Small-Mid Cap (IDX SMC) Composite	November 2022 – Februari 2023
IDX Small-Mid Cap (IDX SMC) Liquid	November 2022 – Februari 2023
Kompas100	November 2022 – Januari 2023
Infobank15	Agustus 2022 – Desember 2022
IDX ESG Leaders	September 2021 – Maret 2022
MSCI Indonesia Small Cap	November 2021 – Maret 2022
ESG Sector Leaders IDX Kehati	Desember 2022 – Mei 2023
ESG Quality 45 IDX Kehati	Desember 2022 – Mei 2023
IDX Value30	November 2022 – Februari 2023
Investor33	Desember 2022 – Mei 2023
IDXFINANCE	Oktober 2022 – Juni 2023
SRI-KEHATI	Juli 2022 – November 2022

Aksi Korporasi

Perseroan melaksanakan *Rights Issue* di tahun 2022 dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas bisnis Perseroan, terutama dalam penyaluran kredit perumahan. Pelaksanaan *Rights issue* ini memperkuat permodalan Perseroan, terutama modal *Tier-1* sehingga akan menjaga rasio permodalan di atas batas ketentuan minimum regulator. Secara ringkas, pelaksanaan *Rights Issue* ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih cukup tinggi, sebesar 12,7 juta.** Perseroan memiliki posisi strategis pada ekosistem perumahan khususnya pembiayaan KPR Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan *market share* KPR Subsidi per Desember 2022 sebesar 84,5%.
- Bank BTN menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,3 juta unit sejak 2021-2025,** untuk mendukung Program Perumahan Nasional, dengan sasaran utama adalah MBR.
- Penerapan regulasi** (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) terkait dengan perhitungan ATMR Kredit akan berdampak pada permodalan Bank (penurunan rasio CAR).
- Rasio modal inti Bank BTN lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata modal inti 11 bank** berdasarkan kategori aset. Rasio modal inti Perseroan per Juni 2022 adalah sebesar 12,7%, sementara rata-rata modal inti 11 bank besar adalah sebesar 21,0%.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 28 Desember 2022 Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan	Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)				Jumlah Saham yang Beredar	
		Pemerintah		Publik			Nominal
		Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%		Rp
28 Desember 2022 - 5 Januari 2023	Sebelum <i>Rights Issue</i>	6.354.000.000	60	4.236.000.000	40	5.295.000.000.000	10.590.000.000
	Setelah <i>Rights Issue</i>	8.420.666.648	60	5.613.777.765	40	7.017.222.206.500	14.034.444.413

Keterangan: Nilai Nominal saham sebelum dan sesudah *Rights Issue*: Rp500/lembar saham

Dari Hasil Pelaksanaan *Rights Issue* sejak 28 Desember 2022 – 5 Januari 2023, jumlah saham yang tereksekusi *Rights*-nya *oversubscribed* 1,63 kali dari porsi publik, dan jika ditambah dengan porsi Penyertaan Modal Negara (PMN) maka jumlah saham yang tereksekusi *Rights*-nya *oversubscribed* mencapai 1,25 kali.

Partisipasi Pemegang Saham Berdasarkan Investor dan Regional Negara

Partisipasi pemegang saham berdasarkan persentase *exercise* menunjukkan bahwa investor retail domestik mencatat kontribusi paling tinggi yaitu mencapai 50,34% dari total *proceeds*, diikuti dengan institusi domestik sebesar 30,33% dan investor asing sebesar 19,32%. Tercatat investor ritel domestik melakukan *exercise* paling signifikan yaitu 185,26% atau 693,56 juta lembar saham baru, lebih banyak dari jatah yang seharusnya pada saat *cumdate* yaitu hanya sebesar 374,38 juta lembar. Berdasarkan negara, persentase pemegang saham yang melakukan *exercise* melebihi jatah yang diberikan yaitu dari Malaysia (214,47%), United Kingdom (149,40%), dan Indonesia (115,32%). Untuk beberapa negara lain seperti Swiss, Cayman Islands dan Swedia melakukan eksekusi *Rights Issue* sebesar 100% dari hak *rights* yang diberikan.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

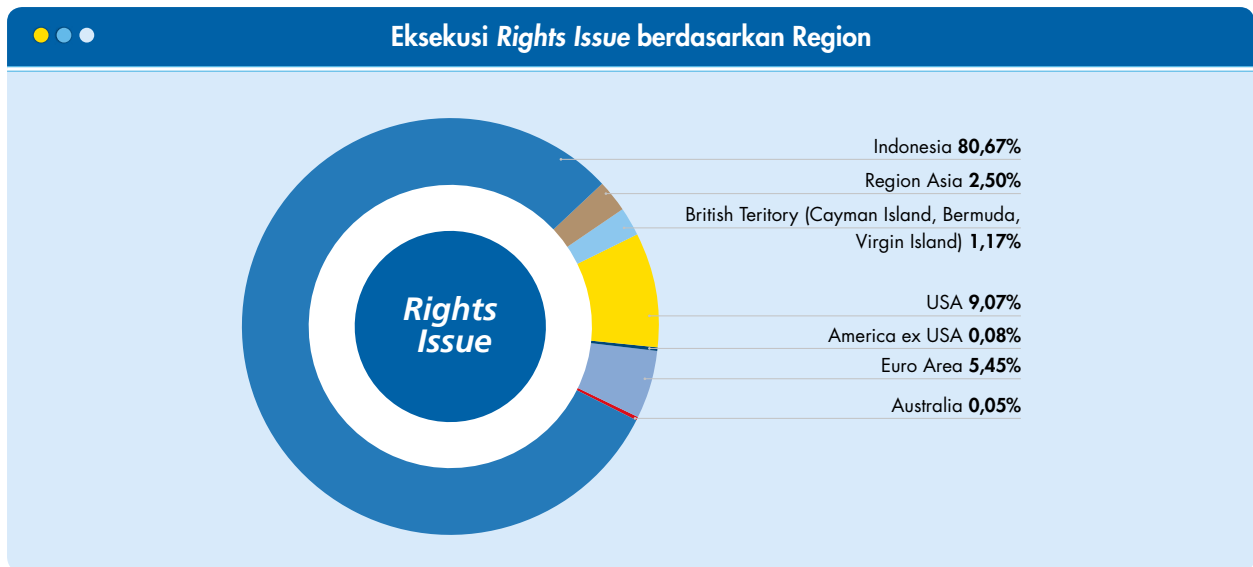
Informasi Obligasi

Tabel Obligasi Bank BTN

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan)
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	27 Maret 2013	10	Rp	2.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	8 Juli 2015	10	Rp	800.000
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C	13 Juli 2017	7	Rp	853.000
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	13 Juli 2017	10	Rp	1.386.000
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri C	28 Juni 2019	5	Rp	1.219.500
<i>Junior Global Bond</i> Bank BTN	23 Januari 2020	5	USD	300
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B	19 Agustus 2020	3	Rp	727.000
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C	19 Agustus 2020	5	Rp	196.000
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 seri A	24 Mei 2022	3	Rp	600.000
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 seri B	24 Mei 2022	5	Rp	400.000

Catatan:

- *Rating* Efek-efek dalam negeri yang diterbitkan di Tahun 2021 menggunakan *rating* dari Pefindo.
- *Rating* Efek-efek dalam negeri yang diterbitkan di Tahun 2022 menggunakan *rating* dari Fitch.
- *Rating Junior Global Bond* Bank BTN (USD) yang diterbitkan di Tahun 2020 menggunakan *rating* dari Moody's



Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
					2022	2021	
	100% dari jumlah pokok Obligasi	27 Maret 2023	7,90%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	^{id} AA+	Bank Mega
	100% dari jumlah pokok Obligasi	8 Juli 2025	10,50%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	^{id} AA+	Bank Mega
	100% dari jumlah pokok Obligasi	13 Juli 2024	8,70%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	^{id} AA+	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok Obligasi	13 Juli 2027	8,90%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	^{id} AA+	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok Obligasi	28 Juni 2024	9,00%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	^{id} AA+	Bank Mega
	100% dari jumlah pokok Obligasi	23 Januari 2025	4,20%	Belum Jatuh Tempo	Ba3 Moody's	Ba3 Moody's	Citicorp International Limited
	100% dari jumlah pokok Obligasi	19 Agustus 2023	7,80%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	^{id} AA+	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok Obligasi	19 Agustus 2025	8,40%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	^{id} AA+	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok Obligasi	24 Mei 2025	5,50%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	-	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok Obligasi	24 Mei 2027	6,00%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	-	Bank BJB

Informasi Sukuk

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan tidak menerbitkan sukuk atau surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dengan demikian Perseroan tidak memiliki informasi mengenai sukuk.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Sekuritisasi KPR

Tabel Sekuritisasi KPR Bank BTN

No.	Transaksi Sekuritisasi	Nominal Total (Rp)	Kelas	Nominal (Rp)	
1.	EBA-SP SMF-BTN 02	1.000.000.000.000	A1	400.000.000.000	
			A2	513.000.000.000	
			B	87.000.000.000	
2.	EBA-SP SMF-BTN 03	1.000.000.000.000	A1	200.000.000.000	
			A2	713.000.000.000	
			B	87.000.000.000	
3.	EBA-SP SMF-BTN 04	2.000.000.000.000	A1	700.000.000.000	
			A2	1.124.000.000.000	
			B	176.000.000.000	
4.	EBA-SP SMF-BTN 05	2.000.000.000.000	A1	574.000.000.000	
			A2	1.142.000.000.000	
			M	24.000.000.000	
			B	260.000.000.000	
5.	EBA-SP SMF-BTN 06	631.000.543.015	A	576.734.000.000	
			B	54.266.543.015	
6.	EBA-SP SMF-BTN 07	500.000.001.416	A	452.500.000.000	
			B	47.500.001.416	

Long Term Notes (LTN)

Tabel Long Term Notes (LTN) Bank BTN

Uraian	Tanggal Distribusi LTN secara Elektronik	Tenor (Bulan)	Mata Uang	
LTN BTN Tahun 2021 Tahap I	17 Desember 2021	186	IDR	
LTN BTN II Tahun 2022 Seri A	12 Juli 2022	171	IDR	
LTN BTN II Tahun 2022 Seri B	12 Juli 2022	177	IDR	
LTN BTN III THP I TAHUN 2022	14 Desember 2022	174	IDR	
LTN BTN III THP II TAHUN 2022	28 Desember 2022	171	IDR	

Keterangan: Surat Berharga LTN BTN tidak di-rating dan diterbitkan melalui penawaran terbatas kepada BP Tapera.

Informasi Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan tidak menerbitkan obligasi konversi. Dengan demikian Perseroan tidak memiliki informasi mengenai obligasi konversi.

	Tanggal Transaksi	Jatuh Tempo	Average Life	Kupon Kelas A	Peringkat Kelas A
	31 Oktober 2016	27 Juni 2027	7,05	A1 = 8,15%	idAAA
				A2 = 8,75%	
	28 April 2017	07 Juli 2029	7,78	A1 = 8,00%	idAAA
				A2 = 8,40%	
	28 Februari 2018	07 Mei 2029	7,03	A1 = 7,00%	idAAA
				A2 = 7,50%	
	27 November 2019	07 Mei 2032	9,09	A1 = 8,50%	idAAA
				A2 = 8,75%	
				M = 10,40%	idA
	30 Desember 2020	07 Juli 2032	6,08	6,50%	idAAA
	23 Desember 2022	07 Januari 2034	5,66	7,70%	idAAA
					idAAA

	Jumlah LTN (Rp Ribuan)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran
	10.185.851	17 Juni 2037	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo
	47.740.325	12 Oktober 2036	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo
	79.378.706	12 April 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo
	210.866.282	14 Juni 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo
	131.184.885	28 Maret 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo

PERINGKAT PERUSAHAAN 2022

Peringkat *Fitch* per Februari 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Peringkat
<i>Outlook</i>	Stable
Peringkat Nasional Jangka Panjang	AA(idn)
Peringkat Nasional Jangka Pendek	F1 +(idn)

LAPORAN ANALIS PERUSAHAAN

Tabel Laporan Analis Perusahaan Bank BTN

No.	Perusahaan	Analisis	Rekomendasi	Target Price (Rp)	Tanggal
1.	PT Aldiracita Sekuritas	Agus Pramono	<i>buy</i>	2.507	28 Oktober 2022
2.	PT Indo Premier Securities	Jovent Muliadi	<i>buy</i>	2.507	27 Oktober 2022
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	Eka Savitri	<i>buy</i>	2.410	03 Januari 2023
4.	PT Ciptadana Sekuritas	Erni Siahaan	<i>buy</i>	2.410	27 Oktober 2022
5.	Sucorinvest Central Gani	Edward Lewis	<i>buy</i>	2.304	15 September 2022
6.	MNC Securities	Tirta Citradi	<i>buy</i>	2.218	09 Desember 2022
7.	OCBC Sekuritas	Isfhan Helmy	<i>buy</i>	2.218	18 Juli 2022
8.	Yuanta Investment Consulting	Swie Cu Yap	<i>buy</i>	2.198	28 Oktober 2022
9.	RHB Research	Andrey Wijaya	<i>buy</i>	2.090	05 Januari 2023
10.	Credit Suisse	Hanel Topada	<i>outperform</i>	2.045	22 November 2022
11.	BCA Sekuritas	Johanes Prasetya	<i>buy</i>	2.025	16 September 2022
12.	Kiwoom Securities Co. Ltd	Team Coverage	<i>overweight</i>	1.957	02 Desember 2022
13.	Bahana Securities	Yusuf Winoto	<i>buy</i>	1.880	18 November 2022
14.	Morgan Stanley	Selvie Jusman	<i>Equalwt/In-Line</i>	1.794	26 Desember 2022
15.	Samuel Securities	Prasetya Gunadi	<i>buy</i>	1.736	03 Januari 2023
16.	Mandiri Sekuritas	Kresna Hutabarat	<i>buy</i>	1.736	15 Desember 2022
17.	CGS-CIMB	Handy Noverdanius	<i>add</i>	1.736	07 September 2022
18.	Maybank Investment Banking Group	Rahmi Marina	<i>hold</i>	1.736	25 April 2022
19.	DBS Bank	Rui Wen Lim	<i>hold</i>	1.687	05 Desember 2022
20.	Korea Investment & Securities Co Ltd.	Edward Tanuwijaya	<i>hold</i>	1.639	05 Oktober 2022

No.	Perusahaan	Analisis	Rekomendasi	Target Price (Rp)	Tanggal
21.	UOB KayHian (Equity)	Posmarito Pakpahan	<i>buy</i>	1.639	16 September 2022
22.	Trimegah Securities	Adi Prabowo	<i>neutral</i>	1.601	23 Desember 2022
23.	Sadif Investment Analytics	Team Coverage	<i>hold</i>	1.495	11 November 2022
24.	PT Verdhana Sekuritas Indonesia	Nicholas Santoso	<i>neutral</i>	1.494	19 Desember 2022
25.	CLSA	Sarina Lesmina	<i>reduce</i>	1.469	17 Oktober 2022
26.	BNI Securities	Yulinda Hartanto	<i>hold</i>	1.446	12 Desember 2022
27.	Macquarie	Jayden Vantarakis	<i>neutral</i>	1.253	03 Januari 2023



PERISTIWA PENTING



 11 Januari 2022

BTN Syariah Berikan Layanan Perbankan bagi Anggota Akademi Militer

Gubernur Akademi Militer Brigjen TNI Legowo WR Jatmiko bersama Direktur *Consumer & Commercial Lending* Bank BTN Hirwandi Gafar melakukan penandatanganan Perjanjian Nota Kesepahaman Penyediaan Layanan Perbankan antara Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN atau BTN Syariah dengan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dengan perjanjian kerja sama ini BTN Syariah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Anggota Akademi Militer melalui produk-produk dan program unggulan seperti pembiayaan perumahan, Tabungan, Tabungan Haji dan Umroh, kemudahan bertransaksi melalui *Mobile Banking*, *Cash Management System*, *SPP Online* serta produk-produk lainnya.



 21 Januari 2022

Rapat Kerja Bank BTN Tahun 2022

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN menandatangani Kontrak Manajemen Tahun 2022 pada Rapat Kerja Bank BTN tahun 2022. Rapat Kerja Bank BTN 2022 mengusung tema "*Bolstering Optimism, Conquering All Challenges*" membahas tentang strategi dan rencana bisnis perusahaan dalam menghadapi peluang dan tantangan yang menghadang tahun ini.



 21 Januari 2022

Penandatanganan Nota Kesepahaman Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kepada Segmen Pekerja Informal Berbasis Komunitas

Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Adi Setianto menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyusunan Kajian Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kepada Segmen Pekerja Informal Berbasis Komunitas di Jakarta. Tujuan Nota Kesepahaman tersebut adalah agar tersedianya kajian pembiayaan kepada segmen pekerja informal berbasis komunitas.



 27 Januari 2022

BTN Sosialisasikan Semangat Antikorupsi

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo bersama jajaran Direksi dan SEVP Bank BTN beserta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron sosialisasikan pencegahan korupsi dengan tema "Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Program Penyuluh Antikorupsi (PAK) bersama KPK, IAKPA dan Bank BTN". Dengan sosialisasi ini diharapkan para BTNers sebagai *Agent of Change* serta *role model* harus dapat menjadi teladan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai anti korupsi melalui peran para penyuluh antikorupsi yang profesional dan berintegritas.



30 Januari 2022

BTN Gelar Santri Developer di Cirebon

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo bersama Direktur Finance, Planning and Treasury Bank BTN Nofry Rony Poetra beserta Pengurus Pesantren Khas Kempek K.H. Mustofa Aqil Siroj, Wakil Ketua MPR RI Asrul Sani dan Ketua Umum NU Circle Gatot Prio Utomo meresmikan pembukaan BTN Santri Developer Kebangsaan di Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan *batch* kedua yang diselenggarakan oleh Bank BTN sebagai bentuk sinergi antara Bank BTN dan NU Circle dalam mencetak Santri Developer yang diharapkan dapat mengurangi angka *backlog* perumahan di Indonesia yang mencapai 11 juta unit.



3 Februari 2022

Peresmian Outlet Bank BTN Mabes Polri

Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo beserta Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono disaksikan Direktur Distribution and Retail Funding Bank BTN, Jasmin meresmikan pembukaan Kantor Cabang Pembantu di Mabes Polri. Peresmian Kantor Cabang Pembantu di Markas Besar Polri tersebut merupakan upaya Perseroan dalam meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada para anggota Kepolisian RI secara langsung. Kehadiran Bank BTN di lingkungan Polri merupakan wujud nyata komitmen Perseroan mendukung program kesejahteraan bagi para anggota polisi khususnya dalam penyediaan kebutuhan pembiayaan perumahan.



9 Februari 2022

Perayaan HUT BTN ke-72

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dan Komisaris Utama Bank BTN Chandra Hamzah bersama jajaran Direksi dan Komisaris memotong tumpeng dalam perayaan HUT BTN ke-72 di Jakarta. Dalam usia ke-72 tahun ini Perseroan berkomitmen tetap menjadi yang terdepan dalam pembiayaan perumahan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah impian. Dengan kinerja tahun 2021 yang cemerlang, pada perayaan HUT BTN ke-72 ini, Perseroan semakin percaya diri bisa mewujudkan mimpi menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025.



16 Februari 2022

BTN Gandeng Arsitag Kembangkan Layanan Digital

Direktur Operation, IT and Digital Banking Bank BTN Andi Nirwoto, Kepala Divisi Digital Channel BTN, Tan Jacky Chen, Direktur Utama Arsitag, Steven Gomedi menandatangani Perjanjian Kerja sama tentang Integrasi Layanan Sistem Informasi dengan Platform Arsitag pada Ekosistem Digital Bank BTN di Jakarta. Wujud nyata kemitraan dari Bank BTN dan Arsitag ini adalah tersedianya layanan baru dari BTN Properti/Digital Mortgage Ecosystem Bank BTN yaitu kemudahan bagi para pengguna aplikasi untuk mencari layanan renovasi dan desain properti yang dikelola Arsitag melalui platform digital Bank BTN. Perseroan akan terus berinovasi dan juga secara bersamaan terus meningkatkan jaringan *partnership*nya dengan merangkul platform properti lainnya untuk dapat maju bersama meningkatkan layanan di bidang properti.



22 Februari 2022

BTN Gelar *Virtual Property Expo 2022*

Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu beserta Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna dan Deputi Komisioner bidang Pengerahan Dana Tapera BP Tapera, Eko Ariantoro menghadiri pembukaan *BTN Anniversary Virtual Property Expo* di Jakarta. Pada Pameran yang digelar mulai tanggal 22 Februari hingga 31 Maret 2022 ini BTN menawarkan suku bunga promo 3,72% per tahun bagi masyarakat yang ingin membeli rumah impiannya dengan fasilitas KPR BTN. Pameran properti ini melibatkan 75 pengembang yang menawarkan 175 proyek properti terbaik dari Jabodetabek dan kota-kota besar di Indonesia yang dapat diakses di www.btnpropertiexpo.com.



23 Februari 2022

BTN Properti For Developer

Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Operation, IT & Digital Banking, Andi Nirwoto (kiri) dan Direktur Consumer & Commercial Lending, Hirwandi Gafar meresmikan peluncuran aplikasi *BTN Properti for Developer*. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi khusus bagi *developer* yang terkoneksi dengan aplikasi *BTN Properti* untuk memudahkan pengkinian data, manajemen stok serta aktivitas operasional lainnya terkait perbankan. Aplikasi ini melengkapi konsep *One Stop Housing Ecosystem* yang diusung BTN untuk mengembangkan Ekosistem Perumahan *Digital*.



18 Maret 2022

Bank BTN Jalin Kerja Sama Pemasaran Dengan *Developer*

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar menandatangani Perjanjian Kerja sama (PKS) antara *BTN-Agent Pemasaran* dan *Developer* yang dihadiri oleh DSM BTN KC Harapan Indah, Medrif, Direktur PT Saipul Putra Sakti, Agus Suhela, Direktur PT Delta Pinangmas, Endang Kawidjaja dan DBM *Business* BTN KC Ciputat, Asep Marlansyah. Perjanjian Kerja Sama Pemasaran tersebut dijalin Bank BTN bersama *Developer* yang melibatkan jasa *Sales Agent* bertujuan mendorong penjualan properti melalui fasilitas KPR Subsidi, mempermudah melakukan *monitoring* dan sosialisasi program promosi Bank BTN secara lebih cepat dan tepat sasaran.



30 Maret 2022

Peluncuran Tabungan BTN Bisnis

Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu, bersama Direktur Distribution & Funding, Jasmin dan Kepala Divisi Retail Funding & Services, Ferry Siphutar serta Kepala Kantor Wilayah II Jakarta-Banten, Dewi Fitrianingrum meluncurkan Tabungan BTN Bisnis. Tabungan BTN Bisnis merupakan Tabungan khusus bagi para pelaku usaha yang dilengkapi dengan fitur khusus seperti informasi detail transaksi, limitasi transfer dan penarikan yang lebih tinggi dibandingkan Tabungan reguler dan fitur lainnya yang mendukung pelaku usaha dalam bertransaksi. Tabungan BTN Bisnis ditargetkan dapat menarik 40.000 rekening baru pada tahun 2022 ini.



2 April 2022

BTN Siapkan Terobosan Hunian Milenial

Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Sadewa Soediro hadir pada acara "Pencanangan Penyediaan Pembiayaan & Hunian Milenial" di Depok, Jawa Barat. Pencanangan tersebut merupakan komitmen Perseroan untuk bersinergi bersama BUMN lain dalam sektor perumahan untuk memberikan fasilitas hunian yang layak dan kemudahan akses pembiayaan bagi generasi milenial dan Gen Z. Dalam mewujudkan pengembangan ekosistem perumahan, Perseroan telah menggandeng 60 BUMN untuk bersinergi menjawab kebutuhan hunian milenial.



25 April 2022

Sinergi BTN dengan BPJS Kesehatan

Direktur Distribution and Funding Bank BTN Jasmin dan Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno menandatangani perjanjian kerja sama Bank BTN dan BPJS Kesehatan. Bank BTN dan BPJS Kesehatan melakukan perjanjian kerja sama terkait jasa layanan perbankan dan penyaluran pembiayaan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan skema *Supply Infrastructure Financing* (SIF). Perseroan menargetkan penyaluran pembiayaan kepada 10.000 FKTP senilai sekitar Rp2 triliun.



25 April 2022

Apresiasi Untuk Pejuang Reformasi

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu dan Anggota DPR Adian Napitupulu saat acara penyerahan bantuan unit rumah kepada keluarga ahli waris pejuang reformasi di Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian BUMN menugaskan Bank BTN yang mempunyai *core business* sebagai *mortgage bank* atau bank perumahan di Indonesia untuk memberikan bantuan 4 (empat) unit rumah kepada ahli waris pejuang reformasi. Pemberian bantuan unit rumah ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah kepada keluarga pejuang reformasi.



18 Mei 2022

BTN Raih Fasilitas Pinjaman dari JICA, Citi Bank dan BCA

Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo, Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu dan *Director General, Private Sector Partnership and Finance Department of Japan International Cooperation Agency* (JICA), Shohei Hara, *Country Head of Treasury & Trade Solutions Citi Indonesia*, Yoanna Darwin dan Direktur Corporate Banking BCA, Rudy Susanto menandatangani Perjanjian Pinjaman Bank BTN dengan JICA, Citi Bank dan BCA. Bank BTN mendapat dukungan dari JICA, Citi Bank dan BCA senilai total USD 100 juta atau setara Rp1,4 triliun. Fasilitas pinjaman tersebut akan digunakan Bank BTN untuk mendukung pembiayaan rumah rakyat dan menyukseskan Program Sejuta Rumah.



20 Mei 2022

BTN Raih Top 100 Most Outstanding Woman 2022

Direktur Assets Management Bank BTN Elisabeth Novie Riswanti menerima penghargaan *Top 100 Most Outstanding Woman 2022*. Elisabeth Novie sebagai satu-satunya Direktur wanita di BTN dinilai sebagai sosok perempuan Indonesia yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi bagi industri perbankan nasional dan menginspirasi banyak kaum wanita untuk dapat menjadi pemimpin yang sukses dalam karir dan kehidupan.



23 Mei 2022

REI Apresiasi Bank BTN

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mendapatkan apresiasi berupa pin emas yang disematkan langsung oleh Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida pada HUT Ke50 Real Estate Indonesia pekan lalu di Yogyakarta. Bank BTN merupakan bank BUMN satu-satunya yang memberikan dukungan terbesar dalam pembangunan rumah rakyat yang dilakukan oleh REI selama ini. Sejak KPR pertama kali diluncurkan tahun 1976 di Indonesia, total rumah yang didukung BTN berjumlah sekitar 5.000.000 unit rumah dengan nilai kredit mencapai Rp365 Triliun dan 70% diantaranya merupakan produk rumah yang dibangun oleh REI.



27 Mei 2022

GCG BTN Jadi Yang Terbaik

Bank BTN menerima penghargaan Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar kategori *Best Responsibility of The Board* dari IICD di Jakarta. BTN meraih penghargaan dari IICD atas peran aktif dari Direksi dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*.



20 Juni 2022

Terbukti Memberikan Layanan Apik, Digital Banking BTN Raih Penghargaan

Head of Digital Channel Division Bank BTN Tan Jacky Chen, mewakili Direktur IT & Digital Bank BTN Andi Nirwoto, menerima penghargaan dalam gelaran *Merdeka Awards 2022*. Dalam ajang tersebut Bank BTN meraih penghargaan Kategori Program Inovatif Untuk Negeri berkat aplikasi yang dikembangkan perseroan seperti *BTN Properti for Developer*, *BTN Properti Mobile version*, *Digital Mortgage Ecosystem* BTN dan *Rumah Murah* BTN.



25 Juni 2022

Penuhi Rumah Rakyat, BTN Gelar Akad KPR 10.000 Rumah

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna didampingi Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar dan Deputi Komisioner BP Tapera Ariev Baginda Siregar secara simbolis menyerahkan kunci kepada debitur KPR FLPP yang mengikuti kegiatan Akad Massal KPR Subsidi yang dilakukan secara serentak di beberapa Kantor Cabang BTN yang dipusatkan penyelenggaraannya di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut Bank BTN menggelar Akad Massal KPR Subsidi 10.000 Unit Rumah yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan rumah rakyat sekaligus untuk menyukseskan Program Satu Juta Rumah.



28 Juni 2022

BTN Gelar Akad Massal Kredit Rumah Pekerja

Direktur Assets Management Bank BTN Elisabeth Novie Riswanti dan Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, Asep Rahmat Suwandha secara simbolis menyerahkan kunci kepada debitur saat Akad Massal Kredit Rumah Pekerja di Perumahan Rajeg Terrace Green Residence, Tangerang Banten. Bank BTN menyelenggarakan Akad Massal kredit Rumah pekerja MLT (Manfaat Layanan Tambahan) dalam program JHT (Jaminan Hari Tua) yang berkolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK dengan jumlah peserta lebih dari 100 orang pekerja. Fasilitas Pembiayaan Perumahan hasil kolaborasi Bank BTN dan BPJAMSOSTEK yang ditawarkan ke pekerja antara lain Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BPJAMSOSTEK dari Bank BTN.



23 Juli 2022

Akad Massal KPR Subsidi BTN

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar bersama Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR RI, Herry Trisaputra Zuna serta Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, BP Tapera Ariev Baginda Siregar secara simbolis menekan layar tanda dimulainya acara akad massal serentak KPR subsidi dalam rangkaian *One Stop Housing Solution* BTN di Maros, Sulawesi Selatan. Gelaran acara akad massal KPR Subsidi BTN yang diikuti oleh lebih dari 10.000 debitur di seluruh Indonesia merupakan strategi Perseroan untuk mempercepat penyaluran KPR Subsidi (FLPP) yang ditargetkan dapat menembus 200.000 unit pada tahun 2022.



29 Juli 2022

BTN Siapkan Klinik Konsultasi Rumah

Direktur Finance Bank BTN Nofry Rony Poetra bersama Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM) Selo dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Salahudin Rasyidi memperlihatkan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Perumahan di Yogyakarta. Bank BTN, FT UGM, dan Kementerian PUPR berkolaborasi mendukung inisiasi Klinik Rumah Swadaya (KRS) di kawasan perguruan tinggi UGM. Melalui klinik tersebut, masyarakat yang ingin membangun rumah secara mandiri bisa mendapatkan layanan informasi dan pendampingan secara gratis. Informasi dan pendampingan yang diberikan mulai dari desain rumah, kebutuhan biaya, perizinan, hingga proses pembangunan.



23 Agustus 2022

BTN Syariah Salurkan Tapera Syariah Perdana

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar bersama Asisten 2 Bidang Pembangunan Provinsi Aceh Ir. Mawardi, Dewan Penasehat Syariah BP Tapera K.H. Solahudin Ayub dan Komisioner BP Tapera, Adi Setianto serta Dewan Penasehat Syariah Bank BTN Mohammad Bagus Teguh saat acara peluncuran Tapera Syariah di Banda Aceh. Unit Usaha Syariah BTN atau BTN Syariah menjadi bank pertama yang menyalurkan Tapera Syariah, produk baru pembiayaan perumahan dari BP Tapera yang menggunakan skema syariah bagi para peserta Tapera. BTN Syariah telah mencatatkan penyaluran Tapera Syariah sebanyak 289 unit atau senilai Rp42,7 miliar per Juli 2022.



25 Agustus 2022

Berperan Besar Dalam Industri Perumahan Rakyat, BTN Raih Apresiasi Dalam Hapernas

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjabat tangan Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo disaksikan Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida usai menyatakan komitmen bersama saat Hari Perumahan Nasional (Hapernas) dengan tema "Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak dan Terjangkau untuk Semua" di Jakarta. Komitmen dan kontribusi Perseroan mendukung program perumahan nasional meraih apresiasi dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan diberikannya penghargaan atas keberhasilan BTN dalam menyalurkan KPR Subsidi terbanyak untuk semua segmen di Indonesia.



5 September 2022

BTN BSSN Maksimalkan Proteksi Transaksi Digital

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo didampingi Direktur IT & Digital Bank BTN Andi Nirwoto menunjukkan naskah Nota Kesepahaman bersama Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi Inspektur Jenderal Polisi Dono Indarto di Jakarta. Melalui kemitraan tersebut, Perseroan meningkatkan keamanan sistem dan transaksi digital Perseroan. Perseroan juga membuka peluang kemitraan dalam rangka penyediaan jasa layanan perbankan bagi BSSN dan karyawannya.



6 September 2022

BTN Ditunjuk Sebagai Bank Penyalur Bantuan Subsidi Upah

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah berbincang-bincang dengan Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor di sela-sela acara Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Penyaluran Bantuan berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh tahun Anggaran 2022 di Jakarta. Perseroan resmi menjadi salah satu bank penyalur Bantuan Subsidi Upah (BSU). Perseroan berkomitmen mendistribusikan BSU sesuai ketentuan Pemerintah kepada pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU.



28 September 2022

Dirut Bank BTN: Tokoh Pembiayaan Rumah Rakyat

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo meraih penghargaan sebagai Tokoh Pembiayaan Perumahan Rakyat dalam Rakyat Merdeka Award 2022 Untuk Indonesia Pulih & Bangkit. Bank BTN terus berperan aktif melakukan berbagai inovasi untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia dengan model pembiayaan yang dapat dipilih masyarakat secara konvensional maupun syariah. Pembiayaan hunian tersebut terbukti turut mendukung perekonomian nasional karena pembiayaan pada sektor perumahan terhubung dengan 174 subsektor lainnya.



28 September 2022

Presiden Jokowi Tinjau Layanan BTN Dalam Penyaluran BSU

Presiden Jokowi didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyaksikan peserta penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) melakukan penarikan dana melalui ATM pada Mobil Kas Keliling (MKK) Bank BTN di Ternate, Maluku Utara. Presiden Jokowi mengapresiasi pelayanan Bank BTN melalui MKK yang dinilai cepat dan dapat langsung diterima oleh para pekerja sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hingga saat ini Perseroan telah menyalurkan BSU kepada 467.856 pekerja senilai Rp280 miliar.



11 Oktober 2022

BTN Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar bersama anggota Komisi VI DPR Jon Erizal secara simbolis memberikan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa sarana kesehatan kepada 51 Posyandu dan Beasiswa Pendidikan untuk kader Posyandu di Pekanbaru, Riau. Bantuan TJSL ini merupakan bukti komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



12 Oktober 2022

Bank BTN Luncurkan KPR Rent To Own

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar dan Wakil Kepala Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division, Dedy Lesmana menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja sama (PKS) perihal Penyediaan Fasilitas KPR Rent To Own oleh Direktur Utama CicilSewa, Andrew Buntoro, dan Direktur Utama TapHomes, Victor Kwan usai meluncurkan KPR BTN Rent To Own di Jakarta. Program ini berangkat dari konsep pemilikan rumah yang menggunakan mekanisme sewa untuk membantu masyarakat memiliki rumah dalam jangka waktu tertentu untuk memiliki rumah dengan cara kredit di akhir masa sewa.



18 Oktober 2022

RUPSLB Setujui *Rights Issue* Bank BTN

RUPSLB Bank BTN menyetujui penerbitan saham baru melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham. Perseroan akan menggunakan dana hasil *Rights Issue* untuk meningkatkan kapasitas perseroan dalam penyaluran kredit untuk mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah.



27 Oktober 2022

Bank BTN Perusahaan Publik Terbaik di Bidang Perumahan

Bank BTN meraih penghargaan sebagai *The Best Performance of Mortgage* pada ajang CSA Awards. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro dan diterima oleh Hirwandi Gafar Direktur Consumer Bank BTN. Penghargaan tersebut diberikan karena Bank BTN dinilai memiliki reputasi, pertumbuhan kinerja yang baik di tengah pandemi serta kredibilitas yang solid dan terus melakukan inovasi sebagai perusahaan publik terbaik di bidang perumahan. Peran Bank BTN tak terelakkan dalam mendukung Pemerintah untuk pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.



8 November 2022

BTN Menjawab Mimpi Abang Gojek Punya Rumah

Direktur Distribution & Funding Bank BTN, Jasmin didampingi Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna secara simbolis memberikan kunci rumah kepada lima *Driver* Gojek saat acara Akad Perdana KPR untuk Gojek di Perumahan Semesta Jeruk Sawit Perumnas, Karanganyar, Jawa Tengah.

Bank BTN bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Gojek dan Perumnas mewujudkan mimpi para mitra *driver* Gojek memiliki rumah yang layak huni melalui KPR BP2BT. Mitra *driver* Gojek yang berpotensi untuk diberikan KPR Bersubsidi oleh Bank BTN mencapai sekitar 200.000 orang



26 November 2022

Direksi Bank BTN Terjun Langsung Bantu Korban Bencana Cianjur

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo bersama Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar meninjau langsung dan menyerahkan bantuan kepada korban bencana gempa Cianjur di Posko Satgas BUMN Jawa Barat, Cianjur. Sebagai bagian dari Kementerian BUMN, Bank BTN bersama Ikatan Istri Karyawan dan Pegawai BTN ikut terjun langsung ke lokasi Gempa Cianjur dan bergotong royong membantu korban bencana tersebut. Hingga saat ini, Bank BTN telah menyalurkan ratusan juta rupiah untuk pembangunan dapur umum, tenda dan perlengkapan ibadah, hingga bantuan kepada karyawan BTN yang ikut terdampak.



1 Desember 2022

BTN Sukseskan Kawasan Bakauheni Harbour City

Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo menandatangani prasasti peresmian Selasar Siger BTN di Kawasan Bakauheni Harbour City, Lampung. Menteri BUMN dan Dirut Bank BTN juga meninjau UMKM yang berada di Selasar Siger BTN. Perseroan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) membangun Selasar Siger BTN yang merupakan wadah budaya, kreasi dan wirasaha saling berinteraksi serta dapat dimanfaatkan sebagai pilihan area wisata bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, selain meresmikan Selasar Siger BTN, Perseroan juga melakukan akad KPR Subsidi secara serentak.



10 Desember 2022

HUT KPR KE- 46, Bank BTN Perluas Digital Mortgage Ecosystem

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Herry Trisaputra Zuna serta Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, M. Zainal Fatah, menyaksikan Mantan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) periode 1988-1994 Asmuadji, memberikan potongan tumpeng pertama kepada Wakil Komisaris Utama Bank BTN, Iqbal Latanro bersama jajaran Direksi dan Komisaris Bank BTN pada acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sebagai bank pertama yang menyalurkan KPR pada 10 Desember 1976, Bank BTN telah menyalurkan kredit tersebut senilai hampir Rp400 triliun untuk lebih dari 5 juta masyarakat Indonesia. Menghadapi era digitalisasi, Bank BTN terus berinovasi memperluas *digital mortgage ecosystem* dengan terus menambah fitur pada aplikasi andalannya seperti *Smart Residence*, BTN Properti dan BTN Properti for Developer.



27 Desember 2022

Sah Jadi Bank Kustodian, Bank BTN Jalin Kerja Sama Dengan KSEI

Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu, dan Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo menunjukkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pemegang rekening KSEI. Bank BTN memperluas bisnis di jasa Kustodian dengan menargetkan dana kelolaan dari nasabah institusi yang menggunakan jasa Kustodian sekitar Rp12 triliun pada tahun pertama. Dengan menyandang status sebagai Kustodian akan melengkapi layanan BTN bagi nasabah yang akan melakukan investasi di pasar modal dan menunjukkan komitmen Bank BTN dalam mengembangkan pasar modal Indonesia.



28 Desember 2022

Bank BTN Terdepan Dalam Penyaluran KPR FLPP dan Pembiayaan TAPERA Serta Bank dengan Pertumbuhan Tertinggi Secara Year on Year (YoY)

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar menunjukkan naskah perjanjian kerja sama penyaluran KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera didampingi Komisiner BP Tapera Adi Setianto, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dan Deputi Komisiner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Dana Arieiv Baginda Siregar. Bank BTN tetap menjadi yang terdepan dan memegang peranan dalam penyaluran KPR FLPP dan Tapera dengan penghargaan dari BP Tapera sebagai bank terbaik dalam penyaluran KPR FLPP dan bank dengan pertumbuhan tertinggi secara *year on year* (YoY).

Laporan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah





Bank  **BTN**
Sahabat Keluarga Indonesia



LAPORAN DIREKSI

Haru Koesmahargyo
Direktur Utama



Pemegang saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridhonya Perseroan mampu menunjukkan hasil yang cukup baik di tengah tantangan perekonomian yang masih melambat. Di tengah tantangan tersebut, sesuai dengan spirit Perseroan dan Bakti Perseroan untuk Rumah Indonesia, Perseroan tetap konsisten dalam mendukung Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui sektor perumahan.

Sebagai wujud nyata Perseroan menjadi mitra Pemerintah dalam mendukung perekonomian khususnya sebagai *agent of development* selama 72 tahun melayani masyarakat Indonesia, Perseroan telah mengucurkan kredit sekitar Rp775 triliun yang mengalir kepada lebih dari 5,78 juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen. Sedangkan untuk pembiayaan perumahan, Perseroan telah menyalurkan KPR sekitar 5,1 juta unit senilai Rp391,621 triliun. Sebanyak 3,9 juta unit merupakan KPR subsidi. Selanjutnya, Perseroan akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik hingga menciptakan ekosistem perumahan yang terintegrasi dengan *digital mortgage ecosystem*.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan pengelolaan dan kinerja Perseroan selama tahun buku 2022 yang meliputi hasil kinerja Perseroan, analisis prospek perusahaan, perkembangan penerapan tata kelola Perseroan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

Analisis Atas Kinerja Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan, Perseroan senantiasa berkomitmen menjadi Bank yang fokus dalam melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui berbagai produk dan jasa baik konvensional maupun syariah. Berbagai produk dan jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

Produk Konvensional

Produk konvensional terdiri dari Produk Konsumer dan Produk Komersial. Produk konsumer terbagi menjadi Produk Kredit Konsumer, Produk Simpanan Konsumer dan Produk *Wealth Management*. Produk Kredit Konsumer meliputi Kredit Perumahan dan Kredit Non Perumahan. Produk Simpanan Konsumer meliputi Tabungan Konsumer, Deposito BTN Ritel dan Giro Perorangan. Sedangkan Produk *Wealth Management* meliputi *Bancassurance*, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara Pasar Sekunder.

Produk Komersial terbagi menjadi Produk Kredit Komersial, Produk Simpanan Komersial serta Produk Korporasi. Produk Kredit Komersial meliputi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Produk Simpanan Komersial meliputi, Deposito Berjangka Lembaga dan Giro Lembaga. Sedangkan Produk Korporasi meliputi, Kredit Modal Kerja Kontraktor, Kredit Sindikasi, *Term Loan Facility*, *Corporate Line Facility*, *Treasury Line Facility*, *Supply Chain Financing* (SCF) serta *Trust Receipt*.

Produk Syariah

Produk Syariah terdiri dari Produk Pembiayaan Syariah dan Produk Simpanan Syariah. Produk Pembiayaan Syariah meliputi, Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial. Sedangkan Produk Simpanan Syariah meliputi, Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah.

Jasa Konvensional

Pada sisi Konvensional, Perseroan memberikan berbagai jasa seperti, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Cash Management*, *Virtual Account*, Kartu Debit Visa/GPN & *Debit Online*, *Internet Banking*, Portal BTN Properti, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, ATM Non Tunai, *Electronic Channel ATM*, Layanan BTN Prioritas, *Branchless Banking*, *BTN Smart Residence*, *Online Onboarding Open Account*, *SMS Notifikasi*, PLUS by BTN Prioritas serta Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya.

Jasa Syariah

Pada sisi Syariah, Perseroan memberikan berbagai jasa seperti, *Safe Deposit Box* BTN iB, Garansi Bank BTN iB, Program Pengembangan Operasional BTN iB, *SPP Online* BTN iB, Penerimaan Biaya Perjalanan Haji, Kartu Debit Visa/GPN Syariah & *Debit Online*, *Payroll* BTN iB, Kiriman Uang, *BTN Cash Management*, dan *Payment Point* BTN iB.

Untuk mengoptimalkan produk dan jasa kepada nasabah, Perseroan telah memiliki jaringan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki jaringan Perbankan Konvensional sebanyak 6 (enam) Kantor Wilayah, 80 Kantor Cabang, 537 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 (tiga) Kantor Fungsional dan 2 (dua) Kantor Layanan Setara KCP (KLKCP). Sedangkan untuk jaringan Perbankan Syariah, Perseroan memiliki, 30 Kantor Cabang Syariah, 69 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 5 (lima) Kantor Kas Syariah dan 6 (enam) Payment Point Syariah.

Perseroan juga telah memiliki struktur organisasi yang efektif dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Pelaksanaan jalannya kepengurusan Perseroan terlihat pada struktur organisasi Perseroan yang terbagi menjadi 7 (tujuh) Direktorat di bawah Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama yaitu, Direktorat Consumer, Direktorat Distribution & Funding, Direktorat Assets Management, Direktorat IT & Digital, Direktorat Finance, Direktorat Risk Management serta Direktorat *Human Capital*, Compliance & Legal. Tiap - tiap Direktorat terbagi menjadi beberapa Divisi yang mendukung pelaksanaan tugas dari setiap Direksi. Direktur Utama terdiri dari Divisi Internal Audit dan Divisi Corporate Secretary. Wakil Direktur Utama terdiri dari Divisi Marketing Communication. Direktorat Consumer merupakan Direktorat yang terdiri dari Divisi Commercial Banking, Divisi SME Banking, Divisi Non Subsidized Mortgage & Personal Loan, Divisi Subsidized Mortgage Lending, dan Divisi Sharia Business. Direktorat Distribution & Funding merupakan Direktorat yang terdiri dari Divisi Wealth Management, Divisi Retail Funding & Services, Divisi Institutional Funding, Divisi Service Quality & Distribution serta Regional Offices. Direktorat Assets Management merupakan Direktorat yang terdiri dari Divisi Commercial Asset Management 1, Divisi Commercial Asset Management 2, Divisi Consumer Collection, Recovery & Asset Sales serta Divisi Procurement & Fixed Asset Management. Direktorat IT & Digital merupakan Direktorat yang terdiri dari Divisi Digital Channel, Divisi IT Strategic Planning & Development, Divisi IT Operations,

Divisi Data Management & Analytics serta Divisi IT Security. Direktorat Finance merupakan Direktorat yang terdiri dari Divisi Treasury, Divisi Corporate Strategy & Planning, Divisi Finance & Accounting serta Divisi Investor Relations & Research. Direktorat Risk Management merupakan Direktorat yang terdiri dari Divisi Retail Credit Risk, Divisi Commercial Credit Risk, Divisi Enterprise Risk Management serta Divisi Transformation & Partnership Management. Direktorat Human Capital, Compliance & Legal merupakan Direktorat yang terdiri dari Divisi Human Capital Strategy, Divisi Human Capital Management serta Divisi Learning Management.

Selain itu, terdapat beberapa Direktorat yang dipimpin oleh Senior Executive Vice President antara lain Direktorat Wholesale Banking, Direktorat Operations serta Direktorat Compliance & Legal. Direktorat Wholesale Banking merupakan Direktorat yang terdiri dari Divisi Corporate Syndication & Transaction Banking, Divisi Financial Institution & Capital Market serta Divisi Wholesale Transaction. Kemudian Direktorat Operations merupakan Direktorat yang terdiri dari Divisi Credit Operation, Divisi Operation & Business Support serta Divisi Customer Care. Sedangkan Direktorat Compliance & Legal terdiri atas Divisi Legal, Divisi Compliance & Governance serta Divisi Policy & Procedure.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki sebanyak 11.859 pegawai. Profil pendidikan pegawai Perseroan meliputi, sebanyak 507 Pegawai berjenjang pendidikan Pasca Sarjana, 9.507 Pegawai berjenjang pendidikan Sarjana, 1.399 Pegawai berjenjang pendidikan Sarjana Muda serta 446 Pegawai berjenjang pendidikan SLTA. Perseroan senantiasa melakukan program pengembangan SDM untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan Pegawai secara berkesinambungan dengan metode pendidikan, pelatihan, penugasan khusus maupun program mutasi dan promosi. Tahun 2022, Perseroan telah mengalokasikan biaya pengembangan kompetensi bagi pegawai yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 72% dibandingkan tahun 2021. Perseroan menggunakan metode *delivery* pendidikan dan pelatihan baik secara *classical onsite* maupun *virtual classroom* dan *self learning* sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menjadi efisien tanpa mengurangi efektivitas dari masing-masing program pendidikan dan pelatihan untuk terus meningkatkan nilai tambah bagi para pegawai salah satunya melalui pemenuhan kompetensi yang dipersyaratkan.

Dalam mendukung pengembangan transformasi bisnis dan digitalisasi, Perseroan juga telah memiliki teknologi informasi yang sangat berkualitas dan selalu melakukan inovasi teknologi informasi untuk mendukung bisnis Perseroan. Beberapa inovasi teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain:

- a. *Cloud Journey* yang antara lain berisi *guiding principle* dan tata kelola penggunaan *cloud* serta telah memulai penggunaan *cloud* infrastruktur untuk mendukung implementasi inisiatif TI sehingga dapat mempercepat proses penyediaan infrastruktur.

- b. Penggunaan konsep dasar dari *Metaverse* dalam virtual expo. Salah satu *case* yang dilakukan adalah Perseroan membuat *Property Expo* di dunia maya yang digunakan untuk berinteraksi antara pengguna dengan para *developer*. Pengunjung dapat membuat avatar sendiri dan seolah-olah berjalan sebagai avatar tersebut ke *booth developer*.
- c. Penambahan *use case* penggunaan *robotic process automation* (RPA) untuk otomatisasi beberapa proses operasional seperti pengumpulan data maupun penginputan data. Dengan penggunaan RPA untuk mendukung proses operasional Perseroan, waktu yang dibutuhkan untuk proses operasional tersebut menjadi lebih singkat, meningkatkan produktivitas dan keakuratan proses.
- d. Perseroan mengembangkan aplikasi super apps ekosistem *digital* yang menyatukan *transactional platform*, *service platform* dan *social platform* dalam satu aplikasi. Hal ini, sangat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dengan menggunakan super apps yang dikembangkan melalui aplikasi *BTN Mobile* Perseroan.

Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki Perseroan, Direksi telah melakukan pengelolaan secara efektif terhadap sumber daya tersebut. Perseroan telah menghasilkan kinerja yang baik di tahun 2022 di tengah kondisi perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih. Direksi senantiasa mempertimbangkan kondisi perekonomian baik global, nasional maupun industri perbankan dalam mengembangkan strategi bisnis, sehingga mampu mengatasi kendala-kendala khususnya yang terkait dengan dampak kondisi perekonomian terhadap bisnis Perseroan. Oleh karena itu, dalam menyampaikan analisis kinerja Perseroan, izinkan kami menyampaikan telaah perekonomian baik di tingkat global, nasional maupun pada industri perbankan.

Tinjauan Makro Ekonomi

Hingga akhir tahun 2022, kondisi perekonomian global masih melambat disertai dengan meningkatnya tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan mayoritas Bank Sentral serta ketidakpastian pasar keuangan global. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh masih berlanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas dan gangguan rantai pasok. Sementara itu, tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi, sehingga Bank Sentral di berbagai negara meresponnya dengan melakukan pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Pada tahun 2022, The Fed mulai menaikkan suku bunga acuannya dari 0,25% menjadi 4,50% atau mencapai 425 bps hanya dalam waktu 10 bulan. Kenaikan *Fed Funds Rate* yang agresif ini diprakirakan hingga awal 2023 dengan siklus yang lebih panjang mendorong tetap kuatnya mata uang dolar AS sehingga memberikan tekanan pelemahan nilai tukar di berbagai negara. Tekanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin meningkat sejalan dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Aliran keluar investasi portofolio asing menambah tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun demikian, Perekonomian nasional tetap melanjutkan perbaikannya pada tahun 2022, seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat. Kinerja perekonomian nasional pada tahun 2022 relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,02% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan menguatnya pemulihan ekonomi domestik seiring meningkatnya kembali mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi dan juga tetap terjaganya kinerja ekspor. Dari sisi lapangan usaha, sektor usaha seperti transportasi dan pergudangan dan akomodasi makan/minum kembali mencatatkan pertumbuhan positif.

Selaras dengan perekonomian nasional, perkembangan industri perbankan di Indonesia juga mengalami perbaikan di sepanjang tahun 2022. Otoritas Jasa Keuangan mencatat Kinerja sektor jasa keuangan khususnya perbankan pada 2022 masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang tersedia serta risiko kredit yang terjaga. Fungsi intermediasi perbankan pada bulan Desember 2022 kembali mencatatkan tren peningkatan dengan kredit tumbuh sebesar 11,35% yoy. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh jenis kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 12,17% yoy dan pertumbuhan kredit debitur korporasi sebesar 15,44% yoy. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Desember 2022 tercatat tumbuh sebesar 9,01% yoy, dengan laju pertumbuhan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan giro sebesar 18,78% yoy dan tabungan sebesar 7,52% yoy. Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL perbankan sebesar 2,44%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi COVID-19 kembali mencatatkan penurunan menjadi sebesar Rp469 triliun, dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah.

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri serta memperhatikan tantangan yang ada, maka Perseroan menetapkan target pasar untuk kredit dan pembiayaan yang diberikan sebesar Rp301,01 triliun dan sebesar Rp322,77 triliun untuk dana pihak ketiga. Berdasarkan target pasar tersebut, Perseroan menargetkan Pendapatan Bunga sebesar Rp24,97 triliun di tahun 2022. Target tersebut berhasil dicapai oleh Perseroan.

Strategi dan Kebijakan

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan dalam mengoptimalkan peluang, Perseroan berupaya meningkatkan kontribusinya pada sektor perumahan dan mendukung *roadmap* transformasi Kementerian BUMN dengan menetapkan visi *Menjadi Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada Tahun 2025 dengan aspirasi bisnis Perseroan yang ingin dicapai di tahun 2025. Pada tahun 2022, telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pada bidang perkreditan, telah dikembangkan strategi pengembangan bisnis kredit jangka pendek dan menengah yang meliputi pengembangan program kepemilikan hunian yang terjangkau untuk mendukung program perumahan nasional, pengembangan pangsa pasar KPR di segmen *emerging affluent* dan *affluent* dan memperluas *value chain real estate* yang menysasar UMKM dan Kontraktor.

2. Pada bidang kualitas kredit dan pembiayaan, inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah meliputi perbaikan proses bisnis kredit, meningkatkan kualitas dan efektivitas *collection* dan mempercepat penyelesaian kredit macet secara *bulk* (Strategi Aset Sales).
3. Pada bidang pendanaan, inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah meliputi pengembangan kapabilitas sebagai bank transaksional dan *channel* transaksi serta menjadi bank operasional pengelolaan dana institusi.
4. Pada bidang pendapatan operasional lainnya dan pembentukan anak perusahaan, untuk meningkatkan profitabilitas, rencana bisnis Perseroan pada tiga tahun ke depan juga difokuskan untuk meningkatkan Pendapatan Operasional Lainnya (POL) yang sebagian besar bersumber dari *fee based income*, terutama pada sumber-sumber baru yang berbasis transaksi dan layanan. Inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah meliputi pengembangan *fee* dari transaksi *e-channel*, peningkatan *fee* transaksi *treasury* dan pengembangan sumber *fee based income* (FBI) baru serta mengembangkan strategi di segmen *retail transaction*.
5. Pada rencana pendirian anak perusahaan, untuk memperkuat bisnis inti bank dan inisiatif dalam mendukung sinergi BUMN, pada jangka menengah pengembangan bisnis juga dilakukan dengan rencana pendirian anak perusahaan atau strategi anorganik melalui rencana penyertaan modal di bidang manajemen investasi, perusahaan modal ventura, asuransi, pendirian anak perusahaan multifinance dan kerja sama untuk mengembangkan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS).
6. Pada bidang bisnis syariah, perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini tidak terlepas dari pangsa pasar yang masih aktif dan terus berkembang. Sejalan dengan potensi perbankan syariah nasional, Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan juga mengalami pertumbuhan bisnis yang searah. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja yang terus tumbuh dan kemampuan UUS Perseroan yang tetap tumbuh di tengah tantangan pandemi.
7. Pada bidang permodalan, untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dibutuhkan dukungan permodalan yang kuat dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum bank sesuai Basel III. Strategi penguatan modal yang akan dilakukan Perseroan meliputi, meningkatkan profitabilitas bank, penerbitan Obligasi/Pinjaman subordinasi dan persiapan pelaksanaan *rights issue* di tahun 2022, apabila Pemegang Saham menyetujui (pelaksanaan *rights issue* membutuhkan dukungan dari Pemerintah sebagai Pemegang Saham Dwiwarna dan mayoritas).
8. Pada bidang *human capital*, dalam rangka mewujudkan *Home of Indonesia's Best Talent*, program kerja pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada jangka pendek dan menengah diselenggarakan dengan landasan *Corporate Plan* Tahun 2021-2025 yaitu, menyusun transformasi *human capital* (HC *Strategic Plan*) untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas pegawai, implementasi struktur *Strategic Business Unit* (SBU) untuk meningkatkan produktivitas unit kerja, meningkatkan produktivitas pegawai melalui implementasi kebijakan insentif, *reward* dan internalisasi *Employee Value Proposition* (EVP), melakukan program *learning* yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapabilitas pegawai di bidang *middle office* (kredit/lending unit), RM, dan pegawai *frontline* di seluruh outlet Bank, meningkatkan kapabilitas organisasi unit Syariah terutama pada bidang *legal*, *financial* dan pengembangan DPS serta menjalankan budaya kerja yang meningkatkan pencapaian sales dengan mendorong perilaku inovatif, pengambilan risiko yang *prudent* dan integritas yang direfleksikan dengan pertumbuhan bisnis, penurunan *fraud* dan penurunan NPL.
9. Pada bidang infrastruktur IT, untuk mendukung inisiatif pengembangan layanan *digital banking* dan *mortgage ecosystem* diperlukan penguatan *Information Technology* (IT) yang memadai. Pilar strategis transformasi, inisiatif pengembangan IT meliputi:
 - a. Pengembangan strategi *digital banking* dengan perencanaan dan pembaruan melalui pengembangan *digital channel* seperti *new mobile banking*, *internet banking* bisnis, *online onboarding*.
 - b. Pengembangan ekosistem *digital* dan *partnership* seperti *end to end housing ecosystem*, *payment* dan *peer to peer*.
 - c. Pengembangan *API Management* dan *Sandboxing* untuk mendukung *digital banking* dan *upgrade middleware* untuk meningkatkan *availability* dan *reliability* sistem.
 - d. Otomatisasi proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan.
 - e. Pengembangan dan optimalisasi *loan architecture* secara keseluruhan yang meliputi antara lain *origination system*, *decision engine*, *collection system*, *monitoring system* serta integrasi dengan pihak mitra.
 - f. Pengembangan *wholesale banking channel* untuk mendukung transaksi *wholesale* antara lain bank kustodian, *trade finance*, *e-bank* garansi dan *supply chain financing*.
 - g. Pengembangan *management tools* untuk aktivitas *marketing* dan *sales* dengan membentuk *digital marketing* dan *sales tools*.
 - h. Pembaruan secara menyeluruh *wealth management system* dan *priority banking system*.
 - i. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas data sebagai *single source of truth*, *enhancement data warehouse*.
 - j. Peningkatan *operational supporting tools*, untuk menambah kapasitas pencegahan risiko dan memaksimalkan pemetaan risiko (*risk profiling*) unit kerja dengan menggunakan aplikasi *operational risk tools*.
 - k. Efisiensi proses *back-end* (*back office*) melalui implementasi *end to end procurement process*, *roll out grab for business*, *enhancement reconciliation system*, pengembangan *human resources system* dan sentralisasi proses di *back office*.
 - l. Peningkatan *merchant enabler system* untuk kerja sama dengan pihak ketiga seperti fitur EDC dan *e-commerce*.

- m. *Reengineering* proses bisnis pembiayaan yang lebih mengarah pada model sentralisasi melalui digitalisasi sistem *back office* untuk mengotomatisasi proses dan menghubungkan ke berbagai *database*.
- n. Dukungan inisiatif pengembangan sistem pembayaran (Bl-Fast) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel yang akan memfasilitasi pembayaran menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara *real time*, aman, efisien, dan tersedia 24 jam dalam 7 hari (24/7).
- o. Pengembangan dan optimasi sistem syariah untuk mendukung bisnis syariah dengan *upgrading core banking system* syariah, pembaharuan *mobile banking* syariah serta *upgrading* beberapa *server* sistem demi mendukung operasional bank yang lebih baik dan andal.
- p. Pengembangan *treasury* dan *settlement system* untuk mendukung bisnis *treasury*.
- q. Pengembangan sistem untuk mendukung layanan nasabah khususnya terkait complain *monitoring* dan *enhancement* aplikasi *contact center*.
- r. Melakukan *assessment* terkait *e-channel cyber security* untuk meningkatkan *security maturity level* dalam mempersiapkan organisasi IT *security* yang handal berbasis implementasi CISO serta peningkatan kapabilitas *security* untuk menerapkan *gap analysis cyber security* berbasis *framework* NIST yang disesuaikan dengan model bisnis Bank BTN.
- s. Melakukan *assessment* untuk meningkatkan *security maturity level* dalam mempersiapkan organisasi IT *security* yang handal berbasis implementasi CISO serta peningkatan kapabilitas *security*.
- t. Penyesuaian dan pengkinian kebijakan TI terhadap kebijakan dan prosedur regulator dan internal bank, seperti penambahan prosedur pengembangan *rapid/agile*.
- u. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tim IT Perseroan melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- v. Pengembangan strategi *digital banking*.
- w. Pengembangan terkait perluasan *monitoring* pada jaringan komunikasi melalui *traffic flow and packet analyzer* yang dapat melakukan *root-cause analysis* atas suatu *incident* secara *real time* untuk mendukung aktivitas *preventive* dalam pencegahan terjadinya *incident*.
- x. Pengembangan terkait perluasan *monitoring* pada jaringan komunikasi untuk mendukung aktivitas *preventive* dalam pencegahan terjadinya *incident* serta *monitoring* pada aplikasi dengan harapan proses *troubleshoot* dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
10. Pada bidang *good corporate governance* (GCG), *risk management* dan *compliance*, Perseroan melakukan penguatan struktur organisasi dan proses bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG secara konsisten melalui penguatan empat pilar utama implementasi GCG yaitu: (i) *Commitment on Governance*; (ii) *Governance Structure*; (iii) *Governance Process* dan (iv) *Governance Outcome*.
11. Pada peningkatan *Risk Management*, strategi dan inisiatif terkait Perseroan antara lain pengembangan kapabilitas *digital*, IT dan *Cyber Risk*, pengembangan pada *Credit Scoring System* yang didasarkan pada model-model analitik guna mendukung keputusan-keputusan dalam *underwriting* dan *monitoring* serta membangun *Early Warning System* (EWS) untuk segmen SME, *Commercial* dan *Corporate*.
12. Pada bidang pengembangan jaringan (*delivery channel*), dilakukan melalui pengembangan kuantitas dan ragam *channel* dengan strategi perluasan jaringan yang difokuskan pada empat inisiatif utama, yaitu strategi regionalisasi, ekspansi cabang, *agent banking* dan *digital channel*.

Direksi memimpin langsung perumusan strategi Perseroan melalui berbagai rapat antara Direksi dengan manajemen kunci. Strategi tertuang dalam *Corporate Plan* Tahun 2021-2025 yang pelaksanaannya senantiasa dilakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan melalui berbagai evaluasi laporan internal serta rapat-rapat bersama para kepala Divisi.

Direksi juga telah menetapkan suku bunga dasar kredit dan tabungan berdasarkan berbagai analisis sehingga mampu memenuhi target penyaluran kredit dan target DPK di tahun 2022. Suku bunga dasar kredit dan tabungan yang telah ditetapkan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Uraian	SDBK Berdasarkan Segmen Bisnis				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2022	8,00%	8,25%	n/a	7,25%	8,75%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2021	8,00%	8,25%	n/a	7,25%	8,75%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2020	9,90%	9,90%	n/a	9,95%	11,25%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2019	11,00%	11,25%	n/a	10,75%	11,50%

Tabel suku bunga tabungan, giro dan deposito Rupiah sesuai dengan jenisnya adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga Ritel	Suku Bunga Lembaga
Tabungan Investa	Sampai dengan Rp1 juta	0,00%	0,00%
	> Rp1 juta - Rp100 juta	1,00%	1,00%
	> Rp100 juta - Rp1 miliar	2,40%	2,25%
	> Rp1 miliar - Rp2 miliar	3,25%	3,15%
	> Rp2 miliar - Rp5 miliar	3,50%	3,30%
	> Rp5 miliar - Rp10 miliar	4,25%	3,55%
	> Rp10 miliar	4,25%	4,00%

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Batara	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - ≤ Rp50 juta	0,10%
	> Rp50 juta - ≤ Rp500 juta	0,10%
	> Rp500 juta - ≤ Rp1 miliar	0,50%
	> Rp1 miliar - ≤ Rp2 miliar	1,00%
	> Rp2 miliar	1,00%
	Tabungan BTN Bisnis	< Rp1 juta
≥ Rp1 juta - < Rp50 juta		0,50%
≥ Rp50 juta - < Rp500 juta		1,00%
≥ Rp500 juta - < Rp1 miliar		1,25%
≥ Rp1 miliar		1,75%
Tabungan BTN Prima	≤ Rp5 juta	0,00%
	> Rp5 juta - Rp10 juta	0,00%
	> Rp10 juta - Rp100 juta	0,25%
	> Rp100 juta - Rp500 juta	0,50%
	> Rp500 juta - Rp2 miliar	0,75%
	> Rp2 miliar - Rp5 miliar	1,00%
	> Rp5 miliar	1,25%
Tabungan BTN Junior	≤ Rp50 ribu	0,00%
	> Rp50 ribu	0,50%
TabunganKu	Rp0 - Rp500 ribu	0,00%
	> Rp500 ribu - Rp1 juta	0,10%
	> Rp1 juta	0,25%
Tabungan Simuda Rumahku	Sampai dengan Rp10 juta	1,00%
	> Rp10 juta - Rp25 juta	1,15%
	> Rp25 juta - Rp50 juta	1,25%
	> Rp50 juta - Rp100 juta	1,35%
	> Rp100 juta - Rp250 juta	1,50%
	> Rp250 juta	2,00%

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Siap!	< Rp1 juta - Rp10 juta	1,00%
	> Rp10 juta - Rp25 juta	1,15%
	> Rp25 juta - Rp50 juta	1,25%
	> Rp50 juta - Rp100 juta	1,35%
	> Rp100 juta - Rp250 juta	1,50%
	> Rp250 juta	2,00%
Tabungan BTN e'BataraPos	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - Rp50 juta	0,10%
	> Rp50 juta - Rp500 juta	0,10%
	> Rp500 juta - Rp1 miliar	0,50%
	> Rp1 miliar	1,00%
Tabanas Batara Kantor Pos		0,00%

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Giro Rupiah	≤ Rp10 juta	0,00%
	> Rp10 juta - Rp100 juta	0,25%
	> Rp100 juta - Rp500 juta	0,75%
	> Rp500 juta - Rp1 miliar	1,00%
	> Rp1 miliar	1,25%

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)						
		1	2	3	4	6	12	24
Deposito Rupiah	< Rp100 juta	2,35%	2,50%	2,75%	2,75%	3,00%	3,00%	3,00%
	≥ Rp100 juta - < Rp500 juta	2,40%	2,50%	3,00%	3,00%	3,15%	3,15%	3,15%
	≥ Rp500 juta - ≤ Rp2 miliar	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%	3,15%	3,15%	3,15%
	> Rp2 miliar	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%	3,15%	3,15%	3,15%

Sedangkan, tabel suku bunga tabungan, giro dan deposito Valas sesuai dengan jenisnya adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	USD		SGD	AUD / CNY		JPY		
	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Felas	< USD100.000	0,15%	All tiering	0,10%	All tiering	0,05%	All tiering	0,00%

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)					
		1	3	4	6	12	24
Deposito USD	Seluruh strata					0,20%	
Deposito SGD	Seluruh strata					0,10%	
Deposito AUD/CNY	Seluruh strata					0,10%	
Deposito JPY	Seluruh strata					0,00%	

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Giro Valas (USD)	Sampai dengan USD100.000	0,00%
	> USD100.000	0,10%

Pencapaian Kinerja

Berdasarkan strategi yang telah diterapkan, pada tahun 2022 Perseroan telah menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Analisis kinerja Perseroan disajikan sebagai berikut.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Jumlah produk kredit konsumen mengalami peningkatan sebesar 26,85% dari sebesar Rp32,95 triliun di tahun 2021 menjadi Rp41,80 triliun di tahun 2022. Begitu pula untuk kredit komersial juga mengalami peningkatan sebesar 84,37% dari sebesar Rp20,42 triliun di tahun 2021 menjadi Rp37,65 triliun di tahun 2022. Di sisi simpanan produk komersial, juga mengalami peningkatan sebesar 13,11% dari sebesar Rp197,94 triliun di tahun 2021 menjadi Rp223,89 triliun di tahun 2022.

Pencapaian kinerja operasional juga telah berhasil meningkatkan laba tahun berjalan yang sangat signifikan dari sebesar Rp2,37 triliun di tahun 2021 meningkat sebesar 28,15% di tahun 2022 menjadi sebesar Rp3,05 triliun. Peningkatan laba tersebut telah berhasil menambah jumlah aset di tahun 2022 sebesar 8,14% dari sebesar Rp371,87 triliun di tahun 2021 menjadi sebesar Rp402,15 triliun di tahun 2022.

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Tahun 2022 merupakan momentum terbaik bagi Perseroan dengan pencapaian pendapatan bunga, laba operasional dan laba bersih yang jauh melampaui yang ditargetkan. Pendapatan bunga mencapai 103,67% dari yang ditargetkan, laba operasional mencapai 111,07% dari yang ditargetkan dan laba bersih mencapai 117,52% dari yang ditargetkan. Pencapaian-pencapaian tersebut juga telah mendorong pencapaian target rasio profitabilitas di tahun 2022. ROA di tahun 2022 tercapai sebesar 114,78% dari yang ditargetkan, ROE di tahun 2022 tercapai sebesar 122,02% dari yang ditargetkan dan NIM 105,03% dari yang ditargetkan.

Memperkuat Bisnis Berkelanjutan

Perseroan berkomitmen memperkuat bisnis berkelanjutan dengan berusaha memenuhi aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) di seluruh lini bisnis perusahaan. Perseroan meyakini, usaha yang dijalankan dengan menyeimbangkan aspek 3P (*Profit, People, Planet*) akan menciptakan nilai-nilai keberlanjutan serta menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang mampu menjaga keberlanjutan bisnis hingga masa mendatang.

Sesuai dengan bidang usaha Perseroan, kami berkomitmen menjalankan usaha dengan memperkuat bisnis berkelanjutan berbasis ekosistem perumahan yaitu mendukung program Pemerintah dalam penyaluran pembiayaan perumahan untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan kualitas terbaik.

Selanjutnya, Perseroan berinovasi membangun dan mewujudkan *Digital Mortgage Ecosystem* yang menyediakan layanan *digital* dengan memenuhi empat aspek yakni *living, renting, buying, dan selling*. Adapun wujud perluasan *Digital Mortgage Ecosystem*, Perseroan fokus mengembangkan beragam fitur terhadap tiga aplikasi andalan pada aspek *living*, yaitu *BTN Properti*, *BTN Properti for Developer*, dan *BTN Smart Residence*. Pada aplikasi *BTN Properti*, Perseroan menghadirkan layanan pencatatan (*listing*) profesional di mana nasabah dapat mengakses layanan perbaikan, perawatan dan renovasi hunian dari berbagai penawaran jasa yang ada. Sementara itu, layanan aplikasi *BTN Smart Residence* dapat mempermudah hubungan antara penghuni dan pengelola dalam proses pembayaran tagihan, iuran, pertukaran informasi, sampai dengan keluhan atau pengaduan. Tidak hanya itu, *BTN Smart Residence* juga menyediakan layanan untuk rumah tangga seperti pembersihan rumah harian, servis AC ruangan, servis mesin cuci dan lain sebagainya, juga integrasi dengan *marketplace* serta *e-wallet*.

Perseroan berkomitmen terus-menerus melakukan inovasi, beradaptasi dengan dinamika bisnis perbankan maupun properti untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dengan menerapkan konsep pembangunan permukiman berkelanjutan berdasarkan prinsip keseimbangan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Komitmen Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perjalanan Perseroan dalam mencapai target kinerja Keuangan Berkelanjutan selaras dengan dukungan Perseroan untuk memenuhi target-target pembangunan berkelanjutan. Perseroan berkomitmen penuh untuk mendukung inisiatif pencapaian TPB pemerintah Indonesia guna memenuhi target-target pembangunan berkelanjutan skala global dalam rumusan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Perseroan memperkuat landasan keberlanjutan dengan menanamkan komitmen kebijakan untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam mendukung kinerja Keuangan Keberlanjutan, Perseroan menerbitkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Melalui RAKB, Perseroan menyampaikan komitmen terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan yang berlandaskan konsep 3P (*People, Planet, and Profit*). Perseroan menyusun lima pilar Keuangan Berkelanjutan yang dipetakan terhadap pencapaian TPB. Kelima pilar yang telah dipersiapkan kemudian diuraikan menjadi aktivitas-aktivitas inti yang akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan (*environment*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*).

Penerapan Keuangan Berkelanjutan juga tidak terlepas dari pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Program TJSL, turut mendukung Perseroan untuk mencapai TPB. Seperti halnya RAKB, komitmen dan pemetaan juga dilakukan Perseroan terhadap penerapan TJSL.

Kendala yang Dihadapi Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan juga mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain, persaingan dalam seluruh lini bisnis yang dijalani Perseroan. Pesaing utama Perseroan adalah bank-bank domestik, dan dalam cakupan yang lebih sempit, bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Untuk kredit perumahan, kompetitor utama Perseroan adalah bank-bank domestik karena bank-bank asing tidak diperkenankan memberikan kredit perumahan. Sebagai akibat dari krisis keuangan global, persaingan untuk mendapatkan pendanaan khususnya pendanaan ritel yang menawarkan biaya pendanaan yang lebih murah menjadi semakin intens. Perseroan biasanya bersaing dengan bank-bank lain terutama dalam hal ekstensi dan kenyamanan saluran distribusi, rentang produk, harga, pelayanan nasabah dan pencadangan untuk jasa teknologi. Untuk menghadapi kendala tersebut, Perseroan melakukan pengembangan program kepemilikan hunian dengan skema pendanaan untuk penyediaan perumahan yang terjangkau. Perseroan juga melakukan kemitraan untuk

pendanaan proyek perumahan segmen milenial dan urban. Selain perumahan dengan harga yang terjangkau, Perseroan juga membangun proyek perumahan milenial yang memiliki fasilitas lengkap (*working space, walkable/dekat ke mana-mana*) melalui pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD).

Kendala lainnya yaitu, beberapa kompetitor secara substansial lebih besar dari Perseroan, memiliki sumber keuangan dan sumber lain yang lebih besar serta jaringan Kantor Cabang dan ATM yang lebih luas. Sebagai tambahan, pada tahun 1999, pemerintah Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan bank-bank asing membuka Kantor Cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank yang lebih dulu beroperasi dan bank baru baik domestik maupun asing, yaitu bank asing dapat menerapkan *joint venture* atau investasi di bank-bank domestik, yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kondisi operasional dan keuangan Perseroan. Untuk menghadapi kendala tersebut, Perseroan melakukan optimalisasi *delivery channel* dalam mendukung bisnis yang dilakukan melalui pengembangan kuantitas dan ragam *channel* dengan strategi perluasan jaringan yang difokuskan pada empat inisiatif utama, yaitu strategi regionalisasi, ekspansi cabang, *agent banking* dan *digital channel*. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dibutuhkan dukungan permodalan yang kuat. Untuk itu, pada tahun 2022 Perseroan melakukan penerbitan Obligasi/Pinjaman subordinasi serta melaksanakan *rights issue*.

Karena pembangunan dan reformasi sektor keuangan Indonesia terus berlanjut, Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber finansial yang lebih besar. Beberapa kompetitor Perseroan telah/dan diprediksi akan membentuk aliansi strategis dengan beberapa bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang secara signifikan lebih besar. Untuk menghadapi kendala tersebut, Perseroan mengembangkan solusi keuangan yang lebih lengkap (pinjaman, tabungan, transaksi, dan investasi) yang menasar nasabah berpendapatan tetap, khususnya bagi *emerging affluent* dan SME serta menyiapkan strategi *cross selling* dan *up selling*.

Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi Pada Masa Mendatang dan Prospek Usaha

Pemulihan ekonomi global terus menunjukkan perbaikan walaupun sedikit tertahan karena ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina. Ketegangan tersebut berdampak pada pemberian sanksi berbagai negara terhadap Rusia, sehingga berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan

harga komoditas terutama minyak bumi, meningkatnya inflasi di berbagai negara serta ketidakpastian pasar keuangan global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF untuk 2023 terkoreksi menjadi 2,7%.

Pertumbuhan ekonomi nasional melanjutkan perbaikannya pada tahun 2022 dengan pertumbuhan berada di atas 5% di setiap Triwulannya. Perbaikan ekonomi nasional dipicu oleh lebih terkendalinya pandemi yang berdampak telah kembalinya kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprakirakan tetap tinggi didorong oleh meningkatnya permintaan domestik serta kinerja ekspor yang tetap positif di tengah risiko lebih dalamnya perlambatan perekonomian global, sehingga diperkirakan ekonomi Indonesia dapat kembali tumbuh di kisaran 5,0% yoy pada tahun 2023.

Kemudian tingkat inflasi di tahun 2023 diperkirakan akan kembali pada kisaran target Bank Indonesia yaitu $3\pm 1\%$ yoy. Untuk mencapai tingkat inflasi tersebut, Pemerintah maupun Bank Indonesia akan melakukan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Sementara, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) diperkirakan di kisaran Rp15.500 pada akhir tahun 2023, dengan tetap memperhatikan ketidakpastian di pasar keuangan global seperti kebijakan moneter The Fed. Bank Indonesia berpotensi untuk tetap menaikkan suku bunga acuannya hingga Triwulan I 2023 sebagai upaya untuk menurunkan laju inflasi dan inflasi inti serta menjaga kestabilan rupiah.

Sektor Jasa keuangan khususnya perbankan diprediksi akan tetap terjaga kinerjanya, dipicu oleh kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Diperkirakan pada tahun 2023 Dana Pihak Ketiga (DPK) akan tumbuh pada kisaran 7,0%-9,0% dan penyaluran kredit perbankan akan tumbuh sebesar 10,0%-12,0%.

Dengan memanfaatkan keunggulan internal yang dimiliki, maka Perseroan optimis memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Oleh karena itu, rumusan strategi pengembangan bisnis Perseroan di tahun 2023 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Optimalisasi kontribusi pada program KPR subsidi dan meningkatkan KPR non subsidi melalui kerja sama developer, agen properti, mengembangkan skema KPR yang menysasar generasi milenial
2. Peningkatan Penyaluran kredit *high yield* (KRING, KAR, KUR) *beyond mortgage* melalui *cross selling* kepada nasabah *captive*.
3. Fokus pada penghimpunan DPK *low cost* dengan meningkatkan CASA pada segmen ritel dan institusi serta membangun kapabilitas untuk peningkatan CASA pada segmen *wholesale banking*.
4. Pengembangan sumber pertumbuhan baru dengan mempercepat implementasi inisiatif *digital banking* dan digitalisasi proses secara masif yang mendukung pengembangan bisnis berbasis ekosistem perumahan.

5. Peningkatan sumber *fee* berbasis layanan dan transaksional terutama pada bisnis *wealth management*, *digital banking* dan *corporate*.
6. Percepatan penyelesaian kredit macet dengan melanjutkan inisiatif penjualan aset (*asset sales*) secara *bulk*.

Tata Kelola Perusahaan

Perseroan meyakini bahwa peningkatan implementasi *good corporate governance* (GCG) berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Keselarasan antara *stakeholder* dan Perseroan akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan perusahaan yang berujung pada timbul dan meningkatnya sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan Perseroan. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka akan semakin menguatkan posisi Perseroan di dalam persaingan global, dan tentu akan memberi jalan untuk perkembangan Perseroan di tahun-tahun mendatang. GCG merupakan alat yang dipergunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Semakin kompleks risiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola oleh Perseroan.

Lebih dari itu, GCG menjadi upaya berkesinambungan untuk merespon secara proporsional kebutuhan implementasi GCG sehingga mencapai tujuan untuk *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*. Perseroan menjadi bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah Perseroan senantiasa mengelola setiap kegiatan usahanya dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik.

Perseroan memiliki struktur GCG yang kuat dan efektif yang terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.

Selama tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS tahunan dalam waktu yang tidak melewati batas yang ditentukan. Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham.

Direksi merupakan organ dalam pelaksanaan Tata Kelola yang bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS. Direksi bertanggung jawab mengelola dan menetapkan arah strategis Perseroan, memanfaatkan dan menjaga aset Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Untuk selanjutnya, Direksi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan menyusun dan menerapkan *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam Perseroan sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*.

Dalam rangka evaluasi penerapan GCG, Perseroan melaksanakan GCG *Assessment* yang dilaksanakan secara periodik dan konsisten setiap tahun yang terdiri dari *self assessment* maupun *assessment* dari pihak eksternal. Penilaian *self assessment* Tata Kelola dilakukan secara berkala pada posisi akhir bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Untuk tahun 2022, standar penerapan Tata Kelola selain mengacu pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga mengikuti ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Hasil *self assessment* pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 berada pada peringkat 2 (dua) yang mencerminkan Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Dari hasil *assessment* tersebut, Perseroan telah melakukan upaya-upaya perbaikan dengan menindaklanjuti beberapa kelemahan yang direkomendasikan berdasarkan hasil *assessment*. Tindaklanjut dari rekomendasi tersebut antara lain:

1. Penguatan budaya kepatuhan melalui berbagai program secara kontinu yang meliputi *compliance broadcast*, *compliance excellence*, *compliance dashboard* dan lainnya.
2. Optimalisasi pemanfaatan CRMS sebagai *tools* yang berfungsi pendukung dalam pelaksanaan *monitoring* komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator serta *database* ketentuan regulator (OJK, BI, LPS, Kementerian, dan sebagainya).

3. Penguatan fungsi *internal control* di seluruh unit kerja.
4. Diseminasi strategi *anti fraud* (SAF) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) ke seluruh unit kerja secara kontinu.

Selain *self assessment*, pada tahun 2022 Perseroan juga melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan. *Assessment* yang dilaksanakan di antaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diadakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh OJK dan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Skor CGPI Perseroan pada tahun 2022 sebesar 90,02 dengan predikat "*Most Trusted*". Perseroan telah melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil *assessment* sebagai berikut:

1. Transformasi organisasi telah dijalankan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan yang meliputi sentralisasi *accounting*, sentralisasi *procurement*, sentralisasi *operation* dan *branch transformation*.
2. Implementasi proses dan sistem pengelolaan WBS oleh pihak eksternal (Deloitte) serta Pengembangan kebijakan WBS.
3. Perseroan telah menyusun dan mengembangkan ketentuan internal mengenai Manajemen Keberlangsungan Usaha (*Business Continuity Management*) yang diimplementasikan sejak 2018.
4. Internal Audit Division telah menjalankan perannya melalui Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) yang dilakukan sesuai *Annual Audit Plan* yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama.
5. Perseroan telah melakukan implementasi struktur organisasi *Branch Control* di Kantor Cabang, Regional Audit & Control Supervisory di Kantor Wilayah dan *Monoline Business Control* di *Commercial Banking Center* (CBC) secara nasional yang berfungsi untuk mengawasi penerapan pengendalian internal oleh unit kerja secara *day to day*.
6. Perseroan telah melakukan Validasi model ICR yang berfungsi untuk mengevaluasi distribusi *rating* untuk kelompok debitur yang *default & non-default* dengan melakukan *backtesting* terhadap model *rating internal* (*rating borrower & rating facility*, metode ROC).
7. Perseroan telah melakukan tindak lanjut penanganan nasabah melalui beberapa strategi antara lain, koordinasi dengan unit kerja dan pihak terkait, penanganan nasabah melalui aplikasi SPN.
8. Perseroan telah melaksanakan pelaporan penanganan penyelesaian permasalahan hukum secara rutin.

Berdasarkan laporan penilaian ACGS yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), total skor Perseroan berdasarkan parameter ACGS tahun 2021 adalah sebesar 111,82. Hasil skor tersebut meningkat dari skor Perseroan pada ajang ACGS tahun 2019 yang diselenggarakan oleh ACMF dengan peningkatan skor sebesar

1,53 poin. Berdasarkan penilaian ini, Perseroan terpilih menjadi *Top 3 Indonesian Top PLC's & ASEAN Asset Class PLCs* (ACGS 2021). Perseroan juga telah melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil *assessment* sebagai berikut:

1. Perseroan telah mencantumkan penjelasan masing-masing agenda RUPS pada Pemanggilan RUPS Tahunan 2021.
2. Perseroan mengungkapkan kehadiran anggota Komite Remunerasi maupun Komite Nominasi pada Laporan Tahunan 2020.
3. Perseroan berkerja sama dengan Perusahaan Jasa Penilai untuk melakukan proses pencarian dan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian Komite di Bawah Direksi

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan

efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite Human Capital
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)
7. Komite Pengarah Transformasi
8. Komite Bisnis

Untuk mengukur efektivitas kinerja komite di bawah Direksi dalam membantu Direksi menjalankan pengurusan perusahaan maka dilakukan penilaian terhadap Komite di bawah Direksi. Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi yaitu pemenuhan pelaksanaan rapat serta kehadiran dalam rapat selama tahun buku. Selama tahun 2022, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2022, komposisi anggota Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Namun, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 Maret 2022 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Nixon L.P. Napitupulu sebagai Wakil Direktur Utama;
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Consumer & Commercial Lending	Direktur Consumer
2.	Direktur Finance, Planning & Treasury	Direktur Finance
3.	Direktur Compliance & Legal	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal
4.	Direktur Wholesale Risk & Asset Management	Direktur Assets Management
5.	Direktur Operation, IT, & Digital Banking	Direktur IT & Digital
6.	Direktur Distribution & Retail Funding	Direktur Distribution & Funding
7.	Direktur Risk Management & Transformation	Direktur Risk Management

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer & Commercial Lending	Direktur Consumer
2.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance, Planning & Treasury	Direktur Finance
3.	Eko Waluyo	Direktur Compliance & Legal	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal
4.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Wholesale Risk & Asset Management	Direktur Assets Management
5.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, & Digital Banking	Direktur IT & Digital
6.	Jasmin	Direktur Distribution & Retail Funding	Direktur Distribution & Funding
7.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management & Transformation	Direktur Risk Management

4. Mengangkat Nixon L.P. Napitupulu sebagai Wakil Direktur Utama. Wakil Direktur Utama Perseroan Nixon L.P. Napitupulu diberhentikan dan diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama untuk periode jabatan kedua.

Sehingga komposisi Direksi per 31 Desember 2022 berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang Direktur sebagai berikut:

Haru Koesmahargyo	:	Direktur Utama
Nixon L. P. Napitupulu	:	Wakil Direktur Utama
Hirwandi Gafar	:	Direktur Consumer
Nofry Rony Poetra	:	Direktur Finance
Eko Waluyo	:	Direktur Human Capital, Compliance & Legal
Elisabeth Novie Riswanti	:	Direktur Assets Management
Andi Nirwoto	:	Direktur IT & Digital
Jasmin	:	Direktur Distribution and Funding
Setiyo Wibowo	:	Direktur Risk Management

Penutup

Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh pegawai yang telah bekerja keras dan mampu memperoleh kinerja yang baik di tahun 2022. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan. Direksi juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham, nasabah dan mitra kerja Perseroan.

Perseroan akan berusaha secara terus menerus meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholders*. Keberhasilan Perseroan dalam memberikan kinerja yang baik hingga saat ini, tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan dari seluruh *stakeholders*. Oleh sebab itu, Direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kepercayaan tersebut.

Ke depannya, sebagai *Agent of Development* Pemerintah, Perseroan dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang terdepan dan terpercaya, melakukan literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 22 Februari 2023

Atas Nama Direksi



Haru Koesmahargyo

Direktur Utama





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama/Independen



Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan yang terhormat, Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, pada tahun 2022 Perseroan dapat mencatatkan kinerja yang baik. Di tengah kondisi perekonomian yang masih mengalami pemulihan, Perseroan tetap tumbuh dan terus bertransformasi agar bisa melayani seluruh keluarga di Indonesia sesuai dengan spirit Bakti Perseroan untuk Rumah Indonesia.

Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Perseroan sepanjang tahun 2022. Dalam laporan ini, akan disampaikan penilaian atas kinerja Direksi selama tahun 2022, pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris menyadari bahwa tantangan yang dihadapi di tahun 2022 tidaklah mudah. Oleh karenanya, kami melakukan komunikasi yang intensif dengan Direksi untuk membahas isu-isu signifikan, termasuk konsistensi pelaksanaan rencana bisnis tahun 2022, pengembangan perseroan, hingga peningkatan kualitas *internal control*. Beberapa masukan kepada Direksi diberikan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi serta Frekuensi serta Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun dengan harmonis dan saling menghormati. Terdapat batasan dari tanggung jawab dan peran yang dijalankan baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan, memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang

Baik. Pengawasan terhadap perumusan strategi Perseroan dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP). Sedangkan pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap *Corporate Plan* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2021-2025.
- Melakukan pengawasan terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Melakukan pengawasan terhadap Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2023.
- Rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan (kebijakan kepengurusan oleh Direksi).

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, tanggapan, arahan, dan/atau pandangan Dewan Komisaris melalui surat tertulis, rapat Komite di bawah Dewan Komisaris dan kunjungan kerja Dewan Komisaris. Kami menilai rapat Dewan Komisaris secara internal dan rapat bersama Direksi menjadi salah satu bentuk pengawasan paling efektif. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 53 (lima puluh tiga) kali Rapat Dewan Komisaris secara internal dan 12 (dua belas) kali rapat bersama, yang terdiri atas 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta 6 (enam) kali Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.

Tinjauan Ekonomi Makro

Secara umum perekonomian dunia pada 2022 menghadapi lima tantangan serius yang sangat perlu diwaspadai. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang menurun (*slow growth*). Kedua, inflasi yang sangat tinggi (*high inflation*) dipicu kenaikan harga energi dan pangan global. Ketiga, kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu yang lama (*higher for longer*). Keempat, dolar AS yang sangat kuat (*strong dollar*) sehingga memberikan tekanan depresiasi nilai tukar banyak negara. Kelima, penarikan dana investor global dan mengalihkan ke aset likuid (*cash is the king*). Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 3,0% pada 2022 setelah tumbuh 6,0% pada 2021. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, perekonomian dunia yang melambat dipengaruhi oleh fragmentasi politik dan ekonomi yang menyebabkan peningkatan tekanan inflasi dan direspons dengan pengetatan kebijakan moneter agresif baik di negara maju maupun negara berkembang. Perang antara Rusia dan Ukraina juga memicu gangguan suplai sehingga mendorong kenaikan tinggi harga energi dan pangan global. Inflasi dunia diperkirakan meningkat dari 5,7% pada 2021 menjadi 9,1% pada 2022. Pada akhir tahun 2022, The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps sehingga kisaran target FFR menjadi 4,25% - 4,5%.

Meskipun perekonomian global masih melambat, perekonomian nasional terus melanjutkan perbaikan. Pada 2022, Pemerintah kembali mengeluarkan program stimulus yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah mengeluarkan stimulus dalam bentuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp455,62 triliun untuk 3 (tiga) kluster utama yaitu kluster kesehatan, kluster perlindungan sosial serta kluster penguatan pemulihan ekonomi. Sementara di sisi moneter, setelah BI mempertahankan suku bunga sebesar 3,50% selama 17 bulan berturut-turut, BI mulai beralih pada kebijakan *pro stability* dan menaikkan suku bunga acuannya menjadi 3,75% pada Agustus 2022 untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi ini akibat kenaikan harga BBM. Hingga Desember 2022, BI telah menaikkan suku bunga hingga 200 bps atau menjadi 5,50% sebagai langkah untuk menurunkan laju inflasi yang masih tinggi. Sedangkan OJK memperpanjang kebijakan terkait restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkena dampak COVID-19 hingga Maret 2023 dan berlanjut diperpanjang hingga Maret 2024 untuk beberapa sektor terkait.

Secara keseluruhan, Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,0%-5,3% (yoy) pada akhir tahun 2022. Harga-harga barang diperkirakan masih akan meningkat sebagai dampak lanjutan dari penyelesaian harga BBM, namun pengendalian inflasi dengan baik oleh koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah menyebabkan tingkat inflasi tetap terjaga dan berada di bawah level 6,0% (yoy) pada akhir tahun 2022.

Dari sisi perbankan, likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) sebesar 134,97%, meningkat dibandingkan Oktober 2022 yang sebesar 130,17% atau jauh di atas ambang batas ketentuan yang sebesar 50%. Sementara Alat Likuid/DPK (AL/DPK) sebesar 30,42%, meningkat dibandingkan capaian pada Oktober 2022 yang sebesar 29,46%, masih di atas ambang batas ketentuan yang sebesar 10%. Sementara, Posisi Devisa Neto (PDN) November 2022 tercatat sebesar 2,05%, juga jauh di bawah *threshold* sebesar 20%. Sementara dari sisi permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri Perbankan pada November 2022 tercatat meningkat menjadi 25,49% dari posisi Oktober 2022 yang sebesar 25,08%.

Selama tahun 2022, kinerja sektor properti (*property beyond*) sebagaimana tercermin dari pertumbuhan sektor konstruksi dan real estat tumbuh positif namun levelnya masih di bawah pertumbuhan sebelum krisis pandemi COVID-19. Sementara itu, kredit properti selama 2022 juga tumbuh positif di level relatif tinggi, di atas 12% (*year on year, yoy*). Pertumbuhan kredit properti yang tinggi terjadi pada properti rumah tapak maupun properti apartemen. Namun demikian, pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) sedikit mengalami perlambatan.

Di tengah kondisi perekonomian tersebut, Perseroan kami nilai mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2022.

Pandangan Atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik di sepanjang 2022. Beberapa program strategis telah direalisasikan dalam rangka memperbaiki fundamental Bank untuk mempersiapkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Keberhasilan pengelolaan Bank juga tercermin dari capaian beberapa indikator kunci. Hal tersebut antara lain terefleksi dari peningkatan total aset Perseroan yang tumbuh 8,14% (yoy) menjadi Rp402,15 triliun dan penyaluran kredit tumbuh 8,53% menjadi Rp298,28 triliun di 2022.

Pencapaian kinerja yang baik juga terlihat dari kenaikan simpanan nasabah, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan nasabah terhadap Perseroan. Selama 2022, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,77% menjadi Rp322 triliun. Tumbuhnya DPK sejalan dengan peningkatan dana murah atau *Current Account Saving Account* (CASA) yang tumbuh 4,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan CASA yang cukup baik menghasilkan perbaikan *Cost of Fund* dari 3,13% di 2021 menjadi 2,60% di 2022. Keberhasilan lain Perseroan

terlihat dalam penguatan struktur permodalan di mana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) meningkat dari 19,14% di 2021 menjadi 20,17% di 2022. Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi volatilitas di masa depan, Perseroan telah meningkatkan rasio kecukupan pencadangan terhadap NPL (*NPL Coverage Ratio*) dari 141,82% di 2021 menjadi 150,6% di 2022. Namun demikian, Dewan Komisaris berpandangan bahwa upaya perbaikan kualitas kredit masih membutuhkan perhatian dengan menjaga *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan at Risk* (LaR) pada level serendah mungkin.

Dengan penguatan pada operasional bisnis tahun 2022, Perseroan mampu membukukan laba bersih sebesar Rp3,05 triliun, tumbuh hingga 28,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja ini, dan berharap pencapaian ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan bisnis Perseroan di masa depan. Secara khusus Dewan Komisaris akan terus mendorong Direksi untuk melakukan upaya perbaikan terhadap kualitas kredit, terutama perbaikan *end to end proses* kredit perumahan dengan digitalisasi, peningkatan dana pihak ketiga untuk ekspansi kredit dan pengelolaan kinerja *Loan at Risk* (LaR) yang dinilai belum optimal.

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan bank juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Tingkat kesehatan bank mencerminkan hasil penilaian kondisi perseroan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2016 Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Dengan Menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk - Based Bank Rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*).

Peringkat kesehatan bank posisi Desember 2022 (*Self Assessment*) berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau PK2 yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah mampu menjalankan kepengurusan Perseroan dan menghasilkan kinerja yang baik di tahun 2022. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Perekonomian global terus menunjukkan perbaikan walaupun sedikit tertahan karena ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina. Ketegangan tersebut berdampak pada pemberian sanksi berbagai negara terhadap Rusia, yang berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas terutama minyak bumi, meningkatnya inflasi di berbagai negara serta ketidakpastian pasar keuangan global. Perekonomian nasional terus melanjutkan perbaikannya pada tahun 2022 dengan pertumbuhan berada di atas 5% di setiap Triwulannya. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diperkirakan tetap tinggi didorong oleh meningkatnya permintaan domestik serta kinerja ekspor yang tetap positif di tengah risiko lebih dalamnya perlambatan perekonomian global.

Industri perbankan diprediksi akan tetap terjaga kinerjanya, dipicu oleh kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Diperkirakan pada tahun 2023 Dana Pihak Ketiga (DPK) akan tumbuh pada kisaran 7,0% s.d. 9,0% dan penyaluran kredit perbankan akan tumbuh sebesar 10,0% s.d. 12,0%. Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan didukung oleh kebijakan suku bunga acuan BI-7 Day *Reverse Repo Rate* (BI7DRR) yang tetap rendah.

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada di antaranya adalah pertumbuhan PDB diprediksi meningkat menjadi 5,1% s.d. 5,4%, kredit diekspektasikan tumbuh di 8,9% serta peluang bisnis digital semakin masif, salah satunya didorong adaptasi *post new normal*.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Bank

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif. Pada dasarnya Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, agar Perseroan menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perseroan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat dan/atau pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan, aktivitas, dan/atau kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Penerapan GCG di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen sebagai berikut.

Manajemen Risiko

Dalam Sistem manajemen risiko, Perseroan melaksanakan proses manajemen risiko yang didukung dengan 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi.
4. Sistem Pengendalian Risiko yang menyuruh.

Dalam pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Organ Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa komite dalam menjalankan tugas dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku. Selanjutnya, diteruskan kepada *layer* di bawah organ Dewan Komisaris dan Direksi yaitu satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja *Policy & Procedure*.

Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. Perseroan saat ini melakukan transformasi arsitektur kebijakan dan prosedur sesuai hierarki piramida kebijakan yang ideal. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini Perseroan telah menyusun Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai Kebijakan tertinggi dalam penerapan Manajemen Risiko dengan *framework* mencakup seluruh aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko Bank. Dalam penguatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dalam pelaksanaannya Perseroan juga memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu pilar budaya perusahaan, yang salah satu pilar budaya perusahaan adalah *Governance & Risk Culture*. Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang *urgent* dan krusial untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent* dan *comply*.

Dalam menjaga Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, maka dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan internal dan dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Reviu terhadap kebijakan internal telah dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdapat unit kerja *assessment* untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan, dalam hal ini terdapat unit kerja *Risk Development* yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengendalian risiko atas kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan Perseroan untuk meminimalkan risiko yang akan dihadapi Perseroan. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko.

Dalam melakukan proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Perseroan telah melengkapi sistem pengendalian internalnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal.

Dewan Komisaris berpandangan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perseroan dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol. Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank antara lain melalui pemantauan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen dan SDM serta kecukupan sistem pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Internal

Implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalkan risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. Perseroan mengacu pada *Committee of the Sponsoring Organizations of*

the Treadway Commission (COSO) - Internal Control Integrated Framework dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) yang merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian intern. Komponen tersebut mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top*.
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) yang merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) yang meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya.
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*) yang merupakan kondisi saluran komunikasi efektif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*) yang merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaannya.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.

Selanjutnya proses pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian yang terlaksana dengan baik mendorong terciptanya Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) yang mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Unsur-unsur Lingkungan Pengendalian tersebut meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai;
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi Manajemen Bank;
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai;
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank;
5. Atensi dan arahan Manajemen Bank dan Komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko; dan
6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan manajemen risiko.

Perseroan telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Perseroan melalui Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau *Internal Audit Division (IAD)* melakukan *Internal Control Assessment (ICA)* dalam rangka evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut mengukur kualitas pengendalian intern dari satuan kerja *auditee* atas 5 (lima) komponen pengendalian internal COSO *Framework* menggunakan kriteria dan metodologi *rating* kuesioner *Internal Control Assessment (ICA)* serta *professional judgement auditor* melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan. Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
2. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (*justifikasi atas irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi dan/atau *feedback* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap pasal-pasal hukum, peraturan dan perjanjian kerja sama serta kepatuhan pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, Identifikasi Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal (*internal control*) Perseroan dilakukan pada seluruh satuan kerja baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang baik Konvensional maupun Syariah, dan satuan kerja lainnya. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Upaya tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi permasalahan yang muncul.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di Perseroan telah berjalan dengan baik. Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Direksi dan/atau Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) sistem informasi dan akuntansi serta komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*).

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern ini merupakan pedoman yang memuat ukuran minimal tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diselenggarakan dan diterapkan oleh Perseroan di dalam seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perseroan.

Whistleblowing System

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum. WBS Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran melalui WBS dilakukan dengan membuat laporan pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa. Perseroan memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik melaporkan setiap pelanggaran yang berisiko merugikan Perseroan. Perseroan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dengan penanganan WBS dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerja sama tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terkait dengan pelaksanaan WBS, Dewan Komisaris berperan melakukan evaluasi apabila pelanggaran dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris. Terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak tersebut, Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan melakukan validasi dan memutuskan layak atau tidaknya dilakukan audit khusus yang investigasi lanjutan atau pendalaman akan dilakukan oleh Tim Audit Khusus dari SKAI atau oleh Tim Auditor Eksternal. Jika tidak layak untuk dilakukan audit khusus maka penanganan akan disesuaikan dengan ketentuan Perseroan.

Perseroan melakukan internalisasi WBS dengan pendistribusian pedoman Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi serta presentasi *sharing session* secara langsung kepada seluruh pimpinan dan pegawai Perseroan. Selain itu, guna menjangkau seluruh *stakeholders* Perseroan, sosialisasi *Whistleblowing System* juga dilakukan melalui *website* Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, *standing banner*, *customer gathering*, presentasi langsung pedoman etika dan kebijakan WBS.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari pengelolaan laporan pengaduan serta tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Pengaduan yang masuk selama periode Januari sampai dengan Desember 2022 berjumlah 115 (seratus lima belas) pengaduan yang terdiri dari 1 (satu) pengaduan melalui Surat atau PO Box, 50 pengaduan melalui SMS, Telepon, dan WhatsApp, dan 64 pengaduan melalui *Email* dan *Website*. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 107 (seratus tujuh) pengaduan telah ditindaklanjuti dengan koordinasi dan pendalaman oleh unit kerja baik Kantor Cabang, Kantor Wilayah, dan Divisi; 6 (enam) pengaduan masih dalam proses pendalaman dan pengumpulan bukti dan dokumen pendukung; sedangkan sisanya 2 (dua) pengaduan diteruskan ke proses audit khusus.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris berpedoman pada Piagam Komite masing-masing komite yang telah disusun. Komite di bawah Dewan Komisaris juga secara berkala melakukan telaah Piagam Komite disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Pelaksanaan tugas Komite mengacu pada Program Kerja yang telah disusun melalui mekanisme rapat komite termasuk dengan mengundang Direktorat atau divisi/satuan kerja terkait serta penelaahan, evaluasi, dan/atau revidi secara mendalam oleh masing-masing komite di luar forum rapat sebagai dasar pemberian saran atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas komite yang bersangkutan.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Kriteria penilaian Komite didasarkan pada pencapaian indikator kinerja atau *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk masing-masing Komite dengan metode penilaian sendiri (*self assessment*) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya atas kinerja dan pelaksanaan tugas yang telah ditunjukkan oleh seluruh komite. Dukungan dari komite menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk dapat memberikan masukan secara formal kepada Direksi untuk terus meningkatkan pengelolaan Bank.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2022 – 2 Maret 2022

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2022 sampai dengan 2 Maret 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

Chandra M. Hamzah	: Komisaris Utama/Independen
Iqbal Latanro	: Wakil Komisaris Utama/Independen
Armand B. Arief	: Komisaris Independen
Ahdi Jumhari Luddin	: Komisaris Independen
Andin Hadiyanto	: Komisaris
Heru Budi Hartono	: Komisaris
Eko D. Heripoerwanto	: Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Periode 2 Maret 2022 – 16 Oktober 2022

Pada tanggal 2 Maret 2022, RUPS Tahunan 2022 memutuskan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Eko D. Heripoerwanto sebagai Komisaris
2. Mengangkat Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;
3. Mengangkat Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris; serta
4. Mengangkat Sentot A. Sentausa sebagai Komisaris Independen.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 2 Maret 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022 sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris sebagai berikut:

Chandra M. Hamzah	: Komisaris Utama/Independen
Iqbal Latanro	: Wakil Komisaris Utama/Independen
Armand B. Arief	: Komisaris Independen
Ahdi Jumhari Luddin	: Komisaris Independen
Sentot A. Sentausa	: Komisaris Independen
Andin Hadiyanto	: Komisaris
Heru Budi Hartono	: Komisaris
Herry Trisaputra Zuna	: Komisaris
Himawan Arief Sugoto	: Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Periode 17 Oktober 2022 – 31 Desember 2022

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Heru Budi Hartono berhenti menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 17 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

Chandra M. Hamzah	: Komisaris Utama/Independen	Sentot A. Sentausa	: Komisaris Independen
Iqbal Latanro	: Wakil Komisaris Utama/ Independen	Andin Hadiyanto	: Komisaris
Armand B. Arief	: Komisaris Independen	Herry Trisaputra Zuna	: Komisaris
Ahdi Jumhari Luddin	: Komisaris Independen	Himawan Arief Sugoto	: Komisaris

Penutup

Kepada seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan seluruh BTNers yang saling bekerja sama dan bekerja keras demi mencapai program-program strategis Perseroan. Dewan Komisaris sungguh berharap, ke depannya seluruh jajaran Perseroan dapat terus mengimplementasikan strategi yang tepat sehingga mampu membawa Perseroan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Jakarta, 22 Februari 2023
Atas Nama Dewan Komisaris



Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama/Independen

Halaman ini sengaja dikosongkan.





LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

**Prof. Dr. H. Muhammad
Quraish Shihab, M.A.**
Ketua Dewan Pengawas Syariah



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Para Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham yang Terhormat, Perkenankan, saya mewakili Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Perseroan selama tahun 2022.

Untuk menjaga agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka dalam menjalankan aktivitasnya, Perseroan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip Syariah (Pasal 1 angka 12 PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk terkait syariah yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi yang terkait syariah dengan mengacu antara lain pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dan kegiatan usaha UUS.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank terkait syariah yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG).
8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk baru Bank terkait syariah:
 - a. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru terkait syariah yang akan dikeluarkan.
 - b. Memastikan ketersediaan akad yang digunakan dalam produk baru terkait syariah dalam fatwa DSN-MUI:
 - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru terkait syariah dengan fatwa dari DSN-MUI.
 - c. Melakukan *review* sistem dan prosedur dari produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
 - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan Bank.
 - e. Melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah atas kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru Bank.
9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS.
 - a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Bank.

- b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan internal, antara lain:
 - Ketersediaan dokumen bukti pembelian barang, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli *murabahah*.
 - Ketersediaan dokumen laporan usaha nasabah, untuk akad *mudharabah/musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
 - d. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
 - e. Melakukan review terhadap kebijakan internal terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.
 - g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK menggunakan format yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
 - h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
10. Manajemen Risiko Bank:
- a. Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang secara triwulanan.

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

Pada tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat

Rapat DPS adalah forum musyawarah antara DPS untuk membahas setiap kebijakan dan keputusan strategis maupun operasional dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, memberikan nasihat, dan memberikan saran kepada Direksi dan Manajemen Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bidang syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Sepanjang Tahun 2022, DPS telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat DPS termasuk di dalamnya 1 (satu) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan pada Oktober 2022. Agenda dalam Rapat DPS antara lain membahas *overview* kinerja UUS Perseroan, permohonan opini syariah dan pembahasan terkait penerapan syariah di KCS dan KP.

2. Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Sepanjang tahun tahun 2022, DPS telah mengeluarkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Opini Dewan Pengawas Syariah. Opini DPS ini dikeluarkan sebagai respon atas perkembangan bisnis UUS Bank BTN agar tetap berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah.

3. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi DPS

Pada periode tahun 2022, DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Semesteran dengan tepat waktu kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2021 UUS Perseroan disampaikan melalui surat No. 76/DIR/SHAD/II/2022 tanggal 2 Februari 2022;
- b. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2022 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 481/DIR/SHAD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Di samping itu, Selama tahun 2022, DPS juga telah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur yang Membidangi UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah. Komposisi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A. : Ketua
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH : Anggota
Mohamad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA : Anggota

Penutup

Demikian Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2022. Ke depannya, Dewan Pengawas Syariah akan tetap komitmen dalam memastikan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dengan senantiasa mengingatkan kepada jajaran Manajemen Perseroan. Dengan demikian Perseroan dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 22 Februari 2023
Atas Nama Dewan Pengawas Syariah



Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah





TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Kami juga menyatakan bahwa Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Perseroan sudah cukup memadai. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Februari 2023



Haru Koesmahargyo
Direktur Utama



Nixon L. P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama



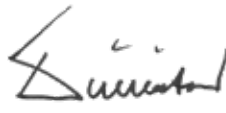
Nofry Rony Poetra
Direktur Finance



Eko Waluyo
Direktur Human Capital,
Compliance & Legal



Setiyo Wibowo
Direktur Risk Management



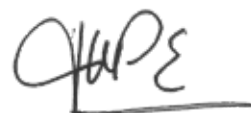
Andi Nirwoto
Direktur IT & Digital



Jasmin
Direktur Distribution & Funding



Hirwandi Gafar
Direktur Consumer



Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Assets Management

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Kami juga menyatakan bahwa Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Perseroan sudah cukup memadai. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Februari 2023



Chandra M. Hamzah

Komisaris Utama/Independen



Iqbal Latanro

Wakil Komisaris Utama/Independen



Armand B. Arief

Komisaris Independen



Ahdi Jumhari Luddin

Komisaris Independen



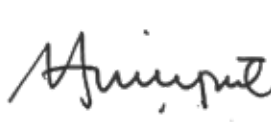
Sentot A. Sentausa

Komisaris Independen



Himawan Arief Sugoto

Komisaris



Herry Trisaputra Zuna

Komisaris



Andin Hadiyanto

Komisaris

Profil Perusahaan





Bank  **BTN**
Sahabat Keluarga Indonesia



IDENTITAS PERUSAHAAN



Nama Perusahaan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Nama Panggilan

Bank BTN (Perseroan)



Kode Saham

BBTN



Tanggal Pendirian

9 Februari 1950



Pencatatan di Bursa Saham

17 Desember 2009, Bursa Efek Indonesia



Bidang Usaha

Bank Umum, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah



Status Perseroan

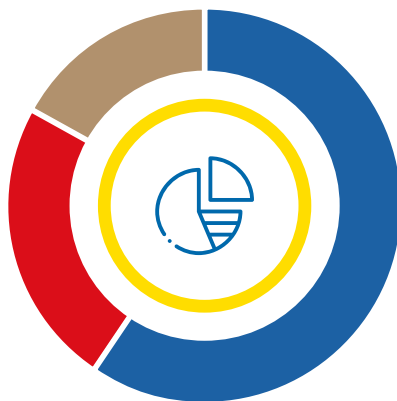
Perseroan Terbatas (PT)/Perusahaan Terbuka/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



Jumlah Karyawan

11.859 Orang
Per 31 Desember 2022

Kepemilikan



65,34%

Pemerintah Republik Indonesia



24,91%

Publik Domestik



9,75%

Publik Asing





Dasar Hukum Pendirian

- Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 Tanggal 9 Februari 1950 tentang Perubahan Undang-undang *Postspaarbank* (*Staatbald* 1934 No. 653, 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295) (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1963 Tanggal 22 Juni 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara No. 86 Tahun 1953).
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 Tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Akta pendirian Bank sebagai Persero No. 136 Tanggal 31 Juli 1992 dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, S.H., di Jakarta.



Modal Dasar

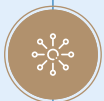
Rp10.239.216.000.000



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp6.443.572.771.000*

* Merupakan data per 31 Desember 2022. Sehubungan dengan pelaksanaan aksi korporasi Perseroan berupa Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dengan periode akhir penjatahan penambahan saham pada tanggal 10 Januari 2023.



Data Jaringan Usaha

- Jaringan Perbankan Konvensional: 6 Kantor Wilayah, 80 Kantor Cabang, 537 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Fungsional, 2 Kantor Layanan Setara KCP (KLKCP).
- Jaringan Perbankan Syariah: 30 Kantor Cabang Syariah, 69 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 5 Kantor Kas Syariah dan 6 Payment Point Syariah.

Kontak Perusahaan

Sekretaris Perusahaan

Achmad Chaerul

Menara BTN

Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130

☎ (021) 6336789 ext. 2003

☎ (021) 6336719

@ achmad.chaerul@btn.co.id

Alamat Kantor Pusat

Menara Bank BTN

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, Indonesia

Contact Address

☎ (021) 6336789

☎ (021) 6346704

@ csd@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

📞 Call Center : 1500-286

Media Sosial

f BankBTN

🐦 @BankBTN

📷 @bankbtn

📺 Bank BTN

Investor Relations

Menara BTN

Lantai 16

Jalan Gajah

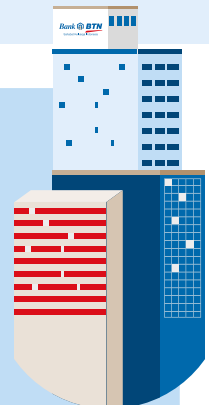
Mada No. 1

Jakarta Pusat

10130

☎ (021) 6336789 ext 1623

@ investor_relations@btn.co.id



NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH, KANTOR CABANG KONVENSIONAL DAN KANTOR CABANG SYARIAH



Kantor Pusat

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130
Telp. : (021) 2310490, 6336789,
6332666

Fax : (021) 6346704
Email : csd@btn.co.id
Website : www.btn.co.id

Kantor Wilayah

Kantor Wilayah 1

Kantor Wilayah Jawa Barat

Gedung Bank BTN Bekasi Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman No. 19 Bekasi 17143

☎ (021) 88953281, 88953282
✉ kantorwilayah1@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Wilayah 2

Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten

Gedung Yodya Tower Lt. 3
Jl. Mayjen Di Panjaitan Kav 8, RT 003
RW 011, Kel. Cipinang Cempedak Kec.
Jatinegara, Jakarta Timur

☎ (021) 2301184, 31901656,
3905775
✉ kantorwilayah2@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Wilayah 3

Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara

Gedung Graha Sudirman
Jl. Panglima Sudirman No. 7-9, Kel.
Gembong Asin, Kec. Genteng, Kota.
Surabaya - Jawa Timur

☎ (031) 5661704, 5661204
✉ kantorwilayah3@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Wilayah 4

Kantor Wilayah Sumatera

Gedung Graha Merah Putih Lt. 8,
Jl. Puteri Hijau No. 1, Kesawan,
Medan 20111

☎ (061) 80011133
✉ kantorwilayah4@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Wilayah 5

Kantor Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua

Jl. Sultan Hassanudin No. 1 Makassar

☎ (0411) 5070760
✉ kantorwilayah5@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Wilayah 6

Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY

Jl. M.T. Haryono No. 717
Semarang 50242

☎ (024) 8455932, 8455934
✉ kantorwilayah6@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 1 (Kantor Wilayah Jawa Barat)

Kantor Cabang Bandung

Jl. Jawa No. 7 Bandung 40117
☎ (022) 4232112, 4241036,
4241034
✉ kc.bandung@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Bandung Timur

Jl. Raya Cinunuk No. 223 A
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung
☎ (022) 7816883
✉ kc.bandungtimur@btn.co.id
🌐 : www.btn.co.id

Kantor Cabang Bogor

Jl. Pengadilan No. 13-15 Bogor 16121
☎ (0251) 8311700
✉ kc.bogor@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Cibinong

Ruko Cibinong City Centre Blok B20-21 &
D20-21 Jl. Tegar Beriman Kel. Pakansari
Kec. Cibinong - Kab. Bogor
☎ (021) 6651644, 6651645
✉ kc.cibinong@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Bekasi

Jl. Jend. Sudirman No. 19 Bekasi
17143
☎ (021) 8840649
✉ kc.bekasi@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Cibubur

Gedung A (Utama)
Jl. Transyogi Km. 3, Ruko Madison Blok
C1 No. 1-3, Komplek Cibubur Times
Square, Jatikarya, Jatisampurna, Kota.
Bekasi - Jawa Barat 17435
☎ (021) 84300071, 84300073
✉ kc.cibubur@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Harapan Indah Bekasi

Ruko Office Park Harapan Indah
Blok OP Kavling No. OP1-01 & OP1-02
Harapan Indah - Bekasi 17132
☎ (021) 88386971 (hunting),
88386972, 88386974
✉ kc.harapanindah@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Cikarang

Pertokoan Cikarang Center City
Blok B No 2, 3, 5, 6
Jl. Raya Cikarang - Cibarusah,
Kabupaten Bekasi 17750
☎ (021) 22180085, 22180086
✉ kc.cikarang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Depok

Jl. Margonda Raya No. 186
Depok 16423
☎ (021) 7751236, 7751237
✉ kc.depok@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Cirebon

Jl. Siliwangi No. 20A-20B
Cirebon 45121
☎ (0231) 209143, 209153
✉ kc.cirebon@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Karawang

Jl. Galuh Mas Raya Blok VI-A No. 6,
Desa. Sukaharja, Kec. Teluk Jambe,
Timur, Kab. Karawang - Jawa Barat
☎ (0267) 8411400, 8411500
✉ kc.karawang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Purwakarta

Jl. RE. Martadinata No. 1 Purwakarta
41114
☎ (0264) 201024, 210830,
210831, 206637
✉ kc.purwakarta@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 101
Tasikmalaya 46112
☎ (0265) 334464, 334465
✉ kc.tasikmalaya@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Sukabumi

Jl. Jendral Sudirman No. 49,
Kel. Sriwedari, Kec. Gunung Puyuh
Sukabumi - Jawa Barat
☎ (0266) 223446, 235951
✉ kc.sukabumi@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Cimahi

Jl. Jend. Amir Machmud/Raya Timur
No. 475 Cimahi 40524
☎ (022) 6651644, 6651645
✉ kc.cimahi@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 2 (Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten)**Kantor Cabang Jakarta Kuningan**

Plaza BP Jamsostek, Jl. HR Rasuna Said
Kav. 112 – 114 Blok B, Kel. Karet, Kec.
Setiabudi, Jakarta Selatan

☎ (021) 52964652
✉ kc.jakartakuningan@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Harmoni

Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130

☎ (021) 6336789, 6332666,
2310490
✉ kc.jakartaharmoni@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

**Kantor Cabang Kelapa Gading
Square**

Gedung Emerald Tower
Jl. Boulevard Barat Blok XB No. 3
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240

☎ (021) 45866883, 45866884
✉ kc.kelapagadingsquare@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

**Kantor Cabang Jakarta
Kebon Jeruk**

Jl. Angrek No. 01 Kel. Kelapa Dua
Kec. Kebon Jeruk Kebon Jeruk Jakarta
Barat 11550

☎ (021) 53666345
✉ kc.jakartakebonjeruk@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Cawang

Gedung Yodya Tower Lt. 1-3
Jl. Mayjen DI Panjaitan Kav 8, RT 003,
RW 011 Kel. Cipinang Cempedak Kec.
Jatinegara, Jakarta Timur

☎ (021) 22986826, 22986827
✉ kc.jakartacawang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 01
Tangerang 15118

☎ (021) 5539363
✉ kc.tangerang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Ciputat

Jl. Dewi Sartika No. 21 Ciputat
Tangerang Selatan 15411

☎ (021) 7445145
✉ kc.ciputat@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Melawai

Jl. Melawai Raya No. 19 C-D,
Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

☎ (021) 27517843, 27517840
✉ kc.jakartamelawai@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

**Kantor Cabang Bumi Serpong
Damai**

Kompleks BSD, Ruko Sektor VII E
Blok K No. 8 Jl. Raya Serpong,
Tangerang 15310

☎ (021) 5372235, 5372237
✉ kc.bumiserpongdamai@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Karawaci

Perumnas Karawaci I
Jl. Cendrawasih No. 1,
Tangerang 15115

☎ (021) 5517849, 5517850
✉ kc.karawaci@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Cilegon

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 49
Cilegon 42414

☎ (0254) 391766, 392681, 393479
✉ kc.cilegon@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Pluit

Jl. Pluit Kencana Raya No. 79, Pluit,
Penjaringan, Jakarta Utara 14440

☎ (021) 97115586
✉ kc.jakartapluit@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Bintaro Jaya

CBD Bintaro Blok B7 No. A3 - 04A, Kel.
Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren
Tangerang Selatan

☎ (021) 22215981
✉ kc.bintarojaya@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 3 (Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara)

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Pemuda No. 50
Surabaya 60271

☎ (031) 5353513, 5353519
✉ kc.surabaya@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Denpasar

Jl. Dewi Sartika No. 2
Denpasar 80114

☎ (0361) 243811
✉ kc.denpasar@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Sidoarjo

Jl. Ahmad Yani No. 15,
Sidoarjo 61212

☎ (031) 8929211, 8957949,
8957950
✉ kc.sidoarjo@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Malang

Jl. Ade Irma Suryani No. 2-4
Malang 65119

☎ (0341) 323956
✉ kc.malang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Mataram

Jl. Pejanggit No. 99-101 Cakranegara
Mataram 83121

☎ (0370) 631186, 638289
✉ kc.mataram@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Surabaya Bukit Darmo

Jl. Mayjend HR Muhammad Kav. 399
Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal
☎ (031) 7323344, 7322146,
7322147

✉ kc.surabayabukitdarmo@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Bangkalan

Jl. Teuku Umar No. 16 Kel. Kemayoran,
Kec. Bangkalan 69116

☎ (031) 3098929, 3098831,
3098930
✉ kc.bangkalan@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Kupang

Jl. Jend. Sudirman No. 87
Kupang 85119

☎ (0380) 831004
✉ kc.kupang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Madiun

Jl. Dr. Sutomo No. 38,
Madiun 63116

☎ (0351) 451460, 459034, 459034,
457927, 459500
✉ kc.madiun@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Mulyosari

Jl. Raya Mulyosari No. 82, Kel. Dukuh
Sutorejo, Kec. Mulyorejo,
Kota. Surabaya 60112

☎ (031) 5931763
✉ kc.mulyosari@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Kediri

Jl. Diponegoro No. 22 - 24
Kediri 64121

☎ (0354) 691260, 691262
✉ kc.kediri@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Jember

Jl. A. Yani No. 05
Jember 68118

☎ (0331) 4846111, 489292, 489266
✉ kc.jember@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Banyuwangi

Jl. Brawijaya No. B-1 dan B-2 Kel. Sobo,
Kec. Banyuwangi
Kab. Banyuwangi 68418

☎ (0333) 414490, 415690
✉ kc.banyuwangi@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Gresik

Kompleks Pertokoan Multi Sarana
Plaza Blok C 01 No. 1
Jl. Gubernur Suryo, Gresik 61118

☎ (031) 3973455
✉ kc.gresik@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Mojokerto

Jl. Majapahit No. 130 - 134 Blok1-2
Mojokerto 61323

☎ (0321) 323850, 323853
✉ kc.mojokerto@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 4 (Kantor Wilayah Sumatera)**Kantor Cabang Medan**

Jl. Pemuda No. 10A Medan 20151

☎ (061) 4149777

✉ kc.medan@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Palembang

Jl. Jend. Sudirman Km. 4, 5 No. 125
Palembang 30128

☎ (0711) 411175, 410552

✉ kc.palembang@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Padang

Jl. H. R. Rasuna Said No. 3, Jati Baru
Padang Tim, Kota Padang 25129

☎ (0751) 31903, 32094, 32096

✉ kc.padang@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Batam

Jl. Raja Isa No.1 Batam Center

☎ (0778) 470630, 470625, 470628

✉ kc.batam@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman No. 393
Pekanbaru 28116

☎ (0761) 40494, 40185, 40188

✉ kc.pekanbaru@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Jambi

Jl. H. M. Yusuf Singadikane No. 146,
Jambi

☎ (0741) 61793, 61792

✉ kc.jambi@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Pematang Siantar

Jl. Dr Sutomo No. 5 G-H, Kel.
Proklamasi Kec. Pematang Siantar Barat
- Pematang Siantar

☎ (0622) 28887

✉ kc.pematangsiantar@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Bandar Lampung

Jl. Wolter Monginsidi No. 80-88
Bandar Lampung 35215

☎ (0721) 489253, 489255, 484778,
483256

✉ kc.bandarlampung@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Bengkulu

Jl. Soeprpto No. 7 - 8,
Bengkulu 38223

☎ (0736) 20875

✉ kc.bengkulu@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Tanjung Pinang

Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Komplek Plaza
Bintan Center Blok Bunga No. 9-12
Tanjung Pinang

☎ (0771) 7447101, 7447088

✉ kc.tanjungpinang@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Pangkal Pinang

Jl. Perniagaan, Mall Bangka Trade
Center B11 - B14 - Pangkal Pinang

☎ (0717) 423748

✉ kc.pangkalpinang@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

**Kantor Cabang Konvensional Wilayah 5
(Kantor Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)****Kantor Cabang Makassar**

Jl. Kajaalido No. 4
Makassar 90111

☎ (0411) 316016, 316011

✉ kc.makassar@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Banjarmasin

Jl. R. E. Martadinata No. 4
Banjarmasin 70111

☎ (0511) 4368133, 4366669,
4366670

✉ kc.banjarmasin@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Samarinda

Jl. RE. Martadinata No. 01
Samarinda 75127

☎ (0541) 736930, 731695, 731510

✉ kc.samarinda@btn.co.id

🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Pontianak

Jl. Imam Bonjol No. 29
Pontianak 78122

☎ (0561) 740163
✉ kc.pontianak@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Balikpapan

Jl. Jend. Sudirman No. 141,
Balikpapan

☎ (0542) 420333
✉ kc.balikpapan@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Parepare

Jl. Adi Makkasau No 115-117, Lakessi,
Kec. Soreang, Kota. Parepare,
Sulawesi Selatan 91131

☎ (0421) 21091
✉ kc_parepare@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Banjarbaru

Jl. Ahmad Yani Km 33 RT 01 RW 01
Loktabak Utara, Banjarbaru
Kalimantan Selatan 71114

☎ (0511) 774116, 774171
✉ kc.banjarbaru@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Manado

Jl. Wolter Monginsidi No. 56
Manado 95115

☎ (0431) 868095, 855504, 855505
✉ kc.manado@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Jayapura

Jl. Koti No. 22 Jayapura 99111

☎ (0967) 537970, 537971, 537973
✉ kc.jayapura@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Kendari

Jl. A. Yani , Komplek A. Yani Square
Blok. A6-7 Kendari 93117

☎ (0401) 322101
✉ kc.kendari@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Ambon

Jl. Diponegoro No. 75B Ambon

☎ (0911) 355882, 354471, 348552,
355882
✉ kc.ambon@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Tarakan

Jl. Mulawarman No. 10 RT. 73 Kel.
Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat,
Kota Tarakan

☎ (0551) 24322
✉ kc.tarakan@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Palu

Jl. Jend. Sudirman No. 2, Palu 94111

☎ (0451) 424555, 428555
✉ kc.palu@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Palangkaraya

Jl. Diponegoro No. 23
Palangkaraya 73111

☎ (0536) 3223407, 3222698,
3224136
✉ kc.palangkaraya@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Gorontalo

Jl. Nani Wartabone No. 3, Kel. Limba U I,
Kec. Kota Selatan, Kota. Gorontalo

☎ +62 435 830490, 829481
✉ kc.gorontalo@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Ternate

Jl. Pahlawan Revolusi No. 152 Kel.
Gamalama, Ternate Tengah -
Maluku Utara 97721

☎ (0921) 3111330
✉ kc.ternate@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Panakkukang

Jl. Hertasning Blok I No. 2
Makassar 90222

☎ (0411) 868831, 868833
✉ kc.panakkukang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Mamuju

Jl KS Tubun No 18, Kabupaten Mamuju

☎ (0426) 22389
✉ kc.mamuju@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 6 (Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY)

Kantor Cabang Semarang

Jl. M.T. Haryono No. 717
Semarang 50242

☎ (024) 312151, 446166
✉ kc.semarang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Yogyakarta

Jl. Jend. Sudirman No. 71
Yogyakarta 55223

☎ (0274) 589898, 581014, 581016
✉ kc.yogyakarta@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Solo

Jl. Slamet Riyadi No. 282
Solo 57141

☎ (0271) 726930
✉ kc.solo@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Pekalongan

Jl. Merdeka No. 7 Pekalongan 51113

☎ (0285) 433883, 433884, 433484,
433917, 413222
✉ kc.pekalongan@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Purwokerto

Jl. Jend. Sudirman No. 431
Purwokerto 53116

☎ (0281) 641114
✉ kc.purwokerto@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Tegal

Jl. Gajah Mada No. 33 - Tegal

☎ (0283) 343050, 343835, 323038
✉ kc.tegal@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Kudus

Jl. Ahmad Yani No. 45 Kel. Panjunan
Kec. Kota, Kab. Kudus,
Jawa Tengah 59312

☎ (0291) 438732
✉ kc.kudus@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Magelang

Jl. Tentara Pelajar No. 40,
Magelang

☎ (0293) 3215983
✉ kc.magelang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah

Kantor Cabang Syariah Wilayah 1 (Kantor Wilayah Jawa Barat)

Kantor Cabang Syariah Bandung

Jl. Diponegoro No. 8, Bandung
Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan
Bandung 40115

☎ (022) 4265472, 4265473,
4265474
✉ kcs.bandung@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bekasi

Jl. Jenderal Sudirman, Ruko No. 1 G-H,
Kel. Kayu Ringin
Kec. Bekasi Selatan - Kota Bekasi 17144

☎ (021) 8893333
✉ kcs.bekasi@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bogor

Jl. Jendral Sudirman No. 01, Kec. Bogor
Tengah, Bogor 16121

☎ (0251) 8327171, 8327575
✉ kcs.bogor@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Cirebon

Jl. Raden Ajeng Kartini No. 68,
Kel. Sukapura, Kec. Kejaksan,
Kota Cirebon

☎ (0231) 235485, 235486, 235488
✉ kcs.cirebon@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya

Jl. Yudanegara No. 10 Kel. Yudanegara
Kec. Cihideung
Kota Tasikmalaya 46112

☎ (0265) 310612, 7296566,
7296567, 7296568
✉ kcs.tasikmalaya@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 2 (Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten)

Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni

Jl. Suryo Pranoto No. 9 B-D Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat 10130

☎ (021) 3860617, 3860620, 3864265
✉ kcs.jakartaharmoni@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tangerang

Jl. Serpong Raya, Ruko Villa Melati Mas Blok. SR-1 No. 23-24 Serpong - Tangerang 15320

☎ (021) 5370773
✉ kcs.tangerang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu

Ruko Grand Palace Blok G & H, Jl. Raya Ps. Minggu Km 16 Pancoran - Jakarta Selatan

☎ (021) 7993662, 7993015
✉ kcs.pasarminggu@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Serang

Jl. Jend Ahmad Yani No. 175, Cipete Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang - Banten

☎ (0254) 7915869
✉ kcs.cilegon@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Depok

Jl. Margonda Raya No. 438B / 438D, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji Kota Depok

☎ (021) 7867664, 7867668
✉ kcs.depok@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 3 (Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara)

Kantor Cabang Syariah Surabaya

Jl. Diponegoro No. 29 Surabaya 60271

☎ (031) 5666363, 5610518
✉ kcs.surabaya@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Malang

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 87 Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen Kota Malang 65112

☎ (0341) 3012469
✉ kcs.malang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Mataram

Jl. Pejanggik No. 18-19 Kel. Cakranegara Kab. Mataram

☎ (0370) 7503646
✉ kcs.mataram@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 4 (Kantor Wilayah Sumatera)

Kantor Cabang Syariah Batam

Jl. Sriwijaya Komp. Regency Park Lot 29 Pelita - Batam 29432

☎ (0778) 421921, 437880
✉ kcs.batam@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Medan

Jl. Ir. H. Juanda No. 48 Medan

☎ (061) 4144554
✉ kcs.medan@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Jl Jendral Sudirman No 203 C D E F G, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru 28128

☎ (0761) 7891314
✉ kcs.pekanbaru@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Palembang

Jl. A Rivai No. 221, Kel. 26 Ilir D.1,
Kec. Ilir Barat I, Palembang, Sumatera
Selatan

☎ (0711) 365808, 354001, 353230
✉ kcs.palembang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Banda Aceh

Jl. H.M Daud Beureuh No. 39, Desa.
Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota.
Banda Aceh

☎ (0651) 40331
✉ kcs.bandaaceh@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bengkulu

Jl. S. Parman No. 24, Kel. Penurunan,
Kec. Ratu Samban,
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

☎ (0736)-7860456
✉ kcs.bengkulu@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Jambi

Jl. Hayam Wuruk No. 27, Kel. Cempaka
Putih, Kec. Jelutung - Kota Jambi

☎ (0741)- 3620645, 3620687
✉ kcs.jambi@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Padang

Jl. Belakang Olo No. 47, Kel. Kp Jao,
Kec. Padang Barat, Padang,
Sumatera Barat

☎ (0751)- 25819, 34098, 30085
✉ kcs.padang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

**Kantor Cabang Syariah Bandar
Lampung**

Jl Kartini No 85, Kelurahan Palapa,
Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota
Bandar Lampung 35116

☎ (0721) - 6025555
✉ kcs.bandarlampung@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 5 (Kantor Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)**Kantor Cabang Syariah Makassar**

Jl A.P Pettarani No 21, Tamamaung, Kecamatan Panakkukang,
Kota Makassar 90231

☎ (0411) 3613399, 3613499
✉ kcs.makassar@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Jl. Jend Ahmad Yani KM 5,5 No. 456 Kel. Pemurus Luar,
Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan

☎ (0511) 3250530, 3250540, 3250560
✉ kcs.banjarmasin@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No. 565 – 566
Balikpapan 76114

☎ (0542) 742260, 742258
✉ kcs.balikpapan@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Kendari

Jl. MT Haryono No. 78 Kel. Bende,
Kec. Baruga – Kota Kendari

☎ -
✉ kcs.kendari@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 6 (Kantor Wilayah Jawa Tengah & DIY)**Kantor Cabang Syariah Yogyakarta**

Jl. Faridan M Noto No. 10, Kota Baru Gondokusuman
Yogyakarta 55224

☎ (0274) 551055, 512467
✉ kcs.yogyakarta@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Solo

Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 332 Solo 57141

☎ (0271) 712127, 7008978, 7008947
✉ kcs.solo@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tegal

Jl. Gajah Mada No. 107, Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota
Tegal Jawa Tengah 52113

☎ (0283) 342923, 342933
✉ kcs.tegal@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Semarang

Jl. Achmad Yani No. 181 Kel. Wonodri Kec. Semarang
Selatan, Kota Semarang

☎ (024) 8449918, 8449919
✉ kcs.semarang@btn.co.id
🌐 www.btn.co.id

JARINGAN MITRA USAHA

Perseroan senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai mitra usaha, dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Perseroan juga menjalankan berbagai kemitraan bisnis dalam rangka penyediaan layanan produk perbankan serta kenyamanan transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Kerja sama yang dilakukan dengan perusahaan BUMN maupun Swasta selama tahun 2022 di antaranya sebagai berikut:

Instansi/Lembaga	Keterangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Aplikasi E-Panjar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Telkomsel	TCASH-BTN
Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	KPR Atlet
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Konstruksi Properti (<i>Cash Loan</i> dan <i>Non Cash Loan</i>)
PT PP (Persero) Tbk dan Grup Usahanya (PP Properti, PP Urban dan lainnya)	Konstruksi Properti (<i>Cash Loan</i> dan <i>Non Cash Loan</i>)
PT Waskita Karya Realty	Konstruksi Properti (<i>Cash Loan</i> dan <i>Non Cash Loan</i>)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Grup Usahanya (WIKI Realty, WIKI Gedung, WIKI Industri dan Konstruksi)	Konstruksi Properti (<i>Cash Loan</i> dan <i>Non Cash Loan</i>)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Grup Usahanya (Adhi Commuter Properti dan Adhi Persada Properti)	Konstruksi Properti (<i>Cash Loan</i> dan <i>Non Cash Loan</i>) - Termasuk Developer yang mendukung penyediaan unit rumah untuk millennials
Perum Perumnas	Konstruksi Properti (<i>Cash Loan</i> dan <i>Non Cash Loan</i>) - Termasuk Developer yang mendukung penyediaan unit rumah untuk millennials
PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)	Kredit Korporasi - <i>Term Loan</i>
PT Bumi Serpong Damai Tbk	Kredit Korporasi - <i>Term Loan</i>
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) – ITDC	Kredit Korporasi – <i>Term Loan</i> (Sindikasi)
PT Indonesia Financial Group (IFG)	Kredit Korporasi – <i>Term Loan</i> (Sindikasi)
PT Angkasa Pura I (Persero)	Kredit Korporasi - Investasi (Infrastruktur)
PT Angkasa Pura II (Persero)	Kredit Korporasi - Investasi dan <i>Term Loan</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kredit Korporasi - Investasi (Sindikasi - Infrastruktur)
PT Patra Jasa	Kredit Korporasi - Investasi dan <i>Term Loan</i>
PT Jasamarga Bali Toll	Kredit Korporasi - Investasi (Sindikasi - Infrastruktur)
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Kredit Korporasi - Modal Kerja
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Kredit Korporasi - Modal Kerja (<i>Cash Loan</i> dan <i>Non Cash Loan</i>)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Kredit Korporasi - Modal Kerja (<i>Cash Loan</i> dan <i>Non Cash Loan</i>)
PT Bio Farma (Persero)	Kredit Korporasi - Modal Kerja (Sindikasi <i>Club Deal</i>)
Blue Bird	Pembiayaan Perumahan
Grab Indonesia	Kredit KPR
Gojek	Kredit KPR
Gojek	Kredit KPR
BPKH	Bank Penerima Setoran Ibadah Haji
Kemenag	Bank Penerima Ibadah Haji
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)	Kredit KPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kementerian PUPR)	Pengelolaan Dana dan Kredit KPR
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Satker PUPR)	Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
PT Jamkrindo Syariah	Penjaminan Asuransi Pembiayaan
PT Askrindo Syariah	Penjaminan Asuransi Pembiayaan
PT Jasindo Syariah	Penjaminan Asuransi Pembiayaan

Instansi/Lembaga	Keterangan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Sekuritisasi KPR, Pinjaman Refinancing dan Pinjaman FLPP
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Pengelolaan Rekening Satuan Kerja dan Badan Layanan Umum
Kementerian Agama Republik Indonesia	Kerja sama Terkait Haji
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia	Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar
Badan Pengelola Keuangan Haji	Pengelolaan dana Haji
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Pengelolaan dana
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	Pengelolaan dana
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Pengelolaan dana
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Pengelolaan dana
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Dana
PT Utama Karya (Persero)	Pengelolaan Dana
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Pengelolaan dana
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pengelolaan dana
PT Jaminan Kredit Indonesia	Pengelolaan dana
PT Jamkrindo Syariah	Pengelolaan dana
PT Reasuransi Indonesia Utama	Pengelolaan dana
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Pengelolaan dana
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pengelolaan dana
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Pengelolaan dana
PT Ciputra Nusantara	Pengelolaan dana
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Pengelolaan dana
PT Medco Power Indonesia	Pengelolaan dana
PT BFI Finance Indonesia Tbk	Pengelolaan dana
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia	Pengelolaan dana
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia	Pengelolaan dana
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri	Pengelolaan dana
Perusahaan Asuransi Allianz	Pengelolaan dana
Manulife Indonesia	Pengelolaan dana
Sun Life Financial	Pengelolaan dana
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan	Pengelolaan dana
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pembiayaan Modal Kerja BTN iB
PT Pabrik Gula Rajawali I, Grup Usaha dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Pembiayaan Modal Kerja BTN iB
PT Industri Kereta Api "INKA" (Persero)	Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor BTN iB
PT Waskita Karya Realty	Pembiayaan Konstruksi BTN iB

BRAND PERUSAHAAN



Logogram Primer yang berbentuk atap rumah merepresentasikan misi utama Perseroan untuk memenuhi kebutuhan KPR masyarakat Indonesia. Logogram Primer terdiri dari dua buah pola segi enam dengan ukuran berbeda untuk menggambarkan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia: **yang besar melindungi dan menumbuhkan yang kecil.**



Logogram Sekunder yang berbentuk garis merah menggambarkan kepercayaan diri dan keandalan Perseroan.

Logo Perseroan

Logo Perseroan terdiri dari 4 (empat) elemen yaitu, *logotype*, logogram primer, logogram sekunder dan *tagline*. *Logotype* dan logogram merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam setiap penggunaannya di berbagai media.

Supergrafik

Supergrafik ini diterapkan pada seluruh desain visual *stationery* Perseroan. Supergrafik berbentuk atap rumah diambil dari aksesoris grafis Logogram Perseroan, simbol panah ke atas memiliki arti selalu optimis menjadi yang terbaik bagi Perusahaan maupun *customer/mitra*.

Warna

Perseroan memiliki 4 (empat) warna, terdiri dari 3 (tiga) warna primer dan 1 (satu) warna sekunder. 3 (tiga) warna primer (biru, emas dan merah) ditampilkan pada logo Perseroan, sedangkan warna sekunder (kuning) mencerminkan identitas Perseroan sebagai Perusahaan yang dinamis dan memiliki semangat tinggi dalam memenuhi harapan masyarakat Indonesia di bidang perbankan.

Warna biru melambangkan kematangan Perseroan dalam mengelola bisnis perbankan dan kebijaksanaan Perseroan dalam mengemban misi pembangunan nasional.

Warna emas melambangkan kredibilitas Perseroan sebagai bank yang solid dalam membuktikan diri sebagai bank yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Warna merah melambangkan kepercayaan diri Perseroan sebagai bank yang tangguh dalam menjalankan roda bisnis perbankan di Indonesia

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN



Perseroan memiliki 6 Kantor Wilayah, 110 Kantor Cabang (termasuk 30 Kantor Cabang Syariah) 606 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 69 Kantor Cabang Pembantu Syariah), 3 Kantor Fungsional, 5 Kantor Kas Syariah, 6 Payment Point Syariah, 51 KCP Mobile (MKK), 2.131 E-Channel (ATM dan CRM) dan 2 Kantor Layanan Setara Kantor Cabang Pembantu (KLKCP).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan") diawali dengan berdirinya *Postspaarbank* pada tahun 1897. Pada tahun 1942, *Postspaarbank* diambil alih oleh Pemerintah Jepang dan berubah nama menjadi Tyokin Kyoku atau Kantor Tabungan. Kemudian hal ini berlanjut pada tahun 1945, Pemerintah Indonesia mengambil alih Tyokin Kyoku dan mendirikan Kantor Taboengan Pos. Di era paska kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia mengubah nama Tyokin Kyoku menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 dan kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963 hingga sekarang.

Pada tahun 1974, Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan Program Pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Di tahun 1976, Perseroan melakukan realisasi pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang. Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01.

TH.92 tanggal 12 Agustus 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A. Pada tahun 1994, Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Perseroan mendapatkan izin operasi sebagai Bank Devisa dan selanjutnya Perseroan ditunjuk sebagai Bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah pada tahun 2002. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004. Perseroan mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pada tahun 2009, Perseroan melakukan sekuritisasi KPR pertama di Indonesia. Perseroan melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA), lalu pada 17 Desember 2009 melakukan Penawaran Umum Saham Perdana/Initial Public Offering (IPO) dan listing di Bursa Efek Indonesia.

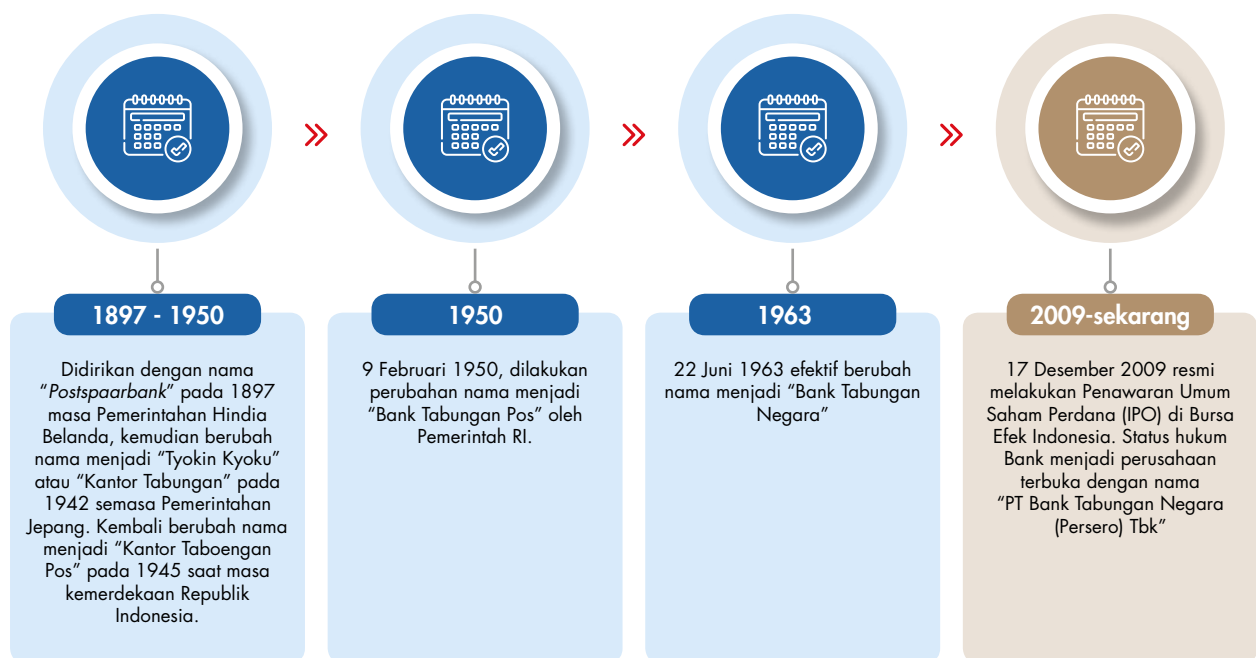
Tahun 2015, Perseroan berperan penting dalam membantu Program Pemerintah “Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat”.

Perseroan telah ditunjuk sebagai salah satu Bank yang mendukung program pemerintah melalui pembiayaan KPR. Pada tahun 2017, perjalanan proses transformasi *digital banking* Perseroan terus berlanjut. Dari sisi bisnis, Perseroan terus meningkatkan pelayanan perbankan dengan mengakselerasi tahapan transformasi di era digital, salah satunya dengan membuka *Smart Branch*. *Smart Branch* Perseroan dilengkapi dengan beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah dalam memperoleh informasi perbankan, melakukan komunikasi, transaksi, registrasi dan pembukaan rekening.

Pada tahun 2019, Perseroan menjadi *Housing Market Maker* dan memperkuat posisi sebagai Bank Terbesar ke-5. Selanjutnya, tahun 2022 ini merupakan tahun yang penting mengingat pada tahun 2022 ini merupakan kali kedua Perseroan menggelar *Rights Issue* atau penawaran saham baru setelah tahun 2012 lalu. *Rights Issue* dimaksud menjadi salah satu upaya Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit dan/atau pinjaman. Dana hasil PMHMETD II akan diperhitungkan sebagai modal inti utama (modal disetor) sesuai dengan POJK No. 11/2016 untuk mengawal Visi Perseroan.

Keterangan Perubahan Nama

Perseroan memiliki sejarah panjang hingga akhirnya menjadi seperti saat ini; mulai dari nama Bank Tabungan Pos pada tahun 1950 hingga menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN



“Menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025.”



REVIU VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Visi dan Misi secara berkala ditinjau dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan eksternal maupun internal. Hasil reviu Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan di tahun 2021 dan rekomendasi dari McKinsey dinyatakan bahwa perumusan Visi dan Misi baru sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan eksternal maupun internal dan masih relevan di tahun 2022. Visi dan Misi baru telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* Perseroan Tahun 2021-2025 dan telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank 2022-2024.



MISI

- 1 Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
- 2 Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
- 3 Menjadi *One of Home of Indonesia's Best Talent*.
- 4 Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
- 5 Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

BUDAYA PERUSAHAAN

Perseroan menyadari pentingnya penerapan budaya perusahaan karena dapat mendorong kinerja perusahaan secara signifikan. Perseroan telah beberapa kali memodifikasi budaya perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa budaya kerja perusahaan kita tetap relevan dengan lingkungan eksternal dan ekosistem bisnis yang dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Budaya Perseroan saat ini adalah AKHLAK secara berurutan adalah Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta diikuti dengan 18 poin yang menjelaskan AKHLAK secara lebih detail adalah fondasi dari budaya perusahaan Perseroan.



*"Menjadi Best Mortgage Bank
in Southeast Asia pada tahun 2025."*

4 Pilar Budaya

Tambah Tumbuh dan
Memenuhi Harapan
Pelanggan
Sales & Service
Culture

Bersih dan
Terpercaya
Governance & Risk
Culture

Berkinerja Unggul
Performance
Culture

Terus Belajar
Learning Culture

8 Perilaku Utama BTNers

Berpegang
teguh dan
patuh pada
etika bisnis dan
peraturan yang
berlaku

1

Terus belajar
untuk
meningkatkan
kompetensi

2

Disiplin,
konsisten dan
tuntas dalam
menyelesaikan
tugas dengan
kualitas hasil
terbaik

3

Saling
menghormati,
menghargai
dan terbuka
terhadap
perbedaan

4

Bertanggung
jawab dan selalu
mendedepankan
kepentingan
perusahaan

5

Proaktif,
efektif dan
efisien dalam
memenuhi
kebutuhan
pelanggan

6

Cepat tanggap
terhadap
perubahan serta
memberikan
kesempatan
untuk melakukan
perbaikan yang
berkelanjutan

7

Terbuka
untuk bekerja
sama yang
menghasilkan
nilai tambah

8

AKHLAK : Nilai-Nilai Utama & 18 Panduan Perilaku

Amanah

Kompeten

Harmonis

Loyal

Adaptif

Kolaboratif

18 (DELAPAN BELAS) PANDUAN PERILAKU AKHLAK BAGI BTNers

Amanah

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.


Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis


- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

A	Amanah	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
K	Kompeten	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
H	Harmonis	Saling peduli dan menghargai perbedaan.
L	Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
A	Adaptif	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
K	Kolaboratif	Membangun kerja sama yang sinergis.




Loyal

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.



Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.



Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

No	Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Telah/Belum Dijalankan
Kegiatan Usaha Utama		
1.	Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;	sudah
2.	Memberikan kredit;	sudah
3.	Menerbitkan surat pengakuan hutang;	sudah
4.	Membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:	sudah
	a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;	sudah
	b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;	sudah
	c. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;	sudah
	d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);	sudah
	e. Obligasi;	sudah
	f. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	sudah
	g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	sudah
5.	Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;	sudah
6.	Menempatkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;	sudah
7.	Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;	sudah
8.	Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;	sudah
9.	Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;	belum
10.	Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;	belum
11.	Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;	sudah
12.	Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;	sudah
13.	Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;	sudah
14.	Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan;	belum
15.	Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;	belum
16.	Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;	sudah
17.	Melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking dan investment banking lainnya;	sudah
18.	Melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan;	sudah
19.	Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	sudah
Kegiatan Usaha Penunjang		
1.	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	sudah

PRODUK DAN JASA

Berdasarkan segmen usaha yang dikembangkan oleh Perseroan, produk dan jasa Perseroan meliputi 2 (dua) segmen yaitu konvensional dan syariah, dengan penjelasan sebagai berikut.





JASA



Perbankan Konvensional

Electronic Data Capture (EDC)

Electronic channel ATM

Cash Management

Layanan BTN Prioritas

Virtual Account

PLUS by BTN Prioritas

Kartu Debit Visa/GPN & Debit Online

Branchless Banking

Internet Banking

BTN Smart Residence

Portal BTN Properti

Online Onboarding Open Account

Mobile Banking

SMS Notifikasi

SKBDN

CRM

Garansi Bank BTN

Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya



Perbankan Syariah/ Unit Usaha Syariah

Safe Deposit Box BTN iB

Kartu Debit Visa/GPN Syariah & Debit Online

Garansi Bank BTN iB

Payroll BTN iB

Program Pengembangan Operasional BTN iB

Kiriman Uang

SPP Online BTN iB

BTN Cash Management

Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Payment Point Syariah

Mobile Banking

Virtual Account



Ragam Produk

Perbankan Konvensional

Perbankan Konsumer

1. Produk Kredit Konsumer

a. Kredit Perumahan

- KPR Bersubsidi BTN

Program untuk Pemilikan Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum.

- KPR FLPP

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan Rumah Tapak atau Rumah Susun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- KPR BP2BT

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang selanjutnya disebut BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah melalui kredit (KPR).

- KPR TAPERA

KPR Tapera adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada MBR peserta Tapera untuk pembelian Rumah Tapak ataupun Rumah Susun.

- KRR TAPERA

KRR Tapera adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada MBR peserta Tapera untuk melakukan perbaikan rumah pertama.

- KPR BTN Mikro

Produk dengan kemudahan untuk membeli lahan atau rumah, ataupun renovasi rumah secara bertahap yang diprioritaskan untuk masyarakat yang bekerja sektor informal.

- KPR Non Subsidi

Kredit pemilikan rumah bagi nasabah segmen menengah ke atas. Layanan KPR non subsidi terdiri dari produk KPR BTN Platinum, KPA BTN dan KP Ruko.

- KPR BTN Platinum

Kredit pemilikan rumah untuk keperluan pembelian rumah dari *developer* ataupun *non developer*, baik untuk pembelian rumah baru atau *second*, pembelian rumah siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.

- KPR Gaeesss!
Merupakan pengembangan fitur dari produk KPR/KPA BTN Platinum untuk memenuhi kebutuhan pembelian rumah atau apartemen untuk calon debitur dari segmentasi generasi milenial (21-35 tahun) dengan berbagai kemudahan & keunggulan.
- KPR Atlet
Program khusus untuk produk KPR/KPA BTN Platinum yang diperuntukkan bagi atlet-atlet Indonesia maupun pengurus Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
- KPA BTN
Kredit kepemilikan apartemen untuk keperluan pembelian apartemen dari developer ataupun non developer, baik untuk pembelian apartemen baru atau second, pembelian apartemen siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.
- KP Ruko BTN
Kredit kepemilikan ruko untuk membeli unit rumah toko, rumah usaha, rumah kantor, maupun kios dengan pelayanan yang cepat dan mudah.
- Kredit Perumahan Lainnya
 - Kredit Agunan Rumah BTN
Fasilitas kredit yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan.
 - Kredit Bangun Rumah BTN
Fasilitas kredit bagi yang ingin membangun rumah di atas tanah milik sendiri.
 - Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan:
 - Pinjaman uang muka Perumahan (PUMP) sebagai fasilitas pinjaman uang muka perumahan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan KPR melalui Bank BTN
 - Pinjaman Renovasi Rumah (PRR) sebagai fasilitas pinjaman untuk renovasi rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Kredit Non Perumahan
Kredit Konsumer Non Perumahan menjadi salah satu fokus utama Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, karena memiliki pasar potensial yang mampu bertahan dari krisis keuangan global. Kredit ini juga memiliki basis nasabah yang banyak dan tersebar. Produk-produk Kredit Konsumer Non Perumahan mencakup Kredit Ringan BTN (Kring BTN), Kredit Ringan BTN Pra Pensiunan (Kring BTN Pra Pensiun), Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan), Kredit Swadana BTN, Kredit Pegawai
- Kredit Ringan BTN (Kring BTN)
Fasilitas kredit yang ditujukan bagi karyawan perusahaan/instansi guna memenuhi berbagai kebutuhannya tanpa agunan cukup hanya memanfaatkan SK Pegawai pemohon.
- Kredit Ringan BTN Pra Pensiun (Kring BTN Pra Pensiun)
Fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji dan uang pensiun) yang gajinya belum atau telah disalurkan melalui Bank, yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Jangka waktu pembiayaan ini dapat melintasi masa pensiun debitur.
- Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiun)
Fasilitas kredit yang ditujukan bagi para pensiunan PNS, TNI/POLRI, maupun janda/duda-nya yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui rekening di Bank BTN.
- Kredit Swadana BTN
Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa tabungan maupun deposito yang disimpan di Bank BTN dengan maksimal kredit 90% dari dana yang disimpan oleh nasabah tersebut dengan suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, jangka waktu sangat fleksibel sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- Kredit Pegawai
Fasilitas kredit lunak bagi karyawan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

2. Produk Simpanan Konsumer

a. Tabungan Konsumer

- Tabungan BTN Batara
BTN Batara memberikan solusi tabungan transaksional dengan kemudahan transaksi pembelian dan pembayaran melalui *channel* Bank BTN untuk menunjang aktivitas keuangan keluarga. Penyetoran dapat dilakukan di *Outlet* Bank BTN dan Kantor Pos maupun melalui *Cash Deposit Machine*.
- Tabungan BTN Investa
Tabungan BTN Investa menjawab kebutuhan nasabah terhadap tabungan investasi dengan suku bunga kompetitif dan lebih fleksibel.
- Tabungan BTN Juara
Tabungan untuk generasi muda dengan harapan membantu menanamkan kebiasaan menabung pada mereka dan membuat kegiatan menabung jadi mudah dan menyenangkan apalagi ditambah bebas biaya administrasi bulanan.
- Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)
Tabungan Simpanan Pelajar yang ditujukan untuk sarana pembelajaran buah hati Anda. Dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

- Tabungan BTN e'BATARAPOS
Bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero), Tabungan BTN e'BATARAPOS menawarkan kemudahan untuk Anda dengan memberikan layanan melalui loket Kantor Pos yang telah ditentukan. Penyetoran dapat dilakukan di Kantor Pos atau *Outlet* Bank BTN yang ada di seluruh Indonesia.
 - Tabungan BTN Cermat
Tabungan BTN Cermat adalah tabungan berbasis kartu yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum tersentuh layanan perbankan melalui kerja sama keagenan Bank.
 - Tabungan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Rekening tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi Investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.
 - Tabungan BTN Siap!
Tabungan berjangka yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan masa depan nasabah.
 - Tabungan BTN Felas
Produk simpanan dalam mata uang valuta asing guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menabung, bertransaksi dan berinvestasi. Tersedia dalam mata uang valuta asing, yaitu: US Dollar dan Singapore Dollar.
 - Tabungan Simuda Rumahku
BTN SiMuda RumahKu memberikan solusi tabungan bagi Mahasiswa dan Pemuda yang memiliki rencana menabung untuk memiliki rumah semenjak dini.
 - Tabungan BTN Bisnis
Tabungan BTN Bisnis menghadirkan fitur dan layanan yang memudahkan berbagai kebutuhan bisnis anda dengan dukungan lengkap untuk bisnis yang lebih besar. Tabungan BTN Bisnis menghadirkan fitur dan layanan yang memudahkan berbagai kebutuhan bisnis anda dengan dukungan lengkap untuk bisnis yang lebih besar. Penyetoran dapat dilakukan di *Outlet* Bank BTN maupun melalui *Cash Deposit Machine* Bank BTN.
 - Tabungan BTN Payroll
Tabungan untuk kemudahan pembayaran *payroll* perusahaan sekaligus berbagi manfaat untuk karyawan yang juga menawarkan kemudahan transaksi yang dapat dilakukan di seluruh *Outlet* Bank BTN di Indonesia dan juga biaya administrasi bulanan yang ringan.
 - Tabungan BTN Pensiunan
Kenyamanan dan kemudahan bagi Anda, nasabah pensiunan dan calon pensiunan. Tabungan BTN Pensiunan dibuat khusus untuk menyalurkan dana pensiun dengan biaya administrasi yang lebih rendah.
 - b. Deposito BTN Ritel
Bank BTN merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing (USD, SGD) dengan jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).
 - c. Giro Perorangan BTN
 - Giro Perorangan
Jenis simpanan dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang diselenggarakan oleh Bank yang dibuka oleh orang perorangan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro dan media penarikan lainnya.
 - Giro Gabungan (*Joint Account*)
Rekening yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening perorangan.
- ### 3. Produk Wealth Management
- a. *Bancassurance*
Dalam penawaran produk *bancassurance*, Bank BTN bekerja sama dengan 4 (empat) mitra asuransi yaitu Sinarmas MSIG, Zurich Topas Life, Binagriya Upakara dan IFG Life.
 - Asuransi Jiwa Tradisional
Asuransi yang menawarkan kepastian manfaat asuransi utama yaitu berupa Uang Pertanggung (UP) jiwa yang dapat disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian finansial di masa depan. BTN berkerja sama dengan Sinarmas MSIG, Zurich Topas Life dan IFG Life dalam menawarkan produk asuransi jiwa tradisional yang dapat diperoleh di jaringan Kantor Cabang BTN maupun dapat ditawarkan melalui *telemarketing*.
 - Asuransi Jiwa Unit Link (PAYDI)
Produk Asuransi Unit Link memberikan manfaat Uang Pertanggung jika terjadi risiko dan manfaat Nilai Tunai yang dapat diperoleh dari bagian premi yang diinvestasikan. Bank BTN bekerja sama dengan Mitra Asuransi Zurich dengan Produk Prestigio (Regular Premium Unit Link) dan dengan Mitra Asuransi Sinarmas MSIG dengan Produk Smart Platinum Link (Regular Premium Unit Link) dan Smart Ultima Link (Regular Premium Unit Link).
 - b. Reksa Dana
Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) bekerja sama dengan 9 (sembilan) Mitra Manajer Investasi dalam penawaran produk reksa dana, baik reksa dana open end maupun reksa dana terproteksi. Mitra Manajer Investasi yang bekerja sama dengan Bank adalah sebagai berikut:
 - 1) PT Bahana TCW Investment Management
 - 2) PT Trimegah Asset Management
 - 3) PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
 - 4) PT Schroder Investment Management Indonesia
 - 5) PT Danareksa Investment Management
 - 6) PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
 - 7) PT Insight Investments Management

- 8) PT Mandiri Manajemen Investasi
- 9) PT Sucorinvest Asset Management
- Reksa Dana Pasar Uang
Jenis reksa dana yang menginvestasikan 100 persen dana kelolaannya pada produk pasar uang seperti Deposito dan surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Reksa Dana ini cocok untuk Investor pemula dengan profil risiko konservatif. Produk Reksa Dana Pasar Uang antara lain:
 - Reksa Dana Bahana Dana Likuid
 - Reksa Dana TRIM Kas 2
 - Reksa Dana Danareksa Seruni Pasar Uang II
 - Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang
 - Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund
 - Reksa Dana Pendapatan Tetap
Merupakan jenis reksa dana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risikonya relatif lebih besar daripada reksa dana pasar uang. Produk Reksa Dana Pendapatan Tetap antara lain:
 - Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II
 - Reksa Dana Manulife USD Fixed Income
 - Reksa Dana TRIM Dana Tetap 2
 - Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Ultima
 - Reksa Dana Campuran
Merupakan jenis reksa dana yang pengalokasian dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksa dana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksa dana pendapatan tetap. Produk Reksa Dana Campuran antara lain:
 - Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur
 - Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi
 - Reksa Dana Manulife Dana Campuran II
 - Reksa Dana TRIM Kombinasi 2
 - Reksa Dana Batavia USD Balanced Asia
 - Reksa Dana Saham
Merupakan jenis reksa dana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksa dana pasar uang dan reksa dana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Produk Reksa Dana Saham antara lain:
 - Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima
 - Reksa Dana TRIM Kapital Plus
 - Reksa Dana Manulife Dana Saham Kelas A
 - Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A
 - Reksa Dana Danareksa Mawar Konsumer 10
 - Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund
 - Reksa Dana Schroder Dana Prestasi
 - Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus
 - Reksa Dana Batavia Dana Saham
 - Reksa Dana Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS
 - Reksa Dana Batavia Global ESG Sharia Equity
 - Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund
 - Reksa Dana Terproteksi
Reksa dana terproteksi atau dikenal dengan Capital Protected Fund (CPF) merupakan jenis reksa dana yang memberikan proteksi atas nilai investasi awal, apabila pemegang unit penyertaan memegang reksa dana tersebut hingga tanggal jatuh tempo melalui mekanisme pengelolaan portofolio investasi. Secara periodik reksa dana terproteksi juga melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk dividen. Produk Reksa Dana Terproteksi antara lain:
 - Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 32
 - Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 42
 - Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Futura 26
 - Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Prima 30
 - Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 215
 - Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 218
 - Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 222
 - Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 44
 - Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Futura 28
 - Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 22
- c. Surat Berharga Negara Ritel
- Surat Berharga Negara Ritel (SBN Ritel) adalah instrumen investasi berupa surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia di pasar perdana. Pemerintah dalam hal ini sebagai penerbit menjamin pengembalian nilai pokok pada saat jatuh tempo ditambah dengan kupon yang akan dibayarkan secara berkala (Sesuai UU No.24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara). Bank BTN merupakan salah satu mitra distribusi Pemerintah dalam penyaluran SBN Ritel.
- Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI)
Merupakan salah satu instrumen SBN Ritel yang diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia di pasar perdana. ORI memiliki karakteristik dapat diperjual belikan (*tradable*) di pasar sekunder antar investor domestik dan tingkat kupon bersifat tetap (*fixed coupon*).
 - Saving Bond Ritel (SBR)
Merupakan salah satu instrumen SBN Ritel yang diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia di pasar perdana. SBR memiliki karakteristik yaitu memberikan tingkat kupon mengambang dengan batas bawah (*floating with*

floor) dan mempunyai fasilitas *early redemption* bagi investornya. Namun SBR tidak dapat diperjual belikan (*tradable*) di pasar sekunder.

- Sukuk Ritel (SR)
Merupakan salah satu instrumen SBSN Ritel yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah serta diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. SR memiliki karakteristik dapat diperjual belikan (*tradable*) di pasar sekunder antar investor domestik dan memiliki tingkat imbal hasil (kupon) yang bersifat tetap (*fixed coupon*).
 - Sukuk Tabungan (ST)
Merupakan salah satu instrumen SBSN Ritel yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah serta diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. ST memiliki karakteristik yaitu memberikan tingkat imbal hasil (kupon) mengambang dengan batas bawah (*floating with floor*) dan mempunyai fasilitas *early redemption* bagi investornya. Namun ST tidak dapat diperjual belikan (*tradable*) di pasar sekunder.
- d. Surat Berharga Negara Pasar Sekunder
- Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dijual di Pasar Sekunder dan menawarkan fleksibilitas bagi para investor yaitu bisa melakukan aktivitas jual - beli kapan saja (tidak ada periode masa penawaran). Pemerintah dalam hal ini sebagai penerbit menjamin pengembalian nilai pokok pada saat jatuh tempo ditambah dengan kupon yang akan dibayarkan secara berkala (Sesuai UU No.24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara).
- *Fixed Rate* IDR (FR)
Salah satu seri dari Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam denominasi Rupiah dan dijual di Pasar Sekunder dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan tenor dari Obligasi tersebut) dengan kupon tetap. Pemerintah dalam hal ini akan membayarkan kupon secara berkala setiap 6 bulan (Semester).
 - *Fixed Rate* USD (INDON dan INDOIS)
Salah satu seri dari Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam denominasi USD dan dijual di Pasar Sekunder dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan tenor dari Obligasi tersebut) dengan kupon tetap. Pemerintah dalam hal ini akan membayarkan kupon secara berkala setiap 6 bulan (Semester).
- e. *Foreign Exchange*
Foreign exchange merupakan sistem pertukaran antar mata uang menggunakan kurs berjalan dengan jangkauan perdagangan di seluruh dunia. Target market *foreign exchange* adalah nasabah perorangan dengan kebutuhan valuta asing dalam bentuk simpanan, transaksional transfer atau pembayaran ke luar negeri serta kebutuhan *trading* valuta asing. Layanan *foreign exchange* mencakup layanan transaksi *Telegraphic Transfer* (TT) *Overbooking*, *Outgoing* dan *Incoming* serta layanan transaksi *Bank Notes*.

Perbankan Komersial

1. Produk Kredit Komersial

a. Kredit Perumahan

- Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi BTN
Kredit Konstruksi BTN atau Kredit Yasa Griya (KYG) adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank kepada Pengembang/Developer berbentuk badan usaha badan hukum, badan usaha non badan hukum untuk modal kerja pembiayaan pembangunan bangunan horizontal (rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, kios dan lainnya) maupun bangunan vertikal/*high rise building* (rumah susun, apartemen, kondotel, gedung perkantoran dan lainnya) berikut sarana dan prasarananya, sepanjang berdasarkan penilaian Bank layak/*feasible* untuk diberikan kredit.
- Kredit Pemilikan Lahan (KPL) BTN
Kredit Pemilikan Lahan BTN adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbadan hukum untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah sederhana yang pembangunannya menggunakan fasilitas Kredit Konstruksi BTN/KYG.

b. Kredit Non Perumahan

Kredit Non Perumahan Bank BTN terdiri dari Produk Kredit UMKM, Kredit Komersial lainnya, Linkage Program dan Kredit Korporasi. Kredit UMKM mencakup KUR BTN, KUMKM BTN dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK). Kredit Komersial lainnya mencakup Kredit Investasi, KMK dan KMK Kontraktor. Linkage Program mencakup kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi). Sedangkan Kredit Korporasi mencakup Kredit Konstruksi, Investasi, Modal Kerja, Modal Kerja Kontraktor dan Sindikasi.

- Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) BTN
Kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi bagi nasabah yang memiliki usaha produktif dengan kriteria UMKM.
- Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK)
PUMK merupakan program pinjaman pembiayaan modal kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil yang baru mulai agar menjadi tangguh dan mandiri.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTN
Kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada usaha produktif dengan kriteria UMKM yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
- Kredit Linkage BTN
Kredit Linkage BTN adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbadan hukum yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi untuk diteruskan kepada sektor Usaha Kecil dan Mikro (produktif) dan sektor konsumtif.

- Kredit Korporasi
Kredit Korporasi adalah kredit yang diberikan kepada Debitur berbentuk badan usaha berbadan hukum (Perseroan) dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau kebutuhan investasi.
 - Kredit Modal Kerja (KMK) BTN
Kredit Modal Kerja BTN adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha non badan hukum dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja perusahaan.
 - Kredit Investasi BTN
Kredit Investasi BTN adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbadan hukum dan badan usaha non badan hukum, dalam rangka pembiayaan investasi, baik investasi baru, perluasan, modernisasi atau rehabilitasi.
 - Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMK Kontraktor)
Kredit Modal Kerja BTN Kontraktor adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbentuk badan hukum, badan usaha non badan hukum yang bekerja berdasarkan kontrak dengan pemilik proyek/ usaha untuk modal kerja di dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang dimaksud.
 - Kredit Sindikasi
Kredit Sindikasi adalah salah satu sistem pembiayaan kredit (kredit investasi, kredit modal kerja, maupun sebagai guarantor) di mana beberapa Bank secara bersama-sama membiayai proyek yang diajukan oleh nasabah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama.
 - Term Loan Facility
Term Loan Facility adalah fasilitas kredit *non revolving* untuk pembiayaan *Capital Expenditure* dan/atau *Operational Expenditure* jangka menengah atau jangka panjang yang pengembaliannya yang dapat dicicil/diangsur sesuai dengan kemampuan keuangan debitur.
 - Corporate Line Facility
Corporate Line Facility adalah suatu bentuk persetujuan penyediaan dana sejumlah batas maksimal tertentu kepada peminjam dalam jangka waktu tertentu berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Bank.
 - Treasury Line Facility
Treasury Line Facility merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada Non Lembaga Keuangan untuk meng-cover transaksi *Foreign Exchange Line*, *Fixed Income Line* maupun fasilitas jenis lainnya yang lazim dilakukan oleh Perbankan.
 - *Supply Chain Financing (SCF)*
Supply of Financing adalah suatu portofolio teknik dan praktik pembiayaan yang mendukung perdagangan dan arus keuangan dari awal hingga akhir dari proses bisnis perusahaan.
 - Trust Receipt
Trust Receipt adalah sistem pembiayaan perdagangan (impor) jangka pendek yang diberikan bagi nasabah untuk menunda pembayaran kewajiban atas penebusan L/C maupun *Documentary Collection*.
2. Produk Simpanan Komersial
- a. Giro Lembaga BTN
- Jenis simpanan dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang diselenggarakan oleh Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Surat Perintah Pembayaran, pemindahbukuan dan media penarikan lainnya.
- Nasabah Giro Lembaga terdiri dari:
- Instansi pemerintah/lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan yang tidak merupakan perusahaan.
 - Semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya.
 - Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Terbatas Penanaman Modal Asing (PTPMA), Firma (Fa), CV, Yayasan, Lembaga Berbadan Hukum Asing, Partai Politik, Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya.
- b. Deposito Berjangka Lembaga
- Deposito Lembaga
Simpanan Dana Pihak Ketiga kepada Bank dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Deposito Berjangka Lembaga dapat diterbitkan dengan jangka waktu 1, 2, 3, 4, 6, 12 dan 24 bulan.
 - Deposito *On Call* Lembaga
Simpanan Dana Pihak Ketiga kepada Bank dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Jangka waktu penempatan Deposito *On Call* Lembaga adalah minimal 1 hari dan maksimal 35 hari atau sesuai kebutuhan nasabah.

Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah

Produk Pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan Unit Usaha Syariah dikategorikan menjadi Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial. Uraian terkait Produk Pembiayaan Usaha Syariah dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Konsumer

a. KPR BTN Subsidi iB

KPR BTN Subsidi iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan *margin* rendah, angsuran ringan dan tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan skema FLPP, SSM, BP2BT dan Tapera Syariah Menggunakan akad "*Murabahah*" (jual beli) serta ada juga skema SSM dan BP2BT yang Menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dalam rangka pemilikan Rumah Tapak dan Rumah Susun yang merupakan program pemerintah.

b. KPR BTN Platinum iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad "*Murabahah*" (jual beli) dengan angsuran tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dalam rangka pemilikan Rumah, Rumah Toko, Rumah Kantor, Rumah Susun atau Apartemen dalam kondisi baru maupun *Second*.

c. Pembiayaan Properti BTN iB (KPR HITS)

Produk Pembiayaan dengan menggunakan akad "*Musyarakah Mutanaqisah*" (*sharing* kepemilikan) yang disewakan ke nasabah dengan angsuran fleksibel, dapat digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah, aset barang lainnya maupun sistem *refinancing*.

d. KPR BTN Indent iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad "*istishna*" (jual beli atas dasar pesanan), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

e. Pembiayaan Bangun Rumah iB

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pemohon perorangan dengan akad "*Murabahah*" (jual beli) dengan tujuan pembiayaan untuk membangun dan atau merenovasi rumah, ruko, atau bangunan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tempat tinggal, di atas tanah yang sudah dimiliki oleh Pemohon, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

f. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) BTN iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad "*Murabahah*" (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi.

g. Pembiayaan Tunai Emas (Tunas) BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad "*Qardh, Rahn dan Ijarah*" yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan Surat Gadai.

h. Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan dengan akad "*Kafalah bil Ujroh*" yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti: Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya *travelling* (perjalanan wisata), Paket biaya Umrah/Haji Plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

i. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan konsumtif perorangan dengan akad "*Murabahah*" yang dapat digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, furnitur dan alat rumah tangga serta barang kebutuhan lainnya.

j. Pembiayaan Emasku BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad "*Murabahah*" yang digunakan untuk pembelian emas batangan dengan cicilan tetap selama jangka waktu.

2. Pembiayaan Komersial

a. Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana Nasabah berdasarkan akad kerja sama antara Bank untuk menjalankan suatu usaha kerja sama tertentu (*syirkah*) bersama dengan Nasabah yang menjalankan usaha produktif berupa pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah serta dengan kewajiban bagi Nasabah untuk mengembalikan dana yang diterima berikut imbalan bagi Bank sesuai jangka waktu dan jadwal pengembalian yang disepakati.

b. Pembiayaan Pembelian Lahan BTN iB

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbadan hukum untuk pengadaan tanah dan/atau pengolahan tanah untuk pembangunan rumah sederhana yang pembangunannya menggunakan fasilitas Pembiayaan Konstruksi BTN iB dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta dengan kewajiban bagi Nasabah untuk mengembalikan dana yang diterima berikut imbalan (bagi hasil) bagi Bank sesuai jangka waktu dan jadwal pengembalian yang disepakati.

c. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana Nasabah berdasarkan akad kerja sama antara Bank untuk menjalankan suatu usaha kerja sama tertentu (*syirkah*) bersama dengan Nasabah yang menjalankan usaha produktif selain usaha pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan dengan akad berdasarkan prinsip Syariah serta dengan kewajiban bagi Nasabah untuk mengembalikan dana yang diterima berikut imbalan bagi Bank sesuai jangka waktu dan jadwal pengembalian yang disepakati.

- d. Pembiayaan Investasi BTN iB
 Fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana Nasabah berdasarkan akad kerja sama antara Bank untuk menjalankan suatu usaha kerja sama tertentu bersama dengan Nasabah yang menjalankan usaha produktif, guna pembelian/pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi dan dilaksanakan dengan akad berdasarkan prinsip Syariah serta dengan kewajiban bagi Nasabah untuk mengembalikan dana yang diterima berikut imbalan bagi Bank (bagi hasil atau margin) sesuai jangka waktu dan jadwal pengembalian yang disepakati.
- e. Pembiayaan BTN iB dengan Mekanisme IMBT
 Penyediaan Dana untuk pengadaan Barang Modal atau *Refinancing Asset* Nasabah dengan prinsip sewa beli antara pemilik objek IMBT (Bank/*Lessor*) dan penyewa (Nasabah/*Lessee*) dengan diakhiri opsi perpindahan kepemilikan objek IMBT dari Bank ke Nasabah melalui hibah atau jual beli, yang mana yang disepakati.
- f. Pembiayaan Sindikasi BTN iB
 Pembiayaan yang diberikan berupa sindikasi dan atau *Club Deal* oleh lebih dari satu Bank diberikan kepada satu nasabah yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Lembaga keuangan Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan pilihan akad "*Mudharabah*" (bagi hasil), "*Musyarakah*" (kerja sama), "*Murabahah*" (bagi hasil), atau "*Ijarah*" (sewa).
 nasabah dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.
- c. Tabungan BTN Haji dan Umroh iB
 Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat Ibadah Haji dan Umroh nasabah dengan akad "*Mudharabah*" (investasi) dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- d. TabunganKu iB
 Produk simpanan dengan akad "*Wadiah*" (titipan), dengan memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Tabungan BTN Qurban iB
 Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (bagi hasil), dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- f. Tabungan BTN Sempel iB
 Tabungan Rupiah untuk Siswa yang diterbitkan Bersama oleh UUS Bank BTN dan Bank-Bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- g. Tabungan BTN Emas iB
 Produk tabungan dengan akad "*Mudharabah Mutlaqah*" yang digunakan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam mempersiapkan dana untuk pembelian emas dan kebutuhan lain nasabah di masa yang akan datang.

Produk Simpanan Syariah

1. Giro Syariah
 - a. Giro BTN iB
 Produk simpanan dengan prinsip "*Wadiah*" (titipan), untuk tujuan keperluan operasional keuangan nasabah dengan memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.
 - b. Giro BTN Prima iB
 Produk simpanan dengan prinsip "*Mudharabah Mutlaqah*" dan "*Mudharabah Muqayyadah*" (investasi), ditujukan untuk keperluan investasi, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.
2. Tabungan Syariah
 - a. Tabungan BTN Batara iB
 Produk simpanan dana dengan akad "*Wadi'ah*" (titipan), digunakan untuk keperluan transaksi perbankan sehari-hari dengan memberikan berbagai manfaat yang menguntungkan bagi nasabah dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.
 - b. Tabungan BTN Prima iB
 Produk simpanan dana berakad "*Mudharabah Mutlaqah*" dan "*Mudharabah Muqayyadah*" (investasi), ditujukan untuk keperluan Investasi dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi
3. Deposito Syariah
 - a. Deposito BTN iB
 Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman, nyaman dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip "*Mudharabah Mutlaqah*" dan "*Mudharabah Muqayyadah*" (investasi). Deposito ini dapat diberikan kepada perorangan maupun lembaga.
 - b. Deposito *On Call* iB
 Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu yang lebih singkat, berdasarkan prinsip "*Mudharabah Mutlaqah*" (investasi). Deposito ini dapat diberikan kepada perorangan maupun lembaga.

Jasa dan Layanan

Jasa dan layanan perbankan yang dimiliki Perseroan di antaranya berupa kartu konsumen, jasa dan layanan pada bisnis *wealth management*, *electronic channel* dan jasa perbankan lainnya. Jasa dan layanan yang ditawarkan oleh Kartu konsumen berupa kartu debit dan kartu kredit. Jasa dan layanan yang ditawarkan pada bisnis *wealth management* antara lain Layanan BTN Prioritas berupa solusi produk yang bervariasi antara lain produk dana (tabungan dan deposito), produk investasi (surat berharga negara, reksa dana dan transaksi valuta asing), produk *bancassurance*, *service privilege* dan *product privilege* khusus bagi Nasabah BTN Prioritas serta *loyalty platform* PLUS

by BTN Prioritas. Jasa *Electronic channel* terdiri dari produk ATM dan Kiosk, *Internet Banking*, *Cash Management*, *SMS Banking* dan *Mobile Banking*. Jasa yang ditawarkan oleh Korporasi berupa Bank Garansi BTN (Bank Garansi Lokal, SBLC, *Demand Guarantee* dan SKDB) dan SKBDN atau L/C. Sedangkan jasa dan layanan perbankan lainnya berupa jasa *trading*, jasa administrasi, jasa layanan dan jasa lainnya.

Perbankan Konvensional

1. Kartu Debit BTN

- a. Kartu Debit BTN Design Suka-suka
Kartu Debit BTN dengan desain yang dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing nasabah atau komunitas, di mana dapat dipergunakan untuk transaksi belanja melalui EDC maupun debit online di berbagai merchant online di seluruh dunia.
- b. Debit BTN Online (Visa dan GPN)
Adalah layanan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat bertransaksi belanja online di berbagai merchant menggunakan Kartu Debit BTN Visa maupun GPN.
- c. Kartu Blink BTN
Kartu BLINK BTN adalah Kartu BTN berbasis Uang Elektronik yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ribuan akseptansi berlogo e-money antara lain: Tol, Moda Transportasi Trans Jakarta dan Kereta Commuterline, Perparkiran dan lain sebagainya.
- d. Poin Spekta BTN
Poin Spekta BTN adalah program loyalty yang diberikan kepada nasabah Bank BTN berupa poin yang dapat ditukarkan atau di *redeem* dengan berbagai macam *voucher*, hadiah langsung maupun *grand prize* di akhir periodenya.

2. Wealth Management

- a. Layanan BTN Prioritas
Layanan BTN Prioritas merupakan layanan eksklusif dari Bank Tabungan Negara khusus bagi Nasabah Istimewa Bank BTN. Melalui *Customer Value Proposition (CVP)* BTN Prioritas, *Defining Your Priority*, Layanan BTN Prioritas hadir untuk memberikan solusi finansial dan layanan yang relevan, berkesinambungan dan berkepanjangan untuk setiap Individu Istimewa, Nasabah setia BTN Prioritas.

Dengan didukung oleh *Priority Banking Manager* yang profesional dan telah tersertifikasi, BTN Prioritas menghadirkan inovasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan Nasabah melalui:

- Solusi produk yang bervariasi antara lain Produk Dana (Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Investa, Tabungan Felas, Deposito BTN Ritel Rupiah, Deposito BTN Ritel Valas), Produk Investasi (Surat Berharga Negara, Reksa Dana, Transaksi penukaran mata uang asing) dan Produk *Bancassurance*.
- *Service Privilege* berupa *exclusive medical check up*, *Platform Loyalty User*, BTN Prioritas *Concierge Service*, BTN Prioritas *Lounge* dan *Meeting Room*, *Flexible Banking*, *E-Consolidated Statement*,

Calendar Event, *Majalah Good Living* BTN Prioritas, *Hadiah Hari Istimewa*, *Airport Transfer*, *Special Merchant*, *Executive Lounge* Bandara, *Welcoming Pack*, *Priority Banking Manager*.

- *Product Privilege* berupa Kartu Debit Visa BTN Prioritas, *Safe Deposit Box (SDB)*, *Mobile Banking*, Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA).
- b. PLUS by BTN Prioritas
PLUS by BTN Prioritas adalah *loyalty platform* bagi Nasabah BTN Prioritas yang dapat diakses melalui *smartphone* maupun PC/laptop nasabah pada alamat www.definingyourpriority.com.

Mengusung *brand promise*, *Defining Your Priority*, PLUS by BTN Prioritas menawarkan berbagai *benefit* bagi nasabah sesuai dengan level *membership* Nasabah BTN Prioritas yang didasarkan pada total *Asset Under Management (AUM)* yang ditempatkan. Mulai dari level *membership* Gold (AUM mulai dari Rp500 juta), Platinum (AUM mulai dari Rp2 Miliar), Titanium (AUM mulai dari Rp5 Miliar) dan Prime (AUM mulai dari Rp10 Miliar), nasabah dapat menikmati berbagai *benefit* pilihan diantaranya *Wealth Management Voucher*, *Loyalty Reward*, *Banking Privilege*, BTN Prioritas *Concierge Service*, *Membership Coupon*, hingga *Hadiah Hari Istimewa* yang dapat ditukarkan dengan berbagai jenis hadiah yang dapat dipilih langsung oleh nasabah.

3. Electronic Channel ATM

Layanan Automatic Teller Machine (ATM) yang dapat melayani penarikan tunai dengan denominasi Rp50.000 dan Rp100.000 yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Cabang Perseroan dan lokasi-lokasi premium seperti Gallery ATM di Mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar dan perumahan sehingga makin memudahkan bagi nasabah dalam bertransaksi serta didukung jaringan yang *online* 24 jam.

4. Cash Recycling Machine (CRM)

Cash Recycling Machine (CRM) adalah fasilitas perbankan untuk tarik tunai, setor tunai, transfer antar bank serta transaksi pembayaran atau pembelian.

5. ATM Non Tunai (Kiosk)

Sebuah mesin yang berdimensi kompak tampak modern, *touchscreen* dan mirip sebuah mesin ATM namun tidak dapat melayani penarikan uang tunai. Dapat berfungsi sebagai media promosi dan melayani transaksi finansial non tunai.

6. Mobile Banking

Aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial di mana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) dengan melakukan *download* aplikasi iMobile BTN dari Google Play dan Apple Store. Koneksi jalur data internet sehingga lebih murah dan efisien. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

7. Internet Banking

Layanan perbankan bagi nasabah perorangan untuk dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan swakelola transaksi perbankan melalui media internet. Alamat *website*:

<https://internetbanking.btn.co.id> dengan mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer Service* kantor cabang Bank BTN. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan.

8. **Virtual Account**

Layanan nomor identifikasi dari pelanggan suatu perusahaan (*end user*) yang telah bekerja sama dengan Perseroan baik untuk pelanggan perorangan maupun non perorangan sebagai identifikasi penerimaan dana.

9. **Electronic Data Capture (EDC)**

Layanan selayaknya mesin ATM mini yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan kartu atau menggesek (*swipe*) kartu ATM (Kartu Debit atau Kredit) dalam suatu bank atau antar bank serta dilengkapi fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *realtime online*.

10. **Cash Management**

Layanan khusus bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet. Alamat website: <https://cashmanagement.btn.co.id> dengan melakukan pendaftaran ke kantor cabang Bank BTN terdekat. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator.

11. **Branchless Banking**

Layanan produk dan jasa perbankan tanpa kantor melalui kerja sama keagenan Bank dan Kantor Pos yang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam rangka memperluas jangkauan dan kemudahan layanan transaksi perbankan bagi masyarakat serta didukung sarana jaringan teknologi informasi.

12. **Portal BTN Properti**

Layanan khusus berbasis portal properti yang memudahkan calon debitur dalam hal pencarian *listing* proyek yang telah bekerja sama dengan Bank BTN, simulasi angsuran, pengajuan KPR/KPA secara *online*, *online live chat* 24 jam serta fitur-fitur lainnya. Portal BTN Properti juga melengkapi fiturnya dengan teknologi *4D Tour Service* yang memungkinkan calon debitur mendapatkan gambaran real terhadap unit properti yang dipilih.

13. **Jasa dan Layanan Nasabah Korporasi**

a. **Garansi Bank BTN (*Guarantee*)**

Layanan jasa perbankan yang dapat diberikan kepada nasabah dalam bentuk penjaminan terhadap suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon penjaminan.

Produk dan layanan *Guarantee* yang meliputi Bank Garansi Lokal, *Standby Letter of Credit*, *Demand Guarantee* dan Surat Keterangan Dukungan Bank yaitu:

- Bank Garansi Lokal adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank kepada *Obligee* apabila *Principal* melakukan wanprestasi.
- SBLC (*Standby Letter of Credit*) adalah jaminan yang berlaku secara internasional, diterbitkan oleh Bank atas permohonan dari *applicant* untuk menjamin penggantian kerugian kepada *beneficiary*

atas kondisi wanprestasi yang dilakukan *applicant* ataupun dapat juga digunakan untuk menjamin pembayaran atas prestasi yang telah dilakukan *beneficiary* sesuai syarat dan kondisi SBLC.

- DG (*Demand Guarantee*) adalah jaminan yang berlaku secara internasional, diterbitkan oleh Bank/ Guarantor berdasarkan permohonan *applicant* untuk membayar kepada *beneficiary* dengan jumlah maksimum sesuai yang tercantum dalam DG atas kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh *applicant*.
 - Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) merupakan Surat keterangan dukungan keuangan yang diterbitkan oleh Bank kepada nasabah untuk tujuan tertentu.
- b. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Letter of Credit* (L/C)

Adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (*Applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk:

- Melakukan pembayaran kepada Penerima atau *order*-nya atau mengaksep membayar wesel yang diterima oleh Bank
- Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau *order*-nya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima, atau
- Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima.

14. **Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya**

Selain menyalurkan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga, Perseroan juga menyediakan layanan konsumen lainnya untuk meningkatkan *Fee Based Income*, seperti pengiriman uang dalam dan luar negeri, Penukaran uang valuta asing, Kotak penyimpanan (*safe deposit box*), Pembayaran tagihan (telepon, listrik dan air), Pembayaran internet dan TV berlangganan, pembelian tiket penerbangan dan tiket kereta api serta Isi ulang pulsa. Selain itu, sebagai penyedia solusi total perbankan kepada nasabah lembaga, Perseroan menyediakan berbagai jasa dan layanan bagi nasabah lembaga antara lain:

a. **Virtual Account** BTN

Layanan bagi nasabah Giro Lembaga BTN berupa *account virtual* yang dapat digunakan oleh pelanggan/mitra dari nasabah lembaga tersebut untuk melakukan pembayaran tagihan menggunakan kartu bank mana pun dan nasabah lembaga dapat melakukan monitoring penerimaan pembayaran secara *online real time* terhadap hasil pembayaran pelanggannya.

b. **Transfer Management**

Transfer Management merupakan layanan bank kepada nasabah untuk membantu nasabah melakukan transfer dana secara *online*, baik *Inhouse Transfer* (antar rekening), *Domestic transfer* (Transfer online, SKNBI, BIRTGS, BI FAST) dan *International Fund Transfer* (transfer valas via SWIFT). Transfer dapat dilakukan dalam *single currency* (kode mata uang yang dikirim sama dengan

- kode mata uang yang diterima) dan multi *currency* (kode mata uang yang dikirim tidak sama dengan kode mata uang yang diterima).
- c. **Payment Management**
Payment management merupakan bentuk kerja sama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah mengelola pembayaran dan tagihan seperti;
- Edu *Payment/SPP Online* BTN
 - Edu *Payment* merupakan layanan bagi lembaga pendidikan berupa penerimaan setoran biaya pendidikan dan biaya lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara *online real time*.
 - *Bill Payment* (Pembayaran tagihan telepon, listrik, air, gas dan lainnya).
 - Pembayaran Pajak
 - Pembayaran pembelian produk Pertamina
 - Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan
 - Pembayaran luran BPJS Kesehatan
 - Pembayaran Pensiun (Taspen dan ASABRI)
 - Pembayaran Tagihan Rumah Sakit
 - Bank Operasional I dan II
- d. **Payroll Service** BTN
Payroll Service merupakan jasa layanan Bank kepada Perusahaan/Lembaga dalam mengelola pembayaran gaji atau honor serta kebutuhan finansial lainnya.
- e. **Point Spekta**
 Poin Spekta BTN adalah Program *loyalty* yang diberikan kepada nasabah Bank BTN berbentuk poin yang dapat ditukarkan atau di-redeem dengan berbagai macam voucher, hadiah langsung maupun grand prize di akhir periodenya.
- 4. Payment Point Syariah**
 Fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin dan tetap seperti tagihan pembayaran uang pendidikan.
- 5. Payroll BTN iB**
 Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan.
- 6. Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji**
 Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan sistem *online* dari Siskohat.
- 7. SPP Online BTN iB**
 Layanan bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan *delivery channel* menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara *realtime* dan *online*.
- 8. Program Pengembangan Operasional BTN iB**
 Program yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah lembaga dalam bentuk dana, barang, maupun fasilitas lainnya untuk mendukung kelancaran operasional Nasabah dengan persyaratan tertentu yang disepakati Bank dan Nasabah dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).
- 9. Garansi Bank BTN iB**
 Jasa yang diberikan oleh Bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada pihak yang menerima jaminan untuk suatu kepentingan transaksi/proyek tertentu yang akan dijalankan Nasabah dengan akad "*Kafalah*" (Garansi).
- 10. Safe Deposit Box BTN iB**
 Tempat dalam bentuk Boks yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu dan dilengkapi system pengamanan untuk menjamin keamanan barang berharga atau dokumen penting yang disimpan dari bahaya kebakaran, perampokan dan lainnya. Akad yang digunakan adalah "*Ijarah*" (Sewa).
- 11. Mobile Banking**
 Aplikasi perbankan bagi nasabah BTN Syariah untuk memudahkan transaksi pembelian, pembayaran, transfer dan akses informasi rekening dari perangkat seluler.
- 12. Virtual Account**
 Layanan yang memberikan kemudahan pembayaran dengan memberikan nomor identifikasi pembayaran.

Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah

1. Kartu Debit Visa BTN Syariah

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai dan transfer, dapat dilakukan di seluruh jaringan ATM Bank BTN, Link, ATM Bersama, Prima, Visa dan Plus serta berbelanja di toko-toko berlogo Visa di dalam dan luar negeri.

2. Kiriman Uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara *real time* ke sesama rekening Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke Bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, BI FAST, Link, ATM Bersama dan Prima.

3. BTN Cash Management

Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi *web-browser* yang berguna untuk membantu nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif dan efisien.

WILAYAH OPERASIONAL



	Kantor Wilayah I (Jawa Barat)	Kantor Wilayah II (DKI Jakarta & Banten)	Kantor Wilayah III (Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara)
Kantor Wilayah	1	1	1
Kantor Cabang	15	13	15
Kantor Cabang Pembantu	123	133	83
Kantor Fungsional	0	0	0
Kantor Cabang Syariah	6	4	3
Kantor Cabang Pembantu Syariah	15	10	12
Kantor Kas Syariah	0	0	1
Payment Point Syariah	1	1	1
Outlet & Lounge BTN Prioritas	9	17	8
ATM & CRM	517	483	334

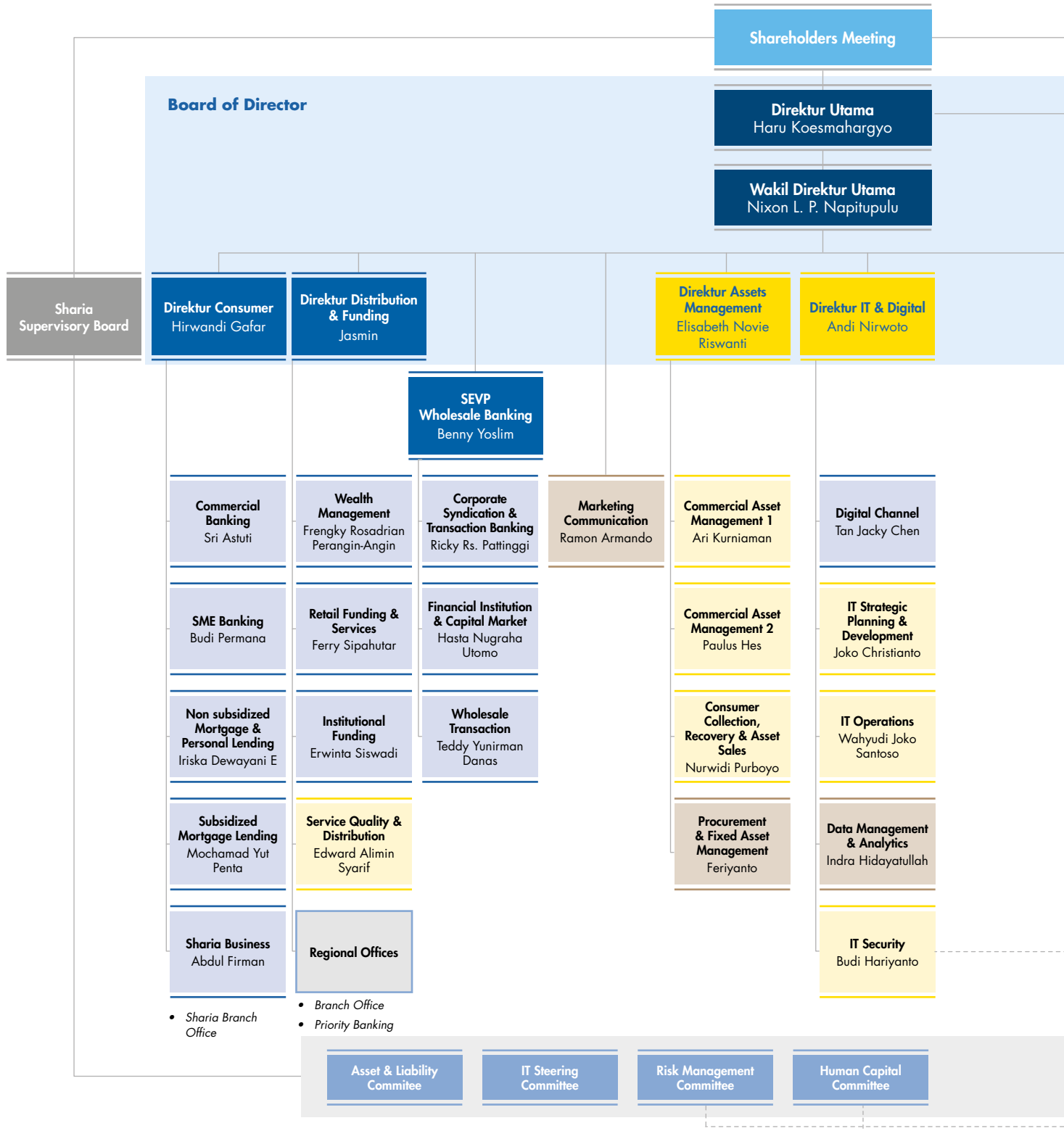
Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 tahun Terakhir

Jenis Kantor	2022	2021	2020	2019	2018
Kantor Wilayah	6	6	6	6	6
Kantor Cabang	80	79	78	78	76
Kantor Cabang Pembantu	537	543*	314	326	304
Kantor Kas	-	-	247	358	468
Payment Point	-	-	56	52	48
Kantor Fungsional	3	58*	-	-	-
Kantor Layanan Setara KCP	2	2	2	3	3
Mobil Kas Keliling	-	51	23	23	23
Total Jaringan Kantor Konvensional	628	733	720	840	923
Kantor Cabang Syariah	30	29	25	25	24
Kantor Cabang Pembantu Syariah	69	61	59	53	48
Kantor Kas Syariah	5	7	7	7	8
Payment Point Syariah	6	12	12	12	13
Mobil Kas Keliling	-	-	-	-	-
Total Jaringan Kantor Syariah	110	109	103	97	93

*) Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum, terdapat penyederhanaan pencatatan jaringan kepada Regulator OJK yaitu Kantor Bank yang berada di bawah Kantor Cabang hanya Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional sehingga terdapat penyetaraan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu dan Payment Point menjadi Kantor Fungsional.

	Kantor Wilayah IV (Sumatera)	Kantor Wilayah V (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)	Kantor Wilayah VI (Jawa Tengah & DIY)
Kantor Wilayah	1	1	1
Kantor Cabang	11	18	8
Kantor Cabang Pembantu	75	69	56
Kantor Fungsional	1	0	2
Kantor Cabang Syariah	9	4	4
Kantor Cabang Pembantu Syariah	14	6	12
Kantor Kas Syariah	3	0	1
Payment Point Syariah	0	2	1
Outlet & Lounge BTN Prioritas	8	10	5
ATM & CRM	293	284	206

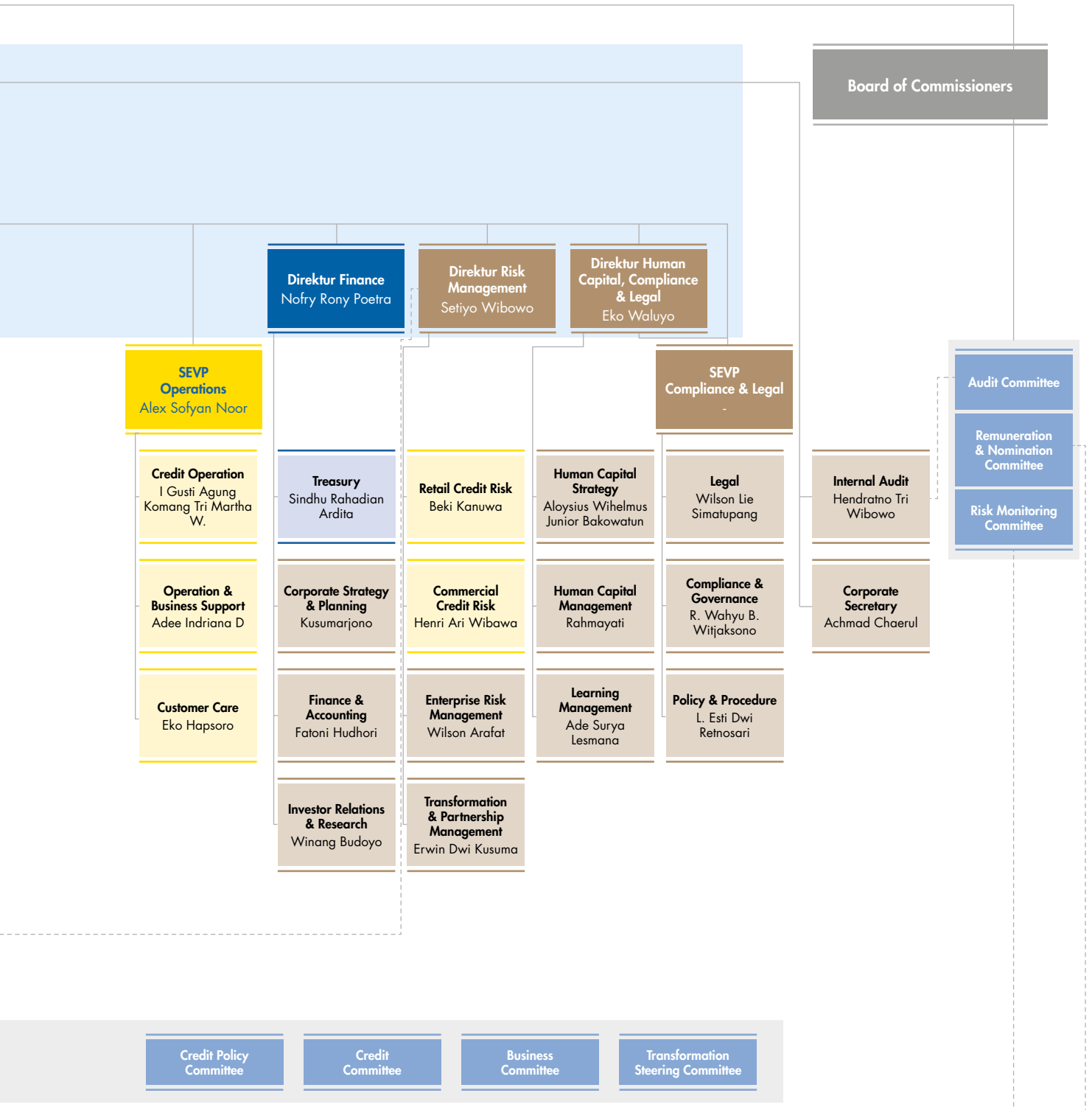
STRUKTUR ORGANISASI



Committee
 Board
 Business
 Support
 Shared Service

Garis Komando
 Garis Koordinasi

Sejalan dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan Perseroan, maka Direksi telah melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi agar proses eksekusi inisiatif bisnis dan operasional dapat berjalan efektif. Struktur Organisasi ini telah mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat Direksi No. 303/DIR/TPMD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat sebagai tindak lanjut arahan Dewan Komisaris dan Hasil Pertemuan dengan OJK jo. Surat Dewan Komisaris No. 44/KOM/BTN/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 Perihal Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk jo. Risalah Rapat Direksi Perseroan No. 20 tanggal 20 Februari 2023. Berikut adalah Struktur Organisasi Perseroan.



Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit: Iqbal Latanro (Ketua merangkap anggota), Ahdi Jumhari Luddin, Sentot A. Sentausa, Andin Hadiyanto, Adi Prakoso dan Peter Eko Budi Darwito.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi: Chandra M. Hamzah (Ketua merangkap anggota), Iqbal Latanro, Armand B. Arief, Ahdi Jumhari Luddin, Sentot A.

Sentausa, Andin Hadiyanto, Herry Trisaputra Zuna, Himawan Arief Sugoto, Moch Amin Nurdin dan Rahmayati.

3. Komite Pemantau Risiko: Armand B. Arief (Ketua merangkap anggota), Herry Trisaputra Zuna, Himawan Arief Sugoto, Ignace Widiatmoko dan Pamuji Gesang Raharjo.

Nama Komite di Bawah Direksi terdapat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI

Pentingnya peran organisasi maupun asosiasi bagi suatu perusahaan mendorong Perseroan untuk ikut serta aktif dalam keanggotaan organisasi atau asosiasi terutama di Indonesia. Perseroan bergabung dengan berbagai asosiasi/perhimpunan yang sesuai dengan kiprahnya dalam industri perbankan, termasuk dalam statusnya sebagai BUMN. Dengan bergabung di dalam asosiasi/perhimpunan ini, Perseroan bisa berbagi isu dan kebijakan tentang industri perbankan, termasuk dampak dan peluangnya bagi perbankan pada jangka pendek, menengah maupun panjang. Selama tahun 2022, Perseroan bergabung dengan asosiasi/perhimpunan berikut:

Nama Asosiasi	Kedudukan dalam Asosiasi
NASIONAL	
Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Ketua Bidang Sosial
Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS)	Bendahara
Forum Human Capital Indonesia BUMN	Koordinator Bidang Sosial
Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)	Anggota
Forum Humas BUMN	Anggota
Asosiasi Emiten Indonesia	Anggota
Konsorsium Data Kerugian Eksternal (KDKE)	Anggota
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	Anggota
Ikatan Auditor Intern Bank	Anggota
Perhimpunan Audit Internal Indonesia	Anggota
Forum Hukum BUMN	Anggota
Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO)	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Operasional	Anggota
SRIKANDI BUMN	Anggota
Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN)	Anggota
Asosiasi Wali Amanat Indonesia	Anggota
INTERNASIONAL	
World Saving Bank Institution (WSBI)	Ketua WSBI Asia - Pasific Regional Group
Association Cambiste Internationale (ACI) - Financial Markets Association (FMA)	Bendahara Umum
Certified Wealth Manager's Association (CWMA)	Anggota
The Institute of Internal Auditor (IIA)-Indonesia Chapter	Anggota

PROFIL DIREKSI

HARU KOESMAHARGYO

Direktur Utama



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Selatan



Usia

56 Tahun Per Desember 2022



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang (1989).
- Master (S2) Investment Banking, Emory University, Atlanta USA (2000).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 5 oleh BSMR (*Refreshment* 2021).



Pengalaman Kerja

- Direktur Utama Bank BTN (Maret 2021 – saat ini).
- Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2021).
- Direktur Keuangan dan Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017).
- Presiden Komisaris PT BTMU – BRI Finance (2014-2015).
- Kepala Divisi Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan untuk pertama kalinya sejak 10 Maret 2021 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 19 Mei 2021.



Periode Menjabat

10 Maret 2021 - RUPS Tahun 2026, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, memiliki 304.600 lembar saham/0,0023636%

NIXON L. P. NAPITUPULU

Wakil Direktur Utama

**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Selatan

**Usia**

53 Tahun Per Desember 2022

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan (1994).

**Sertifikasi**

- Manajemen Risiko Level 5 oleh BSMR (*Refreshment* 2022).
- *Treasury Dealer Level Advance* oleh LSPP (2020).

**Pengalaman Kerja**

- Wakil Direktur Utama Bank BTN (Maret 2021 – saat ini).
- Plt. Direktur Utama Bank BTN (Desember 2020-Maret 2021).
- Direktur Finance, Planning, and Treasury Bank BTN (November 2019-Maret 2021).
- Direktur Finance, Treasury, and Strategy Bank BTN (Agustus 2019 – November 2019).
- Direktur Collection and Asset Management merangkap Plt. Direktur Finance, Treasury, and Strategy Bank BTN (Mei 2019 – Agustus 2019).
- Direktur Collection and Asset Management Bank BTN (Maret 2018 – Mei 2019).
- Direktur Collection, Asset Management, and Legal Bank BTN (2017-Mei 2019). (Desember 2017 – Maret 2018).
- Direktur Bank BTN (Maret 2017 – Desember 2017).
- Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Pos (2015- Maret 2017).
- Head of Tim Transisi Bank Joint Venture PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015).
- Head of Priority Project Bank Joint Venture PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015).
- Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014).

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 17 Maret 2017 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 25 Juli 2017. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak 10 Maret 2021 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 Mei 2021 dan dipercaya untuk menjabat kembali pada periode ke-2 sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tanggal 02 Maret 2022.

**Periode Menjabat**

- 17 Maret 2017 – 02 Maret 2022, Periode Pertama
- 02 Maret 2022 – RUPS Tahun 2027, Periode Kedua

**Jabatan Rangkap**

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.

**Kepemilikan Saham BBTN**

Per 31 Desember 2022, memiliki 2.481.800 lembar saham/0,0192579%

HIRWANDI GAFAR

Direktur Consumer



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Barat



Usia

54 Tahun Per Desember 2022



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1992).



Sertifikasi

- Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2022).
- International Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program oleh MMUGM dan IBI (2022).
- Pelatihan Dasar Perbankan Syariah/PDPS oleh PEBS (2020).



Pengalaman Kerja

- Direktur Consumer Bank BTN (Maret 2022 – saat ini).
- Direktur Unit Usaha Syariah Bank BTN (2020 – saat ini)
- Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN (2019 - Maret 2022).
- Commercial Lending Division Head Bank BTN (2019).
- Subsidized Mortgage Lending Division Head Bank BTN (2019).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 Agustus 2020.



Periode Menjabat

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, memiliki 603.900 lembar saham/0,0046861%

NOFRY RONY POETRA

Direktur Finance

**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Timur

**Usia**

54 Tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Pancasila, Jakarta (1991).
- Master (S2) MBA Business, The George Washington University, Washington DC, USA (1999).

**Sertifikasi**

- Treasury Dealer Level Advance (ACI/LSPP) (*Refreshment* 2021).
- Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh LSPP (2021).
- Certified Wealth Manager (CWMA) (2006).

**Pengalaman Kerja**

- Direktur Finance Bank BTN (Maret 2022 – saat ini).
- Direktur Finance, Planning and Treasury Bank BTN (2021- Maret 2022).
- Treasury Division Head Bank BTN (2015 - 2021).
- Pjs. Kepala Kantor Wilayah I Bank BTN (2015).
- Treasury Division Head Bank BTN (2014).

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 10 Maret 2021 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 09 Agustus 2021.

**Periode Menjabat**

10 Maret 2021 – RUPS Tahun 2026, Periode Pertama

**Jabatan Rangkap**

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.

**Kepemilikan Saham BBTN**

Per 31 Desember 2022, memiliki 1.034.600 lembar saham/0,0080282%

EKO WALUYO

Direktur Human Capital, Compliance & Legal



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Bekasi



Usia

51 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1995).
- Master (S2) Manajemen, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta/University of Kentucky, USA (2004).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh LSPP (2021).



Pengalaman Kerja

- Direktur Human Capital, Compliance & Legal Bank BTN (Maret 2022 – saat ini).
- Direktur Compliance and Legal Bank BTN (2021- Maret 2022).
- Human Capital Management Division Head Bank BTN (2019-2021).
- Human Capital Management & Culture Specialist Division Head Bank BTN (2017-2019).
- Human Capital Division Head Bank BTN (2017).
- Corporate Secretary Division Head Bank BTN (2015-2017)
- Pjs. Corporate Secretary Division Head Bank BTN (2014-2015)



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 10 Maret 2021 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 09 Agustus 2021.



Periode Jabatan

10 Maret 2021 - RUPS Tahun 2026, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, memiliki 770.900 lembar saham/0,0059819%

ELISABETH NOVIE RISWANTI

Direktur Assets Management



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Bekasi



Usia

55 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1991).



Sertifikasi

- International Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program oleh MMUGM dan IBI (2022).
- Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2021)



Pengalaman Kerja

- Direktur Assets Management Bank BTN (Maret 2022 - saat ini).
- Direktur Wholesale Risk and Asset Management Bank BTN (2021- Maret 2022).
- Direktur Remedial and Wholesale Risk Bank BTN (2019 - 2021)
- Direktur Collection and Asset Management Bank BTN (2019).
- Asset Management Division Head Bank BTN (2017 - 2019).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 29 Agustus 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 26 Juni 2020.



Periode Jabatan

29 Agustus 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, memiliki 589.300 lembar saham/0,0045728%

ANDI NIRWOTO

Direktur IT & Digital



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Pusat



Usia

52 Tahun Per Desember 2022



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994).
- Master (S2) Finance, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta/University of Lexington Kentucky, USA (1997).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 5 Direksi oleh IICD (*Refreshment* 2021).



Pengalaman Kerja

- Direktur IT & Digital Bank BTN (Maret 2022 - saat ini).
- Direktur Operation, IT, and Digital Banking Bank BTN (2019 - Maret 2022).
- Direktur IT & Operation Bank BTN (2018 - 2019)
- General Manager Operasional Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017 - 2018).
- General Manager Divisi Solusi & Security Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015 - 2017).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 23 Maret 2018 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 10 September 2018.



Periode Jabatan

23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, memiliki 859.161 lembar saham/0,0066668%

JASMIN

Direktur Distribution and Funding

**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Selatan

**Usia**

58 Tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1988).
- Magister (S2) International Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998).

**Sertifikasi**

- Publik Manajemen Risiko dan Treasury Dealer Level 5 (*Refreshment* 2022).
- Certified Wealth Manager oleh CWM (2021).

**Pengalaman Kerja**

- Direktur Distribution and Funding Bank BTN (Maret 2022 - saat ini).
- Direktur Distribution and Retail Funding Bank BTN (2019 - Maret 2022).
- SEVP Consumer & Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 - 2019).
- Regional CEO IV/JKT 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 - 2018).
- Regional Manager IV/JKT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013 - 2015).

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 04 Mei 2020.

**Periode Jabatan**

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama

**Jabatan Rangkap**

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.

**Kepemilikan Saham BBTN**

Per 31 Desember 2022, memiliki 1.581.930 lembar saham/0,0122753%

SETIYO WIBOWO

Direktur Risk Management



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Tangerang Selatan



Usia

45 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1999).
- Master (S2) MBA in Finance & Banking, KDI School of Public Policy and Management, Korea Selatan (2009).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2022).



Pengalaman Kerja

- Direktur Risk Management Bank BTN (Maret 2022 - saat ini).
- Direktur Risk Management and Transformation Bank BTN (2021 - Maret 2022).
- Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics Bank BTN (2019 - 2021).
- Group Head Consumer Credit Risk & Analytics PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 - 2019).
- Group Head Credit Portfolio Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017 - 2018).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 03 Juli 2020.



Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, memiliki 726.100 lembar saham/0,0056343%

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi																
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan		
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama dan Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama dan Pengendali*				
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√	
Nixon L. P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√	
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer		√		√		√		√		√		√		√	
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance		√		√		√		√		√		√		√	
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal		√		√		√		√		√		√		√	
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management		√		√		√		√		√		√		√	
Andi Nirwoto	Direktur IT & Digital		√		√		√		√		√		√		√	
Jasmin	Direktur Distribution and Funding		√		√		√		√		√		√		√	
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management		√		√		√		√		√		√		√	

*Langsung maupun tidak langsung

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Direksi disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2022, komposisi anggota Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Namun, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 Maret 2022 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Nixon L.P. Napitupulu sebagai Wakil Direktur Utama;
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Consumer & Commercial Lending	Direktur Consumer
2.	Direktur Finance, Planning & Treasury	Direktur Finance
3.	Direktur Compliance & Legal	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal
4.	Direktur Wholesale Risk & Asset Management	Direktur Assets Management
5.	Direktur Operation, IT, & Digital Banking	Direktur IT & Digital
6.	Direktur Distribution & Retail Funding	Direktur Distribution & Funding
7.	Direktur Risk Management & Transformation	Direktur Risk Management

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer & Commercial Lending	Direktur Consumer
2.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance, Planning & Treasury	Direktur Finance
3.	Eko Waluyo	Direktur Compliance & Legal	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal
4.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Wholesale Risk & Asset Management	Direktur Assets Management
5.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, & Digital Banking	Direktur IT & Digital
6.	Jasmin	Direktur Distribution & Retail Funding	Direktur Distribution & Funding
7.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management & Transformation	Direktur Risk Management

4. Mengangkat Nixon L.P. Napitupulu sebagai Wakil Direktur Utama. Wakil Direktur Utama Perseroan Nixon L.P. Napitupulu diberhentikan dan diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama untuk periode jabatan kedua.

Sehingga komposisi Direksi per 31 Desember 2022 berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang Direktur. Seluruh Anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Anggota Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Haru Koesmahargo	Direktur Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	19 Mei 2021
Nixon L. P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017 RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021 RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	19 Mei 2021
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	28 Agustus 2020
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	9 Agustus 2021
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	9 Agustus 2021
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019	26 Juni 2020
Andi Nirwoto	Direktur IT & Digital	OJK	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	3 Juli 2020

PROFIL DEWAN KOMISARIS

CHANDRA M. HAMZAH

Komisaris Utama/Independen



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Selatan



Usia

55 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum, Universitas Indonesia (1995).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris oleh LSPP (2020).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama/Independen Bank BTN (2019 - saat ini).
- Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2014 - 2015)
- *Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm* (2012 - saat ini).
- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2007 - 2011).
- *Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm* (2001 - 2007).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 04 Mei 2020.



Periode Menjabat

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2020-saat ini).
- *Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm* (2012 – saat ini).



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

IQBAL LATANRO

Wakil Komisaris Utama/Independen



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Selatan



Usia

64 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar (1983).
- Magister (S2) Manajemen Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar (1998).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2022).



Pengalaman Kerja

- Wakil Komisaris Utama/Independen Bank BTN (2021 - saat ini).
- Komisaris PT Bank Mandiri Taspen (2020 - 2021).
- Komisaris PT Pemeringkat Efek Indonesia (2020 - 2021).
- Direktur Utama PT Taspen (Persero) (2018 - 2020).
- Komisaris Utama PT Taspen Properti Indonesia (2015 - 2020)



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen Perseroan untuk pertama kalinya sejak 10 Maret 2021 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 06 September 2021.



Periode Jabatan

10 Maret 2021 - RUPS Tahun 2026, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Ketua Komite Audit Bank BTN (2021-saat ini).
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2021-saat ini).



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

ARMAND B. ARIEF

Komisaris Independen

**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Selatan

**Usia**

70 Tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana (S1) *Business Administration*, Curry College, Milton Massachusetts, Amerika Serikat (1982).
- Master (S2) *Business Administration*, Suffolk University, Boston Massachusetts, Amerika Serikat (1995).

**Sertifikasi**Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2021).**Pengalaman Kerja**

- Komisaris Independen PT Cardig Aero Services Tbk (2021 - saat ini).
- Komisaris Independen Bank BTN (2019 - saat ini).
- Komisaris Independen PT Bank Royal Indonesia (2017 - 2018).
- Komisaris/Senior *Consultant Dunamis Organization Services* (Franklin Covey USA Subsidiary (2016 - 2019).
- Anggota Panel *Interviewer* Otoritas Jasa Keuangan (2016 - 2017).

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 14 Mei 2020.

**Periode Jabatan**

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama

**Jabatan Rangkap**

- Komisaris Independen PT Cardig Aero Services Tbk (2021 – saat ini).
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2020-saat ini).
- Ketua Komite Pemantau Risiko Bank BTN (2020-saat ini).

**Kepemilikan Saham BBTN**

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

AHDI JUMHARI LUDDIN

Komisaris Independen



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Timur



Usia

68 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta (1982).
- Master (S2) *Policy Economics*, University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1989).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2022).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen Bank BTN (2019 - saat ini).
- Komisaris Utama PT BRI Agroniaga Tbk (2019).
- Komisaris Independen PT Bank DKI (2015 - 2018).
- Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010 - 2015).
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008 - 2010).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 16 Maret 2020.



Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Anggota Komite Audit Bank BTN (2020 - saat ini).



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

SENTOT A. SENTAUSA

Komisaris Independen

**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Selatan

**Usia**

65 Tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana (S1) Statistika, Universitas Padjajaran, Bandung (1985).
- Master (S2) *Business Administration*, Monash University, Australia (1995).

**Sertifikasi**Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2022).**Pengalaman Kerja**

- Komisaris Independen Bank BTN (2022 - saat ini).
- Komisaris Utama PT Jiwasraya (Persero) (2019 - 2020)
- Komisaris Utama Mandiri Inhealth (2016 - 2019).
- Direktur *Distribution* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 - 2016).
- Direktur *Risk Management* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 - 2014).

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk pertama kalinya sejak 2 Maret 2022 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 8 Agustus 2022.

**Periode Jabatan**

2 Maret 2022 – RUPS Tahun 2027, Periode Pertama

**Jabatan Rangkap**

- Anggota Komite Audit Bank BTN (2022-saat ini).
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2022-saat ini).

**Kepemilikan Saham BBTN**

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

ANDIN HADIYANTO

Komisaris



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Bekasi



Usia

57 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989).
- Master (S2) *International Development*, Nagoya University, Jepang (1997).
- Doctor (S3) *International Development*, Nagoya University, Jepang (2000).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Komisaris oleh LSPP (2022).



Pengalaman Kerja

- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan (2021 - saat ini).
- Komisaris Bank BTN (2019 - saat ini).
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2019 - 2021).
- Staf Ahli Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan (2018 - 2019).
- Direktur Eksekutif, Bank Dunia (2016 - 2018).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 10 Juli 2020.



Periode Jabatan

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan (2021 – saat ini).
- Anggota Komite Audit Bank BTN (2020-saat ini).
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2020-saat ini).



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Komisaris



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Barat



Usia

55 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1992).
- Sarjana (S1) Manajemen, Universitas Padjajaran, Bandung (1993).
- Magister (S2) Sistem dan Teknik Jalan Raya, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1994).
- Doktor (S3) Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Depok (2016).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 1 Komisaris oleh LSPP (2022).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Bank BTN (2022 - saat ini).
- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021 - saat ini).
- Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019 - 2021).
- Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017 - 2019).
- Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015 - 2019).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk pertama kalinya sejak tanggal 2 Maret 2022 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 11 Oktober 2022.



Periode Jabatan

2 Maret 2022 - RUPS Tahun 2027, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2022 – saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Bank BTN (2022 – saat ini).
- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021 – saat ini).



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

HIMAWAN ARIEF SUGOTO

Komisaris



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Depok



Usia

59 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1990).
- Magister (S2) Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Jakarta (2001).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 1 Komisaris oleh LSPP (2022).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Bank BTN (2022 - saat ini).
- Sekretaris Komite Badan Bank Tanah (2021 - saat ini)
- Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Holding Pangan) (2020 - 2022).
- Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2020 - 2021)
- Sekretaris Jenderal Komisaris Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2018 - saat ini).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk pertama kalinya sejak tanggal 2 Maret 2022 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 03 Oktober 2022.



Periode Jabatan

2 Maret 2022 - RUPS Tahun 2027, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2022 – saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Bank BTN (2022 – saat ini).
- Sekretaris Komite Badan Bank Tanah (2021 – saat ini).
- Sekretaris Jenderal Komisaris Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2018 – saat ini).



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

EKO D. HERIPOERWANTO

Komisaris (Berhenti menjabat sejak tanggal 2 Maret 2022)

**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Barat

**Usia**

61 Tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana (S1) Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1987).
- Master (S2) *City Planning*, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat (1994).
- Doktor (S3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Bogor (2009).

**Sertifikasi**

Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Komisaris oleh LSPP (2019).

**Pengalaman Kerja**

- Ahli Utama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021 – 2022).
- Komisaris Bank BTN (2019 - Maret 2022).
- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019 - 2021).
- Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016-2019).
- Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015-2016).

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya sejak 17 Mei 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 20 Desember 2019.

**Periode Jabatan**

17 Mei 2019 – 02 Maret 2022

**Jabatan Rangkap**

Ahli Utama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Kementerian PUPR (2021 – 2022).

**Kepemilikan Saham BBTN**

Per akhir Februari 2022, memiliki 108.500 lembar saham/0,0010246%

HERU BUDI HARTONO

Komisaris (Berhenti menjabat sejak 17 Oktober 2022)



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Timur



Usia

57 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1990).
- Magister (S2) Manajemen, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1998)



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Komisaris oleh LSPP (2019).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Bank BTN (2019 - Oktober 2022).
- Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara (2017 - 2022).
- Komisaris PT Bank DKI (2015 - 2018).
- Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2014 - 2017).
- Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk (2014 - 2015).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 16 Maret 2020.



Periode Jabatan

27 November 2019 – 17 Oktober 2022



Jabatan Rangkap

Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara (2017 – 2022).



Kepemilikan Saham BBTN

Per akhir September 2022, memiliki 296.500 lembar saham/0,0025449%

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Utama dan Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Utama dan Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen		√		√		√		√		√		√		√
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen		√		√		√		√		√		√		√
Armand B. Arief	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Sentot A. Sentausa ¹	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Andin Hadiyanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Herry Trisaputra Zuna ²	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Himawan Arief Sugoto ³	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Eko D. Heripoerwanto ⁴	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Heru Budi Hartono ⁵	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√

* Langsung maupun tidak langsung

- 1) Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022
- 2) Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022
- 3) Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022
- 4) Diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022
- 5) Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Oktober 2022

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2022, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2022 – 2 Maret 2022

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 2 Maret 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2022 – 2 Maret 2022

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	6 September 2021
Armand B. Arief	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	14 Mei 2020

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Andin Hadiyanto	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Juli 2020
Heru Budi Hartono	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019	20 Desember 2019

Komposisi Dewan Komisaris Periode 2 Maret 2022 – 16 Oktober 2022

Pada tanggal 2 Maret 2022, RUPS Tahunan 2022 memutuskan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Eko D. Heripoerwanto sebagai Komisaris;
2. Mengangkat Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;
3. Mengangkat Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris; dan
4. Mengangkat Sentot A. Sentausa sebagai Komisaris Independen.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 2 Maret 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022 sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 2 Maret 2022 – 16 Oktober 2022

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	6 September 2021
Armand B. Arief	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	14 Mei 2020
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	8 Agustus 2022
Andin Hadiyanto	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Juli 2020
Heru Budi Hartono	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	11 Oktober 2022
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	3 Oktober 2022

Komposisi Dewan Komisaris Periode 17 Oktober 2022 – 31 Desember 2022

Pada tanggal 17 Maret 2022, Heru Budi Hartono berhenti menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 17 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 17 Oktober 2022 – 31 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	6 September 2021
Armand B. Arief	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	14 Mei 2020
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	8 Agustus 2022
Andin Hadiyanto	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Juli 2020
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	11 Oktober 2022
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	3 Oktober 2022

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PROF. DR. H. MUHAMMAD QURAISH SHIHAB, M.A.

Ketua Dewan Pengawas Syariah



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Selatan



Usia

79 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) bidang Tafsir dan Hadits dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1967).
- Pascasarjana (S2) bidang Tafsir dan Hadits dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1969).
- Doktor (S3) bidang Tafsir Al-Quran dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1982).



Sertifikasi

Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS-DSM MUI (2019).



Pengalaman Kerja

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank BTN (2019 - saat ini).
- Pendiri dan Anggota Council of Muslim Elders (2014 - saat ini).
- Anggota Eminent Person Group Indonesia Malaysia Person Group Indonesia Malaysia (2010).
- Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Arab, Mesir dan Jibuti (1998 - 2002).
- Menteri Agama Republik Indonesia (1998).
- Anggota Dewan Riset Nasional (1995 - 1999).
- Anggota Badan Akreditasi Nasional (1994 - 1998).
- Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994 - 1997).
- Anggota DPS Bank Muamalat (1992 - 1999).
- Rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1992 - 1998).
- Anggota Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI (1989 - saat ini).
- Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1988 - 1996).
- Anggota MPR-RI periode 1982-1987 dan periode (1987 - 2002).
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (1985 - 1998).
- Wakil Rektor IAIN Alauddin (1974 - 1980).
- Pembantu Pimpinan Koordinator Antar Kepolisian Indonesia Timur dalam Bidang Mental (1973 - 1975).
- Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta se Indonesia Timur (Kopertis Wilayah Timur) (1967 - 1980).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya melalui hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 23 Maret 2018 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 10 Januari 2019.



Periode Menjabat

23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah CIMB Niaga (2019 - saat ini)



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

DR. H. MOHAMAD HIDAYAT, MBA, MH

Anggota Dewan Pengawas Syariah



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta



Usia

54 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Fakultas Syariah dari IAIN Jakarta (1992).
- Master (S2) of Business Administration (MBA) dari IPWI Jakarta.
- Pasca Sarjana (S2) bidang dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta (2003).
- Doktor (S3) di bidang Islamic Economic and Finance dari Universitas Trisakti, Jakarta (2014).



Sertifikasi

Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS-DSM MUI (2019).



Pengalaman Kerja

- Anggota DPS Allianz Syariah (2020 - sekarang).
- Khatib tetap Masjid OJK (2015 - 2020).
- Pengasuh Ponpes Tahfiz Al Qur'an Al Wasiah Jakarta (2007 - sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BTN (2005 - sekarang).
- Khatib tetap Masjid Istana Presiden (2005 - 2020).
- Anggota DPS Bank Syariah Mandiri (1999 - 2021).
- Khatib tetap Masjid Bank Indonesia (1999 - 2000).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sejak 2005 dan diangkat kembali berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 23 Maret 2018.



Periode Menjabat

23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Kedua



Jabatan Rangkap

- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Manulife Syariah.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT BRIngin Life Syariah.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

MOHAMAD BAGUS TEGUH PERWIRA, Lc, MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah

**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Bekasi

**Usia**

44 Tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana (S1) dari Fakultas Dirasat Islamiyah Wal Arabiyah, Univeristas Al-Azhar Kairo-Mesir (1999).
- Pasca Sarjana (S2) Program Studi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah – Jakarta (2007).

**Sertifikasi**

- Sertifikat Certified Financial Planner (CFP).
- Associate Estate Planning Practitioner (AEPP).
- Qualified Wealth Planner (QWP).
- Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.
- Pengawas Syariah – Lembaga Sertifikasi Profesi MUI

**Pengalaman Kerja**

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara, Tbk (Persero) (2021 - saat ini).
- Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2020 - saat ini).
- Sekretaris Bidang Pasar Modal Badan Pelaksana Harian, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2015 - 2020).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah DPLK BRI (2018 - 2019).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Aberdeen Standard Investement Indonesia (2015 - 2021).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Indosurya Asset Management (2015 - 2017).
- Trainer di DSN-MUI Institute (November 2017 - saat ini).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia. (2009 - 2021).
- Dosen Universitas Trisakti (2009 - 2013).
- Head Planner PT Quantum Magna (2007 - 2014).
- Dosen Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka (2007 - 2009).
- Konsultan PT Batasa Tazkia (2004 - 2009).

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya sejak hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 10 Maret 2021 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 02 Juni 2021.

**Periode Jabatan**

10 Maret 2021 – RUPS Tahun 2026, Periode Pertama.

**Jabatan Rangkap**

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT OCBC NISP Tbk.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

**Kepemilikan Saham BBTN**

Per 31 Desember 2022, tidak memiliki saham

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Utama dan Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Utama dan Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Ketua Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Mohamad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√

*Langsung maupun tidak langsung

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Alasan Perubahannya

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah berdasarkan pada persyaratan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 yaitu Anggota

Dewan Pengawas Syariah harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi dalam bidang keuangan. Seluruh Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BTN. Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Ketua	OJK	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 Januari 2019
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	OJK	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	
Mohamad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	2 Juni 2021

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Senior Executive Vice President



BENNY YOSLIM
SEVP Wholesale Banking



Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta Barat



Usia
42 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Industri, Universitas Trisakti, Jakarta (2002).
- Master (S2) Business Administration, Institut Teknologi Bandung, Bandung (2005).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh BSMR (*Refreshment* 2020).



Pengalaman Kerja

- SEVP Wholesale Banking Bank BTN (Maret 2021 – saat ini).
- Corporate Banking Director PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020).
- General Manager, Local Corporate & Multinational Company 1 Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018 – 2020).
- Deputy GM, BUMN & Government Institution Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2017).
- Team Leader, BUMN & Government Institution Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2013 – 2016).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai SEVP Perseroan untuk pertama kalinya sejak 01 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 248/DIR/2021 tanggal 03 Maret 2021.



Kepemilikan Saham BBTN

Tidak memiliki saham BBTN



ALEX SOFJAN NOOR

SEVP Operations



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Barat



Usia

56 Tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1991).



Sertifikasi

- General Banking Level 3 oleh LPPi (*Refreshment* 2022).
- International Risk Management & Wealth Management Certification Program oleh MMUGM dan IBI (*Refreshment* 2022).



Pengalaman Kerja

- SEVP Operations Bank BTN (Juni 2022 – saat ini).
- SEVP Human Capital Bank BTN (Januari 2022 – Juni 2022)
- Sharia Business Division Head Bank BTN (2020 – Januari 2022)
- Sharia Division Head Bank BTN (2019 – 2020)
- Commercial Risk Division Head Bank BTN (2018 – 2019)



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai SEVP Perseroan untuk pertama kalinya sejak 03 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 06/DIR/2022 tanggal 04 Januari 2022.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2022, memiliki 545.500 lembar saham/0,0042329%

Sampai dengan 31 Desember 2022, posisi SEVP Compliance & Legal masih belum terisi. Supervisi unit kerja SEVP Compliance & Legal berada pada Direktur Human Capital, Compliance & Legal sampai dengan ditunjuknya SEVP Compliance & Legal. Adapun terhadap hal-hal yang bersifat strategis dikoordinasikan bersama dengan Direktur Utama.

PROFIL PEJABAT SATU LEVEL DI BAWAH DIREKSI



HENDRATNO TRI WIBOWO
Internal Audit Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Tangerang Selatan



Usia
48 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Magister (S-2) Akuntansi, University of Queensland (2003).



Riwayat Jabatan
2021 menjabat sebagai Internal Audit Division Head.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 26 Juli 2021



ACHMAD CHAERUL
Corporate Secretary Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta Selatan



Usia
52 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Magister (S-2) Ilmu Hukum, Universitas Indonesia (2002).



Riwayat Jabatan

- 2020 menjabat sebagai Service Quality & Distribution Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Corporate Secretary Division Head.
- 2017 menjabat sebagai Regional Office Head V (Sulawesi).



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 11 Juli 2022



R. WAHYU B. WITJAKSONO
Compliance & Governance
Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
52 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Magister (S-2) Manajemen Keuangan, UGM & University of Kentucky USA (2004).



Riwayat Jabatan

- 2018 menjabat sebagai Compliance and Governance Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Deputy Internal Audit Division Head.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 01 Desember 2018



WILSON ARAFAT

Enterprise Risk Management
Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Barat



Usia

50 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

Magister (S-2) Manajemen Pemasaran, Universitas Gadjah Mada (2004).



Riwayat Jabatan

- 2021 menjabat sebagai Enterprise Risk Management Division Head.
- 2019 menjabat sebagai Procurement & General Services Division Head.
- 2017 menjabat sebagai PLT Transformation Management Division Head.



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Juni 2021



KUSUMARJONO

Corporate Strategy & Planning
Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Pusat



Usia

54 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung (1990).



Riwayat Jabatan

- 2021 menjabat sebagai Corporate Strategy & Planning Division Head.
- 2020 menjabat sebagai Retail Funding & Services Division Head.
- 2019 menjabat sebagai Branch Manager Bandung.
- 2017 menjabat sebagai Strategic Planning Department Head.
- 2012 menjabat sebagai Deputy Branch Manager Jakarta Kuningan.



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 19 Juli 2021



WINANG BUDOYO

Investor Relations & Research
Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili

Tangerang



Usia

53 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

Magister (S-2) Ekonomi, University of Queensland Australia (2002).



Riwayat Jabatan

- 2020 menjabat sebagai Investor Relations & Research Division Head dan Chief Economist.
- 2018 menjabat sebagai Investor Relations Department Head dan Chief Economist.



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Februari 2020

**RAHMAYATI**Human Capital Management
Division Head**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Selatan

**Usia**

49 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Business Administration, Institut Teknologi Bandung (2012).

**Riwayat Jabatan**

- 2022 menjabat sebagai Human Capital Management Division Head.
- 2021 menjabat sebagai Sharia Funding & Treasury Deputy.
- 2020 menjabat sebagai Sharia Business Deputy.
- 2016 menjabat sebagai Branch Manager Sharia Jakarta Pasar Minggu.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 14 Februari 2022

**ALOYSIUS WILHELMUS
JUNIOR BAKOWATUN**Human Capital Strategy
Division Head**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Selatan

**Usia**

51 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Manajemen SDM, Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2003).

**Riwayat Jabatan**

2021 menjabat sebagai Human Capital Strategy Division Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 01 Mei 2021

**ADE SURYA LESMANA**PJ Learning Management
Division Head**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Tangerang Selatan

**Usia**

50 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Manajemen, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas (2009).

**Riwayat Jabatan**

- 2022 menjabat sebagai PJ Learning Management Division Head
- 2021 menjabat sebagai Employee Development Department Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 09 Mei 2022



SINDHU RAHADIAN ARDITA
Treasury Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta Pusat



Usia
49 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Magister (S-2) Manajemen Keuangan, UGM & University of Kentucky USA (2004).



Riwayat Jabatan

- 2021 menjabat sebagai Treasury Division Head.
- 2019 menjabat sebagai Corporate Syndication & Transaction Banking Division Head.
- 2017 menjabat sebagai Corporate & Syndication Loan Division Head.
- 2015 menjabat sebagai Institutional Banking Division Head.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 01 April 2021



FERRY SIPAHUTAR
Retail Funding & Services Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Bogor



Usia
52 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Magister (S-2) Manajemen Keuangan, Universitas Gadjah Mada & University of Kentucky USA (2004).



Riwayat Jabatan

- 2021 menjabat sebagai Retail Funding & Services Division Head.
- 2021 menjabat sebagai Regional Office Head I (Jawa Barat).
- 2020 menjabat sebagai Regional Office Head VI (Jawa Tengah).
- 2018 menjabat sebagai Retail Funding & Services Division Head.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 19 Juli 2021



BEKI KANUWA
Retail Credit Risk Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta Timur



Usia
49 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Sarjana (S-1) Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (1996).



Riwayat Jabatan

- 2021 menjabat sebagai Retail Credit Risk Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Corporate Strategy & Performance Management Division Head.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 01 Juli 2021

**JOKO CHRISTIANTO**IT Strategic Planning & Development
Division Head**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Utara

**Usia**

42 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S-1) Ilmu Komputer, Universitas Gajah Mada (2003).

**Riwayat Jabatan**

2021 menjabat sebagai IT Strategic Planning & Development Division Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 29 Juli 2021

**WAHYUDI JOKO SANTOSO**

IT Operations Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Bekasi

**Usia**

51 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Manajemen, STIE Indonesia Banking School (2019).

**Riwayat Jabatan**

- 2021 menjabat sebagai IT Operations Division Head.
- 2019 menjabat sebagai PJ. IT Operations Division Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 09 September 2019

**FERIYANTO**Procurement & Fixed Asset
Management Division Head**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Timur

**Usia**

54 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Manajemen, Universitas Gajah Mada (2001).

**Riwayat Jabatan**

- 2021 menjabat sebagai Procurement & Fixed Asset Management Division Head.
- 2020 menjabat sebagai PJ Enterprise Risk Management Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager Kelapa Gading Square.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 02 Juni 2021



ADEE INDRIANA D

Operation & Business Support
Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Bekasi



Usia

50 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ekonomi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret (1995).



Riwayat Jabatan

- 2018 menjabat sebagai Operation & Business Support Division Head.
- 2017 menjabat sebagai PLT Operation & Business Support Division Head.
- 2016 menjabat sebagai Digital Banking Development Department Head.



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 02 April 2018



EKO HAPSORO SUSILO

PLT Customer Care Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Tangerang Selatan



Usia

49 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

Magister (S-2) Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2004).



Riwayat Jabatan

- 2022 menjabat sebagai PLT Customer Care Division Head.
- 2020 menjabat sebagai Corporate Communication Department Head.



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 26 Desember 2022



FATONI HUDHORI

PJ Finance & Accounting
Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta Barat



Usia

50 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr Moechtar Talib (1995).



Riwayat Jabatan

- 2022 menjabat sebagai PJ Finance & Accounting Division Head.
- 2022 menjabat sebagai Financial Reporting Department Head.
- 2015 menjabat sebagai Tax Department Head.



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 09 Mei 2022

**IRISKA DEWAYANI E**

Non Subsidized Mortgage &
Personal Lending Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Yogyakarta

**Usia**

54 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S-1) Ekonomi Manajemen, UPN Veteran (1992).

**Riwayat Jabatan**

- 2022 menjabat sebagai Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Div Head.
- 2021 menjabat sebagai Regional Office Head III (Jawa Timur).
- 2020 menjabat sebagai Branch Manager Jakarta Harmoni.
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager Jakarta Kuningan.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 03 Januari 2022

**ABDUL FIRMAN**

Sharia Business Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Bekasi

**Usia**

50 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S-1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1995).

**Riwayat Jabatan**

- 2022 menjabat sebagai Sharia Business Division Head
- 2021 menjabat sebagai Human Capital Management Division Head.
- 2020 menjabat sebagai Commercial Business Centre Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 03 Januari 2022

**RAMON ARMANDO**

Marketing Communication
Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Selatan

**Usia**

48 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Perdagangan, The University of Sydney (1998).

**Riwayat Jabatan**

- 2020 menjabat sebagai Marketing Communication Division Head.
- 2020 merangkap sebagai Digital Channel Division Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 01 Mei 2020



TAN JACKY CHEN
Digital Channel Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Tangerang



Usia
39 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Magister (S-2) Magister Manajemen, Universitas Bina Nusantara (2006).



Riwayat Jabatan
2021 menjabat sebagai Digital Channel Division Head.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 16 Juli 2021



SRI ASTUTI
Commercial Banking Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Yogyakarta



Usia
49 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Sarjana (S-1) Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (1995).



Riwayat Jabatan

- 2020 menjabat sebagai Commercial Banking Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Corporate & Loan Syndication Department Head.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 31 Desember 2019



RICKY R.S. PATINGGI
Corporate Syndication & Transaction
Banking Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Bogor



Usia
51 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Sarjana (S-1) Manajemen, Universitas Bandar Lampung (1994).



Riwayat Jabatan

- 2021 menjabat sebagai Corporate Syndication & Transaction Banking Division Head.
- 2021 menjabat sebagai Plt Internal Audit Division Head .
- 2020 menjabat sebagai Deputy Internal Audit Division Head.
- 2017 menjabat sebagai Branch Manager Bandung.
- 2015 menjabat sebagai Branch Manager Malang.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 01 Juli 2021

**ERWINTA SISWADI**

Institutional Funding Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Tangerang Selatan

**Usia**

51 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S-1) Teknik Industri, Universitas Sumatera Utara (1996).

**Riwayat Jabatan**

- 2022 menjabat sebagai Institutional Funding Division Head.
- 2021 menjabat sebagai PJ Institutional Funding Division Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 01 Januari 2022

**WILSON LIE SIMATUPANG**

PJ Legal Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Bogor

**Usia**

54 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Hukum/Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia (2003).

**Riwayat Jabatan**

- 2022 menjabat sebagai PJ Legal Division Head.
- 2021 menjabat sebagai Plt. Legal Division Head.
- 2017 menjabat sebagai Legal Litigation Departement Head

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 09 Mei 2022

**I GUSTI AGUNG KOMANG
TRI MARTHA W**

Credit Operations Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Barat

**Usia**

53 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S-1) Hukum, Universitas Udayana (1993).

**Riwayat Jabatan**

- 2021 menjabat sebagai Credit Operations Division Head.
- 2021 menjabat sebagai PJ Credit Operations Division Head.
- 2019 menjabat sebagai Branch Manager Bekasi.
- 2018 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Business, Regional Office III (Jawa Timur).

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 16 Agustus 2021



**FRENGKY ROSADRIAN
PERANGIN-ANGIN**

Wealth Management Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta Selatan



Usia
47 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Sarjana (S-1) Finance & Economics, University of Oregon (1996).



Riwayat Jabatan
2020 menjabat sebagai Wealth Management Division Head.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 17 Desember 2020



MOCHAMAD YUT PENTA

Subsidized Mortgage Lending
Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Bandung



Usia
52 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Magister (S-2) Manajemen, Universitas Gajah Mada (2004).



Riwayat Jabatan

- 2019 menjabat sebagai Subsidized Mortgage Lending Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Roll Out Project Lead.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 19 November 2019



BUDI PERMAMA

Small Medium Enterprise Banking
Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta Timur



Usia
50 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Sarjana (S-1) Ekonomi, Universitas Syiah Kuala (1997).



Riwayat Jabatan

- 2021 menjabat sebagai Small Medium Enterprise Banking Division Head.
- 2020 menjabat sebagai Retail Credit Risk Division Head.
- 2020 menjabat sebagai Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division Head.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 19 Juli 2021

**HASTA NUGRAHA UTOMO**

Financial Institution & Capital
Market Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Tangerang Selatan

**Usia**

50 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Manajemen Keuangan, UGM & University of Kentucky USA (2004).

**Riwayat Jabatan**

- 2021 menjabat sebagai Financial Institution & Capital Market Division Head.
- 2020 menjabat sebagai Financial Institution Department Head.
- 2014 menjabat sebagai Capital Market Department Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 01 April 2021

**NURWIDI PURBOYO**

Consumer Collection Recovery &
Asset Sales Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Surabaya

**Usia**

53 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S-1) Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Airlangga (1992).

**Riwayat Jabatan**

- 2021 menjabat sebagai Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division Head.
- 2020 menjabat sebagai PJ Regional Office Head IV (Sumatera).
- 2019 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Support, Regional Office III (Jawa Timur).

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 19 Juli 2021

**ARI KURNIAMAN**

Commercial Asset Management 1
Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Bandung

**Usia**

50 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S-1) Hukum, Universitas Padjadjaran (1996).

**Riwayat Jabatan**

- 2022 menjabat sebagai Commercial Asset Management 1 Division Head.
- 2020 menjabat sebagai Corporate Secretary Division Head.
- 2019 menjabat sebagai Branch Manager Jakarta Cawang.
- 2017 menjabat Deputy Branch Manager Bandung.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 11 Juli 2022



PAULUS HES

Commercial Asset Management 2
Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta Timur



Usia
51 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Sarjana (S-1) Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (1995).



Riwayat Jabatan

- 2021 menjabat sebagai Commercial Asset Management 2 Division Head
- 2020 menjabat sebagai PLT Regional Office Head III (Jawa Timur).
- 2019 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Business, Regional Office III (Jawa Timur).



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 01 Februari 2021



ERWIN DWI KUSUMA

Transformation & Partnership
Management Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta Selatan



Usia
43 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Sarjana (S-1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh November (2002).



Riwayat Jabatan

- 2020 menjabat sebagai Transformation & Partnership Management Division Head
- 2019 menjabat sebagai Enterprise Risk Management Division Head
- 2017 menjabat sebagai Retail Risk Division Head



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 09 September 2020



EDWARD ALIMIN SJARIEF

Service Quality & Distribution
Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta Pusat



Usia
53 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Magister (S-2) Manajemen, Universitas Terbuka (2013).



Riwayat Jabatan

- 2022 menjabat sebagai Service Quality & Distribution Division Head.
- 2021 menjabat sebagai Regional Office Head I (Jawa Barat)
- 2021 menjabat sebagai Regional Office Head VI (Jawa Tengah).
- 2019 menjabat sebagai Regional Office Head V (Sulawesi).
- 2019 menjabat sebagai PLT Regional Office Head V (Sulawesi).



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 11 Juli 2022

**HENRI ARI WIBAWA**Commercial Credit Risk Division
Head**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Barat

**Usia**

51 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S-1) Teknik Pertanian, Universitas Gajah Mada (1996).

**Riwayat Jabatan**

- 2021 menjabat sebagai Commercial Risk Division Head
- 2020 menjabat sebagai Branch Manager Jakarta Cawang
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager Ciputat

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 01 Februari 2021

**L. ESTI DWI RETNOSARI**

Policy & Procedure Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Bekasi

**Usia**

53 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (2019).

**Riwayat Jabatan**

- 2021 menjabat sebagai Policy & Procedure Division Head.
- 2019 menjabat sebagai Policy, Procedure & BPR Division Head.
- 2019 menjabat sebagai Policy & Procedure Desk Head.
- 2018 menjabat sebagai PLT. Policy & Procedure Desk Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 16 September 2019

**INDRA HIDAYATULLAH**Data Management & Analytics
Division Head**Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Tangerang Selatan

**Usia**

46 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S-1) Fisika, Institut Teknologi Bandung (2001).

**Riwayat Jabatan**

2021 menjabat sebagai Data Management & Analytics Division Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 01 Mei 2021



TEDDY YUNIRMAN DANAS

Wholesale Transaction
Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Tangerang Selatan



Usia
56 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Magister (S-2) Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (1997).



Riwayat Jabatan
2022 menjabat sebagai Wholesale Transaction Division Head.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 01 November 2022



BUDI HARIYANTO

IT Security Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta Pusat



Usia
42 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Sarjana (S-1) Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (2003).



Riwayat Jabatan
2022 menjabat sebagai IT Security Division Head



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 15 Desember 2022



BENJAMEN SIHOMBING

Regional Office Head I
(Jawa Barat)

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
52 tahun Per Desember 2022.



Riwayat Pendidikan
Sarjana (S-1) Manajemen, Universitas Sumatera Utara (1993).



Riwayat Jabatan

- 2022 menjabat sebagai Regional Office Head I (Jawa Barat).
- 2021 menjabat sebagai Commercial Asset Management 1 Division Head.
- 2020 menjabat sebagai PJ Commercial Risk Division Head.
- 2019 menjabat sebagai PJ Regional Office Head IV (Sumatera).
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager Bekasi.



Periode Menjabat
Menjabat sejak: 11 Juli 2022

**DEWI FITRIANINGRUM**

Regional Office Head II
(Jakarta, Banten)

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Selatan

**Usia**

55 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1998).

**Riwayat Jabatan**

- 2017 menjabat sebagai Regional Office Head II (Jakarta).
- 2015 menjabat sebagai Commercial Funding & Services Division Head.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 01 Oktober 2017

**TEGUH WAHYUDI**

Regional Office Head III
(Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara)

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Pusat

**Usia**

55 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Magister (S-2) Manajemen, Universitas Brawijaya (2002).

**Riwayat Jabatan**

- 2022 menjabat sebagai Regional Office Head III (Jawa Timur).
- 2021 menjabat sebagai Regional Office Head V (Sulawesi).
- 2020 menjabat sebagai Branch Manager Makassar.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 03 Januari 2022

**M. AMIN SHOLEH**

Regional Office Head IV (Sumatera)

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Medan

**Usia**

53 tahun Per Desember 2022.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S-1) Ekonomi Akuntansi, Universitas Sebelas Maret (1993).

**Riwayat Jabatan**

- 2021 menjabat sebagai Regional Office Head IV (Sumatera).
- 2021 menjabat sebagai Branch Manager KC Makassar.
- 2019 menjabat sebagai Commercial Asset Management 1 Division Head.
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager KC Banjarmasin.

**Periode Menjabat**

Menjabat sejak: 19 Juli 2021


HARMAN SOESANTO

Regional Office Head V
(Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
Papua)

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia


Domisili

Makassar


Usia

52 tahun Per Desember 2022.


Riwayat Pendidikan

Magister (S-2) Manajemen, Universitas Indonesia (2005).


Riwayat Jabatan

- 2022 menjabat sebagai Regional Office Head V (Sulawesi).
- 2021 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Business, Regional Office V (Sulawesi).
- 2020 menjabat sebagai Branch Manager KC Surabaya.
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager KC Denpasar.


Periode Menjabat

Menjabat sejak: 03 Januari 2022


RONI SUBAGIO

Regional Office Head VI
(Jawa Tengah, DI Yogyakarta)

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia


Domisili

Semarang


Usia

54 tahun Per Desember 2022.


Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Akuntansi, Universitas Brawijaya (1993)


Riwayat Jabatan

- 2021 menjabat sebagai Regional Office Head VI (Jawa Tengah).
- 2021 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Business, Regional Office III (Jawa Timur).
- 2020 menjabat sebagai Commercial Asset Management 2 Division Head.
- 2019 menjabat sebagai PLT. Commercial Risk Division Head.


Periode Menjabat

Menjabat sejak: 19 Juli 2021

PROFIL PEGAWAI

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2022	2021
Pria	6.261	6.049
Wanita	5.598	5.143
Jumlah	11.859	11.192

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

(dalam satuan orang)

Jabatan	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Level 22	-	1	1	2	2	4
Level 19-21	116	19	135	108	21	129
Level 15-18	921	349	1.270	923	346	1.269
Level 13-14	1.724	1.080	2.804	1.507	812	2.319
Level 11-12	2.565	2.945	5.510	2.719	2.760	5.479
Level 8-10	935	1.204	2.139	790	1.202	1.992
Jumlah	6.261	5.598	11.859	6.049	5.143	11.192

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
≥ 51	682	254	936	561	248	809
31-50	3.088	2.429	5.517	2.858	2.271	5.129
≤ 30	2.491	2.915	5.406	2.630	2.624	5.254
Jumlah	6.261	5.598	11.859	6.049	5.143	11.192

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pasca Sarjana	348	159	507	313	130	443
Sarjana	5.154	4.353	9.507	4.848	3.768	8.616
Sarjana Muda	603	796	1.399	679	882	1.561
SLTA	156	290	446	209	363	572
Jumlah	6.261	5.598	11.859	6.049	5.143	11.192

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

(dalam satuan orang)

Status Ketenagakerjaan	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Tetap	5.819	4.892	10.711	5.902	4.909	10.811
Kontak	442	706	1.148	147	234	381
Jumlah Tanpa Pegawai <i>Outsource</i>	6.261	5.598	11.859	6.049	5.143	11.192
<i>Outsource</i>	7.093	1.094	8.187	7.479	1.071	8.550
Jumlah Termasuk Pegawai <i>Outsource</i>	13.354	6.692	20.046	13.528	6.214	19.742

Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

(dalam satuan orang)

Masa Kerja	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Di atas 30th	64	63	127	90	69	159
Di atas 25th-30th	533	218	751	350	225	575
Di atas 20th-25th	332	43	375	561	78	639
Di atas 15th-20th	109	232	341	9	166	175
Di atas 10th-15th	749	1.008	1.757	578	644	1.222
Di atas 5th-10th	2.377	1.653	4.030	2.181	1.773	3.954
Di atas 0-5th	2.097	2.381	4.478	2.280	2.188	4.468
Jumlah	6.261	5.598	11.859	6.049	5.143	11.192

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Komposisi Pemegang Saham disajikan sebagai berikut:

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank BTN Per 1 Januari 2022

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
LOKAL			
Negara Republik Indonesia	1	6.354.000.000	60,00
Perorangan Indonesia	42.888	960.062.144	9,07
Dana Pensiun	103	904.140.850	8,54
Reksa Dana	189	689.384.853	6,51
Asuransi	68	319.219.732	3,01
Perseroan Terbatas	112	70.825.135	0,67
Yayasan	12	29.664.747	0,28
Bank	2	12.171.500	0,11
Koperasi	6	2.041.400	0,02
Sub Total	43.381	2.987.510.361	28,21
ASING			
Perorangan Asing	70	3.259.040	0,03
Badan Usaha Asing	178	1.245.230.599	11,76
Sub Total	248	1.248.489.639	11,79
TOTAL	43.629	10.590.000.000	100,00

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank BTN Per 31 Desember 2022

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
LOKAL			
Negara Republik Indonesia	1	8.420.666.648	65,34
Asuransi	72	211.372.947	1,64
Bank	3	12.308.689	0,10
Dana Pensiun	102	1.115.359.578	8,65
Koperasi	5	2.591.500	0,02
Lembaga Pemerintah	1	53	0,00
Perorangan Indonesia	48.482	1.320.244.137	10,24
Perseroan Terbatas	134	125.423.551	0,97
Reksa Dana	135	394.920.260	3,06
Yayasan	11	27.599.099	0,21
Sub Total	48.946	11.630.486.462	90,25

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
ASING			
Badan Usaha Asing	214	1.252.967.140	9,72
Perorangan Asing	65	3.691.940	0,03
Sub Total	279	1.256.659.080	9,75
TOTAL	49.225	12.887.145.542	100,00

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank BTN Per 1 Januari 2022

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Lokal	389.275.808	3,68
2.	PT TASPEN	Lokal	179.586.900	1,70
3.	PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	Lokal	160.787.500	1,52
4.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY -	Asing	140.900.000	1,33
5.	JPMBSAS UCITS CLT RE-HANDELS BANKENTILLVAXTMARKNAD TEMA	Asing	122.000.000	1,15
6.	REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND	Lokal	115.785.600	1,09
7.	CITIBANK NEW YORK S/A GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC, LTD.-XING LONG FUND SP	Asing	83.790.000	0,79
8.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP	Lokal	77.756.000	0,73
9.	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Lokal	70.000.000	0,66
10.	BBH BOSTON S/A MATTHEWS ASIA SMALL COMPANIES FUND	Asing	66.124.500	0,62
11.	NT TST CO S/A LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP	Asing	61.460.400	0,58
12.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 15	Asing	58.603.100	0,55
13.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	Asing	50.224.738	0,47
14.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Asing	48.813.788	0,46
15.	STATE STREET BANK-ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Asing	47.025.776	0,44
16.	RD BATAVIA DANA SAHAM - 898544000	Lokal	46.218.800	0,44
17.	REKSA DANA ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA	Lokal	45.700.000	0,43
18.	BNYM RE VANDERBILT UNIVERSITY-2039926099	Asing	43.620.100	0,41
19.	BNYMREBNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326	Asing	42.628.296	0,40
20.	REKSA DANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF	Lokal	35.951.500	0,34

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank BTN Per 31 Desember 2022

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Lokal	389.275.808	3,02
2.	PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	Lokal	273.280.900	2,12
3.	PT TASPEN	Lokal	251.148.600	1,95
4.	REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND	Lokal	132.017.100	1,02
5.	JPMSE STOCK RE UCITS CLT RE-HANDELSBANKENTILLVAXTMARKNAD TEMA	Asing	122.000.000	0,95
6.	CITIBANK NEW YORK S/A GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC, LTD.-XING LONG FUND	Asing	92.000.000	0,71
7.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 23	Asing	90.000.000	0,70
8.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP	Lokal	77.756.000	0,60
9.	REKSA DANA SAM DANA CERDAS	Lokal	62.286.958	0,48
10.	NT TST CO S/A LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP	Asing	61.460.400	0,48
11.	BBH BOSTON S/A MATTHEWS EMERGING MARKETSSMALL COMPANIES FUND	Asing	57.454.700	0,45
12.	BNYM RE VANDERBILT UNIVERSITY-2039926099	Asing	51.523.100	0,40
13.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETSTOCK INDEX FUND	Asing	50.224.738	0,39
14.	STATE STREET BANK-ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Asing	49.224.576	0,38
15.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND	Asing	46.514.830	0,36
16.	BNYMRE BNYMLBRE EMPLOYEESPROVIDENTFBOARD-2039927326	Asing	42.628.296	0,33
17.	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIO	Asing	37.310.235	0,29
18.	MANULIFE DANA EKUITAS	Lokal	33.701.136	0,26
19.	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	Asing	27.316.427	0,21
20.	JPMCB NA RE-AUSTRALIAN SUPER	Asing	26.622.300	0,21

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih Bank BTN per 1 Januari 2022

Nama Investor	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	6.354.000.000	60,00

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih Bank BTN per 31 Desember 2022

Nama Investor	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	8.420.666.648	65,34

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Tabel Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% per 1 Januari 2022

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
LOKAL			
Perorangan Indonesia	42.888	960.062.144	9,07
Dana Pensiun	103	904.140.850	8,54
Reksa Dana	189	689.384.853	6,51
Asuransi	68	319.219.732	3,01
Perseroan Terbatas	112	70.825.135	0,67
Yayasan	12	29.664.747	0,28
Bank	2	12.171.500	0,11
Koperasi	6	2.041.400	0,02
Sub Total	43.381	2.987.510.361	28,21
ASING			
Perorangan Asing	70	3.259.040	0,03
Badan Usaha Asing	178	1.245.230.599	11,76
Sub Total	248	1.248.489.639	11,79
TOTAL	43.628	4.236.000.000	40,00

Tabel Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% per 31 Desember 2022

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
LOKAL			
Asuransi	72	211.372.947	1,64
Bank	3	12.308.689	0,10
Dana Pensiun	102	1.115.359.578	8,65
Koperasi	5	2.591.500	0,02
Lembaga Pemerintah	1	53	0,00
Perorangan Indonesia	48.482	1.320.244.137	10,24
Perseroan Terbatas	134	125.423.551	0,97
Reksa Dana	135	394.920.260	3,06
Yayasan	11	27.599.099	0,21
Sub Total	48.945	3.209.819.814	24,91
ASING			
Badan Usaha Asing	214	1.252.967.140	9,72
Perorangan Asing	65	3.691.940	0,03
Sub Total	279	1.256.659.080	9,75
TOTAL	49.224	4.466.478.894	34,66

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank BTN per 1 Januari 2022

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
DIREKSI				
1.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	-	-
2.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	2.143.800	0,0202436
3.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	283.800	0,0026799
4.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance, Planning, and Treasury	884.600	0,0083532
5.	Eko Waluyo	Direktur Compliance and Legal	533.200	0,0050349
6.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Wholesale Risk and Asset Management	261.100	0,0024655
7.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	328.200	0,0030992
8.	Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	247.900	0,0023409
9.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management and Transformation	227.800	0,0021511
DEWAN KOMISARIS				
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	-	-
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	-	-
3.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	-	-
4.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	-	-
5.	Eko D. Heripoerwanto*	Komisaris	116.900	0,0011039
6.	Heru Budi Hartono	Komisaris	108.500	0,0010246
7.	Andin Hadiyanto	Komisaris	108.500	0,0010246
TOTAL			5.244.300	0,0495214

*Berhenti menjabat sejak tanggal 2 Maret 2022

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank BTN per 31 Desember 2022

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
DIREKSI				
1.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	304.600	0,0023636
2.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	2.481.800	0,0192579
3.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	603.900	0,0046861
4.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	1.034.600	0,0080282
5.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	770.900	0,0059819
6.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Asset Management	589.300	0,0045728
7.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital Banking	859.161	0,0066668
8.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	1.581.930	0,0122753
9.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	726.100	0,0056343
DEWAN KOMISARIS				
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	-	-
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	-	-
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	-	-
4.	Sentot A Sentausa	Komisaris Independen	-	-
5.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	-	-
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	-	-
7.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	-	-

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
8.	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	-	-
9.	Heru Budi Hartono*	Komisaris	-	-
TOTAL			8.952.291	0,0694669

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Oktober 2022

Sampai dengan Desember 2022, tidak terdapat kepemilikan saham tidak langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Klasifikasi Pemegang Saham

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham Bank BTN Per 31 Desember 2022

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Institusi Lokal	464	10.310.242.325	80,00408
Institusi Asing	214	1.252.967.140	9,72261
Individu Lokal	48.482	1.320.244.137	10,24466
Individu Asing	65	3.691.940	0,02865
Total	49.225	12.887.145.542	100,00%

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Kepemilikan saham mayoritas Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar **65,34%***. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung.



*) sehubungan dengan pelaksanaan aksi korporasi Perseroan berupa Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dengan periode akhir peninjauan penambahan saham pada tanggal 10 Januari 2023.

DAFTAR ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

Per 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama beserta

persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset dan status operasi Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama.

INFORMASI KELOMPOK USAHA BANK

Per 31 Desember 2022, Perseroan belum merupakan Kelompok Usaha Bank, sehingga tidak terdapat informasi struktur Kelompok Usaha Bank, struktur keterkaitan kepengurusan dalam Kelompok

Usaha Bank dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



Per 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki Entitas Induk, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM



Pencatatan saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*)

Perseroan mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan menawarkan 2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan, dengan harga penawaran Rp800 per lembar saham kepada masyarakat. Pencapaian *Initial Public Offering (IPO)* tersebut mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat, yang ditandai dengan *oversubscribe* sebanyak 2,04 kali dengan nilai *proceed* sebesar Rp1,88 triliun. Hal tersebut mendapatkan penghargaan "Best IPO in Indonesia 2009" dari majalah *The Asset* dan "Mid Cap/IPO Deal of The Year in Southeast Asia 2009" dari Publisher Alpha South Asia (Hong Kong).

Aksi Korporasi	: Penawaran Umum Saham Perdana (<i>Initial Public Offering/IPO</i>)
Tahun Penerbitan Saham	: 17 Desember 2009
Jumlah Saham yang Ditawarkan	: 2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan
Nilai Nominal Saham	: Rp500 per lembar saham
Harga Penawaran	: Rp800 per lembar saham
Jumlah Saham Sebelum IPO	: 0 lembar saham
Jumlah Saham Tercatat Setelah IPO	: 8.623.285.575 lembar saham Seri B
Pencatatan Bursa	: Bursa Efek Indonesia

Penawaran Umum Terbatas I – *Rights Issue*

Pada tanggal 23 November 2012, Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan juga untuk meningkatkan jumlah saham publik yang diperjual belikan (*floating shares*). Kondisi ini akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham BBTN di pasar modal sekaligus untuk mendukung pertumbuhan kredit, sehingga dapat menambah minat investor untuk berinvestasi lebih pada saham BBTN.

Aksi Korporasi	:	Penawaran Umum Terbatas I - Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/ <i>Rights Issue</i>
Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	1.512.857.500 Saham Seri B
Nilai Nominal Saham	:	Rp500
Harga Pelaksanaan	:	Rp1.235
Jumlah Saham Tercatat Sebelum <i>Rights Issue</i>	:	8.859.291.500 lembar saham
Jumlah Saham Tercatat Setelah <i>Rights Issue</i>	:	10.481.074.500 lembar saham
Jumlah Dana (<i>Proceeds</i>) Diterima	:	Rp1.868.379.012.500
Rasio Konversi	:	555.000 Saham Lama berhak atas 94.943 HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	14,61% sebelum pelaksanaan MESOP dan sebesar 16,49% setelah pelaksanaan MESOP
Periode Perdagangan HMETD	:	23 - 29 November 2012
Periode Pelaksanaan HMETD	:	23 - 29 November 2012
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	:	23 November 2012
Pencatatan Bursa	:	Bursa Efek Indonesia
Pembeli Siaga	:	PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas

Penawaran Umum Terbatas II – *Rights Issue*

Pada tanggal 28 Desember 2022, Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit dan/atau pinjaman.

Aksi Korporasi	:	Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II")
-----------------------	---	--

Kronologis Penerbitan/Pencatatan Saham Bank BTN

No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)
1.	Sebelum IPO	-	-	-	-
2.	17 Desember 2009	Penawaran Umum Perdana	Saham Biasa Seri B	500	800
3.	4 Februari 2011	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	855
4.	4 Oktober 2011	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	855
5.	1 Februari 2012	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	1.297
6.	1 Mei 2012	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-
7.	23 November 2012	Penawaran Umum Terbatas I/ <i>Rights Issue</i>	Saham Biasa Seri B	500	1.235
8.	1 Februari 2013	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	1.098
9.	1 Juli 2013	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-
10.	1 Februari 2014	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-
11.	1 Juli 2014	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-
12.	2 Februari 2015	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-
13.	1 Juli 2015	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-
14.	1 Februari 2016	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	1.098
15.	28 Desember 2022	Penawaran Umum Terbatas II/ <i>Rights Issue</i>	Saham Biasa Seri B	500	1.200

Jumlah Saham yang Ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 3.444.444.413 (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Belas) saham baru Seri B
Nilai Nominal Saham	: Rp500,- (lima ratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah)
Jumlah Saham Tercatat Sebelum Rights Issue	: 10.590.000.000 lembar saham
Jumlah Saham Tercatat Setelah Rights Issue	: 14.034.444.413 lembar saham
Nilai Rights Issue	: Nilai PMN sebesar Rp2.479.999.997.600,- (Dua Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) : Nilai partisipasi publik sebesar Rp1.653.333.295.600,- (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)
Jumlah Dana (Proceeds) Diterima	: Rp4.133.333.295.600,- (Empat Triliun Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)
Rasio Konversi	: Setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) Saham Lama berhak mendapatkan 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Dilusi Kepemilikan	: Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan maksimum sebesar 24,54% (Dua Puluh Empat Koma Lima Empat Persen).
Periode Perdagangan HMETD	: 28 Desember 2022 - 5 Januari 2023
Periode Pelaksanaan HMETD	: 28 Desember 2022 - 5 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	: 28 Desember 2022
Pencatatan Bursa	: Bursa Efek Indonesia
Pembeli Siaga	: PT CIMB Niaga Sekuritas

	Jumlah Saham yang Diterbitkan (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
	-	6.354.000.000	3.177.000.000.000	-
	2.360.057.000	8.714.057.000	4.357.028.500.000	1.888.045.600.000
	95.015.000	8.809.072.000	4.404.536.000.000	81.237.825.000
	26.898.500	8.835.970.500	4.417.985.250.000	22.998.217.500
	2.544.500	8.838.515.000	4.419.257.500.000	3.300.216.500
	5.068.000	8.843.583.000	4.421.791.500.000	-
	1.512.857.500	10.356.440.500	5.178.220.250.000	1.868.379.012.500
	206.420.500	10.562.861.000	5.281.430.500.000	226.649.709.000
	1.992.500	10.564.853.500	5.282.426.750.000	-
	407.000	10.565.260.500	5.282.630.250.000	-
	2.435.500	10.567.696.000	5.283.848.000.000	-
	24.500	10.567.720.500	5.283.860.250.000	-
	14.624.500	10.582.345.000	5.291.172.500.000	-
	7.655.000	10.590.000.000	5.295.000.000.000	8.405.190.000
	3.444.444.413	14.034.444.413	7.017.222.206.500	4.133.333.259.600

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN OBLIGASI SERTA EFEK LAINNYA

Kronologi pencatatan efek lainnya yang dilakukan Perseroan terdiri dari pencatatan Obligasi, Sekuritisasi KPR, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) dan *Long Term Notes* (LTN) dengan kronologis sebagai berikut.

Kronologi Penerbitan Obligasi

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi Bank BTN

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan)	Harga Penawaran	
Obligasi Bank BTN I Tahun 1989	29 Juni 1989	5	Rp	50.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN II Tahun 1990	21 April 1990	5	Rp	50.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN III Tahun 1991	25 November 1991	5	Rp	50.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN IV Tahun 1992	31 Desember 1992	5	Rp	100.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN V Tahun 1993	29 Januari 1993	5	Rp	150.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN VI Tahun 1995	8 Desember 1995	5	Rp	350.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN VII Tahun 1996	27 Juni 1996	5	Rp	200.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN VIII Tahun 1997	27 Juni 1997	5	Rp	400.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN IX Tahun 2003	18 September 2003	5	Rp	750.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN X Tahun 2004	10 Mei 2004	5	Rp	750.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Subordinasi BTN I Tahun 2004	10 Mei 2004	10	Rp	250.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi BTN XI Tahun 2005	28 Juni 2005	5	Rp	750.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XII Tahun 2006	19 September 2006	10	Rp	1.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A	29 Mei 2009	3	Rp	300.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri B	29 Mei 2009	4	Rp	300.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C	29 Mei 2009	5	Rp	900.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XIV Tahun 2010	11 Juni 2010	10	Rp	1.650.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XV Tahun 2011	28 Juni 2011	10	Rp	1.300.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	5 Juni 2012	10	Rp	2.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
				2022	2021	
	25 Juli 1994	18,75% tetap	Lunas	-	-	-
	1 Juni 1995	16,25% tetap	Lunas	-	-	-
	11 November 1996	20,00% tetap	Lunas	-	-	-
	23 Januari 1998	17,00% tetap	Lunas	-	-	-
	31 Juli 1998	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo	Lunas	-	-	-
	21 Desember 2000	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo	Lunas	-	-	-
	22 Juli 2001	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo	Lunas	-	-	-
	18 Juli 2002	14,15% tetap	Lunas	-	-	-
	2 Oktober 2008	12,50% tetap	Lunas	-	-	-
	25 Mei 2009	12,20% tetap	Lunas	-	-	-
	25 Mei 2014*	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun ke enam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan	Lunas	-	-	-
	6 Juli 2010	12,00% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	19 September 2016	12,75% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	29 Mei 2012	11,75% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	29 Mei 2013	12,00% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	29 Mei 2014	12,25% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	11 Juni 2020	10,25% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	28 Juni 2021	9,50% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	5 Juni 2022	7,90% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan)	Harga Penawaran	
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	27 Maret 2013	10	Rp	2.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri A	8 Juli 2015	3	Rp	900.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B	8 Juli 2015	5	Rp	500.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C	8 Juli 2015	7	Rp	800.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	8 Juli 2015	10	Rp	800.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri A	30 Agustus 2016	3	Rp	1.347.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B	30 Agustus 2016	5	Rp	1.653.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A	13 Juli 2017	3	Rp	1.466.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B	13 Juli 2017	5	Rp	1.295.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C	13 Juli 2017	7	Rp	853.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	13 Juli 2017	10	Rp	1.386.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri A	28 Juni 2019	370 Hari	Rp	1.756.500	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri B	28 Juni 2019	3	Rp	1.168.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri C	28 Juni 2019	5	Rp	1.219.500	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Junior Global Bond Bank BTN	23 Januari 2020	5	USD	300	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A	19 Agustus 2020	370 (hari)	Rp	577.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B	19 Agustus 2020	3	Rp	727.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C	19 Agustus 2020	5	Rp	196.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 seri A	24 Mei 2022	3	Rp	600.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 seri B	24 Mei 2022	5	Rp	400.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	

Catatan:

- Rating Efek-efek dalam negeri yang diterbitkan di Tahun 2021 menggunakan rating dari Pefindo.
 - Rating Efek-efek dalam negeri yang diterbitkan di Tahun 2022 menggunakan rating dari Fitch.
 - Rating Junior Global Bond Bank BTN (USD) yang diterbitkan di Tahun 2020 menggunakan rating dari Moody's
- *Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009.

Nama Bursa Tempat Obligasi Perusahaan Dicatatkan

Seluruh Obligasi Perseroan dalam IDR dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan obligasi dalam USD dicatatkan pada Singapore Exchange.

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
				2022	2021	
	27 Maret 2023	7,90% tetap	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	_{id} AA+	Bank Mega
	8 Juli 2018	9,625% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	8 Juli 2020	9,875% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	8 Juli 2022	10,00% tetap	Lunas	-	_{id} AA+	Bank Mega
	8 Juli 2025	10,50% tetap	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	_{id} AA+	Bank Mega
	30 Agustus 2019	8,20% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	30 Agustus 2021	8,75% tetap	Lunas	-	_{id} AA+	Bank Mega
	13 Juli 2020	8,30% tetap	Lunas	-	-	Bank BJB
	13 Juli 2022	8,50% tetap	Lunas	-	_{id} AA+	Bank BJB
	13 Juli 2024	8,70% tetap	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	_{id} AA+	Bank BJB
	13 Juli 2027	8,90% tetap	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	_{id} AA+	Bank BJB
	8 Juli 2020	7,750% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	28 Juni 2022	8,750% tetap	Lunas	-	_{id} AA+	Bank Mega
	28 Juni 2024	9,000% tetap	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	_{id} AA+	Bank Mega
	23 Januari 2025	4,20%	Belum Jatuh Tempo	Ba3 Moody's	Ba3 Moody's	Citicorp International Limited
	29 Agustus 2021	6,75%	Lunas	-	_{id} AA+	Bank BJB
	19 Agustus 2023	7,80%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	_{id} AA+	Bank BJB
	19 Agustus 2025	8,40%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	_{id} AA+	Bank BJB
	24 Mei 2025	5,50%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	-	Bank BJB
	24 Mei 2027	6,0%	Belum Jatuh Tempo	AA(idn)	-	Bank BJB

Kronologis Pencatatan Sekuritisasi KPR

Perseroan telah melakukan sekuritisasi atas tagihan KPR melalui skema Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan skema Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Kronologi Pencatatan Sekuritisasi KPR Bank BTN

No.	Transaksi Sekuritisasi	Nominal Total (Rp)	Kelas	Nominal (Rp)
1.	KIK-EBA DSMF 01	111.111.108.501	A	100.000.000.000
			B	11.111.108.501
2.	KIK-EBA DSMF 02	391.305.329.159	A	360.000.000.000
			B	31.305.329.159
3.	KIK-EBA DBTN 01	750.000.230.717	A	688.500.000.000
			B	61.500.230.717
4.	KIK-EBA DBTN 02	703.450.414.156	A	645.000.000.000
			B	58.450.414.156
5.	KIK-EBA DBTN 03	1.000.000.005.997	A	925.000.000.000
			B	75.000.005.997
6.	KIK-EBA DBTN 04	1.000.000.005.941	A1	403.000.000.000
			A2	525.000.000.000
			B	72.000.005.941
7.	KIK-EBA DBTN 05	1.500.000.001.615	A1	723.500.000.000
			A2	647.500.000.000
			B	129.000.001.615
8.	EBA-SP SMF-BTN 01	200.000.000.041	A	181.600.000.000
			B	18.400.000.041
9.	EBA-SP SMF-BTN 02	1.000.000.000.000	A1	400.000.000.000
			A2	513.000.000.000
			B	87.000.000.000
10.	EBA-SP SMF-BTN 03	1.000.000.000.000	A1	200.000.000.000
			A2	713.000.000.000
			B	87.000.000.000
11.	EBA-SP SMF-BTN 04	2.000.000.000.000	A1	700.000.000.000
			A2	1.124.000.000.000
			B	176.000.000.000
12.	EBA-SP SMF-BTN 05	2.000.000.000.000	A1	574.000.000.000
			A2	1.142.000.000.000
			M	24.000.000.000
			B	260.000.000.000
13.	EBA-SP SMF-BTN 06	631.000.543.015	A	576.734.000.000
			B	54.266.543.015
14.	EBA-SP SMF-BTN 07	500.000.001.416	A	452.500.000.000
			B	47.500.001.416

*Bank sebagai Penyedia Jasa dalam transaksi sekuritisasi telah melaksanakan opsi *clean-up call* sesuai ketentuan.

	Tanggal Transaksi	Jatuh Tempo	Average Life	Kupon Kelas A	Peringkat Kelas A
	11 Februari 2009*	10 Januari 2018	5,30	13,000%	id ^{AAA}
	10 November 2009*	10 Desember 2019	5,63	11,000%	id ^{AAA}
	27 December 2010*	27 September 2019	5,35	9,250%	id ^{AAA}
	16 November 2011*	27 Februari 2021	5,94	8,750%	id ^{AAA}
	12 December 2012*	07 Januari 2023	6,35	7,750%	id ^{AAA}
	20 Desember 2013*	26 Februari 2022	5,57	A1 = 8,90%	id ^{AAA}
A2 = 9,50%					
	28 November 2014*	07 September 2025	6,72	A1 = 10%	id ^{AAA}
A2 = 10,25%					
	27 November 2015*	07 Maret 2022	3,95	8,60%	id ^{AAA}
	31 Oktober 2016	27 Juni 2027	7,05	A1 = 8,15%	id ^{AAA}
A2 = 8,75%					
	28 April 2017	07 Juli 2029	7,78	A1 = 8,00%	id ^{AAA}
A2 = 8,40%					
	28 Februari 2018	07 Mei 2029	7,03	A1 = 7,00%	id ^{AAA}
A2 = 7,50%					
	27 November 2019	07 Mei 2032	9,09	A1 = 8,50%	id ^{AAA}
A2 = 8,75%					
M = 10,40%				id ^A	
	30 Desember 2020	07 Juli 2032	6,08	6,50%	id ^{AAA}
	23 Desember 2022	07 Januari 2034	5,66	7,70%	id ^{AAA}
id ^{AAA}					

Kronologi Penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit*

Tabel Kronologi Pencatatan *Negotiable Certificate of Deposit*

Jenis NCD	Nominal Penerbitan (Rp)	Tanggal Transaksi	Seri	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Rate	Nominal Per Seri
NCD Tahap I	625.000.000.000	5 Desember 2014	A	6 bulan	4 Juni 2015	9,00%	280.000.000.000
			B	12 bulan	27 November 2015	9,25%	45.000.000.000
			C	15 bulan	26 Februari 2016	9,50%	300.000.000.000
NCD Tahap II	1.005.000.000.000	26 Februari 2015	A	6 bulan	26 Agustus 2015	9,00%	470.000.000.000
			B	12 bulan	18 Februari 2016	9,25%	85.000.000.000
			C	15 bulan	19 Mei 2016	9,50%	10.000.000.000
			D	18 bulan	18 Agustus 2016	9,70%	440.000.000.000
NCD Tahap III	500.000.000.000	17 Februari 2015	E	5 bulan	15 Juli 2015	9,00%	500.000.000.000
NCD Tahap IV	1.110.000.000.000	30 April 2015	A	6 bulan	30 Oktober 2015	8,75%	330.000.000.000
			B	12 bulan	2 Mei 2016	9,00%	620.000.000.000
			C	18 bulan	31 Oktober 2016	9,25%	160.000.000.000
NCD Tahap I 2016	740.000.000.000	9 Juni 2016	A	3 bulan	9 September 2016	6,85%	740.000.000.000
NCD Tahap II 2016	1.115.000.000.000	5 Agustus 2016	A	3 bulan	3 November 2016	7,19%	440.000.000.000
			B	6 bulan	1 Februari 2017	7,47%	275.000.000.000
			C	12 bulan	10 Agustus 2017	7,80%	400.000.000.000
NCD Tahap III 2016	371.000.000.000	30 November 2016	A	3 bulan	28 Februari 2017	7,04%	20.000.000.000
			B	6 bulan	29 Mei 2017	7,26%	351.000.000.000
NCD Tahap IV 2016	500.000.000.000	29 Desember 2016	A	3 bulan	29 Maret 2017	7,75%	315.000.000.000
			B	6 bulan	3 Juli 2017	7,74%	185.000.000.000
NCD Tahap V 2016	500.000.000.000	30 Desember 2016	-	6 bulan	3 Juli 2017	7,73%	500.000.000.000
NCD Tahap I 2017	1.735.000.000.000	21 Februari 2017	A	6 bulan	22 Agustus 2017	7,28%	1.195.000.000.000
			B	12 bulan	16 Februari 2018	7,43%	540.000.000.000
NCD Tahap III 2017	550.000.000.000	3 Oktober 2017	-	12 bulan	2 Oktober 2018	6,50%	550.000.000.000
NCD Tahap II 2017	1.050.000.000.000	5 Oktober 2017	A	6 bulan	3 April 2018	6,00%	230.000.000.000
			B	12 bulan	5 Oktober 2018	6,25%	820.000.000.000
NCD Tahap IV 2017	540.000.000.000	13 Desember 2017	A	6 bulan	12 Juni 2018	5,90%	160.000.000.000
			B	12 bulan	13 Desember 2018	6,20%	320.000.000.000
			C	24 bulan	13 Desember 2019	6,60%	60.000.000.000
NCD Tahap I 2018	1.440.000.000.000	3 April 2018	A	6 bulan	2 Oktober 2018	5,90%	830.000.000.000
			B	12 bulan	2 April 2019	6,20%	610.000.000.000
NCD Tahap II 2018	690.000.000.000	18 Juli 2018	A	6 bulan	15 Januari 2019	7,60%	520.000.000.000
			B	12 bulan	16 Juli 2019	7,70%	170.000.000.000
NCD Tahap III 2018	2.020.000.000.000	5 November 2018	A	6 bulan	7 Mei 2019	8,30%	1.340.000.000.000
			B	9 bulan	2 Agustus 2019	8,40%	170.000.000.000
			C	12 bulan	5 November 2019	8,50%	510.000.000.000
NCD Tahap IV 2018	340.000.000.000	10 Desember 2018	A	3 bulan	12 Maret 2019	8,00%	80.000.000.000
			B	6 bulan	11 Juni 2019	8,40%	260.000.000.000
Jumlah	14.831.000.000.000						14.831.000.000.000

Kronologi Penerbitan Long Term Notes (LTN)

Penerbitan Long Term Notes (LTN) BTN ditujukan kepada investor tunggal BP Tapera, sebagai reimburse sumber dana BP Tapera bagi penyaluran KPR Tapera. Dengan demikian LTN merupakan Efek bersifat utang yang diterbitkan tanpa melalui proses Penawaran Umum dan tidak diperingkat.

Tabel Kronologi Penerbitan Long Term Notes (LTN) Bank BTN

Uraian	Tanggal Distribusi LTN secara Elektronik	Tenor (Bulan)	Mata Uang	Jumlah LTN (Rp Ribuan)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran
LTN BTN Tahun 2021 Tahap I	17 Desember 2021	186	IDR	10.185.851	17 Juni 2037	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo
LTN BTN II Tahun 2022 Seri A	12 Juli 2022	171	IDR	47.740.325	12 Oktober 2036	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo
LTN BTN II Tahun 2022 Seri B	12 Juli 2022	177	IDR	79.378.706	12 April 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo
LTN BTN III THP I TAHUN 2022	14 Desember 2022	174	IDR	210.866.282	14 Juni 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo
LTN BTN III THP II TAHUN 2022	28 Desember 2022	171	IDR	131.184.885	28 Maret 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo

Keterangan: Surat Berharga LTN BTN tidak di-rating dan diterbitkan melalui penawaran terbatas kepada BP Tapera.

INFORMASI PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Nama KAP	Purwantono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015
Jaringan Asosiasi	Ernst & Young Global Limited
Alamat KAP	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2 Lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Indonesia
Nama AP	Muhammad Kurniawan Izin No.AP.0240
Periode Penugasan KAP	Tahun ke-8
Periode Penugasan AP	Tahun ke-2
Jasa Audit	General Audit
Jasa Non-Audit	Tidak ada Jasa Non Audit
Fee Audit	Rp4.390.000.000
Fee Non Audit	-

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Nama	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon	(021) 5152855
Faksimile	(021) 52991199
Email	helpdesk@ksei.co.id
Situs Web	www.ksei.co.id
Bentuk Jasa	Kustodian dan Agen Pembayaran
Periode Penugasan	Sepanjang umur Efek Bersifat Utang

Biro Administrasi Efek

Nama	PT Datindo Entrycom
Alamat	Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2 Jakarta 10120 - Indonesia
Telepon	(021) 3508077
Faksimile	(021) 3508077
Email	corporatesecretary@datindo.com
Situs Web	https://www.datindo.com
Bentuk Jasa	Biro Administrasi Efek untuk Saham
Periode Penugasan	9 Desember 2009 – sekarang

Wali Amanat/Trustee

Nama	PT Bank Mega Tbk
Alamat	Menara Bank Mega, Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A, Jakarta 12790, Indonesia
Telepon	(021) 79175000
Faksimile	(021) 79187100
Email	waliamanat@bankmega.com
Situs Web	www.bankmega.com
Bentuk Jasa	Wali Amanat Obligasi
Periode Penugasan	Sepanjang Umur Obligasi

Nama	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB)
Alamat	Sinarmas MSIG Tower Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman kav. 21, Jakarta Selatan, Indonesia
Telepon	(021) 5228737 Ext. 101
Faksimile	(021) 5228738
Email	-
Situs Web	www.bankbjb.co.id
Bentuk Jasa	Wali Amanat Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
Periode Penugasan	Sepanjang Umur Obligasi

Nama	Citicorp International Limited
Alamat	20 th Floor, Citi Tower, One Bay East 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong
Telepon	-
Faksimile	(+852) 2323 0279
Email	-
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Trustee Junior Global Bond 2020
Periode Penugasan	Sepanjang umur Junior Global Bond

Pemeringkat Efek

Nama	PT Fitch Ratings Indonesia
Alamat	DBS Bank Tower 24 th Floor Suite 2403, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940 Indonesia
Telepon	(021) 29886800
Faksimile	(021) 29886822
Email	-
Situs Web	www.fitchratings.com
Bentuk Jasa	Pemeringkat
Periode Penugasan	Sepanjang umur Obligasi

Nama	Moody's Investor Service Singapore Pte. Ltd
Alamat	50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 48623
Telepon	-
Faksimile	-
Email	-
Situs Web	www.moody's.com
Bentuk Jasa	Pemeringkat
Periode Penugasan	Sepanjang umur Junior Global Bond

Notaris

Nama	Siti Rayhana, SH
Alamat	Riviera Timur No. 1 Cluster La Bella, Riviera Village, Jl. Gading Golf Boulevard, Gading Serpong, Cihuni, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15332
Telepon	(021) 55687610
Faksimile	-
Email	siti.rayhana@yahoo.co.id
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Melakukan Pengikatan Perjanjian Penerbitan LTN BTN Tahun 2021 dan Tahun 2022
Periode Penugasan	25 Mei 2022

Nama	Agung Iriantoro, SH
Alamat	Jl. Jati Padang Raya No.13 A, RT.5/RW.3, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon	(021) 7823625
Faksimile	(021) 7823626
Email	agung.iriantoro@yahoo.com
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Melakukan Pengikatan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman kepada PT Mandiri Tunas Finance
Periode Penugasan	12 Oktober 2022

Nama	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
Alamat	Jalan Suryo Nomor 54, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon	(021) 29236060
Faksimile	-
Email	notaris@ashoyaratam.com
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Jasa sebagai Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
Periode Penugasan	Sampai dengan selesainya pelaksanaan RUPS dan PMHMETD II.

Konsultan Hukum

Nama	HKGM & Partners
Alamat	Pondok Indah Plaza 3, Blok E/4 & E/5, Jl. TB Simatupang Jakarta 12310, Indonesia
Telepon	(021) 75900215
Faksimile	(021) 75900225
Email	hkgmlaw@indo.net.id
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Konsultasi Hukum
Periode Penugasan	28 Juli 2021

Konsultan Hukum On Call

Nama	UMBRA
Alamat	Telkom Landmark Tower, Tower 2, 49th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav 52, Jakarta 12710
Telepon	(021) 5082 0999
Faksimile	-
Email	raditya@umbra.law
Situs Web	www.umbra.law
Bentuk Jasa	Konsultasi Hukum terkait Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Meterai Elektronik
Periode Penugasan	10 Mei 2022-8 Juli 2022

Nama	Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR)
Alamat	Graha CIMB Niaga, 24th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190
Telepon	(021) 250 5125 / 5136
Faksimile	(021) 250 5001 / 5121/ 5122 / 5392
Email	info@abnrlaw.com
Situs Web	www.abnrlaw.com
Bentuk Jasa	Konsultasi Hukum terkait Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Meterai Elektronik
Periode Penugasan	10 Mei 2022-8 Juli 2022

Konsultan Hukum Domestik Corporate Action (1A)

Nama	Melli Darsa & Co.
Alamat	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920
Telepon	(021) 5099 2901 / 3119 2901
Faksimile	(021) 5290 5555 / 5290 5050
Email	melli.darsa@pwc.com
Situs Web	www.pwc.com/id/legal
Bentuk Jasa	Lembaga/Profesi Penunjang <i>Rights Issue</i>
Periode Penugasan	03 Oktober 2022 s.d. proses <i>Rights Issue</i> selesai atau selambat-lambatnya pada 31 Januari 2023 (mana yang lebih dahulu tercapai).

Konsultan Hukum Internasional Corporate Action (1B)

Nama	DLA Piper Singapore Pte. Ltd.
Alamat	80 Raffles Place, UOB Plaza 1, Singapore 048624
Telepon	(659) 118 0022
Faksimile	-
Email	joe.bauerschmidt@dlapiper.com
Situs Web	www.dlapiper.com/en/us/
Bentuk Jasa	Lembaga/Profesi Penunjang <i>Rights Issue</i>
Periode Penugasan	03 Oktober 2022 s.d. proses <i>Rights Issue</i> selesai atau selambat-lambatnya pada 31 Januari 2023 (mana yang lebih dahulu tercapai).



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Penghargaan



The Best Public Relations Company Strategy in Providing Innovative National Mortgage Product Category Conventional Bank

Acara:

Indonesia Corporate PR Award 2022

Penyelenggara:

Warta Ekonomi

Tanggal:

27 Januari 2022



Nofry Rony Poetra Excellent Corporate Financial Performance of Indonesia Most Acclaimed CFO Awards 2022 Category Conventional Bank

Acara:

Indonesia Most Acclaimed CFO Awards 2022

Penyelenggara:

Warta Ekonomi

Tanggal:

27 Januari 2022



Indonesia's Marketing Brands Awards 2022 Millenias Choice Category Home Loan

Acara:

2nd Indonesia's Marketing Brands Awards

Penyelenggara:

Iconomics (Media)

Tanggal:

24 Februari 2022



Most Popular Digital Financial Brand in E-Loan Kategori Bank BUKU 3

Acara:

3rd Indonesia's Most Popular Digital Financial Award 2022

Penyelenggara:

Iconomics (Media)

Tanggal:

24 Februari 2022



KPR GAESS – Best Bank for Millennial Mortgage Program

Acara:

16th Annual Indonesia Property & Bank Award 2022

Penyelenggara:

Property & Bank

Tanggal:

24 Februari 2022



Platinum Award – Very Excellent – Score 92,67 The Best IT for Public Company

Acara:

Indonesia Information Technology Award IV 2022

Penyelenggara:

Economic Review

Tanggal:

25 Februari 2022



CEO Talent Development Terbaik Perusahaan Tbk Kategori CEO Perusahaan BUMN Terbuka

Acara:
11th Anugerah BUMN 2022
Penyelenggara:
BUMN Track
Tanggal:
24 Maret 2022



Terbaik II Kategori Tata Kelola Perusahaan GCG Perusahaan Tbk

Acara:
11th Anugerah BUMN 2022
Penyelenggara:
BUMN Track
Tanggal:
24 Maret 2022



Gold Winner Video Profil

Acara:
PR Indonesia Award 2022
Penyelenggara:
PR Indonesia
Tanggal:
25 Maret 2022



Silver Winner Media Cetak (Paras Edisi Desember 2021)

Acara:
PR Indonesia Award 2022
Penyelenggara:
PR Indonesia
Tanggal:
25 Maret 2022



Terpopuler di Media Cetak 2021

Acara:
PR Indonesia Award 2022
Penyelenggara:
PR Indonesia
Tanggal:
25 Maret 2022



The Best IT Human Capital Development Category Banking Industries dan The Best Chief Digital and Information Technology Officer - Andi Nirwoto

Acara:
Digital Technology & Innovation Award 2022
Penyelenggara:
Itech Magazine
Tanggal:
30 Maret 2022



TOP CSR Award 2022 #Star 4

Acara:
TOP CSR Award 2022
Penyelenggara:
TOP Business
Tanggal:
30 Maret 2022



TOP Leader on CSR Commitment 2022 Haru Koesmahargyo

Acara:
TOP CSR Award 2022
Penyelenggara:
TOP Business
Tanggal:
30 Maret 2022



Digital Innovation for Sustainable Business (Aplikasi BTN Property Mobile)

Acara:
Digital Innovation Award 2022
Penyelenggara:
MNC Portal Indonesia
Tanggal:
31 Maret 2022



The Most Innovation Conventional Bank for The Integration of Digital Product and Services

Acara:
Indonesia Digital Innovation Award 2022
Penyelenggara:
Warta Ekonomi
Tanggal:
31 Maret 2022



1st Rank Tabungan Batara – (KBMI) 3 Kategori Asset Class >IDR 200 Trillion

Acara:
Infobank 11th Digital Brand Awards 2022
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
7 April 2022



1st Rank Kartu Debit – (KBMI) 3 Kategori Asset Class >IDR 200 Trillion

Acara:
Infobank 11th Digital Brand Awards 2022
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
7 April 2022



3rd Rank Internet Banking – (KBMI) 3 Kategori Asset Class >IDR 200 Trillion

Acara:
Infobank 11th Digital Brand Awards 2022
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
7 April 2022



1st Rank Bank Umum Konvensional - (KBMI) 3 Kategori Asset Class >IDR 200 Trillion

Acara:
Infobank 11th Digital Brand Awards 2022
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
7 April 2022



3rd Rank Deposito - (KBMI) 3 Kategori Asset Class >IDR 200 Trillion

Acara:
Infobank 11th Digital Brand Awards 2022
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
7 April 2022



1st Rank Wealth Management - (KBMI) 3 Kategori Asset Class >IDR 200 Trillion

Acara:
Infobank 11th Digital Brand Awards 2022
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
7 April 2022



3rd Best Overall All KPR BTN kategori Bank Umum Konvensional

Acara:
Infobank 11th Digital Brand Awards 2022
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
7 April 2022



1st Rank KPR BTN - (KBMI) 3 Kategori Asset Class >IDR 200 Trillion

Acara:
Infobank 11th Digital Brand Awards 2022
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
7 April 2022



Indonesia Best Sharia Finance 2022 with Outstanding Provision of Various Sharia-Principles Banking Products Category Sharia Business Unit of Conventional Bank

Acara:
Indonesia Sharia Finance Awards 2022
Penyelenggara:
Warta Ekonomi
Tanggal:
21 April 2022



Special Achievement atas Prestasi dalam Membangun Digital Public Relations

Acara:
Indonesia Top Digital PR Award 2022
Penyelenggara:
Suara Pemerintah
Tanggal:
22 April 2022



The Best Annual Report For SOE'S Public Company – 2022 Kategori Bank BUKU 3

Acara:

Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award VII 2022

Penyelenggara:

Economic Review

Tanggal:

22 April 2022

Green - Transparansi Penurunan Emisi Kategori Emiten dan BUMN

Acara:

Transparansi Emisi Korporasi 2022

Penyelenggara:

Majalah Investor

Tanggal:

22 April 2022

Silver – Transparansi Perhitungan Emisi

Acara:

Kategori Emiten dan BUMN

Penyelenggara:

Majalah Investor

Tanggal:

22 April 2022



Elisabeth Novie Riswanti - In Recognition of Top 100 Most Outstanding Women 2022 in Financial Sector and SOE Category Jasa Keuangan

Acara:

Top 100 Most Outstanding Women in Financial Sector & SOE

Penyelenggara:

Infobank

Tanggal:

21 Mei 2022



The Winner of Indonesia TJSL Awards 2022 in Bank Sector Industry

Acara:

Indonesia CSR & TJSL Awards 2022

Penyelenggara:

The Economics

Tanggal:

10 Juni 2022



Program Inovatif untuk Negeri

Acara:

Merdeka Award

Penyelenggara:

Kapanlagi Youniverse

Tanggal:

23 Juni 2022



Best Digital Banking Kategori Bank Umum KBMI 3 untuk Dimensi Manajemen Risiko

Acara:

Digital Banking Award 2022

Penyelenggara:

Majalah Investor

Tanggal:

28 Juni 2022



Digital Housing Ecosystem Category Innovation of Marketing, Product and Services

Acara:
iNews Maker Awards 2022

Penyelenggara:
iNews

Tanggal:
30 Juni 2022



Penghargaan Kategori Jasa Keuangan

Acara:
Refleksi 2 Tahun Akhlak BUMN Akhlak Award 2

Penyelenggara:
ACT Consulting

Tanggal:
5 Juli 2022



Asia's Best Bank Transformation Category Transformation Bank 2022 (Regional Award)

Acara:
EuroMoney Award for Excellence 2022

Penyelenggara:
EuroMoney

Tanggal:
25 Juli 2022



Eko Waluyo - The Best Chief Compliance Officer Category Banking Services

Acara:
GRC 2022 & Performance Excellence Award

Penyelenggara:
Business News

Tanggal:
27 Juli 2022



The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 Category Banking Services

Acara:
GRC 2022 & Performance Excellence Award

Penyelenggara:
Business News

Tanggal:
27 Juli 2022



Pilar Lingkungan ****

Acara:
2th TJSL & CSR Award 2022

Penyelenggara:
BUMN Track

Tanggal:
11 Agustus 2022

Green Economy - Digital Mortgage Ecosystem

Acara:
IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2022

Penyelenggara:
IDX Channel

Tanggal:
24 Agustus 2022



Penyaluran KPR FLPP Terbanyak

Acara:

Malam Puncak Hari Perumahan Nasional Tahun 2022

Penyelenggara:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tanggal:

25 Agustus 2022



Indonesia Best Bank 2022 for The One Stop Integrated Financial Service Category KBMI 3, BUMN

Acara:

Indonesia Best Bank Awards 2022

Penyelenggara:

Warta Ekonomi

Tanggal:

25 Agustus 2022



TOP GRC Awards 2022 5 Stars

Acara:

TOP GRC Awards 2022

Penyelenggara:

Top Business

Tanggal:

6 September 2022



Haru Koesmahargyo – The Most Committed GRC Leader 2022

Acara:

TOP GRC Awards 2022

Penyelenggara:

Top Business

Tanggal:

6 September 2022



The High Performing Board of Commissioners on GRC 2022

Acara:

TOP GRC Awards 2022

Penyelenggara:

Top Business

Tanggal:

6 September 2022



Hirwandi Gafar – The Inspiring Leader of Mortgage Banking 2022

Acara:

Property Indonesia Award 2022

Penyelenggara:

Property Indonesia

Tanggal:

8 September 2022



KPR BTN – Top Mortgage Lender (Subsidi)

Acara:

Property Indonesia Award 2022

Penyelenggara:

Property Indonesia

Tanggal:

8 September 2022



KPR BTN – The Favourite Mortgage for Millennials Market

Acara:
Property Indonesia Award 2022

Penyelenggara:
Property Indonesia

Tanggal:
8 September 2022



3rd Indonesia Top Bank Awards 2022 Category KBMI 3

Acara:
Indonesia Banking Summit 2022

Penyelenggara:
The Economics

Tanggal:
9 September 2022



Haru Koesmahargyo – Tokoh Pembiayaan Perumahan Rakyat

Acara:
RM Award 2022

Penyelenggara:
Rakyat Merdeka.id

Tanggal:
28 September 2022



Favorite Bank KPR Syariah

Acara:
Golden Property Awards

Penyelenggara:
Indonesia Property Watch

Tanggal:
13 Oktober 2022



Leadership A

Acara:
ESG Disclosure Awards 2022

Penyelenggara:
Majalah Investor

Tanggal:
26 Oktober 2022



The Best Performance of Mortgage

Acara:
ACSA Award 2022

Penyelenggara:
Asosiasi Analis Efek Indonesia

Tanggal:
27 Oktober 2022



Haru Koesmahargyo – Most Popular Leader in Social Media 2022 Kategori CEO BUMN Tbk

Acara:
PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media 2022

Penyelenggara:
PR Indonesia

Tanggal:
10 November 2022



Haru Koesmahargyo - Banker of The Year 2022

Acara:
Infobank Bankers of The Year 2022
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
23 November 2022



Setiyo Wibowo - TOP 200 The Next Leaders 2022

Acara:
Infobank TOP 200 The Next Leaders 2022
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
23 November 2022



Best Performing Bank 2022 Based on Financial Performance 2020-2022 Category Kategori : Bank Assets Rp100 Trillion up to Less Than Rp500 Trillion

Acara:
Top 20 Financial Institutions 2022
Penyelenggara:
The Finance
Tanggal:
24 November 2022



Nofry Rony Poetra as Best CFO in Financial Institution 2022 Category KBMI 3

Acara:
The Finance Best CEO 2022
Penyelenggara:
The Finance
Tanggal:
24 November 2022



Bank Syariah Terbaik Kategori Unit Usaha Syariah

Acara:
Anugerah Syariah Republika 2022
Penyelenggara:
Republika
Tanggal:
29 November 2022



Nixon L. P. Napitupulu - Best Bankers in Business Strategi Iniative

Acara:
TOP 20 Financial Institution Awards 2022
Penyelenggara:
The Finance
Tanggal:
29 November 2022



Best Data Technology DataGovAi 2022 dan Best Data Technology for Transform Business Processes with Big Data Analytics & AI

Acara:
DataGovAi Award Indonesia 2022
Penyelenggara:
Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI)
Tanggal:
29 November 2022



KPR BTN – Top Mortgage Lender (Subsidi)

Acara:
TOP BUMN Award 2022

Penyelenggara:
Bisnis Indonesia

Tanggal:
13 Desember 2022



Nixon L.P. Napitupulu - The Best Transformation Leader

Acara:
Indonesia TOP Financial Industry Executives 2022

Penyelenggara:
The Economics

Tanggal:
16 Desember 2022



Best Brand Awareness in BUKU 3 Category

Acara:
Indonesia Financial Brand Awards 2022

Penyelenggara:
The Economics

Tanggal:
16 Desember 2022



1st - The Best Indonesia GCG Award – VII – 2022 Category: Asset Rp 200 T - 500 T (Bank Public Company)

Acara:
Indonesia Good Corporate Governance Award - VII - 2022

Penyelenggara:
Economic Review

Tanggal:
16 Desember 2022



1st - The Best Indonesia Risk Management – V – 2022 Category: Asset Rp200 T - Rp500 T (Bank Public Company)

Acara:
Indonesia Enterprise Risk Management Award - V - 2022

Penyelenggara:
Economic Review

Tanggal:
16 Desember 2022



Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Acara:
GCG Award 2022

Penyelenggara:
SWA

Tanggal:
20 Desember 2022

Sertifikasi



ISO 37001:2016

Validasi:

11 Agustus 2020 – 10 Agustus 2023

Penerima Sertifikasi:

Commercial Banking Division (CMBD), Corporate Syndication & Transaction Banking Division (CSTD), Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD), Commercial Credit Risk Division (CRD) dan SME Restructuring seluruh Kantor Wilayah

Dikeluarkan Oleh:

Garuda Sertifikasi Indonesia



ISO 9001:2015

Validasi:

15 September 2020 – 11 Agustus 2023

Penerima Sertifikasi:

Internal Audit Division

Dikeluarkan Oleh:

SGS



ISO 9001:2015

Validasi:

06 April 2022 – 19 October 2024

Penerima Sertifikasi:

Compliance and Governance Division

Dikeluarkan Oleh:

SGS



Sertifikat Indi 4.0 Level 3

Validasi:

18 Juli 2022 – 18 Juli 2025

Penerima Sertifikasi:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dikeluarkan Oleh:

Kementerian Perindustrian

INFORMASI PADA WEBSITE PERSEROAN

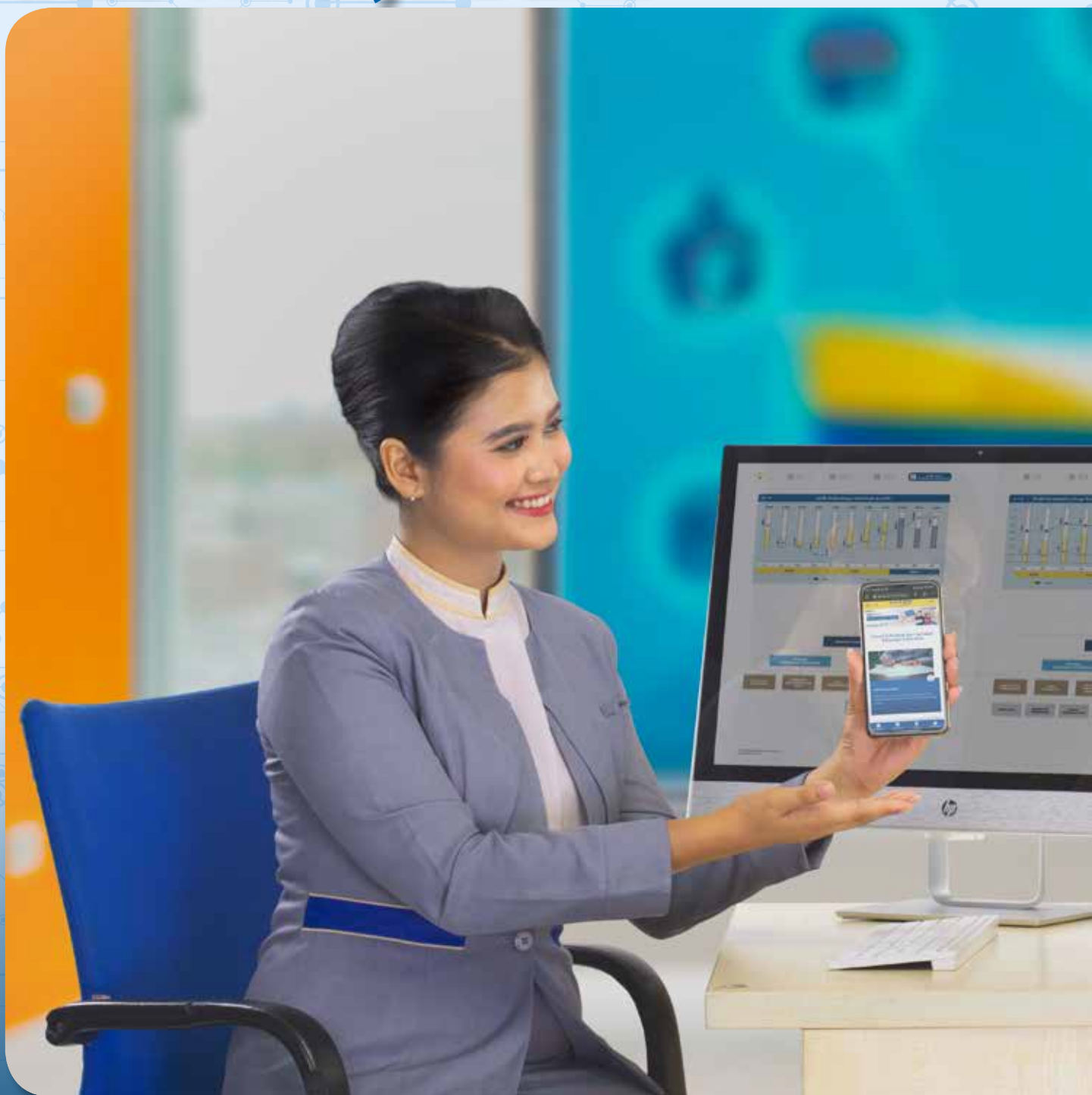
Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat www.btn.co.id. Situs web ini berisi informasi terkini tentang korporasi Perseroan, baik itu *login E-Banking* bagi nasabah, informasi seputar korporasi dan produk-produk Perseroan, profil, pengelolaan organisasi dan transparansi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, hingga berita terkini. Situs web ini menjadi portal yang dapat

diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan situs web sebagai bagian dari transparansi informasi kepada publik.



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank





Bank  **BTN**
Sahabat Keluarga Indonesia



TINJAUAN PEREKONOMIAN



Analisis Perekonomian Global

Hingga akhir Triwulan III, kondisi perekonomian global masih melambat disertai dengan meningkatnya tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan mayoritas Bank Sentral serta ketidakpastian pasar keuangan global. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh masih berlanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas dan gangguan rantai pasok. Sementara itu, tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi, sehingga Bank Sentral di berbagai negara meresponnya dengan melakukan pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Pada tahun 2022, The Fed mulai menaikkan suku bunga acuannya dari 0,25% menjadi 4,50% atau mencapai 425 bps hanya dalam waktu 10 bulan. Kenaikan *Fed Funds Rate* yang agresif ini diperkirakan hingga awal 2023 dengan siklus yang lebih panjang mendorong tetap kuatnya mata uang dolar AS sehingga memberikan tekanan pelemahan nilai tukar di berbagai negara. Tekanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin meningkat sejalan dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Aliran keluar investasi portofolio asing menambah tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Indikator aktivitas ekonomi yang berasal dari *Manufacturing Purchasing Manager Index* (PMI) menunjukkan *outlook* yang kelam pada beberapa negara G20. Meskipun rilis Produk Domestik Bruto (PDB) untuk Triwulan III menunjukkan kenaikan di beberapa *major economics*, rilis PMI per Desember menunjukkan pelemahan pada Triwulan IV, terutama pada Eropa. Sementara itu, aktivitas ekonomi pada negara berkembang masih menunjukkan ekspansi.



Grafik Indikator *Purchasing Manager Index (PMI)* dari negara *Advanced Economies* dan *Emerging Market Economies*

Advanced Economies

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
US	55,50	57,30	58,80	59,20	57,00	52,70	52,20	51,50	52,00	50,40	47,70	46,20
UK	57,30	58,00	55,20	55,80	54,60	52,80	52,10	47,30	48,40	46,20	46,50	45,30
France	56,50	58,60	54,10	56,00	54,20	53,40	50,80	45,90	48,90	46,70	48,60	46,70
Japan	52,80	52,00	56,00	53,40	51,00	52,00	52,50	49,70	50,70	52,80	49,80	50,60

Emerging Market Economies

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Indonesia	53,70	51,20	51,30	51,90	50,80	50,20	51,30	51,70	53,70	51,80	50,30	50,90
Brazil	47,80	49,60	52,30	51,80	54,20	54,10	54,00	51,90	51,10	50,80	44,30	44,20
China	49,10	50,40	48,10	46,00	48,10	51,70	50,40	49,50	48,10	49,20	49,40	49,00
India	54,00	54,90	54,00	54,70	54,60	53,90	56,40	56,20	55,10	55,30	55,70	57,80

Sumber : CEIC, Januari 2023, diolah.

Hingga akhir Desember 2022, harga-harga komoditas seperti minyak, batu bara dan *Crude Palm Oil (CPO)* cenderung naik karena kekhawatiran akan terjadinya resesi, terutama di negara-

negara maju. Kenaikan harga-harga komoditas ini yang telah mendorong kenaikan inflasi sepanjang tahun 2022.

Harga komoditas energi cenderung *sideways*

Natural Gas Price



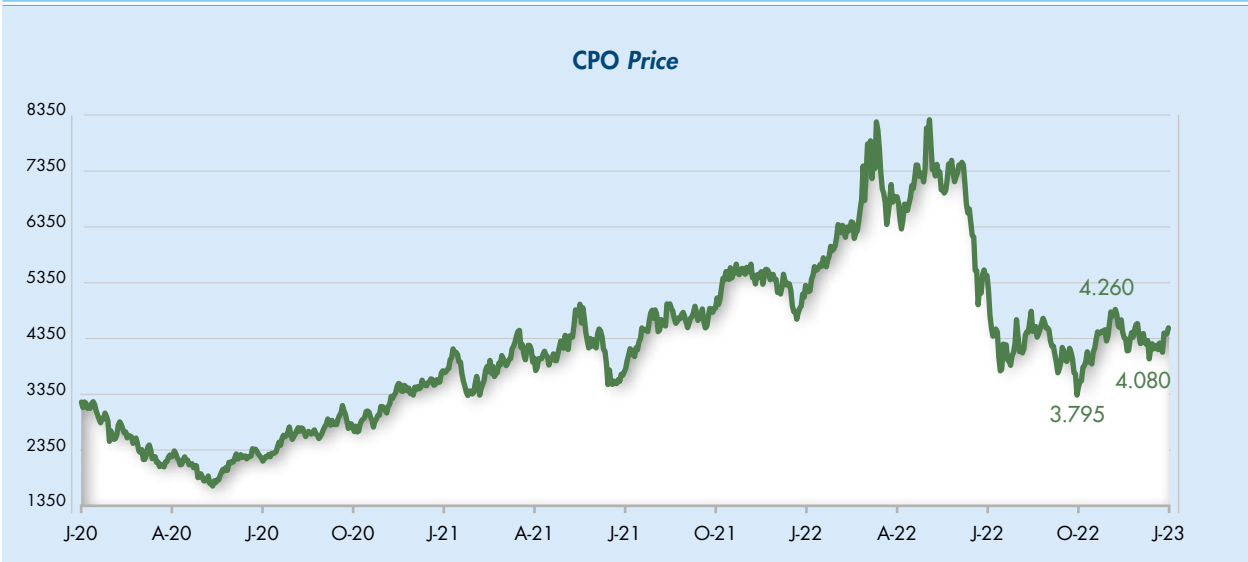
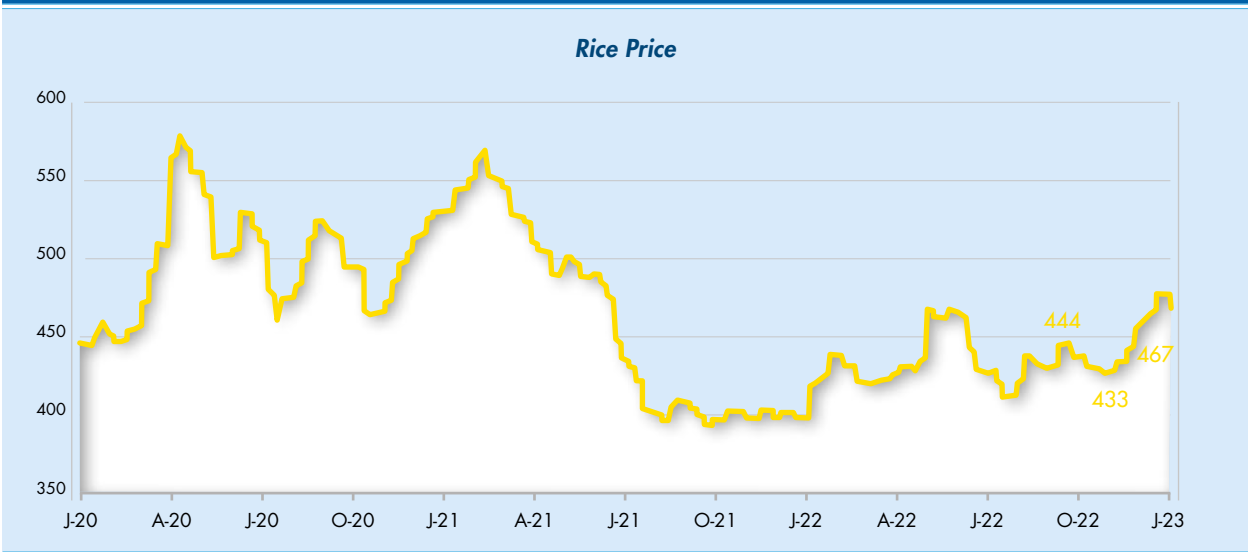
Brent Price



Coal Price



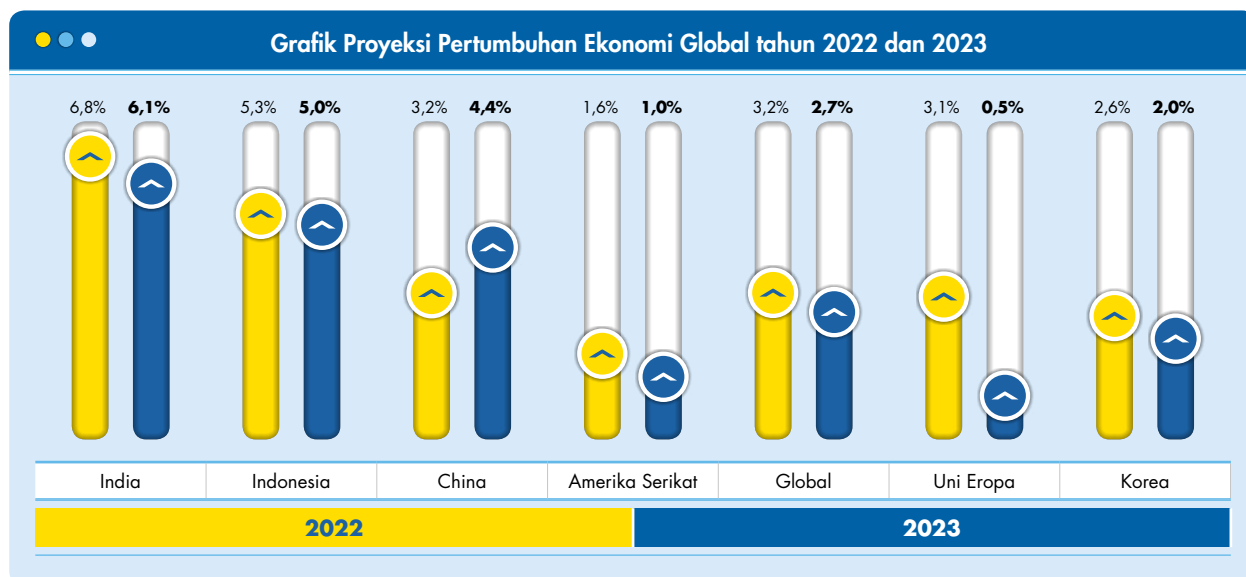
Harga komoditas lain seperti beras dan CPO cenderung stagnan



Sumber: Bloomberg, Januari 2023

International Monetary Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 dari 2,9% pada bulan Juli menjadi 2,7% pada bulan Oktober yang tercantum pada laporan *World Economic Outlook* edisi Oktober 2022. Kondisi tersebut tidak mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 yang berada di level 3,2%. Sementara Bank Indonesia memprakirakan ekonomi dunia tumbuh melemah menjadi sekitar 3,0% pada 2022 dan 2,6% pada

2023. Perkembangan tersebut didorong oleh tensi geopolitik yang masih berlanjut, sehingga ini akan semakin berimplikasi pada gangguan rantai pasok global. Gangguan rantai pasok telah memicu lonjakan harga energi dan pangan, sehingga turut mendorong peningkatan inflasi di berbagai negara dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Uni Eropa dan Amerika Serikat berpotensi memasuki jurang resesi di tahun 2023.



Sumber : International Monetary Fund (IMF), *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2022

Analisis Perekonomian Nasional

Perekonomian nasional melanjutkan perbaikannya pada Triwulan III tahun 2022, seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat. Kinerja perekonomian nasional pada Triwulan III tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,72% yoy, meningkat dibandingkan Triwulan II tahun 2022 yang sebesar 5,44% yoy. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan menguatnya pemulihan ekonomi

domestik seiring meningkatnya kembali mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi dan juga tetap terjaganya kinerja ekspor. Dari sisi lapangan usaha, sektor usaha seperti transportasi dan perdagangan dan akomodasi makan/minum kembali mencatatkan pertumbuhan positif.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), November 2022

Perbaikan ekonomi nasional masih terus berlanjut hingga Triwulan IV tahun 2022 dimana pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,01% yoy. Perkembangan *leading indicators* hingga Desember 2022 juga masih menunjukkan hasil yang positif, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih tinggi sebesar 119,9, PMI Manufaktur yang masih berada pada level ekspansi sebesar 50,9 serta Indeks Penjualan Ritel yang mencapai 216,4. Pada Januari 2023, *International Monetary Fund* (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 4,8% dan proyeksi untuk 2024 menjadi sebesar 5,1%. Hal ini dipicu oleh masih berlanjutnya kenaikan harga komoditas dan energi dampak konflik Rusia dan Ukraina, tekanan inflasi global serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menyebabkan perlambatan ekonomi nasional.

Pada 2022, Pemerintah kembali mengeluarkan program stimulus yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah mengeluarkan stimulus dalam bentuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp455,62 triliun untuk 3 (tiga) klaster utama yaitu klaster kesehatan, klaster perlindungan sosial serta klaster penguatan pemulihan ekonomi. Sementara di sisi moneter, setelah BI mempertahankan suku bunga sebesar 3,50% selama 17 bulan berturut-turut, BI mulai beralih pada kebijakan *pro stability*

dan menaikkan suku bunga acuannya menjadi 3,75% pada Agustus 2022 untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti akibat kenaikan harga BBM. Hingga Desember 2022, BI telah menaikkan suku bunga hingga 200 bps atau menjadi 5,50% sebagai langkah untuk menurunkan laju inflasi yang masih tinggi. Sedangkan OJK memperpanjang kebijakan terkait restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkena dampak Covid-19 hingga Maret 2023 dan berlanjut diperpanjang hingga Maret 2024 untuk beberapa sektor terkait.

Pertumbuhan ekonomi nasional masih melanjutkan perbaikannya walaupun sedikit tertahan pada Triwulan IV tahun 2022. Secara keseluruhan, Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,0%-5,3% yoy pada akhir tahun 2022. Harga-harga barang diperkirakan masih akan meningkat sebagai dampak lanjutan dari penyelesaian harga BBM, namun pengendalian inflasi dengan baik oleh koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebabkan tingkat inflasi tetap terjaga dan berada di bawah level 6,0% yoy pada akhir tahun 2022. Sementara itu, nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pasar global sehingga tekanan terhadap Rupiah masih berlanjut dan kurs Rupiah terhadap Dollar AS berada dikisaran 15.500 pada akhir tahun 2022.

Analisis Industri Perbankan

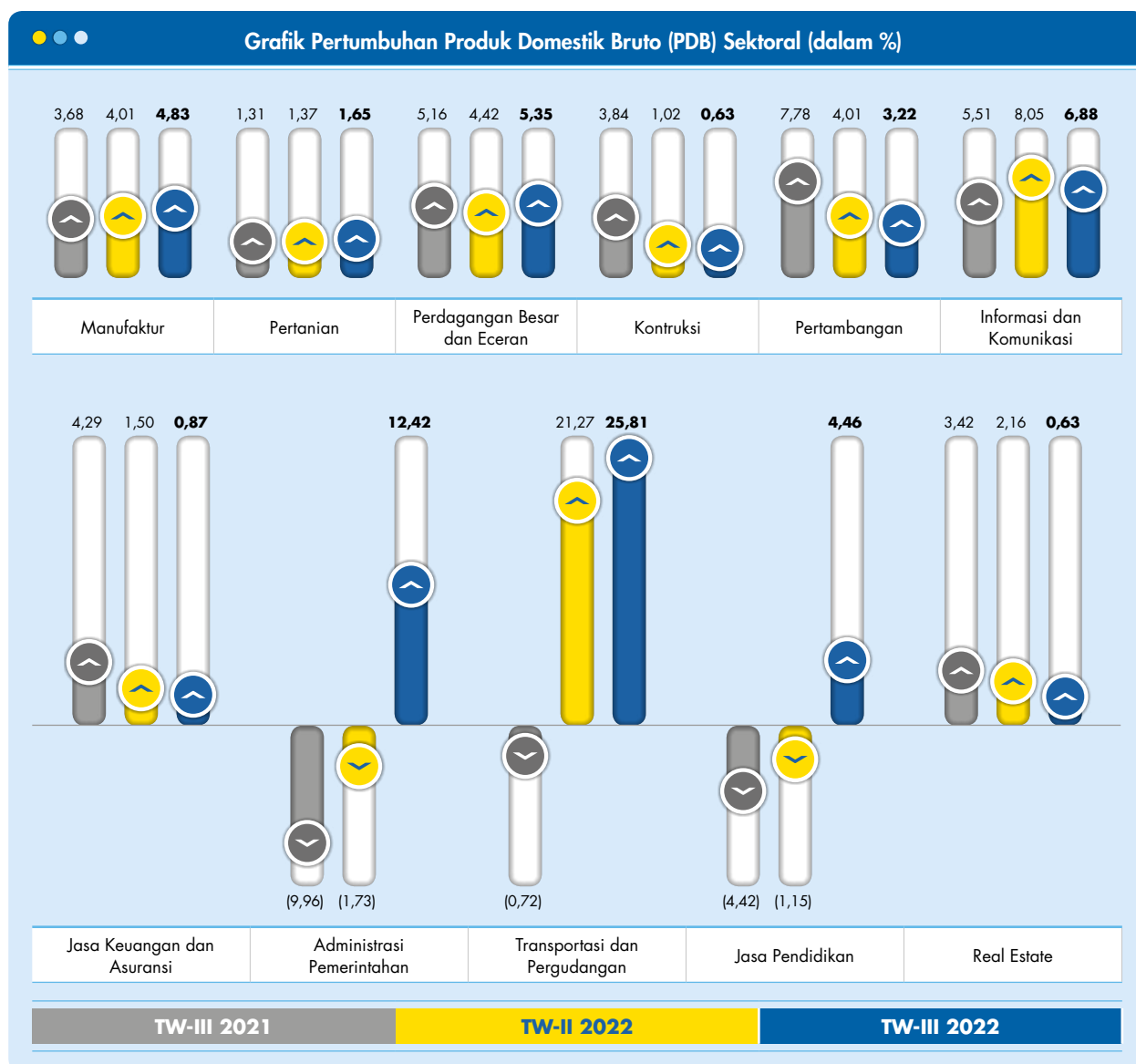
Selaras dengan perekonomian nasional, perkembangan industri perbankan di Indonesia juga mengalami perbaikan di sepanjang tahun 2022. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja sektor jasa keuangan khususnya perbankan pada 2022 masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang tersedia serta risiko kredit yang terjaga.

Fungsi intermediasi perbankan pada bulan Desember 2022 kembali mencatatkan tren peningkatan dengan kredit tumbuh sebesar 11,35% yoy. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh jenis kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 12,17% yoy dan pertumbuhan kredit debitur korporasi sebesar 15,44% yoy. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Desember 2022 tercatat tumbuh sebesar 9,01% yoy, dengan laju pertumbuhan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan giro sebesar 18,78% yoy dan tabungan sebesar 7,52% yoy. Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL perbankan sebesar 2,44%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan menjadi sebesar Rp469 triliun, dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah.

Sumber: Bank Indonesia, Desember 2022.

Analisis Industri Perumahan

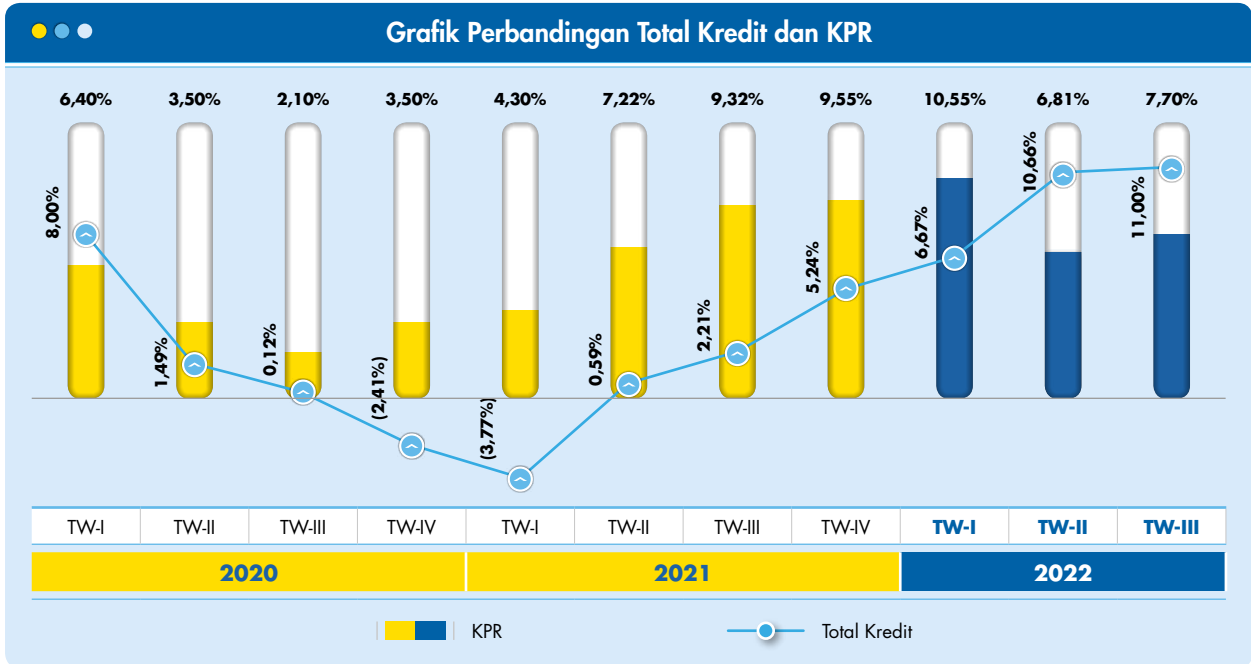
Sektor real estat kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0,63% yoy pada Triwulan III tahun 2022, walaupun melemah dibandingkan pertumbuhan Triwulan II 2022 yang sebesar 2,16% yoy. Sektor Real Estat merupakan salah satu sektor yang tetap mencatatkan pertumbuhan positif walaupun kondisi perekonomian berkontraksi di masa pandemi. Sektor perumahan masih memiliki ruang untuk tumbuh yang sangat besar mengingat masih tingginya angka *backlog* perumahan nasional dan tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Dengan *multiplier effect* sektor perumahan yang cukup besar terhadap sektor ekonomi lainnya, sektor perumahan tetap dapat menjadi alternatif yang ideal untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), November 2022

Perpanjangan stimulus Pemerintah di bidang perumahan mendorong permintaan rumah pada tahun 2022. Stimulus tersebut antara lain pelonggaran rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti menjadi maksimal 100% untuk semua jenis properti serta insentif PPN untuk rumah tapak dan rumah susun yang diperpanjang lagi hingga September 2022. Besarnya

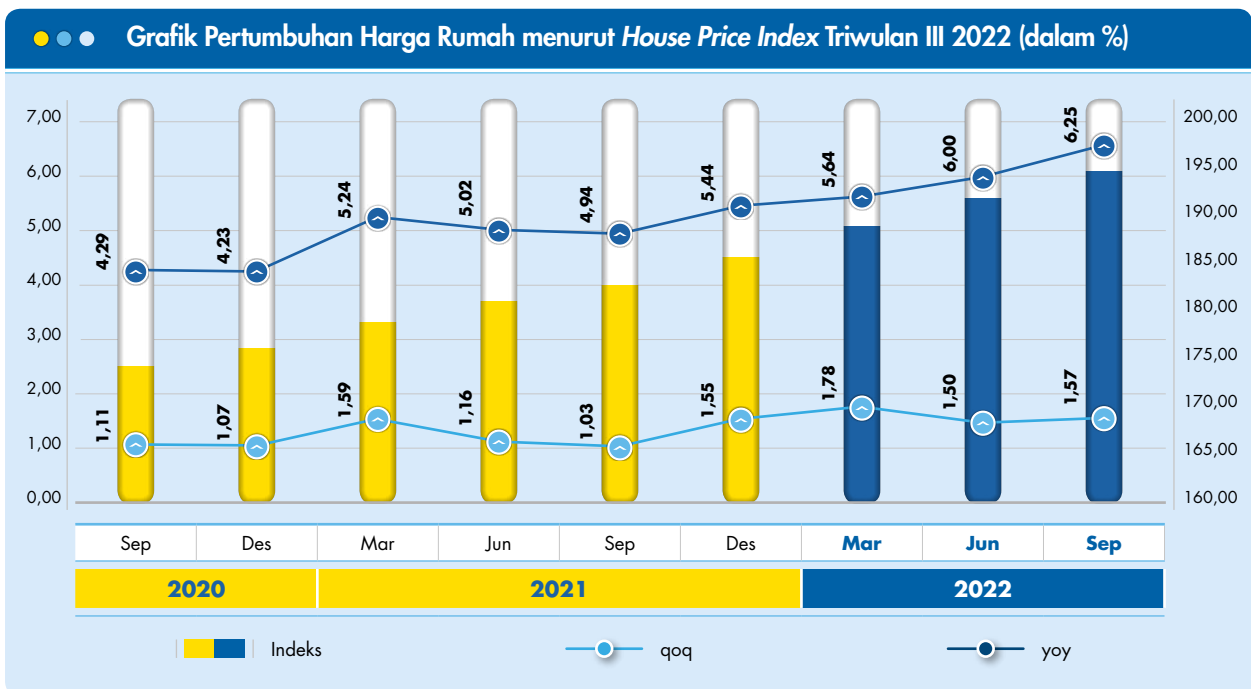
dukungan Pemerintah ini dapat terlihat pada pertumbuhan KPR Nasional hingga Triwulan I 2022 telah tumbuh sebesar 10,55% yoy, sedikit melambat pada Triwulan II menjadi 7,00% yoy, kemudian kembali meningkat pada Triwulan III menjadi 7,70% yoy. Sedangkan pertumbuhan total Kredit nasional kembali melanjutkan pertumbuhannya yaitu menjadi 11,00% yoy.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (SPI OJK) September 2022, diolah.

Pada Triwulan III tahun 2022, *Housing Finance Center* Perseroan merilis Indeks Harga Rumah (*House Price Index/HPI*) sebesar 194,97, dengan pertumbuhan sebesar 6,56% yoy. Pertumbuhan harga rumah yang ditunjukkan oleh *House Price Index* (HPI), tumbuh selaras dengan PDB Nasional bahkan BTN HPI menjadi *leading indicator* pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan Indeks Harga Rumah pada triwulan III yang terus meningkat pada tahun 2022 yang juga diikuti oleh Pertumbuhan Ekonomi

Nasional, sejalan dengan kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan harga pada triwulan ini merupakan yang tertinggi sejak dimulainya pandemi merefleksikan industri perumahan mulai menunjukkan *recovery* sejak April 2020 dan terus membaik hingga saat ini. Pertumbuhan ini dipicu oleh pertumbuhan rumah tipe 36 dan 45 yang mengindikasikan tingginya permintaan untuk kedua tipe tersebut.



Sumber: *Housing Finance Center* (HFC) BTN, Oktober 2022

Analisis Posisi Perseroan Dalam Industri Perbankan

Untuk menggambarkan posisi Perseroan di antara perbankan nasional per November 2022 dapat disampaikan pada penjelasan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Kinerja Perseroan di antara Perbankan Nasional

(dalam triliun Rupiah)

No.	Nama Bank	Aset					
		November 2022	Oktober 2022	Desember 2021	November 2021	Δ Year to Date (ytd)	Δ Year on Year (yoy)
1	BRI	1.679	1.652	1.573	1.552	6,8%	8,2%
2	MANDIRI	1.502	1.509	1.356	1.313	10,8%	14,4%
3	BCA	1.283	1.281	1.205	1.192	6,4%	7,6%
4	BNI	976	983	941	904	3,7%	7,9%
5	BTN	398	392	372	379	6,9%	4,9%
6	CIMB NIAGA	300	296	207	301	(2,3%)	(0,4%)
7	BSI	284	279	265	257	7,0%	10,7%
8	OCBC NISP	233	228	214	221	8,8%	5,6%
9	PANIN	187	184	191	181	(1,8%)	3,1%
10	DANAMON	177	182	179	175	(0,7%)	1,1%
11	BTPN	185	187	175	170	6,1%	8,7%
12	PERMATA	240	227	234	227	2,5%	5,9%
13	MAYBANK	160	152	158	148	1,3%	8,1%
14	BJB	168	162	149	153	12,2%	9,8%
15	UOB	141	145	121	125	15,8%	12,7%
16	MEGA	133	130	133	124	0,4%	7,8%

No.	Nama Bank	Kredit dan Pembiayaan					
		November 2022	Oktober 2022	Desember 2021	November 2021	Δ Year to Date (ytd)	Δ Year on Year (yoy)
1	BRI	1.014	1.019	944	952	7,5%	6,5%
2	MANDIRI	920	907	828	818	11,1%	12,5%
3	BCA	680	681	621	602	9,6%	13,0%
4	BNI	626	621	581	569	7,6%	10,1%
5	BTN	296	294	275	273	7,5%	8,1%
6	CIMB NIAGA	190	189	178	171	7,0%	11,4%
7	BSI	205	202	171	166	20,3%	23,7%
8	OCBC NISP	136	134	121	119	13,0%	14,8%
9	PANIN	120	118	111	109	8,0%	9,9%
10	DANAMON	119	118	107	106	11,8%	12,6%
11	BTPN	137	143	125	124	9,7%	10,4%
12	PERMATA	136	137	125	124	9,4%	14,7%
13	MAYBANK	97	96	91	90	6,4%	7,7%
14	BJB	108	107	95	95	12,5%	13,5%
15	UOB	83	88	75	78	17,6%	10,8%
16	MEGA	69	69	61	60	13,0%	24,8%

Dana Pihak Ketiga

No.	Nama Bank	November 2022	Oktober 2022	Desember 2021	November 2021	Δ Year to Date (ytd)	Δ Year on Year (yoy)
1	BRI	1.234	1.206	1.128	1.122	9,4%	10,0%
2	MANDIRI	1.127	1.125	1.028	989	9,6%	13,9%
3	BCA	1.025	1.029	968	950	5,9%	7,9%
4	BNI	743	751	730	682	1,9%	8,9%
5	BTN	322	315	296	300	8,7%	7,4%
6	CIMB NIAGA	227	225	242	236	(5,9%)	(3,8%)
7	BSI	248	244	233	225	6,1%	(10,2%)
8	OCBC NISP	175	167	168	172	4,1%	1,9%
9	PANIN	128	126	126	125	1,3%	2,2%
10	DANAMON	119	122	122	118	(2,0%)	1,2%
11	BTPN	99	99	98	94	0,2%	5,1%
12	PERMATA	180	168	180	171	(0,0%)	4,9%
13	MAYBANK	114	108	115	106	(1,4%)	7,4%
14	BJB	123	119	114	118	8,6%	4,8%
15	UOB	116	121	100	103	16,4%	12,9%
16	MEGA	93	93	99	94	(5,5%)	(0,9%)

Hingga November 2022, Perseroan tetap mengukuhkan sebagai Bank terbesar ke-5 dari sisi Aset. Adapun aset Perseroan hingga bulan November 2022 yaitu mencapai Rp398 triliun, atau mengalami kenaikan 4,9% yoy. Hal ini juga serupa

pada pertumbuhan kredit dan pembiayaan serta dana pihak ketiga Perseroan hingga bulan November 2022. Kredit dan pembiayaan tumbuh 8,1% yoy menjadi Rp296 triliun dan dana pihak ketiga tumbuh 7,4% yoy menjadi Rp322 triliun.

TINJAUAN OPERASIONAL

Rencana Strategis Bank

Rencana strategis bank meliputi strategi jangka pendek dan menengah serta strategi jangka panjang bank.

Jangka Pendek dan Menengah

Bidang Perkreditan

Inisiatif untuk mengembangkan bisnis kredit pada jangka pendek dan menengah adalah:

1. Mengembangkan program kepemilikan hunian yang terjangkau untuk mendukung program perumahan nasional.
 - a. Mengoptimalkan porsi Perseroan pada kuota KPR Sejahtera FLPP, KPR BP2BT, KPR TAPERA dan penyaluran kerja sama KPR TWP-AD di tahun 2022.
 - b. Mengembangkan skema pendanaan untuk penyediaan perumahan yang terjangkau.
 - c. Kemitraan untuk pendanaan proyek perumahan segmen milenial dan urban.
 - d. Pembangunan proyek perumahan milenial dengan harga terjangkau dan memiliki fasilitas lengkap (*working space, walkable/dekat ke mana-mana*) melalui pembangunan *Transit Oriented Development (TOD)*.
2. Mengembangkan pangsa pasar KPR di segmen *emerging affluent* dan *affluent*.
 - a. Program *up-selling* dan *cross selling* produk non subsidi kepada nasabah KPR Subsidi yang sudah atau hampir lunas melalui kapabilitas *analytics* dan program *up-selling* yang terukur.
 - b. Program kerja sama dan *marketing* dengan agen properti nasional dan individu, sebagai strategi *Direct to Customer (D2C)*, khususnya untuk KPR rumah *second*.
 - c. Mengembangkan kerja sama dengan *developer* untuk mengembangkan proyek perumahan di segmen *emerging affluent*.
 - d. Memperkuat aplikasi dan portal BTN Properti dengan digitalisasi proses KPR secara *end to end*, baik untuk konsumen dan pengembang.
 - e. Meluncurkan *CASA-linked* dan *payroll-linked mortgage proposition*.
 - f. Membuat *one-stop-shop* ekosistem perumahan untuk di *life-cycle* nasabah.
 - g. Membangun *platform instant purchase* sebagai bagian BTN Properti.
3. Memperluas *value chain real estate* yang menasar UMKM dan Kontraktor.
 - a. *Cross sell* SCF, BG, SKBDN dan *e-banking* di nasabah SME, Komersial, Korporasi dan Instansi.
 - b. Eksplorasi kemitraan bisnis SME dengan *fintech*.

Bidang Kualitas Kredit dan Pembiayaan

Untuk mencapai target perbaikan kualitas kredit tersebut, inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan Inisiatif Perbaikan Proses Bisnis Kredit.
 - a. Optimalisasi *Regional Loan Processing Center (RLPC)*.
 - b. Implementasi *Commercial Banking Center (CBC)*.
 - c. Melanjutkan perbaikan proses bisnis perkreditan, terutama di segmen komersial dan SME.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas *collection*.
 - a. Standardisasi proses restrukturisasi kredit.
 - b. Memperbaiki *collection management*.
 - Implementasi *collection scoring*.
 - *Monitoring* produktivitas Tenaga Alih Daya (TAD) *collection, i-coll usage* dan *contacted rate*.
 - Memperbaiki proses bisnis restrukturisasi kredit SME dan Komersial.
 - c. Mengembangkan *early warning system*.
 - d. Optimalisasi kerja sama dengan *lawyer, Regional Legal Representative (RLR)*, pengadilan dan BPN.
3. Mempercepat penyelesaian kredit macet secara *bulk* (Strategi Aset Sales)
 - a. Penjualan melalui Investor atau mitra. Penawaran kepada calon investor/mitra melalui *small gathering* di masing-masing kantor wilayah atau kantor cabang yang memiliki outstanding NPL besar (pareto).
 - b. Penjualan melalui *bulk sales*. Penawaran kepada calon investor/mitra yang dilakukan secara *bulk* kepada satu pihak.
 - c. Penyelesaian kredit komersial melalui litigasi. Koordinasi unit kerja *Assets Sales Management* dengan unit *Legal* untuk melakukan litigasi terhadap debitur-debitur yang berpotensi dapat dilakukan *recovery*.
 - d. Penjualan melalui portal rumah murah BTN (www.rumahmurahbtn.co.id). Memaksimalkan penjualan melalui digital platform agar dapat memberikan *awareness* secara masif kepada khalayak dengan harapan dapat menarik minat calon pembeli.

Bidang Pendanaan

Untuk mencapai target tersebut, inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kapabilitas sebagai bank transaksional dan *channel* transaksi.
 - a. Implementasi transformasi model operasional cabang.
 - b. Meningkatkan produktivitas sales melalui pengembangan BTN *Smart*.

- c. Program dan strategi *campaign* tabungan melalui aktivitas *marketing communication* yang terintegrasi pada segmen menengah dan debitur KPR Non Subsidi.
 - d. Program akuisisi dan penjualan produk *bundling* kepada korporasi BUMN.
 - e. Akuisisi Tabungan BTN Bisnis untuk nasabah dan mitra segmen SME dan Komersial.
 - f. Mengembangkan *loyalty platform* untuk nasabah BTN Prioritas.
 - g. Pengembangan *coverage* jaringan kantor di area pasar potensial dan mengembangkan potensi distribusi non-cabang untuk potensi bisnis baru.
2. Menjadi bank operasional pengelolaan dana institusi
 - a. Meningkatkan akuisisi Satuan Kerja (SATKER) Pemerintah dan interkoneksi SPAN.
 - b. Meningkatkan akuisisi dan utilisasi *cash management* pada nasabah lembaga dan korporasi.
 - c. Program akuisisi nasabah *payroll* melalui penjualan produk *bundling* (Program BTN Solusi).

Treasury Specialist di unit kerja *Wealth Management* untuk memberikan *forex rate* yang kompetitif dengan industri.

- c. Menyediakan 2 (dua) *Structured Product* baru yakni *Market-Linked Deposit* (MLD) dan *Dual Currency Investment* (DCI) oleh unit kerja *Treasury* yang akan membantu pencapaian *fee based income* dari produk *treasury* dan juga membantu peningkatan DPK dalam valuta asing.
- d. Pembentukan Tim *Retail Treasury Specialist* (RTS) di unit kerja *Wealth Management* yang akan berfungsi sebagai *Sales* dan *Trainer* guna meningkatkan *fee based income* dari sisi transaksi *Forex* dan *Structured Products*.
- e. Menyediakan program-program khusus bagi *Forex* dan *Structured Product* guna meningkatkan penjualan *Forex* dan *Structured Product* untuk meningkatkan *fee based income* Perseroan dan juga akuisisi dana *fresh fund* dalam valuta asing.
- f. Melakukan *market beat activities* yang mencakup *daily training, branding, promotion, awareness* baik bagi internal BTN maupun nasabah.
- g. Penjualan *retail bond* meliputi aktivitas penjualan bond baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder dalam mata uang IDR (FR, ORI, SR, ST, SBR) maupun mata uang USD (INDON, INDOIS).

Bidang Pendapatan Operasional Lainnya dan Pembentukan Anak Perusahaan

Fee Based Income

Untuk meningkatkan profitabilitas, rencana bisnis Perseroan pada tiga tahun ke depan juga difokuskan untuk meningkatkan Pendapatan Operasional Lainnya (POL) yang sebagian besar bersumber dari *fee based income*, terutama pada sumber-sumber baru yang berbasis transaksi dan layanan. Untuk mencapai target tersebut, inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan *fee* dari transaksi *e-channel*.
Kerja sama dengan *fintech* dan *e-wallet* (OVO, Gojek, Shopee, LinkAja, Dana dan lain-lain).
2. Meningkatkan *fee* transaksi *treasury* dan mengembangkan sumber FBI baru.
 - a. Meningkatkan pendapatan transaksi *treasury*, terutama dari transaksi *forex*.
 - b. Pengembangan *retail transaction* (*bond/obligasi/forex*).
 - c. Penjualan produk *treasury*, sekuritisasi dan *NCD retail*.
 - d. Meningkatkan kerja sama Bank Garansi (BG), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Supply Chain Financing* (SCF), *Cash Management System* (CMS) di segmen UMKM, Komersial dan Korporasi.
3. Mengembangkan strategi di segmen *retail transaction*
 - a. Pembentukan tim baru *Retail Treasury Specialist* di unit kerja *Wealth Management*.
 - b. Implementasi *branch forex system* oleh unit kerja *Treasury* yang akan digunakan oleh tim baru *Retail*

Rencana Pendirian Anak Perusahaan

Untuk memperkuat bisnis inti bank dan inisiatif dalam mendukung sinergi BUMN, pada jangka menengah pengembangan bisnis juga dilakukan dengan rencana pendirian anak perusahaan atau strategi anorganik melalui rencana penyertaan modal di bidang manajemen investasi, perusahaan modal ventura, asuransi, pendirian anak perusahaan multifinance dan kerja sama untuk mengembangkan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS). Rencana pendirian anak perusahaan Manajemen Investasi (MI) direncanakan dilakukan dengan skema penyertaan modal pengendalian langsung, dalam hal ini kandidat perusahaan yang direncanakan adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan salah satu anak perusahaan BUMN.

Berikutnya, memperhatikan *competitive advantage* bisnis yang kuat di perumahan yang utamanya adalah KPR, Perseroan berencana membentuk anak perusahaan asuransi jiwa atau kerugian yang merupakan strategi anorganik untuk menyediakan layanan *one stop solution* dalam memfasilitasi layanan keuangan keluarga. Rencana pendirian anak perusahaan tersebut dilakukan dengan skema penyertaan modal pengendalian langsung, dengan target calon mitra perusahaan/anak perusahaan asuransi jiwa yang telah berjalan atau pendirian baru.

Selanjutnya, untuk mendukung gagasan sinergi BUMN dan sebagai *special vehicle* pada strategi pengembangan *Assets Management*, Perseroan juga berencana mendirikan anak perusahaan Modal Ventura. Selain itu, fokus bisnis pendirian anak perusahaan di bidang ini juga ditujukan untuk penyertaan pada beberapa potensi bisnis seperti *fintech* dan *assets management* untuk mempercepat penyelesaian kredit macet.

Bidang Bisnis Syariah

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini tidak terlepas dari pangsa pasarnya yang masih belum jenuh dan terus berkembang. Sejalan dengan potensi perbankan syariah nasional, Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan juga mengalami pertumbuhan bisnis yang searah. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja yang terus tumbuh dan kemampuan UUS Perseroan yang tetap tumbuh di tengah tantangan pandemi.

Sesuai dengan regulasi Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan konversi UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) paling lambat pada 16 Juli 2023, dalam mengembangkan bisnis syariah, Perseroan akan melakukan kerja sama pengembangan UUS dengan salah satu bank syariah nasional.

Memperkuat Permodalan

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dibutuhkan dukungan permodalan yang kuat dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum bank sesuai Basel III. Sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bahwa bank harus menyediakan modal berupa modal minimum berdasarkan peringkat risiko dan tambahan modal sebagai penyangga berdasarkan Basel III (terdapat 3 jenis yaitu *capital conservation buffer*, *countercyclical buffer*, *capital surcharge*).

Strategi penguatan modal yang akan dilakukan Perseroan adalah:

1. Meningkatkan profitabilitas bank.
2. Penerbitan Obligasi/Pinjaman subordinasi.
3. Persiapan pelaksanaan *rights issue* di tahun 2022, apabila Pemegang Saham menyetujui (pelaksanaan *rights issue* membutuhkan dukungan dari Pemerintah sebagai Pemegang Saham Dwiwarna dan mayoritas).

Bidang Human Capital

Dalam rangka mewujudkan *One of Home of Indonesia's Best Talent*, program kerja pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada jangka pendek dan menengah diselenggarakan dan landasan *Corporate Plan* Tahun 2021-2025, yaitu:

1. Menyusun transformasi *human capital* (*HC Strategic Plan*) untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas pegawai.
2. Implementasi struktur *Strategic Business Unit* (SBU) untuk meningkatkan produktivitas unit kerja.

3. Meningkatkan produktivitas pegawai melalui implementasi kebijakan insentif, *reward* dan internalisasi *Employee Value Proposition* (EVP).
4. Melakukan program *learning* yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapabilitas pegawai di bidang *middle office* (kredit/*lending unit*), RM dan pegawai *frontline* di seluruh *outlet* Bank.
5. Meningkatkan kapabilitas organisasi unit Syariah terutama pada bidang *legal*, *financial* dan pengembangan DPS.
6. Menjalankan budaya kerja yang meningkatkan pencapaian *sales* dengan mendorong perilaku inovatif, pengambilan risiko yang *prudent* dan integritas yang direfleksikan dengan pertumbuhan bisnis, penurunan *fraud* dan penurunan NPL.

Infrastruktur IT

Untuk mendukung inisiatif pengembangan layanan *digital banking* dan *mortgage ecosystem* diperlukan penguatan *Information Technology* (IT) yang memadai. Sejalan 10 (sepuluh) pilar strategis transformasi, inisiatif pengembangan IT meliputi:

1. Mengembangkan strategi *digital banking* dengan perencanaan dan pembaruan melalui pengembangan *digital channel* seperti *new mobile banking*, *internet banking* bisnis, *online onboarding*.
2. Mengembangkan ekosistem *digital* dan *partnership* seperti *end to end housing ecosystem*, *payment* dan *peer to peer*.
3. Mengembangkan *API Management* dan *Sandboxing* untuk mendukung *digital banking* dan *upgrade middleware* untuk meningkatkan *availability* dan *reliability* sistem.
4. Otomatisasi proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan.
 - a. Modernisasi *hardware* dan infrastruktur.
 - b. Meningkatkan *reliability* dengan implementasi *high availability* perangkat *network data center* untuk mendukung kinerja transaksi perbankan elektronik.
 - c. Modernisasi aplikasi atau sistem.
 - d. Penggunaan Infrastruktur *cloud*.
5. Mengembangkan dan optimalisasi *loan architecture* secara keseluruhan yang meliputi antara lain *origination system*, *decision engine*, *collection system*, *monitoring system* serta integrasi dengan pihak mitra.
6. Mengembangkan *wholesale banking channel* untuk mendukung transaksi *wholesale* antara lain bank kustodian, *trade finance*, *e-bank* garansi dan *supply chain financing*.
7. Mengembangkan *management tools* untuk aktivitas *marketing* dan *sales* dengan membentuk *digital marketing* dan *sales tools*.
8. Pembaruan secara menyeluruh *wealth management system* dan *priority banking system*.
9. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas data sebagai *single source of truth*, *enhancement data warehouse*.
10. Peningkatan *operational supporting tools*, untuk menambah kapasitas pencegahan risiko dan memaksimalkan pemetaan risiko (*risk profiling*) unit kerja dengan menggunakan aplikasi *operational risk tools*.

11. Efisiensi proses *back-end* (*back office*) melalui implementasi *end to end procurement process, roll out grab for business, enhancement reconciliation system*, pengembangan *human resources system* dan sentralisasi proses di *back office*.
12. Peningkatan *merchant enabler system* untuk kerja sama dengan pihak ketiga seperti fitur EDC dan *e-commerce*.
13. *Reengineering* proses bisnis pembiayaan yang lebih mengarah pada model sentralisasi melalui digitalisasi sistem *back office* untuk mengotomatisasi proses dan menghubungkan ke berbagai *database*.
14. Mendukung inisiatif pengembangan sistem pembayaran (BI-Fast) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel yang akan memfasilitasi pembayaran menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara *real time*, aman, efisien dan tersedia 24 jam dalam 7 hari (24/7).
15. Mengembangkan dan optimasi sistem syariah untuk mendukung bisnis syariah dengan *upgrading core banking system* syariah, pembaharuan *mobile banking* syariah serta *upgrading* beberapa server sistem demi mendukung operasional bank yang lebih baik dan andal.
16. Mengembangkan *treasury* dan *settlement system* untuk mendukung bisnis *treasury*.
17. Mengembangkan sistem untuk mendukung layanan nasabah khususnya terkait *complain monitoring* dan *enhancement* aplikasi *contact center*.
18. Melakukan asesmen terkait *e-channel cyber security* untuk meningkatkan *security maturity level* dalam mempersiapkan organisasi IT *security* yang handal berbasis implementasi CISO serta peningkatan kapabilitas *security* untuk menerapkan *gap analysis cyber security* berbasis *framework* NIST yang disesuaikan dengan model bisnis Perseroan.
19. Melakukan asesmen untuk meningkatkan *security maturity level* dalam mempersiapkan organisasi IT *security* yang handal berbasis implementasi CISO serta peningkatan kapabilitas *security*.
20. Penyesuaian dan pengkinian kebijakan TI terhadap kebijakan dan prosedur regulator dan internal bank, seperti penambahan prosedur pengembangan *rapid/agile*.
21. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tim IT BTN melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
22. Mengembangkan strategi *digital banking*.
23. Melakukan pengembangan terkait perluasan *monitoring* pada jaringan komunikasi melalui *traffic flow and packet analyzer* yang dapat melakukan *root-cause analysis* atas suatu *incident* secara *real time* untuk mendukung aktivitas *preventive* dalam pencegahan terjadinya *incident*.
24. Melakukan pengembangan terkait perluasan *monitoring* pada jaringan komunikasi untuk mendukung aktivitas *preventive* dalam pencegahan terjadinya *incident* serta *monitoring* pada aplikasi dengan harapan proses *troubleshoot* dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, and Compliance

Peningkatan Good Corporate Governance (GCG)

Perseroan menyadari dan memahami pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penguatan struktur organisasi dan proses bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan empat pilar utama implementasi GCG yaitu: (i) *Commitment on Governance*; (ii) *Governance Structure*; (iii) *Governance Process* dan (iv) *Governance Outcome*.

Penguatan pilar pertama dilakukan dengan penguatan struktur dan infrastruktur tata kelola, internalisasi prinsip-prinsip GCG pada kegiatan bisnis dan operasional bank, yang telah tercantum sebagai salah satu misi bank yaitu "Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *shareholder value*".

Penguatan pilar kedua dan ketiga dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada perubahan struktur organisasi dan proses bisnis secara menyeluruh yang saat ini sedang dilakukan sebagai tahapan transformasi bisnis bank. Secara garis besar, perubahan tersebut, dilakukan dengan menyelaraskan proses pemisahan antara peran sales, operasional dan kebijakan risiko. Penguatan pilar tersebut dilakukan dengan mempertegas mekanisme supervisi operasional kantor, baik dari tingkatan direktorat sampai dengan unit kerja.

Selanjutnya, penguatan pilar keempat dilakukan melalui hasil penerapan prinsip GCG dalam proses bisnis bank yang dituangkan dalam laporan dan penilaian GCG serta penghargaan-penghargaan yang diterima bank, termasuk *governance outcome* yang mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain: kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan, peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada regulator.

Peningkatan Risk Management

Dalam rangka mendukung rencana jangka panjang Perseroan, yaitu menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025, strategi dan inisiatif terkait *Risk Management* antara lain:

1. Pengembangan Kapabilitas *Digital, IT* dan *Cyber Risk*
Di awal tahun 2020, telah dilakukan beberapa *launching* dan pengembangan aplikasi guna memperluas layanan secara digital. Digitalisasi layanan maupun otomatisasi ini diperlukan dalam rangka menyiapkan layanan *one stop solution* bagi

nasabah guna memenangkan persaingan perbankan yang semakin kompetitif. Perkembangan bisnis dan layanan bisnis tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan risiko bank sehingga diperlukan peningkatan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi secara efektif oleh bank terutama penciptaan sistem dan mekanisme deteksi *fraud* dan *cyber security* yang handal.

2. Pengembangan aset-aset kredit yang didasarkan pada model-model analitik guna mendukung keputusan-keputusan dalam *underwriting* dan *monitoring*.
 - a. Dalam rangka memperbaiki proses keputusan dan kualitas dari kredit konsumen, mempercepat proses *approval* kredit konsumen melalui proses analisis data dengan menggunakan model, bank akan mengembangkan *Credit Scoring Model* (CSM). Selain itu, bank akan menerapkan *collection scoring*, guna mendukung *collection team* dalam melakukan estimasi kemauan dan kemampuan debitur untuk membayar sehingga dapat membantu dalam menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam meningkatkan *collection* kredit konsumen.
 - b. Dalam rangka memperbaiki proses *underwriting* kredit komersial, memperbaiki kualitas kredit komersial serta mendukung implementasi *Business Process Improvement* (BPI) yang baru dan *Commercial Banking Center* (CBC), bank akan memperkuat implementasi *internal credit rating* (ICR). Sejalan dengan salah satu *strategic themes bank* dalam aspirasi 2025 bank, yaitu memperkuat SME BPI dengan memperbaiki *Turn Around Time* (TAT) melalui *workflow* kredit yang diotomatisasi, bank akan mengembangkan *SME application scoring*, yang diharapkan akan mempercepat proses persetujuan kredit UMKM melalui proses data dengan menggunakan model. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan *market share* segmen UMKM maupun memperbaiki kualitas kredit UMKM.
3. Pengembangan *Commercial Loan Early Warning System* (EWS)

Guna mendukung penguatan pemantauan risiko kredit komersial melalui standarisasi, *digitization* dan pengembangan pedoman-pedoman dan perangkat-perangkat (*tools*), bank akan mengembangkan *commercial loan Early Warning System* (EWS) dengan menetapkan parameter-parameter risiko yang mengindikasikan adanya pemburukan kualitas dari debitur kredit komersial secara individual. Hal ini diharapkan dapat membantu satuan-satuan kerja yang memberikan kredit komersial untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan guna mencegah kredit komersial dari debitur tersebut menjadi kredit komersial yang bermasalah.

Bidang Pengembangan Jaringan (*Delivery Channel*)

Optimalisasi *delivery channel* dalam mendukung bisnis dilakukan melalui pengembangan kuantitas dan ragam *channel* dengan strategi perluasan jaringan yang difokuskan pada empat inisiatif utama, yaitu strategi regionalisasi, ekspansi cabang, *agent banking* dan *digital channel*.

1. Strategi Regionalisasi

Strategi regionalisasi merupakan bentuk pengelompokan wilayah kerja yang tidak hanya berdasarkan lokasi, namun juga berdasarkan densitas cabang eksisting guna memastikan penyelarasan strategi yang lebih baik. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan pada strategi regionalisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Pengembangan wilayah yang terlalu padat akan memastikan kontrol terhadap *Key Performance Indicator* (KPI) dan penyelarasan strategi yang lebih komprehensif.
 - b. Penentuan zona operasional cabang tidak hanya mempertimbangkan lokasi, namun juga rasio kepadatan cabang.
2. Ekspansi kantor cabang

Pada jangka pendek, Perseroan tidak terlalu ekspansif dalam pembukaan kantor cabang. Tahun ini Perseroan akan berusaha untuk meningkatkan pengawasan kantor cabang terhadap *outlet* di bawahnya dan akan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja *outlet* yang tidak produktif untuk dilakukan penutupan. Hal ini dilakukan agar kantor cabang dapat melakukan pengawasan kinerja setiap *outlet* di bawahnya secara lebih baik, sehingga akan mendukung kinerja korporat.
3. *Agent Banking*

Mengoptimalkan *agent banking* sebagai agregator dengan memperluas aliansi strategis, misalnya kantor pos dan minimart sebagai agen penjual.
4. *Digital Channel*

Pengembangan *digital channel* ditujukan untuk *remote access* guna menargetkan *segmen emerging affluent*, generasi muda dan meningkatkan kenyamanan transaksi bagi nasabah. Pengembangan *channel digital* difokuskan pada:

 - a. Target segmen yang menarik dan terdefinisi secara jelas, dengan fokus pada pemilihan segmen, direntang usia 20 sampai dengan 35 tahun.
 - b. Penawaran yang tepat sasaran (*right-to-target*) dengan memanfaatkan *big data analytical advantage* untuk memperoleh rekomendasi produk atau layanan bagi tiap nasabah.
 - c. *Customer value management*, melalui penawaran produk dan layanan yang luas serta universal, tapi lebih fokus pada kebutuhan utama nasabah (*customer centric*).

Adapun uraian program jangka pendek dan menengah dalam mendukung strategi di atas adalah sebagai berikut

1. Program Jangka Pendek

- a. *Continuous Employee Value Proposition (EVP) campaign dan recruitment process improvement*
 - *Rebranding Employee Value Proposition (EVP).*
 - *Improvement talent acquisition bank.*
 - *Pengembangan jalur/source talent acquisition bank.*
- b. *Talent development* untuk mempersiapkan suksesi bank sebagai *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025.
 - *Implementasi akselerasi karier dengan development program.*
 - *Implementasi asesmen kompetensi teknis.*
 - *Digital talent development.*
- c. *Standardisasi dan sentralisasi pengelolaan Tenaga Ahli Daya (TAD)*
 - *Standardisasi kebijakan pengelolaan dan organisasi TAD.*
 - *Desain standardisasi dan kriteria pengadaan TAD.*
 - *Monitoring performance TAD dan vendor TAD.*
- d. *Performance management* untuk mendorong produktivitas pegawai.
 - *Implementasi produktivitas pegawai per segmen.*
 - *Implementasi performance management cycle tahun 2021.*
- e. *Integrity* dan integrasi *data analytic* untuk penguatan *people analytic*.
 - *Integrated mobile HC Application (single sign on).*
- f. *Pengembangan Dewan Pengawas Syariah (DPS)* dan penguatan kapasitas personil syariah.
 - *Penyusunan struktur pendukung organ DPS.*
 - *Pemenuhan DPS untuk penguatan struktur Syariah.*
 - *Penguatan performance DPS.*
 - *Implementasi dedicated employee DPS.*
- g. *Penguatan kompetensi teknis operation* untuk *operational excellence*.
 - *Pengembangan academy* untuk peningkatan kapabilitas pegawai di bidang *treasury, retail, wholesale, commercial* dan sebagainya.
 - *Pengembangan struktur kompetensi teknis* untuk mendukung program pengembangan *talent*.
- h. *Penguatan corporate culture* melalui penerapan *Core Values AKHLAK* dan 8 (delapan) perilaku utama yang didukung melalui implementasi 4 (empat) Pilar Tema Budaya.
 - *Implementasi core value AKHLAK* di Perseroan.
 - *Penilaian nilai budaya perusahaan* yang akurat.
 - *Corporate culture campaign infrastructure support.*
 - *Implementasi program employee engagement.*

2. Program Jangka Menengah

- a. *Continuous Employee Value Proposition (EVP) campaign dan recruitment process improvement* melalui desain rekrutmen strategi untuk memenuhi kebutuhan kompetensi bank digital.
- b. *Talent development* untuk mempersiapkan suksesi bank sebagai *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025.
 - *Implementasi program talent mobility* di lingkungan bank.
 - *Implementasi employee exchange program.*
 - *Implementasi talent reward bank.*
- c. *Standardisasi dan sentralisasi pengelolaan TAD.*
 - *Pengembangan kompetensi TAD.*
- d. *Performance management* untuk mendorong produktivitas pegawai.
 - *Pengembangan Performance Management System (PMS)* yang terintegrasi dengan *BTN Smart.*
 - *Implementasi individual incentive rewards* yang mendorong produktivitas pegawai.
 - *Penyusunan desain remunerasi segmen business dan supporting.*
 - *Penyusunan kebijakan manfaat kesehatan pasca kerja dan tunjangan hari tua* bagi peserta Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP).
- e. *Integrity* dan integrasi *data analytic* untuk penguatan *people analytic* melalui implementasi *HC Data Analytic* dan *HC Dashboard* untuk *decision support system*.
- f. *Pengembangan DPS* dan penguatan kapasitas personil syariah.
 - *Syariah business and risk development program.*
 - *Peningkatan value proposition DPS.*
 - *Design strategi rekrutmen* untuk memenuhi talenta dengan kompetensi *islamic finance structure.*
- g. *Penguatan kompetensi teknis operasional* untuk *operational excellence*.
 - *Digital development program* dan *global competency enhancement.*
 - *Individual Development Plan (IDP) automation* melalui integrasi *Lead Measurement System (LMS) Dream* dengan *Performance Management System (PMS)* dan *Technical Management System (TMS).*
 - *Sales for non sales development program.*
- h. *Penguatan corporate culture* melalui penerapan *Core Values AKHLAK* dan 8 (delapan) perilaku utama yang didukung melalui implementasi 4 (empat) pilar tema budaya.
 - *Performance driven culture roadmap.*
 - *Culture measurement* dan *evaluation digitalized system.*
 - *Employee service center.*

Strategi Jangka Panjang

Perseroan berupaya meningkatkan kontribusinya pada sektor perumahan dan mendukung *roadmap* transformasi Kementerian BUMN dengan menetapkan visi Menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada Tahun 2025 dengan aspirasi bisnis Perseroan yang ingin dicapai di tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 10 (sepuluh) tema *strategis Corporate Plan* Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

1. Penyempurnaan model operasional cabang untuk meningkatkan DPK *low cost* dan bisnis ritel dengan mengoptimalkan *footprint* jaringan dan membangun *customer ownership* secara *end to end* (segmen Komersial, SME, Konsumer) termasuk *funding, lending, fee* dan layanan lainnya.
2. Kemitraan/pertumbuhan anorganik untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan, menangkap peluang di bidang *multifinance, asuransi* dan manajemen aset.
3. Pengembangan pembiayaan perumahan untuk segmen *emerging affluent* dan *affluent*, dengan meningkatkan proposisi *direct to consumer* serta bekerja sama dengan *developer* terkemuka dan jaringan agen real estat.
4. Pengembangan program kepemilikan rumah KPR bersubsidi guna mendukung agenda nasional untuk perumahan terjangkau.
5. Memperluas *value chain* dalam *real estate* yang menasar UKM *supplier* dan kontraktor dengan menyediakan *supply chain financing, bank guarantee, SKBDN* dan solusi tabungan bisnis.
6. Mengembangkan solusi keuangan yang lengkap (pinjaman, tabungan, transaksi dan investasi) menasar nasabah berpendapatan tetap, khususnya bagi *emerging affluent* dan SME serta menyiapkan strategi *cross selling* dan *up selling*.
7. Mengembangkan *channel* transaksi elektronik, otomasi berbagai proses bisnis dan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem *digital*, termasuk pengaturan infrastruktur IT pendukung dan model operasional.
8. Penerapan struktur SBU, yang sesuai untuk menciptakan organisasi berorientasi pada kinerja, membangun kapabilitas *hard* dan *soft skill* serta peluncuran *culture program* untuk *sales* dan *service*, tata kelola dan manajemen risiko, kinerja dan pembelajaran.
9. Proses bisnis kredit yang lebih baik dengan sentralisasi operasi kredit (CBC, SME, *consumer*), meningkatkan *check and balances* dan memperkuat kerangka risiko melalui pedoman risiko yang tepat.
10. Mempertahankan tingkat NPL yang rendah di semua segmen melalui pemantauan risiko yang kuat, standarisasi pengerjaan, proses penagihan yang memanfaatkan solusi digital serta strategi penjualan aset.

Adapun *transformation journey* dari 10 (sepuluh) tema strategis tersebut sampai dengan tahun 2025 di atas adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2021, "*Transform to Achieve Sustainable Growth*"
2. Tahun 2022-2023, "*Expand to New Business Areas*"
3. Tahun 2024-2025, "*Disrupt and Scaleup Through Digital*"

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

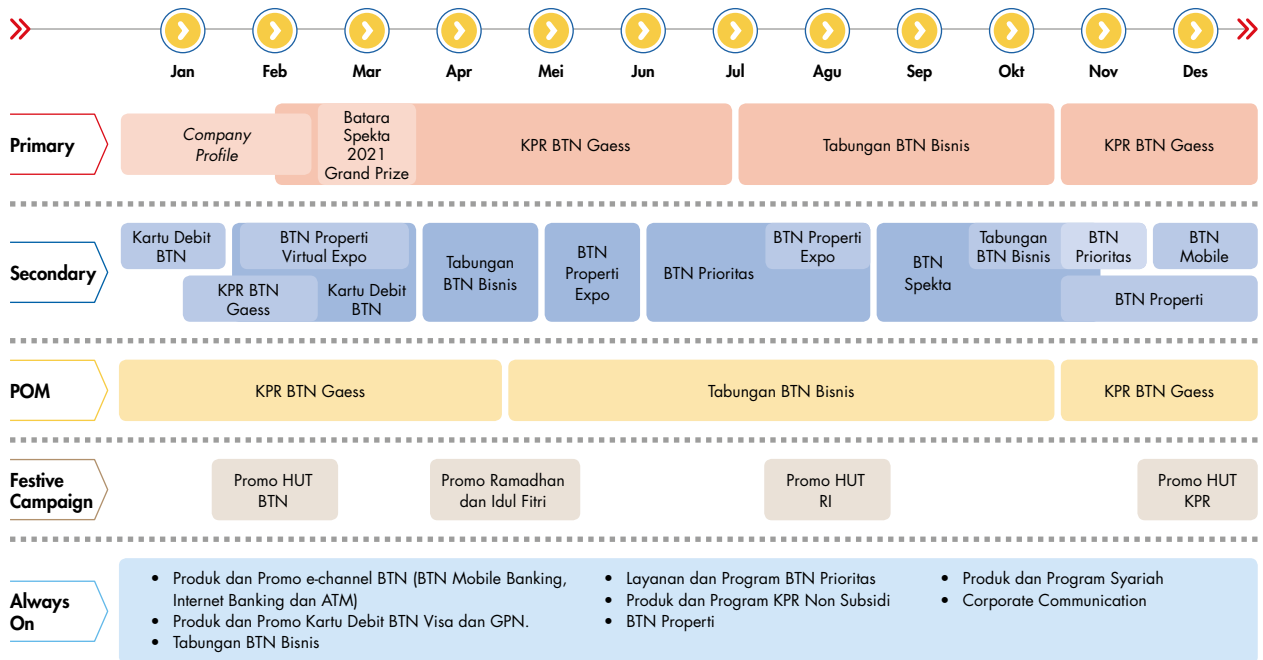
Perseroan menerapkan berbagai strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan produk-produk Perseroan.

Campaign Plan 2022

Campaign plan 2022 merupakan strategi perencanaan promosi Perseroan selama tahun 2022, dengan mengoptimalkan media konvensional dan media *digital, Out of Home (OOH)* serta berbagai kegiatan aktivasi, yang terbagi pada kategori:

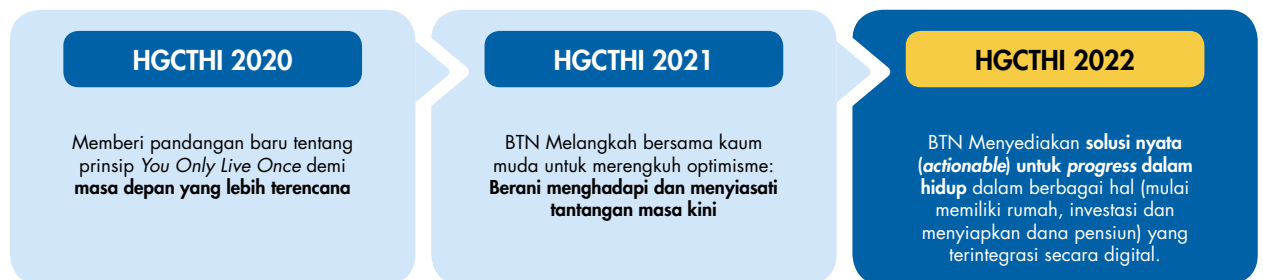
1. **Product of The Month (POM)**
 - a. KPR BTN Gaess (Januari - April)
 - b. Tabungan BTN Bisnis (Mei - Oktober)
 - c. KPR BTN Gaess (November - Desember)
2. **Primary and secondary**
 - a. *Company Profile* (Januari - Februari)
 - b. Pengundian GrandPrize Batara Spekta (Maret)
 - c. KPR BTN Gaess (April - Juni)
 - d. Tabungan BTN Bisnis (Juli Mei - Oktober)
 - e. KPR BTN Gaess (November - Desember)
3. **Festive Campaign**
 - a. Promo HUT BTN (Februari) = *Moment of Truth* Ulang Tahun BTN ke 73
 - b. Promo Ramadhan dan Idul Fitri (April sampai dengan Mei) = *Moment of Truth* Ramadhan dan Lebaran
 - c. Promo HUT RI (Agustus) = *Moment of Truth* HUT RI 73
4. **Always ON**

Merupakan pemasaran melalui media *digital*, baik itu sebagai upaya *call to action* maupun membangun *awareness* terkait produk tersebut.



Hero Campaign

Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI) merupakan *campaign* yang menyasar Gen Z dan Milenial melalui fitur dan layanan BTN dalam memiliki rumah, investasi dan menyiapkan dana pensiun.



Sekarang Waktunya kembangkan bisnis jadi lebih besar dengan fitur solusi finansial dari BTN Bisnis

Karena Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini

Dengan kenaikan bertahap ga pake mahal dan tenor yang panjang, **Sekarang Waktunya** punya rumah dengan tetap jalani gaya hidup tanpa perlu kuatir menjadi tahanan KPR.

Karena Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini

Salah satu produk *champion* Perseroan tahun 2022 dalam meningkatkan *awareness* dan bisnis, yaitu:

1. Peningkatan DPK dari Tabungan BTN Bisnis dan BTN Payroll.


2. Peningkatan realisasi kredit, khususnya pemberian KUR kepada nasabah BTN Bisnis.
3. Peningkatan transaksi *e-channel* (BTN Mobile, ATM dan EDC).


Komunikasi 360°


Marketing Activity


Above the Line (ATL) Marketing:

- Target *audience* yang Luas
- Lebih menjelaskan sebuah konsep atau ide. Tidak ada interaksi langsung dengan *audience*


TV



Radio



Magz/News Paper



OOH DOOH

Below the Line (BTL) Marketing:

- Target *audience* terbatas
- Media atau kegiatan memberikan *audience* kesempatan untuk berinteraksi bahkan *action* membeli


Event/
Sponsorship


Point of Sales
Materials
(Poster/Leaflet)


Direct Marketing
(Mail/SMS/WA Blast)

Through The Line (TTL) Marketing melibatkan penggunaan strategi pemasaran ATL dan BTL. Tren konsumen baru-baru ini dipasaran membutuhkan integrasi strategi ATL dan BTL untuk hasil yang lebih baik. Periklanan 360° dimana kampanye dikembangkan dengan visi membangun merek serta konversi/akutabel. *Digital Marketing* termasuk dalam *TTL Marketing* karena menggabungkan ATL dan BTN Marketing.

Penggunaan Endorser

Bentuk dukungan Perseroan terhadap pengusaha lokal yang mengusung produk dalam negeri dan gerakan *Bangga Buatan Indonesia (BBI)* antara lain melalui penggunaan *endorser*. Alan Budikusuma dan Susi Susanti merupakan pebisnis produk olahraga (Astec Indonesia) yang dahulu merupakan mantan atlet bulutangkis nasional. Alan dan Susi merepresentasikan

pengusaha yang sukses dengan produk lokal yang inovatif dan mampu bersaing dengan produk internasional. Saat ini pertumbuhan bisnis produk lokal semakin diminati dengan kualitas dan produk yang inovatif. Dengan pertumbuhan bisnis lokal yang pesat, bisnis produk lokal perlu didukung oleh layanan dan transaksi perbankan yang mumpuni.



Disamping menerapkan strategi pemasaran tersebut di atas Perseroan juga menerapkan strategi pemasaran produk dan layanan dalam mendorong peningkatan pangsa produk dan jasa. Selain itu, Perseroan juga meningkatkan efektivitas kerja sama dalam pemasaran dan pengembangan produk baru.

Strategi Pemasaran Kredit Korporasi

Uraian strategi pemasaran untuk produk kredit korporasi sepanjang tahun 2022 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *marketing* secara selektif kepada nasabah terpilih.
2. Melakukan kolaborasi dengan perbankan lainnya dalam pemberian kredit sindikasi.
3. Melakukan pendekatan kepada pengembang besar yang masuk dalam kategori *tier one* dan *supply chain* untuk menciptakan ekosistem perumahan.

Strategi Pemasaran Kredit Komersial

Perseroan melakukan beberapa strategi pemasaran untuk produk kredit komersial selama tahun 2022 yakni sebagai berikut:

1. Berkolaborasi dengan *developer* untuk menciptakan sinergi pemasaran dengan mempertemukan *supply and demand* agar dapat memenuhi kebutuhan *developer* agar sejalan dengan target bisnis dari Perseroan.
2. Memberikan *privilege* atau tambahan manfaat kepada *Developer Prima (Rating Platinum dan Rating Gold)* untuk meningkatkan pelayanan kepada debitur komersial.
3. Memperkuat komunikasi dengan *stakeholder* perumahan (Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan sebagainya) dalam mendorong program pemasaran kredit komersial khususnya dalam sektor perumahan.
4. Melakukan perbaikan dan pengembangan aplikasi kredit komersial untuk mendukung proses penyaluran kredit komersial yang berkualitas.
5. Perbaikan proses kredit komersial dan percepatan proses kredit komersial dengan membentuk unit *Commercial Banking Center (CBC)* pada 10 Wilayah di Indonesia.

Strategi Pemasaran Kredit Perumahan

Uraian strategi pemasaran produk kredit perumahan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan skema dan program KPR untuk segmen milenial.
2. Kolaborasi dengan *developer* untuk pengembangan bisnis KPR di berbagai instansi melalui pemanfaatan kerja sama pada program manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Peningkatan kerja sama *payroll* dengan instansi melalui program BTN Solusi sebagai bagian dari strategi *cross selling* dan *upselling*.
4. Peningkatan kemitraan dengan *top developer* nasional.
5. Program kerja sama dan *marketing* dengan agen properti nasional sebagai bagian dari strategi *direct to customer*.

6. Membangun platform *instant purchase* sebagai bagian dari pengembangan BTN Properti.
7. Percepatan proses dari mulai pemberkasan sampai dengan penerbitan surat persetujuan.

Strategi Pemasaran Pendanaan Komersial

Strategi pemasaran tahun 2022 untuk produk pendanaan komersial diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Aktivitas *Marketing* di Masing-Masing Segmen Lembaga
Optimalisasi aktivitas *marketing* dengan nasabah baru (*New to Bank/NTB*) maupun eksisting (*Existing to Bank/ETB*) untuk mengembangkan ekosistem bisnis berdasarkan sektor usaha nasabah sehingga meningkatkan akuisisi *product holding*.
2. Penurunan *Cost of Fund (COF)*
Strategi ini dilaksanakan melalui peningkatan *Current Account Saving Account (CASA)* dan rekomposisi struktur dana lembaga.
3. Penurunan *Concentration Risk*
Diversifikasi nasabah untuk mengurangi ketergantungan dengan nasabah besar melalui program intensifikasi nasabah lembaga.
4. Peningkatan Kerja sama Transaksional berupa *Virtual Account (VA)*, *Host to Host (H2H)*, *e-payment* dan *Cash Management System (CMS)* bagi giran lembaga.
5. *Service Excellence*
Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan *supporting unit* untuk mendukung pengembangan bisnis, pelaksanaan program *marketing*, *review* dan evaluasi kebijakan secara berkala serta peningkatan kompetensi *Institutional funding sales* melalui pendidikan.

Strategi Pemasaran Ritel Funding

Strategi pemasaran tahun 2022 untuk produk DPK Ritel diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tabungan
 - a. Membangun ekosistem bisnis dengan segmen *property related*, *healthcare*, perdagangan, *education* dan kawasan industri.
 - b. Akuisisi *payroll* dengan fokus utama sektor BUMN dan entitas anak, *education and health* serta pensiunan.
 - c. Program aktivasi *Mobile Banking (MB)*, debitur lunas, reaktivasi *dormant*, *merchant*, promo kartu debit dan debit *online*.
 - d. *Branchless banking* dilakukan dengan meningkatkan kualitas agen Perseroan melalui transaksi dan *funding*.
 - e. *Bundling product* yaitu dengan melakukan program *bundling* produk DPK ritel dengan produk *echannel*
 - f. *Cross selling* yaitu dengan optimalisasi *database* untuk dilakukan *cross selling* produk *funding*.
2. Peningkatan Deposito
 - a. Program *expo* melalui pemberian *benefit evoucher* untuk pembukaan deposito *counter rate* baru.
 - b. *E-Deposito* yaitu dengan pembukaan deposito melalui *mobile banking*.

Strategi Pemasaran SME Banking

Strategi pemasaran tahun 2022 untuk produk SME Banking diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyaluran *High Yield Loan (Eagle Project)*
 - a. Pembentukan Mitra Unit UMKM pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) untuk Penyaluran KUR dan Kredit SME Mikro.
 - b. Peningkatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui *direct selling* pada debitur KPR dan kredit konsumen lainnya.
2. Program Stimulus
 - a. Perluasan penyaluran Kredit Modal Kerja Pola Kemitraan dan *supply chain financing* Mitra BUMN Karya dan Pengembang Prima Perseroan.
 - b. Kerja sama dengan Divisi *Funding* dalam penyaluran kredit UMKM kepada mitra satuan kerja (satker), *merchant* linkAja, *merchant* EDC dan Agen Batara.
3. Perbaikan Proses Bisnis dan *Sales SME Loan*
 - a. Penyaluran UMKM dengan pengajuan secara *online* dan proses kredit melalui digitalisasi SME
 - b. Optimalisasi *sales effectiveness* SME sebagai bagian *branch transformation*.

Strategi Pemasaran Produk Syariah

Uraian strategi pemasaran produk pendanaan dan pembiayaan syariah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pemasaran Produk Pendanaan Syariah
 - a. Peningkatan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Islam, Pengembang, Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pengelolaan dana lembaga serta layanan transaksional dan investasi.
 - b. Peningkatan kerja sama pembayaran dan optimalisasi dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf secara digital dengan lembaga *philanthropy*.
 - c. Intensifikasi tabungan pada nasabah pembiayaan eksisting dan komunitas.
 - d. Bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam memberikan layanan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) guna peningkatan tabungan haji dan umrah.
 - e. Meningkatkan peranan Kantor Layanan Syariah (KLS) dalam layanan pendaftaran haji serta penjualan produk Tabungan Haji dan Umroh.
 - f. Peningkatan dana *Current Account and Savings Account (CASA)* melalui aktivitas *marketing* antara lain investor *gathering*, *property expo* dan *individual engagement*.
 - g. Meningkatkan *brand awareness* Perseroan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui program-program *marketing communications*.
 - h. Layanan perbankan *digital* melalui pembukaan rekening nasabah secara *online* tanpa nasabah perlu datang ke *outlet*.
 - i. Pengembangan fitur *e-channel (mobile banking, internet banking dan ATM)*.

2. Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Syariah
 - a. Mengembangkan kerja sama dengan *top developer* untuk mendapatkan *ticket size* yang lebih tinggi (antara lain *emerging affluent* dan *affluent*) dengan peningkatan upaya pemasaran.
 - b. Memperkuat komunikasi dengan *stakeholder* perumahan (Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan) dalam penyusunan Program Sejuta Rumah Pemerintah.
 - c. Program kerja sama dan marketing dengan agen properti nasional dan individu, sebagai strategi *Direct to Consumer (D2C)*, khususnya untuk KPR Rumah *Second*.
 - d. Mengembangkan bisnis pembiayaan dengan sasaran segmen millennial melalui program *partnership* dengan pengembang dalam *joint promo* untuk segmen millennial serta KPR Harapan.
 - e. Optimalisasi *database* nasabah KPR eksisting melalui program *top up* pembiayaan.
 - f. Mengembangkan dan menjual produk pada sepanjang *value chain* mitra *developer* komersial.
 - g. *Maintenance* secara berkelanjutan *developer* eksisting - proyek baru atau pengembangan proyek eksisting,
 - h. Melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan kepada BUMN, Grup Usaha Swasta *Bonafide* dan Institusi Pendidikan.
 - i. Digitalisasi dan automasi proses pembiayaan konsumen dan komersial (peningkatan *Financing Origination System/FOS* Konsumer dan Penggunaan FOS Komersial).
 - j. Mengembangkan produk KPR khusus millennial untuk meningkatkan akuisisi pasar millennial.

Strategi Pemasaran Layanan BTN Prioritas

Strategi pemasaran nasabah BTN Prioritas yang dilakukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut

1. *Above the Line*
Melalui strategi *above the line*, Layanan BTN Prioritas menargetkan *customer* segmen prioritas dengan jangkauan yang lebih luas. Pemasaran produk *wealth management* maupun Layanan BTN Prioritas berupa *key visual* maupun *Television Commercial (TVC)* dilakukan melalui media seperti *billboard*, *website* BTN Prioritas, sosial media Perseroan (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), iklan pada *merchant partner (tent card, roll up banner, spanduk)*. Di samping itu, aktivitas yang bersifat *above the line* lainnya yang dilakukan yaitu BTN Prioritas *Goes to Mall* di berbagai kota besar di Indonesia dan BTN Prioritas *Radio Roadshow* pada beberapa Radio di Jakarta.
2. *Below the Line*
Untuk menyasar target *customer* yang lebih spesifik, pemasaran produk *wealth management* maupun Layanan BTN Prioritas dilakukan melalui media *email/sms/WhatsApp blast*, *Good Living Magazine* dan *priority booklet* yang disampaikan langsung kepada Nasabah BTN Prioritas selain itu BTN Prioritas aktif mengadakan berbagai aktivitas untuk nasabah setianya di antaranya adalah:

- a. Aktivitas *sponsorship* pada berbagai *event* komunitas seperti komunitas golf dan sepeda.
- b. *Annual market outlook* baik dalam skala regional maupun nasional dengan pembicara profesional di industri seperti dari Kementerian Keuangan, professional pada bidang ekonomi, investasi, bidang kesehatan, hingga *influencer*.
- c. *Client gathering event* dengan tema *Chinese New Year: Year of The Tiger, Time to Reset and Refocusing During The Economic Expansion dan Tax Amnesty* yang turut mengundang narasumber dari Dirjen Pajak Republik Indonesia.
- d. *Thematic Webinar Event* yang rutin diadakan untuk nasabah dengan berbagai tema menarik seperti: tema kesehatan, *loyalty*, tema Ramadhan dan sebagainya.
- e. BTN Prioritas *Experience* bekerja sama dengan *merchant exclusive* menawarkan pengalaman pertama bagi Nasabah BTN Prioritas terpilih diantaranya pengalaman keliling kota Jakarta naik helikopter bersama Helicity dan pengalaman makan malam di ketinggian di *Lounge in The Sky*.
- f. BTN Prioritas *Big Campaign Acquisition* Tahun 2022 yakni BTN Prioritas *Road to St. Andrew*, memberikan kesempatan kepada Nasabah BTN Prioritas untuk bermain golf di St. Andrew, Scotlandia.

- b. Selain pengembangan aplikasi tersebut, BTN secara rutin menyelenggarakan BTN Properti Expo baik secara *offline* maupun *online* untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan rumah melalui KPR BTN.
3. Peningkatan Akuisisi *User* dan *Active Rate Transaction* melalui *Direct Sales*

Salah satu strategi pemasaran yang *digital channel* telah dilaksanakan melalui skema *direct sales* kepada nasabah dan untuk meningkatkan *active rate transaction*, adalah sebagai berikut;

- a. Program *cashback* akuisisi BTN Mobile : nasabah yang melakukan registrasi dan aktivasi BTN Mobile selama periode 1 – 28 Februari 2023 akan mendapatkan *cashback* senilai Rp30.000. Program ini nantinya akan berjalan setiap bulannya selama tahun 2023 dengan nilai *cashback* yang berbeda-beda sesuai dengan momentum berjalan.
- b. Program insentif akuisisi untuk KC dan *Contact Center*
 - KC yang berhasil melakukan registrasi *e-channel* akan mendapatkan *reward* senilai:

Paket Akuisisi	Nilai Reward	Kuota
BTN <i>Mobile Banking</i> / BTN <i>Internet Banking</i> + SMS Notifikasi	Rp 5.000,-/akun	60.000
BTN <i>Mobile Banking</i> + BTN <i>Internet Banking</i> + SMS Notifikasi	Rp7.500,-/akun	

- *Contact center* yang berhasil melakukan registrasi *e-channel* akan mendapatkan *reward* sebesar Rp2.000,-/akun dengan kuota + 2.000/bulan
- c. Program *cashback e-deposito* BTN Mobile
Nasabah yang melakukan registrasi dan aktivasi BTN *Mobile* dan juga membuka deposito menggunakan fitur *e-deposito* di BTN *Mobile* akan mendapatkan *cashback* senilai:
 - Deposito Rp5.000.000 selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan *cashback* senilai Rp100.000
 - Deposito Rp20.000.000 selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan *cashback* senilai Rp250.000
 - Deposito Rp50.000.000 selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan *cashback* senilai Rp350.000
 - d. Program Dijajani QRIS BTN Mobile
Nasabah yang melakukan registrasi dan aktivasi BTN *Mobile* dan melakukan transaksi menggunakan QRIS BTN *Mobile* pertama kali akan mendapatkan uang jajan senilai Rp30.000
 - e. Program regular untuk meningkatkan transaksi dan *brand awareness* terhadap fitur di BTN *Mobile*.
 - f. *Event offline* telah dilaksanakan di beberapa wilayah, nasional dan wilayah. Untuk nasional telah dilaksanakan di beberapa *mall*, *event* dan *foodcourt* perkantoran di wilayah Jakarta. Adapun program promonya adalah sebagai berikut:
 - *Mall*
Open booth di berbagai *mall* di Jakarta dan wilayah lainnya.

Strategi Pemasaran *Digital Channel*

Dalam meningkatkan jangkauan *digital* Perseroan, *digital channel* menyusun beberapa langkah strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Pengembangan Layanan *Digital*
Untuk meningkatkan kepuasan nasabah, *digital channel* senantiasa mengembangkan produk dan fitur layanan *digital* yang berorientasi pada kebutuhan perbankan nasabah. *Digital Channel* telah mengembangkan berbagai platform digital mulai dari Superapps BTN Mobile, BTN *Internet Banking*, EDC *Acquiring*, QRIS hingga layanan yang mendukung keamanan transaksi nasabah seperti SMS Notifikasi, *login biometric* dan lain-lain. Berbagai platform tersebut telah dirancang sedemikian rupa agar nasabah BTN dapat melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kebutuhan, sehingga rasa *engagement* nasabah dengan BTN semakin kuat dan bersinergi.
2. Penguatan *Digital Mortgage Ecosystem*
 - a. BTN sebagai bank yang fokus di bidang perumahan, memiliki peran sentral dalam membentuk ekosistem *digital mortgage*. Atas dasar tersebut maka dalam setiap pengembangan layanan selalu mengedepankan kerja sama strategis dengan mitra yang tergabung dalam ekosistem perumahan mulai dari hulu sampai dengan hilir melalui berbagai produk dan layanan *digital* seperti BTN Properti, BTN *Properti for Developer*, E-Mitra, hingga aplikasi BTN *Smart Residence*.

- *Event*
Kerja sama dengan *promotor* atau penyelenggara acara lainnya, untuk melakukan kerja sama dengan BTN Mobile (metode : *sponsorship*)
- *Foodcourt*
Promosi berupa membayar makan siang nasabah dengan BTN Mobile. Nasabah yang melakukan registrasi dan aktivasi BTN Mobile di *event offline* akan mendapatkan *voucher* makan siang di tempat tersebut.
- g. *Event online*, melakukan kegiatan *branding* secara *online*, seperti kegiatan *Augmented Reality*, sebagai contoh HUT BTN (bersama Tulus).
- h. Melakukan kegiatan aktivasi melalui sosial media seperti melakukan *campaign hashtag*, menciptakan *challenge* di media sosial (Ex: Tiktok), melakukan kolaborasi dengan *influencer* baik mikro, makro dan *medium*.
- i. Melakukan *branding* BTN Mobile di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Wilayah Perseroan. Contohnya adalah melakukan *branding* BTN Mobile di gedung kantor dan mobil dinas kantor.

Pangsa Pasar

Informasi mengenai pangsa pasar Perseroan dibandingkan dengan industri perbankan disajikan sebagai berikut.

Tabel Pangsa Pasar Perseroan dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Keterangan	September 2022	September 2021
Aset	Industri Perbankan	10.488	9.735
	Bank BTN	389	368
	Pangsa Pasar Bank BTN (%)	3,71%	3,78%
Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	7.647	7.162
	Bank BTN	313	291
	Pangsa Pasar Bank BTN (%)	4,09%	4,07%
Kredit yang Diberikan	Industri Perbankan	6.338	5.708
	Bank BTN	290	270
	Pangsa Pasar Bank BTN (%)	4,57%	4,74%

Sumber: Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia (SEKI BI), Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (SPI OJK), Data Internal, diolah.

Aset Perseroan tumbuh sebesar 5,77% secara yoy, lebih kecil dibanding pertumbuhan total aset industri perbankan yakni sebesar 7,73% yoy, sehubungan dengan fokus Perseroan di tahun 2022 dalam memperbaiki kualitas bisnis. Hingga September 2022, pangsa pasar Perseroan sebesar 3,71%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Perseroan juga ikut tumbuh sebesar 7,41% yoy, menjadi Rp312 triliun hingga September 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK Industri perbankan yang tumbuh 6,77% yoy. Hal ini membuat pangsa pasar

DPK Perseroan ikut naik sebesar 2 bps menjadi 4,09% pada September 2022 dari sebelumnya 4,07% pada September 2021.

Kredit dan pembiayaan Perseroan tumbuh 7,18% yoy, menjadi Rp290 triliun hingga September 2022, namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan yang tumbuh 11,04%. Hal ini mendorong penurunan pangsa pasar kredit Perseroan menjadi 4,57% hingga September 2022.

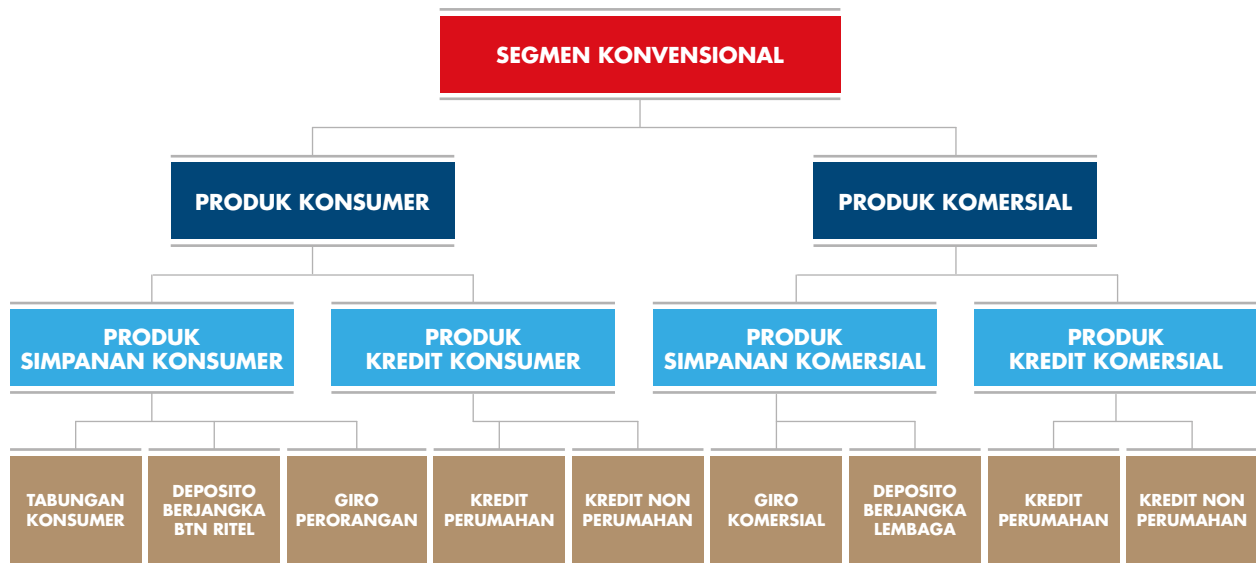
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Segmen usaha Perseroan berdasarkan jenis usaha mencakup 2 (dua) segmen utama, yaitu segmen Konvensional dan segmen Syariah. Segmen Konvensional sebagai segmen bisnis utama Perseroan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan

Perseroan. Sedangkan segmen Syariah yang dikembangkan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya sejalan dengan berbagai upaya dan inisiatif Perseroan.

Segmen Konvensional

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Konvensional



Sekilas tentang kinerja dari Segmen Konvensional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel Kinerja Segmen Konvensional

(dalam jutaan Rupiah)

Produk Segmen Konvensional	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	%
Produk Konsumer				
Produk Kredit Konsumer	41.795.596	32.948.775	8.846.821	26,85
Produk Simpanan Konsumer	63.400.171	68.770.476	(5.370.305)	(7,81)
Jumlah Produk Konsumer	105.195.767	101.719.251	3.476.516	3,42
Produk Komersial				
Produk Kredit Komersial	37.654.864	20.423.399	17.231.465	84,37
Produk Simpanan Komersial	223.893.013	197.936.014	25.956.999	13,11
Jumlah Produk Komersial	261.547.877	218.359.413	43.188.464	19,78
Jumlah Nilai Produk Segmen Konvensional	366.743.644	320.078.664	46.664.980	14,58

Produk Konsumer

Penyaluran produk Perseroan pada Produk Konsumer terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Produk Kredit Konsumer dan Produk Simpanan Konsumer. Jumlah nilai Produk Konsumer tahun 2022 sebesar Rp105,20 triliun, meningkat 3,42% dibandingkan

dengan tahun 2021 yang sebesar Rp101,72 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penyaluran KPR Subsidi 31,63% dan KPR Non Subsidi 25,71%.

Tabel Nilai Produk Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Produk Konsumer	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	%
Produk Kredit Konsumer	41.795.596	32.948.775	8.846.821	26,85
Produk Simpanan Konsumer	63.400.171	68.770.476	(5.370.305)	(7,81)
Jumlah Nilai Produk Konsumer	105.195.767	101.719.251	3.476.516	3,42

Kinerja Produk Konsumer pada tahun 2022 dikontribusi oleh Produk Kredit Konsumer sebesar Rp41,80 triliun meningkat 26,85% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp32,95 triliun.

Tabel Volume Produk Konsumer

Produk Konsumer	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Produk Kredit Konsumer (unit)	189.290	161.024	28.266	17,55
Produk Simpanan Konsumer (rekening)	957.858	2.350.261	(1.392.403)	(59,24)

Volume produk konsumer meningkat seiring dengan peningkatan pada NOA produk konsumer sebesar 189.290 unit, meningkat sebesar 17,55% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar

161.024 unit. Di sisi lain Produk Simpanan Konsumer mengalami penurunan 59,24%, penurunan NoA tabungan disebabkan oleh banyaknya rekening bansos pandemi yang tutup.

PRODUK KREDIT KONSUMER

Perseroan menyediakan produk Kredit Konsumer yang terdiri dari Kredit Perumahan dan Kredit Non-Perumahan. Untuk produk Kredit Perumahan diklasifikasikan menjadi KPR Subsidi, KPR Non

Subsidi dan Kredit Perumahan Lainnya. Seluruh produk kredit perorangan konsumer disalurkan dalam mata uang Rupiah.

Tabel Nilai Penyaluran Produk Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Konsumer	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Perumahan	33.349.809	25.814.129	7.535.681	29,19
KPR Subsidi	19.940.663	15.149.382	4.791.281	31,63
KPR Non Subsidi	12.066.105	9.598.262	2.467.844	25,71
Kredit Perumahan Lainnya	1.343.041	1.066.485	276.556	25,93
Kredit Non Perumahan	8.445.786	7.134.646	1.311.140	18,38
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Konsumer	41.795.595	32.948.775	8.846.821	26,85

Nilai penyaluran produk Kredit Konsumer tahun 2022 sebesar Rp41,80 triliun, meningkat 26,85% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp32,95 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran KPR Subsidi dan Non Subsidi.

Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit Konsumer

(dalam unit)

Kredit Konsumer	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Perumahan	173.701	137.448	36.253	26,38
KPR Subsidi	136.520	105.732	30.788	29,12
KPR Non Subsidi	32.019	27.615	4.404	15,95
Kredit Perumahan Lainnya	5.162	4.101	1.061	25,87
Kredit Non Perumahan	15.589	23.576	(7.987)	(33,88)
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Konsumer	189.290	161.024	28.266	17,55

Volume penyaluran produk Kredit Konsumer tahun 2022 sebanyak 189.290 unit, meningkat 17,55% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 161.024 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran Kredit Konsumer Perumahan sebesar 26,38%

Kredit Perumahan - KPR Subsidi

Sejak tahun 1976 hingga saat ini, skema penyaluran KPR Subsidi terus berganti, meski demikian Perseroan tetap konsisten menyalurkan KPR Subsidi. KPR Subsidi merupakan program pemilikan rumah dari Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. Dalam program KPR Bersubsidi, Pemerintah memberikan bantuan dengan penempatan dana murah jangka panjang ataupun subsidi uang muka sehingga cicilan KPR menjadi terjangkau untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.

Perseroan senantiasa menyediakan berbagai kemudahan dan biaya yang ringan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah melalui program KPR Bersubsidi. Perseroan pertama kali mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan KPR Subsidi sesuai Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1974, dengan realisasi KPR pertama berlangsung pada tanggal 10 Desember 1976. Perseroan menyalurkan KPR Subsidi bekerja sama dengan Pemerintah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketentuan mengenai penyaluran KPR Subsidi terakhir diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 35/PRT/M/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Peraturan Menteri PUPR No. 32 tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dan Peraturan BP Tapera No. 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan Bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan BP Tapera No. 8 Tahun 2021 serta Peraturan BP Tapera Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Perseroan menyalurkan KPR subsidi menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

MBR adalah pembeli rumah pertama kali yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh KPR Subsidi dengan cicilan terjangkau. Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, program KPR Sejahtera FLPP dan KPR BP2BT diberikan kepada nasabah yang belum memiliki rumah dengan penghasilan keluarga sebesar Rp8 juta per bulan (untuk pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) dan Rp10 juta per bulan (untuk pulau Papua). Sementara untuk program KPR Tapera diberikan kepada nasabah yang terdaftar sebagai peserta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera) dengan penghasilan nasabah sebesar Rp8 juta per bulan (untuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) dan Rp10 juta per bulan (untuk Pulau Papua). Harga rumah yang dibeli melalui program-program tersebut terikat pada batas harga tertentu.

Adapun ketentuan pemberian KPR FLPP Tapak dan Rumah Susun adalah sebagai berikut:

1. Nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah tapak atau susun dikurangi dengan uang muka yang disiapkan oleh MBR. Melalui program ini, MBR juga berhak mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta (untuk pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) dan Rp10 juta (untuk Papua) dari Pemerintah.
2. Suku bunga KPR yang dibayar debitur sebesar 5% per tahun dan sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit. Suku bunga sebagaimana dimaksud bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate*) dengan metode perhitungan bunga tahunan (*annuity*).
3. Sumber pendanaan program FLPP berasal dari 75% dari Pemerintah dan 25% dari Perseroan. Perseroan melakukan kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam menyediakan sumber pendanaan bagi program FLPP.
4. Jangka waktu KPR disepakati oleh Perseroan dan MBR yang disesuaikan juga dengan kemampuan membayar angsuran dari calon debitur atau paling lama 20 tahun.

Ketentuan pemberian KPR BP2BT untuk pembelian rumah tapak/susun dan pembangunan rumah swadaya adalah sebagai berikut:

1. Setiap MBR dengan yang bekerja pada sektor informal memenuhi persyaratan program BP2BT mendapatkan bantuan uang muka (Dana BP2BT) sebesar maksimal Rp40 juta dari Pemerintah.
2. Nilai KPR sebesar harga jual rumah tapak/susun atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) rumah swadaya dikurangi dengan Dana BP2BT serta uang muka yang disiapkan oleh MBR.
3. Suku bunga KPR yang dibayar debitur menggunakan rate komersil sebesar 10% *fixed rate* selama 10 tahun atau 9,5% *fixed rate* selama 5 tahun dengan metode perhitungan *graduated payment mortgage*.
4. Sumber pendanaan program BP2BT berasal 100% dari bank pelaksana.
5. Jangka waktu KPR disepakati oleh Perseroan dan MBR yang disesuaikan juga dengan kemampuan membayar angsuran dari calon debitur atau paling lama 20 tahun.

Ketentuan pemberian KPR Tapera adalah sebagai berikut:

1. KPR Tapera diberikan kepada peserta Tapera yang telah memenuhi persyaratan dan urutan prioritas peserta dari BP Tapera.
2. Uang muka KPR Tapera minimal 0% sesuai dengan penilaian Perseroan kepada MBR.
3. Suku bunga KPR yang dibayar debitur sebesar 5% per tahun dan sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit. Suku bunga sebagaimana dimaksud pada butir (2) bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate*) dengan metode perhitungan bunga tahunan (*annuity*).
4. Jangka waktu KPR disepakati oleh Perseroan dan MBR yang disesuaikan juga dengan kemampuan membayar angsuran dari calon debitur atau paling lama 30 tahun.
5. Perseroan akan menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) sesuai dengan jumlah kredit yang terealisasi dengan bekerja sama dengan Bank Kustodian yang ditunjuk oleh BP-Tapera.

Tabel Nilai Penyaluran Produk KPR Subsidi

(dalam jutaan Rupiah)

KPR Subsidi	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KPR BTN Sejahtera Tapak	18.339.646	14.108.199	4.231.447	29,99
KPR BTN Sejahtera Susun	-	6.876	(6.876)	(100,00)
KPR SSA/SSB Tapak	-	-	-	-
KPR SSA/SSB Susun	-	-	-	-
KPR BTN Mikro	-	-	-	-
KPR BP2BT	982.618	976.381	6.237	0,64
KPR BTN TAPERA	617.884	57.926	559.958	966,68
Jumlah Nilai Penyaluran KPR Subsidi	19.940.148	15.149.382	4.790.766	31,62

Nilai penyaluran KPR Subsidi tahun 2022 sebesar Rp 19,94 triliun, meningkat 31,62 % dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp 15,14 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh *demand* kredit KPR Subsidi yang tetap tinggi, seiring dengan tumbuhnya ekonomi Indonesia yang sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pasca dicabutnya pemberlakuan PPKM akibat pandemi Covid-19. Selain itu, Perseroan juga terus melakukan perbaikan proses bisnis kredit konsumen, terutama proses KPR dengan membentuk *Regional Loan Processing Center* (RLPC) sebagai sentra pemrosesan kredit dan analisis kredit konsumen yang mendorong percepatan pemrosesan kredit baru.

Sejalan dengan langkah tersebut, Perseroan juga mengembangkan skema pembiayaan yang *equitable* dan inklusif melalui pengembangan produk KPR Subsidi seperti: *New*

KPR FLPP, KPR dengan *Skema Staircasing Shared Ownership* (SSO) dan *KPR Rent to Own* untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah segmen Informal. Disamping itu, Perseroan juga terus meningkatkan Pangsa KPR Subsidi Perseroan melalui pendalaman kerja sama dengan instansi dan *stakeholder* di bidang perumahan (TAPERA, SMF dan Kementerian PUPR).

Pengembangan kolaborasi dengan TAPERA (untuk skema kepemilikan rumah) untuk menangkap distribusi TAPERA dengan bersama-sama mengintegrasikan proses bisnis dan merancang *marketing campaign*. Sementara itu, pengembangan skema pendanaan dari TAPERA, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) dan Dana Pensiun untuk penyediaan perumahan yang terjangkau.

Tabel Volume Penyaluran KPR Subsidi

(dalam unit)

KPR Subsidi	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KPR BTN Sejahtera Tapak	123.335	96.441	26.894	27,89
KPR BTN Sejahtera Susun	-	46	(46)	(100,00)

KPR Subsidi	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KPR SSA/SSB Tapak	-	-	-	-
KPR SSA/SSB Susun	-	-	-	-
KPR BTN Mikro	-	-	-	-
KPR BP2BT	9.060	8.856	204	2,30
KPR BTN TAPERA	4.125	389	3.736	960,41
Jumlah Volume Penyaluran KPR Subsidi	136.520	105.732	30.788	29,12

Jumlah penyaluran KPR Subsidi tahun 2022 sebanyak 136.520 unit, meningkat sebesar 29,12 % dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 105.732 unit. Peningkatan tersebut disebabkan oleh *demand* KPR Subsidi dan adanya ketentuan segmentasi pemanfaatan KPR FLPP, KPR BP2BT dan KPR Tapera sesuai Surat Edaran Kementerian PUPR RI Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum No. PW.01.03-Dp/07 tanggal 6 Januari 2022.

Kredit Perumahan - KPR Non Subsidi

Selain KPR Subsidi, Perseroan juga memiliki berbagai layanan KPR Non Subsidi yang menargetkan nasabah berpenghasilan menengah ke atas dengan suku bunga mengambang (*floating*). Jangka waktu yang ditawarkan maksimal selama 25 (dua puluh lima) tahun untuk KPR Non Subsidi dan maksimal 15 (lima belas) tahun untuk Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan Kredit Ruko. KPR Non Subsidi Perseroan memberikan layanan untuk keperluan pembelian rumah dari *developer* ataupun *non-developer*, baik untuk pembelian rumah baru atau *second*, pembelian rumah siap huni (*ready stock*) atau

belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari bank lain. Ketentuan uang muka minimal 15% atau sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio *Loan to Value* (LTV).

Perseroan menyalurkan kredit KPR Non Subsidi melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. KPR BTN Platinum
2. KPA BTN
3. Kredit Ruko BTN

Tabel Nilai Penyaluran Produk KPR Non Subsidi

(dalam jutaan Rupiah)

KPR Non Subsidi	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KPR BTN Platinum	11.845.846	9.315.950	2.529.896	27,16
KPA BTN	194.871	250.925	(56.054)	(22,34)
Kredit Ruko BTN	25.387	31.388	(6.001)	(19,12)
Jumlah Nilai Penyaluran KPR Non Subsidi	12.066.105	9.598.262	2.467.843	25,71

Nilai penyaluran KPR Non Subsidi tahun 2022 sebesar Rp12,07 triliun, meningkat 25,71% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp9,60 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran KPR BTN Platinum sebesar 27,16%.

Tabel Volume Penyaluran KPR Non Subsidi

(dalam unit)

KPR Non Subsidi	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KPR BTN Platinum	31.581	27.013	4.568	16,91
KPA BTN	384	550	(166)	(30,18)
Kredit Ruko BTN	54	52	2	3,85
Jumlah Volume Penyaluran KPR Non Subsidi	32.019	27.615	4.404	15,95

Ditinjau dari volumenya, penyaluran KPR Non Subsidi tahun 2022 sebanyak 32.019 unit, meningkat 15,95% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 27.615 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penyaluran KPR BTN Platinum sebesar 16,91%

Peningkatan penyaluran KPR Non Subsidi ini didorong oleh implementasi beberapa inisiatif Perseroan di tahun 2022 seperti:

1. *Upselling* KPR Non Subsidi kepada nasabah eksisting BTN yang sudah 'lulus' (*graduating*)
2. Mengembangkan skema pendanaan dari TAPERA, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) dan Dana Pensiun untuk penyediaan perumahan yang terjangkau.
3. Meningkatkan bisnis perumahan di segmen *emerging affluent* dan *mass affluent* dengan bekerja sama dengan perusahaan top 20 *developer* swasta nasional
4. Mengembangkan segmen *Direct to Consumer* (D2C) bekerja sama dengan agen properti nasional.
5. Peningkatan portofolio produk KPR Non Subsidi melalui *channel online* BTN Properti.

Kredit Perumahan - Kredit Perumahan Lainnya

Perseroan juga menawarkan jenis-jenis kredit perumahan serta kredit konsumen lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kredit perumahan lainnya merupakan upaya Perseroan dalam mengembangkan bisnis sekaligus ditujukan untuk membantu konsumen memiliki hunian dengan keuntungan dan kemudahan yang tinggi.

Perseroan menyalurkan Kredit Perumahan Lainnya melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kredit Agunan Rumah
2. Kredit Bangun Rumah
3. Pinjaman Renovasi Rumah Kerja sama Bank (PRR-KB) BPJS Ketenagakerjaan
4. Tambah Uang Muka Perumahan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (TBUM Bapertarum)

Tabel Nilai Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Perumahan Lainnya	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Agunan Rumah	1.305.831	1.056.175	294.657	23,64
Kredit Bangun Rumah	1.310	1.985	(675)	(34,01)
PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan	33.854	8.292	25.562	308,28
TBUM Bapertarum	-	-	-	-
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya	1.340.996	1.066.453	274.543	25,74

Ditinjau dari volumenya, penyaluran Kredit Perumahan lainnya tahun 2022 sebanyak 1.340.996 unit, meningkat 25,74 % dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 1.066.453 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan

volume Kredit Agunan Rumah dan PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan sebesar 25,74% seiring dengan strategi Perseroan untuk memperbesar porsi bisnis kredit bermarginal tinggi di tahun 2022.

Tabel Volume Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya

(dalam unit)

Kredit Perumahan Lainnya	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Agunan Rumah	4.920	4.037	883	21,87
Kredit Bangun Rumah	5	6	(1)	(16,67)
PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan	216	57	159	278,95
TBUM Bapertarum	-	-	-	-
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya	5.141	4.100	1.041	25,39

Kredit Non Perumahan

Perseroan memberikan kredit konsumen lainnya, di luar kredit perumahan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan nasabah kredit. Perseroan menyalurkan Kredit Non Perumahan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kring BTN
2. Kring BTN Pensiunan
3. Kredit Swadana BTN
4. Kredit Pegawai

Tabel Nilai Penyaluran Kredit Non Perumahan

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Non Perumahan	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kring BTN	1.622.150	1.822.636	(200.486)	(11,00)
Kring BTN Pensiunan	112.482	109.053	3.429	3,14
Kredit Swadana BTN	6.673.308	4.337.092	2.336.216	53,87
Kredit Pegawai	37.846	865.866	(828.020)	(95,63)
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Non Perumahan	8.445.786	7.134.646	1.311.139	18,38

Nilai penyaluran Kredit Non Perumahan tahun 2022 sebesar Rp8,44 triliun, meningkat 18,38% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp7,13 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penyaluran Kredit Swadana BTN sebesar 53,87%

Peningkatan penyaluran Kredit Non Perumahan ini didorong oleh implementasi beberapa inisiatif Perseroan di tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kerja sama dengan instansi Pemerintah, BUMN dan Perusahaan Swasta dengan *privilege* suku bunga fasilitas KPR/KPA dan Kredit Ringan BTN dengan syarat *payroll* di Perseroan.
2. Pengembangan *platform* BTN READY (*Credit Digital for You /for Y Generation*) Fase I.
3. Memperkuat kerja sama dengan mitra strategis dan memperluas *supply chain* - optimalisasi kerja sama dengan instansi via BTN solusi, *payroll* dan kolektif.

Tabel Volume Penyaluran Kredit Non Perumahan

(dalam unit)

Kredit Non Perumahan	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kring BTN	13.771	16.885	(3.114)	(18,44)
Kring BTN Pensiunan	1.092	1.107	(15)	(1,36)
Kredit Swadana BTN	5.720	3.123	2.597	83,16
Kredit Pegawai	154	2.461	(2.307)	(93,74)
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Non Perumahan	20.737	23.576	(2.839)	(12,04)

PRODUK SIMPANAN KONSUMER

Perseroan menyediakan beragam produk simpanan untuk menjawab kebutuhan simpanan kepada nasabah, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) produk, yaitu Tabungan dan Deposito. Melalui penyediaan produk tersebut, Perseroan

berupaya untuk menjaga tingkat likuiditas yang sehat, sumber dana berbiaya murah yang sejalan dengan strategi Perseroan untuk mempertahankan komposisi pendanaan yang kompetitif dan terjangkau.

Tabel Jumlah Dana Simpanan Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Konsumer	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan Konsumer	36.180.189	46.799.401	(10.619.212)	(22,69)
Deposito Berjangka	27.219.982	21.971.075	5.248.907	23,89
Jumlah Dana Simpanan Konsumer	63.400.171	68.770.476	(5.370.305)	(7,81)

Jumlah dana Simpanan Konsumer tahun 2022 sebesar Rp63.40 triliun, menurun 7,81% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp68,77 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Tabungan Konsumer sebesar 22,69% (tabungan yang bersifat investasi).

Tabel Jumlah Rekening Simpanan Konsumer

(dalam rekening)

Simpanan Konsumer	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan Konsumer	7.193.794	7.875.554	(681.760)	(8,66)
Deposito Berjangka	90.592	92.265	(1.673)	(1,81)
Jumlah Rekening Simpanan Konsumer	7.284.386	7.967.819	(683.433)	(8,58)

Ditinjau dari jumlah rekening, Simpanan Konsumer tahun 2022 sebanyak 7.284.386 rekening, menurun 8,58% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 7.967.819 rekening. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perubahan suku bunga saat pandemi sehingga beberapa dana nasabah pareto keluar dengan nominal yang cukup besar.

Tabungan Konsumer

Tabungan konsumer yang dimiliki Perseroan memberikan solusi tabungan transaksional dengan kemudahan transaksi pembelian dan pembayaran melalui *channel* Perseroan untuk menunjang aktivitas keuangan konsumen. Tabungan Konsumer Perseroan dikembangkan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Tabungan BTN Batara
2. Tabungan BTN Bisnis
3. Tabungan BTN Investa
4. Tabungan Lainnya, meliputi beberapa produk yaitu:
 - a. Tabungan BTN Payroll
 - b. Tabungan BTN Pensiunan
 - c. Tabungan BTN Siap!
 - d. Tabungan BTN Felas
 - e. Tabungan BTN Juara
 - f. TabunganKu
 - g. Tabungan BTN Sempel
 - h. Tabungan Cermat
 - i. Tabungan BTN Perumahan
 - j. Tabungan BTN Haji Reguler
 - k. Tabungan BTN Haji Plus
 - l. Tabungan Simuda Rumahku
 - m. Tabungan Batara Pendidik
 - n. Tabungan Batara Tax Amnesty
 - o. Tabungan BTN Batara RDN
5. Tabungan eBatarapos

Tabel Jumlah Tabungan Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Tabungan Konsumer	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan Batara	15.945.562	15.981.203	(35.641)	(0,22)
Tabungan Bisnis	2.281.670	0	2.281.670	-
Tabungan Investa	10.543.816	18.729.740	(8.185.924)	(43,71)
Tabungan BTN Pensiunan	217.661	181.119	36.542	20,18
Tabungan Batara Pendidik	160.781	243.205	(82.424)	(33,89)
Tabungan Batara Prima	2.112.185	6.253.799	(4.141.614)	(66,23)
Tabungan Batara Tax Amnesty	2.418	1.404	1.014	72,20
Tabungan KPR Mass	118.783	141.688	(22.905)	(16,17)
Tabungan BTN Batara RDN	7.447	1.935	5.512	284,85
Tabungan Lainnya	2.613.426	2.690.704	(77.278)	(2,87)
Tabungan BTN Junior	615.681	729.810	(114.129)	(15,64)
Tabungan BTN Juara	748.512	751.174	(2.662)	(0,35)
TabunganKu	924.881	920.363	4.518	0,49
Tabungan BTN Sempel	103.371	93.258	10.113	10,84
Tabungan Cermat	20.763	20.600	163	0,79
Tabungan BTN Perumahan	25.738	25.379	359	1,41
Tabungan BTN Haji Reguler	-	-	-	-
Tabungan BTN Haji Plus	-	-	-	-
Tabungan BTN Siap!	71.787	72.167	(380)	(0,53)

Tabungan Konsumer	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan Felas	102.646	77.783	24.863	31,96
Tabungan Simuda Rumahku	47	170	(123)	(72,44)
Tabungan Pos	2.176.441	2.574.604	(398.163)	(15,47)
Tabungan Tabanas Batara	15.867	19.045	(3.178)	(16,69)
Tabungan eBatara Pos	2.160.574	2.555.559	(394.985)	(15,46)
Jumlah Dana Tabungan Konsumer	36.180.189	46.799.401	(10.619.212)	(22,69)

Jumlah dana Tabungan Konsumer tahun 2022 sebesar Rp36,18 triliun, menurun 22,69% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp46,80 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan tabungan yang bersifat investasi. Meskipun demikian, Perseroan optimis di tahun 2023 untuk memperbesar CASA dengan memperkuat Dana Pihak Ketiga murah (*low cost fund*) melalui pengembangan produk tabungan berbasis transaksi.

Tabel Jumlah Rekening Tabungan Konsumer

(rekening)

Tabungan Konsumer	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan Batara	3.263.730	3.215.546	48.184	1,50
Tabungan Investa	7.559	7.024	535	7,62
Tabungan BTN Pensiunan	20.093	14.909	5.184	34,77
Tabungan Batara Pendidik	101.228	129.454	(28.226)	(21,80)
Tabungan Batara Prima	15.268	21.872	(6.604)	(30,19)
Tabungan Batara Tax Amnesty	21	18	3	16,67
Tabungan KPR Mass	76.495	86.348	(9.853)	(11,41)
Tabungan BTN Batara RDN	4.556	2.885	1.671	57,92
Tabungan Lainnya	3.037.945	3.649.149	(611.204)	(16,75)
Tabungan BTN Junior	123.165	615.544	(492.379)	(79,99)
Tabungan BTN Juara	511.129	513.485	(2.356)	(0,46)
TabunganKu	1.487.288	1.609.141	(121.853)	(7,57)
Tabungan BTN Sempel	742.308	725.942	16.366	2,25
Tabungan Cermat	123.214	123.530	(316)	(0,26)
Tabungan BTN Perumahan	2.785	3.046	(261)	(8,57)
Tabungan BTN Haji Reguler	2	2	-	0,00
Tabungan BTN Haji Plus	259	259	-	0,00
Tabungan BTN Siap!	47.165	57.842	(10.677)	(18,46)
Tabungan Felas	622	337	285	84,57
Tabungan Simuda Rumahku	8	21	(13)	(61,90)
Tabungan Pos	642.183	748.349	(106.166)	(14,19)
Tabungan Tabanas Batara	2.932	4.249	(1.317)	(31,00)
Tabungan eBatara Pos	639.251	744.100	(104.849)	(14,09)
Tabungan Bisnis	24.716	58	24.658	42.513,79
Jumlah Rekening Tabungan Konsumer	7.193.794	7.875.554	(681.760)	(8,66)

Jumlah rekening Tabungan Konsumer tahun 2022 sebanyak 7,19 juta rekening, menurun 8,66% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 7,88 juta rekening. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya rekening bansos pandemi yang tutup.

Deposito Berjangka BTN Ritel

Produk deposito berjangka Perseroan memberikan kemudahan kepada konsumen atau nasabah untuk investasi berjangka dengan benefit yang tinggi. Investasi yang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan suku bunga yang menarik dan bersaing.

Produk Deposito Berjangka BTN Ritel ditawarkan dengan jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan > 12 bulan serta *Deposito On Call*.

Tabel Jumlah Deposito Berjangka

(dalam jutaan Rupiah)

Deposito Berjangka	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
1 bulan	12.132.350	9.683.730	2.448.620	25,29
2 bulan	798.656	635.133	163.523	25,75
3 bulan	11.929.638	10.201.878	1.727.760	16,94
4 Bulan	408.758	7.591	401.167	5284,77
6 bulan	1.422.113	1.058.620	363.493	34,34
> 12 bulan	375.519	321.371	54.148	16,85
E-Depo	-	-	-	-
1 Bulan	2.036	-	2.036	100,00
3 Bulan	1.864	-	1.864	100,00
6 Bulan	759	-	759	100,00
12 Bulan	17	-	17	100,00
<i>Deposito On Call</i>	132.704	62.751	69.953	111,48
<i>DHE</i>	15.568	-	15.568	100,00
Jumlah Dana Deposito Berjangka	27.219.982	21.971.075	5.248.907	23,89

Jumlah Deposito Berjangka tahun 2022 sebesar Rp27,22 triliun, meningkat 23,89% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp21,97 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan Deposito pada jangka waktu 1 bulan sebesar Rp2,45 triliun dan Deposito pada jangka waktu 3 bulan sebesar Rp1,73 triliun.

Tabel Jumlah Rekening Deposito Berjangka

(rekening)

Deposito Berjangka	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
1 bulan	52.685	54.762	(2.077)	(3,79)
2 bulan	1.634	2.053	(419)	(20,41)
3 bulan	24.482	24.739	(257)	(1,04)
4 Bulan	196	17	179	1052,94
6 bulan	8.562	7.601	961	12,64
> 12 bulan	2.924	2.816	108	3,84
E-Depo	-	-	-	-
1 Bulan	55	-	55	100,00
3 Bulan	9	-	9	100,00
6 Bulan	5	-	5	100,00
12 Bulan	2	-	2	100,00
<i>Deposito On Call</i>	37	19	18	94,74
<i>DHE</i>	1	-	1	100,00
Jumlah Rekening Deposito Berjangka	90.592	92.007	(1.415)	(1,54)

Jumlah Rekening Deposito Berjangka tahun 2022 sebesar 90.592 rekening, menurun 1,54% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 92.007 rekening. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Deposito pada jangka waktu 1 bulan sebesar 2.077 rekening.

Produk Komersial

Portofolio produk Perseroan pada Produk Komersial terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Produk Kredit Komersial dan Produk Simpanan Komersial. Jumlah nilai Produk Komersial tahun 2022 sebesar Rp261,55 triliun, meningkat 19,78% dibandingkan

dengan tahun 2021 yang sebesar Rp218,36 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran produk Kredit Komersial sebesar 84,37% dan produk simpanan komersial sebesar 13,11%.

Tabel Nilai Produk Komersial

(dalam jutaan Rupiah)

Produk Komersial	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Produk Kredit Komersial	37.654.864	20.423.399	17.231.465	84,37
Produk Simpanan Komersial	223.893.013	197.936.014	25.956.999	13,11
Jumlah Nilai Produk Komersial	261.547.877	218.359.413	43.188.464	19,78

Ditinjau dari volumenya, penyaluran Produk Komersial dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Volume Penyaluran dan Simpanan Produk Komersial

Produk Komersial	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Produk Kredit Komersial (Unit)	10.599	8.263	2.459	29,76
Produk Simpanan Komersial (Rekening)	66.756	61.514	5.242	8,52

Jumlah rekening produk Simpanan Komersial tahun 2022 sebanyak 66.756 rekening atau meningkat 8,52% dibandingkan dengan jumlah rekening tahun 2021, yaitu sebanyak 61.514

rekening. Peningkatan tersebut terutama didominasi oleh penambahan rekening Giro dengan peningkatan sebesar 4.610 rekening (8,69% yoy).

PRODUK KREDIT KOMERSIAL

Perseroan menyediakan produk kredit perbankan komersial untuk memberikan beragam solusi bagi konsumen dengan produk yang terdiri dari produk kredit perumahan dan kredit

non perumahan. Kredit perumahan berupa kredit konstruksi, sedangkan kredit non perumahan terdiri dari Kredit UMKM dan Kredit Komersial.

Tabel Nilai Penyaluran Produk Kredit Komersial

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Komersial	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Perumahan				
Kredit Konstruksi	6.289.738	4.209.184	2.080.554	49,43
Kredit Non Perumahan				
Kredit UMKM	5.941.249	3.395.899	2.545.350	74,95
Kredit Komersial Lainnya	25.423.876	12.818.316	12.605.561	98,34
Jumlah Penyaluran Kredit Komersial	37.654.864	20.423.399	17.231.465	84,37

Penyaluran Kredit Komersial tahun 2022 sebesar Rp37,66 triliun, meningkat 84,37% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp20,42 triliun. Peningkatan tersebut terutama

disebabkan oleh peningkatan penyaluran Kredit Komersial lainnya sebesar Rp12,61 triliun.

Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit Komersial

(dalam unit)

Kredit Komersial	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Perumahan				
Kredit Konstruksi	2.671	2.410	261	10,83
Kredit Non Perumahan	8.054	5.853	2.201	37,60
Kredit UMKM	7.516	5.539	1.977	35,69
Kredit Komersial Lainnya	538	314	224	71,34
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Komersial	10.725	8.263	2.462	29,80

Ditinjau dari volumenya, penyaluran Kredit Komersial tahun 2022 sebanyak 10.725 unit, meningkat 29,80% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 8.263 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran Kredit UMKM sebesar 35,69% dan Kredit Komersial Lainnya sebesar 71,34%.

Kredit Perumahan – Kredit Konstruksi

Kredit Perumahan pada Produk Komersial adalah Kredit Konstruksi. Perseroan memberikan beragam solusi pembangunan properti dengan banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan. Perseroan menyediakan kredit konstruksi kepada pengembang perumahan untuk tujuan modal kerja yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah dan apartemen. Untuk jenis kredit ini, Perseroan memberikan kredit maksimal hingga 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi dengan suku bunga mengambang. Fasilitas kredit konstruksi memberikan kemudahan bagi nasabah perbankan komersial untuk melakukan pengembangan dalam pembangunan bangunan horizontal maupun bangunan vertikal/*high rise building* termasuk sarana dan prasarannya.

Kredit Konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung Program Sejuta Rumah karena penyaluran kredit tersebut mampu menciptakan *supply* rumah. Dalam membuat keputusan untuk membiayai kredit konstruksi, Perseroan memperhitungkan

periode jatuh tempo berdasarkan perkiraan masa konstruksi. Kredit konstruksi dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang akan dibangun di atas tanah.

Nasabah perbankan komersial yang telah mendapatkan Kredit Konstruksi BTN juga dapat memperoleh Kredit Kepemilikan Lahan, Perseroan menyediakan kredit untuk tujuan memperoleh lahan yang akan digunakan untuk membangun hunian dan apartemen bersubsidi, dalam jumlah sampai dengan 70% dari biaya Jangka waktu kredit ini mengikuti jangka waktu kredit konstruksinya dan dijamin dengan agunan berupa tanah yang diperoleh dan bangunan yang dibiayai dengan tiga tahun dan dijamin dengan agunan berupa tanah yang diperoleh dan bangunan yang dibiayai.

Perseroan menyalurkan Kredit Konstruksi melalui 2 (dua) produk sebagai berikut:

1. Kredit Konstruksi BTN
2. Kredit Konstruksi Korporasi

Tabel Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Konstruksi

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Konstruksi	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Konstruksi BTN	5.909.506	3.843.649	2.065.857	53,75
Kredit Konstruksi Korporasi	380.231	365.535	14.697	4,02
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Konstruksi	6.289.738	4.209.184	2.080.554	49,43

Nilai penyaluran produk Kredit Konstruksi tahun 2022 sebesar Rp6,29 triliun, meningkat 49,43% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp4,21 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya penyaluran kredit konstruksi BTN sebesar 53,75% dan Kredit Konstruksi Korporasi sebesar 4,02%.

Tabel Volume Penyaluran Kredit Konstruksi

(dalam unit)

Kredit Konstruksi	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Konstruksi BTN	2.649	2.386	263	11,02
Kredit Konstruksi Korporasi	22	24	(2)	(8,33)
Jumlah Volume Kredit Konstruksi	2.671	2.410	261	10,83

Ditinjau dari volumenya, penyaluran Kredit Konstruksi tahun 2022 sebanyak 2.671 unit, meningkat 10,83% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 2.410 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya volume Kredit Konstruksi BTN sebesar 11,02%

Kredit Non Perumahan - Kredit Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

Perseroan menyediakan Kredit UMKM sebagai solusi bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bertujuan menyalurkan pembiayaan usaha yang produktif. Perseroan menyalurkan Kredit UMKM melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)
3. Kredit Modal Kerja (KMK)
4. Kredit Investasi UMKM
5. KMK Kontraktor UMKM
6. Linkage Program

Tabel Nilai Penyaluran Kredit UMKM

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit UMKM	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KUR	602.059	291.345	310.714	106,65
KUMKM	3.505.936	2.415.339	1.090.597	45,15
KMK	1.806.444	678.727	1.127.717	166,15
Kredit Investasi UMKM	3.740	1.874	1.866	99,57
KMK Kontraktor UMKM	23.069	8.614	14.455	167,81
Linkage Program	-	-	-	-
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit UMKM	5.941.249	3.395.899	2.545.350	74,95

Nilai penyaluran produk Kredit UMKM tahun 2022 sebesar Rp5,94 triliun, meningkat 74,95% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp3,40 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran Kredit UMKM pada produk KUMKM sebesar Rp1,09 triliun dan KMK sebesar Rp1,13 triliun.

Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit UMKM

(dalam unit)

Kredit UMKM	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KUR	2.475	1.181	1.294	109,57
KUMKM	4.461	4.129	332	8,04
KMK	554	218	336	154,13
Kredit Investasi UMKM	4	3	1	33,33
KMK Kontraktor UMKM	22	8	14	175,00
Linkage Program	-	-	-	-
Jumlah Debitur Penyaluran Kredit UMKM	7.516	5.539	1.977	35,69

Jumlah volume penyaluran produk Kredit UMKM tahun 2022 sebanyak 7.516 unit, meningkat 35,69% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 5.539 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume UMKM pada produk KUR sebesar 109,57% yoy, KUMKM sebesar 8,04% yoy, KMK sebesar 154,13% yoy, Kredit Investasi UMKM sebesar 33,33% yoy dan KMK Kontraktor UMKM sebesar 175,00% yoy.

Kredit Non Perumahan - Kredit Komersial Lainnya

Perseroan memasarkan Kredit Non Perumahan berupa Kredit Komersial selain dengan memberikan bunga yang kompetitif juga pelayanan prima yang ditawarkan. Kredit Komersial disalurkan Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja (KMK)
2. Kredit Investasi
3. KMK Kontraktor

Tabel Nilai Penyaluran Kredit Komersial Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Komersial Lainnya	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KMK	18.913.261	11.964.900	6.948.361	58,07
Kredit Investasi	5.442.790	660.467	4.782.323	724,08
KMK Kontraktor	1.067.825	192.949	874.876	453,42
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Komersial Lainnya	25.423.876	12.818.316	12.605.560	98,34

Nilai penyaluran produk Kredit Komersial tahun 2022 sebesar Rp25,42 triliun, meningkat 98,34% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp12,82 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya penyaluran kredit KMK sebesar 58,07%, kredit investasi sebesar 724,08% dan KMK kontraktor sebesar 453,42%.

Tabel Volume Penyaluran Kredit Komersial

(dalam unit)

Kredit Komersial Lainnya	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KMK	452	261	191	73,18
Kredit Investasi	29	16	13	81,25
KMK Kontraktor	57	37	20	54,05
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Komersial	538	314	224	71,34

Ditinjau dari volume, penyaluran Kredit Komersial tahun 2022 sebanyak 538 unit, meningkat 71,34% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 314 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya volume Kredit KMK sebesar 73,18%, kredit investasi 81,25% dan KMK kontraktor 54,05%.

PRODUK SIMPANAN KOMERSIAL

Perseroan menyediakan produk dan layanan pendanaan untuk segmen perbankan komersial yang meliputi Giro dan Deposito Berjangka Lembaga.

Tabel Jumlah Dana Simpanan Komersial

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Komersial	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Komersial	104.900.918	73.362.874	31.538.044	42,99
Deposito Berjangka Lembaga	118.992.095	124.573.140	(5.581.045)	(4,48)
Jumlah Dana Simpanan Komersial	223.893.013	197.936.014	25.956.999	13,11

Nilai penyaluran produk Simpanan Komersial tahun 2022 sebesar Rp223,89 triliun, meningkat 13,11% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp197,94 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya giro komersial sebesar 42,99%.

Tabel Jumlah Rekening Simpanan Komersial

(dalam rekening)

Simpanan Komersial	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Komersial	57.655	53.045	4.610	8,69
Deposito Berjangka Lembaga	9.101	8.469	632	7,46
Jumlah Rekening Simpanan Komersial	66.756	61.514	5.242	8,52

Secara keseluruhan, jumlah rekening produk Simpanan Komersial tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 66.756 rekening atau meningkat 8,52% dibandingkan dengan tahun 2021, dimana penambahan rekening paling banyak dari produk Giro yaitu sebanyak 4.610 rekening atau meningkat 8,69%.

Giro Komersial

Perseroan memberikan layanan penyimpanan dana dalam bentuk Giro melalui Giro FLPP dan Giro Non FLPP.

Tabel Jumlah Dana Giro Komersial

(dalam jutaan Rupiah)

Giro Komersial	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Non FLPP	62.039.774	41.491.767	20.548.007	49,52
Giro FLPP	42.861.144	31.871.107	10.990.037	34,48
Jumlah Dana Giro Komersial	104.900.918	73.362.874	31.538.044	42,99

Nilai Giro Komersial tahun 2022 sebesar Rp104,90 triliun, meningkat 42,99% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp73,36 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya giro non FLPP sebesar 49,52% dan Giro FLPP sebesar 34,48%.

Tabel Jumlah Rekening Giro Komersial

(dalam rekening)

Giro Komersial	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Non FLPP	57.646	53.038	4.608	8,69
Giro FLPP	9	7	2	28,57
Jumlah Rekening Giro Komersial	57.655	53.045	4.610	8,69

Jumlah rekening produk Giro Komersial tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 57.655 rekening atau meningkat 8,69% dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah akuisisi rekening Giro non FLPP, dimana hal ini didukung oleh strategi pemasaran Perseroan di tahun 2022 yaitu peningkatan *Current Account Saving Account (CASA)* dalam rangka penurunan *Cost of Fund (COF)*.

Deposito Berjangka Lembaga

Perseroan juga memberikan layanan penyimpanan dana dalam bentuk Deposito Berjangka Lembaga melalui produk Deposito Berjangka Lembaga dan Deposito *On Call* Lembaga.

Tabel Jumlah Dana Deposito Berjangka Lembaga

(dalam jutaan Rupiah)

Deposito Berjangka Lembaga	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Deposito Berjangka Lembaga	118.173.089	124.175.092	(6.001.995)	(4,83)
Deposito <i>On Call</i> Lembaga	819.006	398.048	420.957	105,76
Jumlah Dana Deposito Berjangka Lembaga	118.992.095	124.573.140	(5.581.038)	(4,48)

Nilai Deposito Komersial tahun 2022 sebesar Rp118,99 triliun atau turun sebesar 4,48% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp124,57 triliun. Penurunan tersebut dalam rangka merekomposisi struktur dana lembaga dari Deposito ke Giro untuk menurunkan *Cost of Fund (COF)*.

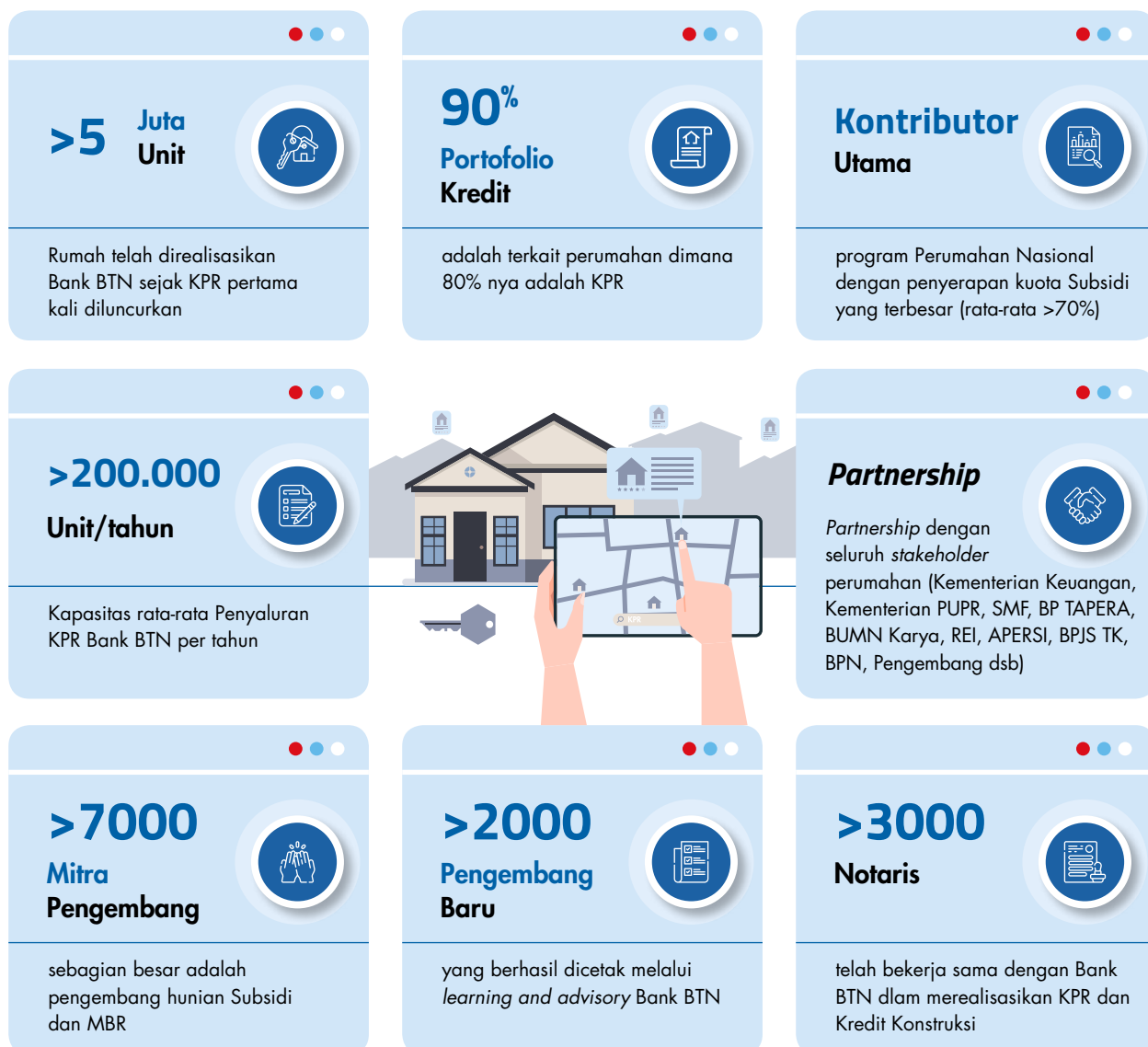
Tabel Jumlah Rekening Deposito Berjangka Lembaga

(dalam rekening)

Deposito Berjangka Lembaga	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Deposito Berjangka Lembaga	9.027	8.424	603	7,16
Deposito <i>On Call</i> Lembaga	74	45	29	64,44
Jumlah Rekening Deposito Berjangka Lembaga	9.101	8.469	632	7,46

Jumlah rekening produk Deposito Komersial tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 9.101 rekening atau meningkat 7,46% dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan tersebut merupakan salah satu strategi diversifikasi nasabah untuk mengurangi ketergantungan dengan nasabah besar (*concentration risk*).

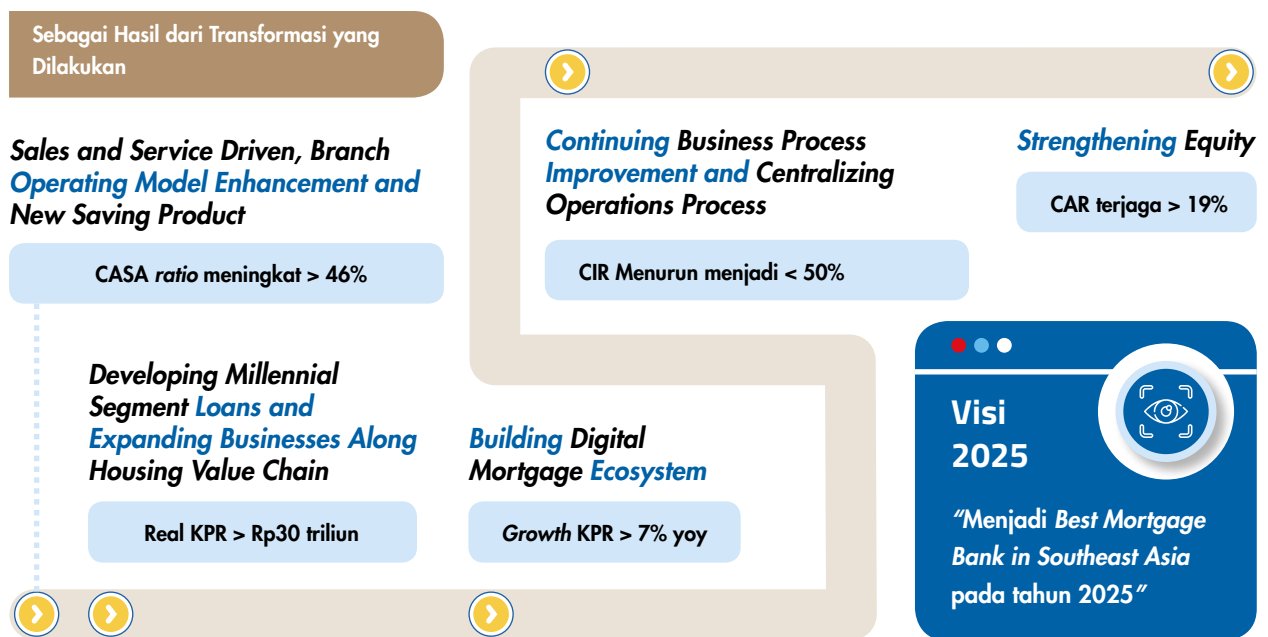
Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Segmen Konvensional



Sebagai bank fokus perumahan, Perseroan telah menjadi kontributor utama dan pendorong program perumahan nasional, terutama pada pembiayaan perumahan di segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kontribusi Perseroan dalam kredit perumahan mencakup:

1. >5 juta unit rumah telah direalisasikan Perseroan sejak KPR pertama kali diluncurkan.
2. 90% portofolio kredit adalah terkait perumahan yang 80% nya adalah KPR.
3. Kontributor utama program perumahan nasional dengan penyerapan kuota subsidi yang terbesar (rata-rata >70%).
4. 200.000 unit per tahun kapasitas rata-rata penyaluran KPR Perseroan.
5. *Partnership* dengan seluruh *stakeholder* perumahan (Kementerian Keuangan, PUPR, SMF, BP Tapera, BUMN Karya, REI, APERSI, BPJS TK, BPN, Pengembang dan sebagainya.)
6. >7.000 mitra pengembang sebagian besar adalah pengembang hunian subsidi dan MBR.
7. >2.000 pengembang baru yang berhasil dicetak melalui *learning and advisory* Perseroan.
8. >3.000 notaris telah bekerja sama dengan Perseroan dalam merealisasikan KPR dan kredit konstruksi.

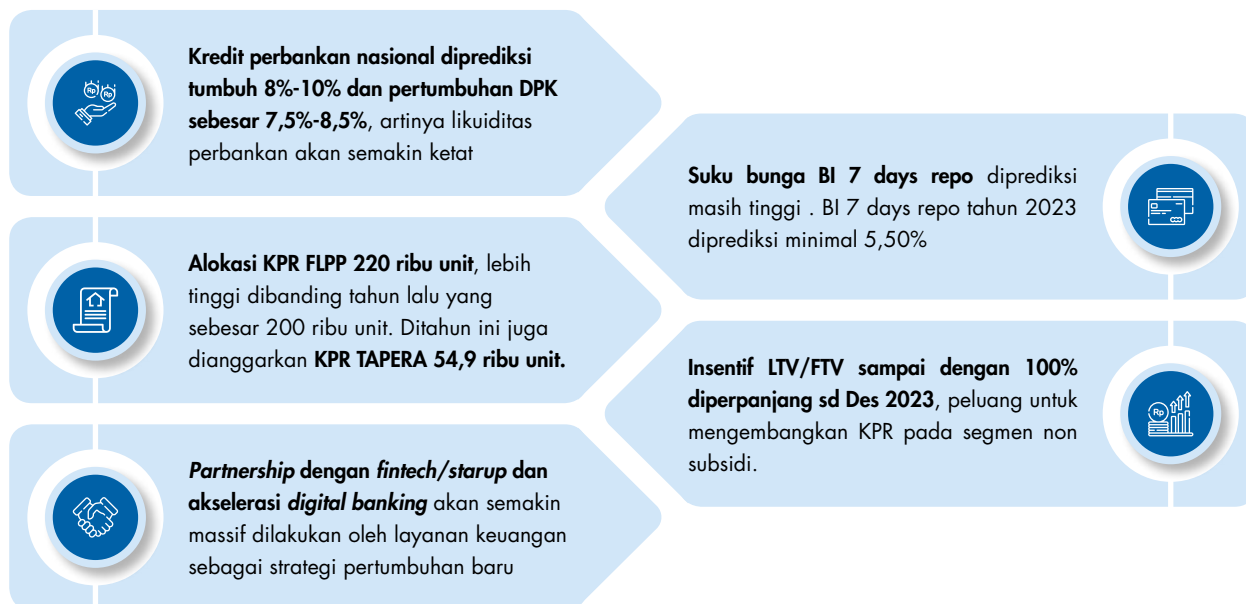
Strategi Segmen Konvensional Tahun 2022



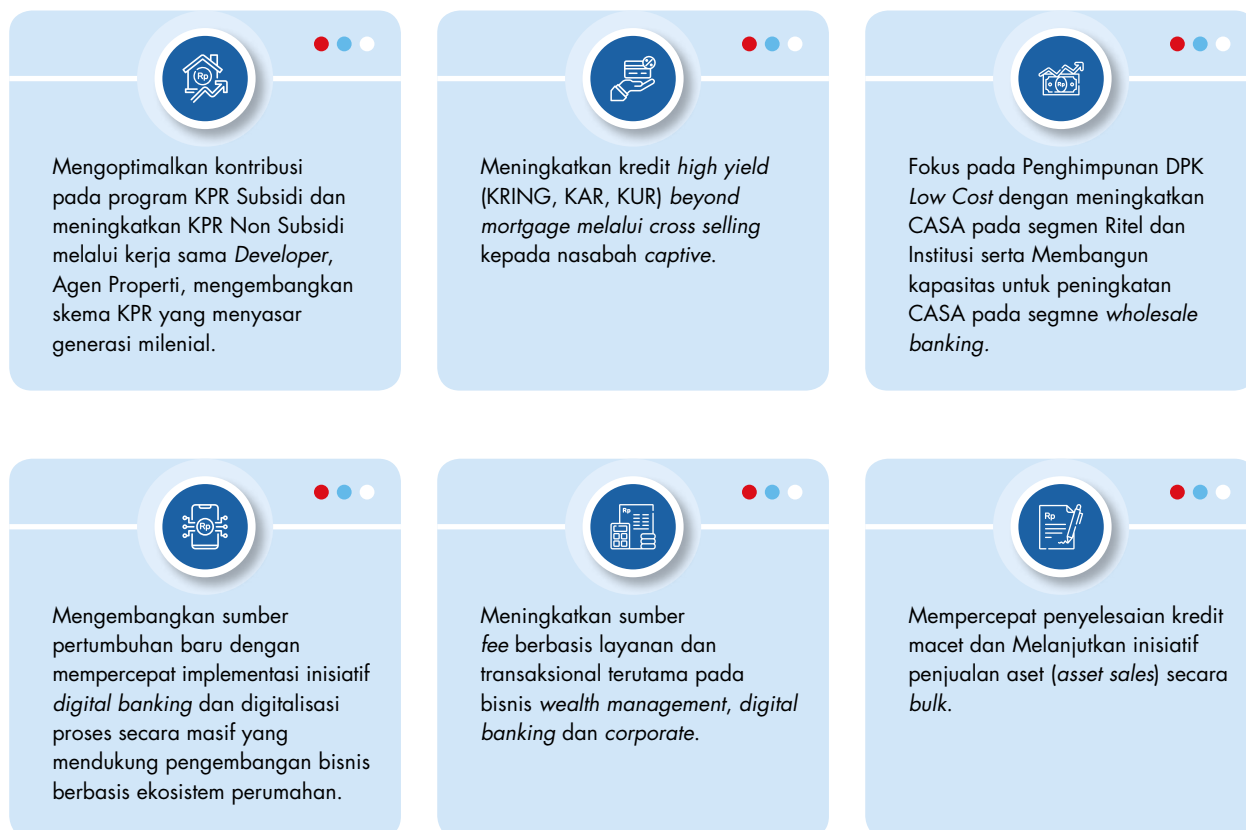
Sesuai dengan Visi Perseroan yaitu menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025, strategi yang dilakukan Perseroan mencakup 5 (lima) hal yaitu:

1. *Sales and service driven, branch operating model, enhancement and new saving product* untuk meningkatkan CASA ratio > 46%.
2. *Developing millennial segment loans and expanding business along housing value chain* untuk meningkatkan realisasi KPR > Rp30 triliun.
3. *Building digital mortgage ecosystem* dengan growth KPR > 7% secara yoy.
4. *Continuing business process improvement and centralizing operations process* dalam rangka menurunkan CIR menjadi < 50%.
5. *Strengthening equity* dengan menjaga CAR > 19%.

Prospek Usaha dan Strategi Segmen Konvensional Tahun 2023



Adapun strategi segmen konvensional dalam menangkap peluang dan prospek usaha di atas yaitu sebagai berikut:

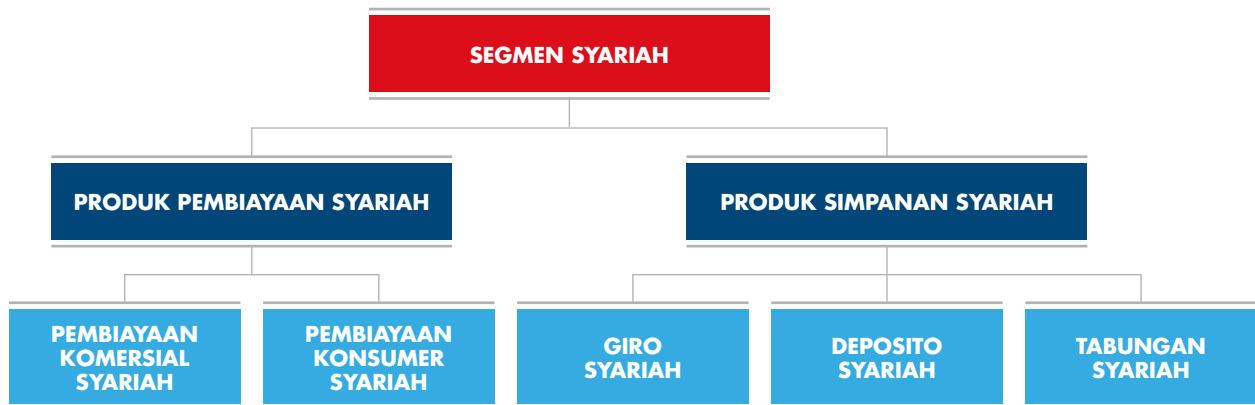


Segmen Syariah

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Syariah

Perseroan juga mengembangkan model perbankan dengan menganut sistem syariah. Segmen Syariah menyediakan produk simpanan dan pembiayaan bersifat konsumen dan komersial.

Kinerja produk dari Segmen Syariah diuraikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Pembiayaan Syariah dan Simpanan Syariah, dengan masing-masing uraian sebagai berikut:



Sekilas tentang kinerja dari Segmen Syariah dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

Tabel Produk Posisi Pembiayaan dan DPK Segmen Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Produk Pembiayaan Syariah				
Pembiayaan Konsumer	29.181.003	24.812.784	4.368.219	17,60
Pembiayaan Komersial	2.443.136	2.737.074	(293.938)	(10,74)
Jumlah Produk Pembiayaan Syariah	31.624.139	27.549.858	4.074.281	14,79
Produk Simpanan Syariah				
Giro Syariah	9.104.388	5.835.567	3.268.821	56,02
Tabungan Syariah	6.012.830	5.122.331	890.499	17,38
Deposito Syariah	19.523.557	18.311.438	1.212.119	6,62
Jumlah Produk Simpanan Syariah	34.640.775	29.269.336	5.371.439	18,35
Jumlah Produk Segmen Syariah	66.264.914	56.819.194	9.445.720	16,62

Produk Pembiayaan Syariah

Perseroan juga melakukan pembiayaan perumahan dan non perumahan melalui mekanisme syariah, dengan klasifikasi produk pembiayaan unit usaha syariah ke dalam jenis konsumen dan komersial. Rincian informasi terkait kinerja produk Pembiayaan Syariah Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Nilai Realisasi Pembiayaan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Pembiayaan Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Pembiayaan Konsumer	6.762.755	4.679.572	2.083.183	44,52
Pembiayaan Komersial	1.450.812	1.552.441	(101.629)	(6,55)
Jumlah Nilai Penyaluran Pembiayaan Syariah	8.213.567	6.232.013	1.981.554	31,80

Ditinjau dari volumenya, penyaluran Pembiayaan Syariah tahun 2022 sebesar Rp8,21 triliun, meningkat 31,80% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp6,23 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran Pembiayaan Konsumer sebesar 44,52% dan Pembiayaan Komersial sebesar 6,55%.

Tabel Volume Realisasi Pembiayaan Syariah

(dalam unit pembiayaan)

Pembiayaan Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Pembiayaan Konsumer	42.298	29.864	12.434	41,64
Pembiayaan Komersial	1.921	1.261	660	52,34
Jumlah Volume Pembiayaan Syariah	44.219	31.125	13.094	42,07

Ditinjau dari volumenya, penyaluran Pembiayaan Syariah tahun 2022 sebesar 44.219 unit pembiayaan, meningkat 42,07% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 31.125 unit pembiayaan. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume Pembiayaan Konsumer sebesar 12.434 unit dan Pembiayaan Komersial sebesar 660 unit.

PEMBIAYAAN KONSUMER SYARIAH

Pembiayaan Konsumer Syariah disalurkan oleh Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan Perumahan, meliputi:

a. KPR Subsidi yang disalurkan melalui:

- KPR BP2BT iB
- KPR Sejahtera Tapak iB
- KPR Sejahtera Susun iB
- KPR SSM Tapak iB
- KPR SSM Susun iB
- KPR Tapera iB

b. KPR Non Subsidi yang disalurkan melalui:

- KPR Platinum iB
- KPR Indent iB

c. Non KPR yang disalurkan melalui:

- Pembiayaan Bangun Rumah iB

2. Pembiayaan Non Perumahan, meliputi:

- a. Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB
- b. Pembiayaan Gadai iB
- c. Pembiayaan Multijasa iB
- d. Pembiayaan Multimanfaat iB
- e. Pembiayaan Emasku

Tabel Realisasi Pembiayaan Konsumer Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Pembiayaan Konsumer Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
PEMBIAYAAN PERUMAHAN	6.691.544	4.631.755	2.059.789	44,47
KPR SUBSIDI	4.391.540	3.260.155	1.131.385	34,70
KPR BP2BT iB	251.438	222.018	29.420	13,25
KPR Sejahtera Tapak iB	4.016.698	3.038.137	978.561	32,21
KPR Sejahtera Susun iB	-	-	-	-
KPR SSM Tapak iB	-	-	-	-
KPR SSM Susun iB	-	-	-	-
KPR Tapera iB	123.404	-	123.404	100,00
KPR Non Subsidi	2.296.850	1.370.460	926.390	67,60
KPR Platinum iB	1.467.169	1.007.240	459.929	45,66
KPR Indent iB	829.681	363.220	466.461	128,42

Pembiayaan Konsumer Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Non KPR	3.154	1.140	2.014	176,67
Pembiayaan Bangun Rumah iB	3.154	1.140	2.014	176,67
PEMBIAYAAN NON PERUMAHAN	71.211	47.817	23.394	48,92
Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB	1.431	681	750	110,13
Pembiayaan Gadai iB	1.117	396	721	182,07
Pembiayaan Multijasa iB	5.864	4.006	1.858	46,38
Pembiayaan Multimanfaat iB	62.799	42.478	20.321	47,84
Pembiayaan Emasku	-	256	(256)	(100,00)
Jumlah Nilai Penyaluran Pembiayaan Konsumer Syariah	6.762.755	4.679.572	2.083.183	44,52

Nilai penyaluran Pembiayaan Konsumer Syariah tahun 2022 sebesar Rp6,76 triliun, meningkat 44,52% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp4,68 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran KPR Non Subsidi sebesar 67,60% dan KPR Subsidi sebesar 34,70%.

Tabel Volume Realisasi Pembiayaan Konsumer Syariah

(dalam unit pembiayaan)

Pembiayaan Konsumer Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
PEMBIAYAAN PERUMAHAN	40.905	29.190	11.715	40,13
KPR SUBSIDI	30.695	23.324	7.371	31,60
KPR BP2BT iB	2.370	2.112	258	12,22
KPR Sejahtera Tapak iB	27.490	21.212	6.278	29,60
KPR Sejahtera Susun iB	-	-	-	-
KPR SSM Tapak iB	-	-	-	-
KPR SSM Susun iB	-	-	-	-
KPR Tapera iB	835	-	835	100,00
KPR Non Subsidi	10.193	5.858	4.335	74,00
KPR Platinum iB	4.826	3.670	1.156	31,50
KPR Indent iB	5.367	2.188	3.179	145,29
Non KPR	17	8	9	112,50
Pembiayaan Bangun Rumah iB	17	8	9	112,50
PEMBIAYAAN NON PERUMAHAN	1.393	674	719	106,68
Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB	4	4	-	-
Pembiayaan Gadai iB	496	35	461	1.317,14
Pembiayaan Multijasa iB	103	66	37	56,06
Pembiayaan Multimanfaat iB	790	567	223	39,33
Pembiayaan Emasku	-	2	(2)	(100,00)
Jumlah Nilai Penyaluran Pembiayaan Konsumer Syariah	42.298	29.864	12.434	41,64

Ditinjau dari volumenya, penyaluran Pembiayaan Konsumer Syariah tahun 2022 sebesar 42.298 unit pembiayaan, meningkat 41,64% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 29.864 unit pembiayaan. Peningkatan penyaluran KPR non subsidi sebesar 4.335 unit disebabkan oleh kontribusi

penyaluran KPR Hits pada segmen millennial dan KPR subsidi sebesar 7.371 unit yang disebabkan salah satunya produk KPR Tapera Syariah yang baru direalisasikan pada 2022 turut menyumbang kontribusi pada peningkatan volume pembiayaan KPR subsidi.

PEMBIAYAAN KOMERSIAL SYARIAH

Pembiayaan Komersial Syariah disalurkan oleh Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan Perumahan
 - a. Pembiayaan konstruksi BTN iB
2. Pembiayaan Non Perumahan
 - a. UMKM Syariah
 - b. Pembiayaan Modal Kerja iB
 - c. Pembiayaan Investasi iB

Tabel Realisasi Pembiayaan Komersial Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Pembiayaan Komersial Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Pembiayaan Perumahan	1.225.826	742.627	483.199	65,07
Pembiayaan konstruksi BTN iB	1.225.826	742.627	483.199	65,07
Pembiayaan Non Perumahan	224.986	809.814	(584.828)	(72,22)
UMKM Syariah				
Pembiayaan Modal Kerja iB	170.683	802.296	(631.613)	(78,73)
Pembiayaan Investasi iB	54.303	7.518	46.785	622,31
Jumlah Nilai Penyaluran Pembiayaan Komersial Syariah	1.450.812	1.552.441	(101.629)	(6,55)

Nilai penyaluran Pembiayaan Komersial tahun 2022 menurun sebesar Rp101,63 miliar atau turun 6,55% apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Penyaluran tahun 2022 sebagian besar adalah kepada sektor konstruksi BTN iB, sedangkan untuk non konstruksi tetap akan difokuskan kepada BUMN maupun sektor swasta khususnya pada bidang pendidikan.

Tabel Volume Realisasi Pembiayaan Komersial Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Pembiayaan Komersial Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Pembiayaan Perumahan	1.731	1.200	531	44,25
Pembiayaan konstruksi BTN iB	1.731	1.200	531	44,25
Pembiayaan Non Perumahan	190	61	129	211,48
UMKM Syariah	-	-	-	-
Pembiayaan Modal Kerja iB	177	58	119	205,17
Pembiayaan Investasi iB	13	3	10	333,33
Jumlah Volume Pembiayaan Komersial Syariah	1.921	1.261	660	52,34

Jumlah akun penyaluran pembiayaan komersial tahun 2022 sebesar 1.921 unit, meningkat 52,34% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 1.261 unit, hal ini disebabkan oleh penyaluran pembiayaan dengan segmen retail. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang terdapat beberapa akun penyaluran pembiayaan komersial kepada segmen *corporate*.

Produk Simpanan Syariah

Perseroan juga melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui Unit Usaha Syariah melalui produk Giro, Tabungan dan Deposito Syariah.

Tabel Posisi Dana Simpanan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Syariah	9.104.388	5.835.567	3.268.821	56,02
Tabungan Syariah	6.012.830	5.122.331	890.499	17,38

Simpanan Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Deposito Syariah	19.523.557	18.311.438	1.212.119	6,62
Jumlah Dana Simpanan Syariah	34.640.775	29.269.336	5.371.439	18,35

Jumlah dana Simpanan Syariah tahun 2022 secara keseluruhan sebesar Rp34,64 triliun, meningkat 18,35% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp29,27 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perolehan Giro Syariah tumbuh 56,02%, Tabungan Syariah tumbuh 17,38% dan Deposito Syariah tumbuh 6,62%.

Tabel Volume Posisi Rekening Dana Simpanan Syariah

(dalam rekening)

Simpanan Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Syariah	15.295	13.713	1.582	11,54
Tabungan Syariah	1.063.346	924.979	138.367	14,96
Deposito Syariah	11.261	11.209	52	0,46
Jumlah Rekening Simpanan Syariah	1.089.902	949.901	140.001	14,74

Ditinjau dari jumlah rekening Simpanan Syariah tahun 2022 tumbuh 14,74% yakni sebanyak 1.089.902 rekening dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 949.901 rekening. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan volume Tabungan Syariah yang tumbuh 14,96% atau sebanyak 138.367 rekening, Giro Syariah sebanyak 1.582 dan Deposito Syariah sebanyak 52 rekening.

GIRO SYARIAH

Simpanan Syariah dalam bentuk Giro diberikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB.

Tabel Posisi Dana Giro Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Giro Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro BTN iB	8.623.601	5.355.953	3.267.648	61,01
Giro BTN Prima iB	480.787	479.614	1.173	0,24
Jumlah Dana Giro Syariah	9.104.388	5.835.567	3.268.821	56,02

Jumlah dana Giro Syariah tahun 2022 mengalami peningkatan 56,02% menjadi sebesar Rp9,10 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp5,84 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Giro BTN iB yang meningkat sebesar 61,01%.

Tabel Posisi Volume Rekening Dana Giro Syariah

(dalam rekening)

Giro Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro BTN iB	13.363	11.787	1.576	13,37
Giro BTN Prima iB	1.932	1.926	6	0,31
Jumlah Rekening Giro Syariah	15.295	13.713	1.582	11,54

Ditinjau dari jumlah rekening Giro Syariah tahun 2022 tumbuh 11,54%, menjadi sebanyak 15.295 rekening dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 13.713 rekening. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Giro BTN iB yang tumbuh 13,37% atau sebanyak 1.576 rekening.

TABUNGAN SYARIAH

Simpanan Syariah dalam bentuk Tabungan diberikan melalui beberapa produk yaitu Tabungan BTN Batara iB, Tabungan BTN Prima iB, Tabungan BTN Haji dan Umroh iB, TabunganKu iB, Tabungan BTN Qurban iB, Tabungan BTN Simpel iB dan Tabungan BTN Emas iB.

Tabel Posisi Dana Tabungan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Tabungan Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan BTN Batara iB	1.178.529	1.139.747	38.782	3,40
Tabungan BTN Prima iB	4.602.504	3.767.123	835.381	22,18
Tabungan BTN Haji dan Umroh iB	205.866	198.490	7.376	3,72
TabunganKu iB	10.451	7.304	3.147	43,09
Tabungan BTN Qurban iB	4.736	3.531	1.205	34,13
Tabungan BTN Simpel iB	4.738	3.188	1.550	48,62
Tabungan BTN Emas iB	6.006	2.949	3.057	103,66
Jumlah Dana Tabungan Syariah	6.012.830	5.122.331	890.499	17,38

Jumlah dana Tabungan Syariah tahun 2022 mengalami peningkatan 17,38% yakni menjadi sebesar Rp6,01 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp5,12 triliun. Kontribusi tertinggi pada peningkatan dana Tabungan Syariah

adalah Tabungan BTN Prima iB yang meningkat Rp835,38 miliar. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari strategi bisnis yaitu peningkatan dana *Current Account and Saving Account* (CASA).

Tabel Posisi Volume Rekening Dana Tabungan Syariah

(dalam rekening)

Tabungan Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan BTN Batara iB	632.423	542.941	89.482	16,48
Tabungan BTN Prima iB	146.374	135.013	11.361	8,41
Tabungan BTN Haji dan Umroh iB	170.071	152.341	17.730	11,64
TabunganKu iB	20.025	16.767	3.258	19,43
Tabungan BTN Qurban iB	14.867	7.714	7.153	92,73
Tabungan BTN Simpel iB	71.363	66.235	5.128	7,74
Tabungan BTN Emas iB	8.223	3.968	4.255	107,23
Jumlah Rekening Tabungan Syariah	1.063.346	924.979	138.367	14,96

Jumlah rekening Tabungan Syariah tahun 2022 adalah sebesar 1,06 juta rekening, meningkat 14,96% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 924,98 ribu rekening.

Kontribusi terbesar pada peningkatan jumlah rekening Tabungan Syariah adalah Tabungan BTN Batara iB yang meningkat sebanyak 89,48 ribu rekening.

DEPOSITO SYARIAH

Simpanan Syariah dalam bentuk Deposito diberikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Deposito BTN iB baik untuk perorangan maupun untuk lembaga serta Deposito *On Call* iB.

Tabel Posisi Dana Deposito Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Deposito Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Deposito BTN iB (Perorangan)	1.121.365	1.060.386	60.979	5,75
Deposito BTN iB (Lembaga)	18.153.922	17.133.702	1.020.220	5,95
Deposito <i>On Call</i> iB	248.270	117.350	130.920	111,56
Jumlah Dana Deposito Syariah	19.523.557	18.311.438	1.212.119	6,62

Jumlah dana Deposito Syariah tahun 2022 sebesar Rp19,52 triliun, meningkat 6,62% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp18,31 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Deposito *On Call* iB sebesar Rp130,92 miliar,

Deposito BTN iB (Lembaga) sebesar Rp1,02 triliun dan Deposito BTN iB (Perorangan) sebesar Rp60,98 miliar. Peningkatan realisasi nilai deposito ini disebabkan antara lain oleh program khusus yang diberikan kepada deposan seperti program loyalitas.

Tabel Posisi Volume Rekening Dana Deposito Syariah

(dalam rekening)

Deposito Syariah	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Deposito BTN iB (Perorangan)	9.319	9.597	(278)	(2,90)
Deposito BTN iB (Lembaga)	1.901	1.591	310	19,48
Deposito <i>On Call</i> iB	41	21	20	95,24
Jumlah Rekening Deposito Syariah	11.261	11.209	52	0,46

Ditinjau dari jumlah rekening Deposito Syariah tahun 2022 sebanyak 11.261 rekening, meningkat 0,46% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 11.209 rekening. Kontribusi terbesar pada peningkatan jumlah rekening Deposito Syariah adalah Deposito BTN iB (Lembaga) yang meningkat sebanyak 310

rekening. Volume rekening deposito BTN iB Perorangan mengalami penurunan 2,90%. Akan tetapi hal tersebut diiringi dengan peningkatan nominal Deposito BTN iB Perorangan sebesar Rp60,98 miliar. Hal ini menunjukkan kenaikan rata-rata volume deposito per deposan.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Segmen Syariah

Beberapa keunggulan kompetitif maupun inovasi yang dilakukan oleh Segmen Syariah antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Peluang nasabah *captive* dengan KPR, Kredit Yasa Griya (KYG) dan Dana Lembaga yang berpotensi dikembangkan.
2. Menjadi mitra Pemerintah pada Program Perumahan Nasional.

3. Kondisi *excess reserve* yang cukup tinggi.
4. Inisiatif transformasi (*Financing Origination System/ FOS Collection*, kerja sama Tapera dan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD), *digital onboarding* dan *corebanking system upgrade*).

Strategi Segmen Syariah Tahun 2022

Uraian strategi tahun 2022 yang dilakukan oleh Segmen Syariah dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Bisnis Pembiayaan

Tema Strategi	Inisiatif
a. Memperkuat pertumbuhan KPR segmen MBR	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan porsi Perseroan pada kuota KPR Subsidi tahun 2022 yang menyasar ASN, TNI, POLRI dan <i>fixed income</i>. - Mengembangkan bisnis KPR di segmen ASN dengan kerja sama pada program KPR TAPERA. - Memperkuat komunikasi dengan <i>stakeholder</i> perumahan (PUPR, Kementerian Keuangan) dalam penyusunan Program Sejuta Rumah Pemerintah. - Sosialisasi dan edukasi KPR FLPP dan BP2BT ke Asosiasi dan Pengembang melalui <i>Webinar, Developer Gathering, Expo</i> dan lain-lain. - Optimalisasi pemasaran KPR Tapera kepada Peserta Tapera sinergi dengan Pengembang - Pengembangan <i>Host to Host/H2H</i> Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP (Sikasep, Sikumbang dan lain-lain) dan Tapera - Pemberian <i>reward</i> dan insentif untuk Pengembang.

Tema Strategi	Inisiatif
b. Fokus KPR Non Subsidi dengan <i>ticket size</i> < Rp500 juta	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama dengan BUMN Properti dan Perumnas untuk pembangunan proyek <i>Transit Oriented Development</i> (TOD). - Kerja sama pendanaan dengan instansi dalam dan luar negeri sebagai alternatif pendanaan untuk proyek perumahan. - Sosialisasi dan edukasi KPR Segmen Milenial ke Kementerian/Swasta/Komunitas melalui Webinar, Expo dan lain-lain. - Sinergi dan <i>join</i> promo dengan Asosiasi dan Pengembang - Program kerja sama dan <i>marketing</i> dengan agen properti nasional dan individu, sebagai strategi <i>Direct to Consumer</i> (D2C), khususnya untuk KPR Rumah <i>Second</i>. - Optimalisasi Program KPR Margin <i>Promo</i> - Meningkatkan akuisisi Perjanjian Kerja sama (PKS) <i>New Developer</i> - Pemberian <i>fee marketing</i> kepada Pengembang dan Agen Properti. - Penunjukkan PIC dan Pemberian <i>Reward</i> KPR Non Subsidi. - Pengembangan aplikasi <i>Lead Management System</i>. - Integrasi BTN <i>Property</i> dengan <i>Financing Origination System</i> (FOS) <i>Consumer</i>/Iloan Syariah.
c. Menumbuhkan <i>Database Business Ecosystem</i> untuk Memperkuat Non KPR	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan aktivitas <i>call "10 Customer One Day"</i> - <i>Telemarketing</i> nasabah KPR eksisting melalui program <i>Top Up</i> pembiayaan. - Sosialisasi dan edukasi BTN Solusi ke Kementerian/Swasta/Perusahaan mitra <i>payroll</i>. - <i>WhatsApp Blast</i> penawaran multijasa dan multimanfaat ke seluruh karyawan BTN dan karyawan perusahaan <i>payroll</i> BTNS. - Implementasi multiguna (<i>soft financing</i>) karyawan. - Perluasan fitur multimanfaat untuk <i>refinancing aset non property</i>.
d. Peningkatan Portofolio Pembiayaan Komersil	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Maintenance</i> secara berkelanjutan <i>developer</i> eksisting - proyek baru atau pengembangan proyek eksisting. - Melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan komersil secara selektif kepada BUMN, group usaha swasta bonafide dan institusi pendidikan. - Optimalisasi <i>partnership</i> dengan program <i>Restricted Investment</i> (SRIA) - Memberikan pembiayaan atas kebutuhan nasabah potensi melalui diversifikasi akad-akad syariah yang sesuai.
e. Digitalisasi dan automasi proses pembiayaan untuk <i>Business Process Improvement</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi dan otomasi proses pembiayaan konsumen dan komersil (peningkatan FOS konsumen dan penggunaan FOS komersil, Bank Garansi <i>Online</i>) - Desentralisasi asuransi KPR bersubsidi dengan <i>host to host</i>.

2. Strategi Pengembangan Pendanaan

Tema Strategi	Inisiatif
a. Peningkatan DPK berbiaya murah	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus Segmentasi pada Badan Layanan Umum/Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintahan. - Penawaran Program Pengembangan Operasional (PPO) BTN iB. - Peningkatan kerja sama lembaga pendidikan (ETB/NTB). - Peningkatan <i>product holding</i> melalui <i>bundling product</i> pembiayaan KPR dengan Tabungan Sekunder.
b. <i>Partnership</i> dan Kemitraan Antar BUMN, Institusi, atau Kelembagaan Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergi Antar BUMN/BUUMD/Grup serta Anak Perusahaan. - Sinergi Antar Lembaga Islam (SALAM) - Akuisisi produk DPK Ritel pada pengurus perusahaan/lembaga yang berkerja sama. - <i>Bundling campaign</i> dengan lembaga <i>philanthropy</i>, komunitas Islam dan <i>Islamic Key Opinion Leader</i>
c. Penguatan Fundamental DPK Komersil	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan Rasio Deposan Inti (target: sangat signifikan menjadi signifikan). - <i>Maintenance</i> nasabah loyal dan eksisting.
d. Optimalisasi <i>Transactional Banking</i> Guna Peningkatan <i>Fee Based Income</i> DPK Komersil	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan BTN Solusi pada segmen ASN, TNI/POLRI, Instansi, perusahaan BUMN dan Instansi Pemerintah. - Pemberian layanan pembayaran secara digitalisasi berkerja sama dengan perusahaan <i>fintech</i>. - Peningkatan penjualan <i>bancassurance</i> melalui penawaran produk kepada nasabah potensi pembiayaan.
e. Menjadi Bank Operasional nasabah institusi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketersambungan <i>Cash Management System</i> (CMS). - Meningkatkan penggunaan layanan <i>virtual account</i>. - Meningkatkan penggunaan layanan <i>payroll system</i>.

3. Strategi Permodalan

Untuk mendukung penyaluran strategi pengembangan bisnis, dibutuhkan permodalan yang cukup dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum sesuai Basel III. Upaya penguatan permodalan tahun 2022 akan difokuskan pada:

a. Peningkatan laba/profitabilitas.

b. Penerbitan Sukuk Tapera sebagai salah satu bentuk pendanaan jangka panjang likuiditas UUS Perseroan.

c. Pelaksanaan *rights issue* oleh BTN Induk tahun 2022 untuk penguatan struktur permodalan dalam rangka mendukung perluasan kredit/pembiayaan perumahan dan bisnis.

4. Strategi Perbaikan Kualitas Pembiayaan

Tema Strategi	Inisiatif
a. Memperkuat <i>collection management system</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat <i>Collection Management System</i> – Segmen Konsumer. - Memperkuat <i>Collection Management System</i> – Segmen Komersial - Penyelarasan struktur organisasi KCS terhadap struktur organisasi SHAD. - Percepatan penyelesaian dokumen pokok dan <i>monitoring</i> untuk percepatan litigasi. - Memperbaiki kualitas data nasabah. - <i>Piloting</i> perubahan proses bisnis <i>collection</i> di Kantor Cabang (meningkatkan fungsi <i>desk call</i>)
b. Membenahi Tenaga Alih Daya (TAD) <i>management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja <i>vendor TAD collection (engagement, workload dan lain-lain)</i> - <i>Monitoring</i> produktivitas <i>TAD collection, icoll usage dan contacted rate.</i>
c. Mempercepat penjualan aset pembiayaan macet	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan aset pembiayaan macet secara <i>bulk</i> melalui kerja sama investor PPA, PAB, MAS dan lain-lain. - Memperluas <i>channel</i> penjualan pembiayaan macet melalui portal rumah murah dan kerja sama <i>e-commerce</i> dibidang properti. - <i>Project assets sales</i> untuk mempercepat <i>recovery</i> pembiayaan macet.
d. Perbaikan proses bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi <i>FOS Collection</i> – Segmen Konsumer
e. Perbaikan Kualitas Pembiayaan Komersial Secara Masif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian data atas <i>profiling</i> pembiayaan komersial NPF dan pasif. - Pengklasifikasian <i>loan</i> NPF dan pasif menjadi 4 (empat) kuartan. - Partisipasi dalam program <i>BTN Project Tiger.</i>
f. <i>Coaching dan mentoring</i> serta saluran pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Coaching dan mentoring</i> kepada <i>CAMU</i> di KCS.
g. Memperluas jaringan terhadap pihak ketiga dalam upaya penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kepada <i>KPKNL dan Pengadilan Agama</i> serta memperluas kerja sama dengan <i>Agent Property, BLS, Advokat, Asosiasi Pengembang Properti dan Kontraktor.</i>
h. Memperluas Relaksasi Kebijakan dan Pemberian <i>Reward</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian kebijakan untuk memperlancar proses penyelesaian pembiayaan serta pemberian <i>reward</i> dan bantuan operasional.

5. Strategi *Fee Based Income*

Tema Strategi	Inisiatif
a. Peningkatan pendapatan administrasi Bank	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kontribusi biaya administrasi pembiayaan. - Optimalisasi pembebanan biaya administrasi Dana Pihak Ketiga.
b. Peningkatan pendapatan <i>fee/ujroh</i> jasa Bank	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi <i>fee/ujroh</i> atas jasa pengiriman uang Bank. - Optimalisasi <i>fee/ujroh</i> atas <i>bancassurance.</i> - Meningkatkan <i>fee/ujroh</i> atas transaksi <i>payroll.</i> - Optimalisasi <i>fee/ujroh</i> atas jasa perbankan lainnya.

6. Strategi Infrastruktur *Information Technology (IT)*

Strategi dan program kerja pengembangan infrastruktur TI tahun 2022 dilakukan oleh BTN Induk yang difokuskan untuk mendukung strategi bisnis pada pertumbuhan dana *low cost*, pertumbuhan *fee based income digital banking* dan efisiensi operasional yang dirangkum sebagai berikut:

- a. Mengembangkan strategi *digital banking* dengan perencanaan dan pembaharuan melalui:
 - Pengembangan *digital channel* seperti *new mobile banking, internet banking bisnis, online onboarding, enhancement mobile apps* kartu kredit.
 - Pengembangan ekosistem *digital* dan *partnership.*
 - Peningkatan *merchant enabler system* seperti pengembangan fitur *EDC, e-commerce/online acquiring* dan kerja sama operasional *EDC.*
 - Pengembangan *Application Programming Interface (API) Management* dan *Sandboxing* dan *upgrade middleware* untuk meningkatkan *availability* dan *reliability* sistem.
- b. Otomatisasi proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan IT, melalui modernisasi *hardware, software/ sistem, infrastruktur* maupun implementasi *high availability* pada perangkat *network data center* dan penggunaan infrastruktur *cloud.*
- c. Pengembangan dan optimalisasi dari *loan architecture* seperti *enhancement flow origination system,* pengembangan *loan sistem* untuk jenis pinjaman atau fitur baru, *enhancement BTN property, enhancement loan monitoring, collection dan restructuring system, enhancement aplikasi mitra, enhancement aplikasi survey/OTS* termasuk *geotagging, implementasi decision engine system, enhancement H2H Asuransi* (penjaminan, klaim, subrogasi), pengembangan aplikasi pengajuan kredit/pembiayaan UMKM berbasis *web, joint finance* dan *platform integration.*

- d. Peningkatan operational *supporting tools* dan otomatisasi proses *back-end (back office)*, untuk menambah kapasitas pencegahan risiko, memaksimalkan pemetaan risiko (*risk profiling*) unit kerja dan meningkatkan efisiensi dengan menggunakan aplikasi operational *risk tools*, digitalisasi sistem *back office, end to end procurement process, roll out grab for business* dan sentralisasi proses di *back office*.
- e. Meningkatkan kapabilitas sistem pembayaran seperti pengembangan sistem *fast payment (BI-Fast)*, maupun sistem untuk mendukung bisnis *remittance*.
- f. Mengembangkan *treasury system* dan *settlement system* untuk mendukung bisnis *treasury* maupun pemenuhan regulasi.
- g. Mengembangkan dan optimasi sistem syariah seperti *upgrading core banking system* syariah, pembaharuan *mobile banking syariah*.
- h. Mengembangkan *wholesale banking channel*, antara lain bank kustodian, *trade finance*, e-Bank Garansi dan *supply chain financing*.
- i. Mengembangkan dan pembaruan *wealth management system* maupun *priority banking system*.
- j. Melakukan asesmen terkait *e-channel cybersecurity* untuk meningkatkan *security maturity level* dalam mempersiapkan organisasi IT *security* yang handal berbasis implementasi *Chief Information Security (CISO)* serta peningkatan kapabilitas *security* untuk menerapkan *gap analysis cybersecurity* berbasiskan *framework NIST* yang disesuaikan dengan model bisnis Perseroan.
- k. Melakukan asesmen untuk meningkatkan *security maturity level* dalam mempersiapkan organisasi IT *security* yang handal berbasis implementasi CISO serta peningkatan kapabilitas *security*.
- l. Penyesuaian dan pengkinian kebijakan TI terhadap kebijakan dan prosedur regulator dan internal bank, seperti penambahan prosedur pengembangan *rapid/agile*.
- m. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tim IT BTN melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- n. Melakukan pengembangan perluasan *monitoring* pada jaringan yaitu *traffic flow and packet analyzer* untuk meningkatkan keandalan pada jaringan komunikasi.
- o. Melakukan pengembangan *application performance monitoring* untuk meningkatkan performa pada aplikasi. Sejalan dengan rencana pengembangan IT tersebut, strategi dan program kerja pengembangan IT *Security* di tahun 2022 difokuskan untuk mendukung kebutuhan unit kerja bisnis. Dalam pelaksanaannya, strategi utama yang akan dijalankan yakni pembangunan kapabilitas IT *Security* dengan meluncurkan IT *Security Fraud Mitigation*, investasi yang ada diarahkan untuk mencegah adanya *fraud* dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah untuk menjaga kepercayaan nasabah dan menjaga reputasi bank. Pelaksanaan inisiatif ini juga mendukung IT *security* terkait peluncuran *Open API Banking* dan *New Mobile Banking*.

7. Strategi Penerapan Risk and Compliance

Strategi penerapan *Risk and Compliance* di tahun 2022 dilakukan melalui BTN Induk yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan kepatuhan yang dirangkum sebagai berikut:

Strategi	Inisiatif
a. Penguatan Pengelolaan Risiko Kredit/Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Backtesting</i> model risiko kredit/pembiayaan PSAK 71. - Pengembangan CSM dengan melakukan <i>re-modeling</i>. - Pengembangan ICR dengan melakukan <i>re-modeling</i>. - <i>Development Collection Scorecard</i>.
b. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana pengukuran <i>Risk Maturity Index (RMI)</i> dan tindak lanjut rekomendasi perbaikan RMI dan saat ini masih <i>on progress</i>.
c. <i>Operational Excellence</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Surveillance</i> Sertifikasi ISO 9001:2015. - <i>Bloomberg Service</i>.
d. Membangun Sistem Informasi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Operational Risk Tools</i>. - <i>Market Risk Tools</i>
e. Meningkatkan kapabilitas <i>Corporate Governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan <i>compliance awareness</i> untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha. - Pengembangan <i>Compliance Dashboard</i>. - <i>CGPI Third Party Assessment</i>. - <i>ACGS Third Party Assessment</i>. - Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) KPK. - Optimalisasi pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai standar mutu <i>Surveillance ISO 9001:2015</i>. - Optimalisasi pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar mutu <i>Surveillance ISO 37001:2016</i>. - <i>Compliance Clinic</i>.
f. Meningkatkan peran <i>Anti Money Laundering (AML)</i> dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) berbasis <i>compliance mandatory regulatory</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan <i>awareness</i> atas penerapan dan pengelolaan APU dan PPT menggunakan media <i>digital</i>. - Penyampaian Laporan kepada PPATK melalui Aplikasi goAML. - Melakukan penyesuaian proses identifikasi, penilaian dan pemahaman risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) dengan mengacu pada <i>National Risk Assessment (NRA)</i> yang diterbitkan PPATK serta <i>Sectoral Risk Assessment (SRA)</i> yang diterbitkan OJK pada Tahun 2021.

8. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengingat UUS Perseroan masih berstatus sebagai Unit Usaha Syariah maka dalam peranannya sebagai *liaison*, strategi pengembangan SDM UUS Perseroan dijalankan dengan mengikuti strategi Pengembangan SDM yang disusun oleh BTN Induk. Adapun strategi pengembangan SDM BTN Induk ditujukan untuk menunjang pengembangan bisnis serta mewujudkan aspirasi sebagai *Home of Indonesia's Best Talent*, melalui:

a. Organization Development

- Penyusunan kelengkapan organisasi *Strategic Business Unit* (SBU), yang meliputi struktur organisasi, *job specification*, *job grade*.
- Penyusunan panduan pelaksanaan pilot SBU.
- Penyusunan model perhitungan profitabilitas unit kerja.
- Penyusunan *roadmap* dan pembentukan *Corporate University*.

b. HC Acquisition

- Penyempurnaan kriteria dan metode rekrutmen untuk mendapatkan *Top talent Pro-Hire*.
- Penyempurnaan Remunerasi *Pro-Hire* (*Sign-on Benefit* dan remunerasi IT sesuai pasar).
- Rekrutmen *Professional Hire* IT.
- Perbaikan kriteria kandidat *fresh graduate* dan perbaikan SLA proses rekrutmen.
- Memperluas program/*channel* rekrutmen melalui program kemitraan kepada universitas ternama.
- Perbaikan program untuk unit bisnis untuk memetakan potensi secara akurat.
- Pengembangan program rekrutmen khusus IT dan *sales*.
- Program kemitraan dengan *Top 10* universitas dalam Prodi IT.
- Penyusunan Sistem pengelolaan dan *monitoring* kinerja TAD.

c. HC Development and Career

- Penyusunan *HC Transformation* (*HC Strategic Plan*).
- Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Penyempurnaan Kamus Kompetensi *Leadership* untuk segmen bisnis.
- Penyusunan *Profile* dan *Individual Development Plan* (IDP) jabatan BoD-1 dan BoD-2 pada *business*.
- *Career path policy* berdasarkan matriks risiko.
- Penyusunan *talent mobility* dan *exchange policy*.
- *Policy and design* program akselerasi.
- *Policy digital talent development*.
- Penyusunan kurikulum dan implementasi *training sales, mortgage, produk development, operation, IT, digital banking, legal* dan *syariah series*.
- Integrasi sistem *individual development plan*.
- Penyusunan kurikulum dan implementasi *training leadership* untuk segmen bisnis.
- *Coaching, mentoring guidelines and program*.
- Implementasi *talent mobility* ke perusahaan terafiliasi dan anak perusahaan serta program *exchange*.
- Membangun *talent management system and assessment tools*.

- Implementasi Program BTN TAP (*Fast Track* dan *BTN Millennials Leader*).

d. Performance and Rewards

- Payung kebijakan *extra cash and non cash reward* spesifik untuk *high performer*.
- Penyusunan payung kebijakan *incentives and commission*.
- Penyusunan *roadmap* segmentasi remunerasi.
- Kebijakan sistem manajemen kinerja dan pengukuran produktivitas.
- Kajian peningkatan *total rewards* di posisi P-80.
- Penyusunan kebijakan *Long Term Incentive* (LTI) dan penyempurnaan kebijakan *insurance benefit*.
- Penyusunan kebijakan *sign-on benefit* untuk *pro hire*.
- Implementasi program *reward* untuk *high performer*.
- Implementasi segmentasi remunerasi.
- Penyusunan parameter produktivitas *per job title*.
- Sistem *dashboard* realisasi kinerja (sistem *leaderboard*, terintegrasi *core-banking* dan *individual based*).
- Implementasi *Long Term Incentives* (LTI) dan *insurance benefit*.

e. Retire and Exit

- *Policy* penyetaraan manfaat pasca kerja program iuran dengan program manfaat pasti.
- *Roadmap* dan kebijakan rekomposisi gaji pokok dan tunjangan pegawai menjadi 75:25.
- Kebijakan dan prosedur program pensiun dini terbatas untuk *slow strater* dan *unfit* selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Kebijakan sanksi disiplin yang ketat untuk pegawai *fraud*.
- Implementasi program rotasi ke daerah asal bagi pegawai yang memasuki MPP.
- Peningkatan kontribusi bank terhadap iuran manfaat pasca kerja dan pensiun yaitu iuran dana pensiun, iuran Tunjangan Hari Tua (THT) Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- Pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk mempersiapkan masa pensiun
- Program *coaching* dan *mentoring bad performers*.
- Pelatihan ekstra pegawai *slow starter* dan *unfit* untuk meningkatkan kinerjanya.

f. Corporate Culture

- Implementasi program *sales and service culture, compliance and risk culture, performance culture* dan *learning culture*.
- Penilaian *core values* per individu.
- Pengembangan portal Budaya Perusahaan.

g. HC Technology and Analytics

- *Single Sign-On Establishment*.
- *Integrated master data* ke aplikasi *Non Human Resources* (HR).
- *People analytic establishment*.
- *Enhancement Human Capital Information System* (HCIS) untuk mendukung *HC Function*.
- Optimalisasi *geo location tagging*.

Prospek Usaha dan Strategi Segmen Syariah Tahun 2023

Uraian prospek usaha dan strategi segmen syariah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Memperhatikan rencana bisnis strategi pendanaan di tahun 2022, strategi peningkatan DPK difokuskan untuk meningkatkan dana murah (*low cost funding*), peningkatan kontribusi DPK Ritel dan rekomposisi dana mahal (deposito dan *wholesale*) dengan rate nisbah yang lebih rendah.

Untuk mencapai target tersebut beberapa inisiatif utama yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Fokus segmentasi pada Badan Layanan Umum/Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintahan.
- Peningkatan kerja sama pendidikan (ETB/NTB).
- Peningkatan *product holding* melalui *bundling product* pembiayaan KPR dengan tabungan sekunder.
- Sinergi Antar BUMN/BUMD/Grup serta Entitas Anak
- Sinergi Antar Lembaga Islam (SALAM)
- Pengurangan Rasio Deposita Inti (Target: Sangat Signifikan menjadi Signifikan)
- Maintenance nasabah loyal dan eksisting.
- Bundling campaign* dengan lembaga *philantrophy*, komunitas Islam dan *Islamic Key Opinion Leader*.
- Mengembangkan BTN Solusi pada segmen ASN, TNI/POLRI, Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN dan Instansi lainnya.
- Pemberian layanan pembayaran secara digitalisasi bekerja sama dengan perusahaan *fintech*

- Meningkatkan ketersambungan CMS dan meningkatkan penggunaan layanan *virtual account* dan *payroll system*.

2. Rencana Wholesale Funding dan Pendanaan Lainnya

Selain penghimpunan DPK, untuk menjaga likuiditas, UUS Perseroan juga merencanakan penerbitan dana *wholesale* yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas Bank. Di tahun 2022 rencana realisasi dana *wholesale* sebesar-besarnya Rp500 miliar yang bersumber dari penerbitan surat berharga Sukuk Tapera, Kewajiban Kepada Bank Lain dan pinjaman SMF. Penghimpunan dana *wholesale* tersebut dan pengaturan kebutuhan jumlah nominal untuk masing-masing opsi akan disesuaikan dengan kondisi likuiditas bank (diberlakukan sebagai *buffer* untuk kebutuhan likuiditas) dan kondisi pasar serta kondisi lain yang relevan.

3. Rencana Penyelesaian Cost of Fund dengan Pricing Pembiayaan

Memperhatikan penurunan CoF DPK di sepanjang Tahun 2021, maka pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian *pricing* pembiayaan di sekitar 7,5%. Untuk mencapai penyesuaian tersebut, beberapa inisiatif utama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan CASA berbasis *low-cost funding*.
- Pengembangan otomatisasi proses bisnis realisasi pembiayaan.
- Akan menyelenggarakan ALCO khusus Syariah.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

Uraian pendapatan dan profitabilitas segmen usaha disajikan sebagai berikut:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022				2021			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total
Pendapatan segmen	23.233.200	2.674.168	-	25.907.368	23.413.857	2.381.101	-	25.794.958
Beban segmen	(10.036.723)	(873.361)	-	(10.910.084)	(11.848.313)	(955.342)	-	(12.803.655)
Pendapatan segmen - neto	13.196.477	1.800.807	-	14.997.284	11.565.544	1.425.759	-	12.991.303
Pendapatan operasional lainnya	2.405.171	78.845	(209.164)	2.274.852	2.270.111	92.456	-	2.362.567
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.414.717)	(602.661)	-	(4.017.378)	(2.857.345)	(770.132)	-	(3.627.477)
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan ontijensi-bersih	(1.074)	-	-	(1.074)	2.845	-	-	2.845
Beban operasional lainnya	(8.704.656)	(943.389)	209.164	(9.438.881)	(8.129.515)	(562.891)	-	(8.692.406)
Laba operasional	3.481.201	333.602	-	3.814.803	2.851.640	185.192	-	3.036.832

Uraian	2022				2021			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	60.912	(25)	-	60.887	(43.517)	5	-	(43.512)
Beban pajak				(830.617)				(617.093)
Laba tahun berjalan				3.045.073				2.376.227
Total aset	364.284.663	45.335.575	(7.471.926)	402.148.312	340.010.131	38.362.728	(6.504.548)	371.868.311
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	338.723.316	44.987.568	(7.471.926)	376.238.958	325.275.710	31.690.502	(6.504.548)	350.461.664

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pertumbuhan Nominal 2021-2022				Pertumbuhan Persentase 2021-2022 (%)			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total
Pendapatan segmen	(180.657)	293.067	-	112.410	(0,77)	12,31	-	0,44
Beban segmen	1.811.590	81.981	-	1.893.571	(15,29)	(8,58)	-	(14,79)
Pendapatan segmen - neto	1.630.933	375.048	-	2.005.981	14,10	26,31	-	15,44
Pendapatan operasional lainnya	135.060	(13.611)	(209.164)	(87.715)	5,95	(14,72)	(100,00)	(3,71)
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(557.372)	167.471	-	(389.901)	19,51	(21,75)	-	10,75
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan ontijensi-bersih	(3.919)	-	-	(3.919)	(137,75)	-	-	(137,75)
Beban operasional lainnya	(575.141)	(380.498)	209.164	(746.475)	7,07	67,60	100,00	8,59
Laba operasional	629.561	148.410	-	777.971	22,08	80,14	-	25,62
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	104.429	(30)	-	104.399	(239,97)	(600,00)	-	(239,93)
Beban pajak				(213.524)				34,60
Laba tahun berjalan				668.846				28,15
Total aset	24.274.532	6.972.847	(967.378)	30.280.001	7,14	18,18	-	8,14
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	13.447.606	13.297.066	(967.378)	25.777.294	4,13	41,96	-	7,36

Pertumbuhan Pendapatan dan Profitabilitas tiap-tiap Segmen usaha adalah sebagai berikut:

- Konvensional**

Pendapatan bersih Segmen Konvensional tahun 2022 adalah sebesar Rp13,19 triliun, meningkat 14,10% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp11,57 triliun. Seiring dengan peningkatan pendapatan, laba operasional segmen konvensional tahun 2022 meningkat 22,08% menjadi Rp3,48 triliun.

- Syariah**

Pendapatan bersih segmen Syariah tahun 2022 adalah sebesar Rp1,80 triliun, meningkat 26,31% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1,43 triliun. Seiring dengan peningkatan pendapatan, laba operasional segmen syariah tahun 2022 meningkat 80,14% menjadi Rp333,60 miliar.

TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan mendapat opini menyajikan

secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perseroan terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

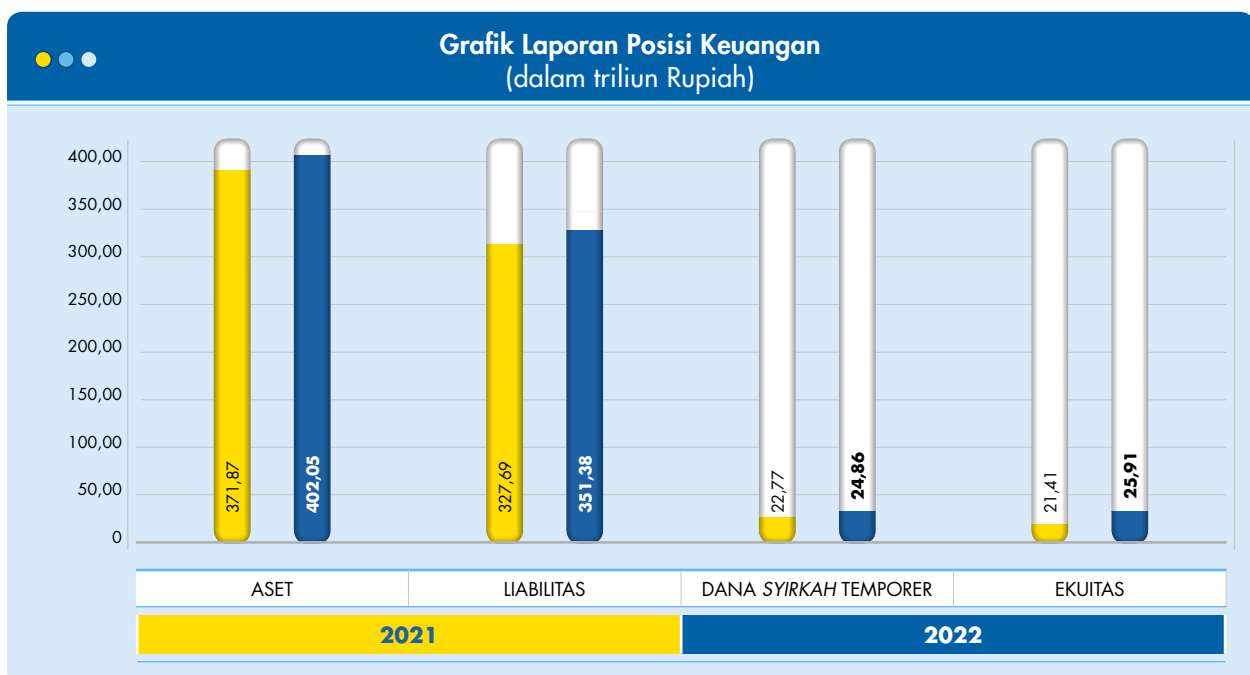
Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
KAS	1.661.533	1.539.577	121.956	7,92
GIRO PADA BANK INDONESIA	25.416.941	10.692.484	14.724.457	137,71
GIRO PADA BANK LAIN				
Pihak ketiga	963.935	1.000.338	(36.403)	(3,64)
Pihak berelasi	508.322	96.460	411.862	426,98
	1.472.257	1.096.798	375.459	34,23
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.747)	(1.698)	(49)	2,89
	1.470.510	1.095.100	375.410	34,28
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN				
Pihak ketiga	12.975.894	27.900.711	(14.924.817)	(53,49)
Pihak berelasi	61	337	(276)	(81,90)
	12.975.955	27.901.048	(14.925.093)	(53,49)
EFEK-EFEK				
Pihak ketiga	873.109	891.173	(18.064)	(2,03)
Pihak berelasi	850.059	1.341.732	(491.673)	(36,64)
	1.723.168	2.232.905	(509.737)	(22,83)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.399)	(2.000)	(399)	19,95
	1.720.769	2.230.905	(510.136)	(22,87)
OBLIGASI PEMERINTAH				
Pihak berelasi	51.964.973	46.080.298	5.884.675	12,77
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI				
Pihak ketiga	1.434.190	1.598.325	(164.135)	(10,27)
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH				
Kredit yang diberikan				
Pihak ketiga	247.217.823	229.174.514	18.043.309	7,87
Pihak berelasi	19.439.742	18.110.919	1.328.823	7,34
	266.657.565	247.285.433	19.372.132	7,83

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.104.914)	(13.165.897)	(939.017)	7,13
	252.552.651	234.119.536	18.433.115	7,87
Pembiayaan/piutang syariah				
Pihak ketiga	31.367.082	27.102.484	4.264.598	15,74
Pihak berelasi	257.057	447.374	(190.317)	(42,54)
	31.624.139	27.549.858	4.074.281	14,79
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.570.009)	(1.269.863)	(300.146)	23,64
	30.054.130	26.279.995	3.774.135	14,36
	282.606.781	260.399.531	22.207.250	8,53
TAGIHAN DERIVATIF				
Pihak ketiga	103.939	31.017	72.922	235,10
TAGIHAN AKSEPTASI				
Pihak ketiga	289.206	-	289.206	100,00
Pihak berelasi	131.356	454.140	(322.784)	(71,08)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(136)	(623)	487	(78,17)
	420.426	453.517	(33.091)	(7,30)
ASET TETAP				
Biaya perolehan/Nilai revaluasi	10.599.848	9.468.655	1.131.193	11,95
Akumulasi penyusutan	(4.246.045)	(3.731.864)	(514.181)	13,78
	6.353.803	5.736.791	617.012	10,76
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	10.750.302	9.173.536	1.576.766	17,19
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	2.915.428	2.430.660	484.768	19,94
ASET LAIN-LAIN	2.352.762	2.505.522	(152.760)	(6,10)
TOTAL ASET	402.148.312	371.868.311	30.280.001	8,14
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA	3.205.358	3.654.236	(448.878)	(12,28)
SIMPANAN DARI NASABAH				
Giro				
Pihak ketiga	17.636.481	12.806.732	4.829.749	37,71
Pihak berelasi	87.264.437	60.556.142	26.708.295	44,11
	104.900.918	73.362.874	31.538.044	42,99
Giro Wadiah				
Pihak ketiga	1.783.134	1.176.350	606.784	51,58
Pihak berelasi	6.841.675	4.179.603	2.662.072	63,69
	8.624.809	5.355.953	3.268.856	61,03
	113.525.727	78.718.827	34.806.900	44,22
Tabungan				
Pihak ketiga	35.656.990	46.363.367	(10.706.377)	(23,09)
Pihak berelasi	525.339	436.034	89.305	20,48
	36.182.329	46.799.401	(10.617.072)	(22,69)
Tabungan Wadiah				
Pihak ketiga	1.192.775	1.149.143	43.632	3,80

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	943	1.096	(153)	(13,96)
	1.193.718	1.150.239	43.479	3,78
	37.376.047	47.949.640	(10.573.593)	(22,05)
Deposito berjangka				
Pihak ketiga	66.808.185	53.067.211	13.740.974	25,89
Pihak berelasi	79.389.842	93.453.378	(14.063.536)	(15,05)
	146.198.027	146.520.589	(322.562)	(0,22)
Total simpanan dari nasabah	297.099.801	273.189.056	23.910.745	8,75
SIMPANAN DARI BANK LAIN				
Pihak ketiga	136.408	66.007	70.401	106,66
LIABILITAS AKSEPTASI				
Pihak ketiga	302.037	292.220	9.817	3,36
Pihak berelasi	118.525	161.920	(43.395)	(26,80)
	420.562	454.140	(33.578)	(7,39)
LIABILITAS DERIVATIF				
Pihak ketiga	-	17.741	(17.741)	(100,00)
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN				
Pihak ketiga	4.297.252	8.094.441	(3.797.189)	(46,91)
Pihak berelasi	4.355.008	4.277.267	77.741	1,82
	8.652.260	12.371.708	(3.719.448)	(30,06)
PINJAMAN YANG DITERIMA				
Pihak ketiga	7.365.320	6.499.997	865.323	13,31
Pihak berelasi	17.455.685	15.562.294	1.893.391	12,17
	24.821.005	22.062.291	2.758.714	12,50
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	629.366	496.725	132.641	26,70
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	4.719	3.644	1.075	29,50
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	7.248.985	6.618.300	630.685	9,53
PINJAMAN SUBORDINASI				
Pihak ketiga	4.658.242	4.259.776	398.466	9,35
Pihak berelasi	4.499.977	4.499.968	9	0,00
	9.158.219	8.759.744	398.475	4,55
TOTAL LIABILITAS	351.376.683	327.693.592	23.683.091	7,23
DANA SYIRKAH TEMPORER				
SIMPANAN NASABAH				
<i>Giro Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	468.889	467.333	1.556	0,33
Pihak berelasi	11.897	12.281	(384)	(3,13)
	480.786	479.614	1.172	0,24
<i>Tabungan Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	4.730.686	3.466.529	1.264.157	36,47
Pihak berelasi	88.427	505.563	(417.136)	(82,51)
	4.819.113	3.972.092	847.021	21,32
<i>Deposito berjangka Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	11.886.366	8.887.336	2.999.030	33,74
Pihak berelasi	7.637.191	9.424.102	(1.786.911)	(18,96)
	19.523.557	18.311.438	1.212.119	6,62
Total simpanan nasabah	24.823.456	22.763.144	2.060.312	9,05

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
SIMPANAN DARI BANK LAIN				
<i>Giro Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	56	46	10	21,74
<i>Tabungan Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	19.674	1.882	17.792	945,38
<i>Deposito berjangka Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	19.089	3.000	16.089	536,30
Total simpanan dari bank lain	38.819	4.928	33.891	687,72
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	24.862.275	22.768.072	2.094.203	9,20
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	-	0,00
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	-	0,00
Dana Setoran Modal	2.756.575	-	2.756.575	100,00
Keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi Pemerintah setelah pajak tangguhan Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.193.252)	87.817	(1.281.069)	(1.458,79)
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(409.657)	(458.153)	48.496	(10,59)
Bagian efektif lindung nilai efektif lindung nilai	(49.301)	(19.983)	(29.318)	146,71
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.508.565	3.307.991	200.574	6,06
Saldo laba*)				
Telah ditentukan penggunaannya	10.745.157	8.606.555	2.138.602	24,85
Belum ditentukan penggunaannya	3.201.813	2.532.966	668.847	26,41
TOTAL EKUITAS	25.909.354	21.406.647	4.502.707	21,03
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	402.148.312	371.868.311	30.280.001	8,14

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 juta telah dieliminasi akibat kuasi reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.



Aset

Jumlah Aset tahun 2022 adalah sebesar Rp402,15 triliun, meningkat 8,14% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp371,87 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Giro pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah.

Kas

Jumlah Kas tahun 2022 adalah sebesar Rp1,66 triliun, meningkat 7,92% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp1,54 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dalam khasanah, kas dalam ATM serta Kas dalam perjalanan seiring dengan kegiatan operasional dari Perseroan di akhir tahun.

Giro Pada Bank Indonesia

Jumlah Giro pada Bank Indonesia tahun 2022 adalah sebesar Rp25,42 triliun, meningkat 137,71% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp10,70 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Giro Wajib Minimum yang harus dipenuhi dari tahun 2021 sebesar 3,0% menjadi 8,1% pada tahun 2022 dari total dana pihak ketiga Perseroan.

Giro Pada Bank Lain

Jumlah Giro pada Bank Lain tahun 2022 adalah sebesar Rp1,47 triliun, meningkat 34,28% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp1,10 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh karena ada peningkatan penempatan dana valuta asing pada bank lain.

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain tahun 2022 adalah sebesar Rp12,98 triliun, menurun 53,49% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp27,90 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh optimalisasi penempatan aset pada instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.

Efek-Efek

Efek-Efek - Neto terdiri atas investasi yang diklasifikasi sebagai Nilai Wajar melalui Laba Rugi, Nilai Wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lainnya diukur dengan menggunakan Nilai Wajar dan Biaya Perolehan. Jumlah Efek-Efek tahun 2022 adalah sebesar Rp1,72 triliun, menurun 22,87% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp2,23 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya efek efek yang jatuh tempo di tahun 2022.

Obligasi Pemerintah

Jumlah Obligasi Pemerintah tahun 2022 adalah sebesar Rp51,96 triliun, meningkat 12,77% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp46,08 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembelian surat berharga .

Efek-Efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali

Jumlah Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali tahun 2022 adalah sebesar Rp1,43 triliun, menurun 10,27% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp1,60 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penjualan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan Bank Indonesia.

Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah

Jumlah Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah tahun 2022 adalah sebesar Rp282,61 triliun, meningkat 8,53% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp260,40 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran kredit dan Pembiayaan di berbagai segmen, terutama pada produk KPR, Kredit Perumahan lainnya dan Korporasi. Pemulihan ekonomi di tahun 2022 berdampak terhadap tingginya *demand* penyaluran KPR, baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi serta Kredit Konsumer Non KPR. Selain itu, sektor non perumahan menjadi tumpuan utama pertumbuhan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi pada segmen komersial dan korporasi di tahun 2022.

Tagihan Derivatif

Jumlah Tagihan Derivatif tahun 2022 adalah sebesar Rp103,94 miliar, meningkat 235,10% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp31,02 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penarikan transaksi derivatif dari berbagai bank.

Tagihan Akseptasi

Jumlah Tagihan Akseptasi tahun 2022 adalah sebesar Rp420,43 miliar, menurun 7,30% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp453,52 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya transaksi SKBDN di tahun 2022.

Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap tahun 2022 adalah sebesar Rp6,35 triliun, meningkat 10,76% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp5,74 triliun. Untuk mendukung kelancaran operasional dan kapasitas IT, di tahun 2022 Perseroan melakukan aktivitas pembelian aset tetap dan pengembangan infrastruktur IT. Beberapa di antaranya: pembelian tanah untuk pengembangan jaringan kantor, pembangunan gedung kantor, mobil kas keliling, mesin pendukung operasional dan pengembangan aplikasi/*software*.

Bunga yang Masih Akan Diterima

Jumlah Bunga yang Masih Akan Diterima tahun 2022 adalah sebesar Rp10,75 triliun, meningkat 17,19% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp9,17 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai bunga yang masih akan diterima atas kredit yang diberikan Perseroan pada tahun 2022.

Aset Pajak Tangguhan - Neto

Jumlah Aset Pajak Tangguhan - Neto tahun 2022 adalah sebesar Rp2,92 triliun, meningkat 19,94% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp2,43 triliun. Peningkatan tersebut karena adanya perbedaan temporer antara laporan keuangan dan pajak.

Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lain-lain tahun 2022 adalah sebesar Rp2,35 triliun, menurun 6,10% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp2,51 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan.

Liabilitas

Jumlah Liabilitas tahun 2022 adalah sebesar Rp351,38 triliun, meningkat 7,23% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp327,69 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain serta pinjaman yang diterima.

Liabilitas Segera

Jumlah Liabilitas Segera tahun 2022 adalah sebesar Rp3,21 triliun, menurun 12,28% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp3,65 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya kewajiban kepada pihak ketiga yang dikarenakan turunnya saldo uang muka kredit.

Simpanan Dari Nasabah

Jumlah Simpanan dari Nasabah tahun 2022 adalah sebesar Rp297,10 triliun, meningkat 8,75% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp273,19 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tingginya penempatan giro.

Simpanan Dari Bank Lain

Jumlah Simpanan dari Bank Lain tahun 2022 adalah sebesar Rp136,41 miliar, meningkat 106,66% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp66,01 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada penempatan produk deposito dan giro dari bank lain.

Liabilitas Akseptasi

Jumlah Liabilitas Akseptasi tahun 2022 adalah sebesar Rp420,56 miliar, menurun 7,39% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp454,14 Hal tersebut dipengaruhi adanya pelunasan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Liabilitas Derivatif

Pada tahun 2022 tidak terdapat liabilitas Derivatif menurun 100,00% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar

Rp17,74 miliar. Hal tersebut karena tidak adanya *rate swap* liabilitas derivatif pada tahun berjalan.

Surat-Surat Berharga yang Diterbitkan

Jumlah Surat-surat Berharga yang Diterbitkan tahun 2022 adalah sebesar Rp8,65 triliun, menurun 30,06% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp12,37 triliun. Penurunan tersebut terutama dikarenakan adanya pelunasan saat jatuh tempo atas surat berharga yang diterbitkan antara lain Obligasi I Tahap I 2012 sebesar Rp2,0 triliun, Obligasi PUB III Tahap II 2019 Seri B sebesar Rp1,17 triliun, Obligasi PUB II Tahap I 2015 Seri C sebesar Rp800 miliar dan Obligasi PUB III Tahap I 2017 seri B sebesar Rp1,30 triliun.

Pinjaman yang Diterima

Jumlah Pinjaman yang Diterima tahun 2022 adalah sebesar Rp24,82 triliun, meningkat 12,50% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp22,06 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman mata uang asing dari Japan International Cooperation Agency (JICA) serta pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF).

Bunga yang Masih Harus Dibayar

Jumlah Bunga yang Masih Harus Dibayar tahun 2022 adalah sebesar Rp629,37 miliar, menurun 26,70% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp496,73 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman yang diterima Perseroan yang meningkat di tahun 2022.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Jumlah Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi tahun 2022 adalah sebesar Rp4,72 miliar, meningkat 29,50% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp3,64 miliar. Peningkatan tersebut berbanding lurus dengan exposure komitmen dan kontinjensi Perseroan di tahun 2022.

Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-Lain

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain tahun 2022 adalah sebesar Rp7,25 triliun, meningkat 9,53% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp6,62 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Dana Jaminan Pengembang.

Pinjaman Subordinasi dan Efek-Efek Subordinasi

Jumlah Pinjaman Subordinasi dan efek-efek Subordinasi tahun 2022 adalah sebesar Rp9,16 triliun, meningkat 4,55% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp8,76 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya selisih kurs obligasi *subordinasi* dalam valuta asing.

Dana Syirkah Temporer

Dana Syirkah Temporer adalah penerimaan dan dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah* dan akun lain lain yang sejenis. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan *musyarakah*. Jumlah dana syirkah temporer tahun 2022 adalah sebesar Rp24,86 triliun, meningkat 9,20% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp22,77 triliun.

Simpanan Nasabah

Jumlah Simpanan Nasabah tahun 2022 adalah sebesar Rp24,82 triliun, meningkat 9,05% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp22,76 triliun. Peningkatan tersebut karena adanya kenaikan simpanan nasabah Dana Syirkah Temporer pada produk tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah*.

Simpanan dari Bank Lain

Jumlah Simpanan dari Bank Lain tahun 2022 adalah sebesar Rp38,82 miliar, meningkat 687,72% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp4,93 miliar. Peningkatan tersebut karena adanya kenaikan simpanan dari Bank Lain Dana Syirkah Temporer pada produk tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah*.

Ekuitas

Jumlah Ekuitas tahun 2022 adalah sebesar Rp25,91 triliun, meningkat 21,03% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp21,41 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba Perseroan dan penambahan modal disetor sebagai hasil *Rights Issue* pada tahun 2022.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh tahun 2022 adalah Rp5,30 triliun, tidak mengalami perubahan dari posisi tahun 2021 yang sebesar Rp5,30 triliun

Tambahan Modal Disetor

Jumlah Tambahan Modal Disetor tahun 2022 adalah sebesar Rp2,05 triliun tidak mengalami perubahan dari posisi tahun 2021 yang sebesar Rp2,05 triliun

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil				
Bunga	23.233.200	23.413.857	(180.657)	(0,77)
Bagi hasil dan <i>margin</i> unit syariah	2.674.168	2.381.101	293.067	12,31

Keuntungan Neto yang Belum Direalisasi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Efek-Efek dan Obligasi Pemerintah Setelah Pajak Tangguhan Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Jumlah Keuntungan Neto yang Belum Direalisasi atas Efek-Efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur Berdasarkan Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif, setelah Pajak Tangguhan tahun 2022 adalah (Rp1,19) triliun, menurun 1.458,79% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp87,82 miliar.

Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan

Jumlah Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah Pajak Tangguhan tahun 2022 adalah sebesar (Rp409,66) miliar, menurun 10,59% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar (Rp458,15) miliar. Hal tersebut karena adanya dampak atas perhitungan program imbalan kerja (PSAK 24) yang berpengaruh kepada beban komprehensif Perseroan di tahun 2022.

Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas

Jumlah Bagian Efektif Lindung Nilai - Arus Kas tahun 2022 adalah sebesar (Rp49,30) miliar, meningkat 146,71% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar (Rp19,98) miliar. Hal tersebut karena adanya penurunan laba komprehensif tahun berjalan terkait dengan lindung nilai.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

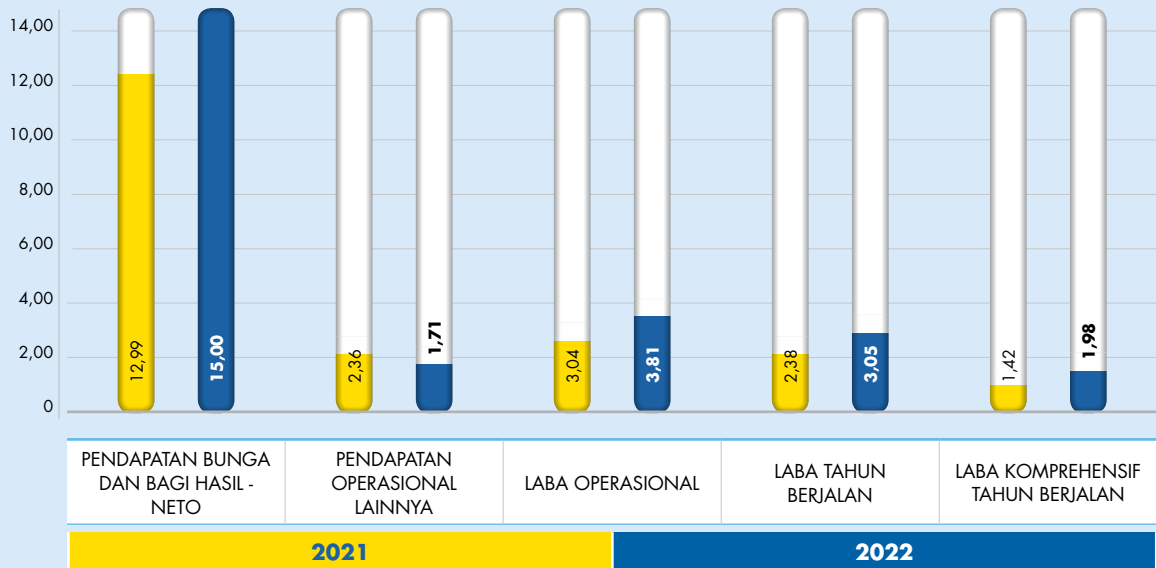
Jumlah Surplus Revaluasi Aset Tetap tahun 2022 adalah sebesar Rp3,51 triliun, meningkat 6,06% dari tahun 2021 yang sebesar Rp3,31 triliun. Hal tersebut dipengaruhi adanya beberapa aset tetap yang dilakukan penilaian kembali (revaluasi) pada tahun 2022.

Saldo Laba

Jumlah Saldo Laba tahun 2022 adalah sebesar Rp13,95 triliun, meningkat 25,20% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp11,14 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan yang meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp3,05 triliun.

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	25.907.368	25.794.958	112.410	0,44
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus				
Bunga	(9.866.919)	(11.670.728)	1.803.809	(15,46)
Beban pendanaan lainnya	(169.804)	(177.585)	7.781	(4,38)
Bonus Simpanan <i>Wadiah</i>	(57.558)	(32.175)	(25.383)	78,89
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	(815.803)	(923.167)	107.364	(11,63)
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(10.910.084)	(12.803.655)	1.893.571	(14,79)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	14.997.284	12.991.303	2.005.981	15,44
Pendapatan Operasional Lainnya				
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	965.441	852.953	112.488	13,19
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	431.591	304.810	126.781	41,59
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	(234.089)	76.734	(310.823)	(405,07)
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	(266.235)	818.679	(1.084.914)	(132,52)
(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	(64.931)	(135.338)	70.407	(52,02)
(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	55.045	(18.778)	73.823	(393,14)
Lain-lain	822.775	463.507	359.268	77,51
Total Pendapatan Operasional Lainnya	1.709.597	2.362.567	(652.970)	(27,64)
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(4.017.378)	(3.627.477)	(389.901)	10,75
Pembalikan (Penyisihan) Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	(1.075)	2.845	(3.920)	(137,79%)
Beban Operasional Lainnya				
Umum dan administrasi	(3.754.028)	(3.358.846)	(395.182)	11,77
Gaji dan tunjangan karyawan	(4.190.298)	(3.782.925)	(407.373)	10,77
Premi program penjaminan Pemerintah	(599.991)	(619.667)	19.676	(3,18)
Lain-lain	(329.308)	(930.968)	601.660	(64,63)
Total Beban Operasional Lainnya	(8.873.625)	(8.692.406)	(181.219)	2,08
LABA OPERASIONAL	3.814.803	3.036.832	777.971	25,62
BEBAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	60.887	(43.512)	104.399	(239,93)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.875.690	2.993.320	882.370	29,48
BEBAN PAJAK	(830.617)	(617.093)	(213.524)	34,60
LABA TAHUN BERJALAN	3.045.073	2.376.227	668.846	28,15
Pendapatan Komprehensif Lain:				
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Revaluasi Aset Tetap	200.574	-	200.574	100,00
Pengukuran kembali program imbalan pasti	59.872	75.005	(15.133)	(20,18)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(11.376)	(1.484)	(9.892)	666,58
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(40.883)	(18.744)	(22.139)	118,11
(Kerugian) keuntungan neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai dan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.576.967)	(1.259.616)	(317.351)	25,19
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	307.463	247.414	60.049	24,27
Total laba komprehensif tahun berjalan	1.983.756	1.418.802	564.954	39,82
LABA PER SAHAM				
Dasar (nilai penuh)	288	224	64	28,57

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam triliun Rupiah)



Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto

Jumlah Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil tahun 2022 adalah sebesar Rp19,99 triliun, meningkat 15,44% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp12,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan bagi hasil dan margin unit syariah.

Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus

Jumlah Beban Bunga dan Bagi Hasil tahun 2022 adalah sebesar Rp10,91 triliun, menurun 14,79% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp12,80 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh strategi Bank dalam merekomposisi suku bunga dana pihak ketiga dengan fokus pada dana-dana murah dan sustain, hak pihak ketiga atas bagi hasil *mudharabah* dan beban pendanaan lainnya

Pendapatan Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp1,71 triliun, menurun 27,64% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp2,36 triliun. Penurunan terutama disebabkan oleh adanya kerugian dari penjualan efek-efek neto sebesar Rp234 miliar dan kerugian dari penjualan obligasi pemerintah sebesar Rp266 miliar.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Aset Keuangan

Jumlah Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Aset Keuangan 2022 adalah sebesar Rp4,02 triliun, meningkat 10,75% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp3,63 triliun. Peningkatan tersebut terutama merupakan strategi perseroan dalam memperbesar cadangan kerugian penurunan nilai untuk mengantisipasi kenaikan risiko kredit.

Pembalikan (Penyisihan) Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi

Jumlah Penyisihan Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi 2022 adalah sebesar Rp1,08 miliar, berbanding terbalik dibandingkan dengan tahun 2021 yang mengalami pembalikan sebesar Rp2,85 miliar. Peningkatan penyisihan tersebut disebabkan oleh kenaikan kelonggaran tarik kredit/pembiayaan atau LC SKBDN yang belum jatuh tempo.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya tahun 2022 sebesar Rp8,87 triliun, meningkat 2,08% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp8,69 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan gaji dan tunjangan karyawan serta beban umum dan administrasi berupa kenaikan beban promosi, beban penyusutan dan amortisasi, pendidikan dan pelatihan dan beban pemeliharaan dan perbaikan.

Laba Operasional

Laba operasional tahun 2022 sebesar Rp3,81 triliun, meningkat 25,62% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp3,04 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil serta penurunan beban bunga, bagi hasil dan bonus.

Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto

Pada tahun 2022, Perseroan membukukan pendapatan bukan operasional – neto tahun 2022 sebesar Rp60,89 miliar, berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan beban bukan operasional - neto sebesar Rp43,51 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya keuntungan dari jual beli mata uang asing.

Laba Sebelum Beban Pajak

Jumlah Laba Sebelum Beban Pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp3,88 triliun, meningkat 29,48% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp2,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil *Mudharabah*.

Beban Pajak

Jumlah Beban Pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp830,62 miliar, meningkat 34,60% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp617,09 miliar. Peningkatan tersebut terutama sejalan dengan peningkatan laba sebelum pajak.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah Laba Tahun Berjalan tahun 2022 adalah sebesar Rp3,05 triliun, meningkat 28,15% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp2,38 triliun. Peningkatan tersebut terutama

disebabkan oleh penurunan beban bunga perseroan sebagai hasil dari strategi Perseroan untuk melakukan rekomposisi Dana Pihak ketiga dengan memperbesar porsi CASA dari 44,30% pada tahun 2021 menjadi sebesar 48,52% pada tahun 2022. Selain hal tersebut, Perseroan melakukan *repricing* Dana Pihak Ketiga jangka panjang (Deposito) dengan *pricing* yang lebih rendah, hal tersebut mendorong penurunan *cost of fund* Dana Pihak Ketiga dari 3,13% pada tahun 2021 menjadi 2,60% pada tahun 2022.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2022 adalah sebesar (Rp1,06) triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar (Rp957,43) miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh kerugian neto yang belum direalisasikan atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2022 adalah sebesar Rp1,98 triliun, meningkat 39,82% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp1,42 triliun. Peningkatan tersebut terutama karena adanya surplus revaluasi aset tetap.

Laba Per Saham

Jumlah Laba Per Saham Dasar tahun 2022 adalah sebesar Rp288, meningkat 28,57% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp224. Peningkatan tersebut dipengaruhi peningkatan laba per saham, merupakan hasil dari strategi korporasi (*corporate plan*) yang dijalankan sejak tahun 2021, perbaikan dari sisi kualitas bisnis dan pengembangan bisnis ke area baru, mendorong Perseroan dapat meningkatkan laba bersih yang berdampak pada peningkatan laba per saham.

Laporan Arus Kas

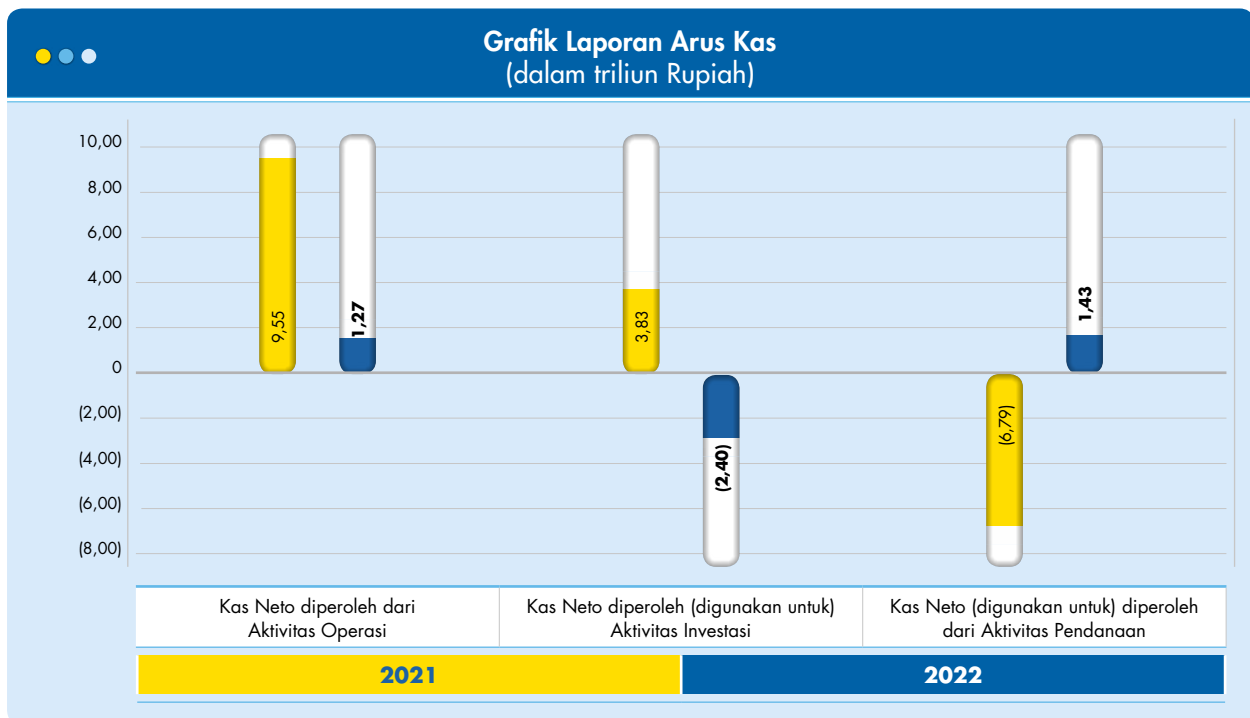
Tabel Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITASI OPERASI				
Penerimaan bunga, bagi hasil dan marjin	24.331.326	22.427.061	1.904.265	8,49
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	503.307	362.436	140.871	38,87
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(10.775.222)	(13.027.787)	2.252.565	(17,29)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.001.324)	(820.461)	(180.863)	22,04
Beban operasional lainnya - neto	(6.896.183)	(5.927.136)	(969.047)	16,35
Beban bukan operasional lainnya - neto	13.828	(27.932)	41.760	(149,51)
Penerimaan atas surat ketetapan pajak	402.428	-	-	-

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	6.578.160	2.986.181	3.591.979	120,29
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				
Penempatan pada bank lain	-	947.105	(947.105)	(100,00)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(104.885)	849.641	(954.526)	(112,34)
Obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi	(4.955.939)	4.842.769	(9.798.708)	(202,34)
Tagihan akseptasi	33.578	(258.069)	291.647	(113,01)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	(26.318.471)	(16.988.247)	(9.330.224)	54,92
Aset lain-lain	(196.503)	1.241.584	(1.438.087)	(115,83)
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	(466.852)	(1.120.009)	653.157	(58,32)
Simpanan dari nasabah				
Giro	31.538.044	4.762.109	26.775.935	562,27
Giro Wadiah	3.268.857	2.270.858	997.999	43,95
Tabungan	(10.617.072)	8.099.264	(18.716.336)	(231,09)
Tabungan Wadiah	43.479	245.030	(201.551)	(82,26)
Deposito berjangka	(322.562)	(1.338.019)	1.015.457	(75,89)
Simpanan dari bank lain	70.400	36.127	34.273	94,87
Liabilitas akseptasi	(33.578)	258.069	(291.647)	(113,01)
Liabilitas lain-lain	654.214	(206.114)	860.328	(417,40)
Dana syariah temporer	2.094.203	2.923.653	(829.450)	(28,37)
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.265.073	9.551.932	(8.286.859)	(86,76)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek biaya perolehan diamortisasi	199.964	-	199.964	100,00
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(1.042.464)	(415.473)	(626.991)	150,91
Penurunan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	381.580	330.249	51.331	15,54
Penurunan (kenaikan) obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.714.402	10.722.233	(5.007.831)	(46,71)
Pembelian obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi	(7.816.426)	(5.922.417)	(1.894.009)	31,98
Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	(236.767)	236.767	(100,00)
Penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	163.410	-	163.410	100,00
Pembelian efek-efek yang dibeli Dengan janji dijual kembali	-	(643.370)	643.370	(100,00)
(Kenaikan) Penurunan efek-efek tersedia untuk dijual	-	-	-	-
Pembelian obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-
Pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-
Kas Neto diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(2.399.534)	3.834.455	(6.233.989)	(162,58)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	1.541.330	10.186	1.531.144	15.031,85
Pembayaran atas surat-surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo	(5.263.000)	(3.455.000)	(1.808.000)	52,33
Penerimaan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	592.326	1.716.191	(1.123.865)	(65,49)
Pembayaran atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali jatuh tempo	(592.326)	(1.716.191)	1.123.865	(65,49)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pembayaran dividen	(237.624)	-	(237.624)	(100,00)
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	11.814.826	6.455.429	5.359.397	83,02
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(9.095.884)	(8.204.691)	(891.193)	10,86
Penerimaan dari efek-efek subordinasi	-	1.500.000	(1.500.000)	(100,00)
Pembayaran liabilitas sewa	(84.983)	(99.959)	14.976	(14,98)
Pembayaran atas pinjaman dan efek-efek subordinasi jatuh tempo	-	(3.000.000)	3.000.000	(100,00)
Dana Setoran Modal	2.756.575	-	2.756.575	100,00
Kas Neto (digunakan untuk) diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.431.240	(6.794.035)	8.225.275	121,07
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	296.779	6.592.352	(6.295.573)	(95,50)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	41.229.907	34.637.555	6.592.352	19,03
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	41.526.686	41.229.907	296.779	0,72



Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2022 adalah sebesar Rp1,26 triliun, menurun 86,76% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp9,55 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan arus kas dari obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi dan tabungan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi tahun 2022 adalah sebesar (Rp2,40) triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp3,83 triliun. Penurunan Kas Neto dari aktivitas Investasi tahun 2022 tersebut disebabkan oleh penurunan obligasi Pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan adanya pembelian obligasi Pemerintah.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan tahun 2022 adalah sebesar Rp1,43 triliun dan pada tahun 2021 sebesar (Rp6,79 triliun). Kenaikan Kas neto dari Aktivitas

Pendanaan tahun 2022 sebagian besar adalah transaksi penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan dan bertambahnya dana setoran modal.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang tercermin dari likuiditas dan solvabilitas Bank. Berkenaan dengan obligasi yang diterbitkan, kemampuan membayar utang tercermin dari lancarnya pembayaran bunga dan pemingkatan efek yang diterbitkan.

Kemampuan Perseroan membayar kewajiban atau utang dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi parameter bagi Perseroan dalam menghitung kemampuan Perseroan menyediakan cadangan likuiditas.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Kemampuan membayar utang jangka pendek salah satunya dapat diketahui melalui rasio likuiditas. Perseroan menggunakan beberapa parameter likuiditas yaitu Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) serta Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Dan Giro Wajib Minimum (GWM)

Salah satu parameter utama dalam rasio likuiditas adalah pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM). Perseroan menjaga GWM Utama dan GWM Sekunder yang pada tahun 2018 telah berubah menjadi Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank Umum dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan.

Hal tersebut berdasarkan PADG Nomor 22/11/PADG/2020 Perihal Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/17/PBI/2020 Perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel Rasio PLM dan GWM

(dalam %)

Kategori	Mata Uang	2022	2021	Kenaikan/Penurunan
Konvensional	Rupiah:			
	Utama (GWM)	8,28	3,55	4,73
	PLM	16,17	14,61	1,56
	Dolar AS	4,13	6,24	(2,11)
Syariah	GWM Rupiah	7,76	3,70	4,06

Rasio GWM konvensional dalam mata uang rupiah tahun 2022 mencapai 8,28%, mengalami kenaikan 4,73% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,55%. Peningkatan rasio GWM dikarenakan adanya perubahan pemenuhan GWM yang dilakukan oleh regulator, yaitu berdasarkan PADG Nomor 24/8/PADG/2022 perihal Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Giro Wajib Minimum untuk UUS berdasarkan ketentuan adalah sebesar 7,5%, sedangkan GWM yang harus dijaga oleh Bank Umum Konvensional adalah sebesar 9%. Perseroan dapat mencapai target pertumbuhan kredit sektor prioritas, Perseroan mendapatkan insentif GWM dari bank Indonesia sebesar 0,9%, sehingga kewajiban pemenuhan minimal GWM adalah 8,1%.

Demikian pula dengan rasio PLM yang meningkat 1,56% menjadi 16,17% di tahun 2022. Hal tersebut antara lain dipengaruhi peningkatan posisi surat berharga yang termasuk kategori surat berharga yang diperhitungkan dalam ketentuan PLM. Sedangkan penurunan posisi GWM valas dilakukan untuk mengoptimalkan excess likuiditas valas dalam rangka peningkatan pendapatan yang menyebabkan GWM valas menurun 2,11% dari 6,24% di tahun 2021 menjadi 4,13% di tahun 2022.

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

RIM merupakan bentuk penguatan dari *Loan to Funding Ratio* (LFR). RIM adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain ditambahkan surat berharga yang dimiliki, terhadap:

1. Dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.
2. Surat-surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018, Perbankan harus menjaga rasio RIM sebesar 84% sampai 94%. Pada tahun 2022, RIM Perseroan adalah sebesar 85,76%, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 84,40%.

Perseroan juga mengelola cadangan likuiditas dalam bentuk *High Quality Liquid Asset (HQLA)* yang juga menjadi komponen likuiditas, yang ditetapkan dalam jumlah optimal dalam rentang di atas batas minimum HQLA setiap hari sebagai pendukung kebutuhan likuiditas Perseroan dan pemeliharaan GWM serta PLM yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Posisi *secondary reserve* Perseroan selalu terjaga di atas batas *minimum secondary reserve* selama tahun 2022.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR merupakan salah satu parameter untuk mengukur rasio likuiditas yang sehat. Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga terhadap dana pihak ketiga (simpanan nasabah). LDR Perseroan di tahun 2022 sebesar 92,65%, turun 0,21 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 92,86%.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek-efek yang diterbitkan Bank yaitu Obligasi. Efek-efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkat guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Rasio permodalan adalah salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur rasio solvabilitas. Sesuai dengan komitmennya untuk menjalankan bisnis perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, Perseroan memastikan Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* mampu memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/CAR yang ditetapkan untuk bank dengan profil risiko "2" adalah sebesar 9,40%. Jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti (*Tier I*) dan Modal Pelengkap (*Tier II*).

Jumlah modal Perseroan di tahun 2022 mencapai Rp28,17 triliun terdiri dari modal inti dan pelengkap masing-masing sebesar Rp22,53 triliun dan Rp5,64 triliun, sedangkan untuk tahun 2021 jumlah modal mencapai Rp25,71 triliun dengan modal inti dan pelengkap masing-masing senilai Rp18,53 triliun dan Rp7,17 triliun. Jumlah ATMR Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp139,63 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp134,34 triliun. Rasio CAR tahun 2022 adalah sebesar 20,17% lebih tinggi dibandingkan dengan rasio CAR tahun 2021 sebesar 19,14%.

sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efeknya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek yang diterbitkan

Keterangan	Peringkat	
	2022	2021
BBTN Berkelanjutan I Tahap II 2013	AA(idn)	idAA+
BBTN Berkelanjutan II Tahap I 2015 Seri D	AA(idn)	idAA+
BBTN Berkelanjutan III Tahap I 2017 Seri C	AA(idn)	idAA+
BBTN Berkelanjutan III Tahap I 2017 Seri D	AA(idn)	idAA+
BBTN Berkelanjutan III Tahap II 2019 Seri C	AA(idn)	idAA+
Junior Global Bond Bank BTN (USD)	Ba3	Ba3
BBTN Berkelanjutan IV Tahap I 2020 Seri B	AA(idn)	idAA+
BBTN Berkelanjutan IV Tahap I 2020 Seri C	AA(idn)	idAA+
BBTN Berkelanjutan IV Tahap II 2022 Seri A	AA(idn)	-
BBTN Berkelanjutan IV Tahap II 2022 Seri B	AA(idn)	-

Catatan :

- Rating efek-efek dalam negeri yang diterbitkan di tahun 2021 menggunakan rating dari Pefindo.
- Rating efek-efek dalam negeri yang diterbitkan di tahun 2022 menggunakan rating dari Fitch Ratings Indonesia.
- Rating Junior Global Bond Bank BTN (USD) yang diterbitkan di tahun 2020 menggunakan rating dari Moody's

Tabel Arti Peringkat Efek

Lembaga Pemerikat	Peringkat	Arti Peringkat
Pefindo	idAA+	Obligor dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan terhadap obligor Indonesia lainnya. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.
Moodys	Ba3	Emiten dengan peringkat Ba memiliki <i>kekuatan finansial intrinsic</i> spekulatif, atau mandiri dan tunduk pada risiko kredit yang substansial apabila tidak ada kemungkinan dukungan dari afiliasi atau Pemerintah.
Fitch Ratings Indonesia	AA	Peringkat Nasional 'AA' menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama. Risiko gagal bayar yang melekat hanya sedikit berbeda dari emiten atau obligasi dengan peringkat tertinggi di negara tersebut.

Rasio Keuangan Lain

Untuk mengukur profitabilitas dan efisiensi kinerja Perseroan, rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh perbankan adalah Laba sebelum pajak terhadap Aset atau *Return On Assets* (RoA), Laba setelah pajak terhadap Ekuitas atau *Return On Equity* (RoE), Marjin Bunga Bersih atau *Net Interest Margin* (NIM) dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Tabel Rasio Keuangan Lain

(dalam %)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
<i>Return On Assets</i> (RoA)	1,02	0,81	0,21
<i>Return On Equity</i> (RoE)	16,42	13,64	2,78
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	4,40	3,99	0,41
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	86,00	89,28	(3,28)

Pada tahun 2022, nilai ROA, ROE dan NIM masing-masing adalah 1,02%, 16,42% dan 4,40% menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persentase *cost of fund* atau beban bunga dana pihak ketiga Perseroan yang pada akhirnya ikut mendorong peningkatan laba bersih di tahun 2022 sebesar Rp3,05 triliun.

Nilai BOPO tahun 2022 sebesar 86,00% menurun sebesar 3,28% dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban bunga yang turun signifikan di tahun 2022 sebagai strategi rekomposisi Dana Pihak Ketiga Perseroan dan *Repricing* terhadap Dana Pihak Ketiga Jangka Panjang yang jatuh tempo.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat Kolektibilitas Piutang bank dapat dilihat dari nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah atau macet dari seluruh kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Semakin kecil nilai NPL, maka *performance* Bank dalam kolektibilitas piutang semakin baik dan menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Tabel Kolektibilitas Piutang

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022		2021	
	Tanpa Segmen Syariah	Dengan Segmen Syariah	Tanpa Segmen Syariah	Dengan Segmen Syariah
Jumlah Kredit/ Pembiayaan yang Diberikan	266.657.565	298.281.704	247.285.433	274.835.290
Performing Loan (PL)	257.633.126	288.211.404	238.296.386	264.656.248
Lancar	239.577.162	268.076.929	227.581.061	252.244.116
Dalam Perhatian Khusus	18.055.964	20.134.475	10.715.325	12.412.132
Non Performing Loan (NPL)	9.024.439	10.070.300	8.989.047	10.179.042
Kurang Lancar	433.219	580.216	153.835	221.614

Uraian	2022		2021	
	Tanpa Segmen Syariah	Dengan Segmen Syariah	Tanpa Segmen Syariah	Dengan Segmen Syariah
Diragukan	793.609	887.982	434.636	484.461
Macet	7.797.611	8.602.102	8.400.576	9.472.967
PL	96,62%	96,62%	96,36%	96,30%
NPL Gross	3,38%	3,38%	3,64%	3,70%
NPL Net	1,48%	1,32%	1,27%	1,20%

NPL Gross tahun 2022 adalah sebesar 3,38%, membaik 0,33% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 3,70%. Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan dari penyaluran kredit yang diberikan dan perbaikan kualitas kredit dari NPL menjadi PL.

Tabel Hapus Buku Kredit Macet

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022		2021	
	Jumlah Debitur	Nilai Hapus Buku	Jumlah Debitur	Nilai Hapus Buku
Konvensional	8.196	2.497.801	6.736	1.802.067
Syariah	1.246	374.232	1.001	467.029
Jumlah	9.442	2.872.033	7.737	2.269.096

Suku Bunga Dana

Informasi suku bunga produk deposito, tabungan dan giro Bank per 31 Desember tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel Suku Bunga Tabungan Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga Ritel	Suku Bunga Lembaga
Tabungan Investa	Sampai dengan Rp1 juta	0,00%	0,00%
	> Rp1 juta - Rp100 juta	1,00%	1,00%
	> Rp100 juta - Rp1 miliar	2,40%	2,25%
	> Rp1 miliar - Rp2 miliar	3,25%	3,15%
	> Rp2 miliar - Rp5 miliar	3,50%	3,30%
	> Rp5 miliar - Rp10 miliar	4,25%	3,55%
	> Rp10 miliar	4,25%	4,00%

Tabel Suku Bunga Tabungan Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Batara	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - ≤ Rp50 juta	0,10%
	> Rp50 juta - ≤ Rp500 juta	0,10%
	> Rp500 juta - ≤ Rp1 miliar	0,50%
	> Rp1 miliar - ≤ Rp2 miliar	1,00%
	> Rp2 miliar	1,00%

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Bisnis	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - < Rp50 juta	0,50%
	≥ Rp50 juta - < Rp500 juta	1,00%
	≥ Rp500 juta - < Rp1 miliar	1,25%
	≥ Rp1 miliar	1,75%
Tabungan BTN Prima	≤ Rp5 juta	0,00%
	> Rp5 juta - Rp10 juta	0,00%
	> Rp10 juta - Rp100 juta	0,25%
	> Rp100 juta - Rp500 juta	0,50%
	> Rp500 juta - Rp2 miliar	0,75%
	> Rp2 miliar - Rp5 miliar	1,00%
	> Rp5 miliar	1,25%
Tabungan BTN Junior	≤ Rp50 rb	0,00%
	> Rp50 rb	0,50%
TabunganKu	Rp0 - Rp500 ribu	0,00%
	> Rp500 ribu - Rp1 juta	0,10%
	> Rp1 juta	0,25%
Tabungan Simuda Rumahku	Sampai dengan Rp10 juta	1,00%
	> Rp10 juta - Rp25 juta	1,15%
	> Rp25 juta - Rp50 juta	1,25%
	> Rp50 juta - Rp100 juta	1,35%
	> Rp100 juta - Rp250 juta	1,50%
	> Rp250 juta	2,00%
Tabungan BTN Siap!	< Rp1 juta - Rp10 juta	1,00%
	> Rp10 juta - Rp25 juta	1,15%
	> Rp25 juta - Rp50 juta	1,25%
	> Rp50 juta - Rp100 juta	1,35%
	> Rp100 juta - Rp250 juta	1,50%
	> Rp250 juta	2,00%
Tabungan BTN e'BataraPos	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - Rp50 juta	0,10%
	> Rp50 juta - Rp500 juta	0,10%
	> Rp500 juta - Rp1 miliar	0,50%
	> Rp1 miliar	1,00%
Tabanas Batara Kantor Pos		0,00%

Tabel Suku Bunga Giro Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Giro Rupiah	≤ Rp10 juta	0,00%
	> Rp10 juta - Rp100 juta	0,25%
	> Rp100 juta - Rp500 juta	0,75%
	> Rp500 juta - Rp1 miliar	1,00%
	> Rp1 miliar	1,25%

Tabel Suku Bunga Deposito Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)						
		1	2	3	4	6	12	24
Deposito Rupiah	< Rp100 juta	2,35%	2,50%	2,75%	2,75%	3,00%	3,00%	3,00%
	≥ Rp100 juta - < Rp500 juta	2,40%	2,50%	3,00%	3,00%	3,15%	3,15%	3,15%
	≥ Rp500 juta - ≤ Rp2 miliar	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%	3,15%	3,15%	3,15%
	> Rp2 miliar	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%	3,15%	3,15%	3,15%

Tabel Suku Bunga Tabungan Valas

Jenis Produk	USD		SGD		AUD / CNY		JPY	
	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Felas	< USD100.000	0,15%	All tiering	0,10%	All tiering	0,05%	All tiering	0,00%

Tabel Suku Bunga Deposito Valas

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)					
		1	3	4	6	12	24
Deposito USD	Seluruh strata						0,20%
Deposito SGD	Seluruh strata						0,10%
Deposito AUD/CNY	Seluruh strata						0,10%
Deposito JPY	Seluruh strata						0,00%

Tabel Suku Bunga Giro Valas

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Giro Valas (USD)	Sampai dengan USD100.000	0,00%
	> USD100.000	0,10%

Suku Bunga Dasar Kredit

Perseroan secara berkala memperbaharui Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) atau *Prime Lending Rate* sesuai dengan pergerakan suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia. SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada Nasabah. SBDK

belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Perseroan terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

(dalam %)

Uraian	SDBK Berdasarkan Segmen Bisnis				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2022	8,00	8,25	n/a	7,25	8,75
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2021	8,00	8,25	n/a	7,25	8,75
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2020	9,90	9,90	n/a	9,95	11,25
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2019	11,00	11,25	n/a	10,75	11,50

Analisis Kualitas Aset Produktif

Penilaian atau penyediaan aset produktif ditujukan untuk penyediaan dana dalam rangka memperoleh penghasilan, baik dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berikut adalah aset produktif Perseroan selama dua tahun terakhir:

Posisi Aset Produktif pada kategori lancar tahun 2022 adalah sebesar Rp380,16 triliun meningkat 1,95% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp372,88 triliun. Dengan demikian, Perseroan memiliki kualitas aset produktif yang baik.

Tabel Kualitas Aset Produktif

Uraian	2022					
	Lancar (L)	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)	Jumlah
Penempatan Pada Bank Lain	1.870.587	-	-	-	1.731	1.872.318
Tagihan Spot dan Derivatif/ Forward	103.939	-	-	-	-	103.939
Surat Berharga Yang Dimiliki	53.593.946	36.727	3.153	5.436	48.879	53.688.141
Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	-	-	-	-	-	-
Tagihan atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190
Tagihan Akseptasi	420.562	-	-	-	-	420.562
Kredit Yang Diberikan dan Pembiayaan Yang Diberikan	307.256.659	31.867.688	1.048.197	1.577.831	14.492.857	356.243.232
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Komitmen dan Kontinjensi	15.480.680	754.249	21.204	12.722	24.205	16.293.060
Agunan Yang Diambil Alih	-	-	-	-	77.591	77.591

Tabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset

Pos-Pos	2022				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Umum	Khusus
Penempatan Pada Bank Lain	16	-	1.731	18.706	1.731
Tagihan Spot dan Derivatif/ Forward	-	-	-	1.039	-



(dalam jutaan Rupiah)

2021						
Lancar (L)	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)	Jumlah	
1.195.453	-	-	-	1.682	1.197.135	
31.017	-	-	-	-	31.017	
48.199.016	42.076	4.474	7.284	60.353	48.313.203	
-	-	-	-	-	-	
1.598.325	-	-	-	-	1.598.325	
454.140	-	-	-	-	454.140	
303.197.225	19.693.638	371.587	838.556	15.345.966	339.446.972	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
18.210.325	1.063.308	14.053	19.162	67.784	19.374.632	
-	-	-	-	77.591	77.591	

(dalam jutaan Rupiah)

2021					
Stage 1	Stage 2	Stage 3	Umum	Khusus	
16	-	1.682	11.955	1.682	
-	-	-	310	-	

Pos-Pos	2022				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Umum	Khusus
Surat Berharga Yang Dimiliki	399	-	2.000	16.284	54.522
Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	-	-	-	-	-
Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	136	-	-	4.206	-
Kredit Yang Diberikan Dan Pembiayaan Yang Diberikan	3.014.067	3.525.156	9.135.700	2.663.032	9.246.776
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-
Komitmen dan Kontinjensi	4.719	-	-	16.711	37.712

Akselerasi Pertumbuhan Fee Based Income

Fee Based Income (FBI) juga menjadi sumber yang mendukung profitabilitas Perseroan. Pada tahun 2022, perolehan FBI Perseroan sebesar Rp2,27 triliun, dengan sumber utama yaitu pendapatan *treasury* Rp211 miliar, administrasi Rp758 miliar, *fee* dari transaksi dan layanan Rp482 miliar dan pendapatan lainnya (termasuk hapus buku) Rp642 miliar.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Perseroan pada perolehan FBI adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan transaksi *treasury* pada segmen *retail* dan meningkatkan transaksi *forex* melalui pembukaan *outlet money changer*, salah satunya yang berada pada Bandara Ngurah Rai, Denpasar.
2. Mengoptimalkan pendapatan administrasi melalui peningkatan NoA dan layanan pada nasabah giro, tabungan, deposito dan kredit.
3. Pendapatan atas layanan yang diberikan (*payment point, card business, servicing fee* sekuritisasi aset, *transfer*, bank garansi, *save deposit box, bancassurance*, layanan syariah dan jasa perbankan).
4. Meningkatkan pendapatan lainnya dengan mengoptimalkan bisnis *mortgage* melalui *kick back* asuransi dan *fee* atas penilaian agunan.
5. Meningkatkan penjualan kredit hapus buku, melalui percepatan *asset sales* dengan kerja sama *investor*, litigasi dan penjualan melalui portal rumah murah.

Pertumbuhan Volume Transaksi Digital

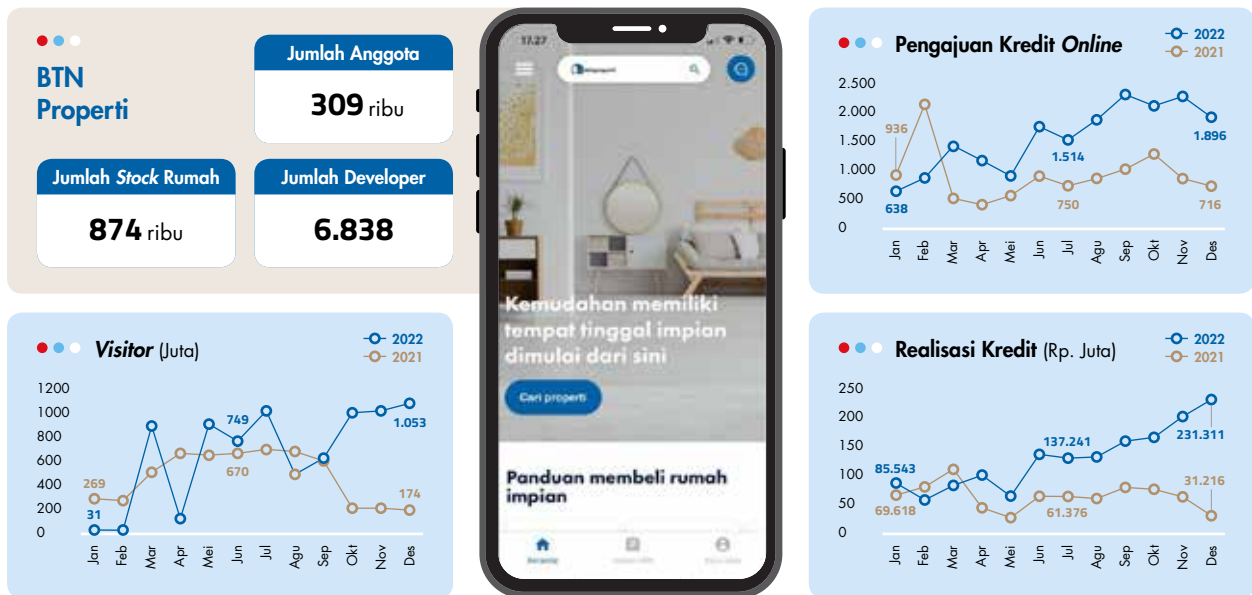
Untuk mengembangkan sumber pertumbuhan baru, Perseroan melakukan percepatan pengembangan layanan *digital* terutama yang menasar transaksi ritel melalui program akuisisi dan utilisasi BTN Mobile. Dengan program yang dijalankan, jumlah transaksi *digital banking* meningkat pesat yaitu menjadi 178 juta transaksi, atau naik 21% yoy. Sejalan dengan peningkatan jumlah transaksi, volume transaksi layanan digital juga naik menjadi Rp130 triliun, atau tumbuh 29% yoy. Dalam rangka mendukung pengembangan transaksi *digital*, pada tahun 2022,

Perseroan juga melakukan pengembangan akuisisi EDC. Pada tahun 2022, Perseroan memiliki 40.339 EDC dengan jumlah saldo *merchant* mencapai Rp1,1 triliun. Selain itu, Perseroan juga melakukan ekspansi aplikasi dan portal BTN Properti sebagai ekosistem perumahan digital. Pada tahun 2022, portal dan aplikasi BTN Properti memiliki 309 ribu anggota (*member*), 6.838 pengembang (*developer*) dan 874 ribu stok rumah yang siap menjadi KPR.

2021				
Stage 1	Stage 2	Stage 3	Umum	Khusus
-	-	2.000	21.187	66.770
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
623	-	-	4.541	-
2.468.071	2.309.833	9.657.856	2.508.843	9.333.279
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.005	1.639	-	18.093	53.165

Volume Transaksi Digital

BTN Properti sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk mendorong pertumbuhan bisnis



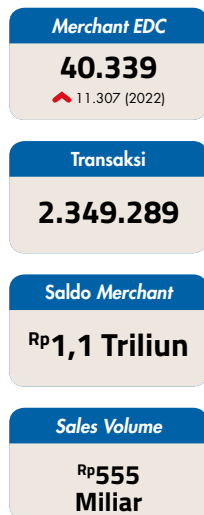
Pertumbuhan transaksi digital Perseroan didukung dengan adanya penggunaan *Mobile Banking*, *Internet Banking* dan Mesin *Electronic Data Capture (EDC)*



Volume Transaksi Digital

Yang didukung dengan Mobile Banking, Internet Banking dan Mesin EDC untuk mendukung transaksi bisnis

EDC



Digital Banking

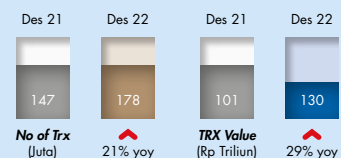
Number of Users
as of Des 22 (ribu)

Mobile Banking 2.231

Internet Banking 1.179

Digital Banking

Mobile and Internet



Struktur Permodalan Bank

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Dasar Penentuan Kebijakan

Rencana Permodalan yang disusun Perseroan mengacu kepada kajian perkembangan ekonomi terkini, di samping berdasarkan kepada penelaahan dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan. Direksi dalam menyusun Rencana Permodalan yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Perseroan merencanakan dan mengkaji bersama-sama secara rutin kebutuhan permodalan dengan didukung data-data analisis. Dalam perencanaan tersebut, Perseroan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko sehingga bisnis Perseroan sejalan dengan permodalan dan persyaratan likuiditas Perseroan.

Tujuan dari kebijakan manajemen atas permodalan adalah untuk memastikan permodalan yang dimiliki Perseroan kuat dan mampu menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha sekarang dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang. Di samping itu, penetapan kebijakan permodalan ditujukan untuk pemenuhan ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perseroan telah efisien.

Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua

atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal Perseroan terdiri dari:

1. Modal Inti, yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier - CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (agio, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan dan opsi saham) dan faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan PPA non produktif).
2. Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti) yang terdiri dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Jumlah modal inti Perseroan di tahun 2022 untuk adalah sebesar Rp22,53 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp18,53 triliun. Sedangkan jumlah modal pelengkap Perseroan di tahun 2022 sebesar Rp5,64 triliun lebih rendah dibandingkan modal pelengkap tahun 2021 sebesar Rp7,17 triliun.

Rincian Struktur Modal

Perseroan memiliki kemampuan permodalan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Berikut adalah rincian struktur permodalan Perseroan.

Tabel Rincian Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan /Penurunan	
			Nominal	Persentase
I. MODAL INTI (TIER 1)	22.533.407	18.531.612	4.001.795	21,59
1. Modal Inti Utama (Common Equity Tier - CET 1)	22.533.407	18.531.612	4.001.795	21,59
1.1 Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham <i>Treasury</i>)	5.295.000	5.295.000	-	0,00
1.2 Cadangan Tambahan Modal	20.153.835	15.667.272	4.486.563	28,64
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-	-	-
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(2.915.428)	(2.430.660)	(484.768)	19,94
2. Modal Inti Tambahan (Additional Tier - AT 1)	-	-	-	-
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	-	-	-
2.2 Agio/Disagio	-	-	-	-
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	-	-	-	-
II. MODAL PELENGKAP (TIER 2)	5.635.050	7.174.698	(1.539.648)	(21,46)
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan <i>Tier 2</i>	4.206.070	5.799.444	(1.593.374)	(27,47)
2. Agio/Disagio	-	-	-	-
3. Cadangan umum PPA aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	1.428.980	1.375.254	53.726	3,91
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-	-	-
JUMLAH MODAL	28.168.457	25.706.310	2.462.147	9,58
Aset Tertimbang Menurut Risiko				
ATMR untuk Risiko Kredit	114.318.357	110.020.335	4.298.022	3,91
ATMR untuk Risiko Pasar	1.373.299	2.406.567	(1.033.268)	(42,94)
ATMR untuk Risiko Operasional	23.938.858	21.913.665	2.025.193	9,24
Jumlah ATMR	139.630.514	134.340.567	5.289.947	3,94
Rasio KPMM sesuai Profil Risiko	9,40%	9,25%		
Rasio CET 1	16,13%	13,80%		
Rasio <i>Tier 1</i>	16,13%	13,80%		
Rasio <i>Tier 2</i>	4,04%	5,34%		
Rasio KPMM	20,17%	19,14%		

Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan, namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Pasal 25 ayat (1) b. Bank wajib menambahkan laporan informasi eksposur risiko dan permodalan pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

Risiko Kredit

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Perseroan dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite and Risk Tolerance*). Perseroan sedang melakukan proses *re-modeling Internal Credit Rating (ICR)* untuk kredit komersial dan korporasi dalam rangka melakukan *review* terhadap ICR agar dapat digunakan secara lebih akurat.

Perseroan saat ini juga sedang melakukan implementasi *Commercial Banking Center (CBC)*. CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Terhadap proses pengambilan keputusan pemberian kredit komersial, Perseroan juga melakukan pembentukan komite kredit melalui Rapat Komite Kredit. Selain itu telah dibentuk Departemen *Monitoring* pada *Commercial Banking Division* yang khusus memonitor eksposur kredit debitur besar (50 debitur inti) serta sudah diimplementasikan *Intelligence Credit Monitoring (iCremo)* yakni aplikasi untuk kredit komersial yang berfungsi untuk melakukan proses *monitoring* kredit komersial mencakup tiga pilar (Manajemen, Prospek Usaha dan Agunan). Sedangkan pada kredit konsumen, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem *iLoan* Konsumer yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model (CSM)*. Pengelolaan

debitur kredit konsumen Kolektibilitas 2 (dua) dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja *Consumer Collection, Recovery and Asset Sales* sedangkan untuk kredit komersial dilakukan oleh Satuan Kerja *Commercial Asset Management*. Dalam putusan kredit komersial terdiri dari *Commercial Risk* dan Unit Bisnis *selaku Risk Taking Unit* dan *first line* serta putusan kredit konsumen yang terdiri dari *Retail Risk Division (Regional Loan Processing Center)* dan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Perseroan telah melakukan uji coba mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum. Dalam rangka mengelola risiko kredit, Perseroan telah menerapkan *Four Eyes Principle* dengan memisahkan fungsi risiko kredit dan unit bisnis.

Uraian terkait pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah, Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak, Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi serta Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			
		Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*
1	Tagihan kepada Pemerintah	70.895.488	-	-	1.434.190
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	13.690.300	-	-	1
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.818.586	88.212	3.949	22
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	105.349.316	59.258.376	35.893.913	41.218.217
6	Kredit Beragun Properti Komersial	10.186.557	4.448.983	1.438.177	1.794.914
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	666.599	480.515	251.052	283.852
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.344.084	1.995.649	945.301	2.022.710
9	Tagihan kepada Korporasi	9.562.331	3.356.354	1.521.504	670.901
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.637.940	875.697	662.386	488.960
11	Aset Lainnya	5.998.451	2.471.875	768.995	1.169.363
	Jumlah	222.149.650	72.975.662	41.485.278	49.083.130

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua



(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2021				
	Jumlah	Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*	Jumlah
	72.329.678	71.691.037	-	-	-	71.691.037
	13.690.301	8.330.434	-	-	-	8.330.434
	-	-	-	-	-	-
	1.910.769	1.867.794	93.680	975	22	1.962.471
	241.719.822	92.902.902	57.089.077	35.433.374	36.136.628	221.561.981
	17.868.631	13.134.309	5.675.873	1.310.734	1.349.002	21.469.918
	1.682.018	702.666	531.741	267.330	311.118	1.812.855
	7.307.744	2.181.456	1.816.835	688.637	1.767.767	6.454.695
	15.111.090	10.229.908	2.243.225	1.023.595	722.014	14.218.742
	3.664.982	1.509.999	824.752	646.028	618.864	3.599.643
	10.408.685	7.033.195	1.947.291	943.778	587.840	10.512.104
	385.693.720	209.583.700	70.222.474	40.314.451	41.493.255	361.613.882

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022					Non Kontraktual	
		<1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	>5 tahun			
1	Tagihan kepada Pemerintah	63.014.308	3.804.916	4.435.399	1.075.055	-		
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.938.867	1.923.525	1.319.844	7.508.065	-		
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-		
4	Tagihan kepada Bank	1.434.412	397.077	79.280	-	-		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.808.220	6.875.512	15.847.782	216.188.307	-		
6	Kredit Beragun Properti Komersial	8.602.033	6.950.019	1.967.901	348.678	-		
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	159.460	125.153	417.149	980.256	-		
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.440.168	2.163.613	1.370.840	2.333.122	-		
9	Tagihan kepada Korporasi	5.108.151	4.481.809	1.721.739	3.799.390	-		
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.297.454	892.497	285.554	1.189.477	-		
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	10.408.685		
	Jumlah	86.803.073	27.614.121	27.445.487	233.422.351	10.408.685		

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**31 Desember 2022**

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	707.070	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	139.817	3.505.119	-	-	
6	Konstruksi	10.608.026	2.298.552	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	1.149.653	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	73.929	4.052.332	-	-	
10	Perantara Keuangan	45.607.636	2.050.455	-	1.257.077	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	505.982	-	-	

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2021					
	Jumlah	<1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	>5 tahun	Non Kontraktual	Jumlah
	72.329.678	62.457.918	3.771.320	4.396.236	1.065.563	-	71.691.037
	13.690.301	1.788.276	1.170.449	803.114	4.568.595	-	8.330.434
	-	-	-	-	-	-	-
	1.910.769	1.473.225	407.821	81.425	-	-	1.962.471
	241.719.822	2.574.033	6.302.140	14.526.181	198.159.627	-	221.561.981
	17.868.631	10.335.708	8.350.742	2.364.517	418.951	-	21.469.918
	1.682.018	171.864	134.888	449.597	1.056.506	-	1.812.855
	7.307.744	1.272.054	1.911.050	1.210.819	2.060.772	-	6.454.695
	15.111.090	4.806.502	4.217.147	1.620.066	3.575.027	-	14.218.742
	3.664.982	1.274.323	876.586	280.463	1.168.271	-	3.599.643
	10.408.685	-	-	-	-	10.512.104	10.512.104
	385.693.720	86.153.903	27.142.143	25.732.418	212.073.312	10.512.104	361.613.882

(dalam jutaan Rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-	230.352	912	-	-
	-	44.672	-	23.945	37.778	19	-
	-	-	-	2.142	10.990	4.439	-
	-	-	-	49.224	658.421	353	-
	-	-	-	8.241	114.636	67	-
	-	17.779.288	-	385.273	5.277.802	1.772.817	-
	-	-	-	393.539	769.859	44.925	-
	-	-	-	40.357	449.968	32.013	-
	-	-	-	7.540	483.661	3.688	-
	-	-	-	392.518	637.355	267	-
	-	44.672	-	35.051	2.404.474	68.164	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	53.120	245.914	8.136	-
	-	-	-	16.297	56.586	274	-
	-	-	-	20.768	23.834	2.479	-

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	
20	Lainnya	15.193.200	128.208	-	653.692	
	Jumlah	72.329.678	13.690.301	-	1.910.769	

31 Desember 2021

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	118.981	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	1.695.813	-	-	
6	Konstruksi	-	1.509.527	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	382.844	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	4.020.207	-	-	
10	Perantara Keuangan	43.191.555	34.769	-	1.962.471	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	502.170	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	
20	Lainnya	28.499.482	66.123	-	-	
	Jumlah	71.691.037	8.330.434	-	1.962.471	

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-	20.677	6.243	2.802	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	34.389	498.657	2.703	-
	241.719.822	-	1.682.018	5.593.232	2.736.288	1.721.837	-
	-	-	-	1.078	697.714	-	10.408.685
	241.719.822	17.868.631	1.682.018	7.307.744	15.111.090	3.664.982	10.408.685

(dalam jutaan Rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-	209.070	1.133	-	-
	-	-	-	1.477	-	-	-
	-	-	-	3.281	1.846	6.273	-
	-	-	-	12.539	55.707	2.559	-
	-	-	-	7.208	67.374	825	-
	-	21.469.918	-	363.630	5.644.308	1.733.207	-
	-	-	-	267.832	3.320.871	71.629	-
	-	-	-	21.774	486.626	35.074	-
	-	-	-	3.857	230.357	3.029	-
	-	-	-	304.578	501.028	1.806	-
	-	-	-	29.788	1.947.789	83.988	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	35.092	207.471	6.781	-
	-	-	-	15.856	55.061	810	-
	-	-	-	6.461	21.346	13.949	-
	-	-	-	17.181	4.868	2.585	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	28.260	11.511	4.714	-
	221.561.981	-	1.812.855	5.125.722	1.661.446	1.632.414	-
	-	-	-	1.089	-	-	10.512.104
	221.561.981	21.469.918	1.812.855	6.454.695	14.218.742	3.599.643	10.512.104

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			
		Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*
1	Tagihan	200.995.545	96.070.121	47.281.062	48.752.870
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)	7.564.838	3.082.356	1.334.572	1.504.680
	a. Belum jatuh tempo	4.904.350	1.695.496	620.231	734.844
	b. Telah jatuh tempo	2.660.488	1.386.860	714.341	769.836
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	4.720.165	2.147.945	996.692	1.172.726
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	3.965.316	1.407.240	462.656	404.949
5	Tagihan yang dihapus buku	996.543	1.013.532	272.214	589.772

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2022				
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo		
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	166.351	156	28,83	81	25.364
2	Perikanan	29.068	55	-	-	18.792
3	Pertambangan dan Penggalian	62.986	370	5.700	5.798	420
4	Industri Pengolahan	604.090	960	6.036	6.207	1.587
5	Listrik, Gas dan Air	3.462.489	862	3.133	3.133	1.065
6	Konstruksi	39.139.058	3.819.669	3.445.780	4.800.058	3.368.432
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.834.499	39.813	58.925	80.588	31.489
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	506.597	240.091	87.788	94.036	240.193
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4.570.782	159.772	3.321	5.311	159.782
10	Perantara Keuangan	38.028.844	277	22	22	261.490
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.693.389	586.752	319.537	318.678	618.720
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	273.893	71.601	9.555	11.212	84.884
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.045.028	474	652	660	6.105
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	560.700	3.862	276	3.749	389
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	27.632	317	2.576	3.702.061	915.532

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2021				
	Jumlah	Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*	Jumlah
	393.099.598	211.837.134	72.326.759	41.228.147	42.809.057	368.201.097
	13.486.447	9.309.264	2.829.746	296.012	953.315	13.388.337
	7.954.922	6.229.563	2.105.778	54.483	331.813	8.721.637
	5.531.525	3.079.701	723.968	241.529	621.502	4.666.700
	9.037.529	5.129.735	1.610.238	237.370	861.636	7.838.979
	6.240.160	2.574.878	1.958.595	1.067.328	1.072.608	6.673.409
	2.872.060	838.766	649.262	237.618	535.853	2.261.499

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2021					
Tagihan yang Dihapus Buku	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku	
		Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
-	215.822	-	-	-	5.767	513	
214	9.835	-	-	-	581	552	
-	140.688	-	2.000	2.000	8.398	2.971	
15.073	95.007	-	20.872	20.872	4.517	13.614	
-	1.772.364	-	-	-	3.381	-	
845.151	33.541.981	6.928.427	2.449.759	5.152.500	2.682.646	804.745	
179.886	4.194.297	18.329	77.477	89.406	129.144	264.767	
39.647	769.792	276.318	131.268	430.219	48.645	2.814	
7.123	4.269.948	-	7.123	9.123	6.513	2.835	
7.122	46.209.211	-	4.384	4.384	210.965	19.035	
114.400	3.485.744	1.286.445	455.326	757.924	93.054	72.631	
-	-	-	-	-	-	-	
-	278.182	92.166	-	55.082	31.386	4.135	
-	88.755	23.650	-	9.808	17.739	4.288	
75.073	558.859	-	-	-	17.972	1.981	
1.374.956	27.406	-	-	-	3.280	-	

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2022				
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo		
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	438.627	2.992	392	320	3.794
19	Bukan Lapangan Usaha	238.391.712	2.809.797	1.456.815	5.615	393.912
20	Lainnya	59.263.855	217.100	130.990	-	108.209
	Jumlah	393.099.598	7.954.922	5.531.525	9.037.529	6.240.160

Tabel Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	8.336.777	6.174.981	6.924.778	6.141.366
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	2.968.511	1.070.996	2.667.577	973.479
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	2.968.511	1.070.996	2.667.577	973.479
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-	-	-

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat dan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

31 Desember 2022

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih				
		Lembaga Peringkat	Peringkat Jangka Panjang			
			Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+ (idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Peringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	112.332	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	337.913	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-

		31 Desember 2021					
Tagihan yang Dihapus Buku	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku	
		Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
-	-	-	-	-	-	-	
100	45.065	-	409	409	1.029	87	
144.114	234.946.446	96.302	1.518.082	1.307.252	3.336.084	1.066.531	
69.199	37.551.695	-	-	-	72.308	-	
2.872.060	368.201.097	8.721.637	4.666.700	7.838.979	6.673.409	2.261.499	

No.	Keterangan	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(2.275.374)	(596.686)	(1.764.492)	(502.627)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-	-	-
	Saldo Akhir CKPN	9.029.914	6.649.291	7.827.863	6.612.218

(dalam jutaan Rupiah)

Tagihan Bersih								
Peringkat Jangka Panjang			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Jumlah
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	F1 s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	kurang dari B3	p-1	p-2	p-3	Kurang dari p-3		
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d idA4	Kurang dari idA4		
23.543	-	-	-	-	-	-	70.871.945	70.895.488
-	-	-	-	-	-	-	13.577.969	13.690.301
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.572.856	1.910.769
-	-	-	-	-	-	-	241.719.822	241.719.822

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+ (idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-

31 Desember 2021

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+ (idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	60.396.404	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	137.452	134.864	116.893	115.888	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	841.263	156.303	100.000	45.393	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-

Tagihan Bersih									
Peringkat Jangka Panjang			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Jumlah	
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	F1 s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	kurang dari B3	p-1	p-2	p-3	Kurang dari p-3			
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d idA4	Kurang dari idA4			
-	-	-	-	-	-	-	-	17.850.675	17.850.675
-	-	-	-	-	-	-	-	1.682.018	1.682.018
-	-	-	-	-	-	-	-	7.304.129	7.304.129
-	-	-	-	-	-	-	-	14.024.660	14.024.660
-	-	-	-	-	-	-	-	3.664.982	3.664.982
-	-	-	-	-	-	-	-	10.408.685	10.408.685

Tagihan Bersih									
Peringkat Jangka Panjang			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Jumlah	
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	F1 s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	kurang dari B3	p-1	p-2	p-3	Kurang dari p-3			
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d idA4	Kurang dari idA4			
-	-	-	-	-	-	-	-	11.294.633	71.691.037
-	-	-	-	-	-	-	-	7.825.337	8.330.434
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	819.512	1.962.471
-	-	-	-	-	-	-	-	221.561.981	221.561.981
-	-	-	-	-	-	-	-	21.469.918	21.469.918
-	-	-	-	-	-	-	-	1.812.855	1.812.855
-	-	-	-	-	-	-	-	6.454.695	6.454.695
-	-	-	-	-	-	-	-	14.218.742	14.218.742
-	-	-	-	-	-	-	-	3.599.643	3.599.643
-	-	-	-	-	-	-	-	10.512.104	10.512.104

Sedangkan untuk Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Transaksi Derivatif *Over the Counter*

Perseroan tidak memiliki transaksi derivatif per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

2. Transaksi *Repo*

Uraian terkait Transaksi *Repo* dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel Transaksi Repo

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
		Nilai Wajar SB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

31 Desember 2022

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit				
		0%	20%	25%	35%	40%
A Eksposur Neraca						
1	Tagihan kepada Pemerintah	70.895.488	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	112.332	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	1.870.587	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	22.871.181	52.672.589	166.176.052	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	326.143	163.150	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	2.785.212	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	1.017.561	-	-	-
11	Aset Lainnya	1.661.534	-	-	-	-
	Jumlah Eksposur Neraca	75.668.376	26.034.811	52.672.589	166.176.052	-
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-

3. Transaksi Reverse Repo

Perseroan tidak memiliki transaksi Reverse Repo per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Tabel Transaksi Reverse Repo

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
		Nilai Wajar SB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah	1.434.190	-	1.434.190	-	1.598.325	-	1.598.325	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.434.190	-	1.434.190	-	1.598.325	-	1.598.325	-

Dalam rangka menurunkan eksposur risiko kredit, Perseroan melakukan *pre-screening* terhadap debitur, mewajibkan debitur memenuhi agunan yang dipersyaratkan, menganalisis dan mengevaluasi kelayakan kredit dan melakukan pengikatan kredit secara legal. Perseroan telah mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan area/wilayah geografis tempat mereka

beroperasi dan mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan sektor industri untuk melihat konsentrasi risiko kredit. Uraian terkait Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit dan Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit diuraikan sebagai berikut

(dalam jutaan Rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	13.577.969	-	-	-	-	6.811.451	630.059
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	40.182	-	-	-	-	394.208	36.464
	-	-	-	-	-	-	58.420.939	5.403.937
	-	-	-	17.850.675	-	-	17.236.491	1.594.375
	-	1.682.018	-	-	-	-	841.009	77.793
	-	-	6.814.836	-	-	-	5.143.757	475.798
	-	-	-	11.239.448	-	-	11.239.448	1.039.649
	-	-	-	485.354	2.162.068	-	3.931.967	363.707
	-	-	-	8.669.561	77.591	-	8.785.946	812.700
	-	15.300.168	6.814.836	38.245.038	2.239.658	-	112.805.216	10.434.483
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	Jumlah Eksposur TRA	-	-	-	-	-	
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan kepada Pemerintah	1.434.190	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
	Jumlah Counterparty Credit Risk	1.434.190	-	-	-	-	

31 Desember 2021

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan kepada Pemerintah	70.092.712	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	272.316	-	-	-	
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	1.823.512	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	140.436.881	30.762.371	50.362.730	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	919.493	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	271.233	134.919	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	1.373.441	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	754.104	-	-	-	
11	Aset Lainnya	1.539.578	-	-	-	-	
	Jumlah Eksposur Neraca	74.196.457	143.421.732	30.762.371	50.362.730	-	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	

	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	17.956	-	-	17.956	1.661
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	3.615	-	-	-	2.711	251
	-	-	-	1.086.430	-	-	1.086.430	100.495
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	3.615	1.104.386	-	-	1.107.098	102.407
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	8.058.117	-	-	-	-	3.913.789	362.025
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	138.961	-	-	-	-	195.271	18.063
	-	-	-	-	-	-	53.404.924	4.939.955
	-	-	-	20.535.846	-	-	20.535.845	1.899.566
	-	1.812.855	-	-	-	-	906.427	83.845
	-	-	6.046.385	-	-	-	4.561.773	421.964
	-	-	-	11.788.364	-	-	11.788.363	1.090.424
	-	-	-	784.131	2.061.408	-	4.027.064	372.503
	-	-	-	9.046.295	77.591	-	9.046.295	836.782
	-	10.009.933	6.046.385	42.154.637	2.138.999	-	108.379.752	10.025.127
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	14.580	-	-	14.580	1.349
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2.158	-	-	-	1.618	150

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	Jumlah Eksposur TRA	-	-	-	-	-	
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan kepada Pemerintah	1.598.325	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
	Jumlah Counterparty Credit Risk	1.598.325	-	-	-	-	

Tabel Tagihan Bersih dan Teknis Mitigasi Risiko Kredit per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin		
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit
A Eksposur Neraca					
1	Tagihan kepada Pemerintah	70.895.488	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	13.690.301	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.910.769	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	212.892.414	-	-	123.174.569
6	Kredit Beragun Properti Komersial	16.961.350	-	-	614.184
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.682.018	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.387.580	326.002	-	163.150
9	Tagihan kepada Korporasi	13.982.905	2.785.212	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3.423.227	-	-	887.571
11	Aset Lainnya	10.408.685	-	-	-
	Jumlah Eksposur Neraca	352.234.736	3.111.213	-	124.839.474
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	17.956	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.615	-	-	-

	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	1.056.939	-	-	1.056.939	97.767
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2.158	1.071.518	-	-	1.073.136	99.265
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2021						
	Lainnya	Bagian yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin				Bagian yang Tidak Dijamin
				Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
	-	70.895.488	70.092.712	-	-	-	-	70.092.712
	-	13.690.301	8.330.434	339.468	-	-	-	7.990.967
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.910.769	1.962.471	-	-	-	-	1.962.471
	-	89.717.845	221.561.981	-	-	142.293.733	-	79.268.249
	-	16.347.165	21.455.339	919.493	-	-	-	20.535.845
	-	1.682.018	1.812.855	-	-	-	-	1.812.855
	-	5.898.428	6.452.538	271.233	-	134.919	-	6.046.385
	-	11.197.694	13.161.804	1.373.441	-	-	-	11.788.363
	-	2.535.656	3.599.643	-	-	754.104	-	2.845.539
	-	10.408.685	10.512.103	-	-	-	-	10.512.103
	-	224.284.048	358.941.881	2.903.635	-	143.182.756	-	212.855.490
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	17.956	14.580	-	-	-	-	14.580
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3.615	2.158	-	-	-	-	2.158

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022				
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin			
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	
9	Tagihan kepada Korporasi	1.086.430	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	
	Jumlah Eksposur TRA	1.108.001	-	-	-	
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	1.434.190	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	
	Jumlah Counterparty Credit Risk	1.434.190	-	-	-	

Risiko Kredit: Sekuritisasi Aset

Tujuan Perseroan melakukan sekuritisasi adalah mentransformasikan aset yang tidak likuid menjadi aset yang likuid dalam bentuk surat berharga/*securities* yang dapat diperjualbelikan (disebut dengan *Asset Backed Securities* – ABS atau Efek Beragun Aset – EBA). Sekuritisasi Aset KPR dilakukan oleh Perseroan antara lain sebagai upaya untuk mitigasi *maturity mismatch*, alternatif sumber pendanaan KPR dan peningkatan *lending capacity*. Fungsi yang dijalankan oleh Perseroan dalam transaksi sekuritisasi adalah sebagai *Originator*, *Servicer* dan *Investor*.

Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah (kumpulan tagihan), Perseroan telah melakukan penjualan atas kumpulan tagihan kepada pihak ketiga (sekuritisasi KPR). Dengan demikian, Perseroan telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan kumpulan tagihan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pada tanggal efektif sekuritisasi Perseroan menghentikan pengakuan atas kumpulan tagihan tersebut. Uraian perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar adalah sebagai berikut:

Tabel Sekuritisasi Aset, Peringkat dan Lembaga Pemeringkat

No.	Transaksi Sekuritisasi	Nominal Total (Rp)	Nominal Class A (Rp)	Nominal Class M (Rp)	
1	KIK-EBA DBTN 05	Rp1.500.000.001.615	A1 = Rp723.500.000.000	-	
			A2 = Rp647.500.000.000	-	
2	EBA-SP SMF-BTN 02	Rp1.000.000.000.000	A1 = Rp400.000.000.000	-	
			A2 = Rp513.000.000.000	-	
3	EBA-SP SMF-BTN 03	Rp1.000.000.000.000	A1 = Rp200.000.000.000	-	
			A2 = Rp713.000.000.000	-	
4	EBA-SP SMF-BTN 04	Rp2.000.000.000.000	A1 = Rp700.000.000.000	-	
			A2 = Rp1.124.000.000.000	-	

			31 Desember 2021					
		Bagian yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin				Bagian yang Tidak Dijamin
Lainnya				Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
-	1.086.430		1.056.939	-	-	-	-	1.056.939
-	-		-	-	-	-	-	-
-	1.108.001		1.073.676	-	-	-	-	1.073.676
-	1.434.190		1.598.325	-	-	-	-	1.598.325
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	1.434.190		1.598.325	-	-	-	-	1.598.325

	Nominal Class B (Rp)	Tanggal Transaksi	Jatuh Tempo	Average Life (tahun)	Kupon Kelas A	Peringkat Pefindo
	Rp129.000.001.615	28 November 2014	7 September 2025	6,72	A1 = 10% A2 = 10,25%	idAAA
	Rp87.000.000.000	31 Oktober 2016	27 Juni 2027	7,05	A1 = 8,15% A1 = 8,75%	idAAA
	Rp87.000.000.000	28 April 2017	7 Juli 2029	7,78	A1 = 8,00% A2 = 8,40%	idAAA
	Rp176.000.000.000	28 Februari 2018	7 Mei 2029	7,03	A1 = 7,00% A2 = 7,50%	idAAA

No.	Transaksi Sekuritisasi	Nominal Total (Rp)	Nominal Class A (Rp)	Nominal Class M (Rp)	
5	EBA-SP SMF-BTN 05	Rp2.000.000.000.000	A1 = Rp574.000.000.000	-	
			A2 = Rp1.142.000.000.000	-	
				Rp24.000.000.000	
6	EBA-SP SMF-BTN 06	Rp631.000.543.015	Rp576.734.000.000	-	
7	EBA-SP SMF-BTN 07	Rp500.000.001.416	Rp452.500.000.000	-	
TOTAL		Rp8.631.000.546.046	Rp7.766.234.000.000	Rp24.000.000.000	

Tabel Transaksi Sekuritisasi

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2022			Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi
		Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo	
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal				
	Tagihan Beragun Rumah Tinggal	7.131.000	-	-	-
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung				
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua	-	-	-	-
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas				
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa	7.131.000	-	-	-
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostudian	-	-	-	-
6	Bank bertindak sebagai Pemodal	-	-	-	-
	a. <i>Senior tranche</i>				
	Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
	b. <i>Junior tranche</i>				
	Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-

Tabel Ringkasan Aktivitas Sekuritisasi - Perseroan Bertindak sebagai Kreditur Asal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Underlying Asset	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	7.131.000	-	8.131.000	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-

	Nominal Class B (Rp)	Tanggal Transaksi	Jatuh Tempo	Average Life (tahun)	Kupon Kelas A	Peringkat Pefindo
	Rp260.000.000.000	27 November 2019	7 Mei 2032	9,09	A1 = 8,50%	idAAA
A2 = 8,75%						
M = 10,40%					idA	
	Rp54.266.543.015	30 Desember 2020	7 Juli 2032	6,08	6,50%	idAAA
	Rp47.500.001.416	23 Desember 2022	7 Januari 2034	6,08	7,70%	idAAA
	Rp840.766.546.046					

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2022		31 Desember 2021					
ATMR	Pengurang Modal	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
211.180	-	8.131.000	-	-	-	253.847	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8.131.000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Underlying Asset	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	7.131.000	-	8.131.000	-

Tabel Eksposur Aset di Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	70.895.488	-	-	70.092.712	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	13.690.301	6.811.451	6.811.451	8.330.434	4.083.522	3.913.789
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.910.769	394.208	394.208	1.962.471	434.182	434.182
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	241.719.822	75.904.002	58.420.939	221.561.981	68.882.706	53.404.924
6	Kredit Beragun Properti Komersial	17.850.675	17.850.675	17.236.491	21.455.339	21.455.339	20.535.845
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.682.018	841.009	841.009	1.812.855	906.427	906.427
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	7.304.129	5.478.097	5.143.757	6.452.538	4.839.403	4.561.773
9	Tagihan kepada Korporasi	14.024.660	14.024.660	11.239.448	13.161.804	13.161.804	11.788.363
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3.664.982	4.747.246	3.931.967	3.599.643	4.633.018	4.027.064
11	Aset Lainnya	10.408.685	-	8.785.946	10.512.104	9.011.321	9.011.321
	Jumlah	383.151.528	126.051.347	112.805.216	358.941.881	127.407.723	108.583.688

Tabel Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	17.956	17.956	17.956	14.580	14.580	14.580
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.615	2.711	2.711	2.158	1.618	1.618
9	Tagihan kepada Korporasi	1.086.430	1.086.430	1.086.430	1.056.939	1.056.939	1.056.939
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.108.001	1.107.098	1.107.098	1.073.677	1.073.136	1.073.137

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	1.434.190	-	-	1.598.325	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.434.190	-	-	1.598.325	-	-

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*)

Perseroan tidak memiliki risiko kredit akibat kegagalan setelmen.

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK
1	<i>Delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	<i>Non-Delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-

Eksposur Sekuritisasi

Tabel Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	211.180	-	253.847
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	9.235
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
	Jumlah	-	211.180	-	263.082

Eksposur Kredit Derivatif

Tabel Eksposur Kredit Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>	-	194.864	-	100.428
	Jumlah	-	194.864	-	100.428

Jumlah Pengukuran Risiko Kredit

Tabel Pengukuran Risiko Kredit per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Jumlah ATMR Risiko Kredit	114.318.357	110.020.335
2	Jumlah Faktor Pengurang Modal	-	-

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Perseroan menggunakan perhitungan *Standard Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Perseroan dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Seluruh transaksi valas yang dilakukan oleh Perseroan adalah transaksi *spot*. Saat ini Perseroan belum melakukan transaksi valas yang bersifat derivatif. Dalam perhitungan KPMM, Perseroan menggunakan metode standar sebagaimana diatur dalam SEOJK No.38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Meskipun portofolio trading meningkat, ATMR untuk Risiko Pasar 31 Desember 2022 membaik dibandingkan posisi 31 Desember 2021. Perbaikan ini berasal dari strategi *shortening duration* surat berharga kategori trading yang semula dominan berada di zona 3 menjadi zona 1 sehingga bobot risikonya lebih rendah.

Uraian terkait Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1	Risiko Suku Bunga	76.147	951.841	153.938	1.924.228
	a. Risiko Spesifik	754	9.419	250	3.125
	b. Risiko Umum	75.394	942.422	153.688	1.921.103
2	Risiko Nilai Tukar	33.717	421.458	38.587	482.339
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-
	Jumlah	109.864	1.373.299	192.525	2.406.567

Ekspose Interest Rate In The Banking Book (IRRBB)

Interest Rate in The Banking Book (IRRBB) merupakan bagian dari risiko suku bunga dengan fokus pada dampak perubahan nilai ekonomis dari posisi *banking book* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas Perseroan. Dalam pengukuran dan perhitungan IRRBB, Perseroan menerapkan 6 (enam) jenis skenario *shock* suku bunga untuk perhitungan Δ EVE yaitu *parallel up*, *parallel down*, *steepener*,

flattener, *short rates up* dan *short rates down*. Sedangkan untuk perhitungan Δ NII menggunakan 2 (dua) skenario *shock* yaitu *parallel up* dan *parallel down*. Perseroan mengukur perubahan NII (Δ NII) sebagai penurunan maksimum dari NII saat terjadi skenario peningkatan atau penurunan suku bunga. Berikut hasil pemantauan manajemen risiko suku bunga Perseroan. Berikut hasil pemantauan manajemen risiko suku bunga Perseroan.

Tabel Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Skenario Shock Suku Bunga	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
		Δ EVE		Δ NII		Δ EVE		Δ NII	
		T	T-1	T	T-1	T	T-1	T	T-1
1	<i>Parallel up</i>	(172.121)	(593.740)	(2.405.885)	(3.070.534)	(1.359.938)	(932.026)	(3.096.966)	(3.100.007)
2	<i>Parallel down</i>	949.773	1.433.843	1.974.177	2.519.147	3.051.361	2.574.140	1.915.884	1.968.422
3	<i>Steepener</i>	(1.017.121)	(1.047.032)	-	-	(1.855.485)	(1.661.974)	-	-
4	<i>Flattener</i>	1.184.300	1.075.536	-	-	1.908.068	1.828.293	-	-
5	<i>Short rate up</i>	444.729	186.608	-	-	265.353	408.071	-	-
6	<i>Short rate down</i>	(1.110.090)	(814.659)	-	-	(960.136)	(1.053.255)	-	-
7	Nilai Maksimum Negatif (absolut)	1.110.090	1.047.032	2.405.885	3.070.534	1.855.485	1.661.974	3.096.966	3.100.007
8	Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Project Income</i> (untuk Δ NII)	22.563.440	18.215.462	13.701.657	13.701.657	18.567.874	17.969.556	11.787.718	11.739.344
	Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Project Income</i> (untuk Δ NII)	4,92%	5,75%	17,56%	22,41%	9,99%	9,25%	26,27%	26,41%

Berdasarkan portofolio Perseroan saat ini, apabila terjadi perubahan suku bunga sesuai dengan *skenario parallel shock* up sebesar \pm 400 bps akan berdampak terhadap perubahan pendapatan bunga dan beban bunga Perseroan sebesar 17,56% terhadap target NII Perseroan. Adapun potensi kerugian maksimum nilai ekonomis dari ekuitas yang dialami Perseroan apabila terjadi perubahan suku bunga jangka pendek menurun sesuai dengan *skenario short rate down* maka potensi kerugian maksimum terhadap Ekuitas Modal Inti

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perseroan sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional

merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko operasional.

Adapun jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tabel Profil Maturitas Rupiah

No	Pos-pos	31 Desember 2022						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
I. Neraca								
A. Aset								
1	Kas	1.645.839	1.645.839	-	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	37.769.892	37.769.892	-	-	-	-	-
	a. Giro	25.193.997	25.193.997	-	-	-	-	-
	b. SBI	-	-	-	-	-	-	-
	c. Lainnya	12.575.895	12.575.895	-	-	-	-	-
3	Penempatan pada bank lain	940.113	940.113	-	-	-	-	-
4	Surat Berharga	48.846.898	2.076.651	649.576	5.199.834	10.707.951	5.820.621	3.053.337
	a. SUN	47.420.225	2.061.104	649.576	4.893.523	10.705.307	5.818.547	2.869.890
	1) diperdagangkan	19.591.199	2.061.104	649.576	-	9.230.307	4.938.578	2.077.981
	2) tersedia untuk di jual	10.501.391	-	-	-	-	479.969	387.909
	3) dimiliki hingga jatuh tempo	17.327.635	-	-	4.893.523	1.475.000	400.000	404.000
	4) pinjaman yang diberikan pada piutang	-	-	-	-	-	-	-
	b. Surat Berharga Korporasi	1.426.673	15.547	-	306.311	2.645	2.074	183.447
	1) diperdagangkan	793.831	15.547	-	300.000	-	-	-
	2) tersedia untuk dijual	358.798	-	-	-	-	-	103.447
	3) dimiliki hingga jatuh tempo	274.044	-	-	6.311	2.645	2.074	80.000
	4) pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-	-	-	-
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-

(Tier 1) yang akan dialami Perseroan sebesar Rp1,11 triliun dan bila dibanding dengan total Modal Inti (Tier 1) sebesar 4,92% atau masih berada di bawah ketentuan limit OJK sebesar 15% dari modal inti (Tier 1). Perbaikan rasio ini berasal dari strategi *shortening duration* surat berharga *available for sale* (AFS/FVTOCI) yang disertai dengan peningkatan CASA dan peningkatan modal inti (Tier 1) sehingga eksposur risiko suku bunga dalam *banking book* menurun.

Uraian terkait risiko operasional dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Risiko Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam jutaan Rupiah)

Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
Pendekatan Indikator Dasar	12.767.391	1.915.109	23.938.858	11.687.288	1.753.093	21.913.665

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2021							
		Saldo	Jatuh Tempo						
> 12 bulan			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan	> 12 bulan
-	1.526.681	1.526.681	-	-	-	-	-	-	-
-	36.491.408	36.461.408	-	-	30.000	-	-	-	-
-	10.400.997	10.400.997	-	-	-	-	-	-	-
-	45.000	15.000	-	-	30.000	-	-	-	-
-	26.045.410	26.045.410	-	-	-	-	-	-	-
-	598.646	598.646	-	-	-	-	-	-	-
21.338.928	41.524.274	2.439.006	769.471	2.330.607	5.074.857	1.964.005	1.855.686	27.090.643	
20.422.278	39.850.251	2.439.006	769.471	2.312.536	5.009.349	1.929.361	1.414.338	25.976.191	
633.654	14.561.060	2.439.006	769.471	-	4.721.939	1.638.175	990.183	4.002.287	
9.633.512	15.836.540	-	-	-	-	50.733	133.246	15.652.561	
10.155.112	9.452.651	-	-	2.312.536	287.410	240.454	290.908	6.321.343	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
916.650	1.674.023	-	-	18.071	65.508	34.644	441.348	1.114.452	
478.284	688.946	-	-	-	19.054	-	-	669.892	
255.351	511.067	-	-	-	-	13.264	319.298	178.505	
183.014	474.010	-	-	18.071	46.454	21.379	122.050	266.056	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Pos-pos	31 Desember 2022						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
5	Kredit yang diberikan	297.112.950	518.823	220.263	1.851.732	1.964.883	3.176.293	6.913.958
	a. Belum Jatuh Tempo	294.073.082	199.615	220.263	1.851.732	1.779.526	3.011.912	5.865.243
	b. Sudah Jatuh Tempo	3.039.868	319.208	-	-	185.357	164.381	1.048.715
6	Tagihan lainnya	1.864.846	1.434.190	-	-	-	430.656	-
	a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1.434.190	1.434.190	-	-	-	-	-
	b. Lainnya	430.656	-	-	-	-	430.656	-
7	Penyertaan Saham	-	-	-	-	-	-	-
8	Lain-lain	15.615.495	-	-	15.615.495	-	-	-
	Jumlah Aset	403.796.033	44.385.508	869.838	22.667.061	12.672.834	9.427.570	9.967.295
B.	Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	318.997.390	117.850.608	21.122.406	50.806.883	40.988.821	24.461.778	9.268.938
	a. Giro	111.715.040	68.853.890	-	-	-	-	-
	b. Tabungan	37.273.401	37.273.401	-	-	-	-	-
	c. Simpanan Berjangka	170.008.949	11.723.317	21.122.406	50.806.883	40.988.821	24.461.778	9.268.938
	1) Deposito on call	1.085.246	543.905	157.000	384.341	-	-	-
	2) Deposito Berjangka	168.923.703	11.179.412	20.965.406	50.422.542	40.988.821	24.461.778	9.268.938
	3) Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	180.166	140.138	-	37.728	2.300	-	-
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	8.652.260	-	-	-	2.000.000	-	727.000
	a. Obligasi	8.652.260	-	-	-	2.000.000	-	727.000
	b. Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
5	Pinjaman yang Diterima	28.513.220	-	-	2.017.953	-	-	2.500.000
	a. Pinjaman Subordinasi	4.499.977	-	-	-	-	-	-
	b. Lainnya	24.013.242	-	-	2.017.953	-	-	2.500.000
6	Kewajiban lainnya	430.656	430.656	-	-	-	-	-
	a. Kewajiban atas surat berharga yang di jual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-	-	-	-
	b. Lainnya	430.656	430.656	-	-	-	-	-
7	Lain-lain	11.726.704	-	-	11.726.704	-	-	-
	Jumlah Kewajiban	368.500.395	118.421.401	21.122.406	64.589.267	42.991.121	24.461.778	12.495.938
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	35.295.638	(74.035.893)	(20.252.567)	(41.922.206)	(30.318.287)	(15.034.209)	(2.528.643)

		31 Desember 2021							
		Saldo	Jatuh Tempo						> 12 bulan
> 12 bulan	s.d 1 minggu		> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan		
282.466.998	275.376.932	325.230	44.135	1.622.320	1.596.822	3.717.198	5.862.789	262.208.439	
281.144.791	272.840.838	28.772	44.135	1.622.320	1.435.873	3.382.473	5.412.931	260.914.334	
1.322.207	2.536.094	296.458	-	-	160.949	334.724	449.858	1.294.104	
-	2.052.465	1.598.325	-	-	-	454.140	-	-	
-	1.598.325	1.598.325	-	-	-	-	-	-	
-	454.140	-	-	-	-	454.140	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	14.192.167	-	-	14.192.167	-	-	-	-	
303.805.926	371.762.574	42.949.296	813.605	18.145.093	6.701.679	6.135.343	7.718.475	289.299.082	
54.497.958	291.384.738	94.727.300	10.169.972	42.605.688	63.737.917	10.922.289	21.390.475	47.831.096	
42.861.151	74.913.609	38.878.993	-	-	-	-	-	36.034.616	
-	47.871.856	47.871.856	-	-	-	-	-	-	
11.636.807	168.599.272	7.976.450	10.169.972	42.605.688	63.737.917	10.922.289	21.390.475	11.796.480	
-	532.051	361.399	7.650	163.002	-	-	-	-	
11.636.807	168.067.221	7.615.051	10.162.322	42.442.686	63.737.917	10.922.289	21.390.475	11.796.480	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	48.485	43.557	-	4.928	-	-	-	-	
5.925.260	12.371.708	-	-	-	-	3.168.000	2.095.000	7.108.708	
5.925.260	12.371.708	-	-	-	-	3.168.000	2.095.000	7.108.708	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.995.267	26.562.258	-	-	1.583.511	1.800.000	2.500.000	740.000	19.938.747	
4.499.977	4.499.968	-	-	-	-	-	-	4.499.968	
19.495.289	22.062.291	-	-	1.583.511	1.800.000	2.500.000	740.000	15.438.780	
-	454.140	454.140	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	454.140	454.140	-	-	-	-	-	-	
-	12.806.606	-	-	12.806.606	-	-	-	-	
84.418.485	343.627.935	95.224.997	10.169.972	57.000.733	65.537.917	16.590.289	24.225.475	74.878.551	
219.387.442	28.134.639	(52.275.701)	(9.356.367)	(38.855.640)	(58.836.238)	(10.454.946)	(16.507.000)	214.420.530	

No	Pos-pos	31 Desember 2022						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
II. Rekening Administratif								
A. Tagihan Rekening Administratif								
1	Komitmen	-	-	-	-	-	-	-
	a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	-	-	-	-	-
	b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-	-	-	-	-
	1) Spot	-	-	-	-	-	-	-
	2) Derivatif	-	-	-	-	-	-	-
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2	Kontijensi	19.459.686	-	-	19.459.686	-	-	-
	Jumlah Tagihan Rekening Administratif	19.459.686	-	-	19.459.686	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif								
1	Komitmen	19.058.474	-	339.313	16.581.426	-	331.410	-
	a. Fasilitas kredit yang belum ditarik	16.363.226	-	-	16.363.226	-	-	-
	b. Irrevocable L/C yang masih berjalan	204.672	-	-	204.672	-	-	-
	c. Posisi Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2.477.048	-	339.313	-	-	331.410	-
	1) Spot	-	-	-	-	-	-	-
	2) Derivat	2.477.048	-	339.313	-	-	331.410	-
	d. Lainnya	13.529	-	-	13.529	-	-	-
2	Kontijensi	964.107	-	-	964.107	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Rekening Administratif	20.022.580	-	339.313	17.545.533	-	331.410	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(562.894)	-	(339.313)	1.914.154	-	(331.410)	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	34.732.744	(74.035.893)	(20.591.880)	(40.008.052)	(30.318.287)	(15.365.619)	(2.528.643)
	Selisih Kumulatif	34.732.744	(74.035.893)	(94.627.773)	(134.635.825)	(164.954.112)	(180.319.730)	(182.848.373)

Tabel Profil Maturitas Valuta Asing

No	Pos-pos	31 Desember 2022						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
I. Neraca								
A. Aset								
1	Kas	15.694	15.694	-	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	222.943	222.943	-	-	-	-	-
3	Penempatan pada bank lain	932.205	932.205	-	-	-	-	-
4	Surat Berharga	4.841.243	-	-	-	128.588	62.270	31.135
	a. SUN	4.544.748	-	-	-	128.588	62.270	31.135
	1) diperdagangkan	-	-	-	-	-	-	-

		31 Desember 2021							
		Saldo	Jatuh Tempo						> 12 bulan
> 12 bulan	s.d 1 minggu		> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15.909.928	-	-	15.909.928	-	-	-	-	-
-	15.909.928	-	-	15.909.928	-	-	-	-	-
1.806.325	19.297.335	-	-	18.279.398	-	-	-	-	1.017.938
-	17.985.858	-	-	17.985.858	-	-	-	-	-
-	280.604	-	-	280.604	-	-	-	-	-
1.806.325	1.017.938	-	-	-	-	-	-	-	1.017.938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.806.325	1.017.938	-	-	-	-	-	-	-	1.017.938
-	12.936	-	-	12.936	-	-	-	-	-
-	976.028	-	-	976.028	-	-	-	-	-
1.806.325	20.273.363	-	-	19.255.426	-	-	-	-	1.017.938
(1.806.325)	(4.363.436)	-	-	(3.345.498)	-	-	-	-	(1.017.938)
217.581.117	23.771.203	(52.275.701)	(9.356.367)	(42.201.138)	(58.836.238)	(10.454.946)	(16.507.000)	213.402.593	
34.732.744	23.771.203	(28.504.497)	(37.860.864)	(80.062.002)	(138.898.240)	(149.353.186)	(165.860.186)	47.542.407	

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2021							
		Saldo	Jatuh Tempo						> 12 bulan
> 12 bulan	s.d 1 minggu		> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan		
-	12.896	12.896	-	-	-	-	-	-	-
-	1.855.093	1.855.093	-	-	-	-	-	-	-
-	598.489	598.489	-	-	-	-	-	-	-
4.619.250	6.776.768	-	31.356	-	149.651	42.758	-	6.553.004	
4.322.756	6.230.273	-	31.356	-	149.651	42.758	-	6.006.509	
-	19.381	-	-	-	-	-	-	-	19.381

No	Pos-pos	31 Desember 2022						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
	2) tersedia untuk di jual	3.831.559	-	-	-	-	-	-
	3) dimiliki hingga jatuh tempo	713.190	-	-	-	128.588	62.270	31.135
	4) pinjaman yang diberikan pada piutang	-	-	-	-	-	-	-
	b. Surat Berharga Korporasi	296.495	-	-	-	-	-	-
	1) diperdagangkan	-	-	-	-	-	-	-
	2) tersedia untuk dijual	296.495	-	-	-	-	-	-
	3) dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
	4) pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-	-	-	-
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
5	Kredit yang diberikan	1.168.755	-	-	-	-	-	-
	a. Belum Jatuh Tempo	1.168.755	-	-	-	-	-	-
	b. Sudah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	-
	b. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
7	Lain-lain	971.042	-	-	971.042	-	-	-
	Jumlah Aset	8.151.883	1.170.842	-	971.042	128.588	62.270	31.135
B. Kewajiban								
1	Dana Pihak Ketiga	2.938.717	1.917.754	50.021	130.345	811.652	26.105	2.840
	a. Giro	1.809.479	1.809.479	-	-	-	-	-
	b. Tabungan	102.646	102.646	-	-	-	-	-
	c. Simpanan Berjangka	1.026.593	5.629	50.021	130.345	811.652	26.105	2.840
	1) Deposito on call	-	-	-	-	-	-	-
	2) Deposito Berjangka	1.026.593	5.629	50.021	130.345	811.652	26.105	2.840
	3) Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	-	-	-	-	-	-	-
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	4.658.242	-	-	-	-	-	-
	a. Obligasi	-	-	-	-	-	-	-
	b. Subordinasi	4.658.242	-	-	-	-	-	-
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
5	Pinjaman yang Diterima	807.763	-	-	-	-	-	-
	a. Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-
	b. Lainnya	807.763	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	a. Kewajiban atas surat berharga yang di jual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-	-	-	-
	b. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
7	Lain-lain	113.736	-	-	113.736	-	-	-
	Jumlah Kewajiban	8.518.458	1.917.754	50.021	244.081	811.652	26.105	2.840
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	(366.575)	(746.911)	(50.021)	726.961	(683.065)	36.165	28.295

		31 Desember 2021							
		Saldo	Jatuh Tempo						> 12 bulan
> 12 bulan	s.d 1 minggu		> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan		
3.831.559	5.439.145	-	-	-	-	-	-	5.439.145	
491.197	771.746	-	31.356	-	149.651	42.758	-	547.982	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
296.495	546.495	-	-	-	-	-	-	546.495	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
296.495	546.495	-	-	-	-	-	-	546.495	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.168.755	143.189	-	-	-	-	-	-	143.189	
1.168.755	143.189	-	-	-	-	-	-	143.189	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1.187.989	-	-	1.187.989	-	-	-	-	
5.788.005	10.574.424	2.466.478	31.356	1.187.989	149.651	42.758	-	6.696.193	
-	4.616.334	3.912.410	433.009	26.231	242.709	1.425	549	-	
-	3.830.463	3.830.463	-	-	-	-	-	-	
-	77.783	77.783	-	-	-	-	-	-	
-	708.087	4.164	433.009	26.231	242.709	1.425	549	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	708.087	4.164	433.009	26.231	242.709	1.425	549	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.658.242	4.259.777	-	-	-	-	-	-	4.259.777	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.658.242	4.259.777	-	-	-	-	-	-	4.259.777	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
807.763	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
807.763	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	761.618	-	-	761.618	-	-	-	-	
5.466.004	9.637.728	3.912.410	433.009	787.849	242.709	1.425	549	4.259.777	
322.001	936.696	(1.445.932)	(401.654)	400.141	(93.058)	41.332	(549)	2.436.416	

No	Pos-pos	31 Desember 2022						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
II. Rekening Administratif								
A. Tagihan Rekening Administratif								
1	Komitmen	2.625.536	-	389.188	-	-	351.737	-
	a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	-	-	-	-	-
	b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2.625.536	-	389.188	-	-	351.737	-
	1) Spot	-	-	-	-	-	-	-
	2) Derivatif	2.625.536	-	389.188	-	-	351.737	-
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2	Kontijensi	76.436	-	-	76.436	-	-	-
	Jumlah Tagihan Rekening Administratif	2.701.972	-	389.188	76.436	-	351.737	-
B. Kewajiban Rekening Administratif								
1	Komitmen	279.023	-	-	279.023	-	-	-
	a. Fasilitas kredit yang belum ditarik	279.023	-	-	279.023	-	-	-
	b. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-	-	-	-	-
	c. Posisi Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-	-	-	-	-
	1) Spot	-	-	-	-	-	-	-
	2) Derivat	-	-	-	-	-	-	-
	d. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2	Kontijensi	61.173	-	-	61.173	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Rekening Administratif	340.196	-	-	340.196	-	-	-
	Selish Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	2.361.776	-	389.188	(263.760)	-	351.737	-
	Selish [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	1.995.201	(746.911)	339.166	463.202	(683.065)	387.902	28.295
	Selish Kumulatif	1.995.201	(746.911)	(407.745)	55.456	(627.608)	(239.707)	(211.412)

		31 Desember 2021							
		Saldo	Jatuh Tempo						> 12 bulan
> 12 bulan	s.d 1 minggu		> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan		
	1.884.612	1.082.678	-	-	13.741	-	-	-	1.068.938
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.884.612	1.082.678	-	-	13.741	-	-	-	1.068.938
	-	13.741	-	-	13.741	-	-	-	-
	1.884.612	1.068.938	-	-	-	-	-	-	1.068.938
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	27.441	-	-	27.441	-	-	-	-
	1.884.612	1.110.120	-	-	41.182	-	-	-	1.068.938
	-	127.082	-	-	127.082	-	-	-	-
	-	113.356	-	-	113.356	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	13.726	-	-	13.726	-	-	-	-
	-	13.726	-	-	13.726	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	16.095	-	-	16.095	-	-	-	-
	-	143.177	-	-	143.177	-	-	-	-
	1.884.612	966.943	-	-	(101.994)	-	-	-	1.068.938
	2.206.613	1.903.639	(1.445.932)	(401.654)	298.146	(93.058)	41.332	(549)	3.505.354
	1.995.201	1.903.639	457.707	56.053	354.200	261.142	302.474	301.925	3.807.278

Tabel *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*

	2022				2021			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Bank Secara Individu	255,03%	233,16%	238,80%	238,50%	232,85%	221,15%	257,85%	283,16%

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan ikatan material dengan pihak terkait dalam rangka investasi barang modal. Beberapa ikatan material dengan nilai signifikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel *Ikatan Material Investasi Barang Modal*

Nama Pihak yang Melakukan Ikatan	Jenis Ikatan	Nilai Ikatan (dalam jutaan Rupiah)
PT Simian Solutions	Sistem <i>Custodian Service</i>	17.000
PT Sigma Cipta Caraka	<i>Open Contract ITM 2022/2023</i>	12.109
PT Metrodata Electronics	<i>Upgrade Tableau Server dari Skema Subscription</i>	13.888
PT Multipolar Technology Tbk	Pengadaan Paket Lisensi <i>Microsoft</i> , dukungan dan layanan pendukung <i>outlet</i>	20.486
PT Swadharma Duta Data	Pengadaan Perpanjangan Jasa IT <i>Outlet</i>	27.663
PT Mitra Integrasi Informatika	Pengadaan Aplikasi <i>Performance Monitoring</i>	15.695
PT Sinergy Informasi Pratama	Pengadaan <i>firewall</i> untuk WAN DC Sentul dan DC Surabaya	11.550
PT Mitra Integrasi Informatika	Pengadaan Paket Lisensi <i>Microsoft</i> Dukungan dan Layanan Pendukung <i>Data Center</i>	47.990

Perseroan melakukan ikatan material untuk investasi barang dan modal dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Adapun sumber dana yang digunakan Perseroan dalam melakukan ikatan material berasal dari dana internal Perseroan. Dikarenakan mata uang yang digunakan untuk investasi barang modal adalah IDR atau Rupiah dan nilai

pengadaan yang tercantum pada perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan Penyedia juga ditetapkan dalam mata uang Rupiah maka tidak diperlukan adanya langkah yang direncanakan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing.

Investasi Barang Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk tanah, gedung/ruang kantor, bangunan lainnya, *hardware* komputer, mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, aset tetap dan Inventaris lainnya. Sampai dengan tahun 2022, jumlah investasi barang modal sebesar Rp9,75 triliun. Jumlah tersebut

meningkat dibandingkan tahun 2021 yang disebabkan oleh adanya pembelian tanah untuk kantor, renovasi gedung kantor, kendaraan dan berbagai peralatan kantor untuk menunjang operasional Perseroan.

Tabel Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Tujuan Investasi	Nilai Investasi	
		2022	2021
Tanah	Operasional Bisnis Bank	4.406.143	3.981.531
Gedung/Ruang Kantor	Operasional Bisnis Bank	1.730.108	1.645.764
Bangunan Lainnya	Operasional Bisnis Bank	69.763	71.767
Hardware Komputer	Operasional Bisnis Bank	2.465.335	2.069.423
Mesin	Operasional Bisnis Bank	481.161	453.732
Kendaraan	Operasional Bisnis Bank	43.685	33.540
Perlengkapan Kantor	Operasional Bisnis Bank	637.637	588.593
Aset Tetap dan Inventaris Lainnya	Operasional Bisnis Bank	45.993	42.784
Jumlah		9.879.828	8.887.134

Komitmen dan Kontinjensi

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021
KOMITMEN		
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	15.109.981	18.178.393
Irrevocable L/C yang masih berjalan	221.484	280.604
Komitmen - Neto	15.331.465	18.458.997
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6.855.269	3.637.301
Liabilitas Kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan	(948.495)	(903.130)
Kontinjensi - neto	5.906.774	2.734.171

Perjanjian dan Perikatan

Sepanjang tahun 2022, Perseroan melaksanakan perjanjian dan perikatan penting antara lain sebagai berikut:

No.	Perihal	Counterparty	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian
1	Pengadaan <i>Software License Oracle Database</i> untuk Aplikasi BI – Fast	PT Metrocom Global Solusi	No. 39/PKS/ITPD/2021 No. 39/ADD/PKS/ITPD/2021 No. 24/ADD/PKS/ITPD/2022	2 September 2021 15 November 2021 13 April 2022
2	Pengadaan <i>Decision Engine</i>	PT IDX Consulting	No. 37/PKS/ITPD/2022 No. IDX: 2633/IDX/PKS/VII/2022	8 Juli 2022

No.	Perihal	Counterparty	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian
3	Pengadaan <i>Open Contract</i> Pengembangan <i>Middleware</i> Tahun 2020	PT Hanoman Cendekia Interaktif	No. 08/PKS/ITPD/2020 No. 12/ADD/PKS/ITPD/2022	24 Februari 2020 7 April 2022
4	Pengadaan Jasa IT <i>Outlet</i>	PT Swadarma Duta Data	No. 09/PKS/ITOD/2022	22 Februari 2022
5	Pengadaan Sistem <i>Custodian Service</i>	PT Simian Solutions	No. 107/S/ITPD/V/2022	4 Mei 2022
6	Pengadaan Genset Peruntukan RBB 2022 dan Kebutuhan Non RBB	PT Hartekprima Listrindo	No. 015/SPP/PF AD/III/2022 No. 001/ADDSP/PFAD/V/2022	16 Maret 2022 18 Mei 2022
7	Pengadaan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi Gedung dan Penataan Jaringan Listrik KC Manado	PT Binayasa Putrabatara	No. 003/SPP/PF AD/V/2022	13 Mei 2022
8	Pengadaan <i>Maintenance</i> BTN <i>Cash Management</i> , <i>Maintenance Internet Banking</i> dan <i>Maintenance Cash Management System</i> Syariah	PT Wide Technologies Indonesia	No. 05/PKS/ITOD/2022	21 Januari 2022

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan

Prospek Perekonomian dan Perbankan Tahun 2023

Pemulihan ekonomi global terus menunjukkan perbaikan walaupun sedikit tertahan karena ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina. Ketegangan tersebut berdampak pada pemberian sanksi berbagai negara terhadap Rusia, sehingga berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas terutama minyak bumi, meningkatnya inflasi di berbagai negara serta ketidakpastian pasar keuangan global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF untuk 2023 terkoreksi menjadi 2,7%.

Pertumbuhan ekonomi nasional melanjutkan perbaikannya pada tahun 2022 dengan pertumbuhan berada di atas 5% di setiap Triwulannya. Perbaikan ekonomi nasional dipicu oleh lebih terkendalinya pandemi yang berdampak telah kembalinya kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprakirakan tetap tinggi didorong oleh meningkatnya permintaan domestik serta kinerja ekspor yang tetap positif di tengah risiko lebih dalamnya perlambatan perekonomian global, sehingga diperkirakan ekonomi Indonesia dapat kembali tumbuh di kisaran 5,0% yoy pada tahun 2023.

Kemudian tingkat inflasi di tahun 2023 diperkirakan akan kembali pada kisaran target Bank Indonesia yaitu 3±1% yoy. Untuk mencapai tingkat inflasi tersebut, Pemerintah maupun Bank Indonesia akan melakukan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Sementara, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) diperkirakan di kisaran Rp15.500 pada akhir tahun 2023, dengan tetap memperhatikan ketidakpastian di pasar keuangan global seperti kebijakan moneter The Fed. Bank Indonesia berpotensi untuk tetap menaikkan suku bunga acuannya hingga Triwulan I 2023 sebagai upaya untuk menurunkan laju inflasi dan inflasi inti serta menjaga kestabilan rupiah. Sampai dengan akhir 2023, diperkirakan suku bunga acuan Bank Indonesia akan berada pada level 6,00%.

Sektor Jasa keuangan khususnya perbankan diprediksi akan tetap terjaga kinerjanya, dipicu oleh kecukupan modal tinggi dan likuiditas melimpah. Diperkirakan pada tahun 2023 Dana Pihak Ketiga (DPK) akan tumbuh pada kisaran 7,0%-9,0% dan penyaluran kredit perbankan akan tumbuh sebesar 10,0%-12,0%.

Mempertimbangkan perkembangan dinamika makro dan intermediasi perbankan, adapun proyeksi pertumbuhan sektor perbankan di tahun 2023 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Proyeksi Indikator Intermediasi Perbankan Tahun 2023

Indikator	Proyeksi 2023
Pertumbuhan Kredit (yoy)	11,7%
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy)	7,9%
Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI 7 Days Repo Rate)	6,0%

Sumber: Bank Indonesia dan Analisis Internal Bank BTN

Proyeksi suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate (BI7DRR) pada tahun 2023, didasari analisis bahwa kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2022 merupakan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendorong kenaikan inflasi hingga jauh di atas target inflasi Bank Indonesia. Dengan target BI mengembalikan tingkat inflasi ke kisaran $3\% \pm 1\%$ pada Semester I

2023, kami berpendapat BI memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,00% pada Triwulan I 2023 dan akan tetap bertahan atau melandai hingga akhir tahun 2023 dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi eksternal khususnya Fed Fund Rate (FFR).

Prospek Industri Perumahan

Jangka Pendek

Pertumbuhan kredit pada sektor perumahan diprediksi tetap tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kredit. Pada jangka pendek, terdapat 3 (tiga) faktor utama yang akan mendorong pertumbuhan kredit sektor perumahan.

Faktor pertama adalah potensi peningkatan KPR segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berkontribusi oleh peningkatan alokasi KPR Subsidi Pemerintah. Di tahun 2023, Pemerintah menambahkan alokasi untuk KPR FLPP dari tahun sebelumnya sebanyak 200.000 unit menjadi 220.000 unit. Selain program KPR FLPP, Pemerintah juga akan menyalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan alokasi sebanyak 54.924 unit.

Faktor kedua adalah kebijakan BI untuk melanjutkan ketentuan *Loan to Value (LTV)/Financing to Value (FTV)* sampai dengan 100% yang diberlakukan sampai akhir tahun 2023. Perpanjangan kebijakan LTV/FTV berpotensi mendorong

permintaan properti pada segmen menengah-atas. Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) untuk rumah tipe menengah dan besar yang lebih tinggi dibanding rumah tipe kecil. Per Triwulan III 2022, IHPR rumah tipe menengah meningkat 2,13% yoy dan IHPR rumah tipe besar meningkat 1,29% yoy, lebih tinggi dibanding peningkatan IHPR rumah tipe kecil yang sebesar 1,17% yoy.

Faktor ketiga adalah mobilitas masyarakat yang sudah mulai normal dan longgarnya kebijakan pembatasan sosial sejalan dengan melandainya kasus Covid-19. Kondisi tersebut akan mendorong percepatan proyek real estat dan konstruksi yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor real estat dan konstruksi di tahun depan. Di tahun 2023 sektor real estat diprediksi tumbuh 3,27% yoy, lebih tinggi dibanding *outlook* tahun 2022 yang sebesar 3,20% yoy. Sektor konstruksi di tahun 2023 diprediksi tumbuh 6,07% yoy, lebih tinggi dibanding *outlook* tahun 2022 yang sebesar 5,97% yoy.

(Sumber: Nota Keuangan APBN 2023, Laporan Kebijakan Moneter dan Analisis Internal BTN)

Jangka Menengah dan Panjang

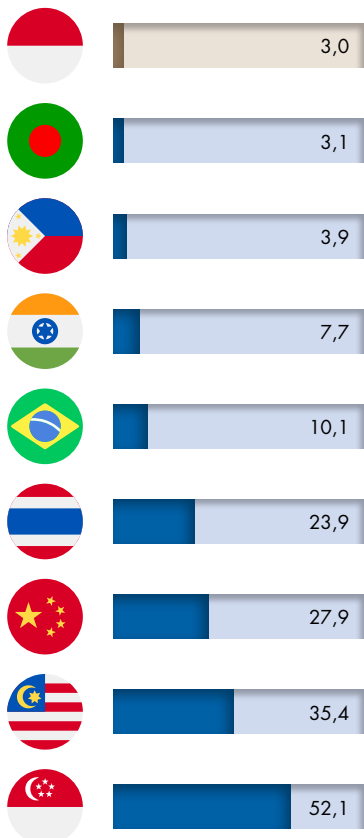
Rasio KPR terhadap PDB yang masih rendah juga merupakan peluang yang akan dikembangkan Perseroan untuk memperluas bisnis perumahan ke depannya. Di tahun 2019, rasio KPR terhadap PDB Indonesia adalah 3,0% masih lebih kecil dibanding negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina 3,9%, Thailand 23,9% dan Singapura 52,1%.

(Sumber: Sarana Multigriya Financial (SMF), 2019)

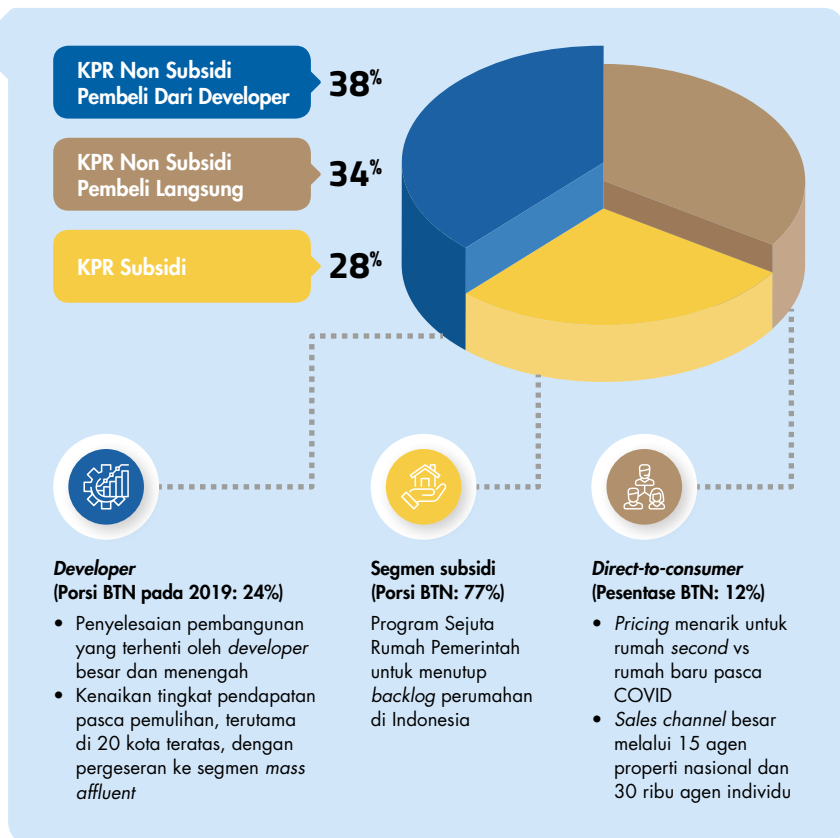
Dengan komitmen keberlanjutan Program Pemerintah Sejuta Rumah dan meningkatnya populasi *middle income* yang didominasi oleh generasi milenial dan segmen *emerging affluent* juga menjadi pertimbangan bagi Perseroan untuk memperluas fokusnya dalam mengembangkan bisnis perumahan ke depan, khususnya dalam meningkatkan pangsa pasar di segmen milenial dan *emerging affluent*. Untuk menangkap potensi pertumbuhan tersebut, di tahun depan Perseroan akan meningkatkan penjualan KPR Non Subsidi dengan menysasar *top developers* dan *direct selling* KPR kepada konsumen (*Direct to Customers*) melalui kerja sama dengan agen properti nasional dan individu.

Gambar Peluang Pengembangan Bisnis KPR

Rasio KPR terhadap PDB 2019 (%)



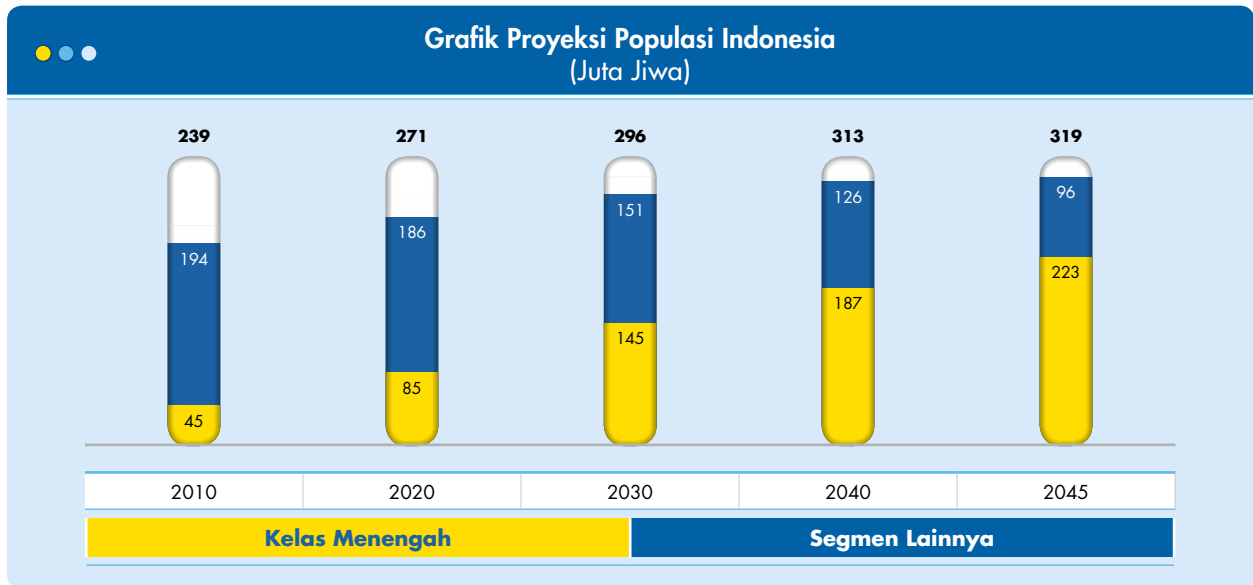
Pasar KPR Nasional Berdasarkan Segmen 2019



Sumber: Corporate Plan Bank BTN 2021-2025

Bonus demografi dan pertumbuhan penduduk kelas menengah (*middle class*) yang didominasi oleh generasi milenial juga menjadi pendorong bisnis pembiayaan perumahan ke depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah generasi Z dan generasi milenial mendominasi populasi usia produktif dengan Generasi Z (usia 8-23 tahun) mencapai

27,94% dan Generasi Milenial (usia 24-39 tahun) sebanyak 25,87% yang mana porsi tersebut diprediksi akan terus tumbuh hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan yang merupakan peluang untuk mengembangkan bisnis perumahan di segmen *first home buyer* yang menjadi *captive market* Perseroan.



Sumber: Bappenas, Visi Indonesia Tahun 2045

Selanjutnya, sebagai sektor yang memiliki *multiplier effect* kepada 174 sub-sektor industri, pengembangan *value chain* dari bisnis perumahan juga menjadi salah satu strategi pengembangan bisnis yang akan dilakukan Perseroan. Untuk menangkap peluang tersebut, Perseroan akan mengembangkan

produk dan layanan keuangan yang menasar perluasan *value chain* bisnis konstruksi yaitu akuisisi lahan, bahan bangunan, pengembangan lahan dan properti, jasa konstruksi dan pembiayaan pada pengembang (*developer*).

Gambar Perluasan Value Chain Bisnis Perumahan

	Pemain	Jumlah pemain dan Landscape persaingan 2019	Pasar, 2025	
			Outstanding loan, (Rp triliun)	Deposit Balance, (Rp triliun)
Akuisi Lahan		<p>N/A</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemain skala nasional di 10 kota terbesar Pasar masih terfragmentasi di kota-kota kecil dengan pemain perorangan 	n/a	n/a
Basic Materials		<p>N/A</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 pemain teratas mencapai 75% dari market share (volume konsumsi) Berbagai SME berperan sebagai distributor 	60-70	20-30
Pengembangan Lahan dan Properti		<p>~160-170rb</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 pemain teratas mencapai ~70% market share (revenue) ~20rb pemain merupakan perusahaan kontruksi menengah hingga atas ~85% perusahaan konstruksi SME 	500-530	500-530
Jasa Konstruksi		<p>~6,000</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasar terkonsentrasi tinggi dengan pemain BUMN besar mencakup 70-80% market share Fokus utama pada pengembangan infrastruktur Pemerintah 	n/a	n/a
Pengembang		<p>~11-12rb</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 pemain teratas mencapai 70% market share (revenue) ~400-600 pemain menengah Sisa 80-90% adalah pengembang SME dengan fokus regional 	370-400	340-360

Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan KPR, baik KPR subsidi maupun non subsidi, Perseroan memiliki pangsa pasar yang besar dalam penyaluran kredit perumahan di Indonesia. Terutama dengan agenda Program Sejuta Rumah dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan BP Tapera, Perseroan dipercaya mendapatkan porsi terbesar dalam penyaluran pembiayaan KPR Subsidi. Pada 31 Desember 2022, pangsa pasar Perseroan pada sektor pembiayaan KPR Subsidi mencapai 82,99% sementara pangsa pasar Perseroan pada keseluruhan pembiayaan KPR pada 31 Desember 2022 mencapai 38,99%.

(Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Desember 2022 dan IRRD Bank BTN)

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, Perseroan yakin memiliki prospek usaha yang sangat baik di masa yang akan datang. Hal ini didukung kekuatan yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Peluang nasabah *captive* dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Yasa Griya (KYG) dan Dana Lembaga yang berpotensi dikembangkan.
- *Partner* Pemerintah pada Program Perumahan Nasional.
- Inisiatif transformasi yang dimulai di tahun 2021 (*Branch Transformation, Commercial Banking Center (CBC), Kerja sama Tapera, Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat/ TWP AD*)
- Kondisi *excess reverse* yang cukup tinggi.

Strategi Perseroan Ke Depan

Sesuai dengan *roadmap corporate plan* tahun 2021-2025, tema strategi tahun 2023 adalah "Disrupsi *Digital* untuk Menguasai Ekosistem Perumahan", dengan penjabaran prioritas strategi di tahun 2023 sebagaimana gambar berikut.

 <p>Mengoptimalkan kontribusi pada program KPR Subsidi dan meningkatkan KPR Non Subsidi melalui kerja sama <i>Developer</i>, Agen Properti, mengembangkan skema KPR yang menyasar generasi milenial.</p>	 <p>Meningkatkan kredit <i>high yield</i> (KRING, KAR, KUR) <i>beyond mortgage</i> melalui <i>cross selling</i> kepada nasabah <i>captive</i>.</p>	 <p>Fokus pada Penghimpunan DPK <i>Low Cost</i> dengan meningkatkan CASA pada segmen Ritel dan Institusi serta Membangun kapasitas untuk peningkatan CASA pada segmen <i>wholesale banking</i>.</p>
 <p>Mengembangkan sumber pertumbuhan baru dengan mempercepat implementasi inisiatif <i>digital banking</i> dan digitalisasi proses secara masif yang mendukung pengembangan bisnis berbasis ekosistem perumahan.</p>	 <p>Meningkatkan sumber <i>fee</i> berbasis layanan dan transaksional terutama pada bisnis <i>wealth management, digital banking</i> dan <i>corporate</i>.</p>	 <p>Mempercepat penyelesaian kredit macet dan Melanjutkan inisiatif penjualan aset (<i>asset sales</i>) secara <i>bulk</i>.</p>

1. Mengoptimalkan kontribusi pada program KPR subsidi dan meningkatkan KPR non subsidi melalui kerja sama *developer*, agen properti, mengembangkan skema KPR yang menyasar generasi milenial
2. Meningkatkan kredit *high yield* (KRING, KAR, KUR) *beyond mortgage* melalui *cross selling* kepada nasabah *captive*
3. Fokus pada penghimpunan DPK *low cost* dengan meningkatkan CASA pada segmen ritel dan institusi serta membangun kapabilitas untuk peningkatan CASA pada segmen *wholesale banking*
4. Mengembangkan sumber pertumbuhan baru dengan mempercepat implementasi inisiatif *digital banking* dan digitalisasi proses secara masif yang mendukung pengembangan bisnis berbasis ekosistem perumahan
5. Meningkatkan sumber *fee* berbasis layanan dan transaksional terutama pada bisnis *wealth management*, *digital banking* dan *corporate*
6. Mempercepat penyelesaian kredit macet dan melanjutkan inisiatif penjualan aset (*asset sales*) secara *bulk*

Pencapaian Target dan Target Ke Depan

Pencapaian Target 2022

Perbandingan Target dan Realisasi Produksi/Operasional

Beberapa indikator pencapaian target operasional dapat ditunjukkan dengan pencapaian beberapa target yaitu target kredit dan pembiayaan serta target perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi/Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Target 2022	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Kredit dan Pembiayaan			
Kredit Perumahan	231.292.555	237.295.650	97,47%
Kredit Non Perumahan	35.365.010	33.079.702	106,91%
Jumlah Kredit	266.657.565	270.375.352	98,62%
Jumlah Pembiayaan	31.624.139	30.639.618	103,21%
Jumlah Kredit dan Pembiayaan yang diberikan	298.281.705	301.014.970	99,09%
Dana Pihak Ketiga			
Giro	114.006.513	94.792.961	120,27%
Tabungan	42.195.160	56.584.558	74,57%
Deposito	165.721.584	171.391.608	96,69%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	321.923.257	322.769.127	99,74%

Kredit perumahan di tahun 2022 terealisasi Rp231,29 triliun dengan pencapaian 97,47%. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan, namun demikian Perseroan optimis prospek terhadap Kredit Perumahan tahun 2023 akan lebih baik.

Tabungan di tahun 2022 terealisasi Rp42,20 triliun dengan pencapaian 74,57%, Hal tersebut disebabkan oleh penurunan tabungan yang bersifat investasi.

Deposito di tahun 2022 terealisasi Rp165,72 triliun dengan pencapaian 96,69%, Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh rekompresi deposito dalam upaya menjaga *cost of fund* Perseroan.

Giro di tahun 2022 terealisasi Rp114,01 triliun dengan pencapaian 120,27%, pencapaian giro tersebut dikontribusi oleh peningkatan giro pada segmen *wholesale*, komersial, korporasi dan institusi.

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Pencapaian keuangan dapat dilihat dari pencapaian posisi keuangan, rasio-rasio keuangan, pendapatan dan laba.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Target 2022	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Posisi Keuangan			
Aset	402.148.312	404.015.092	99,54%
Liabilitas	376.238.958	376.365.025	99,97%
Ekuitas	25.909.354	27.650.068	93,70%
Pendapatan dan Laba			
Pendapatan Bunga	25.907.368	24.971.716	103,75%
Laba Operasional	3.814.803	3.434.495	111,07%
Laba Bersih	3.045.073	2.591.161	117,52%
Rasio Keuangan			
CAR	20,17%	19,71%	102,34%
NPL	3,38%	3,40%	100,63%
RoA	1,02%	0,89%	114,78%
RoE	16,42%	13,46%	122,02%
NIM	4,40%	4,19%	105,03%

Aset di tahun 2022 terealisasi Rp402,15 triliun dengan pencapaian 99,54%. Hal tersebut disebabkan oleh Surat Berharga yang dimiliki, Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) belum mencapai proyeksi.

Liabilitas di tahun 2022 terealisasi Rp376,24 triliun dengan pencapaian 99,97%. Hal tersebut disebabkan oleh Surat Berharga yang dimiliki dan Dana Pihak Ketiga (DPK) belum mencapai proyeksi.

Pendapatan bunga di tahun 2022 terealisasi Rp25,91 triliun dengan pencapaian 103,75%. Pencapaian tersebut disebabkan oleh perbaikan kualitas kredit.

Laba operasional di tahun 2022 terealisasi Rp3,81 triliun dengan pencapaian 111,07%. Pencapaian tersebut disebabkan oleh berhasilnya strategi Perseroan dalam merekomposisi suku bunga dana pihak ketiga sehingga menyebabkan adanya penurunan beban bunga yang tercermin dari *cost of fund* Perseroan yang turun secara signifikan.

Laba bersih di tahun 2022 terealisasi Rp3,05 triliun dengan pencapaian 117,52%. Pencapaian tersebut disebabkan oleh berhasilnya strategi Perseroan dalam menurunkan beban bunga.

Laba di tahun 2022 ini merupakan laba terbesar sepanjang sejarah Perseroan berdiri.

CAR di tahun 2022 terealisasi 20,17% dengan pencapaian 102,34%. Pencapaian tersebut dikontribusi oleh peningkatan laba dan penambahan modal inti yang didapat dari *Rights Issue*.

NPL di tahun 2022 terealisasi 3,38% dengan pencapaian 100,63%. Pencapaian tersebut didorong oleh inisiatif perbaikan proses bisnis seperti implementasi *Commercial Banking Center* (CBC) dan *Regional Loan Processing Center* (RLPC) sehingga proses kredit menjadi lebih *prudent*.

ROA di tahun 2022 terealisasi 1,02% dengan pencapaian 114,78%. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan laba Perseroan pada tahun 2022.

ROE di tahun 2022 terealisasi 16,42% dengan pencapaian 122,02%. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan laba Perseroan pada tahun 2022.

NIM di tahun 2022 terealisasi 4,40% dengan pencapaian 105,03%. Pencapaian tersebut disebabkan oleh berhasilnya strategi Perseroan dalam menurunkan *cost of fund*.

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

Pencapaian struktur modal di tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Target 2022	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	22.533.407	23.641.604	95,31%
Modal Inti Utama (<i>Common Equity Tier - Cet 1</i>)	22.533.407	23.641.604	95,31%
Modal Inti Tambahan (<i>Additional Tier - At 1</i>)	-	-	-
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	5.635.050	5.591.152	100,79%
Jumlah Modal	28.168.457	29.232.756	96,36%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	139.630.514	148.290.089	105,84%
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	20,17%	19,71%	102,34%

Modal Inti (*Tier 1*) di tahun 2022 terealisasi Rp22,53 triliun dengan pencapaian 95,31%. Hal tersebut disebabkan oleh volatilitas atas nilai surat berharga yang dimiliki yang disebabkan oleh kondisi pasar. Meskipun demikian, Modal

Pelengkap (*Tier 2*) di tahun 2022 tercapai terealisasi Rp5,64 triliun dengan pencapaian 100,79%. Ke depannya Perseroan akan menjaga komposisi Modal Pelengkap (*Tier 2*) yang optimal untuk mendukung peningkatan kapasitas bisnis.

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Brand Awareness (tingkat tahu bank) masyarakat terhadap *brand* Bank BTN menjadi indikator pencapaian strategi pemasaran di tahun 2022. Adapun pada tahun 2022, Perseroan menjadi salah satu Bank ke-5 yang paling banyak diketahui oleh nasabah perbankan di 5 (lima) kota di Indonesia.*

Pencapaian peringkat ke-5 ini sesuai dengan target *brand awareness* masyarakat terhadap Perseroan, yang ditetapkan untuk tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021, *brand awareness* masyarakat terhadap *brand* Bank BTN mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berada pada peringkat ke-6.

(*) Studi Adhoc NielsenIQ terhadap 1.167 responden di 5 (lima) kota besar (Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar), dengan usia 25-65 tahun, bekerja dengan minimum pendapatan Rp5 juta/bulan dan memiliki rekening tabungan. Dilakukan pada 12 Desember 2022 – 7 Januari 2023

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Pencapaian pengembangan SDM dapat tercermin pada jumlah pelatihan, pesertadan biaya yang digunakan selama tahun berjalan.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Uraian	Realisasi 2022	Target 2022	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Biaya Pengembangan SDM (Rp juta)	86.945	89.000	97,69%
Jumlah Pelatihan (pelatihan)	167	150	111,33%
Jumlah Peserta Pelatihan (orang)	310.940	270.665	114,88%

Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan seluruh pegawai dengan metode *Classroom*, *Virtual Classroom* and *Self Learning*.

Persentase pencapaian jumlah peserta pelatihan sampai dengan Bulan Desember 2022 mencapai 114,88% atau di atas target yang telah ditentukan.

Target Ke Depan (Proyeksi)

Perseroan telah menyusun target ke depan sesuai dengan dokumen RKAP tahun 2023. Penetapan target tersebut didasarkan pada beberapa asumsi makro sebagai berikut:

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

Asumsi Makro	2023
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,3
Suku Bunga Acuan BI 7 Days Repo (%)	5,0
Inflasi (%)	3,6
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.800
Pertumbuhan Kredit (%)	8 – 10
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)	7,5 – 8,5

Sumber: Aspirasi Pemegang Saham Tahun 2023 dan Analisis *Chief Economist* Bank BTN

Proyeksi Produksi/Operasional

Proyeksi produksi/operasional untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Produksi/Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2023
Kredit dan Pembiayaan	
Kredit Perumahan	249.397.525
Kredit Non Perumahan	41.463.670
Jumlah Kredit	290.861.195
Jumlah Pembiayaan	34.940.434
Jumlah Kredit dan Pembiayaan yang diberikan	325.801.629
Dana Pihak Ketiga	
Giro	117.598.283
Tabungan	47.876.500
Deposito	179.114.937
Jumlah Dana Pihak Ketiga	344.589.720

Proyeksi Keuangan

Proyeksi keuangan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2023
Posisi Keuangan	
Aset	433.426.175
Liabilitas	403.360.770
Ekuitas	30.065.404
Pendapatan dan Laba	
Pendapatan Bunga	27.733.385
Laba Operasional	4.243.699
Laba Bersih	3.289.322

Uraian	Proyeksi 2023
Rasio Keuangan	
CAR	15.91%
NPL	2.99%
RoA	1.01%
RoE	13.29%
NIM	4.40%

Proyeksi Struktur Modal

Proyeksi struktur modal untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2023
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	29.966.943
Modal Inti Utama (<i>Common Equity Tier - Cet 1</i>)	29.966.943
Modal Inti Tambahan (<i>Additional Tier - At 1</i>)	0
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	2.636.932
Jumlah Modal	32.603.874
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	202.129.514
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16,13%

Proyeksi Kebijakan Dividen

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah dan pembayaran dividen diantaranya adalah tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Besarnya dividen Perseroan jumlahnya akan ditentukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan *dividend payout ratio* dengan kisaran 20% apabila terdapat *surplus* kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, kecuali RUPS menyatakan lain tergantung pada berbagai pertimbangan terkait kinerja tahun yang bersangkutan.

Proyeksi Pengembangan SDM

Proyeksi pengembangan SDM tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM

Uraian	Proyeksi 2023
Biaya Pengembangan SDM (Rp juta)	111.550
Jumlah Pelatihan (pelatihan)	175
Jumlah Peserta Pelatihan (orang)	280.320

Proyeksi Pemasaran

Seiring dengan *trend* peningkatan *digitalisasi* perbankan, proyeksi *campaign plan* Perseroan tahun 2023 akan berfokus pada optimalisasi *digital campaign*. BTN *Mobile* sebagai *platform digital* Perseroan dengan fitur dan pengembangan terbaru, akan menjadi *primary campaign* Perseroan pada pembuka tahun 2023. Kehadiran BTN *Mobile* akan semakin memperkuat ekosistem perumahan yang menjadi *core business* Perseroan.

Proyeksi strategi pemasaran tahun 2023 juga akan terus mendukung peningkatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah, sebagai wujud nyata kontribusi Perseroan dalam upaya mendukung pemerintah memberikan akses bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian yang layak. Serta mendukung peningkatan dana pihak ketiga melalui program dan fitur yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia melalui produk tabungan.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Besarnya dividen Perseroan jumlahnya akan ditentukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah dan pembayaran dividen di antaranya adalah tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kecuali ada alasan-alasan lain yang mendasar, manajemen merencanakan pembayaran dividen tunai minimum 10% dari laba bersih setiap tahunnya.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Informasi terkait pengumuman dan pembayaran dividen tahun buku 2020-2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2020-2021

Uraian	Tahun Buku 2021	Tahun Buku 2020
Laba Bersih (Rp)	2.376.225.756.803	1.602.356.526.240
Dividen Kas	237.622.575.680	-
Dividen Non Kas *)	-	-
Jumlah Saham (lembar)	10.590.000.000	-
Dividen Kas Per Saham (Rp)	22,43	-
Dividen Non Kas Per Saham *)	-	-
Dividend Pay Out Ratio (%)	10	-
Tanggal Pengumuman	02 Maret 2022	Tidak membagikan Dividen
Tanggal Pembayaran Dividen Kas	31 Maret 2022	-
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas *)	-	-

Keterangan: *) Perseroan tidak memiliki Dividen Non Kas

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2021

Di tahun 2022, Perseroan membagikan Dividen Tunai Tahun Buku 2021 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan di Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022. Berdasarkan RUPS Tahunan Tahun 2022, Pemegang Saham memutuskan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp2.376.225.756.803 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp237.622.575.680 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp 142.573.545.408 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp2.138.603.181.123 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai saldo laba ditahan.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2020

Di tahun 2021, Perseroan tidak membagikan dividen pada Tahun Buku 2020 sesuai dengan hasil keputusan RUPST Tahun 2020 pada tanggal 10 Maret 2021 dengan keputusan Pemegang Saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp1.602.356.526.240 seluruhnya ditetapkan sebagai

cadangan. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan tidak mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham dalam rangka penguatan permodalan sehubungan dengan rencana penyaluran kredit dengan fokus penyaluran KPR dalam mendukung Program Sejuta Rumah.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari penawaran umum ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan dalam rangka kegiatan usaha penyaluran kredit. Sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
1	2	3	4	5	6
1	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022	11 Agustus 2020	1.000.000.000.000,00	2.258.618.148,00	997.741.381.852,00
			1.000.000.000.000,00	2.258.618.148,00	997.741.381.852,00

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal

Investasi

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak melakukan kegiatan investasi.

Ekspansi

Dalam 2 (dua) tahun terakhir Perseroan telah melakukan ekspansi dari sisi pengembangan jaringan kantor dengan menambahkan 6 (enam) Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah (KC Mulyosari, KC Parepare, KC Mamuju) (KCS Bengkulu, KCS Padang, KCS Jambi) sehingga secara total per Desember 2022 Perseroan memiliki 80 Kantor Cabang dan 29 Kantor Cabang Syariah.

Divestasi

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak melakukan kegiatan divestasi.

Penggabungan/Peleburan Usaha

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha.

Akuisisi

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Hutang dan Modal

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang dan modal



(dalam Rupiah penuh)

Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Rencana Realisasi Kredit	Total	Realisasi Kredit	Total	
7	8	9	10	11
997.741.381.852,00	997.741.381.852,00	997.741.381.852,00	997.741.381.852,00	-
997.741.381.852,00	997.741.381.852,00	997.741.381.852,00	997.741.381.852,00	-

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka

dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar individu di lingkungan Perseroan maupun dengan pihak-pihak lainnya, terdapat potensi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perseroan. Perseroan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap pengendalian dan penanganan benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan

Perseroan, sehingga dapat tercipta pengelolaan bisnis yang efektif dalam mencapai tujuan Perseroan, bebas dari segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dalam hal transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana yang tertuang dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dari sisi internal, Perseroan memiliki Kebijakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan tercantum dalam Peraturan Direksi tersendiri yang mengatur bahwa Perseroan dilarang memberikan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. Perseroan juga mendokumentasikan dengan baik setiap mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat sekurang-kurangnya mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan tersebut.

Pada prinsipnya setiap insan Perseroan menghindari pengambilan keputusan yang memiliki situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan. Pemberian kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dilakukan berdasarkan batas kewajaran dan sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama	Jabatan	Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Transaksi Afiliasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Selama tahun 2022 tidak terdapat transaksi material yang memenuhi kategori transaksi pihak afiliasi.

Transaksi Pihak Berelasi

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Pihak-pihak berelasi yang melakukan transaksi dengan Perseroan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Pihak Berelasi

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Pemegang Saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Obligasi Pemerintah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Liabilitas Akseptasi, Pinjaman yang diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek
PT BRI Agroniaga Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain dan Surat Berharga yang Diterbitkan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek
PT Utama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Indonesia Power	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Efek-efek
PT Timah (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
Perum Perumnas	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT PP Properti Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Indah Kiat Pulp & Paper	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Industri Energi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Danareksa Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT HK Realtindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Indah Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Jasamarga Bali Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Mandiri Manajemen Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-Efek, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Amarta Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-Efek dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT PP Urban	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, Tagihan lain-lain
PT Taspen (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Patra Jasa	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Virama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Bumi Wira	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Waskita Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah
PT PPA Finance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Waskita Fim Perkasa Realti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Yodya Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Anugerah Bhumiamaya Sentosa	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT PP Properti Jababeka Residen	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Adhi Persada Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas Jakabaring	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas Sentraland	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas TOD Tanjung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Sinergi Investasi Prpperti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas Pondok Cina	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Kawasan Berikat Nusantara	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Adhi Commuter Property	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Tagihan Lain-Lain
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan
PT Tugu Reasuransi Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Puspertino	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek dan Kredit yang diberikan
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang Diterbitkan
PT Centurion Perkasa Iman	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang Diterbitkan
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Pertamina Bina Medika	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan
PT Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek - Efek, Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi
PT Sinergi Colomadu	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Pertamina (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Jasa Marga Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Pegadaian (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT BNI Asset Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Peruri Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang Diterbitkan
PT Telkom Satelit Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang Diterbitkan
PT Inhutani IV	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang Diterbitkan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang diterbitkan

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Aviari Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Biofarma (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Inka Multi Solusi Service	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah dan Tagihan lain-lain
PT PAL Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Wika Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Wika Gedung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan lain-lain

Kewajaran Transaksi dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha Perseroan. Seluruh transaksi dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi dengan pihak lain. Perseroan menjamin bahwa seluruh transaksi bebas dari konflik kepentingan dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Berikut rincian realisasi transaksi pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan transaksi pihak berelasi dengan Manajemen Kunci.

Tabel Transaksi Pihak Berelasi Karena Hubungan Kepemilikan dengan Pemerintah Republik Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021
Aset		
Giro pada bank lain-neto	508.322	96.460
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	61	337
Efek-efek	850.059	1.341.732
Obligasi Pemerintah	51.964.973	46.080.298
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	19.594.018	18.413.051
Tagihan akseptasi	131.356	454.140
Tagihan lain-lain	61.169	135.775
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	73.109.958	66.521.793
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(900.235)	(849.085)
Total aset untuk pihak-pihak berelasi-neto	72.209.723	65.672.708
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	17,96%	17,66%
Liabilitas		
Simpanan nasabah	173.906.896	158.526.678
Liabilitas akseptasi	118.525	161.920
Surat-surat berharga yang diterbitkan	4.355.008	4.277.267
Pinjaman diterima	17.455.685	15.562.294
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	4.499.977	4.499.968
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	200.336.091	183.028.127
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	57,01%	55,85%

Uraian	2022	2021
Dana Syirkah Temporer		
Giro Mudharabah	11.897	12.281
Tabungan Mudharabah	83.465	503.717
Deposito Mudharabah	7.631.970	9.423.801
Total dana syirkah untuk pihak-pihak berelasi	7.727.332	9.939.799
Persentase syirkah untuk pihak-pihak berelasi	31,08%	43,66%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	282.311	172.580
Efek-efek	216.020	346.641
Obligasi Pemerintah	1.518.936	1.538.370
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.081.237	1.125.832
Total pendapatan bunga untuk pihak-pihak berelasi	3.098.504	3.183.423
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	11,96%	12,34%
Beban bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	2.642.731	1.799.624
Simpanan dari Bank Lain	781	44
Surat-surat berharga yang diterbitkan	455.401	916.677
Pinjaman yang diterima	843.147	990.259
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.894	-
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	381.760	401.002
Giro Mudharabah	181	288
Tabungan Mudharabah	6.521	12.676
Deposito Mudharabah	80.613	83.130
Total beban bunga untuk pihak-pihak berelasi	4.416.029	4.203.700
Persentase terhadap total beban bunga dan bagi hasil	40,48%	32,83%
Komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif		
Garansi yang diberikan	426.438	162.825
Irrevocable L/C yang masih berjalan	115.445	74.988
Total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif dari pihak berelasi	541.883	237.813
Persentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	43,35%	18,55%

Tabel Transaksi Pihak Berelasi Dengan Manajemen Kunci

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021
Aset		
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	102.781	145.242
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(374)	(1.047)
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	102.407	144.195
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	0,03%	0,04%
Liabilitas		
Simpanan nasabah	115.340	99.575
Kompensasi karyawan kunci	268.476	236.266
Total liabilitas dari manajemen kunci	383.816	335.841
Persentase terhadap total liabilitas	0,11%	0,10%
Dana Syirkah Temporer		
Tabungan Mudharabah	4.962	1.846
Deposito Mudharabah	5.221	301
Total dana syirkah untuk pihak-pihak berelasi	10.183	2.147
Persentase syirkah untuk pihak-pihak berelasi	0,04%	0,01%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	6.929	9.257

Uraian	2022	2021
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,03%	0,04%
Beban bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	1.732	1.279
Persentase terhadap total beban bunga dan bagi hasil	0,03%	0,01%
Beban gaji dan tunjangan		
Direksi	131.671	101.022
Dewan Komisaris	51.960	38.010
Karyawan Kunci	221.825	171.381
Imbalan Pasca Kerja		
Karyawan Kunci Lain	182.874	181.019
Imbalan Jangka Panjang Lainnya		
Karyawan Kunci Lain	85.602	84.089
Total	673.932	575.521
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	16,08%	15,21%

Kebijakan Mekanisme Reviu atas Transaksi

Seluruh transaksi telah melalui mekanisme *review* sesuai dengan jenis transaksi. Setiap transaksi dilakukan analisis kelayakan transaksi antara lain analisis kredit untuk transaksi kredit kepada pihak berelasi. Demikian pula untuk transaksi investasi telah dilakukan analisis kelayakan investasi. Begitu pula dengan transaksi pihak berelasi lainnya seperti garansi yang diterbitkan dan penempatan pada Bank lain.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang prudent. Seluruh transaksi telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Perseroan

Uraian perubahan peraturan perundang-undangan tahun 2022 dan dampaknya terhadap Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
1.	POJK Nomor 6/POJK.07/2022.	Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	Dampak pada adanya perubahan dan/atau penyesuaian mekanisme dan perlakuan dalam pemberian layanan kepada nasabah sebagai konsumen.	Perubahan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap laporan keuangan.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022.	Pelindungan Data Pribadi (PDP)	Adanya kewajiban bagi bank untuk melindungi data dan/atau informasi pribadi dari subjek data pribadi (nasabah, debitur dan lain-lain sebagaimana definisi subjek data pribadi pada UU PDP).	Dengan disahkannya UU PDP, maka hal tersebut dapat berdampak pada laporan keuangan Bank sepanjang dalam laporan keuangan tersebut berisi pengungkapan terhadap data pribadi dari subjek data pribadi. Namun pengungkapan terhadap data pribadi dari subjek data pribadi tersebut dapat dikecualikan apabila: 1. Subjek data pribadi telah memberikan persetujuan; (Vide Pasal 20 ayat (2) UU PDP). 2. Pengungkapan data pribadi dilakukan sah secara hukum. (Vide Pasal 27 UU PDP).

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
3.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). 2. Pengaturan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh lembaga penyalur. 3. Pengaturan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 4. Penghitungan agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 5. Proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan jenisnya. 6. Pelaporan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). 7. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). 	Bank BTN wajib menyesuaikan terhadap pedoman penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Perubahan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap laporan keuangan.
4.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin bagi Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. 2. Penentuan Kriteria Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi Covid-19. 3. Pemberian Perlakuan Khusus KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Covid-19. 4. Pengaturan Penjaminan atas KUR terdampak pandemi Covid-19. 5. Pengaturan Pelaporan Pelaksanaan Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR terdampak pandemi Covid-19. 	Bank BTN wajib menyesuaikan ketentuan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa berlaku perlakuan khusus (1 Januari 2022-31 Desember 2022). 2. Tambahan subsidi bunga. 3. Penambahan Perikatan KUR untuk calon debitur KUR pada masa pandemi Covid-19. 4. Penambahan biaya-biaya untuk calon debitur KUR pada masa pandemi Covid-19. 	Perubahan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap laporan keuangan.
5.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMN wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. 2. Penerapan Manajemen Risiko meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan komisaris dan Dewan Pengawas. b. Kecukupan Kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pelaporan dan <i>monitoring</i> risiko serta sistem informasi manajemen risiko. d. Sistem pengendalian <i>intern</i> yang menyeluruh. 	Bank BTN melakukan penyesuaian dalam kebijakan berkaitan manajemen risiko.	Perubahan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap laporan keuangan.
6.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis transaksi yaitu transaksi yang bersifat tunai (<i>TOD, TOM, SPOT</i>) dan transaksi derivatif nilai tukar atau transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah. b. Kontrak, baik secara konvensional maupun syariah. c. Waktu transaksi. d. <i>Underlying</i> transaksi, untuk transaksi yang dilakukan di atas jumlah tertentu (<i>threshold</i>) dan untuk transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah. e. Dokumen <i>underlying</i> Transaksi dapat bersifat final atau prakiraan. f. Transaksi melalui pihak ketiga, untuk kegiatan ekonomi tertentu seperti transaksi investasi portofolio dan <i>e-commerce</i>. g. Penyelesaian transaksi, dapat dilakukan secara <i>gross</i>. h. Batasan transaksi, yang meliputi antara lain larangan transfer rupiah ke luar negeri, larangan transaksi <i>non deliverable forward</i> valuta asing terhadap rupiah di luar negeri dan memberikan cerukan, kredit, dan/atau pembiayaan untuk dalam rupiah atau valuta asing kepada bukan penduduk. Selain itu, diatur pula batasan transfer rupiah ke rekening bukan penduduk pada bank di dalam negeri. 2. Pengaturan mengenai pelaku transaksi. 3. Pengaturan mengenai kurs acuan yang dapat digunakan dalam bertransaksi di pasar valuta asing. 	Bank BTN melakukan penyesuaian dalam kebijakan mengenai transaksi valuta asing.	Perubahan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap laporan keuangan.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
7.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUK yang pada saat ini sebesar 6,0%, naik menjadi 7,5% mulai 1 Juli 2022 dan 9,0% mulai 1 September 2022. 2. Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUS dan UUS yang pada saat ini sebesar 4,5%, naik 6,0% mulai 1 Juli 2022 dan 7,5% mulai 1 September 2022. 3. Pemberian remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan kewajiban GWM setelah memperhitungkan insentif bagi bank-bank dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. 	Bank BTN melakukan penyesuaian dalam kebijakan berkaitan transaksi valuta asing.	Perubahan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap laporan keuangan.
8.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/10/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan mengenai transaksi di pasar valuta asing. 2. Pengaturan terkait jumlah tertentu (<i>threshold</i>) dan <i>underlying</i> transaksi. 3. Pengaturan mengenai transaksi melalui pihak ketiga mencakup antara lain mengenai kegiatan ekonomi dan <i>underlying</i> transaksi yang dapat digunakan. 4. Pengaturan mengenai batasan transaksi mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Larangan bagi bank melakukan transaksi tertentu. b. Batasan pemberian kredit bagi bank. c. Pengecualian batasan pemberian kredit bagi bank. 5. Pengaturan transfer rupiah kepada bukan penduduk mengenai kewajiban penggunaan <i>underlying</i> transaksi untuk transfer rupiah kepada rekening bukan penduduk. 	Bank BTN melakukan penyesuaian dalam kebijakan berkaitan transaksi valuta asing.	Perubahan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap laporan keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2022 terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dalam tahun berjalan.

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi

Uraian informasi perubahan kebijakan akuntansi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi Tahun 2022

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi
1	Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual". Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
2	Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak". Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan;
3	Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 per sen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan". Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli;
4	Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 73, "Sewa". Penyesuaian ini mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan";

Dampak Secara Kuantitatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank mencerminkan hasil penilaian kondisi perseroan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2016 Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Dengan Menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk - Based Bank Rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*).

Tabel Tingkat Kesehatan Perseroan Posisi 31 Desember 2021-2022 Secara Individu (*Self Assessment*)

Faktor Penilaian	Penilaian Per 31 Desember 2022	Penilaian Per 31 Desember 2021
	Peringkat	Peringkat
Profil Risiko	2	2
Tata Kelola	2	2
Rentabilitas (<i>Earnings</i>)	2	2
Permodalan (<i>Capital</i>)	1	1
Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko	2	2

Peringkat kesehatan bank posisi Desember 2022 (*Self Assessment*) berada pada peringkat komposit 2 (PK2) yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Momentum perbaikan ekonomi nasional terus berjalan di tengah risiko ketegangan geopolitik global. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2022 tetap kuat dengan pertumbuhan 5,01% yoy. Perkembangan ini sejalan dengan melandainya kasus aktif pandemi Covid-19 dan vaksinasi *booster* yang sudah dilakukan secara masif, sehingga mendorong peningkatan mobilitas. Kondisi ini berkontribusi positif terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga, usaha UMKM dan manufaktur. Hal ini tercermin dari perkembangan dari Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada Triwulan I 2022 yang tetap kuat, sebesar 114,6 dan *Purchasing Manager Index* (PMI) yang sebesar 51, yang menunjukkan level ekspansi.

Sejalan dengan momentum pertumbuhan yang berjalan, intermediasi perbankan terus membaik dengan ketahanan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan. Pada Triwulan I 2022,

kredit nasional tumbuh 6,6% yoy, di mana kenaikan lebih tinggi tercatat pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu sebesar 10,6% yoy. Kenaikan KPR tersebut didorong oleh stimulus Pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor perumahan pada proses pemulihan ekonomi nasional melalui keberlanjutan program hunian bersubsidi, relaksasi PPN dan relaksasi *Loan to Value* (LTV) untuk meningkatkan KPR di segmen komersial. Peningkatan intermediasi tersebut didukung oleh ketahanan sektor perbankan yang kuat, ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) per Maret 2022 yang tetap tinggi, yaitu sebesar 24,8% serta rasio NPL *Gross* yang tetap terjaga sebesar 3,60%.

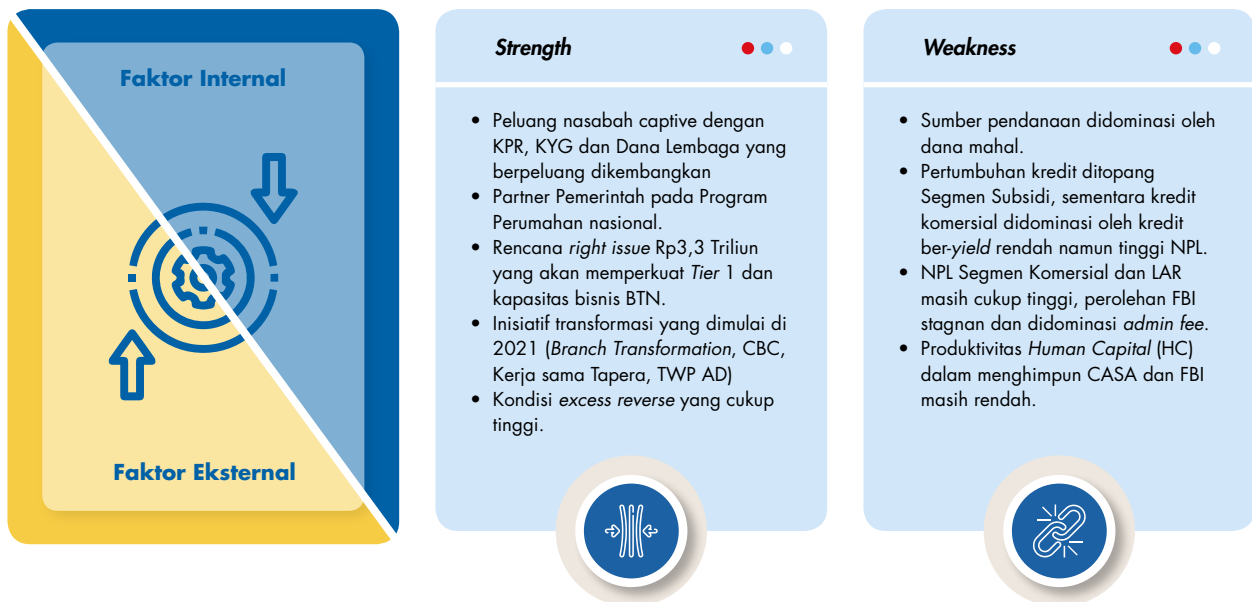
Pemerintah terus mendukung proses pemulihan yang berlangsung, untuk mengantisipasi dampak risiko geopolitik global terhadap ekonomi melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini tercermin dari upaya Pemerintah untuk menjaga ketahanan

energi dan pangan nasional di tengah lonjakan kenaikan harga energi dan komoditas global akibat terganggunya rantai pasok global dengan meningkatkan belanja Pemerintah untuk subsidi energi dan anggaran untuk program Bantuan Sosial (Bansos). Selain itu, untuk melanjutkan proses pemulihan pada sektor keuangan, Bank Indonesia juga menunda kenaikan suku bunga acuan BI 7 days repo hingga Mei 2022, sehingga tren penurunan suku bunga bank terus berlanjut. Meskipun demikian, mempertimbangkan dinamika global, diproyeksikan Bank Indonesia akan meningkatkan suku bunga acuannya pada semester II tahun 2022 yang implementasinya tetap mendukung peningkatan intermediasi perbankan nasional.

Meskipun terdapat ketidakpastian terhadap kondisi makro ekonomi baik di Indonesia maupun global, dengan kekuatan dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan serta inovasi yang berkesinambungan, perubahan kondisi tersebut dapat diakomodir dengan baik oleh Perseroan. Selain itu, dengan penerapan berbagai inisiatif strategi yang tepat, kelangsungan usaha Perseroan dapat terjaga dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perseroan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Asesmen Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Asesmen atas kelangsungan usaha Perseroan dilakukan melalui analisis *Strength Weakness Opportunity Threat* (SWOT). Secara rinci, analisis SWOT Perseroan adalah sebagai berikut:



Opportunity

- Pertumbuhan PDB tahun 2022 diprediksi meningkat menjadi 5,1%-5,4%.
- Kredit tahun 2022 diekspektasikan tumbuh di 8,9%.
- Kuota KPR FLPP Tahun 2022 sebanyak 200 ribu unit lebih tinggi dari tahun 2021 sebanyak 157,5 ribu unit.
- Perpanjangan relaksasi LTV KPR 100% sampai dengan Desember 2022.
- Peluang bisnis digital semakin masif, salah satunya didorong adaptasi *post new normal*.



Strength Opportunity (SO) Strategy

- Mengoptimalkan porsi pada program KPR Subsidi, kerja sama KPR Tapera dan KPR TWVP AD.
- Membangun ekosistem perumahan digital yang menasar nasabah KPR, Debitur Komersial dan Korporasi.
- Meningkatkan penjualan KPR diatas Rp500 juta melalui pengembangan skema KPR, kerja sama *Top Developer* dan *Properti Agent*



Weakness Opportunity (WO) Strategy

- Mengembangkan layanan *digital transaction banking* untuk meningkatkan CASA.
- Meningkatkan kapabilitas *sales* di Cabang, khususnya dalam penjualan produk KPR Non Subsidi, KRING, Kredit SME dan DPK Ritel.
- Mengembangkan sumber FBI baru dari *Treasury, digital channel, wealth* dan bisnis Korporasi.
- Melakukan reorganisasi dan *refocusing* KPI di Cabang.



Threat

- BI *7 Days Repo* diprediksi meningkat menjadi 5,50%.
- Kondisi likuiditas longgar akan berkurang di tahun 2022. Pertumbuhan DPK diproyeksikan lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit yaitu sebesar 7,4%.
- Perbankan dan *Start-Up* semakin masif dalam mengembangkan bisnis layanan keuangan *digital*.
- Persiapan Bank untuk mencukupi rasio *Coverage* debitur restrukturisasi Covid.



Strength Threat (ST) Strategy

- Mengurangi porsi dana *Wholesale* dan melakukan rekomporsi *Wholesale* yang jatuh tempo.
- Meningkatkan *cross sell* pada nasabah *captive* (Debiture KPR, *Developer*, Korporasi) untuk meningkatkan CASA.
- *Partnersip* dan kolaborasi dengan *Fintech* dan Perusahaan *Start-Up* sebagai strategi *an-organic*.
- Alokasi CKPN untuk memitigasi pasca restrukturisasi debitur Covid.



Weakness Threat (WT) Strategy

- Kerja sama Pendanaan jangka panjang dengan institusi dalam dan luar negeri sebagai skema pendanaan KPR yang terjangkau untuk segmen MBR dan Millennial.
- Melanjutkan inisiatif perbaikan proses perkreditan serta *Collection Management*, terutama di segmen Komersial dan SME.
- Melakukan percepatan penjualan aset (*asset sales*) secara bulk untuk mempercepat penyelesaian NPL.



Manajemen Perseroan telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perseroan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan Asesmen

Strategi yang telah disusun berdasarkan analisis SWOT akan berjalan dengan baik dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi Ekonomi Makro pada akhir tahun 2022 diproyeksikan:
 - a. Pertumbuhan PDB sebesar 5,1%-5,9% yoy.
 - b. Suku Bunga Acuan BI 7 Days Repo 5,50%.

- c. Laju Inflasi 4,0%-4,8%.
- d. Nilai tukar Mata Uang Rupiah adalah Rp14.900/USD.
- e. Pertumbuhan kredit sebesar 8,90% yoy.
- f. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 7,40% yoy.
2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi Pemerintah untuk mendukung kebijakan insentif usaha, program kesehatan, usaha korporasi, UMKM dan perlindungan sosial.
3. Memperkuat positioning Perseroan pada bisnis perumahan dan mengembangkan potensi pada ekosistem perumahan.
4. Kinerja keuangan yang baik selama 5 (lima) tahun terakhir.
5. Tingkat Kesehatan Perseroan pada Peringkat Komposit 2 (PK-2), dengan kualifikasi Sehat.

Aspek Perpajakan

Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusinya kepada negara sekaligus menunaikan kewajiban terkait perpajakan.

Berikut disampaikan kontribusi Perseroan melalui pembayaran pajak di tahun 2021-2022.

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Pajak	Tahun 2022	Tahun 2021
Pajak Penghasilan (PPh Badan)	1.001.840	820.461
PPh 21 Perorangan	414.720	323.992
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.032	17.121
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	12	7
Pajak Bumi dan Bangunan	5.103	17.252
Pajak Lainnya	935.023	1.263.881
Total	2.374.730	2.442.714

Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Kondisi ekonomi global selama tahun 2022 sangat fluktuatif. Inflasi global yang meningkat direspon oleh sebagian besar bank sentral di dunia dengan menaikkan suku bunga acuan di negaranya. Kenaikan suku bunga secara global ini berdampak pada koreksi harga surat berharga yang dimiliki Perseroan. Koreksi harga tersebut berimbas pada kenaikan *yield* yang sangat signifikan. Mempertimbangkan adanya potensi peningkatan pendapatan bunga surat berharga akibat kenaikan *yield*, maka investasi difokuskan pada penambahan portofolio *Hold To Maturity* (HTM), khususnya penambahan Surat Berharga Negara, sehingga dampak positif kenaikan *yield* dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan bunga Perseroan.

Perseroan menyusun strategi untuk meminimalisir dampak perubahan kebijakan moneter pada *performance* Perseroan antara lain dengan:

1. Melakukan rekomposisi portofolio surat berharga yang dimiliki.
2. Mengurangi *duration* portofolio agar dapat meminimalisir dampak fluktuasi harga akibat perubahan suku bunga.
3. Meningkatkan pendapatan bunga surat berharga melalui penambahan investasi surat berharga portofolio HTM.

Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

Transaksi spot dan transaksi derivatif periode tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Laporan Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

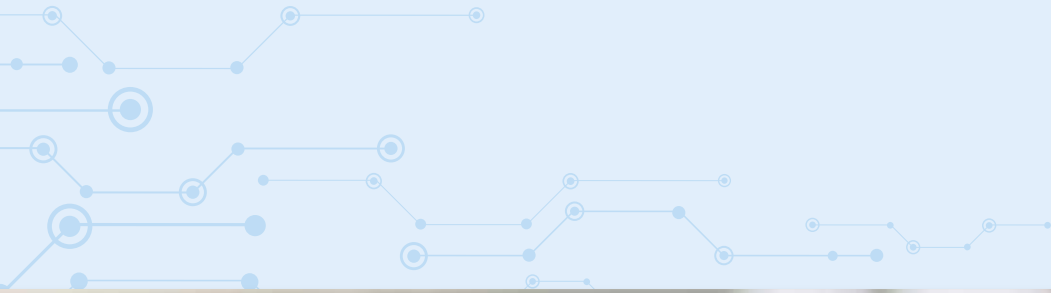
(dalam jutaan Rupiah)

No	Transaksi	BANK				
		2022				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban
A. Terkait dengan Nilai Tukar						
1.	Spot	-	-	-	-	
2.	Forward	-	-	-	-	
3.	Option a. Jual b. Beli	-	-	-	-	
4.	Future	-	-	-	-	
5.	Swap	-	-	-	-	
6.	Lainnya (CCS)	2.641.853	-	-	103.939	
B. Terkait dengan Suku Bunga						
1.	Forward	-	-	-	-	
2.	Option a. Jual b. Beli	-	-	-	-	
3.	Future	-	-	-	-	
4.	Swap	-	-	-	-	
5.	Lainnya	-	-	-	-	
C. Lainnya						
	Jumlah	2.641.853	-	-	103.939	

No	Transaksi	BANK				
		2021				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban
A. Terkait dengan Nilai Tukar						
1.	Spot	-	-	-	-	
2.	Forward	-	-	-	-	
3.	Option a. Jual b. Beli	-	-	-	-	
4.	Future	-	-	-	-	
5.	Swap	-	-	-	-	
6.	Lainnya (CCS)	1.068.975	-	-	31.017	
B. Terkait dengan Suku Bunga						
1.	Forward	-	-	-	-	
2.	Option a. Jual b. Beli	-	-	-	-	
3.	Future	-	-	-	-	
4.	Swap	-	-	-	-	
5.	Lainnya	-	-	-	-	
C. Lainnya						
	Jumlah	1.068.975	-	-	31.017	

Human Capital

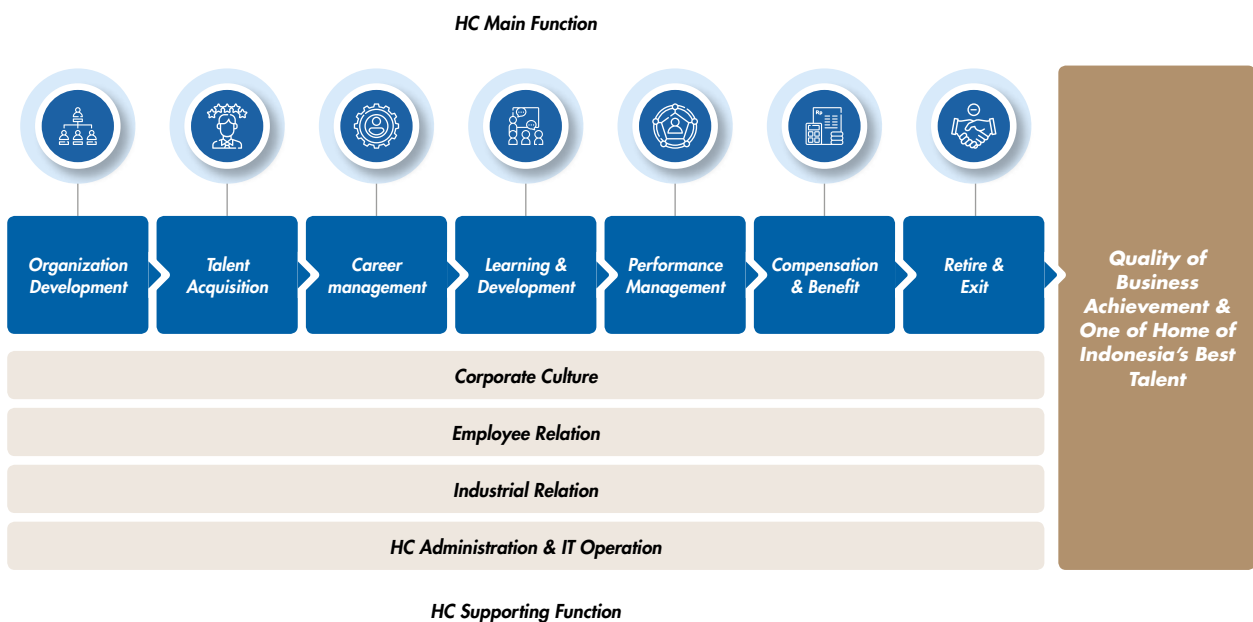




STRATEGI MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Strategi Manajemen *Human Capital* ditujukan untuk menunjang pengembangan bisnis serta mewujudkan aspirasi Perseroan sebagai *One of Home of Indonesia's Best Talent*. Pengembangan *Human Capital* juga dilakukan sesuai dengan siklus *Human Capital* mulai dari pengembangan organisasi, proses rekrutmen pegawai sampai dengan *retirement/exit* serta sesuai aspirasi pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN. Peran *Human Capital* sangat strategis dalam mendukung rencana jangka panjang atau Visi Perseroan yaitu menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025. Oleh karena itu, pengelolaan *Human Capital* menjadi sangat penting untuk mensukseskan visi dan transformasi perseroan tersebut.

Kerangka Pengelolaan *Human Capital*



KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN *HUMAN CAPITAL*

Rekrutmen

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi Perseroan menjadi *One of Home of Indonesia's Best Talent*, inisiatif strategis yang dilakukan adalah mewujudkan Perseroan menjadi pilihan utama tempat kerja bagi talent terbaik dengan membangun praktik pengelolaan SDM yang adaptif dan inovatif serta memperkuat *employer branding* untuk menarik minat kandidat dan mempertahankan talenta terbaik.

Dalam proses rekrutmen, Perseroan melakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan jalur rekrutmen yang dilakukan dan melakukan program *Employee Value Proposition (EVP)*. Pelaksanaan rekrutmen pegawai dilakukan melalui berbagai *channel* rekrutmen untuk menjaring *talent fresh graduate* maupun *experienced hire/professional hire*. Program rekrutmen yang dilakukan dalam rangka membangun EVP yaitu melalui berbagai kegiatan seperti *Talent Scouting*, *Job Fair*, *Beasiswa Pre Graduate*, *Webinar/Seminar*, sebagai berikut:

- Program *Talent Scouting* Universitas Brawijaya (UNBRAW), Malang
- Program *Talent Scouting* Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta
- Program *Talent Scouting* Universitas Sumatera Utara (USU), Medan
- *Job Fair* Pasar Kerja ID UNISA Surabaya
- *Job Fair* National Pasar Kerja ID JCC Senayan
- *Job Fair* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta
- Program *Beasiswa Pre-Graduate* Universitas Brawijaya (UNBRAW), Malang
- Program *Beasiswa Pre-Graduate* Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya
- Program Kerja sama Program ODP S2 dengan LPDP
- *Career Days Company Sharing Session* UGM
- *Lead The Fest* ITB

Untuk jalur rekrutmen di tahun 2022 yaitu:

- a. *Teller Service* (TS)
- b. *Customer Service* (CS)
- c. Sekretaris (SKR)
- d. *General Banking Staff* (GBS)
 - GBS Reguler
 - GBS Program Perekrutan Bersama (PPB) BUMN - FHCI
 - GBS Khusus *Collateral Verification Officer* (CVO)
 - GBS Program Perekrutan Bersama (PPB) BUMN (Papua & Disabilitas)
 - Alih Status Tenaga Alih Daya (TAD) *Collection*
 - Alih Status Tenaga Alih Daya (TAD) *Juara Best Front Liner Award* (BFA)

- e. *Officer Development Program* (ODP)
 - ODP IT
 - ODP Syariah
 - ODP Bisnis
 - ODP General
 - ODP Wholesale
- f. *Experienced/Pro Hire*

Pada tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan rekrutmen sebanyak 802 orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jalur Rekrutmen	Jumlah Rekrutmen
1.	<i>Teller Service</i>	89
2.	<i>Customer Service</i>	101
3.	Sekretaris	21
4.	<i>General Banking Staff</i>	320
	a. Reguler	129
	b. PPB BUMN – FHCI	46
	c. PPB BUMN – Papua & Disabilitas	6
	d. Khusus CVO	69
	e. Alih Status TAD <i>Collection</i>	68
	f. Alih Status TAD <i>Juara BFA</i>	2
5.	<i>Officer Development Program</i>	241
	a. ODP IT dan Digital	71
	b. ODP Syariah	52
	c. ODP Bisnis	43
	d. ODP General	75
6.	<i>Experienced/Pro Hire</i>	30
	Jumlah	802

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi pegawai baik *hard skill* maupun *soft skill* menjadi salah satu program utama Perseroan pada tahun 2022 sesuai dengan Surat Edaran Direksi No. 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pembelajaran dan Pengembangan Pegawai, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan *Human Capital*, ditetapkan bahwa Pegawai yang berhak mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah pegawai dengan status pegawai tetap dan pegawai dengan status tertentu. Dalam hal ini setiap pegawai memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan.

Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan yang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan Perseroan sebagai "*Learning Organization*", dimana setiap pegawai didorong untuk mengembangkan kompetensinya agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik, mempersiapkan diri menghadapi perubahan, tantangan baru dan/atau menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Pengelolaan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan serta kebutuhan bisnis dengan metode 70:20:10 (*70% learning from doing, 20% learning from other dan 10% formal learning*). Kebijakan pembelajaran dan pengembangan, menerapkan konsep ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation*).

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan

Perseroan melakukan program pengembangan SDM untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan secara berkesinambungan dengan metode pendidikan, pelatihan, penugasan khusus maupun program mutasi dan promosi. Berikut tabel jumlah pengembangan SDM berdasarkan Level Jabatan pada periode Januari – Desember 2022:

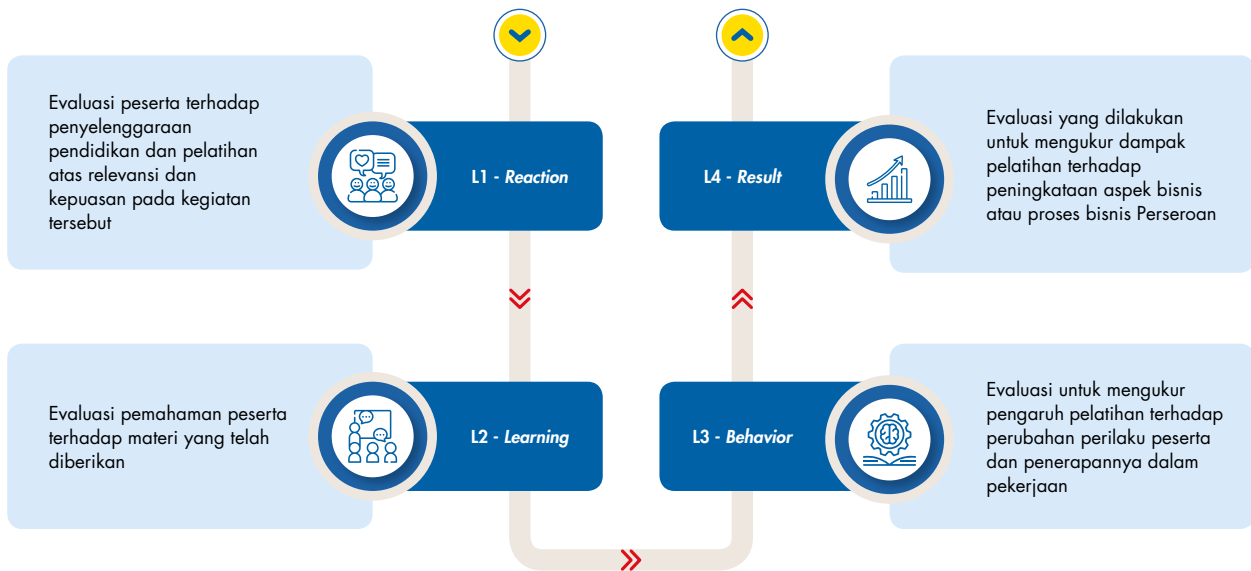
No.	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah	Jumlah Peserta yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
1.	DIREKSI		9	9	100%	
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		9		100%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		3		33%
2.	KOMISARIS		8	8	100%	
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		8		100%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		4		50%
3.	EXECUTIVE VICE PRESIDENT		21	21	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam Bidang <i>Sharia Banking</i>		1		5%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		21		100%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		21		100%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>Sales and Service</i>		3		14%
4.	VICE PRESIDENT		123	123	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam Bidang <i>Sharia Banking</i>		6		5%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang Kredit dan Risiko Kredit		26		21%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		89		72%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		122		99%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>Sales and Service</i>		24		20%
5.	ASSISTANT VICE PRESIDENT		162	162	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam Bidang <i>Sharia Banking</i>		16		10%

No.	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah	Jumlah Peserta yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang Kredit dan Risiko Kredit		41		25%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		94		58%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		158		98%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>Sales and Service</i>		35		22%
6.	SENIOR MANAGER		167	167	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam Bidang <i>Sharia Banking</i>		26		16%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang Kredit dan Risiko Kredit		81		49%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		102		61%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		167		100%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>Sales and Service</i>		30		18%
7.	MANAGER		976	976	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam Bidang <i>Sharia Banking</i>		133		14%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang Kredit dan Risiko Kredit		379		39%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		562		58%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		976		100%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>Sales and Service</i>		384		39%
8.	ASSISTANT MANAGER		2.741	2.741	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam Bidang <i>Sharia Banking</i>		380		14%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang Kredit dan Risiko Kredit		1.170		308%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		1.843		158%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		2.741		149%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>Sales and Service</i>		774		28%
9.	SENIOR STAFF		5.512	5.512	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam Bidang <i>Sharia Banking</i>		787		14%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang Kredit dan Risiko Kredit		1.546		28%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		519		9%

No.	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah	Jumlah Peserta yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		5.509		100%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang Sales and Service		1.918		35%
10.	STAFF		1.950	1.950	100%	
	Business & Sharia Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum dan sebagainya dalam Bidang Sharia Banking		261		13%
	Credit & Risk	Meningkatkan kompetensi di bidang Kredit dan Risiko Kredit		129		7%
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		1.950		100%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang Sales and Service		1.111		57%
JUMLAH TOTAL			11.669	11.669	100%	

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik dari segi materi, metode penyampaian, kualitas pengajar maupun infrastruktur pendidikan dan pelatihan. Perseroan melakukan evaluasi dengan menggunakan metode KirkPatrick yang terdiri dari 4 (empat) level, yaitu:



Biaya Pengembangan Kompetensi

Tahun 2022 Perseroan telah mengalokasikan biaya pengembangan kompetensi bagi pegawai yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 72% dibandingkan tahun 2021, Perseroan menetapkan metode *delivery blended learning* yaitu menggabungkan *online learning* dan *classroom* sehingga pelaksanaan pendidikan menjadi efisien tanpa mengurangi efektivitas dari masing-masing program pendidikan dan pelatihan untuk terus meningkatkan nilai tambah bagi para pegawai salah

satunya melalui pemenuhan kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu, di Tahun 2022 terdapat relaksasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah, sehingga beberapa program pendidikan dan pelatihan mulai dilaksanakan kembali dengan metode *Classroom*. Adapun besaran biaya pengembangan kompetensi pegawai secara total dapat dilihat pada tabel berikut:

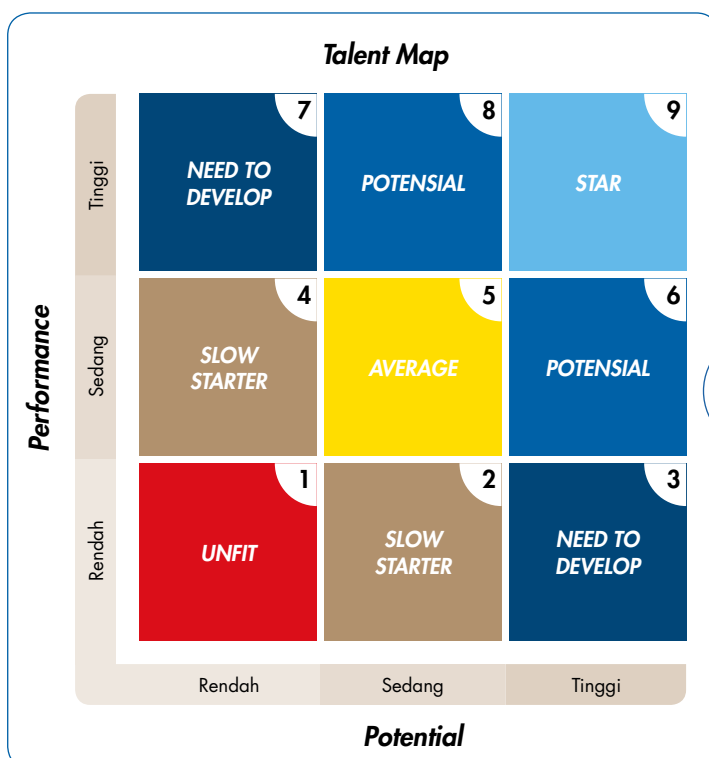
Biaya pengembangan kompetensi (dalam jutaan Rupiah)		Pertumbuhan	
2022	2021	Dalam mata uang (jutaan Rupiah)	Dalam Persen (%)
86.945	50.602	36.343	72%

Pengembangan Karir

Pengembangan karir di Perseroan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Direksi No. 26/DIR/HCD/2014 tanggal 26 Juni 2014 Perihal Perencanaan Karir Pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Secara umum pola karir yang diatur Perseroan untuk seluruh pegawai yaitu pola karir *fast track*, *middle track* dan *normal track*. Adapun sebagai dasar dalam pengelolaan karir pegawai, dilakukan *talent mapping* dengan melakukan pengelompokan pegawai berdasarkan potensi pegawai.

Talent mapping pegawai terdiri dari aspek kinerja dan aspek potensi. Aspek kinerja dan aspek potensi masing-masing dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu rendah, sedang dan tinggi. Aspek kinerja diambil dari penilaian kinerja pegawai, sedangkan aspek potensi dilihat dari 4 (empat) komponen sebagai berikut:

1. Hasil asesmen aspek kognitif dan kepribadian, bobot 75%
2. Hasil pengetahuan dan ketrampilan teknis, bobot 10%
3. Pendidikan terakhir, bobot 5%
4. Pengalaman kerja, bobot 10%

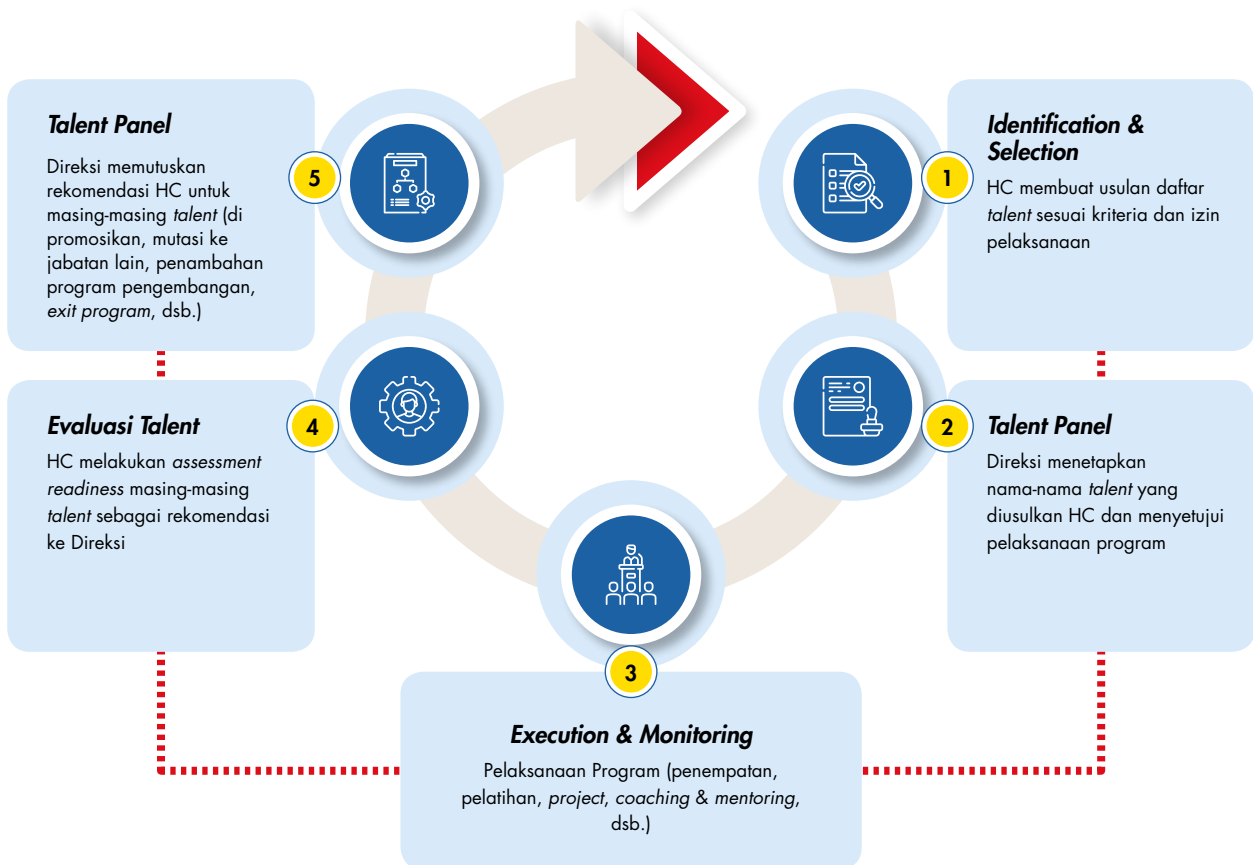


Keterangan: Jumlah promosi disesuaikan dengan kemampuan Perseroan

Konsep pengembangan karir Perseroan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, ketersediaan pegawai, *mapping* potensi dari skor *talent mapping*, pola pergerakan karir sesuai dengan risiko jabatan dan pergerakan jabatan. Hal ini untuk memastikan bahwa pengembangan karir pegawai juga sejalan dengan kebutuhan bisnis atau kebutuhan dalam pemenuhan transformasi/perubahan organisasi.



Untuk memastikan pemenuhan suksesor juga dilakukan program-program pengembangan karir untuk berbagai level jabatan. Untuk pelaksanaan program dilaksanakan dengan langkah-langkah mulai dari identifikasi dan seleksi kandidat, sampai dengan *talent panel* untuk menentukan pergerakan karir atau posisi kandidat dari hasil pelaksanaan program. Adapun jenis pengembangan yang dilakukan kepada kandidat yaitu meliputi pendidikan *leadership*, *coaching* dan *mentoring*, pemberian target spesifik, *project assignment*, pendidikan teknis dan sertifikasi *mandatory*, penugasan mengajar/pemateri, sertifikasi. Selain itu, dilakukan juga *executive coach*, rotasi/*replacement*, *company benchmark*, *join association* (asosiasi profesi perbankan), seminar/konferensi dan *assignment* ke tim *ad-hoc* untuk menambah *exposure*, *experience* dan *network* dari kandidat.



Adapun aktivitas dalam mendukung pengembangan karir pegawai selama tahun 2022 yaitu:

Rincian Assessment Tahun 2022

No	Keterangan	Peserta
1	Assessment Grade 8 - 13 (ASTONIA)*	2.045
2	Assessment Grade > 13 Menggunakan Jasa Konsultan	753
3	Assessment BOD-1 (Kompetensi Kementerian BUMN)	48
4	Pilot Project Assessment Kompetensi Teknis	200
Total Pegawai		3.046

*) ASTONIA merupakan aplikasi internal Perseroan untuk pelaksanaan asesmen pegawai

Rincian Promosi Pegawai Tahun 2022

Grade	Jumlah Peserta
8	2
9	299
10	144
11	854
12	462
13	435
14	143
15	71
16	37
17	36
18	21
19	11
20	6
21	1
Grand Total	2.522

Rincian Talent Acceleration Program (TAP) Tahap 1 Tahun 2022

Grade	Jumlah Peserta
14	2
15	37
16	26
17	16
Grand Total	81

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pegawai dilakukan secara *online* melalui platform *Intelligence BTN Employee Self Service (IBES)* yaitu pada menu *Performance Apraisal Employee*. Masing-masing pegawai

melakukan proses penilaian kinerja dengan menginput sasaran kinerja sesuai dengan jabatan masing-masing dan realisasi kinerja yang selanjutnya dilakukan validasi serta *approval* oleh atasan pegawai.

Adapun komponen yang menjadi penilaian yaitu:

a. Penilaian Kinerja (Bobot 90%)

Merupakan penilaian berdasarkan *Key Performance Indicator* dari jabatan pegawai. Adapun Penilaian kinerja terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

- Komponen KPI (*Key Performance Indicator*) *Cascading* yaitu KPI yang didapatkan dari hasil *cascading* (sesuai tanggung jawab dan peran dari individu tersebut) terhadap KPI dari *layer* di atasnya atau KPI unit kerjanya. Komponen ini mencerminkan kontribusi suatu individu terhadap keberhasilan Unit Kerjanya. Adapun jenis *cascading* adalah sebagai berikut:

Fully Cascade : KPI Unit diturunkan sepenuhnya ke pegawai dengan target yang sama.

Partially Cascade : KPI Unit diturunkan ke pegawai dengan target/segmen yang telah dibagi (sesuai tanggung jawab individu).

Contributory Cascade : KPI Unit diturunkan ke pegawai dalam ukuran KPI lain yang dapat mendukung pencapaian KPI unit tersebut (sesuai peran pegawai).

- Komponen *Performance Indicator (PI)* yaitu ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Uraian Pekerjaan (*Job description*) pegawai. Komponen ini mencerminkan kinerja individu berdasarkan *job desc* nya.

b. Penilaian Implementasi Budaya (Bobot 10%)

Merupakan penilaian dari atasan langsung kepada pegawai berdasarkan penjabaran terhadap implementasi budaya Perseroan.

Finalisasi penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh Komite Personalia di masing-masing unit kerja untuk selanjutnya disampaikan ke Human Capital Management Division sebagai dasar dalam penentuan remunerasi, pengembangan karir dan pencatatan dalam sistem Human Capital Information System (HCIS).

Pada tahun 2022, telah dilakukan penilaian kinerja kepada pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Penilaian	Jumlah Pegawai
Istimewa	3.036
Sangat Baik	3.794
Baik	3.901
Cukup	89
Kurang	33
Total	10.853

Remunerasi

Perseroan telah menerbitkan Surat Edaran Direksi No.16/SE/DIR/HCSD/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi dengan mempertimbangkan aspek, antara lain stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Melalui surat edaran tersebut, Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan remunerasi Perseroan telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Cabang bersangkutan. Perseroan memiliki kebijakan memberikan tunjangan regional untuk daerah-daerah tertentu. Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

- 1) Kebijakan Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja**

Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.
- 2) Metode yang mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu**

Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran Kinerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing.

Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap budaya perusahaan dan kompetensi *leadership* bagi pegawai yang memiliki bawahan.
- 3) Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi**

Metode Penyesuaian remunerasi terkait pencapaian kinerja, dilakukan perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji

pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan *Comparatio*. Dalam hal ini *Comparatio* dapat diartikan nilai prosentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok Pegawai Tetap terhadap *midpoint* pada *range* Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang Pegawai Tetap yang bersangkutan.

Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Jasa Produksi sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang terefleksi dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

Program Pensiun

Perseroan memberikan perhatian atas kesejahteraan pegawai menjelang pensiun melalui program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Program tersebut diperuntukan bagi pegawai tetap yang telah mencapai usia 55 Tahun. MPP diselenggarakan selama 12 bulan sebagai kesempatan untuk mengikuti berbagai program pelatihan sehingga diharapkan dapat mendukung keberlangsungan hidup selepas pensiun.

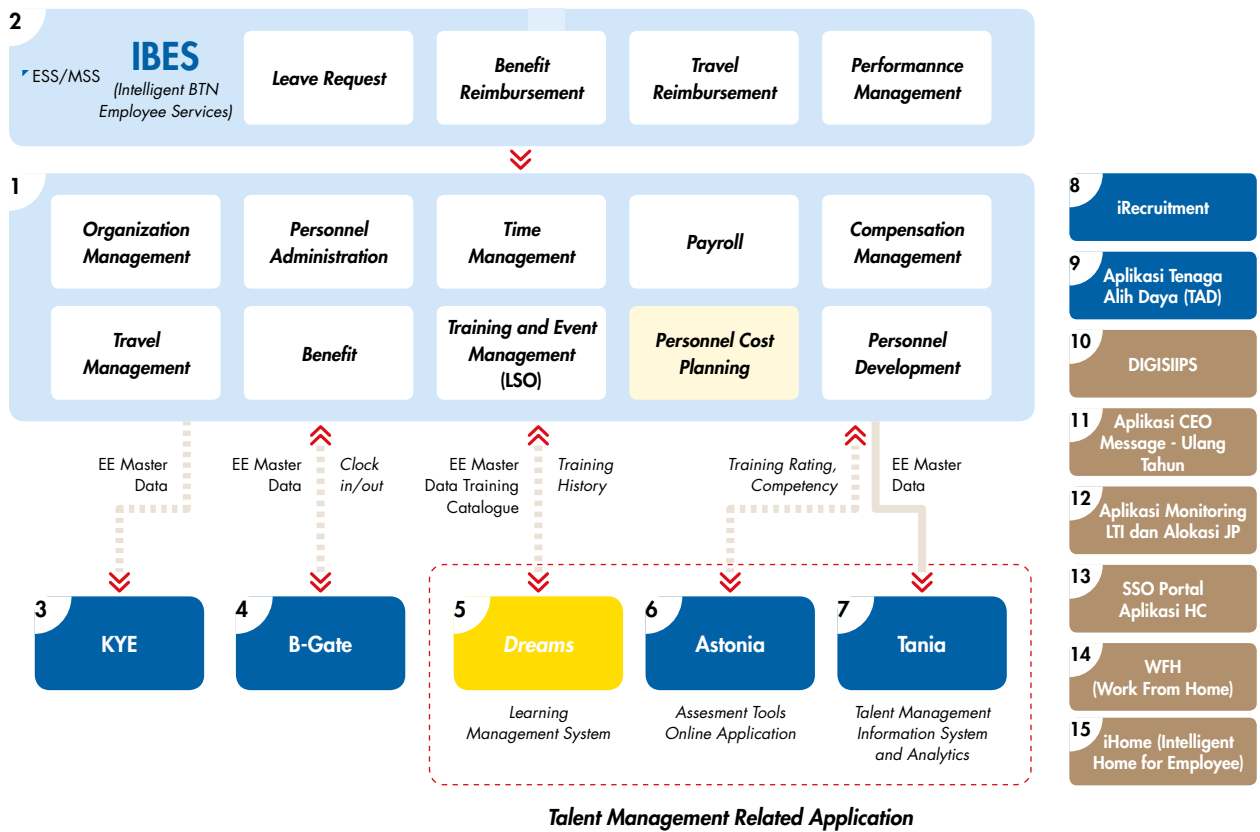
Pelaksanaan program pensiun merupakan bentuk apresiasi kepada pegawai tetap atas kontribusinya di Perseroan. Pegawai tetap yang telah mencapai usia pensiun normal yaitu 56 tahun dan pegawai tetap dengan status *teller staff*, *customer service staff* dan sekretaris yang berusia 36 tahun berhak mendapatkan manfaat pensiun. Perseroan menyelenggarakan program manfaat pensiun yang terdiri dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) sebagai hak pegawai tetap yang telah menjadi peserta Dana Pensiun.

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), pegawai tetap mendapatkan manfaat sebesar formula yang sudah ditentukan oleh Dana Pensiun dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat diterima pegawai setinggi-tingginya 80% dari Penghasilan Dasar Pensiun mengacu kepada Ketetapan Direksi yang mengatur tentang Peraturan Dana Pensiun Perseroan (Dapen BTN), sedangkan pada Program Iuran Pasti, pegawai tetap mendapatkan manfaat pensiun dari akumulasi saldo iuran sebesar 2,5% dari gaji yang bersangkutan dan 7,5% dari Perseroan serta hasil pengembangannya. Pada tahun 2022, sebanyak 83 pegawai telah menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).

HUMAN CAPITAL INFORMATION SYSTEM

Dalam pengelolaan *Human Capital* Perseroan, kebijakan mengenai pengelolaan *Human Capital* dilakukan oleh Divisi Human Capital Strategy Division (HCSD). Kebijakan dilakukan sesuai dengan siklus *Human Capital* mulai dari rekrutmen pegawai dan *on boarding*, sampai dengan kebijakan retirement/ exit pegawai. Selain itu, HCSD juga bertanggungjawab atas kelengkapan organisasi seperti *work load analysis* (WLA), *job description*, *job grading*, *job layer* serta kelengkapan organisasi pada sistem Human Capital Information System (HCIS).

Pengelolaan *Human Capital* Perseroan didukung dengan pengembangan *information technology* (IT) yang memadai untuk memastikan proses operasional dalam pemenuhan hak-hak pegawai dapat berjalan dengan baik. Pengembangan IT *Human Capital* juga digunakan untuk memastikan dan memudahkan dalam proses rekrutmen pegawai, *assessment*, pengembangan karir, *performance management*, pembayaran remunerasi dan *benefit* serta proses operasional lainnya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Secara garis besar *framework* IT *Human Capital* dapat digambarkan dalam bagan berikut:



INTERNALISASI BUDAYA

Perseroan menyadari pentingnya penerapan budaya perusahaan karena dapat mendorong kinerja Perseroan secara signifikan. Perseroan telah beberapa kali memodifikasi budaya perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa budaya kerja Perseroan tetap relevan dengan lingkungan eksternal dan ekosistem bisnis yang dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Budaya Perseroan saat ini adalah AKHLAK secara berurutan adalah Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta diikuti dengan 18 poin yang menjelaskan AKHLAK secara lebih detail adalah pondasi dari budaya perusahaan Perseroan.

Program Budaya Perusahaan di tahun 2022 berfokus pada membangun kultur organisasi *high performing*, top manajemen sebagai teladan dan *role model* serta kepatuhan terhadap sistem, prosedur dan operasional (SOP) Perseroan. Program budaya tahun 2022 merupakan serangkaian dari tahapan transformasi budaya perusahaan yang meliputi 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

1. Tahun 2022: Penguatan pondasi dasar & pembangunan momentum budaya
2. Tahun 2022: *Performance driven culture*
3. Tahun 2023: Pelaksanaan budaya mendorong penciptaan nilai & keunggulan inovasi
4. Tahun 2024: Pelaksanaan budaya mendorong penciptaan nilai & keunggulan inovasi
5. Tahun 2025: Penguatan untuk menjadi pemain global (*sustain new practices*)

Pembangunan Pondasi Dasar *Corporate Culture* tahun 2022 ini, diarahkan pada pembangunan budaya *Performance Culture* dalam menentukan target dan juga bagaimana mencapainya secara konsisten. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan metode 4 *Discipline Execution* (4DX) sebagai pembiasaan kepada seluruh individu maupun unit kerja untuk dapat *concern* terhadap target yang telah ditetapkan dan bagaimana cara mencapainya dengan membangun kerja sama tim. Sehingga, target dapat dicapai dengan langkah yang terukur dengan selalu mengutamakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Sejalan dengan upaya penguatan pondasi dasar dan pembangunan momentum budaya, transformasi budaya perusahaan dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan kapabilitas dalam menerapkan AKHLAK untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kementerian BUMN telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-7/MBU/07/2020 yang menetapkan AKHLAK sebagai *Core Values* BUMN. AKHLAK terdiri atas 6 (enam) Nilai Utama dan 18 Panduan Perilaku sebagai berikut:

- Amanah, yakni memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- Kompeten, yakni terus belajar mengembangkan kapabilitas.
- Harmonis, yakni saling peduli dan menghargai perbedaan.
- Loyal, yakni berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- Adaptif, yakni terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- Kolaboratif, yakni membangun kerja sama yang sinergis.

18 (Delapan Belas) Panduan Perilaku AKHLAK bagi BTNers:

AMANAH

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

KOMPETEN

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

HARMONIS

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

LOYAL

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

ADAPTIF

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

KOLABORATIF

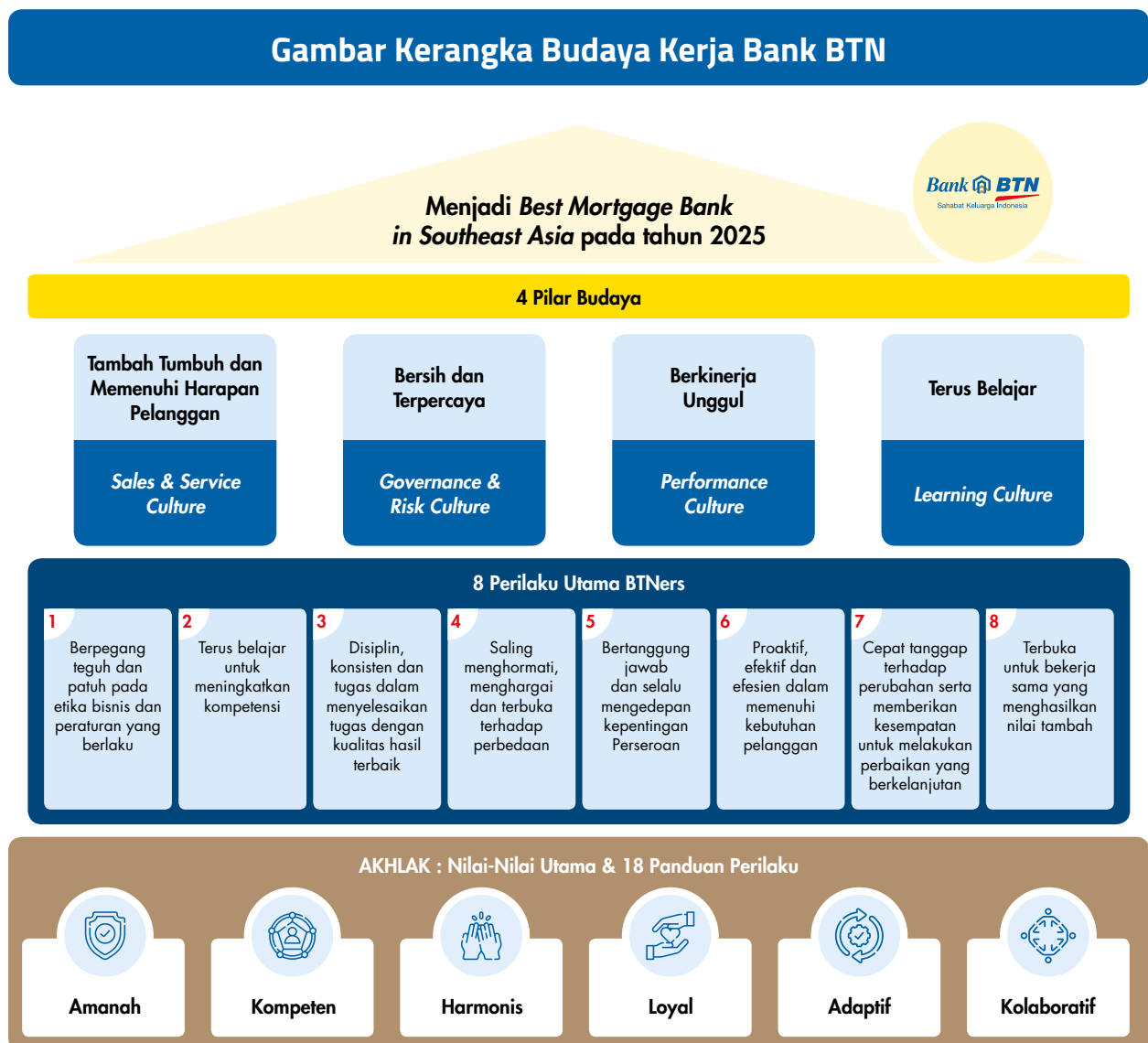
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Sejalan dengan *core values* AKHLAK tersebut, maka perilaku utama BTNers dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) poin utama:

1. Berpegang teguh dan patuh pada etika bisnis dan peraturan yang berlaku.
2. Terus belajar untuk meningkatkan kompetensi.
3. Disiplin, konsisten dan tuntas dalam menyelesaikan tugas dengan kualitas hasil terbaik.
4. Saling menghormati, menghargai dan terbuka terhadap perbedaan.
5. Bertanggung jawab dan selalu mengedepankan kepentingan Perseroan.
6. Proaktif, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
7. Cepat tanggap terhadap perubahan serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
8. Terbuka untuk bekerja sama yang menghasilkan nilai tambah.

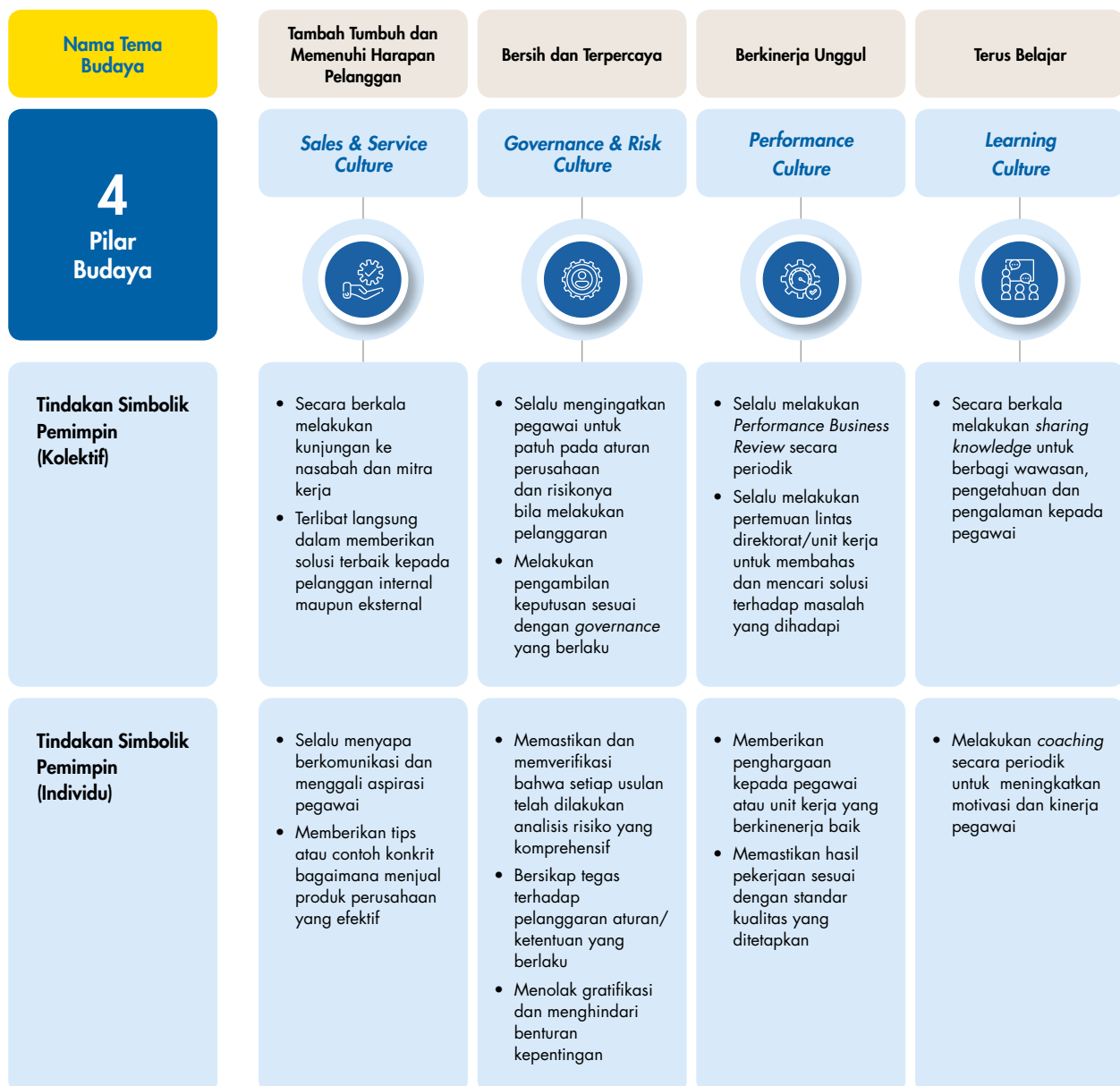
Kerangka Strategi Penguatan Budaya Perseroan

Kerangka strategi disusun sebagai pedoman penguatan implementasi Budaya Perseroan dengan Perilaku AKHLAK untuk mewujudkan visi Perseroan Menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025. Adapun 4 (empat) pilar budaya perusahaan, meliputi *Sales & Service Culture, Governance & Risk Culture, Performance Culture* dan *Learning Culture*.



Untuk mendukung tujuan Perseroan dengan berlandaskan 6 (enam) Nilai dan 18 (delapan belas) Panduan Perilaku Utama AKHLAK, terdapat empat pilar budaya yang menjadi acuan tema Program Budaya Perusahaan Tahun 2022, yaitu:

1. *Sales and Service Culture*, dengan memaksimalkan penggunaan BTN Solusi di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang serta melakukan operasional *excellence* (di Kantor Pusat).
2. *Governance and risk culture*, dengan melaksanakan *go-check* dan *compliance excellence*.
3. *Performance culture*, dengan melaksanakan 4DX atau *performance review*.
4. *Learning culture* dengan melaksanakan *learning, sharing & doing*.



STRUKTUR PENGELOLA HUMAN CAPITAL

Pengelolaan *Human Capital* dikelola oleh Direktorat Human Capital, Compliance & Legal yang dipimpin oleh Direktur Human Capital, Compliance & Legal sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.52/SK/DIR/TPMD/2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Adapun pengelolaan Human Capital Perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) Divisi yaitu Human Capital Strategy Division (HCSD), Human Capital Management Division (HCMD) dan Learning Management Division (LMD), seperti struktur berikut:

Struktur Organisasi Pengelolaan *Human Capital*



Masing-masing divisi yaitu HCSD, HCMD dan LMD memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

Human Capital Strategy Division (HCSD)

Menyusun strategi dan kebijakan terkait *human capital* untuk memenuhi kebutuhan dalam usaha pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan dengan lingkup tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun strategi dan kebijakan terkait *human capital* untuk memenuhi kebutuhan pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan.
- Mengelola kebijakan dan strategi *human capital* yang berkaitan dengan *Organizational Development* dan *Engagement* agar dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.
- Mengelola kebijakan dan strategi *human capital* yang berkaitan dengan *Rewards*, *Administration* dan *Human Capital Information System* (HCIS) agar dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.
- Mengelola kebijakan dan strategi *human capital* yang berkaitan dengan *Acquisition* dan *Development* agar dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.
- Mengelola SOP yang berkaitan dengan kebijakan program *human capital* agar dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.
- Mengelola kegiatan *Post Implementation Review* dari kebijakan *human capital* meliputi proses *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada sehingga lebih relevan dan mendukung operasional bisnis Perseroan.
- Mengkoordinasikan proses sosialisasi, penyampaian dan dokumentasi kebijakan *human capital* kepada seluruh pegawai.
- Mengkoordinasikan penyusunan, *monitoring*, administrasi KPI unit kerja dan individu di lingkungan HCSD untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Human Capital Management Division (HCMD)

Mengelola dan memastikan pelaksanaan strategi pengelolaan *human capital management* untuk mendukung pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan dengan lingkup tanggung jawab yaitu:

- Mengelola dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, penentuan struktur gaji dan kompensasi serta *review* tahunan untuk memastikan pencapaian SLA pelayanan HCMD.
- Mengelola dan mengawasi program rekrutmen yang meliputi *fresh graduate*, *experience & pro hire* dan *outsourcing & internship* untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
- Menjadi wakil Perseroan dalam pengelolaan hubungan industrial di Perseroan baik dengan internal, eksternal dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam rangka mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja yang optimal.
- Mengelola dan mengawasi operasional terkait kepegawaian dalam rangka mendukung operasional bisnis.
- Mengelola dan mengawasi pengembangan karyawan, mulai dari *career path*, *talent management* dan *succession planning* untuk pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan.
- Mengkoordinasikan interaksi dengan kantor wilayah terkait kinerja (*performance*), pemenuhan kebutuhan SDM (rekrutmen), perencanaan karir dan suksesi untuk memenuhi kebutuhan bisnis kantor cabang per wilayah.

Learning Management Division (LMD)

Mengelola dan memastikan pelaksanaan strategi peningkatan kompetensi *human capital* Perseroan termasuk di dalamnya merencanakan, menganalisis, mendesain, menyusun strategi, mengembangkan, memberikan *learning solution*, mengkomunikasikan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi untuk mendukung pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan dengan lingkup tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengelola dan mengawasi kegiatan operasional *training*, fasilitas, penyusunan *budget, database & reporting* termasuk *learning program monitoring & evaluation* untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pegawai Perseroan.
- b. Mengelola dan mengawasi pengembangan kurikulum dan pelaksanaan *training* terkait *leadership*, bisnis dan *sharia*, kredit dan risiko, penjualan dan pelayanan serta pendukung kegiatan bisnis termasuk pengembangan program sertifikasi untuk setiap jabatan berdasarkan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pegawai.
- c. Memberikan arahan strategi pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi karyawan dan memastikan *delivery* yang efektif serta efisien untuk mendukung pencapaian target bisnis.
- d. Melakukan koordinasi dengan para *stakeholder* untuk memastikan kesesuaian program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- e. Memastikan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi pegawai ke dalam program pembelajaran dan pengembangan yang tepat.
- f. Menentukan program pendidikan dan pelatihan dan penggunaan infrastruktur pendukung sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- g. Memastikan penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan *best practice* dan yang memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan sesuai level jabatan dan fungsi tugasnya.
- h. Mengembangkan kapabilitas *Department/School Head, Faculty Member, Program Manager* dan jabatan lain di *Learning Management Division* sesuai fungsi masing-masing.
- i. Memastikan hasil proses pembelajaran memberikan nilai tambah yang diukur melalui teknik evaluasi secara *best practice* di pembelajaran dan pengembangan.

RENCANA KERJA HUMAN CAPITAL 2023

Rencana kerja *Human Capital* 2023 dituangkan dalam *Roadmap Human Capital*. *Roadmap Human Capital* ini merupakan salah satu bentuk transformasi bidang *Human Capital* secara menyeluruh untuk mendukung pencapaian bisnis dan pencapaian Visi Perseroan di tahun 2025. Adapun rencana kerja *Human Capital* untuk mendukung Visi *Human Capital* sebagai *One of Home of Indonesia's Best Talent*.

Secara umum rencana kerja *Human Capital* tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- Program Pengembangan *People Analytic*.
- Program Pengembangan *Digital Employee Service Center*.
- Program Pengembangan HC Sigle Sign On.
- Implementasi *Standardized Sales Incentive*.
- Program Akselerasi Karir Tahap 2.
- Program BTN Millennials Leader.
- Program *Talent Mobility & Talent Exchange*.
- Program Asesmen Kompetensi Teknis.
- Pengembangan Aplikasi *Monitoring* Biaya Tenaga Kerja.
- Program Pengembangan BOD-1 dan BOD-2.
- Program Pengembangan *Nominated Talent* KBUMN.
- Pengembangan Aplikasi TANIA (*Talent Management Information System and Analytic*) dan ASTONIA (*Assessment Tools Online Application*).
- Pengembangan dan penguatan fungsi *Human Capital Business Partner*
- Program Pemenuhan dan Pengembangan Talent Digital.
- Pengembangan *Individual Development Plan* (IDP).
- Pengembangan BTN *Digital Library*.
- Program Penguatan kapabilitas, produktivitas dan daya saing SDM.
- Otimalisasi Pengelolaan TAD dan Pengembangan Aplikasi *Monitoring* Tenaga Alih Daya (TAD).
- Program Rekrutmen Pegawai sesuai Kebutuhan Perseroan.
- Pengembangan dan Pemenuhan *Women Talent & Millennials Talent* Sesuai Arahan KBUMN.
- Implementasi Pengukuran *Monitoring* Produktivitas Pegawai Tersegmentasi.
- Implementasi Program Budaya Kerja AKHLAK.
- Pelaksanaan *Employee Relation Forum* dengan Seluruh Unit Kerja.
- Program *Employer Branding* dan *Employee Value Proposition* (EVP).
- Implementasi HC Strategi khususnya di area *competency development program* di bidang *Sales, Digital, Analytic* dan *Collection*.

Selain program yang disebutkan di atas, dilakukan juga inisiatif-inisiatif lainnya dalam rangka mendukung pencapaian Visi Perseroan yaitu menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025.



Teknologi Informasi

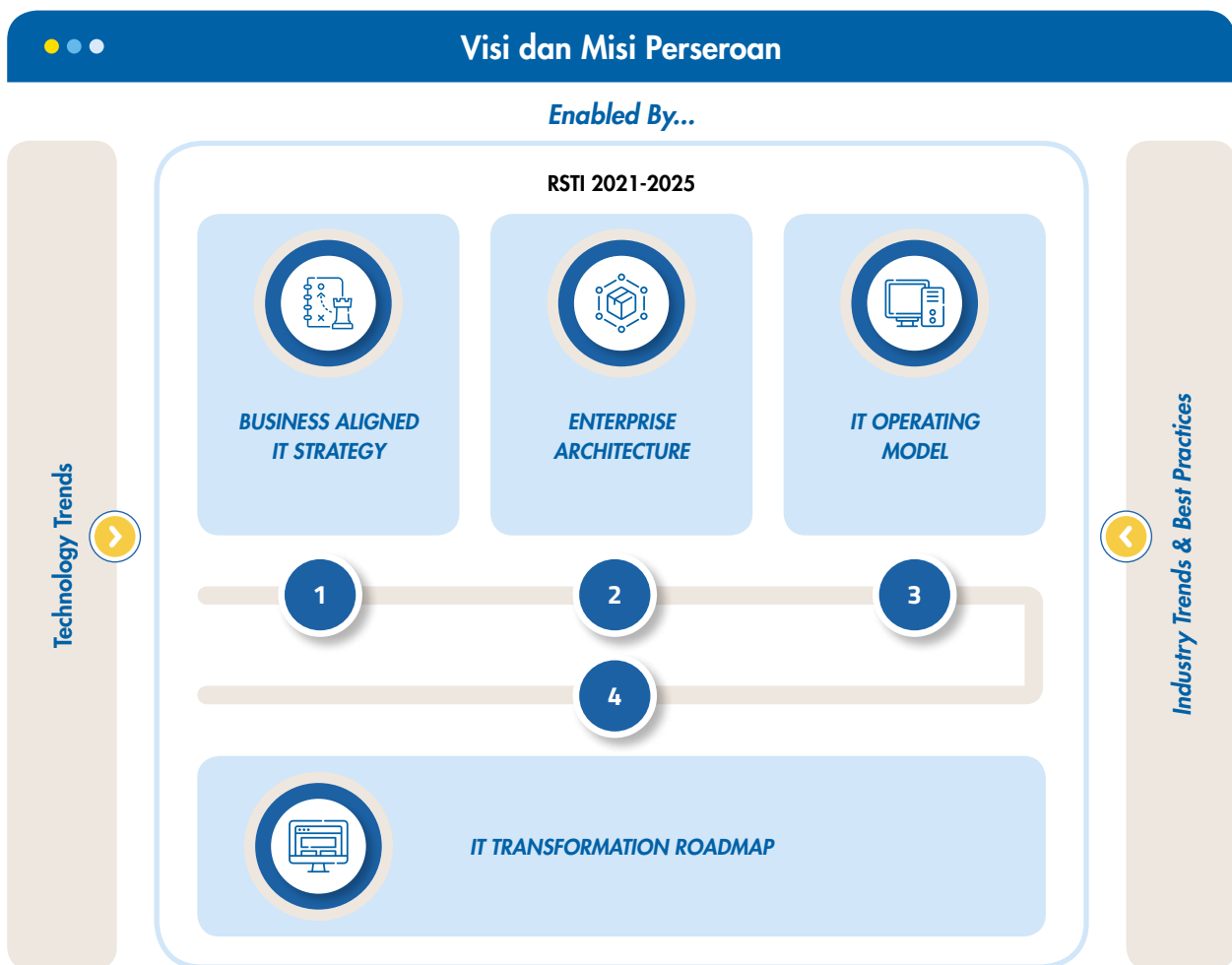




RENCANA STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung bisnis Perseroan. Untuk itu, dilakukan penyusunan rencana strategis Teknologi Informasi (TI) yang dijadikan acuan dalam pengembangan inisiatif TI maupun pemenuhan infrastruktur dan keamanan TI. Penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) 2021-2025 Perseroan didukung oleh 4 (empat) pilar utama, yaitu:

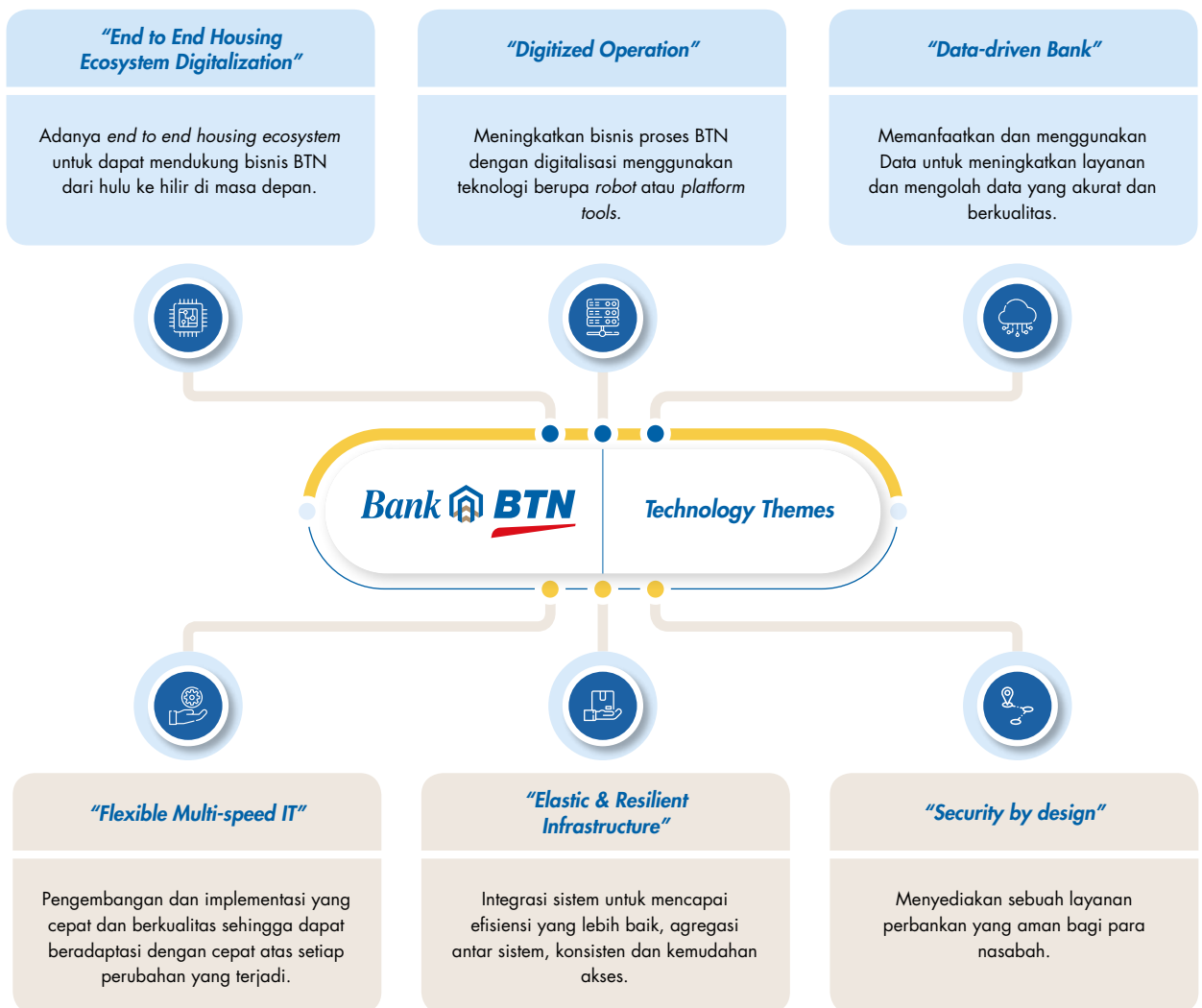
1. *Business Aligned IT Strategy*
Menyelaraskan kebutuhan bisnis agar penyusunan RSTI dapat mendukung pencapaian visi Perseroan menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025.
2. *Enterprise Architecture*
Mendesain *technology stack* yang modular, terbuka dan *scalable* untuk membantu strategi digitalisasi bisnis dan produk.
3. *IT Operating Model*
Meningkatkan model operasi teknologi *multi-speed* dan pendekatan *sourcing* yang strategis untuk membantu mendukung digitalisasi di masa depan.
4. *IT Transformation Roadmap*
Sebuah *roadmap* yang terintegrasi dengan SDM, proses dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan bisnis.



1. *Business Aligned IT Strategy*
Penyusunan rencana strategis teknologi informasi dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan *corporate strategy* serta aspirasi bisnis, dengan demikian pengembangan di sisi teknologi informasi akan sejalan dan mendukung perkembangan bisnis Perseroan.
- Telah ditetapkan 6 (enam) tema teknologi utama untuk mencapai visi Perseroan yaitu:
- a. *End to end housing ecosystem digitalization*
Adanya *end to end housing ecosystem* untuk dapat mendukung bisnis Perseroan dari hulu ke hilir di masa depan.

- b. *Digitized Operations*
Meningkatkan bisnis proses Perseroan dengan digitalisasi menggunakan teknologi berupa *robot* atau *platform tools*.
- c. *Data-driven Bank*
Memanfaatkan dan menggunakan data untuk meningkatkan layanan dan mengolah data yang akurat dan berkualitas.
- d. *Flexible Multi-Speed IT*
Pengembangan dan implementasi yang cepat dan berkualitas sehingga dapat beradaptasi dengan cepat atas setiap perubahan yang terjadi.
- e. *Elastic & Resilient Infrastructure*
Integrasi sistem untuk mencapai efisiensi yang lebih baik, agregasi antar sistem, konsisten dan kemudahan akses.
- f. *Security by Design*
Menyediakan sebuah layanan perbankan yang aman bagi para nasabah.

6 (Enam) Tema Teknologi



Dalam mendukung bisnis Perseroan, terdapat tantangan utama layanan *information technology* (IT) yaitu *faster time to market*, *application quality*, peningkatan kompetensi BP, kapasitas sumber daya IT dan peningkatan pelayanan kualitas IT. Berdasarkan aspirasi bisnis yang dituangkan dalam tema teknologi dan tantangan utama layanan TI, maka disusun visi IT Perseroan pada tahun 2021 – 2025 sebagai berikut:

“To be the reliable partner to deliver best in class IT services and operations excellence to accelerate business’s goals realization”

2. Enterprise Architecture

Perseroan telah menyusun arsitektur *digital banking* untuk membantu strategi digitalisasi bisnis dan produk. Arsitektur *digital banking* memberikan gambaran mengenai teknologi dan sistem yang digunakan oleh Perseroan untuk mencapai visi Perseroan dan strategi bisnis yang telah direncanakan. Terdapat 10 (sepuluh) domain pada arsitektur *digital Banking* Perseroan sebagai berikut:

a. Ecosystem Management

Pengelolaan hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara peserta ekosistem untuk menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat sosial.

b. Channels

Assisted and self-service channels dengan pengalaman pelanggan *omni-channel* yang saling berhubungan.

c. Sales & Marketing

Mendukung kegiatan pemasaran, distribusi dan penjualan di dalam Perseroan.

d. Common Customer View

Berfungsi untuk memberikan pandangan dan pengelolaan yang komprehensif terhadap nasabah Perseroan.

e. Product Processing

Layanan pemrosesan, administrasi dan transaksi produk di Perseroan.

f. Common Services

Layanan pemrosesan yang umum ke seluruh produk Perseroan.

g. Technology Tools

Enterprise-wide technologies yang mendukung operasi Perseroan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

h. Insight & Information

Enterprise-wide tools untuk konsolidasi data dan pembuatan informasi untuk keperluan Perseroan.

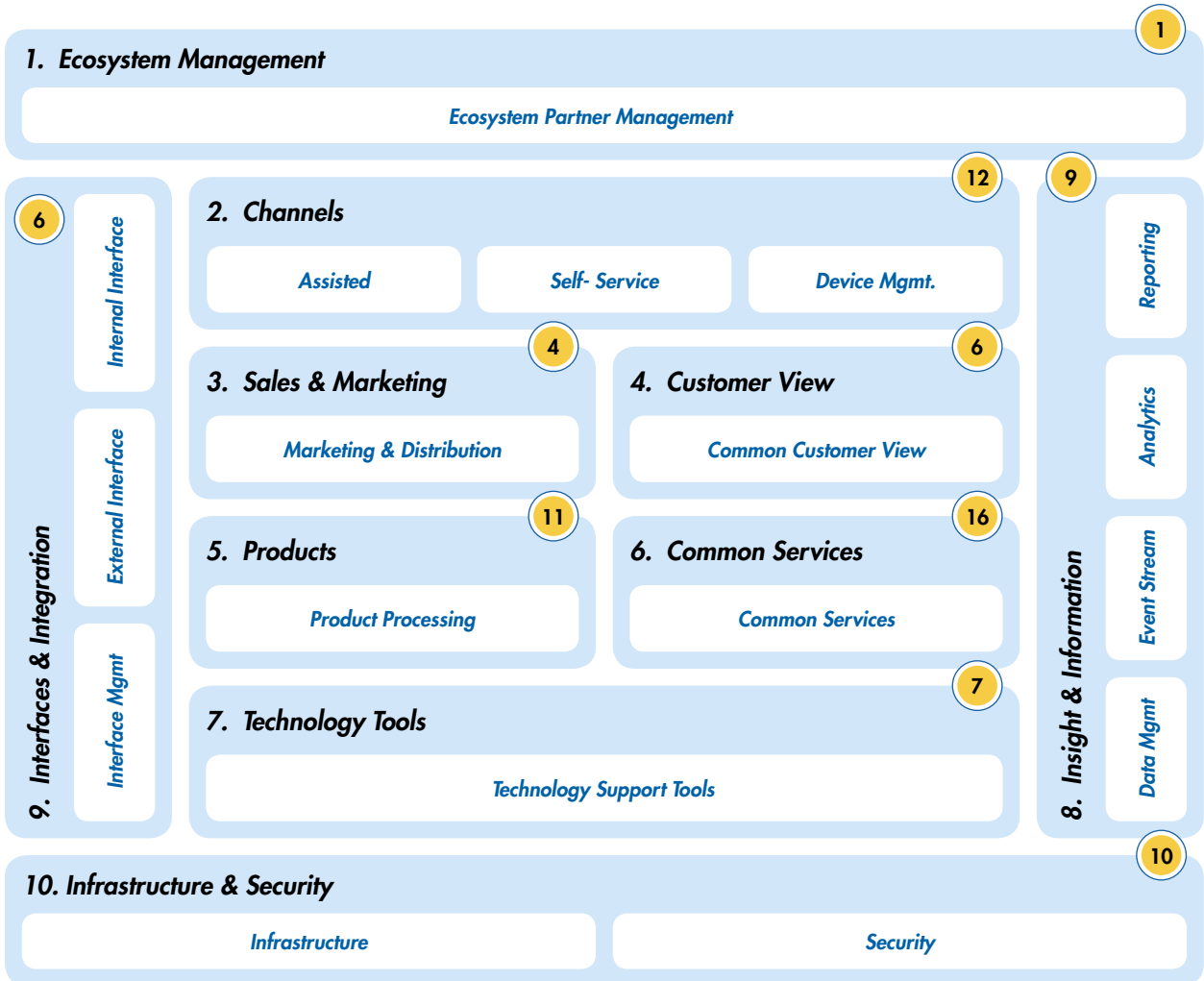
i. Interface and Integrations

Mengelola dan memantau integrasi secara dinamis baik internal Perseroan maupun eksternal.

j. Infrastructure & Security

Infrastruktur yang aman dan yang dapat diskalakan untuk memenuhi tuntutan bisnis.

Arsitektur Digital Banking



Total Number of capabilities in each domain

Perseroan secara berkesinambungan melakukan pengembangan dan peningkatan kapabilitas pada masing-masing domain tersebut untuk dapat mendukung bisnis Perseroan. Pada tahun 2022, Perseroan melakukan pengembangan dan peningkatan kapabilitas khususnya di bidang *Channels*, *Product Processing*, *Infrastructure & Security*.

3. IT Operating Model

Pada tahun 2022, Perseroan memiliki nilai tingkat maturitas TI sebesar 3.27 atau *established* yang diukur dengan menggunakan COBIT 5. Skor tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang memiliki nilai sebesar 3.05. Perseroan juga telah melakukan *improvement* pada IT *Operating Model* untuk mendukung strategis bisnis Perseroan pada tahun 2022, antara lain:

- a. Pembentukan IT Security Division untuk mengelola keamanan sistem dan aplikasi Perseroan.

- b. Implementasi *shared function* pada IT Strategic Planning & Development Division untuk mengelola kebutuhan seluruh Divisi IT seperti *budgeting*, *vendor management*, *asset management* dan lainnya.
- c. Pemenuhan sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen ODP TI maupun *experience hired*.
- d. Pelaksanaan pelatihan pada SDM TI untuk meningkatkan kapabilitas SDM TI.
- e. Pelaksanaan *review* Kebijakan TI.

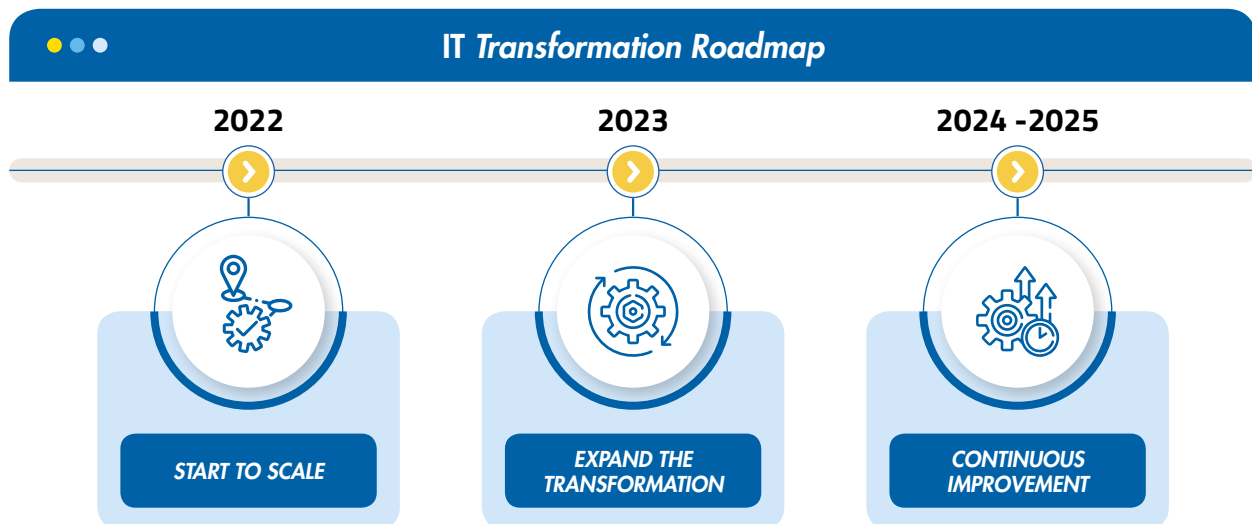
Selain itu, perseroan akan melakukan perbaikan dari sisi proses, *technology*, *governance* dan *organization* guna menjawab tantangan utama layanan TI antara lain sebagai berikut:

- a. Pembentukan *multi speed IT delivery* yang berbasis *agile* untuk pengembangan solusi tertentu.
- b. Utilisasi ITSM *tools* yang ada saat ini untuk pencatatan aset dan *configuration management* (i.e. CMDB).

- c. Pemanfaatan *module problem management* untuk pencatatan *problem record* di *Information Technology Service Management (ITSM)* secara terpisah.
- d. Pembentukan *governance body* untuk melengkapi *governance body* yang sudah ada saat ini, seperti *Portfolio & Program Governance Board, Architecture & Innovation Board, Project Governance Board* dan *Change Approval Board*.

4. IT Transformation Roadmap

Perseroan telah menyusun *IT Transformation Roadmap* berdasarkan 6 (enam) tema teknologi yang telah ditetapkan guna mencapai Visi Perseroan.



Pada tahun 2022, Perseroan telah memulai persiapan untuk perubahan skala besar di Perseroan dengan melakukan kajian terhadap sistem-sistem kritis yang akan di *upgrade/replace*, persiapan implementasi *multi speed IT operating model* berbasis *agile* dan juga berfokus kepada peningkatan maturitas IT. Di samping itu, di tahun 2022 Perseroan memiliki strategi untuk pengembangan ekosistem *digital mortgage* dengan menggunakan *platform* Perseroan, pengembangan *channel digital*, peningkatan *merchant enabler system*, pengembangan otomasi bisnis proses untuk meningkatkan efisiensi serta pemenuhan kebutuhan regulator untuk menjaga kepatuhan Perseroan regulasi terkait. Selain di sisi pengembangan sistem, untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur dan keamanan TI, Perseroan melakukan strategi untuk peremajaan dan standarisasi infrastruktur baik *hardware* maupun *network*, peningkatan kapasitas infrastruktur serta penerapan teknologi keamanan untuk menjaga sistem Perseroan.

Sesuai dengan *IT Transformation* yang telah disusun, Perseroan akan melanjutkan eksekusi *upgrade/replace* dan/atau *enhancement* terhadap sistem-sistem kritis yang telah diidentifikasi. Perseroan juga akan melanjutkan pengembangan sistem (i.e. *digital channel agile based*) pada tahun 2023 dan dilanjutkan *continuous improvement* pada tahun 2024-2025 dengan berfokus kepada peningkatan/*enhancement* terhadap sistem-sistem non kritis, perbaikan proses untuk meningkatkan maturitas IT.

INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan selalu melakukan inovasi teknologi informasi untuk mendukung bisnis Perseroan. Beberapa inovasi teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain:

a. *Cloud Journey*

Perseroan telah menyusun *Cloud Governance* yang antara lain berisi *guiding principle* dan tata kelola penggunaan *cloud* serta telah memulai penggunaan *cloud* infrastruktur untuk mendukung implementasi inisiatif TI sehingga dapat mempercepat proses penyediaan infrastruktur.

b. *Metaverse*

Perseroan menggunakan konsep dasar dari *Metaverse* dalam *virtual expo*. Salah satu *case* yang dilakukan adalah Perseroan membuat *Property Expo* di dunia maya yang digunakan untuk berinteraksi antara pengguna dengan para *developer*. Pengunjung dapat membuat avatar sendiri dan seolah-olah berjalan sebagai avatar tersebut ke *booth developer*.



c. *Robotic Process Automation*

Penambahan *use case* penggunaan *robotic process automation* (RPA) untuk otomasi beberapa proses operasional seperti pengumpulan data maupun penginputan data. Dengan penggunaan RPA untuk mendukung proses operasional Perseroan, waktu yang dibutuhkan untuk proses operasional tersebut menjadi lebih singkat, meningkatkan produktivitas dan keakuratan proses.

d. Pengembangan *Super Apps*

Perseroan mengembangkan aplikasi *super apps* ekosistem *digital* yang menyatukan *transactional platform*, *service platform* dan *social platform* dalam satu aplikasi. Hal ini, sangat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dengan menggunakan *super apps* yang dikembangkan melalui aplikasi *mobile banking* Perseroan.

e. Pengembangan *API Management Platform*

Merupakan wujud Perseroan dalam rangka merealisasikan *ecosystem mortgage digital*. Dengan *API Management platform*, Perseroan dapat mengimplementasikan *open banking* dan memberikan kemudahan bagi mitra-mitra dari Perseroan untuk melakukan integrasi dengan *services* yang disediakan oleh Perseroan untuk mendukung kebutuhan bisnisnya.

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Infrastruktur teknologi informasi merupakan sekumpulan dari perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan dan perangkat layanan teknologi lainnya dalam rangka mendukung layanan yang berbasis teknologi informasi. Teknologi informasi itu sendiri dari waktu ke waktu semakin berkembang pesat khususnya memasuki era layanan berbasis digital. Tentu untuk mendukung dan mewujudkan semua itu diperlukan kesiapan dan kehandalan perangkat infrastruktur yang memadai sehingga layanan teknologi informasi dapat berjalan cepat, mudah, lancar dan aman. Selain pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan juga mengikuti perkembangan teknologi terkini, Perseroan juga mempersiapkan pemenuhan jumlah dan kapabilitas dari personil IT dengan merekrut tenaga muda (ODP) serta dengan pembekalan pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan. Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan *improvement* dari sisi organisasi IT dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan untuk menuju bank yang menyediakan layanan kepada nasabah yang berkualitas dan unggul.

Berkaitan dengan *improvement* di bidang organisasi, Perseroan telah membentuk satu divisi IT baru yaitu Information Technology Security Division (ITSD) yang bekerja pada area “Secure The Bank” sehingga proses operasional bank dari sisi pengamanan perangkat maupun data dapat lebih fokus dan terjamin. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar nasabah dapat dilayani dengan aman pada saat bertransaksi dan juga terlindungi datanya.

Beberapa inisiatif strategis baru dan berkelanjutan di bidang infrastruktur sudah dan sedang berjalan di Perseroan dalam beberapa tahun terakhir ini, antara lain:

1. Implementasi teknologi SDN (*software-defined network*) yang diaplikasikan pada koneksi WAN (*wide area network*) untuk menghubungkan jaringan perusahaan, termasuk Kantor Cabang dan data center yang terpisah secara geografis.
2. Implementasi *Application Centric Infrastructure* sebuah solusi *software-defined networking* (SDN) yang memfasilitasi kelincuhan terhadap aplikasi dan *data center automation*. Dengan teknologi ini, memungkinkan percepatan otomatisasi untuk penerapan dan tata kelola infrastruktur, menyederhanakan manajemen untuk memigrasi beban kerja dengan mudah di seluruh kerangka kerja *multifabric* dan *multicloud*.
3. *Tools monitoring* fokus pada upaya *early warning system* dalam rangka mencegah terjadinya gangguan operasional dan keamanan IT sehingga dapat meningkatkan *availability* dan *reliability* layanan operasional IT.
4. *Backup management system* sebagai upaya proteksi terhadap data dan aplikasi bisnis Perseroan berupa sistem *backup* dan *recovery* untuk menunjang keberlangsungan proses bisnis (*business continuity*).
5. Pengkinian perangkat lunak (*software*) di lingkungan pusat data (*Data Center*) dan Kantor Cabang untuk memastikan operasional IT dapat diandalkan dan memitigasi terjadinya risiko operasional.
6. Untuk mendukung keberlangsungan bisnis bank, maka IT *Resilience* juga menjadi fokus manajemen dengan melakukan pengelolaan perangkat pendukung pusat data dan *backup* yang optimal dan melakukan uji coba peralihan aplikasi pendukung bisnis dan operasional bank secara rutin dan terjadwal.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah memiliki tata kelola Teknologi Informasi yang mengatur pelaksanaan teknologi informasi mulai dari manajemen, perencanaan, pengembangan sampai operasional infrastruktur serta keamanan sistem teknologi informasi. Perseroan telah melakukan *review* secara berkala terhadap tata kelola tersebut dengan menuangkan dalam Kebijakan Umum TI, *Management Data* dan *Digital* yang mengatur tata kelola TI secara *high level*.

Selanjutnya, terdapat kebijakan khusus yang merupakan turunan dari Kebijakan Umum yang mengatur hal-hal yang lebih teknis dan Petunjuk Teknis yang mengatur hal yang lebih detail dan teknis dibandingkan dengan kebijakan Khusus. Setidaknya, Perseroan memiliki 5 (lima) Kebijakan Khusus terkait dengan TI dan 5 (lima) Petunjuk Teknis yang telah dilakukan *review* setiap tahun dan telah disesuaikan dengan arsitektur kebijakan dan prosedur Perseroan yang baru dengan rincian sebagai berikut:

1. KK.5-A KK tentang Standard Operational Procedure TI.
2. KK.5-B KK tentang Keamanan TI.
3. KK.5-C KK tentang Manajemen Risiko TI.
4. KK.5-D KK tentang Standardisasi TI.
5. KK.8-C KK tentang *Business Continuity Management* (BCM).
6. PT.5-A.1 PT tentang Standard Operational Procedure TI.
7. PT.5-D.1 PT tentang Standardisasi TI.
8. PT.8-C.1 PT tentang *Business Impact Analysis* (BIA).
9. PT.8-C.3 PT tentang *Disaster Recovery Plan* (DRP).
10. PT.9-D.1 PT tentang Komite Pengarah TI (KPTI).

Perseroan memandang penting penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk mendukung jalannya bisnis Perseroan. Mempertimbangkan penyelenggaraan Teknologi Informasi ini besar cakupannya sehingga dapat dikategorikan menjadi tiga domain yaitu "*Change the Bank*" yang berperan dalam perencanaan dan pengembangan sistem TI, "*Run The Bank*" untuk menjalankan operasional TI dan memastikan kehandalan infrastruktur dan sistem yang digunakan oleh Perseroan maupun nasabah serta "*Secure the Bank*" yang berperan dalam menjaga keamanan sistem dan aplikasi Perseroan agar aman dan terkendali dari serangan-serangan keamanan TI.

Keamanan Teknologi Informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan digitalisasi untuk memudahkan Nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, Bank BTN memiliki inisiatif untuk meningkatkan keamanan digitalisasi layanan. Hal ini tidak terlepas dari mitigasi terhadap serangan *cyber* yang muncul seiring dengan berpindahnya preferensi layanan nasabah dari *channel* konvensional (cabang/*onsite*) menjadi *channel digital*. Untuk itu, Bank BTN terus beradaptasi dalam melaksanakan pelayanan *digital* berbasis pengamanan 3 (tiga) pilar utama yaitu:

1. *People*
 - Bank BTN telah melakukan edukasi berupa *security awareness* secara rutin kepada seluruh karyawan, nasabah maupun pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank BTN. Berbagai media digunakan untuk penyampaian *security awareness* seperti sosial media, email, *podcast* dan *wallpaper desktop* pada perangkat kerja Karyawan.
 - Bank BTN selalu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi karyawan sebagai mitra nasabah dengan berbagai pelatihan dan sertifikasi keamanan *cyber*.

2. *Process*

Bank BTN telah mempunyai *Security Operation Center* (SOC) untuk melakukan deteksi, tanggap insiden dan pemulihan terhadap serangan siber. Untuk mendukung fungsi *Computer Security Incident Response Team* (CISRT), Bank BTN telah bekerja sama dengan regulator dan juga didukung oleh teknologi terbaru serta *system monitoring* berupa *Security Incident and Event Management* (SIEM) dan berbagai penyedia keamanan *cyber* internasional serta menggunakan layanan *Cyber Threat Intelligence*.

3. *Technology*

Bank BTN telah mengimplementasikan teknologi keamanan terkini seperti *endpoint security*, *application security*, *cloud based security*, *Data Loss Prevention (DLP)*, *Next Generation Firewall (NGFW)*, otomasi *Patching* dan *Hardening* serta pengamanan enkripsi data nasabah.

Berbagai inisiatif tersebut dijelaskan dalam pencapaian *strategic* tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembentukan IT Security Division (CISO)

Bank BTN telah membentuk satu divisi IT baru yaitu Information Technology Security Division (ITSD) yang berfokus pada area "*Secure The Bank*" sehingga proses operasional bank dari sisi pengamanan perangkat maupun data dapat lebih fokus dan terjaga keamanannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan nasabah pada saat menggunakan layanan digital Bank dengan aman pada saat bertransaksi serta dapat meningkatkan pengamanan data Nasabah.

2. Pencapaian *cyber security maturity* (CSM) 4.42

Bank BTN bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melaksanakan penilaian *Cyber Security Maturity* (CSM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan dan maturitas keamanan informasi di Bank BTN. Berdasarkan hasil dari penilaian yang dilakukan oleh BSSN, Bank BTN mendapatkan nilai 4.42 dari skala 5 yang berarti level implementasi sudah terkelola dengan baik.

3. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama (MoU) antara bank BTN dengan BSSN

Kepala badan siber dan sandi negara serta Direktur Bank BTN telah menandatangani nota kesepahaman Kerjasama antara BSSN dan Bank BTN dalam hal keamanan teknologi informasi.

4. Implementasi teknologi *Data Loss Prevention*

Sebagai upaya bank untuk melindungi data nasabah bank telah mengimplementasikan teknologi *Data Loss Prevention* untuk memitigasi terjadinya kebocoran data nasabah dan data perusahaan.

5. Implementasi *Next Generation Firewall* (NGFW)

Dalam rangka melindungi Perseroan dari berbagai ancaman dari *external* bank telah mengimplementasi *Next Generation Firewall* (NGFW) yang memiliki kapabilitas otomasi pencegahan serangan seperti *Advanced Persistent Threat* (APT), *signature base attack* dan *multilayer security* dari serangan *cyber*.

6. Implementasi otomasi *patching* dan *hardening*

Seiring dengan meningkatnya inisiatif bank dalam meluncurkan produk digital baru, penguatan sistem TI melalui *patching* dan *hardening* telah dilaksanakan dengan metode otomasi sehingga proses *patching* dan *hardening* akan lebih cepat dan akurat.

STRUKTUR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Satuan Penyelenggaraan Teknologi Informasi terdiri dari IT Strategic Planning and Development Division, Divisi IT Operations dan Divisi Data Management & Analytic. Selain itu, Perseroan juga telah membentuk Divisi IT Security yang memiliki fungsi yang bertugas menangani ketahanan dan keamanan siber dan bersifat independen terhadap fungsi pengelolaan TI.

Secara umum wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing Divisi adalah sebagai berikut.

1. IT Strategic Planning and Development Division (ITPD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "**Change the Bank**" sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, memantau dan mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan proses penyusunan rencana strategis teknologi informasi serta pengelolaan *portofolio* teknologi informasi, kebijakan teknologi informasi dan strategi pengembangan aplikasi secara efektif dan efisien;
 - b. Mengelola proses pengembangan aplikasi pendukung operasional bisnis beserta *monitoring* pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis Perseroan;
 - c. Mengantisipasi eksposur risiko sistem informasi serta mengembangkan langkah penanganan yang tepat dan memadai;
 - d. Mendukung penerapan keamanan informasi; dan
 - e. Menyusun dan memenuhi pelaporan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pemenuhannya bekerja sama dengan unit terkait.
 2. IT Operations Division (ITOD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "**Run the Bank**" sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan strategi pengelolaan operasional, melaksanakan dan memantau operasional teknologi informasi secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga tingkat layanan teknologi informasi untuk mendukung operasional bisnis;
 - b. Mengantisipasi eksposur risiko dalam pelaksanaan operasional teknologi informasi serta mengembangkan langkah penanganan yang tepat dan memadai;
 - c. Mendukung penerapan keamanan informasi; dan
 - d. Menyusun dan memenuhi pelaporan operasional teknologi informasi bekerja sama dengan unit terkait.
 3. Data Management & Analytic Division (DMD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "**Change the Bank**" maupun "**Run the Bank**" sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi terkait penetapan dan pelaksanaan *roadmap* dan visi penyampaian dan pengelolaan informasi; termasuk *Data Warehouse*, *Big Data*, *Business Intelligence & Analytics* serta *Management Data* untuk menjalankan strategi Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya;
 - b. Berkolaborasi dengan para pimpinan *business unit* dan *support* untuk menerapkan strategi data yang disetujui, menetapkan arah strategis untuk membangun program pengelolaan data organisasi dan mengoptimalkan cara Perusahaan menggunakan data baik internal maupun eksternal;
 - c. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Penyelenggara Teknologi Informasi lainnya, Satuan Kerja Keamanan maupun pihak eksternal, dalam mengatur dan menciptakan lingkungan yang membuat data dan informasi dapat diakses dengan saluran kontrol akses yang sesuai serta bertindak sebagai penasihat dalam penggunaan data untuk meningkatkan kinerja dan perumusan strategi perusahaan secara menyeluruh;
 - d. Mengawasi penerapan analisis data dan teknik analisis baru untuk digunakan sebagai salah satu acuan manajemen perusahaan dalam menentukan strategi pengembangan bisnis perusahaan; dan
 - e. Mengawasi proses pengumpulan dan peninjauan data dari berbagai sistem yang saat ini digunakan; membuat rekomendasi untuk memodernisasi sistem lama dan memastikan solusi baru yang dapat menyediakan data secara tepat waktu, akurat dan berkualitas.
4. IT Security Division (ITSD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "**Secure the Bank**" sebagai berikut:
 - a. Merancang, menerapkan dan memelihara suatu rangkaian proses dan sistem yang terpadu dan efektif dalam mengelola keamanan informasi dan menjamin kerahasiaan, integritas serta ketersediaan aset-aset informasi dengan meminimalkan risiko keamanan informasi;
 - b. Menyusun dan memenuhi pelaporan berkaitan pengamanan informasi bekerja sama dengan unit terkait.

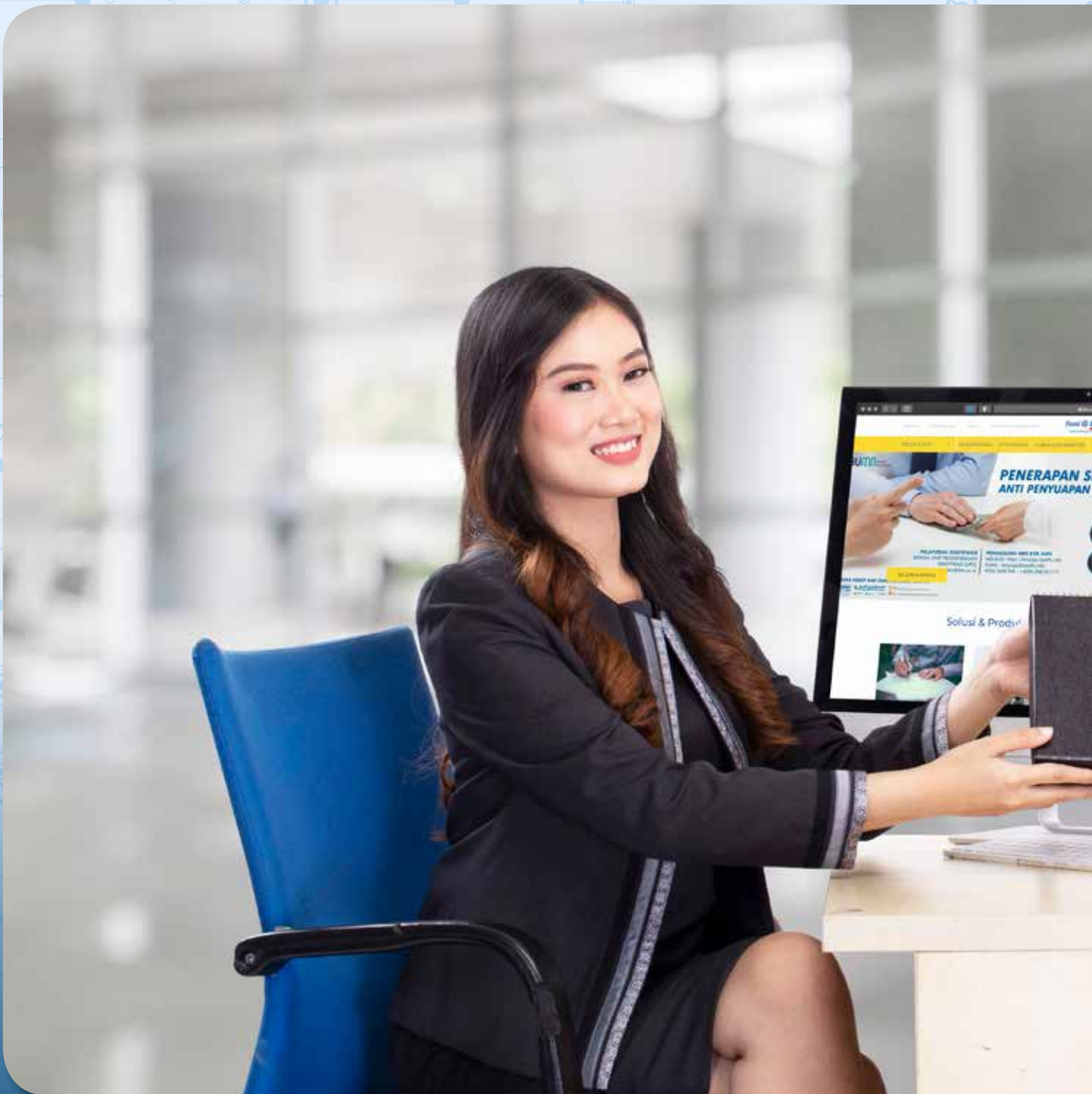
RENCANA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI 2023

Perseroan telah membuat IT *Transformation roadmap* yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 dengan 6 (enam) tema teknologi utama untuk mencapai visi dan misi Perseroan di masa depan yaitu *end to end housing ecosystem digitalization*, *digitized operations*, *data-driven bank*, *flexible multi-speed IT*, *elastic & resilient infrastructure* dan *security by design*. Pengembangan Teknologi Informasi pada tahun 2023 mendukung rencana korporasi serta aspirasi kebijakan umum direksi di tahun 2023 pada bidang kredit dan kualitas kredit, bidang pendanaan dan jaringan kantor, bidang *fee based income* dan bidang beban *overhead*.

Secara garis besar strategi pengembangan TI tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Modernisasi *digital channel* serta pengembangan *digital lending system*.
2. Modernisasi *core banking system*, *branch delivery system* maupun *GL System*.
3. Pengembangan *integrated customer service*.
4. Pengembangan sistem untuk mendukung *wholesale* dan *priority banking* seperti implementasi *custody system*, *trade finance*, *ebank garansi*, *supply chain management system*, *wealth management system* sesuai tahapan.
5. Implementasi sistem untuk mendukung otomatisasi bisnis proses seperti *end to end procurement*, *enterprise document management system*.
6. Implementasi *treasury system* dan *settlement system* untuk mendukung bisnis *treasury* maupun pemenuhan regulasi.
7. Implementasi *enterprise risk management system* seperti *market risk system*, *enhancement aplikasi fraud detection system* dan *enhancement operation risk system*.
8. Implementasi sistem terkait dengan *data management*, seperti implementasi *data mover*, *enterprise data warehouse* dan *master data management*.
9. Dalam sisi proses, Perseroan juga melakukan *improvement* dengan menerapkan *agile framework* sebagai salah satu mekanisme yang digunakan dalam pemenuhan pengembangan sistem/fitur tertentu disamping mekanisme *software development life cycle* yang saat ini digunakan. Untuk mendukung implementasi *agile*, Perseroan juga akan menggunakan *tools agile* untuk memudahkan kolaborasi dan mendukung proses dan aktivitas yang perlu dilakukan dalam *agile* agar dapat berjalan dengan baik. Dengan implementasi *agile* pada Perseroan, akan mendukung terciptanya *multispeed IT*.
10. Perseroan akan melakukan modernisasi *HC System* untuk pengelolaan sistem informasi dan data pegawai sehingga seluruh data pegawai dapat terintegrasikan dengan baik.
11. Implementasi infrastruktur yang *elastic* dan *resilient* seperti implementasi *cloud journey*, *end to end monitoring* (*data center*, *fail over* dan aplikasi) serta *data center operation & infrastructure improvement*.
12. Pengembangan TI terkait *security by design* untuk meningkatkan keamanan sistem dan aplikasi Perseroan antara lain implementasi *Identity & Access Management*, *Security & Network Monitoring* dan *Compliance* seperti menerapkan *end point protection* serta implementasi solusi pengamanan *cyber threat*. Perseroan juga akan melakukan pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan dan skenario untuk meningkatkan ketahanan siber.

Tata Kelola Perusahaan





PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



Top GRC 2022

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai #5 Stars, Bpk. Haru Koesmahargyo (Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk) sebagai *The Most Committed GRC Leader* 2022 dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The High Performing Board of Commissioners on GRC 2022*



CGPI 2021

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The Most Trusted Companies 2022* berdasarkan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*



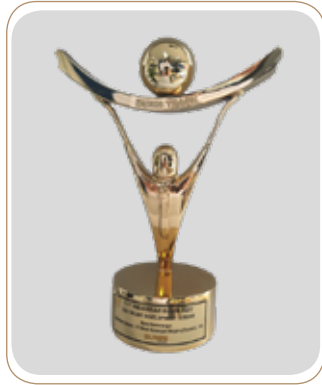
GRC & Performance Excellence Award

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 (Banking Service)*.



The 13th IICD CG Award

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai TOP 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (Big Cap PLCs) dengan *Praktek Tata Kelola Perusahaan Terbaik 2022*



BUMN Track

Kategori Tata Kelola Perusahaan GCG Terbaik II – Anugerah BUMN

Perseroan meyakini bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pencapaian penting Perseroan sepanjang tahun 2022 memperoleh hasil yang memuaskan baik dari sisi kinerja keuangan, operasional maupun penghargaan yang diperoleh. Perseroan tetap mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar (*market leader*) dalam pembiayaan perumahan. Perseroan berhasil memperoleh pengakuan pihak eksternal dengan berbagai penghargaan yang diperolehnya baik terkait kinerja bank, transparansi informasi maupun implementasi GCG, antara lain adalah:

- *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada ajang *Indonesia Most Trusted Companies Award 2022* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*.
- Top 3 of Indonesian PLCs dan ASEAN Asset Class - ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).
- TOP GRC 2022 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business, Perseroan berhasil memperoleh 3 kategori berikut, yaitu: (1) TOP GRC 2022 # 5 Stars; (2) *The Most Committed GRC Leader 2022* untuk Direktur Utama Perseroan; dan (3) *The High Performing Board of Commissioner on GRC 2022* untuk Dewan Komisaris.
- *The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022* dan Bapak Eko Waluyo sebagai *The Best Chief Compliance Officer* yang diselenggarakan oleh *GRC & Performance Excellence Award* bekerja sama dengan Majalah Business News.



ASEAN Corporate Governance Scorecard 2021

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Top 3 of Indonesian PLCs dan ASEAN Asset Class

- Kategori Tata Kelola Perusahaan GCG Terbaik II – Anugerah BUMN.
- Perseroan mendapatkan sertifikat atas *Surveillance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)* dalam bidang Kredit Komersial (*Commercial Lending*) dan bidang Pengadaan (*Procurement*).
- Perseroan telah berhasil melakukan perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam bidang *SME Restructuring* pada seluruh Kantor Wilayah dan Commercial Credit Risk Division.
- Pada tahun 2022 Perseroan mengirimkan 11 orang pegawai Layer 1 dari Divisi Kantor Pusat, CBC Head dan RIPC Head untuk mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sehingga total pegawai sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini yang telah dinyatakan kompeten dan bersertifikasi API sebanyak 59 pegawai.
- Perseroan dalam mendukung program dan upaya pencegahan korupsi dari KPK mengikuti Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang melibatkan pegawai Perseroan dan Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan (IIKPA). Sampai saat ini telah tersertifikasi PAKSI sebanyak 22 pegawai dan 5 (lima) IIKPA sehingga total PAKSI sebanyak 27 orang.

Keselarasannya antara *stakeholder* dan Perseroan akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan perusahaan yang berujung pada timbul dan meningkatnya sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan Perseroan. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka akan semakin menguatkan posisi Perseroan di dalam persaingan global, dan tentu akan memberi jalan untuk perkembangan Perseroan di tahun-tahun mendatang.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dasar penerapan GCG di lingkungan Perseroan merujuk pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan serta mengacu pada pedoman GCG yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional. Dasar rujukan penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
8. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
10. Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
11. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
12. Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
13. Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
14. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
15. Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
16. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
17. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
18. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
19. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir ditulis kembali dengan Akta No. 08 tanggal 08 April 2021 *juncto* Akta No. 05 tanggal 11 Januari 2023.

Selain itu, Perseroan mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance* (CG) Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

TUJUAN DAN PRINSIP PENERAPAN TATA KELOLA

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan GCG yang efektif. Pada dasarnya Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, agar Perseroan menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perseroan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung visi Perseroan, yaitu "Menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025".
2. Mendukung misi Perseroan, yaitu:
 - a. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
 - b. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
 - c. Menjadi *One of Home of Indonesia's Best Talent*.
 - d. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
 - e. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.
3. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
5. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada Perseroan.

Penerapan GCG dilakukan berlandaskan kelima prinsip berikut:

Prinsip-Prinsip GCG

5 (lima) prinsip dasar GCG/Tata Kelola yang baik,

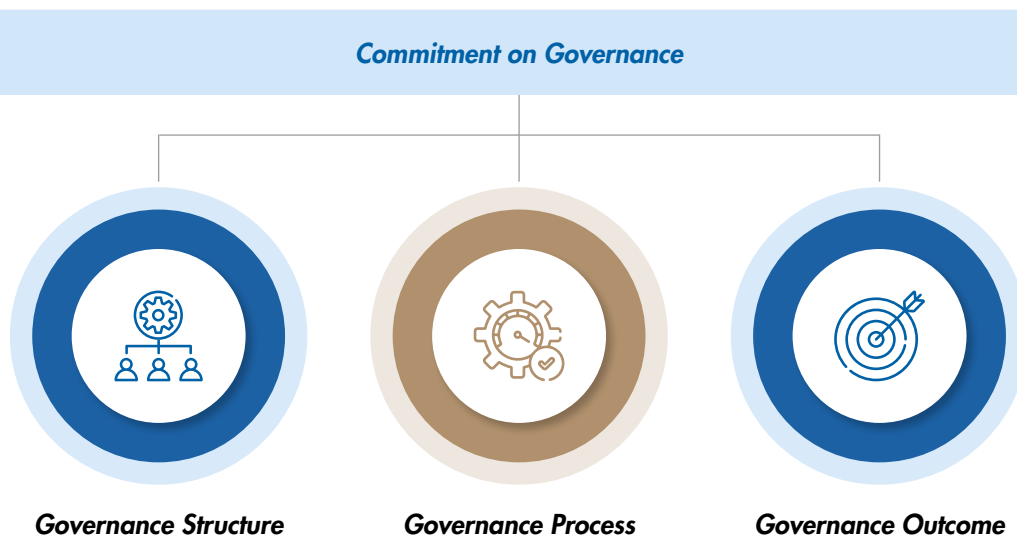


GCG merupakan alat yang dipergunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Semakin kompleks risiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola oleh Perseroan.

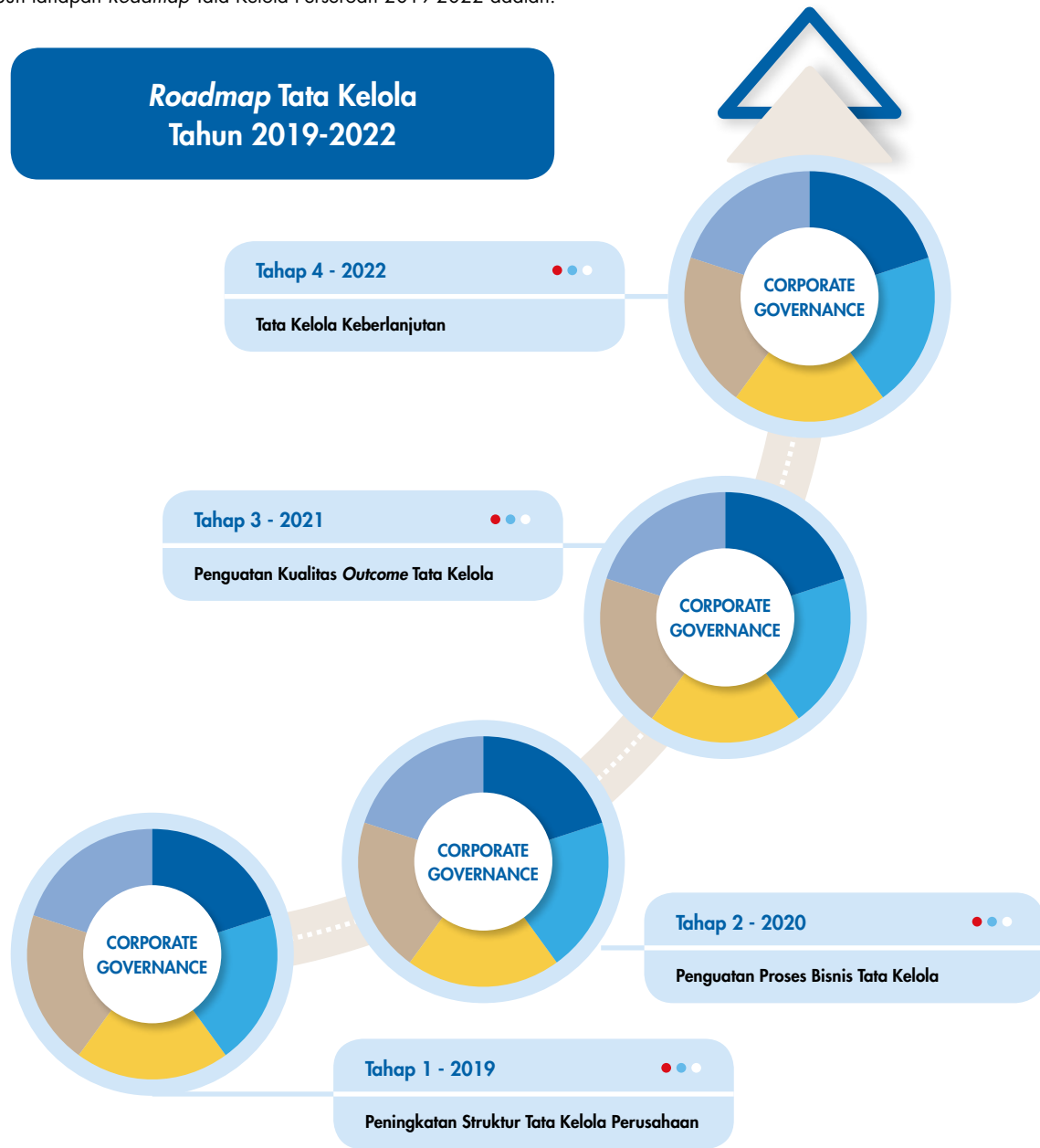
Lebih dari itu, GCG menjadi upaya berkesinambungan untuk merespon secara proporsional kebutuhan implementasi GCG sehingga mencapai tujuan untuk *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*. Perseroan menjadi bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah Perseroan senantiasa mengelola setiap kegiatan usahanya dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dengan menerapkan paradigma GCG secara menyeluruh, akan terjadi keselarasan kepentingan dan tujuan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan dan selanjutnya akan mendorong terciptanya keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. *Roadmap* GCG disusun dalam rangka penguatan GCG secara konsisten dari waktu ke waktu yang meliputi 4 (empat) pilar GCG yaitu *Commitment on Governance*, *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.



Adapun tahapan *Roadmap* Tata Kelola Perseroan 2019-2022 adalah:



Roadmap tata kelola pada tahun 2022 fokus untuk membangun tata kelola berkelanjutan, rencana aksi keuangan berkelanjutan serta *sustainable GCG award*. Perseroan senantiasa melakukan perubahan struktur organisasi melalui *Branch Transformation* yang merupakan inisiatif *Corporate Plan 2021-2025* yang mendukung tercapainya visi BTN untuk menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara di tahun 2025 melalui perubahan peran & model operasional kantor cabang agar fokus pada pertumbuhan *low-cost funding* dan *cross selling* secara aktif oleh seluruh unit kerja pada Kantor Cabang. Selain itu, Perseroan dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Perseroan melakukan audit *surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pada tanggal 1 Agustus 2022 Perseroan telah dilakukan audit *Surveillance* ISO 37001:2016 dan berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan mendapatkan sertifikat atas audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta juga dilaksanakan perluasan untuk ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Kantor Wilayah (Dhi. *SME Restructuring*) dan *Commercial Credit Risk Division* (CRD). Dengan implementasi SMAP, Perseroan memiliki kerangka sistematis dalam menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meninjau, serta meningkatkan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Di samping itu, upaya untuk melakukan tata kelola berkelanjutan dilakukan juga terkait dengan implementasi *Branch Transformation*. *Branch Transformation* adalah inisiatif *Corporate Plan 2021-2025* yang mendukung tercapainya visi BTN untuk menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara di tahun 2025 melalui perubahan peran dan model operasional kantor cabang agar fokus pada pertumbuhan *low-cost funding* dan *cross selling* secara aktif oleh seluruh unit kerja di cabang.

Branch Transformation mengubah model operasional cabang beserta tata kelolanya sehingga sejalan dengan produktivitas *sales*, membangun budaya *sales*, melengkapi *sales* dengan *tools* yang memadai dan melakukan sentralisasi atas aktivitas operasional yang selama ini berjalan di cabang, Aktivitas Peningkatan Sales (*Sales Effectiveness*) bertujuan membangun dan menumbuhkan *sales culture* di seluruh jaringan Bank, terutama untuk mencapai tujuan bersama (*shared goal*) dalam menumbuhkan *funding* dan *lending* melalui sinergi aktif tim *funding* (termasuk dukungan Customer Service, Teller), *Lending* (termasuk dukungan Loan Service dan Loan Officer), serta elemen pendukung cabang lainnya. Komposisi SDM cabang akan diperbanyak untuk fungsi *sales* dengan melakukan sentralisasi operasional aktivitas cabang diantaranya pengadaan, pelaporan keuangan, *accounting*, *internal control*, *human capital*, *service assurance*, kliring, dan pengelolaan kas cabang. Adanya ketentuan regulator terbaru terkait jaringan kantor Bank Umum turut mendorong perubahan struktur organisasi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Bank.

Roll Out untuk Branch Transformation yang meliputi 3 (tiga) bagian, meliputi:

- Struktur organisasi dan model operasi baru;
- Program *sales effectiveness Consumer and SME*;
- Pembekalan *branch leaders*, *sales* dan *frontline*.

Perseroan juga telah melakukan implementasi Struktur Organisasi Operation and Business Support Division (OBSD) melalui pembentukan unit kerja *monoline* yaitu Regional Cash Operation Management (RCOM) dengan 1 (satu) orang *Head* yang membawahi unit kerja Cash Center Operations, Cash Replenishment, dan Cash Management & Client Service serta memiliki tugas dan tanggung (*job description*) sebagai berikut:

- Bertanggung jawab atas proses pemenuhan kebutuhan uang kartal bagi Kantor Cabang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- Bertanggung jawab atas proses penyortiran dan pengemasan uang yang berasal dari Kantor Cabang atau Transaksi Uang Kartal antar Bank (TUKAB) sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang telah ditentukan;
- Bertanggung jawab atas proses penarikan Uang Layak Edar (ULE) dari Bank Indonesia apabila tidak dapat dipenuhi di TUKAB;
- Bertanggung jawab atas proses penyeteroran, penyerahan dan *quality control* atas pengelolaan uang kepada Bank Indonesia apabila posisi *over likuid* atau terdapat Uang Tidak Layak Edar (UTLE) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bertanggung jawab atas proses penyediaan uang untuk pengisian ATM (*Cash Replenishment*) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- Bertanggung jawab atas proses rekonsiliasi uang yang ada di Vendor dengan GL Kas dalam perjalanan (KDP);
- Bertanggung jawab atas proses kerjasama pengangkutan uang dengan vendor Penyelenggaraan Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR) dan vendor *replenishment* guna kelancaran operasional pengelolaan kas;
- Bertanggung jawab atas proses penyusunan laporan posisi uang yang dikelola dalam rangka menghasilkan laporan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

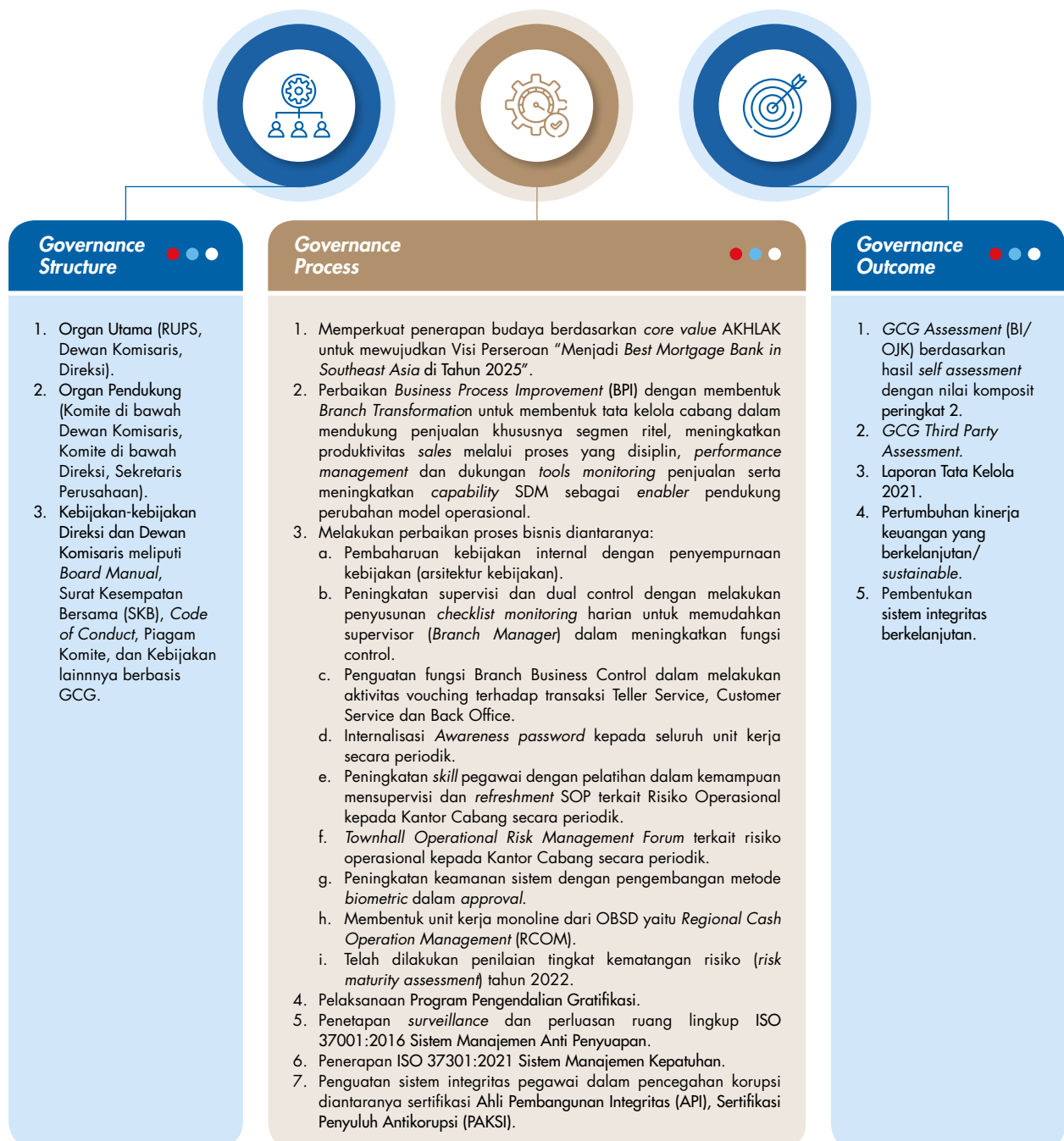
Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengawasan risiko operasional dan mitigasi/pencegahan *operational loss* dan penyelesaian temuan audit (*risk domain*) di Kantor Cabang maka Direksi telah memutuskan untuk mengimplementasikan Departemen Operations Risk Controller (ORCD) pada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menempatkan organ/unit Regional Business Control (RBC) pada Kantor Wilayah, Branch Business Control (BBC) yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah serta Commercial Banking Center Business Control (CBC-BC) yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada Commercial Banking Center (CBC).

Upaya membangun tata kelola berkelanjutan tersebut yakni dapat dilihat dari adanya pengakuan pihak eksternal dalam bentuk berbagai penghargaan baik terkait kinerja bank, transparansi informasi dan juga implementasi GCG yang diperoleh selama tahun 2022.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERSEROAN 2022

Penerapan tata kelola Perseroan tahun lalu fokus pada penguatan kualitas *Outcome* tata kelola, sedangkan untuk tahun 2022 menitikberatkan pada tata kelola berkelanjutan terutama terkait implementasi aplikasi *governance*, rencana aksi keuangan berkelanjutan dan *sustainable GCG award*. Adapun implementasi tata kelola di tahun 2022 yang sejalan dengan *Roadmap GCG Perseroan 2019-2022* melalui penerapan 3 (tiga) Pilar GCG adalah sebagai berikut:

Tata kelola yang baik dapat terwujud dengan adanya *Governance System* yang terdiri dari *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*.



PENYEMPURNAAN PEDOMAN DAN TATA KELOLA PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Perseroan melalui keputusan Direksi melakukan perubahan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur yang berlaku mulai sejak tanggal 2 Februari 2022. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan *governance* dan tata kelola peraturan internal sehingga akan lebih tertata, tidak saling tumpang tindih, lebih ramping dan memudahkan pegawai dalam menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional sehari-hari. Perseroan telah menyusun kebijakan khusus nomor KK.9.A tanggal 22 Maret 2022 perihal Prosedur Tata Kelola Peraturan Internal Bank dan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

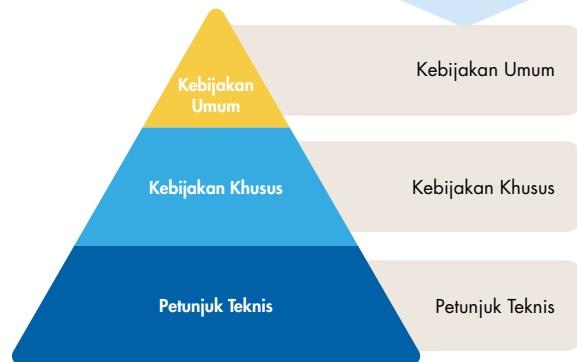
1. Kemudahan dan Kejelasan
2. Efisiensi dan Efektivitas
3. Selaras
4. Terukur
5. Dinamis
6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani
7. Kepatuhan Hukum
8. Kepastian Hukum

Arsitektur Eksisting

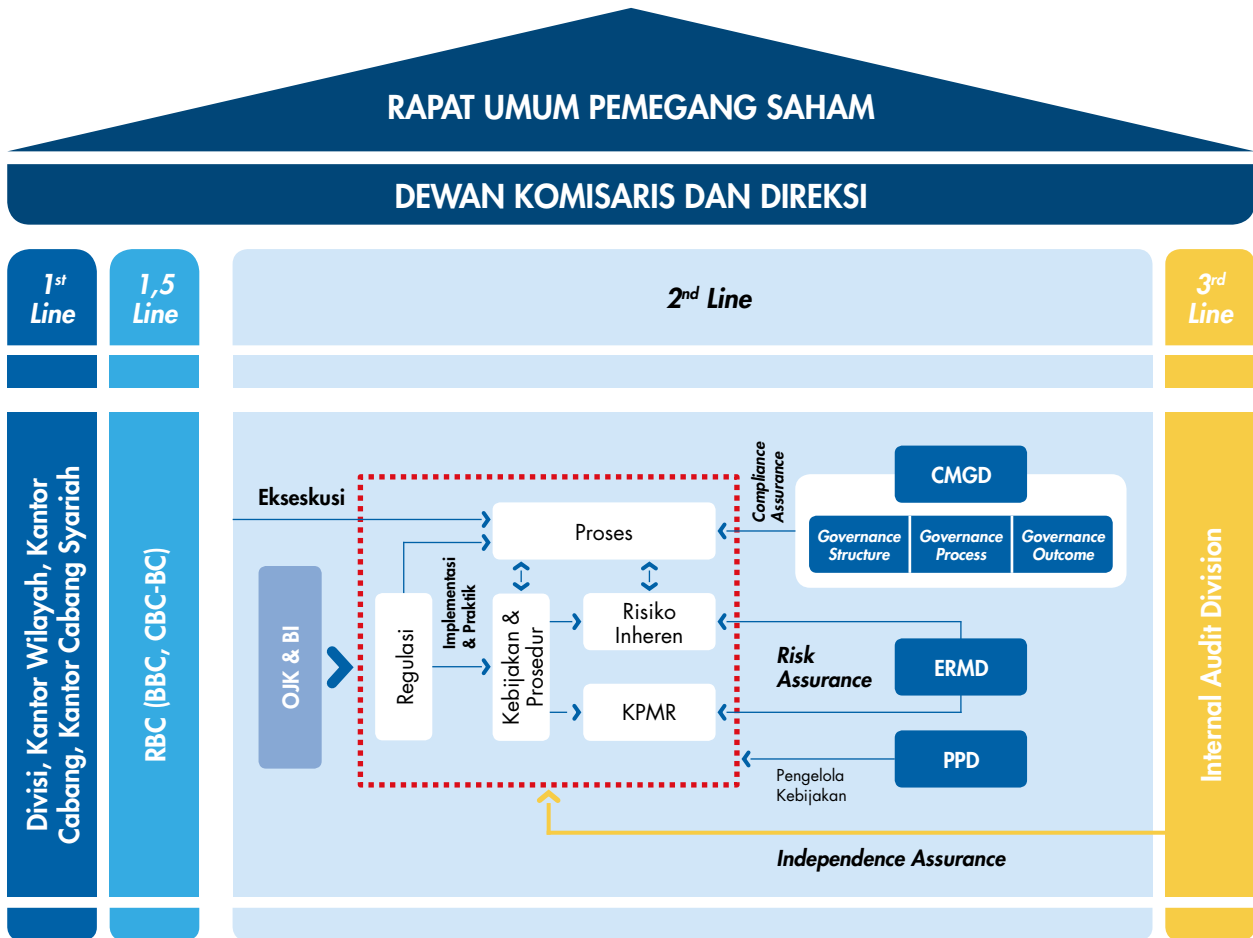


Catatan : data per 31 Desember 2022

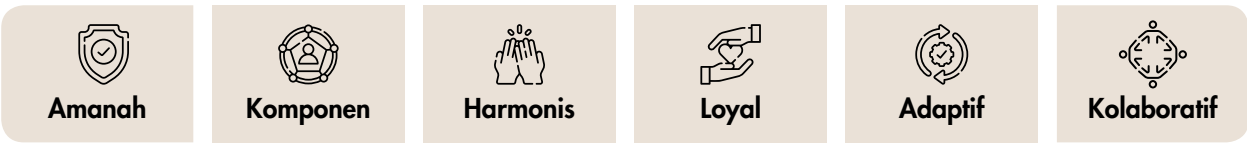
1. Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank.
2. Kebijakan *Treasury, Funding & Product Delivery*.
3. Kebijakan SDM.
4. Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Anak dan Unit Usaha Syariah.
5. Kebijakan Informasi & Teknologi, Management Data dan Digital.
6. Kebijakan Hukum, Kepatuhan, APU & PPT, dan Tata Kelola Perusahaan.
7. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal.
8. Kebijakan Manajemen Risiko.
9. Kebijakan Operasional dan Fungsi Pendukung.



- **Penyempurnaan Peraturan Tata Kelola**
Pada tahun 2022, Perseroan telah menyusun Kebijakan Umum Nomor KU.6 tanggal 5 Desember 2022 perihal Hukum, Kepatuhan, APU & PPT dan Tata Kelola Perusahaan. Penyempurnaan peraturan salah satunya adalah terkait dengan pembaharuan pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi Surat Edaran Direksi No. 68/DIR/CMPD/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dan berdasarkan dengan kebijakan arsitektur terbaru dilakukan perubahan menjadi Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi. Pembaharuan ini mengacu pada peraturan yang dikeluarkan dari regulator khususnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Perseroan juga telah melakukan pembaharuan terkait dengan kebijakan sistem manajemen anti penyuapan berupa Kebijakan Khusus Nomor KK.6-E tanggal 13 Desember 2022 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-E.1 tanggal 21 Desember 2022 tentang Prosedur pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016).
- **Penyempurnaan Piagam Komite Dewan Komisaris**
Sebagai Organ pendukung Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembaharuan yang telah dikaji serta disempurnakan adalah sebagai berikut:
 - Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank BTN No. 11/KOM/BTN/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pembaruan Piagam Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - Piagam Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KOM/BTN/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pembaruan Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KOM/BTN/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pembaruan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- **Sertifikasi dan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan**
Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan melakukan audit *surveillance* ISO 37001:2016 SMAP. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Perseroan telah berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP. Selain itu Perseroan telah melakukan perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada unit SME *Restructuring* pada Seluruh Kantor Wilayah dan Commercial Credit Risk Division (CRD). Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 SMAP guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- **Penguatan Implementasi Pedoman Tata Kelola OJK dan ASEAN CG SCORECARD**
Peningkatan kualitas tata kelola dengan penerapan ASEAN CG *Scorecard* dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 serta *best practice* tata kelola internasional. Terbitnya sejumlah Peraturan OJK baru selama tahun 2022 tentunya menjadi aspek kepatuhan yang senantiasa dijaga oleh Perseroan. Yakni antara lain terkait dengan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No.14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- **Program *Zero Tolerance To Fraud & Zero Defect***
Untuk menjamin bahwa setiap upaya dalam memitigasi risiko terjadinya *fraud* berjalan efektif maka Perseroan secara berkelanjutan melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- **Inisiatif Implementasi *Integrated Governance, Risk and Compliance* (IGRC)**
Perseroan senantiasa melakukan *monitoring* risiko kepatuhan (*Compliance Risk Monitoring*) antara lain melalui pengembangan *compliance dashboard*, pemenuhan aspek *Compliance Regulatory* terkait dengan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan serta meningkatkan komitmen kepatuhan (*Compliance Commitment*) guna mendorong terwujudnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) di semua tingkatan organisasi Perseroan.



AKHLAK: Nilai-Nilai Utama dan 18 Panduan Perilaku



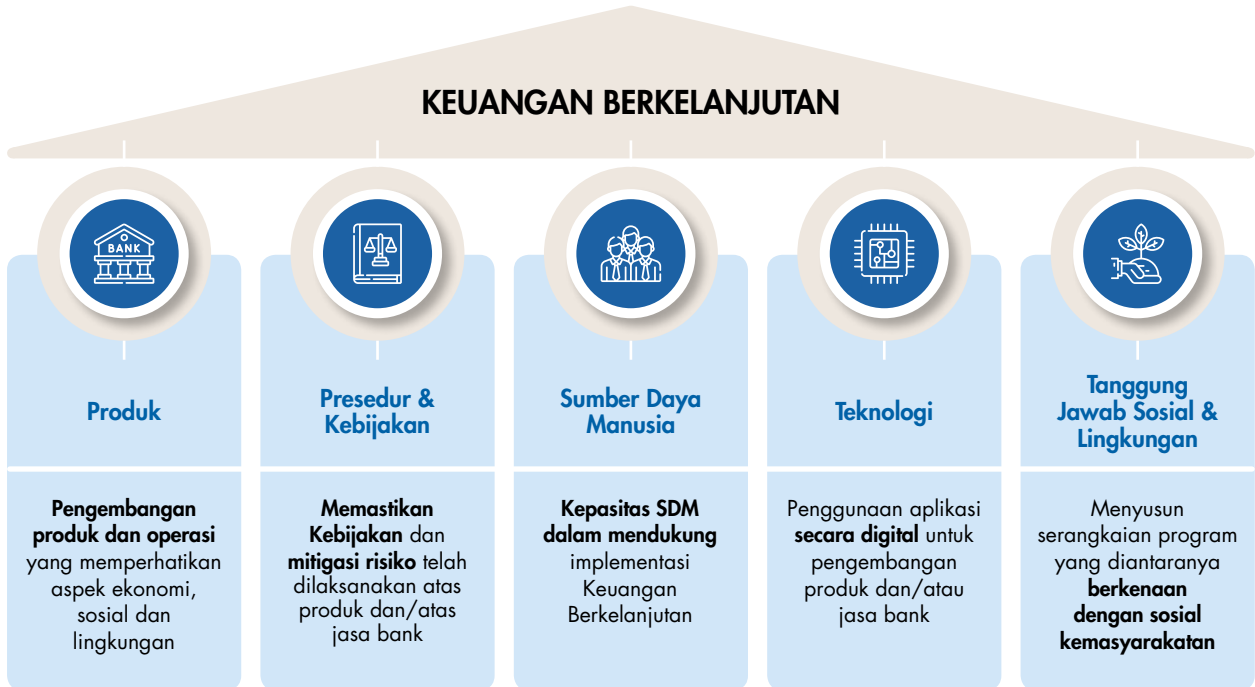
Tahun 2022 Perseroan telah memiliki Penilaian *Self Assessment* iGRC yang terdiri dari Tata Kelola, Profil Risiko dan Rentabilitas dengan Penilaian *Self Assessment* iGRC Triwulan IV pada Peringkat 2 (dua) atau Baik. Selain itu, Perseroan telah mengembangkan iGRC ke tahap implementasi dengan memasukkan Program iGRC ke dalam Budaya Perusahaan dengan fokus pada Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan melalui aktivitas secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

- Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Profesional Berintegritas (PROFIT) Sejak tahun 2019 Perseroan telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui kegiatan, yang meliputi: (1) keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi, (2) program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi dan (3) *Self Assessment* atas daftar periksa panduan pencegahan korupsi yang memadai bagi korporasi, (4) Program Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).
- Sertifikasi API Sertifikasi API adalah personel bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Pada tahun 2022 Perseroan berhasil melakukan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sebanyak 11 orang sehingga total sejak tahun 2019 adalah 59 orang.
- Sertifikasi PAKSI Perseroan dalam mendukung program dan upaya pencegahan korupsi dari KPK mengikuti PAKSI yang melibatkan pegawai Perseroan dan perwakilan IIKPA. Sampai saat ini telah tersertifikasi PAKSI sebanyak 22 pegawai dan 5 IIKPA sehingga total

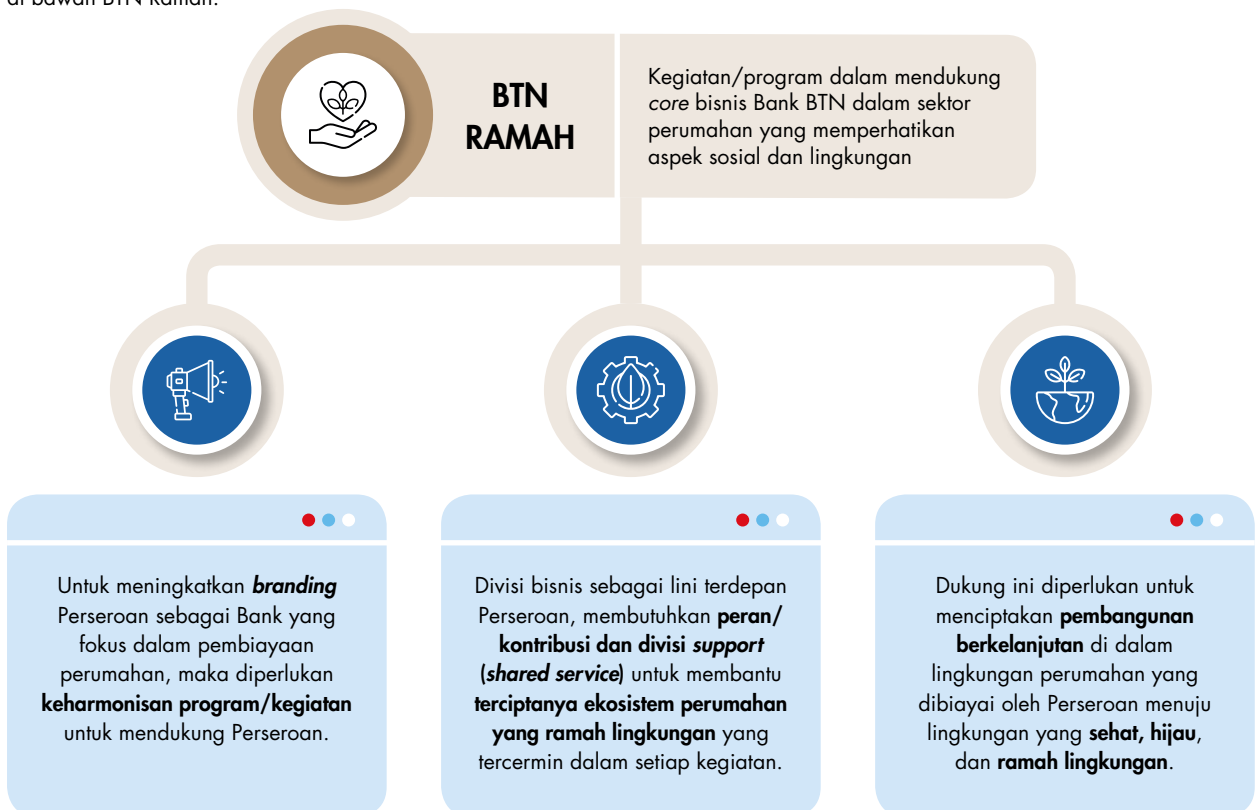
yang sudah tersertifikasi PAKSI sebanyak 27 orang. PAKSI adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi dan mempunyai lingkup penyuluhan anti korupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi pada lingkup organisasi dan jejaring organisasinya.

- Pencapaian Program Keuangan Berkelanjutan 2022

Penerapan RAKB Bank BTN tahun 2022 dirumuskan ke dalam 5 (lima) Pilar Keuangan Berkelanjutan, yaitu:



Guna merealisasikan kelima pilar tersebut, Bank BTN merancang inisiatif berkelanjutan bagi program-program pendukung *core business* di bawah BTN Ramah.



Sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan mulai mengimplementasikan RAKB Tahun 2019 per 1 Januari 2019. Penyusunan RAKB mengacu kepada serangkaian regulasi nasional dan internasional yang berhubungan dengan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) yaitu:



Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan ini disesuaikan dengan konsep *People, Planet, dan Profit* (3P) sebagai wujud dukungan menyeluruh dari Perseroan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. 3P *Sustainable Finance* atau dikenal dengan sebutan *Triple bottom line* ini adalah konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah perusahaan menggunakan tiga kriteria, yaitu *People* (Sosial), *Planet* (Lingkungan), dan *Profit* (Ekonomi) yang dapat mendorong Perseroan mengembangkan sektor ekonomi berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. RAKB memberikan arahan strategis bagi Perseroan dalam mengembangkan portofolio pembiayaan untuk kegiatan usaha berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang akan dilakukan Perseroan dalam proses bisnis dan manajemen risiko. Perubahan yang dicapai merupakan perubahan yang relevan dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan risiko *Environment, Social, Governance* (ESG) dalam kegiatan usaha Perseroan.

Salah satu program keuangan berkelanjutan terkait aspek dalam rangka peningkatan nilai integritas yang sejalan dengan nilai budaya AKHLAK, Perseroan telah menyelenggarakan sertifikasi API melalui kerjasama dengan KPK. Perseroan telah mengikuti program sertifikasi API sejak tahun 2019 sampai saat ini dengan total pegawai yang tersertifikasi API sebanyak 59 pegawai dimana pada tahun 2022 pegawai yang tersertifikasi sebanyak 11 pegawai. Atas program ini, KPK memberikan penghargaan API inspiratif kategori API teraktif pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2022.

Perseroan telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2022 dan berupaya secara maksimal untuk melaksanakannya, sebagai berikut:

No	Nama Program	Satuan Kerja Pelaksana Program
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana UMKM	Corporate Secretary
2	Program BTN Santri Developer	Investor Relations & Research
3	Pembuatan kebijakan yang ramah lingkungan	Digital Channel

No	Nama Program	Satuan Kerja Pelaksana Program
4	Pelatihan/sosialisasi kepada pegawai secara <i>online</i>	Learning Management
5	Penyediaan sarana kebersihan dan pendukung lingkungan yang sehat	Corporate Secretary
6	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan kampus	Corporate Secretary
7	Mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit yang ramah lingkungan	Enterprise Risk Management
8	Pemberian kredit investasi kepada perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi <i>green</i>	Corporate Syndication & Transactional Banking
9	Pembinaan cabang olahraga berprestasi	Corporate Secretary
10	Program digitalisasi kampus	Corporate Secretary
11	Peningkatan akses layanan keuangan perbankan (<i>Branchless Banking</i>)	Retail Funding & Services
12	Penggunaan sumber energi, desain dan material ramah lingkungan di perumahan yang dibiayai kredit/pembiayaan Perseroan	Subsidized & Mortgage
13	Penanaman mangrove	Corporate Secretary
14	Pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja di sektor UMKM	SME Banking
15	Penggunaan desain rumah hemat energi, sirkulasi udara yang baik dengan banyak bukaan/jendela dan menggunakan material yang ramah lingkungan pada perumahan yang dibiayai BTN.	Subsidized & Mortgage Lending
16	Penanaman pohon di lingkungan perumahan yang dibiayai Perseroan	Corporate Secretary
17	Pembiayaan proyek <i>Transit Oriented Development (TOD)</i> .	Corporate Syndication & Transactional Banking
18	Pembiayaan perumahan kepada komunitas sektor informal	Subsidized & Mortgage Lending
19	Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas	Compliance & Governance
20	<i>Housing Development & Intrepreneurship Center</i>	Corporate Secretary
21	<i>Partnership</i> dengan <i>e-commerce</i> atau P2P Lending	SME Banking
22	Penyusunan kebijakan/peraturan internal untuk pembiayaan bangunan yang ramah lingkungan	Commercial Banking
23	Proses penyimpanan dokumen yang memperhatikan aspek lingkungan dengan aplikasi <i>Document Management System & Record Management System</i>	Procurement & Fixed Asset Management
24	Proses pengadaan yang memperhatikan aspek lingkungan dengan aplikasi <i>End to End Procurement</i>	Procurement & Fixed Asset Management
25	Program literasi di bidang property Mini MBA	Investor Relations & Research

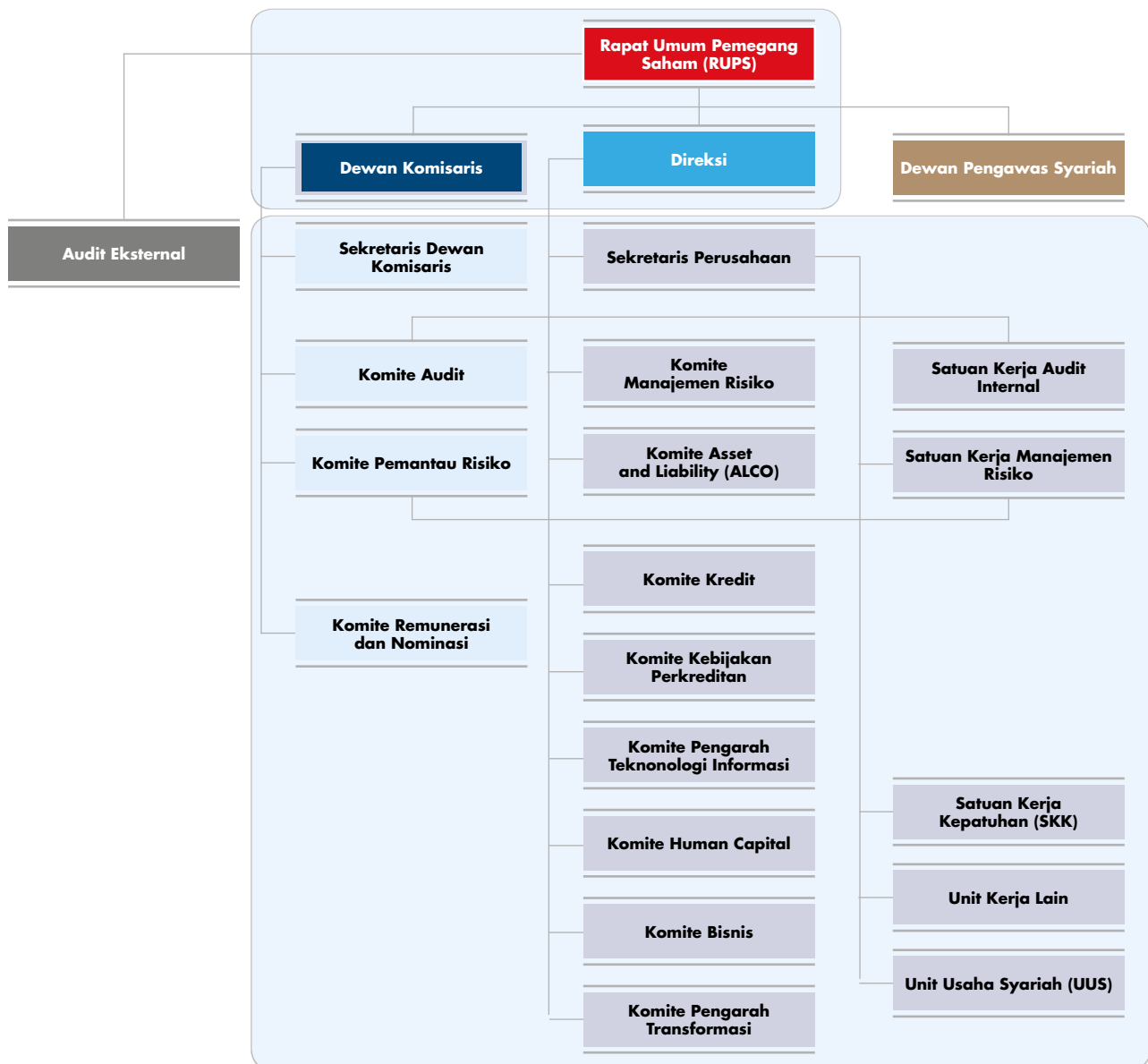
- **Pilar Risk Management & Governance**

Pilar *Risk Management & Governance* adalah pilar yang mendorong arah dan langkah aktivitas Perseroan di dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan aktivitas dan bisnis Perseroan serta mendukung kinerja profesional karyawan Perseroan di dalam melayani nasabah dan masyarakat sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah diatur regulator. Dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan, Perseroan mengintegrasikan aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke dalam manajemen risiko guna menghindari, mencegah, dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan hidup serta mempertimbangkan dan memperhitungkan risiko sosial dan lingkungan hidup dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, Perseroan juga melakukan penyesuaian terhadap prinsip, sistem dan analisis manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik produk dan/atau jasa bank serta eksposur risiko.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Organ Perusahaan

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.



Governance Soft Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan menyusun dan menerapkan *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam Perseroan sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*. *Governance soft structure* Perseroan merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan, sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir ditulis kembali dengan Akta No. 08 tanggal 08 April 2021 *juncto* Akta No. 05 tanggal 11 Januari 2023.
2. Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi No. 01/DIR-BTN/2021.
3. Pedoman Pengelolaan *Whistle Blowing System* melalui Surat Edaran Direksi No. 29/SE/DIR/IAD/2021.
4. Kebijakan Khusus No. KK.6-E tanggal 13 Desember 2022 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-E.1 tanggal 21 Desember 2022 tentang Prosedur pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).
5. Pedoman GCG yang disahkan dalam Peraturan Direksi No. 11/PD/DIR/PPD/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 01/KOM-BTN/2017 sebagai pembaharuan *Board Manual* yang menjadi pedoman kerja sebelumnya.
7. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dalam Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/CMPD/2017 sebagai pembaharuan *Board Manual* yang menjadi pedoman kerja sebelumnya.
8. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.
9. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Sebagai salah satu Perseroan Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan publik, kepemilikan saham terbesar Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 65,34% yang menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Negara Republik Indonesia juga memiliki 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna

yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya dan sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali. Di luar itu, 34,66% saham Perseroan dimiliki oleh masyarakat. Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 12.887.145.542 saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 12.887.145.541 saham Seri B.

Hak Pemegang Saham

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna merupakan pemegang saham pengendali dan memiliki keistimewaan dengan hak dan wewenang sebagai berikut:

Hak dan Wewenang Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Persetujuan perubahan Permodalan.
 - c. Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada Perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - h. Persetujuan penggunaan laba.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan. Di luar hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama.

Hak yang Sama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.

4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perseroan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
6. Hak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

Penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS dilakukan sebagai berikut:



Untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham, maka Perseroan melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan jangka waktu masing-masing, paling kurang melalui situs web Bursa Efek, situs web penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:

1. Tempat kedudukan Perseroan.
2. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
3. Ibu kota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
4. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

Proses pemungutan suara dalam RUPS dilakukan secara fisik dan/atau elektronik. Ketentuan mengenai pemungutan suara dicantumkan pada Tata Tertib RUPS. Prosedur pemungutan suara dijelaskan sesaat sebelum RUPS dimulai. Dalam RUPS, setiap mata acara yang akan diputuskan dijelaskan terlebih dahulu antara lain meliputi penjelasan latar belakang dan dasar hukum.

Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
8. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya. Surat kuasa dapat diakses melalui *website* Perseroan pada bagian Hubungan Investor - RUPS - Pemanggilan RUPS.

Kuorum RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum sebagaimana dimaksud pada butir di atas menyesuaikan mata acara RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2022 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 07/DIR/CSD/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan PT Datindo Entrycom.
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 2 Maret 2022 pukul 10.36 WIB – 14.08 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Maret 2022.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 175/CSD/CMA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Penyampaian Akta Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 2022.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2022

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen, Ketua Komite Audit	Hadir

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen, Anggota Komite Audit	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Eko Djoeli Heripoerwanto	Komisaris	Hadir
6.	Heru Budi Hartono	Komisaris	Hadir
7.	Andin Hadiyanto	Komisaris, Anggota Komite Audit	Hadir
8.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
9.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
10.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance, Planning, and Treasury	Hadir
11.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Wholesale Risk and Asset Management	Hadir
12.	Eko Waluyo	Direktur Compliance and Legal	Hadir
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management and Transformation	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Hadir
15.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	Hadir
17.	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	Hadir
18.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2022

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara pertama Rapat, namun terdapat tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.986.413.743 (99,8468633%)
 Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)
 Abstain : 12.248.691 (0,1531342%)

Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00054/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00053/2.1032/AU.2/07/0240-1/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan yang mencakup pula Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang berakhir pada 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi

Agenda Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kedua Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.988.462.434 (99,8724762%)
 Tidak Setuju : 10.200.200 (0,1275238%)
 Abstain : 0 (0%)

Keputusan

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp2.376.225.756.803,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp237.622.575.680,- (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp142.573.545.408,- (seratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp2.138.603.181.123,- (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai saldo Laba Ditahan.

Status: Terealisasi

Agenda Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.660.751.562 (95,7754054%)
 Tidak Setuju : 337.911.072 (4,2245946%)
 Abstain : 0 (0%)

Keputusan

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status: Terealisasi

Agenda Keempat

Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022, serta tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keempat Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.866.975.417 (98,3536421%)
 Tidak Setuju : 131.686.617 (1,643579%)
 Abstain : 600 (0,0000075%)

Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2022.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2022.

Status: Terealisasi

Agenda Kelima

Persetujuan Penginjian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kelima Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.998.662.434 (99,9999975%)
 Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)
 Abstain : 0 (0%)

Keputusan

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Perseroan dalam rangka memenuhi regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

Status: Terealisasi**Agenda Keenam**

Pengukuhan Pemberlakuan atas:

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keenam Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.998.662.434 (99,9999975%)
Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)
Abstain : 0 (0%)

Keputusan

Mengukuhkan pemberlakuan atas:

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Status: Terealisasi**Agenda Ketujuh**

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 6.951.162.908 (86,9040642%)
Tidak Setuju : 982.921.026 (12,2885671%)
Abstain : 64.578.700 (0,8073687%)

Keputusan

- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - Sdr. Eko D. Heripoerwanto sebagai Komisaris;
 - Sdr. Nixon L.P. Napitupulu sebagai Wakil Direktur Utama;
 yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 17 Mei 2019 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 17 Maret 2017 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Consumer & Commercial Lending	Direktur Consumer
2.	Direktur Finance, Planning & Treasury	Direktur Finance
3.	Direktur Compliance & Legal	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal
4.	Direktur Wholesale Risk & Asset Management	Direktur Assets Management
5.	Direktur Operation, IT, & Digital Banking	Direktur IT & Digital
6.	Direktur Distribution & Retail Funding	Direktur Distribution & Funding
7.	Direktur Risk Management & Transformation	Direktur Risk Management

Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer & Commercial Lending	Direktur Consumer
2.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance, Planning & Treasury	Direktur Finance
3.	Eko Waluyo	Direktur Compliance & Legal	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal
4.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Wholesale Risk & Asset Management	Direktur Assets Management
5.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, & Digital Banking	Direktur IT & Digital
6.	Jasmin	Direktur Distribution & Retail Funding	Direktur Distribution & Funding
7.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management & Transformation	Direktur Risk Management

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 23 Maret 2018, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Herry Trisaputra Zuna - sebagai Komisaris;
 - b. Himawan Arief Sugoto - sebagai Komisaris;
 - c. Sentot A. Sentaosa - sebagai Komisaris Independen;
 - d. Nixon L.P. Napitupulu - sebagai Wakil Direktur Utama.
5. Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama/Independen : Chandra Hamzah
 - Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro
 - Komisaris : Heru Budi Hartono
 - Komisaris : Andin Hadiyanto
 - Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
 - Komisaris : Himawan Arief Sugoto
 - Komisaris Independen : Armand Bachtiar Arief
 - Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
 - Komisaris Independen : Sentot A. Sentaosa
 - b. Direksi
 - Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
 - Wakil Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
 - Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
 - Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
 - Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
 - Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
 - Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
 - Direktur Distribution & Funding : Jasmin
 - Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud.
8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Status: Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 493/DIR/CSD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia.
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan surat kabar harian Investor Daily pada hari Senin, tanggal 26 September 2022.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 14.27 WIB – 15.11 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2022.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 669/CSD/RCD/XII/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Akta Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Oktober 2022.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen, Ketua Komite Audit	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen, Anggota Komite Audit	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen, Anggota Komite Audit	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris, Anggota Komite Audit	Hadir
7.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Hadir
8.	Himawan Arief Sugoto*	Komisaris	Hadir
9.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
10.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
11.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Hadir
12.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	Hadir
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Hadir
15.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Hadir
17.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Hadir
18.	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	Hadir
19.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

*) Hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi

Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Mata Acara Rapat

Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Terdapat 2 (dua) orang penanya yang disampaikan melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 8.602.800.944 (99,9899926%)
 Tidak Setuju : 220.200 (0,0025594%)
 Abstain : 640.800 (0,0074480%)

Keputusan

1. Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II ("PMHMETD"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk:
 - a. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;
 - b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk:
 - a. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
 - d. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - f. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - g. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - h. Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
 - i. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
 - j. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - k. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
 - l. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - n. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2021 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 56/DIR/CSD/I/2021 tanggal 25 Januari 2021, tembusan PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Datindo Entrycom.
Pengumuman	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta web Penyedia e-RUPS (KSEI), web Bursa-OJK, dan web Perseroan pada tanggal 1 Februari 2021.
Pemanggilan	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta web Penyedia e-RUPS (KSEI), web Bursa-OJK, dan web Perseroan pada tanggal 16 Februari 2021.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.49 WIB – 14.15 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta web Penyedia e-RUPS (KSEI), web Bursa-OJK, dan web Perseroan pada tanggal 15 Maret 2021.
Berita Acara RUPS	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 161/CSD/CMA/IV/2021 dan kepada Bursa melalui sistem IDXNet dengan No. 162/CSD/CMA/IV/2021 pada tanggal 07 April 2021.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2021

Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen, sesuai surat Dewan Komisaris No. 27/KOM/BTN/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen, Ketua Komite Audit	Hadir
3.	Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Hadir
4.	Eko Djoeli Heripoerwanto	Komisaris	Hadir
5.	Heru Budi Hartono	Komisaris	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris, Anggota Komite Audit	Hadir
7.	Nixon L.P. Napitupulu	PLT Direktur Utama dan Direktur Finance, Planning, and Treasury	Hadir
8.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending, membawahi Unit Usaha Syariah	Hadir
9.	Yossi Istanto	Direktur Human Capital, Legal, and Compliance	Hadir
10.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	Hadir
11.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	Hadir
12.	Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Hadir
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	Hadir
14.	Andin Hadiyanto	Anggota Komite Audit	Hadir
15.	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	Hadir
16.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan penghitungan suara.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2021

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan terdapat tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 1 (satu) orang penanya.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 8.139.379.243 (99,91%)
 Tidak Setuju : 0 (0%)
 Abstain : 7.168.278 (0,09%)

Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro and Surja sesuai Laporan No. 00062/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - Menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro and Surja sesuai Laporan No. 00081/2.1032/AU.2/10/0242-1/1/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2020, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Kedua**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan Pertanyaan, namun tidak berhubungan dengan mata acara Rapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 8.146.528.234 (99,99%)
Tidak Setuju : 1.500 (0,000018%)
Abstain : 17.787 (0,0002%)

Keputusan

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp1.602.356.526.240,- (satu triliun enam ratus dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh Rupiah) seluruhnya ditetapkan sebagai Cadangan.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Ketiga**

Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021, serta tantiem untuk Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 8.146.071.111 (99,99%)
Tidak Setuju : 460.523 (0,0056%)
Abstain : 15.887 (0,000195%)

Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk kinerja tahun buku 2020 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun 2021.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun 2021.

Status: Terealisasi**Mata Acara Rapat Keempat**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.951.920.957 (97,61%)
Tidak Setuju : 194.608.777 (2,39%)
Abstain : 17.787 (0,0002%)

Keputusan

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk untuk Kantor Akuntan Publik melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 8.146.529.734 (99,99%)
Tidak Setuju : 0 (0%)
Abstain : 17.787 (0,0002%)

Keputusan

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.068.876.401 (86,77%)
Tidak Setuju : 1.076.718.433 (13,21%)
Abstain : 952.687 (0,01%)

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian ketentuan terkait penambahan modal pada perusahaan terbuka mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, penyelenggaraan RUPS pada perusahaan terbuka mengacu pada POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan pelaksanaan e-RUPS pada perusahaan terbuka mengacu pada POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketujuh

Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab.

Hasil Pemungutan Suara

Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan

Keputusan Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedelapan

Perubahan susunan dan penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.068.879.401 (86,77%)
Tidak Setuju : 1.077.650.333 (13,22%)
Abstain : 17.787 (0,00022%)

Keputusan

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang diusulkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Syariah Nasional, yaitu mengangkat Mohammad Bagus Teguh Perwira, L.c., M.A sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kesembilan

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.002.926.101 (85,96%)
 Tidak Setuju : 1.077.650.333 (13,22%)
 Abstain : 65.971.087 (0,81%)

Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB tahun 2019, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Yossi Istanto sebagai Direktur Human Capital, Legal, and Compliance Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Semula tidak ada menjadi Wakil Direktur Utama;
 - b. Semula Direktur Human Capital, Legal, and Compliance menjadi Direktur Compliance and Legal;
 - c. Semula Direktur Remedial and Wholesale Risk menjadi Direktur Wholesale Risk and Asset Management;
 - d. Semula Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics menjadi Direktur Risk Management and Transformation;
4. Mengalihkan penugasan nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Nixon L.P. Napitupulu semula menjabat Direktur Finance, Planning, and Treasury menjadi Wakil Direktur Utama;
 - b. Elisabeth Novie Riswanti semula menjabat Direktur Remedial and Wholesale Risk menjadi Direktur Wholesale Risk and Asset Management;
 - c. Setiyo Wibowo semula menjabat Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics menjadi Direktur Risk Management and Transformation.

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 dan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - b. Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama;
 - c. Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury;
 - d. Eko Waluyo sebagai Direktur Compliance and Legal.
6. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 5 serta penguatan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3,4 dan 5, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris:

– Komisaris Utama/Independen	: Chandra Hamzah;
– Wakil Komisaris Utama/Independen	: Iqbal Latanro;
– Komisaris	: Eko Djoeli Heripoerwanto;
– Komisaris	: Heru Budi Hartono;
– Komisaris	: Andin Hadiyanto;
– Komisaris Independen	: Armand Bachtiar Arief;
– Komisaris Independen	: Ahdi Jumhari Luddin.
 - b. Direksi:

– Direktur Utama	: Haru Koesmahargyo;
– Wakil Direktur Utama	: Nixon L.P. Napitupulu;
– Direktur Consumer and Commercial Lending	: Hirwandi Gafar;
– Direktur Finance, Planning, and Treasury	: Nofry Rony Poetra;
– Direktur Compliance and Legal	: Eko Waluyo;
– Direktur Wholesale Risk and Asset Management	: Elisabeth Novie Riswanti;
– Direktur Operation, IT, and Digital Banking	: Andi Nirwoto;
– Direktur Distribution and Retail Funding	: Jasmin;
– Direktur Risk Management and Transformation	: Setiyo Wibowo.
8. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *fit and proper test* OJK dimaksud.
9. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) atas anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyelesaian atau perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Status: Terealisasi

Direksi

Direksi merupakan organ dalam pelaksanaan tata kelola yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS. Direksi bertanggung jawab mengelola dan menetapkan arah strategis Perseroan, memanfaatkan dan menjaga aset Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Untuk selanjutnya, Direksi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Direktur Utama merupakan Koordinator Direksi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Memimpin rapat Direksi.
2. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
3. Memberikan saran kepada anggota Direksi terkait efektivitas pelaksanaan tugas pengurusan.
4. Memelihara hubungan dan soliditas antar sesama anggota Direksi terkait pelaksanaan tugas pengurusan.
5. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Dewan Komisaris.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Periode 1 Januari 2022 – 2 Maret 2022

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Melaksanakan supervisi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Wholesale Risk and Asset Management b. Direktur Operation, IT and Digital Banking c. Direktur Finance, Planning and Treasury d. Direktur Risk Management and Transformation e. Direktur Compliance and Legal f. SEVP Human Capital g. Internal Audit (IAD) h. Corporate Secretary (CSD)
Nixon L.P Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Melaksanakan supervisi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Consumer and Commercial Lending b. Direktur Distribution and Retail Funding c. SEVP Wholesale Banking d. Marketing Communication (MCD)
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	Melaksanakan supervisi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Commercial Banking (CMBD) b. SME Banking (SMBD) c. Non Subsidized Mortgage & Personal Lending (NSLD) d. Subsidized Mortgage Lending (SMD) e. Sharia Business (SHAD)
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance, Planning and Treasury	Melaksanakan supervisi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Treasury (TRSD) b. Finance & Accounting (FAD) c. Corporate Strategy & Planning (CSPD) d. Procurement & Fixed Asset Management (PFAD) e. Investor Relations & Research (IRR)
Eko Waluyo	Direktur Compliance and Legal	Melaksanakan supervisi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Legal (LGD) b. Compliance and Governance (CMGD) c. Policy and Procedure (PPD) d. Customer Care (CCD)
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Wholesale Risk and Asset Management	Melaksanakan supervisi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Commercial Credit Risk (CRD) b. Commercial Asset Management 1 (CAMD 1) c. Commercial Asset Management 2 (CAMD 2) d. Consumer Collection, Recovery, and Asset Sales (CRSD)
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT and Digital Banking	Melaksanakan supervisi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Digital Channel (DCD) b. Credit Operation (COD) c. Operation and Business Support (OBS) d. IT Strategic Planning and Development (ITPD) e. IT Operation (ITOD)
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Melaksanakan supervisi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Wealth Management (WMD) b. Retail Funding and Services (RFSD) c. Service Quality and Distribution (SQND) d. Regional Offices
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management and Transformation	Melaksanakan supervisi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Enterprise Risk Management (ERMD) b. Transformation and Partnership Management (TPMD) c. Data Management and Analytics (DMD) d. Retail Credit Risk (RRD)

Periode 3 Maret 2022 – 31 Desember 2022

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Melaksanakan supervisi terhadap: a. Direktur Assets Management b. Direktur IT and Digital c. Direktur Finance d. Direktur Risk Management e. Direktur Human Capital, Compliance, and Legal f. SEVP Operations g. Internal Audit (IAD) h. Corporate Secretary (CSD)
Nixon L.P Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Melaksanakan supervisi terhadap: a. Direktur Consumer b. Direktur Distribution and Funding c. SEVP Wholesale Banking d. Marketing Communication (MCD)
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Melaksanakan supervisi terhadap: a. Commercial Banking (CMBD) b. SME Banking (SMBD) c. Non Subsidized Mortgage & Personal Lending (NSLD) d. Subsidized Mortgage Lending (SMD) e. Sharia Business (SHAD)
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Melaksanakan supervisi terhadap: a. Treasury (TRSD) b. Finance & Accounting (FAD) c. Corporate Strategy & Planning (CSPD) d. Investor Relations & Research (IRRD)
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	Melaksanakan supervisi terhadap: a. SEVP Compliance and Legal b. Human Capital Strategy (HCSD) c. Human Capital Management (HCMD) d. Learning Management (LMD)
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Melaksanakan supervisi terhadap: a. Commercial Asset Management 1 (CAMD 1) b. Commercial Asset Management 2 (CAMD 2) c. Consumer Collection, Recovery, and Asset Sales (CRSD) d. Procurement & Fixed Asset Management (PFAD)
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Melaksanakan supervisi terhadap: a. Digital Channel (DCD) b. IT Strategic Planning and Development (ITPD) c. IT Operations (ITOD) d. Data Management and Analytics (DMD) e. IT Security (ITSD)
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Melaksanakan supervisi terhadap: a. Wealth Management (WMD) b. Retail Funding and Services (RFSD) c. Institutional Funding (IFD) d. Service Quality and Distribution (SQND) e. Regional Offices
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Melaksanakan supervisi terhadap: a. Enterprise Risk Management (ERMD) b. Transformation and Partnership Management (TPMD) c. Retail Credit Risk (RRD) d. Commercial Credit Risk (CRD)

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang

atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain.

3. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan

- peraturan perundang-undangan.
5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
 7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta pembuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala dal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Persyaratan Direksi

Persyaratan Direksi yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja adalah sebagai berikut:

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/

atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 - f. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang BUMN, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
 4. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
 5. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan melalui Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/CMPD/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merupakan satu infrastruktur tata kelola yang menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban selaku pengurus Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengacu pada peraturan tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat Perseroan.

Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Nilai-nilai
Bab III	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi A. Struktur dan Komposisi Direksi B. Persyaratan Anggota Direksi C. Kriteria Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan D. Rangkap Jabatan Direksi E. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi F. Masa Jabatan Direksi G. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi H. Kewajiban Direksi I. Hak dan Wewenang Direksi J. Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris K. Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi L. Larangan M. Transparansi N. Etika Kerja O. Waktu Kerja P. Pengaturan Rapat Q. Kepemimpinan R. Evaluasi Kinerja Direksi S. Pelaporan dan Pertanggungjawaban T. Komite

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN.
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
4. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau menjadi calon

legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

5. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dari/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

1. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/ selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.
2. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Haru Koesmahargo	Direktur Utama	-	-
Nixon L. P Napitipulu	Wakil Direktur Utama	-	-
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	-	-
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	-	-
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal	-	-
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	-	-
Andi Nirwoto	Direktur IT & Digital	-	-
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	-	-
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	-	-

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang sah, yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah

dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan (*conflict interest*) yaitu suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi, maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terdapat benturan kepentingan.
2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.
4. Dalam hal pemberian kredit kepada anggota Direksi, harus berdasarkan batas kewajaran sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).
5. Melaporkan transaksi saham Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (Rapat ALCO dan *Performance Review*).
2. Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat, dan menyertakan bahan rapat.
6. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan.
7. Bahan rapat untuk Rapat Terjadwal sebagaimana dimaksud disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana tercepat lainnya.
8. Bahan rapat untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, penyampaian bahan rapatnya paling lambat pada saat rapat diselenggarakan.
9. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap

waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

10. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat Direksi secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan sarana telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan dengan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:
 - a. Dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan/atau risalah Rapat Direksi.
 - b. Bukti rekaman penyelenggaraan rapat.
 - c. Risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.
11. Dalam Rapat Direksi, seorang anggota Direksi dapat diwakili hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka:
 - a. Wakil Direktur Utama yang memimpin; atau
 - b. Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan; atau
 - c. Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama, apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan Direktur Utama tidak melakukan penunjukan; atau
 - d. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat; atau
 - e. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi; atau
 - f. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur dengan masa jabatan paling lama sebagai anggota Direksi, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Komite Direksi

Rapat Komite dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Komite dan atas permintaan tertulis dari sekretaris dan/atau anggota Komite.

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Keputusan pada pemungutan suara harus memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
3. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
4. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
6. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Hasil Rapat

1. Hasil rapat walib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menuliskan alasannya dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.

3. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

Rencana Rapat Direksi

Rencana Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, telah disepakati bahwa Rapat Direksi tahun 2022 dilaksanakan minimal 1 (satu) kali tiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan. Direksi juga melakukan Rapat bersama Komite di bawah Direksi yang dijadwalkan waktunya sesuai dengan kebutuhan.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (Rapat ALCO dan *Performance Review*). Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.

Pemanggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan. Bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana *email* atau sarana elektronik lainnya.

Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta rapat internal Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Internal Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi								
			Haru Koesmahargyo	Nixon L. P Napitupulu	Setiyo Wibowo	Hirwandi Gafar	Jasmin	Elisabeth Novie Riswanti	Andi Nirwoto	Eko Waluyo	Nofry Rony Poetra
1.	10 Januari 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	10 Januari 2022	Perkembangan Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	10 Januari 2022	<i>Update Branch Transformation</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	17 Januari 2022	Perubahan KPI Korporat - Direktorat 2022	1	1	1	1	1	1	Sakit	1	1
5.	17 Januari 2022	Usulan Penyesuaian Inisiatif <i>Corporate Plan</i> Tahun 2022	1	1	1	1	1	1	Sakit	1	1
6.	24 Januari 2022	Usulan <i>New Naming</i> BTN <i>Mobile Banking</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	24 Januari 2022	Usulan dan <i>Update</i> Agenda HUT BTN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	24 Januari 2022	BCM : <i>Monitoring</i> Penanganan Pandemi Covid 19	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi								
			Haru Koesmahargyo	Nixon L.P Napitupulu	Setiyo Wibowo	Hirwandi Gafar	Jasmin	Elisabeth Novie Riswanti	Andi Nirwoto	Eko Waluyo	Nafry Rony Poetra
9.	24 Januari 2022	ALCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	31 Januari 2022	BCM : Laporan <i>Update</i> Penanganan Covid 19 di BTN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	31 Januari 2022	Usulan Desain Ruang Serba Guna Lt 6, Museum BTN, Pusdiklat BTN dan Pre <i>Master Plan</i> Lahan Gandul	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	31 Januari 2022	<i>Update</i> dan Usulan Acara HUT BTN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	31 Januari 2022	Materi HCMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	31 Januari 2022	<i>Update</i> Materi RBB 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	14 Februari 2022	Usulan Persetujuan Mata Acara RUPST 2022 dan Pelaksanaan RUPST 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16.	21 Februari 2022	Laporan Kinerja Dana Pensiun Tahun 2021	1	Cuti	1	1	1	1	1	1	1
17.	21 Februari 2022	Rencana Desain Renovasi Pusdiklat Tanah Abang dan Desain Pembangunan Kanwil 1 Bandung	1	Cuti	1	1	1	1	1	1	1
18.	22 Februari 2022	ALCO	1	Cuti	1	1	1	1	1	1	1
19.	22 Februari 2022	Komite Manajemen Risiko	1	Cuti	1	1	1	1	1	1	1
20.	01 Maret 2022	Usulan Pengelolaan Apartemen Buah Batu <i>Park</i> Bandung	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	05 Maret 2022	Struktur Organisasi dan Pembidangan Divisi Bank BTN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	10 Maret 2022	Hasil Penilaian KPI Tahun 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	14 Maret 2022	Usulan Perubahan Struktur Organisasi TRSD	Dinas	1	1	1	1	1	1	1	1
24.	14 Maret 2022	Internal Direksi	Dinas	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	22 Maret 2022	<i>Performance Review</i> Februari 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Sakit
26.	22 Maret 2022	Tindak Lanjut Klaim Nasabah Berdasar Putusan Pengadilan Inkracht	1	1	1	1	1	1	1	1	Sakit
27.	22 Maret 2022	Materi HCMD	1	1	1	1	1	1	1	1	Sakit
28.	22 Maret 2022	ALCO	1	1	1	1	1	1	1	1	Sakit
29.	05 April 2022	Usulan Program <i>Overall Objective Service</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	Sakit
30.	05 April 2022	<i>Rebranding</i> Logo dan <i>Renaming</i> Mobil Kas Keliling BTN	1	1	1	1	1	1	1	1	Sakit
31.	05 April 2022	Penyelesaian Tindak Lanjut Audit Internal	1	1	1	1	1	1	1	1	Sakit
32.	11 April 2022	<i>Project</i> Penjualan Aset Bermasalah Disertai dengan Pembelian SUKUK	Ijin	1	1	1	1	1	1	1	1
33.	11 April 2022	Usulan Perubahan Struktur Organisasi CCD	ijin	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi								
			Haru Koesmahargyo	Nixon L. P Napitupulu	Setiyo Wibowo	Hirwandi Gafar	Jasmin	Elisabeth Novie Riswanti	Andi Nirwoto	Eko Waluyo	Nofry Rory Poetra
34.	11 April 2022	Pelatihan BOD dan SEVP	ijin	1	1	1	1	1	1	1	1
35.	11 April 2022	Materi HCMD	ijin	1	1	1	1	1	1	1	1
36.	18 April 2022	Persiapan Operasional Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37.	18 April 2022	Persiapan <i>Analyst Meeting</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38.	18 April 2022	<i>Performance Review</i> Maret 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39.	18 April 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40.	20 April 2022	ALCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41.	25 April 2022	Materi HCMD (Komite Sanksi)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42.	25 April 2022	Materi HCMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43.	09 Mei 2022	Usulan Audit Laporan Keuangan Per Juni 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44.	09 Mei 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45.	17 Mei 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46.	17 Mei 2022	Komite HC : <i>Engagement Index</i> BTN 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47.	23 Mei 2022	<i>Performance Review</i> April 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48.	23 Mei 2022	Usulan Perubahan RKAP 2022	1	1	1	ijin	1	1	1	1	1
49.	23 Mei 2022	Pemberian Fasilitas COP Kepada Pejabat BTN	1	1	1	ijin	1	1	1	1	1
50.	23 Mei 2022	Proses Sentralisasi <i>Management Building</i>	1	1	1	ijin	1	1	1	1	1
51.	23 Mei 2022	<i>Update Program</i> TJSJ Pembangunan <i>Housing Development and Entrepreneurship Center</i> Bakauheni Lampung	1	1	1	ijin	1	1	1	1	1
52.	23 Mei 2022	ALCO	1	1	1	ijin	1	1	1	1	1
53.	30 Mei 2022	Internal Direksi	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
54.	06 Juni 2022	Pemohonan Ijin Prinsip Pembahasan Rencana Kerjasama Penutupan Asuransi	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	Dinas
55.	06 Juni 2022	Evaluasi Kerjasama TWP AD dengan Bank BTN	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	Dinas
56.	06 Juni 2022	Internal Direksi	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	Dinas
57.	11 Juni 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58.	13 Juni 2022	<i>Performance Review</i> Mei 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59.	13 Juni 2022	Pembahasan Terkait Pengembangan UUS BTN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60.	13 Juni 2022	Usulan Perubahan SO ITPD, ITOD, IT Security, ERMD dan CMGD	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61.	14 Juni 2022	Komite Manajemen Risiko	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi								
			Haru Koesmahargyo	Nixon L. P Napitupulu	Setiyo Wibowo	Hirwandi Gafar	Jasmin	Elisabeth Novie Riswanti	Andi Nirwoto	Eko Waluyo	Nafry Rony Poetra
62.	20 Juni 2022	Rapat Pendiri dan Pengurus Dapen Untuk Usulan Revisi Rencana Bisnis dan Rencana Investasi Dapen Tahun 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63.	20 Juni 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64.	27 Juni 2022	Standarisasi Fasace dan Interior Bank BTN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65.	27 Juni 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66.	27 Juni 2022	Materi HCMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67.	27 Juni 2022	ALCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68.	27 Juni 2022	Rapat Komite Pengarah TI (KPTI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
69.	4 Juli 2022	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO 37001:2016 SMAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70.	4 Juli 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71.	12 Juli 2022	Komite HC	1	1	1	1	1	1	1	1	1
72.	12 Juli 2022	Komite HC	1	1	1	1	1	1	1	1	1
73.	18 Juli 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	Dinas	1	1
74.	18 Juli 2022	Performance Review Juni 2022	1	1	1	1	1	1	Dinas	1	1
75.	25 Juli 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	Dinas	1	Dinas	1
76.	25 Juli 2022	Pembahasan Kajian PMN dengan BRIDS	1	1	1	1	1	Dinas	1	Dinas	1
77.	25 Juli 2022	ALCO	1	1	1	1	1	Dinas	1	Dinas	1
78.	1 Agustus 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79.	1 Agustus 2022	Usulan Kebijakan Umum Tentang Perkreditan atau Pembiayaan Bank	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80.	8 Agustus 2022	Internal Direksi	1	1	1	Dinas	1	1	1	1	1
81.	15 Agustus 2022	Progress Audit Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2022 Oleh KAP PSSEY	1	1	1	1	1	1	1	1	1
82.	15 Agustus 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
83.	15 Agustus 2022	Pembahasan Terkait Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit Sesuai SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84.	22 Agustus 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85.	22 Agustus 2022	Performance Review Juli 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86.	29 Agustus 2022	Internal Direksi	1	1	1	Dinas	1	1	1	Dinas	1
87.	29 Agustus 2022	Usulan Perubahan Warna Honeycomb dalam Corporate Identity	1	1	1	Dinas	1	1	1	Dinas	1
88.	29 Agustus 2022	ALCO	1	1	1	1	1	1	1	Dinas	1
89.	5 September 2022	Internal Direksi	1	Sakit	1	1	1	1	1	1	1

No.	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi								
			Haru Koesmahargyo	Nixon L. P Napitupulu	Setiyo Wibowo	Hirwandi Gafar	Jasmin	Elisabeth Novie Riswanti	Andi Nirwoto	Eko Waluyo	Nofry Rory Poetra
90.	6 September 2022	Closing Meeting Audit Laporan Keuangan Posisi 30 Juni 2022	1	1	1	Dinas	1	1	1	Dinas	1
91.	12 September 2022	Internal Direksi	1	1	1	1	1	Sakit	1	Cuti	1
92.	12 September 2022	ALCO Khusus	1	1	1	1	1	Sakit	2	Cuti	1
93.	19 September 2022	Evaluasi Tingkat Kesehatan dan Pengelolaan Dana Pensiun di Lingkungan BUMN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94.	19 September 2022	Agenda Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1
95.	19 September 2022	Penjaminan KPR Subsidi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96.	19 September 2022	Performance Review Agustus 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
97.	26 September 2022	Agenda Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98.	26 September 2022	Komite Sanksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
99.	26 September 2022	Materi HCMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100.	27 September 2022	ALCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101.	27 September 2022	KPTI	1	1	1	1	Dinas	Dinas	1	1	1
102.	3 Oktober 2022	Internal Direksi	1	1	Cuti	1	1	1	1	1	Cuti
103.	3 Oktober 2022	ALCO Khusus	1	1	Cuti	1	1	1	1	1	Cuti
104.	10 Oktober 2022	Agenda Umum	Cuti	1	1	1	1	1	1	1	1
105.	10 Oktober 2022	ALCO Khusus	Cuti	1	1	1	1	1	1	1	1
106.	10 Oktober 2022	Bank Garansi Online	Cuti	1	1	1	1	1	1	1	1
107.	10 Oktober 2022	Komite Sanksi dan Disiplin	Cuti	1	1	1	1	1	1	1	1
108.	13 Oktober 2022	Menghimpun Aspirasi Top Down Tahun 2023 dalam Rangka Penyusunan Guideline RBB 2023 - 2025 dan RKAP 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1
109.	18 Oktober 2022	Agenda Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110.	18 Oktober 2022	Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111.	18 Oktober 2022	Penetapan Risk Appetite & Risk Tolerance Tahun 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112.	18 Oktober 2022	Rencana Pembelian Lahan Peruntukan KC KGS dan Kebon Jeruk	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113.	18 Oktober 2022	ALCO Khusus	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114.	18 Oktober 2022	Rapat Komite Manajemen Risiko	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115.	24 Oktober 2022	Agenda Umum	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1

No.	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi								
			Haru Koesmahargyo	Nixon L. P Napitupulu	Setiyo Wibowo	Hirwandi Gafar	Jasmin	Elisabeth Novie Riswanti	Andi Nirwoto	Eko Waluyo	Nafry Rony Poetra
116.	24 Oktober 2022	Performance Review September 2022	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
117.	24 Oktober 2022	ALCO	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
118.	31 Oktober 2022	Update Deal Roadshow Direksi	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
119.	31 Oktober 2022	Agenda Umum	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
120.	31 Oktober 2022	Penyampaian Hasil Kajian Optimalisasi Ekosistem Perumahan MBR dan Grand Design Pembiayaan Perumahan Kepada Segmen MBR Sektor Informal	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
121.	31 Oktober 2022	Update WLA 2022 Pasca Branch Transformation	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
122.	31 Oktober 2022	Usulan RKAP 2023 termasuk Hasil JPS Rencana Pengembangan	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
123.	31 Oktober 2022	Self Assessment Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Manajemen Risiko BUMN	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
124.	31 Oktober 2022	ALCO Khusus	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
125.	4 November 2022	Usulan RKAP 2023	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
126.	14 November 2022	Agenda Umum	1	1	1	Dinas	1	1	Pendidikan	1	1
127.	14 November 2022	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO 37001:2016 SMAP	1	1	1	Dinas	1	1	Pendidikan	1	1
128.	14 November 2022	Pengkinian Recovery Plan dan Resolution Plan	1	1	1	Dinas	1	1	Pendidikan	1	1
129.	14 November 2022	ALCO Likuiditas	1	1	1	Dinas	1	1	Pendidikan	1	1
130.	14 November 2022	Komite Sanksi	1	1	1	Dinas	1	1	Pendidikan	1	1
131.	22 November 2022	Rencana Bisnis Dana Pensiun	1	NDR	Pendidikan	1	1	1	1	1	NDR
132.	22 November 2022	RAKB 2023	1	NDR	Pendidikan	1	1	1	1	1	NDR
133.	22 November 2022	Kebijakan Umum Tentang Kepatuhan, APU - PPT dan Tata Kelola Perusahaan	1	NDR	Pendidikan	1	1	1	1	1	NDR
134.	22 November 2022	Pengembalian Dokumen Legalitas Lahan Milik Mitra dan Aset TWP AD	1	NDR	Pendidikan	1	1	1	1	1	NDR
135.	23 November 2022	ALCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
136.	28 November 2022	Update Project Strategy HC	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137.	28 November 2022	ALCO Likuiditas	1	1	1	1	1	1	1	1	1
138.	28 November 2022	Penyelesaian Permasalahan Debitur Meninggal Dunia yang dilakukan Eksekusi Macet	1	1	1	1	1	1	1	1	1
139.	28 November 2022	Usulan WLA 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi								
			Haru Koesmahargyo	Nixon L. P Napitupulu	Setiyo Wibowo	Hirwandi Gafar	Jasmin	Elisabeth Novie Riswanti	Andi Nirwoto	Eko Waluyo	Nofry Rony Poetra
140.	28 November 2022	Materi HCMD : <i>Talent Mobility</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141.	28 November 2022	KPTI	Dinas	1	1	Dinas	1	1	1	1	1
142.	5 Desember 2022	Agenda Umum	1	1	1	1	1	1	Dinas	1	1
143.	5 Desember 2022	Update Likuiditas	1	1	1	1	1	1	Dinas	1	1
144.	13 Desember 2022	Agenda Umum	1	1	1	Dinas	1	1	1	1	1
145.	13 Desember 2022	Usulan Perubahan SO CRD	1	1	1	Dinas	1	1	1	1	1
146.	19 Desember 2022	ALCO	1	Dinas	1	1	Dinas	Dinas	1	Dinas	1
147.	20 Desember 2022	<i>Update Progress Project Tiger</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
148.	20 Desember 2022	Usulan 14 Tema Inisiatif Utama Tahun 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1
149.	20 Desember 2022	<i>Performance Review November 2022</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150.	20 Desember 2022	<i>Job Evaluation & Grading Structure</i>	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
151.	20 Desember 2022	Rapat Rencana Kerja Tahun 2023	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
152.	20 Desember 2022	Komite HC : Sanksi dan Disiplin	1	1	1	1	1	1	1	1	1
153.	20 Desember 2022	Komite HC : <i>Talent Mobility</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154.	26 Desember 2022	ALCO	Cuti	1	1	1	1	Cuti	1	Dinas	1
155.	26 Desember 2022	BTN <i>Naming Right</i> MRT	Cuti	1	1	1	1	Cuti	1	Dinas	1
156.	26 Desember 2022	Rapat Komite Manajemen Risiko	Cuti	1	1	1	1	Cuti	1	1	1

Rapat Gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi		Kehadiran Dewan Komisaris	
			Direksi	Keterangan	Dewan Komisaris	Keterangan
1.	23 Februari 2022	1. <i>Performance Review</i> 2. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> 3. Pemantauan <i>Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> 4. <i>Progress Penyusunan Kebijakan Umum</i>	Haru Koesmahargyo	Hadir	Chandra Martha Hamzah	Hadir
			Nixon L. P Napitupulu	Tidak Hadir	Iqbal Latanro	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir	Armand B. Arief	Hadir
			Nofry Rony Poetra	Tidak Hadir	Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko Waluyo	Hadir	Andin Hadiyanto	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir	Heru Budi Hartono	Tidak Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir	Eko D. Heripoerwanto	Tidak Hadir
			Jasmin	Hadir		
Setiyo Wibowo	Hadir					

No.	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi		Kehadiran Dewan Komisaris	
			Direksi	Keterangan	Dewan Komisaris	Keterangan
2.	20 April 2022	1. <i>Performance Review</i> 2. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> 3. Pemantauan <i>Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> 4. <i>Progress</i> Penyusunan Kebijakan Umum	Haru Koesmahargyo	Hadir	Chandra Martha Hamzah	Hadir
			Nixon L. P Napitupulu	Hadir	Iqbal Latanro	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir	Armand B. Arief	Hadir
			Nofry Rony Poetra	Hadir	Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko Waluyo	Hadir	Sentot A. Sentausa	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir	Andin Hadiyanto	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir	Heru Budi Hartono	Tidak Hadir
			Jasmin	Hadir	Herry Trisaputra Zuna	Tidak Hadir
3.	22 Juni 2022	1. <i>Performance Review</i> 2. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> 3. Pemantauan <i>Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> 4. <i>Progress</i> Penyusunan Kebijakan Umum	Haru Koesmahargyo	Hadir	Chandra Martha Hamzah	Hadir
			Nixon L. P Napitupulu	Hadir	Iqbal Latanro	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir	Armand B. Arief	Hadir
			Nofry Rony Poetra	Hadir	Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko Waluyo	Hadir	Sentot A. Sentausa	Tidak Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir	Andin Hadiyanto	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir	Heru Budi Hartono	Hadir
			Jasmin	Hadir	Herry Trisaputra Zuna	Tidak Hadir
4.	31 Agustus 2022	1. <i>Performance Review</i> 2. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> 3. Pemantauan <i>Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> 4. <i>Progress</i> Penyusunan Kebijakan Umum	Haru Koesmahargyo	Hadir	Chandra Martha Hamzah	Hadir
			Nixon L. P Napitupulu	Hadir	Iqbal Latanro	Hadir
			Hirwandi Gafar	Tidak Hadir	Armand B. Arief	Hadir
			Nofry Rony Poetra	Hadir	Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko Waluyo	Hadir	Sentot A. Sentausa	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir	Andin Hadiyanto	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir	Heru Budi Hartono	Hadir
			Jasmin	Hadir	Herry Trisaputra Zuna	Tidak Hadir
5.	19 Oktober 2022	1. <i>Performance Review</i> 2. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> 3. Pemantauan <i>Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> 4. <i>Progress</i> Penyusunan Kebijakan Umum	Haru Koesmahargyo	Hadir	Chandra Martha Hamzah	Hadir
			Nixon L. P Napitupulu	Hadir	Iqbal Latanro	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir	Armand B. Arief	Hadir
			Nofry Rony Poetra	Hadir	Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko Waluyo	Hadir	Sentot A. Sentausa	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir	Andin Hadiyanto	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir	Herry Trisaputra Zuna	Hadir
			Jasmin	Hadir	Himawan Arief Sugoto	Tidak Hadir
		Setiyo Wibowo	Hadir			

No.	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi		Kehadiran Dewan Komisaris	
			Direksi	Keterangan	Dewan Komisaris	Keterangan
6.	21 Desember 2022	1. <i>Performance Review</i> 2. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> 3. Pemantauan <i>Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> 4. <i>Progress</i> Penyusunan Kebijakan Umum	Haru Koesmahargyo	Hadir	Chandra Martha Hamzah	Tidak Hadir
			Nixon L. P Napitupulu	Tidak Hadir	Iqbal Latanro	Hadir
			Hirwandi Gafar	Hadir	Armand B. Arief	Hadir
			Nofry Rony Poetra	Hadir	Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Eko Waluyo	Hadir	Sentot A. Sentausa	Hadir
			Elisabeth Novie Riswanti	Hadir	Andin Hadiyanto	Hadir
			Andi Nirwoto	Hadir	Herry Trisaputra Zuna	Hadir
			Jasmin	Hadir	Himawan Arief Sugoto	Hadir
		Setiyo Wibowo	Hadir			

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	156	148	95%	16	16	100%	2	2	100%
Nixon L. P Napitupulu	Wakil Direktur Utama	156	131	84%	16	14	87%	2	2	100%
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	156	139	89%	16	15	94%	2	2	100%
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	156	140	90%	16	15	94%	2	2	100%
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	156	144	92%	16	16	100%	2	2	100%
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	156	144	92%	16	16	100%	2	2	100%
Andi Nirwoto	Direktur IT & Digital	156	145	93%	16	16	100%	2	2	100%
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	156	154	99%	16	16	100%	2	2	100%
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	156	150	96%	16	16	100%	2	2	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Kebijakan terkait pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Program pendalaman pengetahuan bagi anggota Direksi meliputi:

1. Program pendalaman pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program pendalaman pengetahuan seperti seminar, dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada anggota lainnya dalam berbagi informasi dan pengetahuan.
3. Materi yang diterima dari program pendalaman pengetahuan harus didokumentasikan dengan baik dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi pada Sekretaris Perusahaan. Materi tersebut harus tersedia jika suatu saat diperlukan.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Haru Koesmahargo	Direktur Utama	<i>National Conference</i> IKAI 2022	Virtual Zoom, 26 – 27 Januari 2022	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		<i>Colombia Business School Behavioral Science In Businnes : Understanding People to Drive Results</i>	Manhattanville, New York City, 11 – 13 April 2022	Colombia Business Schoo
		<i>Sustainability - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia</i>	Virtual Zoom, 12 Mei 2022	FKDKP
Nixon L. P Napitupulu	Wakil Direktur Utama	<i>International Bank's Executives Discussion : Future of Banking In The Post Covid 19 World</i>	Onsite (Paris - Prancis), 25 – 30 Mei 2022	BSMR
		<i>TXF Global 2022 Export, Agency & Project Finance.</i>	Onsite (Lisbon - Portugal), 07 08 Juni 2022	TXF Media
		<i>Leadership Essential</i>	Onsite (New York - USA), 02 – 03 November 2022	Columbia Business School Executive Education
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	<i>International Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program For Executive</i>	Onsite (Belanda, Belgia, Paris), 05 – 10 November 2022	MMUGM, IBI
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	<i>TXF Global 2022 Export, Agency & Project Finance.</i>	Onsite (Lisbon - Portugal), 07 08 Juni 2022	TXF Media
		<i>Stakeholder Management Board</i>	Onsite (Lausanne - Switzerland), 03 – 04 Oktober 2022	IMD (International Institute for Management Development)
		<i>Master Class GRC Foundation</i>	Virtual Zoom, 08 Desember 2022	BLMI - KBUMN
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	<i>National Conference</i> IKAI 2022	Virtual Zoom, 26 – 27 Januari 2022	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		<i>Fitch On Indonesia 2022 Exit Strategy After The Pandemic (Part 1)</i>	Virtual Zoom, 16 Mei 2022	Fitch Ratings
		<i>Sustainability - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia</i>	Virtual Zoom, 12 Mei 2022	FKDKP
		<i>Webinar OJK - Bank Digitalization: Lessons Learned from Asian Countries</i>	Virtual Zoom, 19 Mei 2022	OJK Institute
		<i>Webinar OJK - Anti Bribery Mangement System: Experience Through Integrity</i>	Virtual Zoom, 16 Juni 2022	OJK Institute
		<i>Workshop FKDKP Untuk Direktur Kepatuhan</i>	Virtual Zoom, 24 – 25 Agustus 2022	FKDKP
		<i>Webinar Batch 3 2022 FKDKP dengan OJK "Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi , Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan</i>	Virtual Zoom, 31 Agustus 2022	FKDKP
		<i>Webinar BUMN "Forum Hukum BUMN" - Building Stronger Foundation for Growth</i>	Virtual Zoom, 31 Agustus – 07 September 2022	KORAN BUMN
		<i>Workshop BUMN dan Anak Perusahaan BUMN: Tata Cara Habus Buku dan Pindah Tangan Asset Tetap BUMN</i>	Onsite (Hotel Saripan Pasific - Jakarta), 2 September 2022	KORAN BUMN
		<i>Workshop IAI "Dampak Pengatribusian Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 Paragraf 70 Terhadap Pencatatan Imbalan Pasca Kerja Setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja"</i>	Virtual Zoom, 24 September 2022	KORAN BUMN
		<i>Workshop BUMN dan Anak Perusahaan BUMN : Bagaimana Dampak Pemberlakuan PP 23/2022 Terhadap Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN</i>	Virtual Zoom, 07 Oktober 2022	KORAN BUMN
		<i>G 20 Integrity & Compliance Task Forc Collective Action In Alleviating Risk</i>	Virtual Zoom, 10 Oktober 2022	KORAN BUMN
<i>Master Class GRC Foundation</i>	Virtual Zoom, 08 Desember 2022	BLMI - KBUMN		

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	<i>Sustainability</i> - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia	Virtual Zoom, 12 Mei 2022	FKDKP
		<i>International Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program For Executive</i>	Onsite (Belanda, Belgia, Paris), 05 – 10 November 2022	MMUGM, IBI
Andi Nirwoto	Direktur IT & Digital	<i>Digital Innovation Program</i>	Onsite (Rotterdam - Belanda), 14 – 16 November 2022	RSM-Erasmus University
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Program <i>Refreshment Online</i> Publik Manajemen Risiko dan Treasury Dealer/ <i>Refreshment Level 5</i>	Virtual Zoom, 11 Januari 2022	Maisa Edukasi
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Mandiri Investment Forum 2022	Virtual Zoom, 09 Februari 2022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		<i>Asia-Pacific Sovereign Ratings: War Inflation and A Pandemic That Is Winding Down</i>	Virtual Zoom, 10 Maret 2022	S&P Global
		BARa Risk Forum: Oprasional Risk : "Are You Ready For The New Trend And Basel III Implementation"	Onsite (Hotel Mulia - Jakarta), 09 Juni 2022	BARa
		<i>The Challenge of Leadership</i> - Erasmus	Onsite (Erasmus Belanda), 22 – 25 November 2022	RSM-Erasmus University
		<i>Master Class GRC Foundation</i>	Virtual Zoom, 08 Desember 2022	BLMI - KBUMN

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Program pengenalan Direksi, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Selama tahun 2022 tidak terdapat Direksi baru, sehingga tidak dilaksanakan program orientasi bagi anggota Direksi baru.

Pelaksanaan Tugas Direksi

Sepanjang tahun 2022, seluruh Anggota Direksi telah melakukan tugas kepengurusan dan pelaporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk:

1. Laporan *Performance Review*
2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank
3. Laporan Pemenuhan Fungsi Kepatuhan

4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
5. Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit

Direksi juga telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kriteria tata kelola perusahaan sesuai POJK.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai kriteria ASEAN *CG Scorecard*.
3. Sosialisasi dan implementasi *Code of Conduct*.
4. Laporan gratifikasi kepada KPK.
5. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan POJK.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite Human Capital

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)
7. Komite Pengarah Transformasi
8. Komite Bisnis

Untuk mengukur efektivitas kinerja komite di bawah Direksi dalam membantu Direksi menjalankan pengurusan Perseroan maka dilakukan penilaian terhadap Komite di bawah Direksi. Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi yaitu pemenuhan pelaksanaan rapat serta kehadiran dalam rapat selama tahun buku. Selama tahun 2022, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Selain dibantu oleh Komite di Bawah Direksi, dalam melaksanakan tugasnya Direksi juga dibantu oleh unit penunjang antara lain Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko dinilai berdasarkan *Key Performance Indicator (KPI)* yaitu Target Utama, Kolaborasi, Inisiatif dan lainnya. Pencapaian KPI tahun 2022 untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, dan Unit Manajemen Risiko mencapai lebih dari 100%. Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu, apabila dengan alasan yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepalutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi.
6. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Mengundurkan diri.
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dalam hal antara anggota Direksi atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris terdapat hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurun garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk pada rangkap jabatan yang dilarang.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Anggaran Dasar. Keputusan penguatan atau pencabutan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan

nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
3. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
7. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur sendiri sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris, serta untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
8. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
10. Dewan Komisaris tidak terlibat langsung dalam keputusan operasional perbankan kecuali hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi bank Umum pasal 31 poin 4.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama merupakan koordinator Dewan Komisaris, dengan tugas sebagai berikut:

1. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
2. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
3. Memberikan saran kepada anggota Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas pengawasan.
4. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, dokumen-dokumen lainnya, persediaan barang-barang, memeriksa kekayaan Perseroan dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor/bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan.
3. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Perseroan di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
6. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Pejabat di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan, baik dalam Rapat Dewan Komisaris maupun di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, tanpa terlebih dahulu harus sepengetahuan Direksi.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, atas usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
8. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Mengajukan calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk diputuskan dalam RUPS.
10. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.
11. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
12. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
13. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perseroan, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan/atau anggota *Ex-Officio* Komite Remunerasi dan Nominasi.
14. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
15. Berhak diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan.
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
4. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
5. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
6. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
7. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
9. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
10. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-Undang yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
12. Melakukan perbuatan mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
 - a. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit baik untuk sebagian maupun keseluruhan.
 - b. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan

dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang diatur tersendiri dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2017. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Landasan Hukum
Bab III	Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan
Bab IV	<p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris</p> <p>A. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris</p> <p>B. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris</p> <p>C. Kriteria tambahan bagi anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen</p> <p>D. Rangkap Jabatan</p> <p>E. Pengangkatan dan Pemberhentian</p> <p>F. Masa Jabatan</p> <p>G. Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>H. Kewajiban</p> <p>I. Hak dan Wewenang</p> <p>J. Mekanisme Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris</p> <p>K. Larangan</p> <p>L. Etika Jabatan</p> <p>M. Waktu Kerja</p> <p>N. Pengaturan Rapat</p> <p>O. Kepemimpinan</p> <p>P. Evaluasi Kinerja</p> <p>Q. Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p> <p>R. Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris</p>
Bab V	Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Bab VI	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
Bab VII	Mekanisme Perubahan
Bab VIII	Penutup

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	Remunerasi dan Nominasi
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Sentot A. Sentausa ¹	Komisaris Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Andin Hadiyanto	Komisaris	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Herry Trisaputra Zuna ²	Komisaris	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi
Himawan Arief Sugoto ³	Komisaris	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi
Eko D. Heripoerwanto ⁴	Komisaris	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi
Heru Budi Hartono ⁵	Komisaris	Remunerasi dan Nominasi

¹ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022

² Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022

³ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022

⁴ Diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022

⁵ Masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Partner	Assegaf Hamzah & Partners Law Firm
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	-	-
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT Cardig Aero Services Tbk
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	-	-
Sentot A. Sentausa ¹	Komisaris Independen	-	-
Andin Hadiyanto	Komisaris	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Plt. Dirut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	Kementerian Keuangan
Herry Trisaputra Zuna ²	Komisaris	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR)
Himawan Arief Sugoto ³	Komisaris	Sekretaris Jenderal Komisaris Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Sekretaris Komite Badan Bank Tanah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Eko D. Heripoerwanto ⁴	Komisaris	Ahli Utama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR)
Heru Budi Hartono ⁵	Komisaris	Kepala Sekretariat Presiden	Kementerian Sekretariat Negara

¹ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022

² Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022

³ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022

⁴ Diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022

⁵ Masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Dewan Komisaris juga dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan dan Etika Jabatan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk:

- Melakukan transaksi atas saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
- Mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
- Memberikan informasi kepada pihak lain.

2. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut, maka anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa harus:

- Mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuntungan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan.
- Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
- Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Benturan Kepentingan lain dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Bank.
- Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

- Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dari Pelanggan atau seseorang pejabat Pemerintah atau Swasta untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya.

Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2022 berjumlah 8 (delapan) orang anggota dengan 5 (lima) orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dari total Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen				
	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	✓	✓	✓	✓	✓

Pernyataan Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK, dengan masing-masing pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Di samping membuat pernyataan independensi, anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya serta memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Secara rinci, surat pernyataan independensi yang dimaksud sebagaimana yang tercantum di bawah ini.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: And Jurnan Luddin
Tempat/tanggal lahir	: Bandung, 23 April 1954
Alamat domisili (foto kopi KTP / SIM terlampir)	: Jl. Raya Padalarang No. 40, Jember, Jawa Timur 50131
Nomor telepon rumah	: 021-47802100
Jabatan	: Komisaris Independen
Nama perusahaan	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan	: 021-47802100

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.
Jakarta, 30 Januari 2020

Mengetahui :  
Nixon L.P. Ningsih
Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Armand Bachtiar Arief
Tempat/tanggal lahir	: Tanjung Pinang, 28 April 1952
Alamat domisili (foto kopi KTP / SIM terlampir)	: Komplek Rongga Indah, Di. Rongga No. 1, Kecamatan Sekeloa Selatan 1, Kota Pekanbaru, Riau 28116
Nomor telepon rumah	: 081-9333884
Jabatan	: Komisaris Independen
Nama perusahaan	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan	: 021-47802100

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.
Jakarta, 30 Januari 2020

Mengetahui :  
Nixon L.P. Ningsih
Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

 
Armand Bachtiar Arief

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Chandra M. Hamzah
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 25 Februari 1967
Alamat domisili (foto kopi KTP / SIM terlampir)	: Jl. Hologrande Selatan No.40 No. 110, Blok 100, Blok Duta, Taman Satrio Selatan 2, Jakarta Selatan 12160
Nomor telepon rumah	: 021-78018801
Jabatan	: Komisaris Independen
Nama perusahaan	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan	: 021-47802100

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.
Jakarta, 5 Februari 2020

Mengetahui :  
Nixon L.P. Ningsih
Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

 
Chandra M. Hamzah

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Iqbal Latario
Tempat dan Tanggal Lahir	: Lj. Pantang, 5 Oktober 1958
Alamat domisili (foto kopi KTP/SIM terlampir)	: Tanjung Blok Raya 3-102 RT 000001 Tanjung Berau, Kecamatan Jakarta Selatan
Nomor telepon rumah	: 021-78018801
Jabatan	: Calon Wakil Komisaris Utama Independen
Nama perusahaan	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan	: 021-47802100

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.
Jakarta, 7 April 2021

Mengetahui :  
And Ninrot
Direktur Operatif, IT and Digital Banking
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

 
Iqbal Latario

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Ratu
Menara Bank BTN
Jl. Hologrande Selatan No. 1 Jakarta Selatan 12160 Indonesia
Telp: 021-47802100
www.bntn.co.id




SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sentot A. Sentausa
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 10 Juni 1957
Alamat domisili (sbb/kepi KTR/SIM terlampir)	: Jl. Bangka 10, Taman No. 100 No. Peta Semarang Dan Kampung, Peta, Kota Jakarta Selatan 12110 Jakarta 12110
Nomor telepon rumah	: -
Jabatan	: Komisaris Independen
Nama perusahaan	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan	: (021) 422 0182

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sejujur benarnya.



CHANDIRA M. HAMZAH
Komisaris Utama/Independen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Jakarta, 13 April 2022



SENTOT A. SENTAUSA

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kantor Pusat
Bukit Duren Kuning
Jl. Sudirman No. 1 - Gedung Pusat PT Bank Tabungan Negara
10110 Jakarta

Telp. (021) 422 0182
Fax (021) 422 0182
www.bntn.co.id

Halaman 1 dari 1

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

- Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.
- Pemanggilan Rapat
 - Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimile atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
 - Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada butir 5 tersebut di atas, harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

11. Pimpinan Rapat Dewan Komisaris
 - a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukkan;
 - b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
12. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 11 yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya sah dalam rapat tersebut.
16. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
17. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
18. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
19. Hasil Rapat
 - a. Hasil Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir 2 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
 - b. Hasil Rapat Gabungan bersama Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;
 - d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan;
 - e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan;
 - f. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat dimaksud.
20. Apabila terdapat hal-hal mendesak dan sangat penting untuk Perseroan, maka:
 - a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
 - b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
21. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media *teleconference*, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam masa Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
23. Materi Rapat

Materi Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Bersama Direksi, didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, karena mendesak dan sangat penting materi rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris telah disepakati bahwa Rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dilaksanakan minimal 1 kali tiap minggu setiap hari Rabu dan sesuai kebutuhan.

Dewan Komisaris juga melakukan Rapat bersama Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris yang secara garis besar membahas agenda sebagai berikut:

- Isu Terkini;
- Reviu/Kajian terhadap laporan/surat masuk dan perkembangan tindak lanjut nasihat/arahan kepada Direksi sebelumnya;
- Paparan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa usulan, pendapat/ rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai reviu/kajian yang telah dilakukan untuk selanjutnya dapat menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris;
- Paparan Komite Audit atas Kajian Temuan Hasil Audit Internal dan/atau Eksternal Bank dan *performance review* kinerja keuangan.

Dewan Komisaris juga melakukan Rapat Bersama Direksi sekurang-kurangnya dengan agenda Paparan Direksi mengenai kinerja perusahaan.

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali rapat. Secara terperinci disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1	05 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Masuk 2 Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 29 Desember 2021 3 Informasi Terkini 4 Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
2	12 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 5 Januari 2022 3. Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Background Branch Transformation</i> b. <i>Timeline Implementasi Branch Transformation</i> c. <i>Struktur Organisasi Terbaru</i> d. <i>Highlight Perubahan Branch Transformation : Next Branch, Sales Effectiveness dan Capability Building</i> 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
3	19 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 12 Januari 2022 3. Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Performance Review Bulan Desember 2021</i> b. <i>Progress Initiative Corporate Plan Tahun 2021</i> c. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance dan Recovery Plan</i> sampai dengan Bulan Desember 2021 d. <i>Monitoring Progress Penyelesaian Sertifikat Kredit</i> e. <i>Penyelesaian Kredit dengan Mekanisme Cessie</i> 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
5	26 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 19 Januari 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
6	28 Januari 2022	Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2021 oleh KAP PSS-EY dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
7	02 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 26 Januari 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
8	03 Februari 2022	Pembahasan <i>Draft</i> Publikasi Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Tahun 2021	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
9	09 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 02 Februari 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
10	11 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 09 Februari 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
11	16 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 09 Februari 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
12	23 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 16 Februari 2022 3. Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Performance Review</i> Bulan Januari 2022; b. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2022; c. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> sampai dengan Januari 2022; d. <i>Progress</i> Persiapan RUPST 2022; e. Laporan Tindak Lanjut Direksi atas Arahan Dewan Komisaris Periode Semester II/2021; f. Profil dan Tata Kelola Perusahaan Afiliasi BTN. 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
13	09 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 23 Februari 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
Herry Trisaputra Zuna*	Hadir			
Himawan A. Sugoto*	Hadir			
14	16 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 9 Maret 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
Herry Trisaputra Zuna*	Hadir			
Himawan A. Sugoto*	Hadir			
15	23 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 16 Maret 2022 3. Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Performance Review</i> Bulan Februari 2022 b. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2022; dan c. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> sampai dengan Bulan Februari 2022 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
Herry Trisaputra Zuna*	Hadir			
Himawan A. Sugoto*	Hadir			

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
16	30 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 23 Maret 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
17	06 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 30 Maret 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
19	13 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 6 April 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
20	20 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 13 April 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
21	27 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 20 April 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
22	11 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 27 April 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
23	18 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 11 Mei 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
24	25 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 18 Mei 2022 3. Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> a. Performance Review Bulan April 2022 b. Progress Initiative Corporate Plan Tahun 2022 c. Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan sampai dengan Bulan April 2022 4. Informasi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Alih Daya (TAD) b. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Bank BTN Triwulan I Tahun 2022 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
26	02 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 25 Mei 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
27	08 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 2 Juni 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
28	15 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 8 Juni 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
29	16 Juni 2022	<p>Pembahasan Struktur dan Skema Penjualan Aset Bermasalah disertai dengan Pembelian Sukuk</p>	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
30	22 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 15 Juni 2022 3. Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Performance Review</i> Bulan Mei 2022 b. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2022 c. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance</i>, dan <i>Recovery Plan</i> sampai dengan Bulan Mei 2022 4. Informasi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggapan atas Permohonan Dukungan dan Persetujuan Dewan Komisaris terhadap Struktur dan Skema Penjualan Aset Bermasalah disertai dengan Penjualan Sukuk; b. Tanggapan atas Penyampaian Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Mei 2022; dan c. Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Posisi Juni 2022 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
31	29 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 22 Juni 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Draft</i> Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Periode 2022-2024 dan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022; b. <i>Draft</i> Tanggapan atas Penyampaian Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Mei 2022. 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
32	06 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 29 Juni 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain : <i>Draft</i> Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Corporate Secretary Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
33	13 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 6 Juli 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain : <i>Draft Self Assessment</i> Tata Kelola Periode Januari - Juni 202 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
34	20 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 13 Juli 2022 3. Informasi Terkini : Pembahasan terhadap Pengelolaan 4. ATM dan Mesin EDC Bank BTN Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
35	27 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 20 Juli 2022 3. Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Performance Review</i> Juni 2022; b. Pembahasan Rencana Pemisahan Unit Usaha Syariah BTN; c. <i>Monitoring Progress</i> Penyelesaian Sertifikat Kredit sampai dengan Juni 2022; d. <i>Monitoring</i> Penerapan Program APU PPT sampai dengan Juni 2022; 4. Informasi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep Surat - Penyampaian Arahan terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); b. Konsep Surat - Penyampaian Usulan Revisi Key <i>Performance Indicator</i> (KPI) Tahun 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.; c. Telaah Rencana Aktivitas Baru Agen Efek Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Futura 28; dan d. Pembahasan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun 2022. 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
37	03 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 27 Juli 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
Himawan A. Sugoto*	Hadir			

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
38	10 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 3 Agustus 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
Himawan A. Sugoto*	Hadir			
39	18 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 10 Agustus 2022 Informasi Terkini : Konsep Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan Kementerian BUMN untuk Periode sampai dengan Semester I atau Triwulan II Tahun 2022 Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
Himawan A. Sugoto*	Hadir			
40	24 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 18 Agustus 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
Himawan A. Sugoto*	Hadir			
41	31 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 24 Agustus 2022 Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit Laporan keuangan dan TJSI Tahun Buku 2023; Performance Review Bulan Juli 2022; Progress Initiative Corporate Plan Tahun 2022; dan Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan sampai dengan Bulan Juli 2022 Informasi Lain: <ol style="list-style-type: none"> Konsep Surat Persetujuan atas ketetapan Direksi Tentang Kebijakan Umum Perkreditan atau Pembiayaan Bank; Konsep Surat Tanggapan atas Penyampaian Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Juli 2022 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
Himawan A. Sugoto*	Hadir			
42	07 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 31 Agustus 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
Himawan A. Sugoto*	Hadir			

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
43	14 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 7 September 2022 Informasi Terkini Informasi Lain: Konsep Surat Perihal Hasil telaah Komite Audit atas <i>Draft</i> Laporan keuangan Publikasi PT Bank tabungan Negara (Persero) Tbk Posisi 30 Juni 2022 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Tidak Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
44	21 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 14 September 2022 Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> <i>Performance Review</i> Bulan Agustus 2022; <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2022; dan <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance</i>, dan <i>Recovery Plan</i> sampai dengan Bulan Agustus 2022 Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
46	28 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 14 September 2022 Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> <i>Performance Review</i> Bulan Agustus 2022; <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2022; dan <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance</i>, dan <i>Recovery Plan</i> sampai dengan Bulan Agustus 2022 Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir
47	05 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 28 September 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir
			Himawan A. Sugoto	Hadir
48	12 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 5 Oktober 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir
			Himawan A. Sugoto	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
49	19 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 12 Oktober 2022 3. Informasi Terkini : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Performance Review</i> Konvensional dan UUS September 2022; b. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2022; c. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance</i>, dan <i>Recovery Plan</i> sampai dengan Bulan September 2022 d. <i>Monitoring Progress</i> Penyelesaian Sertifikat sampai dengan September 2022 e. Pembahasan KPI Direksi Kolegial dan Individual sampai dengan Triwulan II 2022 f. <i>Update Progress</i> Penyusunan Kebijakan Umum Perusahaan 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir
Himawan A. Sugoto	Hadir			
50	26 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 19 Oktober 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Tidak Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir
Himawan A. Sugoto	Hadir			
51	02 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 26 Oktober 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir
Himawan A. Sugoto	Hadir			
52	09 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 2 November 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep Surat Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan Triwulan III Tahun 2022 b. Konsep Surat Persetujuan Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Tahun 2023; c. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Sdr. Alex Sofjan Noor sebagai SEVP <i>Operation</i> dengan Status Kepegawaian <i>Professional Hire</i>; dan d. Pembahasan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Individual Direksi (<i>Non Financial</i>) 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir
Himawan A. Sugoto	Hadir			
53	16 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk 2. Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 9 November 2022 3. Informasi Terkini 4. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir
Himawan A. Sugoto	Hadir			

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran			
54	22 November 2022	Pembahasan Temuan <i>Management Letter</i> KAP PSS EY periode 30 Juni 2022 dan Tindak Lanjut Temuan <i>Management Letter</i> KAP PSS EY Periode 31 Desember 2022	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir			
			Iqbal Latanro	Hadir			
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir			
			Armand B. Arief	Hadir			
			Andin Hadiyanto	Hadir			
			Sentot A. Sentausa	Hadir			
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir			
			Himawan A. Sugoto	Hadir			
55	23 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat masuk Evaluasi Hasil Rapat tanggal 16 November 2022 Informasi Terkini: <ol style="list-style-type: none"> <i>Performance Review</i> sampai dengan bulan Oktober 2022 <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2022 <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> sampai dengan Oktober 2022 Penyampaian <i>Resolution Plan</i> kepada Kementerian BUMN <i>Progress Pelaksanaan Penambahan Modal (Right Issue)</i> <i>Progress Penyusunan Kebijakan Umum</i> Informasi Lain: <ol style="list-style-type: none"> Hasil Reviu terhadap Keputusan Menteri tentang Pedoman Tata Kelola Risiko Berkelanjutan BUMN Konsep Surat Dewan Komisaris - Persetujuan Dokumen Penginian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2023 Konsep Surat Dewan Komisaris - Penyampaian Arahan terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti penyuapan (SMAP) Konsep Surat Dewan Komisaris - Tanggapan atas Penyampaian Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Oktober 2022 Konsep Surat Dewan Komisaris - Persetujuan Dokumen <i>Resolution Plan</i> Tahun 2022 Penetapan Anggaran Tantiem tahun 2023 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir			
			Iqbal Latanro	Hadir			
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir			
			Armand B. Arief	Hadir			
			Andin Hadiyanto	Hadir			
			Sentot A. Sentausa	Hadir			
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir			
			Himawan A. Sugoto	Hadir			
			57	30 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Rapat tanggal 23 November 2022 Informasi Terkini Informasi Lain: <ol style="list-style-type: none"> Pembahasan RKAP Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 Konsep Tanggapan dan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 Konsep Surat Dewan Komisaris - Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2022 	Chandra M. Hamzah	Hadir
						Iqbal Latanro	Hadir
						Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
						Armand B. Arief	Hadir
						Andin Hadiyanto	Hadir
						Sentot A. Sentausa	Hadir
						Herry Trisaputra Zuna	Hadir
						Himawan A. Sugoto	Hadir
58	07 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Rapat tanggal 30 November 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir			
			Iqbal Latanro	Hadir			
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir			
			Armand B. Arief	Hadir			
			Andin Hadiyanto	Hadir			
			Sentot A. Sentausa	Hadir			
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir			
			Himawan A. Sugoto	Hadir			

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
59	21 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Rapat tanggal 7 Desember 2022 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir
			Himawan A. Sugoto	Hadir

*) sebagai pengamat (*observer*)

Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Rencana Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Berdasarkan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris telah disepakati bahwa Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Adapun agenda yang dibahas sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Performance Review* (termasuk pembahasan tentang APU PPT);
- Pelaksanaan GCG dan Tindak Lanjut temuan Audit Internal maupun Eksternal untuk tahun 2022.

Selama tahun 2022, disepakati bahwa rapat bersama dijadwalkan pada hari Rabu di minggu ketiga tiap bulannya. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi pada bulan gasal yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris pada bulan genap yang diinisiasi oleh Direksi. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar.

Realisasi Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali. Secara terperinci, berikut tabel Rapat Bersama Dewan Komisaris Dengan Direksi

Tabel Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
1	19 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <i>Performance Review</i> Bulan Desember 2021 <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2021 <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance dan Recovery Plan</i> sampai dengan Bulan Desember 2021 <i>Monitoring Progress</i> Penyelesaian Sertifikat Kredit Penyelesaian Kredit dengan Mekanisme <i>Cessie</i> 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon LP Napitupulu	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
					Andi Nirwoto	Tidak Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
2	23 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Performance Review</i> Bulan Februari 2022 2. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2022 3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> sampai dengan Bulan Februari 2022 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon LP Napitupulu	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir	Jasmin	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir	Setiyo Wibowo	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
3	25 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Performance Review</i> Bulan April 2022 2. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2022 3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> sampai dengan Bulan April 2022 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon LP Napitupulu	Tidak Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir	Jasmin	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir	Setiyo Wibowo	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
4	27 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Performance Review</i> Juni 2022; 2. Pembahasan Rencana Pemisahan Unit Usaha Syariah BTN; 3. <i>Monitoring Progress</i> Penyelesaian Sertifikat Kredit sampai dengan Juni 2022; 4. <i>Monitoring</i> Penerapan Program APU PPT sampai dengan Juni 2022; 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon LP Napitupulu	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Sentot A. Sentausa*	Hadir	Jasmin	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir	Setiyo Wibowo	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
5	21 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Performance Review</i> Agustus 2022; 2. <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2022; 3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> sampai dengan Bulan Agustus 2022 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon LP Napitupulu	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Jasmin	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna*	Hadir	Setiyo Wibowo	Hadir
			Himawan A. Sugoto*	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
6	23 November 2022	1. <i>Performance Review</i> sampai dengan bulan Oktober 2022 2. <i>Progress Initiative Corporate Plan Tahun 2022</i> 3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan</i> sampai dengan Oktober 2022 4. <i>Penyampaian Resolution Plan</i> kepada Kementerian BUMN 5. <i>Progres Pelaksanaan Penambahan Modal (Right Issue)</i> 6. <i>Progres Penyusunan Kebijakan Umum</i>	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon LP Napitupulu	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Hirwandi Gafar	Tidak Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Sentot A. Sentaosa	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Jasmin	Hadir
			Himawan A. Sugoto	Hadir	Setiyo Wibowo	Tidak Hadir
					Andi Nirwoto	Tidak Hadir

*) sebagai pengamat (observer)

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	53	42	79,2%	6	6	100%	2	2	100%
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	53	52	98,1%	6	6	100%	2	2	100%
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	53	52	98,1%	6	6	100%	2	2	100%
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	53	53	100%	6	6	100%	2	2	100%
Sentot A. Sentaosa ¹	Komisaris Independen	20	20	100%	2	2	100%	1	1	100%
Andin Hadiyanto	Komisaris	53	53	100%	6	6	100%	2	2	100%
Herry Trisaputra Zuna ²	Komisaris	11	11	100%	1	1	100%	1	1	100%
Himawan Arief Sugoto ³	Komisaris	12	12	100%	1	1	100%	1	1	100%
Eko D. Heripoerwanto ⁴	Komisaris	11	11	100%	1	1	100%	1	1	100%
Heru Budi Hartono ⁵	Komisaris	43	43	100%	5	5	100%	2	2	100%
Rata-rata Tingkat Kehadiran		98,2%			100%			100%		

¹) Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022

²) Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022

³) Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022

⁴) Diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022

⁵) Masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan terkait pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Program pendalaman pengetahuan bagi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Program pendalaman pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pendalaman pengetahuan seperti seminar, dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada anggota lainnya dalam berbagi informasi dan pengetahuan.
3. Materi yang diterima dari program pendalaman pengetahuan harus didokumentasikan dengan baik dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi pada Sekretaris Dewan Komisaris. Materi tersebut harus tersedia jika suatu saat diperlukan.

Sepanjang tahun 2022, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, lokakarya, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	<i>Sustainability</i> - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia	12 Mei 2022, <i>Daring</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		<i>Trend</i> dan Inovasi Perbankan Digital	16 Juni 2022, <i>Daring</i>	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
		<i>Workshop Vision and Roadmap for Services at BTN</i>	4 Agustus 2022, Four Seasons Hotel – Jakarta	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	<i>National Conference</i> IKAI 2022	26 Januari 2022, <i>Daring</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		<i>Sustainability</i> - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia	12 Mei 2022, <i>Daring</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		<i>Workshop Vision and Roadmap for Services at BTN</i>	4 Agustus 2022, Four Seasons Hotel – Jakarta	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
		<i>GRC Masterclass</i> - Memperkuat Peran Komite Audit, Komite Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi	17 November 2022, <i>Daring</i>	Kementerian BUMN
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	<i>National Conference</i> IKAI 2022	26 Januari 2022, <i>Daring</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		<i>Sustainability</i> - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia	12 Mei 2022, <i>Daring</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		<i>Workshop Vision and Roadmap for Services at BTN</i>	4 Agustus 2022, Four Seasons Hotel – Jakarta	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
		<i>GRC Masterclass</i> - Memperkuat Peran Komite Audit, Komite Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi	17 November 2022, <i>Daring</i>	Kementerian BUMN
		<i>GRC Masterclass</i> - Peran Organ Pengelola Risiko dalam Risk Management	8 Desember 2022, <i>Daring</i>	Kementerian BUMN
Aldi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	<i>National Conference</i> IKAI 2022	26 Januari 2022, <i>Daring</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		<i>Sustainability</i> - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia	12 Mei 2022, <i>Daring</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		<i>Workshop Vision and Roadmap for Services at BTN</i>	4 Agustus 2022, Four Seasons Hotel – Jakarta	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
		<i>GRC Masterclass</i> - Memperkuat Peran Komite Audit, Komite Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi	17 November 2022, <i>Daring</i>	Kementerian BUMN
Sentot A. Sentausa ¹	Komisaris Independen	<i>Sustainability</i> - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia	12 Mei 2022, <i>Daring</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		<i>Workshop Vision and Roadmap for Services at BTN</i>	4 Agustus 2022, Four Seasons Hotel – Jakarta	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
		<i>Operation Risk - Are You Ready For The New Trend and Basel III Implementation</i>	9 Juni 2022, Hotel Mulia – Jakarta	Bankers Association for Risk Management (BARa)
		<i>GRC Masterclass</i> - Memperkuat Peran Komite Audit, Komite Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi	17 November 2022, <i>Daring</i>	Kementerian BUMN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Andin Hadiyanto	Komisaris	<i>G20 High Level Seminar: Strengthening Global Health Architecture</i>	17 Februari 2022, Plenary Hall JCC - Jakarta	Kementerian Keuangan
		<i>G20 International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth</i>	11 Mei 2022, Daring	Kementerian Keuangan
		<i>Sustainability - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia</i>	12 Mei 2022, Daring	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
Herry Trisaputra Zuna ²	Komisaris	<i>Sustainability - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia</i>	12 Mei 2022, Daring	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris	9 Juni 2022, Daring	Ikatan Bankir Indonesia - Banking Competency Center (IBI - BCC)
		<i>GRC Masterclass - Memperkuat Peran Komite Audit, Komite Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi</i>	17 November 2022, Daring	Kementerian BUMN
		<i>GRC Masterclass - Peran Organ Pengelola Risiko dalam Risk Management</i>	8 Desember 2022, Daring	Kementerian BUMN
Himawan Arief Sugoto ³	Komisaris	Profesional Tata Kelola Berkualifikasi (<i>Qualified Risk Governance Professional</i>)	14 Maret 2022, Daring	Way Academy dan LPK MKS
		<i>Sustainability - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia</i>	12 Mei 2022, Daring	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris	9 Juni 2022, Daring	Ikatan Bankir Indonesia - Banking Competency Center (IBI - BCC)
		<i>GRC Masterclass - Memperkuat Peran Komite Audit, Komite Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi</i>	17 November 2022, Daring	Kementerian BUMN
		<i>GRC Masterclass - Peran Organ Pengelola Risiko dalam Risk Management</i>	8 Desember 2022, Daring	Kementerian BUMN
Eko D. Heripoerwanto ⁴	Komisaris	National Conference IKAI 2022	26 Januari 2022, Daring	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
Heru Budi Hartono ⁵	Komisaris	Digital Workshop with Meta Indonesia: " <i>Social Media Campaign for G20</i> "	16 Februari 2022, Daring	Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara
		Webinar " <i>Setpres Employee Branding with Good Attitude, Best Performance and Great Innovation</i> "	25 April 2022, Daring	Biro Administrasi, Sekretariat Presiden dan John Robert Powers
		Sosialisasi Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	14 April 2022, Daring	Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Sekretariat Negara
		Webinar <i>Financial Planning "How To Plan Your Good Money Habit"</i>	7 April 2022, Daring	Biro Administrasi, Sekretariat Presiden dan Prita Ghozie ZAP Finance
		<i>Sustainability - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia</i>	12 Mei 2022, Daring	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		<i>Workshop Vision and Roadmap for Services at BTN</i>	4 Agustus 2022, Four Seasons Hotel – Jakarta	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

¹⁾ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022

²⁾ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022

³⁾ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022

⁴⁾ Diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022

⁵⁾ Masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Ketentuan terkait program pengenalan Dewan Komisaris telah diatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Pada tahun 2022 telah diangkat Dewan Komisaris baru dalam RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022 yaitu Sdr. Sentot A. Sentausa sebagai Komisaris Independen, Sdr. Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris, dan Sdr. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris. Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru dilaksanakan pada tanggal 18-19 April 2022.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memberikan nasihat, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kepengurusan Perseroan termasuk kebijakan strategis Bank antara lain:

1. *Corporate Plan* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2021-2025;
2. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022-2024 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022;
3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester II tahun 2021 dan Semester I tahun 2022;
4. Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2023;
5. Rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
6. *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi;
7. Pengembangan Organisasi dan Kepegawaian;
8. Materi RUPS Tahunan (sesuai arahan/masukan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, peraturan dan arahan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan);
 - a. Laporan Tahunan 2021;
 - b. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun 2021;

- c. Rekomendasi KAP sebagai auditor laporan keuangan tahun 2022;
 - d. Penetapan remunerasi tahun 2022 dan tantiem tahun 2021;
 - e. Persetujuan Penginian *Recovery Plan*;
 - f. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN; dan
 - g. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan
9. Materi RUPS Luar Biasa (sesuai arahan/masukan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, peraturan dan arahan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan);
 10. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
 11. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2023-2025 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023;
 12. Persetujuan Dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Tahun 2022;
 13. Persetujuan Dokumen Penginian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Tahun 2023;
 14. Persetujuan Penetapan Jumlah Lembar saham dan Harga Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 15. Persetujuan *Ranking* I Peserta Tender/Seleksi Umum Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 16. Persetujuan dan Rekomendasi lainnya, antara lain menyangkut:
 - a. Kebijakan Profil Risiko, *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank Tahun 2023;
 - b. Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT);
 - c. Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2022;
 - d. *Annual Audit Plan* (Rencana Audit Tahunan, termasuk anggarannya);
 - e. Kebijakan Umum Perkreditan atau Pembiayaan Bank;
 - f. Kebijakan Umum *Treasury, Funding, and Product Delivery*;
 - g. Kebijakan Umum *Human Capital*;
 - h. Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Anak dan Unit Usaha Syariah;
 - i. Kebijakan Umum TI, Manajemen Data, dan Digital;
 - j. Kebijakan Umum Hukum, Kepatuhan, APU-PPT, dan Tata Kelola Perusahaan;
 - k. Kebijakan Umum Manajemen Risiko;
 - l. Kebijakan Umum Operasional dan Fungsi Pendukung;
 - m. Kebijakan terkait Struktur dan Skema Penjualan Aset Bermasalah Disertai Dengan Pembelian Suku;
 - n. Pelaksanaan Restrukturisasi, Penyelamatan, dan Hapus Buku Kredit;
 - o. *Internal Audit Charter*;
 - p. Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada Pihak Terkait;
 - q. Tanggapan terhadap Pengangkatan SEVP *Operations*;

- r. Publikasi Laporan Keuangan;
 - s. Penyelesaian Sertifikat Jaminan Kredit dan Posisi LAT dan DAT;
 - t. Produk dan Aktivitas Baru (PAB) serta pelaporannya (setelah mendapat persetujuan OJK);
 - u. Laporan Kepatuhan;
 - v. Skema dan Struktur Penjualan Aset Kredit Bermasalah disertai dengan Pembelian Sukuk;
 - w. Tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal;
 - x. Penetapan pemenang pengadaan jasa KAP;
 - y. Evaluasi atas Kinerja Jasa Penunjang (Kantor Akuntan Publik);
 - z. Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Corporate Secretary Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - aa. Tanggapan atas Usulan Kandidat *Senior Executive Vice President (SEVP) Operations*; dan
 - ab. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Perpanjangan dan Perubahan Status Kepegawaian *Senior Executive Vice President (SEVP) Operations*.
17. Dewan Komisaris bersama Komite Audit secara berkala melakukan:
- a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - b. Menilai dan melakukan *monitoring* pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) maupun auditor eksternal;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal kepada manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
 - e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan tugas-tugas Dewan Komisaris;
 - f. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
 - h. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal;
 - i. Memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun secara benar dan sesuai dengan Standar Akuntansi dan ketentuan yang berlaku dengan

mengusulkan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham serta melakukan evaluasi terhadap AP dan/atau KAP atas jasa audit yang dilakukan.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memiliki kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, sedangkan Direksi juga memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.

Penilaian Kinerja Direksi

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur penilaian kinerja Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN. Direksi menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegal kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Direksi wajib menjabarkan KPI Direksi secara kolegal menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Pencapaian KPI Direksi secara kolegal dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan. Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan secara individual direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Perseroan.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria penilaian kinerja Direksi paling sedikit meliputi prosedur pelaksanaan penilaian kinerja dan kriteria yang digunakan, terdiri dari aspek finansial dan non finansial baik secara kolegal atau pun individual. Pedoman penyusunan Penilaian Kinerja Direksi BUMN sub klaster Perbankan tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-8/MBU/08/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020-2024, dengan inisiatif strategis yang dicanangkan dikategorikan ke dalam 5 (lima) prioritas/perspektif Kementerian BUMN sebagai berikut:

1. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia;
2. Inovasi model bisnis;
3. Kepemimpinan teknologi;
4. Peningkatan investasi; dan
5. Pengembangan talenta.

Adapun rincian KPI Bersama dan KPI Individual Direksi adalah sebagai berikut:

Kategori	No.	KPI 2022	Direktorat								
			C	DF	AM	ITD	F	RM	HCCL	SEVP WB	SEVP Ops
Nilai Ekonomi Sosial - Finansial	1.	PPOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.	PPOP Growth	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.	Relative Stock Performance Againsts Peers					✓				
	4.	Market Cap					✓				
	5.	ROE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6.	LaR	✓		✓			✓	✓	✓	
	7.	CAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nilai Ekonomi Sosial - Operasional	8.	CKPN to LAR	✓		✓		✓	✓		✓	
	9.	Cost of Credit	✓		✓			✓		✓	
	10.	BOPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nilai Ekonomi Sosial - Sosial	11.	Realisasi Penyaluran KUR	✓								
	12.	Realisasi Penyaluran KPR Subsidi (Rp M)	✓								
	13.	Realisasi Penyaluran KPR Subsidi (Unit)	✓								
	14.	Recovery Rate Subro			✓						
Inovasi Model Bisnis	15.	Average Balance Dana Murah	✓	✓						✓	
	16.	CASA Ratio		✓		✓				✓	
	17.	Pertumbuhan jumlah unit rumah yang didanai melalui KPR program Rumah Milenial	✓					✓			
	18.	Penyelesaian Proyek Pembangunan Digital Ecosystem				✓		✓			
Kepemimpinan Teknologi	19.	Kepemimpinan integrasi ATM (Project Jalin) dan EDC Payment				✓					✓
	20.	IT Maturity Level				✓					
	21.	Cyber Security Breach (Zero Incident)				✓					
Peningkatan Investasi	22.	Rating Environment, Social, Government	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	23.	Risk Management Maturity Index						✓			
	24.	Pertumbuhan jumlah nasabah retail BTN Property				✓					
Pengembangan Talenta	25.	Implementasi Cluster Talent Committee							✓		
	26.	% perempuan dalam nominated talent pada level C-1 dan C-2							✓		
	27.	% milenial (<40 tahun) dalam top talent pada level C-1 dan C-2							✓		
			14	8	10	12	9	12	10	11	7

Keterangan:

C : Direktur Consumer

ITD : Direktur IT & Digital

HCCL : Direktur Human Capital, Compliance & Legal

DDF : Direktur Distribution & Funding

F : Direktur Finance

SEVP WB : SEVP Wholesale Banking

AM : Direktur Assets Management

RM : Direktur Risk Management

SEVP Ops : SEVP Operations

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Kinerja Direksi secara kolegal dan individual dilakukan dengan penilaian sendiri (*self assessment*), kemudian dilakukan reuiu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Perseroan. Selanjutnya hasil penilaian kinerja Direksi tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

No	Indikator	Bobot	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian	Nilai Akhir
Ekspansi yang Profitable							
1.	a. PPOP	5.00%	Rp. Miliar	6,762	7,974	110.00%	5.50%
	b. PPOP Growth (vs Realisasi 2021)	3.00%	%	1.46%	19.64%	110.00%	3.30%
Menciptakan Economic Value Add							
2.	a. <i>Relative Stock Performance Againsts Peers</i>	3.00%	%	104.00%	79.80%	76.73%	2.30%
	b. <i>Market Capitalization</i>	3.00%	Rp. Miliar	18,736	18,946	101.12%	3.03%
	c. ROE	3.00%	%	13.46%	16.42%	110.00%	3.30%
3.	CAR	4.00%	%	19.71%	20.17%	102.34%	4.09%
4.	a. LAR	4.00%	%	24.59%	23.24%	105.49%	4.22%
	b. CKPN to LaR (LaR Coverage)	5.00%	%	20.04%	22.61%	110.00%	5.50%
	c. <i>Cost of Credit (CoC)</i>	5.00%	%	1.17%	1.42%	78.65%	3.93%
	d. BOPO	3.00%	%	87.47%	86.00%	101.68%	3.05%
5.	a. Realisasi Penyaluran KUR	3.00%	Rp. Miliar	500	602	110.00%	3.30%
	b. Realisasi Penyaluran KPR Subsidi	3.00%	Rp. Miliar	24,069	24,332	101.10%	3.03%
	c. Realisasi Penyaluran KPR Subsidi	3.00%	Unit	169,315	167,224	98.77%	2.96%
	d. <i>Recovery Rate Subrogation</i>	3.00%	%	12.00%	16.79%	110.00%	3.30%
Peningkatan Daya Saing dalam Hal Perolehan Dana Murah							
6.	a. <i>Average Balance Dana Murah</i>	4.00%	Rp. Miliar	136,240	133,868	98.26%	3.93%
	b. <i>CASA Ratio</i>	4.00%	%	46.90%	48.52%	103.45%	4.14%
Pertumbuhan Jumlah Unit Rumah yang di Danai Melalui KPR Program Rumah Millennial (BTN)							
7.	a. Jumlah unit rumah yang didanai melalui KPR Program Rumah Millennial	5.00%	Jumlah	21,000	28,579	110.00%	5.50%
	b. Penyelesaian proyek pengembangan ekosistem Digital Mortgage (BTN)						
	1) Membangun platform pembelian instant (<i>instant purchase</i>) properti sebagai bagian dari BTN Properti	1.67%	%	100.00%	100.00%	100.00%	1.67%
	2) <i>Enhance</i> BTN Properti Channel	1.67%	%	100.00%	100.00%	100.00%	1.67%
	3) Membuat <i>one-stop-shop</i> ekosistem perumahan	1.67%	%	100.00%	100.00%	100.00%	1.67%
8.	Implementasi integrasi ATM (<i>Project Jalin</i>) dan EDC Payment	5.00%	%	100.00%	111.74%	110.00%	5.50%
9.	<i>IT Maturity Level</i>	3.00%	Indeks	3.00	3.27	109.00%	3.27%
10.	<i>Cyber Security Breach (Zero incident)</i>	3.00%	Jumlah	0	0	100.00%	3.00%
11.	<i>Rating Environment, Social, Government (ESG)</i>	4.00%	Rating	B	C	95.00%	3.80%
12.	<i>Risk Management Maturity Index</i>	3.00%	Indeks	3.00	3.23	107.67%	3.23%
13.	Pertumbuhan jumlah nasabah retail yang menggunakan fasilitas BTN Properti dan <i>Smart Residence</i>	4.00%	Jumlah	83,751	130,916	110.00%	4.40%
14.	Implementasi/penyusunan kebijakan terkait <i>Talent Development & Career Path System</i> di lingkup Holding/ Klaster	4.00%	%	50.00%	100.00%	110.00%	4.40%
Pengembangan Talenta Milenial dan Perempuan							
15.	a. Milenial (<= 42 tahun) dalam <i>nominated talent</i>	3.00%	%	18.00%	22.63%	110.00%	3.30%
	b. Perempuan dalam <i>nominated talent</i> 3.00%	3.00%	%	16.00%	18.72%	110.00%	3.30%
Total							103.60%

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disusun oleh Dewan Komisaris.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria penilaian kinerja yang digunakan adalah sesuai pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham pada khususnya, serta pemangku kepentingan pada umumnya. Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat;
2. Aspek Pelaporan;
3. Aspek Kinerja Perseroan;
4. Aspek Dinamis; dan
5. Aspek lainnya sesuai kebutuhan.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme penilaian sendiri (*self assessment*) dan dilaporkan secara berkala kepada pemegang saham.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Hasil pencapaian kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2022 terhadap target *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditentukan pada program kerja disampaikan sebagai berikut:

No	Program Kerja	Bobot (%)	Tahun 2022			
			Realisasi	Target KPI	Penc. (%)	Nilai
			a	b	c	d=b/c
I	Aspek Perencanaan, Pengawasan dan Pengarahan/ Penasihatatan	65				92,22
1	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RBB dan RKAP Tahunan Bank	10	12	6	200%	20,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Tanggapan terhadap Pelaksanaan Budaya Kerja dan Tata Kelola (GCG) Pengurusan Bank.	15	12	12	100%	15,00
3	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit Internal/Eksternal Bank.	5	12	12	100%	5,00
4	Memberi Persetujuan, Penasihatatan, dan Konsultasi kepada Direksi	10	25	12	208%	20,83
5	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi.	10	59	36	164%	16,39
6	Analisis Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan (Sesuai Format KBUMN)	10	12	12	100%	10,00
7	Pemetaan <i>Talent Pool</i> (<i>track record</i>) BOD-1 (berdasarkan integritas dan <i>performance</i>)	5	1	1	100%	5,00
II	Aspek Pelaporan	15				15,00
8	Menyampaikan Laporan Program Kerja Tahunan dan RBB Bank kepada RUPS	5	1	1	100%	5,00
9	Menyampaikan Laporan/Pendapat Tentang Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham Pengendali – Kementerian BUMN dan OJK.	10	4	4	100%	10,00
III	Aspek Kinerja Perusahaan	15				20,00
10	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja serta Tingkat Kesehatan Bank, mencakup: Profil Risiko, Tata Kelola (GCG), Rentabilitas, dan Permodalan Bank.	10	9	6	150%	15,00
11	Monitoring dan Evaluasi Strategi Pengembangan <i>Talent</i> serta Kultur Perusahaan yang <i>High Performing</i> .	5	6	6	100%	5,00

No	Program Kerja	Bobot (%)	Tahun 2022			
			Realisasi	Target KPI	Penc. (%)	Nilai
		a	b	c	d=b/c	e=dxa
IV	Aspek Dinamis/Lain-Lain	5				7,50
12	Peningkatan Kompetensi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pengawasan.	5	3	2	150%	7,50
JUMLAH		100				134,72

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Kriteria penilaian Komite di bawah yaitu *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris dengan metode penilaian sendiri (*self assessment*) dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Audit

No	Key Performance Indicators	Bobot (%)	Realisasi	Target	Pencapaian	Nilai (%)
		a	b	c	d=b/c	e=dxa
I	Reguler	75				80,00
1	Memberikan rekomendasi Persetujuan atas <i>Annual Audit Plan</i> kepada Dewan Komisaris	10	1	1	100%	10,00
2	Pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan tugas dan tindak lanjut Audit Internal	10	12	12	100%	10,00
3	Menghadiri <i>Exit Meeting</i> Audit Umum Internal	5	4	4	100%	5,00
4	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Eksternal (OJK, BI, BPK, KAP, dll) termasuk tindak lanjut hasil audit, termasuk terhadap pengendalian internal	5	4	4	100%	5,00
5	Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan	5	4	4	100%	5,00
6	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris	5	2	1	200%	10,00
7	Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh KAP atas Informasi Keuangan untuk Tahun Buku	5	1	1	100%	5,00
8	Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi <i>Performance Review</i> bulanan	5	12	12	100%	5,00
9	Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris	5	4	4	100%	5,00
10	Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN	5	4	4	100%	5,00
11	Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK	5	2	2	100%	5,00
12	Menyusun Kertas Kerja <i>Self Assessment</i> GCG semesteran terkait dengan Komite Audit	5	2	2	100%	5,00
13	Menyusun Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) terkait dengan Komite Audit	5	1	1	100%	5,00

No	Key Performance Indicators	Bobot (%)	Realisasi	Target	Pencapaian	Nilai (%)
		a	b	c	d=b/c	e=d×a
II	Nonreguler	10				15,00
14	Evaluasi Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal	5	1	1	100%	5,00
15	Pengembangan Kompetensi yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab	5	2	1	200%	10,00
IV	Lain-Lain	15				25,00
16	Rapat Komite Audit	10	41	6	200%	20,00
17	Rapat Koordinasi Anggota Komite Dewan Komisaris	5	7	4	175%	8,75
JUMLAH		100				123,75

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Productivity	Bobot (%)	Realisasi	Target	Pencapaian	Nilai (%)
		a	b	c	d=b/c	e=d×a
I	Reguler	55				57.50
1	Penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023	5	1	1	100%	5.00
2	Validasi atas Usulan <i>Selected Talent BOD-1</i> Bank BTN	5	1	2	50%	2.50
3	Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota BOC dan BOD untuk <i>Fit & Proper Test</i> terkait dengan pelaksanaan RUPS Tahunan atau Luar Biasa	5	2	2	100%	5.00
4	Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	5	1	1	100%	5.00
5	Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	5	1	1	100%	5.00
6	Penelaahan KPI Kolegial dan Individual BOD	5	2	1	200%	10.00
7	Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas	5	1	1	100%	5.00
8	Penetapan Besaran Tantiem dan Bonus serta Insentif lain yang terkait untuk BOD dan BOC	5	2	1	200%	10.00
9	Merancang Program Kerja Dewan Komisaris	5	1	1	100%	5.00
10	Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank (<i>Self Assessment GCG</i>)	5	1	1	100%	5.00
11	Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi	5	4	4	100%	5.00
II	Non Reguler	20				15.00
12	Evaluasi Kebijakan/SOP <i>Human Capital, Strategy, dan Learning</i>	5	1	1	100%	5.00
13	Evaluasi Kebijakan/Implementasi SOP Tengah Alih Daya	5	1	1	100%	5.00
14	Penetapan <i>Corporate Secretary Divison Head</i> dan <i>Internal Audit Divison Head</i>	5	1	1	100%	5.00
15	Penetapan SEVP untuk beberapa posisi sesuai struktur Organisasi terbaru	5	2	2	100%	5.00
III	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite	10				13.33
14	Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia	10	8	6	133%	13.33
IV	Tugas Khusus dan Lain - Lain	15				20.00
15	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	10	14	6	200%	20.00
16	Tugas lain dari Ketua Komite/Dewan Komisaris	5	2	1	200%	10.00
JUMLAH		100				105.83

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Pemantau Risiko

No	Key Performance Indicators	Bobot (%)	Realisasi	Target	Pencapaian	Nilai (%)
		a	b	c	d=b/c	e=dxa
I	Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab	60				60,00
1	Melakukan Penelaahan Laporan Profil Risiko	10	4	4	100%	10,00
2	Menyampaikan Reviu dan Masukan terkait <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>	10	2	2	100%	10,00
3	Melakukan Penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank	5	1	1	100%	5,00
4	Melakukan Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	5	1	1	100%	5,00
5	Melakukan Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	5	1	1	100%	5,00
6	Melakukan Penelaahan Penginian <i>Recovery Plan</i>	5	1	1	100%	5,00
7	Melakukan Penelaahan Penyusunan <i>Resolution Plan</i>	5	1	1	100%	5,00
8	Melakukan Kajian terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)	5	1	1	100%	5,00
9	Melakukan Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan	5	4	4	100%	5,00
10	Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank	5	2	2	100%	5,00
II	Aspek Perencanaan dan Pelaporan	15				15,00
11	Menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan Triwulanan	5	4	4	100%	5,00
12	Menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan Tahunan	5	1	1	100%	5,00
13	Menyampaikan Program Kerja Tahunan untuk Tahun Berikutnya	5	1	1	100%	5,00
III	Aspek Operasional dan Pengembangan Kompetensi	15				73,33
14	Melaksanakan Rapat Komite	10	41	6	683%	68,33
15	Pengembangan Kompetensi yang Berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab	5	1	1	100%	5,00
IV	Aspek Dinamis	10				11,11
16	Melakukan Tugas Lainnya sesuai dengan Bidang Manajemen Risiko	10	100%	90%	111%	11,11
JUMLAH		100				159,44

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS apabila dengan alasan yang bersangkutan terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Mengundurkan diri.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

Dalam hal terjadi hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk karena memangku jabatan rangkap yang dilarang.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi

Kebijakan dan prosedur nominasi Direksi telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang disahkan dalam Peraturan Direksi No. 11/PD/DIR/PPD/2018 serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun prosedur nominasi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan, memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris berdasarkan kajian dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan Perseroan.
3. Calon anggota Direksi yang merupakan pejabat internal Perseroan dapat diusulkan oleh Komisaris melalui kajian Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Calon anggota Direksi yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat menjadi Direksi.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

Kebijakan dan prosedur nominasi Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang disahkan dalam Peraturan Direksi No. 11/PD/DIR/PPD/2018 serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan

Komisaris. Adapun prosedur nominasi Dewan Komisaris yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui proses seleksi hingga nominasi secara transparan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta mempertimbangkan kepribadian calon Dewan Komisaris meliputi integritas, kejujuran, profesionalitas, kepemimpinan pengalaman, loyalitas, dan kecukupan waktunya demi kemajuan Bank.

Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

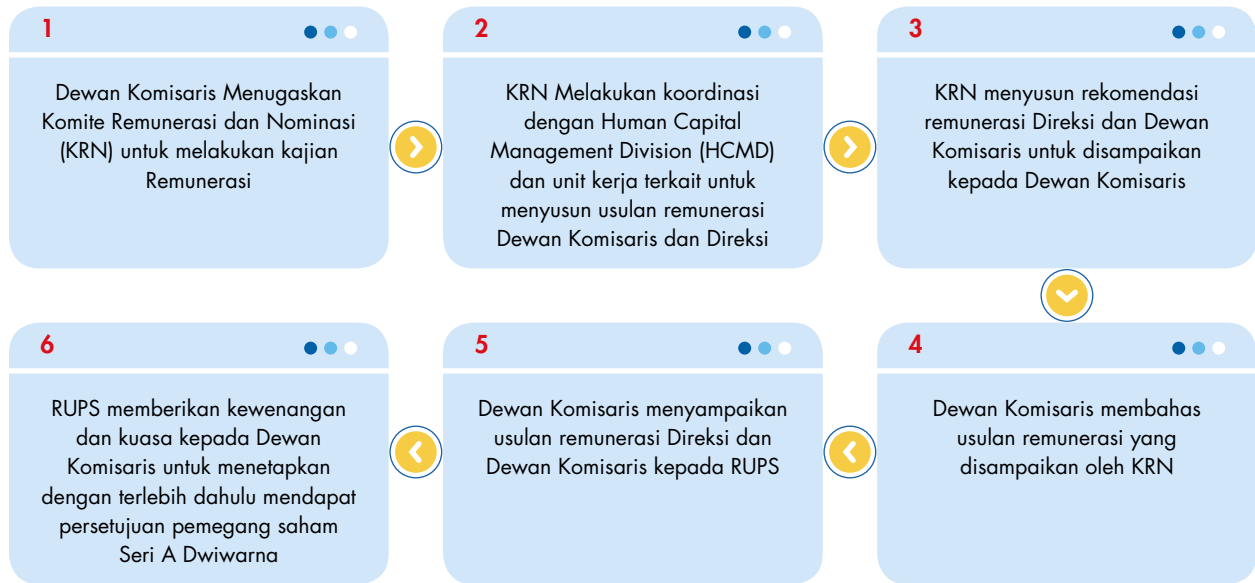
Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/11/2020 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Penyusunan kebijakan remunerasi tidak terlepas dari kemampuan Perseroan serta senantiasa berlandaskan kompetitif, adil dan berbasis risiko yang sejalan dengan arahan dan kebijakan dari OJK. Untuk menjaga remunerasi agar tetap kompetitif, Perseroan senantiasa melakukan *benchmarking* melalui survei yang dilakukan oleh pihak independen.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan telah menerbitkan Surat Edaran Direksi No.16/DIR/HCS/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi dengan mempertimbangkan aspek, antara lain stabilitas keuangan Perseroan, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Adapun cakupan aspek kebijakan tersebut antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, remunerasi yang bersifat variabel maupun *material risk takers*.

Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, yaitu besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan yang ditetapkan di RUPS adalah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:



Cakupan dari kebijakan remunerasi yang dimiliki Perseroan telah disesuaikan dengan POJK No. 5/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, mencakup:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
2. Penentuan *Material Risk Taker* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. *Material Risk Takers* (MRT) dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
 - b. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel antara MRT dan karyawan non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.
3. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dalam menetapkan indikator penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Gaji/Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan antara lain berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
6. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
 - b. Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
 - c. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
 - d. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
 - e. Honorarium Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama.
 - f. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

Struktur dan Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi dan Dewan Komisaris

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan/atau imbalan jangka pendek, jangka panjang dan/atau pasca kerja adalah sebagai berikut:

1. Jenis remunerasi jangka pendek terdiri atas: Honorarium, Tunjangan (hari raya, transportasi), Fasilitas (kesehatan, bantuan hukum) dan Tantiem.
2. Jenis remunerasi jangka panjang dan/atau pasca kerja terdiri dari Asuransi Purna Jabatan dan dapat juga diberikan penghargaan jangka panjang (*long term incentive/LTI*) serta Tantiem/Insentif kerja, pada dalam tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term incentive/LTI*).

Komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:



No	Nama	Jabatan	Remunerasi			
			Honorarium/ Gaji	Tunjangan Hari Raya	Tunjangan (Tj. PPh21)	Tantiem
1	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	✓	✓	✓	✓
2	Nixon L. P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	✓	✓	✓	✓
3	Andi Nirwoto	Direktur IT & Digital	✓	✓	✓	✓
4	Jasmin	Direktur Distribution & Funding	✓	✓	✓	✓
5	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	✓	✓	✓	✓
6	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	✓	✓	✓	✓
7	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	✓	✓	✓	✓
8	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	✓	✓	✓	✓
9	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	✓	✓	✓	✓
Jumlah Direksi (1)			32,593,200,000	2,716,100,000	21,743,915,225	42,562,272,390
1	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	✓	✓	✓	✓
2	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	✓	✓	✓	✓
3	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓
4	Armand B Arief	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓
5	Sentot A Sentausa	Komisaris Independen	✓	✓	✓	-
6	Andin Hadiyanto	Komisaris	✓	✓	✓	✓
7	Eko D. Heripoerwanto ⁽¹⁾	Komisaris	✓	✓	✓	✓
8	Heru Budi Hartono ⁽²⁾	Komisaris	✓	✓	✓	✓
9	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	✓	✓	✓	-
10	Himawan Arief S.	Komisaris	✓	✓	✓	-
Jumlah Dewan Komisaris (2)			14,413,969,372	1,283,660,000	7,645,426,850	17,266,736,316
Total (1 + 2)			47,007,169,372	3,999,760,000	29,389,342,075	59,829,008,706

Keterangan :

(1). Berhenti menjabat sejak tanggal 2 Maret 2022, (2). Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Oktober 2022

Rincian Remunerasi yang diterima Direktur Utama selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Remunerasi			
		Honorarium/ Gaji	Tunjangan Hari Raya	Tunjangan (Tj. PPh21)	Tantiem
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	4,152,000,000	346,000,000	2,451,761,838	4,687,360,590

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 16/DIR/HCSD/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ada yang bersifat tetap dan variabel, yaitu:

1. Remunerasi yang bersifat tetap diberikan dalam bentuk tunai yang dapat disertai dengan pemberian dalam bentuk non tunai.
2. Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.

	Fasilitas Lainnya				Total
	Asuransi Purna Jabatan	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Transportasi	Tunjangan Komunikasi	
✓	-	✓	✓	✓	
✓	-	✓	✓	✓	
✓	-	✓	✓	✓	
✓	-	✓	✓	✓	
✓	-	✓	✓	✓	
✓	-	✓	✓	✓	
✓	-	✓	✓	✓	
✓	-	-	✓	✓	
✓	-	✓	✓	✓	
8,680,400,000	-	1,210,060,000	197,122,379	109,703,069,994	
✓	-	✓	-	✓	
✓	-	✓	-	✓	
✓	-	✓	-	✓	
✓	-	✓	-	✓	
✓	-	✓	-	✓	
✓	-	✓	-	✓	
✓	-	✓	-	✓	
✓	-	✓	-	✓	
✓	-	✓	-	✓	
3,835,125,000	-	2,884,602,000	-	47,329,519,538	
12,515,525,000	-	4,094,662,000	197,122,379	157,032,589,532	

	Fasilitas Lainnya				Total
	Asuransi Purna Jabatan	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Transportasi	Tunjangan Komunikasi	
1,050,000,000	-	177,950,000	26,067,670	12,891,140,098	

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris merupakan perpaduan profesional-profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan segera. Dalam penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan senantiasa berupaya agar komposisi Direksi dan Dewan Komisaris memiliki keberagaman.

Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas dan rencana strategis Perseroan sehingga diharapkan dalam pengembangan maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki.

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman Direksi telah mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin (*gender*) yaitu dengan adanya 1 (satu) orang perempuan yaitu Sdri. Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur Assets Management. Berikut keberagaman komposisi Direksi Perseroan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	56 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Pertanian Magister Investment Banking	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknologi Pertanian Investment Banking
Nixon L. P Napitupulu	Wakil Direktur Utama	53 Tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	54 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Sipil
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	54 Tahun	Laki-laki	Sarjana Magister Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	51 Tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Master Gatoon College of Business, MBA Short Course Program in Cooperation with MM UGM	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi Manajemen
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	55 Tahun	Perempuan	Sarjana Hukum bidang Perdata	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Hukum
Andi Nirwoto	Direktur IT & Digital	52 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Master of Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Keuangan
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	58 Tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Gelar International Business	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi Bisnis
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	45 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Elektro Magister MBA in Finance & Banking	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Keuangan

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman Dewan Komisaris belum mengatur secara khusus tentang keberagaman jenis kelamin (*gender*). Hal ini dikarenakan bahwa Perseroan lebih menekankan pada profesionalisme tanpa memandang gender. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	55 Tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman kerja pada Law Firm dan Komisi Pemberantasan Korupsi	Hukum, Keuangan dan <i>People Management</i>
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	64 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Bisnis 	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Jasa Pemeringkat Efek	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan <i>People Management</i>
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	70 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana <i>Business Administration</i> Master <i>Business Administration</i> 	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan	Perbankan, Manajemen, Risiko, Manajemen Bisnis, dan <i>People Management</i>
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	68 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Master <i>Policy Economics</i> 	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko
Sentot A. Sentausa ¹	Komisaris Independen	65 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Statistika Master <i>Business Administration</i> 	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko
Andin Hadiyanto	Komisaris	57 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Master <i>International Development</i> Doctor <i>International Development</i> 	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan, World Bank Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) dan AMRO	Keuangan dan Ekonomi Makro
Herry Trisaputra Zuna ²	Komisaris	55 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil Sarjana Manajemen Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya Doktor Teknik Sipil 	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ekonomi Makro, Manajemen, Pekerjaan Umum dan Perumahan
Himawan Arief Sugoto ³	Komisaris	59 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil Magister Teknik Sipil 	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang
Eko D. Heripoerwanto ⁴	Komisaris	61 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Planologi Master <i>City Planning</i> Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ekonomi Makro, Perumahan, Perencanaan Wilayah dan Kota

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Heru Budi Hartono ⁵	Komisaris	57 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Magister Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja pada Perbankan, Sekretariat Presiden, dan Walikota	People Management dan Keuangan

Keterangan :

- ¹⁾ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022
- ²⁾ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022
- ³⁾ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022
- ⁴⁾ Diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022
- ⁵⁾ Masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya pada tanggal 17 Oktober 2022

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% atau lebih baik pada Perseroan maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2022, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih, baik pada Perseroan maupun Perusahaan lainnya.

Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	304.600 lembar saham/0,0023636%	Nihil	Nihil	Nihil
Nixon L. P Napitupulu	Wakil Direktur Utama	2.481.800 lembar saham/0,0192579%	Nihil	Nihil	Nihil
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	603.900 lembar saham/0,0046861%	Nihil	Nihil	Nihil
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	1.034.600 lembar saham/0,0080282%	Nihil	Nihil	Nihil
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	770.900 lembar saham/0,0059819%	Nihil	Nihil	Nihil
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	589.300 lembar saham/0,0045728%	Nihil	Nihil	Nihil
Andi Nirwoto	Direktur IT & Digital	859.161 lembar saham/0,0066668%	Nihil	Nihil	Nihil
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	1.581.930 lembar saham/0,0122753%	Nihil	Nihil	Nihil
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	726.100 lembar saham/0,0056343%	Nihil	Nihil	Nihil

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	<ul style="list-style-type: none"> - PT Multi Dimensi Integrasi (240 lembar saham) - PT Jaringan Pangan Terbuka Indonesia (11.000 lembar saham) - PT Kreasi Mitra Unggulan (450 lembar saham)
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sentot A. Sentausa ¹	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andin Hadiyanto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Herry Trisaputra Zuna ²	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Himawan Arief Sugoto ³	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan :

- ¹⁾ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022
- ²⁾ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022
- ³⁾ Diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 02 Maret 2022, lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022

Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk pada penyampaian laporan kepada Regulator mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka (dhi.BBTN) baik langsung maupun tidak langsung. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

Adapun transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham dan Presentase Kepemilikan Saham				Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Pembelian per Saham	Status Kepemilikan	Tujuan Transaksi
				Sebelum transaksi		Setelah transaksi					
1	Haru Koesmahargyo	Direksi	26/08/2022	0	0%	304.600	0,0028763	304.600	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
2	Nixon L.P Napitupulu	Direksi	26/08/2022	2.143.800	0,02%	2.481.800	0,02%	338.000	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
3	Andi Nirwoto	Direksi	26/08/2022	328.200	0,00%	648.300	0,01%	320.100	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
4	Elisabeth Novie Riswanti	Direksi	26/08/2022	261.100	0,0024655	581.200	0,0054882	320.100	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
5	Hirwandi Gafar	Direksi	26/08/2022	283.800	0,0026779	603.900	0,01%	320.100	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
6	Jasmin	Direksi	26/08/2022	247.900	0,00%	568.000	0,0053636	320.100	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
7	Setiyo Wibowo	Direksi	26/08/2022	227.800	0,00%	547.900	0,01%	320.100	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
8	Nofry Rony Poetra	Direksi	26/08/2022	773.300	0,0073022	1.034.600	0,01%	261.300	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
9	Eko Waluyo	Direksi	26/08/2022	424.700	0,00%	686.000	0,01%	261.300	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
10	Andin Hadiyanto	Komisaris	26/08/2022	108.500	0,00%	269.500	0,00%	161.000	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
11	Heru Budi Hartono	Komisaris	26/08/2022	108.500	0,00%	269.500	0,00%	161.000	Rp1.511	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham

No.	Nama	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham dan Presentase Kepemilikan Saham				Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Pembelian per Saham	Status Kepemilikan	Tujuan Transaksi
				Sebelum transaksi	0,00%	Setelah transaksi	0%				
12	Andin Hadyanto	Komisaris	10/11/2022	269.500	0,00%	0	0%	269.500	Rp1.515	Langsung	Pemenuhan Pasal 7 huruf h dan i POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
13	Jasmin	Direksi	14/12/2022	568.000	0,0053636	1.422.400	0,01%	10.000	Rp1.395	Langsung	Investasi
			14/12/2022					25.000	Rp1.390		
			15/12/2022					20.000	Rp1.390		
			15/12/2022					20.000	Rp1.385		
			16/12/2022					10.000	Rp1.375		
			16/12/2022					26.000	Rp1.370		
			16/12/2022					47.100	Rp1.365		
			16/12/2022					70.100	Rp1.360		
			19/12/2022					210.700	Rp1.365		
			20/12/2022					5.000	Rp1.370		
			21/12/2022					150.500	Rp1.395		
			21/12/2022					50.000	Rp1.390		
			22/12/2022					210.000	Rp1.400		

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur berkaitan administrasi, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perusahaan yang efektif dan memastikan bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris Dewan Komisaris sesuai peraturan Menteri BUMN tersebut adalah melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berupa:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
5. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2022 terdapat pergantian Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan yang semula dijabat oleh Sdr. M. Rosyid Ariansyah untuk periode 01 April 2021 - 30 September 2022 dan digantikan oleh Sdr. Fahrudin berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KOM/BTN/2022 Tanggal 28 September 2022. Berikut profil ringkas Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan:



M. ROSYID ARIANSYAH
Sekretaris Dewan Komisaris

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Kota Depok, Jawa Barat

**Usia**

Klaten, 02 Januari 1982 (40 tahun pada Desember 2022)

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (2007)

**Riwayat Jabatan**

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Reasuransi Internasional Indonesia (Maret 2013 – Juni 2016)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) (November 2016 – Januari 2021)
- Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kementerian BUMN (Juni 2020 – saat ini)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (April 2021 – September 2022)

**Periode Menjabat**

01 April 2021 – 30 September 2022

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/KOM/BTN/2021 Tanggal 01 April 2021

**Jabatan Rangkap**

Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Kementerian BUMN

**FAHRUDIN**

Sekretaris Dewan Komisaris

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Kota Jakarta, Pusat DKI Jakarta

**Usia**

Temanggung, 19 November 1983 (39 tahun per Desember 2022)

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (2009)
- Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2012)

**Riwayat Jabatan**

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (April 2016 – Juli 2017)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Juli 2017 – Oktober 2019)
- Sekretaris Dewan Pengawas Perum BULOG (November 2019 – September 2022)
- Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Asisten Deputi Bidang TJSL, Kementerian BUMN (November 2021 – saat ini)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Oktober 2022 – saat ini)

**Periode Menjabat**

01 Oktober 2022 - 30 September 2025 (Periode I)

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/KOM/BTN/2022 Tanggal 28 September 2022

**Jabatan Rangkap**

Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Nama	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
M. Rosyid Ariansyah	Internalisasi Strategi <i>Anti Fraud</i>	30 Mei 2022, Konferensi Daring	Bank BTN
Fahrudin	Webinar Profesi Keuangan 2022	11 Oktober -15 Oktober 2022, Konferensi Daring	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
	<i>Leader as Coach</i>	4, 11, 18, 25 November 2022, Konferensi Daring	Coaching Indonesia
	Pendalaman Kompetensi Talenta Muda BUMN	21-22 November 2022, Konferensi Daring	Transforma

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya, termasuk Penyiapan undangan rapat, Penyiapan bahan-bahan rapat, Pendokumentasian surat-surat dan Penyusunan risalah rapat.
3. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris, dan risalah rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi bersama dengan sekretaris perusahaan.
4. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Perseroan.
5. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
6. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
9. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
10. Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
11. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
12. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
13. Pelaksanaan peran sebagai penghubung antar Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit

Perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka mendukung Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor ekstern, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank, dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.
6. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

7. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
8. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
12. Anggaran Dasar Perseroan.
12. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan yang dilakukan oleh Akuntan/Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik.
13. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
14. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
15. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
16. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank.
17. Mengevaluasi kinerja SKAI.
18. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi Bank umum syariah dan Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.
19. Memastikan SKAI dan auditor eksternal bekerja secara objektif dan independen.
20. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
21. Meninjau laporan audit dan bersama Dewan Komisaris memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
22. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
23. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
24. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
25. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern Bank maupun Anak Perusahaan.
26. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern Bank dan Audit Intern Perusahaan Anak.
27. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerbitan Piagam Audit Intern.
28. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
29. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas internal auditor dan eksternal auditor.
2. Memonitor dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal, termasuk pengelolaan WBS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
5. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
6. Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Bank yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit.
7. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal.
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
9. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
11. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan eksternal.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank BTN No. 11/KOM/BTN/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pembaruan Piagam Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam

melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit dibuat dengan tujuan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Isi Piagam Komite Audit antara lain:

Bagian I	Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Komite Audit
Bagian II	Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit
Bagian III	Tata Cara, Prosedur Kerja, Akses dan Kerahasiaan Informasi, Komposisi, Struktur dan Persyaratan Anggota
Bagian IV	Rapat, Pelaporan, Rencana Kerja, Penganggaran, Penghasilan dan Masa Tugas Komite Audit
Bagian V	Pendidikan, Tenaga Penunjang dan Penanganan Pengaduan
Bagian VI	Evaluasi & Penutup

Wewenang Komite Audit

Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank tentang karyawan, dana, *asset* dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dari Pihak dan luar Perseroan. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum/perbankan.

Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite Audit.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Iqbal Latanro	Ketua merangkap anggota	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko dan <i>People Management</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KOM/BTN/2021 tanggal 31 Maret 2021
Ahdi Jumhari Luddin	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Surat Dewan Komisaris No. 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 08 Januari 2020
Sentot A. Sentausa	Anggota ¹	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Andin Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Surat Dewan Komisaris No. 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 08 Januari 2020
Adi Prakoso	Anggota	Pihak Independen	Audit, Perbankan dan Akuntansi	Keputusan Direksi Nomor 271/DIR/2021 Tanggal 15 Maret 2021
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Audit dan Keuangan	Keputusan Direksi Nomor 1088/DIR/2022 Tanggal 09 November 2022

Keterangan:

¹Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 08 Agustus 2022.

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

IQBAL LATANRO Ketua Komite Audit	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit dari 24 Maret 2021 - 23 Maret 2026	SENTOT A. SENTAUSA Anggota Komite Audit	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 02 Maret 2022 - 16 Maret 2027
AHDI JUMHARI LUDDIN Anggota Komite Audit	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 27 November 2019 - 26 November 2024	ANDIN HADIYANTO Anggota Komite Audit	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 27 November 2019 - 26 November 2024



ADI PRAKOSO

Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Depok, Jawa Barat



Usia

Jakarta, 15 Februari 1965 (57 tahun per Desember 2022)



Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Padjajaran (1989)



Riwayat Jabatan

- Kepala Internal Audit PT PANN Pembiayaan Maritim/Anak Perusahaan BUMN (2013 – 2018)
- *Team Leader di Wholesale Banking Audit Department* (2012 – 2013)
- *Counterpart Relation Bank Mandiri* (2010 – 2012)
- *Senior Investigator di Special Audit Department Bank Mandiri* (1999 – 2010)
- Tim Merger Internal Audit Mandiri (1999)
- *Quality Assurance Auditor Bank Dagang Negara* (1997 – 1999)
- Ketua Tim Audit Intern Bank Dagang Negara (1996 – 1997)
- *Section Head di Urusan Administrasi Keuangan PT Bank Dagang Negara* (1991 – 1996)



Periode Menjabat

Periode pertama masa jabatan 13 Maret 2018 – 12 Maret 2021

Periode kedua masa jabatan 13 Maret 2021 – 12 Maret 2023



Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 271/DIR/2021 Tanggal 15 Maret 2021



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices (CACP)* dari IKAI
- *Chartered Accountant* dari Ikatan Akuntan Indonesia
- *Certified Fraud Examiner (CFE)* dari *Association of Certified Fraud Examiner, USA*
- *Qualified Internal Auditor* dari Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor*
- Sertifikasi Kompetensi sebagai Audit Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
- Sertifikasi *Risk Management Level 1 dan 2* dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

**PETER EKO BUDI DARWITO**

Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Tangerang, Banten

**Usia**

Sukoharjo, 27 Juli 1963 (59 tahun per Desember 2022)

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1987)
- Magister Agrobisnis Jurusan Magister Manajemen, IPB Bogor (2000)

**Riwayat Jabatan**

- Inspektur/Kepala Audit Internal Wilayah BRI Jayapura (2018 – Juli 2019)
- Wakil Pemimpin BRI Kantor Cabang Khusus (2015 – 2018)
- *Group Head/Kabag* Kredit BRI Kantor Cabang Khusus (2009 – 2014)
- *Group Head/Kabag* Kredit Program Kantor Pusat BRI (2005 – 2008)
- *Senior Account Officer* Bisnis Kredit Komersial Kantor Pusat BRI (1999 – 2005)
- *Account officer s/d Assisten Manager* Kredit Bisnis Pertanian
- Kredit Komersial & Kredit Korporasi BRI Kantor Cabang Khusus (1990 – 1998)

**Periode Menjabat**

Periode pertama masa jabatan 19 November 2019 – 18 November 2022

Periode kedua masa jabatan 19 November 2022 – 18 November 2024

**Dasar Hukum Pengangkatan**Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 1088/DIR/2022
Tanggal 09 November 2022**Jabatan Rangkap**

Tidak memiliki rangkap jabatan

**Sertifikasi**

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dari LSPI BARA

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Adi Prakoso	Peter Eko Budi Darwito
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit pada Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Iqbal Latanro	Ketua merangkap Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Ahdi Jumhari Luddin	Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Sentot A. Sentausa	Anggota ¹	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Andin Hadiyanto	Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Adi Prakoso	Anggota	Seminar Nasional Internal Audit 2022, dengan tema <i>Accelerating Digital Transformation and Harnessing ESG Implementation</i>	Legian Kuta Bali, 30 November – 1 Desember 2022	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		<i>Cybersecurity Oversight: Tips and Essential Best Practices</i>	Online Jumat, 07 Oktober 2022	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		<i>Leveraging the Roles of Audit Committee</i>	Online Rabu, 26-27 Januari 2022	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	Seminar Nasional Internal Audit 2022, dengan tema <i>Accelerating Digital Transformation and Harnessing ESG Implementation</i>	Legian Kuta Bali, 30 November – 1 Desember 2022	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		<i>Cybersecurity Oversight: Tips and Essential Best Practices</i>	Online Jumat 07 Oktober 2022	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		<i>Fungsi Oversight Terhadap Audit Eksternal</i>	Online Kamis, 07 April 2022	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		<i>Leveraging the Roles of Audit Committee</i>	Online Rabu, 26-27 Januari 2022	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)

Keterangan:

¹⁾ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 08 Agustus 2022..

Rapat Komite Audit

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

- Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Dalam hal terdapat benturan kepentingan anggota Komite Audit dengan objek bahasan, maka anggota komite dimaksud wajib mendeklarasikan tentang adanya benturan kepentingan dan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan risalah didokumentasikan secara baik.
- Risalah rapat sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Dalam hal anggota Komite Audit tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan:
 - Surat kuasa atau cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku atau;
 - Sarana media elektronik antara lain telekonferensi.
- Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite Audit.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2022, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta
1	03 Januari 2022	Temuan Audit, Cessie, Pengadaan KAP dan Piagam Komite Audit	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
2	07 Januari 2022	Progres Audit KAP untuk Tahun Buku 2021	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
3	10 Januari 2022	Concern Audit Tahun Buku 2021 & Persiapan Rapat Kementerian BUMN	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
4	17 Januari 2022	Update Audit Tahun Buku 2021, Tindak Lanjut Surat OJK, Program Kerja Komite dan Arahan terkait Hasil Pemeriksaan OJK & BI	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
5	24 Januari 2022	Annual Audit Plan Tahun 2022 dan Perkembangan Audit oleh KAP	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
6	28 Januari 2022	Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2021 oleh KAP PSS-EY dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
7	31 Januari 2022	Pembahasan Rekomendasi Komite Audit terkait Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta
8	03 Februari 2022	Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Keuangan Publikasi (<i>audited</i>) Tahun 2021	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
9	07 Februari 2022	Pembahasan Laporan Kegiatan IAD dan Laporan WBS Triwulan IV 2021	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
10	14 Februari 2022	Pelaporan Penunjukan KAP Tahun 2022 kepada KBUMN, Persetujuan <i>Annual Audit Plan 2022</i> , Lain-lain (Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester II atau Triwulan IV 2021)	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
11	07 Maret 2022	Hasil Pembahasan terkait Hapusbuku Kredit dengan CAMD, CRSD & SHAD	1. Ahdi Jumhari Luddin 2. Andin Hadiyanto 3. Adi Prakoso 4. Peter Eko Budi Darwito
12	14 Maret 2022	Konsep Arahan terkait Hapus Buku. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Andin Hadiyanto 4. Peter Eko Budi Darwito
13	21 Maret 2022	Pembahasan Usulan Penambahan Objek Audit Perusahaan Terafiliasi, Putusan Sanksi atas Hasil Audit Khusus dan <i>Update Fraud KC</i>	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
14	04 April 2022	Pembahasan Data Restrukturisasi Kredit terdampak Covid-19 dan Hasil Audit Restrukturisasi Kredit terdampak Covid-19	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
15	11 April 2022	Pembahasan Hasil General Audit KC Bandung	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
16	18 April 2022	<i>Draft</i> Publikasi Laporan Keuangan Triwulan I 2022, Evaluasi Komite Audit terhadap Jasa KAP 2021, Tindak lanjut <i>Management Letter</i> KAP 2021	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
17	25 April 2022	Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
18	23 Mei 2022	Pembahasan Laporan Komite Audit Triwulan I Tahun 2022	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
19	06 Juni 2022	<i>Rootcause analysis</i> , rekomendasi dan tindak lanjut atas temuan berulang internal dan eksternal	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
20	13 Juni 2022	Pembahasan <i>Branch Control</i> , <i>Exit Meeting</i> Audit Intern dan Isu-isu Terkini	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta
21	21 Juni 2022	Rekomendasi Komite Audit perihal Penetapan Jasa KAP Posisi 30 Juni 2022	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
22	04 Juli 2022	Efektivitas 1st & 2nd Line of Defense pada KC sesuai hasil Audit Intern, Peran Branch Control dan rencana Perubahan SO terkait Branch Control	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
23	25 Juli 2022	Monitoring Pengaduan Nasabah dan Tindak Lanjut Surat OJK perihal Pengaduan Nasabah	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
24	08 Agustus 2022	Realisasi Pelaksanaan Audit, Pokok temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut sampai dengan Semester I 2022	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa* 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
25	15 Agustus 2022	-Policy, Pengelolaan dan Strategi Treasury serta Portfolio Management -FBI Treasury, Kondisi Market, Surat Berharga dan Penilaian MtM -Perlakukan Akuntansi Transaksi Surat Berharga	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
26	5 September 2022	Mekanisme Pemberian Sanksi Pegawai	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
27	5 September 2022	Proses Bisnis Kredit Komersial dan Hasil Audit CBC	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
28	13 September 2022	Pembahasan Draft Laporan Keuangan Publikasi posisi Juni 2022 (audited)	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
29	19 September 2022	Permasalahan Hukum Bank BTN di outlet Kantor Pos dengan Fronting Company Bank lain	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
30	10 Oktober 2022	1. Pembahasan Hasil Audit Tematik Collection Strategy; 2. SO, Tugas & Tanggung Jawab CRSD dan Unit Collection di Kanwil dan KC; 3. Proses Collection & Penanganan/Monitoring Debitur Hapus Buku.	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
31	24 Oktober 2022	Realisasi RBB UUS/SHAD dan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal & Eksternal di UUS/SHAD	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Peter Eko Budi Darwito
32	25 Oktober 2022	Pembahasan Draft Laporan Keuangan Publikasi per 30 September 2022	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Peter Eko Budi Darwito
33	7 November 2022	Realisasi Audit Plan, WBS dan Monitoring Tindak Lanjut Audit per Triwulan III 2022	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta
34	7 November 2022	Survey atas Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2022	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
35	21 November 2022	Pembahasan Temuan <i>Management Letter</i> KAP 30 Juni 2022 dan Tindak Lanjut Temuan <i>Management Letter</i> KAP 31 Desember 2021.	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
36	5 Desember 2022	Pembahasan Program Kerja Komite Audit Tahun 2023 dan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Komite Audit Tahun 2022 & 2023	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
37	12 Desember 2022	Konsep Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Sentot A. Sentausa 4. Andin Hadiyanto 5. Adi Prakoso 6. Peter Eko Budi Darwito
38	19 Desember 2022	Rekomendasi Persetujuan <i>Ranking</i> Satu Pengadaan Jasa KAP Tahun 2023	1. Iqbal Latanro 2. Sentot A. Sentausa 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
39	19 Desember 2022	Evaluasi & <i>Follow up</i> Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2022 dan Konsep <i>Annual Audit Plan</i> 2023	1. Iqbal Latanro 2. Sentot A. Sentausa 3. Andin Hadiyanto 4. Adi Prakoso 5. Peter Eko Budi Darwito
40	26 Desember 2022	Penginian Piagam Audit Internal	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Adi Prakoso 4. Peter Eko Budi Darwito
41	26 Desember 2022	<i>Annual Audit Plan</i> 2023	1. Iqbal Latanro 2. Ahdi Jumhari Luddin 3. Adi Prakoso 4. Peter Eko Budi Darwito

Keterangan :

*) sebagai pengamat (*observer*)

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 41 (empat puluh satu) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Iqbal Latanro	Ketua merangkap anggota	41	40	98%
Ahdi Jumhari Luddin	Anggota	41	38	93%
Sentot A. Sentausa	Anggota ¹⁾	18	16	89%
Andin Hadiyanto	Anggota	41	33	81%
Adi Prakoso	Anggota	41	38	93%
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	41	41	100%

Keterangan:

¹⁾ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 08 Agustus 2022.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2022

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan
A. Kegiatan Rutin Komite Audit:		
1	Pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan tugas Internal Audit Division	Terlaksana
2	Menghadiri <i>Exit Meeting</i> Audit Umum IAD	Terlaksana
3	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Eksternal Auditor (OJK, BI, BPK, KAP, dll) termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit.	Terlaksana
3	Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Triwulanan/Tahunan dan <i>Annual Report</i> yang akan dipublikasikan	Terlaksana
4	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (<i>general audit</i> tahunan & evaluasi KPI)	Terlaksana
5	Menyampaikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Kementerian BUMN untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (<i>general audit</i> tahunan dan evaluasi KPI)	Terlaksana
6	Menyampaikan penunjukan Akuntan Publik sesuai Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK	Terlaksana
7	Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh KAP terkait kesesuaiannya dengan kontrak kerja dan standar audit yang berlaku.	Terlaksana
8	Memberikan evaluasi atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP untuk disampaikan kepada OJK.	Terlaksana
9	Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi <i>performance review</i> bulanan yang disampaikan oleh Direksi	Terlaksana
10	Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite kepada Dewan Komisaris	Terlaksana
11	Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK	Terlaksana
12	Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN	Terlaksana
13	Penilaian pengisian Kertas Kerja <i>Self Assessment</i> GCG Komite Audit dan Dewan Komisaris	Terlaksana
14	Pemantauan dan evaluasi Triwulanan terhadap pelaksanaan kepatuhan dengan CMGD	Terlaksana
B. Kegiatan Insidental Komite Audit		
1	Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan	Tidak terdapat perbedaan pendapat
2	Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.	Tidak terdapat pengaduan
3	Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank	Terlaksana
4	Mendampingi anggota Dewan Komisaris dalam kunjungan kerja ke kantor BTN sesuai penugasan dari Dewan Komisaris	Terlaksana
5	Mengikuti <i>training</i> , seminar, <i>workshop</i> di bidang audit dan lainnya sesuai dengan penugasan oleh Dewan Komisaris.	Terlaksana
C. Koordinasi Komite		
1	Rapat Koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Perseroan, bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan sumber daya manusia sebagai *strategic assets* dan *strategic partners*, menganalisis kebijakan, *monitoring* pelaksanaan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan serta perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunerasinya.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada Peraturan, Ketentuan dan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-7/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015, tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
18. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
19. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
20. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 01/DEKOM-BTN/2021 – No. 01/DIR-BTN/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
21. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 09/KOM/BTN/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pembaruan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Tugas Komite terkait remunerasi adalah:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi.
 - Kebijakan atas remunerasi.
 - Besaran atas remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - d. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud dapat berupa Gaji, Honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Bank dan skala usaha dari Bank dalam industrinya.
 - Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
 - g. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk disampaikan kepada Rapat umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - h. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi.
 - i. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang:
 - Penilaian terhadap sistem tersebut;
 - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
 - Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua; dan
 - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
 - j. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.
2. Tugas Komite terkait Nominasi adalah:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan;
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

- g. Memantau dan menganalisis kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- h. Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- i. Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- j. Melakukan reviu terhadap sistem manajemen sumber daya manusia dan kebijakan pengembangan manajemen sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.
- k. Melakukan reviu berkala atas sistem talenta (*talent management system*) perusahaan serta *monitoring* dan evaluasi atas pekerjaannya.
- l. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta (*talent classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
- m. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*nominated talent*).
- n. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
- o. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- p. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
- q. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Nominasi.
- r. Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KOM/BTN/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pembaruan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi bertujuan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pemberian rekomendasi atas remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai serta kebijakan *Human Capital* secara keseluruhan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Muatan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Bagian I	Ketentuan Umum
Bagian II	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite
Bagian III	Keanggotaan
Bagian IV	Mekanisme dan Hubungan Kerja
Bagian V	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja
Bagian VI	Pengembangan Kompetensi dan Penghasilan
Bagian VII	Penutup

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite memiliki kewenangan dari Dewan Komisaris untuk:

1. Mereviu, memeriksa, melakukan Analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Meminta Bank untuk melakukan survei dan/atau studi banding (*benchmarking*) sesuai dengan kebutuhan Komite.
3. Meminta, mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak internal dan eksternal Bank.
4. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari:
 - a. Pihak Bank BTN (termasuk pegawai Bank); dan/atau
 - b. Pihak berkepentingan lainnya.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank BTN yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas komite.

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
2. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai. Komite diketuai oleh Komisaris Independen.

Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Bank BTN.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menerbitkan surat pengangkatan/pemberhentian. Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian oleh anggota Komite wajib didokumentasikan. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak 1 (satu) pada Komite lainnya.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/ Independen	Hukum, Keuangan dan <i>People Management</i>	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/ BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
Iqbal Latanro	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko dan <i>People Management</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/ KOM/ BTN/ IV/ 2021 tanggal 1 April 2021
Armand B. Arief	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis, dan <i>People Management</i>	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/ BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
Ahdi Jumhari Luddin	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/ BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
Sentot A. Sentausa	Anggota ¹	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/ KOM/ BTN/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022
Andin Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/ BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
Herry Trisaputra Zuna	Anggota ²	Komisaris	Ekonomi Makro, Manajemen, Pekerjaan Umum dan Perumahan	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/ KOM/ BTN/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022
Himawan Arief Sugoto	Anggota ³	Komisaris	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/ KOM/ BTN/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022
Eko D. Heripoerwanto	Anggota ⁴	Komisaris	Ekonomi Makro, Perumahan, Perencanaan Wilayah dan Kota	Surat Dewan Komisaris Nomor 073/KOM/ BTN/ V/ 2019 tanggal 21 Mei 2019
Heru Budi Hartono	Anggota ⁵	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/ BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
Moch Amin Nurdin	Anggota	Pihak Independen	<i>Human Capital, Finance dan Corporate Relation</i>	Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 1003/DIR/2021 Tentang Pengangkatan Sdr. Moch. Amin Nurdin Sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Abdul Firman	Anggota Ex. Officio ⁶	Pejabat Eksekutif	<i>Human Capital, Finance dan Corporate Relation.</i>	Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 03/KOM/ BTN/ 2021 tentang Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Rahmayati	Anggota Ex. Officio ⁷	Pejabat Eksekutif	<i>Human Capital, Finance dan Corporate Relation.</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/ KOM/ BTN/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022

Keterangan:

¹ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022.

² Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022.

³ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022.

⁴ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya pada tanggal 02 Maret 2022.

⁵ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya pada tanggal 17 Oktober 2022.

⁶ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir pada tanggal 16 Maret 2022.

⁷ Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mulai tanggal 17 Maret 2022

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

CHANDRA M. HAMZAH Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024	SENTOT A. SENTAUSA Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027
IQBAL LATANRO Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 10 Maret 2021 - 26 November 2026	ANDIN HADIYANTO Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024
ARMAND B. ARIEF Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024	HERRY TRISAPUTRA ZUNA Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027
AHDI JUMHARI LUDDIN Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024	HIMAWAN ARIEF SUGOTO Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027



MOCH. AMIN NURDIN

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Bekasi, Jawa Barat.



Usia

Tegal, 1 November 1973 (49 tahun per Desember 2022)



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang (1997).
- Magister *Marketing*, PPM Graduate School of Management, Jakarta (2006).
- Magister *Human Resource Management*, Universitas Mercu Buana, Jakarta (2019).



Riwayat Jabatan

- Jakarta Area *Head*, Bank CIMB Niaga (2008)
- *Senior Faculty*, LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2018)
- Kepala Divisi Pemasaran dan Pelatihan 1, LPPI (2020)
- Kepala LPK LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2020)



Periode Menjabat

Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 30 November 2021 – 29 November 2024



Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 1003/DIR/2021 Tentang Pengangkatan Sdr. Moch. Amin Nurdin Sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



Sertifikasi

- *Certified Human Resources Analyst* (2018)
- *Certified Trainer for General Banking Level 1,2,3* (2014)
- *Certified General Banking Level 2 (Branch Manager and BOD-2)* (2016)
- *Certified Trainer for BPR/BPRS Leader (BOD/BOC)* (2013)
- *Certified Trainer for Risk Management Level 1* (2012)

**RAHMAYATI**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Ex-Officio)

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Jakarta Timur, DKI Jakarta

**Usia**

Ujung Pandang, 13 Juli 1973 (49 Tahun per Desember 2022)

**Riwayat Pendidikan**

Master of Business Administration/Finance, Institut Teknologi Bandung

**Riwayat Jabatan**

- School of Business & Sharia Banking Department Head, Learning Centre Division (29 Januari 2019 – 28 Februari 2021)
- Sharia Business Deputy, Sharia Business Division (1 April 2021 – 30 November 2021)
- Sharia Funding & Treasury Deputy, Sharia Business Division (1 Desember 2021 – 13 Februari 2022)
- PJ Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division (14 Februari 2022 – 30 September 2022)
- Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division (01 Oktober 2022 – saat ini)

**Periode Menjabat**

Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 17 Maret 2022 – 16 Maret 2025

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022

**Jabatan Rangkap**

Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division, 01 Oktober 2022 - saat ini

**Sertifikasi**

- *Certified Professional Human Resource* (2019)
- *4DX : Managers Implementation* (2020)
- *Professional Coach Certification Program* (2021)
- *Sertifikasi Treasury Level Basic* (2021)
- *Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3* (2022)
- *Sertifikasi Pengetahuan Dasar Bidang Dana Pensiun* (2022)
- *Pelatihan PSAK 24* (2022)

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	CMH	IQL	ABA	AJL	SAS ¹	AHY	HTZ ²	HAS ³	EDH ⁴	HBH ⁵	MAN	ABF ⁶	RHM ⁷
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan

CMH : Chandra M. Hamzah;
IQL : Iqbal Latanro;
ABA : Armand B. Arief;
AJL : Ahdi Jumhari Luddin;
SAS : Sentot A. Sentausa;

AHY : Andin Hadiyanto;
HTZ : Herry Trisaputra Zuna;
HAS : Himawan Arief Sugoto;
HBH : Heru Budi Hartono;
EDH : Eko D. Heripoerwanto;

MAN : Moch Amin Nurdin
ABF : Abdul Firman
RHM : Rahmayati

Keterangan:

- ¹ Lulus Penilaian Kemampuan dan Keputusan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022.
- ² Lulus Penilaian Kemampuan dan Keputusan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022.
- ³ Lulus Penilaian Kemampuan dan Keputusan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022.
- ⁴ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya pada tanggal 02 Maret 2022.
- ⁵ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya pada tanggal 17 Oktober 2022.
- ⁶ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir pada tanggal 16 Maret 2022.
- ⁷ Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mulai tanggal 17 Maret 2022.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi pada Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Iqbal Latanro	Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Armand B. Arief	Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Ahdi Jumhari Luddin	Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Sentot A. Sentausa	Anggota ¹	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Andin Hadiyanto	Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Herry Trisaputra Zuna	Anggota ²	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Himawan Arief Sugoto	Anggota ³	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Eko D. Heripoerwanto	Anggota ⁴	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Heru Budi Hartono	Anggota ⁵	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Moch Amin Nurdin	Anggota	Special Directorship Program	17 - 18 November 2022, Kab. Badung, Bali	Indonesian Institute for Corporate Directorship
		Masterclass GRC Foundation	17 November 2022, Daring	Kementerian BUMN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Abdul Firman	Anggota Ex. Officio ⁶	PDPS Executive Overview of Islamic Bank	18 - 19 Februari 2022, Daring	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		<i>Refreshment</i> Kredit Konsumer & Penyampaian Dokumen Pokok	22 Februari 2022, Daring	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Rahmayati	Anggota Ex. Officio ⁷	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	16 April 2022, Daring	LSPP
		<i>Executive Session</i> BOD-1	18 Juni 2022, Daring	SHL Indonesia
		Sertifikasi Pengetahuan Dasar Bidang Dana Pensiun	1 - 5 Agustus 2022, Daring	Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun
		Pelatihan PSAK 24	1 Oktober 2022, Daring	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		<i>Expert Talk Session</i> BOD-1 <i>Cust & Market</i>	12 November 2022, Daring	SHL Indonesia

Keterangan:

¹ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022.

² Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022.

³ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022.

⁴ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya pada tanggal 02 Maret 2022.

⁵ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya pada tanggal 17 Oktober 2022.

⁶ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir pada tanggal 16 Maret 2022.

⁷ Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mulai tanggal 17 Maret 2022.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank. Kuorum rapat dihadiri oleh minimal 51% (lima puluh satu per seratus) anggota Komite, baik secara langsung maupun melalui media lain yang ditentukan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) Pihak Independen.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan surat kuasa, teknologi telekonferensi dan cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua Komite berhalangan hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Rapat komite dapat mengundang manajemen atau pihak lain sebagai narasumber. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah, dokumen yang aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Keputusan rapat komite dinyatakan sah dan mengikat, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
1.	31 Januari 2022	Rencana Anggaran Pendidikan Tahun 2022	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdhi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Heru Budi Hartono 6. Eko D. Heripoerwanto 7. Andin Hadiyanto 8. Moch Amin Nurdin	Remunerasi
2.	09 Februari 2022	Validasi atas Usulan <i>Selected Talent</i> Bank BTN	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdhi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Heru Budi Hartono 6. Eko D. Heripoerwanto 7. Andin Hadiyanto 8. Moch Amin Nurdin	Nominasi
3.	01 Maret 2022	Penilaian terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdhi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Heru Budi Hartono 6. Eko D. Heripoerwanto 7. Andin Hadiyanto 8. Moch Amin Nurdin	Nominasi
4.	27 April 2022	1. Rekomendasi 3 Kandidat Anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan RUPST tanggal 2 Maret 2022 2. Evaluasi KPI Direksi (Finansial dan Non Finansial) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdhi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa* 6. Heru Budi Hartono 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna* 9. Himawan Arief Sugoto* 10. Moch Amin Nurdin	Nominasi
5.	18 Mei 2022	1. <i>Update</i> evaluasi KPI Direksi (Finansial dan Non Finansial) PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 2. Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdhi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa* 6. Heru Budi Hartono 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna* 9. Himawan Arief Sugoto* 10. Moch Amin Nurdin	Remunerasi dan Nominasi
6.	08 Juni 2022	Pembahasan Usulan Kandidat <i>Senior Executive Vice President (SEVP) - Operation</i>	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdhi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa* 6. Heru Budi Hartono 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna* 9. Himawan Arief Sugoto* 10. Moch Amin Nurdin	Nominasi
7.	06 Juli 2022	Pembahasan Usulan Kandidat Corporate Secretary Division Head	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdhi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa* 6. Heru Budi Hartono 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna* 9. Himawan Arief Sugoto* 10. Moch Amin Nurdin	Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
8.	27 Juli 2022	Pembahasan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2022	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa* 6. Heru Budi Hartono 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna* 9. Himawan Arief Sugoto* 10. Moch Amin Nurdin	Remunerasi
9.	09 November 2022	1. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Sdr. Alex Sofyan Noor sebagai SEVP <i>Operation</i> dengan Status Kepegawaian <i>Professional Hire</i> ; dan 2. <i>Key Performance Indicators (KPI) Individual Direksi (Non Financial)</i> .	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa 6. Andin Hadiyanto 7. Herry Trisaputra Zuna 8. Himawan Arief Sugoto 9. Moch Amin Nurdin 10. Rahmayati	Remunerasi dan Nominasi
10.	16 November 2022	Penilaian Kinerja Anggota Komite Remunerasi Non-Dewan Komisaris/Pihak Independen	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa 6. Andin Hadiyanto 7. Herry Trisaputra Zuna 8. Himawan Arief Sugoto 9. Moch Amin Nurdin	Remunerasi dan Nominasi
11.	23 November 2022	1. Penilaian Kinerja Anggota Komite Pemantau Risiko Non-Dewan Komisaris/Pihak Independen; dan 2. Usulan Anggaran Tantiem BOD/BOC PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2022 dan RKAP Tantiem BOD/BOC PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun 2023	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa 6. Andin Hadiyanto 7. Herry Trisaputra Zuna 8. Himawan Arief Sugoto 9. Moch Amin Nurdin	Remunerasi
12.	30 November 2022	Pembahasan RKAP Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa 6. Andin Hadiyanto 7. Herry Trisaputra Zuna 8. Himawan Arief Sugoto 9. Moch Amin Nurdin 10. Rahmayati	Remunerasi
13.	07 Desember 2022	Pembahasan Usulan Kandidat <i>Senior Executive Vice President (SEVP) Compliance & Legal</i>	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa 6. Andin Hadiyanto 7. Herry Trisaputra Zuna 8. Himawan Arief Sugoto 9. Moch Amin Nurdin	Nominasi
14.	21 Desember 2022	1. Pembahasan Program Kerja Dewan Komisaris; 2. Pembahasan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi; dan 3. Pembaruan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Ahdi Jumhari Luddin 4. Armand B. Arief 5. Sentot A. Sentausa 6. Andin Hadiyanto 7. Herry Trisaputra Zuna 8. Himawan Arief Sugoto 9. Moch Amin Nurdin	Remunerasi dan Nominasi

*) sebagai pengamat (*observer*)

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	14	14	100%
Iqbal Latanro	Anggota	14	14	100%
Armand B. Arief	Anggota	14	14	100%
Ahdi Jumhari Luddin	Anggota	14	14	100%
Sentot A. Sentausa	Anggota ¹	6	6	100%
Andin Hadiyanto	Anggota	14	14	100%
Herry Trisaputra Zuna	Anggota ²	6	6	100%
Himawan Arief Sugoto	Anggota ³	6	6	100%
Eko D. Heripoerwanto	Anggota ⁴	3	3	100%
Heru Budi Hartono	Anggota ⁵	8	8	100%
Moch Amin Nurdin	Anggota	14	14	100%
Abdul Firman	Anggota Ex-Officio ⁶	-	-	-
Rahmayati	Anggota Ex-Officio ⁷	2	2	100%

Keterangan:

- ¹ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 8 Agustus 2022.
- ² Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022.
- ³ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022.
- ⁴ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya pada tanggal 02 Maret 2022.
- ⁵ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya pada tanggal 17 Oktober 2022.
- ⁶ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir pada tanggal 16 Maret 2022.
- ⁷ Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mulai tanggal 17 Maret 2022.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan
I Reguler		
1	Penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023	Terlaksana
2	Validasi atas Usulan <i>Selected Talent BOD-1</i> Bank BTN	Terlaksana
3	Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota BOC dan BOD untuk <i>Fit & Proper Test</i> terkait dengan pelaksanaan RUPS Tahunan atau Luar Biasa	Terlaksana
4	Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	Terlaksana
5	Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	Terlaksana
6	Penelaahan KPI Kolegal dan Individual BOD	Terlaksana
7	Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas	Terlaksana
8	Penetapan Besaran Tantiem dan Bonus serta Insentif lain yang terkait untuk BOD dan BOC	Terlaksana
9	Merancang Program Kerja Dewan Komisaris	Terlaksana
10	Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank (<i>Self Assessment GCG</i>)	Terlaksana
11	Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana
II Non Reguler		
12	Evaluasi Kebijakan/SOP <i>Human Capital, Strategy, dan Learning</i>	Terlaksana
13	Evaluasi Kebijakan/Implementasi SOP Tengah Alih Daya	Terlaksana
14	Penetapan <i>Corporate Secretary Division Head</i> dan <i>Internal Audit Division Head</i>	Terlaksana
15	Penetapan SEVP untuk beberapa posisi sesuai struktur Organisasi terbaru	Terlaksana
III Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite		
14	Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia	Terlaksana

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan
IV Tugas Khusus dan Lain-lain		
15	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana
16	Tugas lain dari Ketua Komite/Dewan Komisaris	Terlaksana

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi telah disajikan pada Sub Judul Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan organ tata kelola yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Menteri Negara BUMN perihal Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan perubahannya.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sejalan dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, klarifikasi, dokumen dan/atau laporan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan penerapan manajemen risiko;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko;

4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko;
5. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank;
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaian;
7. Melakukan kegiatan pemantauan risiko di satuan kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan satuan kerja manajemen risiko;
8. Melakukan revidu, evaluasi, dan/atau memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan persetujuan, konsultasi, maupun pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan regulator;
9. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Pedoman kerja Komite Pemantau Risiko mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan serta diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KOM/BTN/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pembaruan Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan isi muatan sebagai berikut:

Bagian I	Ketentuan Umum
Bagian II	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite
Bagian III	Keanggotaan
Bagian IV	Mekanisme dan Hubungan Kerja
Bagian V	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja
Bagian VI	Pengembangan Kompetensi dan Penghasilan
Bagian VII	Penutup

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko.

- Melakukan komunikasi dengan Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif serta pihak internal Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
- Mendapatkan masukan dan/atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

- Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;

- Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu;
- Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Armand B. Arief	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/I/2020 tanggal 08 Januari 2020
Eko D. Heripoerwanto	Anggota ¹	Komisaris	Ekonomi Makro, Perumahan, Perencanaan Wilayah dan Kota	Surat Dewan Komisaris Nomor 073/KOM/BTN/V/2019 tanggal 21 Mei 2019
Herry Trisaputra Zuna	Anggota ²	Komisaris	Ekonomi Makro, Manajemen, Pekerjaan Umum dan Perumahan	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Himawan Arief Sugoto	Anggota ³	Komisaris	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Ignace Widiatmoko	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko, Perbankan, Keuangan	Keputusan Direksi Nomor 1002/DIR/2021 tanggal 8 November 2021
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Keuangan	Keputusan Direksi Nomor 1067/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021

¹ Masa jabatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko berakhir dengan sendirinya pada tanggal 02 Maret 2022.

² Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022.

³ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022.

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

ARMAND B. ARIEF Ketua Komite Pemantau Risiko	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024
EKO D. HERIPOERWANTO Anggota Komite Pemantau Risiko	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 17 Mei 2019 - 02 Maret 2022

HERRY TRISAPUTRA ZUNA Anggota Komite Pemantau Risiko	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027
HIMAWAN ARIEF SUGOTO Anggota Komite Pemantau Risiko	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027

**IGNACE WIDIATMOKO**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

**Domisili**

Kota Tangerang Selatan, Banten

**Usia**

Probolinggo, 07 Juli 1960 (62 tahun per Desember 2022)

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang (1984)
- *Master of Business Administration di Rutgers The State University* (1995)

**Pengalaman Kerja**

- Vice President of Risk Management of Bank Mandiri (2007 – 2015)
- Commissioner of PT Resik Guna Maju (2015 – 2018)
- Managing Director PT Gedung Bank Exim (2015 – 2018)
- Risk Monitoring Committee and Audit Committee of Rabobank International Indonesia (2018 – 2020)
- Risk Monitoring Committee of Industrial Commercial of Bank of China Indonesia (2018 – 2021)
- Risk Monitoring Committee and Audit Committee of Bank Victoria International Tbk (2021)

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 1002/DIR/2021 tanggal 8 November 2021

**Periode Jabatan**

Periode Pertama dengan Masa Jabatan 07 November 2021 – 06 November 2024

**Jabatan Rangkap**

Tidak memiliki rangkap jabatan

**Sertifikasi**

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI (2019)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 dari BNSP (2019)



PAMUJI GESANG RAHARJO
Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta



Usia

Jakarta, 10 April 1968 (54 tahun per Desember 2022)



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Universitas Dr. Moestopo (1996)
- Magister Manajemen Risiko Universitas Indonesia (2003)
- Doktor bidang Bisnis dan Manajemen (Keuangan) Institut Pertanian Bogor (2014)



Pengalaman Kerja

- General Manager of Risk Management Perum Pegadaian (2010 – 2011)
- Direktur pada Risk Management Center Indonesia (2009 – 2011)
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007 – 2010 dan 2011 – 2016)
- Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2021)



Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 1067/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021



Periode Jabatan

Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 30 November 2021 - 29 November 2024



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



Sertifikasi

- Risk Management Certification Level 4 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dari BSMR (2009)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 3 dari BNSP (2021)
- Certified of Financial Consultant (CFC) Institute of Financial Consultant dari IFC (2013)
- Certified of Investment Market and Banking Analyst (CIMBA) Investment Market and Banking Analyst Association (2014)

Independensi Komite Pemantau Risiko

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Armand B. Arief	Eko D. Heripoerwanto ¹	Herry Trisaputra Zuna ²	Himawan Arief Sugoto ³	Ignace Widiatmoko	Pamuji Gesang Raharjo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Masa jabatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko berakhir dengan sendirinya pada tanggal 02 Maret 2022.

² Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022.

³ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko Pada Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Armand B. Arief	Ketua merangkap Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Eko D. Heripoerwanto ¹	Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Herry Trisaputra Zuna ²	Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Himawan Arief Sugoto ³	Anggota	Perincian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris pada Tahun 2022		
Ignace Widiatmoko	Anggota	Konferensi Nasional: <i>Leveraging The Roles of Audit Committee</i>	26 - 27 Januari 2022; Daring	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		<i>Risk Management Refreshment Program: Managing Operational & Compliance Risk New Paradigm for Synergy</i>	23 September 2022; Daring	IBI - Banking Competency Center
		Special Directorship Program	17 - 18 November 2022; Kab. Badung Bali	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Konferensi Nasional: <i>Leveraging The Roles of Audit Committee</i>	26 - 27 Januari 2022; Daring	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		<i>Risk Management Refreshment Program: Managing Operational & Compliance Risk New Paradigm for Synergy</i>	23 September 2022; Daring	IBI - Banking Competency Center
		Special Directorship Program	17 - 18 November 2022; Kab. Badung Bali	Indonesian Institute for Corporate Directorship

¹ Masa jabatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko berakhir dengan sendirinya pada tanggal 02 Maret 2022.

² Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022.

³ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) Pihak Independen.

Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan surat kuasa, teknologi telekonferensi, dan cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rapat dipimpin oleh ketua Komite atau dalam hal ketua Komite berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota komite yang ditunjuk oleh anggota komite yang hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite Pemantau Risiko dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Rapat komite dapat mengundang manajemen atau pihak lain sebagai narasumber. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah, dokumen yang aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	04 Januari 2022	Penyusunan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Bank Periode Januari sampai dengan Desember 2021 - Bagian Komite Pemantau Risiko	1. Armand B. Arief 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Ignace Widiatmoko 4. Pamuji Gesang Raharjo
2	07 Januari 2022	Pembahasan Kebijakan dan Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dalam Penerapan Program APU PPT	1. Armand B. Arief 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Ignace Widiatmoko 4. Pamuji Gesang Raharjo
3	02 Februari 2022	Pembahasan Laporan Manajemen: 1. Laporan Kepatuhan tahun 2021 2. Laporan TKB Desember 2021 dan KPMM sesuai Profil Risiko Desember 2021 3. Laporan Profil Risiko Posisi Bulan Desember 2021 (Triwulan IV tahun 2021) 4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank BTN Triwulan IV 2021	1. Armand B. Arief 2. Ignace Widiatmoko 3. Pamuji Gesang Raharjo
4	07 Februari 2022	Penelaahan Terhadap Laporan Kepatuhan Selama Periode Tahun 2021	1. Armand B. Arief 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Ignace Widiatmoko 4. Pamuji Gesang Raharjo
5	09 Februari 2022	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif atau Pihak Terkait	1. Armand B. Arief 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Ignace Widiatmoko 4. Pamuji Gesang Raharjo
6	14 Februari 2022	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan IV Tahun 2021 dan Periode Tahun 2021	1. Armand B. Arief 2. Eko D. Heripoerwanto 3. Ignace Widiatmoko 4. Pamuji Gesang Raharjo
7	15 Maret 2022	Pembahasan Konsep Rencana Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022	1. Armand B. Arief 2. Ignace Widiatmoko 3. Pamuji Gesang Raharjo
8	16 Maret 2022	Telaah Penilaian Sendiri Tata Kelola Unit Usaha Syariah Tahun 2021 dan Perubahan Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN)	1. Armand B. Arief 2. Ignace Widiatmoko 3. Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
9	29 Maret 2022	Strategi Pengelolaan Kualitas Kredit (<i>Loan at Risk and Provisioning</i>)	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
10	25 April 2022	Tindak Lanjut atas Arahan terkait Penghapusbukuan Kredit Bank BTN	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
11	23 Mei 2022	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan I Tahun 2022	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
12	07 Juni 2022	Telaah terhadap Struktur dan Skema Penjualan Aset Kredit Bermasalah disertai dengan Pembelian Sukuk	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
13	24 Juni 2022	Telaah Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Periode 2022-2024 dan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
14	29 Juni 2022	Telaah terhadap Selisih Saldo Kas ATM dengan <i>General Ledger</i> (GL)	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
15	18 Juli 2022	Telaah terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Juni 2022	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
16	20 Juli 2022	Penyusunan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Bank Periode Januari sampai dengan Juni 2022 - Bagian Komite Pemantau Risiko	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
17	22 Juli 2022	Telaah Rencana Aktivitas Baru Agen Efek Reksa Dana Terproteksi - Trimegah Terproteksi Futura 28	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
18	25 Juli 2022	Rekomendasi terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP)	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
19	28 Juli 2022	Penyusunan Laporan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
20	02 Agustus 2022	Telaah terhadap Laporan Kepatuhan Periode Semester I Tahun 2022	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
21	29 Agustus 2022	Telaah terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Juli 2022	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
22	30 Agustus 2022	Telaah terhadap Ketetapan Direksi tentang Kebijakan Umum Perkreditan atau Pembiayaan Bank	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
23	28 September 2022	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif atau Pihak Terkait	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna* 3. Himawan Arief Sugoto* 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
24	24 Oktober 2022	Telaah terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode September 2022	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
25	01 November 2022	Penyusunan Laporan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko sampai dengan Triwulan III Tahun 2022	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
26	07 November 2022	Penelaahan Terhadap Laporan Kepatuhan Triwulan III Tahun 2022	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
27	08 November 2022	Rekomendasi Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Tahun 2023	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
28	15 November 2022	Pembahasan Kebijakan Umum (KU) Hukum, Kepatuhan, APU & PPT, dan Tata Kelola Perusahaan	1. Armand B. Arief 2. Himawan Arief Sugoto 3. Ignace Widiatmoko 4. Pamuji Gesang Raharjo
29	18 November 2022	Masukan terhadap Draf Keputusan Menteri tentang Pedoman Tata Kelola Risiko Berkesinambungan BUMN	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
30	21 November 2022	1. Rekomendasi terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) 2. Rekomendasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) Periode 2023-2025 dan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
31	22 November 2022	Rekomendasi terhadap Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) dan Penginjian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>)	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
32	23 November 2022	Telaah terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Oktober 2022	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
33	28 November 2022	1. Rekomendasi terhadap Penetapan Jumlah Lembar Saham dan Harga Pelaksanaan HMETD II 2. Rekomendasi terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB)	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
34	30 November 2022	Pembahasan Kualitas Kredit dan Perkembangan Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19	1. Armand B. Arief 2. Ignace Widiatmoko 3. Pamuji Gesang Raharjo
35	05 Desember 2022	Pembahasan Pembaruan Parameter pada Profil Risiko (<i>Risk Profile</i>)	1. Armand B. Arief 2. Himawan Arief Sugoto 3. Ignace Widiatmoko 4. Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
36	07 Desember 2022	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif atau Pihak Terkait	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
37	08 Desember 2022	Pembahasan Kebijakan Umum (KU) Manajemen Risiko	1. Armand B. Arief 2. Ignace Widiatmoko 3. Pamuji Gesang Raharjo
38	19 Desember 2022	Pembaruan Piagam Komite Pemantau Risiko	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
39	21 Desember 2022	Pembahasan Kebijakan Umum (KU) Pengelolaan Perusahaan Anak dan Unit Usaha Syariah	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
40	23 Desember 2022	Pembahasan Kebijakan Umum (KU) <i>Treasury, Funding, dan Product Services</i>	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo
41	26 Desember 2022	Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2023	1. Armand B. Arief 2. Herry Trisaputra Zuna 3. Himawan Arief Sugoto 4. Ignace Widiatmoko 5. Pamuji Gesang Raharjo

*)sebagai pengamat (observer)

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Armand B. Arief	Ketua merangkap anggota	41	41	100%
Eko D. Heripoerwanto	Anggota ¹	6	5	83,3%
Herry Trisaputra Zuna	Anggota ²	18	14	77,8%
Himawan Arief Sugoto	Anggota ³	18	16	88,9%
Ignace Widiatmoko	Anggota	41	41	100%
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	41	41	100%

¹ Masa jabatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko berakhir dengan sendirinya pada tanggal 02 Maret 2022.

² Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 11 Oktober 2022.

³ Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 03 Oktober 2022.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan	Keterangan
1. REGULER			
a.	Penelaahan Laporan Profil Risiko	Terlaksana	
b.	Penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank	Terlaksana	
c.	Menyampaikan reviu dan masukan kepada Dewan Komisaris terkait <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>	Terlaksana	
d.	Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	Terlaksana	

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan	Keterangan
e.	Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	Terlaksana	
f.	Penelaahan Penginian <i>Recovery Plan</i>	Terlaksana	
g.	Penelaahan Penyusunan <i>Resolution Plan</i> Tahun 2023-2024	Terlaksana	
h.	Melakukan kajian ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).	Terlaksana	
i.	Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank (<i>Self Assessment GCG</i>)	Terlaksana	
j.	Laporan Komite Pemantau Risiko	Terlaksana	
2. NON REGULER			
a.	Bidang Perkreditan		
	• Evaluasi SOP Perkreditan	Terlaksana	
	• Evaluasi LAR dan NPL	Terlaksana	
	• Evaluasi Hasil Restrukturisasi Covid-19 dan non-Covid-19	Terlaksana	
	• Evaluasi dan analisa usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	Terlaksana	
b.	<i>Strategic Initiative & Regulasi Baru</i>		
	• <i>Review project IT, Cyber & Digital Framework</i>	Terlaksana	
	• <i>Review regulasi baru terkait manajemen risiko</i>	Terlaksana	
c.	Rekomendasi kepada Dewan Komisaris pemberian persetujuan kebijakan umum dan khusus:		
	• Kebijakan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal	Dialihkan	Pelaksanaan reviu dan rekomendasi dialihkan kepada Komite Audit
	• Kebijakan terkait Manajemen Risiko	Terlaksana	
	• Kebijakan terkait APU-PPT	Terlaksana	
	• Kebijakan Kerja Sama Mitra	Terlaksana	
3. PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI KOMITE			
	Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Terlaksana	
4. PEMBAHASAN TOP RISK PADA RISK TAKING UNIT			
	Meminta penjelasan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko	Terlaksana	
5. TUGAS KHUSUS & LAIN-LAIN			
a.	Rapat Komite Pemantau Risiko	Terlaksana	
b.	Tugas lain dari Ketua Komite/Dewan Komisaris	Terlaksana	

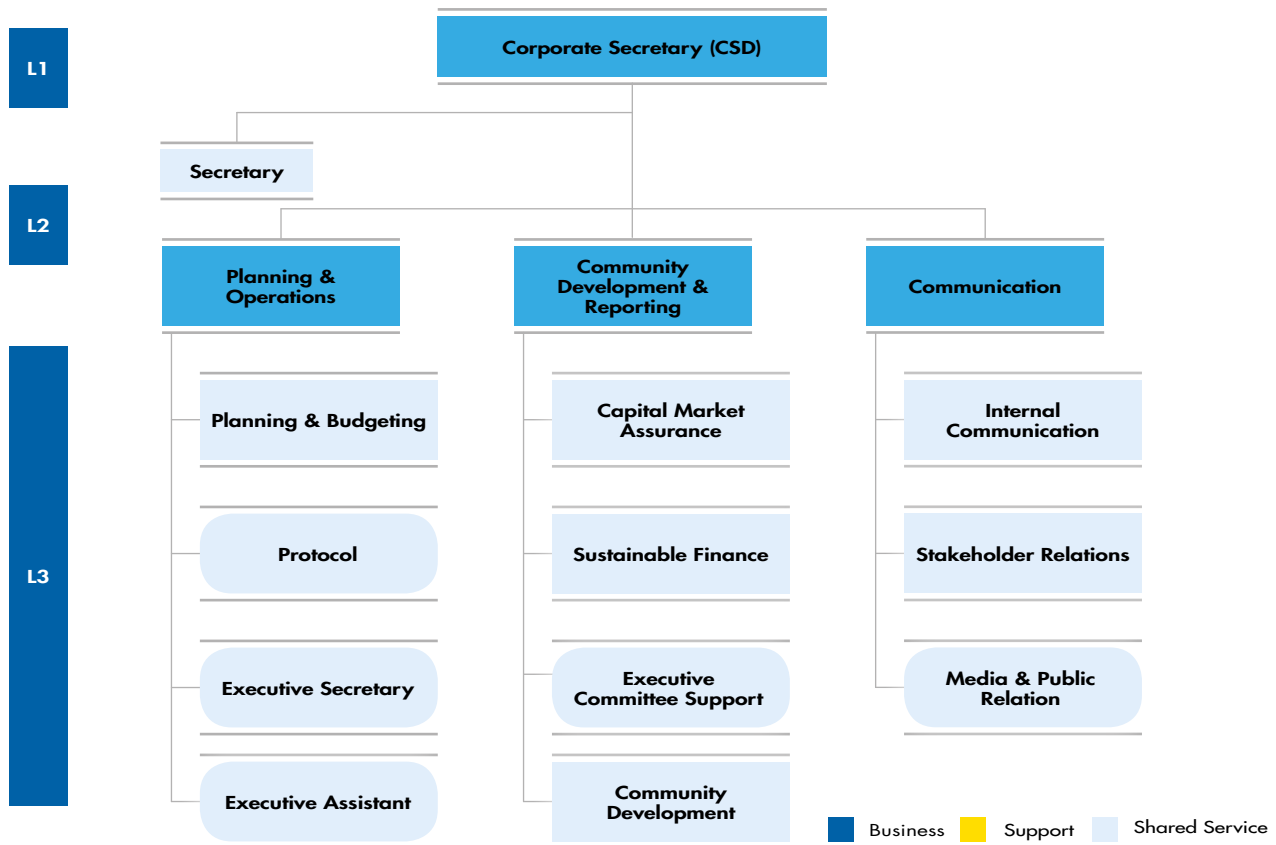
Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung Direksi dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan terkait persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi tanggung jawab Perseroan terkait penyampaian informasi yang material dan relevan kepada *stakeholders*. Selain itu, Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengorganisasikan, mengoordinasikan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, RUPS, dan kegiatan lainnya dengan *stakeholders*.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Organ Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Corporate Secretary Division (CSD) yang dipimpin oleh Corporate Secretary Division Head (dhi. Sekretaris Perusahaan) dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Senior Manager/Assistant Vice President yang bertanggung jawab atas masing-masing unit kerja diantaranya Planning & Operations, Reporting & Community Development, dan Communication.



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Perusahaan Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik.
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Profil Sekretaris Perusahaan

Periode 1 Januari 2022 – 10 Juli 2022



ARI KURNIAMAN

Sekretaris Perusahaan

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Bandung



Usia

Tasikmalaya, 15 Januari 1972/Usia 50 tahun per Desember 2022



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Padjadjaran (1996)



Pengalaman Kerja

Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1997 dan pernah menjabat sebagai:

- Kepala Cabang Gresik (2012)
- Kepala Cabang Denpasar (2013)
- Legal Litigation & Claim Department Head (2014 – 2017)
- Deputy Service Manager KC Bandung (2017 – 2019)
- Kepala Cabang Jakarta Cawang (2019 – 2020)



Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Nomor 261/DIR/2020 tanggal 12 Maret 2020



Sertifikasi

- Kompetensi Manajemen Risiko Level 3 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko – PT Raharja Duta Solusindo

Periode 11 Juli 2022 – 31 Desember 2022



ACHMAD CHAERUL

Sekretaris Perusahaan

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Bekasi



Usia

Palembang, 28 Juni 1970/Usia 52 tahun per Desember 2022



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Sriwijaya (1995)
- Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2022)



Pengalaman Kerja

Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1997 dan pernah menjabat sebagai:

- Kepala Cabang Pekanbaru (2015)
- Kepala Cabang Makassar (2016)
- Regional Office V Head (2017)
- Corporate Secretary Division Head (2018)
- Service Quality and Distribution Division Head (2020)



Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Nomor 711/DIR/2022 tanggal 11 Juli 2022



Sertifikasi

- Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko – PT Raharja Duta Solusindo

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Achmad Chaerul	Corporate Secretary Division	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	Virtual Classroom/2022	PT. Raharja Duta Solusindo
		Executive Session BOD-1	Jakarta/2022	SHL Indonesia
		Pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri	Jakarta/2022	Bank BTN

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyampaian Perkembangan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris salah satunya dengan penyampaian informasi adanya peraturan dan ketentuan terbaru di bidang pasar modal yang harus dijalankan oleh Perseroan. Beberapa peraturan baru yang disosialisasikan atau dilakukan pembaruan oleh Sekretaris Perusahaan adalah:
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-6/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-7/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
2. Program komunikasi kepada komunitas pasar modal bersama dengan *Investor Relations*. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. *Direct*, melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dan *Public Expose*.
 - b. *Indirect*, melalui *Annual Report*, Publikasi Laporan Keuangan dan *Press Release*.
3. Keterbukaan Informasi Kepada Publik
Pemenuhan kewajiban keterbukaan Informasi sebagaimana yang diatur antara lain dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik,

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik,
- e. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selama tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK/Bursa sebanyak 16 (enam belas) laporan. Semua laporan tersebut disampaikan dalam tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat akhir kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Selain laporan keterbukaan informasi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga mengoordinasi penyampaian penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permintaan dari Bursa mengenai pemberitaan yang terkait dengan Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perusahaan Tercatat wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya. Selama tahun 2022, Perseroan menerima 4 (empat) kali permintaan penjelasan dari Bursa.

4. Peningkatan Akses Informasi kepada Publik
Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi dengan *stakeholders* menggunakan kebijakan satu pintu (*one door policy*) yang dibantu koordinasinya oleh Sekretaris Perusahaan. Perseroan juga meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik dengan menyediakan layanan Keterbukaan Informasi Publik pada situs web Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain publikasi melalui situs web Perseroan, publik juga dapat mengakses informasi mengenai Perseroan melalui media massa, serta media sosial yang terdiri dari *facebook*, *twitter*, *youtube* dan *instagram* yang dikelola bersama dengan Marketing Communication Division.

5. Hubungan dengan Media dan Akses Informasi
Sekretaris Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (surat kabar, majalah) dan media *online*. Selama tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan *press release* dan berita foto yang memiliki nilai berita bagi Perseroan, yaitu mengenai perkembangan kinerja, bisnis, CSR dan operasional Perseroan kurang lebih sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) pemberitaan yang terdiri dari 105 (seratus lima) *press release* dan 117 (seratus tujuh belas) berita foto.
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Sekretaris Perusahaan mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selama tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan 2 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022 dan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2022. Seluruh tahapan RUPS telah dijalankan sesuai dengan POJK tersebut di atas dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk di dalamnya pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS serta penyampaian risalah dan berita acara RUPS.
7. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Menerima usulan agenda dan materi yang akan diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dari Divisi/Desk/unit kerja lainnya.
 - b. Memastikan penyampaian materi, kuorum dan pengambilan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Membuat risalah yang ditandatangani oleh Direksi yang hadir terhadap Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang diinisiasi oleh Direksi.
 - d. Mengadministrasikan risalah Rapat Direksi. Menyampaikan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris kepada Divisi/Desk/unit kerja terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Selama tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah mengoordinasikan penyelenggaraan rapat sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kali Rapat Direksi dan 6 (enam) kali

Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi serta 6 (enam) kali rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris.

8. Penyelenggaraan Program Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Sentot A. Sentausa, Bapak Herry Trisaputra Zuna dan Bapak Himawan Arief Sugoto.

Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal merupakan *strategic business partner* bagi manajemen dalam mengoptimalkan implementasi GCG Perseroan, manajemen (pengelolaan) risiko dan memberikan *assurance* serta masukan secara independen dan objektif terkait pengendalian internal Perseroan. Fungsi audit internal dijalankan oleh Internal Audit Division (IAD) melalui proses evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management*, *control* dan *governance processes*. Fungsi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

Kedudukan Fungsi Audit Intern Dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Internal Audit Division (IAD) sebagai pelaksana fungsi audit internal berada di bawah supervisi Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 52/SK/DIR/TPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah serta diperbaharui melalui Risalah Steering Committee Direksi Nomor 16 tanggal 7 Juni 2022. Selain itu, kedudukan fungsi audit internal juga dijelaskan dalam Piagam Audit Intern yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2019 dan Direksi No. 01/DIR-BTN/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pada Bab II Pasal 3 Struktur dan Kedudukan IAD yaitu:

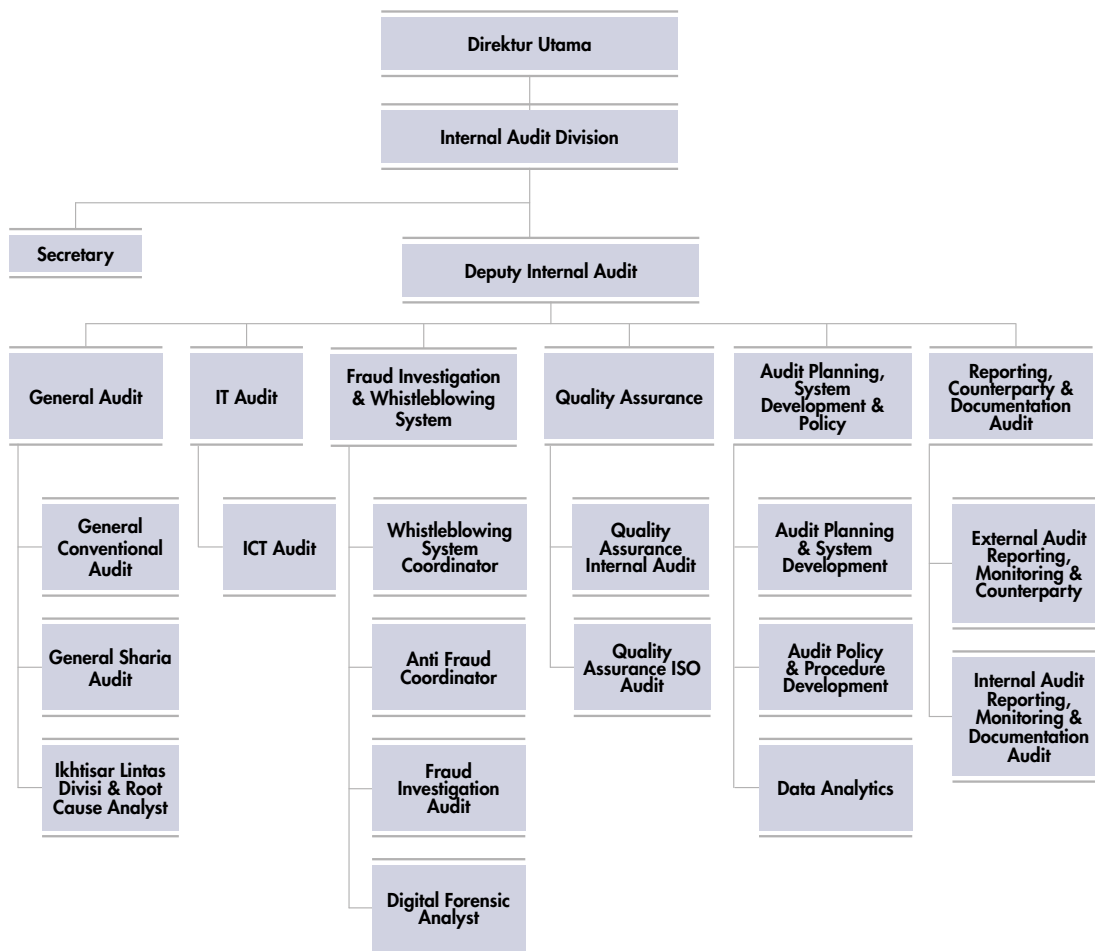
1. Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa Internal Audit Division (IAD) merupakan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi Bank yang kedudukannya langsung di bawah Direktur Utama.
2. Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Pasal 3 Ayat (3) disebutkan bahwa Kepala IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit Division

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan atau pemberhentian Kepala Internal Audit Division adalah Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Secara garis besar, proses pengangkatan atau pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Direktur melakukan *fit and proper test* kepada calon Kepala Internal Audit Division.
2. Direksi Utama menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division.
4. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan pengangkatan/pemberhentian kepala Internal Audit Division kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.

Struktur Organisasi Internal Audit Division



Profil Kepala Audit Internal



HENDRATNO TRI WIBOWO

Internal Audit Division Head

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia



Domisili

Tangerang Selatan



Usia

Surakarta, 24 Mei 1974 / 48 Tahun per Desember 2022



Riwayat Pendidikan

- Diploma (D3) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1995)
- Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Indonesia (1998)
- Magister (S2) Akuntansi dari The University of Queensland, Australia (2003)



Pengalaman Kerja

- Auditor/Investigator Badan Pemeriksa Keuangan RI (1995 – 2010)
- Fraud Risk Management Division Head, Bank Permata Tbk (2011 – 2020)
- Post Mortem & Forensic Audit (Special Audit) Division Head, Bank Exim Indonesia (2020 – 2021)
- Internal Audit Division Head, Bank BTN (2021 – saat ini)



Dasar Hukum Pengangkatan

- Surat Keputusan Direksi No.642/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- Surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara No.60/KOM/BTN/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Persetujuan Usulan Pengangkatan Kepala Internal Audit Division/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)



Sertifikasi

Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Internal Audit Division telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan *Internal Audit Charter* (Piagam Audit) yang telah disusun sejak tahun 2002 kemudian dimutakhirkan dan ditetapkan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2019 dan Direksi Nomor 01/DIR-BTN/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. *Internal Audit Charter* juga menjadi dasar keberadaan, pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab pengawasan bagi IAD. Oleh karena itu, *Internal Audit Charter* disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya untuk mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal. Isi dari *Internal Audit Charter* adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi
2. Struktur dan Kedudukan
3. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang
4. Independensi serta Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Internal
5. Kode Etik dan Persyaratan Standar Profesional Auditor Internal
6. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern Dalam Pelaksanaan Audit Intern

7. Hubungan Satuan Kerja Audit Intern dengan Auditor Ekstern Ahli Hukum
8. Lain-lain

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit Division membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern Perseroan dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan Perseroan dalam kerangka penerapan tata kelola Perseroan yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit.
6. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
7. Melakukan pemeriksaan, penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
8. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
10. Bekerja sama dengan Komite Audit.
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
12. Melakukan pemeriksaan (audit) khusus apabila diperlukan.

Kewenangan Internal Audit

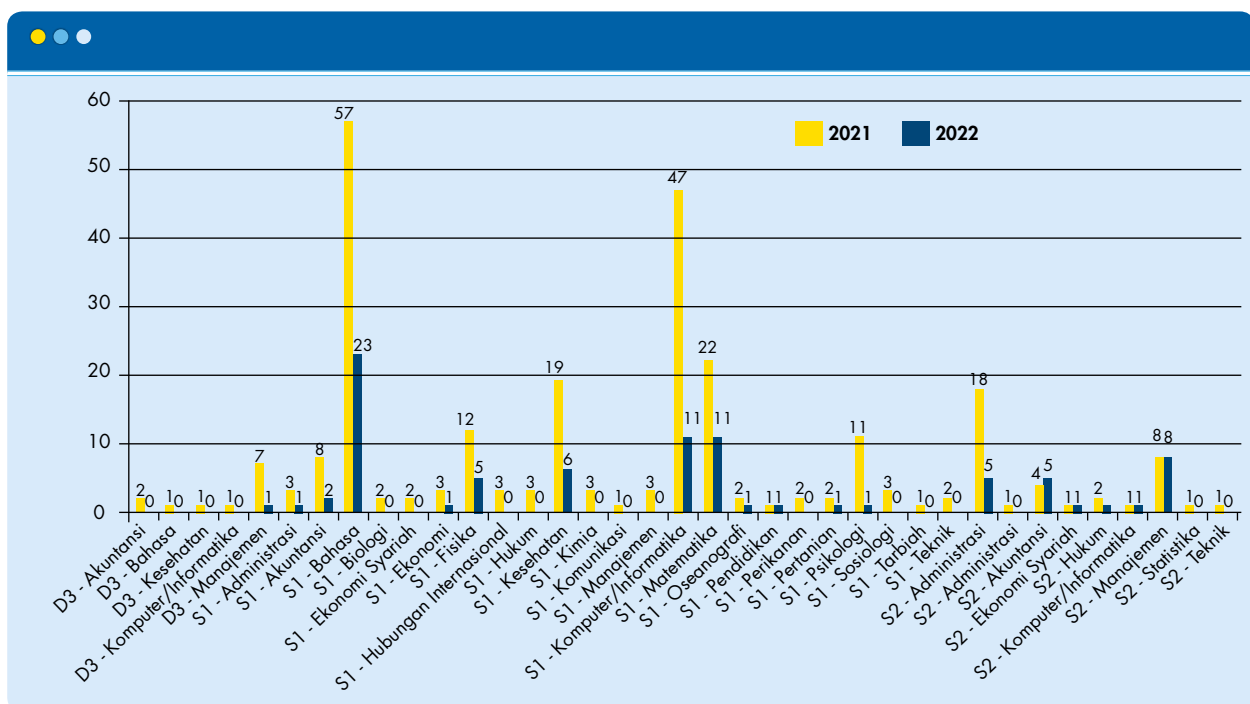
Untuk mewujudkan visi dan supaya dapat melaksanakan misi, fungsi dan tugas audit, maka IAD mempunyai wewenang:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Komposisi Personil Internal Audit Division

Perseroan sangat memperhatikan kecukupan komposisi personil Internal Audit Division dalam menunjang pelaksanaan tugasnya baik dari segi jumlah kualifikasi jabatan hingga kompetensi. Personil Internal Audit Division posisi Desember 2022 berjumlah **86 (delapan puluh enam)** orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Kepala Divisi, 49 (empat puluh sembilan) orang pada General Audit Department, 8 (delapan) orang pada IT Audit Department, 8 (delapan) orang pada Fraud Investigation & Whistleblowing System Department, 6 (enam) orang pada Quality Assurance Department, 5 (lima) orang pada Audit Planning, System Development & Policy Department, dan 7 (tujuh) orang pada Reporting, Counterparty & Documentation Audit Department.

Berikut komposisi personil Internal Audit Division berdasarkan pendidikan sebagai berikut:



Program Peningkatan Kompetensi Internal Audit Division

Setiap personil IAD difasilitasi dan didorong untuk mengembangkan kompetensinya dalam menunjang pelaksanaan fungsi audit internal. Pengembangan kompetensi dilakukan diantaranya dengan cara *knowledge sharing* di antara Kepala IAD, Direksi, dan para auditor terhadap Kebijakan dan Prosedur Internal, program sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, *workshop* serta seminar. Selama tahun 2022 pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dalam bentuk pelatihan baik internal maupun eksternal antara lain sebagai berikut:

Tabel Pengembangan Kompetensi Personil Internal Audit Division

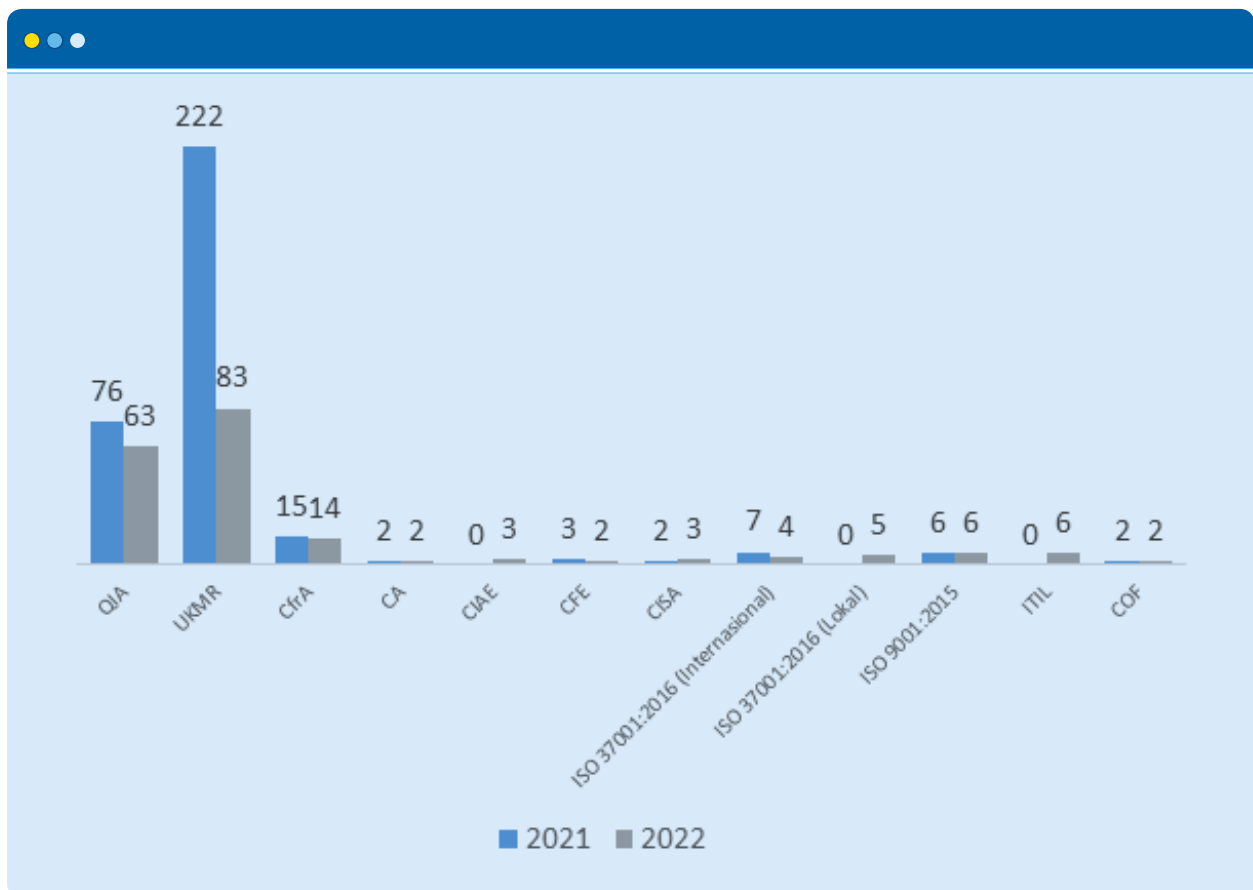
No	Pendidikan	Lembaga	Waktu	Jumlah Peserta
Sertifikasi				
1	Qualified Internal Audit Tingkat Dasar	Yayasan Pendidikan Audit Internal (YPIA)	Batch 1 : 3 - 15 Februari 2022 Batch 2 : 7 - 19 Februari 2022 5 - 17 Desember 2022	18 23 6
2	Qualified Internal Audit Tingkat Manajerial	Yayasan Pendidikan Audit Internal (YPIA)	3 - 11 Februari 2022	9
3	Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 1	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Batch 1 : 7, 8, 12 Maret 2022 Batch 2 : 10 - 12 Maret 2022 Batch 3 : 14, 15, 19 Maret 2022 Batch 4 : 17 - 19 Maret 2022 Batch 5 : 4, 5, 11 April 2022 Batch 6 : 7, 8, 11 April 2022 Batch 7 : 11, 12, 14 April 2022 Batch 8 : 18, 19, 20 April 2022 Batch 9 : 12, 13, 19 Mei 2022 Batch 14 : 6, 7, 11 Juli 2022	9 7 7 7 2 2 2 1 1 2
4	Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Batch 1 : 10 - 12 Maret 2022 Batch 3 : 4, 5, 12 April 2022 Batch 4 : 7, 8, 12 April 2022 Batch 5 : 18, 19, 20 April 2022 Batch 6 : 12, 13, 19 Mei 2022 Batch 7 : 17 - 19 Mei 2022 Batch 8 : 6, 7, 11 Juni 2022 Batch 9 : 9, 10, 11 Juni 2022 Batch 12 : 5, 6, 11 Agustus 2022	2 8 6 6 1 3 5 6 1
5	Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Batch 1 : 13, 14, 17 Mei 2022 Batch 2 : 3, 4, 7 Juni 2022	1 2
6	Refreshment UKMR Level 2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Batch 4 : 9 April 2022 Batch 5 : 16 April 2022	4 3
7	Refreshment UKMR Level 3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Batch 1 : 12 Maret 2022 Batch 2 : 9 April 2022 Batch 3 : 16 April 2022	2 3 2
8	Program Persiapan Certified Internal Auditor (CIA)	The Institute of Internal Auditors (IIA)	7 - 23 Februari 2022	3
9	Program Persiapan Certified Internal Auditor (CIA)	The Institute of Internal Auditors (IIA)	05 - 08 Desember 2022 (Part 1) 12 - 14 Desember 2022 (Part 2) 19 - 21 Desember 2022 (Part 3)	2
10	Pelatihan Program Sertifikasi Certified Internal Audit Executive (CIAE)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Batch 4: Online : 5 - 16 September 2022 Onsite : 19 - 22 September 2022 Ujian : 12 - 13 Oktober 2022 Batch 5: Online : 10 - 21 Oktober 2022 Onsite : 24 - 27 Oktober 2022 Ujian : 8 - 9 November 2022	2 2
11	Training Anti Bribery Management System	The British Standards Institution (BSI)	18 - 22 April 2022	5

No	Pendidikan	Lembaga	Waktu	Jumlah Peserta
Pelatihan dan Workshop				
1	Pendidikan <i>Refreshment</i> Proses Bisnis	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	05 - 17 Januari 2022	269
2	Pendidikan COBIT 2019 dan ITIL <i>Foundation</i>	EnergyX	24 - 31 Januari 2022	6
3	Pendidikan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	16 - 17 Februari 2022	3
4	Webinar Perbanas Bank Indonesia	Perbanas Bank Indonesia	18 Februari 2022	1
5	<i>Workshop Standar Audit Internal & Kode Etik Profesi</i>	Yayasan Pendidikan Audit Internal (YPIA)	7 - 8 Maret 2022	1
6	Pendidikan Kontrol untuk Personil <i>Branch Control IAD</i>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1 - 14 Maret 2022	178
7	<i>Workshop</i> Evaluasi dan Rencana Perbaikan Atas Implementasi Penerapan Tata Kelola	The Indonesia Institute For Conforta Governance (IICG)	29 - 30 Maret 2022	3
8	Sosialisasi Ulang dan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat API	LSP KPK	13 Mei 2022	3
9	<i>Workshop</i> Nasional terkait Pencegahan & Pendeteksian <i>Fraud</i>	Lembaga Pusat Studi Informasi (LPSI)	31 Mei 2022	2
10	<i>Webinar Series Compassionate Leadership Through Service</i>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2 Juni 2022	1
11	Pelatihan Penguatan <i>Operation Risk Control</i> kepada Regional Control dan Branch Control pada Kanwil 1	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18 Juni 2022	35
12	Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) KPK	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10 Juni 2022	30
13	<i>Executive Session</i> BOD	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18 Juni 2022	1
14	<i>Assessment</i> Sertifikasi Ulang untuk Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikasi API	LSP KPK	22 - 23 Juni 2022	3
15	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA)	Yayasan Pendidikan Audit Internal (YPIA)	29 - 30 Juni 2022	5
16	Webinar Penerapan Program APU PPT Tahun 2022	PPATK	13 Juli 2022 17 September 2022 12 Oktober 2022	2 2 2
17	<i>Training Internal Audit Understanding for Auditor, Lawyer & Compliance Officer</i>	Lembaga Berantas Korupsi Indonesia (LBKI)	27 - 28 Juli 2022	1
18	<i>Workshop & Refreshment</i> Penyelesaian Kredit Bermasalah	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Batch 1 : 15 - 16 Agustus 2022 Batch 2 : 22 - 23 Agustus 2022	1 1
19	Program Pelatihan Penyuluh Antikorupsi KPK Tahun 2022	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	03, 04, 06 Oktober 2022	1
20	<i>Effective Business Slide Presentation with Power Point</i>	PT SGD Indonesia	03 - 04 Oktober 2022	1
21	<i>Workshop</i> Pedoman Audit Pemeriksaan Kualitas Data SCV dan Keandalan Sistem	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	04 Oktober 2022	2
22	Pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	PT Surveyor Indonesia	Batch 1: 11 - 12 Oktober 2022 Batch 2: 17 - 18 Oktober 2022	1 1
23	<i>National Anti Fraud Conference (NAFC)</i> Tahun 2022	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)	03 - 04 November 2022	3
24	<i>Workshop</i> Perbaikan Proses Bisnis Data Pelaporan Regulasi	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22 - 23 November 2022	2
25	Webinar Kearsipan	PT Swadharma Sentra Solusi	24 November 2022	1

No	Pendidikan	Lembaga	Waktu	Jumlah Peserta
26	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2022	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	30 November - 01 Desember 2022	2
27	Kegiatan <i>Sharing Session</i> / Pelatihan Internal untuk Personil IT Auditor IAD	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	01 - 02 Desember 2022	8
28	<i>Masterclass GRC Foundation</i>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	08 Desember 2022	1
29	Program Pembekalan Uji Kompetensi Audit Intern Bank	Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	15 - 16 Desember 2022	1
30	Webinar HAKORDIA 2022: Proaktif dan Kolaboratif dalam Mencegah Korupsi di Indonesia	OJK Institute	20 Desember 2022	1

Sertifikasi Profesi Personil Internal Audit Division

Secara keseluruhan jumlah sertifikasi personil Internal Audit Division posisi Desember 2022 sebagai berikut:



Keterangan:

QIA (Qualified Internal Auditor), UKMR (Ujian Kompetensi Manajemen Risiko), CfrA (Certified Forensic Auditor), CA (Certified Accountant), CIAE (Certified Internal Audit Executive), CFE (Certified Fraud Examiner), CISA (Certified Information System Auditor), ISO SMAP 37001:2016 (Internasional), ISO SMAP 37001:2016 (Lokal), ISO 9001:2015, ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, COF (Certified Oxygen Forensic).

Partisipasi Dalam Penghimpunan Profesi Audit Internal

Dalam rangka memperluas wawasan dan pengembangan profesional Auditor Intern, Organisasi Internal Audit Bank telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya pada berbagai organisasi profesi internal audit, di antaranya sebagai anggota maupun keikutsertaan dalam kegiatan perhimpunan profesi audit intern sebagai berikut:

- a. Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) – BUMN/BUMD
Menyertakan anggota IAD sebagai peserta penyelenggara dalam *event-event* yang di inisiasi oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern.
 - b. Organisasi Ikatan Auditor Intern Bank Indonesia (IAIB)
Dalam rangka pengembangan dan peningkatan wawasan, maka para Pimpinan dan Auditor IAD selalu ikut serta dalam forum-forum pertemuan diskusi *benchmarking* dan *workshop* perkembangan *best practice* yang diselenggarakan oleh forum IAIB. Materi *workshop* dan *benchmarking* dalam forum IAIB ini meliputi materi untuk level manajerial pengelolaan fungsi Audit Internal bagi para pimpinan *Chief Auditor Executive* (CAE) IAD maupun untuk level Auditor berupa teknik audit, metodologi audit dan audit sistem dan Audit ICT diselenggarakan melalui forum diskusi maupun *workshop* dengan Auditor Bank-bank lain yang tergabung dalam perkumpulan *Benchmarking* Internal Audit yang diadakan melalui inisiatif IAIB ini.
 - c. The *Institute of Internal Auditor* (IIA) dan *Association Certified Fraud Examiner* (ACFE) – Indonesia Chapter
Selanjutnya anggota internal audit juga didorong untuk menjadi *membership of The Institute of Internal Auditor (IIA)* dan *Association Certified Fraud Examiner (ACFE)* -Indonesia Chapter.
- c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang di *review*.
3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)
 - a. Bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan perusahaan.
 4. Kompetensi (*Competency*)
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
 - b. Melaksanakan audit sesuai dengan Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan/atau standar audit lain yang berlaku.
 - c. Meningkatkan kompetensi secara terus-menerus.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2022

Pada tahun 2022, Internal Audit Division (IAD) telah menyusun rencana atau program kerja audit dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Rencana program Kerja tersebut meliputi sifat dan cakupan audit, penilaian risiko proses bisnis (*risk assessment*), susunan dan jumlah personil tim audit, standar hari kerja efektif audit, lamanya waktu standar hari audit, kebutuhan jumlah personil dan kualifikasi jabatan personil IAD, kondisi kualifikasi personil IAD, penilaian risiko dan pengembangan personil IAD.

RENCANA KERJA AUDIT INTERNAL

Rencana Kerja Internal Audit Division dijabarkan dalam buku *Annual Audit Plan* dengan periode kerja selama 1 tahun. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk Internal Audit Division (IAD) tahun 2022 telah disampaikan kepada Direktur Utama berdasarkan memo IAD No.18/M/IAD/APSP/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Usulan Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) Tahun 2022 dan telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Di samping itu sesuai regulasi POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Dewan Komisaris No. 18/KOM/BTN/II/2020 tanggal 16 Februari 2022. Rencana kerja audit umum (konvensional dan syariah), audit ICT, audit khusus & investigasi serta pelaksanaan audit ISO 9001:2015 yang terjadwal sebagai berikut:

Kode Etik Auditor

Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepatutan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, sebagai berikut:

1. Integritas (*Integrity*)
 - a. Melakukan tugasnya dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab.
 - b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan profesinya.
 - c. Tidak dengan sengaja/sadar terlibat dalam aktivitas yang dilarang/tidak sah, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas Internal Audit dan profesi audit intern.
 - d. Mendukung tujuan perusahaan dan Internal Audit.
2. Objektivitas (*Objectivity*)
 - a. Tidak terlibat dalam kegiatan atau memiliki hubungan yang akan menimbulkan benturan kepentingan.
 - b. Tidak menerima apapun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap *professional judgement*.

Tabel Program Kerja Audit Internal

Objek Audit	Jumlah		Perubahan		Keterangan
	2021	2022	+/-	%	
A. Audit Umum	118	91	-27	-22,88%	
B. Audit ICT	17	16	-1	-5,88%	
C. Audit Khusus & Investigasi	0	0	0	0,00%	Tidak terdapat perencanaan terjadwal untuk pelaksanaan audit khusus/investigasi untuk tahun 2022, akan mengikuti penugasan dari stakeholders dan whistleblowing system.
D. Audit Mutu Internal / Audit ISO	23	23	0	0,00%	
Jumlah Objek Audit	158	130	-28	-21,54%	

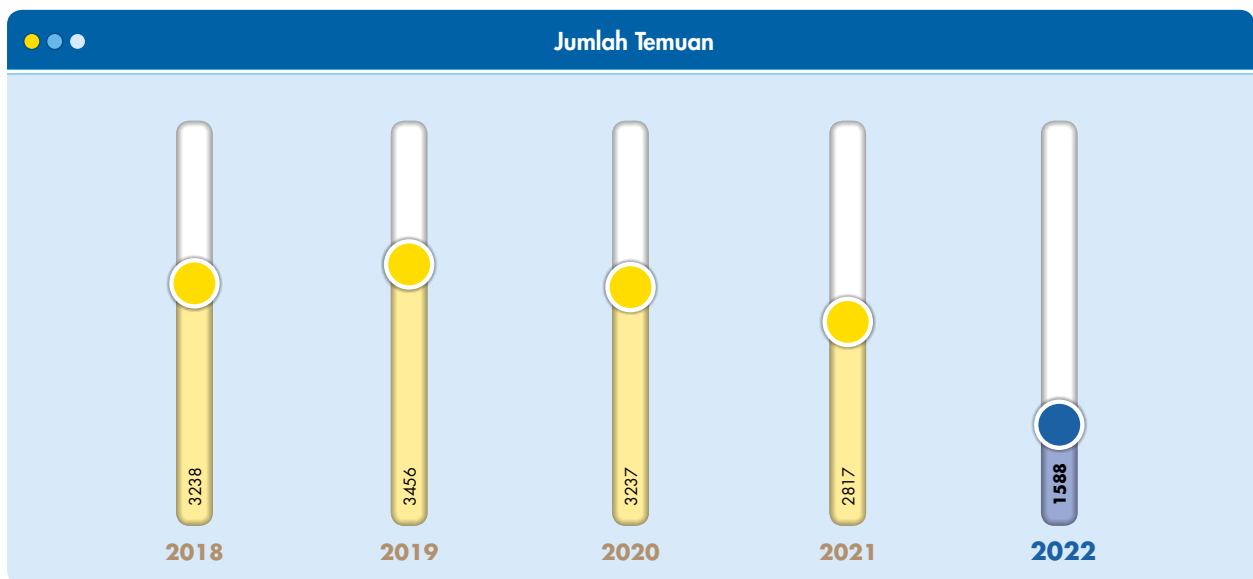
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT DIVISION

Internal Audit Division melaksanakan kegiatan audit dengan objek audit mencakup Audit *General* (Konvensional dan Syariah), Audit ICT, Audit Khusus & Investigasi, Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO, dan Audit Branch Control selama periode Januari - Desember 2022 dengan rincian objek audit sebagai berikut:

Tabel Realisasi Program Kerja Audit Internal

No	Keterangan	Target	Realisasi	% Pencapaian
1.	Audit Umum (General Audit)	91	91	100,00%
2.	Audit ICT (<i>Information & Communication Technology Audit</i>)	16	19	118,75%
3.	Audit Khusus & Investigasi	0	18	100,00%
4.	Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO	23	33	143,48%
TOTAL		130	161	123,85%

Kegiatan audit selama periode Januari sampai dengan Desember 2022 menghasilkan temuan audit sebanyak 1.588 temuan sebagaimana disajikan pada grafik temuan audit selama 5 (lima) tahun terakhir berikut:



MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Tindak lanjut atas temuan audit dilaksanakan oleh *auditee*. Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan kepada Kepala IAD dan kemudian dievaluasi untuk melihat apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan “selesai ditindaklanjuti” dan diinformasikan kepada *auditee* dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus “*pending item*” diminta untuk diselesaikan oleh *auditee* dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala IAD kepada Direksi. Sepanjang tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut temuan audit baik dari hasil audit tahun 2020, 2021, dan 2022 dengan *resume* tindak lanjut audit disajikan pada tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Tanggal Jatuh Tempo Penyelesaian

No	Hasil Audit	Jumlah Temuan	Selesai		Belum Selesai		% Penyelesaian Temuan Jatuh Tempo
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=4/(4+7)
I Internal Audit Division							
I.1 Tahun 2022							
	General Audit KC	908	903	99,45%	5	0	100,00%
	General Audit KC Syariah	217	216	99,54%	0	1	99,54%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	329	189	57,45%	138	2	98,95%
	Audit ICT	134	96	71,64%	28	10	90,57%
	Sub Total	1588	1404	88,41%	171	13	99,08%
I.2 Tahun 2021							
	General Audit KC	1674	1674	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit KC Syariah	452	451	99,78%	0	1	99,78%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	266	266	100,00%	0	0	100,00%
	Audit ICT	425	424	99,76%	0	1	99,76%
	Sub Total	2817	2815	99,93%	0	2	99,93%
I.3 Tahun 2020							
	Audit ICT	432	432	100,00%	0	0	100,00%
	Sub Total	432	432	100,00%	0	0	100,00%
Total Temuan Internal		4837	4651	96,15%	171	15	99,68%
II Temuan Eksternal							
II.1 Otoritas Jasa Keuangan							
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2019	74	74	100,00%	0	0	100,00%
	KHP IT Pemeriksaan OJK Tahun 2021	148	148	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2021	147	147	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2022	203	121	59,61%	81	1	99,18%
	Total Temuan OJK	572	490	85,66%	81	1	99,80%
II.2 Bank Indonesia							
	KHP IT dan Non IT Pemeriksaan BI Tahun 2021	40	40	100,00%	0	0	100,00%
	Total Temuan BI	40	40	100,00%	0	0	100,00%
II.3 Badan Pemeriksa Keuangan RI							
	Pengelolaan SBK dan SBUM 2020	20	14	70,00%	0	6	70,00%
	Pengelolaan SBK dan SBUM 2021	25	1	4,00%	24	0	100,00%
	Total Temuan BPK RI	45	15	33,33%	24	6	71,43%
II.4 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI							
	Penempatan Dana PEN 2022	3	3	100,00%	0	0	100,00%

No	Hasil Audit	Jumlah Temuan	Selesai		Belum Selesai		% Penyelesaian Temuan Jatuh Tempo
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
	Reviu Bansos PKH, Program Sembako dan BLT Tahun 2022	3	3	100,00%	0	0	100,00%
	Reviu P3DN Dalam Rangka BBI Tahun 2022	16	16	100,00%	0	0	100,00%
	Total Temuan BPKP RI	22	22	100,00%	0	0	100,00%
II.5	Kantor Akuntan Publik						
	Management Letter atas Lapkeu posisi 31 Desember 2021	46	46	100,00%	0	0	100,00%
	Management Letter atas Lapkeu Interim 30 Juni 2022	26	12	46,15%	14	0	100,00%
	Total Temuan KAP	72	58	80,56%	14	0	100,00%
	Total Temuan Eksternal	751	625	83,22%	119	7	98,89%
	Total Temuan Audit Internal dan Eksternal	5588	5276	94,42%	290	22	99,58%

PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL AUDIT DIVISION DENGAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT

Mengacu pada *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Intern), Internal Audit Division secara rutin melakukan rapat dengan Direksi serta menghadiri undangan rapat dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dalam rangka pelaporan atas pelaksanaan tugas Internal Audit Division. Sepanjang tahun 2022, Internal Audit Division telah melakukan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit sebagai berikut:

Pelaksanaan Rapat Internal Audit Division dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	29 Agustus 2022	Arahan Direksi atas Surat Dewan Komisaris No.68/KOM/BTN/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 perihal Penelaahan Terhadap Laporan Kepatuhan Periode Semester I Tahun 2022
2	13 September 2022	Pra BOD <i>Strategic Meeting</i> (Division & Regional Office Head Workshop)
3	25 September 2022	Pembahasan Sistem <i>Monitoring & Evaluation</i> Debitur KPR Bersubsidi
4	27 September 2022	Tahap Observasi CGPI 2021
5	10 Oktober 2022	Pra Komite Kebijakan Perkreditan (Pra KKP)
6	20 Oktober 2022	Pra Komite Kebijakan Perkreditan (Pra KKP)
7	25 Oktober 2022	<i>Kick off Meeting Project Job Evaluation & Grading Structure</i>
8	10 November 2022	<i>Kick off Go Live Wholesale Transaction Division</i>
9	25 November 2022	Pembahasan Target Bisnis pada Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023-2025 Bersama OJK
10	01 Desember 2022	Pembahasan <i>draft</i> Kebijakan Umum tentang Sistem Pengendalian Intern
11	02 Desember 2022	Pembahasan <i>draft</i> Kebijakan Umum tentang Sistem Pengendalian Intern
12	12 Desember 2022	Pembahasan <i>draft</i> Kebijakan Umum tentang Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan Rapat Internal Audit Division dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit

No	Tanggal	Agenda
1	24 Januari 2022	<i>Annual Audit Plan</i> Tahun 2022 dan Perkembangan Audit oleh KAP
2	07 Februari 2022	Pembahasan Laporan Kegiatan IAD dan Laporan WBS Triwulan IV 2021
3	21 Maret 2022	Usulan Penambahan Objek Audit Perusahaan Terafiliasi, Putusan Sanksi atas Hasil Audit Khusus dan <i>Update Fraud</i> Kantor Cabang
4	04 April 2022	<i>Issue</i> Akurasi Data Restrukturisasi Covid-19 dan Hasil Audit Restrukturisasi Covid-19
5	25 April 2022	Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal

No	Tanggal	Agenda
6	06 Juni 2022	Root Cause Analysis, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut atas Temuan Berulang Internal dan Eksternal
7	04 Juli 2022	Efektivitas <i>First and Second Line of Defense</i> pada Kantor Cabang sesuai hasil Audit Intern, Peran Branch Control, dan Rencana Perubahan Struktur Organisasi terkait Branch Control
8	08 Agustus 2022	Realisasi Pelaksanaan Audit, Pokok temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut sampai dengan Semester I 2022
9	05 September 2022	Mekanisme Pemberian Sanksi Pegawai
10	05 September 2022	Proses Bisnis Kredit Komersial dan Hasil Audit CBC
11	05 Oktober 2022	Pembahasan <i>draft</i> Kebijakan Umum tentang Sistem Pengendalian Intern
12	10 Oktober 2022	Pembahasan Hasil Audit Tematik <i>Collection Strategy</i>
13	07 November 2022	Realisasi <i>Audit Plan</i> , <i>Whistleblowing System</i> , dan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Audit sampai dengan Triwulan III 2022
14	21 November 2022	Pembahasan Temuan <i>Management Letter</i> KAP 30 Juni 2022 dan Tindak Lanjut Temuan <i>Management Letter</i> KAP 31 Desember 2021
15	12 Desember 2022	Pembahasan <i>draft</i> Kebijakan Umum tentang Sistem Pengendalian Intern
16	19 Desember 2022	Evaluasi dan <i>Follow Up</i> Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2022 dan Konsep <i>Annual Audit Plan</i> 2023
17	26 Desember 2022	Pembaruan Piagam Audit Internal
18	26 Desember 2022	<i>Annual Audit Plan</i> 2023

ASSURANCE REVIEW TERHADAP AUDIT INTERNAL

Sejak Desember 2017 Internal Audit Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah berhasil melakukan *upgrading* standar mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015. Secara berkala telah dilakukan *surveillance audit* oleh auditor eksternal untuk menilai kepatuhan Internal Audit Division terhadap standar mutu ISO 9001: 2015.

Tabel Pelaksana *Surveillance Audit* untuk Sertifikasi ISO 9001:2015

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT SGS	2020	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
2	PT SGS	2021	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
3	PT SGS	2022	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS

Adapun kaji ulang terhadap atas penerapan fungsi audit intern bank sebagaimana telah diatur dalam POJK 01/POJK.03/2019 dalam menilai kesesuaian fungsi intern dengan regulasi, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas telah dilakukan oleh *assessor* independen minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan uraian sebagai berikut:

Tabel Assessor Independen Terkait Penilaian atas Pelaksanaan Audit

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT PricewaterhouseCoopers (PWC)	2015	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
2	PT Deloitte Touche Tohmatsu (DELOITTE)	2018	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
3	PT KPMG Siddharta Advisory	2020	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit

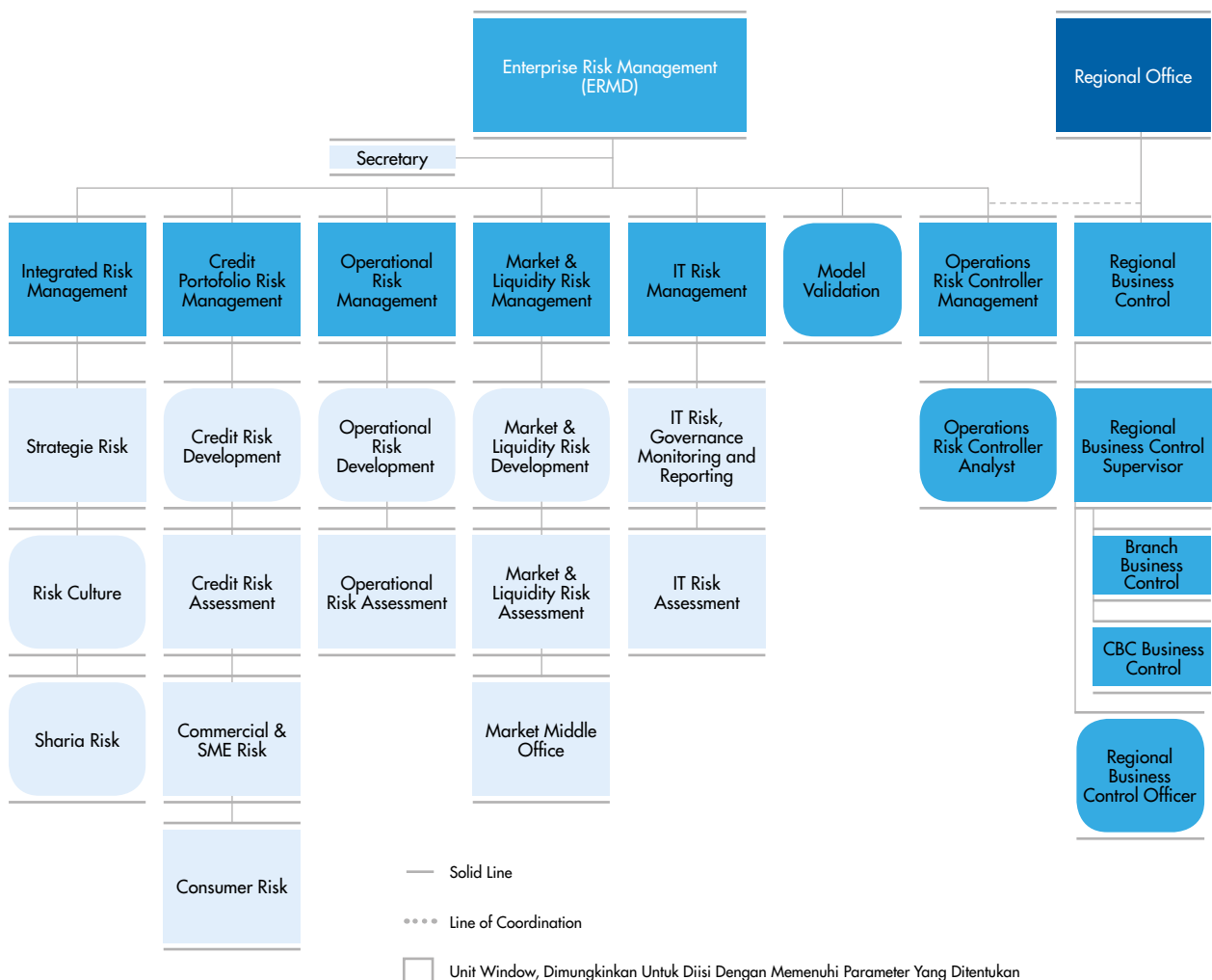
Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank.

Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian internal.

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Division (ERMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management. Struktur Organisasi Enterprise Risk Management Division terdiri dari Market Risk Management Department, Credit Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Operations Risk Controller Management Department, IT Risk Management Department, Integrated Risk Management Department dan Model Validation.



Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sejak tahun 2015, pelaksanaan kegiatan manajemen telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah diupgrade menjadi ISO 9001:2015 pada Bulan Mei tahun 2018. Sertifikasi juga terus dilakukan pemeliharaan setiap tahun dilakukan audit tahunan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2015 dengan tetap menguatkan komitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan, menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku

ISO 9001:2015 sendiri saat ini telah digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia, yang dapat membantu mereka menjalankan operasional yang lebih efisien dan menguntungkan. ISO 9001:2015 menyediakan *framework* untuk performa bisnis yang lebih konsisten, pelayanan yang prima serta perbaikan berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama. ISO 9001:2015 menyediakan banyak keuntungan dan kapabilitas dalam hal skala usaha dalam beberapa tahun belakangan. Standar ini merupakan alat yang sangat membantu dalam pengembangan perusahaan dan membuat organisasi Bank BTN menjadi lebih *resilient*.

Credit Portofolio Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal.

Market Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang antara lain menetapkan rencana yang akan dilakukan apabila Bank mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Operational Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional secara keseluruhan Bank termasuk berkoordinasi dengan Operations Risk Controller Management dan IT Risk Management. Selain itu berfungsi dalam mengelola Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi yang ada di Bank.

Integrated Risk Management Department memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Strategik dan berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan *investor confidence*, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

Model Validation secara umum berfungsi untuk memastikan pengelolaan setiap risiko dikelola tetap sesuai dengan Standar Mutu manajemen ISO 9001:2015, melakukan pemantauan kualitas kinerja secara keseluruhan termasuk dalam memberikan kajian/masukan kepada Divisi terkait. Selain itu unit ini juga berperan melakukan *backtesting* untuk memastikan kelayakan model yang digunakan Bank.

Operations Risk Controller Management Department berfungsi sebagai *control tower* terhadap aktivitas pengawasan dan evaluasi atas penerapan pengendalian internal di Kantor Cabang (KC) dan Commercial Banking Center (CBC) yang dijalankan oleh Branch Business Control (BBC) dan Commercial Banking Center – Business Control (CBC-BC) yang merupakan organ *monoline* Kantor Wilayah.

IT Risk Management Department berfungsi untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko IT, *Digital & Cyber* yang melekat pada solusi teknologi yang digunakan oleh Bank untuk mencapai layanan teknologi yang aman dan handal. Terdapat 7 domain risiko yang menjadi cakupan, yaitu, risiko *information and cyber security*, risiko *IT service delivery, resilience, and continuity*, risiko *IT third party*, risiko *data privacy*, risiko *IT project delivery*, risiko *IT regulatory compliance*, risiko *IT benefit/ Value enablement*. Pengelolaan risiko dilakukan melalui *framework* yang sesuai dengan *best practice* industri dan terintegrasi dengan siklus hidup layanan TI untuk mencapai hasil yang maksimal.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Merancang dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
7. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh unit lain. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/ atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara serta melakukan eskalasi sesuai kebutuhan.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan internal.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada *Regulator*, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank.
12. Dalam penerapan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan atas risiko dan aktivitas kegiatan bisnis Syariah Bank.

Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Division Head sekaligus berperan sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, dijabat oleh Wilson Arafat berdasarkan SK Direksi No. 63/KUASA/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan menjabat sampai dengan sekarang.



WILSON ARAFAT
Enterprise Risk Management Division Head

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili

Jakarta



Usia

Palembang, 21 Maret 1972 / Usia 49 tahun per 31 Desember 2022



Riwayat Pendidikan

Magister Manajemen Pemasaran Universitas Gadjah Mada (2004)



Pengalaman Kerja

- Pelaksana pada Unit Kerja Analisis Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi (1998)
- PJ. Kasi pada Unit Kerja Seksi Kebijakan (2008)
- GCG Implementation & Monitoring Departement Head (2010 – 2011)
- Superintendent Spec Curriculum & Program Development dan Senior Associate Culture Specialist pada Divisi Human Capital (2011 – 2013)
- Corporate Governance Departement Head pada Compliance & Governance Division (2013 – 2016)
- Transformation Management Office Head pada Transformation & Partnership Management Division (2017 – 2018)
- Procurement & Fixed Asset Management Division Head pada Procurement & Fixed Asset Management Division (2019 – 2021)



Dasar Hukum Pengangkatan

SK Direksi No. 63/KUASA/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021



Sertifikasi

- Indonesia Risk Management Outlook 2023 (2022)
- Refreshment Program: Penerapan Basel III Reform Basel IV untuk Perhitungan ATMR pada Risiko Kredit (2022)
- Certification for Credit Risk Management (2022)
- Market Risk & Middle Office Function (2021)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh LSPP (2021),
- Strategi Bisnis Menghadapi Dampak Cvd VC (2020)
- Executive Development Program (2019)
- Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (2018)
- The Positive Leader – DCO Transformation - Hongkong (2017)
- Sertifikat GRC Professional – Arizona (2016)
- 2015 Asean Corporate Conference: Governance Transformation in Asean Performance and Priorities – Phillipines (2015)
- Integrated Governance, Risk Management and Compliance - Australia (2014)
- 8th International Conference on Corporate Governance – Inggris (2010)



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Perseroan telah melaksanakan program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko dan mengikutsertakan seluruh pegawai (sesuai *job specification*) termasuk di ERMD dalam rangka sertifikasi manajemen risiko.

Perseroan secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi manajemen risiko serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah oleh PBI No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 dan bahwa dasar penetapan minimal level sertifikasi UKMR untuk suatu *job title* adalah berapa *level job title* tersebut dari Direksi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku sehingga level minimal sertifikasi untuk *job title* tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Perseroan juga melakukan *in-house training* dan melakukan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan). Selama tahun 2022 pemenuhan sertifikasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Jumlah Pegawai	Belum SMR	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Kesesuaian
1	Tidak Dipersyaratkan SMR	7,298	6,550	501	217	28	2	
2	Mandatory Level 1	1,612	223	924	455	8	2	86.17%
3	Mandatory Level 2	2,324	140	172	1,916	95	1	86.57%
4	Mandatory Level 3	371		2	12	356		96.23%
5	Mandatory Level 4	38				2	35	94.74%
6	Mandatory Level 5	9					9	100.00%
	Total Pegawai	11,652	363	1,599	2,600	489	40	87.32%

Keterangan:

	Pegawai yang diwajibkan sertifikasi namun belum disertifikasi sesuai levelnya
	Pegawai yang diwajibkan sertifikasi dan sudah sesuai dengan levelnya
	Pegawai yang diwajibkan sertifikasi dan sudah memiliki sertifikasi dengan level di atas yang diwajibkan

Selama Tahun 2022 pegawai Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bidang Manajemen Risiko sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
1	ATMR Risiko Kredit & ATMR Risiko Operasional (SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 & SE OJK No. 6/SEOJK.03/2020)	09 - 10 November 2022	LBC
2	Effective Business Slide Presentation with Power Point	17 - 18 Oktober 2022	PT SGS Indonesia
3	Webinar OJK Institute "Towards the in-Depth Understanding of Climate Change, Sharia Insurance, and Crypto Assets"	27 Oktober 2022	OJK Institute
4	Workshop IT Risk Management	14 Oktober 2022	Oliver Wyman
5	Aplikasi Operational Risk Management Information System	24 - 25 November 2022	PT BDO Konsultan Indonesia
6	Risk Maturity Assessment	24 - 25 Maret 2022	CRMS Indonesia
7	Kick Off Program Executive Session BOD-1	Mei 2022	SHL Indonesia
8	Workshop Credit Risk Management	Januari 2022	Resolusi Akusara Nusantara

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2022

Bank BTN selama 2022 dalam penerapan manajemen risiko ditujukan untuk memperkuat pilar-pilar pengelolaan risiko dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas operasional bisnis bank. Target dan inisiatif strategis terkait pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2022, sebagai berikut:

Penguatan Tata Kelola Risiko (Risk Governance)

Penetapan, pengelolaan dan *alignment framework* RA RT dan RKAP; Penguatan *Segregation of duty* dan 3 LOD
Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi melalui *performance review*, transformasi *corporate plan* serta *monitoring & evaluasi* RA dan RT

Penguatan Kerangka Manajemen Risiko

Transformasi arsitektur kebijakan (Penyusunan Kebijakan Umum Manajemen Risiko [KUMR])
Linking Strategy (Corplan, RBB, RKAP, KPI) dengan RA, RT dan Limit
Evaluasi struktur organisasi *risk management* dengan penambahan fungsi *Operational Risk Control*, IT, *Cyber & Digital Risk*, serta *Validation Model*

Penguatan Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM

Pengelolaan Risiko Kredit	Pengelolaan Risiko Pasar & Likuiditas	Pengelolaan Risiko Operasional, Hukum, Kepatuhan & Reputasi	
<ul style="list-style-type: none"> √ Pelaksanaan BPI (Credit Consumer & Commercial) √ <i>Remodelling Credit Scoring Model</i> √ Pengembangan dan Penerapan <i>Credit Rating</i> (ICR) √ Pengembangan <i>Commercial Loan EWS</i> dan <i>underwriting</i> √ Pengembangan SME Credit Scoring & <i>Collection Scoring</i> √ Uji Coba ATMR Kredit sesuai POJK baru √ Strategi Pengelolaan LAR dan Penguatan CKPN to NPL √ Pelaksanaan <i>Portfolio Quality Report</i> √ Pengembangan dan Penerapan <i>Credit Decision Engine</i> √ Membangun <i>collection</i> dan <i>asset sales strategy</i> untuk SME 	<ul style="list-style-type: none"> √ Pengelolaan Risiko Pasar melalui pengembangan dan penerapan <i>middle office</i> √ Pengelolaan manajemen risiko likuiditas secara harian Pelaksanaan <i>Internal Liquidity</i> √ <i>Adequacy Assessment Process</i> (ILAAP) √ Uji Coba ATMR Pasar sesuai POJK baru 	<ul style="list-style-type: none"> √ Penerapan dan penilaian risiko produk sesuai POJK √ Uji Coba ATMR Operasional sesuai POJK baru √ Membangun sistem <i>operational tools</i> (LED, RCSA & KRI) - ORMIS √ Implementasi <i>Branch Operation Risk Control</i> sebagai upaya memperkuat manajemen risiko operasional √ Pengelolaan Operasional, Hukum & Reputasi melalui penambahan cadangan √ <i>Risk Assessment PAB</i> √ Penguatan fungsi <i>Credit Operation</i> √ Sentralisasi fungsi akunting & pengadaan √ Membangun kapabilitas data analitik serta infrastruktur <i>big data</i> 	
Pengelolaan Risiko Strategik	Pengelolaan Risiko IT, Cyber dan Digital	Pengelolaan Risiko Darurat (BCM)	Pengelolaan Tata Kelola Model
<ul style="list-style-type: none"> √ Melaksanakan (<i>Join Stress Test</i> [JST], KBUMN, Internal, Restru Covid, <i>Tapering Off</i>) √ Membangun SIM Risiko sesuai KBUMN (RMI) √ Pengukuran <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) √ Pelaksanaan, monev RA & RT √ Penyusunan <i>blueprint & roadmap Risiko Environmental, Social & Governance</i> (ESG) √ <i>Self assessment</i> TKB √ Penguatan Budaya sadar Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> √ Penguatan kapabilitas pengelolaan manajemen risiko IT, Cyber & Digital (sesuai fungsi LoD) √ Menetapkan <i>roadmap</i> dan stages pengembangan IT 2021-2025 √ Implementasi stages I, II & III 	<ul style="list-style-type: none"> √ Evaluasi Pengelolaan BCM √ Pelaksanaan <i>Business Impact Analysis</i> √ Pengelolaan <i>Business Continuity Plan</i> √ Pengelolaan <i>Disaster Recovery Plan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ Pengelolaan metode tata kelola model (meliputi Model Kredit, Pasar, Operasional, dan lainnya) √ Review Permodelan PSAK 71

Melaksanakan (<i>Join Stress Test</i> [JST], KBUMN, Internal, Restru Covid, <i>Tapering Off</i>)	Membangun sistem informasi manajemen Risiko sesuai dengan KBUMN dan RMI	Penyusunan Risiko <i>Environmental, Social & Governance</i> (ESG) dan Perubahan Iklim	<i>Job Enrichment, Talent Movement</i> dan Resertifikasi ISO 9001 : 2015 dan Risk Culture	Pelaksanaan <i>Recovery Plan & Resolution Plan</i>
--	---	---	---	--

Penguatan Tata Kelola Risiko (Risk Governance)

Evaluasi pengendalian, intern yang efektif oleh satuan kerja audit internal (penguatan kontrol internal pada unit kerja, RO & KC)

Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2022 selain pilar-pilar inisiatif strategis tersebut di atas, pelaksanaan manajemen risiko juga telah dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan Limit Risiko

Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi Bank telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan limit risiko lainnya. RAS dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan

tujuan bisnis Bank serta perubahan kondisi lingkungan bisnis. RAS digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan risiko dan sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik. Selanjutnya RAS diturunkan menjadi limit risiko untuk setiap indikator risiko. Penetapan RAS dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil maupun strategi dan target Bank secara keseluruhan. Limit risiko yang ditetapkan meliputi Risiko secara keseluruhan

(komposit), per jenis Risiko, dan per-aktivitas fungsional. Adapun penetapan limit risiko digunakan sebagai panduan bagi aktivitas Unit Kerja untuk mengelola jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima.

Penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

Penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bank Sistemik Sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia, Bank memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi.

Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/ atau memperbaiki kondisi finansial Bank sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang berdampak pada permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Review Kebijakan Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam mengelola risiko bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, bank telah menyusun kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam suatu kebijakan manajemen risiko dan sekurang-kurangnya setiap tahun dilakukan *review* dan/atau pengkinian beberapa kebijakan manajemen risiko agar mudah dipahami oleh *risk owner* maupun *risk manager* sebagai pedoman dalam melaksanakan. Bank sedang menyelaraskan struktur kebijakan internal sesuai dengan Transformasi Arsitektur Kebijakan dan Prosedur yang baru dimana kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan hirarki kebijakan dari yang tertinggi Kebijakan Umum, Kebijakan Khusus dan Peraturan Teknis.

Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Operasional Pendekatan Standar

Dalam rangka penerapan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2023, maka Bank sedang melakukan *review* proses pencatatan data kerugian dan *recovery* kerugian risiko operasional, serta uji coba perhitungan pendekatan standar berdasarkan data keuangan 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Kredit Basel III Reform Pendekatan Standar

Per-1 Januari 2023, Bank akan mulai menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Perubahan metodologi perhitungan dalam ketentuan tersebut meliputi perubahan bobot risiko lebih granular dan dalam jumlah *bucket* yang lebih banyak. Selain itu juga terdapat klasifikasi kategori portofolio yang lebih beragam dan

keharusan pelaksanaan *due diligence* terhadap pihak lawan untuk memastikan pemahaman atas profil risiko dan karakteristik dari pihak lawan agar penentuan bobot risiko tidak hanya bergantung pada peringkat eksternal.

Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Bank Sistemik. Sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia, Bank ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bank yang berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Resolusi Bank Umum.

Dokumen Rencana Resolusi yang disusun memuat informasi mengenai Bank dan Strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjaminan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.

Pembentukan Regional Business Control (RBC), Branch Business Control (BBC) dan Commercial Banking Center Business Control (CBC-BC)

Dalam rangka meningkatkan pengawasan risiko operasional dan mitigasi/pencegahan *operational loss* dan penyelesaian temuan audit di Kantor Cabang, per 1 Juli 2022, Bank mengimplementasikan Departemen Operations Risk Controller pada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menempatkan organ Regional Business Control (RBC) pada Kantor Wilayah, Branch Business Control (BBC) yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Syariah serta Commercial Banking Center Business Control (CBC-BC) yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada Commercial Banking Center (CBC)

Pembentukan IT Risk Management

Bank membentuk IT Risk Management Department yang berfungsi untuk memastikan efektivitas pengelolaan Risiko IT *Cyber* dan *Digital*. Dalam hal implementasi manajemen risiko IT, *Cyber & Digital*, Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi dan dituangkan ke dalam dokumen *Risk Register*. Bank melakukan pendampingan dalam identifikasi risiko pada *project-project critical* terkait TI serta membuat kontrol mitigasinya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), keaslian (*authentication*), tidak dapat diingkari (*non-repudiation*), dan ketersediaan (*availability*). Selain itu, Bank melakukan *monitoring* parameter risiko utama dengan memantau *Key Risk Indicator* (KRI). Seluruh langkah mitigasi terhadap *issue* yang teridentifikasi telah memiliki tindak lanjut yang cukup untuk mengurangi nilai risiko agar sesuai *risk appetite* Bank.

Melanjutkan Pengembangan dan Memperkuat *Utilisasi Risk Management Tools*

Untuk memperkuat *utilisasi Risk Management Tools* maka telah dilakukan beberapa pengembangan diantaranya:

1. Implementasi sistem pemantauan *monitoring* risiko pasar/*interest rate risk in the banking book* (IRRBB) dan Aplikasi *monitoring* Risiko Likuiditas.
2. Pemanfaatan *Terminal Bloomberg* untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif dalam mendukung pengelolaan risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko lainnya.
3. Memperkuat peran manajemen risiko dengan Pengembangan *Sustainability Environment Risk Management*.
4. Melakukan *Enhancement Credit Scoring Model* (CSM) kredit consumer.
5. Melakukan pengembangan *Credit Scoring Model* (CSM) untuk segmen SME.
6. Melakukan pengembangan *Early Warning* Sistem untuk segmen Komersial dan Korporasi.
7. Melakukan *re-modeling Internal Credit Rating* untuk segmen Komersial dan Korporasi.
8. Melakukan pengembangan *Collection Scoring* untuk segmen Konsumer.
9. Maintenance implementasi ISO di ERMD melalui *Surveillance* ISO 9001:2015 di Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk meningkatkan standar layanan mutu Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada seluruh *stakeholders*.

Pelaksanaan *Stress Testing*

Bank secara berkala melakukan *Stress Testing* guna menilai ketahanan Bank terhadap skenario *stress/krisis*:

1. *Stress Testing* Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan secara triwulanan (pada Profil Risiko Bank).
2. *Stress Testing* Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dan Unit Usaha Syariah secara internal dilakukan pada Juni 2022 dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
3. *Reverse Stress Testing Recovery Plan* untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah di-*update* untuk kebutuhan pelaporan Dokumen *Recovery Plan* pada November 2022.

Pemantauan Manajemen Risiko Bank *Wide* secara Berkala

Bank senantiasa melakukan implementasi manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Bank secara berkala melakukan pemantauan secara *bankwide* yang dibuktikan dengan beberapa *output* laporan wajib kepada Regulator diantaranya:

1. *Recovery Plan*.
2. *Resolution Plan*.
3. *Leverage Ratio*.
4. Profil Risiko.
5. Tingkat Kesehatan Bank.
6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko.
7. *Liquidity Coverage Ratio*.
8. *Net Stable Funding Ratio*.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
10. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
11. Laporan *Adhoc* lainnya.

Komite di Bawah Direksi

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite Human Capital
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)
7. Komite Pengarah Transformasi
8. Komite Bisnis

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KOMAR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KOMAR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran pengelolaan risiko serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan manajemen risiko Bank.

PEDOMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pedoman kerja Komite Manajemen Risiko mengacu pada Surat Keputusan Direksi No.4/SK/DIR/ERMD/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*). Pedoman tersebut antara lain mengatur terkait Tanggung Jawab Komite, Tugas dan Fungsi Komite, Kewenangan Komite, Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite dan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di Bank.

Tugas Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan Division/Desk Head unit kerja operasional dan Enterprise Risk Management Division Head.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Memantau dan pengelolaan risiko.
5. Strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan kecukupan modal.
6. Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 4/SK/DIR/ERMD/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) yang mengacu pada Peraturan Direksi No. 1/PD/DIR/PPBD/2021 perihal Pedoman Komite Direksi dengan susunan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan
Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	Ketua 1: Direktur yang membawahi Manajemen Risiko Ketua 2: Direktur yang membawahi Risiko Kredit Ketua 3: Direktur yang membawahi Keuangan (Apabila Direktur Utama hadir maka Direktur Utama yang bertindak sebagai Ketua)
Direksi Anggota Tetap	– Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan – Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan
Direksi Anggota Tidak Tetap	– Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional – Direktur yang membawahi Kepatuhan
Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	– Kepala Divisi yang membidangi Satuan Kerja Manajemen Risiko
Kepala Divisi (Anggota Tetap)	– Kepala Divisi yang membidangi Satuan Kerja Audit Internal – Kepala Divisi yang membidangi Satuan Kerja Kepatuhan

Struktur	Jabatan
Kepala Divisi (Anggota Tidak Tetap)	Kepala Divisi lain sesuai Kebutuhan

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil anggota Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2022

Kebijakan rapat Komite Manajemen Risiko diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda
1	25 Januari 2022	Hasil <i>self-assessment</i> Laporan TKB Semester II/2021.
2	22 Februari 2022	Review Kualitas Kredit dan Proses Kredit Konsumer dan usulan kebijakan khusus prosedur tata kelola peraturan internal bank.
3	29 Maret 2022	Usulan <i>draft</i> kebijakan khusus prosedur pelaksanaan dan pengelolaan mesin ATM, CDM CRM dan pembahasan usulan kebijakan khusus prosedur pelaksanaan dan pengelolaan mesin EDC <i>acquiring</i> BTN.
4	19 April 2022	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Triwulan I 2022.
5	14 Juni 2022	Usulan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis
6	19 Juli 2022	Hasil <i>self-assessment</i> Laporan TKB Semester I/2022 dan Profil Risiko Triwulan II/2022
7	18 Oktober 2022	Hasil <i>Self-Assessment</i> Laporan Profil Risiko Triwulan III/2022
8	26 Desember 2022	Pencabutan Peraturan Internal Bank secara Bulk

Asset and Liability Management Committee (ALCO)

Asset and Liability Committee atau yang selanjutnya disebut ALCO dibentuk oleh Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam rangka merumuskan kebijakan, menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan risiko likuiditas dan pasar serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management (ALM)* Perseroan untuk memaksimalkan profitabilitas dan menjaga struktur neraca Perseroan.

PEDOMAN KERJA ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Pedoman kerja ALCO mengacu pada Peraturan Direksi No. 05/PD/PPD/2021 tentang Pedoman Komite Direksi dan Surat Keputusan Direksi No.14/SK/DIR/TRSD/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komite ALCO. Pedoman tersebut antara lain mengatur terkait Tanggung Jawab Komite, Tugas dan Fungsi Komite, Kewenangan Komite, Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite dan Rapat Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Tugas

1. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas meliputi sebagai berikut:

- a. Mengelola strategi pengelolaan likuiditas, strategi pengelolaan risiko pasar, strategi pengelolaan risiko kredit, dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Bank.
 - b. Meminimalisir *idle funds*
 - c. Memaksimalkan profitabilitas Bank serta menjaga struktur neraca Bank
2. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas juga dapat memutuskan Bank berada dalam kondisi krisis likuiditas sesuai dengan ketentuan *Contingency Funding Plan (CFP)*.

Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas terkait rapat *Asset and Liability Committee (ALCO)* meliputi sebagai berikut:

1. Memutuskan semua masalah yang dibahas dalam agenda Rapat Komite Aset dan Liabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ALCO.
2. Meminta Satuan Kerja yang terkait guna melaksanakan dan menindaklanjuti hasil Rapat Komite Aset dan Liabilitas.
3. Meminta Satuan Kerja yang terkait guna melaporkan pelaksanaan hasil keputusan Rapat Komite Aset dan Liabilitas secara periodik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi Kepatuhan.

Tanggung Jawab

1. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan likuiditas, sehingga Bank dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
2. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi posisi aktiva dan pasiva Bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar.
3. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi penetapan harga aktiva dan pasiva Bank, untuk memastikan harga tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank.
4. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi atas pelaksanaan dan hasil-hasil yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva Bank yang sekurangnya meliputi: pengelolaan likuiditas; pengelolaan *gap* (risiko *maturity* dan *repricing*); pengelolaan valuta asing; pengelolaan pendapatan dan investasi.
5. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan ALMA Bank selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sekali.

STRUKTUR KEANGGOTAAN ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
	Wakil Direktur Utama *)	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Risiko Kredit	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kepatuhan	X	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	✓	Anggota Tetap
SEVP	SEVP yang membawahi <i>Human Capital**</i>	✓	Anggota Tidak Tetap

* Ketua Pengganti 1

** Berdasarkan Surat Direksi ke Komisaris No. 303/DIR/TPMD/V/2022 SEVP *Human Capital* telah diganti dengan SEVP *Operation***PROFIL ANGGOTA ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)**

Profil anggota ALCO yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Seluruh anggota ALCO tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Masa jabatan dan periode jabatan ALCO baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/Atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO) TAHUN 2022

Kebijakan rapat Komite ALCO diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Komite ALCO. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat Komite ALCO diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu. Selama Tahun 2022, ALCO telah melakukan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda
1	24 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
2	22 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
3	22 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.

No	Tanggal	Agenda
4	20 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
5	23 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
6	27 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
7	25 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
8	29 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
9	12 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
10	27 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.

No	Tanggal	Agenda
11	3 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
12	10 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
13	18 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
14	24 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
15	31 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
16	14 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
17	23 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.

No	Tanggal	Agenda
18	28 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
19	19 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.
20	26 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK dan Kredit. - Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka. - Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK. - Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA. - Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit.

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan merupakan komite yang berperan dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan arahan untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan.

PEDOMAN KERJA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Pedoman kerja Komite Kebijakan Perkreditan mengacu pada SK Direksi Nomor 02/SK/DIR/PPBD/2021 dengan isi muatan sebagai berikut:

1. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite.
2. Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komite.
3. Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan adalah membantu Direktur atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Perseroan dan debitur-debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
 - g. Upaya Perseroan dalam memenuhi kecukupan jumlah penyalangan penghapusan kredit atau pembiayaan.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan.
5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab nomor 1.
6. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan mengacu pada Peraturan Direksi No. 5/PD/DIR/PPBD/2021 perihal Pedoman Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
	Wakil Direktur Utama *)	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko**)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Risiko Kredit Komersial	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kepatuhan	X	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Human Capital</i> ***	✓	Anggota Tidak Tetap

*) Ketua Pengganti I

**) Ketua Pengganti II

***) Berdasarkan Surat Direksi ke Komisaris No. 303/DIR/TPMD/V/2022 SEVP Human Capital telah diganti dengan SEVP Operation

PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Profil anggota Komite Kebijakan Perkreditan baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Seluruh anggota Komite Kebijakan Perkreditan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kebijakan Perkreditan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kebijakan Perkreditan baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Kebijakan Perkreditan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN TAHUN 2022

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2022, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1	22 Februari 2022	1. Penyesuaian Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman/ <i>Term Loan Facility</i> kepada Lembaga Keuangan 2. Penyesuaian Ketentuan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Program PEN
2	01 Maret 2022	Penjualan aset kredit bermasalah disertai pembelian surat berharga sukuk
3	05 April 2022	Perubahan Surat Edaran Direksi Nomor 40/DIR/NSLD/2017 dengan usulan Kebijakan Khusus Pelaksanaan Akad Kredit Menggunakan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB)
4	12 April 2022	1. Perubahan Surat Edaran Direksi Nomor 36/SE/DIR/NSLD/2019 dengan Usulan Kebijakan Khusus Penetapan Klasifikasi dan Manfaat Developer Kredit Konsumer 2. Perubahan Surat Edaran Direksi Nomor 55/SE/DIR/CMLD/2018 dengan Usulan Kebijakan Khusus Manfaat bagi Developer Kredit Komersial
5	10 Mei 2022	1. Pembiayaan Komersial BTN iB dengan Mekanisme IMBT 2. Kebijakan Khusus perihal <i>Treasury Line Facility</i> kepada Non Lembaga Keuangan 3. Kebijakan Khusus perihal <i>Term Loan Facility</i> 4. Usulan Kebijakan Khusus Penetapan Segmentasi Debitur dan Manfaat Tambahan <i>Developer</i> UMKM

No.	Tanggal	Agenda
6	17 Mei 2022	Penjualan aset kredit bermasalah disertai pembelian surat berharga sukuk
7	05 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian Keputusan Khusus tentang Pengelolaan Kredit <i>Small Medium Enterprise</i> (SME) 2. Penyesuaian Petunjuk Pelaksanaan Guarantee 3. Penyesuaian Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Korporasi (<i>Corporate Loan</i>) 4. Usulan Penerbitan Ketentuan Khusus Terkait <i>Refinancing</i> 5. Penyesuaian Petunjuk Pelaksanaan <i>Supply Chain Financing</i>
8	26 Juli 2022	Usulan Penyesuaian Ketentuan Internal Penyelesaian Kredit melalui Mekanisme <i>Cessie</i>
9	10 Oktober 2022	Usulan Implementasi Piloting LPA dan Pencairan Dana Jaminan <i>Live by Video Call</i>
10	20 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> – Perubahan Materi Muatan terkait Marginal Deposit pada Kebijakan Khusus Nomor KK.1-VI tentang Produk dan Layanan Guarantee – Usulan Kebijakan Khusus tentang Produk Bridging Loan – Usulan Kebijakan Khusus tentang Produk dan Layanan Documentary Collection – Usulan Perubahan Peraturan tentang Produk dan Layanan Fasilitas <i>Letter of Credit</i> (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
11	26 Desember 2022	Penerbitan Kebijakan Khusus tentang Pelaksanaan Akad Kredit atau Pembiayaan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

Komite	Fungsi Bisnis		Fungsi Risiko	
	Jabatan	Hak Suara	Jabatan	Hak Suara
Komite A	Wakil Direktur Utama	✓	Direktur Utama	✓
	Direktur yang membawahi Kredit/Pembiayaan	✓	Direktur yang membawahi Risiko Kredit*	✓
	Direktur yang membawahi Jaringan	✓	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Direktur yang membawahi TI dan Operasional	✓
	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	✓	Direktur yang membawahi Kepatuhan	X
Komite B			SEVP yang Membawahi Human Capital	
	Kepala Divisi pengusul antara lain yang membidangi Kredit/Pembiayaan/Penyelamatan Kredit	✓	Kepala Divisi yang membidangi Risiko Kredit Komersial (merangkap sekretaris)	✓
			Kepala Divisi yang membidangi Kepatuhan atau yang mewakili	X
Komite C			Kepala Divisi yang membidangi Legal atau yang mewakili	X
	Regional Office Head/Area Head	✓	RCRH (merangkap sekretaris)	✓
Kepala D			Unit Kepatuhan yang ada di Kantor Wilayah	X
	Kepala Cabang	✓	BCRH (merangkap sekretaris)	✓

* Jika sebagai pengusul kredit maka berubah menjadi fungsi bisnis.

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite yang berperan dalam memberikan keputusan pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

PEDOMAN KERJA KOMITE KREDIT

Pedoman kerja Komite Kredit mengacu pada Pedoman Direksi No.5/PD/DIR/PPD/2021, Surat Keputusan Direksi No. 04/SK/DIR/TPMD.2022, dan Surat Keputusan Direksi No. 06/SK/DIR/PPBD/2021 dengan isi muatan sebagai berikut:

- Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Komite Kredit
- Tata Cara Penyelenggaraan Komite Kredit
- Tugas Sekretaris dan Anggota Komite Kredit
- Batas Wewenang Memutus Kredit

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah memberikan rekomendasi dan memutus pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT

Profil anggota Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Seluruh anggota Komite Kredit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE KREDIT

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE KREDIT

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT TAHUN 2022

Pelaksanaan Rapat Komite Kredit dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan kredit komersial, baik permohonan baru, perubahan struktur kredit, maupun restrukturisasi kredit. Penyelenggaraan Komite Kredit diusulkan oleh Divisi Pengusul, dalam hal ini Divisi Bisnis Kredit Komersial dan Divisi Risiko Kredit Komersial. Dalam Tahun 2022, Komite Kredit telah melakukan rapat sebanyak 211 (dua ratus sebelas) kali rapat. Berikut tanggal rapat dan agenda rapat Komite Kredit sepanjang tahun 2022:

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	18 Januari 2022	Pemberian Keputusan Penetapan <i>Limit Credit Line</i>
2	18 Januari 2022	Pemberian Keputusan Penetapan <i>Limit Credit Line</i>
3	18 Januari 2022	Pemberian Keputusan Penetapan <i>Limit Credit Line</i>

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
4	19 Januari 2022	Restrukturisasi Covid-19
5	24 Januari 2022	Keputusan Kebijakan Perubahan Klausula Asuransi dan Penggantian Kontraktor
6	24 Januari 2022	Pemberian Keputusan Penetapan Limit Credit Line
7	24 Januari 2022	Restrukturisasi Covid-19
8	25 Januari 2022	Persetujuan Perubahan Unit Pembiayaan KYG
9	25 Januari 2022	Restrukturisasi Covid-19
10	25 Januari 2022	Persetujuan Kredit Corporate Loan - Term Loan
11	08 Februari 2022	Pemberian Keputusan Penetapan Limit Credit Line
12	08 Februari 2022	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
13	08 Februari 2022	Pemberian Keputusan Penetapan Limit Credit Line
14	08 Februari 2022	Pemberian Keputusan Penetapan Limit Credit Line
15	14 Februari 2022	Keputusan Kebijakan Pelunasan dengan Diskon Bunga dan Denda Kredit
16	15 Februari 2022	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
17	15 Februari 2022	Restrukturisasi Covid-19
18	16 Februari 2022	Restrukturisasi Covid-19
19	16 Februari 2022	Restrukturisasi Covid-19
20	16 Februari 2022	Restrukturisasi Covid-19
21	16 Februari 2022	Restrukturisasi Pembiayaan
22	16 Februari 2022	Keputusan Perubahan Akta Perusahaan
23	16 Februari 2022	Keputusan Kebijakan Pelunasan dengan Diskon Bunga dan Denda Kredit
24	21 Februari 2022	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
25	21 Februari 2022	Keputusan Pemberian Line Facility
26	22 Februari 2022	Restrukturisasi Covid-19
27	22 Februari 2022	Pemberian Fasilitas Kredit KYG KPL
28	25 Februari 2022	Restrukturisasi Covid-19
29	14 Maret 2022	Pemohonan Banding Keputusan Restrukturisasi
30	14 Maret 2022	Pemberian Fasilitas Kredit KYG KPL
31	14 Maret 2022	Pemberian Keputusan Penetapan Limit Credit Line
32	14 Maret 2022	Pemberian Kebijakan Rate Pinjaman TLF
33	14 Maret 2022	Restrukturisasi Covid-19
34	14 Maret 2022	Restrukturisasi Pembiayaan
35	14 Maret 2022	Restrukturisasi Pembiayaan
36	14 Maret 2022	Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi
37	15 Maret 2022	Usulan Sindikasi Sekunder Kredit BNI
38	15 Maret 2022	Pemberian Fasilitas Kredit KYG KPL
39	15 Maret 2022	Pemberian Fasilitas Kredit KYG KPL
40	15 Maret 2022	Restrukturisasi Kredit
41	15 Maret 2022	Restrukturisasi Kredit

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
42	15 Maret 2022	Pemberian Fasilitas Kredit KYG KPL
43	15 Maret 2022	Restrukturisasi Kredit
44	23 Maret 2022	Restrukturisasi Covid-19
45	23 Maret 2022	Permohonan Banding Syarat Restrukturisasi
46	23 Maret 2022	Pemberian Fasilitas Kredit KMK Kontraktor
47	28 Maret 2022	Restrukturisasi Covid-19
48	28 Maret 2022	Penyelesaian Kredit dengan Mekanisme Kepailitan
49	29 Maret 2022	Restrukturisasi Covid-19
50	30 Maret 2022	Permohonan Keputusan Banding Keputusan Kredit KYG
51	31 Maret 2022	Permohonan Restrukturisasi
52	5 April 2022	Permohonan Line Facility Kontra Bank Garansi
53	5 April 2022	Permohonan Club Deal
54	5 April 2022	Pemberian Keputusan Penetapan Limit Credit Line
55	5 April 2022	Pemberian Keputusan Penetapan Limit Credit Line
56	5 April 2022	Permohonan Perpanjangan Kebijakan Pengikatan SKMHT
57	12 April 2022	Restrukturisasi Covid-19
58	12 April 2022	Permohonan Kredit SME Pola Kemitraan
59	14 April 2022	Permohonan Kredit Corporate Loan dan Kredit SME Pola Kemitraan
60	14 April 2022	Permohonan Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
61	18 April 2022	Permohonan Penetapan Limit Credit Line
62	19 April 2022	Permohonan Restrukturisasi
63	19 April 2022	Permohonan Restrukturisasi
64	19 April 2022	Permohonan Penetapan Limit Credit Line
65	19 April 2022	Permohonan Penetapan Limit Credit Line
66	19 April 2022	Permohonan Usulan Kredit Sub Fasilitas Line Facility
67	22 April 2022	Permohonan Fasilitas KMK PRK
68	25 April 2022	Permohonan Banding Keputusan Restrukturisasi
69	25 April 2022	Permohonan Keputusan KI Refinancing
70	25 April 2022	Permohonan fasilitas KMK Konstruksi dan PRK Siaga
71	25 April 2022	Permohonan KYG dan KPL
72	26 April 2022	Permohonan Restrukturisasi
73	26 April 2022	Permohonan Banding Restrukturisasi
74	26 April 2022	Permohonan Restrukturisasi
75	26 April 2022	Permohonan Restrukturisasi
76	26 April 2022	Permohonan KYG dan KPL
77	26 April 2022	Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
78	27 April 2022	Permohonan KYG
79	17 Mei 2022	Permohonan Line Facility Kontra Bank Garansi
80	17 Mei 2022	Permohonan Kredit
81	23 Mei 2022	Permohonan Restrukturisasi
82	24 Mei 2022	Permohonan Perpanjangan Corporate Loan Modal Kerja
83	24 Mei 2022	Permohonan Restrukturisasi
84	24 Mei 2022	Permohonan Restrukturisasi
85	24 Mei 2022	Permohonan Restrukturisasi
86	25 Mei 2022	Permohonan Keputusan KYG PRK dan PRK Siaga
87	25 Mei 2022	Permohonan Keputusan KYG
88	25 Mei 2022	Permohonan Keputusan Kredit
89	26 Mei 2022	Permohonan Banding atas Keputusan Perubahan Fasilitas KI
90	30 Mei 2022	Permohonan Restrukturisasi
91	31 Mei 2022	Permohonan Restrukturisasi Covid-19
92	14 Juni 2022	Permohonan Penetapan Limit Credit Line
93	14 Juni 2022	Permohonan Penetapan Limit Credit Line
94	14 Juni 2022	Permohonan Penetapan Limit Credit Line Periode Berikutnya
95	14 Juni 2022	Permohonan Penetapan Limit Credit Line Periode Berikutnya
96	14 Juni 2022	Permohonan Penetapan Limit Credit Line Periode Berikutnya
97	20 Juni 2022	Permohonan Banding
98	22 Juni 2022	Permohonan Restrukturisasi
99	22 Juni 2022	Permohonan Pembiayaan Modal Kerja untuk disalurkan kepada Pembiayaan Mekaar PNM
100	27 Juni 2022	Permohonan Restrukturisasi
101	27 Juni 2022	Permohonan Banding Keputusan Restrukturisasi
102	27 Juni 2022	Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Struktur Corporate Line Facility
103	27 Juni 2022	Permohonan Pelunasan Kredit disertai Kebijakan Keringanan Bunga dan Denda
104	28 Juni 2022	Permohonan Restrukturisasi
105	30 Juni 2022	Permohonan Kredit
106	30 Juni 2022	Permohonan Restrukturisasi Covid-19
107	5 Juli 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
108	5 Juli 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
109	5 Juli 2022	Permohonan KMK General Purposes dan Perpanjangan JW Line Facility
110	5 Juli 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
111	11 Juli 2022	Permohonan Restrukturisasi
112	11 Juli 2022	Permohonan Fasilitas KYG

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
113	12 Juli 2022	Permohonan Restrukturisasi (KYG)
114	12 Juli 2022	Permohonan Restrukturisasi (KI)
115	12 Juli 2022	Permohonan Perpanjangan JW Kredit
116	19 Juli 2022	Permohonan Corporate Line Facility
117	19 Juli 2022	Permohonan Fasilitas Kredit
118	19 Juli 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
119	25 Juli 2022	Permohonan Fasilitas KYG & KPL
120	25 Juli 2022	Permohonan Restrukturisasi
121	28 Juli 2022	Permohonan Keringanan Pembayaran Bunga dalam Rangka Pelunasan Kredit
122	28 Juli 2022	Permohonan Keringanan Pembayaran Bunga dalam Rangka Pelunasan Kredit
123	8 Agustus 2022	Permohonan Kredit Sindikasi
124	9 Agustus 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
125	9 Agustus 2022	Permohonan Penetapan Perpanjangan JW Limit Line Facility
126	9 Agustus 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
127	16 Agustus 2022	Permohonan Penetapan Perpanjangan JW Limit Line Facility
128	16 Agustus 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
129	16 Agustus 2022	Permohonan Usulan Kredit Sindikasi
130	16 Agustus 2022	Permohonan Restrukturisasi
131	24 Agustus 2022	Permohonan Persetujuan Perubahan Pengurus
132	24 Agustus 2022	Permohonan Restrukturisasi
133	24 Agustus 2022	Permohonan Restrukturisasi
134	29 Agustus 2022	Permohonan Keringanan Pembayaran Bunga dalam Rangka Pelunasan Kredit
135	29 Agustus 2022	Permohonan Fasilitas Kredit
136	6 September 2022	Persetujuan Fasilitas Pola Kemitraan
137	12 September 2022	Keputusan Perubahan Struktur Credit Line
138	12 September 2022	Pemberian KMK Platinum
139	12 September 2022	Keputusan Usulan Corporate Line Facility
140	13 September 2022	Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Mekanisme Pelunasan Bertahap dan Keringanan Bunga serta Denda
141	13 September 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
142	19 September 2022	Persetujuan Restrukturisasi
143	19 September 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
144	19 September 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
145	20 September 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
146	20 September 2022	Persetujuan Restrukturisasi
147	20 September 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
148	20 September 2022	Persetujuan Pengambilan Sebagian Agunan dan Pembatasan Kelonggaran Tarik
149	23 September 2022	Persetujuan Restrukturisasi
150	27 September 2022	Persetujuan Restrukturisasi
151	29 September 2022	Persetujuan Perpanjangan JW Corporate Loan
152	29 September 2022	Permohonan Restrukturisasi
153	4 Oktober 2022	Banding Restrukturisasi
154	4 Oktober 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
155	4 Oktober 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
156	4 Oktober 2022	Permohonan Fasilitas KMK Kontraktor
157	4 Oktober 2022	Permohonan Perubahan Agunan Kredit
158	11 Oktober 2022	Permohonan Penetapan Limit Line Facility
159	11 Oktober 2022	Permohonan Pemberian Limit Pembelian Reksadana Pasar Uang
160	11 Oktober 2022	Permohonan Pemberian Limit Pembelian Reksadana Terproteksi dan Reksadana Pasar Uang
161	26 Oktober 2022	Permohonan KMK Platinum
162	13 Oktober 2022	Usulan Novasi Proyek Apartemen "East Point" dan Term Loan Facility
163	18 Oktober 2022	Permohonan Pembukaan Limit Kembali Pembelian Reksadana Terproteksi
164	21 Oktober 2022	Permohonan KMK PRK Platinum
165	21 Oktober 2022	Permohonan Perubahan Sifat dan Plafond Kredit
166	25 Oktober 2022	Permohonan Pemberian Treasury Line
167	26 Oktober 2022	Permohonan KYG Fitur Khusus dan PRK Siaga
168	26 Oktober 2022	Permohonan KYG
169	1 November 2022	Perpanjangan JW Credit Line
170	1 November 2022	Perpanjangan JW Credit Line
171	1 November 2022	Permohonan Fasilitas KYG
172	1 November 2022	Permohonan Fasilitas KYG
173	3 November 2022	Restrukturisasi Kredit
174	4 November 2022	Penyelesaian Kredit
175	4 November 2022	Permohonan Fasilitas KYG
176	14 November 2022	Perpanjangan JW Credit Line
177	15 November 2022	Perpanjangan JW Credit Line
178	15 November 2022	Perpanjangan Credit Line
179	15 November 2022	Restrukturisasi Covid-19
180	15 November 2022	Restrukturisasi
181	15 November 2022	Restrukturisasi Pembiayaan
182	28 November 2022	Realisasi Baru Pembiayaan Komersial
183	28 November 2022	Restrukturisasi Pembiayaan
184	29 November 2022	Restrukturisasi
185	29 November 2022	Restrukturisasi
186	29 November 2022	Permohonan Fasilitas Kredit

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
187	29 November 2022	Permohonan Fasilitas Kredit .
188	29 November 2022	Permohonan Penetapan Limit Credit Line
189	29 November 2022	Ijin Prinsip Restrukturisasi
190	29 November 2022	Pemberian Fasilitas Kredit
191	6 Desember 2022	Partisipasi Pembiayaan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia
192	6 Desember 2022	Permohonan Penetapan Limit Credit Line
193	6 Desember 2022	Penyelesaian Kredit
194	6 Desember 2022	Pemberian Fasilitas Kredit
195	6 Desember 2022	Perpanjangan JW Line Credit
196	9 Desember 2022	Pemberian Fasilitas Kredit
197	13 Desember 2022	Pemberian Fasilitas Kredit
198	13 Desember 2022	Perpanjangan JW Line Credit
199	13 Desember 2022	Perpanjangan JW Line Credit
200	13 Desember 2022	Banding Keputusan Kredit
201	13 Desember 2022	Permohonan Perubahan Fasilitas Kredit
202	13 Desember 2022	Perpanjangan PKS Pola Kemitraan
203	14 Desember 2022	Penyelesaian Kredit
204	19 Desember 2022	Restrukturisasi
205	20 Desember 2022	Permohonan Fasilitas Kredit
206	20 Desember 2022	Permohonan Fasilitas Kredit
207	20 Desember 2022	Restrukturisasi Covid-19
208	20 Desember 2022	Permohonan Fasilitas Kredit
209	23 Desember 2022	Restrukturisasi
210	23 Desember 2022	Restrukturisasi
211	27 Desember 2022	Permohonan Fasilitas Kredit

Komite Human Capital

Direksi telah membentuk Komite Human Capital dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah

perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

PEDOMAN KERJA KOMITE HUMAN CAPITAL

Pedoman kerja Komite Human Capital mengacu pada Peraturan Direksi No.5/PD/DIR/PPD/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan human capital yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program *human capital* agar sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *human capital*.
3. Merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masukan yang disampaikan oleh Komite Personalia Divisi/Wilayah/Cabang/Tim yang berkaitan dengan Nomor 1.
4. Sebagai wadah yang independen bagi Pegawai yang melakukan klarifikasi mengenai keputusan Komite Personalia Divisi/Wilayah/Cabang/Tim berkenaan dengan penempatan/pengawasan Pegawai tersebut.
5. Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan kebijakan yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme Rapat Direksi.
6. Komite dapat memiliki kewenangan memutus terkait human capital di luar Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 tersebut di atas apabila diberikan mandat oleh Rapat Direksi.
7. Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam *review* sistem/kebijakan *Human Capital Management*.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Struktur dan Keanggotaan Komite Human Capital telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 5/PD/DIR/PPBD/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Komite Direksi dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara
Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	Direktur Utama	✓
	– Wakil Direktur Utama *)	✓
Direksi / SEVP	– Direktur yang membawahi Keuangan	✓
	– Direktur yang membawahi Risiko Kredit Komersial	✓
	– Direktur yang Manajemen Risiko	✓
	– Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓
	– Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan	✓
	– Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓

Struktur	Jabatan	Hak Suara
	- Direktur yang membawahi Kepatuhan	X
	- SEVP yang membawahi Human Capital**	✓
	- SEVP yang membawahi Wholesale Banking	✓

Keterangan:

*) Ketua Pengganti

**) Berdasarkan Surat Direksi ke Komisaris No. 303/DIR/TPMD/V/2022 SEVP Human Capital telah diganti dengan SEVP Operation

PROFIL ANGGOTA KOMITE HUMAN CAPITAL

Profil anggota Komite Human Capital baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE HUMAN CAPITAL

Seluruh anggota Komite Human Capital tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Human Capital yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Human Capital baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Human Capital yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HUMAN CAPITAL TAHUN 2022

Sesuai dengan kebijakan, rapat Komite Human Capital dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2022, Komite Human Capital telah melakukan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	31 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review dan Penetapan Kembali <i>Selected Talent</i> KBUMN – Th 2022 2. Pembahasan usulan pemenuhan Kepala Divisi HCMD 3. Usulan Promosi/Mutasi dalam rangka Evaluasi Kepala Divisi LCD 4. Usulan Promosi/Mutasi dalam rangka Evaluasi Kepala Divisi ITOD
2.	11 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review keputusan yang tertuang pada Risalah Rapat Direksi No. 13 tanggal 31 Januari 2022 2. Pemenuhan Pejabat Layer 1 3. Usulan Penyesuaian <i>Grade</i> Pejabat Layer 1 4. Usulan Penghapusan Status PJ (Pemangku Jabatan)
3.	25 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Pemenuhan Kepala Divisi FAD. 2. Pemenuhan branch manager KC Makassar, Cikarang, Cilegon, Mamuju, Panakkukang
4.	17 Mei 2022	Paparan EES 2021 - Kornferry
5.	27 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kepala Divisi CSD 2. Pemenuhan BM KC Mamuju, KC Singaraja, Evaluasi BM KC Kupang & KC Jayapura dan Usulan rangkaian BM KCS serta Dept Head di SHAD
6.	29 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan pemenuhan jabatan regional business control head di Kantor WilayaH. 2. <i>Redeployment</i> peralihan struktur organisasi terkait proses bisnis Branch Control khususnya pada struktur di Divisi lad beralih menjadi Divisi ERMD”
7.	26 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Promosi/Mutasi Pejabat Layer 1 di Kantor Cabang dalam rangka <i>refreshment</i>. 2. Usulan pemenuhan Branch Manager terkait pembukaan Kantor Cabang Syariah baru, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor Cabang Syariah Pontianak b. Kantor Cabang Syariah Palu c. Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung d. Kantor Cabang Syariah Karawang 3. Usulan Promosi Pejabat Layer 1 di Kantor Pusat (Kepala Divisi). 4. Usulan penghapusan status Pemangku Jabatan (PJ) Pejabat layer 1 di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
8.	28 November 2022	Usulan pemenuhan jabatan SEVP Compliance & Legal
9.	20 Desember 2022	Usulan pemenuhan jabatan Division Head pada CCD

Komite Pengarah Teknologi Infomasi (KPTI)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Perseroan kepada nasabah, Perseroan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan operasional Perseroan juga dapat meningkatkan risiko yang dihadapi Perseroan, sehingga Perseroan perlu menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Perseroan wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi. Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi.

PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Pedoman kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi mengacu pada Kebijakan Umum tentang Teknologi Informasi, Manajemen Data dan *Digital* Tahun 2022 dan Petunjuk Teknis tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2022.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Tugas dan fungsi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai.
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan.
 - c. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) diterapkan.
 - d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama, misalnya kebijakan Teknologi Informasi yang utama yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi Bank.
3. Melakukan pemantauan prioritas IT CAPEX terhadap pengembangan atas proyek-proyek Teknologi Informasi berdasarkan Rencana Strategis Teknologi Informasi.

4. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur Teknologi Informasi dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi.
5. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
6. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggara Teknologi Informasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
7. Kewenangan untuk memutus prioritas dan realokasi terhadap IT CAPEX dan IT *Plan*, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *Core Banking Application*, *Server Production*, dan Topologi Jaringan.
 - b. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*portfolio list*). Komite Pengarah Teknologi Informasi harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
 - c. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
 - d. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Struktur dan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi mengacu pada Kebijakan Umum tentang Teknologi Informasi, Manajemen Data dan Digital Tahun 2022 dan Petunjuk Teknis tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2022, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	✓
Direksi	Wakil Direktur Utama*)	✓
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	✓
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓

Struktur	Jabatan	Hak Suara
Direksi/SEVP	Direktur/SEVP lain sesuai materi pembahasan	✓
	Direktur yang membawahi Kepatuhan	x

Keterangan:

*)Ketua Pengganti I

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Profil anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Teknologi Informasi baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI) TAHUN 2022

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Apabila dipandang perlu, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dapat diadakan

setiap waktu atas permohonan tertulis dari anggota tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi. Selama Tahun 2022, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda
1	18 Januari 2022	Pengesahan RSTI 2021-2025
		Pengesahan SE terkait tata kelola data
		Update status Proyek 2021 dan 2022
2	22 Maret 2022	IT, Cyber and Digital Risk Management
		Update RSTI, Inisiatif 2022 & proyek
		Persetujuan Kebijakan Khusus Prosedur TI
		Rencana Switch Over and Switch Back Core Banking
3	27 Juni 2022	Persetujuan Review Kebijakan Khusus TI
		Maturity Assessment
		Update Status (RSTI, Inisiatif 2022, Highlight Project)
4	27 September 2022	Update Status Proyek (RSTI, Inisiatif 2022, Highlight Proyek)
		Update Maturity Assessment
		POJK NO 11/POJK.03/2022 Penyelenggaraan TI oleh Bank Umum
		Data Breach Prevention
		Perbaikan Proses Bisnis Data Pelaporan Regulasi
5	28 November 2022	Update Status Proyek (RSTI, Inisiatif 2022, Highlight Proyek)
		Inisiatif & Usulan Anggaran 2023
		Strategi & Roadmap Implementasi HC - Stream IT
		Cloud Governance
		IT Risk Management Update
		Update Availability & Reliability Operational IT

Komite Pengarah Transformasi

Fungsi Komite Pengarah Transformasi adalah membantu Direksi dalam menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan inisiatif Transformasi sesuai strategi bisnis Perseroan dalam bidang *Human Capital, Organization & Governance, Risk Management and Compliance (GRC); Information Technology, Digital and Network; Commercial Banking & Business Process, Consumer Banking & Sharia; Partnership & Project Management.*

PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Pedoman kerja Komite Pengarah Transformasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 5/SK/DIR/TPMD/2021 tanggal 8 April 2021. Pedoman tersebut antara lain mengatur antara lain:

1. Tanggung Jawab Komite Pengarah Transformasi.
2. Tugas dan Fungsi Komite Pengarah Transformasi.
3. Tugas Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pengarah Transformasi.
4. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat.
5. Risalah Rapat.
6. Tindak Lanjut Risalah Rapat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Transformasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain:

1. Menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan Inisiatif Transformasi sesuai Strategi Bisnis Bank, di bidang:
 - a. *Human Capital, Organization dan Governance, Risk Management and Compliance (GRC).*
 - b. *Information Technology (IT), Digital dan Network.*
 - c. *Commercial Banking dan Business Process, Consumer Banking dan Sharia.*
 - d. *Partnership dan Project Management.*
2. Memutuskan kebijakan terkait pelaksanaan *Pilot Project* Inisiatif Transformasi.
3. Mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan Inisiatif Transformasi untuk diputuskan pada Rapat Direksi apabila diperlukan.
4. Melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan Inisiatif Transformasi yang telah diputuskan oleh Komite Pengarah Transformasi, dan melaporkan kepada Direksi sebagai dasar pertimbangan keputusan tindak lanjut Inisiatif Transformasi.

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Profil anggota Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Seluruh anggota Komite Pengarah Transformasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat

pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI TAHUN 2022

Sesuai dengan Risalah Rapat Direksi No. 65 Tanggal 15 Maret 2021 Pelaksanaan Rapat Komite Pengarah Transformasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2022, Komite Pengarah Transformasi telah mengadakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali. Adapun tanggal dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	12 Januari 2022	Implementasi Policy (SE Keputusan Khusus) Implementasi Perubahan Struktur Organisasi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang beserta Aktivitas Peningkatan Sales terkait Branch Transformation
2.	27 Januari 2022	Kebijakan Proses Terkait Rollout Project Pencairan Otomatis Kredit Konsumer Pada Seluruh Kantor Cabang di Wilayah 1 & 2
3.	11 Februari 2022	Steering Committee Branch Transformation Februari 2022 (Laporan Evaluasi Roll Out Branch Transformation Kanwil 1 & 2 serta Persiapan roll out Kanwil 3&6)
4.	24 Februari 2022	Steering Committee Pembahasan Usulan Organisasi Treasury Division
5.	4 Maret 2022	Steering Committee Scope Pengadaan Konsultan Strategic Business Unit (SBU) Usulan Perubahan Struktur Organisasi Customer Care Division
6.	16 Maret 2022	Usulan perubahan Struktur Organisasi Institutional Funding Division
7.	21 Maret 2022	Usulan perubahan Struktur Organisasi Commercial Banking Division
8.	4 April 2022	Steering Committee Laporan Persiapan Branch Transformation Tahap II
9.	18 Mei 2022	Tindak lanjut Project Decision Engine
10.	23 Mei 2022	Steering Committee Penentuan Lokasi RCOM Bandung, Semarang dan Surabaya

No.	Tanggal	Agenda
11.	30 Mei 2022	Steering Committee Pembahasan Usulan : 1. Pembentukan Divisi IT Security/CISO, 2. Perubahan Organisasi ITPD, 3. Perubahan Organisasi ITOD, 4. Perubahan Organisasi ERMD, 5. Perubahan Organisasi CMGD
12.	7 Juni 2022	Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Branch Control
13.	22 Juni 2022	Steering Committee Update Project Strategic Business Unit (SBU) dan Profitability Measurement System (PMS)
14.	28 Juni 2022	Usulan Struktur Organisasi Wholesale Transaction Division
15.	30 Juni 2022	Steering Committee Branch Transformation Tahap II
16.	15 September 2022	Steering Committee Progress Project Decision Engine
17.	26 September 2022	Steering Committee Struktur Organisasi Wholesale Transaction Division (WTD)
18.	19 Oktober 2022	Steering Committee Branch Transformation Tahap II
19.	25 Oktober 2022	Steering Committee Usulan Tim Task Force Pengelolaan Kepailitan /Homologasi/PKPU
20.	29 November 2022	Steering Committee Pembahasan Usulan Perubahan Organisasi Commercial Credit Risk Division (CRD)
21.	7 Desember 2022	Steering Committee Post Implementation Review (PIR) Branch Transformation
		Steering Committee New Inisiatif Project - Transaction Banking and High Yield Loan
22.	29 Desember 2022	Steering Committee Inisiatif Pertumbuhan Anorganik Bank BTN 2023-2025

Komite Bisnis

Komite Bisnis merupakan Komite Perusahaan yang berperan dalam merumuskan, memutuskan, mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi bisnis terkait dengan Produk Bank yang akan dan telah diluncurkan oleh Perseroan untuk memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan bisnis Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE BISNIS

Pedoman kerja Komite Bisnis mengacu pada:

- Surat Keputusan Direksi No. 03/SK/DIR/PPBD/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komite Bisnis.
- Peraturan Direksi No. 05/PD/DIR/PPD/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Komite Direksi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BISNIS

1. Komite Bisnis bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Bisnis maupun Rapat Direksi.
2. Komite Bisnis bertanggung jawab menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Produk Bank serta melaporkan kepada Direksi.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE BISNIS

Berdasarkan kesepakatan, Keanggotaan Komite Bisnis diduduki oleh beberapa jabatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
1	Ketua (merangkap Anggota Tetap)	Ketua : Wakil Direktur Utama Ketua Pengganti : Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan (apabila Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Bisnis, maka bertindak sebagai Ketua)	✓
2	Direksi/SEVP Anggota Tetap	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓
		Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓
		Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓
		Direktur yang membawahi Kepatuhan	x
		SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	✓
3	Direksi/SEVP Anggota Tidak Tetap	Direktur yang membawahi Keuangan	✓
		Direktur yang membawahi Risiko Kredit	✓
		SEVP yang membawahi Human Capital	✓

Keterangan:

Jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam Rapat Komite Bisnis lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Tetap
Struktur Keanggotaan Komite Bisnis di atas mengacu pada Peraturan Direksi No. 05/PD/DIR/PPD/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Komite Direksi

PROFIL ANGGOTA KOMITE BISNIS

Profil anggota Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE BISNIS

Seluruh anggota Komite Bisnis tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE BISNIS

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE BISNIS

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE BISNIS TAHUN 2022

Sesuai dengan Risalah Rapat Direksi No. 65 Tanggal 15 Maret 2021 Pelaksanaan Rapat Komite Bisnis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2022, Komite Bisnis telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Adapun tanggal dan agenda Rapat Komite Bisnis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1.	26 Januari 2022	KMK Platinum bagi <i>Developer Large Commercial</i>
2.	16 Agustus 2022	Pembahasan Inisiatif 2.5 <i>Instant Purchase</i>
3.	31 Agustus 2022	Produk KPR / KAR Eazy
4.	22 September 2022	<i>Eagle Project - High Yield Loan (Produk KAR / KPR Top Up)</i> <i>Eagle Project - High Yield Loan (Produk KRING Top Up)</i>

No.	Tanggal	Agenda
	22 September 2022	<i>Eagle Project - High Yield Loan (Pilot Project KCP Mitra Unit UMKM BTN)</i> <i>Eagle Project - High Yield Loan (KUR Kolaborasi bundling KPR/KAR)</i> <i>Eagle Project - High Yield Loan (KMK Kemitraan Lembaga Pendidikan)</i> Penyesuaian Biaya SMS Notifikasi Bank BTN
5.	28 Desember 2022	Progress Update Implementasi BTN New Mobile Banking (BTN Mobile)

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait aspek remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan.

Perseroan di masa yang akan datang. Adapun uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 10 ayat 2 dan 3, Perseroan memberikan paket remunerasi tahun 2022 kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di luar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif (*ex officio*) dalam tabel berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Remunerasi yang Diterima
Moch. Amin Nurdin	859,425,728
Total	859,425,728

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Guna mendorong transparansi informasi mengenai pemberian remunerasi dan menjaga kelangsungan usaha Perseroan, Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dengan menerbitkan kebijakan remunerasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan OJK tersebut. Perseroan telah menerbitkan Surat Edaran Direksi No.16/SE/DIR/HCS/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi dengan mempertimbangkan aspek, antara lain stabilitas keuangan Perseroan, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Melalui surat edaran tersebut,

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun cakupan aspek kebijakan tersebut antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, baik remunerasi yang bersifat variabel maupun *material risk takers*.

Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, yaitu besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan yang ditetapkan di RUPS adalah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2021, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, per Wilayah dan pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi Perseroan telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Cabang bersangkutan. Perseroan memiliki kebijakan memberikan tunjangan regional untuk daerah-daerah tertentu.

Remunerasi Dikaitkan Dengan Risiko

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan Dengan Remunerasi

1. Kebijakan Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.
2. Metode yang mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja dan kinerja individu Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran kinerja yang meliputi Sasaran Kerja meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan

realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing. Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap kompetensi budaya perusahaan dan kompetensi leadership bagi pegawai yang memiliki bawahan.

3. Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi. Metode Penyesuaian remunerasi terkait pencapaian kinerja, dilakukan Perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan *Comparatio*. Dalam hal ini *Comparatio* dapat diartikan nilai persentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok Pegawai Tetap terhadap *midpoint* pada *range* Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang Pegawai Tetap yang bersangkutan. Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Jasa Produksi sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang terefleksi dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan Dengan Kinerja dan Risiko

Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi Perseroan.
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan.

Implementasi *Malus* akan dikenakan kepada Pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* dengan kriteria kondisi dan/atau sebagai berikut:

1. Menyebabkan kerusakan reputasi Perseroan yang signifikan atau berdampak negatif terhadap finansial Perseroan maupun kesempatan bisnis Perseroan.
2. Menyebabkan kerugian keuangan Perseroan yang signifikan.
3. Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
4. Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah.
5. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan peraturan dan prosedur Perseroan secara sengaja.
6. Menyebabkan kerugian yang signifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik.
7. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap modalitas Perseroan yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
8. Melakukan pengungkapan informasi rahasia Perseroan kepada pihak eksternal secara sengaja.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Perseroan bekerja sama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Juta Rp.	Orang	Juta Rp.
Remunerasi				
Honorarium/Gaji	10 ¹⁾	14.413	9	32.593
Tunjangan rutin (Tj. PPh21)	10 ¹⁾	7.645	9	21.743
Tunjangan Hari Raya	9	1.283	9	2.716
Tantiem	7 ³⁾	24.782	10 ²⁾	65.937
Total Remunerasi (a)	-	48.125	-	122.991
Fasilitas lainnya				
Asuransi Purna Jabatan	9	3.835	9	8.680
Tunjangan Perumahan	-	-	-	-
Tunjangan Transportasi	10 ¹⁾	2.885	9	1.210
Tunjangan Komunikasi	-	-	9	197
Total Fasilitas Lainnya (b)	-	6.720	-	10.087
Total Diterima (a) + (b)	-	54.845	-	133.078

Keterangan :

- ¹⁾ 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.
²⁾ 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
³⁾ 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris		Jumlah Direksi	
	2022	2021	2022	2021
Di atas Rp 2 miliar	10 ¹⁾	7	9	9
Di atas Rp 1 miliar - Rp 2 miliar	-	-	1 ²⁾	-
Di atas Rp 500 juta - Rp 1 miliar	-	-	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-	-	-

Keterangan :

- ¹⁾ Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.
²⁾ Jumlah anggota Direksi yang tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat variabel, yaitu Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Jumlah yang diterima											
Direksi				Dewan Komisaris				Pegawai ²⁾			
Orang		Juta Rp		Orang		Juta Rp		Orang		Juta Rp	
2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
10 ¹⁾	8	65.937	48.953	7	6	24.782	17.495	11.355	11.195	565.140	315.572

Keterangan :

- 1) 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
- 2) Terdiri dari pegawai yang menerima Jasa Produksi

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers (Mrt)

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Bank melakukan pendekatan secara kualitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

1. Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi untuk implementasi tahun 1 sampai dengan tahun 3.
2. Direktur Utama, seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi Bisnis, Kepala kantor Wilayah, dan Kepala Cabang untuk implementasi tahun ke 4 dan selanjutnya.
3. Penetapan jabatan kepala Divisi Bisnis yang tergolong MRT ditetapkan Direksi pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan

No.	Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT
1	Direktur Utama	1
2	Wakil Direktur Utama	1
3	Direktur	7
4	Komisaris Utama	1
5	Wakil Komisaris Utama	1
6	Anggota Dewan Komisaris	6

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Perseroan memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan oleh pegawai atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) sebagai bagian dari apresiasi terhadap manajemen dan seluruh pegawai. Kebijakan pemberian *shares option* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 30% atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru.

Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) serta pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP).

Pengungkapan *Shares Option* Tahap 1, 2, 3 Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank per 31 Desember 2022

MESOP Tahap 1

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Chandra Martha Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-
8	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. Pahotan Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	76.500	76.500	855	Feb 2011- Ags 2014
7	Hirwandi Gafar	-	58.000	58.000	855	Feb 2011- Ags 2014
8	Nofry Rony Poetra	-	77.000	77.000	855	Feb 2011- Ags 2014
9	Eko Waluyo	-	51.000	51.000	855	Feb 2011- Ags 2014
Pejabat Eksekutif		7.430.600	6.925.500	6.925.500	855	Feb 2011- Ags 2014
Pegawai		-	136.751.500	136.751.500	855	Feb 2011- Ags 2014

MESOP Tahap 2

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Chandra Martha Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
7	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-
8	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. Pahotan Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	55.000	55.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
7	Hirwandi Gafar	-	43.000	43.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
8	Nofry Rony Poetra	-	59.500	59.500	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
9	Eko Waluyo	-	41.000	41.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.467.500	5.467.500	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
Pegawai		-	102.442.500	102.442.500	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015

MESOP Tahap 3

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Chandra Martha Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-
8	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. Pahotan Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	56.000	56.000	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
7	Hirwandi Gafar	-	47.500	47.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
8	Nofry Rony Poetra	-	61.500	61.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
9	Eko Waluyo	-	44.500	44.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.566.500	5.566.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
Pegawai		-	102.367.500	102.367.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016

Program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada tahun 2016. Sejak saat itu Bank BTN tidak ada program *Shares Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Karyawan.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	2022	2021
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	22,34 : 1	22,63 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,18 : 1	1,18 : 1
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11 : 1	1,11 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,90 : 1	2,93 : 1

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Bank BTN tidak memiliki kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel (RBV) dan tanpa syarat, karena kebijakan pemberian RBV diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan lama periode bekerja. Bank BTN berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang dan selalu memastikan bahwa tidak ada pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bank BTN juga melakukan kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan remunerasi agar relevan dengan perkembangan industri dan strategi bisnis serta mengadopsi aspek-aspek kepatuhan pada ketentuan perbankan yang berlaku terkait remunerasi secara bertahap.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Tabel Program Pensiun Sukarela Terbatas (PPST)

No.	Jumlah nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai PPST	
		2022	2021
1.	Di atas Rp 1 miliar	1	2
2.	Di atas Rp 500 juta - 1 miliar	9	1
3.	Rp 500 juta ke bawah	-	-

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2022		Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2021	
Tunai	Rp 1.510 juta	Tunai	Rp 988 juta
Saham	5.018.840 (lembar)	Saham	2.745.940 (lembar)

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditanggguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditanggguhkan Tahun 2022		Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditanggguhkan Tahun 2021	
Tunai	Rp 458.925.047	Tunai	Rp 656.214.168
Saham	1.044.300 (lembar)	Saham	999.260 (lembar)

Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*

Jenis Remunerasi	Jumlah
Tunai	Rp 97.204 juta
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank BTN	-

B. Remunerasi Yang Bersifat Variabel *

Jenis Remunerasi	Tidak Ditanggguhkan	Ditanggguhkan
Tunai	Rp 54.772 juta	Rp 980 juta
Saham	-	3.317.200 (lembar)

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Tidak Ditanggguhkan	Ditanggguhkan
Tunai	Rp 54.772 juta	Rp 1.510 juta
Saham	-	5.018.840 (lembar)

Akuntan Publik

Fungsi Audit Eksternal

Perseroan menunjuk Auditor Ekstern untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021. Hal tersebut dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/ POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Auditor Eksternal dituntut untuk mampu memberikan informasi dan data yang akuntabel, independen, dan wajar khususnya atas aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Audit ekstern dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan profil Risiko Bank secara *Bank Wide*. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perseroan. yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Perseroan tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

Penunjukan Akuntan Publik

Perseroan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui RUPS dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme tender pengadaan jasa audit umum, dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam peringkat 10 besar (peringkat berdasarkan asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi).
2. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada Bank yang telah *go public* dan memiliki aset minimal Rp100 triliun.
3. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional.

4. Memiliki pengalaman mengaudit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
5. Termasuk dalam KAP terdaftar di OJK, Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
6. AP tidak sedang terkena sanksi oleh OJK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam HIMBARA.
7. Penunjukan *Signing Partner* (Partner yang bertanggung jawab) yang sama oleh Kantor Akuntan Publik paling lama dilakukan untuk periode audit 3 (tiga) Tahun Buku pelaporan secara berturut-turut, dan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut berikutnya tidak menggunakan AP (*Signing Partner*) yang sama.
8. Dalam perjanjian kerja Pengadaan Jasa KAP sekurang-kurangnya dicantumkan ruang lingkup audit sesuai SEOJK No. 36 tahun 2017 dan *review* perhitungan pencapaian KPI Direksi baik secara kolegal maupun secara individual sesuai pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-11/MBU/II/2020 tanggal 12 November 2020.
9. AP, KAP dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa wajib memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan diserahkan oleh KAP sebelum periode penugasan profesional dimulai.

Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit telah menetapkan Kantor Akuntan Publik KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun Buku 2022 melalui surat Dewan Komisaris Nomor 15/KOM/BTN/II/2022 tanggal 09 Februari 2022. Penunjukan ini juga telah mendapat pengesahan dalam RUPS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 02 Maret 2022 yang tertuang dalam Mata Acara Ketiga. Legalitas penugasan audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun buku 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah tertuang dalam Surat Penunjukkan Nomor 260/PFAD/PROC/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Surat Penunjukkan sebagai Pemenang dan Perjanjian Kerjasama (PKS) No.003/SPP/PFAD/IX/2022 tanggal 7 September 2022.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Periode 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin KAP Periode 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit
2022	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 8	Muhammad Kurniawan	Periode ke 2	Rp4.390.000.000
2021	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 7	Muhammad Kurniawan	Periode ke 1	Rp4.050.000.000
2020	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 6	Yovita	Periode ke 1	Rp3.249.000.000
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 5	Muhammad Kurniawan	Periode ke 1	Rp2.650.000.000
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 4	Yasir	Periode ke 2	Rp2.367.000.000

Fee dan Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Pada periode tahun 2022, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain selain ruang lingkup Jasa audit (Laporan Keuangan, PKBL, Laporan Kepatuhan dan Pengendalian Internal serta Laporan hasil evaluasi kinerja) sehingga tidak terdapat informasi *fee* jasa lain (non audit).

Opini Audit

Tahun	Opini Audit
2022	Wajar tanpa pengecualian
2021	Wajar tanpa pengecualian
2020	Wajar tanpa pengecualian
2019	Wajar tanpa pengecualian
2018	Wajar tanpa pengecualian

Sistem Pengendalian Internal

Implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. Perseroan mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengendalian

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Regulator, maupun peraturan internal yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.
5. Untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.

Selanjutnya proses pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian yang terlaksana dengan baik mendorong terciptanya Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) yang mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, serta langkah Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Unsur-unsur Lingkungan Pengendalian tersebut meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai;
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi Manajemen Bank;
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai;
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank;
5. Atensi dan arahan Manajemen Bank dan Komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko; dan
6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan manajemen risiko.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditimbulkan. Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank. Bank harus secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Pengendalian internal perlu direview

secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun baru muncul. Pelaksanaan *review* tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan operasional Bank.

Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank karena merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari sebagai bagian atas pengendalian terhadap keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi.

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktik yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dewan Komisaris Bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut dapat membantu Direksi termasuk Dewan Komisaris Bank dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank, sekurangnya meliputi hal-hal dibawah ini:

a. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)

Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional harus dilaporkan oleh pejabat dan staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi Bank dapat segera dideteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau *fraud*.

b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*functional review*)

Review yang dilaksanakan oleh Internal Audit Division secara periodik meliputi:

- 1) Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 2) Menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi terhadap rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan)

yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- 3) Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan dan menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).

c. Pengendalian Sistem Informasi

Pengendalian Sistem Informasi dilakukan dengan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi sesuai dengan ketentuan internal. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:

- 1) Pengendalian umum, meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan intern-eksternal.
- 2) Pengendalian aplikasi, diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

d. Pengendalian Aset Fisik

Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file data*, serta membandingkan nilai aset dan liabilitas Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.

e. Dokumentasi

Bank paling sedikit memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumentasi tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual dan harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor intern, akuntan publik, dan pengawasan Bank oleh Regulator. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor intern ketika melakukan audit secara rutin maupun non rutin.

2. Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi atau yang dikenal "*Four Eyes Principle*" dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional, melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank menetapkan prosedur (kewenangan) termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
- b. Menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

1. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi Bank. Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen harus dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan yang terjadi harus segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga harus didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan.
2. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi tersebut termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik yang dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (auditor intern) dan didukung oleh program kontijensi yang memadai.
3. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, pemegang saham dan nasabah Bank.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Dalam melaksanakan pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Perseroan memiliki Fungsi Kepatuhan yang dijalankan oleh Compliance and Governance Division. Compliance and Governance Division memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah serta melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan; mengelola risiko kepatuhan; serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Pelemahan

1. Kegiatan Pemantauan
 - a. Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional maupun satuan kerja audit internal. Bank juga harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.
 - b. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, sekurang-kurangnya antara lain sebagai berikut:
 - 1) Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank;
 - 2) Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal;
 - 3) Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
 - 4) Mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin yang selanjutnya direviu;
 - 5) Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan; dan
 - 6) Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.
2. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan Kelemahan dalam pengendalian internal, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional sebagai *risk taking unit*, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, satuan kerja audit internal, maupun pihak lainnya harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian internal atau tidak efektifnya pengendalian risiko harus segera ditindaklanjuti pejabat yang berwenang;

- b. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti, pejabat berwenang harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian internal dan mengambil langkah perbaikan; dan
- c. Hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian internal harus dilaporkan ke pejabat berwenang.

Kesesuaian dengan Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)

Sistem pengendalian internal Perseroan sebagaimana diatur dalam Kebijakan Umum (KU) Nomor 7 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sistem Pengendalian Intern telah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang juga sejalan dengan kerangka *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*. Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) yang merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian intern. Komponen tersebut mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top*.
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) yang merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) yang meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya.
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*) yang merupakan kondisi saluran komunikasi efektif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*) yang merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaannya.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pada tahun 2022, Perseroan telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Perseroan melalui Internal Audit Division (IAD) melakukan *Internal Control Assessment* (ICA) dalam rangka evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut mengukur kualitas pengendalian intern dari satuan kerja *auditee* atas 5 (lima) komponen pengendalian intern COSO *Framework* menggunakan kriteria dan metodologi *rating* kuesioner *Internal Control Assessment* (ICA) serta *professional judgement auditor* melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan.
2. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (*justifikasi atas irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang.
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.
6. Menetapkan informasi/*feedback* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Untuk menilai kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Kecukupan dan Efektivitas Pengendalian Internal menggunakan kuesioner *Internal Control Assessment* (ICA) untuk menyusun *Risk Control Assessment* serta *Audit Rating* yang diuji ulang pada saat pelaksanaan audit lapangan (*walkthrough*).
2. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target kinerja riil dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP).

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap pasal-pasal hukum, peraturan dan perjanjian kerja sama serta kepatuhan pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, Identifikasi Risiko, aktivitas

pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal (*risk control*) Perseroan dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat (*divisi/desk/Regional Office*) serta Kantor Cabang baik Konvensional maupun Syariah. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Upaya tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi permasalahan yang muncul

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Direksi dan Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) sistem informasi dan akuntansi serta komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*).

Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern ini merupakan pedoman yang memuat ukuran minimal tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diselenggarakan dan diterapkan oleh Perseroan di dalam seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perseroan.

Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan sebagai tindak lanjut penerapan Basel II khususnya pilar 1, Bank telah mengimplementasikan:

1. Pengukuran Risiko Kredit dengan melakukan pemetaan eksposur risiko kredit sesuai kategori portofolio dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit menggunakan *Standardized Approach* mengacu pada SE OJK No. 11/SEOJK.03/2018

tentang Perubahan atas SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Saat ini, Bank telah melakukan persiapan dalam rangka implementasi standar internasional baru dalam dokumen Basel III: *Finalising Post-Crisis Reforms* melalui penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 07 Oktober 2021. Sejak November 2022 Bank secara paralel telah melakukan pengukuran dan pelaporan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit sesuai dengan ketentuan pengukuran dan pelaporan terbaru mengikuti arahan dan ketentuan dari Regulator.

2. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
3. Perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar. Saat ini, Bank telah melakukan persiapan dalam rangka implementasi perhitungan ATMR Risiko Operasional Pendekatan Standar dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 06/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 dan melakukan persiapan pencatatan data kerugian terkait risiko operasional sesuai dengan ketentuan Regulator.

Pelaksanaan *Stress Testing* Bank terfokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sebagai upaya dalam menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank telah melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan internal bank dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit serta secara triwulan untuk risiko pasar dan risiko likuiditas. *Stress testing* dilaksanakan secara berkala guna menilai kecukupan modal apabila terjadi permasalahan yang memiliki risiko ekstrim atau *catastrophy* tetapi *plausible*. Adapun *Stress Testing* Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah dilakukan secara Triwulan sedangkan *Stress Testing* Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun.

Selain itu, Bank juga melakukan *Stress Testing* untuk kebutuhan *update* dokumen *Recovery Plan* setiap tahun sebagai pelaksanaan implementasi Basel III Bank telah melaporkan perhitungan *Leverage Ratio* (LR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bulanan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum, *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur

dalam POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

Risk Appetite Statement

Saat ini, Bank telah memiliki *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pernyataan kualitatif serta ukuran kuantitatif dari risiko-risiko utama Bank. Pengungkapan RAS dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Risiko yang dikuantifikasi antara lain:

1. Risiko Kredit
Untuk menjaga pertumbuhan aset yang berkesinambungan dengan tingkat kualitas aset yang sehat.
2. Risiko Pasar
Untuk menjaga tingkat risiko suku bunga dan nilai tukar secara optimal dalam mendukung pertumbuhan profitabilitas dan ketahanan modal.
3. Risiko Likuiditas
Untuk menjaga likuiditas pada tingkat optimal dalam mendukung pertumbuhan profitabilitas maupun mengantisipasi potensi tekanan likuiditas.
4. Risiko Operasional
Untuk menjaga stabilitas operasional dan intoleransi terhadap setiap pelanggaran.
5. Risiko Hukum
Untuk menjaga kebijakan hukum dan perikatan untuk meminimalisir gugatan dan risiko hukum.
6. Risiko Strategik
Untuk menjaga Bank fokus pada sektor perumahan untuk menjaga rentabilitas dan permodalan yang selaras dengan tingkat risiko dan berkelanjutan.
7. Risiko Kepatuhan
Untuk menjaga komitmen untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan eksternal dan internal yang berlaku.
8. Risiko Reputasi
Untuk menjaga dalam memberikan pelayanan terbaik dan menyelesaikan keluhan nasabah secara tuntas.

Penetapan Limit RAS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. RAS ditetapkan secara *alignment* antara Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* & *Recovery Plan*.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam Sistem manajemen risiko Bank melaksanakan proses manajemen risiko yang didukung dengan 4 pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi.
4. Sistem Pengendalian Risiko yang menyuruh.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan melalui pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang digambarkan dengan organisasi manajemen risiko sebagai berikut:

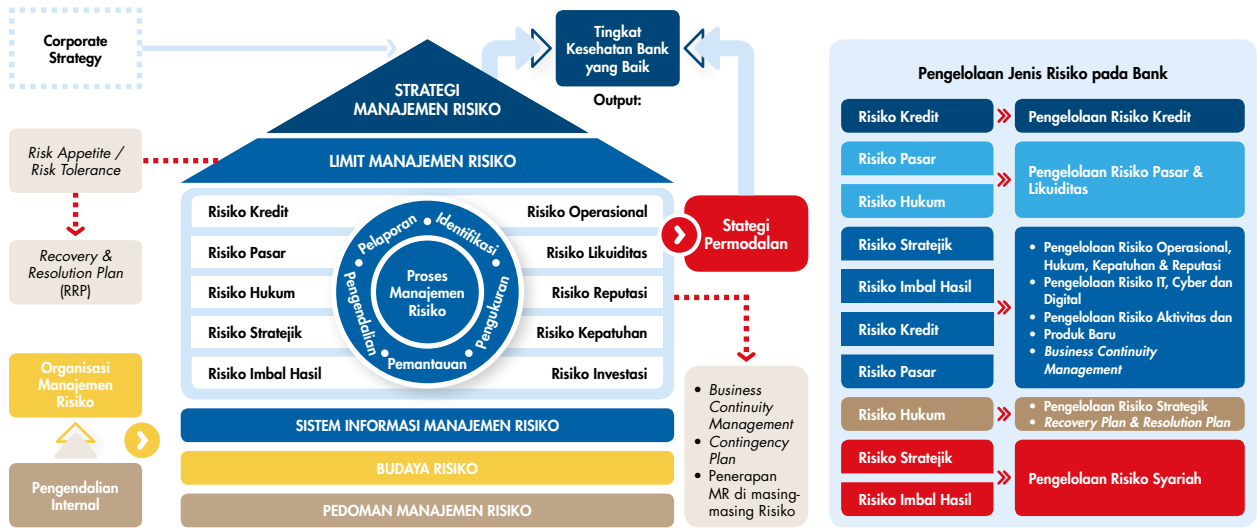


Organ Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa komite dalam menjalankan tugas dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku, untuk selanjutnya diteruskan kepada *layer* di bawah organ Dewan Komisaris dan Direksi yakni satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Policy.

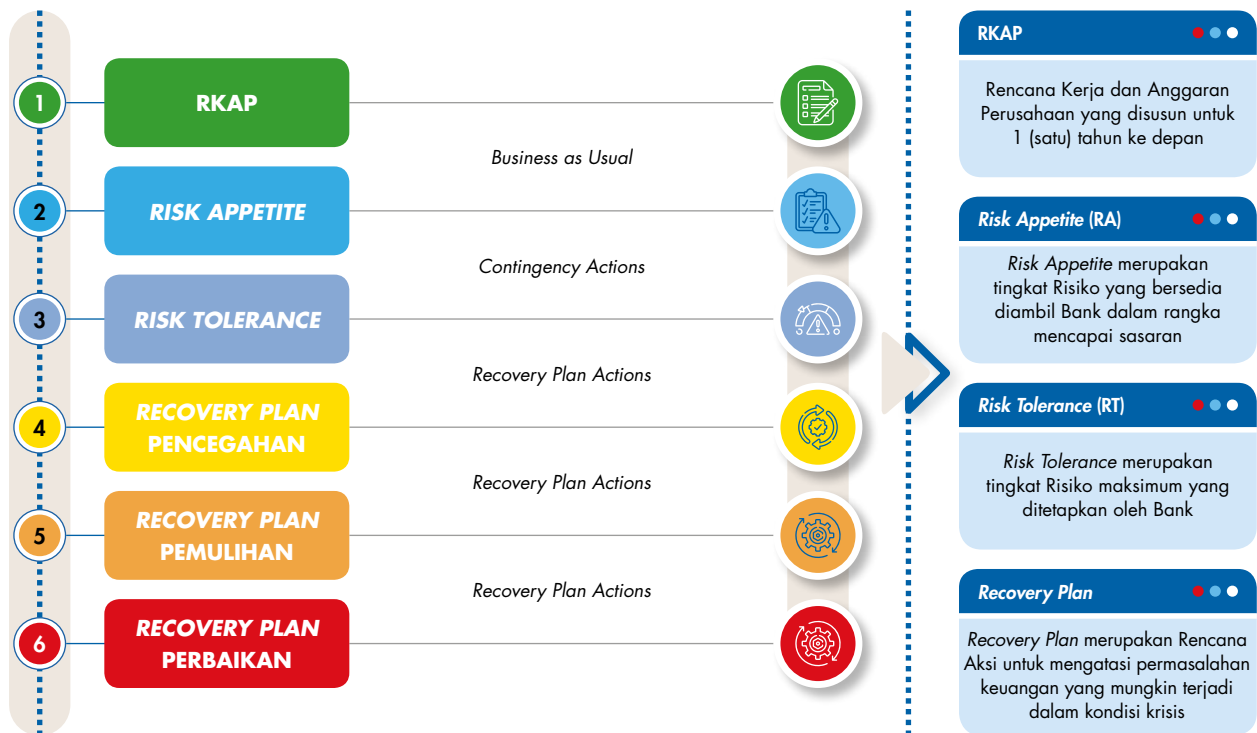
Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. Perseroan saat ini melakukan transformasi arsitektur kebijakan dan prosedur sesuai hirarki piramida kebijakan yang ideal. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini Bank BTN telah menyusun Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai Kebijakan tertinggi dalam penerapan Manajemen Risiko dengan *framework* mencakup seluruh aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko Bank.

Pemetaan kebijakan umum manajemen risiko digambarkan mulai dari strategi manajemen risiko, pengelolaan risiko pada Bank dan *output* yang diharapkan adalah Tingkat Kesehatan Bank yang sehat.



Selain kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Bank juga telah melakukan serangkaian proses dalam penetapan limit risiko dirumuskan dan dijabarkan dengan mengikuti dan atau menyelaraskan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan hingga *Recovery Plan* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait gambaran penetapan limit adalah sebagai berikut:



Dalam penguatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dalam pelaksanaannya Perseroan juga memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu pilar budaya perusahaan Perseroan, dimana salah satu pilar budaya perusahaan adalah *Governance & Risk Culture*. Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang *urgent* dan krusial untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent* dan *comply*.



Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada tahun 2025

4 Pilar Budaya

Tambah Tumbuh dan Memenuhi Harapan Pelanggan

Sales & Service Culture

Bersih dan Terpercaya

Governance & Risk Culture

Berkinerja Unggul

Performance Culture

Terus Belajar

Learning Culture

8 Perilaku Utama BTNers

- 1 Berpegang teguh dan patuh pada etika bisnis dan peraturan yang berlaku
- 2 Terus belajar untuk meningkatkan kompetensi
- 3 Disiplin, konsisten dan tugas dalam menyelesaikan tugas dengan kualitas hasil terbaik
- 4 Saling menghormati, menghargai dan terbuka terhadap perbedaan
- 5 Bertanggung jawab dan selalu mengedepankan kepentingan perusahaan
- 6 Proaktif, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan
- 7 Cepat tanggap terhadap perubahan serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan
- 8 Terbuka untuk bekerja sama yang menghasilkan nilai tambah

AKHLAK : Nilai-Nilai Utama & 18 Panduan Perilaku



Amanah



Kompeten



Harmonis



Loyal



Adaptif



Kolaboratif

AKHLAK BTN

Untuk mencapai **Visi Bank BTN menjadi Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada tahun 2025.**

Seluruh BTNers wajib memegang teguh 4 pilar budaya dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di Unit Kerja masing-masing.

Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang *urgent* dan krusial untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent* dan *comply*.

Dalam menjaga Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, maka dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan internal dan dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Review terhadap kebijakan internal telah dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *assessment* untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan, dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja Risk Development yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengendalian risiko atas kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan Perseroan agar terminimalisir risiko yang akan dihadapi Perseroan. Identifikasi, pengukuran,

pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko.

Hal-hal yang menjadi perhatian Perseroan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali dan merekam risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Perseroan. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, peristiwa risiko dan dampak risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Perseroan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Selain itu, Perseroan mengidentifikasi risiko yang dilakukan secara berkala.

Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk meng-cover risiko residual. Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran berupa metode standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perseroan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perseroan terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perseroan. *Stress test* dilakukan secara berkala dan me-review hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila diperkirakan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

Pemantauan Risiko

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Perseroan menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dari toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, *credit derivatives* serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

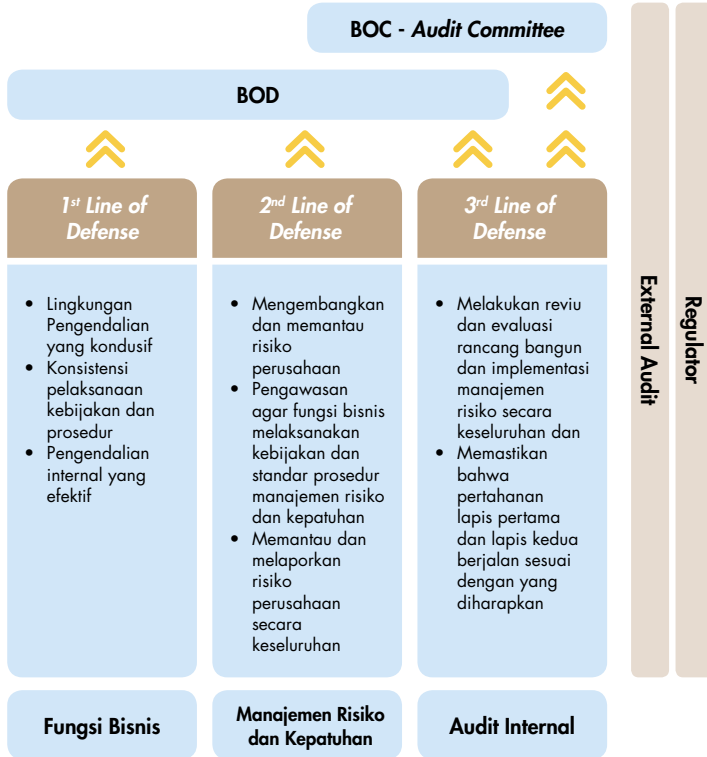
Sistem informasi manajemen risiko pada Bank dikelola secara bersama-sama oleh beberapa Divisi pada Bank. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* data dan risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam melakukan proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melengkapi sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal, yang digambarkan prosesnya sebagai berikut:

3 Lines of Defense



BTN 3 Lines of Defense

Konsep 3 Lines Defense, yang terdiri dari:

1st Line

Fungsi Bisnis, Fungsi Operasional, dan Fungsi Risiko

- Melakukan aktivitas bisnis unit sesuai tujuan strategis Perseroan
- Melaksanakan aktivitas bisnis unit sesuai dengan kebijakan yang berlaku
- Bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari kegiatan bisnis
- Melakukan kontrol dan prosedur yang efektif sesuai dengan kebijakan dan arahan Perseroan

2nd Line

Fungsi Pemantauan Risiko, Kepatuhan, dan Pengelolaan Kebijakan

- Unit Kepatuhan**
Pengelolaan Risiko Kepatuhan
- Unit Risiko**
Pengelolaan Risiko Perusahaan
- Unit Policy**
Pengelola Kebijakan dan Prosedur

3rd Line

Fungsi Audit Internal

- Bertanggungjawab memastikan hal-hal sbb:
- Unit Compliance 2nd Line Defense secara efektif
 - 1st Line Defense sebagai Risk Owner telah mengelola risiko kepatuhan secara memadai

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Dalam penerapan manajemen risiko jenis-jenis risiko yang dikelola Bank antara lain:

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.

Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Pada sebagian besar Bank, pemberian kredit merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di

antarnya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite & Risk Tolerance*), Bank sedang melakukan *re-modeling Internal Credit Rating (ICR)* untuk kredit komersial dalam rangka melakukan review terhadap ICR agar dapat digunakan secara lebih akurat.

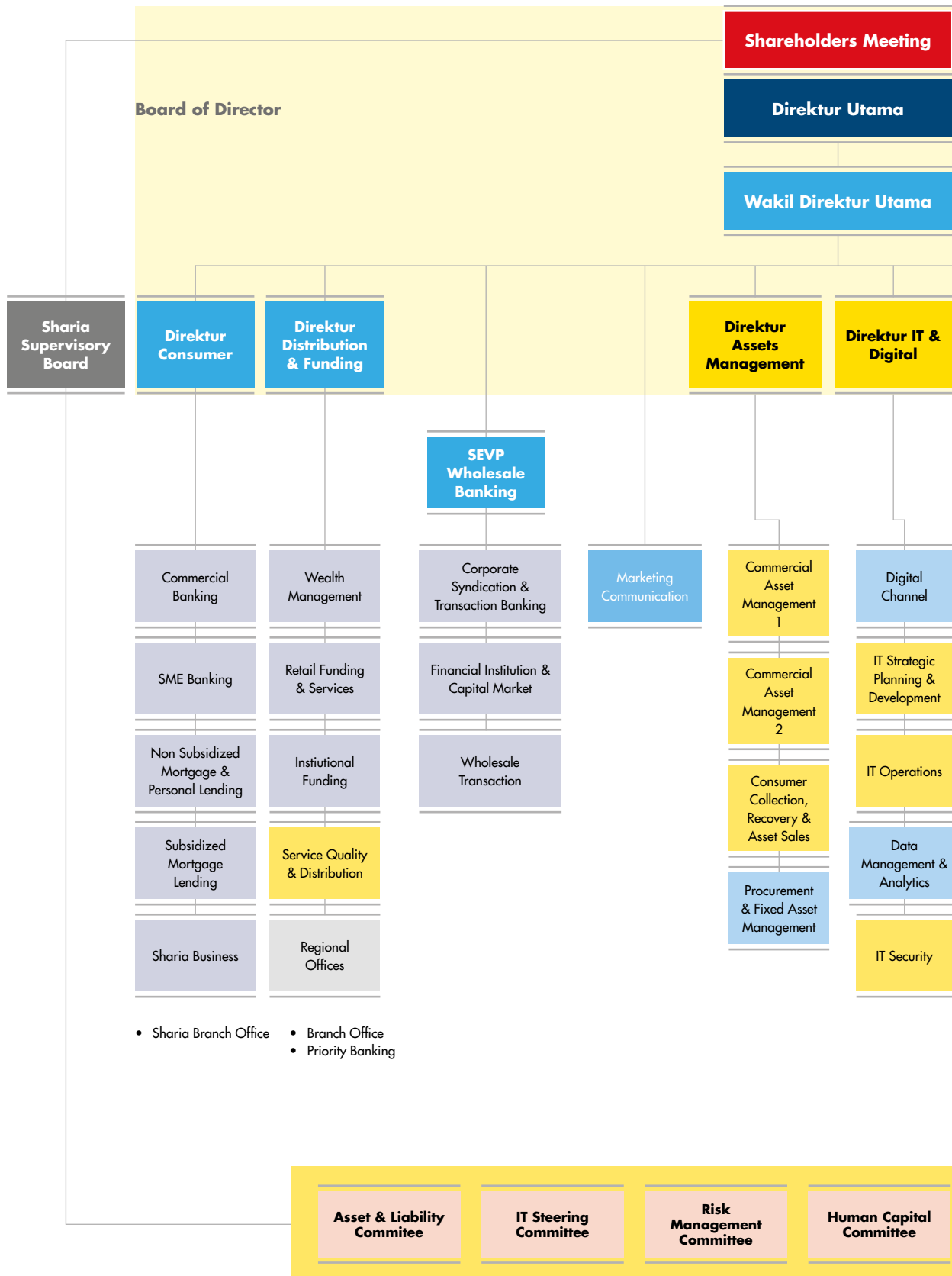
Bank saat ini sudah mengimplementasikan *Commercial Banking Center (CBC)* dimana CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Terhadap proses pengambilan keputusan pemberian kredit komersial, Bank juga melakukan pembentukan Komite Kredit melalui Rapat Komite Kredit. Selain itu telah dibentuk Departemen *Monitoring* pada *Commercial Banking Division* yang khusus memonitor eksposur kredit debitur-debitur besar (50 debitur inti) serta sudah diimplementasikan *Intelligence Credit Monitoring (iCremo)* yakni aplikasi untuk kredit komersial yang berfungsi untuk melakukan proses *monitoring* kredit komersial mencakup tiga pilar (Manajemen, Prospek Usaha dan Agunan). Selain itu beberapa pengembangan sistem seperti pada segmen SME dikembangkan sistem *Credit Scoring Model* dan pada segmen Komersial dan Korporasi sedang dikembangkan *Early Warning System*.

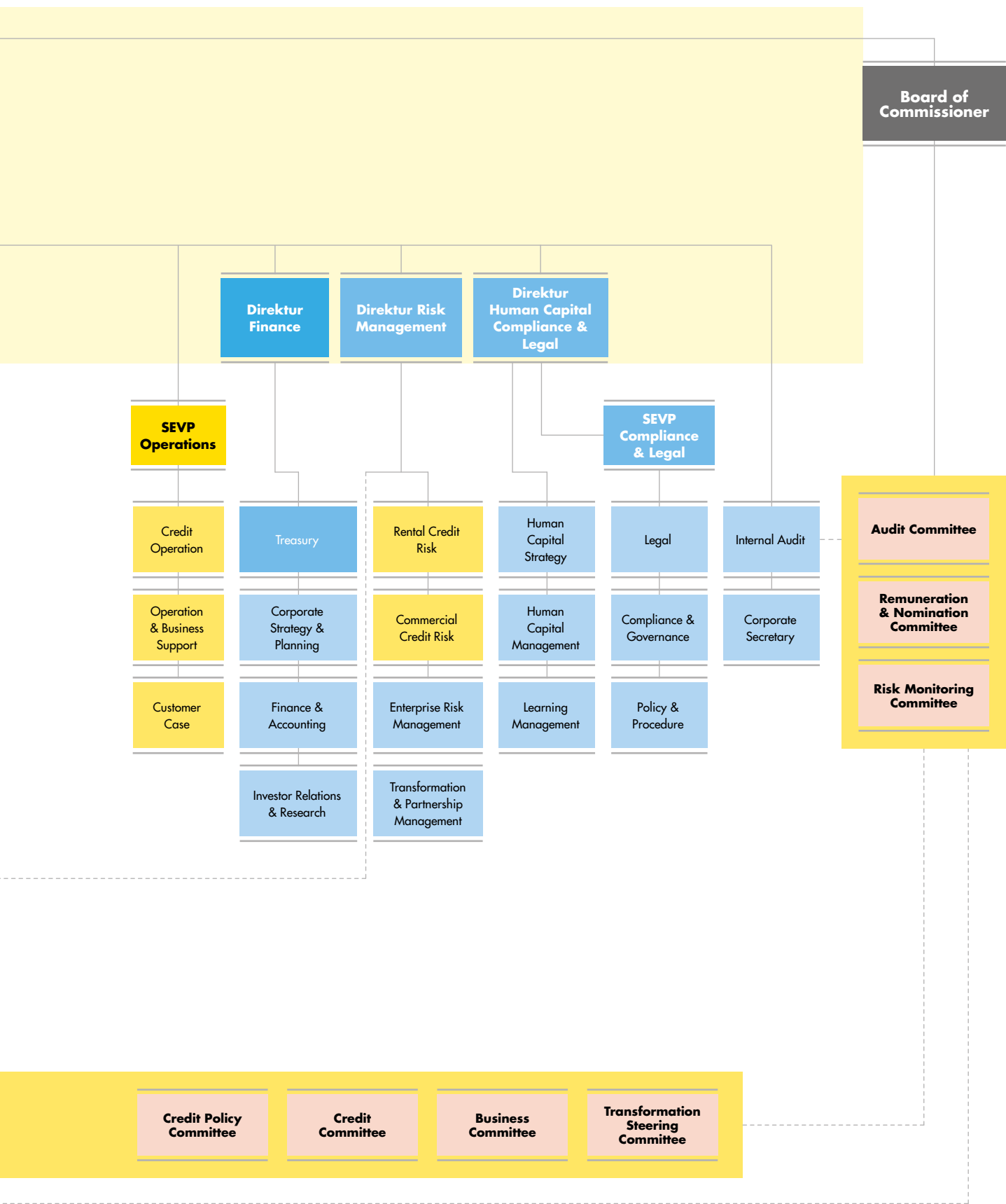
Pada kredit konsumen, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem *iLoan Konsumer* yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model (CSM)* dimana saat ini sedang dilakukan pengembangan pada CSM Bank. Pengelolaan debitur kredit konsumen Kol-2 dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja *Consumer Collection, Recovery & Asset Sales* sedangkan untuk kredit komersial dilakukan oleh Satuan Kerja *Commercial Asset Management*.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar dan pada tahun 2022 ini sedang dilakukan uji coba perhitungan menggunakan ketentuan terbaru yaitu SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum yang efektif diberlakukan pada Januari 2023.

Dalam rangka mengelola risiko kredit, Bank telah menerapkan *Four Eyes Principle* dengan memisahkan fungsi risiko kredit dan unit bisnis. Dalam putusan kredit komersial terdiri dari *Commercial Risk* dan Unit Bisnis selaku *Risk Taking Unit* dan *first line* serta putusan kredit konsumen yang terdiri dari *Retail Risk Division (Regional Loan Processing Center)* dan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah.

Hal ini juga dapat digambarkan dengan struktur organisasi Bank yang telah memisahkan fungsi *credit risk* dan *risk taking unit* sebagai berikut:





Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas yang dapat merugikan Bank. Risiko Pasar dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Pengelolaan Risiko Pasar

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar yang dilakukan oleh unit bisnis dan/atau Enterprise Risk Management Division. Identifikasi risiko pasar salah satunya dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru. Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, Bank telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO) dimana secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Bank, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*.

Dalam rangka mengukur risiko suku bunga dalam posisi *trading book* dan *banking book*, Bank melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas bank. Sedangkan dalam rangka mengukur risiko nilai tukar, Bank melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Bank. Khusus untuk posisi *banking book*, Bank melakukan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* dengan metode *repricing gap* sebagaimana tertuang SE Direksi No. 22/SE/DIR/ERMD/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* dan SK Direksi No. 27/SK/DIR/ERMD/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book)* bagi Bank Umum, Bank telah menyampaikan penyesuaian kebijakan terkait IRRBB dan laporan perhitungan IRRBB sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* tersebut. Perseroan telah menyusun kebijakan IRRBB dan telah mengembangkan sistem/aplikasi pengukuran IRRBB.

Sebagai upaya guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Bank melakukan *stress testing* guna menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrim, dengan skenario mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal bank. Untuk skenario internal Bank, setiap awal tahun Enterprise Risk Management Division berkoordinasi

dengan *Working Group Stress Testing* (Divisi terkait) merumuskan skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Pasar selama 1 (satu) tahun ke depan.

Pemantauan dan pengendalian risiko pasar di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pasar terhadap limit internal Bank (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) yang telah ditetapkan dan direview secara berkala agar selaras dengan kondisi Bank. Selain itu, dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko nilai tukar, Bank telah menetapkan limit yang mencakup limit transaksi *treasury*, limit *dealer*, *budget loss limit*, *stop loss/stop gain limit*, serta batasan Posisi Devisa Neto (PDN) yang sesuai dengan batasan maksimal yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Bank memiliki unit Market Middle Office di Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian risiko pasar, termasuk *monitoring* atas limit-limit yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Basel II Pilar 1, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Portofolio yang diperhitungkan dalam penentuan KPMM risiko pasar terdiri dari portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga serta portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar.

Untuk implementasi Basel II khususnya Pilar 2, Bank telah menyampaikan hasil laporan penerapan manajemen risiko untuk *Interest Rate in the Banking Book* (IRRBB) dan laporan perhitungan IRRBB kepada regulator secara triwulan sesuai SE OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book)* bagi Bank Umum.

Untuk implementasi Basel III Bank yaitu:

1. Menyampaikan hasil laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) kepada regulator secara *daring* setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Bank setiap triwulan sesuai POJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
2. Menyampaikan hasil laporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) kepada regulator secara *daring* setiap triwulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Bank sesuai POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, proses manajemen risiko likuiditas, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko likuiditas. Perseroan memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO) yang berfungsi melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada Perseroan.

Mengacu kepada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan *trend* kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Pengukuran risiko likuiditas pada Perseroan dilakukan oleh Treasury Division dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam melakukan pengukuran risiko likuiditas mengacu pada SE Direksi No. 21/SE/DIR/ERMD/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas. Pengukuran risiko likuiditas menggunakan 4 (empat) metode, yaitu *stock-based*, analisis profil maturitas, proyeksi arus kas dan *stress testing*. Metode *stock-based* digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada Perseroan dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, metode analisis profil maturitas digunakan untuk mengukur *gap* likuiditas dan proyeksi arus kas digunakan untuk mengukur jumlah maupun *trend* kebutuhan likuiditas. Perseroan melakukan *stress testing* menggunakan skenario *Bank Specific Crisis* (BSC) maupun *General Market Crisis* (GMC) *stress testing*, yang tujuannya mengukur kecukupan aset likuid yang tersedia dan kemampuan Perseroan memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. Enterprise Risk Management Division berkoordinasi dengan *Stress Testing Working Group*

(Divisi terkait) merumuskan dampak risiko terhadap skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Likuiditas selama 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur agar tidak terdampak risiko likuiditas, Perseroan melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala baik harian, pekanan, bulanan maupun triwulan. Pemantauan risiko likuiditas oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Direksi serta evaluasi strategi disampaikan kepada Divisi terkait.

Pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko likuiditas terhadap limit internal Bank (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) dan *trigger level Recovery Plan* yang telah ditetapkan. Limit tersebut direview secara berkala agar selaras dengan kondisi Perseroan. Selain itu, Bank melakukan pemantauan *Early Warning Indicator* (EWI) dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Unit Kerja terkait.

Sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank BTN telah melakukan *monitoring* indikator likuiditas, yang salah satunya dilihat dari rasio LCR dan NSFR sesuai POJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bagi Bank Umum dan POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*).

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perseroan sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti *fraud internal*, *fraud eksternal*, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka menerapkan pengelolaan manajemen risiko operasional, Perseroan telah memiliki aplikasi *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA System) yang digunakan untuk

melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada seluruh unit kerja Perseroan. Pendekatan yang digunakan pada aplikasi RCSA adalah ISO 31000:2009 dimana risiko dapat didefinisikan sebagai dampak ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Oleh karena itu dalam mengisi RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja tersebut.

Untuk mengelola data kerugian operasional, Perseroan mengembangkan aplikasi *BTN Loss Event Database* (BTN-LED) yang berfungsi sebagai *operational risk data collection* atas kejadian risiko operasional di Kantor Cabang berdasarkan 7 (tujuh) tipe kejadian risiko sesuai ketentuan Basel II. Aplikasi BTN LED ini berbasis *web* sehingga dalam pelaporan unit kerja dapat mengirimkan data kerugian akibat risiko operasional (*loss event*) secara *online* setiap bulan. *Output* dari BTN LED ini adalah data akumulasi kerugian Perseroan dalam satu bulan baik berupa *actual loss*, *nearmiss*, maupun *potential loss* untuk masing-masing *risk event*. Hasil data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional untuk masing-masing unit kerja. Peta eksposur ini menjadi acuan dalam mitigasi terjadinya kejadian serupa dengan melakukan perbaikan proses bisnis atau menambahkan bentuk mitigasi risiko lainnya.

Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan dalam menjalankan bisnis pasca terdampak risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan kegagalan sistem IT. Kebijakan BCM tersebut berisikan langkah-langkah sistematis dan menjadi pedoman pegawai dalam menghadapi keadaan darurat mulai dari kesiapan pra-bencana, respon terhadap bencana, rencana kontinuitas operasional, hingga pengembalian ke kondisi normal. Dalam mendukung keberhasilan penerapan BCM, Perseroan melakukan beberapa aktivitas antara lain:

1. Pengkinian peraturan internal terkait *Business Continuity Management* (BCM) secara berkala yang berisikan peran dan tanggung jawab masing-masing Unit Kerja dengan jelas.
2. Proses internalisasi kepada seluruh pegawai dengan menyusun materi sosialisasi dan pelaksanaan kuis yang dimasukkan ke dalam program budaya *Risk Awareness*
3. Melakukan *assessment* ketersediaan *Working Remote Area* (WRA) dengan melibatkan unit kerja kritikal, sehingga WRA yang dimiliki Perseroan memiliki tingkat kesiapan yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional saat terjadi bencana.

Sebagai salah satu upaya melakukan meningkatkan fungsi pemantauan atas pengendalian risiko operasional pada aktivitas operasional di Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Sentra Bisnis Komersial (CBC) telah ditempatkan petugas *Business Branch Control* (BBC), *Regional Business Control* (RBC) dan

CBC BC (*Commercial Business Center Business Control*) yang berfungsi sebagai *1,5 line of defence* dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Perseroan untuk membangun budaya sadar risiko pada seluruh jenjang organisasi Perseroan, telah dilakukan pengkinian Kebijakan Umum Strategi Anti *Fraud*.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.

Pengelolaan Risiko Hukum

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Hukum dan Satuan Kerja Operasional Kredit. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Satuan Kerja Hukum diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi, sedangkan dari Satuan Kerja Operasional Kredit diperoleh tingkat kualitas perikatan dokumen perkreditan (LAT). Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Perseroan menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Perseroan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Satuan Kerja Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*. Selain itu, Perseroan memiliki aplikasi *Legal Application System* (LApS) yang dirancang dalam bentuk *website* dan digunakan sebagai register serta *monitoring* terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi atau ditangani oleh Perseroan baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya.

Bank telah menempatkan pegawai di Kantor Wilayah sebagai *Regional Legal Representative* (RLR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberi bantuan hukum terhadap permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional Perseroan sesuai wilayah kerjanya;
2. Melaksanakan aktivitas hukum mewakili pihak Perseroan dalam beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan maupun di luar Pengadilan sesuai wilayah kerjanya;
3. Memberi pendapat hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan di bidang litigasi yang diajukan oleh unit kerja di wilayah kerjanya;
4. Melakukan pengkinian basis data perkara hukum Bank pada system aplikasi *Legal Application System* (LApS);
5. Melakukan fungsi *legal watch* sesuai wilayah kerjanya.

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pengelolaan Risiko Strategik

Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum yang ditetapkan Direksi.

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategik dilakukan oleh Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan dan *monitoring Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Strategik secara bulanan. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Satuan Kerja mereview strategi dasar dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia serta melakukan *review risk appetite* dan *risk tolerance* secara berkala dan minimal setahun sekali.

Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan Risiko Strategik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*).

Dalam pengendalian Risiko Strategik, Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti halnya risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan CKPN, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Risiko Kepatuhan juga dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan Perseroan dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance and Governance Division/CMGD). Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan atas kewajiban-kewajiban penyampaian laporan Bank terhadap pihak eksternal dan melakukan *review* ketentuan internal secara berkala dan berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku. Bank memiliki aplikasi internal yaitu *Compliance Regulatory & Monitoring System* (CRMS) untuk memudahkan seluruh pegawai BTN dalam mengakses seluruh ketentuan eksternal dan berfungsi sebagai *reminder* kepada unit kerja untuk kewajiban penyampaian laporan kepada Regulator. Untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah menempatkan *Regional Compliance Supervisory Officer* (RCSO) di Kantor Wilayah untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan Kantor Cabang dalam menjalankan aktivitas operasional. Seiring dengan berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi, pada Satuan Kerja Kepatuhan telah dibentuk sub unit Data Privacy dan telah dilakukan analisa kesenjangan kesiapan Perseroan dalam mengimplemtasikan ketentuan dimaksud. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan melaporkan Risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Perseroan secara berkala. Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan Perseroan, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

Dalam rangka pengendalian Risiko Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan sebagai berikut:

1. Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Perseroan, misalnya pengaruh reputasi dari pemilik Perseroan dan perusahaan terkait, kompleksitas Produk dan kerjasama bisnis Perseroan, pemberitaan negatif mengenai Perseroan, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.
2. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Perseroan.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung Perseroan menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Peran Manajemen Unit Bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *first-line* dalam mencegah terjadinya Risiko Reputasi khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), penghimpunan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta SDM.

Dalam rangka proses identifikasi risiko reputasi Bank BTN memiliki aplikasi SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) dan melakukan *monitoring* terhadap semua media massa (cetak dan elektronik lokal maupun nasional). Perseroan melakukan pencatatan setiap pemberitaan tentang Bank baik secara langsung (*straightnews*) maupun tidak langsung (*mention*). Aplikasi SPN terintegrasi dengan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Konvensional dan Syariah. Satuan Kerja Pengelolaan Pengaduan Nasabah sebagai pengelola SPN menindaklanjuti

pengaduan nasabah tersebut dan menyelesaikan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Perseroan antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Perseroan. Risiko Reputasi Perseroan dikelola oleh Satuan Kerja *Corporate Secretary* yang mengelola pemberitaan tentang Perseroan yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan Satuan Kerja Pengelolaan Pengaduan Nasabah yang mengelola pengaduan nasabah.

Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) Perseroan berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara online antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh unit kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi dari Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Pelayanan Nasabah berdasarkan *assessment* pada parameter profil risiko reputasi.

Penilaian Risiko

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Satuan Kerja Manajemen Risiko menyampaikan laporan profil risiko ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per triwulan yang memuat tentang eksposur Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Penilaian profil risiko meliputi penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Perseroan.

Secara umum, sesuai dengan penilaian secara *self assessment* Profil Risiko TW IV 2022 diupayakan berada pada tingkat *Low to Moderate*, yaitu kemungkinan kerugian yang dihadapi Perseroan dari risiko inheren komposit tergolong rendah (*Low to Moderate*) dengan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit Memadai (*Satisfactory*), dengan detail sebagai berikut:

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Operasional	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Strategik	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Emiten atau Perusahaan Publik

Penilaian Profil Risiko Bank BTN baik Konvensional dan Syariah sepanjang tahun 2022 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Bank BTN (baik konvensional dan syariah) dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh Bank BTN dengan baik dan efektif. Hasil evaluasi efektivitas Manajemen Risiko Bank BTN tahun 2022 oleh pihak eksternal (konsultan) melalui *Risk Maturity Index (RMI)* berada pada peringkat *Managed* dengan kriteria memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait aktivitas manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko telah terstandarisasi pada setiap unit kerja dan manajemen risiko telah menjadi bagian dari proses dan budaya kerja Bank BTN.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank BTN dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol. Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan. Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai.

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan antara lain melalui pemantauan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen dan SDM serta kecukupan sistem pengendalian internal. Kecukupan sistem Manajemen Risiko Perseroan antara lain didukung oleh:

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko dibantu Enterprise Risk Management Division sebagai sekretaris Komite melakukan

dan mengagendakan pertemuan secara berkala membahas isu-isu terkini, antara lain: Profil Risiko Triwulanan Bank BTN, Tingkat Kesehatan Bank, *Recovery Plan* dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank BTN termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang di dalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Perseroan.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KOMAR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KOMAR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank BTN dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari Market Risk Management Department, Credit Portfolio Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Integrated Risk Management Department, Operations Risk Controller Management Department, IT Risk Management Department dan Model Validation.

Credit Portfolio Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit, Market Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas.

Operational Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Sebagai langkah pengembangan organisasi Manajemen Risiko, saat ini Perseroan membentuk unit kerja yakni Operations Risk Controller Management Department yang berfungsi sebagai *control tower* terhadap aktivitas pengawasan dan evaluasi atas penerapan pengendalian internal di Kantor Cabang (KC) dan Commercial Banking Center (CBC) yang dijalankan oleh Branch Business Control (BBC) dan Commercial Banking Center – Business Control (CBC-BC) yang merupakan organ *monoline* Kantor Wilayah. Selain itu, dalam memperkuat manajemen risiko di bidang *IT Cyber* dan Digital, Perseroan membentuk IT Risk Management Department yang berfungsi untuk memastikan efektivitas pengelolaan Risiko IT Cyber dan Digital.

Integrated Risk Management Department memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Strategik dan berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis guna mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

Model Validation adalah pengembangan struktur organisasi dari *Quality Assurance & Control* yang berfungsi melakukan validasi model atas model risiko yang dimiliki Perseroan dan memastikan pemantauan kinerja secara keseluruhan termasuk *surveillance* ISO 9001:2015, pemantauan temuan audit internal dan eksternal.

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

Perseroan telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) yang di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Panduan kebijakan di bidang manajemen risiko tersebut juga telah dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan internal, antara lain: Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Penilaian Profil Risiko Perseroan, Pelaksanaan pelaporan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Prosedur Validasi model Risiko, Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi *BTN-Loss Event Database* (BTN-LED Tool), Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Pasar, Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*, Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing*, Prosedur Validasi model Risiko, Pedoman Pemantauan Likuiditas, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR), *Risk & Control Self Assessment*, Petunjuk pelaksanaan rencana aksi (*Recovery Plan*), *Risk Culture*, Pedoman dan Penilaian Profil Risiko Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah, Proses *Internal Credit Rating* (ICR), Petunjuk Pelaksanaan Proses *Credit Scoring Model* (CSM), Batas Wewenang Kredit Komersial dan Kredit Konsumer, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Kebijakan Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19, *Business Continuity Management* (BCM), *Standard Operating Procedure* (SOP) *Business Continuity Plan* (BCP),

Standard Operating Disaster Recovery Plan (DRP) dan *Standard Operating Business Impact Analysis* (BIA).

Saat ini, Perseroan juga sedang melakukan perbaikan dan transformasi atas Arsitektur Kebijakan dan Prosedur sesuai hirarki kebijakan sehingga membentuk struktur piramida kebijakan yang ideal.

Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

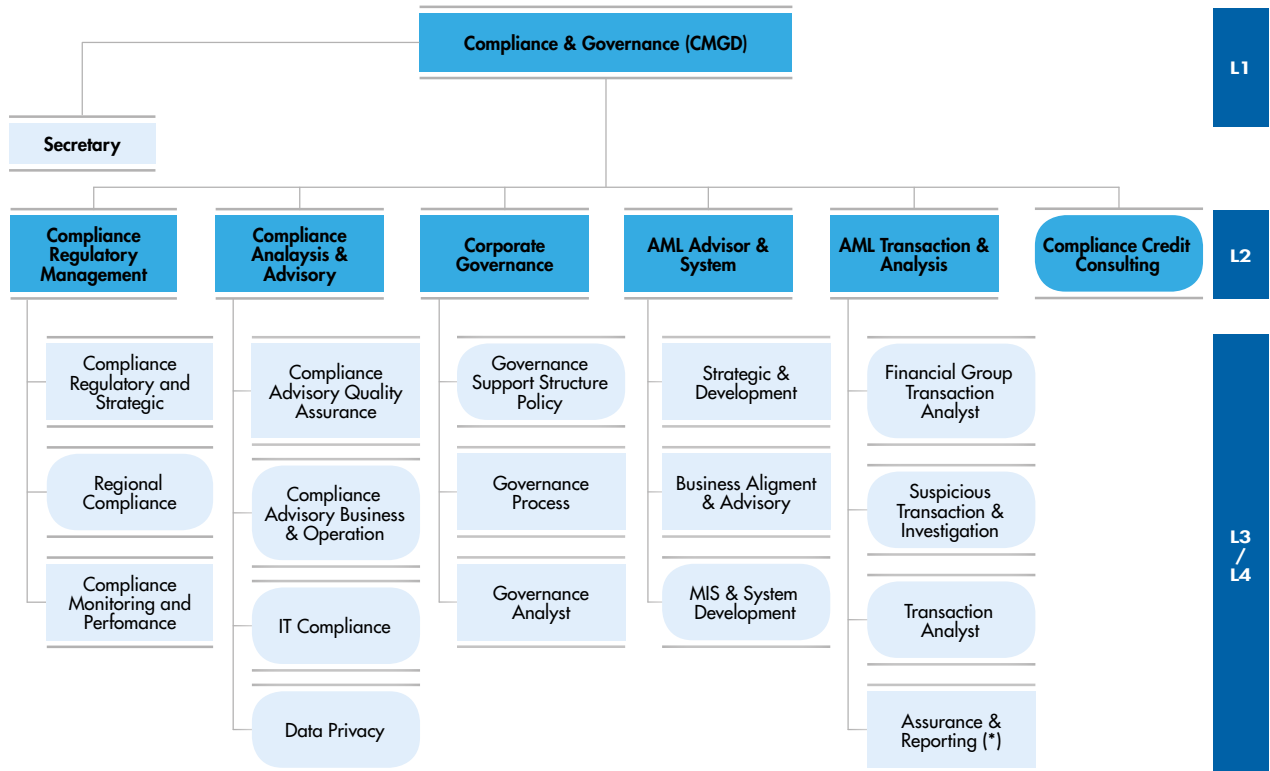
Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Fungsi Kepatuhan

Perkembangan industri perbankan semakin kompleks sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Hal ini ditambah dengan ketatnya persaingan usaha antar bank menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Perseroan sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan; mengelola Risiko Kepatuhan; serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur Organisasi



Struktur organisasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Risalah Rapat Direksi Nomor 15 Tanggal 30 Mei 2022 terkait Perubahan Organisasi Compliance and Governance Division (CMGD) dan telah mengacu pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal Perseroan yang terdiri atas:

1. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
2. Direksi berperan dalam menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Perseroan.
3. Direktur Kepatuhan merupakan anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Perseroan yang bertanggungjawab dalam merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perseroan serta pelaksanaan tugas dalam memastikan terwujudnya Fungsi Kepatuhan Perseroan.
4. Compliance and Governance Division adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan yang bertugas dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur Human Capital, Compliance and Legal. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan telah melalui *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Perseroan segera mengangkat pengganti Direktur yang

membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

4. Untuk memenuhi persyaratan independensi, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya.
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2021 tanggal 10 Maret 2021 mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan yaitu Sdr. Eko Waluyo sebagai Direktur Human Capital, Compliance and Legal. Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan setelah memperoleh persetujuan OJK sebagai Direktur Kepatuhan. Sdr. Eko Waluyo telah mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada OJK sebagai Direktur Kepatuhan dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK pada tanggal 9 Agustus 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
8. Memastikan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan telah efektif dalam menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan.
9. Berkordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap Prinsip Syariah.
10. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Satuan Kerja Kepatuhan

Peran Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dijalankan oleh Compliance and Governance Division, sebagaimana diatur dalam Risalah Rapat Direksi Nomor 15 Tanggal 30 Mei 2022 terkait Perubahan Organisasi Compliance and Governance Division (CMGD) berada di bawah koordinasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan serta terpisah dari unit bisnis dan operasional, unit manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Perseroan, unit treasury, unit keuangan dan akuntansi, unit logistik dan pengadaan barang/ jasa dan unit yang mengelola teknologi informasi.

Compliance and Governance Division dipimpin oleh Kepala Divisi (Division Head) yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Compliance and Governance Division Head selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang telah diatur dalam kebijakan internal tentang kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Direksi Perseroan telah menetapkan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



R. WAHJU B. WITJAKSONO
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Jakarta



Usia
52 Tahun Per Desember 2022



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S-1) Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Indonesia (1993)
- Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan University of Kentucky, Amerika Serikat (2004)



Pengalaman Kerja

- Senior Business Analyst, Bank BTN (April 2010 – Juli 2011)
- Senior Application Development-Business Analyst, Bank BTN (Juli 2011 – Juni 2014)
- Audit System Development Head, Bank BTN (Juli 2014 – September 2017)
- Auditor Coordination Head, Bank BTN (September 2017 – Januari 2018)
- Deputy Internal Audit Division Head, Bank BTN (Februari 2018 – November 2018)
- Compliance and Governance Division Head, Bank BTN (Desember 2018 – saat ini)



Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.



Sertifikasi

- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko perbankan Level 4 tanggal 9 April 2022
- B20 Indonesia Integrity and Compliance Task Force Conference: Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime Organized by ICAW, 28 September 2022

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Compliance and Governance Division dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
2. Berkoordinasi dengan Unit lain dalam melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan regulator yang berlaku.
 - c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perseroan bagi pihak internal maupun eksternal.
 - d. Memastikan proses bisnis pada Satuan Kerja Kepatuhan telah sesuai dengan standart sertifikasi ISO 9001:2015.
 - e. Memastikan pelaksanaan dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan berdasarkan regulasi dari OJK di Entitas utama, Perusahaan Anak, Unit Sharia di lingkungan usaha Bank BTN untuk memastikan kualitas proses perusahaan.
 - f. Memastikan pelaksanaan penilaian (*assessment*) tata kelola perusahaan oleh pihak ketiga/independen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
 - g. Memastikan Pengelolaan Operasional dan Pelaporan terkait Penerapan Program APU dan PPT di Kantor Pusat.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Perseroan melakukan program pengembangan pegawai fungsi kepatuhan untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan secara berkesinambungan dengan metode pendidikan maupun pelatihan. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dasar dan kompetensi teknis jabatan.

Adapun kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai fungsi kepatuhan antara lain:

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Assesment Sertifikasi Ulang API BTN 2022	1
Big Data Analytics For Money Laundering	5
Comm SME Credit & Sales Management	1
Compliance Excellence	364
Effective Strategy in Collection for Executif	1
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan	4
Internalisasi Pengelolaan Mesin ATM, CDM, dan CRM 2022	1
Internalisasi Short Movie APU&PPT serta CEO Message 2022	38
Kick Off Program Executive Session BOD-1	1
Menelusuri Jejak Binary Option & Robot	1
MOOC LinkedIn Learning	4
Pelatihan Tata Kelola Dokumen Pokok	1
Pembekalan Sertifikasi Kepatuhan Level 1	1
Pembekalan UKMR Level 1	3
Pembekalan UKMR Level 3	1
Pendidikan Sekretaris Tahun 2022	1
Preventing & Combating Financial Crime	1
Project Management Professional	1
Refreshment Pengadaan Barang & Jasa 2022	21
Refreshment Penyeragaman Peran dan Fungsi Akuntansi Bank BTN Tahap 2	2
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	5
Refreshment Kredit Konsumer & Penyelesaian Dokpok	2
Roll Out Branch Transformation 2022	40
Security Awareness Bulan Maret 2022	39
Security Awareness Periode 2 (Agustus) Tahun 2022	40
Sertifikasi Institutional Bidang Funding Level Advance DBM Business	1
Sertifikasi Institutional Bidang Funding Level Basic	1
Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Level 1 Batch4	4
Sosialisasi All New Program Giro 2022	1
Sosialisasi dan Survei atas Uji Coba Terbatas New BTN Mobile Banking (Managerial)	6
Sosialisasi dan Survei atas Uji Coba Terbatas New BTN Mobile Banking (Non Managerial)	32

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Sosialisasi Kebijakan Job Specification 2022	40
Sosialisasi LAPs Tahun 2022	39
Sosialisasi Materi Kebijakan Tata Kelola Data Tahun 2022	39
Sosialisasi Pengembangan APU & PPT	6
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP) Semester 2 Tahun 2022	41
Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Pegawai Bank BTN 2022	40
Sosialisasi Produk dan Layanan Giro BTN Tahun 2022	2
Sosialisasi Program PPO 2022	1
Sosialisasi Ulang Short Movie APU & PPT 2022	1
Sosialisasi Webinar Penerapan Program APU-PPT Sesi 2 Tahun 2022	19
Sosialisasi Webinar Penerapan Program APU-PPT Sesi 3 Tahun 2022	14
Supervisor Development Program 2022	1
Ujian Sertifikasi UKMR Level 1	3
Ujian Sertifikasi UKMR Level 3	1
UNSCR 1373 Webinar for Public Private	1
Webinar Tren & Tantangan Anti Money Laundering	12
Webinar Leadership Series	6
Webinar Peluang & Tantangan Implementasi	1
Webinar Peran Regtech dalam Mendukung kinerja Lembaga Jasa Keuangan	1
Webinar Strategi dan Upaya Penguatan	1
Webinar Tantangan & Mitigasi Kejahatan	1
Workshop Penyelesaian Kredit Bermasalah	1
Workshop Profitability Measurement System	1
Workshop Storytelling Data for Business	5
Workshop Valuation on Merger & Acquisition	2
Total Pendidikan & Pelatihan	903

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2022, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Perseroan di antaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu Pengawasan Aktif Direksi adalah memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan serta menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan hal tersebut, Direksi telah menyetujui dan menetapkan Kebijakan Kepatuhan Perseroan yang diusulkan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan bisnis dan operasional perbankan serta menyetujui dan menetapkan Prosedur Kepatuhan sebagaimana usulan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun peraturan internal Perseroan agar senantiasa sesuai serta tidak melanggar ketentuan Otoritas

- Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan di antaranya adalah turut memberikan *review* dan persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Perseroan sebelum ditetapkan oleh Direksi.
 3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam Tata Kelola Perusahaan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pembahasan terkait bisnis dan operasional Perseroan yang dilaksanakan dalam forum Rapat Direksi, Direksi senantiasa memperhatikan pendapat aspek kepatuhan yang disampaikan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan/atau Satuan Kerja Kepatuhan yang menyampaikan ketentuan-ketentuan regulator terkait dengan materi pembahasan Rapat Direksi.
 4. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan, maka diperlukan langkah harmonisasi antara kepentingan perseroan dengan kepatuhan dalam ketaatan terhadap seluruh ketentuan regulator yang mengatur. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, Perseroan telah melakukan langkah-langkah Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Internalisasi Ketentuan Eksternal Kepada Unit Kerja Terkait
Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan internalisasi terhadap ketentuan eksternal yang baru terbit kepada unit-unit kerja terkait maupun kepada Divisi yang melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap ketentuan tersebut, antara lain Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan.
 - b. Kajian Kepatuhan atas *Draft* Peraturan Internal, Produk/ Aktivitas Bisnis dan Operasional
Dalam rangka memastikan kesesuaian peraturan internal, produk dan/atau aktivitas Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan regulator di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan regulator lainnya yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian aspek kepatuhan atas rancangan ketentuan internal serta rencana aktivitas dan rencana kegiatan operasional bisnis yang akan disahkan dan ditetapkan Direksi untuk memastikan bahwa rancangan ketentuan internal dan rencana kegiatan tersebut telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan regulator yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan *Compliance Check List*
Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dari regulator, maka Satuan Kerja Kepatuhan melakukan proses *Compliance Check List* atas beberapa aktivitas yang diwajibkan oleh regulasi perbankan di antaranya adalah:
 - 1) *Compliance Check List Fit & Proper* Pengurus Bank;
 - 2) *Compliance Check List* untuk Pengajuan Penyelenggaraan Produk Bank Baru ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - 3) *Compliance Check List* untuk pembukaan, relokasi, dan peningkatan status jaringan kantor kepada OJK.
 5. Dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan, Perseroan merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dengan dilaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
 - a. *Compliance Excellence*
Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kolaborasi bersama Human Capital Strategy Division (HCSD) dan Learning Management Division (LMD) merumuskan strategi dan implementasi program Budaya Kepatuhan yang merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) pilar Program Budaya Perusahaan Bank Tahun 2022 yakni pilar *Governance & Risk Culture*. Tujuan program ini adalah agar pegawai memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama terkait ketentuan yang ada serta meningkatkan *compliance culture awareness* di seluruh jajaran organisasi. Aktivitas *Compliance Excellence* adalah sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan penyampaian materi tematik produk, jasa dan layanan kepada seluruh Pegawai. Materi *Compliance Refreshment* bersumber dari data *fraud* dari Internal Audit Division (IAD), temuan signifikan, peneraan sanksi disiplin dari Human Capital Management Division (HCMD) dan masukan dari pegawai Satuan Kerja Kepatuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan atas ketentuan dan regulasi yang berlaku di Perseroan. Sepanjang periode Tahun 2022, telah dilaksanakan *Compliance Excellence* yang diikuti oleh seluruh Pegawai sebagaimana dimaksud di atas yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Materi
1	Februari	Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK)
2	Maret	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan <i>Monitoring</i> Kredit Komersial (Konvensional) dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan <i>Monitoring</i> Pembiayaan Komersial (Syariah)
3	April	Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016
4	Mei	<i>Walk in Customer</i> (WIC)
5	Juni	Kredit Usaha Rakyat (KUR)
6	Juli	Penyelesaian Kredit Konsumer
7	Agustus	Penyelesaian Kredit Komersial
8	September	Penerapan Budaya Risiko
9	Oktober	Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai
10	November	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kas

2) *Compliance Feedback*

Kegiatan *Compliance Feedback* adalah aktivitas memberikan umpan balik/*feedback* dari Pegawai terhadap materi dan/atau ketentuan yang disampaikan pada aktivitas *Compliance Refreshment* kepada Divisi Pemilik dan Pengelola Kebijakan. Umpan balik/*feedback* yang telah dikerjakan oleh Pegawai disampaikan kepada masing-masing Unit Kerja pemilik kebijakan untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan yang berkesinambungan, antara lain sebagai berikut:

- a. *Feedback* terhadap materi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) telah disampaikan kepada Small Medium Enterprise Banking Division (SMBD);
- b. *Feedback* terhadap materi Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan *Monitoring* Kredit Komersial (Konvensional) dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan *Monitoring* Pembiayaan Komersial (Syariah) telah disampaikan kepada Commercial Banking Division (CMBD) dan Sharia Business Division (SHAD);
- c. *Feedback* terhadap materi Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyusapan ISO 37001 : 2016 Bank BTN telah disampaikan kepada Compliance and Governance Division (CMGD);
- d. *Feedback* terhadap materi *Walk in Customer* (WIC) telah disampaikan kepada Service Quality & Distribution Division (SQND);
- e. *Feedback* terhadap materi Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disampaikan kepada Small Medium Enterprise Banking Division (SMBD);
- f. *Feedback* terhadap materi Penyelesaian Kredit Konsumer telah disampaikan kepada Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division (CRSD);
- g. *Feedback* terhadap materi Penyelesaian Kredit Komersial telah disampaikan kepada Commercial Asset Management 1 Division (CAMD 1);
- h. *Feedback* terhadap materi Penerapan Budaya Risiko telah disampaikan kepada Enterprise Risk Management Division (ERMD);
- i. *Feedback* terhadap materi Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai telah disampaikan kepada Human Capital Strategy Division (HCSD); dan
- j. *Feedback* terhadap materi Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kas telah disampaikan kepada Operation and Business Support Division (OBSD).

3) *Compliance Test*

Kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai mengenai materi tematik *Compliance Refreshment*.

Selanjutnya pelaksanaan aktivitas *Compliance Excellence* tersebut diatas menjadi salah satu parameter penilaian 1 (satu) dari 4 (empat) pilar Program Budaya Perusahaan tahun 2022 yakni pilar *Governance & Risk Culture* oleh Human Capital Strategy Division (HCSD).

b. *Compliance Broadcast*

Compliance Broadcast adalah kegiatan penyampaian konten dan/atau informasi terkait Kepatuhan yang relevan kepada seluruh Pegawai melalui mekanisme *broadcasting* dengan menggunakan media *email* yang dimiliki Perseroan secara rutin. Tujuan *Compliance Broadcast* adalah untuk meningkatkan literasi terkait Kepatuhan kepada seluruh Pegawai.

6. Upaya Peningkatan Efektivitas Kepatuhan Kantor Cabang

Dalam rangka meningkatkan Kepatuhan pada Kantor Cabang, Satuan Kerja Kepatuhan berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan Regional Compliance Officer (RCO) yang berperan sebagai *Second Line of Defense* di Kantor Wilayah dalam membantu membangun dan memantau pengendalian risiko terhadap Kantor Cabang sesuai binaannya. Adapun tugas dan tanggung jawab Regional Compliance Officer, meliputi:

- a. Dalam rangka peningkatan kepatuhan di Kantor Cabang, RCO melakukan internalisasi ke Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah di wilayah kerjanya terkait ketentuan Penerapan Pelaksanaan Program APU dan PPT, Pengendalian Gratifikasi, *Compliance Regulatory Management System* (CRMS), internalisasi Budaya Kepatuhan dan Peta Kepatuhan serta mendokumentasikan pelaksanaan internalisasi;
- b. Dalam menjalankan fungsi kepatuhan, RCO bertanggung jawab memberikan opini kepatuhan secara independen terkait proses bisnis dan operasional atas permintaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah serta Kantor Wilayah. RCO juga dapat melakukan review terhadap ketentuan berdasarkan masukan dari unit bisnis dan operasional kemudian menyampaikan ke CMGD; dan
- c. Terlibat sebagai *non voting member* dalam pelaksanaan Pra Rapat Komite Kredit (Pra RKK) dan Rapat Komite Kredit (RKK) di Kantor Wilayah dan berhak memberikan opini kepatuhan berupa *compliance checklist* secara independen dan objektif.

Untuk dapat melakukan pengukuran tingkat kepatuhan pada operasional Kantor Cabang, digunakan Peta Kepatuhan dengan beberapa parameter yang dipakai sebagai alat ukur tingkat kepatuhan sebagai salah satu strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan adalah dengan membangun Peta Kepatuhan (*Key Compliance Indicator*) sebagai alat untuk menilai tingkat kepatuhan Kantor Cabang. Peta Kepatuhan Kantor Cabang dihitung berdasarkan penilaian tingkat kepatuhan operasional yang disusun berdasarkan 3 (tiga) parameter, yaitu:

- a. Laporan temuan signifikan/Fraud;
- b. Skor Budaya Perusahaan; dan
- c. Denda Kantor Cabang.

Compliance and Governance Division juga mengembangkan *Compliance Dashboard* yang dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung program Budaya Kepatuhan dengan menambah parameter serta meningkatkan utilitas *Compliance Dashboard*. Parameter *Compliance Dashboard* yang akan dikembangkan difokuskan pada parameter yang dapat berpotensi memunculkan risiko kepatuhan yaitu risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

7. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada proses Pra Rapat Komite Kredit (Pra RKK) dan Rapat Komite Kredit (RKK) Sesuai dengan *redployment* struktur organisasi Compliance and Governance Division (CMGD) terdapat perubahan pada struktur organisasi CMGD berupa penambahan satu fungsi kepatuhan pada proses bisnis perkreditan komersial yaitu pejabat compliance pada saat Pra Rapat Komite Kredit (Pra RKK) dan Rapat Komite Kredit (RKK) dengan adanya *Compliance Credit Consulting*. Satuan Kerja Kepatuhan melalui *Compliance Credit Consulting* bertugas untuk memberikan masukan terhadap aspek kepatuhan terkait pemenuhan persyaratan yang terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), legalitas debitur dan usaha, legalitas proyek yang dibiayai, kemampuan, modal, prospek usaha serta agunan. Diharapkan, dengan adanya pembahasan pada forum Pra RKK, isu atau permasalahan terkait kepatuhan dapat dimitigasi sehingga keputusan kredit terhindar dari risiko Kepatuhan.
8. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penerapan program APU dan PPT ini Bank melakukan beberapa aktivitas yang diuraikan tersendiri pada bab APU dan PPT.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis dan setiap jenjang organisasi Perseroan sekaligus dalam rangka memitigasi Risiko Kepatuhan Perseroan.

- a. Risiko Kepatuhan yang Dihadapi Perseroan Salah satu dampak yang timbul akibat tereksposnya risiko kepatuhan adalah sanksi berupa denda dan teguran tertulis dari pihak regulator yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau Regulator lainnya yang terkait.
- b. Potensi Risiko Kepatuhan Berikut potensi-potensi risiko kepatuhan yang akan dihadapi oleh Bank pada masa mendatang antara lain sebagai berikut:

1. Kesalahan Teknologi/Sistem Kefidaksesuaian sistem internal Perseroan yang belum dapat diimplementasikan pada sistem pelaporan Regulator. Selain itu adanya potensi terdapat error validasi yang disebabkan ketidaksesuaian/ ketidakakuratan data serta kemungkinan kegagalan sistem dalam proses pelaporan kepada Regulator.
 2. Kesalahan Data dan/atau pengisian pelaporan Kesalahan data yang disampaikan dan/atau proses pengisian laporan yakni berupa kesalahan pegawai pada saat melakukan input ke sistem pelaporan kepada Regulator.
 3. Keterlambatan Penyampaian Pelaporan dan Koreksi Pelaporan Kurangnya internal kontrol dan *monitoring* dalam penyampaian laporan sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator.
 4. Hasil Pemeriksaan Regulator Hasil pemeriksaan oleh Regulator terhadap Bank Pelapor, atas laporan-laporan yang telah dikirimkan sebelumnya kepada Regulator.
- c. Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi-potensi risiko kepatuhan di masa mendatang, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan beberapa upaya untuk memitigasi risiko kepatuhan, antara lain:
1. Mengirimkan email notifikasi setiap awal bulan melalui *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) kepada Divisi pengusul (*first line of defense*) terkait Penyelenggaraan Produk Bank baru (PPB) dan Kegiatan Baru untuk Kepentingan Bank (KKB) dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik sebagai reminder untuk kewajiban pelaporan rencana dan realisasi kepada Regulator.
 2. Mengirimkan email notifikasi setiap awal bulan melalui *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) kepada Divisi Bisnis (*first line of defense*) terkait Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik untuk mengingatkan kewajiban pelaporan.
 3. Selain melalui email notifikasi, Satuan Kerja Kepatuhan setiap bulannya telah menyampaikan memo untuk mengingatkan kembali/reminder kewajiban pelaporan terkait komitmen penyampaian laporan kepada Regulator dan/atau pihak eksternal yang telah jatuh tempo ke Divisi terkait dengan tembusan kepada Satuan Kerja Audit Internal sebagai *third line of defense*.
 4. Melakukan koordinasi dengan Divisi terkait untuk penentuan penanggungjawab atas pelaporan baru yang muncul dari setiap regulasi baru yang dikeluarkan oleh Regulator.

5. Himbuan Manajemen melalui memo kepada seluruh Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah terhadap mitigasi Risiko Kepatuhan Perseroan terkait sanksi denda dan/atau teguran tertulis dari Regulator.
6. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan rapat koordinasi terkait pembahasan pelaporan kepada Regulator dan Sanksi Denda Regulator bersama seluruh Divisi penanggung jawab penyampaian laporan Perseroan kepada Regulator dan/atau Lembaga Pengawas dan Pengatur lainnya dalam rangka untuk dapat meningkatkan supervisi dan kontrol terhadap setiap kewajiban pelaporannya ke Regulator sehingga dapat memitigasi sanksi denda Regulator terutama yang diakibatkan kesalahan data pada saat penyampaian pelaporan kepada Regulator.
7. Satuan Kerja Kepatuhan bersama-sama dengan Data Management & Analytic Division (DMD) melakukan *workshop* bersama dengan Divisi PIC Pelapor dan Divisi support data pelaporan, sebagai salah satu upaya untuk memitigasi sanksi denda Regulator dengan agenda perbaikan proses bisnis terkait data pelaporan Regulasi.

Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Lainnya

Perseroan juga melakukan penyempurnaan proses bisnis secara berkelanjutan yang menjadi bagian dari pelaksanaan aktivitas kepatuhan, antara lain:

1. Dalam rangka penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Satuan Kerja Kepatuhan menjalankan peran sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki tugas antara lain: mengawasi rancangan dan penerapan SMAP, menyediakan petunjuk dan pedoman Pegawai atas SMAP, memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku, melaporkan kinerja SMAP pada *Governing Body* dan *Top Management*. Adapun ruang lingkup sertifikasi ISO 37001:2016 sampai dengan tahun 2022 adalah
 - a. Pengadaan barang dan/atau jasa pada Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD).
 - b. Perkreditan Komersial pada Commercial Banking Division (CMBD) dan Corporate Syndication & Transaction Banking Division (CSTD).
2. Dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah berhasil memperoleh sertifikat ISO 37302:2021 Sistem Manajemen kepatuhan pada tanggal 30 Desember 2022 dari Badan Sertifikasi. ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan adalah standar sistem manajemen yang merencanakan, mengelola dan memastikan operasional perusahaan telah memenuhi/mematuhi/sesuai dengan regulasi yang berlaku di eksternal dan internal perusahaan.
3. Dalam rangka melakukan penyempurnaan proses bisnis secara berkelanjutan (*continuous improvement*), unit kerja Perseroan yang terkait kontrol diantaranya Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan kerja Audit Internal Perseroan telah melakukan standarisasi proses bisnis mengacu pada standar ISO 9001:2008 yang bertujuan untuk pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi internal audit yang lebih efektif mengacu pada standar mutu internasional. Pada tahun 2018, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan kerja Audit Internal Perseroan telah mengikuti Resertifikasi ISO dalam rangka pembaharuan Sertifikasi ISO 9001:2008 menjadi Sertifikasi ISO 9001:2015. Pada tahun 2022, satuan kerja Kepatuhan melaksanakan Resertifikasi ISO 9001:2015 dengan hasil bahwa Satuan Kerja Kepatuhan konsisten memenuhi persyaratan maupun ketentuan dalam standard ISO 9001:2015.
4. Penerapan *Integrated GRC (Governance Risk and Compliance)* di Perseroan. Sejalan dengan hasil cetak biru transformasi Perseroan yaitu mencapai *integrated GRC* dengan pelaksanaan praktek-praktek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. Dalam penilaian GRC Indeks, akan dilaksanakan suatu metode *assessment* kepada setiap unit kerja dengan alat ukur *Key Performance Indicator*, *Key Risk Indicator*, dan *Key Compliance Indicator*. Masing-masing unit kerja akan memiliki GRC Indeks yang merupakan indikator penerapan aspek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
5. Commercial Credit Risk Division (CRD).
6. *SME Restructuring* pada seluruh Kantor Wilayah.

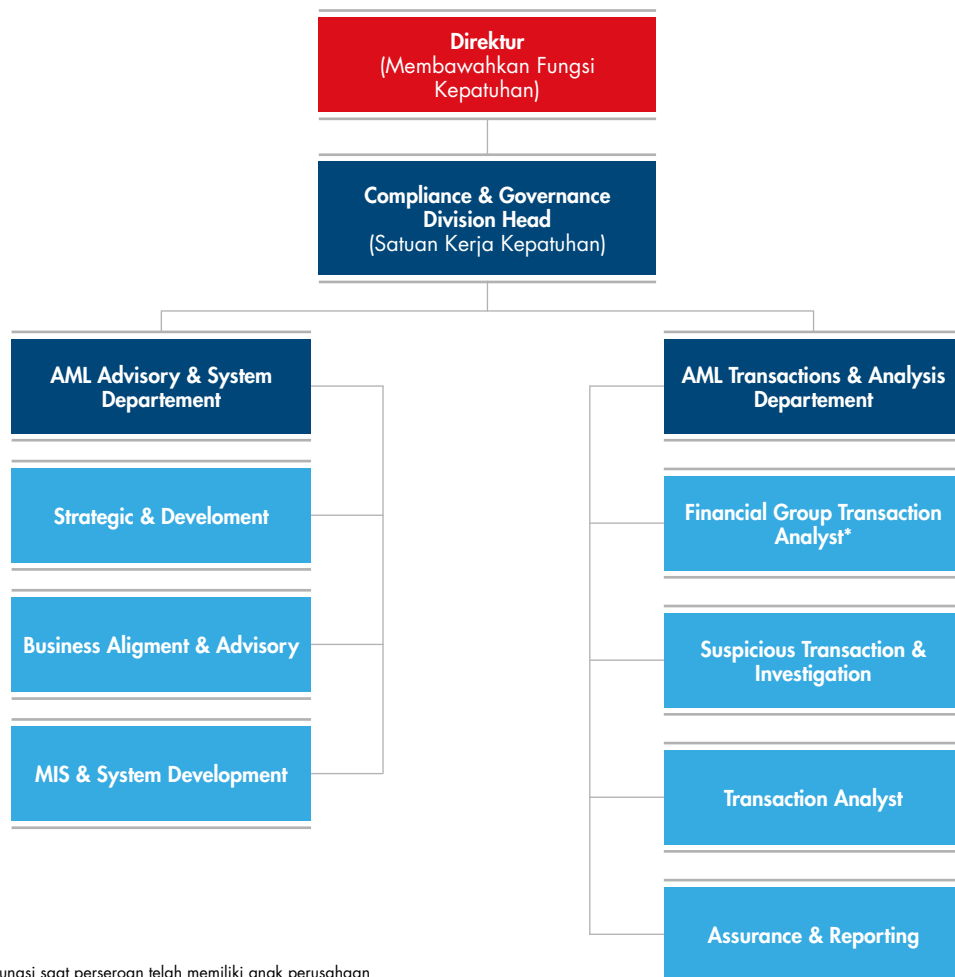
Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Perkembangan teknologi di industri jasa keuangan mendorong Bank dalam meningkatkan langkah mitigasi risiko untuk mencegah penyalahgunaan teknologi Bank sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Hal ini wajib dilakukan karena modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan semakin variatif dalam memanfaatkan Bank sebagai sarana TPPU, TPPT dan PPSPM. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung rezim pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Sebagai bentuk komitmen penguatan rezim APU dan PPT yang mengacu pada regulasi di Indonesia dan *best practice* international serta rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF), Perseroan telah melakukan serangkaian penguatan efektivitas penerapan program APU dan PPT baik dari sisi kebijakan dan prosedur, sistem pendukung pelaporan APU dan PPT maupun kompetensi sumber daya manusia.

Struktur Organisasi dalam Penerapan Program APU dan PPT

Pelaksanaan program APU dan PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut:



*) berfungsi saat perseroan telah memiliki anak perusahaan

Penanggung jawab penerapan Program APU dan PPT di Kantor Wilayah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, sedangkan Pengelola penerapan Program APU dan PPT dilakukan oleh Deputi Kepala Kantor Wilayah dan Satuan Kerja di bawah Deputi Kepala Kantor Wilayah. Adapun penanggung jawab penerapan Program APU dan PPT di unit kerja operasional Kantor Cabang dilakukan oleh Kepala Cabang, sedangkan pengelola dan petugas penerapan Program APU dan PPT dilakukan oleh Deputi Kepala Kantor Cabang, Kepala Outlet di bawah Kantor Cabang serta petugas Customer Service.

Implementasi Program APU dan PPT 2022

Penerapan Program APU dan PPT dilakukan berdasarkan 5 (lima) pilar sesuai Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang meliputi:

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

1. Pengawasan aktif Direksi

Bentuk pengawasan aktif Direksi terhadap program APU dan PPT yaitu melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT. Adapun pengawasan Direksi dilakukan melalui arahan maupun persetujuan atas berbagai program APU dan PPT, antara lain sebagai berikut:

- a. Memastikan dan menetapkan kebijakan dan prosedur APU dan PPT Perseroan;
- b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, seperti perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
- c. Membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU dan PPT;
- d. Monitoring laporan penerapan program APU dan PPT Bank BTN secara periodik yang terdiri dari:
 - i. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
 - ii. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
 - iii. Pelaporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL);
 - iv. Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT);
 - v. Pelaporan Sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (SIPENDAR);
 - vi. Pelaporan Pertukaran Data Elektronik (PEDAL);
 - vii. Pelaporan Sistem Informasi Program APU dan PPT (SIGAP);
 - viii. Pelaporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO); dan
 - ix. Pemenuhan permintaan data dari Regulator dan APGAKUM.
- e. Penyampaian langkah-langkah dan peran aktif Perseroan dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT);
- f. Monitoring pelaksanaan pengujian nilai risiko APU dan PPT berdasarkan pendekatan *Risk Based Approach (RBA)* tahun 2022 yang digunakan pada sistem APU dan PPT guna pengelompokan risiko Nasabah tahun 2023;
- g. Monitoring penyampaian laporan nilai *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF)* Perseroan Tahun 2022;

h. Monitoring penyelenggaraan pelatihan APU dan PPT 2022 termasuk *awareness campaign* APU dan PPT kepada seluruh pegawai yang meliputi pegawai dari seluruh Kantor Cabang, Kantor Wilayah, dan Divisi-Divisi terkait implementasi APU dan PPT.

2. Pengawasan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU-PPT dan persetujuan atas Kebijakan dan Prosedur penerapan program APU dan PPT. Adapun pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui hasil penelaahan maupun persetujuan atas beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang bersifat strategis diusulkan Direksi.
- b. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT.
- c. Pembahasan pada rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris terkait Penerapan Program APU dan PPT.
- d. Penelaahan terhadap Laporan APU dan PPT yang tercantum dalam Laporan Kepatuhan.

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT meliputi:

1. Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Diligence (CDD)* dan/ atau Uji Lanjut Nasabah/*Enhance Due Diligence (EDD)* terhadap Calon Nasabah, Nasabah, *Conductor* dan *Walk In Customer (WIC)*; *Beneficial Owner (BO)*, *Politically Exposed Person (PEP)*.
2. Penghentian Sementara Transaksi dan Penundaan Transaksi.
3. Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha.
4. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) terkait Nasabah, negara/area geografis, produk, jasa dan transaksi serta jaringan distribusi (*delivery channels*).
5. Pemantauan dan Penginian.
6. *Cross Border Correspondent Banking*.
7. Transfer Dana.
8. Penatausahaan Dokumen.
9. Pelaporan dan Sanksi.

Pengendalian Internal

1. Pelaksanaan audit internal APU dan PPT
2. Pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dalam penerapan APU dan PPT
3. Penerapan Pengendalian terhadap penerapan APU dan PPT
4. Penyelenggaraan pelatihan APU dan PPT bagi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif dalam rangka penerapan program APU dan PPT telah dilakukan koordinasi dengan

Unit pengelola IT Bank dalam penyediaan Sistem Informasi Manajemen, yaitu sebagai berikut:

- a. Aplikasi pendukung penerapan Program APU dan PPT;
- b. Aplikasi penilaian parameter *Risk Based Approach* (RBA) dengan mengacu pada hasil penilaian NRA dan SRA dari Lembaga Pengatur dan Pengawas serta mengacu pada penilaian risiko APU dan PPT Perseroan;
- c. Penyempurnaan system APU dan PPT yang digunakan untuk melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan ke Luar Negeri (LTKL);
- d. Penyediaan fitur pelaporan dan dokumentasi aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa (dhi. Laporan Aktivitas Mencurigakan);
- e. Penggunaan *platform* berbasis *web* yang menyediakan database individu dan korporasi berisiko tinggi baik lokal maupun global untuk mendukung analisis terkait indikasi TPPU dan/atau TPPT; dan
- f. Aplikasi penyediaan data untuk pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT);
- g. Aplikasi pencatatan profil dan transaksi *Walk In Customer (WIC)*;
- h. Aplikasi pencatatan profil *Beneficial Owner (BO)*;
- i. Aplikasi pelaporan *Suspicious Transaction Report (STR)* dan *Cash Transaction Report (CTR) WIC*;
- j. Pemeliharaan *database*, pemantauan transaksi dan profil Nasabah secara berkesinambungan meliputi:
 - i. *Politically Exposed Person (PEP)*;
 - ii. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - iii. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT);
 - iv. Daftar Terduga Pelaku Kejahatan *Business Email Compromises (BEC)*; dan
 - v. Nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.

Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Penerapan Program APU dan PPT

Perseroan melakukan pelatihan yang berkesinambungan terkait program APU dan PPT sebagai berikut:

- a. Webinar APU dan PPT Tahun 2022 dengan melibatkan narasumber dari pihak eksternal (dhi. PPATK dan Praktisi Perbankan) terhadap pegawai pada Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Bisnis, Satuan Kerja Supporting di level Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang;
- b. Pelatihan APU dan PPT melalui Program pendidikan Calon Pegawai Baru dan Pegawai Eksisting oleh pihak internal Perseroan seperti Pendidikan *Officer Development Program*, *General Banking Staff*, *Teller Service Unit*, *Customer Service Unit*, *Alih Status Pegawai*, *Managing People Capability Program*, *Supervisor Development Program*, dan *Network Branch Control Program* dari Satuan Kerja Audit Internal;
- c. Program *e-learning* APU dan PPT melalui *Digital Room for E-Learning Modules (DREAM)* terhadap pegawai internal Perseroan terkait *Short Movie* APU dan PPT dan *CEO Message* bertema "*Customer Due Dilligence*".

Untuk meningkatkan *awareness* pegawai terhadap implementasi Program APU dan PPT maka Perseroan melakukan *awareness campaign* melalui berbagai media digital seperti Komik, Infografis, Videografis, *Short Movie*, *Banner*, *Poster*, *Videotron*, serta *Creative Campaign* Tahun 2022 dengan kegiatan-kegiatan berupa *AMOLA Quiz*, *Podcast* dan *Cipta Jingle*.

Perkara Hukum

Tabel Perkara Hukum

No.	Perkara Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	181	116	2
2.	Dalam proses penyelesaian	151	98	0
Total		332	214	2

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

No	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
1	Gugatan terkait pemalsuan bilyet deposito BTN yang dilakukan oleh komplotan pemalsu deposito.	Perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan yang mengharuskan Perseroan untuk membayar ganti rugi.	Rp35.500.000.000	Perseroan membayar ganti kerugian nasabah sebesar Rp. 35.500.000.000,-	Bank telah melakukan pembayaran.
2	Gugatan terkait pemalsuan bilyet deposito BTN yang dilakukan oleh komplotan pemalsu deposito.	Perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan yang mengharuskan perseroan untuk membayar ganti rugi.	Rp58.000.000.000	Perseroan membayar ganti kerugian nasabah sebesar Rp. 58.000.000.000	Bank telah melakukan pembayaran.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2022, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Sampai dengan tahun 2022, Bank BTN belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Perseroan berupaya memenuhi tanggung jawab dan mematuhi setiap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan dan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Perseroan menyediakan akses informasi dan data baik laporan terkait keuangan dan non keuangan kepada publik secara transparan melalui berbagai media seperti situs web (dalam dua bahasa), media massa (siaran pers), majalah/buletin internal, pertemuan dengan analis, situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, poster dan banner produk, aksi korporasi, bahan presentasi Perseroan ke publik

dan sebagainya. Akses informasi Perseroan mengenai informasi finansial dan perusahaan, antara lain dapat dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. *Website* www.btn.co.id yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta menyampaikan informasi mengenai:
 - a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu.
 - b. Analisis kinerja keuangan.
 - c. Laporan Keuangan Tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir.
 - d. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi **Call Center 1500 286** atau email csd@btn.co.id.
3. Bagi investor dapat langsung menghubungi Corporate Secretary/Investor Relations Perseroan dengan mengirim email ke investor_relations@btn.co.id atau telepon ke **(62-21) 633 6789 ext: 2003**.
4. Perseroan juga senantiasa menyampaikan laporan keterbukaan informasi dan/atau fakta material surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem pelaporan elektronik spe.ojk.go.id dan idxnet.co.id dan situs web www.btn.co.id.
5. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, poster dan banner.
6. Penyampaian laporan kepada regulator, *Analyst Meeting*, konferensi pers, dan lain sebagainya. Selain itu, Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan
Achmad Chaerul

Menara BTN
Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130
Telp: (021) 6336789 ext. 2003
Faks: (021) 6336719
Email: achmad.chaerul@btn.co.id

Investor Relations

Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan pemegang saham, investor potensial, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara berkala seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal seperti Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, Laporan Keuangan, Laporan tahunan dan Laporan Pemegang Saham Tertentu.

Adapun kontak untuk *Investor Relations* Perseroan adalah sebagai berikut:

Investor Relations

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara BTN Lt. 16, Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 Indonesia
Telp : +62 21 63870107
Email : investor_relations@btn.co.id
Website : <https://www.btn.co.id/Investor-Relation-Home>

Profil Kepala Investor Relations



WINANG BUDOYO
Kepala Investor Relations

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia



Domisili
Bekasi



Usia
Jakarta, 27 Agustus 1969/ 53 Tahun per Desember 2022



Riwayat Pendidikan
S1 Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia
S2 Master of Economic Studies – University of Queensland



Pengalaman Kerja

- Menjabat sebagai Investor Relations Department Head dan Chief Economist BTN (2018 – 2020)
- Menjabat sebagai Investor Relations & Research Division Head dan Chief Economist BTN (2020 – saat ini)



Dasar Hukum Pengangkatan
21/KUASA/DIR/2020 tanggal 28 April 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab Investor Relations

Pelaksanaan program komunikasi kepada komunitas pasar modal melalui paparan publik yang dilakukan secara berkala, maupun *on-demand*. *Investor Relations* secara aktif menyelenggarakan forumforum pertemuan dengan analis, investor, *rating agency* dan komunitas pasar modal lainnya untuk menjamin keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Pengkinian informasi kepada pemegang saham dan komunitas pasar modal mengenai perkembangan bisnis, operasional dan kinerja keuangan Perseroan, serta target-target yang akan dicapai baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
2. Mengoptimalkan kinerja saham Perseroan, baik likuiditas/ volume perdagangan dan valuasi yang wajar (*fair valuation*).
3. Meningkatkan reputasi dan menjaga hubungan baik dengan *long-term investors*.
4. Memperluas *investor base* dan *coverage* terhadap saham Perseroan dengan mengembangkan *marketing program* kepada investor-investor potensial.

5. Menjalिन hubungan baik dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan sekuritas yang telah secara rutin menulis *report* tentang Perseroan dan memberikan rekomendasi yang baik atas saham Perseroan.
6. Mempersiapkan materi *roadshow*, *analyst meeting*, *conference call* & *public expose* (siaran pers).

Prinsip dasar yang digunakan oleh Investor Relations dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal adalah:

1. Pengungkapan informasi dilakukan secara wajar (*fair disclosure information*) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (*equitable treatment*) dan transparansi.
2. Informasi diberikan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan di bidang perbankan yang berlaku.

Metode paparan publik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Direct*, yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham, *Public Expose*, *Non Deal Road Show*, *Investor Conference*, *Press Conference*, *1-on-1 Meetings*, *Group Meetings*, *Conference Call*, *Branch Visits* dan *Site Visits*.

2. *Indirect*, yang meliputi: Annual Report, Laporan Keuangan Publikasi, *Press Release*, *Website*, Broadcast Media (TV, Surat Kabar, *Media Online*), Social Media, dan E-mails.

Pelaksanaan Tugas Investor Relations

A. Kegiatan Investor Relations

Berikut merupakan program komunikasi kepada komunitas pasar modal yang telah dijalankan oleh Perseroan disepanjang tahun 2022:

Tanggal	Kegiatan
8 Februari 2022	<i>Analyst Meeting</i> FY2021
9 Februari 2022	<i>Courtesy Meeting</i> dengan Fitch Ratings
11 Februari 2022	Mandiri Investment Forum
2 Maret 2022	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank BTN
23 Maret 2022	<i>Monetary Policy And Economic Growth Outlook - Mandiri Sekuritas</i>
13 April 2022	<i>Meeting</i> BNP Paribas FIC Senior Management
13 April 2022	<i>Update</i> BBTN <i>Mortgage Business</i> with UBS Asset Management
22 April 2022	<i>Analyst Meeting</i> 1Q2022
27 April 2022	<i>Group Conference Call</i> Dengan Investor Mandiri Sekuritas
11 Mei 2022	<i>Group Meeting</i> : Danareksa Sekuritas Group US Investors
13 Mei 2022	<i>Talkshow</i> IDX Channel "BTN Raih Kinerja Cemerlang Di Kuartal 1 2022"
10 Juni 2022	<i>Online</i> Nomura Conference
13 - 17 Juni 2022	<i>Non Deal Roadshow</i> dengan Mandiri Sekuritas
11 - 12 Agustus 2022	14Th CGS-CIMB Conference
26 - 28 Agustus 2022	<i>Private Investor Gathering</i> with Sucor Aset Manajemen
15 September 2022	Undangan Pelaksanaan <i>Analyst Meeting</i> 1H2022 (Audited)
15 September 2022	Undangan Pelaksanaan <i>Public Expose Live</i> 2022
20 September 2022	Undangan <i>Courtesy Meeting</i> Bersama Fitch Ratings
28 September 2022	<i>Meeting</i> Dengan Investor Wellington Asset Management
13 Oktober 2022	Narasumber Unboxing Emiten
27 Oktober 2022	<i>Analyst Meeting</i> 3Q 2022
27 Oktober 2022	Penyelenggaraan <i>Town Hall Meeting</i> dengan Seluruh Karyawan Internal BTN
4 - 22 November 2022	<i>Roadshow</i> <i>Rights Issue</i>
15 November 2022	Webinar <i>Rights Issue</i> Kupas Tuntas Peluang Investasi Dari <i>Rights Issue</i> BBTN - Bahana Sekuritas

Tanggal	Kegiatan
25 November 2022	Webinar Invest Talk Series Mengulik Potensi BBTN Dibalik Rencana <i>Right Issue</i> - BRI Danareksa Sekuritas
27 November 2022	Webinar Kupas Tuntas Kinerja & Prospek Bisnis BBTN - @Investabook
30 November 2022	Webinar Ngopi Aren (Ngobrol Pinter Bareng Emiten) BBTN - BNI Sekuritas
8 Desember 2022	Webinar Strategi Mudah Analisa Sektor Properti Dan Peluang BBTN - Cimb Niaga Sekuritas
9 Desember 2022	Webinar Bedah Emiten Dengan @Ngertisaham
12 Desember 2022	Site Visit Dengan Samuel Sekuritas
13 Desember 2022	Investor <i>Gathering</i> Dengan Perusahaan-Perusahaan Afiliasi Negara
19 Desember 2022	<i>Opening Bell</i> Pada Bursa Efek Indonesia - Rights Issue
21, 23, 27 Desember 2022	Intimate Dinner Dengan Nasabah Prioritas terkait Rights Issue BBTN

Sepanjang Tahun 2022, Perseroan juga memenuhi permintaan *meeting*, *conference call* dan *site visit* dari komunitas pasar modal, baik yang dilakukan bersama Direksi maupun oleh unit Investor Relations.

Partisipan	Jumlah Kegiatan
Analisis	77
Investor Lokal	65
Investor Asing	34
<i>Rating Agency</i>	2
Total	178

Unit Investor Relations secara berkala menyampaikan laporan perkembangan saham Perseroan, termasuk adanya pergerakan saham yang tidak biasa (*unusual market activities*) serta laporan terkait masukan, tanggapan dan harapan dari investor, analis dan komunitas pasar modal lainnya terhadap pengembangan bisnis dan perbaikan kinerja Perseroan.

Media Eskposur

Selama periode Januari 2022 hingga 31 Desember 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendapatkan paparan pemberitaan yang luas dan positif di media massa, baik media cetak, *online* maupun televisi. Dalam setahun, Bank BTN telah mendistribusikan lebih dari 105 siaran pers ke media massa, dan lebih dari 117 berita foto resmi yang juga disebarluaskan ke media. Alhasil pada periode yang sama, Bank BTN mendapatkan paparan pemberitaan yang tinggi, dimana ada lebih dari 28.372 berita positif yang diangkat oleh media massa. Adapun dari keseluruhan berita tersebut sebagian besar ditayangkan oleh media massa dari kelompok *Tier I*, yaitu media yang berpengaruh, sesuai segmentasi bisnis Bank BTN dan memiliki jumlah pembaca tertinggi

di Indonesia, seperti Investor Daily, Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Koran Sindo, Kontan, Rakyat Merdeka, Jawa Pos dan sejumlah media *online* seperti detik.com, cnbcindonesia.com, kompas.com, bisnis.com, idxchannel.com, kumparan.com, katadata.com dan media lainnya.

Siaran Pers

No	Tanggal	Judul
1	6 Januari 2022	DINILAI PALING SIAP, TAPERA AJAK BTN SEGERA SALURKAN KPR SUBSIDI
2	7 Januari 2022	BTN Dorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3	8 Januari 2022	KURANGI BACKLOG PERUMAHAN, BTN JALIN KERJASAMA DENGAN ASANU
4	11 Januari 2022	BTN Syariah Siapkan Kebutuhan Rumah Untuk Anggota Akademi Militer
5	17 Januari 2022	BTN TANCAP GAS, DALAM SEMINGGU CATATKAN AKAD KREDIT SEKITAR 6.000 UNIT
6	21 Januari 2022	Perluas Ekosistem Perumahan, Bank BTN Diminta Perkuat Sinergi dengan BUMN dan Swasta
7	29 Januari 2022	Sinergi BTN dan Santri Developer Kurangi Backlog Perumahan
8	31 Januari 2022	PENYALURAN KPR SEJAHTERA FLPP BANK BTN MELOMPAT 473 PERSEN PADA BULAN JANUARI
9	2 Februari 2022	Luncurkan Layanan PLUS,
10	8 Februari 2022	NPL Turun, Laba Bersih Bank BTN Melonjak 48,3
11	16 Februari 2022	Kembangkan Ekosistem Perumahan Digital, Bank BTN Gandeng Arsitag
12	21 Februari 2022	BTN Siap Luncurkan Skema Rent to Own Tahun Ini
13	22 Februari 2022	BTN Targetkan Rp2,5 Triliun Dalam Property Expo 2022
14	23 Februari 2022	BTN LUNCURKAN APLIKASI BTN PROPERTI FOR DEVELOPER
15	2 Maret 2022	BTN Bagikan Dividen Rp237 Miliar
16	7 Maret 2022	Batara Spekta Diundi, Nasabah Loyal BTN Meningkatkan 222 %
17	7 Maret 2022	Sambut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur, BTN Tingkatkan Status Kantor Cabang di Parepare
18	8 Maret 2022	Peduli Kebersihan Parepare, BTN Sumbangkan Mobil Sampah
19	8 Maret 2022	BTN SIAPKAN PROGRAM KHUSUS KPR MANDALIKA
20	20 Maret 2022	BTN Tetap Fokus Kembangkan Digital Mortgage Ecosystem
21	21 Maret 2022	DUKUNG PENDIDIKAN DI SOLO, BTN SYARIAH PACU KERJASAMA DENGAN YAYASAN PENDIDIKAN
22	24 Maret 2022	Peran BTN Sangat Penting Bagi Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perumahan
23	26 Maret 2022	BTN dan Jalin Perluas Rencana Bisnis Pengembangan Virtual ATM

No	Tanggal	Judul
24	27 Maret 2022	3.000 Peserta Meriahkan BTN Run & Ride 2022
25	30 Maret 2022	BIDIK PELAKU USAHA, BANK BTN TAWARKAN TABUNGAN BTN BISNIS
26	31 Maret 2022	BTN Apresiasi Pengembang Loyal
27	2 April 2022	ERICK THOHIR: KOLABORASI BTN DENGAN BUMN LAIN JAWAB KEBUTUHAN HUNIAN BAGI MILENIAL
28	7 April 2022	Realisasi Produk Kring Bank BTN Cabang Ambon Tembus Rp162 Miliar
29	14 April 2022	Kebutuhan Likuiditas Hari Raya Idul Fitri 2022 Persediaan Uang Tunai Bank BTN Jelang Lebaran Naik 56%
30	17 April 2022	Genjot Digital Ecosystem Mortgage - Bank BTN Luncurkan Website e-Mitra Operation
31	17 April 2022	BTN AKAN BERANGKATKAN 600 PEMUDIK GRATIS
32	22 April 2022	Laba Bersih BTN Melonjak 23,89%
33	22 April 2022	BANK BTN GANDENG PT KARYA ANAK NEGRI WUJUDKAN PERUMAHAN GO GREEN
34	24 April 2022	SRIKANDI BTN DORONG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
35	25 April 2022	Bank BTN Siap Salurkan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi ke 10.000 FKTP Senilai Rp2 Triliun
36	26 April 2022	BBTN, Saham Bagus Salah Harga
37	27 April 2022	BTN Sukseskan Mudik Aman Mudik Sehat BUMN 2022
38	27 April 2022	BTN SINERGI DENGAN OMBUDSMAN TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PERBANKAN
39	15 Mei 2022	DUKUNG PEMERINTAH ATASI BACKLOG, BANK BTN GELAR INDONESIA PROPERTY EXPO
40	19 Mei 2022	BTN Siap Mendukung REI Wujudkan Rumah Rakyat Yang Berkualitas
41	26 Mei 2022	LARIS DI INDONESIA TIMUR, BTN SOLUSI MELONJAK 171%
42	31 Mei 2022	Ketua PP Muhammadiyah Kritik Keras Rencana Akuisisi BTN Syariah oleh BSI
43	03 Juni 2022	BTN Dukung Implementasi Gerakan APUPPT
44	07 Juni 2022	DPR Pertanyakan Isu Merger BTN dan BNI
45	11 Juni 2022	NYANYIAN SATRIO ARISMUNANDAR DIJAWAB BIJAK OLEH BTN, INI PENJELASANNYA
46	13 Juni 2022	LABA BUMN MELESAT, BTN IKUT SUMBANG DARI SEKTOR PEMBIAYAAN PERUMAHAN
47	16 Juni 2022	BTN dan Satrio Arismundar Sepakat Berdamai
48	17 Juni 2022	Demi Rumah Rakyat, BTN Gelar Akad Kredit Massal 21.000 Unit
49	20 Juni 2022	Optimalkan Layanan, Ini Yang dilakukan BTN
50	21 Juni 2022	Bisnis On Track, Laba BTN Melonjak 49%
51	25 Juni 2022	Dahsyat, Dalam Sehari BTN Gelar Akad Massal KPR Subsidi 10.000 Unit Rumah

No	Tanggal	Judul
52	28 Juni 2022	Sasar Pekerja Informal, BTN Gelar Grebek Pasar
53	29 Juni 2022	Atasi Backlog dan Penuhi Kebutuhan Hunian Milenial, BTN Ekspansi ke Aceh
54	07 Juli 2022	Genjot Dana Murah, BTN Targetkan Transaksi Tabungan Bisnis Rp7 Triliun
55	10 Juli 2022	Perlu Insentif Wujudkan Pengurangan Backlog Perumahan, BTN Terus Mendorong Implementasi Sekuritisasi Aset di Indonesia
56	11 Juli 2022	Kejati Sumut Didesak Serius Usut Mafia Tanah yang Rugikan Bank BUMN
57	12 Juli 2022	ACHMAD CHAERUL KEMBALI DITUNJUK SEBAGAI CORPORATE SECRETARY BTN
58	14 Juli 2022	HARGA KOMODITAS NAIK, PERUMAHAN BAKAL JADI PRIMADONA
59	17 Juli 2022	Dinilai Ramah Lingkungan, Saham BBTN Kembali Masuk Indeks SRI-KEHATI
60	17 Juli 2022	BANK BTN RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI BEST ASIA'S TRANSFORMATION BANK 2022
61	20 Juli 2022	BANK BTN DAN UPN VETERAN JAKARTA JALIN KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
62	29 Juli 2022	BTN SIAPKAN KLINIK UNTUK KONSULTASI BANGUN RUMAH SECARA GRATIS
63	3 Agustus 2022	TUNJUK INVESTOR BARU SELESAIKAN SERTIFIKAT PERUMAHAN KODAM 3 MAKASSAR
64	6 Agustus 2022	BANK BTN GELAR ROADSHOW TABUNGAN BTN BISNIS DI SINGKAWANG
65	13 Agustus 2022	BTN GELAR "KPR BTN Merdeka" DALAM IPEX 2022
66	15 Agustus 2022	BTN RAIH APRESIASI DARI CARBON DISCLOSURE PROJECT
67	19 Agustus 2022	SEMESTER I, SALES VOLUME MOBILE BANKING BTN MELESAT 67 PERSEN
68	23 Agustus 2022	Enaknya Jadi Pekerja, Dapat KPR Berbunga Rendah dari BTN
69	23 Agustus 2022	BANK BTN SYARIAH JADI BANK PERTAMA SALURKAN TAPERA SYARIAH
70	24 Agustus 2022	Kolaborasi dengan Agen Properti, BTN Luncurkan Program Kangen Banget
71	26 Agustus 2022	BERKONTRIBUSI BESAR BAGI SEKTOR PERUMAHAN, PEMERINTAH AKUI PERAN PENTING BANK BTN UNTUK RUMAH RAKYAT
72	3 September 2022	Bank BTN Road Show Tabungan Bisnis ke Semarang
73	5 September 2022	BTN GANDENG BSSN MAKSIMALKAN KEAMANAN TRANSAKSI DIGITAL
74	8 September 2022	Mitigasi Risiko: BTN Pastikan Kinerja On Track
75	14 September 2022	DPR Restui Rights Issue BTN Rp4,13 T, Termasuk PMN Rp2,48 T
76	15 September 2022	Laba Bersih BTN Melonjak 59,87%
77	18 September 2022	Ditengah Isu Akuisisi, Laba BTN Syariah Menggila

No	Tanggal	Judul
78	21 September 2022	GANDENG BNN, BTN PERLUAS PENERIMA JASA LAYANAN PERBANKAN
79	24 September 2022	BTN Gelar Road Show Tabungan BTN Bisnis di Medan
80	3 Oktober 2022	Pacu Peningkatan DPK, Bank BTN Road Show Tabungan Bisnis di Surabaya
81	11 Oktober 2022	BTN Optimistis Pertumbuhan Kredit Perumahan di Pekanbaru Meningkat
82	12 Oktober 2022	DITUNGGU PASAR, KPR RENT TO OWN RESMI MELUNCUR
83	13 Oktober 2022	BTN DAN KEMENTERIAN ATR/BPN PERCEPAT PROSES PENYELESAIAN SERTIFIKAT
84	13 Oktober 2022	KOLABORASI KEMENTERIAN ATR/BPN DAN BTN SIAPKAN SOLUSI PENYELESAIAN SERTIFIKAT RUMAH RAKYAT
85	17 Oktober 2022	BTN PROPERTI EXPO TAWARKAN KPR MULAI 2,47% DI 6 KOTA
86	18 Oktober 2022	RUPSLB Bank BTN Menyetujui Penerbitan Saham Baru
87	20 Oktober 2022	Giliran Pedagang Pasar Dapat Hunian Layak Berkat Bank BTN
88	21 Oktober 2022	DORONG BTN SOLUSI KE MITRA STRATEGIS
89	27 Oktober 2022	Kinerja Kuartal III 2022, Laba BTN Naik 50%
90	8 November 2022	BTN Bidik Potensi KPR Subsidi 200 Ribu Mitra Gojek
91	10 November 2022	Punya Potensi Besar, BTN Perkuat Kredit ke Pekerja Sektor Informal
92	14 November 2022	REALISASI KREDIT ONLINE BTN PROPERTI MENEMBUS 66%
93	17 November 2022	Tiga Fakta Menarik Rights Issue BBTN
94	19 November 2022	BTN Gelar IPEX 2022 Bidik KPR Baru Rp1,5 Triliun
95	2 Desember 2022	BTN SIAP DUKUNG KPR RENT TO OWN UNTUK MBR
96	07 Desember 2022	TAHUN 2023, BISNIS PEMBIAYAAN RUMAH DIPREDIKSI TUMBUH POSITIF, BTN Bidik 5,8 Juta Generasi Milenial
97	10 Desember 2022	HUT KPR KE 46, BTN PERLUAS DIGITAL MORTGAGE ECOSYSTEM
98	15 Desember 2022	Bank BTN Dukung WSBI Dorong Digitalisasi & Inklusi Keuangan Global
99	21 Desember 2022	Kolaborasi BTN dan BP Jamsostek Permudah Pekerja Milik Rumah Lewat Aplikasi JMO
100	22 Desember 2022	Persiapan Libur Natal dan Tahun Baru 2023 Bank BTN Siapkan Dana Tunai Rp 19 Triliun
101	27 Desember 2022	BTN Bersiap Luncurkan "SuperApp Awal Tahun 2023
102	27 Desember 2022	SAH JADI BANK KUSTODIAN, BTN BIDIK DANA KELOLAAN RP12 TRILIUN
103	28 Desember 2022	Mau Tebus Rights Issue BBTN, Ikuti Cara Mudah Ini
104	29 Desember 2022	BTN Targetkan Penyaluran KPR FLPP dan Tapera 182.250 Unit

No	Tanggal	Judul
105	30 Desember 2022	BTN Siapkan Tim Task Force Dalam Penyelesaian Sertifikat.

Buletin

Selama tahun 2022, Perseroan telah menerbitkan Majalah Internal PARAS dan BTNers Magazine. Adapun majalah yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Edisi	Judul
1.	Oktober 2022	Mencari Jalan Terbaik Pemerintah Restui BTN Rights Issue
2.	Desember 2022	<i>Time To Buy</i> Saham BBTN

Transparansi Penyampaian Laporan

Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan secara berkala kepada masyarakat antara lain melalui media massa, situs web Perseroan dan BEI dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental antara lain kepada OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sepanjang tahun 2022, antara lain:

Perihal	Ditujukan Kepada
Laporan Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing	OJK dan BEI
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK dan BEI
Laporan Informasi atau Fakta Material: Kesiapan Perusahaan untuk Pembayaran Seluruh Obligasi Jatuh Tempo Tahun 2022	OJK dan BEI
Penyampaian Mata Acara RUPS Tahunan	OJK dan BEI
Laporan Kepemilikan Saham Bulanan	OJK dan BEI
Laporan Kewajiban Hutang Valas	OJK dan BEI
Penyampaian Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Per 31 Desember 2021 (Audited)	OJK
Penyampaian Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keberlanjutan 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK Pengawasan Bank I
Penyampaian Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keberlanjutan 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK Pasar Modal dan BEI
Laporan Informasi atau Fakta Material Pemberian LTI	OJK dan BEI
Keterbukaan Informasi Terkait Aksi Korporasi	OJK dan BEI
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK dan BEI

Perihal	Ditujukan Kepada
Laporan Hasil Pemingkatan Efek BBTN Tahunan	OJK dan BEI
Undangan <i>Analyst Meeting</i> Perseroan per 31 Maret 2022	KEMENTERIAN BUMN
Laporan Perubahan Pengurus	OJK dan BEI
Penyampaian Informasi Perkembangan <i>Green Financing</i>	Departemen Kebijakan Makroprudential Bank Indonesia
Laporan Perubahan Corporate Secretary	OJK dan BEI
Laporan Data Hutang/Kewajiban Dalam Valas	OJK dan BEI
Rencana Penyelenggaraan Public Expose Live 2022	OJK dan BEI
Penyampaian Mata Acara RUPSLB	OJK dan BEI
Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK dan BEI
Pelaporan Transaksi Afiliasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK dan BEI
Penyampaian Materi Publix Expose Live 2022	OJK dan BEI
Penyampaian Laporan Keuangan XBRL	OJK dan BEI

Kode Etik

Kode Etik merupakan perwujudan komitmen Perseroan untuk memastikan penerapan GCG dengan standar tinggi yang mengacu kepada *best practice* lembaga perbankan yang kredibel dan terpercaya. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, dan nasabah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan harus mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi norma dan etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perseroan dan mewujudkan Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen*. Karena itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menerapkan pedoman etika dan perilaku yang menjadi dasar sikap dan tindakan seluruh insan Perseroan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Perseroan Sebagai Fondasi Kode Etik

Perseroan telah merumuskan beberapa perangkat kebijakan yang menjadi pedoman beretika dan berperilaku bagi setiap elemen Perseroan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika dan perilaku dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki melalui implementasi *Code of Conduct*.



Visi

Menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025

Misi

1. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
2. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
3. Menjadi *one of home of Indonesia's best talent*.
4. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
5. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Nilai-nilai Budaya Perseroan

Nilai-nilai budaya, tercermin dalam budaya AKHLAK sebagai nilai-nilai utama Perseroan dan 18 panduan perilaku utama AKHLAK sebagai berikut:

Nilai Budaya	Perilaku Utama AKHLAK
 <p>Amanah Memegang teguh kepercayaan yang diberikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi janji dan komitmen; • Bertanggung jawab atas keputusan, tugas dan tindakan yang dilakukan; • Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
 <p>Kompeten Terus belajar mengembangkan kapabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; • Membantu orang lain belajar; • Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
 <p>Harmonis Saling peduli dan menghargai perbedaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; • Suka menolong orang lain; • Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
 <p>Loyal Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara; • Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; • Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
 <p>Adaptif Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; • Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; • Bertindak proaktif.
 <p>Kolaboratif Membangun kerja sama yang sinergi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pokok-Pokok Kode Etik

Code of Conduct berisi standar etika dan perilaku bagi Perseroan sebagai sebuah entitas bisnis beserta seluruh elemennya dalam berinteraksi baik secara internal maupun secara eksternal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Penerapan *Code of Conduct* bertujuan untuk mewujudkan terciptanya perilaku ideal yang berkembang menjadi budaya kerja berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan. *Code of Conduct* terangkum ke dalam 4 Bab yang dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

<p>01. Pendahuluan</p>	<p><i>Code of Conduct</i> ini merupakan kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Perseroan dengan pegawai yang akan mempengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku, baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap aktifitas bisnis.</p> <p>Implementasi <i>Code of Conduct</i>, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, <i>Code of Conduct</i> ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada pada Perseroan. Penerapan <i>Code of Conduct</i> yang konsisten akan menunjukkan bahwa Perseroan adalah Perseroan yang menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang luhur dan etika dalam menjalankan usaha, sekaligus dalam rangka menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.</p>
<p>02. Standar Etika Bisnis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Bank dengan Pegawai Adanya Keadilan perlakuan terhadap pegawai, kedisiplinan pegawai, serta adanya larangan keterlibatan pegawai dalam aktivitas bisnis surat berharga Bank. 2. Etika Bank dengan Nasabah Bank mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah dan pegawai wajib mendukung Bank dalam upaya untuk mencapai kepuasan nasabah. 3. Etika Bank dengan penyedia barang dan jasa Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektifitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok. 4. Etika Bank dengan Pesaing Bank menempatkan pesaing sebagai pendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan. 5. Etika Bank dengan Mitra Kerja Bank menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai, serta menjunjung tinggi kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku. 6. Etika Bank dengan Pemerintah Bank berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Etika Bank dengan Masyarakat Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 8. Etika Bank dengan Media Massa Bank menjadikan media masa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik. 9. Etika Bank dengan Organisasi Profesi Bank membina hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka sharing informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.
<p>03. Kebijakan Standar Prilaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. 2. Setiap anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank dilarang memberikan dan menerima sesuatu untuk kepentingannya baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan. 3. Organ perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank.
<p>04. Penerapan dan Penegakan</p>	<p>Setiap pegawai Bank harus melaporkan setiap fakta penyimpangan <i>Corporate Code of Conduct</i> kepada Human Capital Management Division dan identitas pelapor dilindungi. Human Capital Management Division menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pada akhirnya Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.</p>

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi seluruh Pengurus (dhi. Dewan Komisaris, Direksi) serta Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Pernyataan pemberlakuan *Code of Conduct* bagi seluruh level organisasi dituangkan secara resmi melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan sikap Insan Perseroan terhadap *Code of Conduct* yang disebut Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu, segenap pimpinan unit dituntut untuk memberikan pemahaman terkait penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Bentuk Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Code of Conduct disosialisasikan dan dapat diakses oleh seluruh insan Perseroan melalui **media Digital Room for E learning Modules (DREAM)** serta diselenggarakan kuis tentang *Code of Conduct* untuk mengetahui pemahaman pegawai terhadap *Code of Conduct*. Komitmen terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* juga dituangkan dalam Pakta Integritas yang wajib ditandatangani oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan. Di samping itu, *Code of Conduct* juga dapat diakses oleh seluruh *Stakeholder* Perseroan melalui website Perseroan.

Upaya Penerapan dan Penegakan Code of Conduct

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct*. Bentuk penegakan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Sepanjang tahun 2022, upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam menerapkan dan menegakkan *Code of Conduct* antara lain:

1. Pengisian dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sesuai nilai-nilai *Code of Conduct*;
2. Internalisasi *Code of Conduct*, Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada seluruh Pegawai melalui *Digital Room for E learning Modules (DREAM)*;
3. Bekerja sama dengan KPK melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) yang didalamnya mencakup dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten membangun integritas dalam mengawal pencegahan korupsi di

lingkungan Perseroan melalui keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) dan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) serta keikutsertaan kolaborasi kampanye dengan KPK tentang pencegahan korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi;

4. Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan serta melaporkan implementasinya kepada KPK secara periodik per semester;
5. Mengelola laporan penerimaan gratifikasi dari seluruh unit kerja dan melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan;
6. Melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Etika Bisnis dan Perilaku yang tercantum dalam *Code of Conduct*;
7. Melaksanakan program *Whistleblowing System (WBS)*;
8. *Punishment* bagi pegawai yang melanggar etika bisnis;
9. Dan lainnya.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan menetapkan jenis sanksi untuk setiap pelanggaran *Code of Conduct* dalam dua jenis sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi administratif
 - a. Kategori Ringan, yaitu: teguran lisan; teguran tertulis dan pernyataan tidak puas. Masa berlakunya sanksi sebagai pembinaan pegawai adalah 3 (tiga) bulan.
 - b. Kategori Sedang, yaitu: tidak mendapatkan uang cuti; tidak mendapatkan penyesuaian gaji berkala dan penurunan *Person Grade* sebanyak 1 (satu) *grade* (gaji dasar menyesuaikan). Masa berlakunya sanksi pembinaan pegawai adalah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Kategori Berat, yaitu: penurunan *person grade* sebanyak minimal 2 (dua) *grade* (gaji dasar menyesuaikan); pemutusan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Masa berlakunya sanksi sebagai pembinaan pegawai adalah selama 2 (dua) tahun.
2. Sanksi Finansial
Sanksi finansial yaitu mengganti segala kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Pada tahun 2022 jumlah pelanggaran *Code of Conduct* sebanyak 95 pelanggaran, Sanksi yang dikenakan terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi sanksi ringan sebanyak 20 (dua puluh) orang, sanksi sedang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, sanksi berat sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang.

Tren kualitas penerapan Kode Etik dapat dilihat melalui perkembangan jumlah pelanggaran *Code of Conduct* seperti pada tabel dibawah ini.

No	Kategori Sanksi	2020	2021	2022
1	Sanksi Ringan	93	77	20
2	Sanksi Sedang	125	91	27
3	Sanksi Berat	40	27	48
	Total	258	195	95

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank dalam jangka panjang sehingga Bank dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, manajemen Bank BTN sejak tahun 2020 memutuskan memberikan Insentif/remunerasi bersifat variabel Jangka Panjang/*Long Term Incentive* (LTI) bagi Pegawai berupa pemberian Saham BBTN yang diberikan dalam 3 (tiga) *vesting* yaitu tahun *vesting* 1 (satu) di tahun 2020, *vesting* 2 (dua) di tahun 2021 dan *vesting* 3 (tiga) di tahun 2022. Masing-masing *vesting* dilakukan masa penguncian saham (*locked up period*) selama 3 (tiga) tahun.

Latar belakang pemberian program LTI kepada pegawai Bank BTN antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai *long term performance*, yaitu untuk mendorong kinerja yang bersifat ke masa depan dan jangka panjang.
2. Menjaga motivasi pegawai untuk dapat memberikan kontribusi positif melampaui target yang ditetapkan perusahaan.
3. LTI merupakan program *rewards* yang sangat umum digunakan dalam industri untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan secara jangka panjang.

Pegawai yang mendapatkan LTI adalah pegawai dengan posisi/jabatan kunci yang memiliki peran strategis sebagai penyelaras (*alignment*) tujuan Korporat sekaligus supervisi dan pengendali pencapaian kinerja di Divisi/Kantor Wilayah/Kantor Cabang masing-masing, jabatan tersebut meliputi jabatan struktural L1 dan L2 yaitu jabatan Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Cabang, Kepala Cabang Syariah, Deputy/Wakil Kepala Divisi, Deputy Regional Manager Business, Deputy Regional Manager Support, Department Head, Deputy Branch Manager dan Deputy Service Manager, Commercial Banking Center (CBC) Head, CBC Manager, Commercial Risk Head, Commercial Risk Manager, Regional Loan Processing Center (RLPC) Head serta jabatan setara L1 dan L2 yang ditetapkan oleh Direksi.

Dalam proses *buy back* saham BBTN, Bank BTN bekerjasama dengan perusahaan sekuritas yaitu PT Bahana Sekuritas untuk proses pembelian dan administrasi saham yang sudah di atasnamakan masing-masing pegawai penerima.

Program LTI kepada pegawai akan dilaksanakan secara bertahap selama 3 tahun yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan total anggaran sebesar Rp150 Miliar yang dapat diterima oleh Pegawai melalui pencapaian target kinerja dan

persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank dengan distribusi *vesting* sebagai berikut:

1. LTI tahap 1 (satu)/*vesting* 1 (satu) pada tahun 2020, diberikan maksimum 50% dari total anggaran pembelian saham selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah saham 58.983.900 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp958,55/lembar dan didistribusikan kepada 549 pegawai penerima LTI.
2. LTI tahap 2 (dua)/*vesting* 2 (dua) pada tahun 2021, diberikan maksimum 25% dari total anggaran pembelian saham selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah saham 15.936.000 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp1.566,62/lembar dan didistribusikan kepada 599 pegawai penerima LTI.
3. LTI tahap 3 (tiga)/*vesting* 3 (tiga) pada tahun 2022, diberikan maksimum 25% dari total anggaran pembelian saham selama 3 (tiga) tahun dan akan dibelikan saham BBTN di tahun 2022.

Pada tahun 2022, telah ditetapkan penerima LTI atas *vesting* 2 (dua) atas kinerja tahun 2021 sebanyak 19,066,300 lembar saham kepada 651 pegawai, dan telah dialokasikan LTI untuk *vesting* 3 (tiga) tahun 2022 Rp31,45 Miliar sebanyak 18,192,800 lembar saham kepada pegawai dengan jabatan yang *eligible*, yang selanjutnya akan ditetapkan pada tahun 2023 sesuai dengan kinerja masing-masing.

Whistleblowing System

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. WBS Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran melalui WBS dilakukan dengan membuat laporan pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa, meliputi:

1. Apabila pihak pelapor adalah karyawan Bank BTN sampai dengan 2 (dua) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS BTN, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Tim WBS BTN.
2. Apabila pihak pelapor adalah anggota Tim WBS BTN dan atau karyawan BTN 1 (satu) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
3. Apabila pihak pelapor adalah Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.

4. Apabila pihak pelapor adalah Direksi, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
5. Apabila pihak pelapor adalah Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Anggota Komisaris yang tidak terkait yang juga bukan anggota dari Komite yang bersangkutan.
6. Apabila pihak pelapor adalah Komisaris secara bersama-sama, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Perseroan juga membangun infrastruktur pendukung dalam menerapkan kebijakan WBS untuk memfasilitasi pelapor dalam menyampaikan laporannya melalui media sebagai berikut:

1. PO Box 2828 JKP 10028
2. Website: <https://btnsiips.tipoffs.info>
3. Email: btnsiips@tipoffs.info
4. SMS: +62 813 8870 1117
5. Whatsapp: +62 813 8870 1117
6. Telepon: +62 21-50928882
7. Faximili: +62 21-50928883

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Perseroan memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik melaporkan setiap pelanggaran yang berisiko merugikan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan saluran komunikasi pelaporan (lisan, telepon, *email*) yang bebas dan rahasia ataupun penyediaan Ombudsman yang independen dan rahasia. Melalui saluran komunikasi ini Pelapor akan mendapatkan informasi tindak lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan;

2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim;
3. Perlindungan dari tindakan balasan dari Terlapor atau organisasi yang dilaporkan. Perlindungan ini dapat meliputi:
 - a. Perlindungan fisik baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya;
 - b. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarga atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
 - c. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, pengucilan di tempat kerja, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dll;
 - d. Perlindungan hukum, dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri, termasuk biayanya, dan bila perlu termasuk perlindungan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

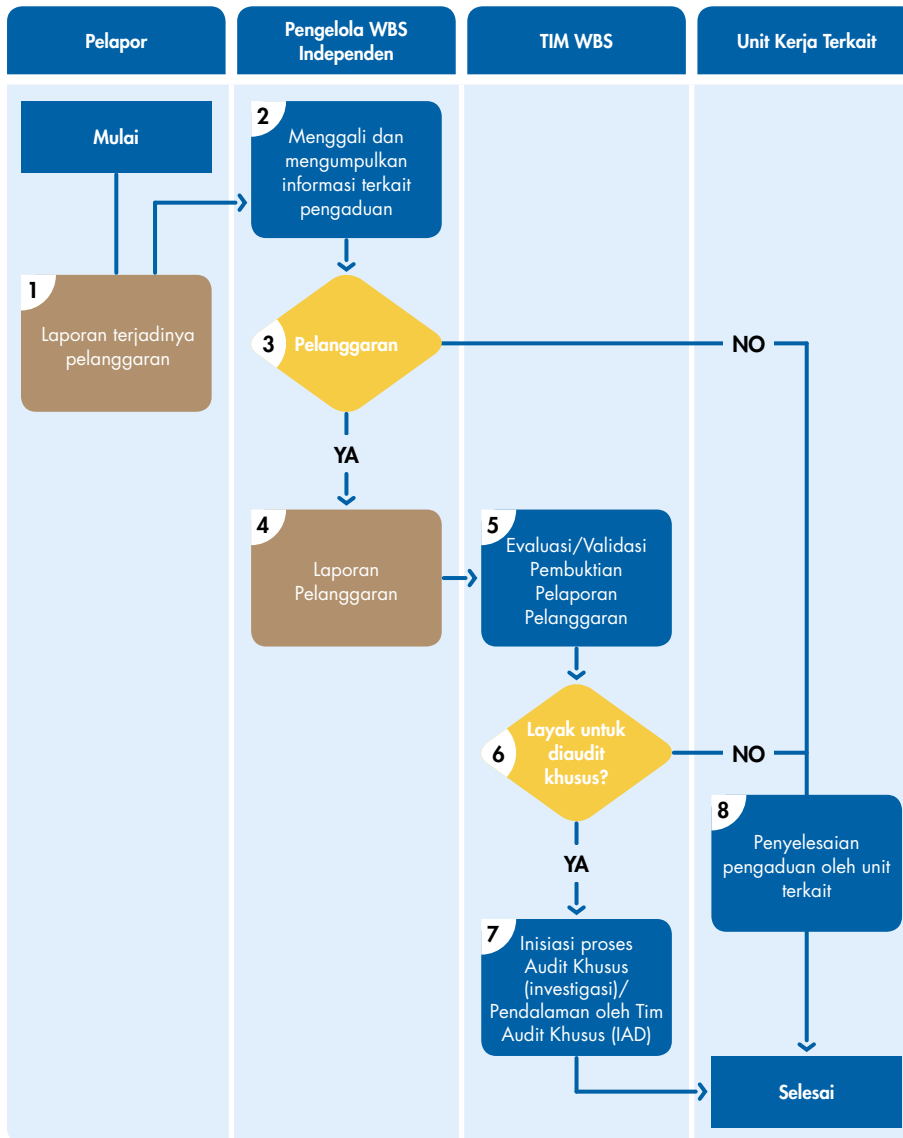
Penanganan Pengaduan

WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi

Perseroan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dengan penanganan WBS dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setiap laporan yang masuk, Tim WBS menindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

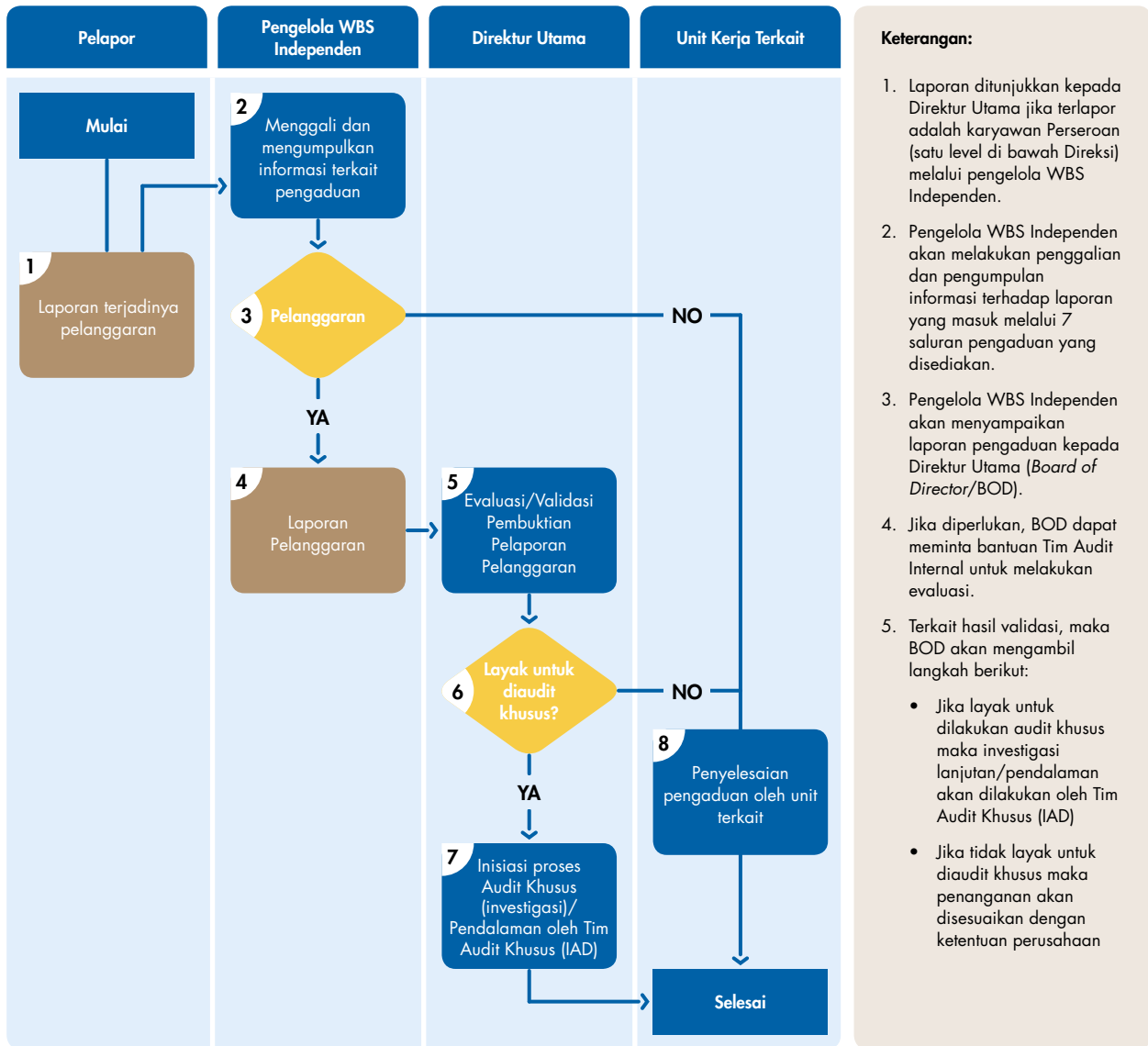
Bagan Alur (1) Jika Terlapor Pegawai BTN [2 Level di bawah Direksi] dan Bukan Tim WBS.



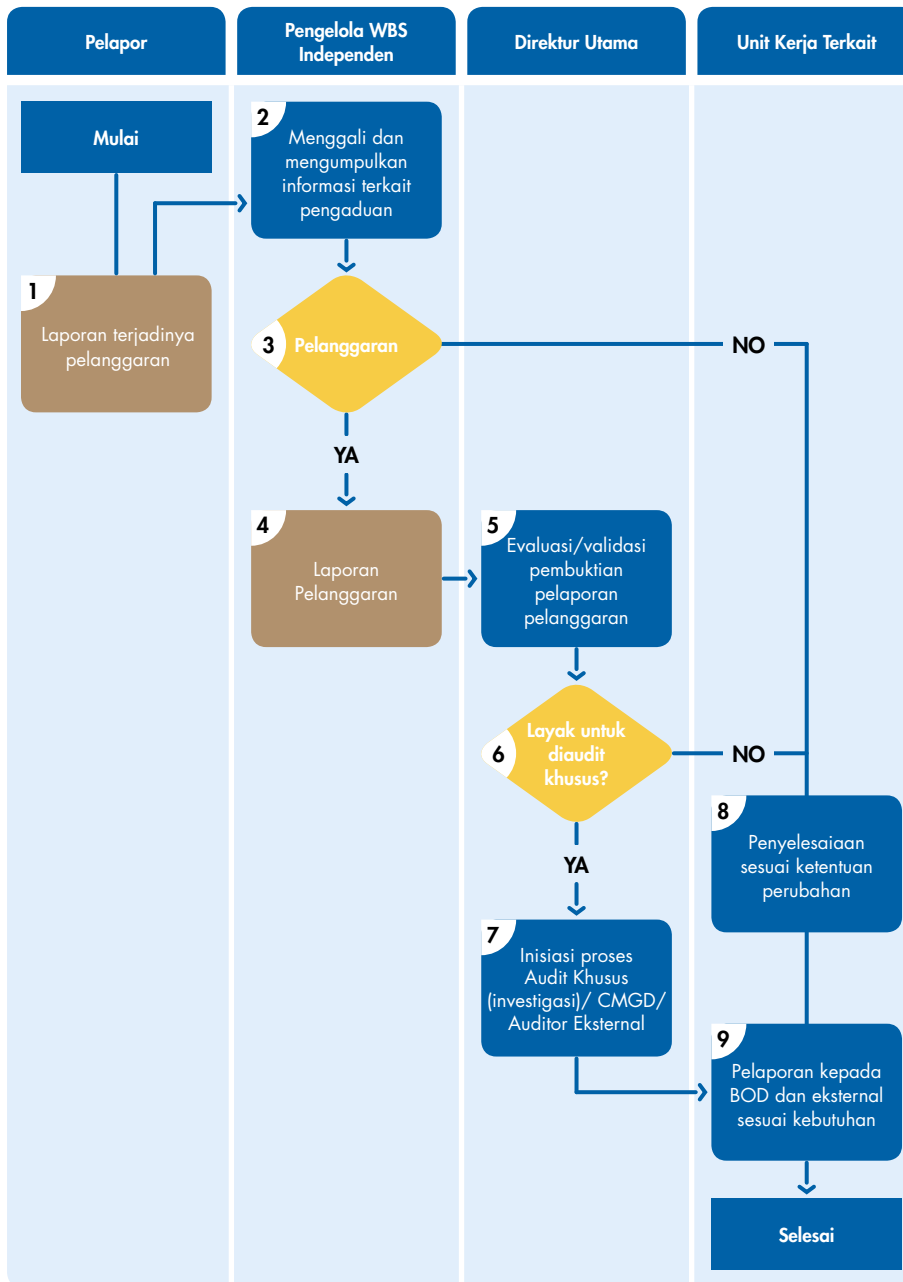
Keterangan:

- Laporan ditunjukkan kepada Tim WBS BTN, jika terlapor merupakan pegawai internal sampai dengan 2 (dua) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS BTN
- Pengelola WBS Independen akan melakukan pengalihan dan pengumpulan informasi terhadap laporan yang masuk melalui 7 saluran pengaduan yang disediakan
- Terkait hasil validasi, maka Tim WBS BTN akan mengambil langkah berikut:
 - Jika layak untuk dilakukan audit khusus maka investigasi lanjutan/pendalaman akan dilakukan oleh Tim Audit Khusus (IAD)
 - Jika tidak layak untuk diaudit khusus maka akan dilakukan pendalaman oleh unit kerja terkait antara lain: pendalaman oleh KC/ KCS/Divisi/Kanwil atau Tim Audit Umum di IAD

Bagan Alur (2) Jika Terlapor adalah Pegawai Perseroan 1 level di bawah Direksi dan bukan Tim WBS.



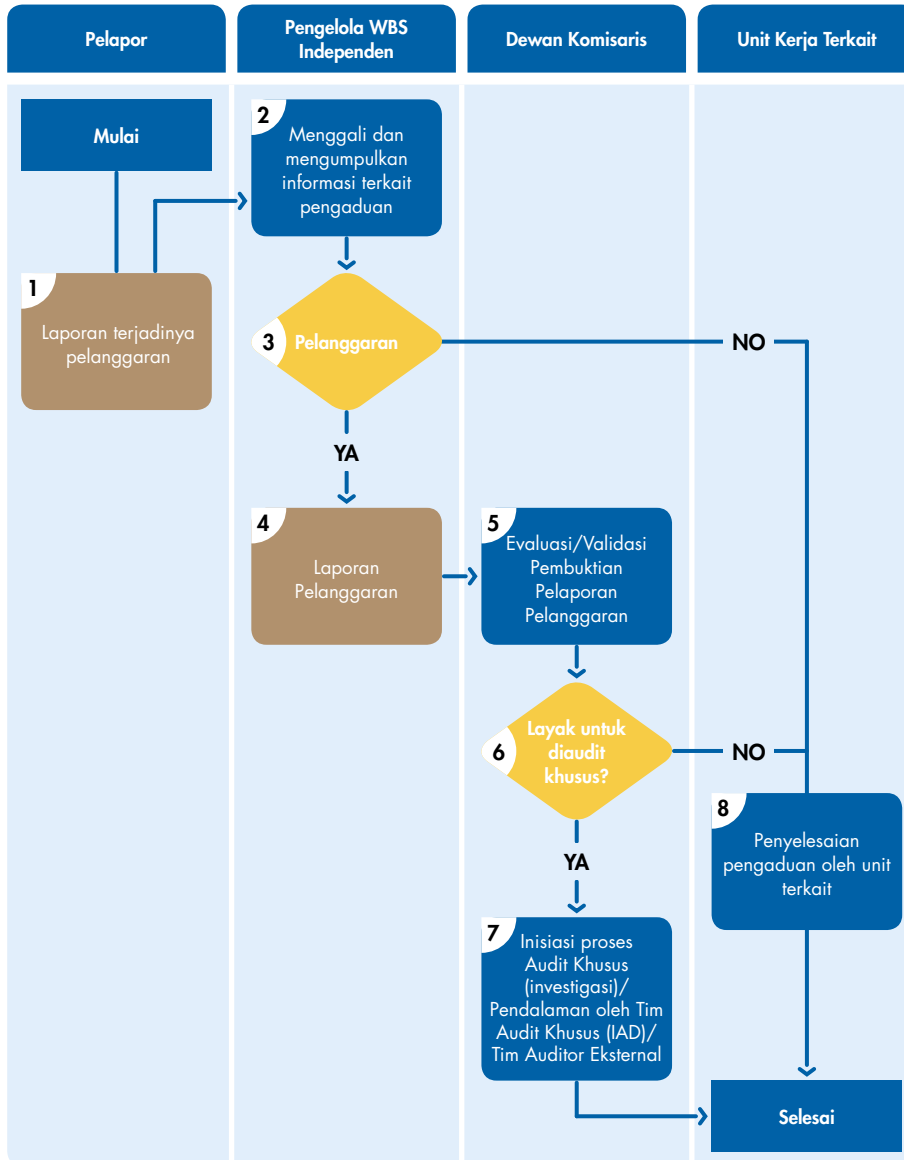
Bagan Alur (3) Jika Terlapor adalah Tim WBS.



Keterangan:

1. Laporan ditujukan kepada Direktur Utama jika terlapor adalah anggota Tim WBS melalui pengelolaan WBS Independen.
2. Pengelola WBS Independen akan melakukan penggalan dan pengumpulan informasi terhadap laporan yang masuk melalui 7 saluran pengaduan yang disediakan.
3. Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan pengaduan kepada Direktur Utama (Board of Director/BOD).
4. Jika diperlukan, BOD dapat meminta bantuan CMGD untuk melakukan evaluasi.
5. Terkait hasil validasi, maka BOD akan mengambil langkah berikut:
 - Jika layak dilakukan audit khusus maka investigasi lanjutan/ pendalaman akan dilakukan oleh Tim Auditor Eksternal dan/ atau CMGD.
 - Jika tidak layak untuk dilakukan audit khusus maka penanganan akan disesuaikan dengan ketentuan perusahaan.
6. CMGD menyampaikan laporan kepada BOD dan pihak eksternal sesuai kebutuhan.

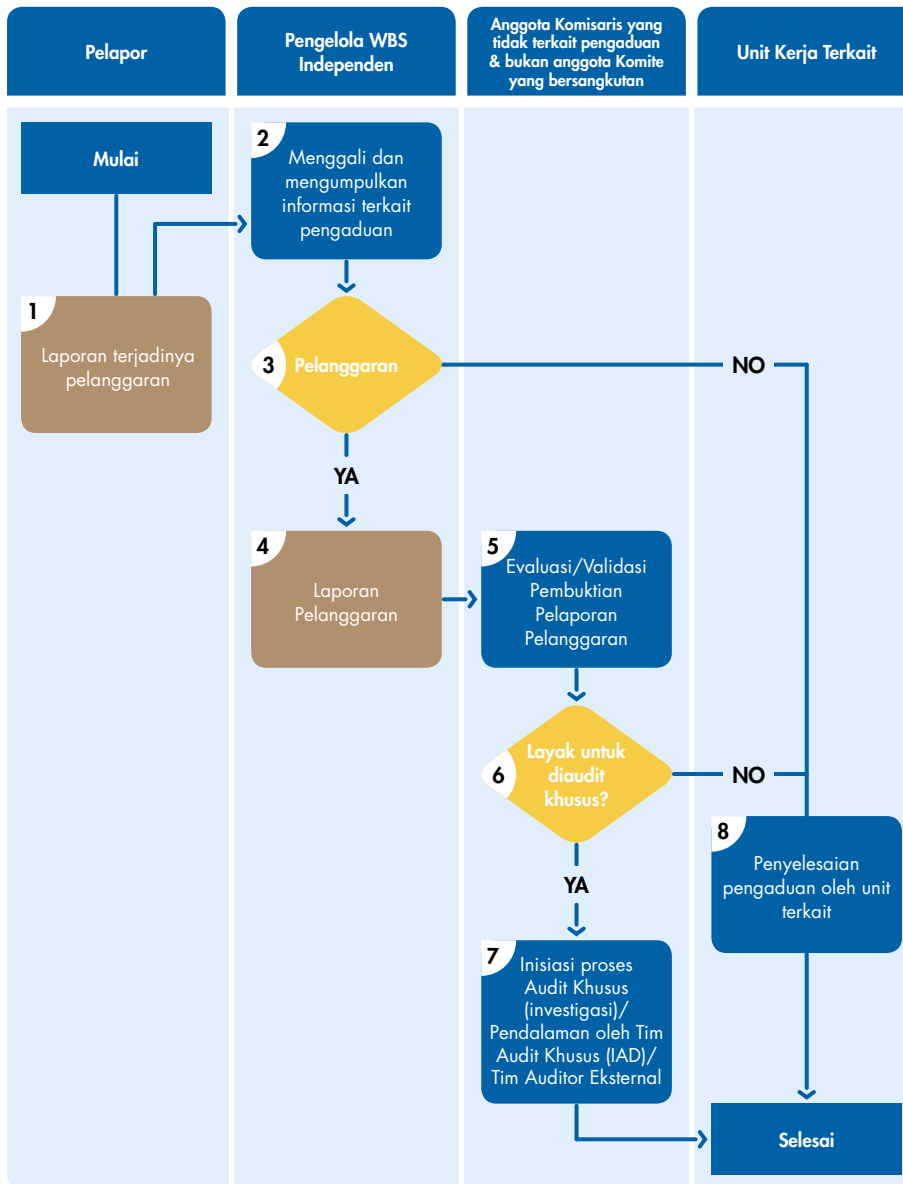
Bagan Alur (4) Jika Terlapor adalah Direksi



Keterangan:

1. Laporan ditujukan kepada Dewan Komisaris jika terlapor adalah Direksi melalui pengelola WBS Independen.
2. Pengelola WBS Independen akan melakukan penggalian dan pengumpulan informasi terhadap laporan yang masuk melalui 7 saluran pengaduan yang disediakan.
3. Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan pengaduan kepada Dewan Komisaris (*Board of Commisioner/BOC*).
4. Jika diperlukan, BOC dapat meminta bantuan Tim Audit Internal dan/atau Audit Eksternal untuk melakukan evaluasi.
5. Terkait hasil validasi, maka BOC akan mengambil langkah berikut:
 - Jika layak dilakukan audit khusus maka investigasi lanjutan/ pendalaman akan dilakukan oleh Tim Audit Khusus (IAD)/Tim Auditor Eksternal.
 - Jika tidak layak untuk dilakukan audit khusus maka penanganan akan disesuaikan dengan ketentuan Perseroan.

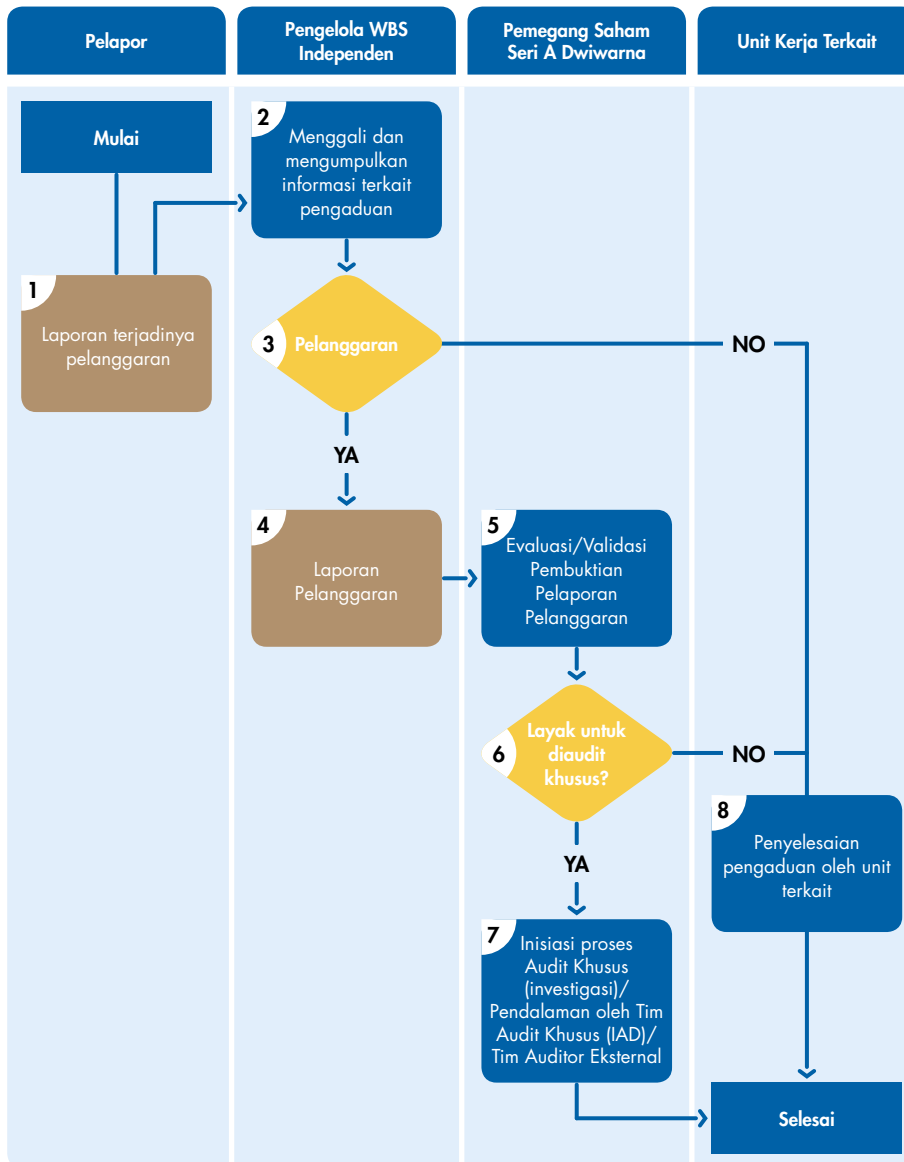
Bagan Alur (5) Jika Terlapor adalah Komisaris dan/atau Komite dibawah Dewan Komisaris



Keterangan:

- Laporan ditujukan kepada anggota Komisaris yang tidak terkait pengaduan dan juga bukan anggota komite yang bersangkutan melalui pengelola WBS Independen.
- Pengelola WBS Independen akan melakukan penggalan dan pengumpulan informasi terhadap laporan yang masuk melalui 7 saluran pengaduan yang disediakan.
- Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan pengaduan kepada Komisaris yang tidak terkait pengaduan dan bukan anggota Komite yang bersangkutan.
- Jika diperlukan, Komisaris dapat meminta bantuan Tim Audit Internal dan/ atau Audit Eksternal untuk melakukan evaluasi.
- Terkait hasil validasi, maka Komisaris yang tidak terkait pengaduan dan bukan anggota Komite yang bersangkutan akan mengambil langkah berikut:
 - Jika layak dilakukan audit khusus maka investigasi lanjutan/ pendalaman akan dilakukan oleh Tim Audit Khusus (IAD)/Tim Auditor Eksternal.
 - Jika tidak layak untuk dilakukan audit khusus maka penanganan akan disesuaikan dengan ketentuan perusahaan.

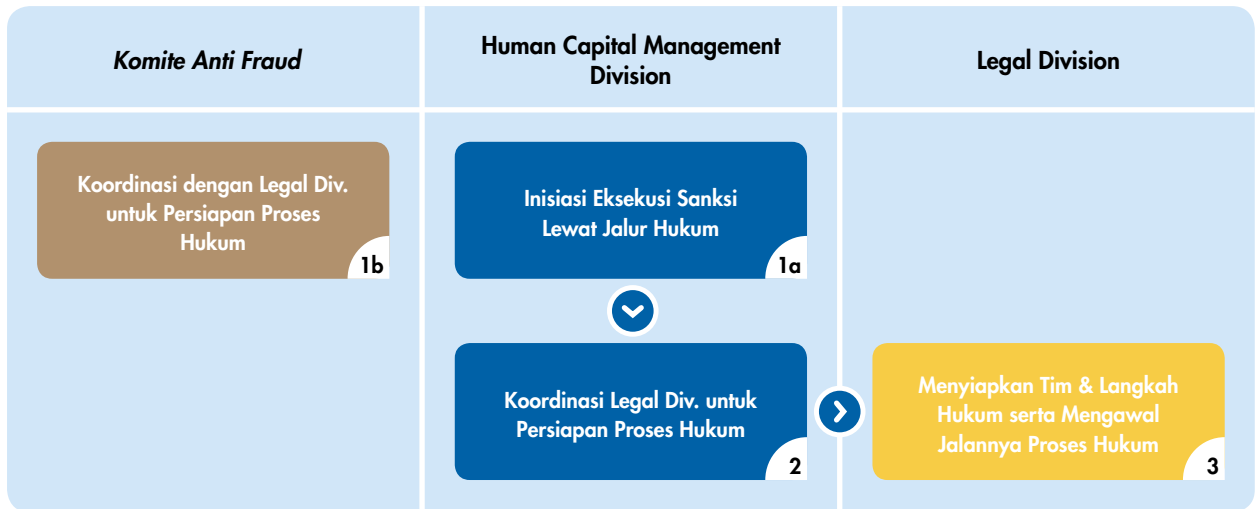
Bagan Alur (6) Jika Terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama



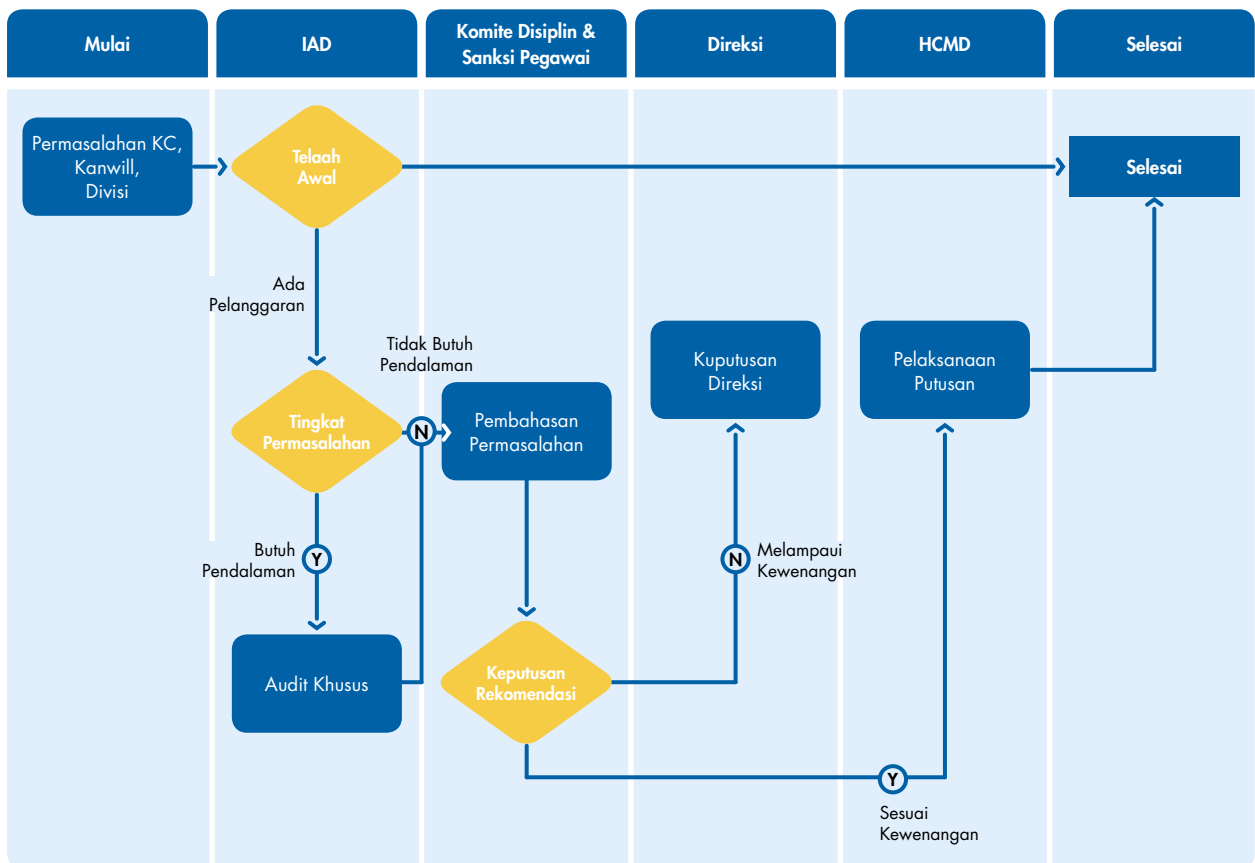
Keterangan:

1. Laporan ditujukan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Pengelola WBS Independen akan melakukan penggalan dan pengumpulan informasi terhadap laporan yang masuk melalui 7 saluran pengaduan yang disediakan.
3. Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan pengaduan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
4. Jika diperlukan, Pemegang Saham Seri A dapat meminta bantuan Tim Audit Internal dan/atau Audit Eksternal untuk melakukan evaluasi.
5. Terkait hasil validasi, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna akan mengambil langkah berikut:
 - Jika layak dilakukan audit khusus maka investigasi lanjutan/ pendalaman akan dilakukan oleh Tim Audit Khusus (IAD)/Tim Auditor Eksternal.
 - Jika tidak layak untuk dilakukan audit khusus maka penanganan akan disesuaikan dengan ketentuan perusahaan.

Bagan Alur Proses Sanksi - Jalur Hukum



Bagan Alur Proses Sanksi pada Perseroan



Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelanggaran atau penyimpangan yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan yang secara signifikan berpotensi mengganggu kelangsungan bisnis atau mengancam keselamatan individu Perseroan. Adapun beberapa contoh pelanggaran dan penyimpangan yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan WBS ini, antara lain adalah:

1. Perbuatan *fraud*/kecurangan;
2. Pencurian/Pengambilan/Penggelapan/Penipuan;
3. Benturan Kepentingan;
4. Penyuaipan/Gratifikasi;
5. Penyalahgunaan Wewenang;
6. Pelanggaran Kode Etik/Perilaku Tidak Etis;
7. Pembocoran Informasi;
8. Pelanggaran Terhadap Ketentuan/Hukum Yang Berlaku.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Perseroan membentuk Tim WBS yang mengelola seluruh pengaduan laporan WBS yang terdiri dari:

1. Kepala Internal Audit Division;
2. Wakil Kepala Internal Audit Division;
3. Unit pengelola WBS di Internal Audit Division.

Sosialisasi Whistleblowing System

Perseroan melakukan internalisasi WBS dengan pendistribusian pedoman Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi serta presentasi *sharing session* secara langsung kepada seluruh pimpinan dan pegawai Perseroan. Selain itu, guna menjangkau seluruh *stakeholders* Perseroan, sosialisasi *Whistleblowing System* juga dilakukan melalui *website* Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, *standing banner*, *customer gathering*, presentasi langsung pedoman etika dan kebijakan WBS.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pengaduan yang masuk selama periode Januari s.d Desember 2022 berjumlah 115 pengaduan yang terdiri dari 1 pengaduan melalui Surat/PO BOX, 50 pengaduan melalui SMS/Telepon/Whatsapp, dan 64 pengaduan melalui Email/Website. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 107 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan koordinasi/pendalaman oleh unit kerja baik Kantor Cabang, Kantor Wilayah, dan Divisi; 6 pengaduan masih dalam proses pendalaman dan pengumpulan bukti/dokumen pendukung; sedangkan sisanya 2 pengaduan diteruskan ke proses audit khusus. Secara rinci, jumlah pengaduan yang diteruskan ke proses audit dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Pengaduan WBS yang Diteruskan ke Proses Audit

Tahun	Metode Penyampaian			Tindak Lanjut			
	Surat/ PO BOX	SMS/ Telepon/ /WA	Email/ Website	Laporan ditutup (tidak terbukti)	Laporan masih dalam proses (Proses Audit/ Proses Pelaporan/ Proses Lintas Divisi)	Laporan telah selesai diproses dan atau telah diberikan sanksi (termasuk sanksi administratif)	Laporan diteruskan kepada Penyidik (terkait tindak pidana umum atau Korupsi)
2018	1	0	5	0	0	6	0
2019	5	2	3	0	1	9	0
2020	3	2	9	0	4	10	0
2021	0	2	3	0	0	5	0
2022	0	1	1	0	2	0	0

Program Anti Korupsi

Perseroan terus berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan terus mendorong efektivitas penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System*, Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Selain itu, Perseroan juga melakukan upaya dalam mendukung Program Anti Korupsi melalui pelaksanaan Sertifikasi dan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaipan (SMAP), keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) serta sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).

Program dan Prosedur yang Dilakukan dalam Mengatasi Praktik Korupsi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi, pada tanggal 11 Agustus 2020 Bank BTN telah memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 atas implementasi ISO 37001:2016 di lingkungan Perseroan. Adapun ruang lingkup sertifikasi ISO 37001:2016 yaitu:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD).
2. Perkreditan Komersial pada Commercial Banking Division (CMBD) dan Corporate Syndication & Transaction Banking Division (CSTD).
3. SME Restrukturisasi Kredit pada seluruh Kantor Wilayah.
4. Commercial Credit Risk Division (CRD).

Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 tersebut, Perseroan melakukan audit *surveillance* ISO 37001:2016 SMAP. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Perseroan telah dilakukan audit *Surveillance* ISO 37001:2016 dan berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP. Untuk menerapkan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan memiliki organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai Panduan SNI ISO 37001:2016 yang terdiri dari *Governing Body*, *Top Management* dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). Dalam hal ini *Governing Body* menjadi kewenangan Dewan Komisaris sedangkan FKAP fungsinya berada pada Compliance and Governance Division.

Adapun pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah berjalan dengan baik sesuai Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diantaranya yaitu:

1. Melakukan pengkajian perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan;
2. Melakukan pengkajian efektivitas tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuapan;
3. Melakukan pengkajian peluang peningkatan berkelanjutan dari SMAP;
4. Melakukan internalisasi SMAP dan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai media sosialisasi kepada Debitur dan Vendor guna peningkatan kualitas SMAP;
5. Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai terkait komitmen implementasi SMAP yang diperbaharui setiap tahunnya secara berkala;
6. Melakukan pengkajian terhadap penambahan unit kerja yang disertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Perseroan berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi,

kolusi dan nepotisme. Perseroan akan senantiasa mengajak rekan bisnis/mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 di Perseroan melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan komitmen bahwa selama bekerja sama dengan Perseroan tidak melakukan praktik gratifikasi, suap maupun tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan diharapkan dapat menambah kepercayaan seluruh *stakeholders* Perseroan, termasuk rekan bisnis/mitra kerja dalam menjalin kerjasama dan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. Perseroan sebagai lembaga keuangan sangat perlu meningkatkan reputasi dengan proses bisnis yang efisien, GCG dan mengikuti standar internasional seperti ISO 37001:2016.

Hasil akhir yang akan diperoleh Perseroan dengan penerapan ISO 37001:2016 adalah peningkatan daya saing Perseroan dalam jangka panjang sehingga Perseroan akan semakin sehat dan tumbuh secara *sustainable*. Perseroan selama ini juga telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, yaitu proses audit pada Internal Audit Division, proses KPR pada Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division, proses bisnis pada Enterprise Risk Management Division, Compliance & Governance Division dan Learning Management Division.

PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN SERTIFIKASI AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS (API)

Keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat sistem integritas Perseroan khususnya dalam pencegahan korupsi dan sebagai komitmen atas kerja sama Perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Profesional Berintegritas (PROFIT).

Sertifikasi API adalah personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Perseroan berupaya membangun sistem integritas dan memperkuat sistem integritas secara berkelanjutan salah satunya melalui sertifikasi API.

Pegawai Perseroan yang telah dinyatakan kompeten dan menerima sertifikat API sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini sebanyak **59 pegawai**. Para peserta sertifikasi API yang telah kompeten kedepannya diharapkan dapat menjadi *trigger mechanism* dan dapat menerapkan komitmen yang telah dibuat dalam bentuk rencana tindak lanjut setelah sertifikasi yaitu meningkatkan *awareness* terkait integritas, membuat profil risiko dan mitigasinya mengenai aktivitas bidang pekerjaan area rawan korupsi, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan kerja atau instansi dengan melakukan internalisasi melalui kegiatan webinar dan sosialisasi mengenai GCG dan Ketentuan Kedisiplinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja secara berkala dan berkesinambungan.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2022 merupakan angkatan 3 (tiga) yang dilaksanakan dari tanggal 3 Juni sampai dengan 21 September 2022 dimulai dari proses *e-learning* sampai dengan pelaksanaan asesmen terdapat 11 pegawai yang dinyatakan kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sepanjang periode 2022 sebagai berikut:

1. Pengajuan Ijin Prinsip keikutsertaan dan usulan calon peserta sertifikasi Ahli Pembangun Integritas kepada Direksi dari Compliance and Governance Division (CMGD);
2. Verifikasi internal para peserta dari Human Capital Management Division (HCMD);
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan Compliance and Governance Division (CMGD);
4. Pendalaman materi melalui *e-learning* dari LSP KPK;
5. Pengisian form APL-01 (formulir biodata calon peserta uji kompetensi);
6. Pengisian form APL-02 (formulir asesmen mandiri peserta uji kompetensi);
7. Pendaftaran peserta melalui link LSP KPK;
8. Pelaksanaan Asesmen secara *offline*.

Pada Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan kepada Compliance & Governance Division Head sebagai Ahli Pembangun Integritas Inspiratif Kategori API Teraktif 2022.

PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI (PAKSI)

Perseroan dalam mendukung program dan upaya pencegahan korupsi dari KPK mengikuti Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang melibatkan pegawai perseroan dan IIKPA. sampai saat ini telah tersertifikasi PAKSI sebanyak 27 orang. Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi dan mempunyai lingkup penyuluhan anti korupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2022 yang dilaksanakan dari tanggal 10 Juni sampai dengan 6 Oktober 2022 dimulai dari proses *e-learning* sampai dengan pelaksanaan asesmen terdapat 22 pegawai dan 5 dari Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan (IIKPA) yang dinyatakan kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) sepanjang periode 2022 sebagai berikut:

1. Pengajuan Ijin Prinsip keikutsertaan dan usulan calon peserta sertifikasi Penyuluh Antikorupsi kepada Direksi dari Compliance and Governance Division (CMGD);
2. Verifikasi internal para peserta dari Human Capital Management Division (HCMD);
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan Compliance and Governance Division (CMGD);
4. Pelaksanaan *E-Learning* "Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas" yang dilaksanakan secara mandiri (*online*);
5. Pengisian Formulir Pendaftaran Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (PELOPOR);
6. Pelaksanaan Diklat PELOPOR secara *offline*;
7. Pendaftaran Sertifikasi Asesmen Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) melalui link LSP KPK;
8. Pelaksanaan Asesmen Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) secara *online*.

ACARA PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2022

Memperingati hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) pada 9 Desember 2022, Perseroan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya diseminasi pesan antikorupsi melalui berbagai media seperti media sosial Perseroan (instagram, facebook, twitter), video di lift, LED Perseroan di beberapa ruas jalan, *virtual background* pada rapat *video conference* pegawai Perseroan, *whatsapp* dan *email blast* kepada seluruh pegawai Perseroan, umbul-umbul tema Hakordia di Lobby Menara Bank BTN.

Puncak acara peringatan Hakordia 2022, Perseroan memberikan penghargaan kepada pegawai Perseroan yang melaporkan gratifikasi di setiap unit kerjanya masing-masing. Acara Pemberian Penghargaan Pelaporan Gratifikasi dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Dalam Rangka Memperingati Hakordia 2022 diselenggarakan di Menara Bank BTN pada tanggal 9 Desember 2022. Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktur Human Capital, Compliance, and Legal Perseroan kepada 3 pegawai terpilih yang melaporkan gratifikasi pada tahun 2022 dengan 2 (dua) kategori yaitu Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak dan Kategori pelaporan gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak.

Selain penghargaan diberikan ke pelapor gratifikasi, apresiasi diberikan kepada 2 (dua) pegawai perwakilan penerima sertifikat Ahli Pembangun Integritas (API) angkatan Tahun 2022. Diharapkan dengan adanya apresiasi tersebut maka akan meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi melalui pelaporan gratifikasi maupun sertifikasi API serta inspirasi bagi seluruh pegawai untuk menjadi *role model* di masing-masing unit kerjanya dan memperkuat sistem integritas di Perseroan dalam upaya pencegahan korupsi.

Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan aspek penting bagi Perseroan dalam menjaga proses kegiatan usaha berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Perseroan melakukan pengendalian gratifikasi bertujuan untuk

membangun nilai-nilai GCG dan menanamkan nilai integritas kepada seluruh pegawai sehingga, proses bisnis senantiasa didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Pengendalian gratifikasi juga dibutuhkan agar kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Sejalan dengan maksud tersebut, Perseroan menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Pegawai Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan antara lain pada saat menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal/Tahun Baru). Perseroan selalu membuat pengumuman melalui surat kabar nasional yang menjangkau masyarakat secara luas bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Pegawai Perseroan mempunyai komitmen penuh untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari/kepada nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.

Perseroan juga mengajak kepada seluruh nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak lainnya yang telah memiliki maupun yang bermaksud melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan mendukung komitmen tersebut dengan tidak memberikan hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberitahuan mengenai hal tersebut juga dilakukan Perseroan melalui surat tertulis kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bukti keseriusan Perseroan dalam mendukung pemberantasan korupsi adalah bekerjasama dengan KPK melakukan penandatanganan komitmen dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja Perseroan sejak tanggal 25 Juni 2014. Berdasarkan komitmen tersebut, pada tahun 2015 Perseroan telah mempunyai pedoman intern

serta Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan aktif dalam menyebarluaskan kesadaran dan pemahaman tentang Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.

Perseroan menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam implementasi pengendalian gratifikasi Perseroan melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dalam mendukung Pengendalian Gratifikasi. Surat edaran tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Gratifikasi.
2. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi.
3. Kategori Gratifikasi.
4. Pengelola Pengendalian Gratifikasi.
5. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.
6. Implementasi Pengendalian Gratifikasi.

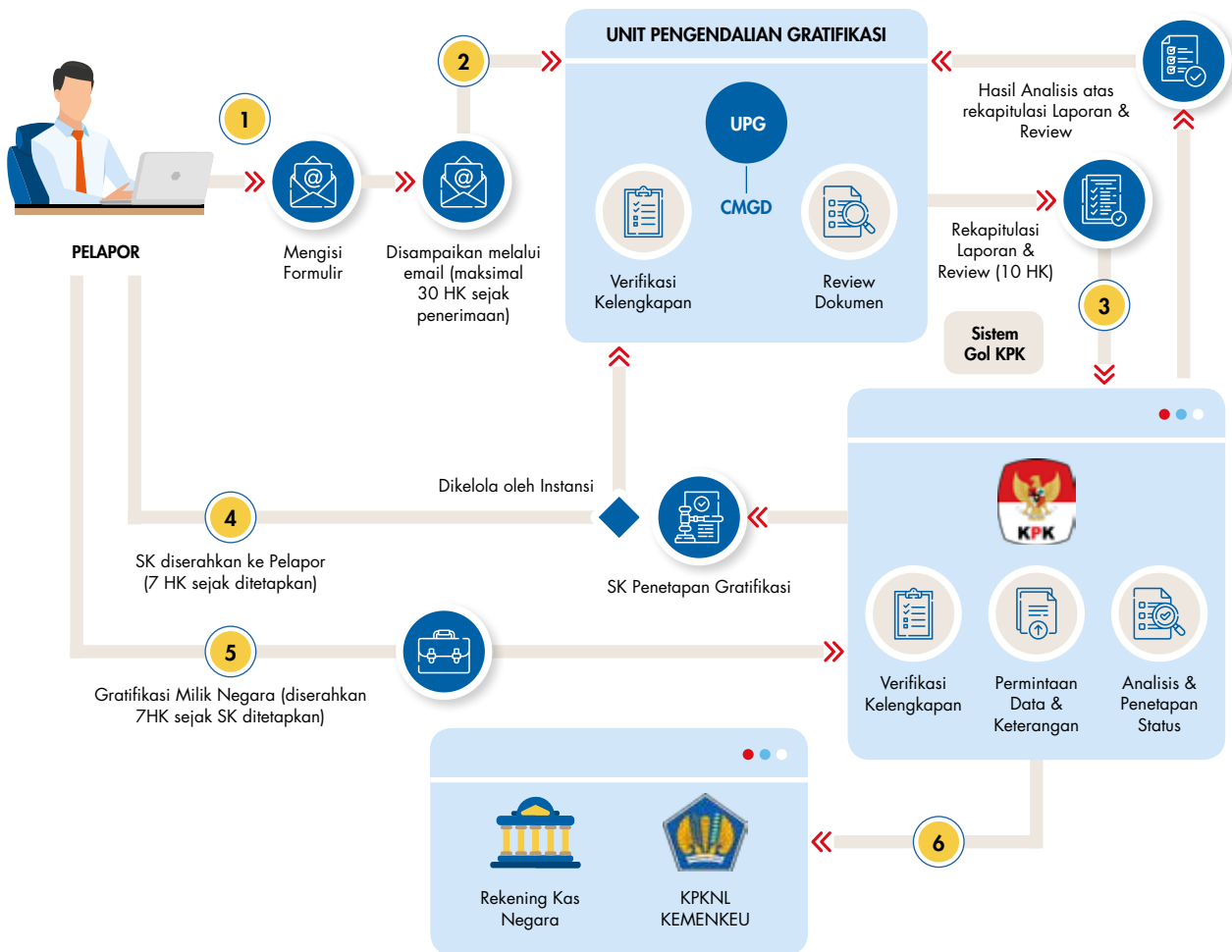
Sejak tahun 2019, Perseroan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi;
2. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi;
3. *Self Assessment* atas Daftar Periksa Panduan Pencegahan Korupsi Yang Memadai Bagi Korporasi (CEK).

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Perseroan telah menetapkan mekanisme pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, dengan alur sebagai berikut:

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi



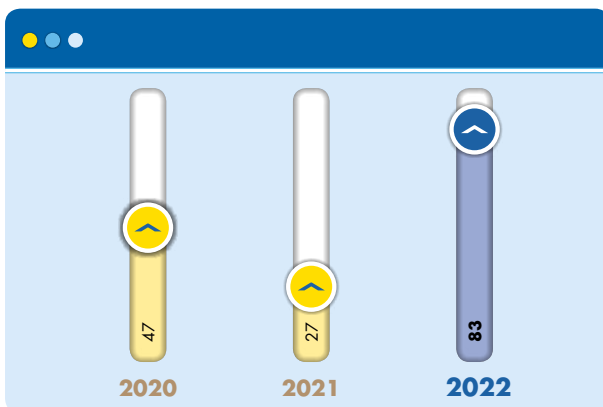
Keterangan Gambar Mekanisme Pelaporan Gratifikasi:

- Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG (dhi. CMGD) dengan mengisi formulir secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor agar disimpan oleh Pelapor sampai dengan adanya Surat Keputusan KPK atas status kepemilikan gratifikasi dimaksud.
- Penyampaian formulir disampaikan melalui email UPG dengan alamat: **upg.btm@btm.co.id**. Formulir yang digunakan pada Surat Edaran ini disesuaikan dengan jenis gratifikasi yang diterima, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Menggunakan formulir 1, jika gratifikasi berupa uang dan termasuk gratifikasi suap;
 - Menggunakan formulir 2, jika gratifikasi diperoleh dari kegiatan kedinasan;
 - Menggunakan formulir 3, jika gratifikasi berupa makanan/minuman/parcel dalam rangka penyambutan hari raya. Namun jika gratifikasi yang diperoleh dalam rangka hari raya berupa uang/*voucher*/barang maka tetap menggunakan formulir 1. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data pada formulir yaitu pencantuman unit kerja, jabatan, uraian kronologi/peristiwa pemberian gratifikasi dimaksud serta kontak Nomor telepon dan alamat email mengingat adanya proses klarifikasi laporan oleh UPG maupun KPK.
- UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG. Selanjutnya KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi:
 - Verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi;
 - Permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
 - Analisis atas penerimaan gratifikasi; dan
 - Penetapan status kepemilikan gratifikasi. Proses yang dilakukan KPK untuk menetapkan status penerimaan laporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap.

4. KPK menyampaikan Surat Keputusan atas status penerimaan gratifikasi kepada penerima/pelapor gratifikasi serta tembusan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Dalam hal status kepemilikan gratifikasi ditetapkan untuk dikelola oleh instansi maka gratifikasi tersebut diserahkan kepada UPG untuk dikelola Perseroan.
 5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Pelapor/Penerima menyerahkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Bukti penyerahan kepada KPK tersebut disampaikan kepada UPG.
 6. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh pelapor kepada rekening Kas Negara dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.
 7. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh pelapor kepada rekening Kas Negara dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.
1. Melakukan diseminasi melalui berbagai media sosialisasi tentang pesan anti gratifikasi kepada seluruh pegawai maupun *stakeholder* Perseroan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Internalisasi dan eksternalisasi pesan Hakordia 2022 melalui berbagai media sosial Perseroan;
 - b. Penayangan peringatan Hakordia 2022 dan video tentang penolakan gratifikasi melalui video di lift;
 - c. Penayangan peringatan Hakordia 2022 pada beberapa LED Perseroan di beberapa ruas jalan;
 - d. Penggunaan *Virtual Background* peringatan Hakordia 2022 pada tanggal 9 Desember 2022 pada rapat video conference pegawai Perseroan;
 - e. Pemasangan umbul-umbul infografis tema Hakordia 2022 di lobby Menara Bank BTN;
 - f. Diseminasi pesan peringatan Hakordia 2022 dan antikorupsi kepada seluruh pegawai melalui Whatsapp Blast dan *Email Blast*;
 - g. Penyelenggaraan Acara Pemberian Penghargaan Oleh Direktur Human Capital, Compliance, and Legal Perseroan Atas Pelaporan Gratifikasi dan Penyerahan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022;
 - h. Internalisasi dan eksternalisasi pesan tentang penolakan gratifikasi menjelang hari raya Idul Fitri/Natal/dan Tahun Baru melalui media sosial Perseroan;
 - i. Penayangan Video sosialisasi tentang penolakan gratifikasi suap dan laporan gratifikasi kepada UPG melalui video di lift dan aplikasi smartshare BTN;
 - j. Diseminasi pesan tentang penolakan gratifikasi melalui aplikasi B-Gate seluruh pegawai;
 - k. Imbauan larangan pemberian gratifikasi kepada pegawai Perseroan yang ditayangkan pada media massa terkemuka pada tanggal 22 April 2022 (Media Indonesia);
 - l. Pemasangan Banner dan Poster Lapor Gratifikasi melalui UPG;
 - m. Internalisasi Kebijakan Anti Penyuapan Bank BTN pada media aplikasi berbasis *mobile* yang digunakan untuk presensi kehadiran pegawai maupun aktivitas *approval* kepegawaian (B-GATE) yang dapat diakses oleh seluruh Pegawai;
 - n. Internalisasi melalui *running text* LED *Banking Hall* Kantor Cabang;
 - o. Internalisasi kepada *Stakeholder* Perseroan (internal maupun eksternal) tentang Pengendalian Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan WBS melalui website Perseroan;
 - p. Internalisasi terkait larangan gratifikasi ilegal dan anti penyuapan melalui media *Digital Room for e-Learning Modules* (DREAM) pada bulan April dan September 2022 yang diikuti oleh seluruh pegawai;
 - q. Penyampaian Imbauan Larangan Penerimaan Gratifikasi menjelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Selama periode tahun 2022, total laporan gratifikasi yang masuk dari kantor pusat maupun kantor cabang **sebanyak 83 laporan**, yang terdiri dari laporan gratifikasi suap, kedinasan, gratifikasi berupa makanan menjelang hari raya keagamaan maupun Penolakan Gratifikasi.



Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi kepada Karyawan

Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah melakukan kegiatan dalam mendorong efektivitas implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, antara lain:

2. Penandatanganan Pakta Integritas Perseroan memiliki program penandatanganan Pakta Integritas yang sejalan dengan komitmen atas pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pakta Integritas tersebut merupakan pernyataan seluruh jajaran Perseroan untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Perseroan dengan cara tidak meminta atau menerima suap maupun gratifikasi dari pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas tersebut senantiasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mendukung program SMAP maupun pengendalian gratifikasi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai diunggah melalui media *Digital Room For E-Learning Modules* (DREAM).
3. *E-learning* tentang Pengendalian Gratifikasi
Internalisasi kepada seluruh Pegawai tentang materi Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan salah satunya melalui program *Compliance Excellence* menggunakan media *Digital Room For E-Learning Modules* (DREAM) serta melakukan evaluasi terkait materi dimaksud berupa penyelenggaraan *quiz* dan *feedback* atas materi yang diberikan.
4. Laporan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) kepada KPK
Berdasarkan surat KPK perihal Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi tahun 2022, maka setiap Semester Perseroan wajib menyampaikan laporan Rencana Kerja kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK. Perseroan telah menyampaikan laporan Rencana Kerja PPG Semester I sampai dengan II kepada KPK dengan rincian yang terdiri sbb:
 - a. Laporan Diseminasi media sosialisasi pesan anti gratifikasi;
 - b. Laporan *e-learning* Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi;
 - c. Laporan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG;
 - d. Bimbingan teknis terkait implementasi PPG;
 - e. Laporan penerimaan dan/atau;
 - f. Penolakan gratifikasi yang dikelola oleh UPG;
 - g. Laporan Inovasi pengendalian gratifikasi.
5. Penyampaian apresiasi kepada pelapor gratifikasi terpilih pada perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 sesuai Surat Edaran KPK perihal peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 yang diperingati pada tanggal 9 Desember 2022, KPK menghimbau agar seluruh Kementerian/Lembaga menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hakordia 2022 dengan mengusung tema "Pulih Bersatu Berantas Korupsi".

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan apresiasi kepada Pegawai yang melaporkan gratifikasi dan berkomitmen terhadap pencegahan korupsi di lingkungan

Perseroan sehingga diharapkan apa yang telah dilakukan oleh Pelapor Gratifikasi menjadi inspirasi bagi Pegawai lainnya untuk memiliki komitmen yang sama dalam pencegahan korupsi salah satunya melalui penolakan dan pelaporan Gratifikasi.

Apresiasi diberikan kepada pelapor gratifikasi pada tahun 2022 dengan 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak.
- b. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak.

Selain penghargaan diberikan ke pelapor gratifikasi, apresiasi diberikan kepada perwakilan penerima sertifikat Ahli Pembangun Integritas (API) Tahun 2022.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan secara konsisten berupaya menjaga kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN. Dasar ketentuan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Perseroan adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

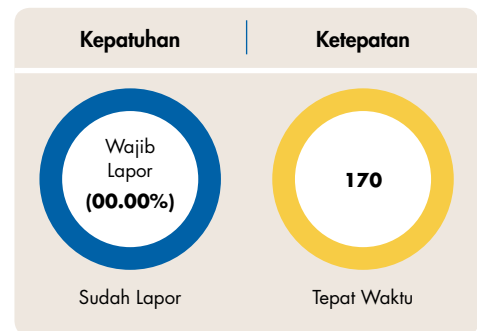
Kebijakan Pengelolaan LHKPN Perseroan

Perseroan berkomitmen terhadap pelaksanaan kewajiban LHKPN dengan diterbitkannya Surat Edaran Direksi No. 29/DIR/HCD/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Pelaksanaan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berdasarkan surat edaran Direksi tersebut, Pejabat di lingkungan Perseroan yang wajib melaporkan LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris.
2. Kepala Divisi/Desk (atau yang setingkat), Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Cabang dan Kepala Cabang Syariah.

Jumlah Pelaporan LHKPN

No	Tahun	Jenis Laporan	Jumlah Wajib Laport	Jumlah Pelaporan	%Kepatuhan
1	2020	Periodik Tahun 2019	158	157	99.37%
2	2021	Periodik Tahun 2020	162	162	100.00%
3	2022	Periodik Tahun 2021	170	170	100.00%



- **Seluruh pejabat BUMN wajib melaporkan LHKPN Tahun Periodik 2021 secara online dimulai sejak tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022**, dimana terdapat Pejabat BUMN yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi Administratif.
- **Bank BTN Tahun 2022 memiliki tingkat kepatuhan unit kerja sebesar 100% (seratus persen)**, hal tersebut sesuai dengan pencapaian Tahun lalu (2021), dimana **tingkat kepatuhan dapat dipertahankan**.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah fraud yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2021)	Tahun Berjalan (2022)	Tahun Sebelumnya (2021)	Tahun Berjalan (2022)	Tahun Sebelumnya (2021)	Tahun Berjalan (2022)
Total Fraud	0	0	17	18	0	1
Telah Diselesaikan	0	0	14	10	0	1
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	0	0	3	7	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	2	1	0	0

Keterangan:

1. Jumlah kasus pada tahun berjalan adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus dan Laporan Hasil Telaah Awal periode Januari - Desember 2022.
2. Jumlah kasus yang "**Telah diselesaikan**" adalah kasus yang telah mendapatkan putusan sanksi dari Direksi - Desember 2022.
3. Jumlah kasus yang "**Dalam proses penyelesaian di internal bank**" adalah kasus yang belum mendapatkan putusan sanksi dari Direksi sampai dengan Desember 2022.
4. Jumlah kasus yang "**Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum**" adalah kasus yang "**telah diselesaikan**" dan mendapatkan putusan sanksi pidana. Proses hukum ditindaklanjuti oleh LGD.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian Dana Kegiatan Sosial menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan. Oleh karena itu, informasi terkait Pemberian Dana Kegiatan Sosial diuraikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2022 Perseroan tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Code of Conduct Perseroan.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Perseroan melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan tidak pernah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2022. Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan BMPK dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Penerapan penyediaan dana oleh Perseroan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan

yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK.

No	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (juta rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	34	9,073
2	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	0	0
	b. Group	20	26.107.705

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2022, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

Rencana Strategis Bank

Informasi terkait Rencana Strategis Bank telah disajikan pada Sub Bab Strategi Bank pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Penjelasan terkait Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan telah tersaji pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2022 tidak ada perselisihan internal antar pegawai yang terjadi.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Sebagai bagian dari pengelolaan potensi benturan kepentingan, Perseroan telah menetapkan kebijakan terkait tindakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) yang diatur dalam Peraturan

Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations serta Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi maupun Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa Orang Dalam Perseroan dilarang melakukan kegiatan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) melalui kegiatan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan atau Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan. Orang Dalam dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komisaris, Direktur, atau Pegawai Perseroan;
2. Pemegang saham utama Perseroan;
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di atas.

Larangan bagi Orang Dalam Perseroan yang mempunyai informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan didasarkan atas pertimbangan adanya Prinsip Keterbukaan pada Pasar Modal yang berakibat harus terciptanya kesetaraan informasi bagi setiap pihak di dalam mengambil keputusan investasinya. Orang Dalam dilarang memperdagangkan Efek Perseroan bila mengetahui Informasi material yang dimiliki oleh Orang Dalam yang belum tersedia untuk umum (dhi. Informasi Orang Dalam) atau Fakta Material. Orang Dalam yang sebelumnya mengetahui Fakta Material dapat melakukan perdagangan Efek setelah Fakta Material tersebut dipublikasikan.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Uraian terkait Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah tersaji pada Sub Bab Transparan Penyampaian Laporan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

LAPORAN TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH

Perseroan melaksanakan Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan untuk memperoleh pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG dan sesuai dengan Prinsip Syariah serta ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan yang dimaksud antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Kebijakan mengenai pengelolaan UUS Perseroan merujuk pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 52/SK/DIR/TPMD/2021 Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
6. Kebijakan Umum No.8 tentang Manajemen Risiko.
7. Anggaran Dasar Perseroan.

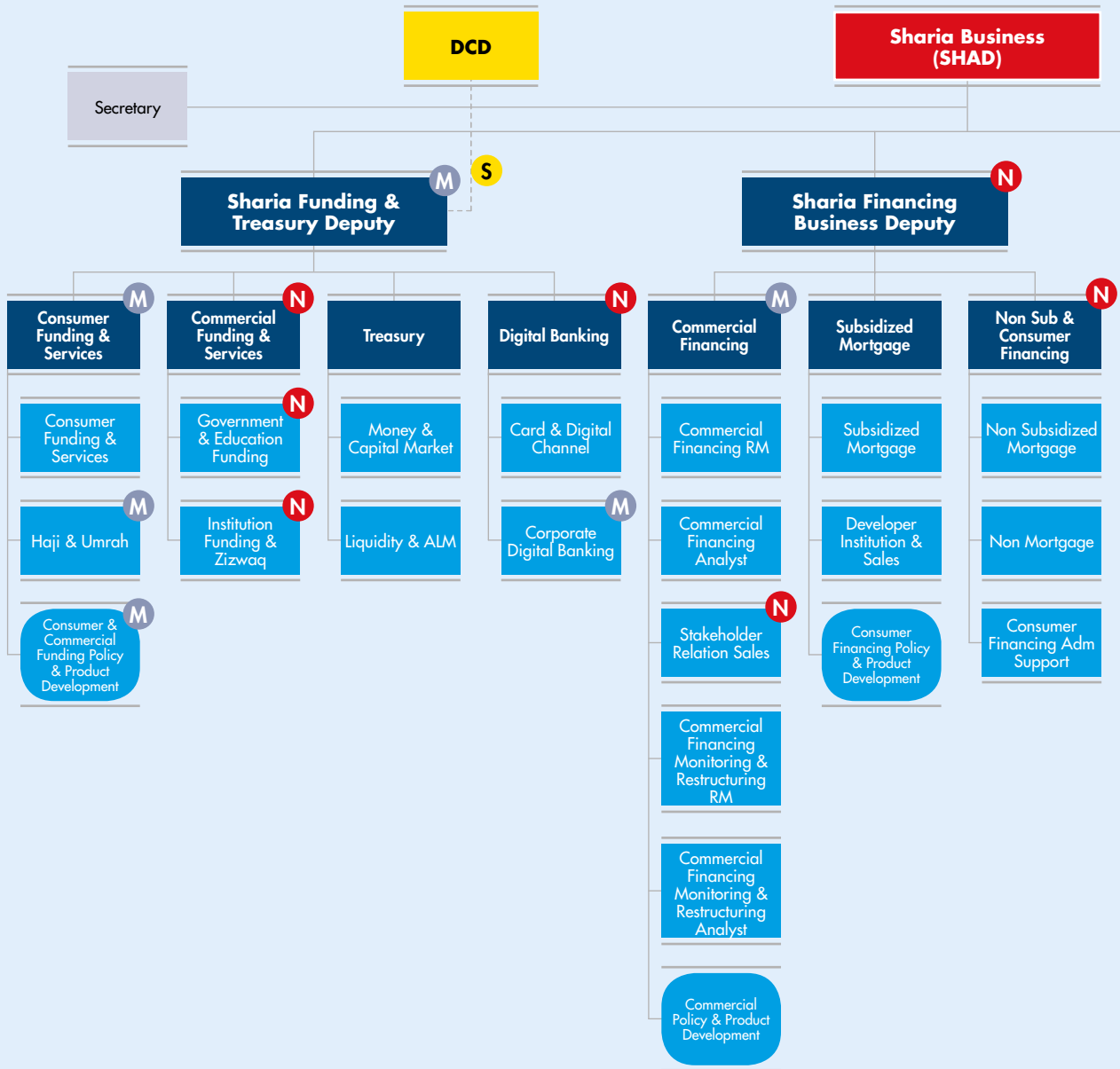
5 (Lima) Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola UUS Perseroan

Perseroan senantiasa konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan Pengelolaan UUS melalui peningkatan layanan kepada para nasabah dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan tetap mengacu kepada Prinsip Syariah yang berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:

1. **Transparansi:** yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas:** yaitu kejelasan dan kebenaran penyajian informasi mengenai pengelolaan Perseroan yang berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan.
3. **Pertanggungjawaban:** yaitu pengelolaan Perseroan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan UUS yang sehat.
4. **Profesionalisme:** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha syariah.
5. **Kewajaran:** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Unit Usaha Syariah Perseroan

Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dikelola oleh Direksi UUS, Kepada Divisi UUS dan Deputi UUS yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana Struktur pengelola UUS disajikan dalam gambar berikut:



Visi dan Misi Unit Usaha Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya, UUS Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

“Menjadi Bank Syariah yang Terdepan Dalam Pembiayaan Perumahan dan Industri Kaitannya”.

Misi

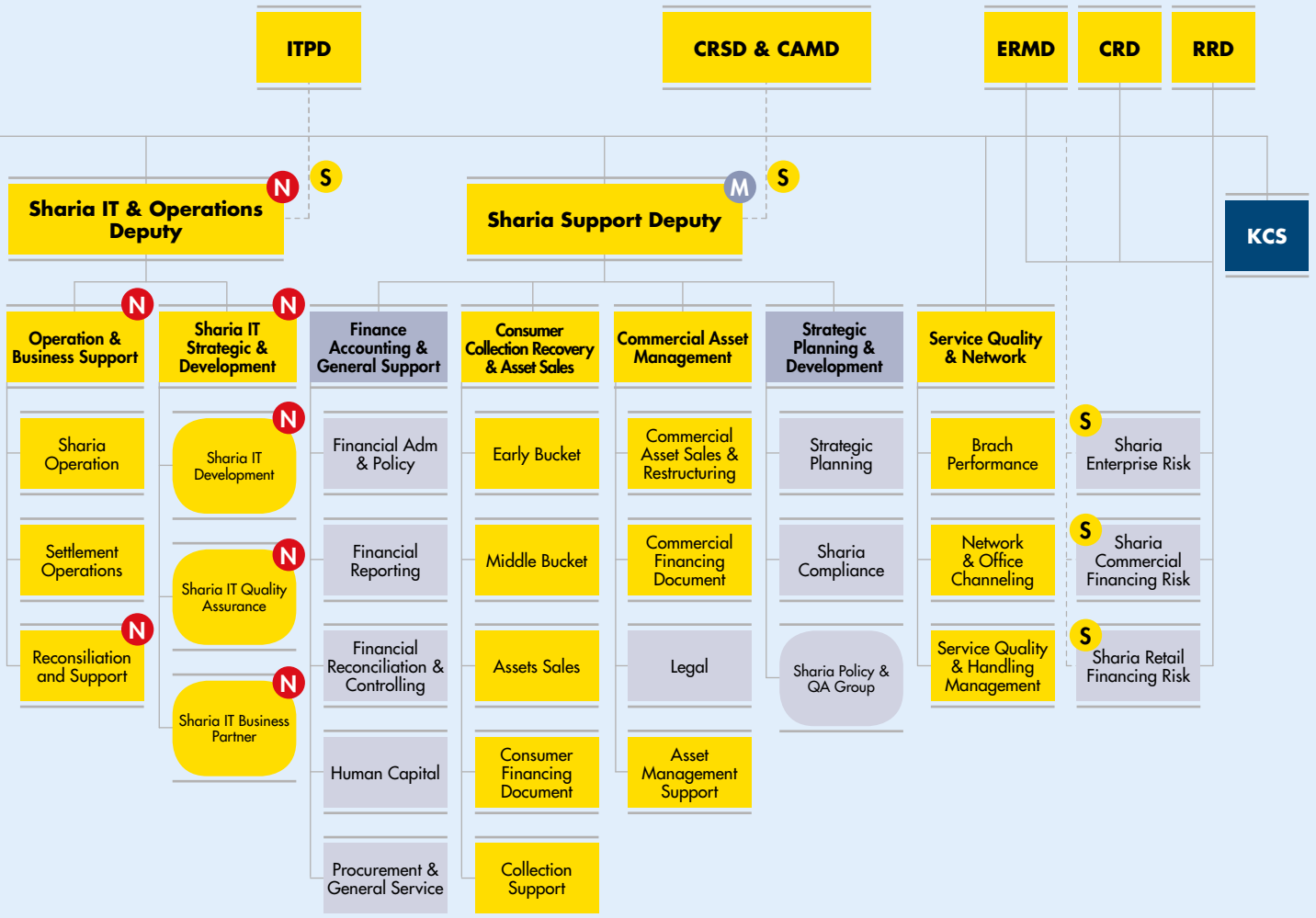
Dalam mencapai visi Bank tersebut di atas, Bank akan mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya dengan sumber pendanaan murah.

2. Mengembangkan human capital yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance* dan *Compliance*.
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi terkini.
4. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk menjaga agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka dalam menjalankan aktivitasnya Perseroan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip Syariah (Pasal 1 angka 12 PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah).



Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan diangkatnya seseorang menjadi anggota DPS harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan dengan penuh profesionalisme piagam Dewan Pengawas Syariah, ketentuan perbankan syariah serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh.
 - e. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
- f. Tidak pernah melakukan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan bidang usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (yang dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi).
2. Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah telah memperoleh persetujuan/surat rekomendasi dari DSN-MUI dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Dalam rangka meningkatkan kompetensinya, anggota DPS harus bersedia secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan termasuk mengikuti program orientasi (*induction program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

3. Reputasi, paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) dan daftar kredit macet OJK.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - e. Tidak pernah menjadi Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - 2) Pertanggungjawabannya pernah tidak terima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.

Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Penetapan anggota DPS Perseroan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota DPS, maka dalam rekomendasi wajib diungkapkan.
3. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris melalui Direksi mengusulkan calon DPS kepada DSN-MUI.
4. DSN-MUI memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi atas usulan penetapan calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi.
5. Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.
6. OJK memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas calon anggota DPS yang diusulkan.
7. RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi DSN-MUI dan persetujuan OJK.
8. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, pengangkatan anggota DPS tersebut wajib dilaporkan oleh Bank ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengangkatan.
9. Calon anggota DPS yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dan tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota DPS.

10. Dalam hal anggota DPS tidak diangkat oleh RUPS maka persetujuan OJK terhadap calon anggota DPS dimaksud menjadi tidak berlaku.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan DPS Perseroan telah berdasarkan pada persyaratan DPS sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 yaitu Anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi dalam bidang keuangan.

Komposisi keanggotaan DPS yang telah diatur dalam Piagam Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
3. Anggota DPS diangkat oleh RUPS Bank.

Perubahan dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Selama Tahun 2022

Informasi terkait Perubahan dan Komposisi DPS dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Informasi terkait pendidikan, pengalaman kerja, periode penugasan DPS, jabatan rangkap dan hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan anggota DPS adalah terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota DPS yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS telah memiliki Piagam Dewan Pengawas Syariah yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. 01/DPS-BTN/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022. Piagam Dewan Pengawas Syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktek-praktek terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Piagam Dewan Pengawas Syariah dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas bagi DPS dengan lebih terarah dan efektif. Adapun isi Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Bagian I	Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Dewan Pengawas Syariah
Bagian II	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
Bagian III	Keanggotaan, Komposisi Keanggotaan DPS
Bagian IV	Remunerasi dan Fasilitas, Rapat, Risalah
Bagian V	Unit Kerja Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS
Bagian VI	Lain-lain

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk terkait syariah yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/ atau pembiayaan yang direstrukturisasi yang terkait syariah dengan mengacu antara lain pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dan kegiatan usaha UUS.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank terkait syariah yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG).
8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk baru Bank terkait syariah:
 - a. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah yang akan dikeluarkan.
 - b. Memastikan ketersediaan akad yang digunakan dalam produk baru terkait syariah dalam fatwa DSN-MUI:
 - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi
9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS.
 - a. Menganalisa laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Bank.
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan internal, antara lain:
 - Ketersediaan dokumen bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah.
 - Ketersediaan dokumen laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
 - d. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai UUS dan/ atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
 - e. Melakukan review terhadap kebijakan internal terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.
 - g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK menggunakan format yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
 - h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
10. Manajemen Risiko Bank:
 - a. Melakukan evaluasi (review) atas kebijakan manajemen risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang secara triwulanan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain dengan memprioritaskan pada perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Bank. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS di wilayah Indonesia.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua DPS	Ketua DPS	CIMB Niaga
Dr. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota DPS	Anggota DPS	Bank Syariah Indonesia (BSI)
		Ketua DPS	Asuransi BRIngin Life Syariah
		Ketua DPS	AJ Manulife Syariah
Mohammad Bagus Teguh Perwira, LC. MA	Anggota DPS	Anggota DPS	OCBC NISP
		Anggota DPS	Maybank Indonesia
		Ketua DPS	Manulife Aset Manajemen Indonesia

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

Anggota DPS harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota DPS apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris, DPS dan Direksi
2. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
3. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Laporan Pelaksanaan Kegiatan DPS

1. Pelaksanaan Rapat

Rapat DPS adalah forum musyawarah antara DPS untuk membahas setiap kebijakan dan keputusan strategis maupun operasional dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Manajemen Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bidang syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam rangka pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan DSN-MUI apabila diperlukan.

Rapat DPS wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam situasi dan kebutuhan tertentu, DPS dapat menyelenggarakan rapat lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Undangan rapat harus secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota DPS dengan tanda terima atau surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat DPS diadakan. Apabila terdapat kepentingan yang mendesak, undangan dapat dilakukan 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat DPS diadakan. Rapat DPS harus dilakukan di wilayah Indonesia namun dalam hal dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, maka keputusan rapat dianggap sah hanya apabila dihadiri oleh seluruh anggota DPS.

Dalam rapat DPS seorang anggota DPS tidak dapat mewakili anggota DPS lainnya yang berhalangan hadir. Rapat DPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang anggota DPS.

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota DPS.

Rapat dipimpin oleh ketua DPS atau dalam hal ketua DPS berhalangan, salah satu anggota DPS ditunjuk sebagai ketua rapat. Rapat dapat diselenggarakan melalui teknologi telekonferensi (saling mendengar dan melihat antara peserta rapat) atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat DPS. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Sepanjang Tahun 2022, DPS telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat DPS termasuk di dalamnya adalah rapat gabungan dengan Direktur Kepatuhan pada Oktober 2022. Di dalam rapat DPS agenda pembahasan antara lain DPS membahas *overview* kinerja UUS Perseroan, permohonan opini syariah dan pembahasan terkait penerapan syariah di KCS dan KP.

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1	18 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja UUS BTN Bulan Desember 2021 <i>Online On Boarding for Open Account</i> UUS Bank BTN. 	DPS dan Manajemen UUS BTN	DPS hadir semua	-
2	18 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja UUS BTN Bulan Januari 2022. Skema BP Tapera & Draft PKS Penyaluran Pembiaya Permohonan Opini Syariah tentang Skema Bisnis BP Tapera & Draft PKS Penyaluran Pembiayaan Perumahan Peserta Tapera serta Rujukan Peraturan Internal LTS Syariah menggunakan Peraturan BTN Konvensional. 	DPS dan Manajemen UUS BTN	DPS hadir semua	-
3	23 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja UUS BTN Bulan Februari 2022 Penutupan Rekening Giro dan Tabungan oleh Bank. Pelaksanaan Deposito PPO BTN iB. Penggunaan Dana Kebajikan untuk Penanganan Nasabah Pembiayaan KPR yang Terkena Dampak Longsor. 	DPS dan Manajemen UUS BTN	DPS hadir semua	-
4	28 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja UUS BTN Bulan Maret 2022 Akad Qard untuk Pembiayaan PUMP BPJS TK. 	DPS dan Manajemen UUS BTN	DPS hadir semua	-

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
5	30 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja UUS BTN Bulan April 2022. Biaya Notaris dan Biaya Pengikatan Agunan dalam Bentuk Prosentasi. Penjualan SBSN melalui Rekening Bank BTN Konvensional. Pemberian Bonus pada Produk Berakad Mudharabah. Opini Draft Legal Qanun Aceh. 	DPS dan Manajemen UUS BTN	DPS hadir semua	-
6	27 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja UUS BTN Bulan Mei 2022. Mekanisme dan Prosedur Pembiayaan Komersial dengan Skema Akad IMBT 	DPS dan Manajemen UUS BTN	DPS hadir semua	-
7	22 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja UUS BTN Bulan Juni 2022 Mekanisme Penyaluran Dana Kebajikan Melalui UPZ Bazis Bank BTN. Temuan OJK 2022 Pembiayaan Komersial. Pengalihan atau Penjualan Portofolio Pembiayaan Berakad Murabahah Dari Unit Usaha Syariah (UUS) (Satu Entity) Ke Bank Umum Syariah (BUS) Lain (Entity Lainnya). Parameter Penetapan Objek Uji Petik. Rencana Kerja DPS Tahun 2022 dan Piagam DPS 	DPS dan Manajemen UUS BTN	DPS hadir semua	-
8	18 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Standardisasi Surat Permohonan Penggunaan <i>Metode Income Smoothing</i>. Review Atas Terminologi Ta'widh Terhadap SK dan SE Direksi. Kesepakatan Pencairan Pembiayaan Konstruksi BTN iB. Rencana Pelatihan/<i>refreshment</i>/workshop terkait tindak lanjut Rekomendasi DPS. Diskusi Terkait <i>Spin Off</i>. 	DPS dan Manajemen UUS BTN	DPS hadir semua	-
9	26 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian Diskon/Hadiah Dalam Bentuk Voucher dan/atau E-Wallet Pemberitahuan Penyesuaian Nisbah Kepada Nasabah. Pembahasan Kinerja UUS BTN Bulan Agustus 2022 	DPS dan Manajemen UUS BTN	2 DPS hadir	An. Mohamad Hidayat melaksanakan ibadah umroh
10	11 Oktober 2022	Rapat Koordinasi Direktur Kepatuhan dengan DPS	DPS, Manajemen UUS, Direktur Kepatuhan dan Direktur Bidang Syariah	DPS hadir semua	-
11	24 Oktober 2022	Workshop Legal Drafting Pembiayaan akad syariah	DPS, UUS BTN, Legal Division (LGD), Enterprise risk Management Division (ERMD) dan Compliance & Governance Division (CMGD)	DPS hadir semua	-
12	10 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan <i>Supply Chain Financing</i> (SCF) BTN iB. Pelaksanaan Distribusi Bagi Hasil Sukuk. Tindak Lanjut Temuan Audit OJK Klausal Pembiayaan. Pembahasan Kinerja UUS BTN Bulan Oktober 2022. Evaluasi manajemen risiko UUS BTN. 	DPS, Manajemen UUS BTN dan Enterprise Risk Management Division (ERMD)	DPS hadir semua	-
13	05 Desember 2022	Pembahasan Legal <i>Drafting</i> Akad Pembiayaan <i>Supply Chain Financing</i> (SCF) BTN iB.	DPS dan Manajemen UUS BTN	DPS hadir semua	-

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Selama tahun 2022, DPS telah melaksanakan rapat internal sebanyak 13 (tiga belas) kali termasuk di dalamnya adalah rapat gabungan bersama Direktur Kepatuhan sebanyak 1 (satu) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing anggota DPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah			Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof.Dr.H.Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	12	12	100%	1	1	100%
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	12	11	92%*	1	1	100%
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota	12	12	100%	1	1	100%

2. Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik
- Sepanjang tahun 2022, DPS telah mengeluarkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Opini Dewan Pengawas Syariah. Opini DPS ini dikeluarkan sebagai respon atas perkembangan bisnis UUS Bank BTN agar tetap berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah.

No	Tanggal	Opini
1	18-01-2022	Online On Boarding for Open Account UUS Bank BTN
2	18-02-2022	Skema Bisnis BP Tapera & Draft PKS Penyaluran Pembiayaan Perumahan Peserta Tapera serta Rujukan Peraturan Internal LTS Syariah menggunakan Peraturan BTN Konvensional.
3	23-03-2022	Pentupan Rekening Giro dan Tabungan Oleh Bank
4	23-03-2022	Penggunaan Dana Kebajikan untuk Penanganan Nasabah Pembiayaan KPR yang terkena Dampak Longsor.
5	23-03-2022	Deposito Program Pengembangan Operasional (PPO) BTN iB.
6	28-04-2022	Akad Qardh untuk Pembiayaan PUMP BPJS TK
7	30-05-2022	Biaya Notaris dan Biaya Pengikatan Agunan Dalam Bentuk Prosentase
8	30-05-2022	Penjualan SBSN melalui Rekening Bank BTN Konvensional
9	30-05-2022	Pemberian Bonus pada Produk Berakad Mudharabah
10	30-05-2022	Draft Legal Qanun Aceh, Biaya-biaya yang Timbul dari Konversi dan Asuransi Konvensional
11	27-06-2022	Mekanisme dan Prosedur Pembiayaan Komersial dengan Skema Akad IMBT
12	22-07-2022	Mekanisme Penyaluran Dana Kebajikan Melalui UPZ Bazis Bank BTN
13	22-07-2022	Temuan OJK 2022 Pembiayaan Komersial
14	22-07-2022	Pengalihan atau Penjualan Portofolio Pembiayaan Berakad Murabahah dari UUS (satu Entity) ke BUS lain (Entity lainnya)
15	16-08-2022	Standardisasi Surat Permohonan Penggunaan Metode Income Smoothing
16	16-08-2022	Review atas Terminologi Ta'widh, Tunggakan Bagi Hasil
17	16-08-2022	Kesepakatan Pencairan Pembiayaan Konstruksi BTN iB

No	Tanggal	Opini
18	16-08-2022	Pandangan DPS Terkait dengan Spin Off
19	19-09-2022	Tanggapan atas Pedoman Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan
20	26-09-2022	Pemberian Diskon/Hadiah dalam Bentuk Voucher dan/atau E-Wallet
21	26-09-2022	Pemberitahuan Penyesuaian Nisbah kepada Nasabah Dana Pihak Ketiga
22	31-10-2022	Draft Kebijakan Dana Kebajikan
23	10-11-2022	Pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) BTN iB
24	10-11-2022	Pelaksanaan Distribusi Bagi Hasil Sukuk
25	10-11-2022	Temuan OJK 2022 Pembiayaan Komersial
26	21-11-2022	Tanggapan atas Kebijakan Umum Tentang Pengelolaan Perusahaan Anak dan Unit Usaha Syariah
27	16-12-2022	Penerbitan Sukuk untuk Pendanaan KPR Tapera
28	23-12-2022	Pembiayaan BTN iB dengan Akad IMBT

3. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi DPS
- Pada periode tahun 2022, DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Semesteran dengan tepat waktu kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:
- Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2021 UUS Perseroan disampaikan melalui surat No. 76/DIR/SHAD/II/2022 tanggal 2 Februari 2022;
 - Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2022 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 481/DIR/SHAD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Di samping itu, selama tahun 2022, DPS juga telah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur yang Membidangi UUS dan Direktur Kepatuhan melalui rapat koordinasi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	11 Oktober 2022	Rapat Koordinasi Direktur Kepatuhan dengan DPS	DPS, Manajemen UUS, Direktur Kepatuhan dan Direktur Bidang Syariah

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada tahap pertama, anggota DPS melakukan penilaian kinerjanya dengan metode *self assessment* terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan dengan melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun 2022 yang terdiri dari Aspek Pemberian Pertimbangan/Pengarahan Syariah, Aspek Pengawasan Syariah dan Aspek Pelaporan DPS.

Pihak yang Melakukan Assessment

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2022 secara mandiri (*self assessment*) yang dilaksanakan di dalam forum rapat internal DPS. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi ketercapaian atas indikator-indikator kinerja DPS selama tahun 2022. Dalam proses evaluasi, DPS berkoordinasi dengan unit kesekretariatan DPS dalam hal tata administrasi, dokumentasi dan data sehingga proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara akurat.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2022, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di dalam Aspek Pemberian Pertimbangan/Pengarahan Syariah, DPS telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat internal termasuk di dalamnya adalah rapat gabungan dengan Direktur Kepatuhan sebanyak 1 (satu) kali serta telah mengeluarkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) opini DPS. Untuk Aspek Pengawasan DPS juga telah melakukan kegiatan Uji petik Syariah terhadap jalannya kegiatan operasional KCS dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas operasional dan bisnis UUS Bank BTN. Adapun jumlah pelaksanaan kegiatan uji petik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dari sebanyak 6 (enam) KCS menjadi 10 KCS. Peningkatan tersebut seiring dengan semakin baiknya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2022. Adapun dalam hal Aspek Pelaporan DPS, di tahun 2022 ini DPS telah melakukan pelaporan atas Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 secara tepat waktu. Kinerja tersebut telah memenuhi persyaratan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah.

Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi DPS

Piagam DPS mengatur ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota DPS ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS melimpahkan kewenangan penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut kepada Dewan Komisaris maka penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Remunerasi DPS Tahun 2022

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Ketua DPS		Anggota DPS	
	Orang	Juta Rp.	Orang	Juta Rp.
Remunerasi				
Honorarium/Gaji	1	420	2	756
Tunjangan rutin (Tj. PPh21)	1	152	2	280
Tunjangan Hari Raya	1	35	2	63
Bonus Kinerja	1	133	2	220
Total Remunerasi (a)		740		1,319
Fasilitas lainnya				
Asuransi Purna Jabatan	1	105	2	189
Tunjangan Transportasi	1	18	2	32
Total Fasilitas Lainnya (b)		123		221
Total Diterima (a) + (b)		863		1,540

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Jabatan anggota DPS berakhir apabila:

1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Adapun mekanisme pengunduran diri DPS adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud pengunduran diri tersebut kepada Direksi Bank sebelum pengunduran dirinya tersebut efektif.
2. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota DPS tersebut dan mengajukan calon pengganti anggota DPS sebagai ketentuan.
3. Jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota DPS menjadi kurang dari jumlah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank wajib mengangkat anggota DPS yang baru sesuai dengan tata cara dan prosedur pengangkatan anggota DPS yang berlaku.
4. Anggota DPS yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pengunduran diri tersebut, efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
5. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberhentian dan/ atau pengunduran diri tersebut efektif.

Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan

UUS Perseroan dipimpin oleh Direktur Perbankan Syariah yang bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan pengelolaan usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pengangkatan Direktur UUS Perseroan telah berdasarkan pada integritas, kompetensi, reputasi keuangan yang memadai, pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Saat ini Direktur UUS Perseroan dijabat oleh Sdr. Hirwandi Gafar berdasarkan melalui rapat Direksi tanggal 3 Desember 2019 dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat nomor SR-6/PB.1/2021 tanggal 2 Maret 2021 melalui Penegasan atas Penunjukan Direktur UUS PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Profil ringkas beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS

Fokus pada pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan GCG.

Kepala Divisi Syariah

Direktur UUS dibantu oleh Kepala Divisi Syariah dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Perseroan. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Bank Perseroan bahwa tugas dan wewenang Kepala Divisi Syariah di antaranya yaitu:

1. Menetapkan usulan rencana kerja dan anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan proses perencanaan strategi untuk Unit Usaha Syariah Perseroan.
3. Memastikan penyusunan kebijakan terkait dengan Unit Usaha Syariah Perseroan.
4. Memastikan fungsi kesekretariatan dari Dewan Pengawas Syariah.
5. Memastikan berjalannya kegiatan operasional dan kinerja Unit Usaha Syariah.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko yang berada dalam kelolaannya.
7. Menerapkan pelaksanaan GCG di unit kerjanya

Laporan Pelaksanaan Kegiatan UUS Perseroan

1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal

UUS Bank BTN telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang berisi kondisi keuangan UUS Bank BTN di tahun 2022 melalui *homepage* (www.btn.co.id) dan beberapa surat kabar, antara lain:

Laporan Keuangan Publikasi	Surat Kabar
Triwulanan IV tahun 2021	Investor Daily, Bisnis Indonesia, Kontan
Triwulanan I tahun 2022	Bisnis Indonesia, Investor Daily
Triwulanan II tahun 2022	Bisnis Indonesia, Investor Daily
Triwulanan III tahun 2022	Kompas, Kontan

2. Daftar Konsultan dan Penasehat UUS

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara UUS Bank BTN dengan konsultan jasa terkait dengan aktivitas dan kegiatan operasional pada UUS Bank BTN, sepanjang tahun 2022 pada UUS Bank BTN melakukan kerjasama dengan (1) konsultan KarimSyah Law Firm untuk jasa konsultasi penyusunan produk *Supply Chain Financing* dan pembiayaan BTN iB dengan mekanisme IMBT, serta (2) konsultan MarkPlus Indonesia untuk jasa kajian preferensi masyarakat terhadap Tabungan BTN Emas iB dan penyusunan strategi *marketing* dan *marketing communication* Tabungan BTN Emas iB.

3. Laporan Penyimpangan Internal UUS

Guna mengurangi penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS Bank BTN yang mempengaruhi kondisi kinerja UUS bank BTN secara signifikan, UUS Bank BTN melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya internal *fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Selama tahun 2022, penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel Internal Fraud UUS

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total fraud	-	-	-	2	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	2	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-

4. Monitoring permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2022, permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS Bank BTN dan telah diajukan melalui proses hukum, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	19	7
Dalam proses penyelesaian	17	4
Total	36	11

5. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang diperoleh antara lain berasal dari denda ataupun pendapatan bunga dari penempatan pada Bank BTN (Induk) yang digunakan sebagai dana likuiditas Kantor Cabang Syariah maupun total pendapatan yang diperoleh selama tahun 2022 (dalam satuan angka penuh Rupiah), adalah sebagai berikut

Tabel Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

No	Uraian	31 Desember 2022
1	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	2,271,854,526
2	Penerimaan Dana Kebajikan	
a	Infaq	-
b	Sedekah	
c	Pengembalian dana kebajikan produktif	
d	Denda; dan	120,591,195
e	Penerimaan non halal	1,012,764

No	Uraian	31 Desember 2022
	Total Penerimaan	121,603,959
3	Penggunaan Dana Kebajikan	
	a Dana Kebajikan Produktif	
	b Sumbangan	
	c Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	2,270,866,258
	Total Penggunaan	2,270,866,258
4	Kenaikan (Penurunan) Sumber dana kebajikan atas Penggunaan	(2,149,262,299)
5	Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	122,592,227

6. Melakukan Self Assessment GCG UUS

Dalam rangka mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat, *prudent* dan tangguh, Unit Usaha Syariah BTN sebagai salah satu entitas yang mengelola kegiatan usaha secara syariah wajib menerapkan GCG serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh Perseroan. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. UUS Bank BTN telah melaksanakan *self assessment* sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang mengharuskan Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG. Hasil penilaian *self assessment* UUS dilaporkan paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir. Penilaian *self assessment* GCG Tahun Buku 2021 telah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 137/S/SHAD/III/2022 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	0,35	1,00	0.35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	0,20	1,00	0.20
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa	0,10	3,00	0.30
4	Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposita Inti	0,10	2,00	0.20
5	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	0,25	2,00	0.50
	Total Nilai	1,00		1.55
	Kriteria Angka			-
	Predikat Nilai Komposit			Baik

7. Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan melalui Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Direktur UUS dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 11 Oktober 2022 guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Unit Usaha Syariah (UUS) BTN baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah dijalankan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhadap proses pengembangan produk baru dan pengawasan terhadap kegiatan Bank telah dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah per 6 (enam) bulan, yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

8. Pelaporan Risk Management Unit Usaha Syariah

Pada periode tahun 2022 UUS telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Triwulanan kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut: 1) Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2021 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat 37/S/SHAD/I/2022 dan 04/S/ERMD/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 2) Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2022 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat 267/DIR/ERMD/IV/2022 tanggal 20 April 2022 3) Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2022 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat 419/DIR/ERMD-SHAD/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 4) Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2022 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat 600/DIR/ERMD/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022.

Pada Unit Usaha Syariah laporan untuk risk management tidak berbeda dengan Bank Umum Konvensional namun ditambahkan 2 (dua) jenis risiko yaitu:

a. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Pegawai Sharia Business Division (SHAD) termasuk manajemen unit bisnis Bank menjadi bagian dari pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil, mengingat Imbal Hasil merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Unit Usaha Syariah (UUS). Peran Manajemen Unit Bisnis dalam hal ini Treasury Department Unit Usaha Syariah (UUS) adalah mengidentifikasi Risiko Imbal Hasil atas Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Pengukuran Risiko Imbal Hasil berdasarkan pada hasil assessment dengan menggunakan parameter/indikator yaitu komposisi dana pihak ketiga, strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan serta perilaku nasabah dana pihak ketiga. Dari ketiga indikator ini yang digunakan Treasury Department Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola Risiko Imbal

Hasil. Dalam rangka pemantauan Risiko Imbal Hasil dan memastikan terjaganya Imbal hasil yang diberikan kepada nasabah maka Sharia Business Division (SHAD) dalam hal ini Treasury Department melakukan pengelolaan kebijakan terkait spesial margin Bagi Hasil Pembiayaan dengan berkoordinasi dengan unit bisnis dalam hal ini Commercial Financing Department dan Kantor Cabang Syariah.

b. Pengelolaan Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Pengelolaan Risiko Investasi merupakan pengelolaan atas risiko pembiayaan yang diberikan dengan basis Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Bank serta disusun sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Investasi dipantau sejak proses pemberian Pembiayaan sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan. Pengukuran Risiko Investasi menggunakan parameter/indikator yang terdiri dari komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dan faktor eksternal. Ketiga indikator ini yang digunakan Commercial Financing Department pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola atas Risiko Investasi. Pemantauan dan pengendalian risiko investasi di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pembiayaan yang berbasis bagi hasil terhadap limit risiko investasi serta *mereview* kebijakan *Internal Credit Rating* antara Commercial Financing Department pada Unit Usaha Syariah (UUS) bersama dengan Commercial Credit Risk Division (CRD). Untuk Pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan oleh Commercial Financing Department pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Perseroan senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Pedoman tata kelola perusahaan terbuka telah diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2022, Perseroan telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A. Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.		
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
	<p>A.1.1. Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>a. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui <i>website</i> Perseroan.</p> <p>b. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham.</p> <p>Pada tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 02 Maret 2022. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (<i>voting</i>). Keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.</p> <p>b. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada Notaris untuk dihitung.</p> <p>c. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.</p> <p>d. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara (<i>abstain</i>) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>e. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat yang diajukan.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	<p>A.1.2. Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 02 Maret 2022, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite Audit dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan.</p> <p>Comply</p>
	<p>A.1.3. Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui <i>Website</i> Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Perseroan menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui <i>Website</i> Perseroan www.btm.co.id pada menu Hubungan Investor (<i>Investor Relations</i>), maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan OJK <i>E-reporting</i>, yakni pada tanggal 04 Maret 2021 untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.</p> <p>Comply</p>
A.2. Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
	<p>A.2.1. Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada Kebijakan Hubungan Investor yang mencakup <i>analyst meeting</i>, <i>public expose</i>, <i>investor meeting</i>, Laporan Tahunan dan sebagainya.</p> <p>Surat Edaran Direksi No.10/DIR/CSD/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Penyampaian Informasi Kepada Komunitas Pasar Modal PT Bank Tabungan (Persero) Tbk</p> <p>Comply</p>
	<p>A.2.2. Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam <i>Website</i>.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada <i>Website</i> Perseroan (www.btm.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B. Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
B.1.	Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
	<p>B.1.1. Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan Regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi.</p> <p>Comply</p>
	<p>B.1.2. Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>Comply</p>
B.2.	Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
	<p>B.2.1. Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi No.01/DIR-BTN/2021, Bab IV Evaluasi Kinerja yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini serta <i>Website</i> Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relations – GCG – Crossreference ASEAN CG Scorecard – SKB.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	<p>B.2.2. Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>Comply</p>
	<p>B.2.3. Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor No.01/DEKOM-BTN/2021 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>Comply</p>
	<p>B.2.4. Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip <i>professionalisme</i> dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C. Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi		
C.1.	Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
	<p>C.1.1. Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu ketentuan Regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Comply</p>
	<p>C.1.2. Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolejal.</p>	<p>Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	<p>C.1.3. Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Pada periode 2022, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Pengalaman Kerja <ol style="list-style-type: none"> Maret 2021 – saat ini menjabat sebagai Direktur Finance 2015-2021 menjabat sebagai Head of Treasury Division. 2015 menjabat sebagai Plt Kepala Wilayah, Kantor Wilayah I 2014 menjabat sebagai Head of Treasury Division. 2013 menjabat sebagai Head of Institutional Banking Division. 2012 menjabat sebagai Post Office Alliance Desk Head <p>Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini.</p> <p>Comply</p>
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
	<p>C.2.1. Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021 Bab IV Evaluasi Kinerja serta sistem penilaian ini dirangkum sebagai <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta <i>website</i> Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relations-GCG - <i>Cross Reference ASEAN CG Scorecard</i>.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	<p>C.2.2. Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>Comply</p>
	<p>C.2.3. Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Ketetapan Direksi Nomor 07/DIR/KD/CMPD/2017 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>Comply</p>
D. Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan		
D.1.	Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
	<p>D.1.1. Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya <i>insider trading</i> sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan <i>Investor Relations</i> sebagaimana yang dapat dilihat di <i>website</i> Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	<p>D.1.2. Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara <i>legal, prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Pelaksanaan penerapan anti <i>fraud</i> di Bank BTN diatur dengan Surat Edaran Direksi No. 03/PD/DIR/PPBD/2020 tanggal 31 Maret 2020 Pedoman Kebijakan Strategi Anti <i>Fraud</i>. Sebagai pedoman dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dari program anti korupsi secara nasional, Perseroan menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 tentang Prosedur Pengendalian Gratifikasi.</p> <p>Comply</p>
	<p>D.1.3. Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 04/PD/DIR/PPD/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pedoman Kebijakan Layanan Umum dan Pengadaan Barang dan atau Jasa, Surat Edaran Direksi No. 47/DIR/PGSD/2015 tanggal 4 November 2022 perihal Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Kebijakan Khusus Nomor KK.9-H tanggal 30 Juni 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja vendor, rekam jejak vendor.</p> <p>Peningkatan kemampuan pemasok atau vendor dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada vendor melalui rapat koordinasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja vendor.</p> <p>Pelaksanaan kebijakan seleksi vendor dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai <i>database</i> vendor dalam pengadaan dengan metode penunjukan langsung/pemilihan langsung/seleksi langsung. Peraturan Direksi dan Surat Edaran tersebut di atas juga mengatur <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan vendor. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin.</p> <p>Comply</p>
	<p>D.1.4. Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati. Memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga. Meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan. <p>Untuk tahun 2022, terdapat 2 kreditur Perseroan yaitu: Kreditur Pinjaman Bilateral dan Kreditur Obligasi.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	<p>D.1.5. Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> yang diatur dalam Surat Edaran No.29/SE/DIR/IAD/2021 Perihal Pedoman Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> Bank BTN yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan <i>Whistleblowing System</i> dimaksud pada periode 2022 diuraikan pada bagian <i>Whistleblowing System</i> Laporan Tahunan ini.</p> <p>Comply</p>
	<p>D.1.6. Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Direksi No.02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris, Peraturan Direksi No.2/PD/DIR/PPDB/2021 tanggal perihal perubahan atas Peraturan Direksi No.02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris, Surat Edaran Direksi No. 16/SE/DIR/HCS/2019 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi, <p>Pemberian remunerasi dan insentif telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bank BTN pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>Peraturan Direksi tersebut mencakup remunerasi berbasis variabel yang ditungguhkan maupun <i>Material Risk Taker</i> sebagaimana Peraturan Kementerian BUMN No. 04/MBU/2014 tentang Pedoman Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 dan POJK Nomor 45/POJK.03/2015.</p> <p>Sejak tahun 2009, Perseroan sudah melaksanakan pemberian insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian <i>Share Option</i> pada Laporan Tahunan ini. Pada tahun 2022, Perseroan telah menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko.</p> <p>Comply</p>
E. Aspek 5 : Keterbukaan Informasi		
E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
	<p>E.1.1. Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain <i>website</i> sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>stakeholders</i> melalui pemanfaatan teknologi informasi, selain <i>website</i> Perseroan seperti melalui media sosial yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • YouTube Bank BTN, • Facebook BankBTNcoid, • Twitter @BankBTNcoid, • Instagram @bankbtn • LinkedIn PT BankTabungan Negara <p>Perseroan juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui <i>email</i>, <i>conference call</i> dan TV Pasar Modal IBCM Channel Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan <i>site visit</i> oleh investor ke kantor cabang Bank BTN, <i>Non-Deal Roadshow</i>, <i>one-on-one meeting</i>, <i>Analyst Meeting Public Expose</i>.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian Laporan Tahunan. Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5 % (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan Tahunan ini, perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor.</p> <p>Comply</p>

GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BANKS YANG DITERBITKAN OLEH BASEL COMMITTEE IN BANKING SUPERVISION

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank BTN
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan.	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris, disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank BTN
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Perseroan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> . Perseroan senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko. Perseroan mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank BTN.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> setiap semester disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk didalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan <i>feedback</i> .
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Kebijakan remunerasi Perseroan saat ini telah sesuai dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Perseroan melakukan pengungkapan melalui website Bank BTN www.btn.co.id dan memastikan tersedianya informasi paling update bagi <i>stakeholder</i> . Selain itu, keterbukaan informasi Bank BTN dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan *the highest standard of Corporate Governance* dengan mengacu kepada regulasi dan standar internasional berdasarkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* yang diterbitkan oleh *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*, Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, dimana perseroan telah melakukan penilaian tata kelola sebagai berikut:

Self Assessment

Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola dilakukan secara berkala pada posisi akhir bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Untuk tahun 2022, standar penerapan Tata Kelola selain mengacu pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga mulai mengikuti ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian

Indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis bank.

Pihak Yang Melakukan Assessment

Perseroan melaksanakan *self assessment* tata kelola dengan melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

Skor Penilaian

Pada penilaian tata kelola Perseroan yang dilakukan pada tahun 2022, hasil penilaian sendiri *Self Assessment* sebagai berikut:

Hasil penilaian sendiri Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Juni 2022

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil penilaian sendiri Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Perseroan pada tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Nama Bank : PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Posisi : JANUARI-DESEMBER 2022

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis

Secara umum penerapan Tata Kelola Bank telah berjalan dengan baik, manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas Bank. Selain itu, manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Bank berdasarkan hasil pemantauan/*review*/rekomendasi dari Komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan CAR, Modal Inti, PDN dan NPL serta tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK. Komitmen Bank terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang disepakati.

Tujuan:

- Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam Struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
- Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- Kecukupan transparansi laporan.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Perlindungan konsumen.
- Obyektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit.
- Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan dan/atau
- Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan analisis **Penilaian Sendiri (Self Assessment)** pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) pada masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

Struktur Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2022 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2022 telah diputuskan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) orang dan Direksi sebanyak 9 (sembilan) orang.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mempunyai integritas, kompetensi, dan pengetahuan yang sangat memadai.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Pada posisi 31 Desember 2022 seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank BTN posisi 31 Desember 2022 sebanyak 8 (delapan) orang dengan peraturan yang berlaku dimana 57% (lima puluh tujuh perseratus) atau 5 (lima) orang Dewan Komisaris berasal dari pihak independen, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan.
- Pada posisi 31 Desember 2022 seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator (OJK, BI, Peraturan Menteri dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
- Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan atau kepengurusan dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- Bank BTN telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan:
 - 1.11.1 Surat Dewan Komisaris No.25/KOM/BTN/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - 1.11.2 Surat Dewan Komisaris No.26/KOM/BTN/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - 1.11.3 Surat Dewan Komisaris No.111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Analisis

- 1.12 Bank BTN telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan yang diterapkan pada setiap kegiatan bisnis dan operasional yang dimuat dalam masing-masing ketentuannya.
- 1.13 Satuan Kerja Kepatuhan Bank BTN merupakan satuan kerja yang independen atau terpisah dari satuan kerja *operasional (risk taking unit)*.
- 1.14 Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap sebagai Direktur Utama/Wakil Direktur Utama, Direktur yang membidangi bisnis & operasional, manajemen risiko, *treasury*, keuangan & akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, audit intern, serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank BTN telah dinyatakan lulus *fit and proper test* dari OJK.
- 1.15 Bank BTN telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang disebut Internal Audit Division (IAD) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit.
- 1.16 Bank BTN telah menyusun dan mereview secara berkala terhadap Piagam Audit Intern, struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal serta tugas dan fungsi.
- 1.17 Internal Audit Division (IAD) telah memiliki struktur organisasi dengan menambah fungsi *root cause analysis* dan ikhtisar lintas divisi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan audit yang bersifat strategis, kritis dan/atau memerlukan tindak lanjut lintas Divisi.
- 1.18 Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk laporan keuangan 2022 telah ditetapkan dan memenuhi kriteria yang ditentukan.
- 1.19 Bank BTN telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdiri dari satuan kerja dan komite yang mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yaitu Enterprise Risk Management Division (ERMD), Internal Audit Division (IAD), Compliance and Governance Division (CMGD), Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Commercial Credit Risk Division (CRD) dan Retail Credit Risk Division (RRD).
- 1.20 Bank BTN telah membentuk Branch Business Control (BBC) dan Regional Branch Control (RBC) di bawah supervisi Kantor Wilayah dan garis koordinasi pada Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi untuk meningkatkan pengawasan dan mitigasi risiko operasional Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
- 1.21 Bank telah memiliki kebijakan penyediaan dana secara lengkap, termasuk alat *monitoring* dan langkah penyelesaiannya serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh divisi terkait melibatkan dan berkoordinasi dengan divisi-divisi lainnya, termasuk Compliance & Governance Division (CMGD), Enterprise Risk Management Division (ERMD) dan Legal Division (LGD) melalui Policy and Procedure Division (PPD) yang selanjutnya diusulkan kepada Komite Kebijakan Kredit melalui Direksi.
- 1.22 Bank telah melakukan implementasi *Branch Transformation* yang mempunyai 3 (tiga) inisiatif utama diantaranya:
 - 1.22.1 *Next BTN Branches*,
 - 1.22.2 *Sales Effectiveness*, dan
 - 1.22.3 *Capability Building*.
- 1.23 Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang terdiri dari peraturan internal dan eksternal (regulator).
- 1.24 Rencana strategis Bank telah dibentuk Rencana Korporasi dan Rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Bank.
- 1.25 Direksi telah menetapkan 5 Fokus Utama & 10 Inisiatif strategis.

2. Faktor-faktor Negatif

Tidak ada

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

Tidak ada

4. Kekuatan

- 4.1 Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN berkomitmen untuk memenuhi dan memperbaiki struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar selalu menyesuaikan ketentuan regulator, pengawas dan mengikuti dinamika kebutuhan bisnis.
- 4.2 Penerapan Tata Kelola yang baik di Bank BTN didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen.

B. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Proses Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Positif

- 1.1 Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien yang dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti *Digital Room for E-learning Modules (DREAMS)*, *Legal Application Systems (LAPS)* dan lainnya.
- 1.2 Direksi telah melakukan *performance review* rutin dengan seluruh Divisi & Kanwil, serta Komitmen Dewan Komisaris melakukan *performance review* bersama Direksi secara bulanan.
- 1.3 Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Internal Audit Division, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 1.4 Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, pada periode Januari-Desember tahun 2022 Direksi sudah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) kali rapat.
- 1.5 Komite-komite dibawah Direksi sudah melaksanakan rapat pada periode Januari-Desember 2022 sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) kali rapat. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - 1.5.1 Komite Aset-Liabilitas 20 kali rapat.
 - 1.5.1 Komite Pengarah Teknologi Informasi 5 kali rapat.
 - 1.5.1 Komite Manajemen Risiko 8 kali rapat.
 - 1.5.1 Komite *Human Capital* 9 kali rapat.
 - 1.5.1 Komite Kebijakan Perkreditan atau pembiayaan 11 kali rapat.
 - 1.5.1 Komite Kredit 211 kali rapat.
 - 1.5.1 Komite Bisnis 5 kali rapat.
 - 1.5.1 Komite Pengarah Transformasi 22 kali rapat.
- 1.6 Dewan Komisaris senantiasa memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank.
- 1.7 Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pada periode Januari-Desember 2022 Dewan Komisaris sudah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali rapat dan Rapat bersama Direksi sebanyak 6 (enam) kali.

Analisis

- 1.8 Komite senantiasa melaksanakan tugasnya secara independen melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin dengan Divisi atau Unit Kerja terkait permasalahan dan kondisi operasional Bank BTN.
- 1.9 Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan antara lain pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris. Pada periode Januari-Desember 2022 komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebagai berikut:
 - 1.9.1 Komite Audit sebanyak 41 kali.
 - 1.9.2 Komite Pemantau Risiko sebanyak 41 kali.
 - 1.9.3 Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 14 kali.
- 1.10 Bank BTN telah mengimplementasikan aplikasi pemrosesan kredit (*iLoan*) dimana didalamnya mencakup aspek Pihak Terkait Bank dengan tujuan untuk memastikan proses kredit terbebas dari benturan kepentingan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- 1.11 Peningkatan pelaksanaan Budaya Perusahaan yaitu: *Sales Culture, Performance Culture, Governance & Risk Culture* dan *Learning Culture*.
- 1.12 Bank BTN telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan kepada regulator secara tepat waktu.
- 1.13 Untuk memastikan setiap peraturan yang akan dibuat, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian/review untuk memastikan peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari regulator maupun perundang-undangan. Pada periode Januari-Desember 2022 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.13.1 Bidang Operasional sebanyak 206 kajian.
 - 1.13.2 Bidang Kredit sebanyak 125 kajian.
 - 1.13.3 Bidang Dana sebanyak 47 Kajian.
- 1.14 Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Perseroan melakukan audit *surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pada tanggal 1 Agustus 2022 Perseroan telah dilakukan audit *Surveillance* ISO 37001:2016 dan berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan mendapatkan sertifikat atas audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Selain itu dilaksanakan perluasan untuk ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Kantor Wilayah (Dhi. *SME Restructuring*) dan Commercial Credit Risk Division (CRD).
- 1.15 Dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah berhasil memperoleh sertifikat ISO 37302:2021 Sistem Manajemen kepatuhan pada tanggal 30 Desember 2022 dari Badan Sertifikasi. ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan adalah standar sistem manajemen yang merencanakan, mengelola dan memastikan operasional perusahaan telah memenuhi/mematuhi/ sesuai dengan regulasi yang berlaku di eksternal dan internal perusahaan.
- 1.16 Pelaksanaan *Whistleblowing System* Bank BTN telah menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *Deloitte Consultant* yang disebut WBS BTN SIIPS dan Bank BTN telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait *Whistleblowing System* (WBS) Tindak Pidana Korupsi (TPK) Ter-integrasi.
- 1.17 Penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders*, hal ini tercermin dari laporan yang disampaikan oleh Internal Audit Division kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala (setiap triwulan), yaitu realisasi Rencana Audit Tahunan, temuan dan rekomendasi audit, serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit.
- 1.18 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan dan pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) yang independen serta rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- 1.19 Bank telah melakukan monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* secara bulanan termasuk analisis pelampauan dan dampak serta rekomendasi atas hasil analisis yang disampaikan secara rutin kepada Direksi dan seluruh Divisi.
- 1.20 Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan manajemen risiko secara aktif dengan melakukan pembahasan limit risiko (*risk appetite* dan *risk tolerance*) setiap bulan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
- 1.21 Melakukan perbaikan proses bisnis sejalan dengan pengendalian internal diantaranya:
 - 1.21.1 Pembaharuan kebijakan internal dengan penyempurnaan kebijakan (arsitektur kebijakan);
 - 1.21.2 Peningkatan supervisi dan *dual control* dengan melakukan penyusunan *checklist* monitoring harian untuk memudahkan supervisor (*Branch Manager*) dalam meningkatkan fungsi *control*;
 - 1.21.3 Penguatan fungsi *Branch Business Control* dalam melakukan aktivitas *vouching* terhadap transaksi TS, CS dan *Back Office*.
 - 1.21.4 Internalisasi *Awareness Password* kepada seluruh unit kerja secara periodik;
 - 1.21.5 Peningkatan *skill* pegawai dengan pelatihan dalam kemampuan mensupervisi dan *refreshment* SOP terkait Risiko Operasional kepada Kantor Cabang secara periodik;
 - 1.21.6 *Townhall/Operational Risk Management Forum* terkait risiko operasional kepada Kantor Cabang secara periodik;
 - 1.21.7 Peningkatan keamanan sistem dengan pengembangan metode *biometric* dalam *approval*;
 - 1.21.8 Membentuk unit kerja *monoline* dari OBSD yaitu *Regional Cash Operation Management* (RCOM);
 - 1.21.9 Telah dilakukan penilaian tingkat kematangan risiko (*risk maturity assessment*) tahun 2022;
- 1.22 Melakukan penguatan disiplin proses dan kontrol berjenjang pada setiap tahapan bisnis proses perkreditan, sejalan dengan peningkatan kredit kualitas rendah yang cukup tinggi, dan proses pemberian kredit dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek 5 C's secara konsisten.
- 1.23 Dalam pengambilan keputusan, Bank BTN telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
- 1.24 Selama periode Januari-Desember 2022, tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
- 1.25 Bank telah melakukan *Roll Out* untuk *Branch Transformation* yang meliputi 3 (tiga) bagian, diantaranya:
 - 1.25.1 Struktur organisasi dan model operasi baru, seperti *redesain* organisasi cabang;
 - 1.25.2 Program *sales effectiveness Consumer & SME* dengan melakukan program efektivitas *sales* untuk meningkatkan produktivitas *staff sales* di cabang melalui *capability building* untuk *product knowledge* dan *best-practice*, penerapan *best-practice of sales cadence*, perubahan KPI untuk posisi/jabatan yang relevan.
 - 1.25.3 Pembekalan *branch leaders, sales* dan *frontline* dengan terus menerus meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapabilitas untuk *middle office, Relationship Manager* baik *hard skill* maupun *soft skill*.
- 1.26 Bank BTN telah menyusun, menyajikan dan mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan mempublikasikan di *website* resmi termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.27 Bank BTN telah memiliki Sistem Pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah melalui *Contact Center* dan *Customer Service*, dimana pengaduan disampaikan melalui petugas Bank untuk dapat diteruskan menggunakan aplikasi SPN.
- 1.28 Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.29 Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi dan Pemegang Saham Pengendali.
- 1.30 Dewan Komisaris telah melakukan fungsi dan tugasnya dalam hal pengawasan (*monitoring*) yaitu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dalam rapat *Performance Review* antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Analisis

- 1.31 Direksi melakukan pembahasan secara rutin terkait kebijakan dan keputusan terkait rencana strategis melalui rapat komite yang didahului pra-komite/steering committee.
- 1.32 Dalam rangka mendukung visi untuk menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara, Bank BTN melakukan penguatan kapasitas dan sistem organisasi dengan penguatan peran pemimpin. Bank BTN membekali para pimpinan untuk membantu mengeksekusi 5 (lima) fokus BTN tahun 2021-2025 dengan membentuk *performance culture*, melakukan monitoring yang meningkatkan *engagement team*, konsisten melakukan perilaku utama serta terus menerus melakukan perbaikan yaitu dengan mengimplementasikan konsep disiplin eksekusi 4DX.

2. Faktor-faktor Negatif

Secara umum pengendalian Internal sudah memadai namun masih belum berjalan dengan optimal sehingga menimbulkan kasus *fraud*, kasus kelalaian, temuan kritikal pada operasional bank.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (Root Cause)

Secara keseluruhan *Governance Process* dilaksanakan dengan baik dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional Bank, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan pemahaman *Standard Operating Procedure* (SOP) dan perlu peningkatan supervisi.

4. Kekuatan

- 4.1 Peningkatan implementasi Budaya Perusahaan untuk mendukung Bank BTN dengan berlandaskan *core values* AKHLAK yaitu: *Sales & Service Culture, Governance & Risk Culture, Performance Culture* dan *Learning Culture*.
- 4.2 Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal melalui: *training/internalisasi*, pemberian sanksi untuk pembinaan, pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM.
- 4.3 Dalam pengambilan keputusan Bank BTN telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
- 4.4 Dalam rangka penerapan pengendalian gratifikasi dan suap, Bank BTN telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berada di bawah supervisi dan kelolaan Divisi Kepatuhan.

C. Hasil Tata Kelola (Governance Outcome)

Hasil Tata Kelola secara umum **Memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

- 1.1 Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2022.
- 1.2 Bank melakukan peningkatan kinerja guna merealisasikan target RBB 2022-2024 melalui penetapan strategi bisnis yang efektif.
- 1.3 Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2022 (*Unaudited*) lebih baik dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar)

No	Kinerja	Posisi Desember 2021	RKAP Desember 2022	Posisi Desember 2022 (Unaudited)
1	Aset	371,868	404,015	402,611
2	Laba	2,376	2,591	3,030
3	DPK	295,976	322,769	321,936
4	Kredit/Pembiayaan	274,835	301,015	298,282
5	Kualitas Kredit	3.70%	3.40%	3.38%

1.4 Indikator Kepatuhan posisi Desember 2022

- 1.4.1 Rasio permodalan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah dibentuk Bank setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2022 adalah 20,20%, sedangkan rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) sesuai profil risiko yang wajib dibentuk Bank untuk posisi 31 Desember 2022 sebesar 9,40%. Dengan demikian maka rasio kecukupan modal Bank BTN masih berada di atas batas minimum dari yang dipersyaratkan regulator dalam ketentuan permodalan.
- 1.4.2 Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 1.4.3 *Non-Performing Loan* (NPL) adalah 3,40 % (*gross*).
- 1.4.4 Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Rupiah Konvensional adalah 8.283% sehingga memenuhi ketentuan batas minimum 3%. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing adalah 4.129% memenuhi ketentuan batas minimum 4%.

2. Faktor-faktor Negatif

- 2.1 Selama periode Januari - Desember 2022, terdapat pengenaan denda sebesar Rp274.679.510,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah), terdapat peningkatan jumlah denda dari Regulator dibandingkan dengan periode yang sama Januari - Desember 2021 yaitu sebesar Rp215.770.000,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 2.2 Selama periode Januari-Desember 2022, terdapat denda GWM UUS Bank BTN sebesar Rp.15.823.510,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- 2.3 Masih terdapat kenaikan jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya *fraud*, pada tahun 2022 jumlah *fraud* sebanyak 19 (sembilan belas) kasus meningkat jika dibandingkan pada 2021 terdapat sebanyak 17 (tujuh belas) kasus.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (Root Cause)

- 3.1 Perlunya peningkatan pemahaman SOP dan penguatan supervisi.
- 3.2 Perlunya penyempurnaan sistem dan infrastruktur pelaporan.

Analisis

4. Kekuatan

- 4.1 Bank BTN telah menetapkan arah jangka panjang yaitu menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara yang akan dicapai melalui implementasi lima fokus strategi jangka panjang dengan aspirasi bisnis Bank BTN yang ingin dicapai di tahun 2025 sebagai berikut:
 - 4.1.1 Menggandakan *low-cost funding* menjadi IDR 250 Triliun.
 - 4.1.2 Mendorong keterjangkauan akses perumahan bagi lebih dari 6 Juta masyarakat Indonesia.
 - 4.1.3 Membangun *one stop shop financial solution* untuk 3 Juta konsumen dan bisnis terkait perumahan.
 - 4.1.4 Menjadi *inovator digital* dan *home of Indonesia's best talent*.
 - 4.1.5 Membangun portofolio berkualitas tinggi dan mempertahankan tingkat NPL yang rendah.
- 4.2 Bank BTN berpedoman pada 10 (sepuluh) tema strategis diantaranya:
 - 4.2.1 Penyempurnaan model operasi cabang untuk meningkatkan DPK *low-cost* dan bisnis ritel dengan mengoptimalkan *footprint* jaringan dan membangun *customer ownership* secara *end to end* (segmen komersial, sme, konsumen) termasuk *funding, lending, fee based* dan layanan lainnya.
 - 4.2.2 Kemitraan / pertumbuhan anorganik untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan, menangkap peluang di bidang *multifinance, asuransi & manajemen aset*.
 - 4.2.3 Pengembangan dari pembiayaan perumahan untuk segmen *emerging affluent* dan *affluent*, dengan meningkatkan proposisi *direct-to-direct*, serta bekerja sama dengan developer terkemuka dan jaringan agen *real estate*.
 - 4.2.4 Pengembangan program kepemilikan rumah untuk KPR bersubsidi dalam mendukung agenda nasional perumahan terjangkau.
 - 4.2.5 Memperluas *value chain* dalam *real estate* yang menasar UKM *supplier* dan kontraktor dengan menyediakan *supply chain financing, bank guarantee, SKBDN* dan solusi tabungan bisnis.
 - 4.2.6 Mengembangkan solusi keuangan yang lengkap (pinjaman, tabungan, transaksi, dan investasi) menasar nasabah berpendapatan tetap, khususnya bagi *emerging affluent* dan SME, serta menyiapkan strategi *cross-selling* dan *upselling*.
 - 4.2.7 Mengembangkan *channel* transaksi elektronik, otomasi berbagai proses bisnis dan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem digital, termasuk pengaturan infrastruktur IT pendukung dan model operasional.
 - 4.2.8 Penerapan struktur SBU yang sesuai untuk menciptakan organisasi berorientasi pada kinerja, membangun kapabilitas *hard & soft skill*, serta peluncuran *culture program* untuk *sales* dan *service*, tata kelola dan manajemen risiko, kinerja, dan pembelajaran.
 - 4.2.9 Proses bisnis kredit yang lebih baik dengan sentralisasi operasi kredit (CBC, SME, *consumer*), meningkatkan *check and balances*, dan memperkuat kerangka risiko melalui pedoman risiko yang tepat.
 - 4.2.10 Mempertahankan tingkat NPL yang rendah di semua segmen melalui pemantauan risiko yang kuat, standarisasi pengerjaan, proses penagihan yang memanfaatkan sosial digital, serta strategi penjualan aset.
- 4.3 Bank BTN secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, diantaranya adalah:
 - 4.3.1 *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) mendapatkan skor 90,02 dengan kategori *The Most Trusted Companies*;
 - 4.3.2 *ASEAN Corporate Governance Scorecard* mendapat penghargaan sebagai:
 - 4.3.2.1 Top 3 of Indonesian PLCs.
 - 4.3.2.1 *ASEAN Asset Class*.
 - 4.3.3 TOP GRC 2022, Bank BTN berhasil memperoleh 3 kategori berikut, yaitu: (1) TOP GRC 2022 # 5 Stars; (2) *The Most Committed GRC Leader* 2022 untuk Direktur Utama Perseroan; dan (3) *The High Performing Board of Commissioner on GRC* 2022 untuk Dewan Komisaris.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI**

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Permasalahan	Tindak lanjut
Selama periode Januari sampai dengan Desember 2022, terdapat peningkatan jumlah denda dari Regulator dibandingkan dengan periode yang sama Januari sampai dengan Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan budaya kepatuhan melalui berbagai program secara kontinu yang meliputi <i>compliance broadcast, compliance excellence, compliance dashboard</i> dan lainnya. • Optimalisasi pemanfaatan CRMS sebagai <i>tools</i> yang berfungsi pendukung dalam pelaksanaan <i>monitoring</i> komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator serta <i>database</i> ketentuan regulator (OJK, BI, LPS, Kementerian, dan sebagainya).
Masih terdapat kenaikan jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya <i>fraud</i> , pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2021.	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan fungsi <i>internal control</i> di seluruh unit kerja. • Diseminasi strategi anti <i>fraud</i> (SAF) dan budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) ke seluruh unit kerja secara kontinu.

Penilaian Pihak Eksternal

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, diantaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh OJK dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Rating GCG - Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award

Perseroan senantiasa mengikuti rating dan survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan

pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance* dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Tahapan Analisis Instrumen dan Dokumen Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan berikut:
 - a. *Self Assessment*; dan
 - b. Penilaian Dokumen.
2. Tahapan Observasi
Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrument penilaian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki perusahaan melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

Kriteria Penilaian

Aspek penilaian dalam CGPI meliputi antara lain Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG).

Hasil Penilaian CGPI Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun Pelaksanaan				
	2022	2021	2020	2019	2018
<i>Governance Structure</i>	25,18	31,83	24,30	30,91	22,73
<i>Governance Process</i>	34,46	32,53	32,53	28,49	38,01
<i>Governance Outcome</i>	30,38	24,47	32,79	29,22	27,23
Skor CGPI	90,02	89,83	89,62	88,62	87,97

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, penilaian yang diberikan oleh IICG dalam keikutsertaan Bank BTN dalam CGPI selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di Bank BTN semakin baik dari tahun ke tahun.

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Terdapat beberapa rekomendasi perbaikan dari IICG terhadap pelaksanaan CGPI 2021. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan dan perbaikan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan.

No	Rekomendasi	Tindak lanjut Perseroan
Governance Structure		
1	Bank BTN perlu mempertimbangkan dan merespon keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan komite remunerasi dan nominasi untuk mempertimbangkan aspek gender dalam penilaian calon anggota Dewan Komisaris. b. Sesuai dengan kewenangan, HCMD telah mengusulkan talenta-talenta perempuan pada jabatan-jabatan kunci, baik untuk posisi pada internal Bank maupun sebagai kandidat BOD pada BUMN lain.

Skor Penilaian

Skor CGPI Perseroan pada tahun 2022 sebesar 90,02 dengan predikat "*Most Trusted*". Adapun hasil penilaian CGPI selama 5 (lima) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:



No	Rekomendasi	Tindak lanjut Perseroan
2	Bank BTN perlu mengembangkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan, serta melengkapi formasi struktur fungsional dengan talenta muda agar dapat membangun kaderisasi penerus (<i>successor</i>) Direksi di masa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Transformasi organisasi dijalankan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan yang meliputi sentralisasi <i>accounting</i>, sentralisasi <i>procurement</i>, sentralisasi <i>operation</i> dan <i>branch transformation</i>. b. Dalam membangun kaderisasi pada jabatan kunci (BOD & BOD -1) melalui program <i>Talent Acceleration Program</i> (TAP) melalui: <ul style="list-style-type: none"> · Melakukan <i>screening</i> kandidat sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke LMD untuk diberikan program pengembangan sebanyak 86 pegawai. · Melakukan <i>job assignment</i> bagi pegawai-pegawai posisi <i>officer</i> pada jabatan-jabatan struktural sebanyak 5 orang.
Governance Process		
1	Bank BTN perlu mengembangkan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) meliputi pengelolaan dilakukan oleh pihak eksternal seperti pengelolaan tindak pidana korupsi terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi proses dan sistem pengelolaan WBS oleh pihak eksternal (Deloitte). b. Pengembangan kebijakan WBS.
2	Bank BTN perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pengungkapan dan keterbukaan informasi perusahaan dengan mengacu pada perkembangan regulasi dan pedoman yang berlaku.	Review dan update kebijakan peraturan Direksi tentang pedoman kebijakan hubungan pemegang saham dan pemangku kepentingan.
3	Bank BTN perlu memperkuat dengan mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam semua kegiatan perusahaan serta melakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko perusahaan secara berkala dan mengungkapkan hasilnya.	Implementasi profil risiko yang dilakukan penilaian secara mandiri setiap triwulan. Sebagai pengembangannya Bank menginisiasi program manajemen risiko RMA pada tahun 2022 (saat ini sedang proses penunjukan konsultan).
4	Bank BTN perlu mengoptimalkan sistem dan mekanisme keberlanjutan bisnis di perusahaan dengan mengimplementasikan dan melakukan sertifikasi sesuai dengan standar SNI ISO 22301:2019 tentang Sistem Manajemen Keberlanjutan Bisnis (<i>Business Continuity Management</i>).	<ul style="list-style-type: none"> a) Bank telah menyusun dan mengembangkan ketentuan internal mengenai Manajemen Keberlangsungan Usaha (<i>Business Continuity Management</i>) yang diimplementasikan sejak 2018. b) Bank merencanakan dan mengimplementasikan sertifikasi terkait ISO 22301:2019 tentang Sistem Manajemen Keberlanjutan Bisnis (<i>Business Continuity Management</i>).
5	Bank BTN perlu mengembangkan sistem dan mekanisme penciptaan inovasi di perusahaan dan meningkatkan capaian inovasi di perusahaan dengan menjadi salah satu yang terbaik pada produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi atau strategi sehingga dapat menjadi <i>benchmarking</i> bagi perusahaan lain.	Bank mengimplementasikan program budaya yang mendorong inovasi melalui <i>innovation awards</i> yang telah diimplementasikan di tahun 2021 dan rencana program di tahun 2022.
6	Bank BTN perlu mengembangkan sistem dan mekanisme pengendalian intern perusahaan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> a. Internal Audit Division menjalankan perannya melalui Audit Berbasis Risiko (<i>Risk Based Audit</i>) yang dilakukan sesuai <i>Annual Audit Plan</i> yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama. b. Telah dilakukan implementasi struktur organisasi Branch Control di Kantor Cabang, Regional Audit & Control Supervisory di Kantor Wilayah dan <i>Monoline Business Control</i> di Commercial Banking Center (CBC) secara nasional yang berfungsi untuk mengawasi penerapan pengendalian internal oleh unit kerja secara <i>day to day</i>. c. Telah dilakukan <i>review</i> peraturan internal Bank secara terus menerus dalam rangka peningkatan aspek <i>governance</i> dan sistem pengendalian internal. d. Bank telah melakukan validasi model ICR yang berfungsi untuk mengevaluasi distribusi rating untuk kelompok debitur yang <i>default & non-default</i> dengan melakukan <i>backtesting</i> terhadap model rating internal (<i>rating borrower & rating facility</i>, metode ROC). e. Bank telah memiliki laporan PQR yang berfungsi untuk <i>review</i> pencapaian dan kualitas kredit baik konsumen maupun komersial. f. Bank telah melakukan pemantauan RA, RT sebagai mekanisme dalam pengendalian intern perusahaan.
7	Bank BTN perlu mengoptimalkan sistem dan mekanisme komunikasi serta koordinasi yang intensif dan jelas antara anggota Komite Audit dan Audit Intern/SKAI dengan Auditor Eksternal/KAP yang telah dipilih oleh RUPS dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga keluaran hasil audit bisa digunakan untuk optimalisasi program pengawasan oleh organ Perusahaan serta digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> a. IAD menjalankan fungsi <i>counterparty</i> melalui proses koordinasi dan komunikasi dengan KAP maupun audit eksternal lainnya. b. Komunikasi serta koordinasi antara Komite Audit dengan KAP terpilih dilaksanakan dengan baik sebagaimana fungsi pengawasan Komite Audit. c. Aktivitas pengawasan terhadap audit eksternal salah satunya dilakukan melalui proses diskusi maupun komunikasi sesuai <i>alur/schedule</i> pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh KAP sejak proses <i>kick of meeting</i>, proses pemeriksaan sampai dengan penyelesaian laporan auditor eksternal sebelum dilakukannya publikasi laporan.

No	Rekomendasi	Tindak lanjut Perseroan
Governance Outcome		
1	Dari kinerja keuangan BTN didapati pertumbuhan bank terkendala dengan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan efektivitas dalam pencapaian target tidak maksimal sehingga BTN perlu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.	Bank menerapkan strategi bisnis pada masa pandemi covid 19 melalui Strategi LAR dan <i>provisioning</i> antara lain seperti: <ul style="list-style-type: none"> Proyeksi <i>downgrade</i> debitur baik LAR non Covid dan restruk Covid yang berasal dari segmen Konsumer, Komersial, Korporasi, SME dan Syariah <i>Provisioning</i> kebutuhan CKPN dan rencana pemenuhannya Strategi pengelolaan LAR
2	Bank BTN perlu meningkatkan besaran dividen secara proporsional dan konsisten bagi seluruh pemegang saham.	Bank melakukan pemberian dividen kepada pemegang saham (Pemerintah dan Publik yang diumumkan pada RUPST 2021 Bank BTN)
3	Bank BTN perlu mengembangkan tindak lanjut penanganan dan penyelesaian seluruh keluhan dari nasabah.	Bank melakukan tindak lanjut penanganan nasabah melalui beberapa strategi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan unit kerja dan pihak terkait Penanganan nasabah melalui aplikasi SPN.
4	Bank BTN perlu mengembangkan tindak lanjut penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelaporan penanganan penyelesaian permasalahan hukum secara rutin. Melaksanakan program sosialisasi risiko hukum ke seluruh unit kerja. LGD menyusun Q&A permasalahan hukum melalui Aplikasi LapS secara kontinu di tiap bulannya (5 Q&A tiap bulan). Melakukan pengembangan fitur dalam <i>Legal Application System (LapS)</i> dengan melakukan pendekatan berbasis risiko untuk mempermudah pemantauan penanganan perkara hukum.
5	Bank BTN perlu mengembangkan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan nasabah/konsumen agar dapat memberikan pelayanan prima dalam rangka meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan.	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Kerjasama dengan MRI terkait <i>survey customer experience</i> Penyempurnaan Standar layanan Bank BTN

Penilaian GCG Berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Assessment GCG lainnya yang dilakukan Perseroan adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). ACGS merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ACMF untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN.

Kriteria Penilaian

Penilaian ACGS memiliki 5 aspek yang dikelompokkan dalam 2 Level sebagai berikut:

- Level 1, terdiri dari 5 Part yaitu:
 - Part A: *Rights of Shareholders*
 - Part B: *Equitable Treatment of Shareholders*
 - Part C: *Role of Stakeholders*
 - Part D: *Disclosure and Transparency*
 - Part E: *Responsibility of the Board*
- Level 2, terdiri dari Bonus dan Penalti.

Pihak Yang Melakukan Assessment

Masing-masing negara ASEAN menunjuk perwakilan *Domestic Ranking Body (DRB)* dan *Corporate Governance (CG) Expert* untuk melakukan penilaian/*assessment* berdasarkan parameter ACGS. Dalam hal ini perwakilan DRB dan CG Expert dari Indonesia diwakili oleh PT RSM Indonesia.

Skor Penilaian

Atas hasil penilaian 100 perusahaan tercatat berdasarkan kriteria ACGS yang dilaksanakan oleh perwakilan CG Expert dan DRB Indonesia (PT RSM Indonesia) tahun 2022 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022, Bank BTN berhasil memperoleh penghargaan pada 2 kategori yaitu "Top 3 Indonesian PLCs" dan 10 (sepuluh) Perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori "ASEAN Asset Class Thresholds".

Hasil penilaian ASEAN Asset Class tahun 2021 yaitu untuk tahun buku 2020, terdapat 10 Perusahaan Tercatat Indonesia yang masuk dalam daftar ASEAN Asset Class dengan nilai 97,5 ke atas.

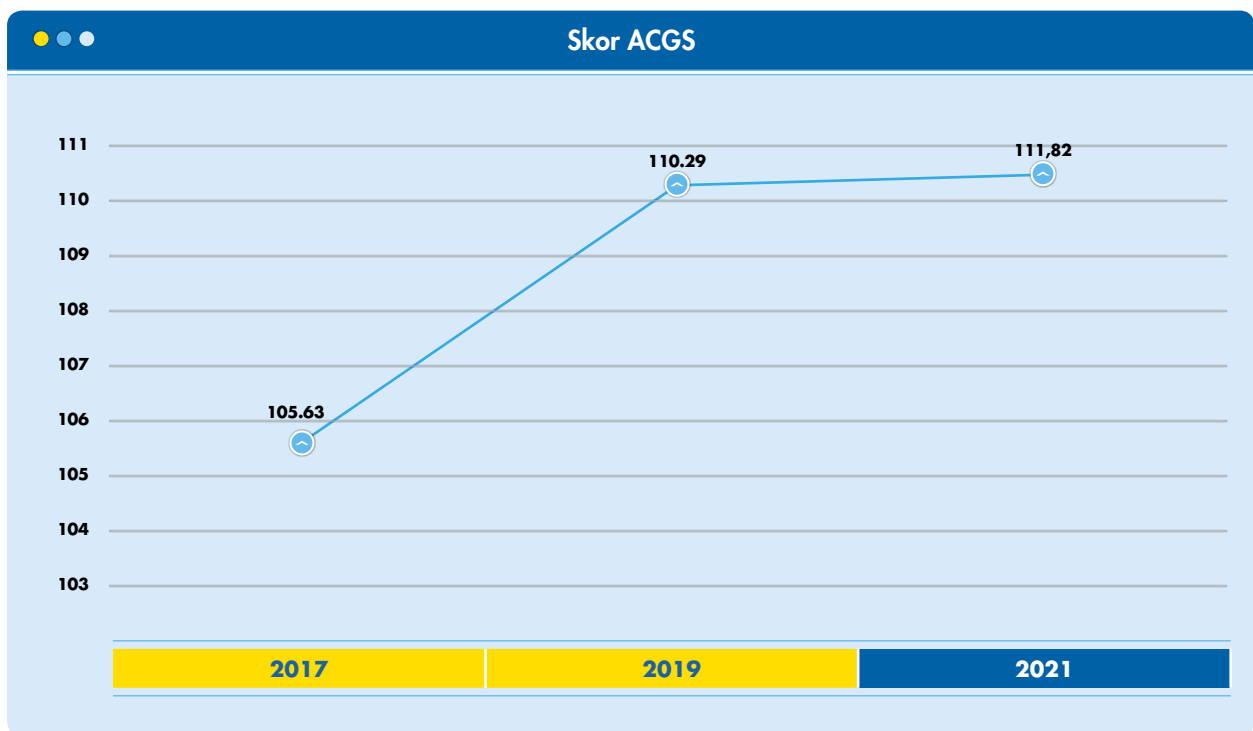
Terdapat 3 (tiga) Perusahaan Tercatat yang mendapat skor ACGS tertinggi (*Top 3 Indonesia PLCs*) yang salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Di samping itu, Perseroan juga memperoleh penghargaan sebagai Perusahaan Tercatat yang masuk dalam kategori *ASEAN Asset Class*.

Berdasarkan laporan penilaian ACGS yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), total skor Perseroan berdasarkan parameter ACGS tahun 2021 adalah **sebesar 111,82**. Hasil skor tersebut meningkat dari skor Perseroan pada ajang ACGS tahun 2019 yang diselenggarakan oleh ACMF dengan peningkatan skor **sebesar 1,53 poin**.

Penilaian tersebut direview berdasarkan pengungkapan praktik tata kelola Perseroan melalui informasi yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam laporan tahunan, *website*, pengumuman dan edaran yang dibuat oleh Perseroan. Informasi yang digunakan dalam penilaian adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Inggris dengan *cut-off date* 31 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil penilaian *ASEAN Asset Class* tahun 2021, Perseroan berhasil ditetapkan sebagai perusahaan *Top 3 of Indonesian PLCs* dan *ASEAN Asset Class*.

Dalam 3 (tiga) periode tahun terakhir, skor ACGS Bank BTN adalah sebagai berikut:



Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di Bank BTN semakin baik dari tahun ke tahun.

Level/ No. Item	Corporate Governance Standart Criteria	Status	Penjelasan
Level 1			
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham.	Comply	
A.2	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental	Comply	
A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS.	Comply	
A.4	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan	Comply	
A.5	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.	Comply	

Level/ No. Item	Corporate Governance Standart Criteria	Status	Penjelasan
B.1	Hak suara dan kepemilikan saham	Comply	
B.2	Pemberitahuan RUPS	-	a. Pengungkapan profil calon Dewan Komisaris dan Direksi belum tersedia pada Pemanggilan RUPS; b. Pemanggilan RUPS tidak memuat informasi terkait Auditor Eksternal yang akan ditunjuk pada RUPS;
B.3	Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.	Comply	
B.4	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.	Comply	
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran	Comply	
C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	Comply	
C.2	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka.	Comply	
C.3	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan.	Comply	
C.4	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini.	Comply	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	Comply	
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	-	Perseroan belum mengungkap remunerasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
D.3	Pengungkapan atas Transaksi Pihak Berelasi	Comply	
D.4	Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan	Comply	
D.5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	Comply	
D.6	Media Komunikasi	Comply	
D.7	Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/Keuangan	Comply	
D.8	Situs Perseroan	Comply	
D.9	Hubungan Investor	Comply	

Level/ No. Item	Corporate Governance Standart Criteria	Status	Penjelasan
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	Comply	
E.2	Struktur Dewan	Comply	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak seluruhnya merupakan komisaris independen
E.3	Proses Dewan	Comply	
E.4	Posisi Dewan	Comply	
E.5	Kinerja Dewan	Comply	

Level/ No. Item	Corporate Governance Standart Criteria	Status	Penjelasan
Level 2			
(B) C.1.1	Perseroan mengadopsi kerangka Laporan Berkelanjutan yang berbasis internasional (seperti GRI, <i>Integrated Reporting</i> , SASB)	Comply	
(B) E.2.3	Perseroan memiliki kebijakan dan mengungkapkan implementasi keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi untuk mencapai Tujuan Perseroan	Comply	
(B) E.2.2	Perseroan telah menyelaraskan proses nominasi dengan <i>strategy map</i> yang ada.	Comply	
(B) E.4.1	Perseroan telah menyelaraskan proses nominasi dengan <i>strategy map</i> yang ada.	Comply	
(B) E.5.1	Pengungkapan peran Dewan Komisaris dan Direksi terkait tata kelola TI	Comply	
(B) E.6.1	Perseroan memiliki Komite Pemantau Risiko yang terpisah dari Dewan Komisaris.	Comply	

Rekomendasi dan Tindak lanjutnya

Perseroan senantiasa melakukan tindak lanjut atas rekomendasi ASEAN *Corporate Governance Scorecard* 2019 sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perseroan agar memastikan Pemanggilan RUPS memuat penjelasan atas masing-masing agenda yang akan dibahas pada saat RUPS	Perseroan akan mencantumkan penjelasan masing-masing agenda RUPS pada Pemanggilan RUPS Tahunan 2021.
2	Perseroan agar memastikan pengungkapan kehadiran rapat anggota Komite Remunerasi maupun Komite Nominasi pada Laporan Tahunan.	Perseroan mengungkapkan kehadiran anggota Komite Remunerasi maupun Komite Nominasi pada Laporan Tahunan 2020.
3	Perseroan agar menggunakan Pihak Eksternal untuk pencarian kandidat dan melakukan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Perseroan berkerja sama dengan Perusahaan Jasa Penilai untuk melakukan proses pencarian dan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan





Sepanjang tahun 2022, Perseroan berhasil menerapkan strategi dan inisiatif yang tepat sehingga Perseroan berhasil membukukan pencapaian secara positif dan berkelanjutan. Perseroan berhasil menyalurkan dana TJSL 2022 sebesar Rp61,98 miliar, sedangkan penyaluran dana PUMK tahun 2022 sebesar Rp18,38 miliar melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Program TJSL mendukung Perseroan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Sebagai salah satu bank terbesar di KPR dan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dukungan nyata diberikan Perseroan dengan memberikan pembiayaan secara selektif, yang selaras dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Nomor PER-6/MBU/09/2022 bahwa Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan Program TJSL BUMN sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja. Peraturan ini juga mengatur tentang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, hukum dan tata kelola. Tahapan yang diterapkan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Kementerian BUMN mendorong semua korporasi di bawahnya agar Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN dapat memberikan dampak kepada masyarakat serta sebagai wujud dukungan terhadap program Pemerintah yang difokuskan kepada 3 (tiga) bidang prioritas yaitu pendidikan, lingkungan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan serta pengelolaan dampak Program TJSL BUMN sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja.

Penyelenggaraan Program TJSL Perseroan bertujuan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis dalam jangka panjang serta memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Perseroan memaknai substansi program TJSL tidak hanya mengarah kepada upaya membangun hubungan yang

harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas dan pemangku kepentingan baik secara lokal, nasional maupun global, namun juga mengarah kepada misi Perseroan untuk memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perseroan memiliki tugas moral untuk mengembangkan bisnis dan memajukan perekonomian dalam negeri yang berkelanjutan dengan senantiasa berpegang teguh pada nilai integritas, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi etika bisnis.

Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama, yaitu:

1. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
3. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
4. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Dalam pelaksanaannya Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisis risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan.
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan.
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Program TJSL saat ini adalah bukan lagi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat *charity* atau *philanthropy* tapi harus memiliki nilai tambah atau disebut *Creating Shared Value* (CSV). CSV yaitu kegiatan TJSL yang memberikan nilai tambah bagi penerima dan berkelanjutan serta memberikan *benefit* kepada Bank BTN yang mengacu pada Pilar dan Fokus TJSL.

Perbedaan Program CSR dengan TJSL *Creating Shared Value* (CSV)

	CSR	TJSL (CSV)
Filosofi	Bantuan yang bersifat murni bantuan sosial (<i>charity, philanthropy</i>)	Bantuan sosial yang memberikan/menciptakan nilai ekonomi bagi penerima dan perusahaan
Value	Berbuat baik, tanpa imbal balik bagi perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan solusi pada masalah sosial, memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan kepada masyarakat - Bank BTN mendapatkan <i>impact</i> dari bantuan sosial
Hasil	Manfaat hanya untuk penerima dan tidak berkelanjutan	Secara sosial, ekonomi dan lingkungan berdampak kepada masyarakat dan terkait dengan bisnis perusahaan yang berkelanjutan

Komitmen Perseroan Pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan memandang penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban akan keberadaan Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan. Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan dalam Program TJSL yang sesuai dan relevan dengan bidang usaha dan kegiatan Perseroan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan program TJSL ini dilakukan sebagai bentuk peran serta Perseroan dalam upaya perbaikan tingkat perekonomian masyarakat yang terkena dampak langsung dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, sekaligus sebagai bagian dari kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Perseroan memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu pembangunan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dengan dukungan dan kontribusi tersebut, Perseroan percaya telah membangun fondasi berkelanjutan dengan menciptakan nilai jangka panjang (*longterm value creation*) yang tidak hanya dalam bentuk terciptanya keunggulan bersaing (*sustainable competitive advantage*) secara berkelanjutan bagi Perseroan, melainkan juga untuk masyarakat dan lingkungan yang lebih luas dan tentu saja memperkuat daya tahan (*strengthen resilience*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Perseroan menyadari akan kewajibannya untuk ikut serta dalam pencapaian TPB, terutama pada poin ke-11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau bagi semua orang pada tahun 2030 melalui produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Kondisi Umum Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan program yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara. TJSL dilatarbelakangi oleh masalah lingkungan dan sosial yang muncul sebagai dampak dari pembangunan yang pesat dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan peran dari Lembaga Keuangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan sosial.

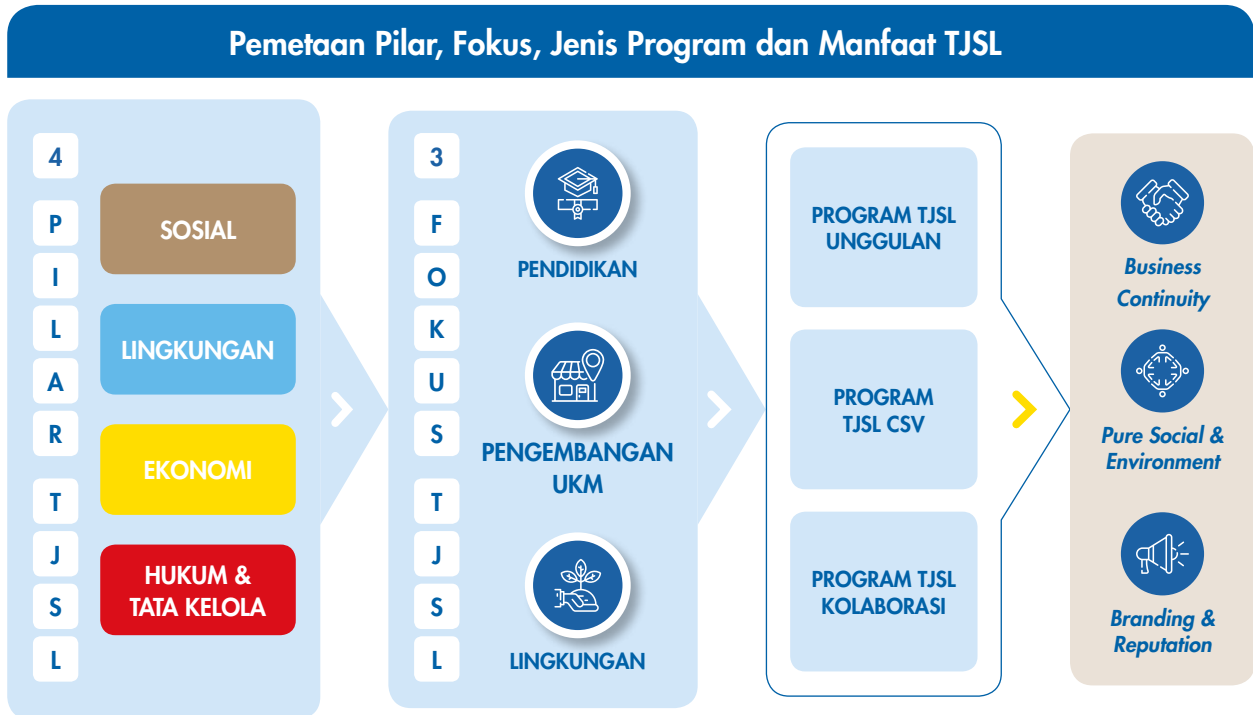
TJSL dipandang sebagai wujud nyata kontribusi perusahaan terhadap upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Perseroan, TJSL memberikan arahan strategis dalam mengembangkan portofolio pembiayaan untuk kegiatan usaha berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang akan dilakukan Perseroan dalam proses bisnis dan manajemen risiko. Perubahan yang dicapai merupakan perubahan yang relevan dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan risiko *Environmental, Social, Governance* (ESG) dalam kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2022 Bank BTN telah melaksanakan beberapa kegiatan TJSL dengan berbagai jenis kegiatan yang mengacu pada 4 (empat) Pilar TJSL yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum dan Tata Kelola serta 3 (tiga) Fokus yaitu Fokus Pendidikan, Fokus Lingkungan (*Go Green*) serta Fokus Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil *alignment* antara 4 (empat) Pilar TJSL dengan 3 (tiga) fokus kegiatan TJSL, Bank BTN mengategorikan kegiatan program TJSL menjadi sebagai berikut:

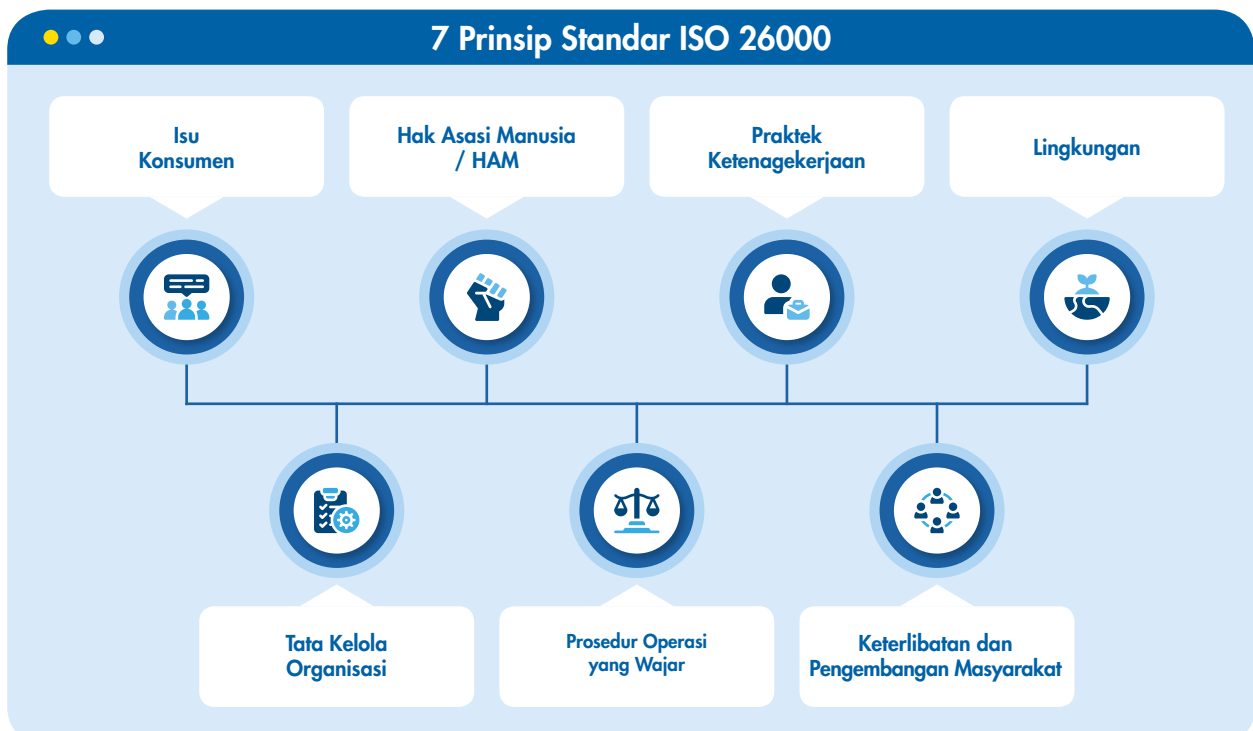
1. Program TJSL Unggulan.
2. Program TJSL CSV.
3. Program TJSL Kolaborasi.

Ketiga program tersebut bertujuan untuk menjaga *business continuity, pure social and environment, branding and reputation*.

Perseroan memaknai substansi program TJSL tidak hanya mengarah kepada upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas dan pemangku kepentingan—baik secara lokal, nasional maupun global, namun juga mengarah kepada misi Perseroan untuk memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perseroan telah menetapkan model penerapan TJSL sebagaimana berikut:



Perseroan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab ini dengan terus menjalankan proses bisnis yang sehat serta meningkatkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan TJSL. Berbagai aktivitas yang dijalankan sekaligus merefleksikan kontribusi Perseroan pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip standar ISO 26000. Dengan demikian, penerapan program TJSL yang dijalankan Perseroan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan, berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perseroan serta membina usaha mikro dan usaha kecil masyarakat agar lebih tangguh dan mandiri.



Landasan Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Selain merujuk Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, implementasi TJSL Perseroan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Nomor PER-6/MBU/09/2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Pelaksanaan Program TJSL juga berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada Standar ISO 26000 sebagai standar global dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Tujuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pelaksanaan Program TJSL berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. Program TJSL Perseroan bertujuan untuk:

- Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perseroan;
- Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
- Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perseroan.
- Selanjutnya, Perseroan juga telah menetapkan tujuan strategis yang dituangkan dalam beberapa tujuan yang memiliki nilai-nilai manfaat, keberlanjutan dan mendukung kelancaran operasional Perseroan. Penetapan tujuan ini juga didasarkan pada konsep Keseimbangan people, planet dan profit.

Tujuan Program TJSL



BAGI PERSEROAN

Meningkatkan *brand image* dan reliabilitas produk Perseroan. Penguatan ketahanan (*strengthening resilience*) karena Perusahaan telah mengelola semua risiko (ekonomi, sosial dan lingkungan) dengan lebih tepat



BAGI PEMERINTAH

Mendukung program pemerintah dalam penguatan inklusi dan literasi keuangan. Mendukung sasaran pembangunan sektor yang disiapkan pemerintah



BAGI STAKEHOLDER

Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemegang saham (*shareholder*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*)



BAGI MASYARAKAT

Meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.

Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program TJSI di Perseroan, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Divisi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program. Perseroan telah menetapkan Corporate Secretary Division sebagai pengelola program TJSI yang berada di bawah Direktur Utama. Sedangkan tanggung jawab pelaksanaan TJSI Perseroan dalam bidang Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dikelola oleh Small Medium Enterprise Banking Division yang berada di bawah Direktur Consumer. Keduanya diharapkan dapat mendorong pelaksanaan TJSI Perseroan menjadi lebih efektif dan bersinergi.

Fokus Utama TJSI Perseroan

Dalam pelaksanaannya, fokus utama penerima manfaat dalam pelaksanaan Program TJSI adalah masyarakat sekitar operasional Perseroan dan masyarakat luas secara selektif. Selama tahun 2022, kegiatan TJSI Perseroan difokuskan ke dalam tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan lingkungan (go green).



Pendidikan



Pengembangan
UMKM



lingkungan
(go green)

Pencapaian TJSI Perseroan Tahun 2022

Sebagai bukti atas komitmen Perseroan dalam penerapan TJSI dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada tahun 2022 Perseroan telah menerima berbagai penghargaan, antara lain:



TOP Leader on CSR Commitment 2022

Haru Koesmahargyo

Maret 2022
TOP CSR Award 2022
Top Business



TOP CSR Award 2022 # Star 4

Maret 2022
TOP CSR Award 2022
Top Business



Green - Transparansi Penurunan Emisi

April 2022
Transparansi Emisi Korporasi 2022
Majalah Investor



Silver - Transparansi Perhitungan Emisi

April 2022
Transparansi Emisi Korporasi 2022
Majalah Investor



The Winner of Indonesia TJSI Awards 2022 in Bank Sector Industry

Juni 2022
Indonesia CSR & TJSI Awards 2022
The Economics



Pilar Lingkungan ★★★★★

Agustus 2022
2th TJSI & CSR Award 2022
BUMN Track



Leadership A

Oktober 2022
ESG Disclosure Awards 2022
Majalah Investor

REALISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) 2022

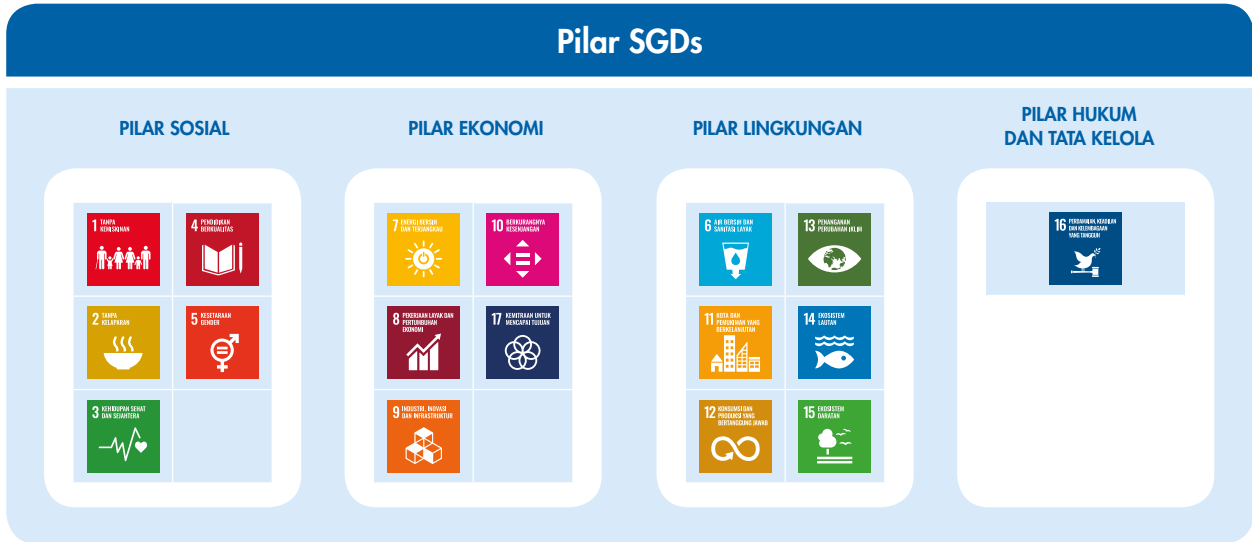
Anggaran TJSL Perseroan pada awal tahun dialokasikan sebesar Rp70 miliar dengan pencapaian sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp61,89 miliar atau sebesar 88,55%.

Tabel Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelaksanaan Program TJSL Perseroan Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Pilar TJSL	RKA Tahun 2022 (Juta Rupiah)
1.	Pilar Sosial	35.250
2.	Pilar Ekonomi	19.000
3.	Pilar Lingkungan	15.250
4.	Pilar Hukum & Tata Kelola	500
	Total	70.000

Tabel Realisasi TJSL per Bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rencana Kerja Anggaran per Bidang Tahun 2022 (Rp)	Realisasi sampai dengan Desember 2022 (Rp)	%
PILAR SOSIAL				
1.	TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	6.000.000.000	5.679.495.611	94,66%
2.	TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	13.000.000.000	12.719.690.723	97,84%
3.	TPB 3 (Kehidupan Sehat & Sejahtera)	10.000.000.000	9.409.466.565	94,09%
4.	TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)	6.000.000.000	4.894.798.719	81,58%
5.	TPB 5 (Kesetaraan Gender)	250.000.000	30.000.000	12,00%
PILAR EKONOMI				
1.	TPB 7 (Energi Bersih Dan Terjangkau)	980.000.000	971.740.516	99,16%
2.	TPB 8 (Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi)	3.680.000.000	3.461.216.148	94,05%
3.	TPB 9 (Industri, Inovasi Dan Infrastruktur)	7.380.000.000	6.455.431.482	87,47%
4.	TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan)	6.360.000.000	4.241.653.236	66,69%
5.	TPB 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)	600.000.000	604.739.600	100,79%
PILAR LINGKUNGAN				
1.	TPB 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak)	750.000.000	660.166.447	88,02%
2.	TPB 11 (Kota & Pemukiman Yang Berkelanjutan)	10.000.000.000	9.963.739.700	99,64%
3.	TPB 12 (Konsumsi & Produksi Yang Bertanggung Jawab)	500.000.000	-	
4.	TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim)	500.000.000	800.571.140	160,11%
5.	TPB 14 (Ekosistem Lautan)	1.750.000.000	367.500.000	21,00%
6.	TPB 15 (Ekosistem Daratan)	1.750.000.000	1.725.839.800	98,62%
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA				
1.	TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh)	500.000.000	-	
	TOTAL	70.000.000.000	61.986.049.687	88,55%



Realisasi TJSL Sesuai 3 (Tiga) Fokus

Fokus Pendidikan

Perseoran mendorong, melakukan *upgrading*, atau memberikan hal positif dalam bidang pendidikan, seperti misalnya program beasiswa anak muda Indonesia utk mendapatkan kemudahan & akses ilmu pengetahuan serta teknologi, sarana pendukung pendidikan, sarana ruang belajar serta rehabilitasi bangunan belajar.

Dokumentasi TJSL Bidang Pendidikan 2022



Tabel Realisasi Program TJSL Bidang Pendidikan Tahun 2022

Fokus	Kategori Kegiatan	Sebaran Wilayah Bantuan	Jumlah (Rp)
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan (PAUD, SD, SMP dan SMA) Bantuan Universitas Mitra BTN Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren dan Madrasah Bantuan Beasiswa Bantuan Sarana Umum Sekolah Bantuan Pengembangan Internet Gratis Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Pendidikan Developer Millennial Kampus Mitra BTN 	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja Perseroan mulai DKI Jakarta, Bandung, Cirebon, Ambon, Lampung, Bandung Timur, Bangkalan, Banjarmasin, Batam, Bekasi, Bogor, Cibubur, Cikarang, Ciputat, Cilegon, Gresik, Karawang, Kediri, Magelang, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Palembang, Padang, Panakkukang, Pare Pare, Pekalongan, Pekanbaru, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Tanjung Pinang, Yogyakarta, Mataram, Sidoarjo	13.155.035.638

Fokus Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

TJSL BUMN diarahkan untuk menyiapkan lebih banyak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di seluruh daerah dengan menyiapkan pembiayaannya serta pemberdayaan UMKM dan ultra mikro untuk naik kelas. BUMN diminta untuk mendorong agar lebih banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pembiayaan terhadap UMKM yang tercipta.

Dokumentasi TJSL Bidang UMKM 2022



Tabel Realisasi Program TJSL Bidang Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Fokus	Kategori Kegiatan	Sebaran Wilayah Bantuan	Jumlah (Rp)
Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan UMKM • Sertifikasi Halal • Bantuan Kelompok Tani • Bantuan Sarana Usaha Kelompok • Pembangunan D’Kios Lingkungan Pondok Pesantren • Pembangunan Selasar Siger • Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM • Penyuluha Kepada UMKM Kain Jumputan • Bantuan Budidaya (tawar dan laut) 	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja Perseroan mulai DKI Jakarta, Cibinong, Ambon, Lampung, Bangkalan, Jember, Magelang, Makassar, Padang, Pekalongan, Banjarbaru, Pematang Siantar, Solo, Tanjung Pinang, Jogja	7.984.301.618

Fokus Lingkungan (Go Green)

TJSL BUMN akan diarahkan untuk menjaga kestabilan alam dengan menyinergikan antara lingkungan hidup, pendapatan masyarakat dan juga perubahan iklim.

Salah satunya adalah dengan melakukan penanaman pohon yang bermanfaat, tidak hanya untuk penghijauan dan oksigen, tetapi juga pendapatan masyarakat, lingkungan hidup yang difokuskan untuk pelestarian alam dan penghijauan.

Dokumentasi TJSL Bidang Lingkungan 2022



Tabel Realisasi Program TJSL Bidang Lingkungan (Go Green) Tahun 2022

Fokus	Kategori Kegiatan	Sebaran Wilayah Bantuan	Jumlah (Rp)
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Penhijauan Lingkungan Perumahan BTN Penanaman Bibit Pohon Penanaman Mangrove Sarana dan Prasarana Kebersihan 	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja mulai dari DKI Jakarta, Banjarmasin, Gorontalo, Karawang, Ambon, Lampung, Bandung Timur, Bangkalan, Banyuwangi, Batam, Bengkulu, Bogor, Cibinong, Cikarang, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Gresik, Jambi, Jember, Karawaci, Kendari, Kudus, Kupang, Makassar, Malang, Mataram, Medan, Mojokerto, Mulyosari, Palembang, Palu, Panakkukang, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Purwakarta, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Surabaya, Tanjung Pinang, Tarakan, Tasikmalaya, Malang, Kudus, Medan, Padang, Sukabumi, Tarakan dan Tasikmalaya.	40.846.712.431

PROGRAM CREATING SHARE VALUE PERSEROAN

Perseroan melihat TJSL sebagai upaya untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan di sekitar daerah operasional Perseroan serta bekerja sama dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Program TJSL yang dijalankan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan penciptaan nilai bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak tidak hanya bagi kinerja ekonomi bagi Perseroan, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan tentunya bagi masyarakat sosial.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah mengembangkan beberapa program TJSL menjadi program *Creating Share Value*, diantaranya sebagai berikut:

Penhijauan Perumahan

No.	Nama Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	Penhijauan di Perumahan	TPB 15	Bogor, Bekasi, Bandung, Surabaya, Semarang, Makasar, Mataram, Medan	Pemberian bibit pohon di perumahan yang dibiayai oleh Bank BTN	50 perumahan

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

Bantuan bibit pohon yang diberikan untuk dapat meningkatkan area hijau di perumahan sehingga membuat perumahan menjadi lebih asri dan menjadi hunian yang lebih nyaman.

Manfaat bagi Perseroan

- Perumahan menjadi hunian yang nyaman, diharapkan kualitas hunian dalam suatu perumahan menjadi meningkat dan pada akhirnya meningkatkan pengajuan KPR kepada Bank BTN dan pengembalian kredit oleh pengembang sesuai dengan perencanaan.
- Sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca Bank BTN.

2.	Workshop Developer for Millennial	TPB 4	Manado, Jember, Cirebon dan Purwakarta	Pemberian pelatihan dan pengenalan mengenai properti kepada mahasiswa	200 mahasiswa
----	-----------------------------------	-------	--	---	---------------

No.	Nama Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
-----	--------------	--	--------	---------------	-------------------------

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

Mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai industri properti, dengan harapan ilmu pengetahuan tersebut untuk diterapkan dalam dunia kerja atau jika mahasiswa ingin berwirausaha menjadi pengembang muda.

Manfaat bagi Perseroan

- Mengenalkan Bank BTN sebagai bank yang fokus terhadap properti kepada *millennial*.
- Para *millennial* yang telah mendapatkan pelatihan apabila bekerja di dunia properti dapat bekerja sama dengan Bank BTN dalam membantu pemerintah dalam memenuhi *backlog* perumahan kepada masyarakat.

3.	Selasar Siger BTN	TPB 11	Lampung	Pembangunan area luar ruang yang dapat digunakan sebagai tempat pendidikan, area bermain, olahraga dan wisata di kawasan Menara Siger Lampung	100 UMKM dan pengembang
----	-------------------	--------	---------	---	-------------------------

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

- Masyarakat UMKM dan pengembang akan memanfaatkan area ini untuk pelatihan, *showcase* UMKM dan pameran dalam rangka meningkatkan *skill* dan penjualan.
- Masyarakat umum akan memanfaatkan area ini sebagai area berkumpul dan bermain.

Manfaat bagi Perseroan

Perseroan mendukung para pelaku usaha UMKM dan pengembang binaan Perseroan untuk meningkatkan penjualan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produk bisnis Perseroan.

Program Unggulan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Selaras dengan arahan pemerintah, Perseroan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang berbagai program unggulan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan penyaluran Program TJSJ Perseroan tahun 2022, terdapat beberapa program unggulan diantaranya:

Pendidikan Disabilitas

No.	Nama Program	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	Pendidikan dan pendampingan generasi spesial (Disabilitas)	TPB 4	Jakarta dan Solo	Bantuan pelatihan dan pendidikan keterampilan serta sarana dan prasarana pendidikan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC)	200 anak

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

Para siswa Disabilitas yang dibina YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) mendapatkan pendidikan mengikuti kompetisi Internasional serta mendapatkan pendidikan keterampilan terkait wirausaha sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan *skill* anak disabilitas yang dapat digunakan untuk bekerja.

PROGRAM KOLABORASI

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) yang dilaksanakan bersama dengan BUMN dan Kementerian BUMN termasuk kolaborasi yang baik dengan pihak eksternal dan internal yang memiliki aspirasi yang sama untuk program-program TJSL ke masyarakat.

Dokumentasi TJSL Program Kolaborasi 2022



Tabel Realisasi Program TJSL Kolaborasi 2022

No.	Nama Program	Nilai (Rp)	BUMN Kolaborasi
1.	Bantuan seragam untuk siswa di Kabupaten Tangerang 2.000 siswa dan siswi	300.000.000	Himbara, Pertamina, Telkom, Biofarma, Wika, Askrindo, Bahana, Jamkrindo, Krakatau Steel, Taspen, Jasa Raharja, Jasindo, Pelni, ASDP, Peruri
2.	Bantuan hunian untuk atlet Paralympic	750.000.000	Perumnas, Kawasan Berikat Nusantara, Indonesia Re, Krakatau Steel
3.	Bantuan Masjid Al Hakim Lombok	420.785.250	BRI, BNI, Mandiri
4.	Pembangunan sapra Pesantren Al Quranyah Kesulthanan Maulana Hasanudin Banten	209.293.800	BRI, BNI, Mandiri
5.	Penyediaan sarana air bersih di Madura	200.000.000	Mandiri, Wika, PPA, Air Nav, Perumnas, Indra Karya, SIER dana Reksa
6.	Pembangunan jembatan Banten	150.000.000	Adi Karya, Askrindo, Bahana, BNI, Hutama Karya, Indra Karya, Jamkrindo, Nindya Karya, Pegadaian, PP, Pupuk Indonesia, Taspen, Waskita, Wijaya Karya, Air Nav, Perumnas, Adi Praya, Jasa Marga
Jumlah		2.030.079.050	

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO & USAHA KECIL (PUMK)

Perwujudan kontribusi Perseroan dalam mendukung pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan juga diimplementasikan melalui Program Pendanaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). Program PUMK merupakan bentuk dari kegiatan TJSI yang lebih mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil yang dibentuk bersama masyarakat.

Pelaksanaan program PUMK ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro dan usaha kecil sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan UMK agar lebih tangguh dan mandiri. Pelaksanaan program PUMK mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Nomor PER-6/MBU/09/2022.

Dana Program PUMK Perseroan tahun 2022 bersumber dari:

1. Dana pokok pengembalian pinjaman Mitra Binaan;
2. Saldo dana Program PUMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun sebelumnya;
3. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program PUMK.

Sumber dana PUMK Perseroan tahun 2022 yang berasal dari saldo akhir tahun buku 2021 sebesar Rp15.254.304.860 dan pengembalian pokok beserta jasa administrasi dan denda di tahun buku 2022 sebesar Rp14.864.617.378. Kinerja Program PUMK pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi penyaluran dana dalam program PUMK mencapai sebesar Rp18,38 miliar. Jumlah ini mencapai 105,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp17,5 miliar .
- Penyaluran dana PUMK tersebut, sebesar Rp18,386 juta disalurkan dalam bentuk pinjaman modal kerja.
- Sepanjang tahun 2022, sebanyak 378 Mitra Binaan tercatat sebagai penerima manfaat Program PUMK yang penyalurannya dilakukan secara mandiri.

Realisasi penyaluran dana Program PUMK disalurkan ke beberapa wilayah Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Realisasi penyaluran Program PUMK sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan wilayah penyaluran dapat dilihat sebagai berikut:

No	Wilayah	Realisasi Tahun 2022	
		Jumlah Mitra Binaan	Nilai (Rp Juta)
1	Sumatera	56	3.070
2	DKI Jakarta	40	2.576
3	DI Yogyakarta	11	281
4	Jawa Barat & Banten	113	4.594
5	Jawa Tengah	35	1.864
6	Jawa Timur	38	2.290
7	Bali	4	105
8	Nusa Tenggara Timur	5	145
9	Nusa Tenggara Barat	9	313
10	Kalimantan	21	1.321
11	Sulawesi	30	1.159
12	Maluku	15	642
13	Papua	1	25
	Total	378	18.386

Realisasi penyaluran dana Program PUMK per sektor sepanjang tahun 2022 adalah sebesar Rp18,38 miliar yang terbagi di tujuh sektor sebagai berikut.

No	Sektor Usaha	Realisasi Tahun 2022	
		Jumlah Mitra Binaan	Realisasi (Rp Juta)
1	Sektor Industri	20	904
2	Sektor Jasa	56	4.183
3	Sektor Perdagangan	292	12.705
4	Sektor Perikanan	4	108
5	Sektor Pertanian	1	50
6	Sektor Peternakan	1	410
7	Sektor Perkebunan	1	25
	Total	378	18.386

Perseroan memberikan pembinaan kepada Mitra Binaan agar mereka dapat meningkatkan tata kelola bisnisnya menuju kepada tata kelola yang lebih baik dan menghasilkan keuntungan yang semakin meningkat, sehingga mitra binaan dapat menjadi pendorong pergerakan ekonomi di wilayah lingkungannya.

Berdasarkan dana pembinaan Mitra Binaan menjadi bagian dari program penyaluran dana TJSJ yang dijalankan Perseroan. Penyaluran dana pembinaan ini diarahkan untuk membiayai aktivitas-aktivitas Perseroan dalam rangka peningkatan kapasitas mitra binaan, di antaranya untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program PUMK.

Pada tahun 2022 tidak ada pelaksanaan Pembinaan UMK secara mandiri maupun kerja sama, sehingga Dana pembinaan UMK sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Nihil. Namun demikian, kegiatan *monitoring* tetap dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan usaha masing-masing Mitra Binaan.

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan (Rp)	
Kas dan Setara Kas	11.732.472.238
Piutang Pinjaman Mitra Binaan Bersih	21.809.469.160
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman	85.576.298
Jumlah Aset	33.627.517.696
Aset Neto Tidak Terikat	33.627.517.696
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	33.627.517.696

Laporan Aktivitas (Rp)	
Pendapatan	1.090.577.716
Beban	(1.312.513.787)
Penurunan Aset Neto Tidak Terikat	(221.936.071)
Aset Neto Awal Tahun	33.849.453.767
Aset Neto Pada Akhir Tahun	33.627.517.696

Laporan Arus Kas (Rp)	
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Pencairan Pinjaman Mitra Binaan	(18.386.450.000)
Penerimaan Pokok Angsuran	13.799.087.350
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	1.063.597.362
Pendapatan Lain-Lain	1.932.666
Kas Neto yang Diperoleh (Dipergunakan untuk) Aktivitas Operasi	(3.521.832.622)
Kenaikan (Penurunan) Neto	(3.521.832.622)
Kas Awal Tahun	15.254.304.860
Saldo Akhir Tahun	11.732.472.238

TJSL PEMENUHAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-05/MBU/04/2021 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PER-06/MBU/09/2022

Perseroan telah merancang strategi keberlanjutan yang komprehensif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penerapan program TJSL yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan. Perseroan senantiasa menyusun dan mengimplementasikan program-program TJSL yang mampu membawa manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran program TJSL Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Nomor PER-6/MBU/09/2022. Untuk mencapai tujuan penerapan TJSL yang efektif berlandaskan pada aspek SDGs, Perseroan telah memfokuskan program-program TJSL berlandaskan empat pilar yang menjadi target dan tujuan pelaksanaan TJSL, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan serta Pilar Hukum & Tata Kelola.

Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pendekatan dalam penetapan jumlah anggaran TJSL Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Nomor PER-6/MBU/09/2022. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut, Perseroan telah menetapkan anggaran untuk pelaksanaan program TJSL yang berasal dari anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontribusi Perseroan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perseroan berkomitmen penuh untuk mendukung inisiatif pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya memenuhi target-target pembangunan berkelanjutan skala global dalam rumusan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perseroan sebagai lembaga pembiayaan berlaku selektif dalam menyalurkan pembiayaan sehingga proyek-proyek yang dibiayai selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian beragam rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah merumuskannya kedalam empat pilar yang selaras dengan bidang Perseroan.

TJSL PEMENUHAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/SEOJK.04/2021

Selain menyusun Laporan TJSL sesuai dengan Standar Kementerian BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Nomor PER-6/MBU/09/2022, sebagai bentuk pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan juga telah menyusun Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun 2022 yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini. Laporan Keberlanjutan ini merupakan laporan berkala yang mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI).

Kriteria OJK, ARA dan SK-16



Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi	
UMUM				
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.			ARA	
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.			ARA SK-16	
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di: 1. Sampul muka. 2. Samping. 3. Sampul belakang. 4. Setiap halaman.	√ √ √ √	ARA SK-16	
Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan.			ARA SK-16	
KILAS KINERJA				
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:			
	1. Pendapatan/penjualan.	21	SEOJK 16 ARA SK-16	
	2. Laba bruto.	21	SEOJK 9 SK-16	
	3. Laba Operasional.	21		
	4. Laba sebelum pajak.	21	SEOJK 16 ARA SK-16	
	5. Laba bersih.	22		
	6. Laba (rugi).	22		
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	22	SEOJK 9	
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	NA	SEOJK 16 ARA	
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	22	SEOJK 16	
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	NA	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16	
	11. Laba (rugi) per saham.	22		
	12. Jumlah aset.	19		
	13. Investasi pada entitas asosiasi.	NA		
	14. Jumlah liabilitas.	20		
	15. Jumlah ekuitas.	21		
	16. Dana pihak ketiga.	19		SEOJK 9
	17. Pinjaman yang diterima.	20		SEOJK 16
	18. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	24		
	19. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	24		
	20. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	24		
	21. Rasio lancar.	24		
	22. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	24		
	23. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	24		
	24. Rasio KPMM.	24		
	25. Aset produktif.	24	SEOJK 9	
	26. Rasio <i>Non-performing Loans</i> (NPL).	24		
	27. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	24		
	28. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR).	24		
29. Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM).	24			

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	30. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	24	
	31. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	24	
	32. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	24	
	33. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	24	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16 ARA SK-16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:		
	a. Jumlah saham yang beredar.	25	
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	25	
	c. Harga saham tertinggi, terendah dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	25	
	d. <i>Volume</i> perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	25	
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.	25-26	
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:		SEOJK 16 ARA
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.	28	
	b. Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan dan perubahan nilai nominal saham.	28	
c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.	28		
d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).	28		
e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	28		
3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	29	SEOJK 16	
4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	29	SEOJK 16	
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	Informasi memuat:		ARA SK-16
	1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>).	28	
	2. Tingkat bunga/imbalan.	29	
	3. Tanggal jatuh tempo.	29	
	4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2021 dan 2022.	29	
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi	
LAPORAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH				
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:			
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:			
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	49-51	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16	
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	51	SEOJK 16	
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	51		
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	54	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16	
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	54-55		
	f. Struktur organisasi.	48	SEOJK 9	
	g. Aktivitas utama.	48		
	h. Teknologi informasi.	48-49		
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah.	48		
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	51-54		
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	51		
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	48		
	m. Jumlah, jenis dan lokasi kantor.	48		
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	NA		
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	NA		
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	55		
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.	48		
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	55	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16	
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	55-57		
	4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	57-58	SEOJK 9 ARA SK-16	
	Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
		1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	63-65	SEOJK 16 SEOJK 9 ARA SK-16
2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.		65		
3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.		65-69		
4. Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut		68-69	ARA	
5. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.		69-70	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA	
6. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.		63	SEOJK 9	
7. Penilaian kinerja Komite-komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	69	SK-16		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut:	80-81	ARA SK-16
	1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri.		
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan.		
	3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya.		
	4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.		
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	84-85	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Alamat		
	2. Nomor telepon		
	3. Alamat surat elektronik		
	4. Alamat situs web		
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain:	86-94	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Alamat Nomor telepon Alamat surat elektronik Alamat situs web <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.</p>		
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada) dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	98-99	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	Mencakup:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Visi Perusahaan	100	
	2. Misi Perusahaan	101	
	3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku.	100	
	4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan.	102-103	
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	104	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	104	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	105-117	
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	118-119	SEOJK 16 ARA
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	120-121	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	122	SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	123-133	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan		
	b. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.		
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA		
7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank.			
8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		SEOJK 16	
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	134-145	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Nama dan jabatan.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris		
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.		
	c. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.		
d. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16		
e. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.			
7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank.			

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.		SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	150-151	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	168-169	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
	Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan dan tujuan pelatihan serta adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan.	353-357	ARA SK 16
	Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	357	
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	170-175	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.		
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya).		
	4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.		SEOJK 16 ARA
	5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:		SEOJK 16
	a. Kepemilikan institusi lokal.		
b. Kepemilikan institusi asing.			
c. Kepemilikan individu lokal.			
d. Kepemilikan individu asing.			
6. Rincian Nama Pemegang Saham yang meliputi 20 Pemegang Saham Terbesar dan Persentase Kepemilikannya			
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.			

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	175	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	176	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan: Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi: a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i> . b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank. c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.	176	SEOJK 9
Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	176	SEOJK 16 ARA SK 16
Kronologis pencatatan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>), nilai nominal dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	177-179	SEOJK 16 ARA SK 16
Kronologis penerbitan efek lainnya	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, jenis tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek (jika ada).	180-187	SEOJK 16 ARA SK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 1. Nama dan alamat. 2. Periode penugasan. 3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan. 4. Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku. 5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	187	SEOJK 16 SK 16
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	187-191	SEOJK 16 ARA SK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Penghargaan dan Sertifikasi.	Informasi memuat antara lain:	191-202	SEOJK 9 ARA SK 16
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).		
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).		
Informasi pada Website Perusahaan.	Meliputi paling kurang:	203	ARA
	1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu.		
	2. Isi Kode Etik.		
	3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan.		
	4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir).		
	5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.		
	6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Unit Audit Internal.		
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERSEROAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang (<i>corporate plan</i>). 2. Rencana jangka menengah dan pendek (<i>business plan</i>).	216	SEOJK 13
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	229,249	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas dan perkembangannya.	229-253	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	229-253	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	258-259	
d. Profitabilitas.	258-259		
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar dan total aset.	260-261, 264-265	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	261-262, 265-266	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan).	260, 264	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	261, 265	
	5. Ekuitas.	263, 266	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain dan total laba (rugi) komprehensif.	268-269	
	7. Arus kas.	271-272	
	8. Suku bunga dasar kredit.	277-278	
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		278-281	SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	272, 273	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	274-275	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>).	Penjelasan atas:		SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas.	283	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>).	282	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	282	
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan.	320	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut.		
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan- ikatan tersebut.		
	4. Mata uang yang menjadi denominasi.		
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.		
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.			
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:	320-321	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Jenis investasi barang modal.		
	2. Tujuan investasi barang modal.		
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.		
Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.			
informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	322	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	322-328	SEOJK 16 ARA SK 16
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	329	SEOJK 16 ARA
	2. Laba (rugi).	329	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>).	330	SEOJK 16
	4. Pemasaran.	330	ARA
	5. Pengembangan SDM.	330	ARA
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	328-329	SEOJK 16 ARA
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	331	SEOJK 16 ARA
	2. Laba (rugi).	331	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>).	332	SEOJK 16
	4. Kebijakan dividen.	332	
	5. Pemasaran.	332	ARA
	6. Pengembangan SDM.	332	ARA
7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	331-332	SEOJK 16 ARA	
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	222-228	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	333	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	333	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	333	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	333	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Total perolehan dana.	334-335	
	2. Rencana penggunaan dana.	334-335	
	3. Rincian penggunaan dana.	334-335	
	4. Saldo dana.	334-335	
5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	N/A		
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku. b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.		
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.		
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:	334-342	SEOJK 16 ARA SK 16
	a. Tanggal, nilai dan objek transaksi.		
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.		
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).		
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.		
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.		
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>).		
	2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms length principle</i>).		
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	<p>h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.</p> <p>i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>		SEOJK 16 SEOJK 13 ARA SK 16
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan. 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	342-344 342-344	SEOJK 16 ARA SK 16
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi. 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi. 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	344-345	SEOJK 16 ARA SK 16
Informasi kelangsungan usaha.	<p>Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. 2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1. 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>. <p>Catatan: Apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p>	345 346 348	ARA
Adanya larangan, batasan dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau dalam rangka pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang antara Bank dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha.		N/A	SEOJK 9
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	283-320	SEOJK 9
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS	<p>Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku. b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan. <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	399-403 404-409	SEOJK 16
Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. 2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi. 	411-412 413-414	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16 SEOJK 16 ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	<p>3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggal Rapat. Peserta Rapat. Agenda Rapat. 	415-424	SEOJK 16 ARA SK 16
	<p>4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada). Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada). 	424-426	SEOJK 16 SK 16
	<p>5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosedur penilaian kinerja. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat. <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	426-427	SEOJK 16 ARA
	<p>6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank yang bersangkutan.. Bank lain. Lembaga keuangan bukan bank. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri. 	466-467	SEOJK 13
Dewan Komisaris.	<p>1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p>	427-428	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16
	<p>2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris.</p>	430	SEOJK 16 ARA
	<p>3. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kriteria penentuan Komisaris Independen. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. 	432-434	ARA
	<p>4. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggal Rapat. Peserta Rapat. Agenda Rapat. 	434-449	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	450-452	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).		
	6. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	453-457	SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	7. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	457-459	SEOJK 16 ARA
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin.	Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	464-466	ARA
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	460	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		SEOJK 16 ARA SK 16
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	460-461	
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.	461	
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	461-463	
d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	461-463		
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	a. Nama.	612	
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.		
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.		
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.	613	
e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	615-617		
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	475-476	SEOJK 16 ARA SK 16
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		SEOJK 16 ARA
	4. Riwayat pendidikan.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	473	SEOJK 16 ARA SK 16	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.			
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).			
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.			
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.			SEOJK 16 ARA SK 16
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.			SEOJK 13 ARA SK 16
	8. Pernyataan independensi komite audit.			SEOJK 16 ARA SK 16
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).			SEOJK 16
	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.			SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SEOJK 13 SK 16
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit.			482
	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.			Paling sedikit memuat:
1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.				
2. Usia.				
3. Kewarganegaraan.				
4. Riwayat pendidikan.				
5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:				
a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.				
b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).				
c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.				
6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		489		
7. Pernyataan independensi komite.		489-490		
8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).		484-485		
9. Uraian tugas dan tanggung jawab.		485		
10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>).		490-493		
11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.		493-494		
12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.		494		
13. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.				
Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:				
1. Alasan tidak dibentuknya komite				
2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.				

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:	495-497	SEOJK 16 ARA
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	498	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	498	
9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	494		
10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite.	494		
11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	499-502		
12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	502-503		
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.	505	SEOJK 16 ARA
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.	506	
5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	506-507		
6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.			
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.	509	SEOJK 16 ARA
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).	510	
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	511-513	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	507	
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	509-510	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	509	
8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal.	514-518		
9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris dan/ atau komite audit.			

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	550	ARA
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	550	
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal Control</i>) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	551-553	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA
	2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>).	553	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	554	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	554	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	554-560	SEOJK 16 SEOJK 13 ARA
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	560-568	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	569	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	569-579	SEOJK 16
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	571-578	SEOJK 13
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	581-582	SEOJK 16 ARA
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan.		
	4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.		SK 16
	5. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		SEOJK 13
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		582	SEOJK 16 ARA
Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis dan sebagainya.		582-587	ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	589	SEOJK 16 ARA
	2. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi.	590	
	3. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	590	
	4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif).	590	
	5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	590-591	
	Catatan: Apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
	6. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan.	588	SK 16
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	542	POJK 45
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	542-543	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	543	
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	543	
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	543	
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>malus</i>), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (<i>clawback</i>).	543	
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	544	
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	544	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	544	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	10. jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.	545	
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material <i>risk takers</i> .	545	
	12. <i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif.	545-548	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	548	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	548	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	548	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	548	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	549	
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	549	
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	549	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee Stock ownership program/ESOP</i>).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock Ownership program/MSOP</i>) dan/ atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock Ownership program/ESOP</i>). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat: 1. Jumlah saham dan/atau opsi. 2. Jangka waktu pelaksanaan. 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak. 4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.	591	SEOJK 16 ARA
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka. 2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.	467-469	SEOJK 16
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran. 2. Perlindungan bagi pelapor. 3. Penanganan pengaduan. 4. Pihak yang mengelola pengaduan. 5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku. b. Tindak lanjut pengaduan. Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	591-592 592 592-599 600 600	SEOJK 16 ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>Fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	600-605	SEOJK 16 ARA
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	605-606	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.		
Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan	607-608	SEOJK 13
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		608	SEOJK 13
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		608	SEOJK 13
Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (<i>internal fraud</i>) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	607	
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	608	SEOJK 13
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/ atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	607	SEOJK 13
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/ atau 2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	623-632	SEOJK 16
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2021 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi.	Memuat uraian mengenai:	634-645	ARA
	1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian		
	2. Pihak yang melakukan penilaian		
	3. Skor penilaian masing-masing kriteria		
	4. Rekomendasi hasil penilaian		
	5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.		
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan		SEOJK 16
INFORMASI KEUANGAN			
Surat Pernyataan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Laporan Keuangan Halaman Surat Pernyataan Direksi	ARA
Opini auditor independen atas laporan keuangan.			ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Deskripsi Auditor Independen di Opini.	Deskripsi memuat tentang:		ARA
	1. Nama dan tanda tangan.	Laporan Keuangan Halaman i-x	
	2. Tanggal Laporan Audit	Laporan Keuangan Halaman x	
	3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	Laporan Keuangan Halaman i, x	
Laporan keuangan yang lengkap.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:		ARA
	1. Laporan posisi keuangan.	Laporan Keuangan Halaman 1-6	
	2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.	Laporan Keuangan Halaman 7-9	
	3. Laporan perubahan ekuitas.	Laporan Keuangan Halaman 10-11	
	4. Laporan arus kas.	Laporan Keuangan Halaman 13-14	
	5. Catatan atas laporan keuangan.	Laporan Keuangan Halaman 15-284	
	6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya.	Laporan Keuangan Halaman 1-284	
	7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	N/A	
Perbandingan tingkat profitabilitas.	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	Laporan Keuangan Halaman 8-9	ARA
Laporan Arus Kas.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut:	Laporan Keuangan Halaman 12-14, 29, 283	ARA
	1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi dan pendanaan.		
	2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.		
	3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.		
	4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi.	Meliputi sekurang-kurangnya:	Laporan Keuangan Halaman 28-83	ARA
	1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK.		
	2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.		
	3. Pajak penghasilan.		
	4. Imbalan kerja.		
Pengungkapan transaksi pihak berelasi.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	Laporan Keuangan Halaman 232-236	ARA
	1. Nama pihak berelasi serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi.		
	2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait.		
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan.	Hal-hal yang harus diungkapkan:	Laporan Keuangan Halaman 201-211	ARA
	1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini.		
	2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi.		
	3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.		
	4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan.		
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap.	Hal-hal yang harus diungkapkan:	Laporan Keuangan Halaman 61-63, 143-147	ARA
	1. Metode penyusutan yang digunakan.		
	2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya.		
	3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya).		
	4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.		
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi.	Hal-hal yang harus diungkapkan:	Laporan Keuangan Halaman 79-80, 220	ARA
	1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan.		
	2. Informasi tentang laba rugi, aset dan liabilitas segmen yang dilaporkan.		
	3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas.		
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan.	Hal-hal yang harus diungkapkan:	Laporan Keuangan Halaman 32-48	ARA
	1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya.		
	2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan.	Laporan Keuangan Halaman 273-277	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.	Laporan Keuangan Halaman 246-273	
	4. Kebijakan manajemen risiko.	Laporan Keuangan Halaman 240-243	
	5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	Laporan Keuangan Halaman 246-273	
Penerbitan laporan keuangan.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		ARA
	1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.	Laporan Keuangan Halaman Surat Pernyataan Direksi	
	2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.		

Keterangan

- SEOJK 16** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SEOJK 9** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SEOJK 13** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK 45** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- ARA** : Kriteria *Annual Report Award*
- SK 16** : Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2021 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements
As of December 31, 2022
and for the year then ended
with independent auditors' report

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| 1. Nama | Haru Koesmahargyo | Name |
| Alamat kantor | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 | Office address |
| Alamat domisili
atau sesuai KTP | Jl. Purnawarman No. 17
Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan | Domicile address or
address according to ID |
| Nomor telepon
Jabatan | 021-7203213
Direktur Utama/President Director | Telephone number
Title |
| 2. Nama | Nofry Rony Poetra | Name |
| Alamat kantor | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 | Office address |
| Alamat domisili
atau sesuai KTP | Jl. Taman Patra XII No. 17
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan | Domicile address or
address according to ID |
| Nomor telepon
Jabatan | 021-5264529
Direktur Finance/Director of Finance | Telephone number
Title |

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|---|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;</i> |
| 2. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. <i>All information in the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and</i> |
| b. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 4. <i>We are responsible for the internal control system of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 17 Februari 2023/Jakarta, February 17, 2023



Haru Koesmahargyo
Direktur Utama/President Director



Nofry Rony Poetra
Direktur Finance/Director of Finance

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/Page</u>	
Laporan Auditor Independen.....		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1 - 6	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	7 - 9	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	10 - 11	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	12 - 14	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	15 - 284	<i>Notes to the Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023

*The Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal-hal paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini audit kami terhadapnya, dan kami tidak menyafakan suatu opini audit terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2022, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebesar Rp15.674.923 juta. Kebijakan akuntansi signifikan untuk cadangan kerugian penurunan nilai diungkapkan dalam Catatan 2f atas laporan keuangan terlampir. Kami berfokus pada area ini karena nilai tercatat atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah signifikan terhadap laporan keuangan terlampir.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (continued)

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole and in forming our audit opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

Description of the key audit matter:

As described in Note 11 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2022, the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables was Rp15,674,923 million. The significant accounting policies of allowance for impairment losses are disclosed in Note 2f to the accompanying financial statements. We focused on this area due to the carrying value of loans and syariah financing/receivables and the allowance for impairment losses on loans and syariah financing/receivables are significant to the accompanying financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Penjelasan atas hal audit utama: (lanjutan)

Penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi termasuk dalam penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (untuk eksposur yang dinilai secara individu atau kolektif), termasuk faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Respons audit:

Prosedur audit kami dalam merespons hal audit utama tersebut di atas mencakup, antara lain: menguji pengendalian utama atas pemberian kredit, melakukan penilaian kualitas kredit internal secara reguler, melakukan pencatatan dan pengawasan kredit yang diberikan, piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pinjaman *qardh*, serta pengendalian umum atas sistem perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dan pengendalian aplikasi atas kelengkapan dan keakuratan aliran data dari sistem asal ke sistem perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, memperoleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, melakukan validasi model cadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, serta menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (*staging*) yang disusun oleh Bank untuk kredit yang diberikan, serta menilai kewajaran atas penyesuaian asumsi berorientasi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk kredit yang diberikan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (continued)

Key audit matter (continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

Description of the key audit matter: (continued)

Determination of allowance for impairment losses requires judgement and is subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models (for exposures assessed on an individual or collective basis), including forward-looking macroeconomics factors.

Audit response:

Our audit procedures address the key audit matter mentioned above included, among others: tested the key controls over the loan origination, regular internal credit quality assessments, recording and monitoring of the loans, *murabahah* receivables, *istishna* receivables, *mudharabah* financing, *musyarakah* financing, and funds of *qardh*, and general controls over the allowance for impairment losses system and the application controls over the completeness and accuracy of data flows from source systems to the allowance for impairment losses system, obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, validation of allowance for impairment losses models, inputs, bases, and assumptions used by the Bank in calculating the allowance for impairment losses, and tested the classification into three-stage credit quality of loan portfolios in accordance with staging criteria developed by the Bank for loans, and assessed reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis, and probability-weighted multiple scenarios for loans.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Respons audit: (lanjutan)

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara individual, kami menguji sampel kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah untuk mengevaluasi identifikasi secara tepat waktu oleh Bank atas eksposur yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai; untuk kasus-kasus di mana penurunan nilai telah diidentifikasi, kami menilai asumsi Bank atas arus kas masa depan ekspektasian, termasuk nilai agunan yang dapat direalisasikan berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen. Kami juga memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang berdasarkan sampel, menilai apakah pengungkapan di laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Bank terhadap risiko kredit, dan melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (continued)

Key audit matter (continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

Audit response: (continued)

With respect to individually assessed allowance for impairment losses, we tested a sample of loans and sharia financing/receivables to evaluate the timely identification by the Bank of exposures with significant deterioration in credit quality or those which have been impaired; for cases where impairment has been identified, assessed the Bank's assumptions on the expected future cash flows, including the value of realizable collateral based on available market information or valuation prepared by independent valuer. We also checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the impairment assessment on a sample basis, assessed whether the financial statements disclosures are adequately and appropriately reflecting the Bank's exposures to credit risk, and involved our auditors' internal expert to assist us in the performance of the above procedures where their specific expertise was required.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the annual report. The annual report is expected to be made available to us after the date of this Independent auditors' report.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini audit kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup laporan tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas laporan tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca laporan tahunan saat tersedia dan, dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan apakah laporan tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (continued)

Other information (continued)

Our audit opinion on the accompanying financial statements does not cover the annual report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the annual report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the annual report when it becomes available and, in doing so, consider whether the annual report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini audit kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease its operations or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditors' report that includes our audit opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of such financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini audit atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an audit opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini audit kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor Independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our audit opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang kami identifikasi selama audit kami.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, serta mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan dan hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap Independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and contents of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal mana saja yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya merupakan hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak seharusnya dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikannya akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

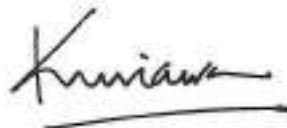
Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditors' report unless laws or regulation precludes public disclosure about such key audit matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditors' report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

17 Februari 2023/February 17, 2023



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2022	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021	
ASET				ASSETS
KAS	1.661.533	2a,2e,4	1.539.577	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	25.416.941	2a,2e, 2g,5	10.692.484	CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN		2a,2d		CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga	963.935	2e,2f,2g	1.000.338	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	508.322	6,43	96.460	<i>Related parties</i>
	1.472.257		1.096.798	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.747)		(1.698)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	1.470.510		1.095.100	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN		2a,2d 2e,2h,7,43		PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
Pihak ketiga	12.975.894		27.900.711	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	61		337	<i>Related parties</i>
	12.975.955		27.901.048	
EFEK-EFEK		2a,2d, 2e,2f,2i, 8,43		SECURITIES
Pihak ketiga	873.109		891.173	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	850.059		1.341.732	<i>Related parties</i>
	1.723.168		2.232.905	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.399)		(2.000)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	1.720.769		2.230.905	
OBLIGASI PEMERINTAH		2a,2d, 2e,2i,9,43		GOVERNMENT BONDS
Pihak berelasi	51.964.973		46.080.298	<i>Related parties</i>
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI		2e 2f, 2u,10		SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL
Pihak ketiga	1.434.190		1.598.325	<i>Third parties</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POS'ISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2022	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH		2d,2e,2f, 2j,2k,11,43		LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES
Kredit yang diberikan				Loans
Pihak ketiga	247.217.823		229.174.514	Third parties
Pihak berelasi	19.439.742		18.110.919	Related parties
	266.657.565		247.285.433	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.104.914)		(13.165.897)	Allowance for impairment losses
	252.552.651		234.119.536	
Pembiayaan/piutang syariah				Sharia financing/receivables
Pihak ketiga	31.367.082		27.102.484	Third parties
Pihak berelasi	257.057		447.374	Related parties
	31.624.139		27.549.858	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.570.009)		(1.269.863)	Allowance for impairment losses
	30.054.130		26.279.995	
	282.606.781		260.399.531	
TAGIHAN DERIVATIF		2e		DERIVATIVE RECEIVABLES
Pihak ketiga	103.939	2an,12	31.017	Third parties
TAGIHAN AKSEPTASI		2d,2e,2f 2l,13,43		ACCEPTANCES RECEIVABLES
Pihak ketiga	289.206		-	Third parties
Pihak berelasi	131.356		454.140	Related parties
	420.562		454.140	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(136)		(623)	Allowance for impairment losses
	420.426		453.517	
ASET TETAP		2n,2o, 14,36		PREMISES AND EQUIPMENT
Biaya perolehan/nilai revaluasi	10.599.848		9.468.655	Cost/revaluation value
Akumulasi penyusutan	(4.246.045)		(3.731.864)	Accumulated depreciation
	6.353.803		5.736.791	
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	10.750.302	2e,15	9.173.536	INTEREST RECEIVABLES
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	2.915.428	2ag,38	2.430.660	DEFERRED TAX ASSETS - NET
ASET LAIN-LAIN	2.352.762	2e,2p, 2q,2am,16	2.505.522	OTHER ASSETS
TOTAL ASET	402.148.312		371.868.311	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2022	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	3.205.358	2e,2r,17	3.654.236	LIABILITIES DUE IMMEDIATELY
SIMPANAN DARI NASABAH		2d,2e,2s,43		DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Giro		18		Demand deposits
Pihak ketiga	17.636.481		12.806.732	Third parties
Pihak berelasi	87.264.437		60.556.142	Related parties
	<u>104.900.918</u>		<u>73.362.874</u>	
Giro <i>Wadiah</i>		18		<i>Wadiah demand deposits</i>
Pihak ketiga	1.783.134		1.176.350	Third parties
Pihak berelasi	6.841.675		4.179.603	Related parties
	<u>8.624.809</u>		<u>5.355.953</u>	
	<u>113.525.727</u>		<u>78.718.827</u>	
Tabungan		19		Saving deposits
Pihak ketiga	35.656.990		46.363.367	Third parties
Pihak berelasi	525.339		436.034	Related parties
	<u>36.182.329</u>		<u>46.799.401</u>	
Tabungan <i>Wadiah</i>		19		<i>Wadiah saving deposits</i>
Pihak ketiga	1.192.775		1.149.143	Third parties
Pihak berelasi	943		1.096	Related parties
	<u>1.193.718</u>		<u>1.150.239</u>	
	<u>37.376.047</u>		<u>47.949.640</u>	
Deposito berjangka		20		Time deposits
Pihak ketiga	66.808.185		53.067.211	Third parties
Pihak berelasi	79.389.842		93.453.378	Related parties
	<u>146.198.027</u>		<u>146.520.589</u>	
Total simpanan dari nasabah	<u>297.099.801</u>		<u>273.189.056</u>	Total deposits from customers

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2022	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
SIMPANAN DARI BANK LAIN		2e,2t, 21		DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Pihak ketiga	136.408		66.007	Third parties
LIABILITAS AKSEPTASI				ACCEPTANCES PAYABLE
Pihak ketiga	302.037	2d,2e,2l	292.220	Third parties
Pihak berelasi	118.525	22,43	161.920	Related parties
	<u>420.562</u>		<u>454.140</u>	
LIABILITAS DERIVATIF		2e,2an		DERIVATIVE PAYABLE
Pihak ketiga	-	12	17.741	Third parties
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN		1c,2d, 2e, 2v,23,43		SECURITIES ISSUED
Pihak ketiga	4.297.252		8.094.441	Third parties
Pihak berelasi	4.355.008		4.277.267	Related parties
	<u>8.652.260</u>		<u>12.371.708</u>	
PINJAMAN YANG DITERIMA		2d,2e,2w, 24,43		FUND BORROWINGS
Pihak ketiga	7.365.320		6.499.997	Third parties
Pihak berelasi	17.455.685		15.562.294	Related parties
	<u>24.821.005</u>		<u>22.062.291</u>	
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	629.366	2e,26	496.725	INTEREST PAYABLE
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	4.719	2d,2e,2af 27,38,43	3.644	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	7.248.985	2d,2e,2ae 28,40,43	6.618.300	EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES
PINJAMAN SUBORDINASI DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI		2d,2e,2x		SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES
Pihak ketiga	4.658.242	25,43	4.259.776	Third parties
Pihak berelasi	4.499.977		4.499.968	Related parties
	<u>9.158.219</u>		<u>8.759.744</u>	
TOTAL LIABILITAS	<u>351.376.683</u>		<u>327.693.592</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2022	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
SIMPANAN NASABAH		2d,2e,2aa		DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Giro <i>Mudharabah</i>		43,18		<i>Mudharabah current accounts</i>
Pihak ketiga	468.889		467.333	Third parties
Pihak berelasi	11.897		12.281	Related parties
	<u>480.786</u>		<u>479.614</u>	
Tabungan <i>Mudharabah</i>		19		<i>Mudharabah saving deposits</i>
Pihak ketiga	4.730.686		3.466.529	Third parties
Pihak berelasi	88.427		505.563	Related parties
	<u>4.819.113</u>		<u>3.972.092</u>	
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>		20		<i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga	11.886.366		8.887.336	Third parties
Pihak berelasi	7.637.191		9.424.102	Related parties
	<u>19.523.557</u>		<u>18.311.438</u>	
Total simpanan nasabah	<u>24.823.456</u>		<u>22.763.144</u>	<i>Total deposits from customers</i>
SIMPANAN DARI BANK LAIN		2e,2aa		DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Giro <i>Mudharabah</i>		21		<i>Mudharabah current accounts</i>
Pihak ketiga	56		46	Third parties
Tabungan <i>Mudharabah</i>		21		<i>Mudharabah saving deposits</i>
Pihak ketiga	19.674		1.882	Third parties
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>		21		<i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga	19.089		3.000	Third parties
Total simpanan dari bank lain	<u>38.819</u>		<u>4.928</u>	<i>Total deposits from other banks</i>
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	<u>24.862.275</u>		<u>22.768.072</u>	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021				Capital stock - Rp500 par value per share (full amount) as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021				Authorized capital 20,478,432,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of Series A Dwiwarna and 20,478,431,999 shares of series B) as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	5.295.000	2y,29a	5.295.000	Issued and fully paid capital 10,590,000,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 10,589,999,999 shares of series B as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Tambahan modal disetor	2.054.454	29b	2.054.454	Additional paid-in capital
Dana setoran modal	2.756.575	29d	-	Capital deposit fund
Keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain- setelah pajak tangguhan	(1.193.252)	2i	87.817	Net unrealized gain allowance for impairment losses on securities and government at fair value through other comprehensive income net of deferred tax
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(409.657)	2ae	(458.153)	Remeasurement of defined benefit plan - net of deferred tax
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(49.301)	2an,12	(19.983)	Effective portion of cash flow hedge
Surplus revaluasi aset tetap	3.508.565	2n,14	3.307.991	Revaluation surplus of premises and equipment
Saldo laba ^{*)}				Retained earnings ^{*)}
Telah ditentukan penggunaannya	10.745.157		8.606.555	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	3.201.813	2b,2y	2.532.966	Unappropriated
TOTAL EKUITAS	25.909.354		21.406.647	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	402.148.312		371.868.311	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

^{*)} Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

^{*)} Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 was eliminated as a result of quasi-reorganization on May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2022	Catatan/ Notes	2021	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Bunga	23.233.200	2ab,2ac 30a	23.413.857	<i>Interest Income and Income from Profit Sharing Interest</i>
Bagi hasil dan marjin unit syariah	2.674.168	2ad,30b	2.381.101	<i>Profit sharing and margin from sharia unit</i>
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	25.907.368		25.794.958	<i>Total Interest Income and Income from Profit Sharing</i>
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus				<i>Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses</i>
Bunga	(9.866.919)	2ab,31a	(11.670.728)	<i>Interest</i>
Beban pendanaan lainnya	(169.804)		(177.585)	<i>Other financing expenses</i>
Bonus simpanan <i>Wadiah</i>	(57.558)	2ad,31b	(32.175)	<i>Wadiah Bonus</i>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil <i>Mudharabah</i>	(815.803)	2ad,31b	(923.167)	<i>Third parties' share on return of Mudharabah</i>
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(10.910.084)		(12.803.655)	<i>Total Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses</i>
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	14.997.284		12.991.303	<i>Interest Income and Income from Profit Sharing - Net</i>
Pendapatan Operasional Lainnya				<i>Other Operating Income</i>
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	965.441		852.953	<i>Administration fees and penalties on deposits and loans</i>
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	431.591		304.810	<i>Income from recovery of loans written-off</i>
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	-	2i,8	76.734	<i>Gain on sale of securities - net</i>
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	-	2i,9	818.679	<i>Gain on sale of government bonds - net</i>
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	55.045	2i,9	-	<i>Unrealized gain on changes in fair value of bonds - net</i>
Lain-lain	822.775	32	463.507	<i>Others</i>
Total Pendapatan Operasional Lainnya	2.274.852		2.516.683	<i>Total Other Operating Income</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan	(4.017.378)	2e,2p,33	(3.627.477)	<i>Provision for Impairment Losses on Financial and Non-financial Assets</i>
(Penyisihan) pembalikan Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	(1.075)	27	2.845	<i>(Provision for) reversal of Estimated losses on Commitment and Contingencies</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2022	Catatan/ Notes	2021	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS (continued)
Beban Operasional Lainnya				Other Operating Expenses
Umum dan administrasi	(3.754.028)	34	(3.358.846)	General and administrative
Gaji dan tunjangan karyawan	(4.190.298)	2ae,2d,35,43	(3.782.925)	Salaries and employee benefits
Premi program penjaminan pemerintah	(599.991)	42	(619.667)	Premium on government's guarantee program
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	-	2i,9	(18.778)	Unrealized losses on changes in fair value of government bonds - net
Kerugian dari penjualan obligasi pemerintah - neto	(266.235)	2i,9	-	Loss on sale of government bonds - net
Kerugian dari penjualan efek-efek - neto	(234.089)	2i,8	-	Loss on sale of securities - net
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	(64.931)	2i	(135.338)	Unrealized losses on changes in fair value of securities - net
Lain-lain	(329.308)	36	(930.968)	Others
Total Beban Operasional Lainnya	(9.438.880)		(8.846.522)	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL	3.814.803		3.036.832	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	60.887	37	(43.512)	NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.875.690		2.993.320	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	(830.617)	2ag,38	(617.093)	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	3.045.073		2.376.227	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income:
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Surplus revaluasi aset tetap	200.574	2n,14	-	Surplus revaluation of fixed asset
Pengukuran kembali program imbalan pasti	59.872	2ae,40	75.005	Remeasurement of defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(11.376)		(1.484)	Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Bagian efektif lindung nilai - arus kas	(40.883)		(18.744)	Effective part of hedging-cash flow
Kerugian neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.576.967)	2i,8,9	(1.259.616)	Net unrealized (loss) on changes in value of fair value through other comprehensive income securities and government bonds

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2022	Catatan/ Notes	2021	
Penghasilan Komprehensif Lain: (lanjutan)				Other Comprehensive Income: (continued)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi (lanjutan)				Items that will be reclassified to profit or loss (continued)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	307.463		247.414	Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.983.756		1.418.802	Total Comprehensive Income for the Year
LABA PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
Dasar (nilai penuh)	288	2ai,48	224	Basic (full amount)
Dilusian (nilai penuh)	279	2ai,48	218	Diluted (full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 For the Year Ended December 31, 2022
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahkan Modal disetor/ Additional Paid-in Capital	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dan Cadangan kerugian penurunan nilai atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-Neto/ Unrealized Gain (Loss) and allowance for impairment losses on FVTOCI Securities and Government Bonds - Net	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Premises and Equipment	Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas/ Effective Portion of Cash Flow Hedges	Saldo Laba/ Retained Earnings*)		Ekuitas/ Equity	
								Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2020		5.295.000	2.054.454	1.100.019	(531.674)	3.307.991	(1.239)	7.004.198	1.759.096	19.987.845	Balance as of December 31, 2021
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,14,40	-	-	(1.012.202)	73.521	-	(18.744)	-	2.376.227	1.418.802	Total comprehensive income (loss) for the year
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	29c	-	-	-	-	-	-	1.602.357	(1.602.357)	-	Appropriation for general and special reserves
Saldo per 31 Desember 2021		5.295.000	2.054.454	87.817	(458.153)	3.307.991	(19.983)	8.606.555	2.532.966	21.406.647	Balance as of December 31, 2021

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

								<u>Saldo Laba/ Retained Earnings*</u>				
	Catatan/ Notes	Modal Ditempat kan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahan Modal disetor/ Additional Paid-in Capital	Dana Setoran Modal/ Deposit capital fund	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dan Cadangan kerugian penurunan nilai atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-Neto/ Unrealized Gain (Loss) and allowance for impairment losses on FVTOCI Securities and Government Bonds - Net	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Premises and Equipment	Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas/ Effective Portion of Cash Flow Hedges	Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Ekuitas/ Equity	
Saldo per 31 Desember 2021		5.295.000	2.054.454	-	87.817	(458.153)	3.307.991	(19.983)	8.606.555	2.532.966	21.406.647	Balance as of December 31, 2021
Total Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,12,40	-	-	-	(1.281.069)	48.496	200.574	(29.318)	-	3.045.073	1.983.756	Total comprehensive income (loss) for the year
Dana setoran modal	29d	-	-	2.756.575	-	-	-	-	-	-	2.756.575	Capital deposit fund
Dividen	29c	-	-	-	-	-	-	-	-	(237.624)	(237.624)	Dividend
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	29c	-	-	-	-	-	-	-	2.138.602	(2.138.602)	-	Appropriation for general and special reserves
Saldo per 31 Desember 2022		5.295.000	2.054.454	2.756.575	(1.193.252)	(409.657)	3.508.565	(49.301)	10.745.157	3.201.813	25.909.354	Balance as of December 31, 2022

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2022	Catatan/ Notes	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan marjin	24.331.326		22.427.061 <i>Interest, profit sharing, and margin</i>
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	503.307		362.436 <i>Recoveries from loan written-off</i>
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(10.775.222)		(13.027.787) <i>Interest and bonus, fees and commissions paid</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.001.324)		(820.461) <i>Corporate income tax paid</i>
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	402.428		- <i>Recoveries from tax assessment letter</i>
Beban operasional lainnya - neto	(6.896.183)		(5.927.136) <i>Other operating expenses - net</i>
Beban bukan operasional lainnya - neto	13.828		(27.932) <i>Other non-operating expense - net</i>
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	6.578.160		2.986.181 <i>Cash receipts before changes in operating assets and liabilities</i>
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			<i>Changes in operating assets and liabilities:</i>
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:			<i>Decrease (increase) in operating assets:</i>
Penempatan pada bank lain	-		947.105 <i>Placement from other banks</i>
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(104.885)		849.641 <i>Fair value through profit or loss securities</i>
Obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(4.955.939)		4.842.769 <i>Fair value through profit or loss government bonds</i>
Tagihan akseptasi	33.578		(258.069) <i>Acceptance receivable</i>
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	(26.318.471)		(16.988.247) <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
Aset lain-lain	(196.503)		1.241.584 <i>Other assets</i>
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:			<i>Increase (decrease) in operating liabilities:</i>
Liabilitas segera	(466.852)		(1.120.009) <i>Current liabilities</i>
Simpanan dari nasabah			<i>Deposits from customer</i>
Giro	31.538.044		4.762.109 <i>Demand deposits</i>
Giro <i>Wadiah</i>	3.268.857		2.270.858 <i>Wadiah demand deposits</i>
Tabungan	(10.617.072)		8.099.264 <i>Savings deposits</i>
Tabungan <i>Wadiah</i>	43.479		245.030 <i>Savings deposits Wadiah</i>
Deposito berjangka	(322.562)		(1.338.019) <i>Time deposits</i>
Simpanan dari bank lain	70.400		36.127 <i>Deposits from other banks</i>
Liabilitas akseptasi	(33.578)		258.069 <i>Acceptance liabilities</i>
Liabilitas lain-lain	654.214		(206.114) <i>Other liabilities</i>
Dana <i>syirkah</i> temporer	2.094.203		2.923.653 <i>Temporary syirkah funds</i>
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.265.073		9.551.932 Net Cash provided by Operating Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2022	Catatan/ Notes	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek biaya perolehan diamortisasi	199.964		-	<i>Proceeds from matured amortized cost securities</i>
Perolehan aset tetap	(1.042.464)	14	(415.473)	<i>Acquisitions of premises and equipment</i>
Penurunan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	381.580		330.249	<i>Decrease in fair value through other comprehensive income</i>
Penurunan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.714.402		10.722.233	<i>Decrease in fair value through other comprehensive income government bonds</i>
Pembelian obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi	(7.816.426)		(5.922.417)	<i>Purchase of amortized cost government bonds</i>
Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-		(236.767)	<i>Purchase of amortized cost securities</i>
Penempatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(165.520.488)		(433.519.302)	<i>Placement of securities purchased under agreement to resell</i>
Penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	165.683.898		432.875.932	<i>Cash receipt from securities purchased under agreement to resell</i>
Kas Neto (digunakan untuk) diperoleh dari Aktivitas Investasi	(2.399.534)		3.834.455	Net Cash (Used in) Provided by Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	1.541.330		10.186	<i>Proceeds from issuance of securities</i>
Pembayaran atas surat-surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo	(5.263.000)		(3.455.000)	<i>Payment of matured securities issued</i>
Penerimaan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	592.326		1.716.191	<i>Proceeds from securities sold under repurchase agreements</i>
Pembayaran atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali jatuh tempo	(592.326)		(1.716.191)	<i>Payments of matured securities sold under repurchase agreements</i>
Pembayaran dividen	(237.624)	29c	-	<i>Payments of dividends</i>
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	11.814.826		6.455.429	<i>Proceeds of fund borrowings</i>
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(9.095.884)		(8.204.691)	<i>Payment from fund borrowings</i>
Penerimaan dari efek-efek subordinasi	-		1.500.000	<i>Proceeds from subordinated securities</i>
Pembayaran liabilitas sewa	(84.983)	28	(99.959)	<i>Payment of lease liabilities</i>
Pembayaran atas pinjaman dan efek-efek subordinasi jatuh tempo	-		(3.000.000)	<i>Payments of matured Subordinated Loan and Securities</i>
Dana setoran modal	2.756.575		-	<i>Capital deposit fund</i>
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan	1.431.240		(6.794.035)	Net Cash Provided by (used in) Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	296.779		6.592.352	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	41.229.907		34.637.555	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	41.526.686		41.229.907	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2022	Catatan/ Notes	2021	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:				The details of cash and cash equivalents at end of year are as follows:
Kas	1.661.533	2a,4	1.539.577	Cash
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	2g,5	10.692.484	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.472.257	2g,6	1.096.798	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	12.975.955	2h,7	27.901.048	Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months or less since the acquisition date
Total	41.526.686		41.229.907	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Bank telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka telah diaktakan dengan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH.01.02. tahun 2009.

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was originally established as a state-owned bank under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank was changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H., and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 dated August 12, 1992 and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the Directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

The Bank has obtained approval from Bank Indonesia to conduct commercial banking activities based on sharia principles through letter No. 6/1350/DPbS dated December 15, 2004.

The Bank started its activities based on sharia principles on February 14, 2005 with the operation of its first sharia branch in Jakarta - Harmoni.

The decision of the Extraordinary General Stockholders' Meeting to amend all of the Bank's Articles of Association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H., The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH.01.02. of 2009.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyesuaian terakhir dinyatakan dalam Akta No. 08 tanggal 8 April 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Maret 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank memiliki 110 kantor cabang (termasuk 30 kantor cabang syariah), 606 kantor cabang pembantu (termasuk 69 kantor cabang pembantu syariah), dan 5 kantor kas syariah (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2021, Bank memiliki 108 kantor cabang (termasuk 29 kantor cabang syariah), 401 kantor cabang pembantu (termasuk 61 kantor cabang pembantu syariah), dan 210 kantor kas (termasuk 7 kantor kas syariah) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The amendment was covered by Notarial Deed No. 08 dated April 8, 2021 of Ashoya Ratam, S.H., MKn., a notary in Jakarta, as approved in the Annual General Shareholders' Meeting on March 10, 2021 and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0288922 dated May 4, 2021.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on sharia principles.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2022, the Bank has 110 branch offices (including 30 sharia branch offices), 606 sub-branch offices (including 69 sharia sub-branch offices), and 5 sharia cash offices (unaudited).

As of December 31, 2021, the Bank has 108 branch offices (including 29 sharia branch offices), 401 sub-branch offices (including 61 sharia sub-branch offices), and 210 cash offices including 7 sharia cash offices (unaudited).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000.

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the Government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would become Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively.

On February 28, 2001, the Bank's Directors and the Ministry of Finance entered into a Management Contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 which should be returned to the Government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the government.

As a result of the Management Contract, the Ministry of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the Government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the Government's rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero), as a limited liability company, in relation to the commercial banks' recapitalization program through conversion of additional capital to 13,843,540 shares of stock, which were issued by the Bank with a par value of Rp1,000,000 (full Rupiah) per share. This regulation was applied retroactively since May 31, 2007.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond*, 5 (lima) kali penerbitan surat hutang jangka panjang sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Rupiah				
Obligasi BTN I/ <i>BTN Bonds I</i>	50.000	5 tahun/years	25 Juli/ July 25, 1994*)	18,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN II/ <i>BTN Bonds II</i>	50.000	5 tahun/years	1 Juni/ June 1, 1995*)	16,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN III/ <i>BTN Bonds III</i>	50.000	5 tahun/years	11 November/ November 11, 1996*)	20,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN IV/ <i>BTN Bonds IV</i>	100.000	5 tahun/years	23 Januari/ January 23, 1996*)	17,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN V/ <i>BTN Bonds V</i>	150.000	5 tahun/years	31 Juli/ July 31, 1998*)	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 15.25% fixed for first and second years, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VI/ <i>BTN Bonds VI</i>	350.000	5 tahun/years	21 Desember/ December 21, 2000*)	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VII/ <i>BTN Bonds VII</i>	200.000	5 tahun/years	22 Juli/ July 22, 2001*)	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VIII/ <i>BTN Bonds VIII</i>	400.000	5 tahun/years	18 Juli/ July 18, 2002*)	14,15% tetap/ fixed
Obligasi BTN IX/ <i>BTN Bonds IX</i>	750.000	5 tahun/years	2 Oktober/ October 2, 2008*)	12,50% tetap/ fixed
Obligasi BTN X/ <i>BTN Bonds X</i>	750.000	5 tahun/years	25 Mei/ May 25, 2009*)	12,20% tetap/ fixed
Obligasi BTN XI/ <i>BTN Bonds XI</i>	750.000	5 tahun/years	6 Juli/ July 6, 2010*)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XII/ <i>BTN Bonds XII</i>	1.000.000	10 tahun/years	19 September/ September 19, 2016*)	12,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII A/ <i>BTN Bonds XIII A</i>	300.000	3 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2012*)	11,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII B/ <i>BTN Bonds XIII B</i>	300.000	4 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2013*)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII C/ <i>BTN Bonds XIII C</i>	900.000	5 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2014*)	12,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIV/ <i>BTN Bonds XIV</i>	1.650.000	10 tahun/years	11 Juni/ June 11, 2020*)	10,25% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds

The Bank issued 24 (twenty-four) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 5 (five) series of long term notes from July 25, 1989 to December 31, 2022, with the details as follows:

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond*, 5 (lima) kali penerbitan surat hutang jangka panjang sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN XV/ BTN Bonds XV	1.300.000	10 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2021*)	9,50% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BTN/ Continuing Bonds I Phase I BTN	2.000.000	10 tahun/years	5 Juni/ June 5, 2022*)	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II BTN/ Continuing Bonds I Phase II BTN	2.000.000	10 tahun/years	27 Maret/ March 27, 2023	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I BTN/ Continuing Bonds II Phase I BTN				
Seri A/A Series	900.000	3 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2018*)	9,63% tetap/ fixed
Seri B/B Series	500.000	5 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2020*)	9,88% tetap/ fixed
Seri C/C Series	800.000	7 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2022*)	10,00% tetap/ fixed
Seri D/D Series	800.000	10 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2025	10,50% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II BTN/ Continuing Bonds II Phase II BTN				
Seri A/A Series	1.347.000	3 tahun/years	30 Agustus/ August 30, 2019*)	8,20% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.653.000	5 tahun/years	30 Agustus/ August 30, 2021*)	8,75% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I BTN/ Continuing Bonds III Phase I BTN				
Seri A/A Series	1.466.000	3 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2020*)	8,30% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.295.000	5 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2022*)	8,50% tetap/ fixed
Seri C/C Series	853.000	7 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2024	8,70% tetap/ fixed
Seri D/D Series	1.386.000	10 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2027	8,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II BTN/ Continuing Bonds III Phase II BTN				
Seri A/A Series	1.756.500	1 tahun/year	8 Juli/ July 8, 2020*)	7,75% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.168.000	3 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2022*)	8,75% tetap/ fixed
Seri C/C Series	1.219.500	5 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2024	9,00% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds (continued)

The Bank issued 24 (twenty-four) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of *global bond*, 5 (five) series of long term notes from July 25, 1989 to December 31, 2022, with the details as follows: (continued)

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond*, 5 (lima) kali penerbitan surat hutang jangka panjang sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi Subordinasi BTN I/ <i>Subordinated Bonds BTN I</i>	250.000	10 tahun/years	25 Mei/ <i>May 25, 2014**</i>	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun keenam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ <i>12.60% fixed for first year until fifth year, 22.60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its option to buyback on the fifth year since the issuance date</i>
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I BTN/ <i>Continuing Bonds IV Phase I BTN</i>				
Seri A/A Series	577.000	1 tahun/year	29 Agustus/ <i>August 29, 2021*</i>	6,75% tetap/ <i>fixed</i>
Seri B/B Series	727.000	3 tahun/years	19 Agustus/ <i>August 19, 2023</i>	7,80% tetap/ <i>fixed</i>
Seri C/C Series	196.000	5 tahun/years	19 Agustus/ <i>August 19, 2025</i>	8,40% tetap/ <i>fixed</i>
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2021/ <i>Long Term Notes BTN Phase 1 2021</i>	10.186	16 tahun/years	17 Juni/ <i>June 17, 2037</i>	1,37% tetap/ <i>fixed</i>
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri A 2022/ <i>Long Term Notes BTN Series A 2022</i>	47.740	14 tahun/years	12 Oktober/ <i>October 12, 2036</i>	1,37% tetap/ <i>fixed</i>
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri B 2022/ <i>Long Term Notes BTN Series B 2022</i>	79.379	15 tahun/years	12 April/ <i>April 12, 2037</i>	0,55% tetap/ <i>fixed</i>
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2022. <i>Long Term Notes BTN Phase I 2022</i>	210.866	15 tahun/years	14 Juni/ <i>June 14, 2037</i>	0,55% tetap/ <i>fixed</i>
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap II 2022/ <i>Long Term Notes BTN Phase II 2022</i>	131.185	14 tahun/years	28 Maret/ <i>March 28, 2037</i>	0,55% tetap/ <i>fixed</i>
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II BTN/ <i>Continuing Bonds IV Phase II BTN</i>				
Seri A/A Series	600.000	3 tahun/year	24 Mei/ <i>May 24, 2025</i>	5,50% tetap/ <i>fixed</i>
Seri B/B Series	400.000	5 tahun/years	24 Mei/ <i>May 24, 2027</i>	6,00% tetap/ <i>fixed</i>
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar BBTN September or Global Bond 2020/ <i>BBTN September or Global Bond 2020</i>	300.000.000	5 tahun/years	23 Januari/ <i>January 23, 2025</i>	4,20% tetap/ <i>fixed</i>

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds (continued)

The Bank issued 24 (twenty-four) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 5 (five) series of long term notes from July 25, 1989 to December 31, 2022, with the details as follows: (continued)

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

**) The Bank has exercised the call options on May 25, 2009

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW.01/3104/DPRI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (Rupiah penuh) per saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lock up* selama enam bulan.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO)

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its Chairman Letter No. PW.01/3104/DPRI/V/2009 dated May 29, 2009 and was enacted by the Government as stipulated by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 66 of 2009 and circulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the State through Initial Public Offering of the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the Registration Statement submitted by the Bank relating to the IPO of 6,353,999,999 ordinary shares Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 new ordinary shares Series B, at par value of Rp500 (full Rupiah) per share to the public, became effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, with the selling price of Rp800 (full Rupiah) per share.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of December 31, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees availed of the program consisting of 226,928,500 Series B shares (with par value of Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering price of Rp800 per share) and a lock up period until six months.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)
(lanjutan)**

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

e. Penerapan kuasi reorganisasi

Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang disebabkan terutama oleh melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga yang tidak stabil, sangat langkanya likuiditas serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak yang buruk bagi industri perbankan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada para debitur Bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Bank mengalami defisit yang cukup besar.

Untuk memperoleh awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Bank melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Mei 2007 (Catatan 2c). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Bank sebagai langkah penting untuk bisa meneruskan usaha secara lebih baik.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tanggal 19 Januari 2006, pemegang saham Bank memutuskan antara lain bahwa pemegang saham mendukung rencana Bank untuk melakukan Kuasi-Reorganisasi dalam rangka menetapkan besarnya nilai akhir Penyertaan Modal Negara dalam Bank dan perbaikan struktur modal Bank, dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai hasil dari Kuasi-Reorganisasi, saldo defisit Bank sebesar Rp14.226.290 dieliminasi ke akun saldo laba.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO) (continued)

In relation to the Initial Public Offering of the share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

e. Implementation of quasi - reorganization

The unfavorable economic condition starting in mid-1997 until 1999, which was caused mainly by the weakening of the rupiah in relation to other foreign currencies such as the United States dollar, the instability of interest rates, liquidity problem and the low level of trust by investors, had an adverse impact to the banking industry in Indonesia. This condition also affected the Bank debtors in fulfilling their obligations. As a result, the Bank suffered a significant amount of deficit.

In order to make a fresh start with a statement of financial position showing present values without the burden of deficit, the Bank conducted a Quasi-Reorganization on May 31, 2007 (Note 2c). The Quasi-Reorganization was recognized by the Bank as a necessary step to positively continue its business.

In the Bank's General Stockholders' Meeting held on January 19, 2006 regarding the Approval of the Bank's Budget and Work Plan, the stockholders approved, among others, the Bank's plan to conduct the Quasi-Reorganization in order to determine the final amount of the Government's capital contribution and to restructure the Bank's capital, which should be implemented according to the prevailing regulations.

As a result of the quasi-reorganization, the Bank's deficit balance amounting to Rp14,226,290 was eliminated against the net amount of the retained earnings.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 04 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Komisaris Utama/Independen	Chandra M. Hamzah
Wakil Komisaris Utama/Independen	Iqbal Latanro
Komisaris	Heru Budi Hartono****
Komisaris	Andin Hadiyanto
Komisaris	Herry Trisaputra Zuna***
Komisaris	Himawan Arief Sugoto**
Komisaris Independen	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	Ahdi Jumhari Luddin
Komisaris Independen	Sentot A. Sentausa*

* Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 8 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 31/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

** Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 3 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-149/D.03/2022 tanggal 3 Oktober 2022.

*** Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-162/D.03/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

****Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/X/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 04 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

December 31, 2022

President/Independent Commissioner	Chandra M. Hamzah
Vice President/Independent Commissioner	Iqbal Latanro
Commissioner	Heru Budi Hartono****
Commissioner	Andin Hadiyanto
Commissioner	Herry Trisaputra Zuna***
Commissioner	Himawan Arief Sugoto**
Independent Commissioner	Armand Bachtiar Arief
Independent Commissioner	Ahdi Jumhari Luddin
Independent Commissioner	Sentot A. Sentausa*

* Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on August 8, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. 31/KDK.03/2022 dated August 8, 2022.

** Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on October 3, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. KEP-149/D.03/2022 dated October 3, 2022.

*** Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on October 11, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. KEP-162/D.03/2022 dated October 11, 2022.

**** Based on Company Letter No. 582/DIR/CSD/X/2022 regarding Report on Material Information or Facts dated October 14, 2022, Heru Budi Hartono's term of office as a member of the Company's Board of Commissioners ended since his inauguration as Acting Governor of the Special Capital Region of Jakarta on October 17, 2022. In connection with the expiration of Heru Budi Hartono, the Company will hold a General Meeting of Shareholders to comply with the provisions of the laws and regulations and the Company's articles of association.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 10 Maret 2021, dengan berita acara No. 09 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021

Komisaris Utama/Independen
Wakil Komisaris Utama/Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Chandra M. Hamzah
Iqbal Latanro*
Eko Djoeli Heripoerwanto
Heru Budi Hartono
Andin Hadiyanto
Armand Bachtiar Arief
Ahdi Jumhari Luddin

* Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 10 Maret 2021 dan efektif sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 58/KDK.03/2021 tertanggal 6 Agustus 2021.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 04 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur *Consumer*
Direktur *Finance*
Direktur *Human Capital,
Compliance and Legal*
Direktur *Assets Management*
Direktur *IT and Digital*
Direktur *Distribution and Funding*
Direktur *Risk Management*

Haru Koesmahargyo
Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Hirwandi Gafar
Nofry Rony Poetra

Eko Waluyo
Elisabeth Novie Riswanti
Andi Nirwoto
Jasmin
Setiyo Wibowo

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 10, 2021, as stated under the notarial No. 09 by Notary Ashoya Ratam, S.H., MKn., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

December 31, 2021

President/Independent Commissioner
Vice President/Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

* Appointed as Deputy President Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on March 10, 2021 and effective as Deputy President Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 58/KDK.03/2021 dated August 6, 2021.

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 04 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2022

President Director
Vice President Director
Director Consumer
Director Finance
Director Human Capital,
Compliance and Legal
Director Assets Management
Director IT and Digital
Director Distribution and Funding
Director Risk Management

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 10 Maret 2021, dengan berita acara No. 09 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur *Consumer and Commercial Lending*
Direktur *Finance, Planning and Treasury*
Direktur *Compliance and Legal*
Direktur *Wholesale Risk and Asset Management*
Direktur *Operation, IT, and Digital Banking*
Direktur *Distribution and Retail Funding*
Direktur *Risk Management and Transformation*

Haru Koesmahargyo*
Nixon L.P. Napitupulu**
Hirwandi Gafar
Nofry Rony Poetra***
Eko Waluyo****

Elisabeth Novie Riswanti
Andi Nirwoto
Jasmin
Setiyo Wibowo

* Diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 8 April 2021 dan efektif sebagai Direktur Utama dari Dewan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 47/KDK.03/2021 tertanggal 19 Mei 2021.

** Dialihkan penugasannya sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 8 April 2021 dan efektif sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 48/KDK.03/2021 tertanggal 19 Mei 2021.

*** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 8 April 2021 dan efektif sebagai anggota Dewan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 53/KDK.03/2021 tertanggal 9 Agustus 2021.

**** Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 8 April 2021 dan efektif sebagai anggota Dewan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat OJK Nomor 54/KDK.03/2021 tertanggal 9 Agustus 2021.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah sebesar Rp51.960 dan Rp38.010 (tidak diaudit) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 43b). Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada direksi adalah sebesar Rp131.671 dan Rp101.022 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 43b).

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 10, 2021, as stated under the notarial No. 09 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2021

President Director
Vice President Director
Director *Consumer and Commercial Lending*
Director *Finance, Planning and Treasury*
Director *Compliance and Legal*
Director *Wholesale Risk and Asset Management*
Director *Operation, IT, and Digital Banking*
Director *Distribution and Retail Funding*
Director *Risk Management and Transformation*

* Appointed as a President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on April 8, 2021 and effective as a President Director of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 47/KDK.03/2021 dated May 19, 2021.

** Reassigned as Deputy President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on April 8, 2021 and effective as a Deputy President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 48/KDK.03/2021 dated May 19, 2021.

*** Appointed as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on April 8, 2021 and effective as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 53/KDK.03/2021 dated August 9, 2021.

**** Appointed as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on April 8, 2021 and effective as a member of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on OJK Letter Number 54/KDK.03/2021 dated August 9, 2021.

Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Commissioners of the Bank amounted to Rp51,960 and Rp38,010 (unaudited) for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 43b). Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Directors of the Bank amounted to Rp131,671 and Rp101,022 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 43b).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Achmad Chaerul*
Hendratno Tri Wibowo

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 711/DIR/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 11 Juli 2022.

31 Desember 2021

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Ari Kurniaman
Hendratno Tri Wibowo*

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 642/DIR/2022 tanggal 26 Juli 2021 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 26 Juli 2021.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 4 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Ketua
Anggota
Anggota

M. Quraish Shihab
Mohamad Hidayat
Mohammad Bagus Teguh Perwira

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 10 Maret 2021, dengan berita acara No. 09 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021

Ketua
Anggota
Anggota

M. Quraish Shihab
Mohamad Hidayat
Mohammad Bagus Teguh Perwira*

* Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 8 April 2021.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

December 31, 2022

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 711/DIR/2022 dated July 7, 2022 and Head of Corporate Secretary Division since July 11, 2022.

December 31, 2021

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 642/DIR/2022 dated July 26, 2021 and Head of Internal Audit Division since July 26, 2021.

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 4 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn are as follows:

December 31, 2022

Chairman
Member
Member

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 10, 2021, as stated under the notarial No. 09 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn are as follows:

December 31, 2021

Chairman
Member
Member

* Appointed as a member of Bank's Sharia Supervisory Board of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the resolutions of the Annual General Meeting of the Company on April 8, 2021.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Ketua merangkap anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Iqbal Latanro

Ahdi Jumhari Luddin

Andin Hadiyanto

Sentot A. Sentausa*

Adi Prakoso

Peter Eko Budi Darwito**

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank No. 03/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022 dan berlaku efektif berdasarkan Surat OJK Nomor 31/KDK.03/2022 tertanggal 8 Agustus 2022.

** Diperpanjang masa jabatan sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank No. 108/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 9 November 2022

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KOM/BTN/2021 tanggal 24 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021

Ketua merangkap anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Iqbal Latanro*

Ahdi Jumhari Luddin

Andin Hadiyanto

Adi Prakoso

Peter Eko Budi Darwito

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank No. 01/KOM/BTN/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan berlaku efektif berdasarkan Surat OJK Nomor 58/KDK.03/2021 tertanggal 6 Agustus 2021.

Berdasarkan ketentuan internal Bank, manajemen kunci Bank cakupannya adalah Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang. Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah 10.711 dan 10.811 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 111/KOM/BTN/XI/2022 dated November 16, 2022 are as follows:

December 31, 2022

Chairman concurrently as a Member

Member

Member

Member

Member

Member

* Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 03/KOM/BTN/2022 dated March 17, 2022 and effective based on OJK Letter Number 31/KDK.03/2022 dated August 8, 2022.

* Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 108/KOM/BTN/XI/2022 dated November 9, 2022

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 01/KOM/BTN/2021 dated March 24, 2021 are as follows:

December 31, 2021

Chairman

Member

Member

Member

Member

* Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 01/KOM/BTN/2021 dated March 24, 2021 and effective based on OJK Letter Number 58/KDK.03/2021 dated August 6, 2021.

Based on the Bank's internal policy, key management consists of Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, Regional Office Head, Division Head, and Branch Manager. The Bank has permanent employees as of December 31, 2022 and 2021 of 10,711 and 10,811 employees, respectively (unaudited).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Amandemen 2019), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan unit syariah Bank yang didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2020) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Musyarakah*" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Sukuk*", PSAK No. 111 tentang "Akuntansi *Wa'd*" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (revisi 2013).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Statement of Compliance

The financial statements as of and for the year ended December 31, 2022 and 2021 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK's Regulation No. VIII.G.7, Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

The Financial Statements is presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No.1 (Amendment 2019), "Presentation of Financial Statements".

The financial statements of the Bank's sharia unit have been presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 101 (Revised 2020) on "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS No. 102 (Revised 2020) on "Accounting for *Murabahah*", SFAS No. 104 on "Accounting for *Istishna*", SFAS No. 105 on "Accounting for *Mudharabah*", SFAS No. 106 (Revised 2020) on "Accounting for *Musyarakah*" and SFAS No. 107 on "Accounting for *Ijarah*", which supersede SFAS No. 59 on "Accounting for Sharia Banking" associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, SFAS No. 110 (Revised 2020) on "Accounting for *Sukuk*", SFAS No. 111 on "Accounting for *Wa'd*" and other SFAS, as long as not contradict with sharia principles and the Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI) (revised 2013).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Statement of Compliance (continued)

The Financial Statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The Financial Statements have been prepared on accrual basis, except for the revenue from *istishna* and the profit sharing from the *mudharabah* and *musyarakah* financing and the statement of cash flow.

The statement of cash flows have been prepared using direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, Bank Indonesia Certificates and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the acquisition date provided they are neither pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The presentation currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statement are rounded off to millions of Rupiah.

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated to nil.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2022, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual". Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- b. Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak". Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan;
- c. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 per sen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan". Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli;
- d. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 73, "Sewa". Penyesuaian ini mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan";

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Kuasi-Reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policy

On January 1, 2022, there were new standards and adjustments or amendments for several prevailing standards and effective since that date, as follows:

- a. Amendment of SFAS No. 22, "Business Combinations to a Reference Conceptual Framework" This amendment clarifies the interaction between SFAS No. 22, SFAS No. 57, ISAK No. 30 and Financial Reporting Conceptual Framework ;
- b. Amendment of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets regarding to Onerous Contracts-Cost of Fulfilling the Contracts". This amendment clarifies the cost to fulfill a contract in order to determine whether a contract is onerous contract;
- c. Annual Adjustment 2020 - SFAS No. 71, "Financial Instrument - Fee under test "10 percent" for derecognition of a financial liability". The amendments clarify the costs included in the entity when assessing whether the terms of the new or modified financial liabilities are substantially different from the terms of the original financial liabilities.
- d. Annual Adjustment 2020 - SFAS No. 73 "Lease". This amendment clarifies the measurement by the lease and the recording of changes in the lease term regarding "rental properties repair"

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current or prior financial years.

c. Quasi-Reorganization

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Kuasi-Reorganisasi (lanjutan)

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas dalam rangka kuasi-reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas yang bersangkutan atau nilai pasar aset dan liabilitas yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan. Untuk aset dan liabilitas tertentu, penilaian dilakukan sesuai PSAK terkait.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

- a) suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- b) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- c) suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;
- d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
- e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank;
- g) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Quasi-Reorganization (continued)

The fair value estimate for assets and liabilities under a quasi-reorganization is determined based on the best available information according to the characteristics of the related assets and liabilities or the market value for the related assets and liabilities. If the market value is not available, the fair value estimation is conducted by considering the value of similar assets, present value estimation, or discounted cash flows. For certain assets and liabilities, the valuation is conducted according to the related SFAS.

d. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS No. 7, "Related Party Disclosures".

The Bank considers the following as its related parties:

- a) a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has significant influence over the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;
- b) an entity which is a member of the same group as the Bank;
- c) an entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;
- d) a member of key management personnel of the Bank;
- e) a close family member of the person described in clause (a) or (d);
- f) an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank;
- g) an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (d) or (e).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disetujui oleh kedua belah pihak dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Bank diungkapkan juga pada Catatan 43.

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penyertaan saham, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain (tagihan kepada pihak ketiga).

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, surat-surat berharga yang diterbitkan, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (setoran jaminan dan dana jaminan pengembang).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with related parties (continued)

Transactions with related parties are made on the term and conditions agreed by both parties where such terms may not be the same as transactions undertaken with third parties. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details have been presented in Note 43 of the financial statements. Furthermore, material transactions and balances between the Bank and the Government of the Republic of Indonesia (RI) and other entities related to the Bank are also disclosed in Note 43.

e. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, government bonds, securities purchased under agreement to resell, derivatives receivable, acceptance receivable, investment in shares, loans and sharia financing/receivables, interest receivable and other assets (third party receivables).

The Bank's financial liabilities consist of liabilities due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, securities issued, derivatives payable, acceptance payable, fund borrowings, subordinated loan, securities sold under repurchase agreements, interest payable and other liabilities (guarantee deposits and developers' security deposits).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya.

Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Bank melakukan pengujian karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang dikelola untuk mengetahui karakteristik arus kas kontraktual berasal hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (*Solely Payment of Principal and Interest* atau *Pass SPPI*) yang konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar (*Basic Lending Agreement*). Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Imbalan untuk nilai waktu dari uang;
- *Leverage*;
- Variabilitas pada waktu dan jumlah arus kas;
- Instrumen yang terkait secara kontraktual;
- Pembayaran dipercepat;
- Ketentuan kontrak tidak sah dan *de minimis*

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan amortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification

The Bank classified its financial assets in the following categories on initial recognition:

- Financial assets held at fair value through profit or loss (FVTPL);
- Financial assets held at Amortized cost;
- Financial assets held at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics.

The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

The Bank assess the contractual cash flow characteristics of financial assets to determine the characteristics of contractual cash flows only from the payment of principal and interest from the outstanding principal (*Solely Payment of Principal and Interest or Pass SPPI*) that is consistent with basic lending agreement. In making the assessment, the Bank considers:

- The time value of money element of interest;
- *Leverage*;
- Variability in timing or amount of cash flows;
- Contractually linked instruments;
- Prepayment;
- Non-genuine features and *de minimis*.

Financial assets are measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- Financial assets are managed where the business model objectives in order to collect the contractual cash flows; and
- The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan;
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) jika tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk diukur pada biaya perolehan amortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) if both of the following conditions are met:

- Financial assets are managed to collect the contractual cash flows and sell the assets; and
- The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) if do not meet the conditions required to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

(ii) Initial recognition

- a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date.
- b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value. For those financial assets or financial liabilities not measured at fair value through profit or loss. The fair value includes directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability.

The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *the determination of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan *credit derivatives* atau *spot* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan amortisasi, diukur pada biaya perolehan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

The fair value option is applied to certain loans and receivables that are hedged with credit derivatives or interest rate spot, but does not meet the criteria for hedge accounting. Otherwise, the loans would be recorded at amortized cost, while the derivatives are measured at fair value through profit or loss.

The fair value option is also applied to investment funds that are part of a portfolio managed on a fair value basis. Furthermore, the fair value option is applied to structured investments that include embedded derivatives.

(iii) Subsequent measurement

Fair value through other comprehensive income financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Assets and other financial liabilities which are measured at amortized cost, are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:

- The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

- Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*); dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognized when: (continued)

- The Bank has transferred its rights to receive cash flows arising from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without significant delay to a third party under a 'pass-through arrangement'; and either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a *pass-through arrangement*, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognized when: (continued)

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan

Penilaian apakah suatu aset keuangan telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dilakukan oleh unit bisnis yang berwenang melakukan modifikasi atau restrukturisasi aset keuangan pada saat unit bisnis tersebut melakukan tindakan modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan.

Modifikasi aset keuangan dianggap substansial dan Bank akan berhenti mengakui aset keuangan awal ketika:

- a. aset keuangan (atau bagiannya) berakhir, yaitu jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas aset tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur pembuatan kontrak kredit baru (sebagai contoh, opsi *equity conversion*); atau
- b. terdapat konversi mata uang.

Bank kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut:

- a. Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial:
 1. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) dimana renegosiasi atau modifikasi tersebut menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan baru/modifikasian pada tanggal modifikasi/negosiasi.
 2. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi.
 3. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets

An assessment of whether a financial asset has been modified substantially or not substantially is carried out by a business unit authorized to modify or restructure financial assets when the business unit carries out modification or restructuring of a financial asset.

Modifications to financial assets are considered substantial and the Bank will stop recognizing the original financial assets when:

- a. the financial asset (or part thereof) expires, that is, if the debtor is legally released from primary responsibility for the asset (or part thereof), either through legal process or by the creditor entering into a new credit contract (for example, the equity conversion option); or
- b. currency conversion.

The bank will then measure the modified financial assets either substantially or not substantially in the following manner:

- a. Substantial Modification of Financial Assets:
 1. When the contractual cash flows on a financial asset are renegotiated or modified (for example, when a credit is restructured) where the renegotiation or modification results in derecognition of the financial asset, the Bank will record the financial asset as a new / modified financial asset at the modification/negotiation date.
 2. The difference between the gross carrying amount of the original financial asset and the fair value of the modified asset is recognized in profit or loss.
 3. Income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan (lanjutan)

Bank kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut (lanjutan):

4. Selanjutnya, Bank melakukan penilaian apakah aset keuangan baru/modifikasian merupakan aset yang berasal dari aset keuangan memburuk.
5. Pengakuan pendapatan bunga atas aset yang berasal dari aset keuangan memburuk ditentukan berdasarkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan risiko kredit (*risk-adjusted effective interest rate*) untuk mendiskontokan arus kas aset keuangan yang telah dimodifikasi.

b. Modifikasi Aset Keuangan yang Tidak Substansial:

1. Saat Bank melakukan renegotiasi atau modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) yang tidak memenuhi kriteria modifikasi aset keuangan yang substansial di atas, maka renegotiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan.
2. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung sebesar nilai kini (*net present value*) dari arus kas kontraktual yang telah dimodifikasi atau direnegosiasi yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal.
3. Bank kemudian mengakui keuntungan atau kerugian dari modifikasi (yaitu sebesar perubahan jumlah tercatat bruto aset keuangan) dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets (continued)

The bank will then measure the modified financial assets either substantially or not substantially in the following manner (continue):

4. Subsequently, the Bank assesses whether the new / modified financial assets are those that arise from deteriorating financial assets.
5. Recognition of interest income on assets originating from deteriorating financial assets is determined based on the risk-adjusted effective interest rate to discount the cash flows of modified financial assets.

b. Non Substantial Modification of Financial Assets:

1. When the Bank renegotiates or modifies contractual cash flows for financial assets (among others when credit is restructured) that do not meet the criteria for substantial modification of financial assets above, the renegotiation or modification does not result in derecognition of financial assets.
2. The gross carrying amount of financial assets is computed at the net present value of modified or renegotiated contractual cash flows discounted at the original effective interest rate.
3. The Bank then recognizes the gain or loss from the modification (ie the change in the gross carrying amount of the financial asset) in the profit or loss.
4. Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as an adjustment to the carrying amount of the modified financial asset and amortized over the remaining term of the modified financial asset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban

(vi) *Income and expense recognition*

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- a. *Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.*

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

- b. Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan (yaitu: instrumen utang yang dimiliki oleh Bank) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diakui dalam laporan laba rugi, kecuali:

- bagian dari hubungan lindung nilai;
- investasi dalam instrumen ekuitas dan Bank telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain;
- liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan Bank disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain;
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan Bank disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Income and expense recognition (continued)

- b. Gain and losses on financial assets (which is debt instrument hold by Bank) measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) are recognized at other comprehensive income, except losses on impairment, until those financial instrument derecognized, unrealized gain and losses record on other comprehensive income reclassified from equity to profit and loss as reclassification adjustment.

Gain and losses on fair value through profit or loss (FVTPL) assets are recognized at statement of profit or loss, except:

- part of a hedging relationship;
- investments in equity instruments and the Bank has chosen to present gains and losses on investment in other comprehensive income;
- financial liabilities determined to be measured at fair value through profit or loss and the Bank is required to present the impact of changes in credit risk liabilities in other comprehensive income;
- financial assets measured at fair value through other comprehensive income and the Bank is required to recognize some changes in fair value in the other comprehensive income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, direklasifikasi, melalui proses amortisasi atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Keuntungan atau kerugian dari liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

(vii) Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi aset keuangan diperbolehkan jika dan hanya jika terjadi perubahan dalam model bisnis untuk mengelola aset keuangan.

Jika Bank mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan ketentuan di atas, Bank menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Bank tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Income and expense recognition (continued)

Gain or losses on financial assets measured at amortized cost and not part of a hedging relationship are recognized in the statement of profit or loss when the financial assets are derecognized, reclassified, through the amortization process or in order to recognize impairment gains or losses.

Gain or losses on liabilities instrument measured at amortized cost and not part of a hedging relationship are recognized in the statement of profit or loss when liabilities instrument are derecognized and through amortization processed

(vii) Reclassification of financial assets

Reclassification of financial assets is permissible when and only when there is change in business model for managing financial assets.

If the Bank reclassifies financial assets in accordance with the above conditions, the Bank applies prospective reclassification from the date of reclassification. The Bank does not restate gains, losses (including impairment gains or losses), or previously recognized interest.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vii) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.

(viii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vii) *Reclassification of financial assets (continued)*

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial assets.

(viii) *Offsetting*

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Saling hapus (lanjutan)

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Offsetting (continued)

The legally enforceable right must not be, contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Fair value measurement assumes the transaction to sell assets or transfer liabilities occurs:

- *In the primary market for such assets and liabilities; or*
- *If there is no primary market, in the most profitable market for these assets or liabilities.*

The fair value of an asset or liability is measured using the assumptions that would be use by market participants in determining the price of the asset and the liability assuming that market participants act in their best economic interests.

The measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in the highest and best use or by selling them to other market participants that would use the asset in the highest and best use.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Bank, untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 47).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

Bank uses suitable valuation techniques in the circumstances and where sufficient data are available to measure fair value, optimizing the use of relevant observable inputs and minimize the use of inputs that are not observable.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- Level 1 : quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
- Level 2 : inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on recurring basis, the Bank determines whether there is a transfer between levels in the hierarchy by evaluating categories (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement) at the end of each reporting period.

The Bank, for purposes of disclosing the fair value, has determined the classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics, risk of assets and liabilities, and the fair value hierarchy levels (Note 47).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(xi) Aset keuangan sukuk

Berdasarkan PSAK No.110 (Revisi 2015), Bank menentukan investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut:

- a. Diukur pada biaya perolehan
- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
 - Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(xi) Sukuk Financial Asset

In accordance with SFAS No.110 (Revised 2015), the Bank determines the classification of investments in sukuk *ijarah* and *mudharabah* either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Sukuk classifications are as follows:

- a. Measured at cost
- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.
 - Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(xi) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

(xi) Sukuk Financial Asset (continued)

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sukuk classifications are as follows: (continued)

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and sell sukuk, has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.
- Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.
- Gain or loss from changes of fair value is recognized in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has previously recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

c. Measured at fair value through profit or loss

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Sukuk acquisition cost excludes transaction cost and the difference between fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan estimasi 12 bulan. Jika terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal maka estimasi kerugian kredit ekspektasian akan dihitung sepanjang umur kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank.

Bank menetapkan definisi peningkatan risiko kredit instrumen keuangan secara signifikan sejak pengakuan awal sebagai berikut:

- sesuai dengan praduga (*rebuttable presumption*) PSAK 71, yaitu ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari; atau
- ketika terjadi restrukturisasi aset keuangan yang disebabkan oleh peningkatan risiko kredit.

Bank menerapkan definisi gagal bayar (stage 3) yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan, yaitu:

- ketika instrumen keuangan telah menunggak 90 hari; atau
- telah berada pada kolektibilitas BI 3, 4, atau 5.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets

At reporting date, the Bank calculates expected credit loss based on estimated 12 months. If there is a significant increase in credit risk since initial recognition, the estimated expected credit loss will be calculated throughout the life of the contract.

Expected credit losses are estimated weighted probabilities of credit losses (is the present value of all cash shortages) over the estimated life of the financial instrument. Cash shortages are the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows that are expected to be received by the Bank.

The Bank has determined the definition of a significant increase in credit risk of financial instruments since initial recognition as follows:

- *in accordance with presumption (rebuttable presumption) SFAS 71, ie when contractual payments are overdue for more than 30 days; or*
- *when there is a restructuring of financial assets caused by increased credit risk.*

The Bank applies a definition of default (stage 3) that is consistent with the definition used for internal credit risk management for relevant financial instruments, namely:

- *when financial instruments are in 90 days in arrears; or*
- *is in BI collectibility 3, 4, or 5.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Bank mengelompokkan aset keuangan dibeli dari aset keuangan memburuk apabila:

- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan; dan
- pembelian dengan diskon sangat besar.

Bank mengelompokkan aset keuangan berasal dari aset keuangan memburuk apabila:

- pihak peminjam dinyatakan pailit;
- terdapat perubahan dari bentuk penyediaan dana, atau
- debitur telah berada pada *stage 3* dan memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - telah dilakukan restrukturisasi secara berulang-ulang dan terjadi pelanggaran kontrak secara signifikan; atau
 - atas restrukturisasi yang terjadi, terdapat selisih negatif lebih dari 20% atas nilai kini arus kas masa depan (yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal) antara persyaratan awal dan persyaratan restrukturisasi.

Bank melakukan penurunan nilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif, berdasarkan pada karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan permodelan kerugian masa depan.

Bank menggunakan metode statistik, *credit rating* dan perkiraan makroekonomi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The Bank classifies purchased or originated credit-impaired financial asset if:

- loss of an active market from financial assets; and
- purchases with very large discounts

The Bank classifies financial assets derived from deteriorated financial assets if:

- the borrower is declared bankrupt;
- there is a change in the form of provision of funds, or
- the debtor is at stage 3 and meets one of the following conditions:
 - repeated restructuring and significant breach of contract; or
 - for the restructuring that occurs, there is a negative difference of more than 20% of the present value of future cash flows (discounted using the initial effective interest rate) between the initial terms and the terms of the restructuring

The Bank is impaired individually or collectively by considering all reasonable and supported information, including forward looking information.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively is grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on future loss model

The Bank uses statistical method, credit rating and macroeconomy forecast to assess allowance for impairment losses on loans.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang murabahah

Bank dapat menetapkan debitur untuk dievaluasi secara individual apabila memenuhi minimal salah satu kriteria sebagai berikut:

Kredit Konsumer:

1. Akun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Akun yang *default* (*bucket* 5) atau restrukturisasi; dan
 - b. Memiliki pokok di atas atau sama dengan Rp4 miliar
2. Mengalami bencana alam yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi pemerintah dan disetujui Direksi.
3. Kualitas kredit kolektibilitas 5 di atas 5 (lima) tahun (minimal DPD 2006 hari) dengan kriteria tidak ada sertifikat atau belum dilakukan pengikatan sempurna (HT) kecuali kredit program (SKMHT)
4. Hasil lelang dibawah kewajiban pokok
5. Terkait permasalahan hukum dengan indikasi, antara lain:
 - a. Sengketa agunan; atau
 - b. Sengketa lahan.Dimana salah satu dari 2 (dua) sengketa tersebut sudah terbit ketetapan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian bagi Bank.
6. Debitur minimal masuk *bucket* 4 dan terdapat minimal 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:
 - a. Tempat bekerja debitur atau usaha debitur mengalami kebangkrutan
 - b. Debitur terkena PHK
 - c. Sertifikat belum terbit selama minimal 36 bulan sejak akad kredit
 - d. Rumah yang menjadi agunan tidak selesai atau terbengkalai
 - e. Pembayaran angsuran dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi oleh debitur
 - f. Debitur sudah mengalami restrukturisasi minimal 2 (dua) kali.
 - g. Debitur mengalami permasalahan hukum
 - h. Klaim asuransi terkait kredit ditolak/tidak dibayar oleh asuradur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables

Bank may assign debtors to be evaluated individually if they meet at least one of the following criteria:

Consumer Credit:

1. Accounts that meet the following criteria:
 - a. Account that defaults (*bucket* 5) or restructured; and
 - b. Has a principal of more than or equal to Rp4 billion
2. Experienced a natural disaster as determined by the Financial Services Authority or government agency and approved by the Board of Directors.
3. Credit quality collectibility of 5 over 5 (five) years (minimum DPD 2006 days) with the criteria of no certificate or perfect binding (HT) except for program credit (SKMHT)
4. The auction proceeds under the principal obligation
5. In relation to legal issues with indications, among others:
 - a. Collateral dispute ; or
 - b. Land dispute.Where one of the 2 (two) disputes a binding legal provision has been issued and causes losses to the Bank.
6. Debtors are at least in *bucket* 4 and there are at least 2 (two) problems as follows:
 - a. The debtor's place of work or the debtor's business is bankrupt
 - b. The debtor is laid off
 - c. The certificate has not been issued for at least 36 months since the credit agreement
 - d. The house that became the collateral was not finished or was abandoned
 - e. Installment payments are made by a third party that is not affiliated with the debtor
 - f. The debtor has undergone restructuring at least 2 (two) times.
 - g. The debtor is experiencing legal problems
 - h. Insurance claims related to credit rejected/not paid by the insurer.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang murabahah (lanjutan)

Kredit Komersial:

1. Akun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Akun yang *default* (*bucket* 5) atau restrukturisasi; dan
 - b. Memiliki pokok di atas atau sama dengan Rp30 miliar
2. Mengalami bencana alam yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi pemerintah dan disetujui Direksi.
3. Kualitas kredit kolektibilitas 5 di atas 5 (lima) tahun (minimal DPD 2006 hari) dengan kriteria tidak ada sertifikat atau belum dilakukan pengikatan sempurna (HT) kecuali kredit program (SKMHT)
4. Hasil lelang dibawah kewajiban pokok
5. Terkait permasalahan hukum dengan indikasi, antara lain:
 - a. Sengketa pengurus,
 - b. Sengketa agunan,
 - c. Sengketa lahan,
 - d. Sengketa proyek,Dimana salah satu dari 4 (empat) sengketa tersebut sudah terbit ketetapan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian bagi bank.
6. Dalam hal penetapan kolektibilitas menggunakan konsep 3 (tiga) pilar maka kriteria *individual assessment* dapat ditetapkan dengan kriteria: minimal masuk *bucket* 4 (hari tunggakan 61 hari) dan terdapat minimal 2 (dua) dari 3 (tiga) permasalahan sebagai berikut:
 - a. Permasalahan prospek usaha menurun dengan indikasi antara lain:
 - i. Tidak terdapat pembayaran pokok sesuai dengan ketentuan dan atau kesepakatan yang telah dibuat, atau
 - ii. Pembangunan berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau
 - iii. Tidak terdapat penjualan lebih dari 1 (satu) tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Commercial Credit:

1. Accounts that meet the following criteria:
 - a. Account that defaults (*bucket* 5) or restructured; and
 - b. Has a principal of more than or equal to Rp30 billion
2. Experienced a natural disaster as determined by the Financial Services Authority or government agency and approved by the Board of Directors.
3. Credit quality collectibility of 5 over 5 (five) years (minimum DPD 2006 days) with the criteria of no certificate or perfect binding (HT) except for program credit (SKMHT)
4. The auction proceeds under the principal obligation
5. In relation to legal issues with indications, among others:
 - a. Collateral dispute ; or
 - b. Collateral dispute,
 - c. Land dispute,
 - d. Project disputeWhere one of the 4 (four) disputes has issued a binding legal provision and/or causes losses to the bank.
6. In the case of collectability using the 3 (three) pillar concept, the individual assessment criteria can be determined with the following criteria: at least entering bucket 4 (days arrears 61 days) and there are at least 2 (two) out of 3 (three) problems as follows:
 - a. Problems with decreased business prospects with indications include:
 - i. There is no principal payment in accordance with the provisions and/or agreements that have been made, or
 - ii. Construction has stopped for more than 1 (one) year, and/ or
 - iii. There are no sales for more than 1 (one) year

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang murabahah (lanjutan)

Kredit Komersial: (lanjutan)

- b. Permasalahan agunan dengan memenuhi salah satu indikasi/ kriteria sebagai berikut:
 - i. Sertifikat agunan belum atas nama debitur atau pengurus yang tidak dapat diikat Hak Tanggungan;
 - ii. Sertifikat agunan belum dilakukan pengikatan Hak Tanggungan 12 bulan sejak akad kredit dan status *default*;
 - iii. Sertifikat tidak memiliki alas hukum untuk dilakukan pengalihan kepada pembeli;
 - iv. Agunan belum terbit sertifikat;
 - v. Agunan tidak terbangun 100% khusus kredit investasi;
- c. Permasalahan kemampuan membayar mengalami penurunan

Perhitungan komponen PD, LGD, dan EAD yang dilakukan secara kolektif pada setiap segmentasi kredit mempertimbangkan data historis, saat ini dan masa yang akan datang.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (*probability of default*). Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Commercial Credit: (continued)

- b. Collateral problems by meeting one of the following indications/criteria:
 - i. The collateral certificate is not yet in the name of the debtor or management that cannot be bound by the Mortgage;
 - ii. Collateral certificate has not been bound by the Mortgage Rights 12 months since the credit agreement and default status;
 - iii. The certificate has no legal basis for transfer to the buyer;
 - iv. The collateral has not been issued a certificate;
 - v. Collateral is not built 100% specifically for investment credit;
- c. The problem of ability to pay has decreased

The computation of PD, LGD, and EAD components carried out collectively in each credit segmentation takes into account historical, current and future data.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on historical loss experience and the possibility of failure (*probability of default*). Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the credit segmentation and past due status of the debtors, among others.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang murabahah (lanjutan)

Bank perlu mempertimbangkan informasi masa lalu, masa sekarang dan masa depan dalam menghitung kemungkinan kejadian gagal bayar. Oleh karena itu, perhitungan PD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perhitungan PD secara historis (PD TTC)
- b. Perhitungan PD *forward-looking*; dan
- c. Perhitungan PD *Point in time* (PiT) melalui proses *scaling*

LGD merupakan estimasi kerugian atas debitur dengan menghitung *recovery* yang didapatkan setelah debitur tersebut *default*. LGD diperhitungkan sebesar 100% dikurangi tingkat pengembalian (*recovery rate*), perhitungan LGD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perhitungan LGD secara historis (LGD TTC);
- b. Perhitungan LGD *Point in Time* (LGD PiT) dengan mempertimbangkan informasi *forward looking*.

Dalam membuat estimasi *recoverable amount* (estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali), Bank dapat menggunakan metode berikut ini:

- a. *Discounted Cash Flow*
Bank melakukan perhitungan berdasarkan jumlah yang telah didiskonto (*discounted value*) dari estimasi arus kas masa datang (pokok dan bunga) yang didiskonto berdasarkan Suku Bunga Efektif dari setiap kredit.
- b. *Expected Collateral*
Bank melakukan perhitungan berdasarkan estimasi penjualan agunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai wajar dan jangka waktu estimasi penjualan agunan di masa depan. Hasil perhitungan akan didiskontokan berdasarkan Suku Bunga Efektif dari setiap kredit.
- c. Metode lainnya yang berdasarkan analisis Bank lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Regulator.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Bank needs to consider past, present and future information in calculating the probability of default. Therefore, the calculation of PD is carried out in the following stages:

- a. Historical PD calculation (PD TTC)
- b. forward-looking PD calculation; and
- c. Calculation of PD *Point in time* (PiT) through a scaling process

LGD is an estimated loss for a debtor by calculating the recovery obtained after the debtor defaults. LGD is calculated as 100% minus the rate of return (*recovery rate*), LGD calculation is carried out in the following stages:

- a. Historical LGD calculation (LGD TTC);
- b. Calculation of LGD *Point in Time* (LGD PiT) by considering forward looking information.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

- a. *Discounted Cash Flow*
The Bank performs calculations based on the discounted amount (*discounted value*) of future cash flows (*principal and interest*) discounted based on the Effective Interest Rate of each loan.
- b. *Expected Collateral*
The Bank calculates earthquakes which are calculated based on the analysis carried out by considering the fair value and the estimated future sales period. The calculation results will be discounted based on the Effective Interest Rate of each loan.
- c. Other methods based on the Bank's analysis are more appropriate and do not conflict with the Regulators' provisions.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang murabahah (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK No. 102, "Akuntansi Murabahah" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPS Revisi 2013), Bank menghitung CKPN untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK No. 102, "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

f.2. Pembiayaan/piutang syariah selain murabahah

Untuk aset keuangan berupa piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan perubahannya pada POJK No. 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, obligasi pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
- b. 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
- c. 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
- d. 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- e. 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

In accordance with SFAS No. 102, "Accounting for Murabahah" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS No. 102 "Impairment of Murabahah Receivables".

f.2. Sharia financing/receivables other than murabahah

For financial assets of *istishna* receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, and *musyarakah* financing, the Bank implements Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" and POJK No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 and its amendment POJK No. 19/POJK.03/2018 dated September 20, 2018 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit".

The minimum allowance to be provided in accordance with Bank Indonesia Regulation is as follows:

- a. 1% of earning assets classified as Current, excluding placements with Bank Indonesia, government bonds, other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral;
- b. 5% of earning assets classified as Special Mention, net of deductible collateral;
- c. 15% of earning assets classified as Sub-standard, net of deductible collateral;
- d. 50% of earning assets classified as Doubtful, net of deductible collateral; and
- e. 100% of earning assets classified as Loss, net of deductible collateral.

The criterias for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Bank Indonesia Regulations (OJK).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility*, *term deposit* dan *deposit facility syariah*, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka, *interbank call money* dan tabungan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

i. Efek-efek dan obligasi pemerintah

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Medium Term Notes* (MTN) dan penyertaan reksadana.

Obligasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

h. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility, term deposit and sharia deposit facility, whereas placement with other banks is in the form of time deposit, interbank call money and savings.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

i. Securities and government bonds

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), Deposits Certificates of Bank Indonesia (SDBI), bonds, Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Medium Term Notes (MTN) and mutual funds.

Government bonds are bonds issued by the Indonesian Government.

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows:

1. *Securities and government bonds classified as amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Efek-efek dan obligasi pemerintah (lanjutan)

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

2. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi. Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi pemerintah tersebut dijual.
3. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Securities and government bonds (continued)

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows: (continued)

2. *Securities and government bonds classified as fair value through profit or loss (FVTPL) are measured using fair value. Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Changes in fair value are recognized in profit or loss. Upon sale of portfolio of fair value through profit or loss securities and government bonds, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and government bonds are sold.*
3. *Securities and government bonds classified as fair value through other comprehensive income (FVTOCI) are measured using fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities and Government bonds are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

j. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period of time.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan (termasuk kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Bank telah melakukan penjualan atas KPR kepada pihak ketiga.

Atas penjualan tersebut, Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR kepada pihak lawan. Oleh karena itu, pada tanggal efektif penjualan, Bank menghentikan pengakuan atas KPR tersebut.

Penjualan tersebut telah memenuhi kriteria jual putus seperti yang tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Loans (continued)

Loans (including loans under syndication) are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to obtaining the financial asset. After initial recognition, loans are measured at amortized cost using the effective interest method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized costs.

Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and new loan conditions.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

Sales of Housing Loans (KPR)

The Bank sold its KPR to third parties.

In relation with the above mention sale, the Bank has transferred the risk and rewards of ownership of the KPR to counterparty. Hence, at the effective date of the sale, the Bank derecognized the KPR.

The sale has fulfill the criteria of true sale according to OJK regulation No. 11/POJK.03/2019.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Pembiayaan/piutang syariah

k. Sharia financing/receivables

Pembiayaan/piutang syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Financing/receivables based on Sharia principles is receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchase arrangements and profit sharing between Bank and other parties for a certain period of time. Such receivables consist of receivables arising from *murabahah* transactions, *istishna* transactions and *qardh* transactions, for financing consist of *mudharabah* and *musyarakah* financing.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode marjin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus direct attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Mudharabah financing is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (*shahibul maal*) and the customer as a business executor (*mudharib*) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed *nisbah* (*pre-determined ratio*). On the statement of financial position date, *mudharabah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

k. Sharia financing/receivables (continued)

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah is a partnership contract among fund's owners (*musyarakah partners*) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position date, *musyarakah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna is a sale and purchase contract between *al-mustashni* (buyer) and *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price. *Istishna* receivables are stated at outstanding billings to final buyer less allowance for impairment losses.

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidu oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

Qardh is the provision of funds or equivalent claims based on agreement between the borrower and the lender that requires the borrower to repay the debts after a certain period of time. *Qardh* are stated at outstanding balance less allowance for impairment losses based on the management's review on the financing quality.

l. Tagihan dan liabilitas akseptasi

l. Acceptances receivable and payable

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksepi oleh bank pengaksepi (*accepting bank*).

Acceptances receivable and payable represent Letters of Credit by Local Document (SKBDN) transactions that have been accepted by the accepting bank.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. *Acceptances receivable* are stated net of allowance for impairment losses.

Tagihan dan liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi.

Acceptances receivable and payable are classified as amortized costs.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik serta penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki saham pada perusahaan debitur.

Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan 20,00% sampai dengan 50,00% dicatat dengan metode ekuitas yaitu penyertaan dicatat sebesar biaya perolehan disesuaikan dengan bagian Bank atas ekuitas perusahaan asosiasi dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyertaan modal sementara dihapus buku dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

n. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap selain tanah dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Investment in shares

Investments in shares represent long-term investments in non-publicly-listed companies and temporary investments in debtor companies arising from conversion of loans or certain of transactions which resulted The Bank have shares in debtor's company.

Investments in shares represent ownership interests of 20.00% to 50.00% are recorded using the equity method. Under this method, investments are recorded at cost and adjusted for the Bank's proportionate share in the net equity of the investees and reduced by dividends earned starting the acquisition date net of by allowance for impairment losses

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 (five) years in accordance with OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks".

n. Premises and equipment

All premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, premises and equipment besides lands are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

- (i) the exchange transaction lacks commercial substance, or*
- (ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Aset tetap (lanjutan)

n. Premises and equipment (continued)

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furniture and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan	10 - 20
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8

Buildings
Office furniture and fixtures and motor vehicles

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 14).

Land are initially recognized at cost and not depreciated. Subsequent to initial recognition, land is measured at fair value at the revaluation date less any subsequent accumulated impairment losses. Valuation of land are performed by appraisers with professional qualification, and is done in regular basis to ensure that the carrying amount does not differ materially from its fair value at the end of reporting period (Note 14).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan bahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi kelompok usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Premises and equipment (continued)

Increase in the carrying amount arising from revaluation is recorded in "Premises and equipment Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss, up to the amount of impairment of the same assets due to revaluation previously recognized in profit or loss. A decrease in carrying value arising as a result of a revaluation should be recognized in profit or loss.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Construction in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment". The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to reevaluate on an annual basis, whereas if the fair value of the revalued asset does not change significantly, it is necessary to reevaluate at a minimum every 3 (three) years.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa

PSAK No. 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Berbeda dengan akuntansi lessee, persyaratan untuk akuntansi lessor sebagian besar tidak berubah. Dalam hal ini, Bank terekspos risiko Bank sebagai lessee.

a) Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No. 73 menentukan apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa atas dasar jika penyewa memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

Bank menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang diterapkan dalam PSAK No. 73 untuk semua kontrak yang dicatat atau diubah pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Right-of use assets and lease liabilities

SFAS No. 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. It introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for short-term leases and leases of low value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. In this case, Bank is exposed the risk of the Bank as lessee.

a) Impact of the new definition of a lease

The change in the definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No. 73 determines whether a contract is, or contains, a lease if the lessee has the right to control the use of an identified asset for a certain period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS No. 30.

The Bank applies the definition of a lease and related guidance set out in SFAS No. 73 to all contracts entered into or changed on or after January 1, 2020.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

- b) Panduan praktis, pengecualian pengakuan dan pilihan kebijakan pada saat masa transisi, Bank memilih untuk menerapkan panduan praktis yang terdapat pada panduan transisi dalam PSAK No. 73, yang antara lain:
1. Penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang hampir sama;
 2. Tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 73 untuk kontrak dengan masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 dan dicatat sebagai sewa jangka pendek; dan
 3. Pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal.

Bank memilih pengecualian pengakuan untuk tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK No. 73 untuk kontrak:

1. Sewa jangka pendek dengan masa sewa 12 bulan atau kurang; dan
2. Sewa dengan aset pondasi bernilai rendah.

Bank mengakui pembayaran sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah sebagai beban baik dengan dasar garis lurus maupun dasar sistematis lainnya yang merepresentasikan pola manfaat.

Selain itu, Bank juga memilih pilihan kebijakan untuk:

1. Tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai komponen sewa tunggal.
2. Tidak mencatat sewa atas aset tak berwujud berdasarkan PSAK No. 73.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

- b) *Practical expedient, recognition exemption and accounting policy option at the transition date, Bank decided to use the practical expedient that is permitted in SFAS No. 73, as:*
1. *Using a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;*
 2. *Not to apply the recognition and measurement according to SFAS No. 73 of the contracts which lease term ends within 12 months of January 1, 2021 and recorded as short term lease; and*
 3. *Exclude initial direct cost from the measurement of the right of use assets at the date of initial application.*

Bank may choose the recognition exemption not to recognize and measure according to SFAS No. 73 of the contract:

1. *Short term leases for which lease term is or below 12 months; and*
2. *Lease for which the underlying asset is low value.*

Bank recognise the lease payment of short term and low value leases as an expense on either a straight line basis over the lease term or another systematic basis which represent the pattern of the benefit.

Besides, Bank may choose the policy option:

1. *Not to separate the non-leased component from lease component, and choose to record the lease component and non-leased component as a single lease component.*
2. *Not to record the lease of intangible assets according to SFAS No. 73.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

c) Dampak pada akuntansi lessee

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, estimasi biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Untuk pengukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa.

Aset hak guna disusutkan dengan metode sesuai dengan persyaratan depresiasi yang ada pada aset tetap.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No. 48 Penurunan Nilai Aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

c) Impact on lessee accounting

Bank applies a single recognition and measurement approach for the entire lease, except for the short terms and low-value lease. Bank recognises lease liabilities for the lease payments and right of use asset that represent right of use of the underlying asset

Bank recognises right of use asset and lease liabilities at the commencement date.

On the commencement date, right of use assets measured at cost, which shall comprise the amount initial measurement of lease liabilities, initial direct cost incurred, an estimate of restoration cost, and lease payments made at or before the commencement date less the rental incentives received. For the subsequent measurements, the right of use assets less the accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.

Right of use assets depreciated by methods in accordance with the fixed assets depreciation requirements.

If the ownership of lease assets transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflects the purchase option, then the depreciation period measured by using the estimation of asset economic benefit. The right of use asset tested for impairment in accordance with SFAS No. 48 Impairment of Asset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

PSAK No. 73 mengubah cara Bank menyajikan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi pada PSAK No. 30, yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyajikan aset hak-guna secara terpisah;
2. Menyajikan liabilitas sewa sebagai bagian dari liabilitas lain-lain;
3. Menyajikan beban penyusutan aset hak-guna dan beban bunga liabilitas sewa sebagai bagian dari beban umum dan administrasi; dan
4. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

At the commencement date, Bank recognized the lease liabilities measured at the present value of the future lease payment during the lease term. Lease payment including the fixed payment (including substantial fixed-payments) less lease incentive receivable, variable lease payment that depend on the index or exchange rate, and the expected amount will be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the execution price of a reasonable purchase option if it ensured to exercise by the Bank and the penalty payment to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank to execute the lease termination option. Variable lease payments that do not rely on the index or exchange rates recognized as expense in periods in which events or conditions that trigger payments occur.

In calculating the present value of lease payments, Bank uses the incremental borrowing rate of the lessee at the commencement date of the lease, as the implicit interest rate of the lease cannot be determined. For the subsequent measurement, amount of lease liabilities increased to reflect the increasing of interest and reduced by the lease payments. In addition, the carrying amount of lease liabilities remeasured if there is a modification, change in lease term, change of lease payment, or changes in assessment of purchase option of the underlying asset.

SFAS No. 73 changes the way of Bank presents lease that previously classified as an operating lease in SFAS No. 30, which not disclosed in financial statements, with the details of below:

1. Present the right of use asset separately
2. Present the lease liabilities as part of other liabilities
3. Present the depreciation expense of right of use asset and interest expense of lease liabilities as part of general and administrative expenses, and
4. Separate the total amount of payment to the principal (presented in financing activities) and interest (presented in operational activities) in the statement of cash flow.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2e).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

q. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs of disposal, refers to SFAS No. 68, "Fair Value Measurements" (Note 2e).

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

q. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterimanya perintah pemindahbukuan dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

s. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Liabilities due immediately

This account is recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Current liabilities are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

s. Deposits

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Simpanan (lanjutan)

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

t. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan *inter-bank call money*.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Deposits (continued)

Deposits from customers are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

t. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits, time deposits and inter-bank call money.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah demand deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

u. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase

Securities purchased under agreement to resell

Securities purchased under agreement to resell are presented as financial assets in the statement of financial position, at the net resale price of unamortized interest and net of allowance for impairment losses.

The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income (unamortized) and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are resold using effective interest rate.

Securities purchased under agreement are classified as amortized costs.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi.

Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar dimuka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali atas surat berharga syariah

Bank mencatat transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengacu ke PSAK No. 111 tentang "Akuntansi Wa'd" yang berlaku secara prospektif. Pada saat pengakuan awal, Bank mengklasifikasikan surat berharga syariah yang diperoleh dari transaksi jual beli pertama dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

v. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan Bank adalah obligasi dan *Long Term Note (LTN)*.

Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR).

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase (continued)

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest.

The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using the effective interest method.

Securities sold under agreement to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities purchased under agreement to resell of sharia-compliant securities

The Bank records securities purchased under resale agreements in accordance with SFAS No. 111 on "Accounting for Wa'd" which is implemented prospectively. At initial recognition, the Bank classifies the underlying securities from the first sale and purchase transaction as at fair value through other comprehensive income. Gain or losses arising from changes in its fair value is recorded as other comprehensive income.

v. Securities issued

Securities issued by Bank consist of bonds and *Long Term Note (LTN)*.

The securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR).

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia, pemerintah dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

y. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

z. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

aa. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/BTN Unit Syariah) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received by the Bank from Bank Indonesia, the government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Fund borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

x. Subordinated loans

Subordinated loans are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

y. Capital stock

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

z. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank's results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

aa. Temporary *syirkah* funds

*Temporary *syirkah* funds represent investments from other parties conducted on the basis *mudharabah mutlaqah* contract in which the owners of the funds (*shahibul maal*) grant freedom to the fund manager (*mudharib*/BTN Sharia Unit) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary *syirkah* funds consist of *mudharabah* current accounts, *mudharabah* saving deposits, and *mudharabah* time deposits.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo giro dan tabungan nasabah di Bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena BTN Unit Syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Temporary *syirkah* funds (continued)

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime (*on call*) or can be withdrawn based on certain agreed terms. *Mudharabah* current accounts and savings deposits are stated based on the customer's demand and savings deposit balance in Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. *Mudharabah* time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Temporary *syirkah* fund cannot be classified as liability. This was due to the BTN Sharia Unit does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to BTN Sharia Unit's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary *syirkah* fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realized gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary *syirkah* funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Third parties' share on returns of temporary *syirkah* funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under *mudharabah* principles. Income that will be distributed is the cash received (*cash basis*) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

ab. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Jika aset keuangan atau nilai kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Temporary *syirkah* funds (continued)

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners and depositors as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

ab. Interest income and expense

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to obtain the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate.

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *istishna*, margin *murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Fees and commissions

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fees and commissions that are not related to the credit activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

ad. Sharia profit sharing income and bonus expense

Sharia profit sharing income represents income from istishna, margin from murabahah and profit-sharing on mudharabah and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Income from istishna is recognized at the date of transfer of assets.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara Syariah (lanjutan)

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

ae. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020 ("Undang-undang").

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Sharia profit sharing income and bonus expense (continued)

Mudharabah and musyarakah income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

ae. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank's regulations and Job Creation No. 11 year 2020 dated 2 November 2020 ("the Law").

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognized as other comprehensive income consist of:

- (i) Actuarial gain and losses.
- (ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
- (iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

af. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *spot Reuters* pada tanggal tersebut pukul 15.00 WIB. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits which are current service cost, net interest expense of net defined benefit assets liabilities (assets), and re-measurement of liability (asset) is recognized immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or curtailment program occurs, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

af. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah based on Reuters' spot rates at 15.00 WIB (West Indonesian local time) on that date. The resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

af. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	31 Desember/ December 31, 2022
1 Dolar Amerika Serikat	15.567,50
1 Dolar Australia	10.557,88
1 Pound Sterling Inggris	18.786,09
1 Euro Eropa	16.581,72
1 Yen Jepang	117,81
1 Ringgit Malaysia	3.533,66
1 Dolar Hongkong	1.996,55
1 Riyal Arab Saudi	4.139,00
1 Renminbi	2.238,91
1 Dolar Singapura	11.592,88

ag. Pajak penghasilan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

af. Foreign currency transactions and balances (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the exchange rates used in translating the foreign currencies into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	31 Desember/ December 31, 2021	
	14.252,50	1 United States Dollar
	10.346,61	1 Australian Dollar
	19.250,86	1 Great Britain Pound Sterling
	16.112,46	1 European Euro
	123,77	1 Japanese Yen
	3.417,67	1 Malaysian Ringgit
	1.828,03	1 Hongkong Dollar
	3.796,00	1 Saudi Arabian Riyal
	2.235,72	1 Renminbi
	10.554,67	1 Singapore Dollar

ag. Income tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ag. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Beban Pajak Penghasilan - Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Bank memperhitungkan dampak atas posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti. Hal ini termasuk juga melakukan evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

ah. Pelaporan segmen

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Income tax (continued)

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Expense - Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

In determining the amount of current and deferred tax, the Bank takes into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties. This includes evaluation on tax assessment letters received from tax authorities.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

ah. Segment reporting

Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

An operating segment is a component of an entity:

- a) *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*
- b) *whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- c) *for which discrete financial information is available.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ah. Pelaporan segmen (lanjutan)

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat (segmen usaha). Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

ai. Laba per saham dasar

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

aj. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahkan Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

ak. Opsi Saham

Bank telah memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Biaya kompensasi saham pada penerbitan dihitung dengan menggunakan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" menggunakan metode garis lurus selama masa tunggu (*vesting period*). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas. Penentuan nilai wajar dari opsi saham yang diberikan dihitung dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binomial-tree* (*Binomial-tree option pricing model*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ah. Segment reporting (continued)

The Bank identifies and discloses financial information based on the business activities in which the Bank engages (*business segments*) in. Segment revenues, expenses, income, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

ai. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid shares during the related year.

aj. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including *pre-emptive rights issue*) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Additional Paid-in-Capital - Net" account, under Equity section in the statement of financial position.

ak. Stock Options

The Bank has granted stock options to the Board of Directors and employees of certain positions and levels based on established criteria. Cost of stock compensation at the issuance date is calculated using the fair value of the stock options and is recognized as part of "Salaries and Employee Benefits Expense" using the straight-line method over the vesting period. The accumulation of the stock compensation cost is recognized as "Stock Options" in the equity. The fair value of the stock options granted are calculated using the *Binomial-tree option pricing model*.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

al. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

am. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain"

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset Lain-lain"

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai outstanding kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

al. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

am. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account.

Foreclosed collaterals represent assets acquired by the Bank both from auction and non auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor's approval to sell the collateral where the debtor could not fulfill their obligations to the Bank. Foreclosed collaterals represent loan collateral that were taken over as part of loans settlement and presented in "Other Assets".

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

am. Agunan yang diambil alih (lanjutan)

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

an. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif diukur dan diakui di laporan posisi keuangan pada nilai wajar.

Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2e).

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tujuan Bank atas transaksi yaitu untuk (a) lindung nilai atas nilai wajar, (b) lindung nilai atas arus kas, (c) lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dan (d) instrumen perdagangan, sebagai berikut:

- a. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar aset dan liabilitas yang dilindungi, diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi menunjukkan terjadinya ketidakefektifan lindung nilai dan secara langsung diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

am. Foreclosed collaterals (continued)

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value and any losses from such write-down is recognized in profit or loss.

an. Derivative Instruments

Derivatives financial instruments are valued and recognized in the statement of financial position at fair value net of allowance for possible losses.

Each derivatives contract is recorded as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The fair value of derivatives instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics, which refers to SFAS No. 68, "Fair Value Measurement" (Note 2e).

Gains or losses from derivative contracts are presented in the financial statements based on its purpose designated upon acquisition, as (a) fair value hedge, (b) cash flow hedge, (c) net investment in a foreign operation hedge, and (d) trading instruments as follows:

- a. Gain or loss on a derivative contract designated and qualified as a fair value hedging instrument and the gain or loss arising from the changes in fair value of hedged assets and liabilities is recognised as gain or loss that can be set off one another during the same accounting period/year. Any difference representing hedge ineffectiveness is directly recognized as gain or loss in current year.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

an. Instrumen derivatif (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tujuan Bank atas transaksi yaitu untuk (a) lindung nilai atas nilai wajar, (b) lindung nilai atas arus kas, (c) lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dan (d) instrumen perdagangan, sebagai berikut: (lanjutan)

- b. Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian atas kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas arus kas dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain. Bagian yang tidak efektif dari lindung nilai dilaporkan sebagai laba atau rugi tahun berjalan.
- c. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain, sepanjang transaksi tersebut dianggap efektif sebagai transaksi lindung nilai.
- d. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai (atau kontrak derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai) diakui sebagai laba atau rugi pada tahun berjalan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

an. Derivatives Instrument (continued)

Gains or losses from derivative contracts are presented in the financial statements based on its purpose designated upon acquisition, as (a) fair value hedge, (b) cash flow hedge, (c) net investment in a foreign operation hedge, and (d) trading instruments as follows: (continued)

- b. The effective portion arising from gain or loss of derivative contracts, designated as a cash flow hedge instruments is reported as other comprehensive income. The hedge ineffective portion is recognized as a gain or loss in the current year.
- c. Gain or loss arising from derivative contract that is designated as a net investment hedge in a foreign operation is reported as other comprehensive income, as long as the transactions are effectively recognized as hedge transactions.
- d. Gain or loss arising from derivative contract that is not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized as gain or loss in current year.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan" dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71, "Financial Instrument". Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2e.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the Financial Statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi mengenai apakah aset keuangan dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results. Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK No. 71 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK No. 71 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

- i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan
- ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
 - a. Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
 - b. Nilai waktu dari uang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

The Bank reviews their financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortized cost under SFAS No. 71 which required to recognize the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. SFAS No. 71 incorporates forwardlooking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation

In carrying out the impairment review, the following management's judgements are required:

- i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor's, deterioration of the credit quality of the debtor's; and
- ii. Determination of expected credit life that reflect:
 - a. An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
 - b. The time value of money.

Impairment of securities

The Bank determines that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available-for-use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets.

In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Umur ekonomis dari aset tetap (lanjutan)

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas.

Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

Jangka waktu sewa

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah Bank cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Useful lives of premises and equipment
(continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

The lease term

The Bank determines the lease term as a non cancellable lease term, along with the period covered by the option to extend the lease if it is reasonably exercised, or any period covered by the option to terminated the lease, if it is reasonable not to exercise.

The Bank has several leases that include extention option and termination of lease term. Bank implements the assessment in evaluating whether it ensure to exercise the extention or termination option of lease. This done by taking into consideration of all relevant facts and circumstances that provide economic incentives for the extention or termination of the lease. After the commencement date, the Bank assesses the lease term, if there is an event or significant change in circumstances that are in control and affects whether the Bank is reasonable to exercise the extention or termination option of the lease.

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan.

Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

- a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- c) significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs of disposals and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized.

Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Significant judgement is required in determining the provision for taxes

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris.

Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Present value of retirement obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations.

The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

4. KAS

4. CASH

	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		1.645.841		1.526.682	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	711.837	11.081	742.565	10.583	United States Dollar
Dolar Singapura	193.883	2.248	99.520	1.050	Singapore Dollar
Dolar Australia	99.490	1.050	14.365	149	Australian Dollar
Euro Eropa	34.410	570	20.635	332	European Euro
Ringgit Malaysia	87.453	309	62.833	215	Malaysian Ringgit
Yen Jepang	1.310.000	154	632.000	78	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	46.550	97	160.220	293	Hong Kong Dollar
Riyal Arab Saudi	19.573	81	13.345	51	Saudi Arabian Riyal
Renminbi	26.102	58	15.802	35	Renminbi
Pound Sterling Inggris	2.350	44	5.685	109	Great Britain Pound Sterling
		15.692		12.895	
Total		1.661.533		1.539.577	Total

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp270.091 dan Rp267.004, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) of Rp270,091 and Rp267,004, as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		25.192.737		10.546.537	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currency
Dolar Amerika Serikat	14.402.083	224.204	10.240.083	145.947	United States Dollar
Total		25.416.941		10.692.484	Total

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp3.381.362 dan Rp1.430.919 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp3,381,362 and Rp1,430,919 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The minimum reserve requirement ratios of the Bank as of December 31, 2022 and 2021, are as follows (unaudited):

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Rupiah			Rupiah
Utama	8,28%	3,55%	Primary
Harian	0,18%	0,55%	Daily
Rata-rata	8,10%	3,00%	Average
PLM	16,17%	14,51%	PLM
Dolar Amerika Serikat	4,13%	6,24%	United States Dollar
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Rupiah	7,76%	3,70%	Rupiah

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia's Minimum Legal Reserve Requirements (GWM).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022. PBI tersebut dijelaskan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No.20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 13 Maret 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020, PADG No.23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021, PADG No. 24/3/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022, dan perubahan terakhir PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/5/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang tentang Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan inklusif, Bank Indonesia memberikan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen). Insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku mulai 1 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 8,10% dan 3,00%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 4,00% dan 4,00%. Untuk PLM adalah sebesar 6,00% dan 6,00% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 7,50% dan 3,00%. Untuk mata uang asing masing-masing sebesar 1,00%.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
(continued)**

The calculation of the GWM ratios as of December 31, 2022 and 2021 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 which has been amended several times, the latest with PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022. The PBI is explained by Regulations of Members of the Board of Governors (PADG) No. 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 which has been amended several times with PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 which has been amended several times with PADG No. 21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 dated March 13 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 dated April 30, 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020, PADG No.23/27/PADG/2021 dated December 21, 2021, PADG No. 24/3/PADG/2022 tanggal March 1, 2022, and the latest amendment by PADG No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 regarding "Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Conventional Commercial Banking, Sharia Commercial Banking and Sharia Business Units".

Based on Bank Indonesia Regulation Number 24/5/PBI/2022 dated February, 25 2022 concerning Incentives for Banks Providing Funds for Certain and inclusive Economic Activities, Bank Indonesia provided incentives in the form of leniency on the obligation to fulfill the statutory reserve in rupiah which must be fulfilled on a daily basis of 0.9% (zero point nine percent). This incentive is given to Banks that provide funds for Certain and inclusive Economic Activities as stipulated by Bank Indonesia and are valid from December 1, 2022 to February 28, 2023.

As of December 31, 2022 and 2021, based on the above Bank Indonesia regulations, the Bank is required to maintain primary GWM in Rupiah amounting to 8.10% and 3.00%, respectively, while GWM for foreign currency amounting to 4.00% and 4.00%, respectively. PLM amounting to 6.00% and 6.00% in Rupiah as of December 31, 2022 and 2021.

As of December 31, 2022 and 2021, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, The Bank is required to maintain GWM in Rupiah of 7.50% and 3.00%. For foreign currencies of 1.00%, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank juga harus memenuhi PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 dan PBI No. 22/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah diubah dengan PADG No. 21/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 dan perubahan terakhir PADG No. 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau excess reserve yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 46).

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, The Bank must also comply with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 regarding "Macprudential Intermediation Ratios and Macprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit" which has been amended with PBI 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019 and PBI No. 22/17/PBI/2020 dated September 30, 2020 which is explained through PADG No. 21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 which has been amended with PADG No. 21/11/PADG/2020 dated April 29, 2020, PADG No. 22/30/PADG/2020 dated October 5, 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 dated April 26, 2021 and the latest amendment by PADG No. 23/31/PADG/2021 dated December 31, 2021 concerning "Macprudential Intermediation Ratio and Macprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units".

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve and Macprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprise of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represents the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve, Minimum Statutory Reserve on LFR and Macprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of December 31, 2022 and 2021.

The remaining period of current accounts with Bank Indonesia is categorized as less than one month (Note 46).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		540.052		498.310	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currencies
Yen Jepang	3.825.323.896	450.661	402.598.858	49.830	Japanese Yen
Dolar Amerika Serikat	19.465.688	304.746	25.511.864	363.608	United States Dollar
Pound Sterling Inggris	3.372.747	63.361	3.988.260	76.777	Great Britain Pound Sterling
Australia Dollar	4.480.725	47.307	5.428.181	56.163	Australian Dollar
Singapura Dollar	2.950.598	34.206	4.758.882	50.228	Singapore Dollar
Euro Eropa	104.380	30.893	104.380	1.682	European Euro
Renminbi	460.499	1.031	89.528	200	Renminbi
		932.205		598.488	
Total		1.472.257		1.096.798	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(1.747)		(1.698)	Less allowance for impairment losses
Neto		1.470.510		1.095.100	Net

b. Berdasarkan bank

b. By bank

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank Central Asia Tbk	263.538	200.856	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	215.125	258.763	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta	46.579	23.480	Standard Chartered Bank, Jakarta
Citibank N.A., Jakarta	925	925	Citibank N.A., Jakarta
Lainnya	337	214	Others
	526.504	484.238	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>			<u>Related Parties (Note 43)</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.350	13.176	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.198	896	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
	13.548	14.072	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

**6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(continued)**

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

b. By bank (continued)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign currencies</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Standard Chartered Bank	325.746	394.600	Standard Chartered Bank
PT Bank ANZ Indonesia	47.307	56.163	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	34.206	50.228	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	27.410	13.227	PT Bank Central Asia Tbk
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	1.731	1.682	Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam
PT Bank ICBC Indonesia	1.031	200	PT Bank ICBC Indonesia
	<u>437.431</u>	<u>516.100</u>	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>			<u>Related Parties (Note 43)</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	457.512	55.975	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	37.262	26.413	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	<u>494.774</u>	<u>82.388</u>	
Total	1.472.257	1.096.798	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.747)	(1.698)	Less allowance for impairment losses
Neto	<u>1.470.510</u>	<u>1.095.100</u>	Net

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp1.198 dan Rp896, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp1,198 and Rp896, as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

Berikut adalah perubahan giro pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021:

Presented below is the movements in amortized cost of current account with other banks for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively:

	31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Giro pada Bank Lain						Current Accounts with Other Banks
Saldo awal	1.094.220	-	1.682	896	1.096.798	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	358.406	-	49	302	358.757	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	16.702	-	-	-	16.702	New financial assets originated or purchased
Saldo akhir tahun	<u>1.469.328</u>	<u>-</u>	<u>1.731</u>	<u>1.198</u>	<u>1.472.257</u>	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

Berikut adalah perubahan giro pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

Presented below is the movements in amortized cost of current account with other banks for the year ended December 31, 2022 and 2021, respectively (continued):

31 Desember/December 31, 2021						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Giro pada Bank Lain						Current Accounts with Other Banks
Saldo awal	3.215.042	-	1.799	288	3.217.129	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(2.120.337)	-	(117)	608	(2.119.846)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	30	-	-	-	30	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(515)	-	-	-	(515)	Derecognized financial assets
Saldo akhir tahun	1.094.220	-	1.682	896	1.096.798	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

c. Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:

	2022	2021	
Rupiah	0,19%	0,29%	Rupiah
Mata uang asing	0,00%	0,00%	Foreign currencies

d. Kolektibilitas

d. Collectibility

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kolektibilitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022 and 2021, the collectibility of current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Lancar	1.470.526	1.095.116	Current
Macet	1.731	1.682	Loss
Total	1.472.257	1.096.798	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.747)	(1.698)	Less allowance for impairment losses
Neto	1.470.510	1.095.100	Net

e. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

e. As of December 31, 2022 and 2021, there are no current accounts with other banks which are pledged as collateral.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

**6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(continued)**

- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

- f. The movements in the allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31		
	2022	2021	
Saldo awal tahun	1.698	1.808	Balance at beginning of year
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan selama tahun berjalan (Catatan 33)	49	(110)	Provision (reversal) for impairment losses during the year (Note 33)
Saldo akhir tahun	1.747	1.698	Balance at end of year

31 Desember/December 31, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Giro pada Bank Lain						Current Accounts with Other Banks
Saldo awal	14	-	1.682	2	1.698	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	-	-	49	-	49	Net remeasurement of impairment losses
Saldo akhir tahun	14	-	1.731	2	1.747	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2021

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Giro pada Bank Lain						Current Accounts with Other Banks
Saldo awal	7	-	1.799	2	1.808	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	7	-	(117)	-	(110)	Net remeasurement of impairment losses
Saldo akhir tahun	14	-	1.682	2	1.698	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses provided on current accounts with other banks is adequate.

- g. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

- g. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 46.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

a. Based on currency and type

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Term Deposit Bank Indonesia	7.998.224	20.495.486	Term Deposit Bank Indonesia
Deposit Facility Bank Indonesia	2.499.670	499.924	Deposit Facility Bank Indonesia
Deposit Facility Syariah Bank Indonesia	2.078.000	5.050.000	Deposit Facility Sharia Bank Indonesia
Inter-bank call Money PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	400.000	100.000	Inter-bank call Money PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-	45.000	Bank Indonesia Sharia Certificate
	12.975.894	26.190.410	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>			<u>Related Party (Note 43)</u>
<u>Tabungan</u>			<u>Savings Deposits</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61	337	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	61	337	
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign currencies</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Term Deposit Bank Indonesia	-	1.710.301	Term Deposit Bank Indonesia
Total	12.975.955	27.901.048	Total

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp2.078.000 dan Rp5.095.000, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

As of December 31, 2022 and 2021, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp2,078,000 and Rp5,095,000, respectively.

b. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo

b. Based on remaining period until maturity

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
≤ 1 bulan	12.975.955	27.871.048	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 6 bulan	-	30.000	> 1 month ≤ 6 months
Total	12.975.955	27.901.048	Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

- c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:

**Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31**

	2022	2021
Rupiah	3,47%	3,01%
Mata Uang Asing	0,96%	0,01%

- d. Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diklasifikasikan sebagai lancar.
- e. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, karena manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.
- f. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

8. EFEK-EFEK

- a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Pihak Ketiga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	793.831	688.945
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	83.097
Diukur pada biaya perolehan di amortisasi	79.278	119.131
	<u>873.109</u>	<u>891.173</u>
Pihak Berelasi (Catatan 43)		
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	655.293	986.855
Diukur pada biaya perolehan di amortisasi	194.766	354.877
	<u>850.059</u>	<u>1.341.732</u>
Total	<u>1.723.168</u>	<u>2.232.905</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.399)	(2.000)
Neto	<u><u>1.720.769</u></u>	<u><u>2.230.905</u></u>

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

- c. Average annual interest rates for placement with Bank Indonesia and other banks:

Rupiah
Foreign Currencies

- d. All placements with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2022 and 2021, are classified as current.
- e. Management believes no allowance for impairment losses is required as of December 31, 2022 and 2021, because management believes that placements with Bank Indonesia and other banks are fully collectible.
- f. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 46.

8. SECURITIES

- a. Based on purpose, related party and third party

Third Parties
Fair value through profit or loss
Fair value through other comprehensive income
Amortized cost

Related Party (Note 43)
Fair value through other comprehensive income
Amortized cost

Total

Allowance for impairment losses

Net

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit

b. Based on currency, type and issuer

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>			<u>Fair value through profit or loss</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Reksadana			Mutual Funds
PT Syailendra Capital	100.486	-	PT Syailendra Capital
PT Berdikari Manajemen Investasi	100.470		PT Berdikari Manajemen Investasi
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	100.460	-	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
PT Mega Asset Management	-	100.000	PT Mega Asset Management
Efek Beragun Aset			Asset Backed Securities
KIK - SP -BTN 05 Kelas B	176.898	198.219	KIK EBA - SP - BTN 05 Class B
EBA - SP - BTN04 Kelas B	95.685	119.806	EBA - SP - BTN04 Class B
EBA - SP - BTN06 Kelas B	64.494	82.490	EBA - SP - BTN06 Class B
EBA - SP - BTN03 Kelas B	52.580	59.541	EBA - SP - BTN03 Class B
KIK - SP -BTN 07 Kelas B	52.238	-	KIK EBA - SP - BTN 07 Class B
EBA - SP - BTN02 Kelas B	50.520	57.207	EBA - SP - BTN02 Class B
KIK EBA BTN 05 Kelas B	-	71.682	KIK EBA BTN 05 Class B
	<u>793.831</u>	<u>688.945</u>	
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>			<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Obligasi			Bonds
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap III Seri A 2019	-	23.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Phase III Series A 2019
Tahap I Seri B 2017	-	5.071	Phase I Series B 2017
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap I Seri C 2019	-	20.550	PT Bank CIMB Niaga Tbk Phase I Series C 2019
Tahap III Seri C 2017	-	13.144	Phase III Series C 2017
Tahap I Seri B 2019	-	8.072	Phase I Series B 2019
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Tahap I Seri B 2019	-	13.260	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Phase I Series B 2019
	<u>-</u>	<u>83.097</u>	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan) Rupiah (lanjutan) Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>			<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued) Rupiah (continued) Related Parties (Note 43)</u>
Obligasi			Bonds
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Tahap II Seri D 2017	26.598	-	Phase II Series D 2017
Tahap I Seri B 2019	-	63.800	Phase I Series B 2019
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Sukuk Tahap II Seri B 2017	52.424	54.173	Sukuk Phase II Series B 2017
Sukuk Tahap II Seri A 2017	-	25.565	Sukuk Phase II Series A 2017
PT Bank Mandiri Taspen			PT Bank Mandiri Taspen
Tahap II Seri B 2021	20.108	-	Phase II Series B 2021
Tahap I Seri A 2019	-	5.078	Phase I Series A 2019
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Tahap II 2021	24.635	25.000	Phase II 2021
Tahap I Seri B 2021	24.647	-	Phase I Series B 2021
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Tahap IV Seri A 2022	48.672	-	Phase IV Series A 2022
PT Pegadaian (Persero)			PT Pegadaian (Persero)
Sukuk Mudharabah IV 2021	30.603	30.013	Sukuk Mudharabah IV 2021
Sukuk Mudharabah II 2022	28.028	-	Sukuk Mudharabah II 2022
PT Timah (Persero) Tbk			PT Timah (Persero) Tbk
Tahap II Seri A 2019	-	50.000	Phase II Series A 2019
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)			PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Seri A 2020	-	26.000	Series A 2020
Seri B 2020	-	15.000	Series B 2020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tahap III 2018	-	7.074	Phase III 2018
Efek Beragun Aset			Asset Backed Securities
PT Indonesia Power			PT Indonesia Power
KIK EBA IP PLN			KIK EBA IP PLN
Seri A Tahun 2017	-	26.269	Series A Year 2017
Medium Term Notes			Medium Term Notes
Perum Perumnas			Perum Perumnas
Tahap III Seri A 2018	103.083	100.000	Phase III Series A 2018
	358.798	427.972	

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>		
<u>Mata Uang Asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Obligasi</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Euro Medium		
Term Notes (EMTN)-2024	60.977	80.500
Term Notes (EMTN)-2025	30.434	166.827
PT Pertamina (Persero)		
Senior Unsecured Notes		
Due 2030	27.093	28.505
Due 2050	36.038	42.758
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		
Unsecured Fixed	50.944	109.506
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)		
Senior Notes - 2025	15.028	15.393
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Senior Unsecured Notes Due 2024	-	42.635
Medium Term Notes		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
EMTN Programme		
Indonesia Eximbank - 2017	75.981	72.759
	296.495	558.883
	655.293	1.069.952

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)</u>
<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
<u>Related Parties (Note 43)</u>
<u>Bonds</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Euro Medium
Term Notes (EMTN)-2024
Term Notes (EMTN)-2025
PT Pertamina (Persero)
Senior Unsecured Notes
Due 2030
Due 2050
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Unsecured Fixed
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Senior Notes - 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Senior Unsecured Notes Due 2024
Medium Term Notes
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
EMTN Programme
Indonesia Eximbank - 2017

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
<u>Diukur pada biaya perolehan di amortisasi</u>			<u>Amortized cost</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Obligasi			Bonds
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap II Seri B 2018	77.150	79.915	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Phase II Series B 2018
PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007	2.000	2.000	PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap I Seri B 2019	-	20.111	PT Bank CIMB Niaga Tbk Phases I Series B 2019
Tahap II Seri C 2017	-	17.105	Phases II Series C 2017
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	128	-	Domestic Documentary Letters of Credit
	<u>79.278</u>	<u>119.131</u>	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>			<u>Related Parties (Note 43)</u>
Obligasi			Bonds
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021	25.338	25.577	PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018	5.027	5.038	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phases III 2018
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap III Seri B 2017	-	25.115	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase III Series B 2017
Tahap I Seri B 2019	-	60.048	Phase I Series B 2019
<u>Medium Term Notes</u>			<u>Medium Term Notes</u>
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	50.000	-	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
<u>Reksadana</u>			<u>Mutual Funds</u>
PT Permodalan Nasional Madani Investment Management	100.000	100.000	PT Permodalan Nasional Madani Investment Management
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	14.401	139.099	Domestic Documentary Letters of Credit
	<u>194.766</u>	<u>354.877</u>	
	<u>274.044</u>	<u>474.008</u>	
Total	1.723.168	2.232.905	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.399)	(2.000)	Allowance for impairment losses
Neto	<u>1.720.769</u>	<u>2.230.905</u>	Net

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

Berikut adalah perubahan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021:

31 Desember/December 31, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek						Securities
Saldo awal	1.432.209	-	-	111.751	1.543.960	Beginning balancer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(442.631)	-	-	143	(442.488)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	761.634	-	-	28.176	789.810	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(936.812)	-	-	(25.133)	(961.945)	Derecognized financial assets
Saldo akhir tahun	814.400	-	-	114.937	929.337	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2021

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek						Securities
Saldo awal	2.263.497	-	-	105.807	2.369.304	Beginning balancer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(44.732)	-	-	2.304	(42.428)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	481.757	-	-	30.013	511.770	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.268.313)	-	-	(26.373)	(1.294.686)	Derecognized financial assets
Saldo akhir tahun	1.432.209	-	-	111.751	1.543.960	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

c. Jatuh tempo dan suku bunga

c. Maturity and interest rate

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah				Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap III Seri A 2019	Obligasi/Bonds	18 Oktober/ October 18, 2022	8,25% tetap/ fixed	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Phase III Series A 2019
Tahap I Seri B 2017	Obligasi/Bonds	6 Desember/ December 6, 2022	8,15% tetap/ fixed	Phase I Series B 2017
Tahap II Seri B 2018	Obligasi/Bonds	28 September/ September 28, 2023	9,50% tetap/ fixed	Phase II Series B 2018
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Tahap I Seri B 2019	Obligasi/Bonds	24 Mei/ May 24, 2022	8,55% tetap/ fixed	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Phase I Series B 2019
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap II Seri C 2017	Obligasi/Bonds	23 Agustus/ August 23, 2022	8,15% tetap/ fixed	PT Bank CIMB Niaga Tbk Phase II Series C 2017
Tahap III Seri C 2017	Obligasi/Bonds	2 November/ November 2, 2022	7,75% tetap/ fixed	Phase III Series C 2017
Tahap I Seri B 2019	Obligasi/Bonds	19 Desember/ December 19, 2022	7,55% tetap/ fixed	Phase I Series B 2019
Tahap I Seri C 2019	Obligasi/Bonds	19 Desember/ December 19, 2024	7,80% tetap/ fixed	Phase I Series C 2019

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

c. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	5 Juli/ July 5, 2012	10,35% tetap/ fixed	PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007
PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Power PLN	Efek Beragun Aset/ Asset Backed Securities	19 September/ September 19, 2022	8,02% tetap/ fixed	PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Power PLN
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	Medium Term Notes	10 Desember/ December 10, 2023	11,25% tetap/ fixed	Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Tahun 2022	Medium Term Notes	2 November/ November 2, 2027	9,00% tetap/ fixed	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Year 2022
PT Timah (Persero) Tbk Tahap II Seri A 2019	Obligasi/Bonds	15 Agustus/ August 15, 2022	8,50% tetap/ fixed	PT Timah (Persero) Tbk Phase II Series A 2019
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Seri A 2020	Obligasi/Bonds	1 September/ September 1, 2023	9,95% tetap/ fixed	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Series A Year 2020
Seri B 2020	Obligasi/Bonds	1 September/ September 1, 2025	10,55% tetap/ fixed	Series B Year 2020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Seri B 2019	Obligasi/Bonds	7 November/ November 7, 2022	7,60% tetap/ fixed	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase I Series B 2019
Tahap III Seri B 2017	Obligasi/Bonds	24 Agustus/ August 24, 2022	8,00% tetap/ fixed	Phase III Series B 2017
Tahap II Seri D 2017	Obligasi/Bonds	11 April/ April 11, 2027	8,80% tetap/ fixed	Phase II Series D 2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018	Obligasi/Bonds	21 September/ September 21, 2023	8,50% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase III 2018
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahap II 2021	Obligasi/Bonds	17 November/ November 17, 2026	6,00% tetap/ fixed	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Phase II 2021
Tahap I Seri B 2021	Obligasi/Bonds	8 Juli/ July 8, 2026	6,40% tetap/ fixed	Phase I Series B 2021
PT Bank Mandiri Taspen Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	26 November/ November 26, 2022	7,90% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri Taspen Phase I Series A 2019
Tahap II Seri A 2021	Obligasi/Bonds	28 April/ April 28, 2024	6,50% tetap/ fixed	Phase II Series A 2021
Tahap II Seri B 2021	Obligasi/Bonds	26 April/ April 26, 2026	7,25% tetap/ fixed	Phase II Series B 2021
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Tahap II Seri A 2017	Obligasi/Bonds	3 November/ November 3, 2022	7,20% tetap/ fixed	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Phase II Series A 2017
Sukuk Tahap II Seri B 2017	Obligasi/Bonds	3 November/ November 3, 2027	8,20% tetap/ fixed	Sukuk Phase II Series B 2017
PT Waskita Karya Realty Seri A 2022	Obligasi/Bonds	12 Mei/ May 12, 2027	6,65% tetap/ fixed	PT Waskita Karya Realty Series A 2022

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

c. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
PT Pegadaian (Persero) Sukuk <i>Mudharabah</i> IV 2021	Obligasi/Bonds	6 April/ April 6, 2024	6,00% tetap/ fixed	PT Pegadaian (Persero) Sukuk <i>Mudharabah</i> IV 2021
Sukuk <i>Mudharabah</i> II 2022	Obligasi/Bonds	16 Agustus/ August 16, 2025	5,75% tetap/ fixed	Sukuk <i>Mudharabah</i> II 2022
Mata Uang Asing				Foreign Currencies
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN <i>Programme Indonesia</i> Eximbank - 2017	Medium Term Notes	6 April/ April 6, 2024	3,88% tetap/ fixed	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN <i>Programme Indonesia</i> Eximbank - 2017
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2024	Obligasi/Bonds	28 Maret/ March 28, 2024	3,95% tetap/ fixed	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Senior Unsecured Notes Due 2024
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes	Obligasi/Bonds	16 Mei/ May 16, 2024	5,13% tetap/ fixed	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024	Obligasi/Bonds	11 April/ April 11, 2024	3,75% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024
Term Notes (EMTN) - 2025	Obligasi/Bonds	13 Mei/ May 13, 2025	4,75% tetap/ fixed	Term Notes (EMTN) - 2025
PT Pertamina (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2030	Obligasi/Bonds	21 Januari/ January 21, 2030	3,10% tetap/ fixed	PT Pertamina (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2030
Senior Unsecured Notes Due 2050	Obligasi/Bonds	21 Januari/ January 21, 2050	4,18% tetap/ fixed	Senior Unsecured Notes Due 2050
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025	Obligasi/Bonds	5 Mei/ May 5, 2025	4,25% tetap/ fixed	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025

d. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo (efek-efek yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi)

d. Remaining period to maturity (amortized cost securities)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
≤ 1 tahun	96.706	263.477	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 5 tahun	175.338	210.531	> 1 year ≤ 5 years
> 10 tahun	2.000	-	> 10 year
	274.044	474.008	

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Peringkat

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

8. SECURITIES (continued)

e. Rating

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia, are as follows:

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember/ Desember 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	Issuer
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018 <i>Euro Medium</i>	Obligasi/Bonds	-	idAAA	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase III 2018 <i>Euro Medium</i>
<i>Term Notes (EMTN) - 2024</i>	Obligasi/Bonds	Baa2 ¹⁾	Baa2 ¹⁾	<i>Term Notes (EMTN) - 2024</i>
<i>Term Notes (EMTN) - 2025</i>	Obligasi/Bonds	Baa2 ¹⁾	Baa2 ¹⁾	<i>Term Notes (EMTN) - 2025</i>
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021	Obligasi/Bonds	AA ¹⁾	idAA+	PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021
Tahap II Seri B 2021	Obligasi/Bonds	AA ¹⁾	-	Phase II Series B 2021
Tahap I Seri A 2019	Obligasi/Bonds	-	idAA	Phase I Series A 2019
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Tahap I Seri B 2019	Obligasi/Bonds	-	idAAA	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Phase I Series B 2019
PT Timah (Persero) Tbk Tahap II Seri A 2019	Obligasi/Bonds	-	idA+	PT Timah (Persero) Tbk Phase II Series A 2019
PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap II Seri C 2017	Obligasi/Bonds	-	idAAA	PT Bank CIMB Niaga Tbk Phase II Series C 2017
Tahap III Seri C 2017	Obligasi/Bonds	-	idAAA	Phase III Series C 2017
Tahap I Seri C 2019	Obligasi/Bonds	-	idAAA	Phase I Series C 2019
Tahap I Seri B 2019	Obligasi/Bonds	-	idAAA	Phase I Series B 2019
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahap II 2021	Obligasi/Bonds	idAAA	idAAA	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Phase II 2021
Tahap I Seri B 2021	Obligasi/Bonds	idAAA	-	Phase I Series B 2021
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk <i>Unsecured Fixed</i> <i>Term Notes (EMTN) - 2024</i>	Obligasi/Bonds	Baa2 ^{*)}	Baa2 ^{*)}	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk <i>Unsecured Fixed</i> <i>Term Notes (EMTN) - 2024</i>
PT Pertamina (Persero) <i>Unsecured Fixed</i> <i>Term Notes (EMTN) - 2030</i>	Obligasi/Bonds	Baa2 ^{*)}	Baa2 ^{*)}	PT Pertamina (Persero) <i>Unsecured Fixed</i> <i>Term Notes (EMTN) - 2030</i>
<i>Term Notes (EMTN) - 2050</i>	Obligasi/Bonds	Baa2 ^{*)}	Baa2 ^{*)}	<i>Term Notes (EMTN) - 2050</i>
PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Seri A Tahun 2017	Efek Beragun Aset/ Asset Backed Securities	-	idAAA(sf)	PT Indonesia Power KIK EBA IP PLN Series A Year 2017
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	<i>Medium Term Notes</i>	idBBB-	idBBB-	Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Tahun 2022	<i>Medium Term Notes</i>	idAAA	-	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Year 2022
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia <i>Euro Medium</i> <i>Term Notes (EMTN) - 2024</i>	Obligasi/Bonds	Baa2 ¹⁾	Baa2 ¹⁾	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia <i>Euro Medium</i> <i>Term Notes (EMTN) - 2024</i>
PT Waskita Karya Realty Seri A 2022	Obligasi/Bonds	idAAA(gg)	-	PT Waskita Karya Realty Series A 2022

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Peringkat

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut: (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

e. Rating

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia, are as follows: (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	Issuer
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Seri A 2020	Obligasi/Bonds	-	idAA	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Series A Year 2020
Seri B 2020	Obligasi/Bonds	-	idAA	Series B Year 2020
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap II Seri B 2018	Obligasi/Bonds	idAA	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Phase II Series B 2018
Tahap III Seri A 2019	Obligasi/Bonds	-	idAA-	Phase III Series A 2019
Tahap I Seri B 2017	Obligasi/Bonds	-	idAA-	Phase I Series B 2017
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025	Obligasi/Bonds	Baa3*)	Baa3*)	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Seri B 2019	Obligasi/Bonds	-	idAAA	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase I Series B 2019
Tahap III Seri B 2017	Obligasi/Bonds	idAAA	idAAA	Phase III Series B 2017
Tahap II Seri D 2017	Obligasi/Bonds	-	idAAA	Phase II Series D 2017
Senior Unsecured Notes Due 2024	Obligasi/Bonds	-	Baa2*)	Senior Unsecured Notes Due 2024
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Tahap II 2017 Seri B	Obligasi/Bonds	idAAA(sy)	idAAA(sy)	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Phase II 2017 Series B
Sukuk Tahap II 2017 Seri A	Obligasi/Bonds	-	idAAA(sy)	Sukuk Phase II 2017 Series A
PT Pegadaian (Persero) Sukuk Mudharabah IV 2021	Obligasi/Bonds	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	PT Pegadaian (Persero) Sukuk Mudharabah IV 2021
Sukuk Mudharabah II 2022	Obligasi/Bonds	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	Sukuk Mudharabah II 2022

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch

*) Based on ratings published by Moody's
**) Based on ratings published by Fitch

f. Kolektibilitas

Kolektibilitas efek-efek adalah sebagai berikut:

f. Collectibility

The collectibility of securities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Lancar	1.628.411	2.118.718	Current
Dalam Perhatian Khusus	36.675	42.076	Special Mention
Kurang Lancar	3.148	4.474	Substandard
Diragukan	5.436	7.284	Doubtful
Macet	49.498	60.353	Loss
Total	1.723.168	2.232.905	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.399)	(2.000)	Allowance for impairment losses
Neto	1.720.769	2.230.905	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

g. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

g. The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

31 Desember/December 31, 2022						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya						Securities at fair value through other comprehensive income
Saldo awal	71.617	-	-	-	71.617	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(20.889)	-	-	-	(20.889)	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	238	-	-	-	238	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.088)	-	-	-	(3.088)	Derecognized financial assets
Pembayaran kembali valuta asing dan perubahan lain	4.081	-	-	-	4.081	Repayment foreign exchange and other movement
Saldo akhir tahun	51.959	-	-	-	51.959	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2021						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya						Securities at fair value through other comprehensive income
Saldo awal	27.746	-	-	-	27.746	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	49.991	-	-	-	49.991	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.484	-	-	-	1.484	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(11)	-	-	-	(11)	Derecognized financial assets
Pembayaran kembali valuta asing dan perubahan lain	(7.593)	-	-	-	(7.593)	Repayment foreign exchange and other movement
Saldo akhir tahun	71.617	-	-	-	71.617	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2022						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi						Securities at amortized cost
Saldo awal	-	-	-	2.000	2.000	Beginning balance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	399	-	-	-	399	New financial assets originated or purchased
Saldo akhir tahun	399	-	-	2.000	2.399	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

h. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai.

h. Management believes that the allowance for impairment losses provided on securities is adequate.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- i. Bank mengakui (kerugian) keuntungan bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar (Rp234.089) dan Rp76.734, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan dalam akun "(Kerugian) keuntungan dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- j. Nilai pasar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif lain" pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing berkisar dari 77,16% sampai dengan 125,88% dan 71,51% sampai dengan 164,97%.
- k. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi bersih (setelah pajak tangguhan) sebesar Rp35.792 dan Rp89.900 dari perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp51.959 dan Rp71.617 masing-masing pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021 dalam akun keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah setelah pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan.
- l. Terdapat investasi efek-efek dengan pihak-pihak berelasi sebesar Rp850.059 dan Rp1.341.732, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 43).
- m. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

8. SECURITIES (continued)

- i. The Bank recognized net (loss) gain on sale of securities amounting to (Rp234,089) and Rp76,734, for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "(Loss) gain on sale of securities - net".
- j. As of December 31, 2022 and 2021, the market values of securities classified as fair value through profit or loss and Fair Value Through Other Comprehensive Income of nominal amounts range from 77.16% to 125.88% and range from 71.51% to 164.97% respectively.
- k. The Bank recognized unrealized gain - net (after deferred tax) of Rp35,792 and Rp89,900 from the changes in fair values through other comprehensive include allowance for impairment losses amounted Rp51,959 and Rp 71,617 as of December 31, 2022 and 2021, respectively, which are presented as unrealized gain (loss) on securities and government bonds, net of deferred tax in the statement of financial position.
- l. As of December 31, 2022 and 2021, investments in securities with related parties amounted to Rp850,059 and Rp1,341,732, respectively (Note 43).
- m. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 46.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>			<u>Related Party (Note 43)</u>
Diukur pada nilai wajar			
melalui laba rugi	19.591.199	14.580.217	Fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.332.949	21.275.682	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	18.040.825	10.224.399	Amortized cost
Total	51.964.973	46.080.298	Total

9. GOVERNMENT BONDS

a. Based on purpose, related party and third party

b. Berdasarkan mata uang dan jenis

b. Based on currency and type

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>			<u>Fair value through profit or loss</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0071	88.494	198.658	FR 0071
FR 0091	73.201	201.591	FR 0091
FR 0095	70.191	-	FR 0095
FR 0040	55.701	-	FR 0040
FR 0068	54.890	114.744	FR 0068
FR 0096	52.743	-	FR 0096
PBS 017	51.220	26.055	PBS 017
FR 0046	46.040	-	FR 0046
FR 0080	41.472	167.535	FR 0080
ORI 018	40.110	299	ORI 018
FR 0090	33.017	42.363	FR 0090
FR 0087	30.396	212.150	FR 0087
FR 0072	23.366	292.622	FR 0072
FR 0084	20.526	131.725	FR 0084
FR 0092	16.136	86.650	FR 0092
FR 0083	11.643	47.107	FR 0083
FR 0064	10.370	145.168	FR 0064
FR 0078	9.002	112.460	FR 0078
ORI 019	2.087	8	ORI 019
FR 0097	701	-	FR 0097
ORI 021	496	-	ORI 021
FR 0093	290	-	FR 0093
FR 0074	207	84.826	FR 0074
FR 0075	206	88.681	FR 0075
FR 0085	187	21.816	FR 0085
SR 0017	198	-	SR 0017
SR 0015	191	9.734	SR 0015
FR 0065	97	19.746	FR 0065
SR 0014	80	-	SR 0014
ORI 017	70	468	ORI 017
FR 0088	65	400	FR 0088
SR 0012	50	-	SR 0012
FR 0082	-	254.425	FR 0082
FR 0070	-	165.637	FR 0070
FR 0059	-	139.537	FR 0059
FR 0073	-	118.721	FR 0073
FR 0076	-	73.113	FR 0076
PBS 027	-	62.081	PBS 027
FR 0077	-	61.504	FR 0077
FR 0063	-	51.305	FR 0063
FR 0056	-	45.177	FR 0056
FR 0079	-	37.797	FR 0079
FR 0086	-	35.545	FR 0086
PBS 031	-	33.940	PBS 031
PBS 032	-	21.335	PBS 032
ORI 020	-	1.263	ORI 020
SR 0013	-	1.132	SR 0013
FR 0089	-	1.112	FR 0089

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Pihak berelasi (lanjutan)		
<u>Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Tingkat bunga tetap (lanjutan)		
FR 0062	-	883
SR 0011	-	300
ORI 016	-	51
	733.443	3.109.664
<i>Zero Coupon Bonds</i>		
SPN12230303	3.334.531	-
SPN12230203	2.779.061	-
SPN12230105	2.061.001	-
SPN12230413	1.744.737	-
SPN12230526	1.494.707	-
SPN12230330	1.284.484	-
SPN12230622	1.220.975	-
SPN03230208	760.534	-
SPN12230818	750.789	-
SPN12230914	723.728	-
SPN03230222	496.595	-
SPNS02052023	473.497	-
SPNS07032023	421.154	-
SPN03230111	349.606	-
SPNS10012023	299.754	-
SPN12231207	224.643	-
SPN03230308	99.130	-
SPN12230720	97.296	-
SPN12231012	96.027	-
SPN12231109	95.755	-
SPNS07022023	49.752	-
SPN12220106	-	2.438.688
SPN12220203	-	2.316.400
SPN12220527	-	1.477.570
SPN12220303	-	1.266.101
SPN12220331	-	842.146
SPN03220126	-	802.890
SPN03220112	-	668.707
SPN12220707	-	382.064
SPN12220819	-	342.013
SPN12220915	-	264.138
SPNS08032022	-	149.137
SPNS12022022	-	146.057
SPNS06042022	-	107.460
SPN12221013	-	100.252
SPNS14012022	-	99.880
SPNS03052022	-	47.668
	18.857.756	11.451.171
	19.591.199	14.560.835
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDOIS 2031	-	18.773
INDON 2024N	-	609
	-	19.382
	19.591.199	14.580.217

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on currency and type (continued)

	31 Desember/ December 31, 2021
Related parties (continued)	
<u>Fair value through profit or loss (continued)</u>	
<u>Rupiah (continued)</u>	
Fixed interest rate (continued)	
FR 0062	883
SR 0011	300
ORI 016	51
<i>Zero Coupon Bonds</i>	
SPN12230303	-
SPN12230203	-
SPN12230105	-
SPN12230413	-
SPN12230526	-
SPN12230330	-
SPN12230622	-
SPN03230208	-
SPN12230818	-
SPN12230914	-
SPN03230222	-
SPNS02052023	-
SPNS07032023	-
SPN03230111	-
SPNS10012023	-
SPN12231207	-
SPN03230308	-
SPN12230720	-
SPN12231012	-
SPN12231109	-
SPNS07022023	-
SPN12220106	2.438.688
SPN12220203	2.316.400
SPN12220527	1.477.570
SPN12220303	1.266.101
SPN12220331	842.146
SPN03220126	802.890
SPN03220112	668.707
SPN12220707	382.064
SPN12220819	342.013
SPN12220915	264.138
SPNS08032022	149.137
SPNS12022022	146.057
SPNS06042022	107.460
SPN12221013	100.252
SPNS14012022	99.880
SPNS03052022	47.668

Foreign Currencies
United States Dollar
Fixed interest rate
INDOIS 2031
INDON 2024N

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0083	1.360.887	1.702.498
FR 0068	567.123	722.474
FR 0078	490.508	418.376
FR 0084	489.041	806.004
FR 0090	470.978	-
FR 0042	435.458	311.811
FR 0056	427.016	451.764
FR 0040	389.801	421.786
FR 0072	369.052	1.091.228
FR 0071	350.602	555.455
FR 0059	323.036	173.884
FR 0081	272.327	176.275
FR 0087	263.695	338.234
FR 0091	243.430	-
FR 0044	241.971	39.881
FR 0052	205.584	309.932
FR 0075	188.673	1.202.183
FR 0039	171.841	5.624
FR 0082	156.466	462.119
FR 0073	140.750	404.180
FR 0077	129.035	-
FR 0037	129.092	285.917
FR 0046	102.310	43.373
FR 0085	57.797	1.335.151
FR 0062	57.785	63.520
FR 0054	47.085	78.919
FR 0079	-	473.198
FR 0076	-	386.467
FR 0080	-	307.411
FR 0047	-	209.013
FR 0064	-	197.424
FR 0065	-	169.250
FR 0086	-	162.490
FR 0067	-	110.188
FR 0043	-	91.472
FR 0074	-	74.222
FR 0061	-	50.702
ORI 016	-	41.123
ORI 017	-	20.785
FR 0050	-	7.898
FR 0045	-	7.684
FR 0057	-	6.194
	8.081.343	13.716.109

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on currency and type (continued)

	Rupiah
<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income</u>	
<u>Rupiah</u>	
Fixed interest rate	
FR 0083	1.702.498
FR 0068	722.474
FR 0078	418.376
FR 0084	806.004
FR 0090	-
FR 0042	311.811
FR 0056	451.764
FR 0040	421.786
FR 0072	1.091.228
FR 0071	555.455
FR 0059	173.884
FR 0081	176.275
FR 0087	338.234
FR 0091	-
FR 0044	39.881
FR 0052	309.932
FR 0075	1.202.183
FR 0039	5.624
FR 0082	462.119
FR 0073	404.180
FR 0077	-
FR 0037	285.917
FR 0046	43.373
FR 0085	1.335.151
FR 0062	63.520
FR 0054	78.919
FR 0079	473.198
FR 0076	386.467
FR 0080	307.411
FR 0047	209.013
FR 0064	197.424
FR 0065	169.250
FR 0086	162.490
FR 0067	110.188
FR 0043	91.472
FR 0074	74.222
FR 0061	50.702
ORI 016	41.123
ORI 017	20.785
FR 0050	7.898
FR 0045	7.684
FR 0057	6.194

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

b. Based on currency and type (continued)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>			<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah (continued)</u>
Obligasi Syariah Negara			Government Sharia Bond
PBS 027	479.969	491.578	PBS 027
PBS 017	308.382	231.083	PBS 017
PBS 030	273.796	185.145	PBS 030
PBS 026	254.920	268.626	PBS 026
PBS 032	194.051	85.561	PBS 032
PBS 003	191.598	97.537	PBS 003
PBS 025	105.392	189.162	PBS 025
PBS 019	104.917	109.217	PBS 019
PBS 029	101.669	107.355	PBS 029
PBS 022	79.275	149.424	PBS 022
PBS 021	71.851	75.330	PBS 021
PBS 028	71.208	76.543	PBS 028
PBS 012	59.124	-	PBS 012
PBS 004	45.960	45.251	PBS 004
PBS 033	32.921	-	PBS 033
PBS 034	32.610	-	PBS 034
PBS 011	8.209	8.620	PBS 011
PBSG 001	4.199	-	PBS 001
	<u>2.420.051</u>	<u>2.120.432</u>	
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign Currencies</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
INDON 2047	775.119	935.603	INDON 2047
INDON 2046	544.954	655.627	INDON 2046
INDON 2038	516.227	597.497	INDON 2038
INDON 2044	383.132	502.327	INDON 2044
INDON 2045	365.197	493.412	INDON 2045
INDON 2043	361.545	461.095	INDON 2043
INDON 2048	203.418	246.628	INDON 2048
INDON 2049	158.781	195.193	INDON 2049
INDON 2037	127.775	293.024	INDON 2037
INDOIS 2050	127.609	296.413	INDOIS 2050
INDON 2049N	116.540	145.516	INDON 2049N
INDON 2050N	90.032	165.157	INDON 2050N
USDFR0002	61.226	62.546	USDFR0002
INDON 2042	-	341.359	INDON 2042
INDON 2035	-	47.744	INDON 2035
	<u>3.831.555</u>	<u>5.439.141</u>	
	<u>14.332.949</u>	<u>21.275.682</u>	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

b. Based on currency and type (continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
<u>Diukur pada biaya</u>			<u>Amortized cost</u>
<u>perolehan amortisasi</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			<u>Fixed interest rate</u>
FR 0081	1.457.898	605.616	FR 0081
FR 0084	1.231.951	804.084	FR 0084
FR 0086	1.137.564	634.520	FR 0086
FR 0056	1.048.174	1.066.874	FR 0056
FR 0064	835.184	697.618	FR 0064
FR 0047	804.972	624.324	FR 0047
FR 0059	442.347	53.453	FR 0059
FR 0070	440.831	449.403	FR 0070
FR 0085	405.264	-	FR 0085
FR 0078	340.917	238.804	FR 0078
FR 0044	300.342	311.397	FR 0044
FR 0040	284.041	159.096	FR 0040
FR 0087	262.628	-	FR 0087
FR 0082	238.580	-	FR 0082
FR 0054	151.148	-	FR 0054
FR 0071	137.061	139.386	FR 0071
FR 0073	131.814	-	FR 0073
FR 0077	103.718	106.266	FR 0077
FR 0090	95.292	-	FR 0090
FR 0037	78.003	81.045	FR 0037
FR 0088	74.948	-	FR 0088
FR 0091	47.456	-	FR 0091
FR 0065	46.442	-	FR 0065
FR 0052	41.811	-	FR 0052
FR 0046	41.273	-	FR 0046
FR 0042	16.889	17.231	FR 0042
FR 0039	14.565	15.440	FR 0039
FR 0063	-	318.162	FR 0063
FR 0043	-	30.624	FR 0043
	<u>10.211.113</u>	<u>6.353.343</u>	
Obligasi Syariah Negara			Government Sharia Bond
Sukuk BI	7.116.523	3.099.308	Sukuk BI
	<u>7.116.523</u>	<u>3.099.308</u>	
	<u>17.327.636</u>	<u>9.452.651</u>	
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign Currencies</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Tingkat bunga tetap			<u>Fixed interest rate</u>
INDON 2026	257.113	242.354	INDON 2026
INDOIS 2023	128.695	-	INDOIS 2023
INDOIS 2024	102.380	94.828	INDOIS 2024
INDON 2025	99.348	93.497	INDON 2025
INDON 2023	62.816	59.241	INDON 2023
INDON 2023 N	31.702	29.727	INDON 2023 N
INDOIS 2024N	31.135	28.506	INDOIS 2024N
INDOIS 2022N	-	149.274	INDOIS 2022N
INDON 2022	-	42.732	INDON 2022
INDON 2022N	-	31.589	INDON 2022N
	<u>713.189</u>	<u>771.748</u>	
	<u>18.040.825</u>	<u>10.224.399</u>	
Total	<u>51.964.973</u>	<u>46.080.298</u>	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
Nilai wajar melalui laba rugi Rupiah			Fair value through profit or loss Rupiah
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0040	15 September/ September 15, 2025	11,00% tetap/ fixed	FR 0040
FR 0046	15 Juli/ July 15, 2023	9,50% tetap/ fixed	FR 0046
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed	FR 0056
FR 0059	15 Mei/ May 15, 2027	7,00% tetap/ fixed	FR 0059
FR 0062	15 April/ April 15, 2042	6,38% tetap/ fixed	FR 0062
FR 0063	15 Mei/ May 15, 2023	5,63% tetap/ fixed	FR 0063
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028	6,13% tetap/ fixed	FR 0064
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,63% tetap/ fixed	FR 0065
FR 0068	15 Maret/ March 15, 2034	8,38% tetap/ fixed	FR 0068
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,38% tetap/ fixed	FR 0070
FR 0071	15 Maret/ March 15, 2029	9,00% tetap/ fixed	FR 0071
FR 0072	15 Mei/ May 15, 2036	8,25% tetap/ fixed	FR 0072
FR 0073	15 Mei/ May 15, 2031	8,75% tetap/ fixed	FR 0073
FR 0074	15 Agustus/ August 15, 2032	7,50% tetap/ fixed	FR 0074
FR 0075	15 Mei/ May 15, 2038	7,50% tetap/ fixed	FR 0075
FR 0076	15 Mei/ May 15, 2048	7,38% tetap/ fixed	FR 0076
FR 0077	15 Mei/ May 15, 2024	8,13% tetap/ fixed	FR 0077
FR 0078	15 Mei/ May 15, 2029	8,25% tetap/ fixed	FR 0078
FR 0079	15 April/ April 15, 2039	8,38% tetap/ fixed	FR 0079
FR 0080	15 September/ September 15, 2035	7,50% tetap/ fixed	FR 0080
FR 0082	15 September/ September 15, 2030	7,00% tetap/ fixed	FR 0082
FR 0083	15 April/ April 15, 2040	7,50% tetap/ fixed	FR 0083
FR 0084	15 Februari/ February 15, 2026	7,25% tetap/ fixed	FR 0084
FR 0085	15 April/ April 15, 2031	7,75% tetap/ fixed	FR 0085
FR 0086	15 April/ April 15, 2026	5,50% tetap/ fixed	FR 0086
FR 0087	15 Februari/ February 15, 2031	6,50% tetap/ fixed	FR 0087
FR 0088	15 Juni/ June 15, 2036	6,25% tetap/ fixed	FR 0088
FR 0089	15 Agustus/ August 15, 2051	6,88% tetap/ fixed	FR 0089
FR 0090	15 April/ April 15, 2027	5,13% tetap/ fixed	FR 0090
FR 0091	15 April/ April 15, 2032	6,38% tetap/ fixed	FR 0091
FR 0092	15 Juni/ June 15, 2042	7,13% tetap/ fixed	FR 0092
FR 0093	15 Juli/ July 15, 2037	6,38% tetap/ fixed	FR 0093
FR 0095	15 Agustus/ August 15, 2028	6,38% tetap/ fixed	FR 0095
FR 0096	15 Februari/ February 15, 2033	7,00% tetap/ fixed	FR 0096
FR 0097	15 Juni/ June 15, 2043	7,13% tetap/ fixed	FR 0097

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
Tingkat bunga tetap (lanjutan)			
ORI 016	15 Oktober/ October 15, 2022	6,80% tetap/ fixed	ORI 016
ORI 017	15 Juli/ July 15, 2023	6,40% tetap/ fixed	ORI 017
ORI 018	15 Oktober/ October 15, 2023	5,70% tetap/ fixed	ORI 018
ORI 019	15 Februari/ February 15, 2024	5,57% tetap/ fixed	ORI 019
ORI 020	15 Oktober/ October 15, 2024	4,95% tetap/ fixed	ORI 020
ORI 021	15 Februari/ February 15, 2025	4,90% tetap/ fixed	ORI 021
PBS 017	15 Oktober/ October 15, 2025	6,13% tetap/ fixed	PBS 017
PBS 027	15 Mei/ May 15, 2023	6,50% tetap/ fixed	PBS 027
PBS 031	15 Juli/ July 15, 2024	4,00% tetap/ fixed	PBS 031
PBS 032	15 Juli/ July 15, 2026	4,88% tetap/ fixed	PBS 032
SR 0011	10 Maret/ March 10, 2022	8,05% tetap/ fixed	SR 0011
SR 0012	10 Maret/ March 10, 2023	6,30% tetap/ fixed	SR 0012
SR 0013	10 September/ September 10, 2023	6,05% tetap/ fixed	SR 0013
SR 0014	10 Maret/ March 10, 2024	5,47% tetap/ fixed	SR 0014
SR 0015	10 September/ September 10, 2024	5,10% tetap/ fixed	SR 0015
SR 0017	10 September/ September 10, 2025	5,90% tetap/ fixed	SR 0017
Zero Coupon Bonds SPN	Beragam/ Various	Beragam/ Various	Zero Coupon Bonds SPN
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
Tingkat bunga tetap			
INDOIS 2031	9 Juni/ June 9, 2031	2,55% tetap/ fixed	INDOIS 2031
INDON 2024N	11 Februari/ February 11, 2024	4,45% tetap/ fixed	INDON 2024N
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>			
<u>Rupiah</u>			
Tingkat bunga tetap			
FR 0037	15 September/ September 15, 2026	12,00% tetap/ fixed	FR 0037
FR 0039	15 Agustus/ August 15, 2023	11,75% tetap/ fixed	FR 0039
FR 0040	15 September/ September 15, 2025	11,00% tetap/ fixed	FR 0040
FR 0042	15 Juli/ July 15, 2027	10,25% tetap/ fixed	FR 0042
FR 0043	15 Juli/ July 15, 2022	10,25% tetap/ fixed	FR 0043
FR 0044	15 September/ September 15, 2024	10,00% tetap/ fixed	FR 0044
FR 0045	15 Mei/ May 15, 2037	9,75% tetap/ fixed	FR 0045
FR 0046	15 Juli/ July 15, 2023	9,50% tetap/ fixed	FR 0046
FR 0047	15 Februari/ February 15, 2028	10,00% tetap/ fixed	FR 0047

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Fair value through profit or loss (continued)</u>			
<u>Rupiah (continued)</u>			
Fixed interest rate (continued)			
ORI 016	15 Oktober/ October 15, 2022	6,80% tetap/ fixed	ORI 016
ORI 017	15 Juli/ July 15, 2023	6,40% tetap/ fixed	ORI 017
ORI 018	15 Oktober/ October 15, 2023	5,70% tetap/ fixed	ORI 018
ORI 019	15 Februari/ February 15, 2024	5,57% tetap/ fixed	ORI 019
ORI 020	15 Oktober/ October 15, 2024	4,95% tetap/ fixed	ORI 020
ORI 021	15 Februari/ February 15, 2025	4,90% tetap/ fixed	ORI 021
PBS 017	15 Oktober/ October 15, 2025	6,13% tetap/ fixed	PBS 017
PBS 027	15 Mei/ May 15, 2023	6,50% tetap/ fixed	PBS 027
PBS 031	15 Juli/ July 15, 2024	4,00% tetap/ fixed	PBS 031
PBS 032	15 Juli/ July 15, 2026	4,88% tetap/ fixed	PBS 032
SR 0011	10 Maret/ March 10, 2022	8,05% tetap/ fixed	SR 0011
SR 0012	10 Maret/ March 10, 2023	6,30% tetap/ fixed	SR 0012
SR 0013	10 September/ September 10, 2023	6,05% tetap/ fixed	SR 0013
SR 0014	10 Maret/ March 10, 2024	5,47% tetap/ fixed	SR 0014
SR 0015	10 September/ September 10, 2024	5,10% tetap/ fixed	SR 0015
SR 0017	10 September/ September 10, 2025	5,90% tetap/ fixed	SR 0017
Zero Coupon Bonds SPN	Beragam/ Various	Beragam/ Various	Zero Coupon Bonds SPN
<u>United States Dollar</u>			
Fixed interest rate			
INDOIS 2031	9 Juni/ June 9, 2031	2,55% tetap/ fixed	INDOIS 2031
INDON 2024N	11 Februari/ February 11, 2024	4,45% tetap/ fixed	INDON 2024N
<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income</u>			
<u>Rupiah</u>			
Fixed interest rate			
FR 0037	15 September/ September 15, 2026	12,00% tetap/ fixed	FR 0037
FR 0039	15 Agustus/ August 15, 2023	11,75% tetap/ fixed	FR 0039
FR 0040	15 September/ September 15, 2025	11,00% tetap/ fixed	FR 0040
FR 0042	15 Juli/ July 15, 2027	10,25% tetap/ fixed	FR 0042
FR 0043	15 Juli/ July 15, 2022	10,25% tetap/ fixed	FR 0043
FR 0044	15 September/ September 15, 2024	10,00% tetap/ fixed	FR 0044
FR 0045	15 Mei/ May 15, 2037	9,75% tetap/ fixed	FR 0045
FR 0046	15 Juli/ July 15, 2023	9,50% tetap/ fixed	FR 0046
FR 0047	15 Februari/ February 15, 2028	10,00% tetap/ fixed	FR 0047

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

c. Based on maturity and interest rate

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>			<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah (continued)</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0050	15 Juli/ July 15, 2038	10,50% tetap/ fixed	FR 0050
FR 0052	15 Agustus/ August 15, 2030	10,50% tetap/ fixed	FR 0052
FR 0054	15 Juli/ July 15, 2031	9,50% tetap/ fixed	FR 0054
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed	FR 0056
FR 0057	15 September/ September 15, 2025	11,00% tetap/ fixed	FR 0057
FR 0059	15 Mei/ May 15, 2027	7,00% tetap/ fixed	FR 0059
FR 0061	15 Mei/ May 15, 2022	7,00% tetap/ fixed	FR 0061
FR 0062	15 April/ April 15, 2042	6,38% tetap/ fixed	FR 0062
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028	6,13% tetap/ fixed	FR 0064
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,63% tetap/ fixed	FR 0065
FR 0067	15 Februari/ February 15, 2044	8,75% tetap/ fixed	FR 0067
FR 0068	15 Maret/ March 15, 2034	8,38% tetap/ fixed	FR 0068
FR 0071	15 Maret/ March 15, 2029	9,00% tetap/ fixed	FR 0071
FR 0072	15 Mei/ May 15, 2036	8,25% tetap/ fixed	FR 0072
FR 0073	15 Mei/ May 15, 2031	8,75% tetap/ fixed	FR 0073
FR 0074	15 Agustus/ August 15, 2032	7,50% tetap/ fixed	FR 0074
FR 0075	15 Mei/ May 15, 2038	7,50% tetap/ fixed	FR 0075
FR 0076	15 Mei/ May 15, 2048	7,38% tetap/ fixed	FR 0076
FR 0077	15 Mei/ May 15, 2024	8,13% tetap/ fixed	FR 0077
FR 0078	15 Mei/ May 15, 2029	8,25% tetap/ fixed	FR 0078
FR 0079	15 April/ April 15, 2039	8,38% tetap/ fixed	FR 0079
FR 0080	15 Juni/ June 15, 2035	7,50% tetap/ fixed	FR 0080
FR 0081	15 Juni/ June 15, 2025	6,50% tetap/ fixed	FR 0081
FR 0082	15 September/ September 15, 2030	7,00% tetap/ fixed	FR 0082
FR 0083	15 April/ April 15, 2040	7,50% tetap/ fixed	FR 0083
FR 0084	15 Februari/ February 15, 2026	7,25% tetap/ fixed	FR 0084
FR 0085	15 April/ April 15, 2031	7,75% tetap/ fixed	FR 0085
FR 0086	15 April/ April 15, 2026	5,50% tetap/ fixed	FR 0086
FR 0087	15 Februari/ February 15, 2031	6,50% tetap/ fixed	FR 0087
FR 0090	15 April/ April 15, 2027	5,13% tetap/ fixed	FR 0090
FR 0091	15 April/ April 15, 2032	6,38% tetap/ fixed	FR 0091
ORI 016	15 Oktober/ October 15, 2022	6,80% tetap/ fixed	ORI 016
ORI 017	15 Juli/ July 15, 2023	6,40% tetap/ fixed	ORI 017

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
Tingkat bunga tetap Obligasi Syariah Negara PBS 003	15 Januari/ January 15, 2027	6,00% tetap/ fixed	Government Sharia Bonds PBS 003
PBS 004	15 Januari/ January 15, 2037	6,10% tetap/ fixed	PBS 004
PBS 011	15 Agustus/ August 15, 2023	8,75% tetap/ fixed	PBS 011
PBS 012	15 November/ November 15, 2031	8,88% tetap/ fixed	PBS 012
PBS 017	15 Oktober/ October 15, 2025	6,13% tetap/ fixed	PBS 017
PBS 019	15 September/ September 15, 2023	8,25% tetap/ fixed	PBS 019
PBS 021	15 November/ November 15, 2026	8,50% tetap/ fixed	PBS 021
PBS 022	15 April/ April 15, 2034	8,63% tetap/ fixed	PBS 022
PBS 025	15 Mei/ May 15, 2033	8,38% tetap/ fixed	PBS 025
PBS 026	15 Oktober/ October 15, 2024	6,63% tetap/ fixed	PBS 026
PBS 027	15 Mei/ May 15, 2023	6,55% tetap/ fixed	PBS 027
PBS 028	15 Oktober/ October 15, 2046	7,75% tetap/ fixed	PBS 028
PBS 029	15 Maret/ March 15, 2034	6,38% tetap/ fixed	PBS 029
PBS 030	15 Juli/ July 15, 2028	5,88% tetap/ fixed	PBS 030
PBS 032	15 Juli/ July 15, 2026	4,88% tetap/ fixed	PBS 032
PBS 033	15 Juni/ July 15, 2047	6,75% tetap/ fixed	PBS 033
PBS 034	15 Juni/ July 15, 2039	6,50% tetap/ fixed	PBS 034
PBSG001	15 September/ September 15, 2029	6,50% tetap/ fixed	PBSG001
Tingkat bunga tetap INDOIS 2050	23 Juni/ June 23, 2050	3,80% tetap/ fixed	Fixed interest rate INDOIS 2050
INDON 2035	12 Oktober/ October 12, 2035	8,50% tetap/ fixed	INDON 2035
INDON 2037	17 Februari/ February 17, 2037	6,63% tetap/ fixed	INDON 2037
INDON 2038	17 Januari/ January 17, 2038	7,75% tetap/ fixed	INDON 2038
INDON 2042	17 Januari/ January 17, 2042	5,25% tetap/ fixed	INDON 2042
INDON 2043	15 April/ April 15, 2043	4,63% tetap/ fixed	INDON 2043
INDON 2044	15 Januari/ January 15, 2044	6,75% tetap/ fixed	INDON 2044
INDON 2045	15 Januari/ January 15, 2045	5,13% tetap/ fixed	INDON 2045
INDON 2046	8 Januari/ January 8, 2046	5,95% tetap/ fixed	INDON 2046
INDON 2047	8 Januari/ January 8, 2047	5,25% tetap/ fixed	INDON 2047
INDON 2048	11 Januari/ January 11, 2048	4,35% tetap/ fixed	INDON 2048
INDON 2049	11 Februari/ February 11, 2049	5,35% tetap/ fixed	INDON 2049
INDON 2049N	30 Oktober/ October 30, 2049	3,70% tetap/ fixed	INDON 2049N
INDON 2050N	15 Oktober/ October 15, 2050	4,20% tetap/ fixed	INDON 2050N
USD FR 0002	24 Juni/ June 24, 2026	4,05% tetap/ fixed	USD FR 0002

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)</u>			
<u>Rupiah (continued)</u>			
Government Sharia Bonds PBS 003	15 Januari/ January 15, 2027	6,00% tetap/ fixed	Government Sharia Bonds PBS 003
PBS 004	15 Januari/ January 15, 2037	6,10% tetap/ fixed	PBS 004
PBS 011	15 Agustus/ August 15, 2023	8,75% tetap/ fixed	PBS 011
PBS 012	15 November/ November 15, 2031	8,88% tetap/ fixed	PBS 012
PBS 017	15 Oktober/ October 15, 2025	6,13% tetap/ fixed	PBS 017
PBS 019	15 September/ September 15, 2023	8,25% tetap/ fixed	PBS 019
PBS 021	15 November/ November 15, 2026	8,50% tetap/ fixed	PBS 021
PBS 022	15 April/ April 15, 2034	8,63% tetap/ fixed	PBS 022
PBS 025	15 Mei/ May 15, 2033	8,38% tetap/ fixed	PBS 025
PBS 026	15 Oktober/ October 15, 2024	6,63% tetap/ fixed	PBS 026
PBS 027	15 Mei/ May 15, 2023	6,55% tetap/ fixed	PBS 027
PBS 028	15 Oktober/ October 15, 2046	7,75% tetap/ fixed	PBS 028
PBS 029	15 Maret/ March 15, 2034	6,38% tetap/ fixed	PBS 029
PBS 030	15 Juli/ July 15, 2028	5,88% tetap/ fixed	PBS 030
PBS 032	15 Juli/ July 15, 2026	4,88% tetap/ fixed	PBS 032
PBS 033	15 Juni/ July 15, 2047	6,75% tetap/ fixed	PBS 033
PBS 034	15 Juni/ July 15, 2039	6,50% tetap/ fixed	PBS 034
PBSG001	15 September/ September 15, 2029	6,50% tetap/ fixed	PBSG001
Tingkat bunga tetap INDOIS 2050	23 Juni/ June 23, 2050	3,80% tetap/ fixed	Fixed interest rate INDOIS 2050
INDON 2035	12 Oktober/ October 12, 2035	8,50% tetap/ fixed	INDON 2035
INDON 2037	17 Februari/ February 17, 2037	6,63% tetap/ fixed	INDON 2037
INDON 2038	17 Januari/ January 17, 2038	7,75% tetap/ fixed	INDON 2038
INDON 2042	17 Januari/ January 17, 2042	5,25% tetap/ fixed	INDON 2042
INDON 2043	15 April/ April 15, 2043	4,63% tetap/ fixed	INDON 2043
INDON 2044	15 Januari/ January 15, 2044	6,75% tetap/ fixed	INDON 2044
INDON 2045	15 Januari/ January 15, 2045	5,13% tetap/ fixed	INDON 2045
INDON 2046	8 Januari/ January 8, 2046	5,95% tetap/ fixed	INDON 2046
INDON 2047	8 Januari/ January 8, 2047	5,25% tetap/ fixed	INDON 2047
INDON 2048	11 Januari/ January 11, 2048	4,35% tetap/ fixed	INDON 2048
INDON 2049	11 Februari/ February 11, 2049	5,35% tetap/ fixed	INDON 2049
INDON 2049N	30 Oktober/ October 30, 2049	3,70% tetap/ fixed	INDON 2049N
INDON 2050N	15 Oktober/ October 15, 2050	4,20% tetap/ fixed	INDON 2050N
USD FR 0002	24 Juni/ June 24, 2026	4,05% tetap/ fixed	USD FR 0002

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Diukur pada biaya perolehan amortisasi</u>			<u>Amortized cost</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0037	15 September/ September 15, 2026	12,00% tetap/ fixed	FR 0037
FR 0039	15 Agustus/ August 15, 2023	11,75% tetap/ fixed	FR 0039
FR 0040	15 September/ September 15, 2025	11,00% tetap/ fixed	FR 0040
FR 0044	15 September/ September 15, 2024	10,00% tetap/ fixed	FR 0044
FR 0042	15 Juli/ July 15, 2027	11,00% tetap/ fixed	FR 0042
FR 0043	15 Juli/ July 15, 2022	10,25% tetap/ fixed	FR 0043
FR 0046	15 Juli/ July 15, 2023	9,50% tetap/ fixed	FR 0046
FR 0047	15 Februari/ February 15, 2028	10,00% tetap/ fixed	FR 0047
FR 0052	15 Agustus/ August 15, 2030	10,50% tetap/ fixed	FR 0052
FR 0054	15 Juli/ July 15, 2031	9,50% tetap/ fixed	FR 0054
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed	FR 0056
FR 0059	15 Mei/ May 15, 2027	7,00% tetap/ fixed	FR 0059
FR 0063	15 Mei/ May 15, 2023	5,63% tetap/ fixed	FR 0063
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028	6,13% tetap/ fixed	FR 0064
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,63% tetap/ fixed	FR 0065
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,38% tetap/ fixed	FR 0070
FR 0071	15 Maret/ March 15, 2029	9,00% tetap/ fixed	FR 0071
FR 0073	15 Mei/ May 15, 2031	8,75% tetap/ fixed	FR 0073
FR 0077	15 Mei/ May 15, 2024	8,13% tetap/ fixed	FR 0077
FR 0078	15 Mei/ May 15, 2029	8,25% tetap/ fixed	FR 0078
FR 0081	15 Juni/ June 15, 2025	6,5% tetap/ fixed	FR 0081
FR 0082	15 September/ September 15, 2030	7,00% tetap/ fixed	FR 0082
FR 0084	15 Februari/ February 15, 2026	7,25% tetap/ fixed	FR 0084
FR 0085	15 April/ April 15, 2031	7,75% tetap/ fixed	FR 0085
FR 0086	15 April/ April 15, 2026	5,50% tetap/ fixed	FR 0086
FR 0087	15 Februari/ February 15, 2031	6,50% tetap/ fixed	FR 0087
FR 0088	15 Juni/ June 15, 2036	6,25% tetap/ fixed	FR 0088
FR 0090	15 April/ April 15, 2027	5,13% tetap/ fixed	FR 0090
FR 0091	15 April/ April 15, 2032	6,38% tetap/ fixed	FR 0091
Obligasi Syariah Negara			Government Sharia Bond
Sukuk BI	6 Januari/ January 6, 2023	3,27% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 Februari/ February 3, 2023	3,27% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 Maret/ March 3, 2023	3,27% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Januari/ January 6, 2023	3,21% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	10 April/ April 10, 2023	3,27% tetap/ fixed	Sukuk BI

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Diukur pada biaya perolehan amortisasi</u>			<u>Amortized cost</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
Obligasi Syariah Negara (lanjutan)			Government Sharia Bond (continued)
Sukuk BI	10 Februari/ February 10, 2023	3,20% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	12 Mei/ May 12, 2023	3,26% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 Maret/ March 3, 2023	3,20% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	2 Juni/ June 2, 2023	3,26% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Januari/ January 6, 2023	3,18% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	10 April/ April 10, 2023	3,20% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	7 Juli/ July 7, 2023	3,26% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 Februari/ February 3, 2023	3,96% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	5 Mei/ May 5, 2023	4,00% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	4 Agustus/ August 4, 2023	4,05% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 Maret/ March 3, 2023	4,25% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	2 Juni/ June 2, 2023	4,30% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	1 September/ September 1, 2023	4,35% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	4 Januari/ January 4, 2023	5,05% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Januari/ January 6, 2023	5,05% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	10 April/ April 10, 2023	5,30% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	7 Juli/ July 7, 2023	5,54% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Oktober/ October 6, 2023	5,66% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	11 Januari/ January 11, 2023	5,05% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	13 Januari/ January 13, 2023	5,05% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	16 Januari/ January 16, 2023	5,05% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	18 Januari/ January 18, 2023	5,05% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	20 Januari/ January 20, 2023	5,55% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	24 Januari/ January 24, 2023	5,55% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	25 Januari/ January 25, 2023	5,55% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	27 Januari/ January 27, 2023	5,55% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	30 Januari/ January 30, 2023	5,56% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	1 Februari/ February 1, 2023	5,55% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 Februari/ February 3, 2023	5,55% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	5 Mei/ May 5, 2023	5,85% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	4 Agustus/ August 4, 2023	6,04% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 November/ November 3, 2023	6,16% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Februari/ February 6, 2023	5,56% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	8 Februari/ February 8, 2023	5,56% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	10 Februari/ February 10, 2023	5,56% tetap/ fixed	Sukuk BI

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Diukur pada biaya perolehan amortisasi</u>			<u>Amortized cost</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
Obligasi Syariah Negara (lanjutan)			Government Sharia Bond (continued)
Sukuk BI	13 Februari/ February 13, 2023	5,56% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	15 Februari/ February 15, 2023	5,56% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	17 Februari/ February 17, 2023	6,05% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	20 Februari/ February 20, 2023	6,04% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	24 Februari/ February 24, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	27 Februari/ February 27, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	1 Maret/ March 1, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 Maret/ March 3, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	2 Juni/ June 2, 2023	6,35% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	1 September/ September 1, 2023	6,53% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	1 Desember/ December 1, 2023	6,65% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	2 Januari/ January 2, 2023	5,79% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Maret/ March 6, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	4 Januari/ January 4, 2023	5,78% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	8 Maret/ March 8, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Januari/ January 6, 2023	5,78% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	10 Maret/ March 10, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	9 Januari/ January 9, 2023	5,79% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	13 Maret/ March 13, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	11 Januari/ January 11, 2023	5,79% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	15 Maret/ March 15, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	13 Januari/ January 13, 2023	5,79% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	17 Maret/ March 17, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	2 Januari/ January 2, 2023	5,51% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	16 Januari/ January 16, 2023	5,79% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	20 Maret/ March 20, 2023	6,06% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	4 Januari/ January 4, 2023	5,51% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	18 Januari/ January 18, 2023	5,78% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	23 Maret/ March 23, 2023	6,05% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Januari/ January 6, 2023	5,76% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	20 Januari/ January 20, 2023	6,02% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	24 Maret/ March 24, 2023	6,62% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	2 Januari/ January 2, 2023	5,50% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	9 Januari/ January 9, 2023	5,76% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	23 Januari/ January 23, 2023	6,02% tetap/ fixed	Sukuk BI

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Diukur pada biaya</u>			
<u>perolehan amortisasi (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah</u>			
<u>Amortized cost (continued)</u>			
<u>Rupiah</u>			
<u>Fixed interest rate</u>			
<u>Government Sharia Bond (continued)</u>			
Tingkat bunga tetap			
Obligasi Syariah Negara (lanjutan)			
Sukuk BI	27 Maret/ March 27, 2023	6,26% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	4 Januari/ January 4, 2023	5,50% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	11 Januari/ January 11, 2023	5,76% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	25 Januari/ January 25, 2023	6,03% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	29 Maret/ March 29, 2023	6,26% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	6 Januari/ January 6, 2023	5,50% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	13 Januari/ January 13, 2023	5,76% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	27 Januari/ January 27, 2023	6,02% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	31 Maret/ March 31, 2023	6,2% tetap/ fixed	Sukuk BI
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
<u>United States Dollar (continued)</u>			
<u>Fixed interest rate</u>			
<u>INDON 2022</u>			
Tingkat bunga tetap			
INDON 2022	5 Mei/ May 5, 2022	4,88% tetap/ fixed	INDON 2022
INDOIS 2022N	29 Maret/ March 29, 2022	3,40% tetap/ fixed	INDOIS 2022N
INDOIS 2023	1 Maret/ March 1, 2023	3,75% tetap/ fixed	INDOIS 2024
INDOIS 2024	10 September/ September 10, 2024	4,35% tetap/ fixed	INDOIS 2024
INDOIS 2024N	20 Agustus/ August 20, 2024	3,90% tetap/ fixed	INDON 2024N
INDON 2022	25 April/ April 25, 2022	3,75% tetap/ fixed	INDON 2022
INDON 2023	15 April/ April 15, 2023	3,38% tetap/ fixed	INDON 2023
INDON 2023N	17 Oktober/ October 17, 2023	5,38% tetap/ fixed	INDON 2023N
INDON 2025	15 Januari/ January 15, 2025	4,13% tetap/ fixed	INDON 2025
INDON 2026	8 Januari/ January 8, 2026	4,75% tetap/ fixed	INDON 2026

Bunga atas obligasi pemerintah syariah seri ORI, PBS dan seri SR, masing-masing dibayarkan secara bulanan dan semester.

Interest of ORI series, PBS and SR series sharia government bonds are paid monthly and semi-annually, respectively.

Nilai pasar obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berkisar dari 77,42% sampai dengan 120,93% dan 90,78% sampai dengan 159,52% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The market values of government bonds classified as fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income are ranging from 77.42% to 120.93% and 90.78% to 159.52% of nominal amounts as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp1.229.044) dan (Rp2.083), yang disajikan dalam akun "(Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah setelah pajak tangguhan" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Bank mengakui kerugian dan keuntungan bersih atas penjualan obligasi pemerintah masing-masing sebesar (Rp266.235) dan Rp818.679, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bank mengakui keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi-neto atas perubahan nilai wajar obligasi pemerintah melalui laba rugi sebesar Rp55.045 dan (Rp18.778) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko Bank, manajemen telah memitigasi risiko dari dampak fluktuasi harga pasar terhadap obligasi yang dimiliki dengan melakukan investasi dalam reksadana terproteksi yang dimiliki hingga jatuh tempo yang mempunyai *underlying* obligasi pemerintah seri FR63. Pada tanggal 31 Desember 2021, Bank merupakan satu-satunya pihak yang memegang unit reksadana tersebut.

Sebagai bagian dari kepatuhan Bank pada POJK Nomor 2/POJK.04/2020 ("POJK 2") Pasal 6 (1) huruf k dimana manajer investasi dilarang memiliki efek yang diterbitkan oleh pemegang unit penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang unit penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh manajer investasi dengan pemegang unit penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang unit penyertaan, serta disebutkan pemegang unit penyertaan wajib menyesuaikan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, maka bank melakukan pencairan reksadana Terproteksi XXXIV BNI-AM pada 8 November 2022.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the unrealized gain or loss due to the decrease in the fair value of fair value through other comprehensive income government bonds (after deferred tax) amounted to (Rp1,229,044) and (Rp2,083), respectively, which are presented as "Unrealized (loss) on securities and government bonds, net of deferred tax" in the equity section of the statement of financial position.

The Bank recognized loss and gain-net on sale of government bonds amounting to (Rp266,235) and Rp818,679 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain on sale of government bonds - net".

The Bank recognized unrealized gain and loss-net from the change in fair value of government bonds classified as at fair value through profit or loss amounting to Rp55,045 and (Rp18,778) for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, which is presented in the statement of profit and loss in other comprehensive income as "Unrealized gain (loss) from change in fair value of government bonds - net".

As part of the Bank's risk management, the management has mitigated the risk of market price fluctuation in relation with the bonds owned by investing in protected mutual fund which is held to maturity and has underlying of government bonds series FR63. As of December 31, 2021, the Bank is the only party who holds the mutual fund unit.

As part of the Bank's compliance upon POJK Number 2/POJK.04/2020 ("POJK 2") Article 6 (1) letter k whereby the investment manager prohibited from owning securities issued by unit's holders and/or affiliated parties of unit's holders based on the agreement commitment between investment manager and unit's holders and/or affiliated parties of unit holders, also mentioned that unit's holders must obey the aforementioned Financial Services Authority Regulation at the latest 3 (three) years since the regulation applied hence the Bank liquidated Protected Fund XXXIV BNI-AM as of November 8, 2022.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI**

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali terdiri dari:

31 Desember/December 31, 2022

Nasabah/ Customer	Jenis surat berharga/ Type of securities	Suku bunga/ Interest rate	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal dimulai/ Commencement date	Tanggal penjualan kembali/ Resell date	Harga Penjualan Kembali/ Resell price	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized interest	Nilai tercatat/ Carrying Value
Pihak Ketiga/Third Party								
Bank Indonesia	VR0035	5,50%	1.000.000	30 Desember/ December 30, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	957.562	731	956.831
Bank Indonesia	VR0039	5,50%	500.000	30 Desember/ December 30, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	477.724	365	477.359
			1.500.000			1.435.286	1.096	1.434.190

31 Desember/December 31, 2021

Nasabah/ Customer	Jenis Surat Berharga/ Type of securities	Suku Bunga/ Interest rate	Nilai Nominal/ Nominal amount	Tanggal Dimulai/ Commencement date	Tanggal Penjualan Kembali/ Resell date	Harga Penjualan Kembali/ Resell price	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ unrealized interest	Nilai Tercatat/ Carrying value
Pihak Ketiga/Third Party								
Bank Indonesia	FR0056	3,50%	888.780	27 Desember/ December 27, 2021	3 Januari/ January 3, 2022	981.711	191	981.520
Bank Indonesia	VR0034	3,50%	646.832	28 Desember/ December 28, 2021	4 Januari/ January 4, 2022	616.985	180	616.805
			1.535.612			1.598.696	371	1.598.325

Berikut adalah perubahan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021:

Presented below is the movements in securities purchased under agreement to resell for the year ended December 31, 2022 and 2021, respectively:

31 Desember/December 31, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						Securities purchased under agreement to resell
Saldo awal	1.598.325	-	-	-	1.598.325	Beginning Balance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.434.190	-	-	-	1.434.190	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.598.325)	-	-	-	(1.598.325)	Derecognized financial assets
Saldo akhir tahun	1.434.190	-	-	-	1.434.190	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2021

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						Securities purchased under agreement to resell
Saldo awal	954.955	-	-	-	954.955	Beginning balance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.598.325	-	-	-	1.598.325	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(954.955)	-	-	-	(954.955)	Derecognized financial assets
Saldo akhir tahun	1.598.325	-	-	-	1.598.325	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank berdasarkan jenis, transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Konvensional		
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	204.856.626	189.559.536
Non-kepemilikan rumah	11.546.141	10.811.139
	<u>216.402.767</u>	<u>200.370.675</u>
Modal kerja	32.155.119	33.474.386
Investasi	11.501.050	10.885.744
Sindikasi	4.504.244	200.144
Direksi dan karyawan		
- Pihak ketiga	2.008.080	2.249.677
- Pihak yang berelasi	86.305	104.807
	<u>266.657.565</u>	<u>247.285.433</u>
Syariah		
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	29.030.428	24.665.540
Non-kepemilikan rumah	143.517	117.316
	<u>29.173.945</u>	<u>24.782.856</u>
Modal kerja	2.300.564	2.550.249
Investasi	142.572	186.046
Direksi dan karyawan		
- Pihak yang berelasi	7.058	30.707
	<u>31.624.139</u>	<u>27.549.858</u>
Total	298.281.704	274.835.291
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.674.923)	(14.435.760)
Neto	<u>282.606.781</u>	<u>260.399.531</u>

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES

All loans provided by the Bank, including sharia financing/receivables are in Rupiah. The details of loans and sharia financing/receivables classified by type, transactions with related parties, economic sector, period based on agreements, remaining period to maturity and collectibility are as follows:

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables

Conventional
Consumer
Housing loan
Non-housing loan
Working capital
Investment
Syndicated
Directors and employees
Third parties -
Related parties -
Sharia
Consumer
Housing loan
Non-housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees
Related parties -
Total
Less allowance for impairment losses
Net

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

b. Sektor Ekonomi

b. Economic Sector

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Perumahan	233.309.666	219.574.369	Property
Konstruksi	13.089.795	11.883.047	Construction
Jasa usaha	7.260.835	6.248.265	Business service
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	4.414.947	4.323.806	Transportation, warehousing, and communication
Listrik, gas dan air	3.368.130	1.582.919	Electricity, gas and water
Perdagangan, restoran, dan hotel	1.410.821	1.145.520	Trading, restaurant and hotel
Pertambangan	1.228.096	24.742	Mining
Jasa-jasa sosial	1.148.943	1.643.985	Social service
Manufaktur	1.058.915	731.428	Manufacturing
Pertanian	52.234	14.538	Farming
Lain-lain ^{*)}	315.183	112.814	Other ^{*)}
	<u>266.657.565</u>	<u>247.285.433</u>	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Perumahan	29.035.910	24.694.748	Property
Konstruksi	1.466.466	1.512.424	Construction
Jasa usaha	1.121.763	1.342.686	Business service
	<u>31.624.139</u>	<u>27.549.858</u>	
Total	298.281.704	274.835.291	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.674.923)	(14.435.760)	Less allowance for impairment losses
Neto	<u>282.606.781</u>	<u>260.399.531</u>	Net

^{*)} Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

^{*)} Consists of household and other economic sectors

c. Kolektibilitas

c. Collectibility

	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
<u>Konvensional</u>					<u>Conventional</u>
Individual					Individual
Lancar	6.349.613	1.487.285	6.593.441	2.315.471	Current
Dalam perhatian khusus	3.094.462	2.261.194	2.081.223	1.418.380	Special mention
Kurang lancar	210.002	43.087	15.625	12.832	Substandard
Diragukan	287.925	250.586	126.792	113.622	Doubtful
Macet	4.173.552	3.168.627	4.569.573	3.963.877	Loss
	<u>14.115.554</u>	<u>7.210.779</u>	<u>13.386.654</u>	<u>7.824.182</u>	
Kolektif					Collective
Lancar	233.227.549	4.086.908	220.987.622	2.770.525	Current
Dalam perhatian khusus	14.961.502	1.189.242	8.634.102	810.167	Special mention
Kurang lancar	223.217	48.405	138.209	40.139	Substandard
Diragukan	505.684	127.977	307.844	97.819	Doubtful
Macet	3.624.059	1.441.603	3.831.002	1.623.065	Loss
	<u>252.542.011</u>	<u>6.894.135</u>	<u>233.898.779</u>	<u>5.341.715</u>	
<u>Syariah</u>					<u>Sharia</u>
Lancar	28.499.767	197.833	24.663.055	220.836	Current
Dalam perhatian khusus	2.078.511	326.315	1.696.806	7.115	Special mention
Kurang lancar	146.997	146.997	67.780	36.569	Substandard
Diragukan	94.373	94.373	49.825	29.107	Doubtful
Macet	804.491	804.491	1.072.392	976.236	Loss
	<u>31.624.139</u>	<u>1.570.009</u>	<u>27.549.858</u>	<u>1.269.863</u>	
Total	<u>298.281.704</u>	<u>15.674.923</u>	<u>274.835.291</u>	<u>14.435.760</u>	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Konsumsi			Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	4.538	4.481	Housing Loan
Non-kepemilikan rumah	91.185	110.054	Non-housing loan
	95.723	114.535	
Modal Kerja	8.884.001	10.850.741	Working capital
Investasi	6.728.046	6.945.499	Investment
Sindikasi	3.731.972	200.144	Syndicated
	19.439.742	18.110.919	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Konsumsi			Consumer
Modal Kerja	249.999	417.445	Working capital
Pemilikan rumah (KPR)	5.483	29.208	Housing Loan
Non-kepemilikan rumah	1.575	721	Non-housing loan
	257.057	447.374	
Total	19.696.799	18.558.293	Total

e. Jangka waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

e. Loan period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
≤ 1 tahun	2.871.853	3.260.342	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.945.142	2.896.240	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	11.756.496	10.612.051	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	250.084.074	230.516.800	> 5 years
	266.657.565	247.285.433	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
≤ 1 tahun	114.641	33.993	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	413.397	309.246	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	1.624.779	2.022.163	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	29.471.322	25.184.456	> 5 years
	31.624.139	27.549.858	
Total	298.281.704	274.835.291	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.674.923)	(14.435.760)	Less allowance for impairment losses
Neto	282.606.781	260.399.531	Net

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Sisa Umur Jatuh Tempo

f. Remaining Period to Maturity

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
≤ 1 tahun	15.001.990	14.410.000	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	6.996.578	8.114.898	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	25.171.528	24.038.929	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	219.487.469	200.721.606	> 5 years
	<u>266.657.565</u>	<u>247.285.433</u>	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
≤ 1 tahun	1.033.295	1.191.986	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	979.616	624.508	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	1.831.707	2.111.973	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	27.779.521	23.621.391	> 5 years
	<u>31.624.139</u>	<u>27.549.858</u>	
Total	298.281.704	274.835.291	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.674.923)	(14.435.760)	Less allowance for impairment losses
Neto	<u>282.606.781</u>	<u>260.399.531</u>	Net

g. Informasi pokok lainnya

g. Other significant information

i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

i. Loans include sharia financing/receivables with details, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Piutang <i>Murabahah</i>	23.810.202	19.937.325	Murabahah receivables
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	4.563.573	4.688.337	Musyarakah financing
Piutang <i>Istishna</i>	2.955.715	2.435.985	Istishna receivables
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	284.162	479.691	Mudharabah financing
Pinjaman <i>Qardh</i>	10.487	8.520	Funds of Qardh
Total	31.624.139	27.549.858	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.570.009)	(1.269.863)	Less allowance for impairment losses
Neto	<u>30.054.130</u>	<u>26.279.995</u>	Net

ii. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit konsumen sebesar 10,41% dan 10,45% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit komersial masing-masing sebesar 6,54% dan 7,32% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

ii. Average annual interest rates for consumer loans are 10.41% and 10.45% for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively. Average annual interest rates for commercial loans are 6.54% and 7.32% for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- iii. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 18, 19 dan 20).
- iv. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 48 tanggal 26 Oktober 2022 dan Akta Cessie No. 36 tanggal 23 Desember 2022.

- iii. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, demand deposits, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable by the Bank (Notes 18, 19 and 20).
- iv. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 48 dated October 26, 2022 and Deed of Cessie No. 36 dated December 23, 2022.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp483.628 yang terdiri dari 5.809 debitor dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (2 Oktober 2022). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp483,628 which consists of 5,809 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (October 2, 2022). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

- v. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar 6,18% dan 6,17%, dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 15 tahun. Kredit ini akan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp459.549 dan Rp542.378 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 16).

- v. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for purchase of vehicles and other personal necessities. These loans earn an average interest of 6.18% and 6.17%, for years ended December 31, 2022 and 2021, with term ranging from 1 to 15 years. This loan will be repaid through employee deduction salary. Difference between employee loan's interest rates and Base Lending Rate (BLR) is deferred and recorded as deferred expense for employee loans as part of other assets. Deferred expense for employee loans amounted to Rp459,549 and Rp542,378 as of December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 16).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- vi. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.696.799 dan Rp18.558.293 (Catatan 43). Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 6,60% dan 6,67%.
- vii. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

- vi. As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp19,696,799 and Rp18,558,293, respectively (Note 43). As of December 31, 2022 and 2021, the percentage of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 6.60% and 6.67%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.
- vii. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Saldo awal tahun	14.435.760	13.060.943	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 33)	4.039.507	3.584.310	Provision for impairment losses during the year (Note 33)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	71.716	57.626	Recovery of loans written-off
Penghapusbukukan kredit	(2.872.060)	(2.267.119)	Loans written-off
Saldo akhir tahun	15.674.923	14.435.760	Balance at the end of year
Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:			Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						Loans and sharia financing/receivables
Saldo Awal	200.610.568	29.282.802	17.392.063	27.549.858	274.835.291	Beginning Balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	10.127.196	(9.252.362)	(874.834)	-	-	Stage 1
Stage 2	(10.109.606)	10.556.294	(446.688)	-	-	Stage 2
Stage 3	(4.362.863)	(678.482)	5.041.345	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	196.265.295	29.908.252	21.111.886	27.549.858	274.835.291	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(9.599.191)	(513.843)	(387.887)	(1.924.831)	(12.425.752)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	46.634.491	72.127	31.440	7.261.078	53.999.136	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(12.910.849)	(702.799)	(753.529)	(887.734)	(15.254.911)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(28.982)	(101.622)	(2.367.224)	(374.232)	(2.872.060)	Written-off financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	24.095.469	(1.246.137)	(3.477.200)	4.074.281	23.446.413	Total addition/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	220.360.764	28.662.115	17.634.686	31.624.139	298.281.704	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

vii. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

vii. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows: (continued)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2021

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						Loans and sharia financing/receivables
Saldo Awal	188.221.197	29.278.199	17.552.720	25.062.047	260.114.163	Beginning Balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	9.823.686	(9.413.065)	(410.621)	-	-	Stage 1
Stage 2	(11.069.002)	11.690.434	(621.432)	-	-	Stage 2
Stage 3	(2.378.153)	(997.114)	3.375.267	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	184.597.728	30.558.454	19.895.934	25.062.047	260.114.163	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(11.259.595)	(624.327)	(460.067)	(1.695.834)	(14.039.823)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	37.458.790	46.865	21.193	5.516.593	43.043.441	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(10.171.222)	(644.286)	(333.817)	(866.046)	(12.015.371)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(15.133)	(53.904)	(1.731.180)	(466.902)	(2.267.119)	Written-off financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	16.012.840	(1.275.652)	(2.503.871)	2.487.811	14.721.128	Total addition/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	200.610.568	29.282.802	17.392.063	27.549.858	274.835.291	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

31 Desember/December 31, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						Loans and sharia financing/receivables
Saldo Awal	1.209.325	2.309.833	9.646.739	1.269.863	14.435.760	Beginning Balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	663.412	(499.909)	(163.503)	-	-	Stage 1
Stage 2	(53.917)	160.278	(106.361)	-	-	Stage 2
Stage 3	(28.068)	(175.118)	203.186	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	1.790.752	1.795.084	9.580.061	1.269.863	14.435.760	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(226.641)	1.887.803	2.066.364	477.724	4.205.250	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	300.732	4.698	15.139	238.053	558.622	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(141.040)	(60.807)	(409.403)	(41.399)	(652.649)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(28.982)	(101.622)	(2.367.224)	(374.232)	(2.872.060)	Written-off financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(95.931)	1.730.072	(695.124)	300.146	1.239.163	Total addition/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	1.694.821	3.525.156	8.884.937	1.570.009	15.674.923	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- vii. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- vii. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2021						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						Loans and sharia financing/receivables
Saldo Awal	1.048.230	1.566.027	9.537.679	909.007	13.060.943	Beginning Balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	596.227	(411.184)	(185.043)	-	-	Stage 1
Stage 2	(74.852)	468.005	(393.153)	-	-	Stage 2
Stage 3	(47.663)	(164.882)	212.545	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	1.521.942	1.457.966	9.172.028	909.007	13.060.943	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(469.535)	943.644	2.359.072	722.991	3.556.172	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	252.727	5.128	9.227	173.266	440.348	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(80.676)	(43.001)	(162.408)	(68.499)	(354.584)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(15.133)	(53.904)	(1.731.180)	(466.902)	(2.267.119)	Written-off financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(312.617)	851.867	474.711	360.856	1.374.817	Total addition/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	1.209.325	2.309.833	9.646.739	1.269.863	14.435.760	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

Termasuk di dalam saldo cadangan kerugian adalah cadangan kerugian pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp1.570.009 dan Rp1.269.863, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

As of December 31, 2022 and 2021, the balance of allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses on sharia financing/receivables amounting to Rp1,570,009 and Rp1,269,863, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

- viii. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit (*credit limit*) dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan portofolio individual secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.

- viii. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting consistent lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

ix. Dalam laporan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.

ix. Based on the report submitted by the Bank to Financial Services Authority (OJK) as of December 31, 2022 and 2021, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.

x. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode *gross* dan *neto*) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

x. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the *gross* and *net* methods) are shown in the following table:

Kolektibilitas	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		Collectibility
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	
Kurang Lancar	433.219	146.997	153.834	67.780	Substandard Doubtful Loss
Diragukan	793.609	94.373	434.636	49.825	
Macet	7.797.611	804.491	8.400.575	1.072.392	
	9.024.439	1.045.861	8.989.045	1.189.997	
Cadangan kerugian Penurunan nilai atas NPL/NPF	(5.080.285)	(1.045.861)	(5.851.354)	(1.041.912)	Allowance for impairment losses for NPL/NPF
	3.944.154	-	3.137.691	148.085	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	266.657.565	31.624.139	247.285.433	27.549.858	Loans and sharia financing/ receivables
% <i>Non-performing</i> kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - <i>Gross</i> (Gross NPL/NPF)	3,38%	3,31%	3,64%	4,32%	% of <i>Non-performing</i> loans and sharia financing/ receivables - <i>Gross</i> (Gross NPL/NPF)
% <i>Non-performing</i> kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - <i>Neto</i> (Neto NPL/NPF)	1,48%	0%	1,27%	0,54%	% of <i>Non-performing</i> loans and sharia financing/ receivables - <i>Net</i> (Net NPL/NPF)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

- xi. NPL/NPF Gross dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah dengan jumlah kredit/pembiayaan/piutang Syariah.

NPL/NPF Neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian dan jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

Rasio NPL/NPF Gross (total konvensional dan syariah) adalah 3,38% dan 3,70% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Rasio NPL/NPF Neto (total konvensional dan syariah) adalah 1,32% dan 1,20% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

- xii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah *non-performing* berdasarkan sektor ekonomi:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Konvensional</u>		
Perumahan	7.794.092	7.864.759
Konstruksi	904.621	565.804
Perdagangan, restoran dan hotel	173.739	303.645
Jasa Usaha	79.417	124.292
Jasa-jasa sosial	28.436	52.416
Pertambangan	15.397	20.800
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	6.387	13.127
Listrik, gas dan air	6.141	4.385
Manufaktur	715	21.217
Pertanian	60	57
Lain-lain ^{*)}	15.434	18.543
	9.024.439	8.989.045
<u>Syariah</u>		
Konstruksi	573.570	704.241
Jasa Usaha	174.670	278.943
Perumahan	297.621	206.813
	1.045.861	1.189.997
Total	10.070.300	10.179.042
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(6.126.146)	(6.893.266)
Neto	3.944.154	3.285.776

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

- xi. The Gross NPL/NPF are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables by the total loans and sharia financing/receivables.

The Net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables, net of allowance for possible losses, by the total loans and sharia financing/receivables.

The Gross NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 3.38% and 3.70% as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

The Net NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 1.32% and 1.20% as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

- xii. Non-performing loans and sharia financing/receivables by economic sectors:

	<u>Conventional</u>
	Property
	Construction
	Trading, restaurant and hotel
	Business service
	Social service
	Mining
	Transportation, warehousing, and communication
	Electricity, gas and water
	Manufacturing
	Farming
	Other ^{*)}
	<u>Sharia</u>
	Construction
	Business service
	Property
	Total
	Less allowance for impairment losses
	Net

*) Consists of household and other economic sectors

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xiii. Rasio kredit usaha kecil (KUK) terhadap total kredit adalah sebesar 0,44% dan 0,33% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

xiii. The ratio of small-scale enterprise loans to total loans is 0.44% and 0.33% as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

xiv. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 7,62% dan 10,56% (tidak diaudit) dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

xiv. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2022 and 2021, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans is 7.62% and 10.56% (unaudited) for each, respectively, of the total syndicated loans.

xv. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi:

xv. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector:

31 Desember/December 31, 2022

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	30.595.294	11.093.003	441.112	646.733	4.635.418	47.411.560	Property
Konstruksi	4.013.346	481.513	15.628	32.339	976.286	5.519.112	Construction
Jasa usaha	1.234.625	21.170	10.542	10.623	137.547	1.414.507	Business service
Perdagangan, restoran dan hotel	215.923	103.350	-	16	97.199	416.488	Trading, restaurant and hotel
Jasa-jasa sosial	105.371	25.335	302	-	17.854	148.862	Social services
Manufaktur	1.257	776	-	-	359	2.392	Manufacturing
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	2.998.715	6.634	-	-	1.413	3.006.762	Transportation, warehousing and communication
Pertambangan	-	-	-	-	12.266	12.266	Mining
Pertanian	-	-	-	4	-	4	Farming
Lain-lain ^{*)}	15.199	1.432	397	134	12.413	29.575	Other ^{*)}
Total	39.179.730	11.733.213	467.981	689.849	5.890.755	57.961.528	Total

31 Desember/December 31, 2021

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	45.151.346	6.496.051	110.179	277.731	4.766.975	56.802.282	Property
Konstruksi	4.660.940	580.188	27.036	45.083	684.375	5.997.622	Construction
Jasa usaha	664.813	52.919	10.720	28.999	117.142	874.593	Business service
Perdagangan, restoran dan hotel	308.905	99.528	-	1.304	233.147	642.884	Trading, restaurant and hotel
Jasa-jasa sosial	143.817	37.625	-	317	18.944	200.703	Social services
Manufaktur	3.239	304	-	313	20.171	24.027	Manufacturing
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	130	12.848	-	242	8.343	21.563	Transportation, warehousing and communication
Pertambangan	-	-	2.000	-	14.862	16.862	Mining
Pertanian	236	88	-	-	-	324	Farming
Lain-lain ^{*)}	19.681	1.956	38	106	9.040	30.821	Other ^{*)}
Total	50.953.107	7.281.507	149.973	354.095	5.872.999	64.611.681	Total

^{*)} Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

^{*)} Consists of household and other economic sectors

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- xv. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi: (lanjutan)

- xv. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector: (continued)

Skema restrukturisasi yang disepakati oleh Bank dan debitur meliputi antara lain penjadwalan ulang pembayaran pokok kredit dan bunga, pembebasan tunggakan bunga, penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit, novasi dan lain-lain.

Restructured loans scheme agreed by the Bank and its debtors include loans principal and interest rescheduling, overdue interest exemption, reduction of interest rates, additional loan facilities, novation and others.

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019" tertanggal 13 Maret 2020 dan perubahan POJK No. 48/POJK.03/2020 "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019" tertanggal 1 Desember 2020 dan perubahan kedua POJK No. 17/POJK.03/2021 "Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019" tertanggal 10 September 2021. Per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 total saldo kredit restrukturisasi Covid-19 masing-masing sebesar Rp33.667.902 dan Rp40.391.152.

Bank has restructured its credit for debtors affected by Covid-19 pandemic in accordance with POJK No.11/POJK.03/2020 "National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated March 13, 2020 and amendment POJK No.48/POJK.03/2020 "Amendment of POJK No.11/POJK.03/2020 Regarding National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated December 1, 2020 and second amendment POJK No.17/POJK.03/2021 "Second Amendment of POJK No.11/POJK.03/2020 Regarding National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated September 10, 2021. As of December 31, 2022 and December 31, 2021 the total balance of Covid-19 restructure loans amounted to Rp33,667,902 and Rp40,391,152 respectively.

- xvi. Kredit yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat sebagai kredit *off balance sheet* di dalam rekening administratif.

- xvi. The loans written-off by the Bank are recorded as off balance sheet in the administrative account.

- xvii. Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar Rp11.909.808 dan Rp11.842.122, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

- xvii. Minimum allowance for impairment losses for loans and sharia financing receivables required by Financial Services Authority amounted to Rp11,846,874 and Rp11,909,808 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xviii. Sejak tahun 2020, Bank berpartisipasi dalam penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN") sesuai dengan PMK No. 104/PMK.05/2020 tanggal 6 Agustus 2020 serta PMK No. 71/PMK.08/2020 tanggal 23 Juni 2020. Penyaluran kredit PEN ini dijamin oleh pemerintah melalui PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia dan Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia.

xviii. Starting 2020, Bank participated in granting loan to support Government for National Economic Recovery Program "PEN" based on PMK No. 104/PMK.05/2020 dated August 6, 2020 and PMK No. 71/PMK.08/2020 dated June 23, 2020. The loan is guaranteed by Government through PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia and Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia.

Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020, Pemerintah melakukan Penempatan Uang Negara kepada perbankan salah satunya di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dalam bentuk deposito sebesar Rp5.000.000. Penempatan dana Pemerintah tahap I tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp16.350.366.

In order to accelerate National Economic Recovery Program, based on Ministry of Finance Regulation Number 70/PMK.05/2020, Government place their funds in Banks, which PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. is one of the banks, in time deposit amounted to Rp5,000,000. The Government Fund phase I has been distributed in form of loan amounted to Rp16,350,366.

Setelah dana dikembalikan, Pemerintah kemudian melakukan penempatan dana kembali periode ke-II sesuai PMK Nomor 104/PMK.05/2020 dalam bentuk deposito sebesar Rp10.000.000 yang telah disalurkan dalam bentuk kredit akumulatif sebesar Rp34.133.984 sampai tanggal jatuh tempo deposito pada 13 Januari 2021. Deposito tersebut telah dikembalikan kepada Pemerintah pada tanggal 13 Januari 2021. Periode ke-III penempatan dana pemerintah dapat disalurkan sebesar Rp17.818.499 mulai tanggal 4 Februari 2021 sampai 4 Mei 2021. Terakhir setelah pengembalian dana periode III, Pemerintah melakukan penempatan dana untuk periode ke-IV, penyaluran sampai dengan periode jatuh tempo 3 Desember 2021 sebesar Rp36.830.440. Setiap periode penempatan dana, dana tersebut dikembalikan kepada Pemerintah dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan evaluasi oleh Pemerintah.

After the funds are returned, the Government then places the funds for the second period in accordance with PMK Number 104/PMK.05/2020 in the form of deposits of Rp10,000,000 which has been distributed in the form of an accumulative credit of Rp34,133,984 until the maturity date of the deposit on January 13, 2021. The deposit was returned to the Government on January 13, 2021. The third period of placement of government funds can be distributed in the amount of Rp17,818,499 starting from February 4, 2021 to May 4, 2021. Finally, after the return of period III funds, the Government conducts placement of funds for the fourth period, distribution until the maturity period of December 3, 2021, amounting to Rp36,830,440. Each period of placement of funds, the funds are returned to the Government and every 3 (three) months an evaluation is carried out by the Government.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

Berlandaskan PMK No. 138/PMK.05/2020, Bank telah menerima dana subsidi bunga sebesar Rp2.497.999 dan telah disalurkan ke debitur sebanyak Rp2.493.953 kepada 1.080.288 debitur selama Mei 2020 s.d. Oktober 2020, sedangkan sisanya seluruhnya dikembalikan ke kas negara. Lalu dilakukan perpanjangan berlandaskan PMK No. 50/PMK.05/2021, Bank menerima dana subsidi bunga PEN sebesar Rp1.879.816 yang telah disalurkan ke debitur sebesar Rp1.873.715 kepada 1.013.159 debitur, sedangkan sisanya seluruhnya dikembalikan ke kas negara. Pada periode selanjutnya, berlandaskan PMK No. 150/PMK.05/2021, Bank menerima subsidi bunga sebesar Rp2.046.893 yang telah disalurkan kepada debitur sebesar Rp2.043.962 kepada 1.262.507 debitur, sedangkan sisanya seluruhnya dikembalikan ke kas negara.

h. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas kredit diungkapkan pada Catatan 46.

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Bank BTN menerapkan akuntansi lindung nilai atas arus kas dengan tujuan untuk melindungi suatu instrumen atau kelompok instrumen dari eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui (seperti seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan mata uang asing) atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan dapat mempengaruhi laba rugi.

Pada tanggal 10 November 2022 dan 18 November 2022, Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dari obligasi subordinasi sebesar USD 300 juta (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap*, dengan nilai nosional sebesar USD 72 juta (nilai penuh).

Pada tanggal 28 Juli 2022 Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dan nilai pokok dari pinjaman korporasi Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar JPY 7 miliar (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap*, dengan nilai nosional sebesar JPY 3 miliar (nilai penuh).

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Other significant information (continued)

Based on PMK No. 138/PMK.05/2020, Bank has received interest subsidy funds of Rp2,497,999 and has been distributed to debtors of Rp2,493,953 to 1,080,288 debtors during May 2020 until October 2020, while the rest will be returned to the state treasury. Then carried out an extension based on PMK No. 50/PMK.05/2021, Bank received PEN interest subsidies amounting to Rp1,879,816 which had been distributed to debtors in the amount of Rp1,873,715 to 1,013,159 debtors, while the rest was entirely returned to the state treasury. In the next period, based on PMK No. 150/PMK.05/2021, Bank received an interest subsidy of Rp2,046,893 which was distributed to debtors of Rp2,043,962 to 1,262,507 debtors, while the rest was entirely returned to the state treasury.

h. Information with respect to classification of impaired and not impaired and credit quality of financial assets are disclosed in Note 46.

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES

Bank BTN implemented hedge accounting of the cash flow with purpose to protect an instrument from exposure of cashflow variability that can be attributed at certain risk that related to acknowledge assets or liabilities (such as all or partial of future interest payment on foreign currency debt) or which can be attributed to certain risk that are most likely to occur and can affect profit or loss.

On November 10, 2022 and November 18, 2022, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of subordinated bond amounting to USD 300 million (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of USD 72 million (full amount).

On July 28, 2022, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of corporate loan Japan International Corporate Agency (JICA) amounting to JPY 7 billion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of JPY 3 Billion (full amount).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Pada tanggal 24 Januari 2020 Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dan nilai pokok dari obligasi subordinasi sebesar USD 300 juta (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap*, dengan nilai nosional sebesar USD 150 juta (nilai penuh)

Perubahan nilai wajar dari kontrak CCS sebagai instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai lindung nilai yang efektif (yaitu bagian yang saling hapus) diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Setiap sisa keuntungan/kerugian atas instrumen lindung nilai (yaitu ketidakefektifan) untuk lindung nilai diakui dalam laba rugi.

Sejak dimulainya akuntansi lindung nilai arus kas tersebut, manajemen telah memiliki dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi nilai dan juga tujuan manajemen risikonya serta strategi dalam melakukan berbagai transaksi lindung nilai.

Dokumentasi juga meliputi penilaian efektivitas lindung nilai dari derivatif yang digunakan sebagai instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi nilai. Penilaian ini dilakukan baik pada permulaan lindung nilai tersebut diterapkan dan pada saat-saat berikutnya secara berkelanjutan.

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES (continued)

On January 24, 2020, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of Subordinated Bond amounting to USD 300 million (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of USD 150 million (full amount)

The changes of fair value of CCS contract as a hedging instrument that is designated as an effective hedge (that is, a part of set off) are recognized in other comprehensive income. The remaining gains/losses on the hedging instrument (ie ineffectiveness) of the hedge, recognized in profit/loss.

Since the inception of the cashflow hedge accounting, management has documented the relationship between hedging instruments and hedged items as well as the objectives of risk management and strategies for engaging various hedging transaction.

The documentation also includes assessing the effectiveness of hedge from derivative that used as hedging instrument and hedged items. This assessment is carried out both at the beginning of the hedging applied and at later on an ongoing basis.

31 Desember/December 31, 2022

Tanggal Transaksi/ Transaction Date	Pihak ketiga/ Third Parties	Nosional/ Notional	Suku bunga yang dibayarkan/ Interest Paid	Suku bunga yang diterima/ Interest receivable	Jatuh tempo/ Maturity Date
27 Januari/ January 27, 2020	Standard Chartered Bank	USD5.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2023
27 Januari/ January 27, 2020	Standard Chartered Bank	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
27 Januari/ January 27, 2020	Deutsche Bank AG	USD20.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2023
27 Januari/ January 27, 2020	Deutsche Bank AG	USD25.000.000	8,30%	4,20%	3 Januari/ January 3, 2025
10 November/ November 10, 2022	ANZ Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
10 November/ November 10, 2022	UOB Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2023
18 November/ November 18, 2022	Standard Chartered Bank	USD22.000.000	6,33%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
28 Juli/ July 28, 2022	ANZ Bank	JPY1.500.000.000	6,11%	0,90%	10 Mei/ May 10, 2023
28 Juli/ July 28, 2022	UOB Bank	JPY1.500.000.000	6,11%	0,90%	10 Mei/ May 10, 2023

31 Desember / December 31, 2021

Tanggal Transaksi/ Transaction Date	Pihak ketiga/ Third Parties	Nosional/ Notional	Suku bunga yang dibayarkan/ Interest Paid	Suku bunga yang diterima/ Interest receivable	Jatuh tempo/ Maturity Date
27 Januari/ January 27, 2020	Standard Chartered Bank	USD5.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2023
27 Januari/ January 27, 2020	Standard Chartered Bank	USD 25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
27 Januari/ January 27, 2020	Deutsche Bank AG	USD 20.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2023
27 Januari/ January 27, 2020	Deutsche Bank AG	USD 25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Selisih nilai wajar instrumen derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai arus kas dan keuntungan (kerugian) selisih kurs atas obligasi subordinasi dalam mata uang asing dicatat pada penghasilan komprehensif lain masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo kerugian tersebut sebesar (Rp49.301) dan (Rp19.983) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan sebagai "Bagian efektif lindung nilai arus kas" pada ekuitas.

Ringkasan transaksi derivatif sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Tagihan Derivatif		
Cross currency interest rate swap	103.939	31.017
Total	103.939	31.017
Liabilitas Derivatif		
Cross currency interest rate swap	-	17.741
Total	-	17.741

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES (continued)

The fair value difference of derivative instruments designated as cash flow hedges and gain (loss) on foreign exchange of subordinated bonds denominated in foreign currency were reported as other comprehensive income amounting to (Rp49,301) and (Rp19,983) as of December 31, 2022 and 2021, respectively. The amount is presented as "Effective portion of cashflow hedge" in equity as of December 31, 2022.

The summary of the derivatives transaction as follow:

Derivative Receivable
Cross currency interest rate swap
Total
Derivative Payable
Cross currency interest rate swap
Total

13. TAGIHAN AKSEPTASI

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Pihak Berelasi</u>		
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	131.356	-
<u>Pihak Ketiga</u>		
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	282.045	454.140
Letter of Credit	7.161	-
Total	420.562	454.140
Cadangan kerugian penurunan nilai	(136)	(623)
Total	420.426	453.517

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE

The details of acceptances receivable from customers are as follows:

a. By Type and Currency

<u>Related Parties</u>
Domestic Document Letter of Credit
<u>Third Parties</u>
Domestic Document Letter of Credit Letter of Credit
Total
Allowance for impairment losses
Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. TAGIHAN AKSEPTASI

b. Berdasarkan Kolektibilitas

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai lancar.

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
≤ 1 bulan	80.697	20.094
> 1 bulan - 3 bulan	49.568	56.401
> 3 bulan - 1 tahun	290.297	377.645
Total	420.562	454.140

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2022				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Tagihan akseptasi					
Saldo Awal	454.140	-	-	-	454.140
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	420.562	-	-	-	420.562
Pembayaran kembali	(454.140)	-	-	-	(454.140)
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(33.578)	-	-	-	(33.578)
Saldo akhir tahun	420.562	-	-	-	420.562

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE

b. By Collectibility

All acceptances receivable were classified as current as of December 31, 2022 and 2021.

c. By Period

≤ 1 month
> 1 month - 3 months
> 3 months - 1 year

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Tagihan akseptasi						Acceptances receivable
Saldo Awal	454.140	-	-	-	454.140	Beginning balance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	420.562	-	-	-	420.562	New financial assets originated or purchased
Pembayaran kembali	(454.140)	-	-	-	(454.140)	Repayment
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(33.578)	-	-	-	(33.578)	Total addition/(reversal)
Saldo akhir tahun	420.562	-	-	-	420.562	Balance at end of year

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

	31 Desember/December 31, 2021					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Tagihan akseptasi						Acceptances receivable
Saldo Awal	196.071	-	-	-	196.071	Beginning balance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	454.140	-	-	-	454.140	New financial assets originated or purchased
Pembayaran kembali	(196.071)	-	-	-	(196.071)	Repayment
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	258.069	-	-	-	258.069	Total addition/(reversal)
Saldo akhir tahun	454.140	-	-	-	454.140	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

13. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

- d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Tagihan akseptasi					
Saldo awal	623	-	-	-	623
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	136	-	-	-	136
Pembayaran kembali	(623)	-	-	-	(623)
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(487)	-	-	-	(487)
Saldo akhir tahun	136	-	-	-	136

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE (continued)

- d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

31 Desember/December 31, 2022						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Tagihan akseptasi						Acceptances receivable
Saldo awal	623	-	-	-	623	Beginning Balance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	136	-	-	-	136	New financial assets originated or purchased
Pembayaran kembali	(623)	-	-	-	(623)	Repayment
Total penambahan/(reversal) during the year	(487)	-	-	-	(487)	Total addition/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	136	-	-	-	136	Balance at end of year

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2021						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Tagihan akseptasi						Acceptances receivable
Saldo awal	1.393	-	-	-	1.393	Beginning Balance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	623	-	-	-	623	New financial assets originated or purchased
Pembayaran kembali	(1.393)	-	-	-	(1.393)	Repayment
Total penambahan/(reversal) during the year	(770)	-	-	-	(770)	Total addition/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	623	-	-	-	623	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara kolektif.

The Bank assessed acceptance receivables collectively for impairment.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas tagihan yang dibentuk telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses provided on acceptances receivable is adequate.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

14. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

14. PREMISES AND EQUIPMENT

This account consists of:

31 Desember/December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi ^{*)} / Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Biaya/nilai revaluasi</u>					<u>Cost/revaluation value</u>
Tanah	3.981.531	424.612	-	4.406.143	Land
Bangunan	1.645.843	84.344	-	1.730.187	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.188.072	485.741	-	3.673.813	Office furniture, fixtures and motor vehicle
	8.815.446	994.697	-	9.810.143	
Aset dalam penyelesaian	71.689	72.891	(74.895)	69.685	Constructions in progress
	8.887.135	1.067.588	(74.895)	9.879.828	
Aset hak guna	581.520	253.379	(114.879)	720.020	Right of use of asset
	9.468.655	1.320.967	(189.774)	10.599.848	
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan	787.416	74.832	-	862.248	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	2.655.788	351.714	-	3.007.502	Office furniture, fixtures and motor vehicles
	3.443.204	426.546	-	3.869.750	
Aset hak guna	288.660	202.514	(114.879)	376.295	Right of use of asset
	3.731.864	629.060	(114.879)	4.246.045	
Nilai Buku Neto	5.736.791			6.353.803	Net Book Value
31 Desember/December 31, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi ^{*)} / Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Biaya/nilai revaluasi</u>					<u>Cost/revaluation value</u>
Tanah	3.970.392	11.139	-	3.981.531	Land
Bangunan	1.593.156	52.687	-	1.645.843	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	2.891.976	296.096	-	3.188.072	Office furniture, fixtures and motor vehicle
	8.455.524	359.922	-	8.815.446	
Aset dalam penyelesaian	56.662	17.418	(2.391)	71.689	Constructions in progress
	8.512.186	377.340	(2.391)	8.887.135	
Aset hak guna	540.996	99.431	(58.907)	581.520	Right of use of asset
	9.053.182	476.771	(61.298)	9.468.655	
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan	711.786	75.630	-	787.416	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	2.342.521	313.267	-	2.655.788	Office furniture, fixtures and motor vehicles
	3.054.307	388.897	-	3.443.204	
Aset hak guna	180.430	167.137	(58.907)	288.660	Right of use of asset
	3.234.737	556.034	(58.907)	3.731.864	
Nilai Buku Neto	5.818.445			5.736.791	Net Book Value

*) Termasuk dalam penambahan aset tetap adalah surplus revaluasi atas tanah sebesar Rp 200.574 dan Rp334.731 yang dibukukan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2019

*) Included in additions of premises and equipment is gain on revaluation of land amounting to Rp200,574 and Rp334,731, recorded by Bank on December 31, 2022 and 2019

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp426.546 dan Rp388.897 (Catatan 34).

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah didepresiasi penuh oleh Bank namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp2.359.401 dan Rp2.043.136 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Bank telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.565.947 dan Rp4.559.284.

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2022		
Jumlah/ Amount	Kisaran persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak penyelesaian/ Range percentage carrying amount to contract value	Kisaran persentase penyelesaian/ Range percentage of completion
Bangunan	69.685	52,94% - 87%
		Building
31 Desember/December 31, 2021		
Jumlah/ Amount	Kisaran persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak penyelesaian/ Range percentage carrying amount to contract value	Kisaran persentase penyelesaian/ Range percentage of completion
Bangunan	71.689	10% - 95%
		Building

Penilaian atas tanah di tahun 2016 dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan melalui laporannya pada tanggal 19 April 2016. Selanjutnya di tahun 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki yang dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan dengan laporan tertanggal 22 Oktober 2019. Bank melakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki pada tahun 2022 yang dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Aditya Iskandar dan Rekan dengan laporan tertanggal 12 Desember 2022. Penilaian dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia serta Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Depreciation of premises and equipment and right of use asset charged to operations amounted to Rp426,545 and Rp388,897, for the year ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 34).

The gross carrying amount of the Bank's fully depreciated premises and equipment that are still in use amounted to Rp2,359,401 and Rp2,043,136 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

Landrights consist of ownership rights and rights to use. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed or extended upon their expiration.

The Bank insured its premises and equipment from losses due to risks of fire and theft to PT Asuransi Bina Griya (related party) on date December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp4,565,947 and Rp4,559,284, respectively.

The percentage of completion of the constructions in progress as of December 31, 2022 and 2021 are:

The valuations of land in 2016 were performed by an external independent appraiser KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan through its report dated April 19, 2016. Next in 2019, the bank revalued its land which was done by an external independent appraiser KJPP Agus, Ali, Firdaus and Partners with its report dated October 22, 2019. The bank revalued its land in 2022 which was done by an external independent appraiser KJPP Aditya Iskandar and Partners with its report dated December 12, 2022. Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards, and regulation No. VIII.C.4 concerning the guidance on valuation and presentation for the appraisal report on the capital market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap untuk kelompok aset tanah yang dilakukan Bank tahun 2016, 2019 dan 2022 adalah sebagai berikut:

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

In the fair value measurement of the land, the Independent Appraisers takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

Information on the revaluation of land performed by the Bank in 2016, 2019 and 2022 are as follows:

31 Desember/December 31, 2022				
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ Gain/(Loss) on Revaluation	
Tanah	3.991.340	4.191.914	200.574	Land
31 Desember/December 31, 2019				
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ Gain/(Loss) on Revaluation	
Tanah	3.635.660	3.970.391	334.731	Land
31 Desember/December 31, 2016				
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ Gain/(Loss) on Revaluation	
Tanah	537.559	3.580.298	3.042.739	Land

Penilaian Kembali yang dilakukan atas tanah pada tahun 2022 menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp200.574 yang tercatat pada "Penghasilan Komprehensif Lain". Sedangkan penilaian kembali yang dilakukan atas tanah pada tahun 2019, menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp334.731 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp341.000 dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp6.269. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tahun 2016 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.042.739.

Pada tahun 2022 dan 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah tersebut bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk tujuan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

The revaluation of land in 2022, resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp200,574 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income". However, the revaluation of land in 2019, resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp334,731 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp341,000 and a decrease in carrying amount of land recognised in the current year expenses amounting to Rp6,269. Increase in the carrying amount arising from revaluation in 2016 is recorded in "Premises and Equipment Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income amounting to Rp3,042,739.

In 2022 and 2019, Bank has revalued the value of that land not for tax purpose rather for the accounting purpose according to the Financial Accounting Standard.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian kembali tanah pada tahun 2016 adalah untuk tujuan perpajakan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016. Jumlah pajak yang telah dibayar oleh Bank sehubungan penilaian kembali tersebut adalah sebesar Rp75.748.

Jika tanah dicatat sebesar harga perolehan, maka pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp828.757 dan Rp619.336.

Nilai wajar atas tanah termasuk pada hirarki nilai wajar level 3.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki Bank yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Bank menyewa beberapa aset termasuk bangunan, rumah dinas, lahan ATM, kendaraan mobil, jaringan, mesin ATM, dan media promosi. Rata-rata masa sewa adalah 4 tahun.

Bank mempunyai sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa bernilai rendah. Bank menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

Nilai tercatat untuk aset hak guna adalah sebagai berikut:

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Revaluation of land in 2016, for tax purposes is performed after the approval from Directorate General of Tax through its letter No. KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016. The amount of tax which has been paid by the Bank in relation with the revaluation was amounting to Rp75,748.

If land is recorded at historical cost basis, the amount as of December 31, 2022 and 2021, would be Rp828,757 and Rp619,336.

The fair value of land included in the fair value hierarchy as level 3.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no fixed assets owned by the Bank which are pledged as collateral.

Management believes that there is no impairment in value of premises and equipments and the amount of insurance coverage is adequate to cover the risk of loss that may arise on the premises and equipments as of December 31, 2022 and 2021.

The Bank leases several assets including buildings, official residences, ATM space, car, network, ATM machine, and promotional media. The average lease term is 4 years.

The Bank also has certain leases with lease terms of 12 months or less and low value assets. The Bank applies the recognition exemptions of short-term leases and low-value assets for these leases.

The carrying amount of right of use assets are as follows:

31 Desember / December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions/	Pengurangan/ Deductions/	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Nilai tercatat</u>					<u>Carrying amount</u>
Bangunan	514.000	137.542	(85.818)	565.724	Buildings
Kendaraan	59.433	115.837	(28.951)	146.319	Vehicle
Mesin ATM	7.839	-	-	7.839	ATM Machine
Lainnya	248	-	(110)	138	Others
	581.520	253.379	(114.879)	720.020	
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan	236.048	147.499	(85.818)	297.729	Buildings
Kendaraan	47.345	53.843	(28.951)	72.237	Vehicle
Mesin ATM	5.074	1.122	-	6.196	ATM Machine
Lainnya	193	50	(110)	133	Others
	288.660	202.514	(114.879)	376.295	
Nilai Buku Neto	292.860			343.725	Net Book Value

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai tercatat untuk aset hak guna adalah sebagai berikut: (lanjutan)

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The carrying amount of right of use assets are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions/	Pengurangan/ Deductions/	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Nilai tercatat</u>					<u>Carrying amount</u>
Bangunan	458.046	98.188	(42.234)	514.000	Buildings
Kendaraan	73.933	1.243	(15.743)	59.433	Vehicle
Mesin ATM	7.839	-	-	7.839	ATM Machine
Pusat Data	519	-	(519)	-	Data Center
Lainnya	659	-	(411)	248	Others
	540.996	99.431	(58.907)	581.520	
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan	135.412	142.870	(42.234)	236.048	Buildings
Kendaraan	41.143	21.945	(15.743)	47.345	Vehicle
Mesin ATM	3.188	1.886	-	5.074	ATM Machine
Pusat Data	352	167	(519)	-	Data Center
Lainnya	335	269	(411)	193	Others
	180.430	167.137	(58.907)	288.660	
Nilai Buku Neto	360.566			292.860	Net Book Value

15. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

15. INTERESTS RECEIVABLES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Kredit yang diberikan	10.165.322	8.600.229	Loans
Obligasi pemerintah	385.556	432.607	Government bonds
Efek-efek dan penempatan pada bank lain	170.468	140.700	Securities and placement with other Banks
Derivatif	28.956	-	Derivative
Total	10.750.302	9.173.536	Total

16. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

16. OTHER ASSETS

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third party</u>
Tagihan kepada pihak ketiga	1.040.048	890.325	Third party receivables
Biaya dibayar dimuka	505.346	367.925	Prepaid expenses
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 11g)	459.549	542.378	Deferred expense for employee loan (Note 11g)
Uang muka pajak (Catatan 38)	-	402.428	Prepaid taxes (Note 38)
Agunan yang diambil alih	77.591	77.591	Foreclosed collateral
Lainnya	270.228	224.875	Others
Total	2.352.762	2.505.522	Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Perumpera), tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos, serta tagihan kepada PT Artajasa terkait dengan transaksi ATM Bersama, PT Finnet Indonesia atas transaksi ATM Link, PT Alto Network atas transaksi ATM Alto, dan PT Rintis Sejahtera atas transaksi ATM Prima.

Rincian biaya dibayar dimuka terutama terdiri dari biaya sewa dan biaya pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.

17. LIABILITAS SEGERA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Kewajiban kepada pihak ketiga	2.534.231	3.140.315
Hutang pajak		
Pajak penghasilan		
Pasal 29 (Catatan 38)	347.774	329.800
Pasal 4 ayat (2)	122.810	76.004
Pasal 21	88.045	13.954
Pajak pertambahan nilai	32.567	20.721
Deposito berjangka jatuh tempo	14.058	28.490
Bagi hasil yang belum dibagikan	37.548	23.626
Bunga atas deposito berjangka yang belum diambil nasabah	2.634	6.311
Lainnya	25.691	15.015
Total	3.205.358	3.654.236

18. GIRO

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Pihak ketiga				
Rupiah		19.411.404		13.975.207
Dolar Amerika Serikat	527.470	8.211	552.563	7.875
		19.419.615		13.983.082
Pihak Berelasi (Catatan 43)				
Rupiah		92.304.844		60.913.157
Dolar Amerika Serikat	115.706.948	1.801.268	268.204.729	3.822.588
		94.106.112		64.735.745
Total		113.525.727		78.718.827

16. OTHER ASSETS (continued)

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the receivables from the Government of the Republic of Indonesia, (Perumpera) receivables from PT Pos Indonesia (Persero) regarding collaboration on holding Tabungan Batara Kantor Pos, and receivables from PT Artajasa arising from transactions with ATM Bersama, receivables from PT Finnet Indonesia arising from ATM Link's transactions, receivables from PT Alto Network arising from transaction with ATM Alto, and receivables from PT Rintis Sejahtera arising from transaction with ATM Prima.

Details of prepaid expenses consist mainly of rent expenses and building and office furnitures maintenance expenses.

17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Kewajiban kepada pihak ketiga	2.534.231	3.140.315
Hutang pajak		
Pajak penghasilan		
Pasal 29 (Catatan 38)	347.774	329.800
Pasal 4 ayat (2)	122.810	76.004
Pasal 21	88.045	13.954
Pajak pertambahan nilai	32.567	20.721
Deposito berjangka jatuh tempo	14.058	28.490
Bagi hasil yang belum dibagikan	37.548	23.626
Bunga atas deposito berjangka yang belum diambil nasabah	2.634	6.311
Lainnya	25.691	15.015
Total	3.205.358	3.654.236

18. DEMAND DEPOSITS

This account consists of:

	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Pihak ketiga				
Rupiah		19.411.404		13.975.207
Dolar Amerika Serikat	527.470	8.211	552.563	7.875
		19.419.615		13.983.082
Pihak Berelasi (Catatan 43)				
Rupiah		92.304.844		60.913.157
Dolar Amerika Serikat	115.706.948	1.801.268	268.204.729	3.822.588
		94.106.112		64.735.745
Total		113.525.727		78.718.827

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. GIRO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah masing-masing sebesar Rp8.624.809 dan Rp5.355.953.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Rupiah adalah sebesar 1,59% dan 1,78% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dan tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Dolar Amerika Serikat adalah sebesar 1,03% dan 0,83% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp354.287 dan Rp603.229 (Catatan 11).

Giro simpanan dari nasabah dan wadiah dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp94.106.112 dan Rp64.735.745

Dana Syirkah Temporer - Giro Mudharabah

a. Berdasarkan jenis produk

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Giro BTN Prima iB	480.787	479.614
Total	480.787	479.614

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Pihak Ketiga	468.890	467.333
Pihak Berelasi (Catatan 43)	11.897	12.281
Total	480.787	479.614

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro Mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Giro Mudharabah	14 : 86	1,37%

18. DEMAND DEPOSITS (Continued)

As of December 31, 2022 and 2021, demand deposits balance include deposits based on sharia banking principles amounting to Rp8,624,809 and Rp5,355,953, respectively.

The average annual interest rates for Rupiah demand deposits are 1.59% and 1.78% for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, and for United States Dollar denominated demand deposits are 1.03% and 0.83% for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

Demand deposits amounting to Rp354,287 and Rp603,229 as of December 31, 2022 and 2021, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank (Note 11).

As of December 31, 2022 and 2021, demand deposit and wadiah demand deposits from depositors who are related parties of the bank amounted to Rp94,106,112 and Rp64,735,745

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Current Accounts

a. By product

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Giro BTN Prima iB	480.787	479.614
Total	480.787	479.614

b. By relationship

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Third Parties	468.890	467.333
Related Party (Note 43)	11.897	12.281
Total	480.787	479.614

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022	
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Mudharabah current accounts	14 : 86	1,37%

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

18. GIRO (lanjutan)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2021

	<u>Nisbah (%)/ Ratio (%)</u>	<u>Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)</u>	
Giro <i>Mudharabah</i>	14 : 86	1,31%	<i>Mudharabah current accounts</i>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat giro *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no *mudharabah* demand deposits which are pledged as collateral.

19. TABUNGAN

	<u>31 Desember/December 31, 2022</u>		<u>31 Desember/December 31, 2021</u>		
	<u>Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)</u>	<u>Ekuivalen/ Equivalent Rupiah</u>	<u>Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)</u>	<u>Ekuivalen/ Equivalent Rupiah</u>	
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Tabungan Batara		36.079.695		46.721.618	<i>Batara savings deposits</i>
Tabungan Batara <i>Wadiah</i>		1.193.718		1.150.239	<i>Batara Wadiah savings deposit</i>
		<u>37.273.413</u>		<u>47.871.857</u>	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollar</u>
Tabungan Batara	6.211.491	96.697	5.156.003	73.486	<i>Batara savings deposits</i>
<u>Dolar Singapura</u>					<u>Singapore Dollar</u>
Tabungan Batara	512.114	5.937	407.120	4.297	<i>Batara savings deposits</i>
		<u>102.634</u>		<u>77.783</u>	
Total		<u>37.376.047</u>		<u>47.949.640</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp1.193.718 dan Rp1.150.239.

As of December 31, 2022 and 2021, savings deposits balance include savings deposits based on sharia banking principles amounted to Rp1,193,718 and Rp1,150,239, respectively.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan rupiah sebesar 1,44% dan 1,81% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan valas sebesar 0,16% dan 0,30% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The average annual interest rates for rupiah savings deposits are 1.44% and 1.81%, for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively. The average annual interest rates for foreign currencies savings deposits are 0.16% and 0.30%, for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp598.326 dan Rp817.279 (Catatan 11).

Savings deposits amounting to Rp598,326 and Rp817,279 as of December 31, 2022 and 2021, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

19. TABUNGAN (lanjutan)

Tabungan Batara dan *wadiah* dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp526.282 dan Rp437.130 (Catatan 43).

19. SAVINGS DEPOSITS (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, Batara and *wadiah* savings deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp526,282 and Rp437,130, respectively (Note 43).

Dana *Syirkah* Temporer - Tabungan *Mudharabah*

Temporary *Syirkah* Funds - *Mudharabah* Savings Deposits

a. Berdasarkan jenis produk

a. By product

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tabungan BTN Prima iB	4.602.504	3.767.123	Tabungan BTN Prima iB
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	205.866	198.490	Tabungan BTN Haji & Umroh iB
Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB	4.736	3.530	Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB
Tabungan BTN Emas iB	6.007	2.949	Tabungan BTN Emas iB
Total	4.819.113	3.972.092	Total

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pihak Ketiga	4.730.686	3.466.529	Third Parties
Pihak Berelasi (Catatan 43)	88.427	505.563	Related Party (Note 43)
Total	4.819.113	3.972.092	Total

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for *Mudharabah* savings deposits for the year ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022		
	<u>Nisbah (%)/ Ratio (%)</u>	<u>Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)</u>	
Tabungan BTN Prima iB	10,50 : 89,50	1,03%	Tabungan BTN Prima iB
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	15,50 : 84,50	1,52%	Tabungan BTN Haji & Umroh iB
Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB	15,50 : 84,50	1,52%	Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,44%	Tabungan BTN Emas iB

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

19. TABUNGAN (lanjutan)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2021	
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Tabungan BTN Prima iB	25 : 75	2,35%
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	15,50 : 84,50	1,45%
Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB	15,50 : 84,50	1,45%
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,35%

19. SAVINGS DEPOSITS (continued)

The average rate of ratio and profit sharing for *Mudharabah* savings deposits for the year ended December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

	2021	
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Tabungan BTN Prima iB	25 : 75	2,35%
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	15,50 : 84,50	1,45%
Tabungan <i>Qurban</i> BTN iB	15,50 : 84,50	1,45%
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,35%

20. DEPOSITO BERJANGKA

a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	2022	
Rupiah		
1 bulan	2,86%	
3 bulan	3,13%	
6 bulan	3,13%	
12 bulan	3,03%	
24 bulan	4,51%	
Dolar Amerika Serikat	0,36%	

20. TIME DEPOSITS

a. Average annual interest rates for time deposits are as follows:

	2021	
Rupiah		
1 month	3,31%	
3 months	3,73%	
6 months	3,81%	
12 months	4,19%	
24 months	5,36%	
United States Dollar	0,93%	

b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu kontrak:

b. The details of time deposits by currency and contract period are as follows:

	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
1 bulan		49.859.586		33.943.855	1 month
3 bulan		49.971.583		49.235.079	3 months
6 bulan		23.370.744		18.500.390	6 months
12 bulan		10.416.465		27.238.651	12 months
24 bulan		11.553.056		16.894.527	24 months
		145.171.434		145.812.502	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollar</u>
1 bulan	2.448.639	38.119	32.117.271	457.751	1 month
3 bulan	56.778.006	883.892	5.267.507	75.075	3 months
6 bulan	5.083.726	79.141	12.159.650	173.306	6 months
12 bulan	473.642	7.373	38.538	549	12 months
		1.008.525		706.681	
<u>Dolar Singapura</u>					<u>Singapore Dollar</u>
1 bulan	104.900	1.216	-	-	1 months
3 bulan	453.603	5.259	133.230	1.406	3 months
6 bulan	1.000.000	11.593	-	-	6 months
		18.068		1.406	
Total		146.198.027		146.520.589	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

20. TIME DEPOSITS (continued)

c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo:

c. Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
≤ 1 bulan	66.439.113	46.805.347	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	37.434.888	55.863.050	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	20.558.238	10.333.717	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	9.195.878	21.404.584	> 6 months ≤ 12 months
> 12 bulan ≤ 24 bulan	11.543.318	11.405.804	> 12 months ≤ 24 months
	<u>145.171.434</u>	<u>145.812.502</u>	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
≤ 1 bulan	186.307	463.404	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	811.341	241.303	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	8.037	1.425	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	2.840	549	> 6 months ≤ 12 months
	<u>1.008.525</u>	<u>706.681</u>	
<u>Dolar Singapura</u>			<u>Singapore Dollar</u>
≤ 1 bulan	1.216	-	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	11.055	1.406	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	5.796	-	> 1 month ≤ 3 months
	<u>18.068</u>	<u>1.406</u>	
Total	<u>146.198.027</u>	<u>146.520.589</u>	Total

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.040.402 dan Rp2.633.495 (Catatan 11g).

As of December 31, 2022 and 2021, time deposits amounting to Rp1,040,402 and Rp2,633,495, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11g).

Deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp79.389.842 dan Rp93.453.378 (Catatan 43).

As of December 31, 2022 and 2021, time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp79,389,842 and Rp93,453,378, respectively (Note 43).

Dana Syirkah Temporer - Deposito Mudharabah

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Time Deposits

a. Berdasarkan jangka waktu kontrak

a. By contractual period

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
1 bulan	10.306.290	5.279.283	1 month
3 bulan	5.096.193	9.583.351	3 months
6 bulan	4.060.838	3.105.503	6 months
12 bulan	58.587	343.176	12 months
24 bulan	1.649	125	24 months
	<u>19.523.557</u>	<u>18.311.438</u>	
Total	<u>19.523.557</u>	<u>18.311.438</u>	Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Deposito Mudharabah

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
≤ 1 bulan	12.300.037	9.012.353
> 1 bulan ≤ 3 bulan	3.169.127	8.391.697
> 3 bulan ≤ 6 bulan	4.025.968	583.990
> 6 bulan ≤ 12 bulan	27.682	323.392
> 12 bulan ≤ 24 bulan	743	6
Total	19.523.557	18.311.438

c. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Pihak Ketiga	11.886.366	8.887.336
Pihak Berelasi (Catatan 43)	7.637.191	9.424.102
Total	19.523.557	18.311.438

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022		2021		
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	
1 bulan	29,50 : 70,50	2,88%	40 : 60	3,75%	1 month
3 bulan	29,50 : 70,50	2,88%	43 : 57	4,04%	3 months
6 bulan	29,50 : 70,50	2,88%	44 : 56	4,13%	6 months
12 bulan	29,50 : 70,50	2,88%	44 : 56	4,13%	12 months
24 bulan	39 : 61	3,81%	39 : 61	3,66%	24 months

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

20. TIME DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Time Deposits

b. By remaining period to maturity

	≤ 1 month
> 1 month ≤ 3 months	8.391.697
> 3 months ≤ 6 months	583.990
> 6 months ≤ 12 months	323.392
> 12 months ≤ 24 months	6

c. By relationship

Third Parties
Related Party (Note 43)

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the year ended December 31, 2022 and 2021, are as follows:

As of December 31, 2022 and 2021, there are no mudharabah time deposits which are pledged as collateral.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Giro	0,99%	0,76%
Deposito	2,75%	3,48%
Inter-bank call money	3,40%	2,82%

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2022					
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
<u>Rupiah</u> Giro	136.408	-	-	-	136.408
Total	136.408	-	-	-	136.408

31 Desember/December 31, 2021					
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
<u>Rupiah</u> Deposito	4.000	1.057	-	-	5.057
Giro	60.950	-	-	-	60.950
Total	64.950	1.057	-	-	66.007

Simpanan dari bank lain yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar RpNihil.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan.

Dana Syirkah Temporer - Simpanan Dari Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Pihak Ketiga</u> <u>Rupiah</u>		
Deposito berjangka Mudharabah	19.089	3.000
Tabungan Mudharabah	19.674	1.882
Giro Mudharabah	56	46
Total	38.819	4.928

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

	2022	2021
Giro	0,99%	0,76%
Deposito	2,75%	3,48%
Inter-bank call money	3,40%	2,82%

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows:

31 Desember/December 31, 2022					
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
<u>Rupiah</u> Giro	136.408	-	-	-	136.408
Total	136.408	-	-	-	136.408

31 Desember/December 31, 2021					
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
<u>Rupiah</u> Deposito	4.000	1.057	-	-	5.057
Giro	60.950	-	-	-	60.950
Total	64.950	1.057	-	-	66.007

As of December 31, 2022 and 2021, deposits from other banks which are related parties of the Bank amounted to RpNil respectively.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no deposits from other banks which are pledged as collateral.

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Third Parties</u> <u>Rupiah</u>		
Mudharabah Time deposits	19.089	3.000
Mudharabah Saving deposits	19.674	1.882
Mudharabah Current accounts	56	46
Total	38.819	4.928

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Simpanan Dari Bank Lain (lanjutan)

Simpanan bank lain berdasarkan dana *syirkah* temporer yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar RpNihil.

Tabungan dan giro *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun:

	2022	2021
Giro <i>mudharabah</i>	1,37%	1,31%
Tabungan <i>mudharabah</i>	1,03%	2,35%
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>	2,88%	3,75%

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat simpanan dari bank lain *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

22. LIABILITAS AKSEPTASI

Rincian liabilitas akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Rupiah</u>		
Pihak ketiga		
Surat Kredit Berdokumen		
Dalam Negeri (SKBDN)	294.876	292.220
<i>Letter of Credit</i>	7.161	-
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Surat Kredit Berdokumen		
Dalam Negeri (SKBDN)	118.525	161.920
Total	420.562	454.140

b. Berdasarkan Jangka Waktu:

	31 Desember / December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
≤ 1 bulan	80.697	20.094
> 1 bulan - 3 bulan	49.568	56.401
> 3 bulan - 1 tahun	290.297	377.645
Total	420.562	454.140

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks (continued)

Deposits from other banks based on temporary *syirkah* funds which are related parties of the Bank as of December 31, 2022 and 2021 amounted to RpNil, respectively.

Mudharabah savings deposits and current account represent deposits from third parties who receive a share in the revenue earned by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

By annual interest rates and profit sharing:

	2022	2021
Giro <i>mudharabah</i>	1,37%	1,31%
Tabungan <i>mudharabah</i>	1,03%	2,35%
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>	2,88%	3,75%

As of December 31, 2022 and 2021, there are no *mudharabah* deposits from other banks which are pledged as collateral.

22. ACCEPTANCES PAYABLE

The details of acceptances payable from customers are as follows:

a. By Type and Currency

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Rupiah</u>		
Third Parties		
Domestic Document		
Letter of Credit	294.876	292.220
Letter of Credit	7.161	-
Related parties (Note 43)		
Domestic Document		
Letter of Credit	118.525	161.920
Total	420.562	454.140

b. By Period

	31 Desember / December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
≤ 1 month	80.697	20.094
> 1 month - 3 months	49.568	56.401
> 3 months - 1 year	290.297	377.645
Total	420.562	454.140

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. SURAT-SURAT DITERBITKAN	BERHARGA	YANG			23. SECURITIES ISSUED
			<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
					<u>Rupiah</u>
<i>Long Term Note</i> Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I Pihak berelasi			9.529	10.186	<i>Long Term Notes Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2021 Phase I Related parties</i>
<i>Long Term Note II</i> Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri A Pihak berelasi			46.903	-	<i>Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series A Related parties</i>
<i>Long Term Note II</i> Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri B Pihak berelasi			78.033	-	<i>Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series B Related parties</i>
<i>Long Term Note III</i> Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap I Pihak berelasi			210.866	-	<i>Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase I Related parties</i>
<i>Long Term Note III</i> Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap II Pihak berelasi			131.185	-	<i>Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase II Related parties</i>
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.366 dan Rp5.901 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Pihak ketiga Pihak berelasi (Catatan 43)			508.247 413.387	508.467 411.759	<i>Continuing Bonds IV Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp1,366 and Rp5,901 as of December 31, 2022 and 2021, respectively Third parties Related parties (Note 43)</i>
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.909 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Pihak ketiga Pihak berelasi (Catatan 43)			748.568 249.523	- -	<i>Continuing Bonds IV Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp1,909 and RpNil as of December 31, 2022 and 2021, respectively Third parties Related parties (Note 43)</i>
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp604 dan Rp2.307 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Pihak ketiga Pihak berelasi (Catatan 43)			454.275 764.621	1.678.876 706.317	<i>Continuing Bonds III Phase II net of unamortized issuance cost amounted to Rp604 and Rp2,307 as of December 31, 2022 and 2021, respectively Third parties Related parties (Note 43)</i>
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.298 dan Rp1.949 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Pihak ketiga Pihak berelasi (Catatan 43)			791.541 1.446.161	1.588.823 1.943.228	<i>Continuing Bonds III Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp1,298 and Rp1,949 as of December 31, 2022 and 2021, respectively Third parties Related parties (Note 43)</i>

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah (continued)</u>
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp497 dan Rp314 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021			<i>Continuing Bonds II Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp497 and Rp314 as of December 31, 2022 and 2021, respectively</i>
Pihak ketiga	182.886	895.824	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 43)	616.616	703.862	<i>Related parties (Note 43)</i>
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp81 dan Rp395 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021			<i>Continuing Bonds I Phase II net of unamortized issuance cost amounted to Rp81 and Rp395 as of December 31, 2022 and 2021, respectively</i>
Pihak ketiga	1.611.735	1.630.665	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 43)	388.184	293.940	<i>Related parties (Note 43)</i>
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp238 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021			<i>Continuing Bonds I Phase I net of unamortized issuance cost amounted to RpNil and Rp238 as of December 31, 2022 and 2021, respectively</i>
Pihak ketiga	-	1.791.786	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 43)	-	207.975	<i>Related parties (Note 43)</i>
Total	8.652.260	12.371.708	Total

i. Long Term Note Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp9.529. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

i. Long Term Notes Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2021 Phase I

The Bank issued *Long Term Notes (LTN)* Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2021 Phase I with a total nominal value of Rp9,529. Such *LTN* were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on June 17, 2037. The payment agent for *LTN* is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). *LTN* were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERTHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

ii. Long Term Note II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri A

Bank menerbitkan Long Term Note (LTN) Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp46.903. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2036. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. LTN ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan LTN tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

iii. Long Term Note II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri B

Bank menerbitkan Long Term Note (LTN) Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp78.033. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. LTN ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan LTN tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

ii. Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series A

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp46,903. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on October 12, 2036. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

iii. Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series B

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp78,033. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on April 12, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERTHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

iv. Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap I

Bank menerbitkan Long Term Note (LTN) Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp210.866. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. LTN ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan LTN tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

v. Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap II

Bank menerbitkan Long Term Note (LTN) Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp131.185. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. LTN ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan LTN tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

iv. Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase I

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp210,866. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on June 14, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

v. Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase II

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp131,185. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on March 28, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

vi. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

vi. Continuing Bonds IV Phase II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 5,50% dan 6,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A dan Seri B dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 24 Mei 2025 dan 24 Mei 2027. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II tahun 2022 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-211/D.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

The Bank issued Continuing Bonds IV Phase II of 2022 with a total nominal value of Rp1,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 5.50% and 6.00%, payable every three months for Continuing Bonds IV Phase II Series A dan Series B, respectively, and will mature on May 24, 2025 and May 24, 2027, respectively. The issuance of Continuing Bonds IV Phase II of 2022 became effective based on Letter No. S-211/D.04/2020 dated August 11, 2020 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

As of December 31, 2022, Continuing Bonds IV Phase II were rated idAA by PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

The trustee for Continuing Bonds IV Phase II is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERTHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

vii. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

vii. Continuing Bonds IV Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.500.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 6,75%, 7,80% dan 8,40% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2021, 19 Agustus 2023, dan 19 Agustus 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I tahun 2020 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-211/D.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

The Bank issued Continuing Bonds IV Phase I of 2020 with a total nominal value of Rp1,500,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 6.75%, 7.80% and 8.40%, payable every three months for Continuing Bonds IV Phase I Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on August 29, 2021, August 19, 2023, and August 19, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds IV Phase I of 2020 became effective based on Letter No. S-211/D.04/2020 dated August 11, 2020 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia dan idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo)

As of September 30, 2022 and 2021, Continuing Bonds IV Phase I were rated idAA by PT Fitch Ratings Indonesia and idAA+ by PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), respectively.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

The trustee for Continuing Bonds IV Phase I is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until December 31, 2022, Continuing Bonds IV Phase I Series A has been fully paid by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERTHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

viii. Obligasi Berkelanjutan III Tahap II

viii. Continuing Bonds III Phase II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp4.144.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,75%, 8,75% dan 9,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020, 28 Juni 2022, 28 Juni 2024. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2019 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/ 2017 tanggal 22 Juni 2017.

The Bank issued Continuing Bonds III Phase II of 2019 with a total nominal value of Rp4,144,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 7.75%, 8.75% and 9.00%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase II Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on July 8, 2020, June 28, 2022, and June 28, 2024, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase II of 2019 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated June 22, 2017 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2022 and, 2021, Continuing Bonds III Phase II are rated idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds III Phase II is PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A dan Seri B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until December 31, 2022, Continuing Bonds III Phase II Series A and Series B has been fully paid by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERTHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

ix. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

ix. Continuing Bonds III Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 8,30%, 8,50%, 8,70% dan 8,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020, 13 Juli 2022, 13 Juli 2024 dan 13 Juli 2027. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tahun 2017 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/2017 tanggal 22 Juni 2017.

The Bank issued Continuing Bonds III Phase I of 2017 with a total nominal value of Rp5,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 8.30%, 8.50%, 8.70% and 8.90%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 13, 2020, July 13, 2022, July 13, 2024 and July 13, 2027, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase I of 2017 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated June 22, 2017 of the Board of Commissioners the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia dan idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2022 and 2021, Continuing Bonds III Phase I were rated idAA by PT Fitch Ratings Indonesia and idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), respectively.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The trustee for Continuing Bonds III Phase I is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A dan Seri B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until December 31, 2022, Continuing Bonds III Phase I Series A and Series B has been fully paid by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERTAHAP YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

x. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

x. Continuing Bonds II Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,63%, 9,88%, 10,00% dan 10,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2018, 8 Juli 2020, 8 Juli 2022 dan 8 Juli 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tahun 2015 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-207/D.04/2015 tanggal 30 Juni 2015.

The Bank issued Continuing Bonds II Phase I of 2015 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 9.63%, 9.88%, 10.00% and 10.50%, payable every three months for Continuing Bonds II Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 8, 2018, July 8, 2020, July 8, 2022 and July 8, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds II Phase I of 2015 became effective based on Letter No. S-207/D.04/2015 dated June 30, 2015 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia dan idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2022 and 2021, Continuing Bonds II Phase I were rated idAA by PT Fitch Ratings Indonesia and idAA+ by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), respectively.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds II Phase I is PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A dan Seri B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until December 31, 2022, Continuing Bonds II Phase I Series A and Series B has been fully paid by the Bank on the maturity date

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERTAHAP YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xi. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II

xi. Continuing Bonds I Phase II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tahun 2013 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

The Bank issued Continuing Bonds I Phase II 2013 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on March 27, 2023. The issuance of Continuing Bonds I Phase II of 2013 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia dan idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2022 and 2021, Continuing Bonds I Phase II were rated idAA by PT Fitch Ratings Indonesia and idAA+ by Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), respectively.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi I Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp75.000 dengan harga beli Rp76.620. Pada tanggal 27 Mei 2022, Bank melakukan penjualan kembali Obligasi I Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp75.000 dengan harga jual Rp77.250.

As of October 12, 2020, the Bank bought back BTN Continuing Bonds I Phase II Bonds for nominal value of Rp75,000 with repurchased price of Rp76,620. As of May 27, 2022, the Bank resell BTN Continuing Bonds I Phase II Bonds for nominal value of Rp75,000 with reselling price of Rp77,250.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds I Phase II is PT Bank Mega Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERTAHAP YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xi. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I

xi. Continuing Bonds I Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2022. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTN I Tahap I tahun 2012 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

The Bank issued Continuing Bonds I Phase I 2012 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on June 5, 2022. The issuance of Continuing Bonds I Phase I of 2012 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I mendapat penilaian peringkat idAA+, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

As of December 31, 2022 and 2021, Continuing Bonds I BTN Phase I were rated idAA+, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds I Phase I is PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo

Until December 31, 2022, Continuing Bonds I Phase I has been fully paid by the Bank on maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Pihak Ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	4.418.075	4.000.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.000.000	2.000.000
Citibank N.A., Jakarta	139.483	-
PT Bank DKI	-	499.997
	<u>6.557.558</u>	<u>6.499.997</u>
<u>Mata Uang Asing</u>		
Japan International Cooperation Agency	807.762	-
	<u>7.365.320</u>	<u>6.499.997</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17.455.685	15.562.294
	<u>17.455.685</u>	<u>15.562.294</u>
Total	<u>24.821.005</u>	<u>22.062.291</u>

24. FUND BORROWINGS

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Third Parties</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	4.418.075	4.000.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.000.000	2.000.000
Citibank N.A., Jakarta	139.483	-
PT Bank DKI	-	499.997
	<u>6.557.558</u>	<u>6.499.997</u>
<u>Foreign Currency</u>		
Japan International Cooperation Agency	807.762	-
	<u>7.365.320</u>	<u>6.499.997</u>
<u>Related Parties (Note 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17.455.685	15.562.294
	<u>17.455.685</u>	<u>15.562.294</u>
Total	<u>24.821.005</u>	<u>22.062.291</u>

a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Perjanjian No. 195/Add-KCK/2021 tanggal 22 April 2021 yang terdiri dari:

- *Term Loan II* dan *III* yang dilakukan perpanjangan selama 36 bulan atas pinjaman tersebut sebesar masing-masing Rp1 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar masing-masing 5,50% dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 21 Juni 2024 dan 14 Juni 2024.
- *Term Loan IV* sebesar Rp 2 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 5,5% dengan jangka waktu selama 36 bulan yang akan jatuh tempo masing-masing sebesar Rp1 triliun (angka penuh) pada 25 April 2024 dan sebesar Rp1 triliun (angka penuh) pada 8 Mei 2024.

a. Loan from PT Bank Central Asia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Central Asia Tbk which is intended to Finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk has been amended several times. The last amendment was documented under the loan agreement No. 195/Add-KCK/2021 dated April 22, 2022 consist of:

- The *Term Loan II*, and *III* the loan were extended for 36 months, for each Rp1 trillion (full amount) with fixed interest rate are 5.50% per annum and will mature on June 21, 2024 and June 14, 2024, respectively.
- The *Term Loan IV* amounting Rp2 trillion (full amount) with fixed interest rate 5.50% with 36 months period which will mature amounting Rp1 trillion (full amount) on April 25, 2024 and amounting Rp1 trillion (full amount) on May 8, 2024, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk Jakarta sebesar Rp420 miliar (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 5,23% dan jatuh tempo pada 18 Mei 2025.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- Menjaga Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Neto sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 40%

b. Pinjaman dari Citibank N.A., Jakarta

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Citibank N.A., Jakarta ditujukan untuk mendukung Bank dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah di Indonesia.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman sindikasi sebesar Rp140 miliar (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 4,70% dan jatuh tempo pada 18 Mei 2024.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- Menjaga Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Neto sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 40%

24. FUND BORROWINGS (continued)

a. Loan from PT Bank Central Asia Tbk (continued)

On May 18, 2022, the Bank received loan from PT Bank Central Asia Tbk with plafond amounting to Rp420 billion (full amount) with fixed interest rate of 5.23% and will mature on May 18, 2025.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- Gross Non Performing Loan (NPL) ratio shall not exceed 6%
- Maintain Net Non Performing Loan (NPL) ratio to comply in accordance with regulations
- Capital Adequacy Ratio is minimum at least 12%
- Net income for the current year with positive numbers
- Liquidity coverage ratio minimum 100%
- Non Performing Loan (NPL) coverage minimum 100%
- Open credit exposure ratio shall not exceed than 40%

b. Loan from Citibank N.A., Jakarta

This account represents loan facility obtained from Citibank N.A., Jakarta which is intended to support Banks in the context of selling housing loans in Indonesia.

On May 18, 2022, the Bank received syndicated loan with plafond amounting to Rp140 billion (full amount) with fixed interest rate of 4.70% and will mature on May 18, 2024, respectively.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- Gross Non Performing Loan (NPL) ratio shall not exceed 6%
- Maintain Net Non Performing Loan (NPL) ratio to comply in accordance with regulations
- Capital Adequacy Ratio is minimum at least 12%
- Net income for the current year with positive numbers
- Liquidity coverage ratio minimum 100%
- Non Performing Loan (NPL) coverage minimum 100%
- Open credit exposure ratio shall not exceed than 40%

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari Japan International Cooperation Agency

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Japan International Cooperation Agency ditujukan untuk mendukung penyaluran kredit kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di Indonesia.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar JPY 7 miliar (angka penuh) atau ekuivalen Rp765.590 dengan bunga tetap sebesar 0,90% dan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2027.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit minimal 40%

d. Pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional Bank.

Perjanjian pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Perjanjian Kredit No. 108/PP/EB/0121 tanggal 17 Februari 2021, Bank mendapatkan pinjaman bilateral dengan plafon sebesar masing-masing Rp500 miliar (angka penuh), Rp500 miliar (angka penuh) dan Rp1.000 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap sebesar masing-masing 5,75% dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023, 25 September 2023 dan 24 Desember 2023.

24. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from Japan International Cooperation Agency

This account represents loan facility obtained from Japan International Cooperation Agency which is intended to support distributing housing loans for low and middle income communities in Indonesia.

On May 18, 2022, the Bank received loan with plafond amounting to JPY 7 billion (full amount) or the equivalent to Rp765,590 with fixed interest rate of 0.90% and will mature on May 10, 2027, respectively.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- Gross *Non Performing Loan (NPL)* ratio shall not exceed 6%
- *Capital Adequacy Ratio* is minimum at least 12%
- Net income for the current year with positive numbers
- *Liquidity coverage ratio* minimum 100%
- *Non Performing Loan (NPL)* coverage minimum 100%
- *Open credit exposure ratio* is not less than 40%

d. Loan from PT Bank Danamon Indonesia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Danamon Indonesia Tbk which is intended to support the business and operational development of the Bank.

The loan agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk has been amended several times. The last amendment was documented under the loan agreement No. 108/PP/EB/0121 dated February 17, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting for each Rp500 billion (full amount), Rp500 billion (full amount) and Rp1,000 billion (full amount) with fixed interest rate for each 5.75% and will mature on August 22, 2023, September 25, 2023 and December 24, 2023, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d. Pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Mempertahankan minimum CAR sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku

d. Pinjaman dari PT Bank DKI

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank DKI ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan penyaluran kredit.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 336/Termloan/TRS/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021, Bank mendapatkan pinjaman bilateral dengan plafon sebesar Rp500 miliar (angka penuh) dengan bunga 3,25% dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp500 miliar (angka penuh).

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut:

- Pinjaman SMF Tahap 1 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,8 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 9,20% dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp1,8 triliun.

24. FUND BORROWINGS (continued)

d. Loan from PT Bank Danamon Indonesia Tbk (continued)

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum is in accordance with the provisions of the applicable regulator under
- *Non-Performing Loan* (NPL) ratio in accordance with the provisions of the applicable regulator.
- *Liquidity coverage ratio* minimum is in accordance with the provisions of the applicable regulator

d. Loan from PT Bank DKI

This account represent loan facility obtained from PT Bank DKI this is intended to support the business and development the operational of Bank and credit distribution.

Based on Loan Agreement No. 336/Termloan/TRS/XII/2021 dated on December 21, 2021, the Bank received bilateral loan with plafond amounting Rp500 billion (full amount) with fixed rate 3.25% and will mature on January 28, 2022.

The Bank has fully paid the loan at maturity date on January 28, 2022 amounting to Ro 500 billion (full amount), respectively.

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow:

- SMF Loan Phase 1 Year 2019

Based on loan agreement No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 dated February 12, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.8 trillion (full amount) with fixed interest rate of 9.20% and will mature on February 12, 2022.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on February 12, 2022 amounting to Rp1.8 trillion (full amount).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- **Pinjaman SMF Tahap 2 Tahun 2019**
Berdasarkan perjanjian No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 tanggal 11 April 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,5 triliun (angka penuh) yang terdiri atas sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dan Rp500 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 8,60% yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 2 Mei 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 2 Mei 2022 sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dan Rp500 miliar (angka penuh).
- **Pinjaman SMF Tahap 3 Tahun 2019**
Berdasarkan perjanjian No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 8,79% yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp1 triliun (angka penuh).
- **Pinjaman SMF Tahap 4 Tahun 2019**
Berdasarkan perjanjian No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp2.095 miliar (angka penuh) yang terdiri atas sebesar Rp640 miliar dengan bunga tetap 8,87% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2022 dan sebesar Rp1.455 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 9,09% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2024.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2022 sebesar Rp640 miliar (angka penuh).

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow: (continued)

- **SMF Loan Phase 2 Year 2019**
Based on loan agreement No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 dated April 11, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.5 trillion (full amount) with details of amounting to Rp1 trillion (full amount) and Rp500 billion (full amount) with interest rate of 8.60% and will mature on April 11, 2022 and May 2, 2022.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date for each on April 11, 2022 and May 2, 2022 and amounting to Rp1 trillion (full amount) and Rp500 billion (full amount).
- **SMF Loan Phase 3 Year 2019**
Based on loan agreement No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 dated May 29, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1 trillion (full amount) with fixed interest rate of 8.79% and will mature on May 31, 2022.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on May 31, 2022 amounting to Rp1 trillion (full amount).
- **SMF Loan Phase 4 Year 2019**
Based on loan agreement No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 dated July 9, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp2,095 billion (full amount) with details of amounting to Rp640 billion with interest rate of 8.87% and will mature on July 9, 2022, and amounting to Rp1,455 billion (full amount) with interest rate of 9.09% and will mature on July 9, 2024.

The Bank has fully paid the loan at maturity date on July 9, 2022 amounting to Rp640 billion (full amount).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2022

Berdasarkan perjanjian No. 016/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2022 dan No. 02/PKS/DIR/2022 tanggal 6 Januari 2022, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.493.322 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2022

Berdasarkan perjanjian No. 017/FLPP/AKAD/SMF-BTNS/I/2022 dan No. 04/PKS/DIR/2022 tanggal 6 Januari 2022, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp990.267 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF FLPP Year 2022

Based on loan agreement No. 016/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2022 and No. 02/PKS/DIR/2022 dated January 6, 2022, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2022. The outstanding balance as of December 31, 2022 is amounting to Rp4,493,322 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2022

Based on loan agreement No. 017/FLPP/AKAD/SMF-BTNS/I/2022 and No. 04/PKS/DIR/2022 dated January 6, 2022, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2022. The outstanding balance as of December 31, 2022 is amounting to Rp990,267 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2022

Berdasarkan perjanjian No. 017/FLPP/AKAD/SMF-BTNS/II/2022 dan No. 04/PKS/DIR/2022 tanggal 6 Januari 2022, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp990.267 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP 2021

Berdasarkan perjanjian No. 069/FLPP/PP/SMF-BTN/IV/2021 tanggal 14 April 2021, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2022

Based on loan agreement No. 017/FLPP/AKAD/SMF-BTNS/II/2022 and No. 04/PKS/DIR/2022 dated January 6, 2022, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2022. The outstanding balance as of December 31, 2022 is amounting to Rp990,267 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan FLPP 2021

Based on loan agreement No. 069/FLPP/PP/SMF-BTN/IV/2021 dated April 14, 2021, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2021 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp3.328.337 dan Rp.3.476.551 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP 2020

Berdasarkan perjanjian No. 010/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp854.264 dan Rp897.524 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan FLPP 2021 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2021. The outstanding balance as of December 31, 2022 and 2021 is amounting to Rp3,328,337 and Rp3,476,551 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF FLPP Year 2020

Based on loan agreement No. 010/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2020 dated January 20, 2020, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2022 and 2021 is amounting to Rp854,264 and Rp897,524 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2021

Berdasarkan perjanjian No. 069A/FLPP/AKAD/SMF-BTN/IV/2021 tanggal 21 April 2021, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp710.998 dan Rp747.118 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- *Refinancing 1* SMF 2021

Berdasarkan perjanjian No.124/PP/SMF-BTN/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500 miliar (angka penuh) dan Rp1.000 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 5,70% dan 5,95% yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2024.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2021

Based on loan agreement No. 069A/FLPP/AKAD/SMF-BTN/IV/2021 dated April 21, 2021, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2022 and 2021 is amounting to Rp710,998 and Rp747,118 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *Refinancing 1* SMF 2021

Based on loan agreement No.124/PP/SMF-BTN/VI/2021 dated June 30, 2021, the Bank received a loan with *plafond* amounting to Rp500 billion (full amount) and Rp1,000 billion (full amount) with interest rate of 5.70% and 5.95% and will mature on June 30, 2023 and June 30, 2024.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

• *Refinancing 2 SMF 2021*

Berdasarkan perjanjian No.254/PP/SMF-BTN/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp200 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 4% yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp200 miliar (angka penuh).

• *Refinancing 1 SMF 2022*

Berdasarkan perjanjian No.119/PP/SMF-BTN/IV/2022 tanggal 28 April 2022, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp2 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 5,60% yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2025.

• *Pinjaman SMF FLPP 2019*

Berdasarkan perjanjian No. 099/PP/FLPP/SMF-BTN/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit kepemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp803.296 dan Rp849.356 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

• *Refinancing 2 SMF 2021*

Based on loan agreement No.254/PP/SMF-BTN/XII/2021 dated December 28, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp200 billion (full amount) with interest rate of 4% and will mature on December 28, 2022.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on December 28, 2022 amounting to Rp200 billion (full amount).

• *Refinancing 1 SMF 2022*

Based on loan agreement No. 119/PP/SMF-BTN/IV/2022 dated April 28, 2022, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp2 trillion (full amount) with interest rate of 5.60% and will mature on April 28, 2025.

• *SMF Loan FLPP 2019*

Based on loan agreement 099/PP/FLPP/SMF-BTN/I/2019 dated January 17, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2022 and 2021 is amounting to Rp803,296 and Rp849,356 respectively, with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah*

Berdasarkan perjanjian No. 179/AKAD/SMF-BTNS/IX/2021 tanggal 15 September 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100 miliar (angka penuh) dengan nisbah bagi hasil sebesar 53,17% dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022 sebesar Rp100 miliar (angka penuh).

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2020

Berdasarkan perjanjian No.024/FLPP/AKAD/SMF-BTNSy/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit kepemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp168.256 and Rp177.973 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah*

Based on loan agreement No. 179/AKAD/SMF-BTNS/IX/2021 dated September 15, 2021, the Bank received loan with *plafond* amounting to Rp100 billion (full amount) with *nisbah* ratio 53.17% and will mature on September 16, 2022.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on September 16, 2022 amounting to Rp100 billion (full amount).

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2020

Based on loan agreement No. 024/FLPP/AKAD/SMF-BTNSy/I/2020 dated January 29, 2020, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2022 and 2021 is amounting to Rp168,256 and Rp177,973 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2018

Berdasarkan perjanjian No. 81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit kepemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp607.414 dan Rp642.516 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018

Berdasarkan perjanjian No.103A/AKAD/SMF-BTNSy/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit kepemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan FLPP 2018

Based on loan agreement No. 81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 28, 2018. The Outstanding Balance as of December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp607,414 and Rp642,516, respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018

Based on loan agreement No.103A/AKAD/SMF-BTNSy/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp26.616 dan Rp28.411 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019

Berdasarkan perjanjian No. 017A/AKAD/FLPP/SMF-BTNSy/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 28, 2018. The outstanding balance as of December 31, 2022 and 2021 is amounting to Rp26,616 and Rp28,411 respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019

Based on loan agreement No. 017A/AKAD/FLPP/SMF-BTNSy/I/2019 dated January 21, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp95.575 dan Rp101.889 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019

Berdasarkan perjanjian No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit kepemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2022 and 2021 is Rp95,575 and Rp101,889, respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019

Based on loan agreement No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 dated December 20, 2019, the Bank received loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp26.238 dan Rp28.115 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP Percepatan 2019

Berdasarkan perjanjian No. 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 tanggal 28 November 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2022 and 2021 is Rp26,238 and Rp28,115 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan FLPP Percepatan 2019

Based on loan agreement No. 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 dated November 28, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

f. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP Percepatan 2019 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp396.120 dan Rp417.896 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pinjaman yang diterima dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp17.455.685 dan Rp15.562.294 (Catatan 43).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima.

24. FUND BORROWINGS (continued)

f. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan FLPP Percepatan 2019 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2022 and 2021 is amounting to Rp396,120 and Rp417,896, respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

As of December 31, 2022 and 2021, fund borrowings received from related parties amounted to Rp17,455,685 and Rp15,562,294, respectively (Note 43).

As of December 31, 2022 and 2021, the Bank has complied with all of the existing terms and condition of the fund borrowing agreements.

25. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI

25. SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
<u>Mata Uang Asing</u>			<u>Foreign Currency</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Obligasi Subordinasi	4.658.242	4.259.776	Subordinated bonds
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>			<u>Related Party (Note 43)</u>
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	4.499.977	4.499.968	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Total	9.158.219	8.759.744	Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI
(lanjutan)**

Akun ini merupakan fasilitas pemberian Pinjaman Subordinasi yang diperoleh dari PT SMF (Persero) yang ditujukan untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Pinjaman Subordinasi sebesar Rp3.000.000 dengan suku bunga 9,00% dilakukan dalam 2 (dua) kali tahapan pencairan. Pencairan tahap ke-1 pada 30 Mei 2016 sebesar Rp1.500.000 dan tahap ke-2 pada 20 September 2016 sebesar Rp1.500.000. Jangka waktu Pinjaman Subordinasi adalah 5 tahun (60 bulan) yang akan jatuh tempo masing-masing pada 30 Mei 2021 dan 20 Juni 2021. Pinjaman Subordinasi sebesar Rp3.000.000 dengan suku bunga 8,90% dilakukan pencairan pada tanggal 27 Desember 2019 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2024. Pada tanggal 15 November 2021, Bank melakukan pencairan Pinjaman Subordinasi pada tanggal 15 November 2021 sebesar Rp1.500.000 dengan suku bunga 7,65% yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2026.

Pinjaman subordinasi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-69/PB.31/2016 tanggal 30 September 2016 dan No. S-21/PB.31/2020 tanggal 4 Februari 2020 dan No. S-261/PB.31/2021 tanggal 25 November 2021.

Pada tanggal 23 Januari 2020, Bank telah menerbitkan obligasi subordinasi sebesar USD300 juta atau ekuivalen Rp4.089.000 dengan tenor 5 tahun dan bunga 4,20% per tahun dan dicatikan di Bursa Efek Singapura. Penerbitan Obligasi tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-35/PB.31/2020 tanggal 26 Februari 2020.

Biaya penerbitan obligasi subordinasi tersebut sebesar Rp23.866 dicatat mengurangi nilai obligasi subordinasi dan akan diamortisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada 23 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman subordinasi yang diterima.

**25. SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES
(continued)**

This account is a subordinated loan that was obtained from PT SMF (Persero) that is aimed to support the one million housing program. Subordinated loan in the amount of Rp3,000,000 with interest rate of 9.00% is done in 2 (two) steps credit disbursement. The first disbursement is done on May 30, 2016 in the amount of Rp1,500,000 and the second disbursement is on September 20, 2016 in the amount of Rp1,500,000. The time period of the subordinated loan is 5 years (60 months) that will mature on May 30, 2021 and June 20, 2021. Subordinated loan in the amount of Rp3,000,000 with interest rate of 8.90% was withdrawn on December 27, 2019 and will mature on December 27, 2024. On 15 November 2021, Bank disburse Subordinated Loan amounting Rp1,500,000 with interest rate 7.65% mature on November 15, 2026.

Subordinated loan has been approved by Financial Service Authority through letter No. S-69/PB.31/2016 dated September 30, 2016 and No. S-21/PB.31/2020 dated February 4, 2020 and No. S-261/PB.31/2021 dated November 25, 2021.

On January 23, 2020, the Bank issued subordinated bonds with a total nominal value of USD300 million or the equivalent to Rp4,089,000, with tenor of 5 years and interest of 4.20% per annum and listed in the Singapore Stock Exchange. The issuance of Global Bond became effective based on letter No. S-35/PB.31/2020 dated February 26, 2020.

The issuance costs of the subordinated bonds amounting to Rp23,866 was recorded as deduction to the amount of the subordinated bonds and amortised until the maturity date on January 23, 2025.

As of December 31, 2022 and 2021, the Bank has complied with all of the existing terms and conditions of the subordinated loan agreements.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

26. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

26. INTEREST PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Deposito berjangka	334.877	213.484	Time deposits
Surat-surat berharga yang diterbitkan	79.538	127.941	Securities issued
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	114.971	106.244	Subordinated loan and securities
Pinjaman yang diterima	51.072	49.056	Fund borrowings
Derivatif	48.908	-	Derivative
Total	629.366	496.725	Total

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

The collectibility classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks are as follows:

	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
<u>Lancar</u> <u>Rupiah</u>					<u>Current</u> <u>Rupiah</u>
Garansi yang diterbitkan (Catatan 39)		887.321	892.365		Guarantees issued (Note 39)
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed) Irrevocable L/C yang masih berjalan (Catatan 39)		67.928	85.734		Unused loan facility (committed) Outstanding irrevocable L/Cs (Note 39)
		221.484	280.604		
		<u>1.176.733</u>	<u>1.258.703</u>		
<u>Mata uang asing</u>					<u>Foreign currencies</u>
Garansi yang diterbitkan (Catatan 39)					Guarantees issued (Note 39)
Dolar Amerika Serikat	3.869.076	60.232	646.129	9.209	United States Dollar
Euro Eropa	56.784	942	96.565	1.556	European Euro
		61.174		10.765	
		<u>1.237.907</u>		<u>1.269.468</u>	
<u>Dalam Perhatian Khusus</u> <u>Rupiah</u>					<u>Special mention</u> <u>Rupiah</u>
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)		12.200	12.200		Unused loan facility (committed)
Total		<u>1.250.107</u>	<u>1.281.668</u>		Total

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk fasilitas kredit yang belum ditarik.

As of December 31, 2022 and 2021, there are no transaction with related parties for unused loan facility.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, garansi bank yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp426.438 dan Rp162.825 (Catatan 43).

As of December 31, 2022 and 2021, guarantees issued to related parties amounted to Rp426,438 and Rp162,825, respectively (Note 43).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Movements in the gross carrying amount are as follows:

		31 Desember/December 31, 2022					
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)							Unused loan facility (committed)
Saldo Awal		89.811	8.123	-	-	97.934	Beginning balance
Pengalihan ke:							Transfer to:
Stage 1		8.123	(8.123)	-	-	-	Stage 1
Stage 3		-	-	-	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan		97.934	-	-	-	97.934	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat		226	-	-	-	226	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli		-	-	-	-	-	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya		(18.032)	-	-	-	(18.032)	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan		(17.806)	-	-	-	(17.806)	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun		80.128	-	-	-	80.128^{**)}	Balance at end of year

^{*)} Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"
^{**)} Terdiri dari fasilitas kredit yang committed yang belum ditarik

^{*)} Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"
^{**)} Consist of committed unused loan facility

		31 Desember/December 31, 2021					
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)							Unused loan facility (committed)
Saldo Awal		36.591	42.765	-	-	79.356	Beginning balance
Pengalihan ke:							Transfer to:
Stage 1		23.096	(23.096)	-	-	-	Stage 1
Stage 3		-	(4.631)	4.631	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan		59.687	15.038	4.631	-	79.356	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat		38.024	(1.542)	(4.631)	-	31.851	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli		13.186	-	-	-	13.186	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya		(21.086)	(5.373)	-	-	(26.459)	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan		30.124	(6.915)	(4.631)	-	18.578	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun		89.811	8.123	-	-	97.934^{**)}	Balance at end of year

^{*)} Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"
^{**)} Terdiri dari fasilitas kredit yang committed yang belum ditarik

^{*)} Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"
^{**)} Consist of committed unused loan facility

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Movements in the gross carrying amount are as follows:

31 December/December 31, 2022						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Irrevocable L/C yang masih berjalan						Outstanding irrevocable L/Cs
Saldo Awal	280.604	-	-	-	280.604	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(75.440)	-	-	-	(75.440)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	683.151	-	-	-	638.151	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(666.830)	-	-	-	(666.830)	Derecognized financial assets
Total penambahan/(penurunan) periode berjalan	(59.119)	-	-	-	(59.119)	Total additional/(reversal) during the period
Saldo akhir periode	221.484	-	-	-	221.484	Balance at end of period

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2021						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Irrevocable L/C yang masih berjalan						Outstanding irrevocable L/Cs
Saldo Awal	35.440	-	-	-	35.440	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	353	-	-	-	353	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	293.726	-	-	-	293.726	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(48.915)	-	-	-	(48.915)	Derecognized financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	245.164	-	-	-	245.164	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	280.604	-	-	-	280.604	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

The movements in the estimated for impairment losses on commitments and contingencies are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31		
	2022	2021	
Rupiah			Rupiah
Saldo awal tahun	3.644	6.489	Balance at beginning of year
Penyisihan/(pemulihan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	1.075	(2.845)	Provision/ (reversal) for impairment losses during the year
Saldo akhir	4.719	3.644	Balance at end

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut (lanjutan):

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses on commitments and contingencies are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)						Unused loan facility (committed)
Saldo awal	1.640	1.640	-	-	3.280	Beginning balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	1.640	(1.640)	-	-	-	Stage 1
Stage 3	-	-	-	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	3.280	-	-	-	3.280	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	1.792	-	-	-	1.792	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(465)	-	-	-	(465)	Derecognized financial asset
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	1.327	-	-	-	1.327	Total Additional/(reversal)/during the year
Saldo akhir tahun	4.607	-	-	-	4.607	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2021

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)						Unused loan facility (committed)
Saldo awal	3.061	3.413	-	-	6.474	Beginning balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	1.911	(1.911)	-	-	-	Stage 1
Stage 3	-	(519)	519	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	4.972	983	519	-	6.474	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(2.517)	843	(519)	-	(2.193)	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	(157)	-	-	-	(157)	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(672)	(172)	-	-	(844)	Derecognized financial asset
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(3.346)	671	(519)	-	(2.845)	Total Additional/(reversal)/during the year
Saldo akhir tahun	1.626	1.654	-	-	3.280	Balance at end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Irrevocable L/C yang masih berjalan						Outstanding irrevocable L/Cs
Saldo Awal	364	-	-	-	364	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(83)	-	-	-	(83)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.395	-	-	-	1.395	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.564)	-	-	-	(1.564)	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) period berjalan	(252)	-	-	-	(252)	Total additional/(reversal) period the year
Saldo akhir periode	112	-	-	-	112	Balance at end of period

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2021					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Irrevocable L/C yang masih berjalan					
Saldo Awal	15	-	-	-	15
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	4	-	-	-	4
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	365	-	-	-	365
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(20)	-	-	-	(20)
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	349	-	-	-	349
Saldo akhir tahun	364	-	-	-	364

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Liabilitas imbalan kerja</u>		
Bonus dan tantiem	855.623	747.894
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 40b)	1.073.511	858.695
	1.929.134	1.606.589
<u>Liabilitas lain-lain</u>		
Dana jaminan pengembang (kewajiban pada pihak ketiga)	4.680.949	4.107.146
Liabilitas sewa	167.633	126.348
Lainnya	471.269	778.217
	5.319.851	5.011.711
Total	7.248.985	6.618.300

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

Dana jaminan pengembang merupakan setoran jaminan dari pengembang untuk menjamin penyelesaian kewajiban pengembang di Bank.

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses on commitments and contingencies are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2021	
	Total
Outstanding irrevocable L/Cs	
Beginning balance	15
Net remeasurement of carrying amount	4
New financial assets originated or purchased	365
Derecognized financial assets	(20)
Total additional/(reversal) during the year	349
Balance at end of year	364

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

Based on management's assessment, the amount of estimated losses on commitments and contingencies is adequate.

28. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Employee benefits liabilities</u>		
Bonuses and tantiem	855.623	747.894
Long term employee benefits (Note 40b)	1.073.511	858.695
	1.929.134	1.606.589
<u>Other liabilities</u>		
Developers' security deposits (liabilities to third party)	4.680.949	4.107.146
Lease liability	167.633	126.348
Others	471.269	778.217
	5.319.851	5.011.711
Total	7.248.985	6.618.300

Provision for bonus represents unpaid employees' bonus for the current year which has not yet been distributed at the end of the year.

Developer's security deposits represent security deposit from developer to ensure that the developer settle its obligation to the Bank.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN (lanjutan)

Bank telah mengidentifikasi dugaan pemalsuan bilyet deposito Bank dan dari hasil pemeriksaan Bank menunjukkan bahwa terdapat beberapa bilyet deposito Bank yang diduga dipalsukan oleh pihak lain di luar Bank sehingga tidak tercatat dalam sistem Bank. Bank telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dan saat ini sedang dalam proses penyidikan sehingga jumlah pasti atas potensi kerugian dari kasus tersebut belum dapat ditentukan. Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, Bank telah membentuk cadangan atas potensi kerugian operasional masing-masing per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp16.590 dan Rp71.590 juta.

28. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES (continued)

The Bank has identified an indication of forged transaction in the Bank's certificate of time deposits and based on the Bank's investigation, there were several Bank's certificate of time deposits forged by third party, therefore it is not recorded in the Bank's system. The Bank has reported this case to the authority and currently it is in the process of investigation, therefore the definite amount of potential loss from this case is still cannot be determined yet. In view of implementation of prudential banking principle, the Bank has provided allowance for potential operational losses as of December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp16,590 and Rp71,590 million, respectively.

Pengungkapan liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Disclosure of lease liabilities on December 31, 2022 and 2021 is as follows:

31 Desember/December 31, 2022

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Penambahan liabilitas sewa/ Additions of lease liabilities	Beban bunga atas liabilitas sewa/ Interest expense of lease liabilities	Pembayaran liabilitas sewa/ Payment of lease liabilities	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Bangunan	95.663	3.571	3.571	(51.960)	47.274	Building
Kendaraan	25.920	122.449	6.293	(29.643)	118.726	Motor vehicles
Mesin ATM	4.605	247	246	(3.342)	1.510	ATM machine
Pusat Data	-	-	-	-	-	Data center
Lainnya	160	1	1	(38)	123	Others
Total	126.348	126.268	10.111	(84.983)	167.633	Total

31 Desember/December 31, 2021

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan liabilitas sewa/ Additions of lease liabilities	Beban bunga atas liabilitas sewa/ Interest expense of lease liabilities	Pembayaran liabilitas sewa/ Payment of lease liabilities	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Bangunan	139.170	7.239	7.336	(50.746)	95.663	Building
Kendaraan	66.251	5.150	3.245	(45.481)	25.920	Motor vehicles
Mesin ATM	7.488	459	458	(3.342)	4.605	ATM machine
Pusat Data	337	4	4	(341)	-	Data center
Lainnya	205	4	4	(49)	160	Others
Total	213.451	12.856	11.047	(99.959)	126.348	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2022					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,00%	Series B Stock Government
Dewan Direksi					Board of Directors
Haru Koesmahargyo	304.600	500	152	0,00%	Haru Koesmahargyo
Nixon L.P Napitupulu	2.481.800	500	1.241	0,02%	Nixon L.P Napitupulu
Hirwandi Gafar	603.900	500	302	0,01%	Hirwandi Gafar
Elisabeth Novie Riswati	581.200	500	291	0,01%	Elisabeth Novie Riswati
Andi Nirwoto	648.300	500	324	0,01%	Andi Nirwoto
Eko Waluyo	686.300	500	343	0,01%	Eko Waluyo
Nofry Rony Poetra	1.034.600	500	517	0,01%	Nofry Rony Poetra
Jasmin	1.422.400	500	711	0,01%	Jasmin
Setiyo Wibowo	547.900	500	274	0,00%	Setiyo Wibowo
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.227.689.000	500	2.113.845	39,92%	Public (ownership less than 5% each)
Total	10.590.000.000		5.295.000	100,00%	Total

29. EQUITY

a. Capital Stock

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2021					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,00%	Series B Stock Government
Dewan Komisaris					Board of Commissioners:
Eko D. Heripoerwanto	116.900	500	58	0,00%	Eko D. Heripoerwanto
Heru Budi Hartono	108.500	500	54	0,00%	Heru Budi Hartono
Andin Hadiyanto	108.500	500	54	0,00%	Andin Hadiyanto
Dewan Direksi:					Board of Directors:
Nixon L.P Napitupulu	2.143.800	500	1.072	0,02%	Nixon L.P Napitupulu
Hirwandi Gafar	283.800	500	142	0,00%	Hirwandi Gafar
Elisabeth Novie Riswati	261.100	500	131	0,00%	Elisabeth Novie Riswati
Andi Nirwoto	328.200	500	164	0,01%	Andi Nirwoto
Eko Waluyo	533.200	500	267	0,01%	Eko Waluyo
Nofry Rony Poetra	884.600	500	442	0,01%	Nofry Rony Poetra
Jasmin	247.900	500	124	0,00%	Jasmin
Setiyo Wibowo	227.800	500	114	0,00%	Setiyo Wibowo
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.230.755.700	500	2.115.378	39,95%	Public (ownership less than 5% each)
Total	10.590.000.000		5.295.000	100,00%	Total

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

Series A Dwiwarna share is the share that gives the shareholder preferential rights to approve the appointment or dismissal of Commissioners and Directors, changes in Articles of Association, approve on Bank's merger, dissolution, acquisition and separation, submission of request for bankruptcy and liquidation of the Bank.

Series B shares are common shares that can be owned by the public.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah dalam rangka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen diberikan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham Perseroan.

Saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 8.311.000 lembar saham dan 5.244.300 lembar saham atau 0,08% dan 0,05% dari jumlah modal dasar.

b. Tambahan modal disetor

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2009	-
Tambahan Modal disetor akibat penawaran umum perdana tahun 2009	708.017
Biaya emisi penerbitan saham	(68.391)
	639.626
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 1 dan 2 Tahun 2011	94.733
	734.359
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 3 dan 4 Tahun 2012	5.219
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 1 dan 2 Tahun 2012	1.130
	740.708

29. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The shares ownership by board of commissioners and board of directors follows the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks, where members of the Directors and Board of Commissioners are given variable remuneration in the form of the Company's shares.

Shares held by the Board of Commissioners and Board of Directors for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to 8,311,000 shares and 5,244,300 shares or 0.08% and 0.04% of the total authorized capital, respectively.

b. Additional Paid In Capital

The movements in additional paid in capital are as follows:

Balance as January 1, 2009
Additional Paid in capital due to Initial Public Offering in 2009
Shares Issuance Cost
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP I in 2011
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP I in 2012
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP II in 2012

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. EKUITAS (lanjutan)

29. EQUITY (continued)

b. Tambahan modal disetor (lanjutan)

b. Additional paid-in capital (continued)

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in additional paid in capital are as follows: (continued)

Tambahan Modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas I pada tahun 2012

1.111.949

Additional paid in capital due to Right Issue I in 2012

Biaya emisi penerbitan saham

(59.154)

Shares Issuance Cost

1.793.503

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 5 dan 6 Tahun 2013

11.063

Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP I in 2013

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 3 dan 4 Tahun 2013

117.623

Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP II in 2013

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 1 dan 2 Tahun 2013

103.575

Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP III in 2013

2.025.764

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8 Tahun 2014

1.840

Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP I in 2014

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 5 dan 6 Tahun 2014

243

Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP II in 2014

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 3 dan 4 Tahun 2014

289

Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP III in 2014

2.028.136

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8 serta MESOP III tahap 5 dan 6 Tahun 2015

18.462

Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP II and phases 5 and 6 of MESOP III in 2015

2.046.598

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 7 Tahun 2016

7.856

Additional Paid in capital due to purchased stock option during phase 7 of MESOP III in 2016

2.054.454

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. EKUITAS (lanjutan)

c. Penggunaan Laba

Penggunaan Laba Tahun 2021

Alokasi penggunaan laba untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar Rp237.624
- b. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.138.602

Penggunaan Laba Tahun 2020

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah laba ditahan yang ditentukan penggunaannya Rp1.602.357.

d. Dana Setoran Modal

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 18 Oktober 2022, Para Pemegang Saham Bank Menyetujui Untuk Melakukan Penambahan Modal Melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada para pemegang saham Bank sejumlah 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham dengan nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) (lima ratus rupiah) per lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp1.200 (nilai penuh) (seribu dua ratus rupiah) per lembar saham.

Bank melakukan pembukuan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Bank BTN Tahun 2022 dengan setoran modal dari pemerintah sebesar Rp2.480.000 dan setoran modal dari publik sebesar Rp276.575.

Berdasarkan kajian legal yang telah dilakukan oleh Bank, dana penambahan modal melalui PMHMETD belum dapat diakui sebagai modal disetor dikarenakan belum terdapatnya akta perubahan anggaran dasar Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Namun, dana tersebut dapat dicatat sebagai dana setoran modal dalam komponen ekuitas mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2016 yang telah mengalami perubahan menjadi POJK nomor 27 tahun 2022 pada pasal 14.

29. EQUITY (continued)

c. Profit Distribution

Profit Distribution for Year 2021

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2021 are as follow:

- a. Dividends amounted to Rp237,624
- b. Appropriated retained earnings amounted to Rp2,138,602

Profit Distribution for Year 2020

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2020 are appropriated retained earnings amounted to Rp1,602,357.

d. Capital deposit fund

Based on extraordinary meeting of shareholder dated October 18, 2022, the shareholder of the Bank approved the additional capital through the Limited Public Offering II (PUT II) with pre-emptive rights to the Bank's shareholders at 4,600,000,000 (four billion six hundred million) common registered shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share with exercise price of Rp1,200 (full amount) per share.

The bank has recorded additional capital with pre-emptive rights (PMHMETD) for Bank BTN in 2022 with a capital deposit from government of Rp2,480,000 and paid up capital for the public Rp276,575.

Based on legal assessment that conducted by the bank, the additional capital cannot be acknowledged as paid in capital through PMHMETD since the deed of change until December 31, 2022 have not been issued yet. However, the capital can be recognized as capital deposit fund on equity component referring to Financial Services Authority Regulation number 11/POJK.03/2016 which has been changed to Financial Services Authority Regulation number 27 of the year 2022 in article 14.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

- a. Pendapatan Bunga
 Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2022	2021
Biaya perolehan diamortisasi		
Kredit yang diberikan	20.955.847	20.615.139
Giro pada Bank Indonesia	217.757	319.746
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	71.670	95.528
Giro pada bank lain	1.311	48.803
Tagihan lainnya	5.805	18.947
Efek dibeli dengan janji dijual kembali	86.602	301.532
Obligasi pemerintah	453.703	161.233
Efek-efek	56.439	65.416
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi pemerintah	236.476	130.362
Efek-efek	82.222	95.594
Derivatif	55.005	-
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi pemerintah	828.759	1.246.773
Efek-efek	181.604	314.784
Total	23.233.200	23.413.857

- b. Bagi hasil dan marjin unit syariah
 Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2022	2021
Pendapatan <i>murabahah</i>	1.657.741	1.532.569
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	322.992	295.518
Pendapatan <i>istishna</i>	278.899	230.328
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	25.771	27.275
Pendapatan usaha utama lainnya	388.765	295.411
Total	2.674.168	2.381.101

30. INTEREST INCOME AND INCOME FROM PROFIT SHARING

- a. Interest Income
 This account consists of:

Amortized cost
Loans
Current accounts with Bank Indonesia
Placements with Bank Indonesia and other banks
Current accounts with other banks
Others receivable
Securities purchased under agreement to resell
Government bonds
Securities
Fair value through profit or loss
Government bonds
Securities
Derivative
Fair value through other comprehensive income
Government bonds
Securities

- b. Profit sharing and margin from sharia unit
 This account consists of:

Income from <i>murabahah</i>
<i>Musyarakah</i> profit sharing income
Income from <i>istishna</i>
<i>Mudharabah</i> profit sharing income
Other main operating income

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

31. BEBAN BUNGA, BAGI HASIL DAN BONUS

31. INTEREST, PROFIT SHARING AND BONUS EXPENSES

a. Beban Bunga

a. Interest Expense

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31		
	2022	2021	
Deposito berjangka	5.204.910	6.223.750	Time deposits
Giro	1.343.080	1.166.421	Demand deposits
Pinjaman yang diterima	1.133.603	1.500.510	Fund borrowings
Surat-surat berharga yang diterbitkan	880.152	1.261.343	Securities issued
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	596.092	617.133	Subordinated loan and securities
Tabungan	563.151	848.311	Savings deposits
Kewajiban derivatif	102.692	42.968	Derivative liabilities
Simpanan dari bank lain	36.387	8.970	Deposits from other banks
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6.852	1.322	Securities sold under repurchase agreements
Total	9.866.919	11.670.728	Total

b. Bonus Simpanan Wadiah dan Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah

b. Wadiah Deposit Bonus and Third Parties' Share on Return of Mudharabah

Bonus simpanan wadiah:

Wadiah deposit bonus:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31		
	2022	2021	
Beban bonus simpanan wadiah:			Wadiah bonus expenses:
Giro wadiah	52.233	28.697	Wadiah demand deposit
Tabungan wadiah	5.325	3.478	Wadiah saving deposit
	57.558	32.175	

Hak bagi hasil mudharabah:

Mudharabah share on return:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31		
	2022	2021	
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah:			Third Parties' Share on Return of Mudharabah:
Deposito mudharabah	601.033	732.524	Mudharabah time deposit
Tabungan mudharabah	141.241	126.410	Mudharabah saving deposit
Pinjaman mudharabah	65.839	58.353	Mudharabah borrowing
Giro mudharabah	7.690	5.880	Mudharabah demand deposit
Total	815.803	923.167	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

32. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

32. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31		
	2022	2021	
Jasa perbankan <i>Servicing Fee</i> Sekuritisasi Aset	188.557	193.152	Bank services
Jasa penagihan - <i>payment points</i>	16.955	14.268	Securitization Assets Servicing Fee
Lainnya	529.894	144.535	Collection services - <i>payment points</i>
Total	822.775	463.507	Total Others

Jasa perbankan terdiri dari pendapatan dari transaksi transfer dana, pendapatan sewa *safe deposit box* dan pendapatan administrasi layanan ATM.

Bank services pertains to income from fund transfer transactions, safety deposit box rentals and ATM service charges.

Lainnya terutama terdiri dari provisi atas garansi bank yang diterbitkan, komisi yang diterima dari perusahaan asuransi atas produk asuransi yang terjual melalui Bank, pembalikan atas cadangan pajak dan hukum.

Others consist mainly of provision from bank guarantee issued, commission received from insurance companies for insurance products sold by the Bank to its borrowers, reversal of tax and law provision.

33. PENYISIHAN (PEMBALIKAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN NON- ASET KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

33. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31		
	2022	2021	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	4.039.507	3.584.310	Loans and sharia financing/receivables (Note 11)
Efek-efek (Catatan 8)	(19.259)	43.871	Securities (Note 8)
Properti terbengkalai	(2.432)	176	Abandoned Property
Giro pada bank lain (Catatan 6)	49	(110)	Current accounts with other banks (Note 6)
Tagihan Akseptasi (Catatan 13)	(487)	(770)	Acceptance Receivable (Note 13)
Total	4.017.378	3.627.477	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2022	2021
Perbaikan dan pemeliharaan	1.136.954	1.012.177
Promosi	469.580	340.301
Penyusutan (Catatan 14)	426.546	388.897
Sewa bukan PSAK No. 73	388.480	467.656
Listrik, air dan komunikasi	296.549	312.554
Jasa profesional	236.277	160.933
Beban kantor	229.233	184.219
Beban depresiasi aset hak guna (Catatan 14)	202.514	167.137
Transportasi	135.604	88.618
Outsourcing	54.833	52.857
Lainnya	177.458	183.497
Total	3.754.028	3.358.846

Lainnya terutama terdiri dari beban administrasi *branchless banking*, biaya operasional program pemerintah, premi asuransi untuk gedung, premi asuransi kas dalam perjalanan serta kas dalam khazanah dan beban operasional protokoler.

35. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2022	2021
Gaji dan upah		
Rutin	2.122.173	2.022.673
Tidak rutin	1.954.049	1.692.424
Pelatihan dan pengembangan	87.757	50.600
Lainnya	26.319	17.228
Total	4.190.298	3.782.925

Lainnya terdiri dari beban imbalan kerja, biaya perekrutan, pesangon dan tunjangan rekreasi karyawan.

34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2022	2021
Perbaikan dan pemeliharaan	1.136.954	1.012.177
Promosi	469.580	340.301
Penyusutan (Note 14)	426.546	388.897
Lease expense non SFAS No. 73	388.480	467.656
Electricity, water and telecommunications	296.549	312.554
Professional fees	236.277	160.933
Office expenses	229.233	184.219
Depreciation expense of right of use asset (Note 14)	202.514	167.137
Transportation	135.604	88.618
Outsourcing	54.833	52.857
Others	177.458	183.497
Total	3.754.028	3.358.846

Others consist mainly of *branchless banking administration expense*, government program operational expense, insurance premium on the building, insurance premium on in transit and cash in vault and protokoler operational expenses.

35. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2022	2021
Gaji dan upah		
Recurring	2.122.173	2.022.673
Non-recurring	1.954.049	1.692.424
Training and development	87.757	50.600
Others	26.319	17.228
Total	4.190.298	3.782.925

Others consists mainly of employee benefits expense, recruitment costs, severance costs and employee recreational costs.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

36. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2022	2021
Imbalan atas jasa penagihan	71.635	78.134
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	51.106	37.108
Cadangan litigasi risiko hukum	-	418.931
Lainnya	206.567	396.795
Total	329.308	930.968

Lainnya terutama terdiri dari beban representasi dan jamuan makan dan minum rapat, beban terkait dengan restrukturisasi struktur organisasi Bank dan cadangan atas risiko operasional lainnya.

37. PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2022	2021
Pendapatan sewa gedung	200	251
Pendapatan (beban) lainnya - neto	60.687	(43.763)
Total	60.887	(43.512)

Lainnya terutama terdiri dari beban denda administrasi, keuntungan/(kerugian) jual beli mata uang asing dan beban bina lingkungan.

36. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

This account consists of:

Fees for collection services
Loss on bad debt settlement
Provision for litigation legal risk
Others
Total

Others consist mainly of representation and entertainment expense, expense related to the restructuring of the Bank's organization structure and provision for other operational risk.

37. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET

This account consists of:

Building rental income equipment
Other income (expense) - net
Total

Others consist mainly of administration penalty expense, gain/(loss) on trading of foreign currency and community development expense.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

38. PERPAJAKAN

- a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31	
	2022	2021
Laba sebelum beban pajak	3.875.690	2.993.320
Beda temporer:		
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan dan lainnya	928.143	782.816
Penyisihan untuk imbalan kerja	274.687	62.508
Penurunan (kenaikan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(206.021)	236.951
Penyusutan Aset Hak Guna	(3.753)	(45.995)
	<u>993.056</u>	<u>1.036.280</u>
Beda tetap:		
Kenikmatan karyawan	136.692	125.969
Beban kantor	84.703	2.220
Sewa	14.401	7.796
Sumbangan	62.204	9.696
Perbaikan dan pemeliharaan	6.061	5.621
Dana sosial dan representasi	113.258	50.990
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	3.031	1.690
Perubahan nilai EBA yang tidak dapat diakui secara pajak	60.514	131.022
Lain-lain	15.316	1.074
Pendapatan sewa tarif final	(200)	(251)
	<u>495.980</u>	<u>335.827</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>5.364.726</u>	<u>4.365.427</u>
Beban pajak penghasilan Pajak penghasilan Pasal 25	1.019.298 (671.524)	829.431 (499.631)
Hutang pajak penghasilan badan (Catatan 17)	<u>347.774</u>	<u>329.800</u>

38. TAXATION

- a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Income before tax expense
Temporary differences:
Provision for allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets and others
Provision for employee benefits
Decrease (increase) in fair value of trading securities
Depreciation of Right of Use Asset
Permanent differences:
Employee welfare
Office expense
Rent
Donations
Repairs and maintenance
Social funds and representation
Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes
Changes in EBA fair value which are non-recognizable for tax purposes
Others
Rent income subject to final tax
Estimated taxable income
Income tax expense
Income tax - Article 25
Corporate income tax payable (Note 17)

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

- a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jendral Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2022 dan 2021 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Beban/(manfaat) pajak

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Beban pajak - kini	1.019.298	829.431
Beban/(manfaat) pajak - tangguhan	(188.681)	(212.338)
Total	830.617	617.093

- c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to statement of profit or loss and other income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	2.116.831	241.474	-	2.358.305	Allowance for impairment losses loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - selain kredit yang diberikan	15.120	(3.540)	-	11.580	Allowance for impairment losses on financial assets - other than loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	845	(462)	-	383	Allowance for impairment losses on non non-financial assets
Cadangan hukum, kecurangan (fraud) dan lainnya	94.716	(61.125)	-	33.591	Allowance for legal, fraud and others
Cadangan imbalan kerja	163.152	52.191	(11.376)	203.967	Allowance for employee benefits
Penyusutan aset hak guna (Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	20.415	(713)	-	19.702	Depreciation of right of use asset
Rugi yang belum direalisasi atas lindung nilai arus kas (Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	28.684	(39.144)	-	(10.460)	Unrealized (gain) loss on fair value through profit or loss
	-	-	11.565	11.565	Unrealized loss on cash flow hedges
	(9.103)	-	295.898	286.795	Unrealized (gain) loss on fair value through other comprehensive income
Aset pajak tangguhan - neto	2.430.660	188.681	296.087	2.915.428	Deferred tax assets - net

38. TAXATION (continued)

- a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows: (continued)

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Bank calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due. The taxable profit resulting from the reconciliation in 2022 and 2021 is the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the tax authorities in accordance with applicable regulations.

- b. Tax Expense/(benefit)

Current tax expense	829.431
Deferred tax expense/(benefit)	(212.338)
Total	617.093

- c. Deferred tax assets (liabilities)

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember/December 2021

	Saldo awal/ Beginning balance	Dampak Perubahan tarif pajak yang ditangguhkan ke laporan laba rugi/ Effect of changes in tax rate - deferred to statement of profit or loss and other income	Dampak Perubahan tarif pajak yang ditangguhkan ke ekuitas/ Effect of changes in tax rate - deferred to equity	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statement of profit or loss and other income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	2.046.339	14.287	-	56.205	-	2.116.831	Allowance for impairment losses loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain kredit yang diberikan	3.830	(1.609)	-	12.899	-	15.120	Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif	811	-	-	34	-	845	Allowance for impairment losses on non earning assets
Cadangan hukum, kecurangan (fraud) dan lainnya	15.119	-	-	79.597	-	94.716	Allowance for legal, fraud and others
Cadangan imbalan kerja	149.993	2.767	12.818	11.876	(14.302)	163.152	Allowance for employee benefits
Penyusutan aset hak guna (Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan	29.154	-	-	(8.739)	-	20.415	Depreciation of right of use asset
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada Nilai Wajar melalui penghasilan komprehensif	(16.336)	-	-	45.020	-	28.684	Unrealized (gain) loss on trading securities
	(256.517)	-	-	-	247.414	(9.103)	Unrealized (gain) loss on fair value through income securities
Aset pajak tangguhan - neto	1.972.393	15.445	12.818	196.892	233.112	2.430.660	Deferred tax assets - net

d. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

d. The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2022 and, 2021, are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Laba sebelum beban pajak	3.875.690	2.993.320	Income before tax expense
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	(736.381)	(568.731)	Tax expense at the applicable tax rate
Beda tetap	(94.236)	(63.808)	Permanent differences
Dampak penyesuaian tarif pajak	-	15.446	Effect of tax rate adjustments
Beban pajak	(830.617)	(617.093)	Tax expense

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan

e. Uang Muka Pajak

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>
Tahun Pajak 2012	-	48.683
Tahun Pajak 2013	-	156.774
Tahun Pajak 2014	-	196.971
Saldo akhir tahun (Catatan 16)	-	402.428

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 25%.

Namun demikian, berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tersebut, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 tahun 2015 tertanggal 3 Agustus 2015 dan terakhir digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tertanggal 10 Juni 2021 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tertanggal 18 Juni 2021 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" mengatur bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang ada, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

38. TAXATION (continued)

Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax

e. Prepaid Tax

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
	48.683	Fiscal Year 2012
	156.774	Fiscal Year 2013
	196.971	Fiscal Year 2014
Balance at end of year (Note 16)	402.428	

Under article paragraph 17 (2) of Law No. 7 year 1983 regarding "Income Tax" which was revised for the fourth time by Law No. 36 year 2008, the corporate tax rate is 25%.

In addition, based on the above Law No. 36 year 2008 dated September 23, 2008, the Government Regulation No. 81 year 2007 dated December 28, 2007, which subsequently has been revoked and replaced by Government Regulation (GR) No. 77 Year 2013 dated November 21, 2013 and replaced by Government Regulation (GR) No. 56 Year 2015 dated August 3, 2015 and latest amendment by Government Regulation (GR) No 29 Year 2021 dated June 10, 2021 "Income Tax Facilities in relation to handling *Corona Virus Disease* (Covid-19) and Government Regulation (GR) No 30 Year 2021 dated June 18, 2021 on "Reduction of the Income Tax Rate on Resident Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies" and the Ministry of Finance Regulation No. 238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 on "The Guidelines on the Implementation and Supervision on the Rate Reduction for Domestic Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies" stipulates that resident public companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate at 5% lower than the highest existing income tax rate, provided they meet the prescribed criteria, public companies whose shares are owned by the public at a minimum of 40% or more of the total paid-up shares are traded in the Indonesia Stock Exchange and such shares are owned by at least 300 (three hundred) parties and each party owning only less than 5% of the total paid-up shares. These requirements should be fulfilled by the public companies for a minimum period of 183 (one hundred and eighty three) days in 1 (one) fiscal year.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

**Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2021, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2021 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2021. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku 1 Januari 2022 maka tarif pajak kembali ke tarif pajak tunggal yaitu 22%.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2023-0038 tanggal 3 Januari 2023 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 3 Januari 2023 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2022-0027 tanggal 3 Januari 2022 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 3 Januari 2022, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah terpenuhi.

Pajak penghasilan badan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 19%.

38. TAXATION (continued)

**Reduction of the Tax Rate of Corporate Income
Tax (continued)**

On 31 March 2021, the Government issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 of 2021 which has become Law (UU) No. 2 of 2021, as well as stipulated Government Regulation (PP) No. 30 of 2021 concerning Tariff Reduction for Domestic Public Companies Taxpayers and effective since 19 June 2021. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for Fiscal Year 2021 and 2022 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

Based Law No. 7 of 2022 regarding Harmonisation of the Tax Regulation which applies on January 1st, 2022 therefore the tax rate is a single rate of 22%.

Based on Letter No. DE/I/2023-0038 dated January 3, 2023 and the monthly report of shares ownerships (form No. X.H.I-2 dated January 3, 2023 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2022), all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2022 were fulfilled by the Bank.

Based on Letter No. DE/I/2022-0027 dated January 3rd, 2022 and the monthly report of shares ownerships (form No. X.H.I-2 dated January 3rd, 2022 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2021), all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2021 were fulfilled by the Bank.

Bank's corporate income tax for the year ended December 31, 2022 and, 2021 are calculated using the tax rate of 19%.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012

Pada tanggal 30 September 2014, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 mengenai kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2012 atas Kantor Cabang Pekanbaru. Atas SPHP tersebut, pada tanggal 10 November 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)	
Tahun 2012			Year 2012
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00095/240/12/218/14	191	92	SKPKB Article 4 (2) No.00095/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00096/240/12/218/14	191	92	SKPKB Article 4 (2) No.00096/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00097/240/12/218/14	190	91	SKPKB Article 4 (2) No.00097/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00098/240/12/218/14	168	81	SKPKB Article 4 (2) No.00098/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00099/240/12/218/14	214	103	SKPKB Article 4 (2) No.00099/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00100/240/12/218/14	196	94	SKPKB Article 4 (2) No.00100/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00101/240/12/218/14	207	99	SKPKB Article 4 (2) No.00101/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00102/240/12/218/14	245	118	SKPKB Article 4 (2) No.00102/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00103/240/12/218/14	238	114	SKPKB Article 4 (2) No.00103/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00104/240/12/218/14	229	110	SKPKB Article 4 (2) No.00104/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00105/240/12/218/14	250	120	SKPKB Article 4 (2) No.00105/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00106/240/12/218/14	305	146	SKPKB Article 4 (2) No.00106/240/12/218/14
Total	2.624	1.260	Total

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut yaitu sebesar Rp3.884. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 16).

On December 8, 2014, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) amounting to Rp3,884. The payment is recorded as other assets (Note 16).

Pada tanggal 20 Januari 2015, Bank mengajukan surat keberatan atas seluruh SKPKB tersebut di atas. Pada tanggal 14 Januari 2016, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak seluruh permohonan keberatan Bank. Pada tanggal 2 April 2016 Bank mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 19 Oktober 2017 Pengadilan Pajak telah menerbitkan surat keputusan yang memenangkan Wajib Pajak dan memerintahkan kantor pajak untuk membayar kembali uang muka pajak tersebut.

On January 20, 2015, the Bank filed letters of tax objection on all of the aforementioned underpayment TAL. On January 14, 2016, the Tax Office has issued Objection Decision Letters which has rejected all of the Bank's objections. On April 2, 2016, the Bank filed the appeal letters to the Tax Court on all of the aforementioned objection decision letters. On October 19, 2017, Tax Court has issued an appeal decision in favour of the Bank's Tax Appeal and order tax office to refund the prepaid tax.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012 (lanjutan)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-03/PJ.0401/2017 tanggal 22 Mei 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2012, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2012 sebesar Rp59.307 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)
Tahun 2012	
SKPKB PPh Badan No.00003/206/12/093/17	40.073

Selain itu, Bank juga telah menerima SKPKB PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp4.834 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 21 Agustus 2017.

Namun demikian Bank tidak setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp48.683 dan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak tanggal 10 Oktober 2017 yang diterima oleh DJP pada tanggal 12 Oktober 2017. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 16).

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 25 September 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2018. Pada tanggal 15 September 2022 Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Banding yang menerima seluruh permohonan banding Bank melalui Putusan Banding No. PUT-010930.15/2018/PP/MXVIIIIB Tahun 2022.

38. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2012 (continued)

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-03/PJ.0401/2017 dated May 22, 2017, regarding tax audit result for the year of 2012, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax for the year of 2012 amounting to Rp59,307 as follows:

	Denda/ Penalty (Rp)		Year 2012
	19.234	SKPKB Article Corporate Income Tax No.00003/206/12/093/17	

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 23, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp4,834 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on August 21, 2017.

However, the Bank does not agree with the SKPKB of the Corporate Income Tax amounting to Rp48,683 and has submitted the objection letter dated October 10, 2017 which has been received by the Tax Office on October 12, 2017. This payment is recorded as other assets (Note 16).

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected all of the Bank's objection request, on September 25, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated December 14, 2018 to the Tax Court and the Tax Court has issued a decision which has granted all Banks' appeal through an Appeal Decision No. PUT-010930.15/2018 PP/MXVIIIIB Tahun 2022 on September 15, 2022.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 tanggal 21 September 2016 mengenai hasil pemeriksaan terhadap Kantor Cabang Semarang untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2013		
SKPKB PPh Pasal 21 No.00001/243/13/511/16	64	30
SKPKB PPh Pasal 23 No.00060/203/13/511/16	0,2	0,1
Total	64,2	30,1
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00012/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00013/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00014/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00015/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00016/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00017/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00018/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00019/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00020/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00021/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00022/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00023/240/13/511/16	381	183
Total	4.572	2.196

Pada tanggal 17 November 2016, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yaitu sebesar Rp94 telah dicatat sebagai biaya pajak di tahun 2016 karena bank setuju atas SKPKB tersebut. Sedangkan pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar Rp6.768 dicatat sebagai uang muka pajak (Catatan 16) karena Bank tidak setuju dengan SKPKB tersebut. Pada tanggal 6 Januari 2017, Bank mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas.

38. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2013

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 dated September 21, 2016, regarding tax audit result on the Semarang Branch Office for the year of 2013, Bank has received Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) as follows:

	Year 2013
SKPKB Article 21 No.00001/243/13/511/16	30
SKPKB Article 23 No.00060/203/13/511/16	0,1
Total	30,1
SKPKB Article 4 (2) No.00012/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00013/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00014/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00015/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00016/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00017/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00018/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00019/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00020/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00021/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00022/240/13/511/16	183
SKPKB Article 4 (2) No.00023/240/13/511/16	183
Total	2.196

On November 17, 2016, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letters (TAL) of Tax Underpayment (SKPKB). The payment of the TAL of Article 21 and Article 23 amounted to Rp94 has been charged as tax expenses in 2016 since the Bank has agreed with the said SKPKB. However, in regard to the payment of the SKPKB of Article 4 paragraph (2) amounting to Rp6,768 has been recognized as prepaid tax (Note 16) since Bank did not agree with the SKPKB. On January 6, 2017, the Bank filed letters of tax objection on the aforementioned TAL of Article 4 paragraph (2).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013 (lanjutan)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menerima sebagian dari permohonan Bank. Berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp57 yang telah dicatat sebagai pengurang uang muka pajak (catatan 16). Atas pajak yang masih belum diterima, kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Januari 2018.

Pada tanggal 2 Mei 2019, Pengadilan pajak telah menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan sebagian dari Banding oleh Bank. Pengembalian pajak tersebut telah diterima pada tanggal 20 Juni 2019 dan 28 Oktober 2019.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-00011/WPJ.19/KP.040/RIKSIS/2017 tanggal 19 Juli 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2013 sebesar Rp183.958 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)	Year 2013
Tahun 2013			SKPKB Article Corporate Income Tax
SKPKB PPh Badan			No.00006/206/13/093/17
No.00006/206/13/093/17	124.296	59.662	

Selain itu, Bank juga telah menerima SKPKB PPh Pasal 21, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp9.945 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 4 September 2017.

Namun demikian Bank tidak sepenuhnya setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp156.773 dan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui surat tanggal 26 Oktober 2017. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 16).

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 18 September 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2018. Pada tanggal 15 September 2022 Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Banding yang menerima seluruh permohonan banding Bank melalui Putusan Banding PUT-010931.15/2018/PP/MXVIII B Tahun 2022.

38. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2013 (continued)

On October 16, 2017, the Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has partially granted the Bank's objection request. Based on the said Objection Decision Letter the Tax Office has paid the tax overpayment amounting to Rp57 which was booked as a deduction to the prepaid taxes (Note 16). Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated January 12, 2018 to the Tax Court for the remaining ungranted amounts.

On May 2, 2019 The Tax Court has issued a decision letter which has partially granted the Bank's appeal. The refund has been received on June 20, 2019 and October 28, 2019.

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-00011/WPJ.19/KP.040/RIKSIS/2017 dated July 19, 2017, regarding tax audit result for the year of 2013, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax for the year of 2013 amounting to Rp183,958 as follows:

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp9,945 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on September 4, 2017.

However, the Bank did not fully agree with the SKPKB of the Corporate Income Tax amounting to Rp156,773 and has submitted the objection letter dated October 26, 2017. The payment is recorded as other assets (Note 16).

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected the Bank's objection request, on September 18, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated December 14, 2018 to the Tax Court. The Tax Court has issued a decision which has granted all Banks' appeal through an Appeal Decision No. PUT010931.15/2018/PP/MXVIII B Tahun 2022 on September 15, 2022.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2014

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-00016/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal 5 Desember 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2014 sebesar Rp206.337 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)
Tahun 2014	
SKPKB PPh Badan No.00008/206/14/093/17	139.417

Selain itu, Bank juga telah menerima SKPKB PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp 13.530 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 28 Desember 2017.

Namun demikian Bank tidak sepenuhnya setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp196.971 dan akan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 9 Maret 2018.

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 2 November 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Januari 2019. Pada tanggal 15 September 2022 Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Banding yang menerima seluruh permohonan banding Bank melalui Putusan Banding PUT-000840.15/2019/PP/M.XVIII B Tahun 2022.

Pada tanggal 7 Januari 2022, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atas PPh Badan sebesar Rp48.683 untuk tahun pajak 2012 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00072.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 pada tanggal 14 Oktober 2021 dan sebesar Rp156.774 juta untuk tahun pajak 2013 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00071.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 tanggal 13 Oktober 2021 kepada Bank. Pada tanggal 11 Maret 2022, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Bank atas PPh Badan, dengan nilai netto sebesar Rp196.740 untuk tahun pajak 2014 setelah dikompensasi atas pajak terhutang sebesar Rp231 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00070.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

38. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2014

Based on Notification of Tax Audit Findings No. SPHP-00016/WPJ.19/KP.04/2017 dated December 5, 2017, regarding tax audit result for the year of 2014, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax amounting to Rp206,337 for the year of 2014 as follows:

	Denda/ Penalty (Rp)	Year 2014
		SKPKB Article Corporate Income Tax No.00008/206/14/093/17
	66.920	

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 23, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp13,530 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on December 28, 2017.

However, the Bank did not fully agree with the SKPKB of Corporate Income Tax amounting to Rp196,971 and submitted the objection letter to the Tax Office dated March 9, 2018.

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected the Bank's objection request, on November 2, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated January 31, 2019 to the Tax Court. The Tax Court has issued a decision which has granted all Banks' appeal through an Appeal Decision No. PUT-000840.15/2019/PP/M.XVIII B Tahun 2022 on September 15th, 2022.

On January 7, 2022, the Tax Office has returned the overpayment of tax on Corporate Income Tax amounting to Rp48,683 for fiscal years 2012 in accordance with the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-00072.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 on October 14, 2021 and amounting to Rp156.774 for fiscal years 2013 in accordance with the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-00071.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 dated October 13, 2021 to the Bank. On March 11, 2022, the Tax Office has returned the overpayment of tax to the Bank for Corporate Income Tax, with net value of Rp196.74 for fiscal year 2014 after being compensated for tax payable amounting to Rp231 in accordance with KEP/00070.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 dated October 13, 2021.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak atas penilaian kembali aset tetap

Bank berdasarkan surat No.1195/S/DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP WP Besar "Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan tahun 2016 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aset tetap".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015, permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, akan mendapatkan perlakuan khusus berupa pajak penghasilan yang bersifat final menjadi sebesar 3%. Sehubungan dengan estimasi atas kenaikan nilai wajar tanah, Bank telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp40.035 pada tanggal 10 Desember 2015.

Kemudian berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Bank telah menyampaikan surat No.473/S/DIR/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal tambahan dokumen terkait proses penilaian kembali aset tetap dimana pada tanggal 20 Mei 2016, Bank telah melunasi sisa pembayaran pajak sebesar Rp35.713. Kemudian Kantor Pajak telah menerbitkan surat Keputusan DJP No.KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016 mengenai persetujuan atas permohonan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh Bank.

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
KOMITMEN		
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	15.109.981	18.178.393
Irrevocable L/C yang masih berjalan (Catatan 27)	221.484	280.604
Komitmen - neto	15.331.465	18.458.997
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6.855.269	3.637.301
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 27)	(948.495)	(903.130)
Kontinjensi - neto	5.906.774	2.734.171

38. TAXATION (continued)

Tax for revaluation of fixed assets

The Bank based on the letter No. 1195/S/DIR/XII/2015 dated December 8, 2015 have submitted an application regarding "Revaluation of fixed assets for tax purposes on 2016 by tax payer that have not revalued fixed assets".

Based on the regulation No.191/PMK.010/2015 on October 15, 2015, from the Ministry of Finance, applications that are submitted up to December 31, 2015 will receive special treatment in the form of final tax rate of 3%. In connection with the estimated increase in fair value of land, the Bank has made tax payment amounting to Rp40,035 on December 10, 2015.

Based on the revaluation report issued by Public Appraisal Company, the Bank has reported a letter No.473/S/DIR/V/2016 dated May 23, 2016 regarding additional data for assets revaluation, in which on May 20, 2016, the Bank has paid the remaining tax of Rp35,713. Furthermore, the Tax Office has issued a Decision Letter No.KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016 that has granted the Bank's request for assets revaluation.

39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The outstanding commitments and contingencies as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

COMMITMENTS
Commitments payable
Unused loan facility commitments
Outstanding irrevocable L/Cs (Note 27)
Commitments - net
CONTINGENCIES
Contingent receivables
Interest income on non-performing assets
Contingent payables
Guarantees issued (Note 27)
Contingencies - net

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. IMBALAN KERJA

Program pensiun imbalan pasti

Program dana Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

Sesuai dengan ketentuan Dana Pensiun, Program Pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBTN merupakan kontribusi Bank.

Program pensiun iuran pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2004, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program pensiun imbalan pasti (DPBTN), namun demikian, karyawan Bank diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang berlaku efektif sejak bulan Januari 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp35.782 dan Rp23.919 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa penghargaan masa kerja dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu 1 (satu) tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal (usia 56 tahun).

Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah Masa Pegawai Tetap dibebastugaskan karena telah mendekati usia pensiun normal. Pada ketentuan sebelumnya (Surat Edaran Direksi Nomor 62/SE/DIR/HCS/2019) dijelaskan bahwa Pegawai Tetap yang telah memasuki usia 55 tahun maka akan melaksanakan MPP dengan Hak upah berupa Gaji Pokok Pegawai bulan terakhir hingga Pegawai ybs memasuki usia pensiun (56 tahun), apabila dipandang perlu karena keahlian/pengalaman Pegawai Tetap yang bersangkutan masih diperlukan, Direksi dapat menangguhkan/menghapuskan MPP yang bersangkutan dan selama dipekerjakan yang bersangkutan tetap diberikan penghasilan seperti halnya pada waktu Pegawai Tetap tersebut masih aktif (sebelum MPP).

40. EMPLOYEE BENEFITS

Defined benefit pension plan

The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

According to the Pension Fund regulation, the pension plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and any remaining amount required to fund DPBTN represents the contributions by the Bank.

Defined contribution plan

Effective January 1, 2004, all newly appointed permanent employees are not included in the defined benefit pension plan (DPBTN), instead, the Bank's employees are included in the defined contribution pension plan which was effective since January 2004. This defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp35,782 and Rp23,919 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

Other long-term employee benefits

The Bank provides employee benefits in the form of allowance for gratuity for services and retirement preparation period (MPP), which is within 1 (one) year before the normal pension age (56 years old).

Retirement Preparation Period (MPP) is the period when permanent employees are dismissed because they are approaching normal retirement age. In the previous provisions (Circular Letter of the Board of Directors Number 62/SE/DIR/HCS/2019) it is explained that Permanent Employees who have entered the age of 55 will carry out MPP with Wage Rights in the form of the last month's Basic Employee Salary until the Employee concerned enters retirement age (56 years), if it is deemed necessary because the expertise/experience of the Permanent Employee concerned is still needed, the Board of Directors can suspend/remove the MPP concerned and while employed the person concerned is still given income as was the case when the Permanent Employee was still active (before MPP).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Terdapat perubahan ketentuan pelaksanaan MPP sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank BTN tahun 2022 pasal 69 ayat 1 dimana Pegawai yang memasuki usia MPP (55 tahun) maka akan tetap bekerja hingga usia pensiun (56 tahun) dan apabila Pegawai ingin menjalani MPP maka dapat mengajukan permohonan kepada Perusahaan. Perubahan ketentuan pelaksanaan MPP tersebut juga telah disosialisasikan kepada seluruh Pegawai Bank berdasarkan memo nomor 244/M/HCSD/HCSP/IX/2022 dan nomor 370/M/HCMD/ER/IX/2022 perihal Pemberitahuan Perubahan Ketentuan Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Karyawan Bank juga memperoleh manfaat dari pemberian program kesejahteraan, kontribusi karyawan terhadap dana kesejahteraan sebesar 0,00% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank sebesar 3,50%. Aset program diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah berdasarkan laporan aktuaris tanggal 13 Februari 2023 dan 31 Januari 2022 dari aktuaris Kantor Konsultan Aktuarial Santhi Devi dan Ardianto Handoyo dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Other long-term employee benefits

There are changes to the provisions for implementing MPP as stipulated in the Bank BTN Collective Labor Agreement (PKB) in 2022 article 69 paragraph 1 where Employees who enter MPP age (55 years) will continue to work until retirement age (56 years) and if Employees wish to undergo MPP then may apply to the Company. The changes to the MPP implementation provisions have also been socialized to all Bank employees based on memos number 244/M/HCSD/HCSP/IX/2022 and number 370/M/HCMD/ER/IX/2022 regarding Notification of Changes in Retirement Preparation Period (MPP).

Bank employees are also given welfare program, employees' contributions are 0.00% of their net wages for welfare program benefits and the Bank contributions are 3.50%. The plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The actuarial valuation of employee benefits as of December 31, 2022 and 2021, are based on the actuarial reports dated February 13, 2023 and January 31, 2022, of Kantor Konsultan Aktuarial Santhi Devi dan Ardianto Handoyo respectively, using the "Projected Unit Credit" method.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Asumsi ekonomi:			Economics assumptions:
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	6,00%	6,00%	Basic pensionable annual salary increase rate
Tingkat diskonto per tahun sebelum usia pensiun normal	7,00%	7,00%	Annual discount rate before normal retirement age
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat mortalita (kematian)	TMI-2019	TMI-2019	Mortality rate
Tingkat cacat	1,00% mortalita/ mortality	1,00% mortalita/ mortality	Disability rate
Asumsi lainnya (lanjutan):			Other assumptions (continued):
Tingkat Diskonto per tahun untuk:			Annual Discount rate:
Imbalan Jangka Panjang Lainnya - Penghargaan Masa Kerja Program Pesangon Pensiun - Selisih DPLK	7,00%	6,50%	Other long-term benefits Gratuity
Masa Persiapan Pensiun	7,00%	6,50%	Retirement severance program Difference from DPLK
Program Pensiun Imbalan Pasti	7,25%	7,00%	Retirement Preparation Period
Program Kesejahteraan	7,00%	7,00%	Deferred Benefit Pension Plan Welfare Program
Tingkat pengunduran diri			Turnover rate
Umur 25	5,00%	5,00%	Age 25
Umur 30	5,00%	5,00%	Age 30
Umur 35	5,00%	5,00%	Age 35
Umur 40	5,00%	5,00%	Age 40
Umur 45	5,00%	5,00%	Age 45
Umur 50	3,00%	3,00%	Age 50
Umur 55	9,00%	9,00%	Age 55
Penghargaan masa kerja, program pesangon pensiun-selisih DPLK, masa persiapan pensiun dan program kesejahteraan dicantumkan dalam program lainnya.			Gratuity for services, retirement severance program-difference from DPLK, retirement preparation period and welfare program are included in other benefits.

a. Biaya imbalan kerja

a. Employee benefits expense

	31 Desember/December 31, 2022			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini luran peserta	35.276	106.523	141.799	Current service cost
Beban bunga neto	(7.050)	(7.153)	(14.203)	Contribution from participant
Kerugian aktuarial	5.394	46.104	51.498	Net interest cost
Biaya jasa lalu	-	76.053	76.053	Actuarial loss
Perubahan metode atribusi	11.460	256.180	267.640	Past service cost
	-	(68.659)	(68.659)	Change in benefit attribution method
Beban imbalan kerja - neto	45.080	409.048	454.128	Employee benefits expense - net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a. Biaya imbalan kerja (lanjutan)

a. Employee benefits expense (continued)

31 Desember/December 31, 2021

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini	37.714	141.817	179.531	Current service cost
Iuran peserta	(7.056)	(7.240)	(14.296)	Contribution from participant
Beban bunga neto	8.681	35.455	44.136	Net interest cost
Kerugian aktuarial	-	73.066	73.066	Actuarial loss
Biaya jasa lalu	15.352	-	15.352	Past service cost
Beban imbalan kerja - neto	54.691	243.098	297.789	Employee benefits expense - net

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja

b. Movements of liabilities for employee benefits

31 Desember/December 31, 2022

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	148.266	710.429	858.695	Beginning balance
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	45.080	409.048	454.128	Employee benefits expense during the year - net
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(49.512)	(10.360)	(59.872)	Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran iuran tahun berjalan	(36.620)	(142.820)	(179.440)	Payment contribution from current year
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 28)	107.214	966.297	1.073.511	Balance liabilities at end of year (Note 28)

31 Desember/December 31, 2021

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	182.662	688.801	871.463	Beginning balance
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	54.691	243.098	297.789	Employee benefits expense during the year - net
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(52.439)	(22.836)	(75.275)	Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Pembayaran iuran tahun berjalan	(36.648)	(198.634)	(235.282)	Payment contribution from current year
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 28)	148.266	710.429	858.695	Balance liabilities at end of year (Note 28)

c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows:

31 Desember/December 31, 2022

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	2.186.761	1.633.262	3.820.023	Beginning balance
Biaya jasa kini	35.276	106.523	141.799	Current service cost
Beban bunga	152.585	110.738	263.323	Interest cost
Biaya jasa lalu	11.460	256.180	267.640	Past service cost
Manfaat yang dibayarkan	(140.158)	(208.970)	(349.128)	Benefits paid
Perubahan metode atribusi	-	(68.660)	(68.660)	Change in benefit attribution method
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(19.871)	101.283	81.412	Actuarial loss/(gain)
Saldo pada akhir tahun	2.226.053	1.930.356	4.156.409	Balance at end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- c. The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2021

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	2.193.818	1.667.846	3.861.664	Beginning balance
Biaya jasa kini	37.714	141.817	179.531	Current service cost
Beban bunga	144.765	99.474	244.239	Interest cost
Biaya jasa lalu	15.352	-	15.352	Past service cost
Manfaat yang dibayarkan Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(134.231)	(248.692)	(382.923)	Benefits paid
	(70.657)	(27.183)	(97.840)	Actuarial loss/(gain)
Saldo pada akhir tahun	2.186.761	1.633.262	3.820.023	Balance at end of year

- d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

- d. The movements in the fair value of plan assets are as follows: (unaudited)

31 Desember/December 31, 2022

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	2.038.499	995.996	3.034.495	Beginning balance
Hasil pengembangan aset program	176.833	93.752	270.585	Return on plan asset
Kontribusi Bank	36.620	29.036	65.656	Contributions by the Bank
Kontribusi pegawai	7.050	7.153	14.203	Employees contribution
Manfaat yang dibayarkan	(140.158)	(95.201)	(235.359)	Benefits paid
Saldo pada akhir tahun	2.118.844	1.030.736	3.149.580	Balance at end of year

31 Desember/December 31, 2021

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	2.001.160	979.041	2.990.201	Beginning balance
Hasil pengembangan aset program	117.866	59.773	177.639	Return on plan asset
Kontribusi Bank	36.648	35.345	71.993	Contributions by the Bank
Kontribusi pegawai	7.056	7.240	14.296	Employees contribution
Manfaat yang dibayarkan	(134.231)	(85.403)	(219.634)	Benefits paid
Saldo pada akhir tahun	2.038.499	995.996	3.034.495	Balance at end of year

- e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

- e. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities:

31 Desember/December 31, 2022

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	195.072	370.549	565.621	Beginning balance
Kerugian aktuarial	(19.871)	25.229	5.360	Actuary loss
Imbal hasil atas aset program	(29.642)	(21.199)	(50.841)	Return on plan assets
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	-	(14.391)	(14.391)	Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Saldo pada akhir tahun	145.559	360.188	505.749	Balance at the end of year

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto: (lanjutan)

- e. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities: (continued)

31 Desember/December 31, 2021

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	247.511	393.385	640.896	Beginning balance
Kerugian aktuaris	(70.657)	(100.249)	(170.906)	Actuary loss
Imbal hasil atas aset program	18.218	8.530	26.748	Return on plan assets
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	-	68.883	68.883	Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Saldo pada akhir tahun	195.072	370.549	565.621	Balance at the end of year

- f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan yang terdiri dari reksadana, efek beragunan aset, surat berharga negara, obligasi, deposito berjangka dan saham.

- f. The asset program's investment portfolio is placed in the form of financial instruments including mutual funds, asset backed securities, government securities, bonds, time deposits and shares of stocks.

Status pendanaan imbalan kerja per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut:

Funding status of employee benefit as of December 31, 2022 and 2021 are as follow:

31 Desember/December 31, 2022

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Kesejahteraan/ Welfare Benefits	Total	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	2.118.845	1.030.738	3.149.583	Fair value of plan assets (unaudited)
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(2.226.057)	(964.038)	(3.190.095)	Present value of funded defined benefit obligation
Selisih lebih (kurang) pendanaan	(107.212)	66.700	(40.512)	Funding surplus (deficit)
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	-	(66.700)	(66.700)	Asset adjustment
Kewajiban - neto	(107.212)	-	(107.212)	Liabilities - net

31 Desember/December 31, 2021

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Kesejahteraan/ Welfare Benefits	Total	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	2.038.497	995.997	3.034.494	Fair value of plan assets (unaudited)
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(2.186.761)	(922.828)	(3.109.589)	Present value of funded defined benefit obligation
Selisih lebih (kurang) pendanaan	(148.264)	73.169	(75.095)	Funding surplus (deficit)
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	-	(73.169)	(73.169)	Asset adjustment
Kewajiban - neto	(148.264)	-	(148.264)	Liabilities - net

Per tanggal 31 Desember 2022, tidak ada selisih lebih aset kesejahteraan yang diakui di laporan posisi keuangan karena ketentuan untuk pengakuan aset dari selisih lebih pendanaan yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

As of December 31, 2022, there were no recognition of surplus of Welfare Benefits Plan assets in the statement of financial position as the funding surplus did not meet the recognition criteria of assets under the accounting standards.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja (tidak diaudit) terhadap perubahan asumsi aktuarial sebagai berikut:

- g. The sensitivity of employee benefit liability (unaudited) to the changes in actuarial assumptions is as follow:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Tingkat diskonto			Discount rate:
Kenaikan 1%	(363.644)	(343.389)	Increase 1%
Penurunan 1%	431.961	410.486	Decrease 1%
Tingkat kenaikan gaji			Salary increase rate:
Kenaikan 1%	221.622	205.478	Increase 1%
Penurunan 1%	(191.781)	(175.590)	Decrease 1%

- h. Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

- h. Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows: (unaudited)

31 Desember/December 31, 2022				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Sampai dengan 1 tahun	127.654	278.591	406.245	Up to 1 year
1 sampai 5 tahun	835.385	978.527	1.813.912	Between 1 to 5 years
5 sampai 10 tahun	1.064.334	641.241	1.705.575	Between 5 to 10 years
Total	2.027.374	1.898.359	2.925.732	Total
31 Desember/December 31, 2021				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Sampai dengan 1 tahun	248.468	142.432	390.900	Up to 1 year
1 sampai 5 tahun	477.451	795.838	1.273.289	Between 1 to 5 years
5 sampai 10 tahun	1.029.726	560.855	1.590.581	Between 5 to 10 years
Total	1.755.645	1.499.125	3.254.770	Total

Rata-rata durasi tertimbang kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The average duration of the defined benefit obligations are as follow:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pensiun	10,05 tahun/years	10,54 tahun/years	Pension
Kesejahteraan	9,50 tahun/years	10,97 tahun/years	Welfare benefit
Program lainnya			Other programs:
Pesangon	7,49 tahun/years	8,47 tahun/years	Post employment benefit
Masa persiapan pensiun	7,67 tahun/years	8,47 tahun/years	Pre-retirement benefit
Imbalan jangka panjang lainnya	7,49 tahun/years	8,47 tahun/years	Other long term benefit

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

i. Risiko

Bank terespos beberapa risiko atas program imbalan kerja antara lain:

- Risiko yang terekspos pada program iuran pasti adalah hasil investasi dibawah tingkat diskonto. Akumulasi iuran aktual lebih kecil dari nilai yang diasumsikan sehingga mengakibatkan selisih pembayaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan akan meningkat dan berdampak pada beban dan liabilitas yang akan meningkat pula.
- Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK No. 24, "Imbalan Kerja" yang diadopsi dari IAS 19, "Employee Benefits". Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS *Intepretation Committee Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan tahun berjalan.

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

i. Risk

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans as follows:

- The exposed risks in defined contribution plan is lower return on investment compared to assumption on discount rate. The accumulated actual contribution to be lower than its assumption resulted increase the difference in the amount of contribution based on Labor Law, and will also increase the amount of the related expenses and liabilities.
- The exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in contribution paid to Pension Fund.

In April 2022, Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK No. 24, "Employee Benefits" which was adopted from IAS 19, "Employee Benefits". The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the labor law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS *Intepretation Committee Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). The impact of the changes of calculation is immaterial, therefore the impact of the changes is recorded entirely in the financial statements for the current year.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. PELAPORAN SEGMENT

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

41. SEGMENT REPORTING

Segment information based on business type are as follows:

	31 Desember/December 31, 2022				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	23.233.200	2.674.168	-	25.907.368	Segment income
Beban segmen	(10.036.723)	(873.361)	-	(10.910.084)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	13.196.477	1.800.807	-	14.997.284	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	2.405.171	78.845	(209.164)	2.274.852	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.414.717)	(602.661)	-	(4.017.378)	Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi bersih	(1.074)	-	-	(1.074)	Reversal for allowance for estimated losses from commitment & contingencies
Beban operasional lainnya	(8.704.656)	(943.389)	209.164	(9.438.881)	Other operating expenses
Laba operasional	3.481.201	333.602	-	3.814.803	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	60.912	(25)	-	60.887	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak		-	-	(830.617)	Tax expense
Laba tahun berjalan				3.045.073	Income for the year
Total aset	364.284.663	45.335.575	(7.471.926)	402.148.312	Total assets
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	338.723.316	44.987.568	(7.471.926)	376.238.958	Total liabilities and temporary syirkah fund
	31 Desember/December 31, 2021				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	23.413.857	2.381.101	-	25.794.958	Segment income
Beban segmen	(11.848.313)	(955.342)	-	(12.803.655)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	11.565.544	1.425.759	-	12.991.303	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	2.270.111	92.456	-	2.362.567	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(2.857.345)	(770.132)	-	(3.627.477)	Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi bersih	2.845	-	-	2.845	Reversal for allowance for estimated losses from commitment & contingencies
Beban operasional lainnya	(8.129.515)	(562.891)	-	(8.692.406)	Other operating expenses
Laba operasional	2.851.640	185.192	-	3.036.832	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(43.517)	5	-	(43.512)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak				(617.093)	Tax expense
Laba tahun berjalan				2.376.227	Income for the year
Total aset	340.010.131	38.362.728	(6.504.548)	371.868.311	Total assets
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	325.275.710	31.690.502	(6.504.548)	350.461.664	Total liabilities and temporary syirkah fund

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**42. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

**42. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE
OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS**

Based on Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, stated on article 8 that in relation with the task completion and dismissal of IBRA, the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementation Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. The Government established the Deposit Insurance Corporation (LPS), an independent agency, to replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the establishment Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings deposits and/or other equivalent form.

Based on LPS regulation No. 1/PLPS/2006 dated March 9, 2006 regarding "Government Guarantee Program on Saving Account", the balance of saving accounts guaranteed for each customer is at a maximum of Rp100 million.

In accordance with Government Regulation No. 66 of 2008, dated October 13, 2008 regarding "The Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", the total amount of customers' saving accounts in banks which is guaranteed by the Government has increased to Rp2 billion, from the previous Rp100 million, effective on the date stated above.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**42. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
(lanjutan)**

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 3,75% dan 3,50% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan masing-masing sebesar 0,25% dan 1,00% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp599.991 dan Rp619.667.

**42. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE
OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS
(continued)**

LPS interest rates guarantee as of December 31, 2022 and 2021 were 3.75% and 3.50% for each deposits in Rupiah and 0.25% and 1.00% for deposits in foreign currencies.

The Bank paid a premium on the guarantee program amounting to Rp599,991 and Rp619,667 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021:

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have been entered into the agreed terms and conditions.

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2022 and 2021:

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Pemegang saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ Majority shareholder through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	Obligasi Pemerintah/Government Bonds
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Liabilitas Akseptasi, Pinjaman yang diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan/Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, Acceptances Payable, Fund Borrowing and Securities issued
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Surat Berharga yang Diterbitkan/ Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities and Securities issued

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

**43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2022 and 2021 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities and Securities issued</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro pada bank lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ <i>Current accounts with other banks, and Placement with Bank Indonesia and Other Banks</i>
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek/ <i>Placement with Bank Indonesia and Other Banks and Securities</i>
PT Bank Raya Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain dan Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Deposits from Other Banks, Securities issued</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek/ <i>Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities</i>
PT Utama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Indonesia Power	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i>
PT Timah (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i>
Perum Perumnas	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek, dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Securities, and Loans and sharia financing/receivables</i>

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

**43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2022 and 2021 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT PP Properti Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Acceptances Receivable and Loans and sharia financing/receivables
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan/Acceptances Receivable and Guarantees issued
PT Wijaya Karya Industri Energi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi/Acceptances Receivable
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi/Acceptances Receivable
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Danareksa Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan/Securities and Securities Issued
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

**43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2022 and 2021 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT HK Realtindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Indah Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Jasamarga Bali Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued
PT Mandiri Manajemen Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan/Securities and Securities issued
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Efek-Efek, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Securities, Loans and sharia financing/receivables
PT Amarta Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Efek-Efek dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Securities and Loans and sharia financing/receivables
PT PP Urban	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, Tagihan lain-lain/Loans and sharia financing/receivables, Other receivables
PT Taspen (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Surat Berharga yang Diterbitkan/ Securities issued

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

**43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2022 and 2021 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Patra Jasa	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Virama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Waskita Bumi Wira	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Waskita Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah/Acceptance Receivables, Loans and sharia financing/receivables
PT PPA Finance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Waskita FIM Perkasa Realti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Yodya Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Anugrah Bhumi Amaya Sentosa	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT PP Properti Jababeka Residence	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

**43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2022 and 2021 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Adhi Persada Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Jakabaring	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Sentraland	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas TOD Tanjung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Sinergi Investasi Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Pondok Cina	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Kawasan Berikat Nusantara	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Adhi Commuter Property	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Tagihan Lain-Lain/Loans and sharia financing/receivables and Other receivables
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

**43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2022 and 2021 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan/ Securities issued and Guarantees issued
PT Tugu Reasuransi Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Surat Berharga yang Diterbitkan/ Securities issued
PT Puspertino	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan/ Securities Issued and Guarantees issued
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Surat Berharga yang Diterbitkan/ Securities issued
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Surat Berharga yang Diterbitkan/ Securities issued
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan Efek-efek/ Loans and sharia financing/receivables and Securities
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued
PT Centurion Perkasa Iman	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan/ Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

**43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2022 and 2021 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Pertamina Bina Medika	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities Issued</i>
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan/ <i>Securities issued and Guarantees issued</i>
PT Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek - Efek, Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi/ <i>Securities, Fund borrowings and Subordinated Loan and securities</i>
PT Sinergi Colomadu	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-Efek/ <i>Securities</i>
PT Pertamina (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-Efek/ <i>Securities</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek - Efek/ <i>Securities</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2022 and 2021 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-Efek/ <i>Securities</i>
PT Pegadaian (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-Efek/ <i>Securities</i>
PT BNI Asset Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
Peruri Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/ <i>Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Telkom Satelit Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
PT Inhutani IV	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman dan Efek-Efek Subordinasi/ <i>Subordinated Loan and Securities</i>

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

**43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2022 and 2021 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT PP Urban	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Garansi yang diterbitkan, Tagihan lain-lain/ Guarantees issued, Other receivables
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Bio Farma (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Inka Multi Solusi Service	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah dan Tagihan lain-lain/Loans and sharia financing/receivables and Other receivables
PT PAL Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Wika Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Pertamina (persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan efek-efek/ Loans and sharia financing/receivables and Securities
PT Wika Gedung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Tagihan lain-lain/Other receivables

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

Manajemen Kunci termasuk Direksi, Komisaris, Komite Audit, Kepala Divisi dan Kepala Cabang/*Key Management including Director, Commissioner, Audit Committee, Head Division and Branch Manager*

Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan/*Control on company's activities*

Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah, Simpanan dari Nasabah, dan Dana Syirkah Temporer/*Loans and sharia financing/receivables, Deposit from Customers and Temporary Syirkah Fund*

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia:

a. *Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia:*

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Aset			Assets
Giro pada bank lain (Catatan 6)	508.322	96.460	<i>Current accounts with other banks (Note 6)</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	61	337	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)</i>
Efek-efek (Catatan 8)	850.059	1.341.732	<i>Securities (Note 8)</i>
Obligasi pemerintah (Catatan 9)	51.964.973	46.080.298	<i>Government bonds (Note 9)</i>
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	19.594.018	18.413.051	<i>Loans and sharia financing/receivables (Note 11)</i>
Tagihan akseptasi (Catatan 13)	131.356	454.140	<i>Acceptance receivable (Note 13)</i>
Tagihan lain-lain	61.169	135.775	<i>Other Receivables</i>
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	73.109.958	66.521.793	Total assets to related parties
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(900.235)	(849.085)	<i>Allowance for impairment losses for related parties</i>
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	72.209.723	65.672.708	Total assets from related parties - net
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	17,96%	17,66%	Percentage of total assets from related parties to total assets

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari nasabah (Catatan 18, 19 dan 20)	173.906.896	158.526.678	Deposits from customers (Notes 18, 19 and 20)
Liabilitas Akseptasi (Catatan 22)	118.525	161.920	Acceptance payable (Note 22)
Surat-surat berharga yang diterbitkan (Catatan 23)	4.355.008	4.277.267	Securities issued (Note 23)
Pinjaman yang diterima (Catatan 24)	17.455.685	15.562.294	Fund borrowings (Note 24)
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi (Catatan 25)	4.499.977	4.499.968	Subordinated loan and securities (Note 25)
Total liabilitas untuk pihak- pihak berelasi	200.336.091	183.028.127	Total liabilities to related parties
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	57,01%	55,85%	Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities
Dana Syirkah Temporer			Temporary Syirkah Funds
Giro <i>Mudharabah</i> (Catatan 18)	11.897	12.281	<i>Mudharabah</i> current accounts (Note 18)
Tabungan <i>Mudharabah</i> (Catatan 19)	83.465	503.717	<i>Mudharabah</i> savings deposits (Note 19)
Deposito <i>Mudharabah</i> (Catatan 20)	7.631.970	9.423.801	<i>Mudharabah</i> time deposits (Note 20)
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	7.727.332	9.939.799	Total temporary syirkah funds to related parties
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	31,08%	43,66%	Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds
	2022	2021	
Pendapatan bunga dan bagi hasil			Interest income and income from profit sharing
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	282.311	172.580	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	216.020	346.641	Securities
Obligasi pemerintah	1.518.936	1.538.370	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.081.237	1.125.832	Loans and sharia financing/ receivables
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	3.098.504	3.183.423	Total interest income and income from profit sharing from related parties
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	11,96%	12,34%	Percentage to total interest income and income from profit sharing

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	2022	2021	
Beban bunga, bagi hasil dan bonus			Interest, profit sharing and bonus expenses
Simpanan dari nasabah	2.642.731	1.799.624	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	781	44	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang diterbitkan	455.401	916.677	Securities issued
Pinjaman yang diterima	843.147	990.259	Fund borrowings
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.894	-	Securities sold under repurchase agreement
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	381.760	401.002	Subordinated loan and securities
Giro <i>Mudharabah</i>	181	288	Mudharabah current accounts
Tabungan <i>Mudharabah</i>	6.521	12.676	Mudharabah savings deposits
Deposito <i>Mudharabah</i>	80.613	83.130	Mudharabah time deposits
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	4.416.029	4.203.700	Total interest and bonus expenses from related parties
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil dan bonus	40,48%	32,83%	Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense
	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif (Catatan 27)			Commitments and Contingencies in Administrative Accounts (Note 27)
Garansi yang diterbitkan	426.438	162.825	Guarantees issued
Irrevocable L/C yang masih berjalan	115.445	74.988	Outstanding irrevocable LCs
Total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif dari pihak berelasi	541.883	237.813	Total commitments and contingencies in administrative accounts
Persentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	43,35%	18,55%	Percentage to total commitments and contingencies in administrative accounts
	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
b. Transaksi dengan manajemen kunci			b. Transactions with key management personnel
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (Catatan 11)	102.781	145.242	Loan and sharia financing/receivables (Note 11)
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(374)	(1.047)	Allowance for impairment losses for related parties
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	102.407	144.195	Total assets from related parties - net
Persentase terhadap total aset	0,03%	0,04%	Percentage to total assets

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan)

b. Transactions with key management personnel
(continued)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari nasabah (Catatan 18, 19 dan 20)	115.340	99.575	Deposits from customers (Notes 18, 19 and 20)
Liabilitas imbalan kerja	268.476	236.266	Employee benefits liability
Total liabilitas dari manajemen kunci	383.816	335.841	Total liabilities from key management personnel
Persentase terhadap total liabilitas	0,11%	0,10%	Percentage to total liabilities
	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Dana Syirkah Temporer			Temporary Syirkah Funds
Tabungan Mudharabah (Catatan 19)	4.962	1.846	Mudharabah savings deposits (Note 19)
Deposito Mudharabah (Catatan 20)	5.221	301	Mudharabah time deposits (Note 20)
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	10.183	2.147	Total temporary syirkah funds to related parties
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	0,04%	0,01%	Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds
	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pendapatan bunga dan bagi hasil			Interest income and income from profit sharing
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	6.929	9.257	Loans and sharia financing/ receivables
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,03%	0,04%	Percentage to total interest income and income from profit sharing
	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Beban bunga, bagi hasil dan bonus			Interest, profit sharing and bonus expenses
Simpanan dari nasabah	1.732	1.279	Deposits from customers
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil, dan bonus	0,03%	0,01%	Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

b. Transaksi dengan manajemen kunci

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Imbalan jangka pendek:		
Direksi (Catatan 1f)	131.671	101.022
Dewan komisaris (Catatan 1f)	51.960	38.010
Karyawan kunci lain	221.825	171.381
Imbalan pasca kerja:		
Karyawan kunci lain	182.874	181.019
Imbalan jangka Panjang lainnya:		
Karyawan kunci lain	85.602	84.089
Total	673.932	575.521
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	16,08%	15,21%

**43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

b. Transactions with key management personnel
(continued)

Short-term employee benefits:
Board of directors (Note 1f)
Board of commissioners (Note 1f)
Other key employees
Post-employment benefits:
Other key employees
Other long term benefit:
Other key employees
Total
Percentage to total salaries and employee benefits

44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

44. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Net Open Position

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 which was fourth amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio of the overall statement of financial position at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING (lanjutan)**

**44. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN
FOREIGN CURRENCIES (continued)**

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

The Bank's NOP as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

31 Desember/December 31, 2022			
	Aset/Assets	Liabilitas/Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<u>Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif</u>			<u>Statement of financial position and Administrative accounts</u>
Dolar Amerika Serikat	7.622.973	(8.311.493)	688.520 United States Dollar
Yen Jepang	480.099	(808.933)	328.834 Japanese Yen
Dolar Singapura	36.865	(24.018)	12.847 Singapore Dollar
Dolar Australia	48.406	(4)	48.402 Australian Dollar
Renminbi	1.089	(8)	1.081 Renminbi
Ringgit Malaysia	292	(10)	282 Malaysian Ringgit
Euro Eropa	31.464	(328)	31.136 European Euro
Pound Sterling Inggris	63.405	(11)	63.394 Great Britain Pound Sterling
Dolar Hong Kong	97	-	97 Hong Kong Dollar
Riyal Arab Saudi	81	-	81 Saudi Arabian Riyal
			1.174.674
Modal (Catatan 45)			28.168.457 Capital (Note 45)
Rasio PDN			4,17% NOP ratio

31 Desember/December 31, 2021			
	Aset/Assets	Liabilitas/Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<u>Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif</u>			<u>Statement of financial position and Administrative accounts</u>
Dolar Amerika Serikat	9.755.845	(9.310.116)	445.729 United States Dollar
Yen Jepang	49.908	(118)	49.790 Japanese Yen
Dolar Singapura	51.628	(6.339)	45.289 Singapore Dollar
Dolar Australia	56.312	16	56.328 Australian Dollar
Renminbi	235	(5)	230 Renminbi
Ringgit Malaysia	215	(7)	208 Malaysian Ringgit
Euro Eropa	332	(258)	74 European Euro
Pound Sterling Inggris	76.887	(11)	76.876 Great Britain Pound Sterling
Dolar Hong Kong	289	-	289 Hong Kong Dollar
Riyal Arab Saudi	50	-	50 Saudi Arabian Riyal
			674.863
Modal (Catatan 45)			25.706.310 Capital (Note 45)
Rasio PDN			2,63% NOP ratio

**45. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (KPMM)**

**45. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR)**

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risks*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

The Bank actively manages its capital in accordance with the regulatory requirements. The primary objective of which is to ensure that the Bank, at all times, maintains adequate capital to cover inherent risks to its banking activities without prejudice to optimizing shareholder's value.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (KPMM) (lanjutan)**

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risks*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

CAR pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, Bank diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016. Pembentukan modal *buffer* yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB yang wajib dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) masing-masing sebesar 2,50%, 0,00% dan 1,00%.

Berdasarkan POJK No 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020, untuk kebijakan relaksasi dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sektor perbankan, bahwa kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer* dalam komponen modal diiadakan sampai dengan 31 Maret 2022.

Berdasarkan profil risiko Bank masing-masing per 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu *low to moderate*, maka rasio kecukupan modal (KPMM) minimum per 31 Desember 2022 dan 2021 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan 10%.

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktik akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk KPMM.

**45. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR) (continued)**

The Bank actively manages its capital in accordance with the regulatory requirements. The primary objective of which is to ensure that the Bank, at all times, maintains adequate capital to cover inherent risks to its banking activities without prejudice to optimizing shareholder's value.

CAR on December 31, 2022 and 2021 was calculated based on Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.03/2016 on date September 22, 2016 concerning of Change regulation No. 11/POJK.03/2016 on date January 29, 2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks.

Based on POJK No. 34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, PBI No. 17/22/PBI/2015 concerning the Establishment of *Countercyclical Buffer Requirement*, and POJK No. 46/POJK.03/2015 concerning the Determination of *Systemically Important Bank* and *Capital Surcharge*, the Bank is required to form additional capital as a buffer that apply in stages starting on January 1, 2016. The establishment of buffer capital consists of *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer*, and *Capital Surcharge* for D-SIB which shall be established based on a percentage of Risk Weighted Assets (RWA) of 2.50%, 0.00% and 1.00%, respectively.

Based on POJK No. 48/POJK.03/2020 as of December 1, 2020 concerning the amendments of POJK No.11/POJK.03/2020 dated May 27, 2020 for relaxation policy in order to support the national economic recovery program of the banking sector, that the obligation to fulfill the *Capital Conservation Buffer* in the capital component is removed until March 31, 2022.

Based on the risk profile as of December 31, 2022 and 2021, respectively, which are both low to moderate, the minimum CAR for December 31, 2022 and 2021, is set at 9% to less than 10%, respectively.

The determination of the Bank's compliance with regulations and applicable ratios are based on the accounting rules which is differ in several aspects with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

As of December 31, 2022 and 2021, the Bank has fulfilled the required ratios of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority for the CAR.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

45. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) (lanjutan)

Perhitungan KPMM Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

45. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2022 and 2021 follows (continued):

		<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Modal inti	a	22.533.407	18.531.612	Core Capital
Modal pelengkap (Maksimal 100% dari modal inti)	b	5.635.050	7.174.698	Supplementary Capital (Maximum of 100% of Core Capital)
Modal pelengkap tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	c	-	-	Additional supplementary capital allocated for anticipation of market risk
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	d=a+b	<u>28.168.457</u>	<u>25.706.310</u>	Total Core Capital and Supplementary Capital
Jumlah modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	e=c+d	28.168.457	25.706.310	Total core capital, supplementary capital and additional supplementary capital allocated for anticipation of market risk
Penyertaan	f	-	-	Investment
Jumlah modal untuk risiko kredit	g=d-f	28.168.457	25.706.310	Total capital for credit risk
Jumlah modal untuk risiko kredit dan risiko pasar	h=e-f	28.168.457	25.706.310	Total capital for credit risk and market risk
Aset tertimbang menurut risiko kredit	i	114.318.357	110.020.335	Risk weighted assets credit risk
ATMR untuk risiko pasar	j	1.373.299	2.406.567	RWA for market risk
ATMR untuk risiko operasional	k	23.938.858	21.913.665	RWA for operational risk
Jumlah ATMR untuk risiko kredit dan risiko operasional	l=i+k	138.257.215	131.934.000	Total RWA for credit risk and operational risk
Jumlah ATMR untuk risiko Kredit, Risiko Operasional kredit, risiko operasional dan risiko pasar	m=i+j+k	139.630.514	134.340.567	RWA for Credit Risk, Operational risk and market risk
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional	n=g/l	20,37%	19,48%	CAR for credit risk and operational risk
CAR untuk risiko kredit Risiko operasional dan risiko pasar	o=h/m	20,17%	19,14%	CAR for credit risk Operational risk and market risk
CAR Minimum yang Diwajibkan		<u>9%</u>	<u>9%</u>	Minimum CAR

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO

Bank portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI rate. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2018 tentang perubahan atas SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Selain dari itu Bank juga telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank melakukan *stress test* dengan *worst case scenario*. Selain melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas bank secara keseluruhan, Bank juga melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. *Stress Test* yang dilakukan oleh Bank fokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit, Bank melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* sebagaimana diatur dalam SE Direksi No. 21/SE/DIR/ERMD/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing* dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit dan risiko pasar serta per triwulan untuk risiko likuiditas.

46. RISK MANAGEMENT

The bulk of the Bank's loan portfolio consists of mortgage loans (KPR) that are affected by changes in the external business environment such as inflation and the BI rate. Efforts to minimize the negative impact is being done through risk management activities on a daily basis, with the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the basis to ensure that all the processes and mechanisms in connection to achieve the Bank's objectives, to prevent the bank from deviations and risks that can lead to failure in achieving corporate objectives. The principle of prudence is the basis of risk management activities to ensure the healthy growth of the Bank's performance and sustainability.

As a follow up to the implementation of Pillar 1 of Basel II, the Bank has implemented a credit risk measurement using the Standardized Approach in accordance with SEOJK No.11/SEOJK.03/2018 in changed from SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 regarding the Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk by using Standardized Approach. Apart from that, the Bank has been calculating the minimum capital requirements using the Basic Indicator Approach for operational risk in accordance with SEOJK No. 24/SEOJK.03/2016 dated in July 14, 2016 regarding the calculation of risk weighted assets (RWA) for Operational Risk. The use of Standardized Method for market risk are in accordance with SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 dated in September 8, 2016 regarding the Guidelines for the Use of Standardized Method in the Calculation of Capital Adequacy Ratio on Market Risk for Commercial Banks.

In measuring risks, particularly market risk and liquidity risk, the Bank conducts stress testing using worst case scenario in addition to scenario analysis of the Bank's activities as a whole. The Bank also performs scenario analysis on specific activities, especially new activity, which could potentially increase the interest rate risk exposure. Currently, the stress tests conducted by the Bank is focused on 3 (three) types of risks, namely, credit risk, market risk (including interest rate risk) and liquidity risk. To improve the measurement of market risk, liquidity risk and credit risk, the Bank conduct stress test on worst case scenario as regulated in Director Circular Letter No. 21/SE/DIR/ERMD/2019 dated in May 15, 2019 regarding The Guidelines of Implementation for Stress Testing with a minimum frequency of 1 (one) year for credit risk and market risk and quarterly for liquidity risk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophy*. *Stress Testing Risiko Likuiditas* telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu disampaikan melalui laporan Profil Risiko Triwulan I/2022, Triwulan II/2022, Triwulan III/2022 dan Triwulan IV/2022. *Stress Testing Risiko Kredit dan Risiko Pasar* dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun dan dilakukan sebanyak 1 kali dimana pelaporan tahun 2022 akan disampaikan kepada OJK.

Manajemen Risiko Kredit dalam kondisi Pandemi COVID-19 untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, Bank telah menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19 melalui Ketentuan Internal baik berupa Surat Edaran maupun Surat Keputusan Direksi sebagai Kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19* yang diberlakukan sejak tanggal 24 Maret 2020. Dalam kebijakan tersebut telah diatur kriteria debitur dan sektor usaha terdampak COVID-19 yang dapat dilakukan restrukturisasi. Relaksasi dilakukan khusus untuk debitur dan sektor yang terdampak COVID-19 dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diperbaharui POJK No. 48/POJK.03/2020, Peraturan Menko Perekonomian No. 6/ 2021 dan ketentuan internal Bank. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip *four eyes* yang melibatkan Satuan Kerja Bisnis dan Satuan Kerja Pengelola Risiko Kredit Ritel maupun Satuan Kerja Pengelola Risiko Kredit Komersial untuk menjaga prinsip kehati-hatian. Bank telah menyusun skema restrukturisasi dengan pola penundaan pembayaran kewajiban kredit. Dalam upaya mitigasi terjadi risiko kredit. Bank memperketat analisa bagi debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi dan meminimalisasi risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran serta untuk menghindari *moral hazard*. Pemberian stimulus hanya dapat diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank. Penetapan debitur yang memenuhi kriteria tersebut juga melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (unit risk management) sebagai pihak yang independen. Dalam pelaksanaan pemberian stimulus dan untuk menghindari adanya *free rider (moral hazard)*, Bank BTN selalu mengacu pada regulasi dan mengikuti tata kelola yang baik (GCG).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

The Bank conducts periodic *stress testing* to assess capital adequacy in anticipation of the occurrence of risk events that are extreme or *catastrophic*. *Stress Testing for liquidity risk* has been carried out 2 times, which is submitted through the Risk Profile report for Quarter I/2022, Quarter II/2022, Quarter III/2022 and Quarter IV/2022. *Market Risk and Credit Risk Stress Testing* is conducted at least once a year and conducted once in 2022 and the report will be submitted to the OJK.

Credit Risk Management during the COVID-19 Pandemic: In order to support the government's efforts to maintain economic stability, the Bank has prepared a credit restructuring policy for debtors affected by COVID-19 through Internal Regulations in the form of a Directors Circular and Directors Decree as a Countercyclical Policy in handling The Impact of the Spread of COVID-19 which was effective on March 24, 2020. The policy has stipulated criteria for debtors and business sectors affected by COVID-19 that can be restructured. Relaxation is allowed specifically for debtors and sectors affected by COVID-19 by referring to POJK Number 11/POJK.03/2020 which was updated by POJK Number 48/POJK.03/2020, Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs Number 6/2021 and Bank BTN internal regulations . In addition, decision making is carried out using the four eyes principle which involves the Business Work Unit and Retail Credit Risk Management Work Unit and Commercial Credit Risk Management Work Unit to maintain the principle of prudence. The bank has created a restructuring scheme with a pattern of postponing payment of credit obligations. In efforts to mitigate credit risk occurs. The Bank will tighten the assessment for debtors who apply for restructuring and minimize the risk of restructuring that is not right on target and to avoid moral hazard. The stimulus can only be given to debtors who meet the criteria set by the Bank. Determination of debtors who meet these criteria also involves the Risk Management Unit as an independent party. In the implementation of providing stimulus and to avoid free riders (moral hazard), Bank BTN always refers to regulations and follows good corporate governance (GCG).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan debitur-debitur Bank yang terdampak pandemi COVID-19 dapat terbantu, sehingga kualitas portfolio Bank dapat tetap dijaga dengan baik. Dalam kaitan dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung, Bank melakukan sejumlah penyesuaian pada proses dan mekanisme monitoring kredit, baik terhadap debitur secara individual maupun portofolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil monitoring senantiasa dapat memberikan *early warning signal* dan penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas kredit selama masa pandemi. Penyesuaian mekanisme monitoring kredit dilakukan melalui analisa *watchlist* terhadap seluruh debitur terutama entitas debitur yang berada pada sektor usaha terdampak COVID-19 dengan mengacu pada POJK No. 48 /POJK.03/2020 dan ketentuan internal Bank. Debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja wajib dipantau dengan rencana *action plan* yang dipantau pelaksanaannya secara berkelanjutan, selain itu pengendalian pencairan kredit terhadap debitur yang mengalami restrukturisasi kredit (terutama yang melalui skema Stimulus Perekonomian Nasional POJK No. 11/POJK.03/2020) sehingga tujuan restrukturisasi dapat dicapai dengan tepat guna. Manajemen Risiko Kredit melakukan *review* sebagai perlakuan debitur restrukturisasi yang terdampak pandemi Covid-19 agar dapat meminimalisasi terjadinya *default* bagi Bank, serta dilakukan analisa proyeksi terhadap kondisi debitur sebagai langkah antisipasi Bank, dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku. Terhadap skema restrukturisasi debitur, Bank melakukan sejumlah penyesuaian ketentuan proses restrukturisasi kredit dengan mengacu pada POJK No. 48 /POJK.03/2020 dan kebijakan internal terkait dengan pemberian stimulus perekonomian bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Adapun penyesuaian ketentuan restrukturisasi melalui stimulus perekonomian mencakup: kriteria debitur restrukturisasi, sektor usaha yang terdampak COVID-19, mekanisme dan skema restrukturisasi, kewenangan memutus, penetapan kualitas kredit serta pelaporan kepada *regulator*. Penyesuaian ketentuan proses restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 ini diharapkan dapat membantu debitur Bank serta kualitas portfolio kredit Bank senantiasa terjaga dengan baik.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

The implementation of this policy is expected to help Bank's debtors who are affected by COVID-19 pandemic, so that the quality of the Bank's portfolio can be well maintained. In the ongoing COVID-19 pandemic, the Bank made several adjustments to the credit monitoring process and mechanism, both for debtors as an individual and portfolios. This adjustment is made for the purposes that monitoring results can always provide early warning signals and determine risk mitigation to be effective in maintaining credit quality during the pandemic period. Adjustments to the credit monitoring mechanism are carried out through watchlist analysis of all debtors, especially debtor entities that are in the business sector affected by COVID-19 with reference to POJK Number 48 /POJK.03/2020 and the Bank's internal regulations. Debtors that have the potential to experience a decline in performance must be monitored with an action plan that is monitored for its implementation on an ongoing basis, in addition to controlling credit disbursement of debtors who are experiencing credit restructuring (especially those through the National Economic Stimulus scheme POJK Number 11/POJK.03/2020) therefore restructuring objectives can be achieved efficiently. Credit Risk Management conducts a review as a treatment for restructured debtors who are affected by covid19 in order to minimize the occurrence of defaults for the Bank, as well as a projection analysis of the condition of the Covid-19 restructured debtor as a precautionary measure for the Bank by still referring to applicable government and regulatory regulations. For the debtor restructuring scheme, the Bank made several adjustments to the provisions of the credit restructuring process by referring to POJK Number 48 /POJK.03/2020 and internal policies related to providing economic stimulus for debtors affected by the spread of COVID-19. The adjustment of restructuring provisions through economic stimulus includes: criteria for restructuring debtors, business sectors affected by COVID-19, restructuring mechanisms and schemes, decision authority, determination of credit quality and reporting to regulators. Adjustments to the provisions of the credit restructuring process affected by COVID-19 are expected to be able to help Bank debtors and the quality of the Bank's credit portfolio is always well maintained.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bisnis *Commercial dan Corporate Loan* serta meningkatkan pendapatan Bank dapat melalui pemberian fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan. Dalam proses pemberian Fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan sudah melibatkan unit manajemen risiko kredit mulai dari pengumpulan data hingga proses keputusan pemberian Fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan. Hasil penetapan limit fasilitas *Credit Line* kepada *Counterparty* didasarkan atas analisa aspek legal, rating perusahaan, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek industri, aspek pemasaran, dan aspek agunan. Manajemen Risiko Pasar juga melakukan monitoring transaksi terhadap limit fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan secara harian.

Struktur Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

In order to improve and optimize services to the public, especially in the Commercial and Corporate Loan business, as well as to increase Bank revenue through the provision of Credit Line facilities to Non-Financial Institutions. In the process of granting Credit Line Facilities for Non-Financial Institutions, the credit risk management unit has been involved, starting from data collection to the decision process for granting Credit Line Facilities for Non-Financial Institutions. The results of the limit determination of Credit Line facilities to Counterparties are based on analysis of legal aspects, company ratings, management aspects, financial aspects, industrial aspects, marketing aspects, and collateral aspects. Market Risk Management also monitors transactions on Credit Line facility limits for Non-Financial Institutions on a daily basis.

Risk Management Structure

The Bank's risk governance, which is based on the principles of GCG, involves the entire Bank in managing risks. This can be seen in the composition of the Bank's risk management organizational structure. The Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD) are responsible for ensuring the proper implementation of risk management in accordance to the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. The BOC and BOD play an active role in the risk management process in order to mitigate the risk of the Bank through Quality of Risk Management Implementation which covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of risk management systems.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan Enterprise Risk Management Division secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan, Tingkat Kesehatan Bank, Recovery Plan dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu, KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Division (ERMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics. Struktur organisasi Enterprise Risk Management Division terdiri dari Market Risk Management Department, Credit Portfolio Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Integrated Risk Management Department dan Quality Assurance & Control.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Structure (continued)

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners by evaluating the Bank's risk management policy guidelines (Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Strategic Risk, Compliance Risk and Reputational Risk), evaluating according to the policy guidelines and monitoring the duties of Risk Management Committee. In carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee with the Enterprise Risk Management Division regularly discuss issues about Risk Profile, Bank Soundness Level, Recovery Plan and other matters related to Bank risk management including reviewing the Risk Management Policy Guidelines in which there are Risk Appetite and Risk Tolerance Bank.

Risk Management Committee

The Bank's Risk Management Committee (RMC) is actively involved in providing advice on the inherent risks associated to new policies to be established by the BOD and providing evaluation to the regulations that are considered to be outdated and require updating. The RMC is also actively involved in conducting risk measurement of the risks associated to new products and/or services to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The RMC may evaluate the Risk Management Policy Guidelines, if necessary.

Risk Management Division

Enterprise Risk Management Division (ERMD) is a Risk Management Working Unit (RMWU) at the Bank, led by a Division Head that is responsible directly to the Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics Director. The organizational structure of the ERMD consists of the Market Risk Management Department, Credit Portfolio Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Integrated Risk Management Department dan Quality Assurance & Control.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Market Risk Management Department berfungsi untuk melakukan pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Fungsi Credit Risk Management Department melakukan pengelolaan Risiko Kredit, Operational Risk Management Department berfungsi mengelola Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum sedangkan Integrated Risk Department berfungsi mengelola Risiko Strategik, Setiap Departement Head dibantu oleh Unit Policy & Procedure dan Unit Assessment & Measurement.

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan gap analysis serta mengakomodasi best practices yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan database risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Profil Risiko

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, ERMD menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Selanjutnya berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian faktor profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Structure (continued)

Market Risk Management Department is responsible for managing market risk and liquidity risk. Credit Risk Management Department is responsible for credit risk management, while Operational Risk Management Department is responsible for managing operational risk, compliance risk, reputational risk and legal risk and Integrated Risk Management responsible for strategik risk. The Department Head is assisted by Policy & Procedure Unit and Assessment & Measurement Unit.

The Bank's risk management policies are formalized in the RMPM. RMPM sets out the minimum requirements based on Bank Indonesia regulations. A regular review is conducted on internal policies to comply with the prevailing regulations from regulatory bodies. Gap analysis are performed and best practices are applied to enhance the quality of the risk management implementation.

Risk Management Policies and Procedures

The Bank also performs risk management on information systems which focuses on risk database collection and improvement. The data is gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated into the Bank's risk management on a timely basis.

Risk Profile

In accordance with POJK No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 regarding on Risk Management for Commercial Banks, ERMD submits on a quarterly basis a risk profile report to the Financial Services Authority, which contains exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputational risk and strategic risk. Furthermore, based on POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding a Bank's health level, the assessment of the risk profile will cover the inherent risk and quality of risk management implementation through the operational activities of the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Secara umum, sesuai dengan penilaian secara self assessment Profil Risiko Bank triwulan IV tahun 2022 diupayakan tetap berada pada tingkat *Low to Moderate* yang tercermin dari tingkat risiko inherent moderate dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan peringkat *satisfactory*. Risiko Inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan.

Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko diantaranya adalah memastikan kepatuhan dengan persyaratan kredit, kecukupan agunan dan penanganan kredit bermasalah.

Pemantauan risiko secara reguler dilakukan oleh ERMD untuk memastikan bahwa unit kerja melakukan kegiatan kredit secara konsisten menerapkan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Bank.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (*non-housing related*).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

In general, in accordance with the self-assessment of the Bank's Risk Profile for the fourth quarter of 2022, it is strived to be at the Low to Moderate level, which is reflected in the moderate inherent risk level and satisfactory level of quality of risk management implementation. Inherent risks include business strategy, business characteristics, complexity of products and activities of the Bank, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions. The quality of risk management implementation covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of the risk management system.

Credit Risk

Credit risk management is part of the overall risk management, which is defined in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks, as the risk arising from the failure of debtors and/or other parties to fulfill their obligations to the Bank.

The Bank regularly reviews and updates the RMPM Guidelines as well as the Credit and Financing Manual Policy.

Credit risk exposure is monitored from the credit granting process until the maturity of the credit. Credit risk monitoring includes, among others, ensuring compliance with the terms of the loan, adequacy of collateral and handling of non-performing loans.

Regular risk monitoring is undertaken by ERMD to ensure that the business units carrying out credit activities are consistently implementing regulation and Standard Operating Procedures (SOP) based on the limits set by the Bank.

Another strategic step in the implementation of the Bank's credit risk management is to distribute credit risk and minimize credit concentration by increasing the loan portfolio as well as financing non-housing related sectors.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya:

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain kredit yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminakan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a) *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan.
- b) *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
- c) Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit yasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (*coverage ratio*).

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out*) dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (i) Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation:

The carrying value of the Bank's financial assets other than loans represents its maximum exposure to credit risk.

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a determined second way out. The types of collateral are as follows:

- a) *Physical collateral*, such as land and buildings.
- b) *Financial collateral*, such as third party funds (saving deposits, demand deposits and time deposits), securities, etc.
- c) Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment which generally represent yasa griya loan, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be used in determining the coverage ratio.

In addition to collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (*first way out*) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Geographical sectors

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31, 2022 and 2021. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

31 Desember/December 31, 2022

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada							
Bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	-	25.416.941	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.470.723	-	240	1.271	23	1.472.257	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia dan	12.975.955	-	-	-	-	12.975.955	Bank Indonesia and
bank lain	1.723.168	-	-	-	-	1.723.168	other banks
Efek-efek	51.964.973	-	-	-	-	51.964.973	Securities
Obligasi Pemerintah	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190	Government bonds
Efek - efek yang dibeli	-	410.219	10.343	-	-	420.562	Securities purchased under agreement
dengan janji dijual	103.939	-	-	-	-	103.939	to resell
kembali	-	-	-	-	-	-	Acceptance receivable
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	Derivative receivable
Tagihan derivatif	-	-	-	-	-	-	
Kredit yang diberikan							Loans and sharia financing/ receivables
dan piutang/pembiayaan							Consumer
syariah							Housing loan
Konsumer							Non-housing loan
Pemilikan rumah	-	98.728.648	59.465.684	37.405.974	38.286.748	233.887.054	Working capital
Non-kepemilikan rumah	-	3.415.964	3.965.796	1.400.018	2.907.880	11.689.658	Investment
Modal kerja	-	22.394.510	7.732.094	2.044.470	2.284.609	34.455.683	Syndicated
Investasi	-	9.556.832	1.246.509	636.549	203.732	11.643.622	Director and Employees
Sindikasi	-	4.504.244	-	-	-	4.504.244	Third party - Related party -
Direksi dan karyawan:							
- Pihak ketiga	-	874.100	538.776	273.637	321.567	2.008.080	Interest receivable
- Pihak berelasi	-	52.022	22.575	6.090	12.676	93.363	Other assets ¹⁾
Bunga yang masih	556.024	5.216.864	2.719.508	993.220	1.264.686	10.750.302	
akan diterima	948.131	78.478	8.250	2.090	3.099	1.040.048	
Aset lain-lain ¹⁾							
Total kotor	96.594.044	145.231.881	75.709.775	42.763.319	45.285.020	405.584.039	Total gross
Cadangan kerugian							Allowances for impairment losses
penurunan nilai						(15.679.205)	
Neto						389.904.834	Net

31 Desember/December 31, 2021

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada							
Bank Indonesia	10.692.484	-	-	-	-	10.692.484	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.095.688	-	113	975	22	1.096.798	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia dan	27.901.048	-	-	-	-	27.901.048	Bank Indonesia and
bank lain	2.232.905	-	-	-	-	2.232.905	other banks
Efek-efek	46.080.298	-	-	-	-	46.080.298	Securities
Obligasi pemerintah							Government bonds

¹⁾ Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

^{**)} Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

¹⁾ Consists of third parties receivables

^{**)} Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Geographical sectors (continued)

31 Desember/December 31, 2021

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total	
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.598.325	-	-	-	-	1.598.325	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan akseptasi	-	454.140	-	-	-	454.140	Acceptance receivable
Tagihan derivatif	31.017	-	-	-	-	31.017	Derivative receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/pebiayaan syariah							Loans and sharia financing/receivables
Konsumer							Consumer
Pemilikan rumah	-	90.456.674	53.798.137	34.864.883	35.105.382	214.225.076	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	3.178.544	3.845.734	1.202.160	2.702.017	10.928.455	Non-housing loan
Modal kerja	-	23.097.950	7.997.854	2.321.370	2.607.461	36.024.635	Working capital
Investasi	-	8.713.979	1.495.948	634.628	227.235	11.071.790	Investment
Sindikasi	-	200.144	-	-	-	200.144	Syndicated
Direksi dan karyawan:							Director and Employees
- Pihak ketiga	-	985.733	604.726	303.286	355.932	2.249.677	Third party -
- Pihak berelasi	-	65.271	38.888	9.001	22.354	135.514	Related party -
Bunga yang masih akan diterima	573.308	4.238.222	2.383.019	868.032	1.110.955	9.173.536	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	732.013	146.696	5.381	2.110	4.125	890.325	Other assets ^{*)}
Total kotor	90.937.086	131.537.353	70.169.800	40.206.445	42.135.483	374.986.167	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(14.440.081)	Allowances for impairment losses
Neto						360.546.086	Net

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

^{**)} Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

^{*)} Consists of third parties receivables

^{**)} Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure related to administrative accounts as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

31 Desember/December 31, 2022

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	15.819	36.774	25.471	2.064	80.128	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan Irrevocable L/C	-	718.932	190.123	623	38.817	948.495	Guarantees issued Outstanding irrevocable L/Cs
Yang masih berjalan	-	173.743	47.741	-	-	221.484	
Total	-	908.494	274.638	26.094	40.881	1.250.107	Total

31 Desember/December 31, 2021

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	17.324	52.516	26.257	1.837	97.934	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan Irrevocable L/C	-	699.155	157.973	30.635	15.367	903.130	Guarantees issued Outstanding irrevocable L/Cs
yang masih berjalan	-	280.604	-	-	-	280.604	
Total	-	997.083	210.489	56.892	17.204	1.281.668	Total

^{*)} Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

^{**)} Hanya fasilitas kredit committed yang belum ditarik

^{*)} Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua

^{**)} Only for committed unused loan facility

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2022 and 2021:

31 Desember/December 31, 2022

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	-	25.416.941	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	1.472.257	-	-	-	1.472.257	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.575.894	400.061	-	-	-	12.975.955	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	547.036	593.031	583.101	-	1.723.168	Securities
Obligasi Pemerintah	51.964.973	-	-	-	-	51.964.973	Government bonds
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan Akseptasi	-	-	-	420.562	-	420.562	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	-	103.939	-	-	-	103.939	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	4.516.550	40.261	810.586	44.381.293	248.533.014	298.281.704	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	545.988	31.175	4.023	2.427.021	7.742.095	10.750.302	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	5.733	488.071	-	403.022	143.222	1.040.048	Other assets ^{*)}
Total kotor	96.460.269	3.082.800	1.407.640	48.214.999	256.418.381	405.584.039	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.679.205)	Allowances for impairment losses
Neto						389.904.834	Net

31 Desember/December 31, 2021

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	10.692.484	-	-	-	-	10.692.484	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	1.096.798	-	-	-	1.096.798	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	27.800.711	100.337	-	-	-	27.901.048	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	921.091	762.705	549.109	-	2.232.905	Securities
Obligasi Pemerintah	46.080.298	-	-	-	-	46.080.298	Government bonds
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.598.325	-	-	-	-	1.598.325	Securities purchased under agreement to resell

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.

^{**)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, perdagangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{*)} Consists of third party receivables.

^{**)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021: (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2021

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Tagihan Akseptasi	-	-	-	454.140	-	454.140	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	-	31.017	-	-	-	31.017	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/pendbiayaan syariah	4.494.240	93.677	1.206.390	41.005.159	228.035.825	274.835.291	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	484.774	6.617	7.379	2.463.779	6.210.987	9.173.536	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	1.533	56.885	-	798.732	33.175	890.325	Other assets ^{*)}
Total kotor	91.152.365	2.306.422	1.976.474	45.270.919	234.279.987	374.986.167	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(14.440.081)	Allowances for impairment losses
Neto						360.546.086	Net

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.

^{**)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

31 Desember/December 31, 2022

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	-	-	77.942	2.186	80.128	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan Irrevocable L/C	-	-	-	946.635	1.860	948.495	Guarantees issued
yang masih berjalan	-	-	-	221.484	-	221.484	Outstanding irrevocable L/Cs
Total	-	-	-	1.246.061	4.046	1.250.107	Total

^{*)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{**)} Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

^{*)} Consists of third party receivables.

^{**)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2022 and 2021, are as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021: (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2021

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	-	-	5.546	92.388	97.934	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-	895.843	7.287	903.130	Guarantees issued Outstanding irrevocable L/Cs
Total	-	-	-	1.181.993	99.675	1.281.668	Total

^{*)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{**)} Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

^{*)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

^{**)} Only for committed unused loan facility

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai

1. Giro pada Bank Lain

31 Desember/December 31, 2022

	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total	
Rupiah	540.052	-	540.052	Rupiah
Mata Uang Asing	930.474	1.731	932.205	Foreign currencies
Total	1.470.526	1.731	1.472.257	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.747)	Allowance for impairment losses
Neto			1.470.510	Net

^{*)} Kolektibilitas 3, 4 dan 5

^{*)} Collectibility 3, 4 and 5

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2022 and 2021, are as follows: (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets

1. Current Accounts with Other Banks

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

1. Giro pada Bank Lain (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2021			
Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total	
Rupiah	498.310	-	498.310
Mata Uang Asing	596.806	1.682	598.488
Total	1.095.116	1.682	1.096.798
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.698)	Allowance for impairment losses
Neto		1.095.100	Net

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

*) Collectibility 3, 4 and 5

2. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Per 31 Desember 2022 dan 2021, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

3. Efek-efek

31 Desember/December 31, 2022			
Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total	
Reksadana	401.416	-	401.416
Obligasi	709.711	2.000	711.711
Medium Term Notes	103.085	-	103.085
Efek Beragunan Aset	492.415	-	492.415
SKBDN	14.541	-	14.541
Total	1.721.168	2.000	1.723.168
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.399)	Allowance for impairment losses
Neto		1.720.769	Net

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

*) Collectibility 3, 4 and 5

31 Desember/December 31, 2021			
Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total	
Reksadana	200.000	-	200.000
Obligasi	1.176.591	2.000	1.178.591
Medium Term Notes	100.000	-	100.000
Efek Beragunan Aset	615.215	-	615.215
SKBDN	139.099	-	139.099
Total	2.230.905	2.000	2.332.905
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.000)	Allowance for impairment losses
Neto		2.330.905	Net

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

*) Collectibility 3, 4 and 5

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

4. Rekening administratif

Per 31 Desember 2022 dan 2021, rekening administratif mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp4.719 dan Rp3.644.

5. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Per 31 Desember 2022 dan 2021, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami penurunan nilai.

6. Tagihan Akseptasi

Per 31 Desember 2022 dan 2021, tagihan akseptasi tidak mengalami penurunan nilai.

7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Per 31 Desember 2022 dan 2021, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam PSAK No. 71 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

4. Administrative account

As of December 31, 2022 and 2021, administrative account which are impaired amounting to Rp4,719 and Rp3,644, respectively.

5. Securities Purchased Under Agreement to Resell

As of December 31, 2022 and 2021, securities purchased under agreement to resell are not impaired.

6. Acceptance Receivable

As of December 31, 2022 and 2021, acceptance receivable are not impaired.

7. Loans and sharia financing/receivables

As of December 31, 2022 and 2021, these financial assets are impaired calculated by individual and collective impairment according to SFAS No. 71 and Financial Service Authority Regulations (POJK).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai bruto):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses):

		31 Desember/December 31, 2022						
		Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>	Tingkat tinggi/ <i>High Grade^{*)}</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade^{**)}</i>	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired^{**)}</i>	Total	
Efek-efek								Securities
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	793.831	-	-	-	-	793.831	Fair value through profit -or-loss
	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	655.293	-	-	-	-	655.293	Financial assets held at fair value through other comprehensive income
	Diukur pada biaya perolehan amortisasi	272.044	-	-	-	2.000	274.044	Amortized cost
Obligasi pemerintah								Government bonds
	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	19.591.199	-	-	-	-	19.591.199	Fair value through profit -or-loss
	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.332.949	-	-	-	-	14.332.949	Financial assets held at fair value through other comprehensive income
	Diukur pada biaya perolehan amortisasi	18.040.825	-	-	-	-	18.040.825	Amortized cost
Lain-lain								Others
	Giro pada bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	-	25.416.941	Current accounts with Bank Indonesia
	Giro pada bank lain	1.470.526	-	-	-	1.731	1.472.257	Current accounts with other banks
	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.975.955	-	-	-	-	12.975.955	Placements with Bank Indonesia and other banks
	Tagihan Akseptasi	420.562	-	-	-	-	420.562	Acceptance Receivable
	Efek-efek yang Dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190	Securities purchased under agreement to resell
	Tagihan Derivatif	103.939	-	-	-	-	103.939	Derivative Receivable
	Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							Loans and sharia financing/ receivables
	Konsumer							Consumer
	Pemilikan rumah	106.290.471	109.503.902	15.481.718	2.610.963	233.887.054	Housing loan	
	Non kepemilikan rumah	2.560.043	8.260.912	650.143	218.560	11.689.658	Non-housing loan	
	Modal kerja	5.987.718	17.130.097	1.162.221	10.175.647	34.455.683	Working capital	
	Investasi	3.397.768	2.863.506	155.160	5.227.188	11.643.622	Investment	
	Sindikasi	2.055.846	2.448.398	-	-	4.504.244	Syndicated	
	Direksi dan karyawan							Directors and employees
	- Pihak ketiga	1.331.455	653.854	10.891	11.880	2.008.080	Third parties -	
	- Pihak yang berelasi	72.047	20.553	655	108	93.363	Related parties -	
	Bunga yang masih akan diterima	10.750.302	-	-	-	10.750.302	Interests receivable	
	Aset lain-lain ^{*)}	1.040.048	-	-	-	1.040.048	Other assets ^{*)}	
	Total	228.993.952	140.881.222	17.460.788	18.248.077	405.584.039		Total
	Cadangan kerugian nilai					(15.674.923)		Allowance for impairment losses
	Neto					389.909.252		Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

**) Tidak diaudit

***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

*) Consists of third party receivables

**) Unaudited

***) Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

	31 Desember/December 31, 2021						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>	Tingkat tinggi/ <i>High Grade</i> ^{*)}	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i> ^{**)}	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i> ^{**)}	Total	
Efek-efek							Securities
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	688.945					688.945	<i>Fair value through profit -or-loss</i>
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.069.952					1.069.952	<i>Financial assets held at fair value through other comprehensive income</i>
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	472.008				2.000	474.008	<i>Amortized cost</i>
Obligasi Pemerintah							Government Bonds
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	14.580.217					14.580.217	<i>Fair value through profit -or-loss</i>
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	21.275.682					21.275.682	<i>Financial assets held at fair value through other comprehensive income</i>
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	10.224.399					10.224.399	<i>Amortized cost</i>
Lain-lain							Others
Giro pada bank Indonesia	10.692.484					10.692.484	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	1.095.116				1.682	1.096.798	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	27.901.048					27.901.048	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Tagihan Akseptasi	454.140					454.140	<i>Acceptance Receivable</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.598.325					1.598.325	<i>Securities purchased under agreement to resell</i>
Tagihan Derivatif	31.017					31.017	<i>Derivative Receivable</i>
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							<i>Loans and sharia financing/ receivables</i>
Konsumer							<i>Consumer</i>
Pemilikan rumah	116.266.018	86.409.940		8.140.106	3.409.012	214.225.076	<i>Housing loan</i>
Non kepemilikan rumah	3.646.107	6.581.029		427.114	274.205	10.928.455	<i>Non-housing loan</i>
Modal kerja	9.359.937	12.990.287		1.653.201	12.021.210	36.024.635	<i>Working capital</i>
Investasi	7.692.375	663.481		202.708	2.513.226	11.071.790	<i>Investment</i>
Sindikasi	63.666	136.478				200.144	<i>Syndicated</i>
Direksi dan karyawan							<i>Directors and employees</i>
- Pihak ketiga	1.538.517	673.788		6.660	30.712	2.249.677	<i>Third parties -</i>
- Pihak yang berelasi	114.802	18.046		2.609	57	135.514	<i>Related parties -</i>
Bunga yang masih akan diterima	9.173.536					9.173.536	<i>Interests receivable</i>
Aset lain-lain ³⁾	890.325					890.325	<i>Other assets³⁾</i>
Total	238.828.616	107.473.049		10.432.398	18.252.104	374.986.167	Total
Cadangan kerugian nilai						(14.440.081)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto						360.546.086	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

**) Tidak diaudit

***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunannya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

*) Consists of third party receivables

**) Unaudited

***) Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- (b) Efek-efek dan obligasi pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baa3 (Moody's).

Tingkat standar

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- (b) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih.
- (c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality is defined as follows:

High grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with government institution, transaction with reputable banks with low probability of default for its liabilities.
- (b) Securities and government bonds are Sovereign securities issued by government of RI, investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baa3 (Moody's).

Standard grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- (b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days.
- (c) Securities and Government bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(v) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

(v) The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2022 and 2021, follows:

31 Desember/December 31, 2022						
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	180 sampai 270 hari/ 180 to 270 days	Total	
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	13.190.989	384.038	1.021.398	885.293	15.481.718	Housing Loan
Non kepemilikan rumah	613.666	638	14.288	21.551	650.143	Non housing loan
Modal kerja	719.359	-	12.786	430.076	1.162.221	Working capital
Investasi	81.655	-	1.191	72.314	155.160	Investment
Direktur dan karyawan	9.513	-	851	1.182	11.546	Directors and employees
Total	14.615.182	384.676	1.050.514	1.410.416	17.460.788	Total
Cadangan kerugian nilai					(1.918.975)	Allowance for impairment losses
Neto					15.541.813	Net

31 Desember/December 31, 2021						
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	180 sampai 270 hari/ 180 to 270 days	Total	
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	6.634.554	261.185	727.534	516.833	8.140.106	Housing Loan
Non kepemilikan rumah	410.282	986	6.670	9.176	427.114	Non housing loan
Modal kerja	1.336.830	-	51.816	264.555	1.653.201	Working capital
Investasi	166.744	-	2.067	33.897	202.708	Investment
Direktur dan karyawan	6.506	346	1.475	942	9.269	Directors and employees
Total	8.554.916	262.517	789.562	825.403	10.432.398	Total
Cadangan kerugian nilai					(1.094.466)	Allowance for impairment losses
Neto					9.337.932	Net

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

(vi) Movements in allowance for impairment losses by type of loans are as follows:

31 Desember/December 31, 2022								
	Konsumsi/Konsumer						Total	
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan Rumah/ Non-Housing Loan	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employee		
Saldo Awal	4.296.939	309.075	8.485.819	1.302.032	7.618	34.277	14.435.760	Beginning balance
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama periode berjalan	3.420.001	69.993	38.379	495.348	7.875	7.911	4.039.507	Provision for impairment losses during the period
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	11.764	3.838	49.698	6.416	-	-	71.716	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(1.363.969)	(118.534)	(1.083.251)	(277.182)	-	(29.124)	(2.872.060)	Loans written-off
Saldo akhir periode	6.364.735	264.372	7.490.645	1.526.614	15.493	13.064	15.674.923	Balance at the end of period
Penurunan nilai individual	889.594	86.221	4.902.353	1.331.382	-	1.229	7.210.779	Individual impairment
Penurunan nilai kolektif	5.475.141	178.151	2.588.292	195.232	15.493	11.835	8.464.144	Collective impairment
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	893.068	85.794	8.057.392	5.078.192	-	1.108	14.115.554	Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed impairment losses

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2021

	Konsumsi/Konsumer		Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employee	Total	
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan Rumah/ Non-Housing Loan						
Saldo Awal	3.966.504	419.904	7.550.711	1.104.018	741	19.065	13.060.943	Beginning balance
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	1.252.787	27.372	1.910.372	371.300	6.877	15.602	3.584.310	Provision for impairment losses during the year
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	5.145	2.925	44.593	4.963	-	-	57.626	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(927.497)	(141.126)	(1.019.857)	(178.249)	-	(390)	(2.267.119)	Loans written-off
Saldo akhir tahun	4.296.939	309.075	8.485.819	1.302.032	7.618	34.277	14.435.760	Balance at the end of year
Penurunan nilai individual	1.223.779	72.358	5.512.769	1.015.276	-	-	7.824.182	Individual impairment
Penurunan nilai kolektif	3.073.160	236.717	2.973.050	286.756	7.618	34.277	6.611.578	Collective impairment
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	1.518.799	95.583	9.507.248	2.265.024	-	-	13.386.654	Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed impairment losses

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed, among others, by:

- inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or
- inability to generate cash flows from funding, inter-bank transactions and fund borrowings.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian Bank dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh *Internal Audit Division* (IAD) dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD).

Pengendalian Risiko Likuiditas melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan pemantauan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat serta penerapan sistem informasi manajemen risiko secara wajar untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini dan berkesinambungan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas antara lain adalah Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi Arus Kas, dan *Stress Testing* (pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank maupun skenario *stress* pada faktor pasar).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

In general, the main objective of risk management for liquidity risk is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain source of cash flow funding. Thus, the Bank can meet some financial obligations that have been agreed upon in a timely manner, and to always be able to maintain adequate and optimal levels of liquidity. Liquidity risk management policies include the active supervision of the Board Of Commissioners and Board Of Directors who basically set the implementation of the Bank's liquidity risk management, policy, procedures and determination of limits, which generally includes the liquidity risk management strategy, level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance, and risk management process, information systems and internal control systems by implementing internal controls and adequate independent review of the risk management implementation for liquidity risk which are being carried out by the Management and conducted by the Internal Audit Division (IAD) and Enterprise Risk Management Division (ERMD).

Liquidity risk management is being carried out through funding strategy, liquidity positions and monitoring of daily liquidity, management of high quality liquid assets, planning the emergency funding as well as implementation of a sound risk management information system to support the process of identification, measurement, monitoring and control, as well as reporting of liquidity risk under normal and extreme conditions in a comprehensive, accurate, timely and sustainable manner.

The tools used in the measurement of liquidity risk among others are Liquidity Ratio, Maturity Profile, Cash Flow Projection, and Stress Testing (testing the Bank's ability to meet liquidity needs on a state of crisis by using the specific stress scenarios on the Bank as well as on the market factor).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan:

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities:

31 Desember/December 31, 2022							
Total	Lainnya/ Others *)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months		
ASET							ASSETS
Kas	1.661.533	-	1.661.533	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	25.416.941	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.470.510	(1.747)	1.472.257	-	-	-	Current accounts with other banks Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	12.975.955	-	12.975.955	-	-	-	Securities
Obligasi Pemerintah	1.720.769	(2.399)	1.455.405	8.260	82.165	177.338	Government bonds
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	51.964.973	-	37.540.672	3.266.511	512.540	10.645.250	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan Akseptasi	1.434.190	-	1.434.190	-	-	-	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	420.426	(136)	80.697	339.865	-	-	Derivative Receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	103.939	-	43.543	29.284	512.540	10.645.250	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	282.606.781	(15.674.923)	5.336.769	4.811.050	5.887.466	282.246.419	Interest receivable
Aset lain-lain**)	10.750.302	-	10.750.302	-	-	-	Other assets**)
	1.040.048	-	1.040.048	-	-	-	
Total	391.566.367	(15.679.205)	99.208.312	8.454.970	6.994.711	303.714.257	Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera ***)	2.588.471	-	2.588.471	-	-	-	Liabilities due immediately***)
Simpanan nasabah	297.099.801	-	174.667.266	58.829.356	9.198.718	54.404.461	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain Surat berharga yang diterbitkan	136.408	-	136.408	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas Derivatif	8.652.260	-	-	1.999.919	725.924	5.926.417	Securities issued
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	Derivative Liabilities
Pinjaman yang diterima	420.562	-	80.697	339.865	-	-	Acceptance payable
Bunga yang masih harus dibayar	24.821.005	-	499.997	-	2.000.000	22.321.008	Fund borrowings
Liabilitas lain-lain****)	629.366	-	629.366	-	-	-	Interest payables
Pinjaman dan efek- efek subordinasi	4.690.821	-	4.690.821	-	-	-	Other liabilities****)
	9.158.219	-	-	-	-	9.158.219	Subordinated Loan Securities
Total	348.196.913	-	183.293.026	61.169.140	11.924.642	91.810.105	Total
Perbedaan jatuh tempo	43.369.454	(15.679.205)	(84.084.714)	(52.714.170)	(4.929.931)	211.904.152	Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

***) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.

****) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

*****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

***) Consists of third party receivables.

****) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

*****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

	31 Desember/December 31, 2021						
	Total	Lainnya/ Others *)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	
ASET	1.539.577	-	1.539.577	-	-	-	ASSETS
Kas	-	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada	-	-	-	-	-	-	Current accounts with
Bank Indonesia	10.692.484	-	10.692.484	-	-	-	Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.095.100	(1.698)	1.096.798	-	-	-	Current accounts with
Penempatan pada	-	-	-	-	-	-	other banks
Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	Placements with
dan bank lain	27.901.048	-	27.871.048	30.000	-	-	Bank Indonesia
Efek-efek	2.230.905	(2.000)	1.776.858	121.078	122.437	212.532	and other banks
Obligasi pemerintah	46.080.298	-	37.895.823	977.073	336.532	6.870.870	Securities
Efek-efek yang dibeli	-	-	-	-	-	-	Government bonds
dengan janji	-	-	-	-	-	-	Securities purchased under
dijual kembali	1.598.325	-	1.598.325	-	-	-	agreement to resell
Tagihan Akseptasi	453.517	(623)	20.094	56.401	377.645	-	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	31.017	-	-	-	-	31.017	Derivative Receivables
Kredit yang diberikan dan	-	-	-	-	-	-	Loans and sharia
pembiayaan/piutang	-	-	-	-	-	-	financing/receivables
syariah	260.399.531	(14.435.760)	6.145.384	4.868.290	4.588.312	259.233.305	
Bunga yang masih akan	-	-	-	-	-	-	Interest receivable
diterima	9.173.536	-	9.173.536	-	-	-	Other assets**)
Aset lain-lain**)	890.325	-	890.325	-	-	-	
Total	362.085.663	(14.440.081)	98.700.252	6.052.842	5.424.926	266.347.724	Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera ***)	3.198.742	-	3.198.742	-	-	-	Liabilities due immediately****)
Simpanan nasabah	273.189.056	-	125.035.451	67.983.258	27.239.204	52.929.143	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	66.007	-	64.950	1.057	-	-	Deposits from other banks
Surat berharga yang	-	-	-	-	-	-	Securities issued
diterbitkan	12.371.708	-	-	3.166.632	2.094.129	7.110.947	Derivative Liabilities
Liabilitas Derivatif	17.741	-	17.741	-	-	-	Acceptance payable
Liabilitas akseptasi	454.140	-	20.094	56.401	377.645	-	Fund borrowings
Pinjaman yang diterima	22.062.291	-	499.978	4.299.988	939.997	16.322.328	
Bunga yang masih harus	-	-	-	-	-	-	Interest payables
dibayar	496.725	-	496.725	-	-	-	Other liabilities****)
Liabilitas lain-lain****)	4.117.108	-	-	-	-	4.117.108	Subordinated Loan
Pinjaman dan efek-	-	-	-	-	-	-	Securities
efek subordinasi	8.759.744	-	-	-	-	8.759.744	
Total	324.733.262	-	129.333.681	75.507.336	30.650.975	89.239.270	Total
Perbedaan jatuh tempo	37.352.401	(14.440.081)	(30.633.429)	(69.454.494)	(25.226.049)	177.108.454	Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.

***) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

**) Consists of third party receivables.

***) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga):

31 Desember/December 31, 2022

	Total	On demand	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months	
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera*)	2.588.471	-	2.588.471	-	-	-	Liabilities due immediately*)
Simpanan nasabah							Deposits from customers
Deposito berjangka	148.981.512	-	66.763.135	59.616.536	9.631.572	12.970.268	Time deposits
Tabungan	37.376.047	37.376.047	-	-	-	-	Savings deposits
Giro	113.525.727	70.664.584	-	-	-	42.861.143	Demand deposits
Simpanan dari bank lain	136.408	136.408	-	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	Derivative liabilities
Liabilitas akseptasi	420.562	-	80.697	339.865	-	-	Acceptance payable
Surat berharga yang diterbitkan	10.110.074	-	72.842	2.245.500	991.612	6.800.120	Securities issued
Pinjaman yang diterima	32.698.776	-	85.148	1.026.370	2.602.004	28.985.254	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	629.366	-	629.366	-	-	-	Interest payables
Liabilitas lain-lain**)	4.690.821	-	4.690.821	-	-	-	Other liabilities**)
Pinjaman Subordinasi dan Efek-efek subordinasi	10.562.334	-	48.158	240.792	288.950	9.984.434	Subordinated Loan and securities
Total	361.720.098	108.177.039	74.958.638	63.469.063	13.514.138	101.601.219	Total

31 Desember/December 31, 2021

	Total	On demand	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months	
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera*)	3.198.742	-	3.198.742	-	-	-	Liabilities due immediately*)
Simpanan nasabah							Deposits from customers
Deposito berjangka	148.282.821	-	47.680.097	66.592.158	22.003.546	12.007.020	Time deposits
Tabungan	47.949.639	47.132.360	507.513	92.845	214.271	2.650	Savings deposits
Giro	78.718.827	42.684.211	-	-	-	36.034.616	Demand deposits
Simpanan dari bank lain	66.015	-	64.955	1.060	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	1.245.787	-	42.160	-	42.160	1.161.467	Derivative liabilities
Liabilitas akseptasi	454.140	-	20.094	56.401	377.645	-	Acceptance payable
Surat berharga yang diterbitkan	14.548.510	-	14.754	3.563.474	2.453.834	8.516.448	Securities issued
Pinjaman yang diterima	28.284.991	-	61.898	4.771.253	1.290.404	22.161.436	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	496.725	-	496.725	-	-	-	Interest payables
Liabilitas lain-lain**)	4.117.108	-	4.117.108	-	-	-	Other liabilities**)
Pinjaman Subordinasi dan Efek-efek subordinasi	10.569.363	-	25.629	111.728	223.865	10.208.141	Subordinated Loan and securities
Total	337.932.668	89.816.571	56.229.675	75.188.919	26.605.725	90.091.778	Total

*) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

***) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Market Risk

Market risk is the risk on statement of financial position and administrative accounts, due to changes in overall market conditions.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar, Bank menggunakan perhitungan *Standardized Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejala eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar.

i. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Aset	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December, 2021		Assets
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	
Giro pada bank lain	0,19%	0,00%	0,29%	0,00%	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3,47%	0,96%	3,01%	0,01%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8,59%	4,13%	11,53%	-	Securities
Obligasi pemerintah					Government bonds
Tingkat bunga tetap	3,60%	2,93%	4,29%	4,17%	Fixed interest rate
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	4,21%	0,00%	3,54%	-	Securities purchased under agreement to resell
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah	8,14%	4,48%	8,05%	0,73%	Loans and sharia financing/receivables
Liabilitas					Liabilities
Simpanan nasabah					Deposits from customers
Giro	1,59%	1,03%	1,78%	0,83%	Demand deposits
Tabungan	1,44%	0,16%	1,81%	0,30%	Savings deposits
Deposito Berjangka	3,49%	1,71%	3,51%	0,93%	Time deposits
Simpanan dari Bank lain					Deposits from other banks
Giro	0,99%	0,00%	0,76%	-	Demand deposits
Deposito Berjangka	2,75%	0,00%	3,48%	-	Time deposits
Inter-bank call money	3,40%	1,48%	2,82%	-	Inter-bank call money
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3,93%	0,00%	-	-	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	8,56%	0,00%	8,93%	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima	5,47%	0,90%	7,26%		Fund borrowing
Pinjaman subordinasi dan efek-efek Subordinasi	8,28%	4,20%	8,28%	4,20%	Subordinated loan and securities

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

In accordance with the Financial Services Authority Circular No.12 /SEOJK.03/2018 dated in August 21, 2018 regarding the Implementation of Risk Management and Measurement of Risk in the Standard Approach In measuring market risk, the Bank uses the Standardized Method in calculating CAR for market risk. Exchange rate risk arises from fluctuations in exchange rates maintained by keeping the net open position in accordance with Bank Indonesia regulations. External shocks are also being considered by stress testing, which is done to measure the extent to which the Bank can survive some scenario changes in external conditions, particularly changes in market interest rates.

Market risk includes the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and exchange rates.

i. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows from the fair values of financial instruments.

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended December 31, 2022 and 2021:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross):

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross):

31 Desember/December 31, 2022

Suku bunga mengambang/Variable interest rate							
Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total		
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas	-	-	-	1.661.533	1.661.533	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	22.035.579	-	-	3.381.362	25.416.941	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	1.471.059	-	-	1.198	1.472.257	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	10.897.955	2.078.000	12.975.955	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	793.831	-	816.282	113.055	1.723.168	Securities	
Obligasi pemerintah	-	-	43.150.065	8.814.908	51.964.973	Government bonds	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	1.434.190	-	1.434.190	Securities purchases under agreement to resell	
Tagihan Akseptasi	-	-	-	420.562	420.562	Acceptance Receivable	
Tagihan Derivatif	-	-	103.939	-	103.939	Derivative receivables	
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	3.898.479	9.715.127	187.066.985	65.976.974	298.281.704	Loans and sharia financing/ receivable	
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	10.750.302	10.750.302	Interest receivable	
Aset lain-lain ^{*)}	-	-	-	1.040.048	1.040.048	Other assets ^{*)}	
Total aset keuangan	28.198.948	9.715.127	187.066.985	122.379.405	407.245.572	Total financial assets	
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Liabilitas segera ^{**)}	-	-	-	2.588.471	2.588.471	Liabilities due immediately ^{**)}	
Simpanan dari nasabah	-	-	-	-	-	Deposits from customers	
Giro	62.039.775	-	42.861.143	8.624.809	113.525.727	Demand deposits	
Tabungan	36.182.329	-	-	1.193.718	37.376.047	Savings deposits	
Deposito berjangka	-	-	146.198.027	-	146.198.027	Time deposits	
Simpanan dari bank lain	136.408	-	-	-	136.408	Deposits from other banks	
Liabilitas akseptasi	-	-	-	420.562	420.562	Acceptance payable	
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	-	Derivative liabilities	
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	8.652.260	-	8.652.260	Securities issued	
Pinjaman yang diterima	-	-	22.803.052	2.017.953	24.821.005	Fund Borrowings	
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	629.366	629.366	Interest payables	
Liabilitas lain-lain ^{**)}	-	-	-	4.690.821	4.690.821	Other liabilities ^{**)}	
Pinjaman subordinasi dan Efek-efek subordinasi	-	-	9.158.219	-	9.158.219	Subordinated Loan and Securities	
Total liabilitas keuangan	98.358.512	-	229.672.701	20.165.700	348.196.883	Total financial liabilities	
Gap repricing suku bunga-kotor	(70.159.564)	9.715.127	187.066.985	(107.293.296)	59.048.689	Gross interest repricing gap	

31 Desember/December 31, 2021

Suku bunga mengambang/Variable interest rate							
Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total		
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas	-	-	-	1.539.577	1.539.577	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	9.261.565	-	-	1.430.919	10.692.484	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	1.095.902	-	-	896	1.096.798	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	22.806.048	5.095.000	27.901.048	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	688.946	-	1.432.208	111.751	2.232.905	Securities	
Obligasi pemerintah	-	-	41.344.864	4.735.434	46.080.298	Government bonds	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	1.598.325	-	1.598.325	Securities purchases under agreement to resell	
Tagihan Akseptasi	-	-	-	454.140	454.140	Acceptance Receivable	
Tagihan Derivatif	-	-	31.071	-	31.071	Derivative receivables	
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	196.896.379	-	50.389.054	27.549.858	274.835.291	Loans and sharia financing/ receivable	
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	9.173.536	9.173.536	Interest receivable	
Aset lain-lain ^{*)}	-	-	-	890.325	890.325	Other assets ^{*)}	
Total aset keuangan	207.942.792	-	117.601.570	50.981.436	376.525.798	Total financial assets	

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

*) Consists of third party receivables.

***) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (lanjutan):

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross) (continued):

31 Desember/December 31, 2021						
Suku bunga mengambang/Variable interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total
Liabilitas Keuangan						
Liabilitas segera ^{*)}	-	-	-	-	3.198.742	3.198.742
Simpanan dari nasabah						
Giro	37.328.258	-	-	36.034.616	5.355.953	78.718.827
Tabungan	45.879.036	-	-	920.365	1.150.239	47.949.640
Deposito berjangka	-	-	-	146.520.589	-	146.520.589
Simpanan dari bank lain	60.950	-	-	5.057	-	66.007
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	454.140	454.140
Liabilitas Derivatif	-	-	-	17.741	-	17.741
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	12.371.708	-	12.371.708
Pinjaman yang diterima	-	-	-	20.878.780	1.183.511	22.062.291
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	496.725	496.725
Liabilitas lain-lain ^{**)}	-	-	-	-	4.117.108	4.117.108
Pinjaman subordinasi dan Efek-efek subordinasi	-	-	-	8.759.744	-	8.759.744
Total liabilitas keuangan	83.268.244	-	-	225.508.600	15.956.418	324.733.262
Gap repricing suku bunga-kotor	124.674.548	-	-	(107.907.030)	35.025.018	51.792.536

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Consists of third party receivables.

**) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

***) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Analisis sensitivitas atas ekuitas dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Jumlah sensitivitas atas ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva imbal hasil.

Sensitivity analyses for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are shown in the tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the variable rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2022 and 2021. The sensitivity of equity is calculated by revaluing fixed interest rate fair value through other comprehensive income and fair value to profit or loss financial assets as of December 31, 2022 and 2021 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of equity is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan ekuitas Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, terdapat perubahan signifikan dibandingkan dengan Desember 2021 atas dampak ke laba rugi dan ekuitas dikarenakan peningkatan portofolio surat berharga dalam USD:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below demonstrate the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2022 and 2021, there is significant changes compare to December 2021 from impact of profit or loss and equity because of the increasing from securities in USD:

31 Desember/December 31, 2022

	Perubahan basis point/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ Impact to Statement of Comprehensive Income before tax	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity	
Rupiah	+125	(43.380)	(556.734)	Rupiah
	+50	(17.878)	(230.043)	
	-50	18.623	240.557	
	-125	48.045	622.570	
Dolar Amerika Serikat	+125	-	(546.154)	United States Dollar
	+50	-	(232.895)	
	-50	-	254.593	
	-125	-	682.459	

31 Desember/December 31, 2021

	Perubahan basis point/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ Impact to Statement of profit or loss and Other Comprehensive Income before tax	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity	
Rupiah	+125	(230.716)	(1.171.645)	Rupiah
	+50	(95.620)	(487.384)	
	-50	100.400	514.428	
	-125	260.652	1.341.085	
Dolar Amerika Serikat	+125	(1.910)	(885.200)	United States Dollar
	+50	(791)	(379.383)	
	-50	830	417.737	
	-125	2.150	1.126.315	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2022
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terhadap kemungkinan perubahan suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga *variable* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

The tables below demonstrate the sensitivity of profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for variable rate financial assets and liabilities as of December 31, 2022 and 2021:

31 Desember/December 31, 2022	
Perubahan basis poin/ Change in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income
Rupiah	±125 ±50
	±405.949 ±162.380
	Rupiah

31 Desember/December 31, 2021	
Perubahan basis poin/ Change in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income
Rupiah	±125 ±50
	±416.588 ±166.635
	Rupiah

ii. Risiko Nilai Tukar

ii. Exchange rate risk

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK.

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations.

31 Desember/December 31, 2022	
Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income
Dolar Amerika Serikat	±0.30% ±0.35%
	±1.106 ±1.290
	United States Dollar

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK (tidak diaudit). (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

ii. Exchange rate risk (continued)

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations (unaudited). (continued)

31 Desember/December 31, 2021

	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Dolar Amerika Serikat	±0.30% ±0.35%	±2.212 ±2.581	United States Dollar

Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan dampak yang diestimasi atas perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the estimated effect of the assumed change in foreign currency exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dampak atas perubahan nilai tukar mata uang lainnya seperti Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Singapura, Dolar Australia dan Dolar Hongkong tidak material.

As of December 31, 2022, and 2021, the effect of fluctuations in exchange rates of other currencies, such as British Pound Sterling, European Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Australian Dollar and Hongkong Dollar, is not material.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational Risk

Operational risk is a risk arising from the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failure, and/or the presence of external events that can affect the operations of the Bank.

Risiko Operasional yang timbul harus segera diantisipasi. Pencadangan modal yang dilakukan Bank dihitung berdasarkan kebutuhan modal minimum (CAR) merupakan salah satu langkah antisipasi agar eksposur Risiko Operasional tidak sampai mengganggu permodalan.

Operational risk arising should be anticipated. Provision of capital held by bank is calculated based on minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) which is one of anticipatory measures in order the operational risk exposure not interfere Bank's capital structure.

Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional, Bank menerapkan Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach), sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

In order to calculate the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for operational risk, the Bank applies the Basic Indicator Approach, in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk Calculated using Basic Indicator Approach (PID).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Dalam pemantauan risiko operasional, fungsi Internal Audit melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi risiko, saat ini Bank sedang mengembangkan aplikasi BTN *Loss Event Database* (BTN-LED). Aplikasi BTN LED ini dirancang terhubung dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *loss event* masing-masing kantor secara online melalui media *web* (web based).

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut diharapkan akan teridentifikasi peta eksposur risiko yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. *Enterprise Risk Management Division* bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

In monitoring operational risk, Internal Audit performs an assessment of the implementation of risk management policies and procedures at each functional activity, product or new service and the ERMD also ensures that the identification, measurement, monitoring and risk control, work effectively on any functional activity, product or new services.

In order to make the process of identifying risks, the Bank is currently developing applications BTN Loss Event Database (BTN-LED). The application of LED was designed BTN connected with regional offices and branch offices. Thus, regional offices and branch offices can periodically send data loss event each office online through media web (web based).

The Data collected will be processed and analyzed. Processing and analysis of the results are expected to be identified as a risk exposure maps are obtained, further mitigation measures will be performed against the identified risk exposures.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by risk taking units within the Bank. The Enterprise Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each risk taking unit in conducting its daily transactions and activities accurately, efficiently and in a timely manner.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Hukum

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh *Enterprise Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh *Legal Division* untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, *Legal Division* memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division (CSD)* dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh *Customer Care Division (CCD)*.

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dikembangkan aplikasi Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah yang memungkinkan proses penanganan pengaduan secara *online* antar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Hal ini berguna untuk memastikan terjaminnya kepuasan nasabah.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation (PSO)* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Legal Risk

Legal risk measurement is conducted together by Enterprise Risk Management Division and Legal Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by Legal Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and also conducts a regular review of agreements and partnership contracts with counterparty.

Reputational Risk

Reputational risk is identified an inherent risk factors associated to functional activities including disclosure requirements, customer complaints against the Bank, employee attitude when providing services to customers and the Bank's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the results of assessment on the reputation risk factors. Bank reputation risk is managed by CSD and being reported to Bank Indonesia by Customer Care Division (CCD).

In order to monitor reputational risk, the Bank developed an application called Customer Complaint System (CCS) to support customer service and complaint handling that allows online complaints handling process between the parties related to the issues at branch offices and head office. This will be useful to ensure sustained customer satisfaction.

CSD is responsible for implementing policies related to managing and settling negative issues or avoiding counter-productive information and performs the Public Service Obligation (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi, serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Corporate Strategy and Planning Division* (CSPD) sebagaimana yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko strategik dilakukan oleh CSPD secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* dan *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* bank.

Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan Kantor Cabang me-review strategi dasar yang fokus pada perubahan-perubahan antara lain struktur organisasi Bank, perkreditan komersial, pembiayaan perdagangan, treasury, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko strategik, *Corporate Strategy and Planning Division* (CSPD) berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, *Compliance Division* (CMGD) melakukan kajian terkait dengan eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat pada ketentuan internal. Di samping itu, CMGD menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke ERMD dan RMC untuk di-review.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputational Risk (continued)

Corporate Social Responsibility is not focused only on *charity*, but also in the form of a sustainable program. This can be realized in the form of credit subsidies and implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (SERP).

Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising from the inaccuracies in the decision making and/or the execution of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. *Strategic Risk* identification is based on the strategic risk factors on specific functional activities, such as lending, treasury and investment activities, as well as operations and services through a business plan prepared by the Corporate Strategy and Planning Division (CSPD) as elaborated in the General Policy of the BOD.

Strategic risk and parameter measurement are based on the Bank's performance by comparing actual results with targets that have been set. *Strategic risk* monitoring is carried out by CSPD periodically to monitor the achievement of Key Performance Indicator and risk exposure compared to the Bank's risk appetite.

Furthermore, the BOC, BOD, Divisions and Branch Offices are reviewing the basic strategy that focuses on changes in among others, the organizational structure of the Bank, commercial lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

In controlling strategic risk, the Corporate Strategy and Planning Division (CSPD) analyzes actual results against target and periodically reports to the BOD.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank's inability to comply and/or carry out laws and regulations. In identifying compliance risks, *Compliance Division* (CMGD) conducts a review regarding compliance risk associated with exposure to external provision inherent in internal regulations. In addition, CMGD analyzes the events that led to the emergence of risk, which are reported to and reviewed by ERMD and RMC.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Dalam rangka meminimalkan timbulnya Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama Legal Application System (LAPS) untuk memudahkan seluruh unit bisnis melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Di samping itu, *Compliance Division* melakukan monitoring terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke ERMD.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereviu semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, ERMD dan CMGD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

Secara berkala, IAD melakukan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut audit baik dari intern maupun ekstern.

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

In order to minimize the Compliance Risk, Legal Division (LGD) has provided a special access called Legal Application System (LAPS) for easy access to the internal regulations of the Bank for the entire business units. In addition, CMGD monitors the events that contributed to compliance risk and reports these matters to ERMD.

Compliance risk is assessed by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigations and complaints received by the Bank.

In monitoring compliance risk, ERMD and CMGD are responsible to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management by monitoring regularly all kinds of activities that could potentially pose a compliance risk.

Periodically, IAD monitors and follow-up results of both internal and external audits.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2022 and 2021 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas	1.661.533	1.661.533	1.539.577	1.539.577	Cash
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	793.831	793.831	688.945	688.945	Securities
Obligasi Pemerintah	19.591.199	19.591.199	14.580.217	14.580.217	Government bonds
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Financial asset held at fair value through other comprehensive income
Efek-efek	655.293	655.293	1.069.952	1.069.952	Securities
Obligasi Pemerintah	14.332.949	14.332.949	21.275.682	21.275.682	Government bonds
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					Amortized cost
Efek-efek	271.645	280.451	474.008	484.542	Securities
Obligasi pemerintah	18.040.825	17.945.001	10.224.399	10.316.914	Government bonds
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.434.190	1.434.190	1.598.325	1.598.325	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan derivatif	103.939	103.939	31.017	31.017	Derivative receivable
Tagihan Akseptasi	420.426	420.426	453.517	453.517	Acceptance Receivable
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	25.416.941	10.692.484	10.692.484	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.470.510	1.470.510	1.095.100	1.095.100	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	12.975.955	12.975.955	27.901.048	27.901.048	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah					Loans and sharia financing/receivables
Konsumsi					Consumer
Pemilikan rumah	227.522.319	225.618.498	209.924.685	209.421.659	Housing loan
Non-kepemilikan Rumah	11.425.286	11.425.286	10.619.368	10.619.368	Non-housing loan
Modal kerja	26.965.038	26.965.038	27.700.039	27.700.039	Working capital
Investasi	10.117.008	10.117.008	9.769.396	9.769.396	Investment
Sindikasi	4.488.751	4.488.751	192.526	192.526	Syndicated
Direksi dan karyawan	2.088.379	2.088.379	2.193.517	2.193.517	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	10.750.302	10.750.302	9.173.536	9.173.536	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	1.040.048	1.040.048	890.325	890.325	Other assets ^{*)}
Total aset keuangan	391.566.367	389.575.528	362.087.663	361.687.686	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Liabilitas Derivatif	-	-	17.741	17.741	Derivatif Payable ^{**)}
Liabilitas segera ^{**)}	2.611.027	2.611.027	3.198.742	3.198.742	Current liabilities ^{**)}
Simpanan nasabah					Deposits from customers
Giro	113.525.727	113.525.727	78.718.827	78.718.827	Demand deposits
Tabungan	37.376.047	37.376.047	47.949.640	47.949.640	Savings deposits
Deposito Berjangka	146.198.027	146.198.027	146.520.589	146.520.589	Time deposits
Simpanan dari Bank Lain					Deposits from other banks
Giro	136.408	136.408	60.950	60.950	Demand deposits
Deposito Berjangka	-	-	5.057	5.057	Time deposits
Surat berharga yang Diterbitkan	8.652.260	8.828.249	12.371.708	13.203.400	Securities issued
Liabilitas akseptasi	420.562	420.562	454.140	454.140	Acceptance Payable
Pinjaman yang diterima	24.821.005	21.731.531	22.062.291	20.101.757	Fund Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	629.366	600.410	496.725	496.725	Interest payables
Liabilitas lain-lain ^{**)}	4.690.821	4.690.821	4.117.108	4.117.108	Other liabilities ^{**)}
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.158.219	8.899.563	8.759.744	11.009.370	Subordinated Loan and securities
Total liabilitas keuangan	348.219.469	345.018.372	324.733.262	325.854.046	Total financial liabilities

^{*)} Terdiri dari tagihan pihak ketiga.
^{**)} Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
^{***)} Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

^{*)} Consists of third party receivables.
^{**)} Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.
^{***)} Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;
- (ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung;
- (iii) Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

**47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date;
- (ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly;
- (iii) Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

31 Desember/December 31, 2022					
	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	793.831	301.416	492.415	-	Securities
Obligasi pemerintah	19.591.199	19.591.199	-	-	Government bonds
Total nilai wajar laba rugi	20.385.030	19.892.615	492.415	-	Total fair value through profit or loss
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Financial asset held at fair value through other comprehensive income
Efek-efek	655.293	655.293	-	-	Securities
Obligasi pemerintah	14.332.949	14.332.949	-	-	Government bonds
Total Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.988.242	14.988.242	-	-	Total financial asset held at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					Amortized cost
Efek-efek	280.451	280.451	-	-	Securities
Obligasi pemerintah	17.945.001	17.945.001	-	-	Government bonds
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	1.434.190	-	-	Securities purchased under agreement to resell
Total diukur pada biaya perolehan amortisasi	19.659.642	19.659.642	-	-	Total Amortized cost
Tagihan Derivatif	103.939	-	103.939	-	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan Syariah - Net	280.702.960	-	273.798.185	6.904.775	Loan and receivables Loan and sharia financing receivables
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	8.828.249	-	8.828.249	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima	21.731.531	-	21.731.531	-	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	8.899.563	-	8.899.563	-	Subordinated loan and securities

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan: (lanjutan)

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments: (continued)

31 Desember/December 31, 2021					
	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
					Financial Assets
Aset Keuangan					<i>Fair value through profit or loss</i>
Nilai wajar melalui					<i>Securities</i>
laba rugi					<i>Government bonds</i>
Efek-efek	688.945	100.000	588.945	-	
Obligasi pemerintah	14.580.217	14.580.217	-	-	
Total nilai wajar					<i>Total fair value through profit or loss</i>
laba rugi	15.269.162	14.680.217	588.945	-	
					<i>Financial asset held at fair value through other comprehensive income</i>
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					<i>Securities</i>
Efek-efek	1.069.952	1.069.952	-	-	<i>Government bonds</i>
Obligasi pemerintah	21.275.682	21.275.682	-	-	
Total Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	22.345.634	22.345.634	-	-	<i>Total financial asset held at fair value through other comprehensive income</i>
					<i>Amortized cost</i>
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					<i>Securities</i>
Efek-efek	484.542	484.542	-	-	<i>Government bonds</i>
Obligasi pemerintah	10.316.914	10.316.914	-	-	<i>Securities purchased under agreement to resell</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.598.325	1.598.325	-	-	
Total diukur pada biaya perolehan amortisasi	12.399.781	12.399.781	-	-	<i>Total Amortized cost</i>
Tagihan Derivatif	31.017	-	31.017	-	<i>Derivative Receivable</i>
					<i>Loan and receivables</i>
Kredit yang diberikan dan piutang					<i>Loan and sharia financing receivables</i>
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan Syariah - Net	259.896.505	-	254.334.033	5.562.472	
					Financial Liabilities
Liabilitas Keuangan					<i>Derivative payable</i>
Liabilitas Derivatif	17.741	-	17.741	-	
Surat berharga yang diterbitkan	13.203.400	-	13.203.400	-	<i>Securities issued</i>
Pinjaman yang diterima	20.101.757	-	20.101.757	-	<i>Fund borrowing</i>
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	11.009.370	-	11.009.370	-	<i>Subordinated loan and securities</i>

a. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

a. The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government Bonds classified as held to maturity, loans, fund borrowings, and marketable securities issued approximate to their carrying values due to their short-term maturities.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market interest rates for debt instruments with similar credit risk and remaining maturities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

b. Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

c. Efek-efek dan Obligasi pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/ pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

d. Surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

**47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

The estimated fair values of certain financial obligations which are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates of instruments with similar remaining maturities.

b. Loans

Generally, the Bank's loan portfolio consists of loans with variable interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amounts of variable rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

c. Securities and Government bonds

The fair values of amortized cost marketable securities and Government bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

d. Securities issued, fund borrowings and subordinated loan and securities

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining term to maturity.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>		
(i) Laba tahun berjalan	3.045.073	(a)	Income for the year (i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.590	(b)	Weighted average (ii) number of shares outstanding
(iii) Laba per saham dasar	288	(a/b)	Basic earnings per share (iii)
	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>		
(i) Laba tahun berjalan	2.376.227	(a)	Income for the year (i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.590	(b)	Weighted average (ii) number of shares outstanding
(iii) Laba per saham dasar	224	(a/b)	Basic earnings per share (iii)

The reconciliation of the factors used in calculating the basic earnings per share, for the year ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar dilusian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>		
(i) Laba tahun berjalan	3.045.073	(a)	Income for the year (i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.900	(b)	Weighted average (ii) number of shares outstanding
(iii) Laba per saham dilusian	279	(a/b)	Diluted earnings per share (iii)
	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>		
(i) Laba tahun berjalan	2.376.227	(a)	Income for the year (i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.879	(b)	Weighted average (ii) number of shares outstanding
(iii) Laba per saham dilusian	218	(a/b)	Diluted earnings per share (iii)

The reconciliation of the factors used in calculating the diluted earnings per share, for the year ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Laba per saham dilusian dihitung dengan mempertimbangkan dana setoran modal.

Diluted earnings per share is calculated by considering the capital deposit fund.

49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Surya Sudeco sehubungan dengan Pengadaan Sewa Mobil Operasional Bank BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp77.830.

Pada tanggal 4 Agustus 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Mitra Integrasi Informatika sehubungan dengan Pengadaan Paket License Microsoft Dukungan dan Layanan Pendukung Data Center dengan nilai kontrak sebesar Rp47.990 untuk jangka waktu selama tiga tahun.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

a. Significant Agreements

On August 29, 2022, Bank signed an agreement with PT Surya Sudeco in relation to procurement for Operational Car Lease with contract value of Rp77,830.

On August 4, 2022, Bank signed an agreement with PT Mitra Integrasi Informatika in relation to procurement for License Package Microsoft Support and Supporting Services for Data Center with contract value of Rp47,990 for three years.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 22 Januari 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Swadharma Duta Data sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan Jasa Teknologi Informasi pada Outlet dengan nilai kontrak sebesar Rp27.663 untuk jangka waktu selama dua tahun.

Pada tanggal 14 November 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Pesona Adi Batara sehubungan dengan Pengadaan Mobil operasional pejabat BTN tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.500.

Pada tanggal 16 Desember 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Dana Pensiun Bank BTN sehubungan dengan perpanjangan sewa gedung graha exitama lantai 2 sampai dengan 5 (Learning Center Tebet) sebesar Rp18.204.

Pada ada tanggal 21 Juli 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sinergy Informasi Pratama sehubungan dengan Pengadaan Firewall untuk WAN DC Sentul dan DC Surabaya dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.550 untuk jangka waktu selama satu tahun.

Pada tanggal 2 November 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa kontraktor renovasi lantai 6 Menara BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp17.500.

Pada tanggal 24 Mei 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Simian Solutions sehubungan dengan Pengadaan Pelaksana Sistem Custodian Service dengan nilai kontrak sebesar Rp17.000.

Pada tanggal 16 Maret 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Hartekprima Listrindo sehubungan dengan Pengadaan Genset Peruntukan RBB 2022 dan Kebutuhan Non RBB dengan nilai kontrak sebesar Rp10.823.

Pada tanggal 22 Juli 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Jasa Kontraktor Renovasi KCS Makassar dengan nilai kontrak sebesar Rp9.850.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Metrocom Global Solusi sehubungan dengan Pengadaan Software Lisence Oracle Database untuk Aplikasi BI FAST dengan nilai kontrak sebesar Rp12.575.

**49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
CONTINGECIES (continued)**

a. Significant Agreements (continued)

On January 22, 2022, Bank signed an agreement with PT Swadharma Duta Data in relation to procurement for The Extension of Information Technology Service in Outlet with contract value of Rp27,663 for two years.

On November 14, 2022, Bank signed an agreement with PT Pesona Adi Batara in relation to Procurement of operational cars for BTN officials in 2022 with contract value of Rp21,500.

On December 16, 2022, Bank signed an agreement with PT Dana Pensiun Bank BTN in relation to Procurement extension of the lease for the 2nd floor until 5th floor of the Graha Extama building (Tebet Learning Center) with contract value of Rp18,204.

On July 21, 2022, Bank signed an agreement with PT Sinergy Informasi Pratama in connection with the Procurement of Firewalls for WAN DC Sentul and DC Surabaya with a contract value of Rp.11,550 for a period of one year.

On November 2, 2022, Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to contractor services of renovation for the 6th floor of BTN building with contract value of Rp17,500.

On May 24, 2022, Bank signed an agreement with PT Simian Solutions in relation to procurement of Implementation of Custodian Service System with contract value of Rp17,000.

On March 16, 2022, Bank signed an agreement with PT Hartekprima Listrindo in relation to Procurement of Generator Set for RBB 2022 and non RBB needed with contract value of Rp10,823.

On July 22, 2022, Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia in relation to Procurement of KCS Makassar Renovation Contractor Services with contract value of Rp9,850.

On August 31, 2021, Bank signed an agreement with PT Metrocom Global Solusi in relation to procurement Software Lisence Oracle Database for BI FAST Application with contract value of Rp12,575.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 7 May 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Infosys Solusi Terpadu sehubungan dengan Proyek New Mobile Banking BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp8.980.

Pada tanggal 24 Agustus 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Experian sehubungan dengan proyek decision engine dengan nilai kontrak sebesar Rp8.880.

Pada tanggal 26 November 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Kontraktor reovasi KCS Aceh dengan nilai kontrak sebesar Rp7.500.

Pada tanggal 23 September 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Accenture sehubungan dengan Penyusunan RSTIK Tahun 2022 sampai dengan 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.499.

Pada tanggal 23 Desember 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Mitra Integrasi Informatika sehubungan dengan Pengadaan Container Platform dengan nilai kontrak sebesar Rp7.498.

Pada tanggal 13 Agustus 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Infosys Solusi Terpadu sehubungan dengan Proyek Internet Banking Bisnis Bank BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp7.480.

Pada tanggal 20 Mei 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Multipolar Technology Tbk sehubungan dengan Upgrade Hardware IBM I Power 9 for Pre Production Critical Application dengan nilai kontrak sebesar Rp7.033.

Pada tanggal 23 September 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Graha Sarana Duta sehubungan dengan Pengadaan Kontraktor Renovasi ME KC Bekasi dengan nilai kontrak sebesar Rp6.557.

**49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Significant Agreements (continued)

On May 7, 2021, Bank signed an agreement with PT Infosys Solusi Terpadu in relation to New Mobile Banking Project with contract value of Rp8,980.

On August 24, 2021, Bank signed an agreement with PT Experian in relation to decision engine project with contract value of Rp8,880.

On November 26, 2021, Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia in relation to procurement of Contractor for renovation of KCS Aceh with contract value of Rp7,500.

On September 23, 2021, Bank signed an agreement with PT Accenture in relation to making RSTIK for the year 2022 until 2025 with contract value of Rp7,499.m

On December 23, 2021, Bank signed an agreement with PT Mitra Integrasi Informatika in relation to procurement of Container Platform with contract value of Rp7,498

On August 13, 2021, Bank signed an agreement with PT Infosys Solusi Terpadu in relation to Internet Banking Bank BTN Project with contract value of Rp7,480.

On May 20, 2021, Bank signed an agreement with PT Multipolar Technology Tbk in relation to Upgrade Hardware IBM I Power 9 Pre Production Critical Application with contract value of Rp7,033.

On September 23, 2021, Bank signed an agreement with PT Graha Sarana Duta in relation to procurement of Contractor to Renovate ME KC Bekasi with contract value of Rp6,557.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 14 September 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Mastersystem Infotama sehubungan dengan Pengadaan Sistem BI FAST dengan nilai kontrak sebesar Rp6.500.

Pada tanggal 23 September 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Pengadaan Kontraktor Kantor Wilayah Medan dengan nilai kontrak sebesar Rp6.325.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp160.209 dan Rp426.916.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

**49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Significant Agreements (continued)

On September 14, 2021, Bank signed an agreement with PT Mastersystem Infotama in relation to procurement for BI FAST System with contract value of Rp6,500.

On September 23, 2021, Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to procurement of Contractor for Regional Office Medan with contract value of Rp6,325.

b. Contingent Liabilities

In conducting its business, the Bank is a defendant with various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, the Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of Bank

Bank has established an allowance (included in "Employee Benefits and Other Liabilities") for several pending lawsuits filed against Bank amounted to Rp160,209 and Rp426,916.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**50. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN
DIREVISI**

Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan selama tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

Bank bermaksud untuk menerapkan amandemen dan penyesuaian PSAK tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2023:

- a. Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- b. Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- c. Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- d. Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- e. Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes* tentang *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*; dan
- f. Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah".
- g. Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

**50. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS**

The amendments and adjustments to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) that have been approved by the Financial Accounting Standards Board (IFAS) - Indonesian Institute of Accountants (IAI), but have not been effective for financial statements during the year are disclosed below.

The Bank intends to implement the amendments and adjustments to the SFAS, if it is deemed relevant, when they become effective. Effective after January 1, 2023:

- a. *Amendment of SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";*
- b. *Amendment of SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;*
- c. *Amendment of SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;*
- d. *Amendment of SFAS No. 16, "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;*
- e. *Amendment of SFAS No. 46, "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction;* and
- f. *Amendment of SFAS No. 107, "Ijarah Accounting".*
- g. *Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.*

As at the authorization date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these revised standards to the Bank's financial statements.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

51. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	Arus Kas/Cash Flow				31 Desember / December 31, 2022	
	1 Januari/ January 1, 2022	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Perubahan Non-Kas/ Non-Cash Changes		
Surat Berharga yang Diterbitkan	12.371.708	1.541.330	(5.263.000)	2.222	8.652.260	Securities Issued Securities Sold
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	-	592.326	(592.326)	-	-	Under Repurchase Agreements
Pinjaman yang Diterima	22.062.291	11.814.826	(9.095.884)	39.772	24.821.005	Fund Borrowings
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	8.759.744	-	-	398.475	9.158.219	Subordinated Loans And Securities
Pembayaran Liabilitas Sewa	126.348	-	(84.983)	126.268	167.633	Payment of Lease liability
Total	43.320.091	13.948.482	(14.961.321)	491.864	42.799.117	Total

51. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	Arus Kas/Cash Flow				31 Desember / December 31, 2021	
	1 Januari / January 1, 2021	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Perubahan Non-Kas/ Non-Cash Changes		
Surat Berharga yang Diterbitkan	15.810.466	10.186	(3.455.000)	6.056	12.371.708	Securities Issued Securities Sold
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	-	1.716.191	(1.716.191)	-	-	Under Repurchase Agreements
Pinjaman yang Diterima	23.807.138	6.455.429	(8.204.691)	4.415	22.062.291	Fund Borrowings
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	10.194.432	1.500.000	(3.000.000)	65.312	8.759.744	Subordinated Loans And Securities
Pembayaran Liabilitas Sewa	213.451	-	(99.959)	12.856	126.348	Payment of Lease liability
Total	50.025.487	9.681.806	(16.475.841)	88.639	43.320.091	Total

52. INFORMASI TAMBAHAN

- Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah aset produktif (*non-performing ratio*) masing-masing adalah sebesar 2,74% dan 2,99%.
- Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk berdasarkan PSAK No. 71 terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing sebesar 130,00% dan 120,14%.

52. ADDITIONAL INFORMATION

- As of December 31, 2022 and 2021, the Bank's *non-performing assets* to total earning assets (*non-performing ratio*) are 2,74% and 2.99%, respectively.
- As of December 31, 2022 and 2021, the ratio of allowance for impairment losses on financial assets based on SFAS No. 71 to minimum allowance for impairment losses based on Financial Service Authority regulation is 130.00% and 120.14%, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**53. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN**

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2022 dan telah selesainya pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II, melalui Surat No. 07/KOM/BTN/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, Dewan Komisaris menyetujui realisasi jumlah saham yang dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menyatakan keputusan terkait persetujuan dimaksud ke dalam akta notaris. Sehubungan dengan hal dimaksud, Bank melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 05 tanggal 11 Januari 2023.

Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Januari 2023 dengan hasil keputusan antara lain mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022, mengangkat Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris Perseroan, dan mengangkat kembali Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital.

54. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2023.

53. EVENT AFTER THE REPORTING DATE

As a follow-up to the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 18, 2022 and the completion of the additional Capital with Pre-emptive Rights Limited Public Offering II, through Letter No. 07/KOM/BTN/I/2023 dated 11 January 2023, The Board of Commissioners approved the realization of the number of shares issued in connection with the additional in published and paid-up capital and authorized the Board of Directors to state decisions regarding the approval referred to in a notarial deed. In this regard, the Bank made changes to the Articles of Association as stated in the Deed of Statement of Resolutions of the Meeting of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk or abbreviated as PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 05 dated January 11, 2023.

The Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2023, with the results of which among others honorably confirmation dismissed Mr. Heru Budi Hartono as a member of the Board of Commissioners starting from October 17, 2022, appointed Mr. Mohamad Yusuf Permana as a member of the Board of Commissioners, and reappointed Mr. Andi Nirwoto as Director of IT & Digital.

54. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying Financial Statements which were completed and authorized for issuance on February 17, 2023.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama | : Haru Koesmahargyo |
| Alamat Kantor | : Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130 |
| Alamat domisili atau sesuai KTP | : Jl. Purnawarman No. 17
Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan |
| Nomor telepon | : 021-6346764 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| | |
| 2. Nama | : Hirwandi Gafar |
| Alamat Kantor | : Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130 |
| Alamat domisili atau sesuai KTP | : Taman Meruya Ilir Blok D12/86
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat |
| Nomor telepon | : 021-6346764 |
| Jabatan | : Direktur |

menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Februari 2023



Haru Koesmahargyo
Direktur Utama




Hirwandi Gafar
Direktur

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Laporan auditor independen	
Laporan posisi keuangan.....	1
Laporan aktivitas	2
Laporan arus kas.....	3
Catatan atas laporan keuangan	4-15

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00083/2.1032/AU.2/07/0240-2/1/II/2023

**Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("PUMK") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PUMK tanggal 31 Desember 2022, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap PUMK berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00083/2.1032/AU.2/07/0240-2/1/II/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan PUMK dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi PUMK atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan PUMK.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini audit kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00083/2.1032/AU.2/07/0240-2/1/II/2023 (lanjutan)

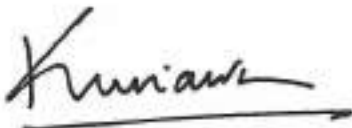
Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga (lanjutan):

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini audit atas keefektifitasan pengendalian internal PUMK.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan PUMK untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini audit kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan PUMK tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang kami identifikasi selama audit kami.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240

17 Februari 2023



**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
ASET			
Kas dan Setara Kas	2b,2j,4,11	11.732.472.238	15.254.304.860
Piutang Pinjaman Mitra Binaan - neto (Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Sebesar Rp33.795.371.727 dan Rp32.482.857.940 Masing-masing Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)	2c,2e,5	21.809.469.160	18.534.620.297
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman	2d,6	85.576.298	60.528.610
JUMLAH ASET		<u>33.627.517.696</u>	<u>33.849.453.767</u>
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat	2f,7	33.627.517.696	33.849.453.767
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>33.627.517.696</u>	<u>33.849.453.767</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	2g,8	1.088.645.050	1.439.728.817
Pendapatan Lain-Lain	2h,9	1.932.666	278.422
		1.090.577.716	1.440.007.239
BEBAN			
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	2i,5c	(1.312.513.787)	(3.984.119.149)
Beban lain-lain		-	(65)
		(1.312.513.787)	(3.984.119.214)
PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		(221.936.071)	(2.544.111.975)
ASET NETO PADA AWAL TAHUN		33.849.453.767	36.393.565.742
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN		33.627.517.696	33.849.453.767

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pencairan Pinjaman Mitra Binaan		(18.386.450.000)	(10.994.200.000)
Penerimaan Pokok Angsuran		13.799.087.350	12.665.877.981
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		1.063.597.362	1.417.899.179
Pendapatan Lain-Lain	9	1.932.666	278.422
Beban Lain-lain		-	(65)
Kas Neto Yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi		(3.521.832.622)	3.089.855.517
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS			
		(3.521.832.622)	3.089.855.517
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		15.254.304.860	12.164.449.343
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		11.732.472.238	15.254.304.860

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

1. PENJELASAN UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Program TJSL BUMN), yang antara lain mengatur bahwa, sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (3), laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN dilaporkan menjadi satu kesatuan dalam laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN Pembina.

Selain hal di atas, antara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4), untuk laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahunan tetap dilaporkan tersendiri dan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN Pembina.

Definisi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengacu kepada peraturan Menteri No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Program TJSL BUMN) dan ketentuan-ketentuan peraturan pelaksanaannya adalah tentang Program Pendanaan UMK yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.

b. Kegiatan Utama

Kegiatan utama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) adalah penyaluran pinjaman dan penyaluran dana pembinaan. Dana Program Pendanaan UMK kepada Mitra Binaan disalurkan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
- c. Beban pembinaan:
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, penelitian, pemagangan, pemasaran, promosi, yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan usahanya;
 - 2) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

c. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola

Susunan pengelola Program Pendanaan UMK BTN pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Pembina	Haru Koesmahargyo Hirwandi Gafar	Haru Koesmahargyo* Hirwandi Gafar
Program Pendanaan UMK		
Pimpinan	Budi Permana	Budi Permana**
Pelaksana	Ardi Darmawan	Ardi Darmawan
Pelaksana	Harry Kevinta J M*	Diana Syafrida
Pelaksana	Rizqy El M	Rizqy El M
Pelaksana	Angga Dwi Yanuar Putra**	Angga Dwi Yanuar Putra***

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

c. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola (lanjutan)

Tahun 2022

- *) Menjadi Pelaksana Program Pendanaan sejak Januari 2022
- **) Menjadi Pelaksana Program Pendanaan UMK s.d. Juli 2022

Tahun 2021

- *) Menjadi Pembina sejak 10 Maret 2021
- **) Menjadi Pimpinan Program Pendanaan UMK sejak Juli 2021
- ***) Menjadi Pelaksana Program Pendanaan UMK sejak Januari 2021

Mulai tahun 2021, struktur pengelola Program TJSL BUMN mengikuti peraturan terbaru dari Meneg BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 dimana Program TJSL BUMN dilaporkan terpisah dan menjadi satu kesatuan dari laporan keuangan BUMN Pembina.

d. Ketentuan Program Pendanaan UMK Mengacu kepada Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/04/2021

- 1) Program Pendanaan UMK adalah bagian dari Program TJSL BUMN dalam bentuk pemberian pendanaan kepada usaha mikro dan usaha kecil Binaan BUMN.
- 2) Dalam peraturan di atas diatur tentang kriteria usaha mikro dan usaha kecil yang berhak menjadi mitra binaan BUMN, antara lain, sebagai berikut:
 - i) usaha dimaksud adalah milik Warga Negara Indonesia;
 - ii) belum memiliki akses pinjaman kepada lembaga pendanaan dan perbankan;
 - iii) diutamakan yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;
 - iv) berdiri sendiri yang bersifat perorangan dan/atau sekelompok orang yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi; dan
 - v) mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- 3) Bentuk dan maksimum pendanaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000.
 - b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000.
 - c. Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman di atas pada angka 1), memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal 3 tahun.
 - d. Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah maka untuk jasa administrasinya diberikan berdasarkan:
 - prinsip jual beli maka proyeksi margin yang diberikan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.c) di atas, atau
 - prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% sampai dengan paling banyak 50% berdasarkan perjanjian.
- 4) Syarat dan kondisi:

Untuk tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK diatur syarat dan kondisi yang harus dipenuhi calon usaha binaan, antara lain, harus menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina yang nanti akan dilakukan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

d. Ketentuan Program Pendanaan UMK Mengacu kepada Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 (lanjutan)

4) Syarat dan kondisi:

Bagi calon binaan yang memenuhi syarat dan terpilih akan dibuatkan surat perjanjian dan/atau kontrak yang berisi syarat dan kondisi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak.

5) Teknis pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK:

Dalam pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK, BUMN Pembina dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak perusahaan BUMN atau Perusahaan terafiliasi BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.

Ketentuan pelaksanaan kerja sama dimaksud di atas dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

6) Sumber dana Program TJSL BUMN berasal dari:

- i) anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN pembina dalam tahun anggaran berjalan;
- ii) penyisihan sebagian laba bersih BUMN Pembina pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau;
- iii) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada angka 6) di atas, dapat berasal dari:

- i) saldo dana Program Pendanaan UMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau;
- ii) jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Pendanaan UMK

8) Besaran dana Program TJSL BUMN sebagaimana dijelaskan pada angka 6.i) dan angka 6.ii) di atas, ditetapkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

9) Pembebanan beban operasional Program TJSL BUMN:

- Pembebanan beban operasional Program TJSL BUMN menjadi beban BUMN Pembina.
- Pembebanan beban kepada usaha mikro dan usaha kecil menjadi bagian dari biaya Program TJSL BUMN.

e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 (PER-6) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 (PER-5) tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Mengacu kepada No. PER-6 di atas, beberapa ketentuan pasal-pasal tertentu dalam No. PER-5 tentang Program TJSL terutama terkait dengan Program Pendanaan UMK (PUMK) telah diubah. Secara ringkas perubahan di atas adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

- e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 (PER-6) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 (PER-5) tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (lanjutan)

Pasal 10

Ayat (1)

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil dan/atau
- b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.

Ayat (2)

Pelaksanaan program TJSL untuk pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK.

Pasal 12

Ayat (1)

Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

Huruf a

Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

Huruf b

Pinjaman tambahan dalam bentuk dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Ayat (3)

Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebagai berikut:

- a. 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
- b. Suku bunga flat yang setara dengan 3% (tiga persen) per tahun dari saldo yang ditetapkan menteri.
- c. Ketentuan lain yang ditetapkan menteri,

dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.

Ayat (3)

Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan:

- a. Prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau
- b. Prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

Pasal 21

Ayat (1)

Beban operasional Program TJSL BUMN menjadi beban BUMN.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

- e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 (PER-6) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 (PER-5) tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (lanjutan)

Pasal 21 (lanjutan) Pasal 21

Ayat (2)

Beban pembinaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b menjadi bagian dari biaya Program TJSL BUMN.

Pasal 23

Ayat (4)

Laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 perihal penetapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali untuk Laporan Arus Kas disusun menggunakan dasar kas. Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*). Tahun buku Program Pendanaan UMK BTN adalah 1 Januari sampai 31 Desember dan mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Program Pendanaan UMK BTN.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah saldo kas dan bank yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan Program Pendanaan UMK tidak digunakan sebagai jaminan. Saldo kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh PUMK kepada mitra binaan. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penggolongan kualitas piutang pinjaman mitra binaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN serta dengan ketentuan sebagai berikut:

- i) lancar, dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

- ii) kurang lancar, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
- iii) diragukan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
- iv) macet, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

d. Piutang Jasa Administrasi Pinjaman

Piutang jasa administrasi pinjaman adalah jasa administrasi yang sudah menjadi hak Program Pendanaan UMK BTN pada akhir tahun namun belum diterima sampai akhir tahun. Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pinjaman mitra binaan dengan kualitas pinjaman lancar dan kurang lancar. Apabila pinjaman mitra binaan memiliki kualitas pinjaman diragukan atau macet maka tidak dibentuk akrual atas piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan.

e. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada.

f. Aset Neto

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Aset neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat (ANT) dan Aset Neto Tidak Terikat (ANNT).

ANT adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. ANNT adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

g. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan UMK yang disalurkan kepada mitra binaan. Akrual pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui hanya untuk piutang dengan status lancar dan kurang lancar dan diukur serta dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

h. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi pendapatan yang telah disebutkan di atas dan diakui pada saat diterima. Pendapatan lain-lain diukur dan dicatat sebesar nilai yang diterima Program Pendanaan UMK BTN.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Beban (Pembalikan) Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Beban (pembalikan) penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah beban (pendapatan) yang timbul akibat pembentukan (pembalikan) penyisihan penurunan nilai atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

Program Pendanaan UMK BTN melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK-ETAP tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", yang didefinisikan antara lain:

- a. Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas.
- b. Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas.
- c. Personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat).
- d. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Sesuai Peraturan Menteri BUMN, beban operasional Program Pendanaan UMK menjadi beban PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina.

Mata uang fungsional Program Pendanaan UMK BTN adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Program Pendanaan UMK BTN beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Program Pendanaan UMK BTN menentukan bahwa mata uang fungsionalnya adalah Rupiah.

b. Estimasi dan asumsi

Setiap akhir periode pelaporan, Program Pendanaan UMK BTN menelaah penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit mitra binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan penyisihan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada mitra binaan. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang. Penyisihan piutang mitra binaan dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas merupakan penempatan dana Program Pendanaan UMK pada rekening giro di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Program Pendanaan UMK yaitu: - Rekening Giro Kantor Pusat	11.732.472.238	15.254.304.860
Jumlah Kas dan Setara Kas	11.732.472.238	15.254.304.860

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

a. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Wilayah 1 ^{*)}	7.196.558.033	6.300.780.435
Wilayah 2 ^{**)}	14.693.532.108	12.656.395.286
Wilayah 3 ^{***)}	9.275.498.642	9.316.265.862
Wilayah 4 ^{****)}	7.156.135.401	5.609.250.372
Wilayah 5 ^{*****)}	10.874.552.812	10.362.094.049
Wilayah 6 ^{*****)}	6.408.563.891	6.772.692.233
Jumlah Piutang Pinjaman	55.604.840.887	51.017.478.237
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(33.795.371.727)	(32.482.857.940)
Neto	21.809.469.160	18.534.620.297

- ^{*)} Wilayah 1 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Barat
^{**)} Wilayah 2 terdiri dari kantor cabang pada wilayah DKI Jakarta dan Banten
^{***)} Wilayah 3 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT
^{****)} Wilayah 4 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Sumatera
^{*****)} Wilayah 5 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
^{*****)} Wilayah 6 terdiri dari kantor cabang pada wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

b. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Kualitas Pinjaman

	31 Desember 2022		
	Saldo Piutang	Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	Saldo Piutang - Neto
Lancar	18.257.799.973	995.218.754	17.262.581.219
Kurang lancar	4.535.941.159	1.201.796.907	3.334.144.252
Diragukan	1.649.878.829	437.135.140	1.212.743.689
Macet	31.161.220.926	31.161.220.926	-
Jumlah Piutang Pinjaman	55.604.840.887	33.795.371.727	21.809.469.160

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

b. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Kualitas Pinjaman (lanjutan)

	31 Desember 2021		
	Saldo Piutang	Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	Saldo Piutang - Neto
Lancar	14.825.473.051	822.155.705	14.003.317.346
Kurang lancar	5.364.527.209	1.480.054.755	3.884.472.454
Diragukan	893.284.697	246.454.200	646.830.497
Macet	29.934.193.280	29.934.193.280	-
Jumlah Piutang Pinjaman	51.017.478.237	32.482.857.940	18.534.620.297

c. Perubahan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Perubahan penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman kepada mitra binaan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo awal tahun	32.482.857.940	28.498.738.791
Beban (Pembalikan) cadangan penyisihan kerugian Penurunan nilai piutang pinjaman selama tahun berjalan	1.312.513.787	3.984.119.149
Saldo akhir tahun	33.795.371.727	32.482.857.940

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan.

d. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Perdagangan	33.731.624.584	29.814.688.658
Jasa	9.285.064.565	8.230.710.795
Peternakan	4.612.130.235	4.790.122.436
Pertanian	3.413.367.092	3.870.044.223
Industri	2.274.443.292	1.966.979.114
Perikanan	998.843.804	1.141.372.217
Industri Kreatif	108.079.227	65.528.127
Perkebunan	81.129.136	37.873.715
Usaha Lainnya	1.100.158.952	1.100.158.952
Jumlah Piutang Pinjaman	55.604.840.887	51.017.478.237
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(33.795.371.727)	(32.482.857.940)
Neto	21.809.469.160	18.534.620.297

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

6. PIUTANG JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

a. Rincian Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Berdasarkan Wilayah

Rincian piutang jasa administrasi pinjaman berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Wilayah 1 ^{*)}	15.104.604	9.976.972
Wilayah 2 ^{**)}	18.816.734	12.086.702
Wilayah 3 ^{***)}	19.264.295	13.699.088
Wilayah 4 ^{****)}	13.733.699	8.915.990
Wilayah 5 ^{*****)}	9.022.797	7.784.146
Wilayah 6 ^{*****)}	9.634.169	8.065.712
Jumlah	<u>85.576.298</u>	<u>60.528.610</u>

^{*)} Wilayah 1 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Barat

^{**)} Wilayah 2 terdiri dari kantor cabang pada wilayah DKI Jakarta dan Banten

^{***)} Wilayah 3 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT

^{****)} Wilayah 4 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Sumatera

^{*****)} Wilayah 5 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua

^{*****)} Wilayah 6 terdiri dari kantor cabang pada wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

b. Rincian Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Berdasarkan Kualitas Pinjaman

Rincian piutang jasa administrasi pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman adalah sebagai berikut:

<u>Kualitas Pinjaman</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Lancar	48.600.124	14.540.676
Kurang lancar	36.976.174	45.987.934
Jumlah	<u>85.576.298</u>	<u>60.528.610</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang tidak diperlukan karena seluruh piutang akan dapat ditagih.

7. ASET NETO

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Aset Neto Tidak Terikat		
Saldo awal	33.849.453.767	36.393.565.742
Penurunan aset neto tidak terikat	(221.936.071)	(2.544.111.975)
Saldo akhir	<u>33.627.517.696</u>	<u>33.849.453.767</u>

8. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

Rincian pendapatan jasa administrasi pinjaman berdasarkan wilayah pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

8. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Wilayah 1 ^{*)}	162.395.039	97.678.733
Wilayah 2 ^{**)}	249.366.893	220.725.000
Wilayah 3 ^{***)}	226.571.716	272.429.420
Wilayah 4 ^{****)}	118.823.060	530.218.776
Wilayah 5 ^{*****)}	166.812.920	115.525.261
Wilayah 6 ^{*****)}	164.675.422	203.151.627
Jumlah	1.088.645.050	1.439.728.817

- *) Wilayah 1 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Barat
 **) Wilayah 2 terdiri dari kantor cabang pada wilayah DKI Jakarta dan Banten
 ***) Wilayah 3 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa timur, Bali, NTB dan NTT
 ****) Wilayah 4 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Sumatera
 *****) Wilayah 5 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
 *****) Wilayah 6 terdiri dari kantor cabang pada wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

9. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari sumber di luar kegiatan utama Program Pendanaan UMK dan tidak bersifat rutin yakni berupa denda keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur. Pendapatan lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.932.666 dan Rp278.422.

10. KEBIJAKAN PROGRAM PENDANAAN UMK BTN ATAS DAMPAK PANDEMI COVID-19

Terkait dampak pandemi COVID-19, Menteri Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) telah menerbitkan surat Nomor S-1 42/MBU/DSI/03/2020 tanggal 27 Maret 2020, perihal "Stimulus untuk Mitra Binaan Program Kemitraan atas Terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease 2019*".

Maksud dan tujuan atas diterbitkannya surat Meneg BUMN di atas adalah memberikan kebijakan stimulus untuk Mitra Binaan antara lain:

- a. Meringankan beban Mitra Binaan agar dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang melemah akibat pandemik COVID-19;
- b. Sebagai bentuk upaya BUMN untuk menjaga keberlangsungan usaha Mitra Binaan;
- c. Memperkuat peran BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional melalui pemberdayaan kondisi ekonomi masyarakat.
- d. Adapun kebijakan yang dibuat BUMN Pembina dapat berupa penerapan pemberian kebijakan stimulus kepada Mitra Binaan atas terjadinya Pandemi COVID-19, yang meliputi:
 - 1) Kebijakan restrukturisasi pinjaman; dan/atau
 - 2) Kebijakan penundaan pembayaran kewajiban angsuran pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun.

Dalam surat Meneg BUMN tersebut, dalam menerapkan kebijakan stimulus kepada Mitra Binaan sebagaimana dimaksud pada penjelasan tentang kebijakan yang akan diterapkan, BUMN Pembina diminta agar membuat petunjuk pelaksanaan teknis dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko.

Menindaklanjuti permintaan Meneg BUMN sebagaimana dijelaskan di atas, Direksi BUMN Pembina, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, menerbitkan Surat Edaran No.30/SE/DIR/SMBD/2020 tanggal 30 September 2020, perihal "Pemberian Perlakuan Khusus bagi Mitra Binaan Program Kemitraan yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)".

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

10. KEBIJAKAN PROGRAM PENDANAAN UMK BTN ATAS DAMPAK PANDEMI COVID-19 (lanjutan)

Dalam Surat Edaran No. 30/SE/DIR/SMBD/2020 tersebut, antara lain, telah diatur tentang persyaratan debitur mitra binaan yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti kebijakan pemberian perlakuan khusus, yaitu untuk debitur-debitur dengan kolektibilitas lancar dan kurang lancar dan harus melengkapi dokumen-dokumen tertentu sebagai prasyarat untuk ikut program tersebut.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus tersebut, Direksi telah menerbitkan Surat Keputusan No. 18/SK/DIR/SMBD/2020 tanggal 30 September 2020, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlakuan Khusus Bagi Mitra Binaan Program Kemitraan yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan surat keputusan direksi tersebut, pada tahun 2020, terdapat 30 debitur yang ikut dalam program perlakuan khusus dengan jumlah saldo sebesar Rp664.722.438. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo debitur di atas masing-masing menjadi sebesar Rp342.828.180 dan Rp464.437.185.

Untuk tahun 2021, Meneg BUMN kembali menerbitkan peraturan No. S-2332/MBU/04/2021 tanggal 1 April 2021 tentang perlakuan khusus terhadap debitur yang terdampak Covid 19 sebagai respon atas masih belum berakhirnya pandemi Covid 19.

Menindaklanjuti kebijakan yang dibuat Meneg BUMN tersebut, Direksi BUMN Pembina telah menerbitkan Surat Keputusan No. 16/SK/DIR/SMBD/2021 tanggal 16 Juli 2021 dan petunjuk pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No. 11/SE/DIR/SMBD/2021 tanggal 16 Juli 2021. Dalam surat edaran tersebut disebutkan tentang masa berlaku program perlakuan khusus mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Namun demikian, selama tahun 2022 dan 2021, tidak terdapat debitur baru yang mengikuti program perlakuan khusus selain yang sudah mengikuti program di tahun 2020.

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

<u>Pihak berelasi</u>	<u>Jenis hubungan</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi</u>	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BUMN Pembina	Penempatan dana	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset			
Kas di bank		11.732.472.238	15.254.304.860
Jumlah		11.732.472.238	15.254.304.860
Persentase jumlah aset di pihak berelasi terhadap jumlah aset		34,89%	45,07%

12. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh pengelola pada tanggal 17 Februari 2023.

Laporan Tahunan **2022**



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130

Tel. 62-21 6336789, 6332666

Fax. 62-21 6346704

E-mail : csd@btn.co.id

Contact Center: 1500 286

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Ayo Punya Rumah
Dengan Bank Tabungan

Bank BTN @bankbtn bankbtn



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan